

OPERATIONAL AND COMMERCIAL EXCELLENCE FOR BUSINESS STABILIZATION

Keunggulan Operasi dan Komersial Demi Stabilisasi Bisnis



LAPORAN TAHUNAN **2020** ANNUAL REPORT

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2020 dengan tema **"Keunggulan Operasi dan Komersial demi Stabilisasi Bisnis"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sepanjang tahun 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, proyeksi usaha yang ditampilkan dalam bab analisis dan pembahasan manajemen, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2020 dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Kami tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjalankan bisnis di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik. Adakalanya kata "IPC", "Perusahaan", dan "kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) secara umum.

Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2020 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sementara itu, data numerik yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini menggunakan standar penulisan Bahasa Indonesia.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the theme **"Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization"**. This theme was selected based on review and facts from the business development of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) throughout 2020 and future business continuity of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This Annual Report contains financial condition, operation results, business projections as presented in management discussion and analysis chapter, plans, strategies, policy, as well as the objectives of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that the information presented will bring specific results as expected.

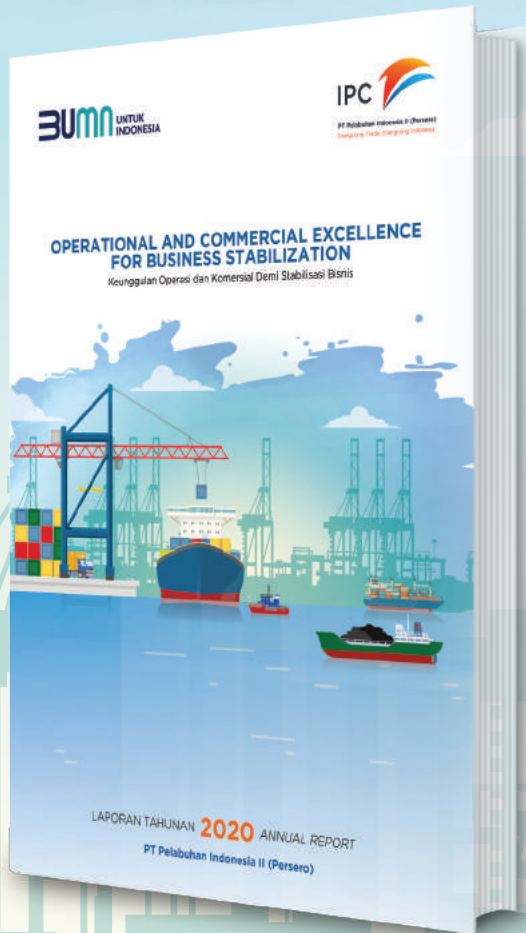
This Annual Report contains the word "Company", hereinafter referred to as PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which conducts business in port services and logistics. The words "IPC", "Company", and "we" are at times used to simply refer to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in general.

The 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is presented bilingually in Indonesian and English language. Numerical notations in this Annual Report are in Indonesian.



Kesinambungan Tema Theme Continuity

2020



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mulai bersiap untuk menjadi *World Class Maritime Ecosystem*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahapan yang ingin dicapai Perseroan pada tahun 2020 sebagai pijakan menuju visi di tahun 2024 adalah Stabilisasi Bisnis Perusahaan melalui Keunggulan Operasi dan Komersial.

Untuk mendukung stabilitas bisnis, Perseroan melakukan 5 (lima) *milestone* utama, yang meliputi kesehatan dan keselamatan lingkungan, improvisasi proses bisnis, optimalisasi pendapatan dan peningkatan efektivitas biaya, peningkatan kemampuan digital, serta optimalisasi *capital expenditure* guna menghadirkan nilai tambah.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is starting to prepare to become a *World Class Maritime Ecosystem*. In connection with this, the stage that the Company wants to achieve in 2020 as a stepping stone towards the vision for 2024 is the Stabilization of the Company's Business through Operational and Commercial Excellence.

To support business stability, the Company has implemented 5 (five) main milestones, which include environmental health and safety, business process improvement, revenue optimization and cost effectiveness improvement, digital capability enhancement, and capital expenditure optimization to provide added value.

Keunggulan Operasi dan Komersial demi Stabilisasi Bisnis

Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization

Kesinambungan Tema Theme Continuity

2019



Pada tahun 2019, Perseroan memiliki target untuk meningkatkan laba dari pertumbuhan organik dan non-organik. Hal ini dicapai selain dengan meningkatkan performa 12 (dua belas) cabang yang telah dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis pelabuhan, Perseroan juga akan berfokus pada kegiatan akuisisi pelabuhan baru di beberapa wilayah, seperti Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan lain-lain. Untuk mendukung target ini, Perseroan juga bekerja sama dengan beberapa kawasan industri, perusahaan pelayaran serta akan meningkatkan performansi Anak Perusahaan khususnya yang bergerak di bisnis pendukung. Di samping itu, pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan *National Connectivity Program* dengan mengimplementasikan proyek strategis yaitu Pembangunan *Container Terminal 2 (CT 2)* di New Priok, Pelabuhan Kijing di Pontianak, Jalan Tol Cilincing Cibitung dan beberapa proyek strategis lain. Sebagai langkah untuk mewujudkan *Global Expansion*, Perseroan melakukan kerja sama dengan beberapa *sister port*, ekspansi bisnis Anak Perusahaan, aktif dalam kegiatan atau organisasi internasional seperti *chainport*, ASEAN Ports Association (APA), International Association of Ports and Harbors (IAPH) serta beberapa kegiatan lain.

In 2019, the Company has a target to increase profit from organic growth and non-organic. This was achieved by improving the performance of 12 (twelve) branches managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries engaged in the port business, and the Company will also focus on the acquisition of new ports in several regions, such as Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) and others. To support this target, the Company also cooperated with several industrial estates, shipping companies and improved the performance of Subsidiaries, especially those engaged in supporting businesses. Apart from that, in 2019 the Company has carried a National Connectivity Program by implementing the strategic projects, namely the Construction of Container Terminal 2 (CT 2) in New Priok, Kijing Port in Pontianak, Cilincing Cibitung Toll Road and several other strategic projects. As a step towards realizing Global Expansion, the Company entered into cooperation with several sister ports, performed Subsidiaries' business expansion, and actively involved in international activities or organizations such as chainport, ASEAN Ports Association (APA), International Association of Ports and Harbors (IAPH) and several other activities.

Business Expansion for Sustainable Superior Performance

2018



Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan *roadmap* yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan enam fitur digital pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Customer Relationship Management (CRM)* di seluruh Kantor Cabang Pelabuhan dan dua Anak Perusahaan IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.

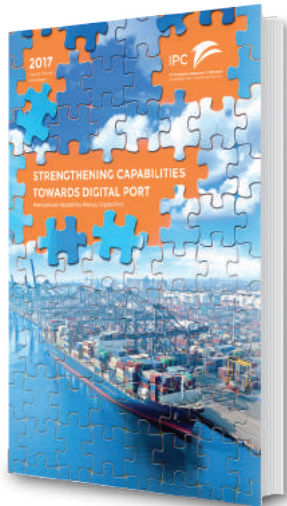
The direction towards World Class Performance in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of Establishment of Performance. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (Digital Port). In fact, the Company is the first Digital Port in Indonesia. The Company has implemented the six digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely Master Customer Data, Customer Profiling, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Survey, and Sales are contained in the Digital Customer Relationship Management (CRM) application feature in all Port Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Peti Kemas.

Establishment of Excellence Digital Port



Kesinambungan Tema Theme Continuity

2017



Tahun 2017 dalam *Corporate Roadmap* IPC merupakan tahun “*Enhancement*” dimana Perseroan memperkuat kapabilitas menuju *digital port* guna mewujudkan kinerja unggul yang berkesinambungan.

Enhancement mencakup peningkatan aspek operasional dan pelayanan, modernisasi alat terbaru, pengembangan Anak Perusahaan dan program pemasaran, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan-pelabuhan baru. Dengan mewujudkan *digital port*, IPC mampu terus melaju menjadi penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia dan mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.

2017 in the IPC Corporate Roadmap is a year of "Enhancement", in which the Company strengthens its capabilities towards digital port in order to realize sustainable superior performance.

Enhancement includes improvement of operational and service aspect, modernization of latest equipment, development of subsidiaries and marketing programs, and development of infrastructure and superstructure of new ports. By realizing digital port, IPC will be able to move forward and become the leading port service provider in Indonesia and achieve its goal of becoming a world class port operator.

Strengthening Capabilities Towards Digital Port

2016



Melalui fase *Fit in infrastructure*, Perseroan menyusun *Corporate GCG Roadmap* untuk lima tahun ke depan dan mengimplementasikannya secara menyeluruh demi terciptanya *Good Corporate Citizenship* yang komprehensif. Suksesnya implementasi fase ini terbukti berhasil mendorong keberhasilan Perseroan untuk melalui masa-masa sulit. Ke depannya, Perseroan terus memperkuat komitmen terhadap implementasi kepatuhan yang optimal demi memberikan nilai-nilai terbaik bagi Bangsa Indonesia dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Through the Fit in Infrastructure phase, the Company prepared its roadmap for the next five years and is implementing it comprehensively for the creation of a comprehensive Corporate Citizenship. The successful implementation of this phase is proven to drive the Company's success to go through difficult times. Moving forward, the Company will continue to strengthen its commitment in implementing optimal compliance, in order to provide the best values for Indonesia and all Stakeholders.

Creating Values Through Governance

DAFTAR ISI Table of Contents

- Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer
1 Kesenambungan Tema
Theme Continuity

1 Kilas Kinerja 2020 2020 Performance Highlights

- 8 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
13 Grafik Kinerja Keuangan
Charts of Financial Performance
16 Upaya IPC Menuju *World Class Port*
IPC's Endeavors Towards World Class Port
18 Ikhtisar Saham
Share Highlights
19 Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds
21 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Information on Other Financing Sources
22 Peristiwa Penting Tahun 2020
2020 Significant Events
28 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

2 Laporan Manajemen Management Report

- 36 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
62 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
98 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Responsibility Statement of Board of Commissioners and Board of Directors Regarding PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Annual Report

3 Profil Perusahaan Company Profile

- 102 Informasi Umum Perusahaan
General Information of the Company
104 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company
108 Jejak Langkah
Milestones
110 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan
Company Vision, Mission, and Corporate Value
115 Makna Logo Perusahaan
Company Logo Meaning
116 Bidang Usaha
Line of Business
118 Produk dan Jasa
Products and Services

- 122 Wilayah Operasional Perusahaan
Operational Areas of the Company
124 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
133 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
147 Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris
Profile of Organs under the Board of Commissioners
154 Struktur Organisasi
Organization Structure
156 Profil Pejabat Eksekutif
Profiles of Executive Officers
162 Profil SDM Perusahaan
Human Capital Profile of the Company
168 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure
169 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
172 Informasi Entitas Anak, Entitas Cucu, Entitas Asosiasi, dan Kerja Sama Operasi (KSO) Perusahaan
Information on Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, Third-Tier Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures of the Company
214 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal
Institutions and/or Professions Supporting Capital Market

4 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

- 221 Tinjauan Umum
General Overview
229 Tinjauan Industri
Industry Review
237 Analisis Posisi IPC dalam Industri Pelabuhan
Analysis of IPC's Position in the Port Industry
247 Tinjauan Operasional
Operational Review
260 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
262 Unit Penunjang Operasional Perusahaan
Company Operational Support Unit
272 Tinjauan Per Segmen Operasi
Operational Review Per Business Segment
348 Tinjauan Keuangan
Financial Review
364 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Collectability
369 Struktur Modal
Capital Structure
370 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment
372 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment
381 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
384 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020
Comparison Between Target and Realization in 2020
394 Informasi Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan dan Dampaknya
Material Information Subsequent to the Date of Financial Statements and Its Impacts



- 394 Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
- 394 Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perseroan
Impact of Price Changes on Sales or Net Income of the Company
- 395 Komponen-Komponen Substansi dari Pendapatan dan Beban Lainnya
Substantial Components of Income and Other Expenses
- 395 Peningkatan/Penurunan Material dari Penjualan/Pendapatan Bersih
Material Increase/Decrease from Net Sales/Income
- 395 Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Dividend Policy, Announcement and Payment
- 397 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee and Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)
- 397 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering
- 398 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties
- 406 Pembayaran Pajak
Payment of Taxes
- 409 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya
Regulatory Changes and the Impact
- 410 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies
- 415 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity
- 417 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level
- 418 Prospek Usaha ke Depan
Future Business Prospects
- 424 Inisiatif Strategis Tahun 2021
Strategic Initiatives in 2021
- 428 Target/Proyeksi Tahun 2021
Target/Projection For 2021

5 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

- 437 Komitmen dan Dasar Hukum Penerapan GCG
GCG Commitment and Legal Basis of Implementation
- 438 Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG
GCG Objectives and Purpose
- 439 Inisiatif Strategis Penguatan GCG Perusahaan
Strategic Initiatives for GCG Improvement
- 439 Ruang Lingkup GCG Perusahaan
GCG Scope at the Company
- 440 Kerangka GCG Perusahaan
GCG Framework at the Company
- 441 Prinsip-prinsip GCG Perusahaan
GCG Principles at the Company
- 443 Roadmap GCG Perusahaan
GCG Roadmap of the Company
- 445 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
- 446 Governance Soft Structure
Governance Soft Structure
- 447 Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders
- 470 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 546 Direksi
Board of Directors
- 608 Program Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Program
- 613 Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors

- 616 Keseimbangan Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Balance of Work Relations Between the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 620 Organ di Bawah Dewan Komisaris
Organs Under the Board of Commissioners
- 685 Organ di Bawah Direksi
Organs Under the Board of Directors
- 714 Akuntan Publik
Public Accountant
- 718 Organisasi dan Tata Kelola Cabang Pelabuhan
Port Branch Governance and Organization
- 718 Manajemen Risiko
Risk Management
- 743 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 767 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance
- 776 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data
- 786 Perkara Penting dan Sanksi Administratif
Legal Issues and Administrative Sanctions
- 788 Peraturan Disiplin Kerja
Employee Discipline Regulation
- 796 Transformasi Budaya Perusahaan
Transformation of Corporate Culture
- 802 Kode Etik Bisnis Perusahaan
Company Code of Conduct
- 810 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
- 818 Asesmen Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment

6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

- 827 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Governance
- 834 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility for Fair Operating Practices
- 862 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia
Corporate Social Responsibility on Human Rights
- 881 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
Corporate Social Responsibility on Manpower and Occupational Health and Safety (K3)
- 912 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility to the Environment
- 930 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat
Corporate Social Responsibility to the Community
- 946 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelanggan
Corporate Social Responsibility to the Customers

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018

Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

7 Laporan Keuangan Financial Report



01



Kilas Kinerja 2020

2020 Performance Highlights



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Berikut ini merupakan Ikhtisar Kinerja Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja.

The following are the Financial Performance Highlights which consist of Consolidated Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Consolidated Statement of Cash Flows of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the fiscal years ending on December 31, 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
ASET / ASSETS					
Aset Lancar / Current Assets					
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	5.298.274.315	15.603.533.329	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678
Investasi jangka pendek / Short term investment	11.090.879.218	2.596.701.126	3.836.007.289	6.999.082.698	4.787.160.000
Piutang usaha – neto / Trade receivables - net					
Pihak ketiga / Third parties	564.590.543	712.826.744	634.078.032	549.154.117	404.004.378
Pihak berelasi / Related parties	56.644.013	135.198.738	155.875.322	149.599.560	80.267.487
Piutang lain-lain – neto / Other receivables - net					
Pihak ketiga / Third parties	40.278.140	45.117.978	9.530.083	49.765.763	31.679.063
Pihak berelasi / Related parties	1.151.526.870	784.951.419	640.168.731	738.312.346	108.443.481
Uang muka dan beban dibayar di muka / Advances and prepaid expenses	93.350.043	104.181.981	120.068.178	144.176.602	153.791.098
Pendapatan masih akan diterima / Accrued revenues					
Pihak ketiga / Third parties	265.857.471	258.865.863	256.914.263	303.926.301	201.554.511
Pihak berelasi / Related parties	12.881.610	46.586.491	65.953.809	26.573.499	63.312.642
Persediaan / Inventories	55.314.157	82.940.596	59.139.424	56.480.952	49.241.502
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	524.068.875	680.605.067	751.789.998	557.236.979	432.913.175
Aset lancar lainnya / Other current assets	9.822.586	10.253.126	6.139.521	-	-
Total Aset Lancar / Total Current Assets	19.163.487.841	21.061.762.458	24.554.336.129	23.781.639.149	20.780.243.015
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets					
Investasi jangka panjang / Long term investment					
Investasi pada entitas asosiasi / Investment in associates	2.121.040.201	2.757.291.330	2.362.825.278	1.554.888.854	1.619.970.587
Investasi pada penyertaan saham / Investment in share of stocks	138.912.000	50.906.100	524.362.036	-	-
Investasi pada surat utang / Investment in bonds	516.441.402	402.826.170	324.550.117	-	-
Properti investasi – neto / Investment properties - net	337.941.738	357.295.487	377.142.447	394.342.020	415.822.791
Aset tetap – neto / Fixed assets - net	14.190.173.679	13.387.155.835	12.628.997.433	11.325.850.596	10.436.641.420
Aset kerja sama operasi – neto / Joint operation assets - net	434.117.133	461.100.101	482.390.189	507.560.396	535.920.134
Aset hak-guna – neto / Right-of-use assets - net	162.800.761	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	158.035.340	73.873.814	47.498.765	44.644.534	37.017.244
Aset tak berwujud – neto / Intangible assets - net	11.863.510.745	10.818.271.480	9.038.949.144	8.296.435.366	8.617.040.414
Taksiran tagihan restitusi pajak / Estimated claims for tax	1.052.309.931	958.917.154	841.931.567	839.786.756	668.961.286
Aset tidak lancar lainnya / Other non-current assets	1.545.880.270	1.711.199.806	249.893.918	474.940.688	359.883.364



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Total Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	32.521.163.200	30.978.837.277	26.878.540.894	23.438.449.210	22.691.257.240
TOTAL ASET / TOTAL ASSETS	51.684.651.041	52.040.599.735	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255
LIABILITAS DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS / LIABILITIES					
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities					
Pinjaman bank jangka pendek / Short-term bank loans	4.000.000	34.193.914	4.000.000	-	-
Utang usaha / Trade payables					
Pihak ketiga / Third parties	293.806.030	359.929.551	418.899.213	367.571.206	401.719.610
Pihak berelasi / Related parties	1.288.115.200	1.076.552.787	1.247.008.500	999.183.968	944.037.756
Pendapatan diterima di muka jangka pendek / Short-term unearned revenues	957.175.849	845.489.224	834.098.021	778.706.786	457.410.169
Utang pajak / Taxes payable	357.031.402	445.015.994	389.495.675	441.919.999	195.577.132
Beban akrual / Accrued expenses	1.765.278.079	2.274.726.626	2.290.832.616	2.168.022.495	1.148.153.513
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang / Current maturities of long-term liabilities					
Utang bank / Bank loans	-	12.000	-	1.860.603	1.724.970
Liabilitas sewa / Lease liabilities	60.214.419	-	-	-	635.202
Liabilitas jangka panjang lainnya – pihak berelasi / Other long-term liabilities - Related parties	10.835.740	19.887.737	38.272.280	54.127.289	63.047.890
Liabilitas jangka pendek lainnya / Other short-term liabilities					
Pihak ketiga / Third parties	205.507.480	206.170.895	185.350.553	165.639.036	183.421.670
Pihak berelasi / Related parties	98.512.786	91.743.873	90.237.622	95.916.891	96.993.402
Total Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	5.040.476.985	5.353.722.601	5.498.194.480	5.072.948.273	3.492.721.314
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities					
Utang obligasi / Bonds payables	22.333.703.064	21.984.178.194	22.890.166.969	21.376.332.500	21.178.512.268
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar / Long-term liabilities - net of current maturities					
Utang bank / Bank loans	-	114.978.000	-	-	1.860.603
Liabilitas sewa / Lease liabilities	112.676.519	-	-	-	-
Liabilitas jangka panjang lainnya / Other long-term liabilities					
Pihak ketiga / Third parties	228.316.051	225.013.928	234.402.238	219.299.877	221.112.329
Pihak berelasi / Related parties	13.842.060	10.250.000	-	-	-
Pendapatan diterima di muka jangka panjang / Short-term unearned revenues	4.060.901.225	4.005.631.257	4.290.892.916	4.496.181.101	4.754.664.509
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefit liabilities	2.764.262.295	1.966.325.908	1.776.917.294	1.806.109.326	1.554.159.311
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities	43.507.959	254.289.069	307.846.807	301.299.484	356.873.980
Total Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	29.557.209.173	28.560.666.356	29.500.226.224	28.199.222.288	28.067.183.000
TOTAL LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	34.597.686.158	33.914.388.957	34.998.420.704	33.272.170.561	31.559.904.314

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
EKUITAS / EQUITY					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owner of parent entity					
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham / Share capital – par value Rp1,000,000 (full amount) per share					
Modal dasar – 4.000.000 saham / Authorized capital - 4,000,000 shares					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.444.029 saham / Issued and fully paid capital - 1,444,029 shares	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi / Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	(205.004.707)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)
Saldo laba / Retained earnings					
Ditentukan penggunaannya / Appropriated	15.021.058.681	13.273.514.540	11.726.994.846	10.201.069.392	9.153.232.292
Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated	907.447.522	2.455.762.802	2.379.261.695	2.179.893.506	1.415.580.254
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	(1.119.689.737)	(105.008.860)	(114.597.288)	(72.365.832)	53.674.364
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – neto / Equity attributable to owner of parent entity - net	16.074.666.741	16.777.525.989	15.144.916.760	13.461.854.573	11.775.744.417
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	1.012.298.142	1.348.684.789	1.289.539.559	486.063.225	135.851.524
Ekuitas – Neto / Equity - net	17.086.964.883	18.126.210.778	16.434.456.319	13.947.917.798	11.911.595.941
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	51.684.651.041	52.040.599.735	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
LABA RUGI / PROFIT OR LOSS					
Pendapatan operasi / Operating revenues	10.453.610.044	11.141.752.225	11.436.700.894	10.655.574.667	8.926.064.770
Pendapatan konstruksi / Construction revenues	957.228.613	1.542.697.617	781.658.834	319.744.293	1.392.135.798
Beban operasi / Operating expenses	(8.271.983.135)	(8.520.357.673)	(8.042.554.820)	(7.397.914.132)	(6.411.461.985)
Beban konstruksi / Construction expenses	(957.228.613)	(1.542.697.617)	(781.658.834)	(319.744.293)	(1.392.135.798)
Pendapatan operasi lainnya – neto / Other operating income - net	(85.551.623)	717.114.514	(196.360.574)	11.410.021	208.659.785
Laba Usaha / Income from Operations	2.096.075.286	3.338.509.066	3.197.785.500	3.269.070.556	2.723.262.570
Pendapatan keuangan / Finance income	508.515.645	836.260.112	688.914.300	534.789.328	287.625.782
Beban keuangan / Finance expenses	(1.122.841.759)	(1.200.237.089)	(1.130.782.016)	(1.064.136.560)	(1.043.385.641)
Bagian laba entitas asosiasi / Equity in income of associates	(97.537.586)	240.568.343	376.200.594	79.081.852	72.794.376
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Profit Before Final Tax and Corporate Income Tax	1.384.211.586	3.215.100.432	3.132.118.378	2.818.805.176	2.040.297.087
Beban pajak final / Final tax expenses	(397.544.705)	(509.692.491)	(357.113.222)	(345.222.944)	253.178.548
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Profit Before Corporate Income Tax	986.666.881	2.705.407.941	2.775.005.156	2.473.582.232	1.787.118.539



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan / Corporate income tax benefit (expense)					
Kini / Current	(116.190.631)	(259.917.054)	(353.981.768)	(291.831.888)	(237.965.664)
Tangguhan / Deferred	286.311.037	58.319.461	9.686.466	23.976.675	(11.938.104)
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year	1.156.787.287	2.503.810.348	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti / Remeasurement of defined benefit plan	(794.030.284)	(68.567.665)	32.019.693	(159.232.831)	(179.146.070)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan / Exchange difference due to financial statements translation	(329.194.038)	254.857.849	(18.329.765)	23.609.863	(3.987.667)
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual / Changes in fair value of available-for-sale financial assets	108.347.081	(170.053.962)	(54.273.223)	8.946.393	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	141.910.046	2.520.046.570	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.081.034
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Income for the year attributable to					
Pemilik entitas induk / Owner of parent entity	1.184.857.249	2.455.762.801	2.379.261.695	2.179.893.506	1.511.459.775
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	(28.069.962)	48.047.547	51.448.159	25.833.513	25.754.996
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year	1.156.787.287	2.503.810.348	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771
Total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Total comprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk / Owner of parent entity	170.176.372	2.473.310.918	2.337.030.239	2.053.853.310	1.328.907.682
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	(28.266.326)	46.735.652	53.090.320	25.197.134	25.173.352
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	141.910.046	2.520.046.570	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.081.034
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) / Basic Earnings Per Share (Full Amount)	820.522	1.700.633	1.647.655	1.509.591	1.046.696

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI / CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Penerimaan kas dari pelanggan / Cash receipts from customers	9.943.466.403	11.677.175.952	10.414.180.403	9.545.892.387	8.512.075.301
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya / Payment to contractors, suppliers and others	(5.105.621.170)	(5.642.396.334)	(4.849.497.861)	(4.316.101.188)	(4.118.471.372)
Pembayaran kepada karyawan / Payment to employees	(2.631.603.392)	(2.609.390.364)	(2.324.087.858)	(2.245.546.714)	(1.833.435.900)
Pembayaran pajak penghasilan / Payment for income tax	(249.151.245)	(1.995.196.071)	(541.932.045)	(391.972.308)	(141.735.373)
Penghasilan bunga / Interest received	505.408.821	719.435.193	604.025.265	439.649.013	243.908.383
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya / Payment of interest and other financial charges	(1.108.967.928)	(1.025.736.701)	(1.064.789.688)	(984.317.563)	(960.401.313)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided by Operating Activities	1.353.531.489	1.123.891.675	2.237.898.216	2.047.603.627	1.701.939.726

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Penerimaan dividen / Receipt of dividends	223.174.017	281.858.622	272.747.364	130.367.400	-
Laba penjualan aset tetap / Profit from sale of fixed assets	8.503.424	80.629.851	5.442.459	-	-
Penerimaan premium / Receipt of Premium	-	-	-	-	193.335.930
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud / Acquisition of fixed assets and intangible assets	(2.627.005.403)	(3.312.163.703)	(1.984.667.658)	(775.034.171)	(2.125.974.262)
Penerimaan investasi jangka pendek / Receipt of short-term investments	(8.494.178.092)	1.239.306.163	3.163.075.409	(2.011.922.698)	(1.727.260.000)
Penerimaan sewa di muka / Receipt of advanced rental fee	127.469.047	124.255.688	318.174.500	308.934.500	526.670.000
Penempatan deposito jangka panjang / Placement of long-term deposit	-	-	-	-	(200.000.000)
Penempatan investasi saham / Placement of investment in shares	(165.555.296)	(787.067.050)	(327.615.532)	449.500.127	154.264.311
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(10.927.592.303)	(2.373.180.429)	1.447.156.542	(1.898.154.842)	(3.178.964.021)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya / Receipt of loans from banks and other financial institutions	(2.000.000)	145.183.914	2.139.397	(2.360.172)	(1.626.360)
Pembayaran liabilitas sewa / Payments of lease liabilities	(51.779.311)	-	-	-	-
Pembayaran dividen / Payment of dividends	(708.218.661)	(832.742.000)	(653.968.052)	(453.437.932)	(371.934.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash used in Funding Activities	(761.997.972)	(687.558.086)	(651.828.655)	(455.798.104)	(373.560.360)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas / Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	30.799.772	(478.291.310)	778.115.044	45.803.973	(91.353.568)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas / Net Decrease in Cash and Cash Equivalents	(10.305.259.014)	(2.415.138.150)	3.811.341.147	(260.545.346)	(1.941.938.223)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	15.603.533.329	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of the Year	5.298.274.315	15.603.533.329	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

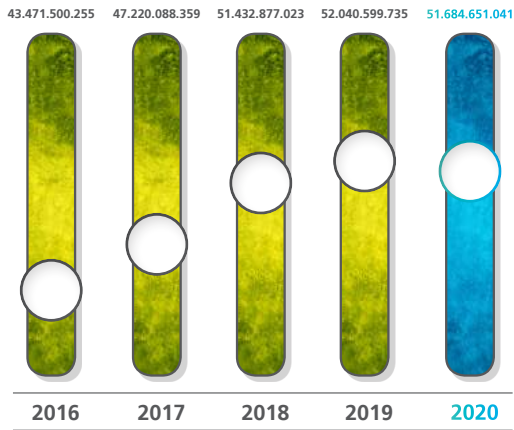
Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
RASIO PROFITABILITAS / PROFITABILITY RATIO					
Tingkat Pengembalian Aset / Return on Assets	2,23%	4,81%	4,73%	4,67%	3,54%
Tingkat Pengembalian Ekuitas / Return on Equity	7,23%	15,72%	17,31%	18,82%	14,79%
Tingkat Pengembalian Investasi / Return on Investment	9,25%	13,37%	11,15%	11,03%	10,20%
Marjin Laba Bersih / Net Profit Margin	11,07%	22,47%	21,25%	20,21%	17,22%
RASIO SOLVABILITAS / SOLVENCY RATIO					
Rasio Liabilitas terhadap Aset / Liabilities to Asset Ratio	66,94%	65,17%	68,05%	70,46%	72,60%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio	202,48%	187,10%	212,96%	238,55%	264,95%
RASIO LIKUIDITAS / LIQUIDITY RATIO					
Rasio Kas / Cash Ratio	325,15%	339,95%	397,49%	418,03%	551,20%
Rasio Lancar / Current Ratio	380,19%	393,40%	446,59%	468,79%	594,96%
Rasio Perputaran Total Aset / Asset Turnover Ratio	30,00%	33,34%	27,32%	27,60%	25,34%
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / Equity to Asset Ratio	33,06%	34,83%	31,95%	28,33%	27,09%



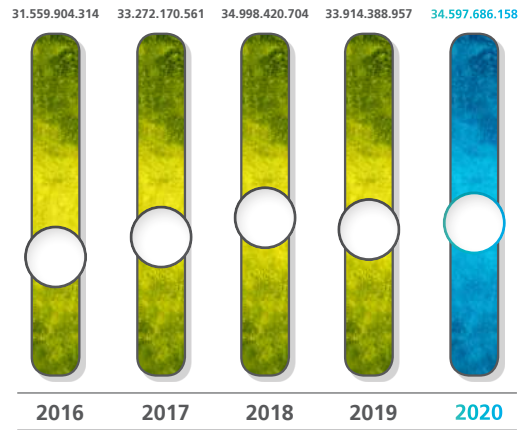
Grafik Kinerja Keuangan

Charts of Financial Performance

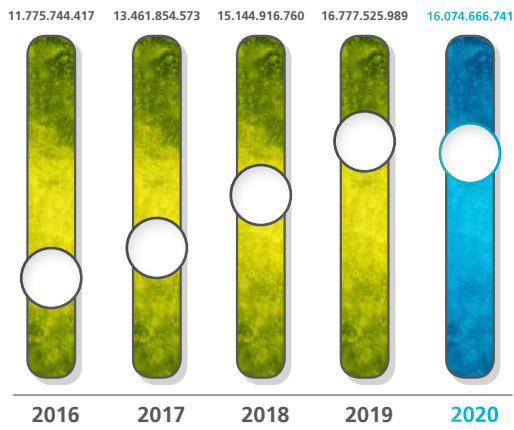
Total Aset / Total Assets
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)



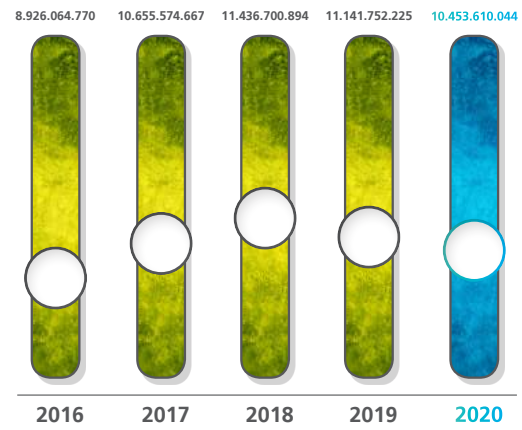
Total Liabilitas / Total Liabilities
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)



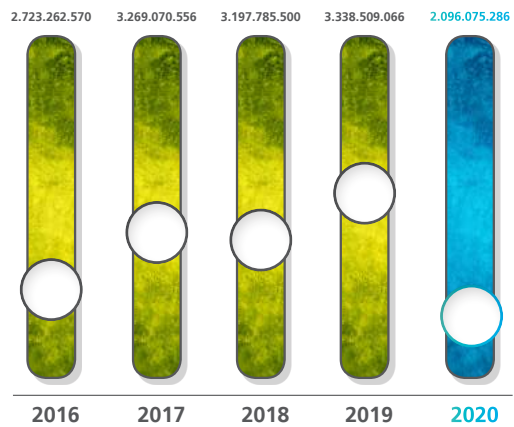
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – neto / Equity attributable to owner of parent entity - net
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)



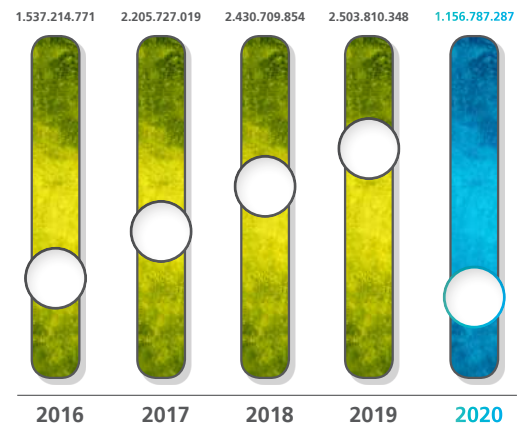
Pendapatan Operasi / Operating Revenues
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)



Laba Usaha* / Income from Operations*
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)



Laba Tahun Berjalan / Income for the Year
(dalam Ribuan Rupiah / in Thousands of Rupiah)

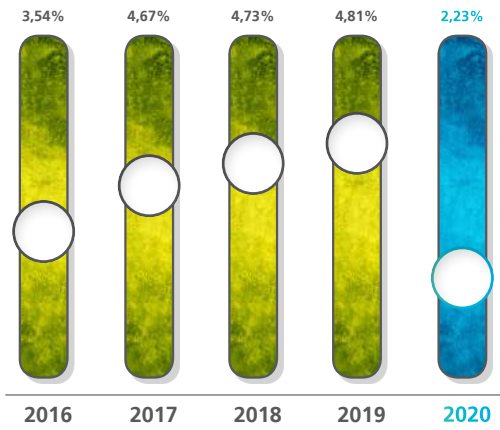


* Diperoleh dari akumulasi Pendapatan Operasi, Pendapatan Konstruksi, dan Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya - Neto, lalu dikurangi Beban Operasi dan Beban Konstruksi.

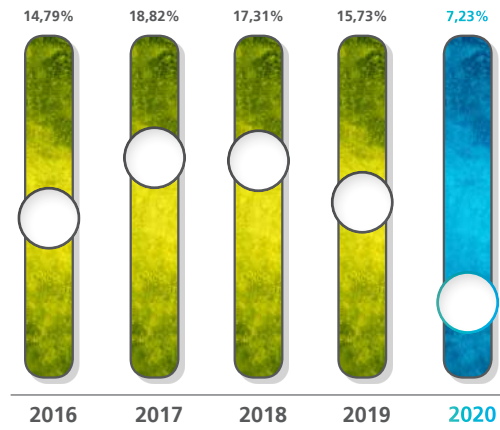
* Derived from accumulation of Operating Revenues, Construction Revenues, and Other Operating Income (Expenses) – Net, deducted by Operating Expenses and Construction Expenses.

Grafik Kinerja Keuangan Charts of Financial Performance

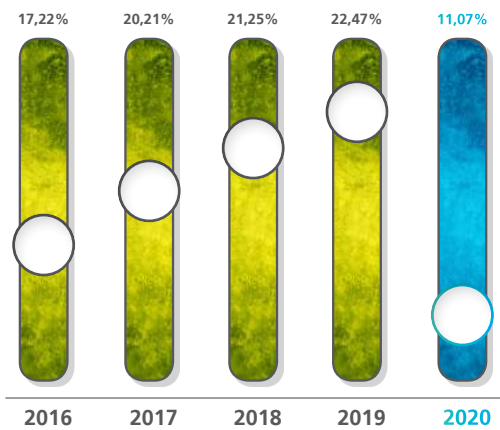
Tingkat Pengembalian Aset / Return on Assets
(dalam % / in %)



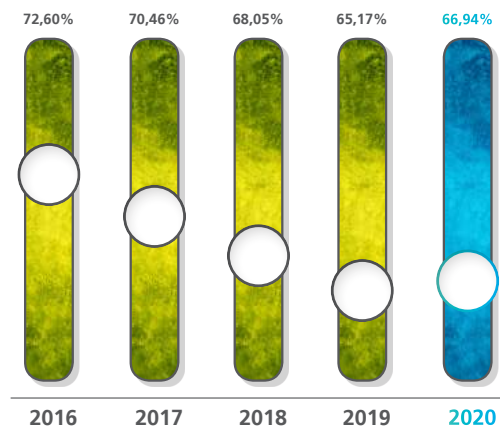
Tingkat Pengembalian Ekuitas / Return on Equity
(dalam % / in %)



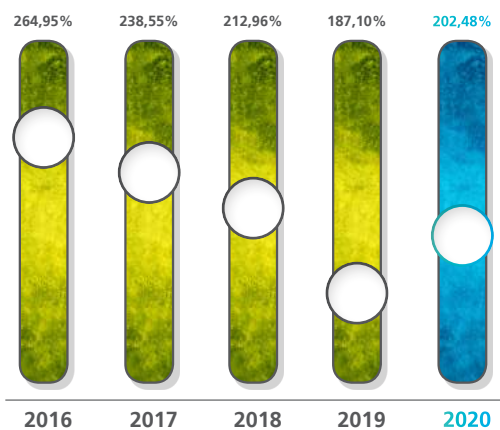
Marjin Laba Bersih / Net Profit Margin
(dalam % / in %)



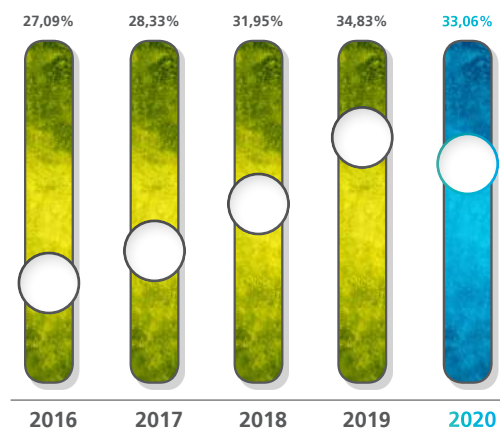
Rasio Liabilitas terhadap Aset / Liabilities to Asset Ratio
(dalam % / in %)



Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio
(dalam % / in %)



Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / Equity to Asset Ratio
(dalam % / in %)

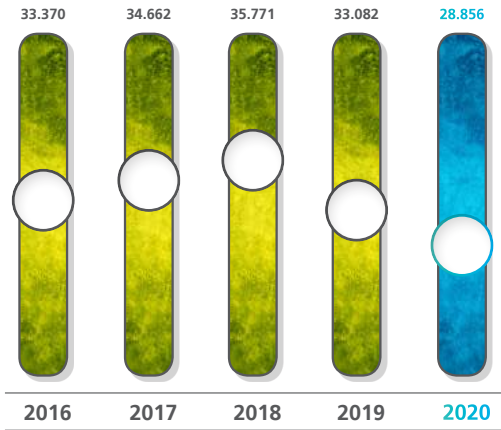




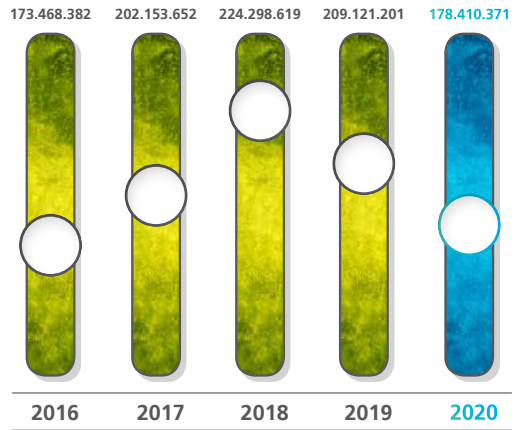
Grafik Kinerja Operasional

Charts of Operational Performance

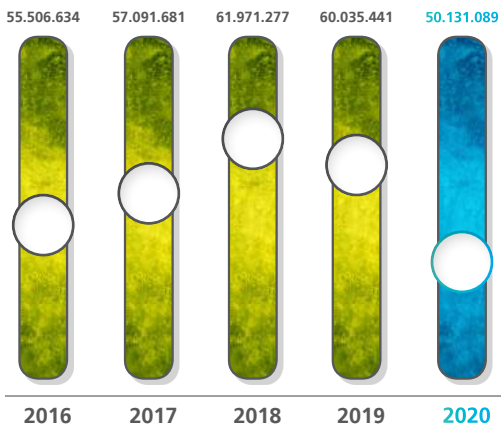
Kunjungan Kapal / Ship Calls
(dalam Unit / in Units)



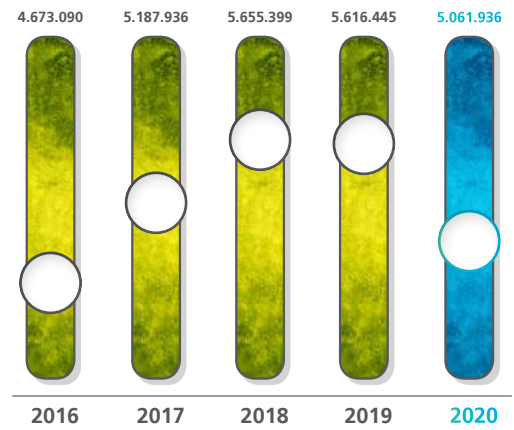
Kunjungan Kapal / Ship Calls
(dalam GT / in GT)



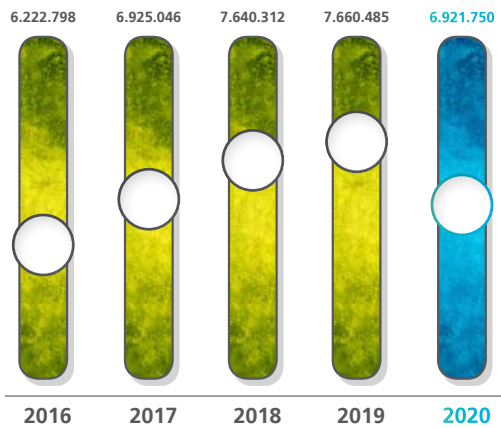
Arus Barang / Cargo Flow
(dalam Ton / in Tons)



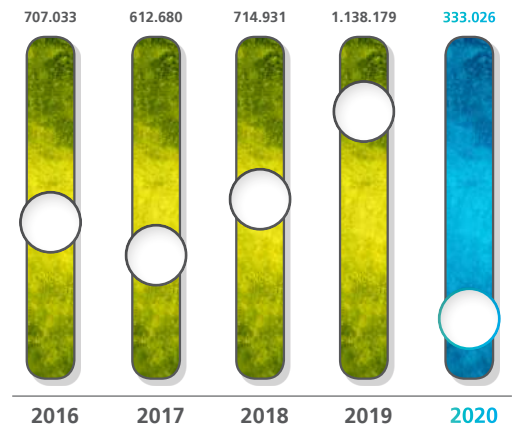
Arus Peti Kemas / Container Flow
(dalam Box / in Box)



Arus Peti Kemas / Container Flow
(dalam TEUs / in TEUs)



Arus Penumpang / Passenger Flow
(dalam Orang / in Person)



Upaya IPC Menuju *World Class Port* IPC's Endeavors Towards World Class Port

Menurut IPC, definisi *World Class Port* atau Pelabuhan Kelas Dunia adalah pelabuhan yang terus-menerus mengembangkan potensi serta kualitas operasional dan pelayanan sampai menjadi pelabuhan yang terbaik di kelasnya. Upaya yang telah berhasil dilakukan oleh IPC dalam rangka mencapai level pelabuhan kelas dunia hingga tahun 2020 diuraikan dalam ilustrasi di bawah ini:

IPC defines a World Class Port as a port that continuously develops its potential as well as the operational and service quality in order to become the best port in its class. IPC's successful endeavors to reach a world class port status until 2020 are illustrated as follows:

1

Program : Operasi NPCT-1 Kalibaru

Pencapaian : Cucu usaha IPC melalui anak usaha PT IPC Terminal Peti Kemas, NPCT-1, telah mulai beroperasi tahun 2016.

Program : NPCT-1 Kalibaru Operation

Achievement : IPC's second-tier subsidiary through subsidiary PT IPC Terminal Peti Kemas, NPCT-1, commenced operations in 2016.

2

Program : *Initial Public Offering (IPO) Anak Perusahaan IPC*

Pencapaian : Dua anak usaha IPC telah melakukan Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* pada tahun 2018, yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk).

Program : *Initial Public Offering (IPO) of IPC Subsidiaries*

Achievement : Two subsidiaries of IPC launched *Initial Public Offering (IPO)* in 2018, namely PT Jasa Armada Indonesian Tbk (PT JAI Tbk) and PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk).



Upaya IPC Menuju *World Class Port* IPC's Endeavors Towards World Class Port

3

Program : Kerja Sama *Direct Call* dengan Perusahaan Pelayaran Kelas Dunia
Pencapaian : Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal-kapal besar layanan *Direct Call* ke berbagai tujuan, antara lain:

- Los Angeles, Amerika Serikat dengan Pelayaran CMA – CGM;
- Eropa dengan Pelayaran CMA – CGM;
- China dengan Pelayaran COSCO;
- Vietnam dengan Pelayaran SM Lines;
- Busan, Korea Selatan dengan pelayaran MSC.

Program : *Direct Call Cooperation with World-Class Shipping Companies*
Achievement : Currently, Tanjung Priok Port caters to *Direct Call* service of large ships to various destinations, among others:

- Los Angeles, United States with CMA – CGM Shipping;
- Europe with CMA – CGM Shipping;
- China with COSCO Shipping;
- Vietnam with SM Lines Shipping;
- Busan, South Korea with MSC Shipping.

4

Program : Implementasi Sistem di Berbagai Aspek Perusahaan
Pencapaian : Saat ini, IPC telah meningkatkan *digital capability* melalui implementasi sistem di berbagai aspek perusahaan, seperti:

- Strategi Korporat : EPICS, BI Dashboard.
- Pengadaan : *Vendor Management System*, e-Katalog, *Contract Management System*.
- Komersial : *Customer Data Management*, *Customer Relationship Management*, e-Service platform, SISKAKU.
- Teknik : Sistem Monitoring Investasi, Oracle EAM.
- Operasi : OPUS, ITOS, NPK TOS, *Autogate* Peti Kemas dan Non Peti Kemas, TPS Online, *Marine Operating System*, *Automatic Identification System*, *Vessel Management System*, *Remote Tally Sistem*, *Warehouse Management System*.
- Keuangan : *Oracle Fixed Asset*, *OracleCash Management*, *Enterprise Planning and Budgeting*, e-Invoice, e-Payment, *IPC Intercompany System*, Sistem Akuntansi Biaya.
- Sumber Daya Manusia : HRIS, e-Arsip, *Dashboard Demografi*, *Learning Management System*.
- Manajemen Risiko : SIM RISK.

Program : *System Implementation in Various Aspects of the Company*
Achievement : Currently, IPC has increased its digital capability through system implementation in various aspects of the Company, such as:

- Corporate Strategy : EPICS, BI Dashboard.
- Procurement : *Vendor Management System*, e-Catalog, *Contract Management System*.
- Commercial : *Customer Data Management*, *Customer Relationship Management*, e-Service platform, SISKAKU.
- Engineering : *Investment Monitoring System*, Oracle EAM.
- Operations : OPUS, ITOS, NPK TOS, *Autogate Container and Non-Container*, TPS Online, *Marine Operating System*, *Automatic Identification System*, *Vessel Management System*, *Remote Tally System*, *Warehouse Management System*.
- Finance : *Oracle Fixed Asset*, *OracleCash Management*, *Enterprise Planning and Budgeting*, e-Invoice, e-Payment, *IPC Intercompany System*, *Cost Accounting System*.
- Human Capital : HRIS, e-Archive, *Demography Dashboard*, *Learning Management System*.
- Risk Management : SIM RISK.

5

Program : Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Beberapa Pelabuhan Mancanegara
Pencapaian : IPC telah menandatangani MoU dengan beberapa pelabuhan mancanegara, antara lain *Port of Ningbo*, *Port of Guangzhou*, dan *Port of Shenzhen* di China; *Port of Baku* di Azerbaijan; *Port of Townsville* di Australia; *Port of Lazaro Cardenas* di Meksiko; *Port of Hamad* di Qatar; *Port of Djibouti* di Afrika Timur; *Port of Sabah* di Malaysia; dan *Port of Los Angeles* di Amerika Serikat; *Port of Rotterdam* di Belanda; dan *Port of Constantza* di Romania.

Program : *Signing Memorandum of Understanding (MoU) with Several International Ports*
Achievement : IPC signed MoU with several international ports, among others *Port of Ningbo*, *Port of Guangzhou*, and *Port of Shenzhen* in China; *Port of Baku* in Azerbaijan; *Port of Townsville* in Australia; *Port of Lazaro Cardenas* in Mexico; *Port of Hamad* in Qatar; *Port of Djibouti* in East Africa; *Port of Sabah* in Malaysia; and *Port of Los Angeles* in the United States; *Port of Rotterdam* in the Netherlands; and *Port of Constantza* in Romania.

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di bursa efek manapun, termasuk Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, informasi mengenai harga saham, kapitalisasi pasar, dan volume perdagangan saham tidak relevan untuk disajikan.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Hingga saat ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu BUMN *Non-Listed* atau belum mencatatkan saham di bursa efek manapun, termasuk Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, informasi tentang kronologi pencatatan saham Perseroan, yang meliputi tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham Perseroan dicatatkan, tidak relevan untuk disajikan.

AKSI KORPORASI

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan merupakan badan usaha *non-listed* yang belum melakukan pencatatan saham di bursa efek manapun, sehingga informasi mengenai aksi korporasi tidak relevan untuk disajikan.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

As of December 31, 2020, the Company did not list any shares on any stock exchange, including Indonesia Stock Exchange. Therefore, information on share price, market capitalization, and share trading volume is not available.

SHARE LISTING CHRONOLOGY

To date, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is a Non-Listed State-Owned Enterprise which does not list its shares on any stock exchange, including Indonesia Stock Exchange. Therefore, information on the Company's share listing chronology, including corporate action, share offering price for each corporate action, total listed shares after each corporate action, and name of stock exchange where the Company's shares are listed is not available.

CORPORATE ACTION

As of December 31, 2020, the Company was a non-listed enterprise which does not list its shares on any stock exchange, so that information on corporate action is not available.

SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARES

As of December 31, 2020, the Company was never imposed any sanctions of suspension and/or delisting of shares.



Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

INFORMASI OBLIGASI

IPC menerbitkan Obligasi Global (*Global Bond*) Seri 1 dan Seri 2 pada tanggal 5 Mei 2015 di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Adapun informasi mengenai nama obligasi, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai obligasi, tingkat suku bunga, status pembayaran, dan tempat pencatatan obligasi diuraikan dalam tabel berikut ini.

INFORMATION ON BONDS

IPC issued Global Bonds Series 1 and Series 2 on May 5, 2015 at Singapore Exchange Securities Trading Limited. Information on the name of bonds, year of issuance, maturity date, bonds value, interest rate, payment status, and place where the bonds are listed is described in the following table:

Informasi Obligasi IPC

IPC Bonds Information

No.	Nama Obligasi / Name of Bonds	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik / Date of Electronic Distribution of Bonds	Tenor	Nilai Obligasi / Bonds Value	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Suku Bunga / Interest Rate	Status Pembayaran / Payment Status	Tempat Pencatatan Obligasi / Stock Exchange
1.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 1 / Series 1 Global Bonds	5 Mei 2015 / May 5, 2015	10 tahun / years	USD1,1 miliar / billion	5 Mei 2025 / May 5, 2025	4,250% per tahun / per annum	Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo / Payment of the principal will be made when due	Singapore Exchange Securities Trading Limited
2.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 2 / Series 2 Global Bonds		30 tahun / years	USD0,5 miliar / billion	5 Mei 2045 / May 5, 2045	5,375% per tahun / per annum		

Peringkat Obligasi

Salah satu indikator kemampuan Perseroan dalam membayar utang tercermin dari peringkat obligasi. Oleh sebab itu, obligasi yang diterbitkan oleh IPC, yaitu Obligasi Global (*Global Bond*) di Singapore Exchange Securities Trading Limited secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan.

Bonds Rating

One of the indicators of the Company's ability to pay its liabilities is reflected on the bonds rating. Therefore, the Global Bonds issued by IPC at Singapore Exchange Securities Trading Limited are regularly evaluated by rating institution to support the feasibility of issued bonds.

Berikut ini disajikan peringkat obligasi IPC yang diberikan oleh 3 (tiga) Lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu Standard and Poor's (S&P), Moody's, dan Fitch, dari tahun pertama kali obligasi diterbitkan, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2020.

The rating of IPC's bonds provided by 3 (three) International Rating Institutions, namely Standard and Poor's (S&P), Moody's, and Fitch, from the first year of initial bonds issuance in 2015 until 2020.

Peringkat Obligasi IPC Tahun 2015 Hingga Tahun 2020

IPC Bonds Rating from 2015 until 2020

Tahun / Year	Hasil Peringkat / Rating		
	S&P	Moody's	Fitch
2015	BB+ (<i>Outlook : Stable</i>)	Baa3 (<i>Outlook : Stable</i>)	BBB- (<i>Outlook : Stable</i>)
2016	BB+ (<i>Outlook : Positive</i>)	Baa3 (<i>Outlook : Stable</i>)	BBB- (<i>Outlook : Stable</i>)
2017	BBB- (<i>Outlook : Stable</i>)	Baa3 (<i>Outlook : Positive</i>)	BBB- (<i>Outlook : Positive</i>)
2018	BBB- (<i>Outlook : Stable</i>)	Baa2 (<i>Outlook : Stable</i>)	BBB (<i>Outlook : Stable</i>)
2019	BBB (<i>Outlook : Stable</i>)	Baa2 (<i>Outlook : Stable</i>)	BBB (<i>Outlook : Stable</i>)
2020	BBB- (<i>Outlook : Stable</i>)	Baa2 (<i>Outlook : Stable</i>)	BBB (<i>Outlook : Stable</i>)

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

Kronologi Pembayaran Bunga Obligasi

Berikut ini disajikan informasi mengenai tanggal dan status pembayaran bunga dari Obligasi Global (*Global Bond*) yang diterbitkan Perseroan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dari tahun pertama kali obligasi diterbitkan, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2020.

Bonds Interest Payment Chronology

Information on the interest payment date and status from the Global Bonds issued by the Company at Singapore Exchange Securities Trading Limited from the first year of issuance in 2015 until 2020 is as follows.

Kronologi Pembayaran Bunga Obligasi IPC Tahun 2015 Hingga Tahun 2020

IPC Bonds Interest Payment Chronology from 2015 until 2020

Bunga Ke- / Order of Interest	Tanggal Pembayaran Bunga / Date of Interest Payment	Status Pembayaran Bunga / Status of Interest Payment
1	5 November 2015 / November 5, 2015	Telah dibayarkan / Paid
2	5 Mei 2016 / May 5, 2016	Telah dibayarkan / Paid
3	5 November 2016 / November 5, 2016	Telah dibayarkan / Paid
4	5 Mei 2017 / May 5, 2017	Telah dibayarkan / Paid
5	5 November 2017 / November 5, 2017	Telah dibayarkan / Paid
6	5 Mei 2018 / May 5, 2018	Telah dibayarkan / Paid
7	5 November 2018 / November 5, 2018	Telah dibayarkan / Paid
8	5 Mei 2019 / May 5, 2019	Telah dibayarkan / Paid
9	5 November 2019 / November 5, 2019	Telah dibayarkan / Paid
10	5 Mei 2020 / May 5, 2020	Telah dibayarkan / Paid
11	5 November 2020 / November 5, 2020	Telah dibayarkan / Paid

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan sukuk atau surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, informasi mengenai penerbitan sukuk Perseroan tidak relevan untuk disajikan.

INFORMATION ON SUKUK

As of December 31, 2020, the Company did not issue any sukuk or government securities based on sharia principle. Therefore, information on sukuk issuance by the Company is not available.

INFORMASI OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan obligasi konversi. Dengan demikian, informasi mengenai penerbitan obligasi konversi Perseroan tidak relevan untuk disajikan.

INFORMATION ON CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2020, the Company did not issue any convertible bonds. Therefore, information on convertible bonds issuance by the Company is not available.



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Financing Sources

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai sumber pendanaan lainnya tidak relevan untuk ditampilkan.

As of December 31, 2020, the Company did not have other sources of financing from securities. Therefore, information on other financing sources is not available.

IPC



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

Januari / January



7 Januari 2020 / January 7, 2020

- Kegiatan *Last Call* 2019 dan *First Call* 2020 serentak di seluruh Cabang Pelabuhan IPC.
- Penandatanganan *Head of Agreement* tentang Penyiapan Kerja Sama Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar beserta Area Pendukungnya.
- Last Call 2019 and First Call 2020 in all IPC Port Branches.
- Signing of the Head of Agreement on the Preparation of Cooperation for the Operation and Development of Batu Ampar Port and its Supporting Areas.

Februari / February



19 Februari 2020 / February 19, 2020

- *Talkshow* ITB *Civil Engineering Expo* (ICEE) 2020 oleh Direktur Teknik
- Rapat Kerja Nasional (*Rakernas*) 2020
- Penandatanganan kerja sama *sister port* dengan *Port of Constanza* di Romania
- Sosialisasi pencegahan virus corona
- Program pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pencegahan narkoba di wilayah sekitar Cabang Pelabuhan Tanjung Priok
- 2020 ITB *Civil Engineering Expo* (ICEE) *Talkshow* by Technical Director by the Technical Director
- 2020 National Work Meeting (*Rakernas*)
- Signing of *sister port* cooperation with *Port of Constanza* in Romania
- Dissemination of corona virus prevention
- Community empowerment program in the form of drug prevention activities in areas around Tanjung Priok Port Branch



Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

Maret / March



11 Maret 2020 / March 11, 2020

- Kunjungan kerja Direktur Utama
- IPC dan *Port of Rotterdam*, Belanda menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang pengembangan logistik maritim dan infrastruktur
- Work visit of President Director
- IPC and the Port of Rotterdam, the Netherlands, signed a cooperation agreement for maritime logistics and infrastructure development

April / April



13 April 2020 / April 13, 2020

- Forum Manajemen
- Pemberian bantuan Covid-19 di berbagai Cabang Pelabuhan
- Beragam kegiatan pencegahan virus Covid-19 yang diselenggarakan di Cabang Pelabuhan IPC
- Management Forum
- Provision of Covid-19 assistance at various Port Branches
- Various Covid-19 prevention activities held at IPC Port Branches

Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

Mei / May



20 Mei 2020 / May 20, 2020

- IPC menyalurkan 10 ton beras dan 10.000 masker
- Posko Dapur Umum Satgas BUMN
- Bersama OP Tanjung Priok, IPC membagikan 1.500 paket sembako.
- *Rapid Test* untuk seluruh pegawai Grup IPC
- IPC Peduli membagikan paket sembako dan *e-voucher*
- Diskusi virtual bersama Forum Wartawan Perhubungan
- Alokasi THR Direksi dan Dewan Komisaris untuk Bantuan Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM)
- Halalbihalal IPC secara virtual
- IPC distributed 10 tons of rice and 10,000 masks
- Public Kitchen by SOE Task Force
- Together with Tanjung Priok OP, IPC distributed 1,500 food packages
- Rapid Test for all IPC Group employees
- IPC Peduli distributed food packages and e-vouchers
- Virtual discussion with the Transportation Journalists Forum
- Allocation of Religious Holiday Allowance of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Assistance for Stevedoring Workers (TKBM)
- Virtual *Halalbihalal* (Eid *Al-Fithr* Gathering) of IPC

Juni / June



25 Juni 2020 / June 25, 2020

- Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila via Daring
- Peluncuran Aplikasi *Mobile Customer*
- Ngobrol Bisnis (Urgensi *Smart Port* Selama *Fase Reopening* Ekonomi)
- Diskusi Virtual berkolaborasi dengan Myshipgo
- Pemberian Stimulus kepada Mitra Binaan UMKM
- Kolaborasi dengan BNN pada Hari Anti Narkoba Internasional
- Penandatanganan Kerja Sama Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara beberapa Cabang Pelabuhan dengan Kejaksaan Tinggi setempat
- Online Pancasila Day Ceremony
- Launching of the Mobile Customer Application
- Business Talk (Smart Port Urgency During Economic Reopening Phase)
- Virtual Discussion in collaboration with Myshipgo
- Provision of stimulus for MSME Fostered Partners
- Collaboration with BNN on International Anti-Drug Day
- Signing of Cooperation on Civil and State Administration Legal Matters between several Port Branches and the local High Court



Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

Juli / July



23 Juli 2020 / July 23, 2020

- Pemberlakuan aturan *Traffic Separation Scheme* (TSS)
- MoU Pengembangan Kepelabuhanan dan Kepariwisataaan
- Seminar Leader Ber-AKHLAK
- *Holding* Rumah Sakit BUMN
- Dukung UMKM dengan memberikan relaksasi pinjaman
- Penandatanganan Kerja Sama Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Agung
- IPC memberikan relaksasi biaya layanan petikemas
- Bantuan Penanganan Covid-19 kepada RS Pelabuhan
- Penyaluran 3.700 masker non-medis untuk TKBM
- Penyaluran Hewan Kurban
- Application of the Traffic Separation Scheme (TSS) regulation
- MoU on Port and Tourism Development
- AKHLAK Leaders Seminar
- SOEs Hospital Holding
- Supporting MSMEs by providing loan relaxation
- Signing of Cooperation on Civil and State Administration Legal Matters with the Attorney General's Office
- IPC provided relaxation of container service costs
- Covid-19 Handling Assistance to Port Hospital
- Distribution of 3,700 non-medical masks for TKBM
- Distribution of Sacrificial Animals

Agustus / August



12 Agustus 2020 / August 12, 2020

- Rangkaian kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI
- Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 via Daring
- *Talkshow* Minggu Santai
- IPC *Wellness Competition*
- Series of activities for the 75th Anniversary of Indonesia's Independence Day
- Online ceremony for 75th Anniversary of Indonesia's Independence Day
- Casual Sunday Talkshow
- IPC Wellness Competition

Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

September / September



15 September 2020 / September 15, 2020

- Penyandaran perdana di Terminal Curah Cair Gaung
- Simulasi penanganan terorisme di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok
- Penandatanganan MoU dengan PT Bukit Asam Tbk
- Deklarasi Priok Bermasker bersama Otoritas Pelabuhan
- First berthing at Gaung Liquid Bulk Terminal
- Simulation of terrorism handling at Tanjung Priok Port Branch
- Signing of MoU with PT Bukit Asam Tbk
- Priok Bermasker Declaration with Port Authority

Oktober / October



15 Oktober 2020 / October 15, 2020

- IPC menyediakan fasilitas *Shore To Ship* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok
- IPC mengakuisisi 49 persen saham PT Multimedia Nusantara di PT ILCS
- IPC provided Shore to Ship facilities at Tanjung Priok Port Branch
- IPC acquired 49 percent shares of PT Multimedia Nusantara in PT ILCS



Peristiwa Penting Tahun 2020 2020 Significant Events

November / November



10 November 2020 / November 10, 2020

- IPC dan Ditjen Pajak mengembangkan Integrasi Data Perpajakan Berbasis IT
- IPC and the Directorate General of Taxes develop IT-Based Tax Data Integration
- Diskusi terbuka dengan 3 (tiga) Kementerian untuk penerapan *Eco Port*
- Open discussion with 3 (three) Ministries for the application of *Eco Port*

Desember / December



3 Desember 2020 / December 3, 2020

- Perayaan Bersama HUT Pelindo I – IV ke-28
- Perayaan HUT IPC ke-28
- *Marketing Outlook*
- *Customer Gathering & Award*
- *Last Call* IPC
- Forum Mutu Grup IPC
- *IPC Risk Award*
- Joint Celebration of the 28th Anniversary of Pelindo I - IV
- Celebration of IPC's 28th Anniversary
- *Marketing Outlook*
- *Customer Gathering & Award*
- *IPC Last Call*
- *IPC Group Quality Forum*
- *IPC Risk Award*

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



PENGHARGAAN

Penghargaan IPC

AWARDS

IPC Awards

Indonesia Digital 5th Innovation Award 2020

(Diselenggarakan oleh Warta Ekonomi tanggal 12 Februari 2020 / Organized by Warta Ekonomi on February 12, 2020)

1. Innovative Company For Digital Port Implementation Through Enterprise Resources Planning Category Transportation Services

Indonesia CSR Brand Equity Award 2020

(Diselenggarakan oleh Iconomics tanggal 27 Februari 2020 / Organized by Iconomics on February 27, 2020)

2. Excellence Corporate Social Responsibility Program in 2020 Port Operator Category

Bersatu Lawan Covid / Uniting to Combat Covid

3. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Atas Peran Serta, Dukungan dan Kerja Samanya Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jakarta Utara / PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for its Participation, Support, and Cooperation in the Efforts of Prevention and Handling of *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) in North Jakarta Area

Indonesia Corporate Branding PR Award 2020

(Diselenggarakan oleh Iconomics tanggal 14 Mei 2020 / Organized by Iconomics on May 14, 2020)

4. Kategori Operator Pelabuhan / Port Operator Category

Indonesia TOP CSR Award 2020

(Diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness tanggal 29 Juli 2020 / Organized by Majalah TopBusiness on July 29, 2020)

5. Arif Suhartono (Direktur Utama IPC) sebagai Top Leader on CSR Commitment 2020 / Arif Suhartono (IPC President Director as Top Leader on CSR Commitment 2020)
6. Top CSR Award 2020 #Stars 4

GRC & Performance Excellence Award 2020

(Diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia tanggal 29 Juli 2020 / Organized by Majalah BusinessNews on July 29, 2020)

7. Arif Suhartono (Direktur Utama IPC) sebagai The Best CEO & GRC Leader 2020 / Arif Suhartono (IPC President Director) as The Best CEO & GRC Leader 2020
8. The Best GRC Overall For Corporate & Performance 2020 (In Logistics Service)

BUMN Marketeers Awards 2020

(Diselenggarakan oleh Markplus.Inc tanggal 16 September 2020 / Organized by Markplus.Inc on September 16, 2020)

9. *Gold Winner* untuk "The Most Promising Company in Strategic Marketing"
10. *Bronze Winner* untuk "The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs"
11. Penghargaan Dewi BUMN untuk Rima Novianti (Direktur Komersial IPC / Dewi BUMN Award for Rima Novianti (IPC Commercial Director)



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



TOP GRC Awards 2020

(Diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness tanggal 15 Oktober 2020 / Organized by Majalah TopBusiness on October 15, 2020)

12. TOP GRC 2020 STARS #4

13. The High Performing Board Of Commissioners On GRC 2020

14. The Most Committed GRC Leader 2020 untuk Arif Suhartono (Direktur Utama IPC) / The Most Committed GRC Leader 2020 for Arif Suhartono (IPC President Director)

Nusantara CSR Award 2020

(Diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR tanggal 15 Oktober 2020 / Organized by The La Tofi School of CSR on October 15, 2020)

15. Kategori Peningkatan Mutu Pendidikan Program 50 Juara Cinta IPC Jakarta Utara / Category of Education Quality Improvement for 50 Juara Cinta Program of IPC North Jakarta

Digital Marketing & Human Capital Awards 2020

(Diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia tanggal 25 November 2020 / Organized by Majalah BusinessNews Indonesia on November 25, 2020)

16. Kategori "The Best Business Strategy & Digital Marketing Team" / Category of "The Best Business Strategy & Digital Marketing Team"

TOP BUMN Award 2020

(Diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia tanggal 26 November 2020 / Organized by Bisnis Indonesia on November 26, 2020)

17. The Most Resilient BUMN 2020

18. The Best CEO

Indonesia Most Trusted Companies Award 2020

(Diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA tanggal 17 Desember 2020 / Organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and Majalah SWA on December 17, 2020)

19. Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2019 Kategori "TERPERCAYA" / Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2019 Category "TRUSTED"

Harbour Master Of Tanjung Priok Awards 2020

(Diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 22 Desember 2020 / Organized by the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation on December 22, 2020)

20. Perusahaan Terfavorit atas Peran Aktif pada Kegiatan Sosial dan Keamanan / The Most Favorite Company for Active Participation in Social Activities and Security

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



Penghargaan Cabang

Branch Awards

CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK / TANJUNG PRIOK PORT BRANCH

DTKJ Awards 2020

(Diselenggarakan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tanggal 26 November 2020 / Organized by Jakarta Transportation Council (DTKJ) on November 26, 2020)

- Kategori "Silver" untuk Fasilitas Disabilitas Terminal Penumpang Nusantara / "Silver" Category for Disability Facilities in Nusantara Passenger Terminal

CABANG PELABUHAN PALEMBANG / PALEMBANG PORT BRANCH

Zero Accident Award 2020

(Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Februari 2020 / Organized by the Provincial Government of South Sumatera on February 12, 2020)

- Perusahaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 / The Best Company in Occupational Health and Safety (OHS) in South Sumatera Province in 2019

#1 Customer Choice Satisfaction Award 2020

(Diselenggarakan oleh Indonesia Development Achievement Foundation dan Venna Event Management tanggal 28 Agustus 2020 / Organized by Indonesia Development Achievement Foundation and Venna Event Management on August 28, 2020)

- Kategori "The Most Reliable And Recognized Port Company in Quality Best Service of The Year 2020" / Category of "The Most Reliable and Recognized Port Company in Quality Best Service of the Year 2020"

CABANG PELABUHAN BANTEN / BANTEN PORT BRANCH

Zero Accident Award 2020

(dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)

- (6.273.219 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja per tanggal 30 November 2017 – 30 September 2019) tanggal 17 September 2020. / Banten Port Branch (6,273,219 manhours without work accidents as of November 30, 2017 – September 30, 2019) September 17, 2020.

CABANG PELABUHAN TELUK BAYUR / TELUK BAYUR PORT BRANCH

Zero Accident Award 2020

(dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)

- (447.732 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja per tanggal 1 Januari 2017 – 31 Desember 2019) tanggal 17 September 2020. / Teluk Bayur Port Branch (447,732 manhours without work accidents as of January 1, 2017 - December 31, 2019) September 17, 2020.



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



SERTIFIKASI

CERTIFICATIONS

Manajemen Mutu dan Layanan Pelabuhan / Quality Management and Port Services

ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu / ISO 9001:2015 on Quality Management System

(Dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Service / Issued by Sucofindo International Certification Service)

1. Kantor Pusat / Head Office
2. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch
3. Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch
4. Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch
5. Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch
6. Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch
7. Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch
8. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch
9. Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch
10. Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch
11. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch
12. Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch
13. Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch

Masa berlaku : 28 Desember 2020 – 27 Desember 2023 / Validity period : December 28, 2020 – December 27, 2023

Penyediaan Pelayanan Kepelabuhanan untuk Gedung Cabang Tanjung Priok, Terminal Penumpang, Reception Facilities, dan Pelayanan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok / Provision of Port Services for Tanjung Priok Branch Building, Passenger Terminal, Reception Facilities, and Ship Services in Tanjung Priok Port

(Dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia / Issued by: TUV NORD Indonesia Certification Agency)

- Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch

(Masa berlaku: 31 Agustus 2018 – 30 Agustus 2021 / Validity period: August 31, 2018 – August 30, 2021)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Occupational Health and Safety (OHS)

OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / OHSAS 18001:2007 Certificate on Occupational Health and Safety Management System

Dikeluarkan oleh / Issued by: Sucofindo International Certification Service

- Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch

(Masa berlaku: 7 Januari 2021 – 6 Januari 2024 / Validity period: January 7, 2021 – January 6, 2024)

- Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch

(Masa berlaku: 23 Mei 2019 – 22 Mei 2022 / Validity period: May 23, 2019 – May 22, 2022)

(Dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia / Issued by: TUV NORD Indonesia Certification Agency)

- Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch

(Masa berlaku: 30 Agustus 2018 – 30 Agustus 2021 / Validity period: August 30, 2018 – August 30, 2021)

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) / Occupational Health and Safety Management System (SMK3)

(Dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Issued by The Minister of Manpower of the Republic of Indonesia)

- Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch
- Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch
- Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch
(Masa berlaku : 17 September 2020 – 17 September 2023 / Validity period: September 17, 2020 – September 17, 2023)
- Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch
- Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch
(Masa berlaku: 29 Maret 2019 – 29 Maret 2022 / Validity period: March 29, 2019 – March 29, 2022)
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
(Masa berlaku: 30 Juli 2018 – 30 Juli 2021 / Validity period: July 30, 2018 – July 30, 2021)

Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan / Statement of Compliance with Port Facilities Security

(Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Issued by The Directorate General of Sea Transportation)

- Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch
(Masa berlaku : 30 November 2020 – 8 Juli 2025 / Validity period : November 30, 2020 – July 8, 2025)
- Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch
(Masa berlaku : 19 Maret 2020 – 5 April 2025 / Validity period : March 19, 2020 – April 5, 2025)
- Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch
(Masa berlaku : 16 Desember 2019 – 2 November 2024 / Validity period : December 16, 2019 – November 2, 2024)
- Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch
(Masa berlaku: 29 November 2019 – 20 Oktober 2024) / Validity period: November 29, 2019 – October 20, 2024)
- Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch
(Masa berlaku: 14 Oktober 2019 – 1 Oktober 2024) / Validity period: October 14, 2019 – October 1, 2024)
- Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch
(Masa berlaku: 8 Oktober 2019 – 13 Oktober 2024) / Validity period: October 8, 2019 – October 13, 2024)
- Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch
(Masa berlaku: 16 September 2019 – 19 Agustus 2024) / Validity period: September 16, 2019 – August 19, 2024)
- Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch
(Masa berlaku: 12 September 2019 – 13 Agustus 2024) / Validity period: September 12, 2019 – August 13, 2024)
- Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch
(Masa berlaku: 5 September 2019 – 28 Agustus 2024) / Validity period: September 5, 2019 – August 28, 2024)
- Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch
(Masa berlaku: 21 Agustus 2019 – 14 September 2024) / Validity period: August 21, 2019 – September 14, 2024)
- Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch
(Masa berlaku: 31 Desember 2018 – 19 Desember 2023 / Validity period: December 31, 2018 – December 19, 2023)



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



Lingkungan / Environment

SNI ISO 14001:2015 tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan / ISO 14001:2015 on Certification for Environmental Management System

- Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
(Masa Berlaku: 29 Mei 2019 – 28 Mei 2022 / Validity Period: May 29, 2019 – May 28, 2022)
- Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch
(Batas Berlaku: 30 Agustus 2021 / Validity Period: August 30, 2021)
- PT Jasa Armada Indonesia
(Masa Berlaku: 15 Mei 2019 – 2 Mei 2022 / Validity Period: May 15, 2019 – May 2, 2022)
- PT Pengerukan Indonesia
(Masa Berlaku: 14 Agustus 2020 – 23 Juni 2021 dan 19 Agustus 2020 – 26 Oktober 2021 / Validity Period: August 14, 2020 – June 23, 2021 and August 19, 2020 – October 26, 2021)
- PT Indonesia Kendaraan Terminal
(Batas Berlaku: 28 Desember 2021 / Validity Period: December 28, 2021)
- PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
(Masa Berlaku: 5 Oktober 2018 – 4 Oktober 2021 / Validity Period: October 5, 2018 – October 4, 2021)
- Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok area Tanjung Priok / Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Priok area
(Batas Berlaku: 2 September 2020 (on-progress perpanjangan) / Validity Period: September 2, 2020 (extension on progress))

Hukum / Legal

SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (KAN) / ISO 37001:2016 on Certification for Anti Bribery Management System (KAN)

Dikeluarkan oleh / Issued by: BSI Indonesia

1. Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Ruang Lingkup: Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Pemasaran, Pelayanan Terminal, Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, Layanan Keuangan, Pembelajaran SDM, Strategi SDM, Layanan SDM, Hukum, Manajemen Risiko, Kendali Mutu, Pengadaan, Pelayanan Kapal, Peralatan, Konstruksi Sipil, Manajemen Proyek Strategis, Sistem Informasi, Pengelolaan Keuangan / Scope: Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Marketing, Terminal Services, Financial Planning and Control, Financial Services, HC Learning, HC Strategy, HC Services, Legal, Risk Management, Quality Control, Procurement, Vessel Services, Equipment, Civil Construction, Strategic Project Management, Information System, Financial Management

Masa Berlaku: 26 November 2020 – 25 November 2023 / Validity Period: November 26, 2020 – November 25, 2023



02



Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

President Commissioner and Independent Commissioner



Dewan Komisaris mengapresiasi langkah strategis Direksi dalam mengupayakan tercapainya target pendapatan usaha sesuai RKAP 2020, di antaranya dengan berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* (pelanggan, asosiasi dan regulator), pemberian relaksasi berupa insentif tarif pelayanan jasa kapal kepada beberapa *customer* terbesar, melakukan pemasaran intensif atas aset *idle* dan yang belum optimal, melakukan perpanjangan dengan mitra dan penajakan dengan mitra-mitra baru, serta pelaksanaan program *revenue enhancement* di beberapa Anak Perusahaan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' strategic steps in striving to achieve the targeted operating revenues based on the 2020 RKAP, including coordinating and establishing good relationships with stakeholders (customers, associations, and regulators), providing relaxation in the form of incentives for ship service rates to several key customers, intensive marketing of idle and less optimal assets, extending cooperation with partners and exploring new partners, and implementing revenue enhancement program in several subsidiaries.





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

To Our Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, terutama akibat adanya Pandemi Covid-19 serta pemberlakuan awal atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, 72 dan 73 yang cukup berdampak terhadap Pelaporan Keuangan Konsolidasian IPC tahun buku 2020.

Pada kesempatan kali ini, kami selaku jajaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2020 yang memuat tentang pelaksanaan tugas kami di bidang pengawasan pengelolaan kinerja Perseroan sepanjang tahun buku. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga agar kegiatan operasional Perseroan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, visi dan misi, Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN MAKROEKONOMI

Tantangan yang hadir bagi stabilitas ekonomi global terus berlanjut hingga 2020, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia. Akibat adanya pandemi tersebut, perekonomian di banyak negara tercatat mengalami kemunduran. Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan "World Economic Outlook" yang dirilis pada kuartal IV 2020 mengungkapkan bahwa perekonomian global diproyeksikan tumbuh berkontraksi hingga minus 4,4 persen sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis Covid-19 memaksa pemerintahan di berbagai negara dengan cepat meluncurkan paket penopang ekonomi yang nilainya diperkirakan mencapai USD12 triliun untuk membantu menyelamatkan jiwa dan mata pencaharian, mengingat krisis ini telah menyebabkan pengangguran besar-besaran serta mencatat lebih dari satu juta kematian. Meski dampak

First of all, let us express our praise and gratitude to the Almighty God for the abundance of His grace and gifts to all of us, so that PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) managed to pass 2020 which was full of challenges, especially due to the Covid-19 Pandemic and the early implementation of the Financial Accounting Standards (PSAK) 71, 72 and 73 which had quite an impact on IPC Consolidated Financial Reporting for the 2020 fiscal year.

On this occasion, the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) would like to submit the Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2020 which contains the implementation of our duties in the field of monitoring the management of the Company's performance throughout the fiscal year. The supervision aims to ensure that the Company's operational activities can be carried out in accordance with the objectives, vision and mission, the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

MACROECONOMIC OVERVIEW

The challenges to global economic stability continued to persist in 2020 as an impact of Covid-19 pandemic that hit almost all countries in various parts of the world, which resulted in economic downturn in numerous countries. The International Monetary Fund (IMF) in its report "World Economic Outlook" released in the fourth quarter of 2020 stated that the global economy was projected to contract by up to minus 4.4 percent as a result of Covid-19 pandemic.

Stagnating world economic growth due to the Covid-19 crisis has forced governments in various countries to immediately launch economic supports estimated at USD12 trillion to save lives and livelihoods, considering that this crisis has caused massive unemployment and more than one million fatalities. Although the impact of the Covid-19 pandemic was not as severe as predicted in the second quarter of 2020, the

dari pandemi Covid-19 tidak separah yang diperkirakan pada kuartal II 2020, namun pemulihannya akan berjalan lambat, terutama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

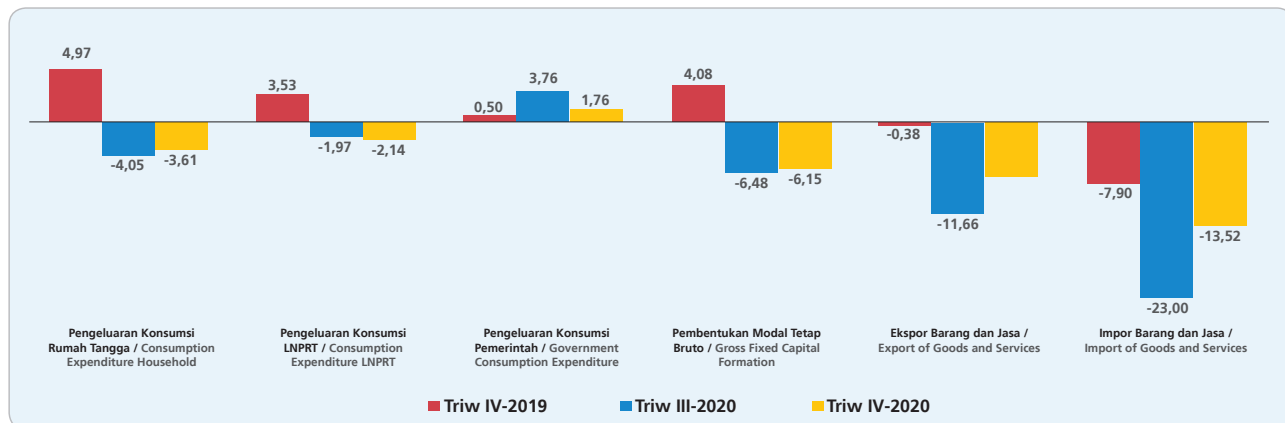
Secara domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020 per tahunan (*year on year/“yoy”*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen. Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 1,76 persen. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,21 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,15 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,61 persen. Sementara itu, Komponen Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,52 persen.

recovery will be slow, especially for developing countries including Indonesia.

In the domestic sphere, Indonesia’s economic growth in the fourth quarter of 2020 (*year on year/“yoy”*) contracted by 2.19 percent. Based on data by Statistics Indonesia (SI), contraction occurred in almost all expenditure components, except for Government Consumption Expenditure (PK-P) Component which grew by 1.76 percent. Negative growth mainly occurred in Goods and Services Export Component by 7.21 percent; followed by Gross Fixed Capital Formation (PMTB) Component by 6.15 percent; and Household Consumption Expenditure (PK-RT) Component by 3.61 percent. Meanwhile, the growth in Goods and Services Component contracted by 13.52 percent.

Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) (persen) Tahun 2020

GDP Growth in Several Expenditure Components (yoy) (percent) in 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Source: Statistics Indonesia

Beberapa sektor dengan intensitas kontak yang tinggi serta pekerjaan yang sulit dilakukan jarak jauh dan mengandalkan interaksi langsung dengan konsumen seperti transportasi, kepelabuhanan, pedagang grosir dan ritel, perhotelan, konstruksi, dan manufaktur, mengalami dampak yang keras karena menurunnya aktivitas ekonomi demi mencegah penyebaran Covid-19.

Several sectors with high contact intensity and working situation that is unsuitable for long-distance work and relies on direct interaction with consumers, such as transportation, port, wholesale and retail, hotel, construction, and manufacture, faced severe impacts of reduced economic activity to prevent the spread of Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 juga berpengaruh besar terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Realisasi kurs yang digunakan pada laporan keuangan tahun 2020 adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, yakni sebesar Rp14.105,- per USD, yang mana nilai mata uang Rupiah secara aktual menguat dibandingkan dengan kurs asumsi Revisi RKAP 2020, yakni sebesar Rp14.800,- per USD.

The Covid-19 pandemic also significantly affected the rupiah to dollar exchange rate. The exchange rate used in the 2020 financial statements is the middle rate of Bank Indonesia at the reporting date at Rp14,105 per USD, whereas the actual value of the Rupiah currency appreciated compared to the exchange rate assumption in the Revised RKAP 2020 at Rp14,800 per USD. In line with limited public mobility and



Sementara itu sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya Pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat, tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember dicatatkan sebesar 1,68 persen (yoy) dan berada di bawah kisaran sasarannya sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Inflasi tersebut melambat dibandingkan dengan inflasi 2019 sebesar 2,72 persen, melanjutkan tren penurunan sejak 2017.

Meski kondisi makroekonomi global dan nasional belum sepenuhnya kondusif, hal tersebut tak menyurutkan komitmen IPC sebagai salah satu penyelenggara usaha pelabuhan milik negara, yang segmen usahanya antara lain pelayanan jasa barang, pelayanan terminal dan pelayanan terminal petikemas, untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan meningkatkan kinerja sehingga kian memperbesar andilnya dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional.

IPC terus berupaya untuk bersikap optimis menghadapi berbagai tantangan yang hadir karena tahun 2020 merupakan momentum besar bagi IPC dalam mencapai visi misi menjadi pelabuhan kelas dunia (*World Class Port*). Sesuai *Corporate Roadmap* tahun 2020 – 2024 yang telah ditentukan, tahun 2020 menjadi awal dari fase “Stabilisasi Bisnis” yang akan dilakukan. Dalam hal ini, aspek Operasional dan Komersial yang Andal difokuskan pada lingkungan kerja yang sehat dan aman, peningkatan proses bisnis, pengoptimalan pendapatan dan efektivitas biaya, peningkatan kapabilitas digital, dan pengoptimalan investasi untuk penciptaan nilai melalui belanja modal.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

PENILAIAN ATAS KINERJA SECARA UMUM

Sepanjang tahun 2020, IPC menghadapi beragam tantangan yang menyebabkan penurunan *throughput* di seluruh Cabang dan Anak Perusahaan, pembatalan beberapa proyek strategis seperti akuisisi PT KBS dan pengembangan properti di lahan *idle*, perpindahan beberapa jenis komoditas cargo ke terminal pesaing dikarenakan adanya tarif yang lebih murah, serta tertundanya rencana penyesuaian tarif pada beberapa layanan jasa kepelabuhanan karena kondisi perekonomian yang lebih stabil, menjadi kendala yang sangat memengaruhi upaya IPC dalam mencapai pendapatan usaha.

Namun demikian Dewan Komisaris mengapresiasi langkah strategis Direksi dalam mengupayakan tercapainya target pendapatan usaha sesuai RKAP 2020, di antaranya dengan berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan

the Government’s efforts to reduce energy prices to boost people’s purchasing power, the December Consumer Price Index (CPI) inflation rate was recorded at 1.68 percent (yoy), below the target range of 3.0 ± 1 percent. This inflation slowed down compared to 2019 inflation at 2.72 percent, continuing a downward trend since 2017.

Despite unfavorable global and national macroeconomic conditions, IPC held its commitment as a state-owned port operator, of which business segments include cargo services, terminal services, and container terminal services, to delivering added value to shareholders by improving performance and increasing its participation in supporting national economic growth.

IPC remained optimistic in facing various challenges as the year 2020 was a great momentum for IPC in achieving its vision and mission of becoming a World Class Port. In accordance with the established Corporate Roadmap for 2020-2024, the year 2020 is the beginning of the “Business Stabilization” phase that will follow. On this matter, Reliable Operational and Commercial aspect is focused on a healthy and safe work environment, business process improvement, revenue optimization and cost effectiveness, digital capability enhancement, and investment optimization for value creation through capital expenditure

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

ASSESSMENT OF GENERAL PERFORMANCE

Throughout 2020, IPC we faced numerous challenges that reduced throughput in all Branches and Subsidiaries, the cancellation of several strategic projects, such as the acquisition of PT KBS and property development on idle land, the shift of several types of cargo commodities to competitor terminals due to cheaper rates, and delayed rate adjustment plan for several port services that await more stable economic condition. These challenges became the obstacles that greatly affected IPC’s efforts to achieve operating revenues.

Nevertheless, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors’ strategic steps in striving to achieve the targeted operating revenues based on the 2020 RKAP, including coordinating and establishing good relationships

stakeholder (pelanggan, asosiasi dan regulator), pemberian relaksasi berupa insentif tarif pelayanan jasa kapal kepada beberapa *customer* terbesar, melakukan pemasaran intensif atas aset *idle* dan yang belum optimal, melakukan perpanjangan kerja sama dengan mitra dan penajakan dengan mitra-mitra baru, serta pelaksanaan program *revenue enhancement* di beberapa Anak Perusahaan.

Keberhasilan IPC dalam mempertahankan kinerja yang baik juga terlihat dalam pencapaian target *Key Performance Indicators (KPI)* yang mana sedikit mengalami perubahan format pada 2020, sesuai salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara pada *item* perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Untuk tahun 2020, IPC berhasil merealisasikan skor keseluruhan sebesar 103,43 persen dari jumlah maksimal 110 persen, dengan rincian sebagai berikut:

- Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia mencapai target, yakni 42,55 dari target 42,00.
- Perspektif Inovasi Model Bisnis mencapai target, yakni 23,38 dari target 22,00.
- Perspektif Kepemimpinan Teknologi mencapai target, yakni 6,00 dari target 6,00.
- Perspektif Pengembangan Investasi mencapai target, yakni 10,61 dari target 10,00.
- Perspektif Pengembangan Talenta mencapai target, yakni 20,89 dari target 20,00.

Berdasarkan pencapaian KPI tahun 2020 tersebut, 5 (lima) perspektif dapat mencapai target. Perhitungan skor KPI ini dihitung berdasarkan capaian KPI terhadap target revisi RKAP 2020 dan nilai maksimal capaian KPI di setiap perspektif yaitu 110 persen. Apabila di-*breakdown* untuk tiap indikator kinerja dalam 1 perspektif, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu KPI PKBL. Hal tersebut dikarenakan oleh rendahnya efektivitas Program Kemitraan dan Kolektabilitas Dana Program Kemitraan akibat penyaluran hibah kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ditunda oleh Kementerian BUMN serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beralihnya status pinjaman mitra binaan dari lancar menjadi diragukan.

Sementara itu dari segi Tingkat Kesehatan Perusahaan, IPC juga tercatat masuk ke dalam kategori perusahaan "SEHAT" dengan nilai "A" dengan skor 77,50. Meski belum mampu mencapai target Revisi RKAP 2020 sebesar 78,00, namun Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dan jajaran

with stakeholders (customers, associations, and regulators), providing relaxation in the form of incentives for ship service rates to several key customers, intensive marketing of idle and suboptimal assets, extending cooperation with partners and exploring new partners, and implementing revenue enhancement program in several subsidiaries.

IPC's ability in maintaining good performance is also evident in the achievement of Key Performance Indicators (KPI) targets, of which format slightly changed in 2020 in accordance with the copy of the Minister of SOEs Regulation Number: PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contract and Annual Management Contract for the Board of Directors of State-Owned Enterprises in item of the perspective of Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development. In 2020, IPC managed to reach an overall score of 103.43 percent from a maximum of 110 percent with the following details:

- Economic and Social Value for Indonesia Perspective reached the target at 42.55 out of 42.00.
- Business Model Innovation Perspective reached the target at 23.38 out of 22.00.
- Technology Leadership Perspective reached the target at 6.00 out of 6.00.
- Investment Development Perspective reached the target at 10.61 out of 10.00.
- Talent Development Perspective reached the target at 20.89 out of 20.00.

Based on the 2020 KPI achievement, the 5 (five) perspectives reached the target. The KPI score was calculated based on the KPI achievement compared to the revised RKAP 2020 target, whereas the maximum value for KPI achievement in each perspective is 110 percent. In the breakdown of performance indicators of each perspective, there was 1 performance indicator that did not achieve the target, namely the PKBL KPI. This was due to low effectiveness of the Partnership Program and the Collectability of Partnership Program Funds due to postponed disbursement of grants to PT Permodalan Nasional Madani (Persero) by the Ministry of SOEs as well as the Covid-19 pandemic which caused a change in loan status of the fostered partners from current to doubtful.

Meanwhile, in terms of Company Soundness, IPC was also categorized as a "SOUND" company with an "A" score at a value of 77.50. Although the Company has not reached the target in Revised RKAP 2020 at 78.00, the Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of



manajemen untuk menjaga agar aspek Keuangan dan Operasional tetap berada dalam tataran yang positif.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi keberhasilan penerapan sistem sistemisasi dan menggunakan aplikasi digital dalam mendukung kegiatan di sisi laut dan sisi darat yang mencakup terminal pelabuhan, pergudangan serta area pendukung lainnya. Di sisi laut, Perseroan memanfaatkan teknologi *inaportnet* serta aplikasi digital lain seperti VMS, VTS, MOS, SIMOP untuk aktivitas labuh, kapal pandu, kapal tunda, kepil dan tambat. Sementara itu, di sisi terminal Perseroan telah mengembangkan aplikasi TOS, NPK TOS, dan *Car Terminal Operating System* untuk kegiatan bongkar muat serta pemindahan barang. Sedangkan di area pendukung, IPC telah memanfaatkan aplikasi *Behandle Operating System*, *Warehouse Operating System* serta *Autogate System*. Dalam mendukung kemudahan proses bagi pengguna jasa pelabuhan, IPC telah memperkenalkan *platform E-service* yang memudahkan pelayanan secara *online*, antara lain registrasi, *booking*, *billing*, *tracking*, pembayaran, dan pengaduan pelanggan (*e-care*).

Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, IPC terus meningkatkan pembangunan proyek-proyek strategis. Hal itu sejalan dengan keinginan Pemerintah di masa depan untuk mengembangkan *Transshipment Port* di Pelabuhan Tanjung Priok yang diintegrasikan dengan metode pengiriman barang dari pelabuhan-pelabuhan lainnya di Nusantara yang memungkinkan dilakukannya *transshipment*.

PENILAIAN ATAS KINERJA OPERASIONAL

Secara keseluruhan, kami mengapresiasi pencapaian kinerja operasional Perseroan di tahun 2020. Arus kapal dan arus peti kemas berhasil terealisasi lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam Revisi RKAP tahun 2020. Arus kapal terealisasi sebesar 178.41 juta GT atau 1,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020 sebesar 175.99 juta GT. Hal tersebut disebabkan oleh mulai normalnya kunjungan kapal luar negeri terutama kapal-kapal yang berasal dari China serta meningkatnya trafik kapal dengan muatan petikemas di beberapa cabang seperti Tanjung Priok, Panjang, Palembang, dan Teluk Bayur.

Sementara itu, arus Petikemas berhasil terealisasi sebesar 6,92 juta TEUs atau 0,97 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020 sebesar 6,86 juta TEUs. Hal ini disebabkan adanya kenaikan arus peti kemas di KSO TPK Koja dan PT IPC TPK yang dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekspor impor sebagai dampak mulai dibukanya perdagangan di beberapa negara.

Directors and management to keep the Financial and Operational aspects at a positive level.

The Board of Commissioners also appreciates the success in the implementation of systemization and digital applications to support activities on the sea and land, which include port terminal, warehouse, and other supporting areas. On sea, the Company utilized *inaportnet* technology as well as other digital applications such as VMS, VTS, MOS, SIMOP for mooring activities, pilot boats, tugboats, kepil, and mooring. In the terminals, the Company developed TOS, NPK TOS, and *Car Terminal Operating System* applications for loading and unloading activities and cargo transportation. Meanwhile, in the support area, IPC utilized *Behandle Operating System*, *Warehouse Operating System*, and *Autogate System* applications. To provide easy process for port service users, IPC introduced an *E-service platform* that facilitates online services, including registration, booking, billing, tracking, payment, and customer complaints (*e-care*).

To support sustainable growth, IPC continued the development of strategic projects. This in line with the Government's vision in the future to develop a *Transshipment Port* at Tanjung Priok Port which is integrated with cargo shipping methods from other ports in the Indonesian archipelago that enables *transshipment*.

ASSESSMENT OF OPERATIONAL PERFORMANCE

Overall, we appreciate the achievement of the Company's operational performance in 2020. The realization of vessel and container flows was higher than the target set in the Revised RKAP for 2020. Vessel flow was realized at 178.41 million GT or 1.38 percent higher than the Revised RKAP 2020 at 175.99 million GT. This was due to the beginning recovery of normal ship calls by foreign ships, especially ships originating from China, as well as the increase in ship traffic with container cargo in several branches such as Tanjung Priok, Panjang, Palembang and Teluk Bayur.

Meanwhile, container flow was realized at 6.92 million TEUs or 0.97 percent higher than the Revised RKAP 2020 at 6.86 million TEUs. This was due to an increase in container flow at TPK Koja JO and PT IPC TPK, which was influenced by the increase in export-import activities as a result of the opening of trade in several countries.

Meski demikian, realisasi arus barang dan arus penumpang di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan target dalam Revisi RKAP tahun 2020. Pencapaian arus barang yang belum optimal di tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan *General Cargo* pada kegiatan impor terutama di PT PTP dan Curah Kering, sedangkan untuk arus penumpang disebabkan oleh adanya himbauan Pemerintah untuk tidak bepergian selama masa pandemi dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

PENILAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi pendapatan usaha dan EBITDA pada tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar Rp10.453,61 miliar dan Rp3.123,76 miliar. Pencapaian tersebut berhasil terealisasi di atas target revisi RKAP tahun 2020, masing-masing sebesar 1,33 persen dan 4,00 persen. Terealisasinya pendapatan usaha dan EBITDA dari target Revisi RKAP 2020 disebabkan oleh realisasi pendapatan dari jasa kapal, TBAL, rupa-rupa dan terminal peti kemas yang berhasil tercapai dengan optimal dari target Revisi RKAP 2020. Meski demikian, terdapat pendapatan usaha yang terealisasi di bawah Revisi RKAP 2020, yaitu pendapatan jasa barang; pendapatan jasa alat dan pendapatan terminal akibat turunnya aktivitas impor. Kami berharap agar hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja di tahun depan.

Di sisi lain, realisasi laba bersih juga mampu melampaui target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp561,53 miliar menjadi Rp1.156,79 miliar di tahun 2020. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak sepenuhnya berasal dari kegiatan utama Perseroan, namun diperoleh dari pengembalian pajak. Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Komisaris berharap agar Manajemen IPC dapat meningkatkan efisiensi biaya, terutama biaya yang berada dalam kendali Manajemen sebagai langkahantisipasi masih berlangsungnya dampak pandemi Covid-19; mengimplementasikan *cash management system* dan mengintensifkan penagihan piutang usaha mitra kerja; serta menerapkan perencanaan pajak yang baik termasuk mitigasi risikonya.

Selain itu dalam rangka menunjang pencapaian laba, Manajemen Perseroan perlu melakukan kajian terhadap Anak Perusahaan yang kelangsungan usahanya terganggu serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Induk Perusahaan (IPC), Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan.

However, the realization of cargo and passenger flows in 2020 was lower than the target in the Revised RKAP for 2020. The sub-optimal flow of cargo in 2020 was influenced by the decline in General Cargo in import activities, especially in PT PTP and Dry Bulk, whereas the decline in passenger flow was caused by the Government's advice not to travel during the pandemic in order to break the chain of Covid-19 transmission.

ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE

In terms of financial performance, realized operating revenues and EBITDA in 2020 were recorded at Rp10,453.61 billion and Rp3,123.76 billion, respectively. This achievement exceeded the revised RKAP target for 2020 by 1.33 percent and 4.00 percent, respectively. The realization of operating revenues and EBITDA compared to the Revised RKAP 2020 target was attributable to optimum revenues from vessel services, TBAL, miscellaneous, and container terminals with regard to the Revised RKAP 2020 target. However, there were operating revenues that fell below the Revised RKAP 2020 target, namely revenues from cargo services, equipment services, and terminal due to lower import activities. We hope that this can be evaluated for the performance in the next year.

On the other hand, the realization of net profit also exceeded the Revised RKAP 2020 target of Rp561.53 billion at Rp1,156.79 billion in 2020. However, this achievement did not originate entirely from the main activities of the Company, but obtained from tax returns. In response to this condition, the Board of Commissioners hopes that IPC Management can improve cost efficiency, especially costs that are under the Management's control, as a measure to anticipate the ongoing impact of the Covid-19 pandemic; implement cash management system and intensify the collection of business partners' accounts receivables; and implement good tax planning which includes risk mitigation.

To support profit achievement, the Company's management also needs to review Subsidiaries with disrupted business continuity and improve the efficiency and effectiveness of Corporate Governance implementation at the Parent Company (IPC), Port Branches, and Subsidiaries.



PENILAIAN ATAS KINERJA INVESTASI

Dewan Komisaris menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kinerja investasi masih belum mampu tercapai dengan optimal dari target. Pada tahun 2020, realisasi investasi dan penyertaan modal tercatat sebesar Rp2.980,67 miliar atau hanya tercapai sebesar 86,42 persen dari target Revisi RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya pembangunan terminal Kijing dan pembangunan menara maritim Indonesia.

Berkaca pada pencapaian kinerja investasi dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Komisaris akan terus memantau dan mendorong pencapaian investasi untuk beberapa tahun ke depan. Kami juga meminta agar persiapan untuk pelaksanaan investasi tahun 2021 dapat dilaksanakan sebaik mungkin agar dapat berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Jajaran Direksi dan Manajemen IPC telah menyusun strategi bisnis sebagai acuan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional di bidang jasa kepelabuhanan. Terdapat 2 (dua) jenis strategi bisnis yang disusun, yaitu strategi bisnis jangka panjang yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan strategi bisnis jangka pendek yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Guna memastikan bahwa seluruh strategi yang telah dijalankan oleh IPC berjalan efektif dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris memberikan beberapa evaluasi/arahan/tanggapan/persetujuan, di antaranya:

1. Terkait Persetujuan RJPP

Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah RJPP 2020-2024 Perubahan melalui pembahasan dengan Direksi tanggal 28 September 2020. Dari telaah tersebut, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan masukan secara garis besar agar Direksi:

- Memperhatikan perubahan situasi eksternal terkait dengan *logistics ecosystem* yang berpengaruh pada visi dan misi Perseroan.
- Mengantisipasi pengaruh rencana pembentukan *cluster* pelabuhan terhadap hak dan kewajiban Perseroan.
- Memastikan rencana transformasi dan restrukturisasi Anak Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi Anak Perusahaan.

ASSESSMENT OF INVESTMENT PERFORMANCE

The Board of Commissioners highlighted that in recent years, investment performance has not been able to reach its target optimally. In 2020, realization of investment and equity participation was recorded at Rp2,980.67 billion or only 86.42 percent of the Revised RKAP 2020 target. This was due to unrealized construction of Kijing Terminal and the Indonesian maritime tower.

Based on the investment performance in recent years, the Board of Commissioners will continue to monitor and encourage investment in the next few years. We also encourage that the preparation for investment in 2021 be carried out as well as possible to reach better achievement than the previous year.

SUPERVISION OF CORPORATE STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Directors and Management of IPC have formulated business strategies as a reference for the Company in carrying out operational activities in the port services sector. There are 2 (two) types of business strategies, namely long-term business strategy stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the short-term business strategy stipulated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

To ensure that all strategies implemented by IPC are running effectively and in accordance with the vision, mission and objectives of the Company as well as directions from the Shareholders, the Board of Commissioners provided evaluations/directions/responses/approvals as follows:

1. Regarding RJPP Approval

The Board of Commissioners has studied and reviewed RJPP 2020-2024 Amendments through discussions with the Board of Directors on September 28, 2020. From this review, the Board of Commissioners provided a summary of opinions and input for the Board of Directors to:

- Pay attention to changes in the external situation related to the logistics ecosystem that affect the Company's vision and mission.
- Anticipate the effect of the planned port cluster formation on the rights and obligations of the Company.
- Ensure that the plan of Subsidiaries transformation and restructuring can improve the performance and contribution of the Subsidiaries.

- d) Memprioritaskan kebijakan Perseroan dalam investasi tahun 2020-2024 pada investasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kinerja Perseroan.
- e) Memperhatikan strategi *cluster* laut Kementerian BUMN, penyelarasan *strategic initiative* Perseroan dengan Lima Program Prioritas Kementerian BUMN.
- f) Menggunakan asumsi yang rasional berdasarkan *update* kondisi internal dan eksternal untuk Menyusun proyeksi dalam penyusunan proyeksi operasi dan keuangan sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Direksi juga telah menyusun RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan dalam rangka menyesuaikan strategi bisnis Perseroan dengan kondisi bisnis di era *New Normal* akibat adanya Pandemi Covid-19. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui Surat Nomor: 07/DK/PI.II/I-2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan memberikan tanggapan dan masukan agar Direksi:

- a) Menyesuaikan RJPP Tahun 2020-2024 dengan hasil Rapat Pembahasan Tahun Buku 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 18 Januari 2021 di Kementerian BUMN.
- b) Melakukan pengelolaan arus kas dengan baik dalam pendanaan investasi (*capital expenditure*).

2. Terkait Evaluasi Usulan Revisi RKAP 2020

Sehubungan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 dan Surat Wakil Menteri BUMN II No. 5-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, yang pada pokoknya menyampaikan agar penyusunan revisi RKAP 2020 mempertimbangkan inisiatif penghematan biaya, inisiatif optimalisasi *capital expenditure*, dan mengedepankan prinsip *financial sustainability* serta mengacu pada asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, Perseroan menyusun Revisi RKAP Tahun 2020. Evaluasi usulan rencana kerja dan target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2020 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli, 5 Agustus, 12 Agustus 2020, rapat koordinasi dengan Direksi, dan penyampaian surat mengenai tanggapan atas usulan perubahan RKAP Tahun 2020 kepada Direksi melalui surat Nomor 52/DK/PI.II/VIII-

- d) Prioritize the Company's investment policies in 2020-2024 on investments that have a direct impact on increasing the Company's revenue and performance.
- e) Take into account the maritime cluster strategy of the Ministry of SOEs, align the Company's strategic initiative with the Five Priority Programs of the Ministry of SOEs.
- f) Use rational assumptions based on updates of internal and external conditions to prepare operational and financial projections as a result of the Covid-19 Pandemic.

In light of the Covid-19 Pandemic, the Board of Directors has also prepared RJPP 2020-2024 Amendments in order to adjust the Company's business strategies to the business conditions in the New Normal era due to the Covid-19 Pandemic. The Board of Commissioners has approved the Draft of 2020-2024 RJPP Amendment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Letter Number: 07/DK/PI.II/I-2021 dated January 29, 2021, by providing feedback and input for the Board of Directors to:

- a) Adjust the 2020-2024 RJPP with the results of the 2021 Fiscal Year Discussion Meeting of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on January 18, 2021 at the Ministry of SOEs.
- b) Perform proper cash flow management in investment funding (*capital expenditure*).

2. Regarding Evaluation of the Proposed Revision to 2020 RKAP

Related to the impact of the Covid-19 pandemic and the Letter of the Deputy Minister of SOEs II No. 5-46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding the Amendment to the 2020 RKAP of SOEs supervised by the Deputy Minister of SOEs II, which basically states that the preparation of 2020 RKAP revision shall consider cost-saving initiatives, initiatives to optimize capital expenditure, and prioritize the principles of financial sustainability and refer to the assumptions set by the Ministry of SOEs, the Company prepared the Revised RKAP for 2020. Evaluation of the proposed work plan and targets of 2020 as stated in the 2020 RKAP has been carried out by the Board of Commissioners through discussions at the Board of Commissioners internal meeting on July 15, August 5, and 12 August 2020, coordination meeting with the Board of Directors, and submission of a letter regarding the response to the proposed changes to the 2020 RKAP to the Board of Directors through letter Number 52/



2020 tanggal 5 Agustus 2020. Beberapa hal yang menjadi catatan serta pendapat dan saran Dewan Komisaris terkait usulan perubahan RKAP Tahun 2020:

- a) Untuk mencapai target laba Perseroan tahun 2020, Direksi disarankan agar meningkatkan efisiensi biaya, khususnya biaya yang berada dalam kendali manajemen; mempercepat implementasi *cost accounting* agar biaya dapat dikendalikan dengan baik; dan menerapkan perencanaan pajak dengan baik.
- b) Direksi perlu memprioritaskan realisasi rencana investasi yang segera menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan.
- c) Terkait rencana aksi korporasi pembelian saham PT CTP dan PT PP Properti, Direksi agar tetap mengacu kepada Surat Wakil Menteri BUMN II Nomor: S-46/Wk2.MBU/06/2020.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan pendapat dan saran kepada Direksi terkait optimalisasi kinerja di tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi kinerja di tahun sebelumnya, antara lain:

1. Melakukan optimalisasi usaha eksisting serta pengembangan usaha baru kepelabuhanan dan pendukungnya sehingga pendapatan dari kegiatan usaha pokok dapat terus meningkat.
2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk meningkatkan pendapatan serta melakukan efisiensi biaya perusahaan.
3. Meningkatkan optimalisasi kinerja anak perusahaan, melalui perluasan pangsa pasar serta meningkatkan kemandirian, sehingga tidak bergantung pada kegiatan usaha di induk perusahaan.
4. Meningkatkan pendapatan dari kegiatan operasional Cabang Perusahaan melalui perluasan pangsa pasar dan mempertahankan pelanggan eksisting agar tidak berpindah ke operator lain.
5. Memastikan implementasi *roadmap* teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya digitalisasi pada *back office* dengan penerapan ERP agar dapat berjalan secara komprehensif di semua level Perusahaan.
6. Meningkatkan mutu pelayanan melalui percepatan implementasi program-program yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan antara lain melalui penyediaan *CFS Center*, *DO Online*, *Auto Gate System*, dan Pengembangan *Digital Port* baik di kantor pusat, cabang, maupun anak perusahaan

DK/PI.II/VIII-2020 dated August 5, 2020. Opinions and suggestions from the Board of Commissioners regarding the proposed changes to the 2020 RKAP:

- a) In order to achieve the Company's profit target for 2020, the Board of Directors is advised to increase cost efficiency, particularly costs that are under the management's control; accelerate the implementation of cost accounting so as to properly control costs; and implement tax planning properly.
- b) The Board of Directors shall prioritize the realization of investment plans that will immediately generate added value for the Company.
- c) Regarding the corporate action plan to purchase shares of PT CTP and PT PP Properti, the Board of Directors shall refer to the Letter of the Deputy Minister of SOEs II Number: S-46/Wk2.MBU/06/2020.

In addition, the Board of Commissioners also provided opinions and suggestions to the Board of Directors regarding performance optimization in 2020 based on the results of performance evaluation in the previous year, including:

1. Optimizing existing businesses and developing new businesses at ports and supporting businesses in order to continuously increase revenue from main business activities.
2. Improving the optimization of company assets utilization to increase revenue and implement cost efficiency.
3. Improving the optimization of subsidiaries performance by expanding market share and increasing independence, so that they do not depend on business activities in the parent company.
4. Increasing revenue from operations of the Company's branches by expanding market share and keeping existing customers from shifting to other operators.
5. Ensuring the implementation of the information technology roadmap in the Company's operational activities, especially digitalization at the back office with ERP implementation so that it can run comprehensively at all levels of the Company.
6. Improving service quality by accelerating the implementation of programs oriented towards improving service to customers, including the provision of CFS Center, DO Online, Auto Gate System, and Digital Port Development at the head office, branches, and subsidiaries.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Memperbaiki perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga ke arah yang lebih menguntungkan Perusahaan dan membuka kemungkinan dikelola sendiri apabila perjanjian telah berakhir.</p> <p>8. Melakukan pengelolaan perpajakan dengan optimal melalui <i>tax planning</i> yang baik.</p> <p>9. Mempercepat pelaksanaan investasi khususnya yang berada di bawah kendali penuh Perusahaan, antara lain investasi non strategis.</p> <p>10. Mempercepat penerapan SOP pengadaan barang dan jasa serta penerapan <i>e-procurement</i> yang dapat mendukung pelaksanaan investasi perusahaan.</p> <p>11. Memperbaiki proses bisnis pengambilan keputusan pelaksanaan investasi dengan memperkuat <i>feasibility study</i> dan pemetaan risikonya.</p> <p>12. Memperbaiki sistem manajemen proyek dengan pengawasan yang cukup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menanganinya.</p> <p>13. Meminta komitmen dari seluruh pimpinan unit Perseroan untuk menyelesaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang bersifat eksisting, baik dari pemeriksa internal dan eksternal, dan menerapkan <i>reward and punishment</i> yang dapat mendorong percepatan penyelesaiannya.</p> | <p>7. Improving cooperation agreements with third parties to be more profitable for the Company and open up the possibility of self-management when the agreement ended.</p> <p>8. Performing optimal tax management through proper tax planning.</p> <p>9. Accelerating the implementation of investments, especially those under full control of the Company, including non-strategic investments.</p> <p>10. Accelerating the implementation of SOP for goods and services procurement and the application of e-procurement that can support the implementation of company investments.</p> <p>11. Improving business process in decision-making for investments by strengthening feasibility study and risk mapping.</p> <p>12. Improving project management system through adequate supervision and improvement of the quality of human capital in charge of it.</p> <p>13. Requesting commitment from all unit leaders of the Company to resolve existing audit findings, both from internal and external auditors, and implementing rewards and punishments that can encourage the acceleration of its completion.</p> |
|---|---|

Langkah pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris Berikut ini adalah rincian tanggal pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020:

Supervision measures on the implementation of the Company's strategy were also carried out through work visits with the Supporting Organs of the Board of Commissioners. The dates of the work visits by the Board of Commissioners throughout 2020 are as follows:

No.	Tanggal / Date	Tujuan Kunjungan Kerja / Work Visit Destination	Kegiatan / Activity
1.	24 Februari 2020 / February 24, 2020	Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	Melaksanakan cek fisik penghapusan aset di Cabang Pelabuhan Pontianak / Physical examination for asset write-off at Pontianak Port Branch
2.	28 Februari 2020 / February 28, 2020	Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	Melaksanakan inventarisasi aset di Cabang Pelabuhan Banten pada tanggal 28 Februari 2020 / Asset inventory at Banten Port Branch on February 28, 2020
3.	25-26 Juni 2020 / June 25-26, 2020	Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Harbor Branch	Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk monitoring dan evaluasi Cabang Pelabuhan Cirebon tanggal 25 s.d 26 Juni 2020 / Implementing the 2020 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Cirebon Port Branch from June 25 to 26, 2020
4.	6 Juli 2020 / July 6, 2020	Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk monitoring dan evaluasi Cabang Pelabuhan Banten tanggal 6 Juli 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Banten Port Branch on July 6, 2020
5.	8 Juli 2020 / July 8, 2020	Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Harbor Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk monitoring dan evaluasi Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 8 Juli 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Sunda Kelapa Port Branch on July 8, 2020
6.	9 Juli 2020 / July 9, 2020	Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Pontianak / Write-off of Fixed Assets at Pontianak Port Branch
7.	27 Juli 2020 / July 27, 2020	Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Panjang / Write-off of Fixed Assets at Panjang Port Branch



No.	Tanggal / Date	Tujuan Kunjungan Kerja / Work Visit Destination	Kegiatan / Activity
8.	3 Agustus 2020 / August 3, 2020	Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Write-off of Fixed Assets at Tanjung Pandan Port Branch
9.	6 Agustus 2020 / August 6, 2020	Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Write-off of Fixed Assets at Pangkal Balam Port Branch
10.	6 Agustus 2020 / August 6, 2020	Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk monitoring dan evaluasi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 6 Agustus 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Tanjung Priok Port Branch on August 6, 2020

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Pemberian arahan kepada Direksi dilakukan dengan beberapa mekanisme, antara lain melalui pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Sepanjang 2020, Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris juga mengundang jajaran Direksi untuk hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung sebanyak 4 (empat) kali, dengan uraian sebagai berikut:

FREQUENCY AND MEANS OF ADVICE PROVISION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Provision of directives to the Board of Directors was carried out through several mechanisms, including Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Strategic Issues Discussion Meeting, as well as evaluation, direction, response, and approval mechanisms. Throughout 2020, Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 12 times. The meetings discussed periodic company performance, reports from each Directorate, follow-up to previous meetings, and other agendas.

During 2020, the Board of Commissioners also invited the Board of Directors to attend internal meetings of the Board of Commissioners and its Supporting Organs 4 (four) times, with the following description:

No.	Tanggal / Date	Direksi yang Diundang / Invited Directors	Agenda
1.	8 April 2020 / April 8, 2020	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Keuangan Direktur SDM dan Umum President Director Vice President Director Technical Director Finance Director HC and General Affairs Director	1) Pembahasan Rencana Perubahan Struktur Organisasi; 2) Pembahasan Rencana Penyertaan Modal di PT RSP; 3) Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Proyek Kalibaru. 1) Discussion of Plan of Organizational Structure Change; 2) Discussion on the Equity Participation Plan in PT RSP; 3) Discussion on the completion of Kalibaru Project Physical Work.
2.	22-23 April 2020 / April 22-23, 2020	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Komersial Direktur Teknik Direktur Operasi Direktur Keuangan Direktur SDM dan Umum Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Direktur Anak Perusahaan President Director Vice President Director Commercial Director Technical Director Operations Director Finance Director HC and General Affairs Director Business Transformation and Development Director Directors of Subsidiaries	Wawancara Direksi / Interview of Directors

No.	Tanggal / Date	Direksi yang Diundang / Invited Directors	Agenda
3.	17 Juni 2020 / June 17, 2020	Direktur Keuangan / Finance Director	Pemaparan perhitungan pembagian laba, perhitungan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta pembahasan tanggapan atas Laporan Audit Tahun Buku 2019. / Presentation of profit sharing calculations, calculation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020, as well as discussion of responses to the Audit Report for the 2019 Fiscal Year.
4.	12 Agustus 2020 / August 12, 2020	Direktur Utama Direktur SDM dan Umum Direktur Keuangan President Director HC and General Affairs Director Finance Director	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan Direktur Utama atas Pengangkatan Direktur Utama Anak Perusahaan; 2) Penjelasan Direktur Utama mengenai rencana investasi dan aksi korporasi dalam revisi RKAP 2020; 3) Pembahasan Laporan Manajemen Semester I 2020; 4) Pembahasan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Pangkal Balam; 5) Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1) Explanation from the President Director on the appointment of the President Director of Subsidiaries; 2) Explanation from the President Director on the plan of investment and corporate action in the revised RKAP 2020; 3) Discussion on the Management Report Semester I 2020; 4) Discussion on the Proposal for Fixed Asset Write-off at Pangkal Balam Port Branch; 5) Other strategic matters.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (tiga) Komite, yang meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai *charter* yang dimiliki.

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu jumlah rapat Komite serta jumlah laporan Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI Dewan Komisaris di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100 persen dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120 persen.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit telah

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out duties to supervise the management of the Company, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners, which consists of 3 (three) Committees, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.

In 2020, the Board of Commissioners considered that the committees under the Board of Commissioners performed their duties and responsibilities properly according to the existing charters.

The performance evaluation of Committees under the Board of Commissioners is part of the KPI of the Board of Commissioners, with the criteria being the number of Committee meetings and the number of Committee reports. Based on performance measurements in the KPI of the Board of Commissioners, all Committees under the Board of Commissioners were able to achieve the KPI targets. All committees performed their duties with 100 percent achievement and held meetings with 120 percent achievement.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners in supervising IPC management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Throughout 2020, the Audit Committee has carried out their duties properly, which is based on the meeting implementation of the Audit Committee by 43 times.



melaksanakan rapat sebanyak 43 kali. Adapun rincian pelaksanaan tugas Komite Audit sepanjang tahun 2020 dapat dilihat dalam bab “Tata Kelola Perusahaan” dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 20 kali. Adapun rincian pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 dapat dilihat dalam bab “Tata Kelola Perusahaan” dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan atau *Enterprise Risk Management* (ERM). Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali. Adapun rincian pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun 2020 dapat dilihat dalam bab “Tata Kelola Perusahaan” dalam Laporan Tahunan ini.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia memberikan tantangan bagi pertumbuhan industri pelabuhan. Namun sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional di tahun 2021 yang cerah, perkembangan industri pelabuhan juga diharapkan akan turut membaik.

Selain didorong oleh pertumbuhan ekonomi global dan nasional, prospek usaha industri pelabuhan juga terbilang masih sangat cerah, terutama mengingat adanya peluang usaha yang dimiliki oleh industri pelabuhan nasional. Beberapa peluang tersebut antara lain industri pelabuhan memiliki peluang pertumbuhan yang luas dari bisnis turunan pelabuhan; potensi ekspansi domestik yang masih terbuka lebar dengan memanfaatkan tren perdagangan positif antar

Details of the implementation of the Audit Committee’s duties throughout 2020 are available in the “Corporate Governance” chapter in this Annual Report.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established formed to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of the Nomination and Remuneration policy of the Board of Directors, Management Team, and employees. Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee has carried out their duties properly, which is based on the meeting implementation of the Nomination and Remuneration Committee by 20 times. Details of the implementation of the Nomination and Remuneration Committee’s duties throughout 2020 are available in the “Corporate Governance” chapter in this Annual Report.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee was established to improve the quality of supervision and provision of advice by the Board of Commissioners on Enterprise Risk Management (ERM). Throughout 2020, the Risk Management Monitoring Committee has carried out their duties properly, which is based on the meeting implementation of the Risk Management Monitoring Committee by 19 times. Details of the implementation of the Risk Management Monitoring Committee’s duties throughout 2020 are available in the “Corporate Governance” chapter in this Annual Report.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS

The Covid-19 pandemic that has been ongoing since March 2020 in Indonesia posed challenges for the growth of the port industry. However, in line with brighter projection of global and national economic growth in 2021, the development of the port industry is also expected to improve.

Apart from being driven by global and national economic growth, the business prospects of the port industry also remains promising with business opportunities in the national port industry. These opportunities include the extensive growth opportunities from port derivative businesses; the great potential for domestic expansion by taking advantage of the positive trend of inter-island trade in Indonesia; digital trends that open up new sectors to enhance business and

pulau di Indonesia; tren digital yang membuka bidang-bidang baru untuk meningkatkan bisnis dan operasi, serta; dukungan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritim yang berpotensi mendukung ekspansi bisnis IPC.

Industri pelabuhan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah berupa penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Dalam RPJMN tersebut dinyatakan bahwa visi Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Selain itu fokus pemerintah untuk mengembangkan konektivitas laut tersebut tentunya dapat memberikan dorongan bagi IPC dalam mengembangkan bisnisnya baik pada 2 (dua) pelabuhan yang ada di area kerjanya, yaitu Tanjung Priok dan Kijing, maupun berkolaborasi dengan pelabuhan lain di luar area kerjanya. Kolaborasi dengan seluruh pelabuhan utama yang ada akan membantu meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global, dan Indonesia diperkirakan akan mengklaim gelar sebagai eksportir terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045.

Direksi Perseroan telah menyusun RKAP yang berisi rencana kerja dan target bisnis Perseroan untuk tahun 2021 mendatang. Dewan Komisaris juga telah mengevaluasi RKAP 2021 melalui pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 27 dan 25 November 2020, rapat koordinasi dengan Direksi, dan penyampaian surat mengenai persetujuan rancangan RKAP kepada Direksi melalui surat Nomor 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan 08/DK/PI.III-2021 tanggal 29 Januari 2021. Dalam rangka pelaksanaan RKAP Tahun 2021, Dewan Komisaris menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target laba Perseroan tahun 2021, Direksi diminta untuk:
 - a. Mengupayakan efisiensi biaya khususnya biaya yang berada dalam kendali manajemen dan mengusahakan agar peningkatan biaya dapat mengakselerasi peningkatan pendapatan (*effectiveness cost*), sebagai langkah antisipasi masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
 - b. Meningkatkan pendapatan dari penggunaan kapasitas yang masih belum maksimal utilitasnya.
 - c. Meningkatkan pangsa pasar perusahaan, dengan mencari peluang baru di luar bisnis reguler Perusahaan.
 - d. Melakukan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang

operations, and; government support for the development of maritime infrastructure that has the potential to support the expansion of IPC's business.

The port industry has the full support from the government in the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) through Presidential Regulation No. 18/2020. The RPJMN states the President's vision of the “Realization of an Advanced Indonesia through Sovereignty, Independence, and Gotong Royong Character”. In addition, the government's focus on developing maritime connectivity encouraged IPC in developing business in the 2 (two) ports in its working area, namely Tanjung Priok and Kijing, as well as collaborating with other ports outside its work area. Collaboration with all major existing ports will help improve Indonesia's position as a key player in the global market. Indonesia is also expected to become the world's 10th largest exporter by 2045. With this positive projection, the Board of Commissioners is confident that IPC will continue to record its best performance in the future.

The Board of Directors of the Company has prepared RKAP which contains the work plan and business targets of the Company for the coming 2021. The Board of Commissioners has also evaluated the 2021 RKAP through discussion in the internal meeting of the Board of Commissioners on November 27 and 25, 2020, coordination meeting with the Board of Directors, and submission of a letter regarding the approval of the draft RKAP to the Board of Directors through letter Number 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020 and 08/DK/PI.III-2021 dated January 29, 2021. In implementing the 2021 RKAP, the Board of Commissioners recommended:

1. To achieve the Company's profit target for 2021, the Board of Directors shall:
 - a. Strive for cost efficiency, especially costs that are under management control, and aim increased costs at accelerating revenues increase (*effectiveness cost*), as a measure to anticipate ongoing Covid-19 pandemic.
 - b. Increase revenues by using capacity that is still not optimally utilized.
 - c. Increase the Company's market share by seeking new opportunities outside of the Company's regular business.
 - d. Make investments that can increase the Company's revenues in the short and long term.



- | | |
|---|---|
| <p>e. Menerapkan perencanaan pajak yang baik termasuk mitigasi risikonya.</p> <p>2. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, Direksi disarankan agar:</p> <p>a. Meningkatkan penerapan manajemen risiko baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan, dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam penilaian risiko Perusahaan terutama yang terkait dengan perubahan lingkungan eksternal.</p> <p>b. Mempercepat penyelesaian permasalahan hukum terutama yang bersifat non-litigasi untuk memberi kepastian terhadap kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>c. Mengkaji terhadap Anak Perusahaan yang kelangsungan usahanya terganggu (<i>going concern</i>).</p> <p>d. Mempercepat implementasi sistem informasi yang mendukung operasional Perusahaan dan meningkatkan <i>maturity level</i> sistem informasi yang ada.</p> <p>e. Segera mengimplementasikan Pasar Digital UMKM sehingga dapat <i>live</i> transaksi pada Triwulan II/2021.</p> <p>f. Selalu menjaga tingkat kesehatan Perusahaan yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN.</p> <p>3. Dalam rangka peningkatan kinerja Anak Perusahaan, Direksi agar melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang lebih baik, serta mempercepat pelaksanaan restrukturisasi anak perusahaan yang berkinerja kurang baik.</p> <p>4. Berupaya untuk merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengarahkan penggunaan dana-dana tersebut sesuai tujuan Perseroan.</p> | <p>e. Implement proper tax planning including its risk mitigation.</p> <p>2. To improve the performance of the Company, the Board of Directors shall:</p> <p>a. Improve risk management implementation at the Head Office, Branch Offices, and Subsidiaries by increasing the human capital capacity in assessing the Company's risks, especially those related to changes in the external environment</p> <p>b. Accelerate the resolution of legal issues, especially non-litigations, to ascertain the Company's business activities.</p> <p>c. Review Subsidiaries with disrupted business continuity (<i>going concern</i>).</p> <p>d. Accelerate the implementation of information system that support the Company's operations and increase the maturity level of existing information system.</p> <p>e. Immediately implement the MSME Digital Market to enable live transactions in Quarter II/2021.</p> <p>f. Maintain the Company soundness level based on the guidelines set by the Ministry of SOEs.</p> <p>3. To improve the performance of Subsidiaries, the Board of Directors shall carry out better coordination, guidance, and supervision, as well as accelerate the restructuring of underperforming subsidiaries.</p> <p>4. Strive to realize the distribution of funds for the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) in accordance with the targets set and direct the use of these funds according to the Company's objectives.</p> |
|---|---|

PANDANGAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam mencapai tujuannya terhadap pertumbuhan dan kelangsungan usaha yang berkelanjutan, IPC senantiasa berupaya membangun dan memelihara kepercayaan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui penerapan *best practices* GCG dan memperkuat budaya tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan IPC. Dewan Komisaris meyakini dengan berpegang penuh pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

VIEW AND ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In achieving its goal of sustainable business growth and continuity, IPC always strives to build and maintain the trust of shareholders and stakeholders by implementing GCG best practices and strengthening good corporate governance culture within the IPC environment. The Board of Commissioners believes that by fully adhering to this commitment, the Company will always follow developments in the best governance practices applicable at the national, regional and international levels that are relevant and meet the needs of the Company.

HASIL IMPLEMENTASI GCG

Komitmen IPC untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh aspek usaha dibuktikan melalui perolehan skor *assessment* GCG Perusahaan yang dilakukan oleh tim asesor internal IPC sebesar 98,73, lebih tinggi dari skor hasil *assessment* pada tahun 2019 sebesar 98,550.

Terdapat beberapa *area of improvement* (Aoi) yang harus dipenuhi baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Tindak lanjut Aoi tersebut dipantau oleh Dewan Komisaris, serta surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Untuk aspek pengujian Dewan Komisaris, terdapat 5 (lima) Aoi yang perlu ditindaklanjuti tahun sebelumnya, dan seluruh Aoi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris pada tahun 2020.

Selain itu pada 2020, seluruh pegawai IPC telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen bersama dalam menerapkan GCG secara optimal, serta berhasil meraih penghargaan sebagai *Indonesia Most Trusted Companies Award 2020* dengan predikat CGPI "Terpercaya" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA.

UPAYA MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG

Dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, sepanjang 2020 IPC telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG yang seluruhnya didasarkan kepada *Roadmap Good Corporate Governance (GCG) 2017 – 2020* yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK. 568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017. Penetapan *Roadmap* GCG IPC bertujuan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur serta sistem GCG secara terukur dan berkesinambungan, sehingga GCG menjadi suatu budaya yang tidak dapat terpisahkan dari setiap pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan. *Roadmap* GCG IPC disusun untuk jangka panjang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan praktik dan sistem GCG di lingkungan Perseroan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan nilai bersama (*shared value*) dengan para pemangku kepentingan.

RESULTS OF GCG IMPLEMENTATION

IPC's commitment to always apply GCG principles in an inclusive and sustainable manner in all business aspects is proven through the Company's GCG assessment score of 98.73 by the IPC internal assessor team, an increase from the assessment result score in 2019 of 98,550.

There were several areas of improvement (Aoi) that must be handled by the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Shareholders. Aoi follow-up was monitored by the Board of Commissioners and letter from the Board of Commissioners to the Board of Directors. In the assessment of Board of Commissioners aspect, there were 5 (five) areas of improvement that need to be followed up in the previous year, all of which have been followed up by the Board of Commissioners in 2020.

In addition, in 2020, all IPC employees signed the Integrity Pact as a joint commitment in implementing GCG optimally, and won the award as the Indonesia Most Trusted Companies Award 2020 with the CGPI predicate of "Trusted" from The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine.

EFFORTS TO STRENGTHEN GCG IMPLEMENTATION

In achieving good and sustainable corporate governance, throughout 2020 IPC has carried out various GCG implementation initiatives which entirely referred to the 2017-2020 Good Corporate Governance (GCG) Roadmap which was approved through the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK. 568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017. The determination of the IPC GCG Roadmap aims to build and develop a measurable and sustainable GCG infrastructure and system, so that GCG develops as a culture inseparable from any operational activities of the Company. The IPC GCG Roadmap is prepared for the long term, so that it can be used as a reference for developing GCG practices and systems within the Company in order to support the achievement of business performance and create shared value with stakeholders.



Untuk memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diterapkan di Perseroan, beberapa hal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain:

1. *Monitoring* dalam tindakan Direksi, seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, penghapusbukuan aset, dan kerja sama aset.
2. Menyampaikan surat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai GCG, antara lain melalui Surat Nomor 75/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 11 November 2020.

PANDANGAN ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

IPC senantiasa berupaya menerapkan manajemen risiko yang tepat dan komprehensif guna membuat perencanaan kinerja operasional yang strategis. Hal tersebut dilakukan agar mampu mendorong IPC lebih siap dalam menangkap peluang usaha yang lebih luas serta mempertahankan kinerja berkelanjutan. IPC meyakini bahwa penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan iklim bisnis perusahaan dapat mendorong kepatuhan terhadap perundang-undangan dan praktik GCG, lebih transparan dan percaya diri dalam pengambilan keputusan serta mengurangi kerugian yang mungkin terjadi dengan mitigasi yang cermat.

Pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan yang dijalankan melalui konsep Pertahanan 3 (tiga) Lapis (*Three Lines of Defense*) bertujuan untuk meningkatkan daya tahan seluruh internal organisasi Perseroan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dewan Komisaris mengapresiasi inovasi yang terus dilakukan Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Satuan Pengawasan Internal dalam pengelolaan risiko.

Sesuai dengan *Corporate Roadmap* IPC, tema tahun 2020 adalah "*Business Stabilization: Commercial and Operational Excellence*". Tema serta target-target Perseroan yang tercantum dalam RJPP dan RKAP tersebut menjadi sasaran dalam menetapkan konteks risiko tahun 2020. Selain sasaran Perseroan, kondisi internal dan eksternal Perusahaan serta aspirasi dari *stakeholder* menjadi bagian dari konteks risiko tahun 2020.

Pada tahun 2020, beberapa program strategis manajemen risiko yakni penyusunan *Business Continuity Management* (BCM) di 5 (lima) cabang pelabuhan, pembuatan *Automatic Risk Early Warning System*, peningkatan *Risk Culture & Awareness* melalui *Risk Champion/Agent Awards* dalam

To ensure the implementation of Good Corporate Governance principles at the Company, the Board of Commissioners carried out the following measures:

1. Monitoring the actions of the Board of Directors, such as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries, asset write-offs, and asset cooperation.
2. Submit letter of direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors regarding GCG, among others through Letter Number 75/DK/PI.II/XI-2020 dated November 11, 2020.

VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT

IPC strives to continuously implement appropriate and comprehensive risk management in order to make strategic operational performance planning. This was done in order to encourage IPC to be more prepared in capturing wider business opportunities and maintaining sustainable performance. IPC believes that risk management that is implemented in accordance with the company's business climate can encourage compliance with laws and GCG practices and make the Company more transparent and confident in adopting decision and reduce possible losses with careful mitigation.

Risk management in the Company's environment carried out through Three Lines of Defense concepts aims to increase resilience of the entire internal organization of the Company against various risk potential. The Board of Commissioners appreciates innovations that the Board of Directors continuously make through the Risk Management Division and the Internal Control Unit Division in risk management.

In accordance with the IPC Corporate Roadmap, the theme for 2020 is "*Business Stabilization: Commercial and Operational Excellence*". The theme and targets of the Company as set forth in the RJPP and RKAP constitute the targets in the determination of risk context for 2020. In addition to the Company's goals, the Company's internal and external conditions as well as the aspirations of stakeholders are part of the 2020 risk context.

In 2020, several strategic risk management programs, namely the preparation of Business Continuity Management (BCM) in 5 (five) port branches, creation of an Automatic Risk Early Warning System, improvement of Risk Culture & Awareness through Risk Champion/Agent Awards in various categories

berbagai kategori telah berjalan efektif dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko IPC secara menyeluruh kepada karyawan IPC.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi keikutsertaan IPC dalam ajang penghargaan risiko yang bertujuan untuk meningkatkan citra dan *value* Perseroan selama tahun 2020. Keikutsertaan tersebut membuahkan hasil dengan perolehan berbagai penghargaan sebagai berikut:

1. TOP GRC 2020

- # 4 Stars : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Pemenang Kategori "*The Most Committed GRC Leader 2020*" : **Arif Suhartono** (Direktur Utama IPC);
- Pemenang Kategori "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*" : **Moermahadi Soerja Djanegara** (Komisaris Utama IPC).

2. GRC Excellence Award 2020

- The Best CEO & GRC Leader 2020 : **Arif Suhartono** (Direktur Utama IPC).

3. GRC Excellence Award 2020

- The Best GRC Overall For Corporate And Performance 2020 (In Logistic Services) : **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**.

PANDANGAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam upaya mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan, penghitungan yang cermat mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif demi memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Komponen utama Sistem Pengendalian Internal IPC terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

Dewan Komisaris dalam hal ini memiliki peran untuk mengarahkan dan mengawasi Direksi dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Perseroan, dimana Direktur Utama sebagai penanggung jawab utama dibantu oleh Direktur lain dan senior manajemen lainnya. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pengawasan

were implemented effectively and able to improve the overall quality of IPC risk management towards IPC employees.

The Board of Commissioners also appreciates IPC's participation in the risk award event which aims to enhance the Company's image and value during 2020. Through this participation, the Company successfully attained various awards as follows:

1. TOP GRC 2020

- # 4 Stars : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Winner in "*The Most Committed GRC Leader 2020*" category : **Arif Suhartono** (IPC President Director);
- Winner in "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*" category: **Moermahadi Soerja Djanegara** (IPC President Commissioner).

2. GRC Excellence Award 2020

- The Best CEO & GRC Leader 2020 : **Arif Suhartono** (IPC President Director).

3. GRC Excellence Award 2020

- The Best GRC Overall For Corporate And Performance 2020 (In Logistic Services) : **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**.

VIEW ON EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

In its effort to achieve the predetermined business objectives, careful calculation of the effectiveness and efficiency in resources management has become one of the Company's main concerns. Therefore, the Company continues to encourage the implementation of a reliable and effective Internal Control System in order to provide confidence to stakeholders that all resources owned can be managed properly in order to achieve the Company's goals. The main components of the IPC Internal Control System consist of five main interrelated elements, namely the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

The Board of Commissioners in this case is responsible for directing and supervising the Board of Directors in the development and implementation of internal control. Management is responsible for developing and implementing the Company's Internal Control System, where the President Director as the main person in charge is assisted by other Directors and other senior management. The responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the Internal



Sistem Pengendalian Internal antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan tata kelola, jalannya tata kelola pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi, terkait dengan manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi upaya Manajemen Perseroan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di tahun 2020 melalui revisi Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal dengan mengacu pada Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 tanggal 29 Desember 2020. Dengan adanya penetapan pedoman baru tersebut, kami berharap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka menggenapi penerapan GCG yang berintegritas, Dewan Komisaris juga memberi perhatian khusus terhadap penerapan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai upaya menciptakan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur dalam menjalankan bisnis Perseroan. Perseroan telah memiliki program WBS yang diberi nama "IPC Bersih", yang merupakan sebuah program nyata dari manajemen Perseroan maupun Anak Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Dengan melaporkan adanya pelanggaran melalui IPC Bersih melalui sarana yang telah disediakan, Insan IPC maupun *stakeholder* lainnya telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan meminimalisasi terjadinya tindakan curang, pencurian, dan korupsi di dalam lingkungan kerja IPC.

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 48 laporan yang masuk ke dalam saluran WBS melalui berbagai jenis kontak, yang mana dari 48 laporan tersebut, 3 laporan di antaranya termasuk dalam indikasi Pelanggaran Kebijakan

Control System include:

1. Supervise governance policies, the course of governance in general, and provide advice to the Board of Directors, related to risk management and internal control;
2. Monitor and ensure that governance, risk management and internal control are implemented in an effective and sustainable manner.

The Board of Commissioners also appreciates the efforts of the Company Management to improve the effectiveness of the Internal Control System in 2020 through the revision of the General Guidelines for Internal Control System with reference to the COSO Framework (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), which has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 dated December 29, 2020. With the establishment of these new guidelines, we hope that Internal Control System implementation in the Company can increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in order to achieve the objectives of the Company, ensure reports that are accurate, reasonable, timely and relevant as the basis for making appropriate and accountable decisions, as well as ensuring that all Company activities are carried out in accordance with the prevailing laws and regulations.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In order to implement GCG with integrity, the Board of Commissioners also pays special attention to the implementation of Whistleblowing System (WBS) as an effort to create a culture of transparency, open communication, and honesty in running the Company's business. The Company already has a WBS program called "IPC Bersih", which is a concrete program from the management of the Company and its subsidiaries to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion. By reporting violations through Clean IPC through the available channel, IPC employees and other stakeholders have helped create a conducive environment and minimize the occurrence of fraudulent acts, theft, and corruption in the IPC work environment.

As of December 31, 2020, there were 48 reports that entered the WBS channel through various types of contacts. 3 out of 48 reports was identified to fall into Indication of Violation of Company Policies and Regulations, while 45 other reports

dan Peraturan Perseroan, sedangkan 45 laporan lainnya merupakan Laporan di Luar Cakupan. Seluruh laporan yang masuk tersebut telah ditangani dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku di Perseroan. Sepanjang tahun 2020, pihak pengelola WBS juga secara berkala melakukan pengujian saluran IPC Bersih setiap satu bulan sekali, dengan hasil bahwa seluruh saluran IPC Bersih, yaitu *WhatsApp*, *SMS*, *email*, telepon, faksimile dan *Website* IPC Bersih, berstatus aktif dan berfungsi dengan baik.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagi IPC, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan perwujudan komitmen yang dibangun untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan *stakeholder* yang relevan. Dalam hal ini, Perseroan berupaya untuk tidak hanya melaksanakan program yang bersifat filantropi namun juga tumbuh bersama *stakeholder* secara menyeluruh di seluruh aspek. Oleh karenanya, perumusan pelaksanaan CSR IPC dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas dan proses bisnis Perseroan.

Pelaksanaan CSR Perseroan dibagi sesuai dengan regulasi yang berlaku, meliputi tanggung jawab terhadap operasi yang adil, tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, tanggung jawab terhadap masyarakat, serta tanggung jawab terhadap pelanggan. Berikut adalah pencapaian program CSR berdasarkan aspek yang telah ditentukan:

- Dari **aspek tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan**, salah satu pencapaian yang berhasil diperoleh Perseroan adalah skor yang cukup memuaskan dari survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja. Untuk tahun 2020, Indeks *Engagement* Pekerja (IEP) secara Korporat (Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan) adalah **4,38** dari skala Likert **5,00** dengan kategori **Sangat Terikat**. Indeks tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yang tercatat sebesar **4,57** dari skala Likert **5,00** dengan kategori **Sangat Terikat**. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Pekerja (IKP) Korporat, pada tahun 2020 tercatat sebesar **4,58** dari skala Likert **5,00** dengan kategori **Sangat Puas**, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang tercatat sebesar **4,51** dari skala Likert **5,00** dengan kategori **Sangat Puas**;

were uncategorized reports. All reports that have been submitted have been handled properly in accordance with the prevailing policies in the Company. Throughout 2020, the WBS management also periodically tested the IPC Bersih channel once a month, and the result was that all IPC Bersih channels, namely *WhatsApp*, *SMS*, *email*, *telephone*, *facsimile* and the *IPC Bersih Website*, were active and functioned properly.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

For IPC, Corporate Social Responsibility (CSR) is a manifestation of the commitment built to contribute to improve the quality of life of the community and relevant stakeholders. In this case, the Company strives to hold not only philanthropic programs but also to grow together with stakeholders as a whole in all aspects. Therefore, the formulation of IPC's CSR implementation is carried out by identifying and reviewing social, economic and environmental impacts resulting from the Company's business activities and processes.

The implementation of the Company's CSR is divided in accordance with applicable regulations, including responsibility for fair operations, responsibility for Manpower and Occupational & Health & Safety (OHS), responsibility for the environment, responsibility towards society, and responsibility towards customers. The following are the achievements of CSR program based on predetermined aspects:

- From **responsibility for employment aspect**, one of the achievements made by the Company is a satisfactory score from the Employee Engagement and Satisfaction survey. In 2020, the Corporate Worker Engagement Index (IEP) (Head Office and 12 Port Branches) scored **4.38** out of **5.00** on a Likert scale in the **Very Engaged** category. This index is lower than that of 2019 which was recorded at **4.57** out of **5.00** on the Likert scale in the **Very Engaged** category. Whereas for the Corporate Worker Satisfaction Index (IKP), in 2020 it was recorded at **4.58** out of **5.00** on the Likert scale in the **Very Satisfied** category, an increase from 2019 which was recorded at **4.51** on the Likert scale of **5.00** in the **Very Satisfied** category;



- Dari **aspek tanggung jawab terhadap K3**, salah satu pencapaian yang berhasil diperoleh Perseroan adalah terealisasinya program pelatihan IPC diselenggarakan sebanyak 159 kali dan diikuti oleh 6.480 Pekerja;
- Dari **aspek tanggung jawab terhadap lingkungan hidup**, pencapaian yang diperoleh Perseroan berkaitan dengan konsep *Green Port*, antara lain program elektrifikasi pada 27 alat bongkar muat berbasis *rail* yang tersebar di Tanjung Priok, Panjang, dan Palembang yang berdampak pada berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil; penerapan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) di Tanjung Priok untuk memurnikan air laut sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti kebutuhan sanitasi, air kapal, dll serta berdampak pada berkurangnya penggunaan air tanah; pemberian izin *Reception Facility* (RF) pada Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, dan Teluk Bayur. Jika ditinjau dari aspek teknis yang memiliki 12 parameter, IPC, khususnya IPC TPK, memperoleh nilai rata-rata 42 persen dari 100 persen. Hal yang perlu menjadi perhatian, terutama pada kualitas air laut serta sedimen serta inisiatif penggunaan energi terbarukan.
- Dari **aspek tanggung jawab terhadap masyarakat**, salah satu pencapaian yang berhasil diperoleh Perseroan adalah Realisasi Dana yang Tersedia Program Kemitraan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp46,07 miliar atau lebih kecil 3,82 persen dari anggaran sampai tahun 2020 sebesar Rp47,91 miliar dan lebih kecil dari realisasi sampai dengan tahun lalu sebesar Rp69,96 miliar. Hal ini dikarenakan adanya penurunan besarnya pengembalian pokok pinjaman yaitu 4,47 persen di bawah anggaran sampai dengan tahun 2020 dan 4,38 persen di bawah realisasi sampai dengan tahun 2019. dan penyaluran dana CSR berdasarkan objek bantuan sebesar Rp12,81 miliar.
- From **the responsibility for OHS aspect**, one of the achievements made by the Company is the realization of IPC training programs that was held 159 times and attended by 6,480 workers;
- From **the responsibility for the environment aspect**, the Company's achievements were related to the Green Port concept, including the electrification program for 27 rail-based loading and unloading equipment spread across Tanjung Priok, Panjang and Palembang, which resulted in reduced use of fossil fuels; application of Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) in Tanjung Priok to purify sea water so that it can be used for non-consumption needs, such as sanitation needs, ship water, etc. and reduce groundwater use; granting Reception Facility (RF) permits at the Ports of Tanjung Priok, Panjang, Palembang, and Teluk Bayur. From the technical aspect which has 12 parameters, IPC, especially IPC TPK, obtained an average value of 42 percent out of 100 percent. Matters requiring attention were the quality of seawater and sediment as well as initiatives for the use of renewable energy.
- From **the responsibility towards society aspect**, one of the achievements made by the Company is the Realization of Funds Available for the Partnership Program, which up to 2020 amounted to Rp46.07 billion or decreased by 3.82 percent compared to 2020 budget amounting to Rp47.91 billion and lower than the realization of up to last year amounting to Rp69.96 billion. This was due to a decrease in the amount of loan principal repayments, namely 4.47 percent below the budget of 2020 and 4.38 percent below the realization of 2019. and the distribution of CSR funds based on the assistance object amounting to Rp12.81 billion.

Selain itu pada tahun 2020 IPC juga melaksanakan kegiatan berkelanjutan, di antaranya IPC Champion Scholarship, IPC Healthy Care, IPC Cinta Lingkungan, IPC Cinta Ramadhan, IPC Berbagi Qurban, IPC Sunatan Masal, IPC Berbagi Sembako Gratis, IPC Cinta Mata Anak dan Pembagian *New Normal Kit*.

In addition, in 2020 IPC also performed continued activities, namely IPC Champion Scholarship, IPC Healthy Care, IPC Love the Environment, IPC Love Ramadhan, IPC Share Qurban, IPC Mass Circumcision, IPC Share Staple Food for FREE, IPC Love Children's Eyes and the Distribution of *New Normal Kit*.

- Dari **aspek tanggung jawab terhadap pelanggan**, salah satu pencapaian yang berhasil diperoleh Perseroan adalah skor indeks survei kepuasan pelanggan tahun 2020 yang mencapai 4,68 (kategori sangat puas). Indeks loyalitas pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga tercatat baik yakni sebesar 4.70 (kategori sangat loyal). Indeks keterikatan/*engagement* adalah 94,97 persen (sangat terikat/*very engaged*). Sedangkan Indeks Ketidakpuasan Pelanggan adalah 0,29 persen (kategori sangat baik).

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020, susunan anggota Dewan Komisaris IPC mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut:

PERIODE 1 JANUARI – 2 MARET 2020

Sejak tanggal 20 Desember 2019, Bapak Tumpak H. Panggabean mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan karena diangkat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan beliau sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan resmi berakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-79/MBU/6/2015 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Komisaris Utama, pada tanggal 2 Januari 2020, Dewan Komisaris Perseroan menggelar rapat internal yang menyepakati penunjukan Bapak Djadmiko untuk melaksanakan fungsi Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditunjuknya Komisaris Utama definitif oleh RUPS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/1-2020 tentang Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Fungsi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

- From **the responsibility to customers aspect**, one of the achievements made by the Company is the customer satisfaction survey index score which in 2020 reached 4.68 (very satisfied category). The customer loyalty index of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was also recorded at 4.70 (very loyal category). The engagement index was 94.97 percent (very engaged). Meanwhile, the Customer Dissatisfaction Index is 0.29 percent (excellent category).

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

During 2020, the composition of members of IPC's Board of Commissioners changed as described below:

PERIOD OF JANUARY 1 - MARCH 2, 2020

Since December 20, 2019, Mr. Tumpak H. Panggabean tendered his resignation from his position as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company because he was appointed as the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (KPK). His position as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company officially ended based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-79/MBU/6/2015 dated March 2, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

To fill the vacancy of the President Commissioner position, on January 2, 2020, the Company's Board of Commissioners held an internal meeting which resolved to appoint Mr. Djadmiko to carry out the function of the Company's President Commissioner until the definitive appointment of President Commissioner by GMS based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/1-2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners to Carry out the Function of the President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.



Komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 1 Januari hingga 2 Maret 2020 berjumlah 6 (enam) orang, dengan uraian sebagai berikut:

The Board of Commissioners composition from January 1 to March 2, 2020 consists of 6 (six) people as described below:

Nama / Name	Jabatan / Position	Pelaksana / Appointed by	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
Djadmiko	Komisaris merangkap Komisaris Utama / Commissioner cum President Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – December 14, 2020 (First Period)
Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 3, 2022
R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period)

PERIODE 2 MARET – 14 DESEMBER 2020

Pada tanggal 2 Maret 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan mengangkat Bapak Moermahadi Soerja Djanegara sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-68/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

PERIOD MARCH 2 - DECEMBER 14, 2020

On March 2, 2020, the Minister of SOE as the sole and controlling shareholder of the Company appointed Mr. Moermahadi Soerja Djanegara as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-68/MBU/03/2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 2 Maret hingga 14 Desember 2020 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan uraian sebagai berikut:

Thus, the composition of the Board of Commissioners for the period March 2 to December 14, 2020 consists of 7 (seven) people, with details as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Pelaksana / Appointed by	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)

Nama / Name	Jabatan / Position	Pelaksana / Appointed by	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 3, 2022 (First Period)
R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Maret 2018 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-26/MBU/01/2018 dated March 22, 2018	22 Maret 2018 – 21 Maret 2023 (Periode Pertama) / March 22, 2018 – March 21, 2023 (First Period)
Djadmiko	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – December 14, 2020 (First Period)

PERIODE 14 – 31 DESEMBER 2020

Pada tanggal 14 Desember 2020, jabatan Bapak Djadmiko sebagai Komisaris Perseroan resmi berakhir. Oleh sebab itu, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan mengangkat Bapak Nurrachman sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan posisi Bapak Djadmiko selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 14 hingga 31 Desember 2020 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan uraian sebagai berikut:

PERIOD OF DECEMBER 14 – 31, 2020

On December 14, 2020, Mr. Djadmiko's position as Commissioner of the Company officially ended. Therefore, the Minister of SOEs as the sole and controlling shareholder of the Company appointed Mr. Nurrachman as the Independent Commissioner of the Company, replacing Mr. Djadmiko as Commissioner of the Company based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020.

Thus, the composition of the Board of Commissioners for the period 14 to December 31, 2020 consists of 7 (seven) people, with details as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Pelaksana / Appointed by	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Komisaris Merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Commissioner cum Secretary of Head of Nomination and Remuneration Committee	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 3, 2022 (First Period)
R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 31, 2023 (First Period)
Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 (Periode Pertama) / December 14, 2020 – December 13, 2025 (First Period)



Seluruh jajaran Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tumpak H. Panggabean dan Bapak Djadmiko atas kontribusi, dedikasi, dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga Perseroan mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik. Kami juga mengucapkan selamat mengemban amanah baru sebagai Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dilantik oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan di tahun 2020.

APRESIASI DAN PENUTUP

Menutup laporan ini, saya mewakili segenap Dewan Komisaris IPC menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga IPC berhasil menutup tahun 2020 dengan pencapaian yang baik.

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh kerja keras dan kolaborasi yang solid oleh Direksi serta seluruh Insan IPC dalam merumuskan dan mengeksekusi berbagai inisiatif strategis yang telah dicanangkan pada tahun 2020 sehingga IPC mampu mencatatkan kinerja yang positif pada tahun 2020 di tengah banyaknya tantangan yang hadir.

The entire Board of Commissioners of the Company would like to thank Mr. Tumpak H. Panggabean and Mr. Djadmiko for the contribution, dedication and hard work that has been given while serving as the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), so that the Company is able to record good performance achievements. We also congratulate you on carrying out the new mandate as the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for members of the Board of Commissioners who have just been appointed by the Ministry of SOE as Shareholders of the Company in 2020.

APPRECIATION AND CLOSING

To conclude, on behalf of IPC's Board of Commissioners, I would like to express my gratitude for the support provided by shareholders and stakeholders so that IPC has successfully closed 2020 with good achievements.

The Board of Commissioners also expresses its highest appreciation for all the hard work and solid collaboration between the Board of Directors and all IPC employees in formulating and executing various strategic initiatives that were implemented in 2020 so that IPC was able to record positive performance in 2020 amidst various challenges along the way.

Jakarta, April 2021 / Jakarta, April 2021

**Atas nama Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),
On behalf of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),**

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors



ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director



Pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan *assessment* GCG sesuai parameter Kementerian BUMN yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*), dengan pencapaian skor sebesar 98,73 dari skor maksimal 100, atau setara dengan predikat "Sangat Baik". Capaian skor tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan perolehan dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebesar 98,55 atau setara dengan predikat "Sangat Baik."

In 2020, the Company carried out GCG assessment according to the parameters set by the Ministry of SOEs (self assessment) with a score of 98,73 from a maximum score of 100, or equivalent to "Excellent" predicate. This score was recorded to increase compared to the achievement in the previous year, which was 98,55 or equivalent to "Excellent".





Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

To Our Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan akibat situasi pandemi *coronavirus disease-2019* (Covid-19) yang terjadi, baik pada lingkup global maupun nasional. Meski demikian, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Perseroan berhasil melaksanakan kinerja operasional di tengah situasi yang menantang dan mampu menjaga keseimbangan target jangka pendek serta jangka panjang, sesuai RKAP 2020 (Revisi) dan RJPP 2020-2024. Pada kesempatan ini, kami mewakili jajaran Direksi akan melaporkan pelaksanaan tugas kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2020.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Situasi perekonomian dunia pada tahun 2020 ditandai dengan sejumlah hambatan sebagai dampak kebijakan pembatasan interaksi serta mobilitas manusia demi menyikapi perkembangan situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat melalui beragam indikator makroekonomi, meliputi realisasi pertumbuhan ekonomi dunia, tingkat suku bunga acuan, serta harga minyak dunia. Mengacu pada laporan yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2021, realisasi laju pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2020 mengalami resesi hingga level 3,3 persen, atau berada jauh lebih rendah dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang masih berada di zona positif di angka 6,1 persen. Realisasi tersebut dikontribusikan secara lebih besar oleh pertumbuhan akumulatif pada negara-negara maju, yang tercatat sebesar minus 4,7 persen, dibanding perolehan akumulatif negara-negara berkembang yang sebesar minus 2,2 persen. Beberapa negara dengan kontraksi paling dalam meliputi Spanyol dan Britania Raya, dengan kontraksi sebesar minus 9,9-11 persen, serta India dan Meksiko, dengan kontraksi sebesar minus 8,0-8,8 persen. Masih merujuk pada data yang sama, Indonesia beserta negara-negara lain di kawasan ASEAN mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi akumulatif sebesar minus 3,4 persen untuk tahun 2020, yang sekaligus menunjukkan penurunan dibanding realisasi di tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen.

2020 was the year rife with challenges on the back of the coronavirus disease-2019 (Covid-19) pandemic occurred globally and nationally. However, all praise is due to the Almighty God, for His grace and blessings has allowed the Company to run its operations amid the challenging situation and to successfully maintain a balance of short-term and long-term targets according to the 2020 RKAP (Revised) and 2020-2024 RJPP. On this occasion, on behalf of the Board of Directors, we will report the implementation of the Company's management for the 2020 financial year.

ECONOMIC OVERVIEW

Global economic situation in 2020 was indicated by various challenges as a result of restriction policy on human interaction and mobility in order to respond to the development of the Covid-19 pandemic. This could be seen through a variety of macroeconomic indicators, including the realization of global economic growth, interest rate benchmark, and the world's oil price. Referring to the report released by the International Monetary Fund (IMF) in April 2021, global economy in 2020 was recorded to experience recession to 3.3 percent, or much lower than the positive growth rate in the previous year of 6.1 percent. This realization was contributed more by the accumulative growth of developed countries, which was booked at minus 4.7 percent, compared to the accumulative growth of developing countries of minus 2.2 percent. Among the countries with the deepest contraction were Spain and Great Britain, with a contraction of minus 9.9-11 percent, as well as India and Mexico, with a contraction of minus 8.0-8.8 percent. Still referring to the same data, Indonesia and other countries in the ASEAN region booked an accumulative economic growth rate of minus 3.4 percent in 2020, which at the same time showed a decrease compared to the realization in the previous year of minus 4.9 percent.

Seiring kontraksi pada realisasi pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan dunia diketahui menurun secara tajam dibanding perolehan pada tahun sebelumnya sebesar 9,5 persen, dari laju pertumbuhan sebesar 1,0 persen pada tahun 2019 menjadi minus 8,5 persen pada akhir tahun 2020. Perolehan tersebut, masih merujuk pada publikasi IMF, dikonstruksikan oleh kontraksi pada sektor impor negara-negara maju dan berkembang sebesar 8,9-9,1 persen. Pada sektor ekspor, kontraksi terjadi lebih dalam pada negara-negara maju yang secara akumulatif tercatat 9,5 persen, dengan perolehan akumulatif negara-negara berkembang berada di angka minus 5,7 persen. Di samping kontraksi yang terjadi pada realisasi volume perdagangan dunia, harga komoditas dunia tercatat berada pada level pertumbuhan yang terkendali pada kawasan ekonomi negara maju, sebesar 0,7 persen, serta pada ekonomi negara-negara berkembang sebesar 5,1 persen, yang sekaligus menunjukkan perolehan yang sama dibanding pada tahun 2019.

Kebijakan pembatasan interaksi serta mobilitas manusia yang terjadi di sejumlah negara kemudian berpengaruh pada penurunan secara drastis atas konsumsi bahan bakar minyak dunia. Hal tersebut berimbas pada tingkat harga minyak dunia, yang untuk tahun 2020 tercatat terkontraksi sebesar 32,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Merujuk laporan Bank Dunia yang dipublikasi pada semester II tahun 2020, harga minyak dunia mengalami penurunan secara tajam pada periode Januari hingga April sebesar 85 persen. Penurunan tersebut tercatat terjadi lebih dalam dibanding penurunan harga minyak yang terjadi pada periode krisis finansial global Agustus hingga Desember 2008, yang sebesar 70 persen, serta yang terjadi pada periode Juni 2014 hingga Januari 2016 yang sebesar 77 persen. Terdapat perbaikan harga pada Mei 2020, meski harga yang tercatat masih berada jauh di bawah harga pada paruh pertama Januari. Seiring hal tersebut, permintaan atas bahan bakar minyak dunia secara akumulatif tetap mengalami penurunan menyusul diberlakukannya kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) serta penutupan kunjungan internasional (*travel ban*) di sejumlah negara.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 pada tataran global, perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 tercatat mengalami hambatan yang serupa. Mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan

Along with the contraction in the realization of economic growth, the global trade volume is known to have decreased sharply compared to the previous year's growth of 9.5 percent, from a growth rate of 1.0 percent in 2019 to minus 8.5 percent at the end of 2020. Still based on IMF publications, this figure was contributed by a contraction in the import sector of developed and developing countries by 8.9-9.1 percent. In the export sector, advanced economies recorded a deeper contraction of 9.5 percent, with the accumulative growth of emerging markets at minus 5.7 percent. In addition to the contraction that occurred in the global trade volume, global commodity prices were recorded at a controlled level, namely 0.7 percent, in developed economies, and at 5.1 percent in developing countries, which at the same time showed the same growth compared to 2019.

Restriction policy on human interaction and mobility that occurred in a number of countries then resulted in a sharp decrease in global fuel consumption. This had an impact on the level of global oil prices, which in 2020 was recorded to contract by 32.7 percent compared to the previous year. Referring to the World Bank report published in the second semester of 2020, global oil prices experienced a sharp decline in January to April period by 85 percent. This decline was recorded to be deeper than the decline in oil prices that occurred during the global financial crisis period from August to December 2008 at 70 percent and that occurred in the period June 2014 to January 2016 at 77 percent. There was also an improvement in prices in May 2020, although the recorded prices were still far below those in the first half of January. In line with this, the accumulative global demand for fuel continues to decline following the implementation of lockdown travel ban in several countries.

In the midst of the Covid-19 pandemic all around the world, Indonesia's economy in 2020 also experienced similar obstacles. Referring to data released by the Statistics Indonesia (BPS) in February 2021, Indonesia's economic growth as measured by Gross Domestic Product (GDP) in 2020 was



besaran Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2020 adalah sebesar minus 2,07 persen, atau menurun sebesar 7,09 persen dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang tercatat 5,02 persen. Secara spesifik, pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,19 persen dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya, atau mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen dibanding perolehan pada kuartal III tahun 2020. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut secara dominan dikontribusikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, dengan pertumbuhan sebesar minus 2,51 persen, serta Pulau Sumatera yang tercatat berkontraksi sebesar 1,19 persen. Meski demikian, terdapat pula provinsi yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2020, seperti Pulau Sulawesi yang tumbuh 0,23 persen serta Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,44 persen.

Pada situasi tersebut, terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mencatatkan kontraksi secara lebih dalam di antaranya sektor Transportasi dan Pergudangan yang tercatat sebesar minus 15,04 persen, Penyedia Akomodasi dan Makanan dan Minuman sebesar 10,22 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar -5,44 persen. Meski demikian, tetap terdapat pula sektor lapangan usaha yang bertumbuh secara positif pada tahun 2020, di antaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 11,60 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen, serta Real Estate sebesar 2,32 persen. Secara spesifik, atas catatan angka pertumbuhan itu, sektor Transportasi dan Pergudangan untuk tahun 2020 diketahui mengalami penurunan secara tajam dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,39 persen, atau menurun sebesar 21,43 persen. Terkait hal tersebut, struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha diketahui tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan dibanding pada tahun sebelumnya, dengan Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 19,8 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,70 persen terhadap PDB.

Merujuk pada laporan Bank Indonesia yang dirilis Januari 2021, ketidakpastian pasar keuangan global mendorong terjadinya pembalikan aliran modal asing yang kemudian berpengaruh pada depresiasi nilai tukar rupiah mencapai Rp16.575 per dolar Amerika Serikat (AS), dengan nilai volatilitas yang tinggi, pada akhir Maret 2020. Pada lingkup yang lebih

minus 2.07 percent, or decreased by 7.09 percent compared to that of previously recorded at 5.02 percent. Specifically, growth in the fourth quarter of 2020 contracted by 2.19 percent compared to the same quarter in the previous year, or contracted by 0.42 percent compared to the figure in the third quarter of 2020. The realization of Indonesia's economic growth was predominantly contributed by growth in Java Island provinces at minus 2.51 percent and Sumatra Island which recorded a contraction of 1.19 percent. However, there were also provinces that still recorded positive growth in 2020, such as Sulawesi Island which grew 0.23 percent and Maluku and Papua Islands which grew by 1.44 percent.

In this situation, there were several business sectors that recorded deeper contraction, including the Transportation and Warehousing sector at minus 15.04 percent, Accommodation and Food and Beverage Providers at 10.22 percent, and Corporate Services at minus 5.44 percent. However, there were also business sectors that grew positively in 2020, including Healthcare Services and Social Activities which grew by 11.60 percent, Information and Communication by 10.58 percent, and Real Estate by 2.32 percent. Specifically, given the record of this growth rate, the Transportation and Warehousing sector in 2020 experienced a sharp decline compared to 6.39 percent in the previous year, or decreased by 21.43 percent. In this regard, the structure of Indonesia's GDP according to business fields is recorded to have shown no significant change compared to the previous year, with the Processing Industry contributing 19.8 percent and Agriculture, Forestry and Fisheries contributing 13.70 percent of GDP.

Based on Bank Indonesia report released in January 2021, global financial market uncertainty led to capital flight which then caused rupiah exchange rate to depreciate to Rp16,575 per US dollar (US) with high volatility value at the end of March 2020. In a larger scope, there were positive expectations in line with developments in the handling of the Covid-19 pandemic,

besar, terdapat ekspektasi positif seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang membuat perbaikan aliran modal global ke negara-negara berkembang secara bertahap. Hal tersebut kemudian mendorong penguatan mata uang negara-negara Asia, termasuk Indonesia, terhadap dolar AS. Perkembangan situasi eksternal tersebut diikuti oleh langkah-langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia, yang kemudian berpengaruh pada nilai tukar rupiah yang secara keseluruhan periode berada pada posisi yang terkendali, berkisar Rp14.529 per dolar AS atau sedikit di atas nilai rata-rata di tahun sebelumnya yang Rp14.141 per dolar AS.

Menyikapi dampak perekonomian akibat pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan respons kebijakan berupa program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang di antaranya berfokus pada beberapa sektor meliputi Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektor K/L dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, serta Insentif Usaha. Beberapa langkah kebijakan terkait program tersebut meliputi restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April dan Juni 2020, dengan penambahan alokasi belanja subsidi baik subsidi energi maupun non-energi, terutama kepada golongan masyarakat terdampak. Per Desember 2020, realisasi belanja subsidi energi (listrik, BBM, dan LPG) mencapai Rp196,21 triliun atau sebesar 102,18 persen dibanding pagu anggaran, serta belanja subsidi non-energi mencapai Rp87,37 triliun atau sebesar 90,62 persen dari pagu yang ditetapkan.

Industri kepelabuhan sebagai sektor penunjang logistik mengalami situasi yang serupa, dengan terjadinya penurunan arus barang sejak akhir kuarter I tahun 2020. Hal itu terjadi seiring penurunan pengiriman barang baik ekspor maupun impor, serta penurunan kunjungan kapal dari negara-negara produsen utama. Secara keseluruhan, arus peti kemas selama tahun 2020 khususnya yang berada di bawah lingkup operasional Perusahaan tercatat turun hingga 9,7 persen (*year-on-year/yooy*), dari sebesar 7,66 juta TEUs pada tahun sebelumnya, menjadi 6,92 juta TEUs pada tahun 2020. Di samping itu, terdapat pula penurunan arus non-peti kemas pada tahun 2020 sebesar 16,5 persen (*yoy*), yaitu terealisasi sebesar 50,13 juta ton dibanding realisasi sebesar 60,03 juta ton pada tahun sebelumnya.

which led to gradual capital inflows to developing countries. This then encouraged the strengthening of currencies of Asian countries, including Indonesia, against the US dollar. This external situation development was followed by the rupiah exchange rate stabilization policy by Bank Indonesia, which subsequently affected rupiah exchange rate that was recorded to remain under control during the whole period, namely between Rp14,529 per US dollar or slightly above the average value booked in the previous year at Rp14,141 per US dollar.

In response to the economic impact of the pandemic, the Indonesian government issued a policy response in the form of the Covid-19 Handling and National Economic Recovery (PC-PEN) program, which was focused on several sectors, namely Health, Social Protection, Sectoral Ministries/Agencies and Local Governments, MSMEs, Corporate Financing, as well as Business Incentives. Among the policy steps related to the program include State Budget restructuring in April and June 2020, with an additional allocation of subsidies for both energy and non-energy subsidies, especially for affected groups of people. As of December 2020, the realization of energy subsidy spending (electricity, fuel, and LPG) reached Rp196.21 trillion or 102.18 percent compared to the budget ceiling, and non-energy subsidy spending reaching Rp87.37 trillion or 90.62 percent of the ceiling set.

The port industry as a logistics support sector experienced similar situation, with a decrease in cargo traffic since the end of the first quarter of 2020. This occurred in line with a decrease in shipments of goods, both exports and imports, and a decrease in ship calls from major producing countries. Overall, container traffic during 2020, especially those under the Company's operational scope, was recorded to decrease by 9.7 percent (*year-on-year/yooy*), from 7.66 million TEUs in the previous year to 6.92 million TEUs in 2020. In addition, there was also a decline in non-container traffic in 2020 by 16.5 percent (*yoy*), namely 50.13 million tons compared to the realization of 60.03 million tons in the previous year.



ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

KEBIJAKAN STRATEGIS

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang industri jasa kepelabuhanan, IPC berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa melalui visi "*To be World-Class Maritime Ecosystem*" dan misi "*Develop Indonesia's Port Logistic Maritime Integrated Network to Reduce Logistic Cost and Energize Trade.*" Dalam menyusun strategi Perseroan, baik strategi jangka panjang maupun jangka pendek, Perseroan berupaya untuk menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Agenda Prioritas Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Salah satu fokus agenda Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yaitu "*Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*". Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan infrastruktur ekonomi, salah satunya adalah infrastruktur konektivitas laut. Sektor konektivitas laut menjadi salah satu sektor infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah karena hingga saat ini, kinerja pelabuhan belum memenuhi standar, jaringan pelayaran masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan *hinterland*, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Kendala tersebut tentu dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pada kinerja transportasi laut maupun logistik di tingkat nasional.

Di samping itu, Perseroan juga terus berupaya untuk menyelaraskan strategi Perseroan dengan 5 (lima) Agenda Prioritas Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER/08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang meliputi Nilai Ekonomi dan Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Talenta. Upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan Sasaran Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

STRATEGIC POLICY

As a state-owned company engaged in the port services industry, IPC is committed to continuing to provide the best contribution to the nation through its vision "*To be a World-Class Maritime Ecosystem*" and the mission of "*Develop Indonesia's Port Logistic Maritime Integrated Network to Reduce Logistic Cost and Energize Trade.*" In formulating the Company's long-term and short-term strategies, the Company seeks to align it with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Priority Agenda of the Ministry of SOEs for 2020-2024 in order to support the realization of President of RI's vision, namely to create Progressive, Sovereign, and Independent Indonesia with Teamwork Character.

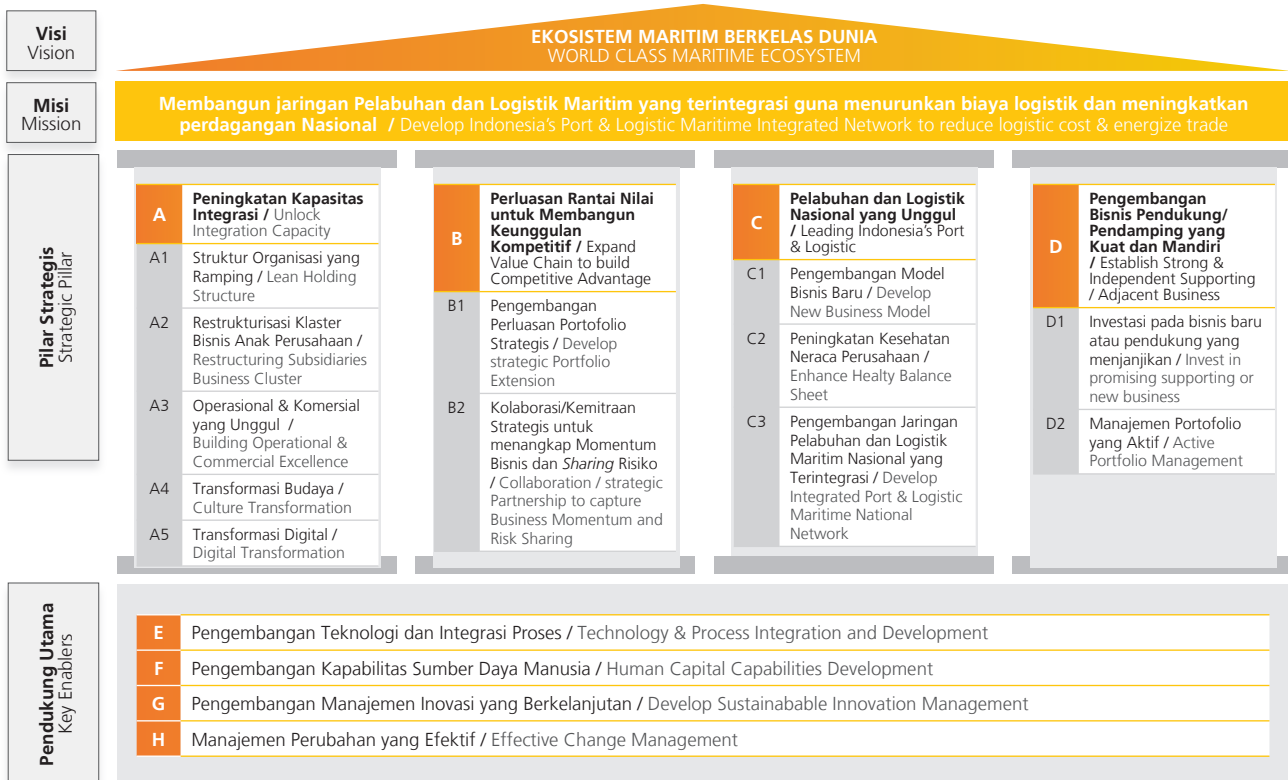
One of the focuses of the Government's agenda set forth in the 2020-2024 RPJMN is "*Strengthening Infrastructure to Support Economic Development and Basic Services*". To achieve this mission, the Government strives to develop economic infrastructure, one of which is maritime connectivity infrastructure. Maritime connectivity is one of the government's pivotal infrastructure sectors because until now, port performance has not met standards, the size of vessels used in shipping fleet does not conform to the optimum standard with linear routes (non-loop), less developed port support area (*hinterland*), limited multimodal and intermodal connectivity at ports and hinterlands, and limited use of maritime logistics information technology. These constraints can certainly affect the level of efficiency in sea transportation and logistics performance at the national level.

In addition, the Company also continuously seeks to align the Company's strategy with the 5 (five) Priority Agenda of the Ministry of SOEs as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER/ 08 /MBU/08/2020 dated August 7, 2020 covering Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Increase and Talent Development. The Company strives to undertake the strategy by determining the Company's Targets as described below:

Tema / Theme	Sasaran Perusahaan / Company Targets
Nilai Ekonomi dan Sosial / Economic and Social Value	Finansial / Financial Keseimbangan kepentingan Jangka Pendek dengan investasi Perseroan untuk pertumbuhan bisnis Jangka Panjang / Balance between the Company's Short-Term interest and investment for Long-Term business growth
	Operasional / Operational Peningkatan Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan / Improvement in Ship and Cargo Services at Port
	Sosial / Social Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan / Welfare improvement of the community around Port area.
Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	Sinergi dan integrasi pelabuhan untuk pengelolaan bisnis kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien guna penciptaan nilai (<i>value creation</i>) yang lebih optimal. / Port synergy and integration for more effective and efficient port business management to create more optimum value
Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi proses bisnis Perseroan / Digitalization of the Company's business process Inisiasi penggunaan teknologi ramah lingkungan / Eco-friendly technology use initiation
Peningkatan Investasi / Investment Growth	Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan optimalisasi pendayagunaan aset / Port infrastructure development and asset use optimization
Pengembangan Talenta / Talent Development	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi dan performansi pegawai / Improvement of employee competency and performance Mendorong lingkungan inklusif untuk memberikan <i>diversity</i> pemikiran pada level struktural. / Promoting inclusiveness to create diverse perspectives at the structural level

Untuk mendorong tercapainya sasaran Perseroan yang telah diuraikan di atas, IPC telah menetapkan Rumah Strategi Perusahaan yang berlandaskan pada Visi dan Misi Perseroan serta ditopang oleh 4 (empat) *strategic pillars* yang merupakan sekumpulan tindakan atau aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan 4 (empat) *key enablers* yang merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama pada sisi fungsional yang akan mendorong kelancaran proses implementasi strategi.

To support the achievement of the Company's targets as explained above, IPC has established a Company Strategy House which is based on the Company's Vision and Mission that is supported by 4 (four) strategic pillars. These pillars are set of key actions or activities needed to achieve the objectives and 4 (four) key enablers that constitute a series of actions and main activities on the functional front that will encourage smooth implementation of the strategy.





Penjelasan dari masing-masing komponen dalam rumah strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pilar-Pilar Strategis

a. Membuka Kapasitas Integrasi

Merupakan rencana strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Grup IPC untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan melakukan pengembangan bisnis korporasi ke arah yang lebih luas. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka *unlock integration capacity* meliputi perencanaan struktur bisnis perusahaan beserta anak perusahaan, peningkatan kapasitas operasional dan komersial, transformasi budaya perusahaan, serta transformasi digital.

b. Memperluas Rantai Nilai Untuk Membangun Keunggulan Kompetitif

Merupakan rencana strategi yang dilakukan dalam rangka memperluas layanan bisnis Perseroan di luar *core business* yang telah ada saat ini. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka implementasi *strategic pillars* ini meliputi penyusunan strategi perluasan portofolio serta membangun kolaborasi atau *partnership* dengan mitra dalam rangka perluasan bisnis dan *sharing* risiko.

c. Memimpin Pelabuhan & Logistik Indonesia

Merupakan rencana strategi yang dilakukan dalam rangka memperkuat dan mengukuhkan posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam bisnis pelabuhan dan logistik nasional. Untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan telah merencanakan aktivitas atau tindakan yang meliputi pengembangan model bisnis, penguatan permodalan Perseroan (*healthy balance sheet*), serta pengembangan jaringan *Integrated Port & Logistic Maritime*.

d. Membangun Bisnis Pendukung yang Kuat dan Mandiri

Merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat aktivitas bisnis pendukung Perseroan yang telah ada sehingga dapat terus memberikan nilai dan kontribusi bagi bisnis inti Perseroan. Strategi ini didukung oleh beberapa rencana aktivitas yang meliputi belanja modal/ investasi pada sektor bisnis pendukung yang memiliki potensi pendapatan dan pengelolaan portofolio bisnis secara aktif.

The explanation of each component in the strategy house is as follows:

1. Strategic Pillars

a. Unlock Integration Capacity

Is a strategic plan carried out to increase the capacity of IPC Group to be able to improve service quality and develop corporate business in a broader direction. Activities or actions prepared as part of unlocking capacity integration include restructuring subsidiaries business cluster, building operational and commercial excellence, conducting culture transformation as well as digital transformation.

b. Expand Value Chain to Build Competitive Advantage

Is a strategic plan carried out in order to expand the Company's business services beyond the existing core business. Activities or actions prepared as part of the implementation of these strategic pillars include developing strategic portfolio extension, entering into collaboration/strategic partnership to capture business momentum and risk sharing.

c. Leading Indonesia's Port & Logistic

Is a strategic plan carried out to strengthen and reinforce the Company's position as a major player in the national port and logistics business. To support this strategy, the Company has prepared activities or actions that include developing business model, enhancing the Company's capital (*healthy balance sheet*), as well as developing the *Integrated Port & Logistic Maritime* network.

d. Establish Strong and Independent Supporting/ Adjacent Business

Is a strategic plan carried out to strengthen the Company's existing supporting business activities so that they can continue to provide value and contribution to the Company's core business. This strategy is supported by several activity plans that include capital expenditures/investments in promising supporting business sectors and active business portfolios management.

2. Key Enablers

- a. Integrasi dan Pengembangan Teknologi & Proses
Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk memadukan antara kebutuhan proses kerja dan standar operasi yang diharapkan dengan tren teknologi dan *best practices* yang berkembang di industri pelabuhan. Inisiatif-inisiatif yang direncanakan sebagai bagian dari *key enabler* ini di antaranya pengembangan infrastruktur TI dan sistemisasi proses bisnis.
- b. Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan *human capital* yang unggul dan adaptif untuk dapat memasuki era bisnis perusahaan yang semakin luas dari yang semula dalam bidang *port & logistic* menjadi ekosistem maritim.
- c. Mengembangkan Manajemen Inovasi yang Berkelanjutan
Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk membangun suatu tata kelola inovasi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keunggulan bersaing dalam setiap proses kerja maupun model bisnis Perseroan.
- d. Manajemen Perubahan yang Efektif
Merupakan rencana strategi yang disusun untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung unit kerja maupun individu dalam perusahaan untuk dapat mengadopsi setiap perubahan-perubahan yang dihadapi dalam perjalanannya mencapai visi dan misi Perseroan.

Guna memastikan proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2024 menjadi **World Class Maritime Ecosystem**, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi Perseroan. Sesuai *roadmap* jangka panjang IPC yang telah disusun dalam RJPP 2020-2024, fokus kebijakan Perusahaan untuk tahun 2020 merupakan *Business Stabilization* yang disusun dengan asumsi bahwa Perseroan masih sebagai *stand alone company* BUMN Pelabuhan. Guna mewujudkan hal tersebut, Perseroan menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan operasional pada tahun 2020 dengan menekankan pada 5 (lima) *milestone* utama, yaitu kesehatan dan keselamatan lingkungan, pengembangan proses bisnis, optimalisasi pendapatan dan peningkatan efektivitas biaya, peningkatan kemampuan digital, serta optimalisasi *capital expenditure* guna menghadirkan nilai tambah.

2. Key Enablers

- a. Technology & Process Integration and Development
Is an activity or action undertaken to integrate the needs of the work process and the expected standard of operation with the technological trends and best practices developing in the port industry. The initiatives planned as part of this key enablers include IT infrastructure development and business process systemization.
- b. Human Resources Capabilities Development
Is an activity or action undertaken to prepare superior and adaptive human capital to be able to enter wider company business environment from originally port & logistics field to a maritime ecosystem.
- c. Developing Sustainable Innovation Management
Is an activity or action taken to build a sustainable innovation governance with the purposes of increasing efficiency, effectiveness, and competitive advantage in every work process and business model of the Company.
- d. Effective Change Management
Is a strategic plan devised to prepare, complement, and support work units and individuals in the company to be able to adopt any changes the Company face in achieving the Company's vision and mission.

In order to ensure that the process of achieving the targets is in accordance with the strategy and vision set for 2024, namely to become a **World Class Maritime Ecosystem**, the Company then needs to develop a road map that serves as a guidance which will provide an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the ultimate goal or vision of the Company. In accordance with the long-term IPC roadmap set out in the 2020-2024 RJPP, the focus of the Company's policy for 2020 is Business Stabilization, which is prepared with the assumption that the Company is still a stand alone port state-owned company. In order to achieve this, the Company undertook business and operational activities in 2020 by emphasizing 5 (five) main milestones, namely environmental health and safety, business process development, revenue optimization and cost effectiveness increase, digital capability improvement, and capital expenditure optimization to provide added value.



Adapun inisiatif strategis yang dijalankan IPC selama menjalankan aktivitas operasional di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Implementasi *e-equipment* untuk mendukung manajemen peralatan berkelas dunia;
- Penguatan kapabilitas *project management* untuk memastikan ketercapaian proyek;
- Standarisasi metodologi kerja operasional di seluruh cabang pelabuhan;
- Peningkatan *brand value* melalui nasional/internasional publikasi/aktivitas;
- Pembentukan dan implementasi *governance risk compliance* secara berkelanjutan;
- Integrasi dan sinergi BUMN pelabuhan;
- Pembentukan *innovation excellence* untuk mempercepat pertumbuhan IPC;
- Peningkatan efisiensi biaya melalui pengelolaan biaya pajak dari *intertransaction* anak perusahaan
- Pengembangan bisnis pendukung untuk mendukung bisnis inti;
- Peningkatan sistem audit digital;
- *Review* dan *monitoring* implementasi perencanaan strategis perusahaan;
- Peningkatan sistem operasional pelabuhan (TOS, MOS, dll);
- Implementasi *shared service centres*;
- *Smart work* dan integrasi sistem pelayanan SDM berdasarkan analisis data;
- Ekspansi pasar melalui pengembangan area industri;
- Implementasi pengembangan pelabuhan (kijing, new priok, dll);
- Program transformasi budaya;
- Pembentukan program *integrated leadership pipeline*;
- *smart learning*;
- Transformasi divisi legal untuk mewujudkan tujuan bisnis perusahaan.

PENCAPAIAN KINERJA DIBANDING TARGET RKAP 2020

Secara garis besar, pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian Aspirasi Pemegang Saham atau *Shareholder Aspiration* (SHA), *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan, dan Tingkat Kesehatan Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

The strategic initiatives carried out by IPC during operational activities in 2020 are as follows:

- Implementation of *e-equipment* to support world-class equipment management;
- Strengthening of project management capabilities to ensure project achievement;
- Standardization of operational work methodologies across port branches;
- Improvement of brand value through nation-wide/international publications/activities;
- Establishment and implementation of governance risk compliance in a sustainable manner;
- Integration and synergy of state-owned ports;
- Establishment of innovation excellence to accelerate IPC growth;
- Cost efficiency increase by managing tax costs from subsidiary intertransaction;
- Development of supporting businesses to support core businesses;
- Improvement of digital audit system;
- Review and monitoring of the implementation of the company's strategic planning;
- Improvement of port operational systems (TOS, MOS, etc.);
- Implementation of shared service centers;
- Smart work and integration of HR service systems based on data analysis;
- Market expansion through industrial area development;
- Implementation of port development (kijing, new priok, etc.);
- Cultural transformation program;
- Establishment of an integrated leadership pipeline program;
- Smart learning;
- Transformation of legal division to achieve the company's business goals.

PERFORMANCE ACHIEVEMENT COMPARED 2020 RKAP TARGET

Broadly speaking, the Company's performance achievements during 2020 can be seen from the achievement of Shareholder Aspiration (SHA), Company Key Performance Indicators (KPI), and Company Health Level as described below:

1. SHA

Secara umum, pencapaian SHA tahun 2020 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 31 Agustus 2019 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 serta Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II. Namun demikian, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum berhasil memenuhi target, yaitu *Berth Occupancy Ratio* (BOR) yang terealisasi sebesar 40,45 persen atau tercapai 80,90 persen dari target Revisi RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya *joint* slot kapal petikemas sehingga jumlah unit kapal petikemas yang melakukan tambat lebih sedikit.

2. KPI Perusahaan

Sesuai Salinan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, terdapat penyesuaian format dan perspektif KPI dalam pelaporan. Adapun realisasi skor KPI Perusahaan di tahun 2020 adalah sebesar 103,43 atau telah memenuhi target Revisi RKAP. Berikut ini merupakan penjelasan KPI Perusahaan per perspektif:

- Skor KPI untuk Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia telah mencapai target, yaitu 42,55 dari target 42,00.
- Skor KPI untuk Perspektif Inovasi Model Bisnis telah mencapai target, yaitu 23,38 dari target 22,00.
- Skor KPI untuk Perspektif Kepemimpinan Teknologi telah mencapai target, yaitu 6,00 dari target 6,00.
- Skor KPI untuk Perspektif Pengembangan Investasi telah mencapai target, yaitu 10,61 dari target 10,00.
- Skor KPI untuk Perspektif Pengembangan Talenta telah mencapai target, yaitu 20,89 dari target 20,00.

1. SHA

In general, the achievement of SHA in 2020 has met the target set in the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises to the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisors of SOEs No. S-574/MBU/08/2019 dated August 31, 2019 concerning Submission of Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of Company Work Plans and Budgets of 2020 and Letter of the Minister for State-Owned Enterprises No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding Amendments to the 2020 RKAP for Fostered SOEs of Deputy Minister of SOEs II. However, there is 1 (one) target that has not yet met the target, namely the *Berth Occupancy Ratio* (BOR) which was realized at 40.45 percent or reached 80.90 percent of the Revised RKAP 2020 target. This was due to the *joint* slot for container ships, which caused a decrease in number of moored container ship.

2. Company KPIs

In accordance with the Copy of the Minister of SOEs Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Board of Directors of State-Owned Enterprises, there are adjustments to the KPI format and perspective in reporting. The realization of the Company's KPI score in 2020 was 103.43 or has met the Revised RKAP target. The following is an explanation of the Company's KPIs per perspective:

- The KPI score for Economic and Social Value for Indonesia Perspective has reached the target, which was 42.55 from the target of 42.00.
- The KPI score for the Business Model Innovation Perspective has reached the target, which was 23.38 from the target of 22.00.
- The KPI score for Technology Leadership Perspective has reached the target, which was 6.00 from the target of 6.00.
- The KPI score for the Investment Development Perspective has reached the target, which was 10.61 from the target of 10.00.
- The KPI score for Talent Development Perspective has reached the target, which was 20.89 from the target of 20.00.



3. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Realisasi capaian skor Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 adalah sebesar 77,50, dan belum mampu mencapai target Revisi RKAP 2020 sebesar 78,00. Dengan total skor sebesar 77,50, maka IPC masuk dalam kategori perusahaan "SEHAT" dengan nilai "A". Berikut ini merupakan penjelasan pencapaian pada masing-masing aspek:

- Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada Aspek Keuangan telah mencapai target, yaitu 33,50 dari target Revisi RKAP 2020 yaitu 30,00.
- Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada Aspek Operasional telah mencapai target yaitu 35,00 dari target Revisi RKAP 2020 yaitu 35,00.
- Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada Aspek Administrasi belum mampu mencapai target Revisi RKAP 2020, yaitu 9,00 dari target Revisi RKAP 2020 yaitu 13,00. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaktercapaian indikator efektivitas penyaluran dana dan indikator kolektabilitas pengembalian pinjaman terhadap target Revisi RKAP 2020.

Selain itu, Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang disusun pada awal tahun 2020 menunjukkan ketercapaian rata-rata sebesar 93,00 persen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktorat Utama memiliki pencapaian progres RKM sebesar 98,24 persen dari 6 program strategis dan 99 program non-strategis. Terdapat 99 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Utama.
2. Wakil Direktorat Utama memiliki pencapaian progres RKM sebesar 97,22 persen dari 4 program strategis dan 24 program non-strategis. Terdapat 21 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Wakil Direktorat Utama.
3. Direktorat Komersial memiliki pencapaian progres RKM sebesar 81,70 persen dari 6 program strategis dan 30 program non-strategis. Terdapat 21 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Komersial.
4. Direktorat Teknik memiliki pencapaian progres RKM sebesar 89,19 persen dari 9 program strategis dan 42 program non-strategis. Terdapat 27 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Teknik.
5. Direktorat Operasi memiliki pencapaian progres RKM sebesar 80,85 persen dari 10 program strategis dan 33 program non-strategis. Saat ini status 22 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Operasi.
6. Direktorat Keuangan memiliki pencapaian progres RKM sebesar 84,42 persen dari 5 program strategis dan 31 program non-strategis. Terdapat 18 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Keuangan.

3. Company Health Level

The realization of the Company's Health Level score for 2020 was 77.50 and has yet to achieve the 2020 RKAP Revised target of 78.00. With a total score of 77.50, IPC fell into the category of "HEALTHY" company with an "A" score. The following is an explanation of the achievements in each aspect:

- The Company's Health Level Score in the Financial Aspect has reached the target, which was 33.50 of the 2020 RKAP Revised target of 30.00.
- The Company's Health Level Score in the Operational Aspect has reached the target of 35.00 from the Revised RKAP 2020 target of 35.00.
- The Company's Health Level Score in the Administrative Aspect has yet to reach the Revised RKAP 2020 target, which was 9.00 from the Revised RKAP 2020 target of 13.00. This was because the Company did not achieve the target in the effectiveness of fund disbursement and collectability of loan repayments indicators as set out in the 2020 Revised RKAP.

In addition, the Management Work Plan (RKM) prepared in early 2020 shows an average score of 93.00 percent as described below:

1. The Main Directorate has achieved RKM progress of 98.24 percent of the 6 strategic programs and 99 non-strategic programs. There were 99 RKM recording 100 percent achievement in the Main Directorate.
2. Deputy Main Directorate has achieved RKM progress of 97.22 percent of 4 strategic programs and 24 non-strategic programs. There were 21 RKM recording 100 percent achievement in the Deputy Main Directorate.
3. The Commercial Directorate has achieved RKM progress of 81.70 percent of the 6 strategic programs and 30 non-strategic programs. There were 21 RKM recording 100 percent achievement in the Commercial Directorate.
4. The Directorate of Engineering has achieved RKM progress of 89.19 percent of 9 strategic programs and 42 non-strategic programs. There were 27 RKM recording 100 percent achievement in the Directorate of Engineering.
5. The Operations Directorate has achieved RKM progress of 80.85 percent of the 10 strategic programs and 33 non-strategic programs. Currently, there were 22 RKM recording 100 percent achievement in the Operations Directorate.
6. The Directorate of Finance has achieved RKM progress of 84.42 percent of the 5 strategic programs and 31 non-strategic programs. There were 18 RKM recording 100 percent achievement in the Directorate of Finance.

7. Direktorat SDM dan Umum memiliki pencapaian progres RKM sebesar 96,68 persen dari 8 program strategis dan 76 program non-strategis. Terdapat 55 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat SDM dan Umum.
8. Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis memiliki pencapaian progres RKM sebesar 99,78 persen dari 6 program strategis dan 17 program nonstrategis. Terdapat 22 RKM yang memiliki pencapaian 100 persen di Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis.

Pencapaian kinerja Perseroan secara keseluruhan selama tahun 2020 juga dapat ditinjau dari kinerja operasional, keuangan, dan investasi.

PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL

Pada kinerja operasional, realisasi trafik kapal dan petikemas untuk tahun 2020 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Revisi RKAP 2020. Perseroan mencatat arus kapal terealisasi sebesar 178,41 juta GT atau 1,38 persen lebih tinggi dengan Revisi RKAP 2020 sebesar 175,99 juta GT. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh mulai normalnya kunjungan kapal luar negeri, terutama kapal-kapal yang berasal dari China, serta meningkatnya trafik kapal dengan muatan petikemas di beberapa cabang pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Panjang, Palembang, dan Teluk Bayur. Sementara itu, realisasi arus petikemas tahun 2020 tercatat sebesar 6,92 juta TEUs atau 0,97 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020 sebesar 6,86 juta TEUs. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan arus peti kemas di KSO TPK Koja dan PT IPC TPK, sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekspor impor sebagai dampak mulai dibukanya perdagangan di beberapa negara.

Meski demikian, realisasi arus barang dan arus penumpang pada tahun 2020 belum mampu mencapai target Revisi RKAP 2020. Arus barang terealisasi sebesar 50,13 juta ton atau 1,43 persen lebih rendah dari Revisi RKAP 2020 (Revisi). Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan *General Cargo* pada kegiatan impor, terutama di PT PTP, dan Curah Kering pada kegiatan Bongkar, terutama di Cabang Pelabuhan Banten dan PT PTP. Sedangkan untuk trafik penumpang hanya terealisasi sebesar 333,03 ribu penumpang atau 16,13 persen di bawah target Revisi RKAP 2020. Tidak tercapainya realisasi arus penumpang pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Untuk memutus rantai penularan

7. The Directorate of Human Resources and General Affairs has achieved RKM progress of 96.68 percent of the 8 strategic programs and 76 non-strategic programs. There were 55 RKM recording 100 percent achievement in the Directorate of Human Resources and General Affairs.
8. The Directorate of Business Transformation and Development has achieved RKM progress of 99.78 percent of 6 strategic programs and 17 non-strategic programs. There were 22 RKM recording 100 percent achievement in the Directorate of Business Transformation and Development.

The overall achievement of the Company's performance during 2020 can also be seen from its operational, financial and investment performance.

OPERATIONAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

In view of operational performance, the realization of ship and container traffic in 2020 was recorded to exceed the target set in the Revised RKAP 2020. The Company recorded ship traffic of 178.41 million GT or 1.38 percent higher than the Revised RKAP 2020 of 175.99 million GT. This achievement was contributed by increasing international ship calls, especially ships originating from China, as well as the increase in ship traffic with container cargoes in several port branches, such as Tanjung Priok, Panjang, Palembang, and Teluk Bayur. Meanwhile, the realization of container traffic in 2020 was recorded at 6.92 million TEUs or 0.97 percent higher than the Revised RKAP 2020 of 6.86 million TEUs. This was due to an increase in the container traffic at TPK Koja JO and PT IPC TPK, in line with the increase in export-import activities as a result of the opening of trade in several countries.

However, the realization of cargo traffic and the passenger traffic in 2020 has yet to reach the Revised RKAP 2020 target. Cargo traffic was realized at 50.13 million tons or 1.43 percent lower than the Revised RKAP 2020. This was contributed by a decrease in General Cargo in import activities, especially at PT PTP, and Dry Bulk in Unloading activities, especially at Banten Port Branch and PT PTP. Meanwhile, passenger traffic was realized at only 333.03 thousand passengers or 16.13 percent below the Revised RKAP 2020 target. The target of passenger traffic in 2020 was not achieved due to the Covid-19 Pandemic. To break the chain of transmission of Covid-19, the Government implemented a Large-Scale Social



Covid-19, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian. Kebijakan tersebut tentu berdampak signifikan pada jumlah penumpang yang mengalami penurunan selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari sisi keuangan, Pendapatan Usaha Perseroan berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Revisi RKAP 2020. Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp 10.453,61 miliar atau tercapai sebesar 101,33 persen dibanding target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp10.316,57 miliar. Secara lebih spesifik, perolehan tersebut dikontribusikan paling besar dari Pendapatan Terminal Petikemas, yang terealisasi sebesar Rp3.178,04 miliar atau tercapai 101,85 persen dibanding target Revisi RKAP 2020. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

- *Throughput Area* Domestik Tanjung Priok 2 terealisasi sebesar 4,21 persen di atas target dikarenakan oleh peningkatan volume *Shipping Line* Meratus Line, serta adanya penambahan layanan baru dari Maersk Line di Semester II Tahun 2020 Terminal *Oceangoing* di Area Tanjung Priok 2;
- *Throughput Area* Pontianak juga mengalami kenaikan pada petikemas *oceangoing* sebesar 186 persen atau 2.466 TEUs dari target Revisi RKAP 2020 sebesar 1.344 TEUs;

Kemudian, kontributor terbesar kedua adalah Pendapatan Perusahaan TBAL yang terealisasi sebesar Rp3.023,33 miliar atau tercapai 101,83 persen dibanding target Revisi RKAP 2020, yang disebabkan oleh adanya realisasi pendapatan TBAL Lainnya yang berasal dari reduksi pendapatan PT PPI. Kontributor terbesar ketiga adalah Pendapatan Pelayanan Terminal yang terealisasi sebesar Rp1.775,22 miliar. Namun, realisasi tersebut belum mampu mencapai target Revisi RKAP 2020 yang dikarenakan oleh tidak tercapainya pendapatan jasa dermaga di PT IKT Tbk karena menurunnya kegiatan *handling* kendaraan. Selanjutnya adalah Pendapatan Jasa Kapal yang terealisasi sebesar Rp1.332,08 miliar atau tercapai 100,84 persen dibanding target Revisi RKAP 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kinerja pelayanan jasa kapal di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri, terutama untuk kegiatan penundaan dan realisasi pendapatan kapal *Ship-To-Ship* (STS) yang ada di Cabang Pelabuhan Panjang.

Restriction (PSBB) policy and urged people not to travel. This policy certainly had a significant impact on the decrease in the number of passengers during the Covid-19 Pandemic in 2020.

FINANCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

From the financial side, the Company's Revenues exceeded the target set in the Revised RKAP 2020. Realization of Revenues in 2020 was recorded at Rp10,453.61 billion or reached 101.33 percent of the Revised RKAP 2020 target of Rp10,316.57 billion. More specifically, these revenues contributed the most to Container Terminal Revenue, which was realized at Rp3,178.04 billion or 101.85 percent compared to the Revised RKAP 2020 target. This achievement was attributable to:

- *Throughput Area* of Domestic Tanjung Priok 2 was realized by 4.21 percent above the target due to an increase in the volume of *Shipping Line* of Meratus Line, as well as the addition of new services from Maersk Line in Semester II of 2020, *Oceangoing* Terminal, in Tanjung Priok 2 Area;
- *Throughput Area* of Pontianak also experienced an increase in *oceangoing* container at 186 percent or 2,466 TEUs of the Revised RKAP 2020 target of 1,344 TEUs;

Furthermore, the second largest contributor was TBAL Business Revenue which was realized at Rp3,023.33 billion or reached 101.83 percent compared to the Revised RKAP 2020 target, which was caused by the realization of Other TBAL revenue which came from the reduction of PT PPI's revenue. The third largest contributor was Terminal Service Revenue which was realized at Rp1,775.22 billion. However, this figure has yet to reach the Revised RKAP 2020 target because revenues from dock services at PT IKT Tbk did not meet the target on the back of declining vehicle handling activities. Next, there is Ship Services Revenue that was realized at Rp1,332.08 billion or 100.84 percent compared to the Revised RKAP 2020 target, which was mainly due to an increase in the performance of ship services at the Dock for Own Interest, especially for tug activities and realization of ship-to-ship revenues in Panjang Port Branch.

Pendapatan dari Pelayanan Jasa Barang dan Pengusahaan Alat menjadi penyumbang terkecil terhadap Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020. Pendapatan pelayanan jasa barang sebesar Rp42,77 miliar atau 87,69 persen dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020 sebesar Rp48,77 miliar yang disebabkan oleh tidak tercapainya *throughput* barang pada PT IKT Tbk serta turunnya impor *steel product* seiring penurunan pada industri otomotif dan baja melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada capaian pendapatan jasa dermaga. Sedangkan pendapatan pengusahaan alat terealisasi sebesar Rp58,81 miliar atau 62,62 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp93,93 miliar. Hal ini disebabkan terutama karena tidak tercapainya pendapatan pengusahaan alat PT PTP dari Revisi RKAP 2020 yang hanya terealisasi sebesar Rp25,02 miliar atau sebesar 70,47 persen dari target Revisi RKAP 2020 senilai Rp35,50 miliar, akibat menurunnya impor barang sejalan dengan penurunan trafik barang.

Di sisi lain, realisasi laba bersih juga mampu melampaui target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp561,53 miliar menjadi Rp1.156,79 miliar di tahun 2020. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak sepenuhnya berasal dari kegiatan utama Perseroan, namun diperoleh dari pengembalian pajak berdasarkan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Register 4223B/PK/PJK/2020 dan Surat Pengantar No. PKMA-2281/VIII/PAN.WK/2020.

PENCAPAIAN KINERJA INVESTASI

Dari sisi investasi, capaian investasi dan penyertaan modal Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 2.980,67 miliar atau 86,42 persen dari target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp3.449,07 miliar. Secara spesifik, serapan investasi dan penyertaan modal tersebut dikontribusikan antara lain oleh 4 (empat) proyek utama, yaitu pembangunan Terminal Kalibaru Utara tahap I, pembangunan Terminal Kijing Kalimantan Barat fase 1, pembangunan Menara Maritim Indonesia, serta akuisisi saham pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS).

Per 31 Desember 2020, pembangunan Terminal Kalibaru Utara tahap I telah terealisasi sebesar Rp606,49 miliar, atau terserap 134,25 persen dari target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp451,77 miliar. Pembangunan fase 1 Terminal Kijing di Kalimantan Barat untuk tahun buku 2020 terealisasi sebesar Rp988,21 miliar atau 97,92 persen dari RKAP 2020 (Revisi) sebesar Rp1.009,23 miliar. Sementara itu, realisasi pembangunan Menara Maritim Indonesia per 31 Desember

Revenue from Goods Services and Equipment Services was the smallest contributor to the Company's Operating Revenues in 2020. Goods services revenue amounted to Rp42.77 billion or 87.69 percent of Revised RKAP 2020 of Rp48.77 billion. This small contribution was caused by failure to achieve goods throughput target at PT IKT Tbk and the decrease in steel product imports in line with the decline in the automotive and steel industries through Port of Tanjung Priok which had an impact on the achievement of dock service revenues. Meanwhile, revenue from equipment services was realized at Rp58.81 billion or 62.62 percent of the Revised RKAP 2020 amounting to Rp93.93 billion. This was mainly because equipment services revenue of PT PTP did not meet the Revised RKAP 2020 target, which was recorded at Rp25.02 billion only or 70.47 percent of the Revised RKAP 2020 target of Rp35.50 billion, due to the decline in goods import in line with the decline in cargo traffic.

On the other hand, the realization of net profit was also able to exceed the Revised RKAP 2020 target of Rp561.53 billion to Rp1,156.79 billion in 2020. However, this achievement did not come entirely from the main activities of the Company, but was contributed by tax refund based on decisions Judicial Review decision from the Supreme Court on December 14, 2020 with Registration Number 4223B/PK/PJK/2020 and Cover Letter No. PKMA-2281/VIII/PAN.WK/2020.

INVESTMENT PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

On the investment front, the Company's investment and equity participation in 2020 was recorded at Rp2,980.67 billion or 86.42 percent of the Revised RKAP 2020 target of Rp3,449.07 billion. Specifically, the investment absorption and capital participation were contributed by, among others, 4 (four) main projects, namely the construction of phase I of the North Kalibaru Terminal, the construction of phase 1 of the Kijing West Kalimantan Terminal, the construction of the Indonesian Maritime Tower, and the acquisition of shares in PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS).

As of December 31, 2020, the construction of phase I of the North Kalibaru Terminal was realized at Rp606.49 billion, or 134.25 percent of the Revised RKAP 2020 target of Rp451.77 billion. The construction of phase 1 of the Kijing Terminal in West Kalimantan for the 2020 financial year was realized at Rp988.21 billion or 97.92 percent of the (Revised) RKAP 2020 of Rp1,009.23 billion. Meanwhile, the realization of the construction of the Indonesian Maritime Tower as of



2020 tercatat sebesar Rp197,82 miliar atau mencapai 76,44 persen dari target Revisi RKAP 2020 sebesar Rp258,80 miliar. Untuk akuisisi pada PT ILCS, Perseroan merealisasikan akuisisi saham dari PT Multimedia Nusantara sebesar 49 persen sesuai dengan persetujuan Kementerian BUMN melalui Surat Nomor S.589/MBU/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH STRATEGIS

Perusahaan menyadari bahwa tahun 2020 merupakan tahun dengan berbagai tekanan pada sektor perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19, baik pada lingkup global maupun nasional. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada industri kepelabuhanan, yang memiliki kaitan erat terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi, untuk kemudian menghadirkan kendala eksternal bagi aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan Perusahaan. Meski demikian, di tengah situasi tersebut, Perusahaan secara konsisten mengupayakan berbagai pencapaian kinerja sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan melalui RKAP 2020 serta RJPP 2020-2024.

Pada tahun 2020, situasi pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap penurunan *throughput* di seluruh cabang dan anak perusahaan yang dimiliki. Seiring hal tersebut, terhadap beberapa proyek strategis yang dibatalkan, seperti pada rencana akuisisi PT KBS dan rencana pengembangan properti di lahan *idle*. Tekanan dari situasi perekonomian tahun 2020 juga mengakibatkan risiko perpindahan beberapa jenis komoditas kargo ke terminal pesaing, serta rencana penyesuaian tarif di beberapa layanan jasa kepelabuhanan yang tertunda.

Untuk mengantisipasi sejumlah hambatan yang hadir akibat situasi pandemi, Perusahaan secara khusus menjalankan strategi *Business Stabilization* melalui pendekatan *Business Continuity Management* (BCM) yang merupakan strategi demi memastikan kegiatan operasional Perusahaan dapat tetap berjalan di tengah berbagai kendala terkait situasi pandemi.

Selanjutnya, dalam merespons perkembangan situasi penanganan Covid-19, pada kuartal III tahun 2020, Perusahaan menjalankan strategi *Business Stabilization* yang terdiri atas 3 (tiga) fase yang dirancang untuk menangkap peluang bisnis pada era kenormalan baru (*new normal*) dan pasca-pandemi, serta membangun *competitive advantage* Perusahaan.

December 31, 2020 was recorded at Rp197.82 billion or 76.44 percent of the Revised RKAP 2020 target of Rp258.80 billion. For the acquisition of PT ILCS, the Company acquired shares from PT Multimedia Nusantara of 49 percent in accordance with the approval of the Ministry of SOEs through Letter Number S.589/MBU/08/2020 dated August 24, 2020.

CHALLENGES FACED AND STRATEGIC STEPS

The company realizes that 2020 was the year full of pressures on the economic sector as a result of the Covid-19 pandemic in both global and national levels. This condition certainly brought impact on the port industry as the sector that greatly contributes to the development of economic growth. This impact subsequently provided external obstacles for business and operational activities carried out by the Company. However, in the midst of this situation, the Company has consistently strived to record various performance achievements according to the targets and plans set out in the 2020 RKAP and 2020-2024 RJPP.

In 2020, the Covid-19 pandemic situation contributed to a decrease in throughput in all branches and subsidiaries. This was coupled with the cancellation of several strategic projects, i.e. acquisition plan of PT KBS and the property development plan on idle land. The economic pressure in 2020 also resulted in the risk of transfer of several types of cargo commodities to competing terminals, as well as delayed tariff adjustment plans for some port services.

To anticipate these various obstacles arising from the pandemic, the Company has specifically implemented a Business Stabilization strategy through the Business Continuity Management (BCM) approach. BCM is a strategy to ensure that the Company's operational activities can continue amidst various obstacles posed by the outbreak.

Furthermore, in response to the development of the Covid-19 handling situation, in the third quarter of 2020, the Company implemented a Business Stabilization strategy consisting of 3 (three) phases designed to capture business opportunities in the new normal and post-pandemic era as well as build the Company's competitive advantage. The Business Stabilization

Strategi *Business Stabilization* dengan pendekatan BCM ini diuraikan pada tabel di bawah ini:

strategy with the BCM approach is described in the table below:

Strategi di Masa Pandemi dengan Pendekatan BCM Framework / Strategy During Pandemic Using BCM Framework Approach	
Tahapan & Strategi Respon / Phase & Response Strategy	Inisiatif Utama / Key Initiatives
1. Masa Covid-19/Pandemi Lain / Covid-19 Period/Other Pandemic	
Stabilitas Bisnis / Business Stabilization	Keselamatan dan Kesehatan di Lingkungan Kerja / Safety and Health in the Work Environment <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan protokol kesehatan dan SOP <i>New Normal</i> / Implementing New Normal health protocols and SOP Penerapan pola <i>Smart Work</i> / Implementing Smart Work pattern Pembentukan Satgas Covid-19 / Establishment of Covid-19 Task Force
	Mempertahankan dan Meningkatkan Pelayanan / Maintaining and Improving Service <ul style="list-style-type: none"> Menjalankan pelayanan operasional sesuai dengan protokol / Running operational services in accordance with protocols Pemberian insentif tarif dan fasilitas serta <i>loyalty reward</i> kepada pelanggan / Providing tariff and facilities incentives as well as loyalty rewards to customers Reviu proses bisnis / Business process review
	Optimalisasi Pendapatan and Efektivitas Biaya / Revenue Optimization dan Cost Effectiveness <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan terintegrasi dan <i>tailored service</i>, serta peningkatan layanan <i>online</i> kepada <i>customer</i> / Integrated and tailored services, as well as improved online services to customers Peningkatan Digitalisasi di Operasional (termasuk pelayanan <i>online</i> kepada <i>customer</i>) dan Kantor/<i>back office</i> (termasuk <i>online training</i>) / Increased digitalization in operations (including online services to customers) and back offices (including online training) Prioritas pada program <i>must have</i> / Priority on must-have programs
2. Periode Dampak Industri/ Industry Impact Period	
Perbaikan Usaha / Business Recovery	Penyempurnaan Metode Kerja <i>New Normal</i> / Improvement of the New Normal Work Method <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan metode <i>Smart Work</i> pada masa <i>New Normal</i> untuk bekerja secara fleksibel & efektif / Improvement of the Smart Work method during the New Normal era to work flexibly & effectively Penyempurnaan struktur dan jalur komunikasi yang jelas, efektif & efisien / Improvement of clear, effective & efficient communication structures and channels
	Peningkatan Kapabilitas Digital / Enhanced Digital Capability <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapabilitas IT (Operasional, <i>Back Office</i>, <i>Front End</i>) yang berkelanjutan baik di level induk maupun Anak Perusahaan pada grup IPC / Continuous improvement of IT capabilities (Operations, Back Office, Front End) both in the parent entity and subsidiaries in IPC group
	Optimalisasi Capex untuk <i>Value Creation</i> dan Mengoptimalkan Diversifikasi Usaha / Optimizing Capex for Value Creation and Optimizing Business Diversification <ul style="list-style-type: none"> Investasi pada Anak Perusahaan bidang IT / Investment in IT subsidiaries Investasi pada Anak Perusahaan Jalan Tol / Investment in Toll Road Subsidiaries
3. Periode <i>Next Normal</i> / The Next Normal Period	
Keberlanjutan Usaha / Business Sustainability	Transformasi Digital / Digital Transformation <ul style="list-style-type: none"> Digital dengan merepresentasikan cara baru dalam berbisnis, melalui perbaikan dalam: <i>Technology, people, process & budaya</i> / Digital in representing a new way of doing business through improvements in: technology, people, process & culture Mendorong digitalisasi pada ekosistem maritim (<i>enterprise dan stakeholder</i>) / Encouraging digitalization in the maritime ecosystem (enterprise and stakeholders)
	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation <ul style="list-style-type: none"> Terutama terkait <i>Value Propositions, Key Partnership/Resources, Channel, Customer Segment</i> / Particularly on Value Propositions, Key Partnership/Resources, Channels, Customer Segment Mengelola terminal di luar lingkungan Pelindo / Managing terminals outside Pelindo environment Mendorong penggunaan produk lokal (TKDN) / Encouraging the use of local products (TKDN) Ekspansi bisnis secara vertikal / Vertical business expansion
	Pengembangan Inovasi yang Berkelanjutan / Sustainable Innovation Development <ul style="list-style-type: none"> <i>Exploit</i>: Optimalisasi dan <i>improvement</i> terhadap potensi/<i>resource</i> yang dimiliki untuk dapat meningkatkan produktivitas secara efektif & efisien / <i>Exploit</i>: Optimization and improvement of existing potential/<i>resources</i> to increase productivity effectively & efficiently <i>Explore</i>: Mencari ide untuk menangkap peluang & mengembangkan bisnis "<i>the New and the Next</i>" / <i>Explore</i>: Looking for ideas to seize opportunities & develop "<i>the New and the Next</i>" business

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan efisiensi kinerja di tengah Pandemi Covid-19, antara lain:

- Berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* (pelanggan, asosiasi, dan regulator);
- Pemberian relaksasi berupa insentif tarif pelayanan jasa kapal kepada pelanggan-pelanggan utama;

Moreover, the Company implemented various programs to improve performance efficiency amid the Covid-19 Pandemic, among others:

- Coordinating and establishing good relationships with stakeholders (customers, associations and regulators);
- Providing relaxation in the form of incentives for ship service rates to major customers;



3. Melakukan pemasaran secara intensif atas aset *idle* dan aset dengan pemanfaatan belum optimal;
4. Penyelesaian perpanjangan kerja sama dengan mitra;
5. Melakukan peninjauan atas peluang kerja sama dengan mitra-mitra baru;
6. Melaksanakan program *Revenue Enhancement* di beberapa Anak Perusahaan.

Lebih lanjut, situasi akibat pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada pelaksanaan proyek strategis yang dijalankan Perseroan pada tahun 2020. Proyek strategis tersebut meliputi (1) Pembangunan Terminal Kijing Tahap I, (2) Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I, (3) Pembangunan Terminal Sorong, (4) Pembangunan Cikarang Bekasi Laut (CBL), serta (5) Pembangunan *Eastern Access New Priok*. Berbagai langkah strategis yang dijalankan Perusahaan untuk mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan proyek-proyek tersebut, yaitu:

1. Pembangunan Terminal Kijing Tahap I

Perseroan melakukan evaluasi/revisi *schedule* pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan penunjukan konsultan untuk pendampingan implementasi program penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

2. Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I

Untuk merealisasikan percepatan evaluasi volume pekerjaan, Perseroan bekerja sama dengan JPN untuk pendampingan dan pemberian pendapat hukum/LO.

3. Pembangunan Terminal Sorong

Kelanjutan proyek pembangunan Sorong Seget untuk tahun 2020 diputuskan untuk ditunda, dengan komunikasi kepada Pelindo IV untuk ikut berpartisipasi di Sorong Kota.

4. Pembangunan Cikarang Bekasi Laut (CBL)

Perseroan menyampaikan surat pengajuan sebagai investor dan operator Terminal CBL kepada pemerintah, dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan. Kemudian, Perseroan melaksanakan sinkronisasi rencana pengembangan proyek CBL dengan seluruh penanggung jawab kegiatan. Selain itu, Perusahaan sesuai arahan pihak manajemen belum melanjutkan proyek untuk sementara waktu seiring perkembangan konsep yang lebih baik untuk CBL.

5. Pembangunan *Eastern Access New Priok*

Perseroan melakukan *review* atas kajian komersial dan konsep umum perencanaan jalan akses Timur Kalibaru/NPEA. Selain itu, Perseroan memastikan PT API bertindak sebagai pemrakarsa NPA mewakili IPC, dari tahap prakonstruksi, konstruksi, hingga operasi.

3. Intensively marketing idle assets and not-fully-utilized assets;
4. Completing cooperation extension with partners;
5. Exploring opportunities for cooperation with new partners;
6. Implementing Revenue Enhancement program in several Subsidiaries.

Furthermore, the Covid-19 pandemic also had an impact on the implementation of strategic projects carried out by the Company in 2020. These strategic projects include (1) Development of the Kijing Terminal Phase I, (2) Development of North Kalibaru Terminal Phase I, (3) Development of Sorong Terminal, (4) Development of Cikarang Bekasi Laut (CBL), and (5) Development of Eastern Access New Priok. The following are strategic steps taken by the Company to overcome obstacles in the implementation of these projects:

1. Development of the Kijing Terminal Phase I

The Company evaluated/revised work implementation schedule. In addition, the Company also appointed consultants to assist the implementation of community social impact management programs.

2. Development of North Kalibaru Terminal Phase I

To realize the acceleration of work volume evaluation, the Company partnered with JPN to receive assistance and legal opinions/LOs.

3. Development of Sorong Terminal

The continuation of the Sorong Seget development project in 2020 was decided to be postponed by communicating it to Pelindo IV to participate in Sorong Kota.

4. Development of Cikarang Bekasi Laut (CBL)

The company submits an application letter as an investor and operator of the CBL Terminal to the government, in this case BPTJ of the Ministry of Transportation. Furthermore, the Company synchronizes the CBL project development plan with all people in charge. In addition, the Company, as directed by the management, has not continued the project while waiting for better concept development of CBL.

5. Development of the Eastern Access New Priok

The Company conducted a review of the commercial studies and the general concept of the East Kalibaru/NPEA access road plan. In addition, the Company ensured that PT API acted as the initiator of the NPA representing IPC, from the pre-construction, construction, to operation stages.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Analisis prospek usaha Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi terhadap perkembangan situasi ke depan, meliputi sejumlah indikator ekonomi yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan usaha Perusahaan. Situasi perekonomian global pada tahun 2021 diproyeksi akan mengalami pemulihan seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-19 serta implementasi kebijakan vaksinasi oleh sejumlah negara. Situasi tersebut didukung oleh keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan mampu mendorong perbaikan situasi perekonomian. Terkait hal tersebut, ketersediaan serta distribusi vaksin merupakan faktor yang menentukan, khususnya bagi pemulihan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Per Januari 2021, sejumlah negara telah memulai proses vaksinasi antara lain Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, serta Tiongkok. *Herd immunity* sebagai hasil program vaksinasi diharapkan dapat mendorong situasi untuk pulih dan secara kondusif mendorong tingkat konsumsi, kegiatan produksi, serta aktivitas perdagangan dunia.

Mengacu pada laporan yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2021, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi akan mampu tumbuh mencapai 6,0 persen pada tahun 2021. Pada proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan dikontribusikan secara lebih besar oleh perolehan akumulatif negara-negara berkembang, dengan tingkat pertumbuhan 6,7 persen, seiring proyeksi pertumbuhan akumulatif pada negara-negara maju sebesar 5,1 persen. Beberapa negara dengan proyeksi laju pertumbuhan yang tinggi di antaranya Amerika Serikat dan Perancis pada kelompok negara maju, dengan tingkat pertumbuhan 5,8-6,4 persen, serta India dan Tiongkok pada kelompok negara berkembang, dengan tingkat pertumbuhan 8,6-12,5 persen. Masih mengacu pada laporan yang sama, pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan akan mampu terealisasi hingga 8,4 persen, atau meningkat sebesar 15,9 persen dibanding realisasi pada tahun sebelumnya, dengan harga minyak mentah diperkirakan tumbuh hingga 41,7 persen dari sebelumnya sebesar -32,7 persen pada 2020.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksi bahwa pemulihan ekonomi global akan terealisasi dengan didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Hal tersebut dapat dilihat melalui sejumlah indikator, seperti pada kebijakan *The Fed* atas keberlanjutan kebijakan ekstra-akomodatif hingga awal tahun 2021. Kebijakan moneter Amerika Serikat yang akomodatif tersebut dijalankan seiring potensi pembelian aset pada *current pace*, 80 miliar dolar AS untuk UST dan

ANALYSIS OF THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

The analysis of the Company's business prospects is conducted by taking into account of projections on future developments, including a number of economic indicators that may affect the Company's business sustainability. The global economic situation in 2021 is projected to experience recovery in line with developments in the handling of the Covid-19 pandemic and the implementation of vaccination policies by several countries. This situation is supported by the continuation of the fiscal and monetary policy system which is expected to be able to stimulate the improvement of the economic situation. In this regard, the availability and distribution of vaccines is a determining factor, especially for the recovery of mobility rates and economic activities. As of January 2021, numerous countries were recorded to have started the vaccination process, namely Britain, the United States, the European Union, and China. *Herd immunity* as a result of the vaccination program is expected to improve the situation and conductively boost consumption levels, production activities, and global trade activities.

Based on a report released by the International Monetary Fund (IMF) in April 2021, global economic growth is projected to be able to grow to 6.0 percent in 2021. In this projection, accumulative growth of developing countries is estimated to contribute most to the world's economic growth at 6.7 percent, in line with the projected accumulative growth in developed countries of 5.1 percent. Several countries with high growth rate projections include the United States and France in the developed countries group, with a growth rate of 5.8-6.4 percent, and India and China in the developing countries group, with a growth rate of 8.6-12.5 percent. Still referring to the same report, the growth of global trade volume is estimated to reach up to 8.4 percent, or an increase of 15.9 percent compared to the realization in the previous year, where crude oil prices are estimated to grow by 41.7 percent from -32.7 percent by 2020.

In line with this, Bank Indonesia (BI) predicts that the global economic recovery will be realized through accommodative monetary policy. This can be seen from several indicators, such as The Fed policy which continues its extra accommodative policy until early 2021. This accommodative US monetary policy is accompanied by the potential for asset purchases at a current Pace, US\$80 billion for UST and US\$40 billion in Mortgage-Backed Securities (MBS) per month, with an



40 miliar dolar AS pada *Mortgage-Backed Securities* (MBS) per bulan dengan perluasan horizon yang lebih panjang. Untuk kawasan Uni Eropa, European Central Bank (ECB) diperkirakan akan tetap menjaga tingkat suku bunga pada posisi yang rendah, memperpanjang periode diskon suku bunga *Targeted Longer-Term Refinancing Operations* (TLTRO) hingga Juni 2022, serta meningkatkan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) hingga 1,85 triliun euro dengan perpanjangan waktu hingga Maret 2022. Seiring hal tersebut, Bank of Japan (BoJ) telah mempertahankan kebijakan moneter meliputi *short-term interest rate target* minus 0,1 persen dan menjaga target *long-term rates* di sekitar 0 persen dengan komitmen pembelian surat utang negara tanpa adanya limit, seiring mempertahankan program pembelian ekuitas ETFs (*Exchange Trade Funds*) dan J-REITs hingga 12 triliun yen dalam setahun, serta memperpanjang *emergency funding* program hingga 6 bulan hingga September 2021.

Pada lingkup nasional, pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berjalan dengan didukung oleh stimulus kebijakan moneter, meliputi (1) dukungan bagi stabilitas nilai rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yang terjaga, (2) suku bunga yang akan tetap rendah seiring realisasi penguatan inflasi, serta (3) melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN tahun 2021. Selain itu, kebijakan moneter juga akan didukung oleh kebijakan makroprudensial yang juga akan tetap akomodatif pada tahun 2021. Merujuk pada dokumen yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu mengalami perbaikan pada tahun 2021, mencapai angka pertumbuhan 5,0 persen. Pada proyeksi tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan akan mampu berada pada posisi stabil, pengaruh kondisi likuiditas di pasar global serta peluang pemulihan ekonomi pada negara-negara maju. Seiring hal tersebut, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat pada tahun 2021 diperkirakan akan berdampak pada realisasi tingkat inflasi sebesar 3,0 persen secara akumulatif, seiring perbaikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kesiapan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat melalui anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021, yang mencapai Rp688,3 triliun. Angka tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan dibanding anggaran pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp579,78 triliun. Lebih lanjut, anggaran PEN 2021 akan difokuskan untuk menciptakan dukungan pada 5 (lima) bidang, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi UMKD dan pembiayaan korporasi. Di samping itu, merujuk pada informasi APBN 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, anggaran belanja

extension of a longer tenor horizon. In the European Union, the European Central Bank (ECB) is estimated to keep interest rates low, extend the discounted interest rate period for the Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) to June 2022, and increase the Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) to 1.85 trillion euros with an extension period to March 2022. Meanwhile, the Bank of Japan (BoJ) decided to maintain monetary policy including the short-term interest rate target of -0.1 percent and maintain the long-term rate target at around 0 percent with a commitment to purchase government bonds without any limits, maintain the equity purchasing program of ETFs (Exchange Trade Funds) and J-REITs up to 12 trillion yen in a year, and extend the emergency funding program for up to 6 months until September 2021.

At the national level, the economic recovery in Indonesia is expected to be supported by monetary policy stimuli, namely (1) support for rupiah value stability in accordance with maintained market fundamentals and mechanisms, (2) interest rates that will remain low in line with the realization of inflation strengthening, and (3) action to continue the purchase of SBN (government bond) from the primary market to finance the 2021 APBN. In addition, monetary policy will also be supported by macroprudential policies which will also remain accommodative in 2021. Based on a document released by the Ministry of Finance, the Indonesian economy is expected to be able to improve by 2021 with a growth rate of 5.0 percent. In this projection, the rupiah exchange rate is expected to keep stable as a result of liquidity conditions on the global market and opportunities for economic recovery in developed countries. In line with this, the improving public consumption activities in 2021 is estimated to contribute to the realization of an accumulative inflation rate of 3.0 percent, in line with the improvement in Indonesia's economic growth rate.

The readiness of the government to support national economic recovery can be seen in the 2021 National Economic Recovery program budget, which reaches Rp688.3 trillion. This figure simultaneously shows an increase compared to the previous year's budget of Rp579.78 trillion. Furthermore, the 2021 PEN budget will focus on supporting 5 (five) sectors, namely health, social protection, priority programs, business incentives, as well as support for MSMEs and corporate financing. In addition, referring to the 2021 State Budget information released by the Ministry of Finance, the state budget will be focused on 3 (three) main targets, namely (1) continuing the

negara akan difokuskan pada 3 (tiga) sasaran utama, yaitu (1) melanjutkan penanganan kesehatan dampak Covid-19, utamanya peningkatan *supply side* danantisipasi pengadaan vaksin, (2) melanjutkan program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, PHK, Pra-Kerja), serta (3) dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak meliputi sektor Pangan, Pariwisata, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung diperkirakan akan memberikan sejumlah hambatan bagi pertumbuhan industri pelabuhan. Akan tetapi, seiring proyeksi perbaikan pada situasi ekonomi global dan nasional, perkembangan industri pelabuhan juga diperkirakan akan mengalami sejumlah perbaikan dibanding pada tahun sebelumnya. Dengan didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi, prospek industri pelabuhan masih menyediakan peluang yang potensial bagi Perusahaan, di antaranya terkait faktor (1) industri pelabuhan berpotensi tumbuh seiring situasi pada bisnis turunan pelabuhan, (2) potensi ekspansi domestik yang masih terbuka lebar, dengan memanfaatkan tren perdagangan positif antar-pulau di Indonesia, (3) tren digital yang membuka bidang-bidang baru untuk meningkatkan bisnis dan operasi, serta (4) dukungan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritim yang berpotensi mendukung ekspansi bisnis Perusahaan.

Atas berbagai proyeksi dan analisis pada sejumlah indikator ekonomi untuk tahun 2021, pihak manajemen Perusahaan meyakini bahwa IPC tetap memiliki peluang yang besar untuk secara optimal menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan sejumlah kesempatan usaha yang ada. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah menyiapkan beberapa strategi yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 mendatang. Strategi tersebut memiliki 6 (enam) fokus utama, yaitu Transformasi Digital, Transformasi Budaya Perusahaan, Inovasi Model Bisnis, Manajemen Inovasi, Restrukturisasi Anak Perusahaan, serta Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan yang merupakan program penugasan dari Pemegang Saham.

Selain itu, kami telah menganalisis bahwa IPC memiliki kekuatan yang optimal dalam menjawab tantangan dan meraih peluang usaha yang ada di masa yang akan datang. Adapun kekuatan yang dimiliki IPC antara lain:

- Memiliki struktur keuangan yang kuat,
- *Corporate branding* dan *networking* yang luas dengan pelaku industri nasional dan internasional sehingga investor cenderung memilih IPC sebagai mitra pengembangan pelabuhan di Indonesia,

handling of Covid-19 health impact, especially increasing the supply side and anticipating vaccine procurement, (2) continuing social protection program for accelerated recovery (Staple Food Vouchers, Layoff and Preemployment Cards), and (3) support for programs/activities in the affected sectors such as Food and Tourism sectors as well as expansion of access to capital for MSMEs through KUR interest subsidies.

The ongoing Covid-19 pandemic is predicted to bring an array of challenges to the growth of the port industry. However, in line with the projected improvement in the global and national economic situation, the port industry is also predicted to experience improvements compared to the previous year. Driven by the improving economy, the prospect of the port industry still provides potential opportunities for the Company which among others relate to the following factors (1) the port industry has the opportunity to grow in line with the situation in the port derivative business, (2) the potential for domestic expansion is still wide open, taking advantage of the positive inter-island trade trend in Indonesia, (3) digital trend that opens up new businesses to improve business and operations, and (4) government support for maritime infrastructure development that has the potential to support the Company's business expansion.

Based on various projections and analysis on a number of economic indicators in 2021, the Company's management believes that IPC still has a great opportunity to optimally face various challenges and take advantage of a number of existing business opportunities. To support this, the Company has prepared several strategies that will be implemented in 2021. This strategy has 6 (six) main focuses, namely Digital Transformation, Corporate Culture Transformation, Business Model Innovation, Innovation Management, Subsidiary Restructuring, and Synergy and Integration of Port Services SOEs which is an assignment program from Shareholders.

In addition, we have analyzed that IPC has optimal strength in responding to challenges and capturing future business opportunities. IPC's strengths include:

- Possess a strong financial structure,
- Extensive corporate branding and networking with national and international industry players, hence investors tend to choose IPC as a port development partner in Indonesia;



- Keunggulan dan pemahaman yang mendalam sebagai *landlord* dan operator terminal dalam bisnis kepelabuhan Indonesia,
- Pengalaman dalam pengembangan pelabuhan skala internasional,
- Portofolio bisnis anak dan cucu perusahaan yang telah terstruktur dan terdiversifikasi dengan baik dalam memberikan layanan terkait kepelabuhan logistik dan layanan pendukungnya,
- Lokasi geografis wilayah operasi IPC yang berada pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
- Memiliki kemampuan *handling cargo* untuk seluruh jenis kargo dengan fasilitas dan peralatan cabang-cabang pelabuhan yang dapat melayani hampir semua jenis kargo,
- Memiliki hubungan dengan *stakeholder* pelabuhan yang baik antara lain dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, Perguruan Tinggi dan *Global Network*,
- Memiliki talenta SDM yang telah terdidik dan terlatih dalam lingkup kepelabuhan dan logistik.
- Excellence and deep understanding as landlord and terminal operator in the port business in Indonesia;
- Sufficient experience in developing international-scale ports;
- Well-structured and well-diversified business portfolio of subsidiaries and second-tier subsidiaries in providing services related to port, logistics and supporting services;
- Geographical location with high economic growth as IPC's operational areas;
- Have cargo handling capabilities for all types of cargo with facilities and equipment of port branches that can serve almost all types of cargo;
- Have a good relationship with port stakeholders, among others, with the Central and Regional Government, Universities, and the Global Network;
- Have talents that have been educated and trained in the scope of port and logistics.

Dengan didukung oleh kekuatan kelangsungan usaha IPC yang baik serta pangsa pasar pada industri pelabuhan yang masih dominan, maka Perseroan optimis mampu meraih prospek usaha pada industri pelabuhan pada tahun 2021 maupun beberapa tahun yang akan datang.

Supported by good strength of IPC's business continuity and the dominant market share in the port industry, the Company is optimistic that the Company will be able to achieve business prospects in the port industry in 2021 and beyond.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa seluruh proses bisnis dan operasional yang dijalankan wajib dijalankan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), secara menyeluruh pada setiap aspek pengelolaan. Melalui penerapan GCG tersebut, Perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang kuat dapat terwujud secara berkelanjutan, serta memenuhi aspek tanggung jawab kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran dan keyakinan tersebut kemudian membuat IPC secara konsisten memiliki komitmen terhadap penerapan GCG di seluruh lini Perusahaan, meliputi Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, serta seluruh Entitas Anak.

Untuk menjaga efektivitas penerapan GCG di tiap tahun buku, Perusahaan telah memiliki dan menerapkan *roadmap* GCG sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/Pl.II-17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017-2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company realizes that all its business and operational processes must be carried out by adhering to Good Corporate Governance (GCG) principles thoroughly in every aspect of management. Through GCG implementation, the Company believes that it can achieve strong business growth in a sustainable manner while fulfilling its responsibility to stakeholders in accordance with the provisions of the prevailing laws/regulations. Ingrained with this awareness and belief, IPC has consistently committed to the implementation of GCG in all lines of the Company, from the Head Office, Port Branches, to all Subsidiaries.

To maintain the effectiveness of the GCG implementation in each financial year, the Company has established and implemented GCG roadmap in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/Pl.II-17 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of the 2017-2020 Good Corporate

Roadmap tersebut sekaligus merupakan dasar pelaksanaan pengembangan penerapan GCG Perusahaan, untuk tahun 2017 hingga 2020. Lebih lanjut, Penyusunan *Roadmap* GCG IPC dilakukan untuk memastikan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja bisnis seiring penciptaan manfaat bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (*shared value*). Keberadaan *Roadmap* GCG IPC diharapkan mampu semakin meningkatkan kesadaran, baik seluruh Insan Perusahaan maupun pemangku kepentingan lain, tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus memantapkan komitmen serta posisi IPC dalam menjalankan pengembangan bisnis secara beretika sesuai ketentuan serta standar *best practices* yang berlaku.

Sejak awal diberlakukan, *Roadmap* GCG IPC telah berperan secara optimal sebagai pedoman pengembangan penerapan GCG Perusahaan. Sebagian hasil dari pelaksanaan pengembangan GCG sesuai *Roadmap* GCG IPC telah dapat dirasakan sebagai capaian-capaian jangka pendek (*quick win*), meliputi terealisasinya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *roadmap* penyempurnaan GCG). Sebagai tolok ukur capaian penerapan GCG tersebut, Perusahaan mampu meningkatkan nilai *assessment* GCG sesuai ketentuan pada peraturan Kementerian BUMN serta berhasil memperoleh berbagai penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

Sesuai *Roadmap* GCG IPC 2016-2020, pengembangan penerapan GCG Perusahaan untuk tahun 2020 berfokus pada sasaran *Citizenship*. Melalui sasaran tersebut, IPC diharapkan mampu tumbuh serta memantapkan langkah sebagai perusahaan berkelas dunia sekaligus menjadi rujukan penerapan GCG bagi perusahaan lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pengembangan yang dilakukan pada 2020 merupakan kelanjutan dari pengembangan pada fase selanjutnya, yaitu pada sasaran *Sustainable* yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Melalui pelaksanaan pengembangan GCG secara berkesinambungan, Perusahaan menjadikan tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* GCG pada tahun sebelumnya sebagai dasar peningkatan kualitas penerapan. Terkait hal tersebut, Perseroan telah menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi) dari hasil *assessment* GCG pada tahun 2019 secara menyeluruh.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan *assessment* GCG sesuai parameter Kementerian BUMN yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), dengan pencapaian skor sebesar 98,73 dari skor maksimal 100, atau setara dengan

Governance (GCG) *Roadmap* of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The roadmap also serves as the reference in developing the Company's GCG implementation for 2017 to 2020. Furthermore, IPC GCG Roadmap is prepared to ensure direction and long-term achievements of governance aspects in order to support the achievement of business performance along with the creation of shared value with all stakeholders. The existence of the IPC GCG Roadmap is expected to be able to further increase awareness of all employees of the Company and other stakeholders about the importance of good corporate governance implementation, as well as strengthen IPC's commitment and position in carrying out ethical business development in accordance with applicable regulations and best practice standards.

Since its first enforcement, the IPC GCG Roadmap has contributed optimally as a guideline for the development of the Company's GCG implementation. Some of the results of the implementation of GCG development that conformed to IPC GCG Roadmap were short-term achievements (quick win), including the realization of GCG governance structure and infrastructure (guidelines and roadmap for GCG improvement). As a benchmark for the achievement of GCG implementation, the Company was able to increase GCG assessment score according to the provisions of the Ministry of SOE regulations and has succeeded in obtaining various national level awards in the GCG sector.

In accordance with the 2016-2020 IPC GCG Roadmap, the development of the Company's GCG implementation in 2020 was focused on Citizenship goals. With this target, IPC is expected to be able to grow and strengthen its steps as a world-class company as well as benchmark for GCG implementation for other companies, both at the national and international levels. The development carried out in 2020 is a continuation of the development in the next phase, namely the Sustainable target that have been implemented in 2019. Through the implementation of sustainable GCG development, the Company improved the quality of GCG implementation based on follow-up of GCG assessment recommendations. In this regard, the Company has thoroughly followed-up Areas of Improvement (Aoi) of GCG assessment results in 2019.

In 2020, the Company carried out GCG assessment according to the parameters set by the Ministry of SOEs (self-assessment) with a score of 98,73 from a maximum score of 100, or equivalent to "Excellent" predicate. This score was recorded



predikat "Sangat Baik". Capaian skor tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan perolehan dibanding para tahun sebelumnya, yang sebesar 98,55 atau setara dengan predikat "Sangat Baik."

EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan sepenuhnya menyadari adanya potensi munculnya risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran proses pelaksanaan bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya dan metode yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan munculnya atau terjadinya risiko usaha melalui program manajemen risiko yang dilakukan secara komprehensif dan terukur untuk mengelola dan memitigasi risiko dengan baik.

Proses manajemen risiko di lingkungan IPC dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu Pendekatan *Top-Down*, *Bottom-Up*, dan *Loss Event Management* (LEM). Berdasarkan pendekatan tersebut, dengan menggunakan *Risk Control & Self-Assesment* (RCSA), diperoleh 16 (enam belas) risiko yang diidentifikasi mampu mempengaruhi kinerja Perseroan, Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan, dimana salah satu risiko, yaitu Risiko Penularan dan Penyebaran Covid-19 berada di level Sangat Tinggi, lalu 7 (tujuh) risiko berada di level Menengah, sedangkan 8 (delapan) risiko lainnya berada di level Rendah. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi oleh Perseroan tersebut telah ditentukan upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan program manajemen risiko di Perseroan, beberapa program strategis di bidang Manajemen Risiko tahun 2020 telah dijalankan, antara lain:

1. Penyusunan *Business Continuity Management* (BCM) di 5 (Lima) Cabang Pelabuhan, yaitu Cabang Pelabuhan Jambi, Cabang Pelabuhan Palembang, Cabang Pelabuhan Cirebon, Cabang Pelabuhan Pontianak dan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam;
2. Pembuatan *Automatic Risk Early Warning System*;
3. Peningkatan *risk culture* dan *awareness* terhadap pentingnya implementasi Manajemen Risiko di lingkungan kerja Perseroan melalui beberapa langkah, diantaranya penyelenggaraan *Risk Champion/Agent Awards*, Program Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur, dan Seminar Manajemen Risiko.

to increase compared to the achievement in the previous year, which was 98.55 or equivalent to "Excellent".

EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company is fully aware of risk potential that can hinder smooth implementation of business process. Therefore, the Company requires an effort and method that can be used to anticipate and prevent the possibility of the emergence or occurrence of business risk through a comprehensive and measurable risk management program to manage and mitigate risks properly.

The risk management process in the IPC environment is carried out using 3 (three) approach methods, namely the *Top-Down*, *Bottom-Up*, and *Loss Event Management* (LEM) approach. Based on this approach, using *Risk Control & Self-Assesment* (RCSA), there are 16 (sixteen) risks identified as being able to affect the performance of the Company, Port Branches, and Subsidiaries, where one of the risks, namely the Risk of Covid-19 Transmission and Spread, which is recorded to be at Very High level, 7 (seven) risks at the Medium level, while the other 8 (eight) risks are at the Low level. The Company has determined risk mitigation efforts for all these identified risks in order to anticipate possible risks that may arise in the Company's business processes in the future.

To strengthen the effectiveness of the implementation of risk management programs in the Company, several strategic programs in the Risk Management field in 2020 have been implemented, among others:

1. Preparation of *Business Continuity Management* (BCM) in 5 (Five) Port Branches, namely Jambi Port Branch, Palembang Port Branch, Cirebon Port Branch, Pontianak Port Branch and Pangkal Balam Port Branch;
2. Creation of an *Automatic Risk Early Warning System*;
3. Improvement of *risk culture* and *awareness* of the importance of implementing Risk Management in the Company's work environment through several initiatives, i.e. organizing *Risk Champion/Agent Awards*, *Structured Risk Management Training Program*, and *Risk Management Seminar*.

Agar implementasi manajemen risiko di Perseroan dapat berjalan efektif, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan melalui pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity*). Terlebih, dalam rangka menuju *World Class Port*, *risk maturity* Perseroan harus terus ditingkatkan. Pada tahun 2020, telah dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan nilai **3,10**. Berdasarkan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko tersebut, masih terdapat beberapa evaluasi yang harus diperhatikan dalam pengembangan implementasi manajemen risiko IPC ke depannya.

EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Perseroan, maka Manajemen melakukan revisi terhadap Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal dengan mengacu pada Kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 tanggal 29 Desember 2020. Dengan adanya penetapan pedoman baru tersebut, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN

Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) SDM BUMN, yaitu AKHLAK yang merupakan akronim dari **A**manah, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif, sebagai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter SDM.

Untuk meningkatkan pemahaman Insan IPC terhadap nilai AKHLAK, maka Perseroan melakukan internalisasi *value* AKHLAK secara serentak di seluruh wilayah operasional IPC maupun Anak Perusahaan serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi melalui 4 (empat) *milestone*, yaitu *Awareness*, *Understanding*, *Buy-in*, *Ownership*. Keempat *milestone*

In order to ensure effective risk management implementation in the Company, the Company always carries out evaluations and improvements by measuring the risk management maturity level. Moreover, in order to become a World Class Port, the Company's risk maturity must be continuously improved. In 2020, risk maturity level at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was measured at **3.10**. Based on the measurement of the maturity level of risk management implementation, there were still a number of evaluations that must be considered in developing the implementation of IPC risk management going forward.

EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

In order to increase the effectiveness of the Internal Control System within the Company, the Management has revised the General Guidelines for Internal Control System by referring to the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework which has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 dated December 29, 2020. With the establishment of these new guidelines, the implementation of the Internal Control System in the Company is expected to increase the effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in achieving the Company's objectives, ensuring accurate, reasonable, timely and relevant reports, as a basis for making appropriate and accountable decisions, as well as ensure that all Company activities are carried out in accordance with the applicable provisions and laws and regulations.

CORPORATE CULTURE TRANSFORMATION

Along with the issuance of Circular Letter of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) implements Core Values of SOE HR, namely AKHLAK, which is an acronym for **A**manah (Trustworthy), **K**ompeten (Competent), **H**armonis (Harmonious), **L**oyal, **A**daptif (Adaptive), and **K**olaboratif (Collaborative), and simultaneously serves as a Corporate Culture and basis building the character of HR.

To increase IPC's understanding of AKHLAK value, the Company internalizes AKHLAK value simultaneously in all operational areas of IPC and its Subsidiaries and Consolidated Affiliated Companies through 4 (four) milestones, namely Awareness, Understanding, Buy-in, Ownership. The four internalization milestones are performed by taking into



internalisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip *People (improving role fit)*, *Practice (connecting roles to purpose)*, *Place and Narrative (establishing connections in the workplace)*, sehingga *value* AKHLAK dapat dipahami dan dilaksanakan dengan *embedded mechanism* terhadap proses bisnis Perseroan.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan implementasi *Core Values* BUMN, yaitu AKHLAK, IPC melakukan Survei Implementasi Budaya Perusahaan pada tanggal 11 – 22 Desember 2020 dengan menggunakan 288 *sampling*, yang terdiri dari 118 Pekerja Kantor Pusat dan 172 Pekerja Cabang Pelabuhan. Dari kegiatan survei tersebut, diperoleh hasil Indeks Implementasi Budaya Perusahaan secara Korporat tahun 2020 yang terealisasi sebesar 4,56 atau melampaui target dalam KPI *Corporate* tahun 2020 sebesar 4,55.

INTERNALISASI KODE ETIK BISNIS

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perseroan melakukan pembaruan terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Keputusan Direksi No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020. Pedoman Kode Etik Bisnis IPC ini berlaku bagi seluruh Insan IPC sebagai bukti komitmen Insan IPC, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mewujudkan perilaku etika profesional dan etika kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal tersebut tercermin dari penandatanganan Pakta Integritas, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, dan Janji Kode Etik Bisnis.

Selain itu, dalam rangka membangun kultur Perseroan berbasis nilai-nilai GCG dan *Corporate Culture*, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada seluruh Insan IPC secara berkala.

EFEKTIVITAS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka menciptakan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur, serta meningkatkan kualitas penerapan GCG di seluruh lini bisnis Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada seluruh Insan IPC maupun *stakeholder* lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan terhadap nilai-nilai etika yang berlaku melalui Program IPC Bersih.

account the principles of *People (improving role fit)*, *Practice (connecting roles to purpose)*, and *Place and Narrative (establishing connections in the workplace)*. This aims so that AKHLAK value can be understood and implemented with an embedded mechanism for the Company's business processes.

To determine the level of understanding and implementation of SOE Core Values, namely AKHLAK, IPC conducted a Corporate Culture Implementation Survey on December 11-22, 2020 using 288 sampling, consisting of 118 Head Office Workers and 172 Port Branch Workers. From the survey activities, the realization of the 2020 Corporate Culture Implementation Index was 4.56 or exceeded the target in the 2020 Corporate KPI of 4.55.

INTERNALIZATION OF THE CODE OF BUSINESS ETHICS

On August 24, 2020, the Company renewed the Guidelines for Business Ethics of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020. This Code of Business Ethics Guidelines applies to all IPC People as proof of the commitment of IPC People, including the Board of Commissioners and Directors, to realize professional behavior ethics and work ethics in carrying out daily work. This is reflected on the signing of Integrity Pact, Conflict of Interest Statement, and Promise of the Code of Business Ethics.

In addition, in order to build corporate culture based on the values of GCG and *Corporate Culture*, the Company is obliged to conduct dissemination and internalization of the values contained in the Code of Business Ethics of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to all IPC personnel on a regular basis.

EFFECTIVENESS OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

In order to create a culture of transparency, open and honest communication, and improve the quality of GCG implementation in all lines of the Company's business, the Company encourages all IPC personnel and other stakeholders to submit reports regarding indications of violations committed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) personnel and Subsidiaries towards the ethical values that apply through IPC Bersih Program.

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 48 laporan baru yang masuk ke dalam saluran WBS melalui berbagai jenis kontak, yang mana dari 48 laporan tersebut, 3 laporan di antaranya termasuk dalam Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan, sedangkan 45 laporan lainnya merupakan Laporan di Luar Cakupan. Seluruh laporan yang masuk tersebut telah ditangani dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku di Perseroan. Secara berkala, Perseroan juga melakukan pengujian saluran IPC Bersih setiap satu bulan sekali, dengan hasil bahwa seluruh saluran IPC Bersih, yaitu WhatsApp, SMS, *email*, telepon, faksimile dan *Website* IPC Bersih, berstatus aktif dan berfungsi dengan baik.

PENEGAKAN BUDAYA ANTI-KORUPSI DAN ANTI-SUAP

Selaras dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang sehat, jujur, adil, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Perseroan, IPC secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk korupsi dan suap. Untuk mendukung terwujudnya budaya anti korupsi dan anti suap di seluruh lingkungan kerja IPC, Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berbasis pada ISO 37001:2016 dan menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis pada ISO 37001:2016 dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/31/81.1/PKN/UT/PI.II-2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 31 Agustus 2020.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan telah membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.02/27/P/1/PKN/UT/PI.II-2020 tanggal 27 Agustus 2020. Selain itu, Perseroan telah memberikan program pengembangan kompetensi berupa *Training* ISO 37001 *Awareness* dan Internal Audit kepada 25 (dua puluh lima) Pekerja IPC yang bertugas untuk menjalankan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Auditor Internal.

Sebagai perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka menegakkan upaya pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal di lingkungan aparatur negara. Pada periode 1 Januari – 30 April 2020, IPC memiliki total Wajib Lapo

As of December 31, 2020, there were 48 new reports that entered the WBS channel through various types of contacts. Out of 48 reports, 3 of which fell into the Indication of Violation of Company Policies and Regulations category, while the other 45 reports were Uncategorized Report. All reports that have been submitted have been handled properly in accordance with the applicable policies in the Company. Periodically, the Company also tests IPC Bersih channel once a month, and the results show that IPC Bersih channels, namely WhatsApp, SMS, e-mail, telephone, facsimile and IPC Bersih Website, are active and functioning properly.

ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY CULTURE

In line with the Company's commitment to implement GCG principles to create a corporate culture that is healthy, honest, fair and compliant with the laws and regulations within the Company, IPC strongly condemns and prohibits all forms of corruption and bribery. To support the creation of an anti-bribery and anti-bribery culture throughout the IPC work environment, the Company has implemented an Anti-Bribery Management System based on ISO 37001: 2016 and established Guidelines for Anti-Bribery Management Systems based on ISO 37001: 2016 in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/31/81.1/PKN/UT/PI.II-2020 concerning the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Anti-Bribery Management System on August 31, 2020.

To improve the quality of the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP), the Company has established an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.02/27/P/1/PKN/UT/PI.II-2020 dated August 27, 2020. In addition, the Company has provided competency development programs in the form of ISO 37001 Awareness and Internal Audit Training to 25 (twenty-five) IPC Employees who are tasked with carrying out the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and the Internal Auditor.

As a company with the status of a State-Owned Enterprises (BUMN), the Company is obliged to comply with applicable laws and regulations, one of which is related to the obligation to submit a State Officials Wealth Report (LHKPN) in order to enforce efforts to eradicate corruption and acts of internal deviation within the state apparatus. In the period of January 1 - April 30, 2020, IPC has a total of 92 (ninety-two) LHKPN Mandatory Reporters. All of the IPC LHKPN Mandatory



LHKPN sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang. Seluruh Wajib Laporkan LHKPN IPC tersebut telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejalan dengan diperolehnya Sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pada tahun 2020 juga dilakukan perubahan atas Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/15/6/2/KPP/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juni 2020 sebagai upaya untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya praktik gratifikasi di seluruh lingkup operasional Perseroan serta memberi pemahaman kepada Insan IPC tentang perlakuan terhadap Gratifikasi. Pada tahun 2020, IPC juga menyosialisasikan larangan penerimaan gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari *stakeholder* dan pihak-pihak lainnya untuk Insan IPC, melalui media sosial resmi Perseroan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan, yaitu Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

Untuk mendukung penegakan budaya anti-gratifikasi, Perseroan menyediakan saluran pengaduan gratifikasi melalui Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk oleh Direksi Perseroan. Selain itu, laporan gratifikasi juga dapat disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) dan akan diproses langsung oleh KPK. Selama tahun 2020, terdapat 13 (tiga belas) laporan gratifikasi yang masuk melalui mekanisme pengaduan gratifikasi. Seluruh laporan gratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke KPK, serta telah mendapat penetapan status laporan gratifikasi dari KPK.

PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) atas dasar kesadaran bahwa hubungan yang baik antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor yang penting guna terciptanya pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan secara jangka panjang. Selain itu, Perusahaan juga menyadari bahwa IPC merupakan sebuah BUMN yang pada dasarnya berkewajiban untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, termasuk masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Atas dasar tersebut, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menjalankan pengelolaan bisnis dan operasional seiring pemenuhan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan terkait, meliputi masyarakat sekitar, lingkungan

Reporters have submitted the LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK).

In line with the achievement of the ISO 37001:2016 Certificate concerning Anti-Bribery Management System (SMAP), in 2020 there were also changes to the Gratification Control Guidelines which have been stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/15/6/2/KPP/UT/PI.II-20 dated June 15, 2020 as an effort to control and prevent the practice of gratification throughout the Company's operational scope as well as to provide understanding to IPC personnel regarding the treatment of Gratification. In 2020, IPC also disseminated the prohibition of receiving gratuities, either directly or indirectly from stakeholders and other parties for IPC personnel, through the Company's official social media before the implementation of religious holidays, namely Eid al-Fitr and Christmas and New Year.

To support the enforcement of the anti-gratification culture, the Company provides a channel for gratification complaints through the Gratification Control Unit (UPG) Team formed by the Company's Board of Directors. In addition, gratification reports can also be submitted online through the Online Gratification (GOL) application that will be processed directly by the KPK. During 2020, there were 13 (thirteen) gratification reports received through gratification reporting mechanism. All these reports have been followed up and reported to the KPK and received status of gratification report from the KPK.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IMPLEMENTATION

The Company implements corporate social responsibility (CSR) programs based on the awareness that good relationship between the Company and all stakeholders is critical to creating strong and sustainable business growth in the long term. In addition, the Company also realizes that IPC is a SOE which basically has the obligation to deliver positive contribution to the community, including the communities around the Company's operational areas. With this in mind, the Company is highly committed to always carrying out business and operational management while fulfilling its social responsibility to relevant stakeholders, namely the surrounding community, the environment, and all employees of the Company. Along with the implementation of CSR program, the Company runs Partnership and Community

hidup, serta seluruh Insan Perusahaan. Seiring pelaksanaan program CSR, Perusahaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) secara berkesinambungan pada setiap tahun buku.

Pelaksanaan program CSR Perusahaan untuk tahun 2020 meliputi 7 (tujuh) sektor, yaitu (1) pemberdayaan pembinaan masyarakat kurang mampu, (2) pembangunan/pengembangan lingkungan, fasilitas serta pelestarian alam, (3) pendidikan/pelatihan, kegiatan olahraga dan kesenian, (4) kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan, (5) peningkatan kesehatan, (6) promosi, pembinaan, pendampingan dan pemasaran usaha kecil menengah, serta (7) sektor lainnya. Lebih lanjut, pelaksanaan program CSR Perusahaan mencakup penyaluran pada wilayah di sekitar area-area operasional, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Banten, Jambi, Bengkulu, Bangka, serta Belitung. Atas keseluruhan pelaksanaan program CSR tahun 2020, Perusahaan merealisasikan penyaluran dana mencapai Rp12,81 miliar.

Program bina lingkungan yang dilaksanakan Perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Sesuai ketentuan tersebut, program bina lingkungan yang dilaksanakan Perusahaan meliputi 7 (tujuh) sektor, yaitu (1) bantuan kepada korban bencana alam, (2) bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, (3) bantuan peningkatan kesehatan, (4) bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, (5) bantuan sarana ibadah, (6) bantuan pelestarian alam, serta (7) bantuan sosial masyarakat pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, sasaran program bina lingkungan oleh Perusahaan adalah masyarakat sekitar wilayah operasional dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling memberi manfaat) antara IPC dan masyarakat sekitar, seiring terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Untuk tahun 2020, Perusahaan telah merealisasikan penyaluran dana untuk program bina lingkungan sebesar Rp26,78 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 8,26 persen dibanding realisasi per akhir tahun sebelumnya yang sebesar Rp24,27 miliar.

Development Program (PKBL) on an ongoing basis every financial year.

The implementation of the Company's CSR program in 2020 centered on 7 (seven) sectors, namely (1) empowerment of underprivileged communities, (2) development of the community, facilities and natural preservation, (3) education/training, sports and arts activities, (4) social and religious activities, (5) healthcare improvement, (6) promotion, guidance, assistance and marketing of small and medium enterprises, and (7) other sectors. Furthermore, the implementation of the Company's CSR program includes distribution to areas around operational areas, namely DKI Jakarta, West Java, Lampung, South Sumatra, West Sumatra, West Kalimantan, Banten, Jambi, Bengkulu, Bangka, and Belitung. For the overall implementation of the 2020 CSR program, the Company incurred Rp12.81 billion of funds.

The community development program implemented by the Company is based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/04/2020 concerning Partnership and Community Development Program. In accordance with these provisions, the community development program implemented by the Company centered on 7 (seven) sectors, namely (1) natural disaster victim assistance, (2) education and/or training assistance, (3) healthcare improvement assistance, (4) assistance facilities and infrastructure development assistance, (5) religious facilities assistance, (6) natural conservation assistance, and (7) socio-community assistance to alleviate poverty. Specifically, the target of the Company's community development is the community around the operational area where the Company provides community empowerment assistance. The implementation of this program is expected to be able to support as well as build harmonious and mutually beneficial relationships between IPC and the surrounding community while seeking to develop conducive climate for the continuity of the Company's business activities. In 2020, the Company incurred Rp26.78 billion for community development program, or an increase of 8.26 percent compared to the realization at the end of the previous year which amounted to Rp24.27 billion.



PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perusahaan menerapkan kebijakan pengelolaan SDM secara menyeluruh pada setiap tahap, meliputi rekrutmen, pengembangan, pola karier, predikat jabatan fungsional, promosi jabatan struktural dan fungsional, serta penghasilan non-bulanan. Kebijakan yang diterapkan tersebut diharapkan mampu mendorong daya saing Perusahaan, sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, sistem tata kelola SDM IPC mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyusunan *Individual Development Plan* bagi para pekerja, program pelatihan baik yang dilaksanakan secara *inhouse* maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal, serta program pengembangan melalui *on the job training* atau magang baik di dalam maupun di luar lingkup IPC.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterapkan Perusahaan untuk tahun 2020 didasarkan pada *roadmap* Direktorat SDM untuk tahun 2016-2020. Mengacu pada *roadmap* tersebut, strategi pengelolaan dan pengembangan SDM berfokus pada 4 (empat) tahapan utama, yaitu tahapan *fit in infrastructure, enhancement, establishment*, hingga sampai pada *world class port operator*. Khusus untuk tahun 2020, Perusahaan menjalankan strategi pengelolaan dengan fokus pada "*World Class Human Resources Management Implementation*". Secara lebih lanjut, strategi yang diterapkan pada tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan pengembangan organisasi yang berkelas dunia, seiring penciptaan kualitas SDM serta pelayanan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Perusahaan melaksanakan program pembelajaran SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan karyawan, meliputi pendidikan, pelatihan, serta magang. Untuk tahun 2020, Divisi Pembelajaran SDM Perusahaan telah melaksanakan sejumlah 159 program, atau mencapai 96,95 persen dari target yang direncanakan pada RKAP 2020 (Revisi). Pada sejumlah program tersebut, terdapat realisasi jumlah karyawan peserta program sebanyak 6,480 peserta dari 3.159 peserta yang direncanakan, atau mencapai 205,13 persen dari target yang direncanakan. Program pembelajaran SDM yang dilaksanakan Perusahaan bersifat adaptif dengan perkembangan situasi pada tahun 2020, khususnya terkait pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, Perusahaan mengalihkan sebagian pelaksanaan program melalui sistem daring, berupa webinar serta *e-learning*, yang merupakan sistem alternatif bersifat sementara. Lebih lanjut, penyelenggaraan webinar serta *e-learning* berfokus pada pengembangan *practical skill* serta *sharing knowledge* khususnya terkait strategi menghadapi situasi pandemi Covid-19, dengan mengundang narasumber yang relevan, baik dari pihak internal maupun eksternal.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Company implements a comprehensive HR management policy at every stage, including recruitment, development, career patterns, functional titles, promotions for structural and functional positions, as well as non-monthly income. The policies implemented are expected to be able to boost the Company's competitiveness in accordance with the vision and mission that has been set. Furthermore, the IPC HR governance system includes 3 (three) aspects, namely the preparation of an Individual Development Plan for employees, training programs carried out in-house and in partnership with external parties, as well as development programs through on the job training or internships both inside and outside IPC environment.

The management of Human Resources (HR) implemented by the Company in 2020 was based on the roadmap of the HR Directorate for 2016-2020. Referring to the roadmap, the HR management and development strategy focuses on 4 (four) main stages, namely the stages of fit in infrastructure, enhancement, establishment, to the world class port operator. Especially for 2020, the Company carries out a management strategy with a focus on "*World Class Human Resources Management Implementation*". Furthermore, the strategy implemented in 2020 aims to realize world-class organizational development, along with the improvement of quality human resources and superior and competitive HR services.

The company implements an HR learning program through various employee development activities, including education, training, and internships. In 2020, the Company's HR Learning Division has implemented a total of 159 programs, or reached 96.95 percent of the target planned in the 2020 RKAP (Revised). In these programs, there were 6,480 out of 3,159 participants, or reaching 205.13 percent of the planned target. The HR education program carried out by the Company as adaptive to the development of the situation in 2020, especially related to the Covid-19 pandemic. In 2020, several HR learning program was conducted online in the form of webinars and e-learning, which are temporary alternative systems. Furthermore, the implementation of webinars and e-learning is focused on developing practical skills and sharing knowledge, especially related to strategies for dealing with the Covid-19 pandemic situation, by inviting relevant sources from internal and external party to the Company.

Untuk tahun 2020, Perusahaan memiliki SDM sejumlah 10.257 orang yang terbagi ke dalam posisi organik serta posisi non-organik. Pegawai organik Perusahaan merupakan karyawan dengan penugasan pada Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan, yang per 31 Desember 2020 telah terealisasi sejumlah 2.609 orang, serta pegawai organik rekrutmen internal Anak Perusahaan yang untuk tahun 2020 terealisasi sejumlah 1.059 orang. Selanjutnya, pegawai non-organik pada Induk Perusahaan terealisasi sebanyak 914 orang, sementara pegawai non-organik pada Anak Perusahaan sebanyak 5.675 orang.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan melaksanakan pengembangan Teknologi Informasi untuk tahun 2020 sesuai *roadmap* Teknologi Informasi 2016-2020. Secara umum, *roadmap* Teknologi Informasi 2016-2020 bertujuan untuk memberikan arahan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perusahaan. Lebih lanjut, *roadmap* tersebut memiliki tujuan untuk (1) menyiapkan jalan guna mewujudkan tujuan Perusahaan untuk menjadi *world class port* dan penyedia layanan logistik yang unggul, (2) mewujudkan implementasi TI yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu kegiatan non-operasional pelabuhan, (3) meningkatkan kapasitas Divisi Sistem Informasi dalam mengimplementasikan teknologi baru dan memanfaatkannya untuk mendukung *core* bisnis Perusahaan.

Mengacu pada *roadmap* tersebut, pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan berfokus pada 5 (lima) aspek, yaitu *operation*, *support*, *dashboard*, serta ERP. Untuk tahun 2020, aspek *operation* dilaksanakan melalui program Sistem Operasional Kepelabuhan Fase IV serta *Port Automation*; aspek *support* direalisasikan melalui program SIM Risk dan GCG, *Custom Portal*, CRM, DMS, *Equipment*, Monitoring, serta *E-Procurement*; aspek *dashboard* direalisasikan atas visualisasi *dashboard intelligence and analytics*; aspek ERP direalisasikan melalui program ERP Cloud, *Planning and Budgeting*, *Integrated Cash Management*, *Fixed Asset*, dan HRIS; serta aspek infrastruktur melalui pelaksanaan program *cloud infrastructure*.

Secara lebih lanjut, pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan untuk tahun 2020 meliputi 3 (tiga) sektor, yaitu pengembangan dan implementasi aplikasi, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan tata kelola Teknologi Informasi. Sektor pengembangan dan implementasi aplikasi mencakup aspek pelayanan kapal, pelayanan terminal, pelayanan keuangan, pelayanan SDM,

In 2020, the Company's workforce consisted of 10,257 people divided into organic and non-organic employees. The Company's organic employees are employees stationed at Head Office, Port Branches and Subsidiaries, which as of December 31, 2020 totaled 2,609 people, and 1,059 people for organic employees internally recruited by Subsidiaries in 2020. Furthermore, there were 914 non-organic employees at the Parent Company and 5,675 non-organic employees at the Subsidiaries.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

The Company implemented Information Technology development in 2020 according to the 2016-2020 Information Technology roadmap. In general, the 2016-2020 Information Technology roadmap aims to provide direction for the development of information and communication technology within the Company. Furthermore, the roadmap aims to (1) path the way for realizing the Company's goal of becoming a world class port and superior logistics service provider, (2) realize an effective and realistic IT implementation to improve the quality of non-operational port activities, (3) increase the capacity of the Information Systems Division in implementing new technology and utilizing it to support the Company's core business.

Based on the roadmap, the implementation of the Company's Information Technology development is focused on 5 (five) aspects, namely operations, support, dashboards, and ERP. In 2020, IT development operation is carried out through Port Automation and Port Operational System Phase IV programs; IT support is realized through SIM Risk and GCG programs, Custom Portal, CRM, DMS, Equipment, Monitoring, and E-Procurement; IT dashboard is realized through dashboard visualization of intelligence and analytics; ERP is realized through the ERP Cloud, Planning and Budgeting, Integrated Cash Management, Fixed Asset, and HRIS programs; and IT infrastructure is realized through the implementation of cloud infrastructure program.

Furthermore, the implementation of the Company's Information Technology development in 2020 centered on 3 (three) sectors, namely application development and implementation, infrastructure development, and Information Technology governance development. The application development and implementation sector covers aspects of ship services, terminal services, financial services, human



serta pelayanan dukungan lainnya. Khusus pada sektor tata kelola Teknologi Informasi, pada tahun 2020 Perusahaan telah melaksanakan penyusunan IT *Risk Management* sebagai panduan terhadap risiko yang mungkin terjadi terkait dengan teknologi informasi dan kaitannya terhadap bisnis Perusahaan, termasuk mitigasi dalam menghadapi risiko tersebut. Selain itu, Perusahaan juga telah melaksanakan penyusunan *Enterprise Release Management and Version Control* untuk meningkatkan proses *manage change* dalam implementasi solusi IT termasuk sebagai manajemen *versioning* untuk seluruh solusi aplikasi.

Pengembangan Teknologi Informasi yang dilakukan Perusahaan untuk tahun 2020 diharapkan mampu memberikan dukungan secara maksimal terhadap efektivitas pengelolaan bisnis dan operasional secara jangka panjang.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2020, terdapat perubahan komposisi jajaran Direksi IPC, dengan uraian sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI – 2 MARET 2020

Komposisi anggota Direksi pada periode 1 Januari hingga 2 Maret 2020 berjumlah 8 (delapan) orang, dengan uraian sebagai berikut:

Komposisi Anggota Direksi IPC Periode 1 Januari – 2 Maret 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Elvyn Gani Masasya	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / April 22, 2016 – March 2, 2020 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Arif Suhartono	Direktur Komersial / Commercial Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
4.	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / November 26, 2018 – March 2, 2020 (First Period)
5.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – June 18, 2020 (First Period)
6.	Prasetyadi	Direktur Operasi / Operations Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – March 2, 2020 (First Period)
7.	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Resources Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 – 11 Februari 2020 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – February 11, 2020
8.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)

resources services, and other support services. Particularly in the Information Technology governance sector, in 2020 the Company prepared IT Risk Management as a guide to possible risks related to information technology and its relation to the Company's business, including mitigation in dealing with these risks. Moreover, the Company prepared Enterprise Release Management and Version Control to improve the process of change management in implementing IT solutions, including as versioning management for all application solutions.

The development of Information Technology carried out by the Company in 2020 is expected to be able to provide maximum support for the effectiveness of long-term business and operational management.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2020, there was a change in the composition of Board of Directors of IPC as described below:

PERIOD OF JANUARY 1 - MARCH 2, 2020

Members of the Board of Directors for the period of January 1 - March 2, 2020 consisted of 8 (eight) people as detailed below:

Board of Directors Composition of IPC Period of January 1 - March 2, 2020

PERIODE 2 MARET – 18 JUNI 2020

Pada tanggal 2 Maret 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal Perseroan melakukan perombakan jajaran Direksi Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), perubahan jajaran Direksi IPC adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat terhadap 4 (empat) anggota Direksi, yaitu Bapak Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama, Bapak Prasetyadi sebagai Direktur Operasi, Bapak Widyaka Nusapati sebagai Direktur Keuangan, dan Bapak Rizal Ariansyah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
2. Penunjukan Bapak Arif Suhartono yang semula menjabat Direktur Komersial sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru;
3. Pengangkatan 4 (empat) anggota Direksi baru, Ibu Rima Novianti sebagai Direktur Komersial, Bapak Muarip sebagai Direktur Operasi, Bapak Yon Irawan sebagai Direktur Keuangan, serta Bapak Ihsanuddin Usman sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi pada periode 2 Maret hingga 18 Juni 2020 berjumlah 8 (delapan) orang, dengan uraian sebagai berikut:

Komposisi Anggota Direksi IPC Periode 2 Maret – 18 Juni 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – June 18, 2020 (First Period)
4.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Director of Transformation and Business Development	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
5.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
6.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
7.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)

PERIOD OF MARCH 2 - JUNE 18, 2020

On March 2, 2020, the Minister of SOEs as the Sole Shareholder of the Company restructured the Company's Board of Directors. Based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-69 /MBU/03/2020 concerning Dismissal, Change in Position Nomenclature, Task Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), changes in IPC's Board of Directors are as follows:

1. Dismissal of 4 (four) members of the Board of Directors, namely Mr. Elvyn G. Masassya as President Director, Mr. Prasetyadi as Operations Director, Mr. Widyaka Nusapati as Finance Director, and Mr. Rizal Ariansyah as Human Resources Director;
2. Appointment of Mr. Arif Suhartono, who previously served as Commercial Director as the new President Director of the Company;
3. Appointment of 4 (four) new members of the Board of Directors, Mrs. Rima Novianti as Commercial Director, Mr. Muarip as Operations Director, Mr. Yon Irawan as Finance Director, and Mr. Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director.

Thus, members of the Board of Directors for the period of March 2 to June 18, 2020 consisted of 8 (eight) people as described below:

Board of Directors Composition of IPC Period of March 2 - June 18, 2020



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
8.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Resources and General Affairs Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)

PERIODE 18 JUNI – 31 DESEMBER 2020

Pada tanggal 18 Juni 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal Perseroan memberhentikan Bapak Dani Rusli Utama dari posisinya sebagai Direktur Teknik Perseroan karena dipindahtugaskan sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan mengangkat Bapak Zuhri Iryansyah untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik IPC yang baru. Pergantian Direksi Teknik Perseroan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi pada periode 18 Juni hingga 31 Desember 2020 masih sama seperti periode sebelumnya, yakni berjumlah 8 (delapan) orang, dengan uraian sebagai berikut:

PERIOD OF JUNE 18 - DECEMBER 31, 2020

On June 18, 2020, the Minister of SOEs as the Sole Shareholder of the Company dismissed Mr. Dani Rusli Utama from his position as Technical Director of the Company because he was assigned as President Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and appointed Mr. Zuhri Iryansyah to occupy the position as the new Technical Director of IPC. The replacement of the Company's Technical Director is stated in the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises No. SK-208 / MBU/06/2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Thus, members of the Board of Directors for the period of June 18 to December 31, 2020 is still the same as in the previous period, which consisted of 8 (eight) people as described below:

Komposisi Anggota Direksi IPC Periode 18 Juni – 31 Desember 2020

Board of Directors Composition of IPC Period of June 18 - December 31, 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Resources and General Affairs Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 (Periode Pertama) / June 18, 2020 – June 17, 2025 (First Period)

PERIODE SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 HINGGA TANGGAL PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Setelah tanggal 31 Desember 2020, terdapat perubahan komposisi Direksi. Pada tanggal 15 Maret 2021, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal Perseroan mengangkat Bapak Mega Satria sebagai Direktur Keuangan IPC, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Yon Irawan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-79/MBU/03/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi pada periode setelah tanggal 31 Desember 2020 hingga tanggal Laporan ini disahkan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni berjumlah 8 (delapan) orang, dengan uraian sebagai berikut:

PERIOD AFTER DECEMBER 31, 2020 UNTIL THE DATE OF RATIFICATION OF THE 2020 FINANCIAL YEAR ANNUAL REPORT

After December 31, 2020, there was a change in the composition of the Board of Directors. On March 15, 2021, the Minister of SOEs as the Sole Shareholder of the Company appointed Mr. Mega Satria as Finance Director of IPC, replacing the position previously held by Mr. Yon Irawan, as stated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-79/MBU/03/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Therefore, members of the Board of Directors for the period after December 31, 2020 until the date this Report is ratified is still the same as in the previous period, which consisted of 8 (eight) people as described below:

Komposisi Anggota Direksi IPC Periode 18 Juni – 31 Desember 2020

Board of Directors Composition of IPC Period of June 18 - December 31, 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
6.	Mega Satria	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021	15 Maret 2021 – 14 Maret 2026 (Periode Pertama) / March 15, 2021 – March 14, 2026 (First Period)
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Resources and General Affairs Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK- 69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 (Periode Pertama) / June 18, 2020 – June 17, 2025 (First Period)



Seluruh jajaran Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elvyn G. Masassya, Bapak Prasetyadi, Bapak Widyaka Nusapati, Bapak Rizal Ariansyah, Bapak Dani Rusli Utama, dan Bapak Yon Irawan atas kontribusi, dedikasi, dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga Perseroan mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik. Kami juga mengucapkan selamat mengemban amanah baru sebagai Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bagi anggota Direksi yang baru dilantik oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan.

PENUTUP

Kami menyadari bahwa capaian kinerja Perusahaan untuk tahun 2020 merupakan hasil dari upaya, inisiatif, dan kerja keras seluruh Insan IPC, serta berkat dukungan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan Perusahaan. Untuk itu, Direksi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh karyawan Perusahaan atas upaya, inisiatif, dan kerja keras selama tahun 2020, serta kepada Dewan Komisaris atas dukungan dan kerja sama yang secara efektif telah diberikan. Selain itu, Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham serta pemangku kepentingan Perusahaan, atas dukungan dan kepercayaan atas jalannya pengelolaan Perusahaan. Ke depan, Perusahaan optimistik akan mampu mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan sebagai perusahaan pengelola pelabuhan profesional berkelas dunia.

The Company's Board of Directors would like to thank Mr. Elvyn G. Masassya, Mr. Prasetyadi, Mr. Widyaka Nusapati, Mr. Rizal Ariansyah, Mr. Dani Rusli Utama, and Mr. Yon Irawan for their contribution, dedication, and hard work given during their terms of office as Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which enabled the Company to record excellent performance. To the newly inaugurated Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) who have just been appointed by the Ministry of SOEs as Shareholder of the Company, we wish you the best in performing new mandate as Director.

CLOSING

We realize that the Company's performance achievements in 2020 are the result of the efforts, initiatives and hard work of all IPC People, as well as the support of the Company's Shareholders and stakeholders. To that end, the Board of Directors would like to express our high appreciation to all Company employees for their efforts, initiatives and hard work during 2020, as well as to the Board of Commissioners for their effective support and cooperation. In addition, we also wish to convey our indebtedness to the Shareholders and stakeholders of the Company, for their support and trust in the management of the Company. In the future, the Company is optimistic that the company will be able to realize strong and sustainable business growth as a world-class professional port management company.

Jakarta, April 2021 / Jakarta, April 2021

**Atas nama Direksi, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),
On behalf of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),**

ARIF SUHARTONO

**Direktur Utama
President Director**

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Suaidi Marasabessy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nurrachman
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Montty Girianna
Komisaris
Commissioner

Kushari Suprianto
Komisaris
Commissioner

D. Andhi Nirwanto
Komisaris
Commissioner

R. Agus H. Purnomo
Komisaris
Commissioner



STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

We, the undersigned, testify that all information contained in the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been presented in its entirety and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This statement is hereby made in all truthfulness

Direksi Board of Directors

Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director

Hambra
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Zuhri Iryansyah
Direktur Teknik
Technical Director

Ogi Rulino
Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis
Director of Transformation and
Business Development

Rima Novianti
Direktur Komersial
Commercial Director

Muarip
Direktur Operasi
Operations Director

Mega Satria
Direktur Keuangan
Finance Director

Ihsanuddin Usman
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum
Human Resources
and General Affairs Director



03



Profil Perusahaan

Company Profile





Nama Perusahaan / Company Name	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Nama Panggilan / Call Name	Indonesia Port Corporation (IPC)
Badan Hukum Perusahaan / Company Legal Entity	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / <i>State-Owned Enterprise</i>
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	5 Februari 1960 / <i>February 5, 1960</i>
Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 4 tanggal 12 April 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0226846 Tanggal 12 April 2021. / <i>Deed of Establishment Number 3 dated December 1, 1992, made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, which received validation through Decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-4745 HT.01.01.Th 93 dated June 17, 1993, which underwent several amendments with the latest amendment through Deed No. 4 dated April 12, 2021, made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with Letter of Receipt of Notification of Changes to Company Data issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0226846 dated April 12, 2021.</i>
Komposisi Pemegang Saham / Shareholder Composition	Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN : 100% / <i>The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises: 100%</i>
Modal Dasar / Authorized Capital	Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) / <i>Rp4,000,000,000,000 (four trillion rupiah)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / <i>1 (one) Series A share with a value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah)</i> • 3.999.999 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B, dengan masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp3.999.999.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) / <i>3,999,999 (three million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series B shares with a par value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) each or totaling Rp3,999,999,000.000.00 (three trillion nine hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah)</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Capital	Rp1.444.029.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah) / <i>Rp1,444,029,000,000 (one trillion four hundred forty four billion twenty nine million rupiah)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / <i>1 (one) Series A share with a value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah)</i> • 1.444.028 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu dua puluh delapan) lembar saham Seri B, dengan masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp1.444.028.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar dua puluh delapan juta rupiah) / <i>1,444,028 (one million four hundred forty-four thousand twenty-eight) Series B shares with a par value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) each or totaling Rp1,444,028,000,000.00 (one trillion four hundred forty-four billion twenty-eight million rupiah)</i>



Informasi Umum Perusahaan

General Information of the Company

Bidang Usaha / Line of Business	Jasa Kepelabuhan dan Logistik / <i>Port and Logistics Services</i>
Produk dan Jasa / Products and Services	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kapal / <i>Ship Services</i> • Pelayanan Barang / <i>Cargo services</i> • Pelayanan Rupa-Rupa / <i>Miscellaneous Services</i>
Jaringan Kantor per 31 Desember 2020 / Office Network per December 31, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kantor Pusat / <i>Head Office</i> • 10 Wilayah Kerja / <i>Work Areas</i> • 12 Kantor Cabang / <i>Branch Offices</i>
Grup Perusahaan per 31 Desember 2020 / Company Group per December 31, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Entitas Anak / <i>Subsidiaries</i> • 3 Entitas Cucu / <i>Second-Tier Subsidiaries</i> • 1 Entitas Cicit / <i>Third-Tier Subsidiary</i> • 3 Entitas Asosiasi / <i>Associates</i> • 2 Kerja Sama Operasi (KSO) / <i>Joint Operations</i>
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	10.257 pegawai (mencakup Pegawai Organik, Non-Organik, dan Pegawai di Anak Perusahaan) / <i>10,257 employees (including Organic Employees, Non-Organic Employees, and Employees of Subsidiaries)</i>
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	Rp51,68 triliun / <i>trillion</i>
Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 14310 Telp. : (6221) 4301080 Faks. : (6221) 43911704
Kontak Perusahaan / Company Contact	<p>Sekretariat Perusahaan / <i>Corporate Secretariat</i> Ari Santoso EVP Sekretariat Perusahaan Email : corp_sec@indonesiaport.co.id</p> <p>Investor Relation Email : investor.relations@indonesiaport.co.id</p> <p>Situs Web / <i>Website</i> www.indonesiaport.co.id</p> <p>Media Sosial / <i>Social Media</i> Facebook : Pelabuhan Indonesia II /IndonesiaPort Twitter : @indonesiaport Instagram : @indonesiaportcorp Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC</p>

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company



PT Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut "IPC" dan "Perseroan") pada awalnya didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum yang Dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PT Pelabuhan Indonesia II (hereinafter referred to as "IPC" and "Company") was originally established as a State Company ("PN") based on Government Regulation ("PP") No. 19 of 1960 regarding Management of Public Port by Port Enterprise ("BPP").





PT Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut “IPC” dan “Perseroan”) pada awalnya didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum yang Dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

Pada tahun 1964, pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan. Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, sedangkan aspek komersial ditangani oleh PN. Kemudian, berdasarkan PP No. 18 Tahun 1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

Pada tahun 1983, pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan. Dengan status tersebut, Perum Pelabuhan bertugas dalam mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Perum Pelabuhan kemudian dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I, II, III, dan IV, sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No. 15 Tahun 1983 *juncto* PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993.

PT Pelabuhan Indonesia II (hereinafter referred to as “IPC” and “Company”) was originally established as a State Company (“PN”) based on Government Regulation (“PP”) No. 19 of 1960 regarding Management of Public Port by Port Enterprise (“BPP”).

In 1964, the government reorganized the management of public ports by separating the operational and commercial aspects of port management. Port operational activities were coordinated by Port Authority as a government institution, while the commercial aspect was handled by PN. Subsequently, pursuant to PP No. 18 of 1969, BPP was managed independently by each port. BPP replaced PN after the Port Authority was disbanded.

In 1983, the government changed the status of BPP into a Port General Public Company (“Perum Pelabuhan”). With this status, Perum Pelabuhan was tasked to manage concession ports only, while non-concession public ports were managed directly by the Technical Operation Unit of the Directorate General of Sea Transportation, Department of Transportation. Perum Pelabuhan was then merged and divided into four operating areas under the names of Perum Pelabuhan I, II, III, and IV, as stated in PP No. 15 of 1983 *juncto* PP No. 5 dated February 5, of 1985. The four companies were State-Owned Enterprises under the guidance of the Department of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II changed its status to Limited Liability Company (Persero). As a follow up, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Imas Fatimah, S.H., Notarial Certificate No. 3 dated December 1, 1992. The Certificate of establishment was approved by the Republic of Indonesia Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993.



Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perseroan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir telah ditetapkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 April 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0226846 Tanggal 12 April 2021.

Since the establishment of the Ministry of SOEs in 1998, the Company has come under its guidance. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Deed No. 4 dated April 12, 2021, drawn up by and before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Letter of Receipt of Notification of Changes to Company Data was issued by the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0226846 dated April 12, 2021.



IPC merupakan Perusahaan BUMN *Non Listed* yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan merupakan satu-satunya Pemilik dan Pemegang Saham Tunggal yang berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00. Keseluruhan saham yang dikeluarkan tersebut menjadi modal ditempatkan serta disetor penuh Perseroan hingga saat ini.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM

IPC tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. Namun demikian, IPC pernah melakukan perubahan status perusahaan, dari semula berstatus Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1983 lalu diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang berlaku efektif pada tanggal 17 Juni 1993 sesuai dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93, sehingga nama IPC menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) hingga saat ini.

IPC is a non-listed SOE of which shares are 100 percent owned by the Government of the Republic of Indonesia, which is represented by the Ministry of State-Owned Enterprises, as the Sole Owner and Shareholder of 1,444,029 shares with a par value of Rp1,000,000.00, totaling Rp1,444,029,000,000.00. All issued shares constitute the Company's issued and fully paid capital until the present.

INFORMATION ON CHANGE OF NAME AND LEGAL ENTITY STATUS

IPC never changed its name since its first establishment. However, IPC changed the company status from a General Public Company ("Perum") into a Limited Liability Company ("Persero") in 1983, which was effective on June 17, 1993 in accordance with the approval of the Republic of Indonesia Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93, so that IPC's name became PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Jejak Langkah Milestones

1960

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum yang Dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of State Enterprise (PN) in accordance to the Government Regulation Number 19 year 1960 regarding the Management of Ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969

Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial.

The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

1969-1983

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

According to the Government Regulation Number 18 year 1969, the BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 *juncto* PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Based on the Government Regulation No. 15 year 1983 *juncto* PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became State Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

2014

Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama World Bank tentang "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in Subsidiaries, increased 33.64 percent compared to 2013 which amounted to Rp1.07 trillion. In addition, the Company also invested in human capital development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and research related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish one-stop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.

2013

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis Perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Groundbreaking* Terminal New Priok oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world. One of biggest achievements in this year was New Priok Terminal *Groundbreaking* by President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

2012

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan *branding* identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new branding identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world-class port operator.

1992

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57 year 1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II, under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H., No. 3 dated Desember 1, 1992.

2015

Di tahun 2015, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *Global Bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhanan eksisting seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC Corporate University oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC Corporate University merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC Corporate University, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen, dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In 2015, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.



Jejak Langkah Milestones

2020

Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 12 Cabang Pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan.
- IPC memperkenalkan *Single Truck Identity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020.
- IPC berhasil membangun kerja sama *sister port* dengan 11 pelabuhan yaitu *Port of Ningbo*, *Port of Guangzhou*, dan *Port of Shenzhen* di China; *Port of Baku* di Azerbaijan; *Port of Townsville* di Australia; *Port of Lazaro Cardenas* di Meksiko; *Port of Hamad* di Qatar; *Port of Djibouti* di Afrika Timur; *Port of Sabah* di Malaysia; dan *Port of Los Angeles* di Amerika Serikat.
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen Standard & Poor's meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable* (prospek *stable*) yang menunjukkan bahwa tren kinerja positif Perusahaan.
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk skor KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat "*Emerging Industry Leader*". Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,550 dengan kategori Sangat Baik.
- Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 21 Agustus 2019.

IPC's achievements in 2019 are as follows:

- 12 Port Branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch.
- IPC introduced Single Truck Identity Database (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020.
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America.
- In mid-2019, the independent rating agency Standard & Poor's upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend of a company.
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of Emerging Industry Leader. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.550 with the category of Very Good.
- Changes in Types of Share and Changes in Articles of Association Deed No. 09 dated August 21, 2019 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,

- Inisiatif Kerja Sama Awal (MoU) dengan 2 (dua) pelabuhan asing, yaitu *Port of Rotterdam* dan *Port of Constantza*, Romania.
- Akuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.
- Mendukung pembentukan *Holding Rumah Sakit BUMN* atau *Indonesia Health Corporation (IHC)* melalui kepemilikan saham IPC di PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 2 persen.
- *Progress* pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Terminal Kijing Tahap I per 31 Desember 2020 sebesar 80,01 persen, serta sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Menara Maritim Indonesia.
- Initial Cooperation Initiatives (MoU) with two overseas ports, namely Port of Rotterdam and Port of Constantza, Romania.
- Acquisition of share ownership by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,00 shares or equivalent to 49 percent of shares of PT ILCS with transfer value amounting to Rp49,200,000.
- Supported the establishment of State-Owned Enterprise Hospital Holding or the Indonesia Health Corporation (IHC) by acquiring 2 percent of shares of PT Pertamina Bina Medika IHC by IPC.
- Progress of physical construction work of Kijing Terminal Phase I as of December 31, 2020 reached 80.01 percent. At the same time, the construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I and Indonesia Maritime Tower was on progress.

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" dengan fokus tahun ini adalah "*volume growth*", "*profitability growth*", dan "*holding establishment*".

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

2019

2018

2016

2017

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyesuaian (*fine-tuning*) dalam semua aspek. Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects. One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

Pada Fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena untuk yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15 persen. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang. IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "*Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services*" atau disingkat "*JAX Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau *Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime* yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15 percent. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people. IPC provides services under the Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMA-CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port Branch signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Corporate Value



MENJADI EKOSISTEM MARITIM BERKELAS DUNIA TO BE WORLD-CLASS MARITIME ECOSYSTEM

Penjelasan Visi Perusahaan

World Class (Kelas Dunia)

IPC mampu membangun kepemimpinan tingkat nasional dan regional, dengan ekspansi bisnis secara global dalam menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang berkontribusi terhadap ekosistem. Pembangunan bisnis secara berkesinambungan dengan penguatan kerja sama dengan pelabuhan dengan pemain ekosistem logistik maritim lainnya.

IPC sebagai perusahaan kelas dunia memiliki kualitas utama:

1. Memiliki kinerja dan citra perusahaan yang baik;
2. Memiliki fasilitas infrastruktur yang modern dan sistem yang terintegrasi; dan
3. Memiliki dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Maritime Ecosystem (Ekosistem Maritim)

IPC tidak hanya mampu mengelola jasa operasional dan layanan kepelabuhanan yang unggul, namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektor-sektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor pelabuhan, dalam rangka menciptakan jasa *end to end logistic* dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem maritim logistik yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Company Vision Explanation

IPC is able to build national and regional leadership through global business expansion to become a world-class port operator that contributes to the ecosystem. Business development is carried out continuously by strengthening cooperation with other ports and players in the logistics maritime ecosystem.

IPC as a world-class company has the following main qualities:

1. Good performance and company image;
2. Modern infrastructure facilities and integrated system; and
3. Positive impacts for the stakeholders.



“Membangun jaringan Pelabuhan dan Logistik Maritim yang terintegrasi guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan perdagangan Nasional”

“Develop Indonesia’s Port Logistic Maritime Integrated Network to reduce logistic cost & energize trade”

Penjelasan Misi Perusahaan

Perwujudan Misi Perusahaan yaitu dengan memaksimalkan nilai tambah untuk pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang Saham

Memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui *best-practice* GCG.

Company Mission Explanation

The Company realizes its mission by maximizing added value for the stakeholders:

1. Shareholders

Maximize value for the shareholders by improving financial performance optimizing governance management through GCG best practices.



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Corporate Value

2. Pegawai

Memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi.

3. Pelanggan dan Mitra

Meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir dan memaksimalkan aksesibilitas melalui integritas produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

4. Masyarakat dan Negara Indonesia

Memastikan keamanan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dan memaksimalkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Employees

Maximize employee satisfaction by focusing on capabilities and improving employee welfare through integrity and innovation.

3. Customers and Partners

Enhance service and product quality using the latest technology and capability as well as maximize accessibility through product integrity and along logistics value chain for the satisfaction of customers and partners.

4. Community and Indonesia

Ensure the security of trade flow to support the national economy and maximize Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) through logistics cost efficiency in order to improve the people's welfare.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Peninjauan kembali atas Visi dan Misi Perusahaan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 – 2024. Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perseroan telah menyampaikan RJPP tahun 2020 – 2024 kepada Kementerian BUMN melalui pelaporan elektronik dengan No. PR.03/31/10/1/STR/UT/PI.II-19. Namun, pada tahun 2020, Perseroan melakukan Perubahan terhadap RJPP tahun 2020 – 2024 yang dilatarbelakangi oleh 2 (dua) aspek utama.

Aspek pertama adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap laju perekonomian nasional, khususnya penurunan terhadap arus perdagangan dan logistik, dimana hal tersebut berdampak pada pencapaian kinerja IPC.

Sedangkan aspek kedua dilatarbelakangi oleh rencana penyusunan *master plan cluster* BUMN sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang ditetapkan

Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors

The Company's Vision and Mission has been reviewed by the Board of Commissioners and Board of Directors during the preparation of Company Long-Term Plan (RJPP) of 2020-2024. On October 31, 2019, the Company submitted 2020-2024 RJPP to the Ministry of SOEs through electronic report No. PR.03/31/10/1/STR/UT/PI.II-19. However, in 2020 the Company changed the 2020-2024 RJPP in light of 2 (two) main aspects.

The first aspect is the Covid-19 pandemic that affected Indonesia since March 2020. The pandemic caused significant impacts to the national economy, particularly in the drop of trade and logistics flow, which affected IPC's performance achievement.

The second aspect is the preparation of SOE cluster master plan according to the Strategic Plan of the Ministry of SOEs, as set forth in SOE Regulation No. PER-8/MBU/08/2020

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Corporate Value

melalui Peraturan BUMN No. PER-8/MBU/08/2020, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BUMN melalui Surat No. S57/Wk2.MBU/09/2020. Dalam hal ini, IPC termasuk dalam *cluster* Logistik Laut. Terkait dengan rencana penyusunan *Master Plan Cluster* BUMN tersebut, Direksi IPC telah menyampaikan rancangan RJPP 2020 – 2024 kepada Menteri BUMN melalui Surat Pengantar No. PR.05/30/9/1/STR/UT/PI.II-2020 pada tanggal 30 September 2020.

RJPP 2020 – 2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini akan menjadi pedoman bagi Manajemen Perseroan dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan, arah pengembangan perusahaan, serta sebagai salah satu kontributor terhadap *Master Plan Cluster* Logistik Laut BUMN.

Terdapat ukuran atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditentukan untuk menjadi representatif pencapaian Visi dan Misi Perseroan. KPI tersebut dilakukan *monitoring* secara periodik. Untuk memudahkan proses *monitoring* pencapaian KPI saat ini, Perseroan sedang mengembangkan *dashboard* kinerja Perseroan. Pada *dashboard* tersebut, jika terlihat indikator yang tidak tercapai atau menurun angka pencapaiannya, maka akan dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau proses kerja yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut.

Dengan dilakukannya evaluasi, maka akan muncul inisiatif perbaikan dalam pelaksanaan program kerja atau proses kerja tersebut. Organisasi juga memantau pencapaian tata nilai perusahaan dengan menetapkan hasil pencapaian nilai-nilai organisasi dan realisasi pelaksanaan *morning briefing* pada setiap unit kerja yang menjadi KPI Perseroan, dan dilakukan pula *monitoring* pencapaiannya selama triwulanan.

Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2019, arah pencapaian visi dan misi telah sesuai dengan yang ditargetkan dan ditunjukkan dengan pencapaian KPI di tahun 2020. Hasil *review* tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

submitted to the Board of Commissioners and Board of Directors of SOEs through Letter No. S57/Wk2.MBU/09/2020. On this matter, IPC is part of the Sea Logistics cluster. In response to the preparation of SOE Cluster Master Plan, the Board of Directors of IPC has submitted 2020-2024 RJPP draft to the Ministry of SOEs through Letter No. R.05/30/9/1/STR/UT/PI.II-2020 dated September 30, 2020.

2020-2024 RJPP Amendment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will serve as the Company Management's guidelines in preparing annual Company Work Plan and Budget (RKAP), direction of company development, and as a contributor to the SOE Sea Logistics Cluster Master Plan.

A Key Performance Indicator (KPI) has been established to represent the achievement of the Company's Vision and Mission through periodical monitoring. To facilitate the monitoring of KPI achievement, the Company is currently developing a Company performance dashboard. If the dashboard shows that an indicator is not achieved or decreased in score, the work program and/or work process will be evaluated to fulfill the indicator.

This evaluation will initiate improvements in the implementation of the relevant work program or work process. The organization will also monitor the realization of corporate values by implementing the results of these values achievement and realization of morning briefing at each work unit subject to the Company's KPI, as well as by monitoring its quarterly achievement.

Based on the evaluation in 2019, the achievement of the vision and mission has been in line with the targets as shown by KPI realization in 2020. Results of the review has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Corporate Value

NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUE

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN RI No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berstatus sebagai BUMN diwajibkan menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Perseroan maupun Grup IPC. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan internalisasi nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang disebut sebagai **AKHLAK**, dengan penjabaran sebagai berikut:

Based on Republic of Indonesia Minister of SOEs Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 regarding Core Values of State-Owned Enterprises Human Capital, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as SOE is required to implement the Core Values of State-Owned Enterprises Human Capital as a Corporate Culture and the basis for human capital character development at the Company or IPC Group. Thus, the company internalized the Core Values of State-Owned Enterprises Human Capital called AKHLAK with the following explanation:

Amanah Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. / Uphold the trust given.

- Memenuhi janji dan komitmen. / Keep promises and commitments.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. / Responsible for the tasks, decisions, and actions performed.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. / Stick to moral and ethical values.

Kompetitif Competitive

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. / Continue to learn and develop capabilities.

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. / Improve self-competence to respond to ever-changing challenges.
- Membantu orang lain belajar. / Help others learn.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. / Complete tasks with the highest quality.

Harmonis Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan. / Mutual care and respect for differences.

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. / Respect everyone regardless of their background.
- Suka menolong orang lain. / Like to help others.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif. / Build a conducive work environment.

Loyal Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. / Dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State.

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. / Maintain the reputation of fellow employees, leaders, SOE, and the State.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. / Willing to sacrifice to achieve a greater goal.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. / Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.

Adaptif Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. / Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. / Quickly adjust to be better.
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. / Make continuous improvements following technological developments.
- Bertindak proaktif. / Be proactive.

Kolaboratif Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis. / Build synergistic cooperation.

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. / Provide opportunities for various parties to contribute.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. / Open to work together to generate added value.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. / Mobilize the use of various resources for common goals.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Corporate Value

IPC juga memiliki nilai-nilai perusahaan berupa **CINTA**, dengan uraian sebagai berikut:

IPC also has corporate values called **CINTA** with the following explanation:

Customer Centric	<p>Meet Customer Expectation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif. / Proactively seek and understand customers' needs to provide innovative solutions. • Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan. / Build long-term good relationship with customers. • Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang. / Consistently provide the best quality service to help customers grow and develop.
Integrity	<p>Walk the Talk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan rasa percaya dengan mengatakan apa yang kita rasakan serta melakukan apa yang kita ucapkan; / Nurture trust by saying what we feel and doing what we say; • Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal; / Show professionalism and honesty in interacting with internal and external parties; • Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. / Disciplined and uphold business code of conduct in performing daily work.
Nationalism	<p>National Pride.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan semangat dan ikut berperan menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan Nasional. / Grow passion and participate in supporting the government in national development. • Menumbuhkan rasa bangga dan semangat nasionalisme dalam berkarya. / Grow pride and nationalism in delivering work. • Terus berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan pengelola pelabuhan kelas dunia. / Continuously develop and be able to compete with world-class port operator companies.
Team Work	<p>Together We Can.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dalam tim untuk mendapatkan hasil yang terbaik. / Collaborate in team to gain the best results. • Bekerja bersama-sama menghasilkan ide-ide implementatif untuk solusi kebutuhan pengguna jasa pelabuhan. / Work together to create implementable ideas to provide solutions for port services users' needs. • Semangat kebersamaan dan menghargai orang lain. / Spirit of togetherness and respect others.
Action	<p>Make It Happen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berani bermimpi dan berusaha mewujudkannya. / Dare to dream and strive to realize it. • Proaktif untuk mencari cara dalam mewujudkan visi perusahaan. / Proactively seek ways to realize the company's vision. • Melakukan terobosan-terobosan dan langkah nyata dalam mendorong perkembangan perusahaan. / Make breakthroughs and tangible efforts to support the company's development.

Nilai-nilai perusahaan **CINTA** di atas kemudian dipetakan kepada nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yaitu **AKHLAK**, seperti pada ilustrasi gambar berikut:

CINTA corporate values are mapped into the core values of State-Owned Enterprises human capital, namely **AKHLAK**, as illustrated below:

CORE VALUES IPC: PEMETAAN CINTA MENJADI AKHLAK

IPC CORE VALUES: MAPPING CINTA TOWARDS AKHLAK





PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Makna Logo Perusahaan Company Logo Meaning



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

5 — **Energizing Trade. Energizing Indonesia.**

Penjelasan dari Logo/Brand IPC

IPC Logo/Brand Explanation



1 Anak panah yang melesat di atas air atau horizon dan menjadi representasi dari konsep pergerakan Perusahaan yang dinamis. / A dashed arrow above the water or horizon represents a concept of dynamic movement of the Company.



2 Cahaya matahari pagi yang merepresentasikan perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh karyawan terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan Perusahaan. / The sunrise represents the spirit of change, strength, optimism, and the pride of employees toward their company that drives them to work together to achieve the Company's goals.



3 Sisi biru logo menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis, serta fleksibilitas dari setiap komponen Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan. / The blue represents a dynamic new era for both the company and employees where all of the Company's elements move in a flexible way when facing challenges.



4 IPC dengan tulisan abu-abu gelap merupakan brand yang merepresentasikan citra modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasi kepercayaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan. / IPC's name written in dark grey font becomes a brand that represents a modern image, confidence, and professionalism as well as illustrating our trust to all Stakeholders.



5 "Energizing Trade. Energizing Indonesia" merupakan tagline yang mencerminkan pergeseran paradigma Perusahaan dari sekedar *Serving Indonesia Economic Growth* menjadi *Driving Indonesia Economic Growth*. / "Energizing Trade. Energizing Indonesia" is a tagline that reflects of paradigm shift for the Company from *Serving Indonesia Economic Growth* into *Driving Indonesia Economic Growth*.

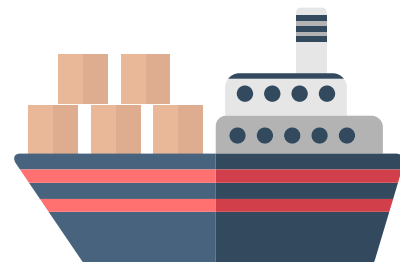
BIDANG USAHA

Line of Business



Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the purpose and objective of conducting business in the field of port business services and operations, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.





BIDANG USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BIDANG USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI

Adapun rincian cakupan kegiatan usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan status pelaksanaannya hingga tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

LINE OF BUSINESS BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the purpose and objective of conducting business in the field of port business services and operations, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

CURRENTLY OPERATING LINE OF BUSINESS

The scope of business activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the implementation status until 2020 is described in the following table:

Bidang Usaha yang Dijalankan Hingga Tahun 2020

Line of Business Operated Until 2020

No.	Kegiatan Usaha / Business Activity	Status Pelaksanaan / Implementation Status
Kategori Kegiatan Usaha Utama / Main Business Activities Category		
1.	Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. / Port basins and water pools for traffic and vessels dock.	Telah terlaksana / Implemented
2.	Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal. / Services related to pilotage and towage.	Telah terlaksana / Implemented
3.	Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , barang termasuk hewan (<i>general cargo</i>), dan fasilitas naik turunnya penumpang. / Docks and other facilities for anchoring, container stevedoring, liquid bulk, dry bulk, multi-purpose, goods including animals (<i>general cargo</i>), and facilities for passenger embarkation/debarkation facilities.	Telah terlaksana / Implemented
4.	Jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (<i>general cargo</i>), dan kendaraan. / Stevedoring services, containers, liquid bulk, dry bulk (<i>general cargo</i>), and vehicles.	Telah terlaksana / Implemented
5.	Jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro. / Container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multipurpose bulk, passengers, public services, and Ro-Ro.	Telah terlaksana / Implemented
6.	Gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. / Warehouses, stockpiles and goods storage, transportation, equipment stevedoring, and port equipment.	Telah terlaksana / Implemented
7.	Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda. / Land for buildings and land and warehouses/buildings needed for smooth multi-mode transportation.	Telah terlaksana / Implemented
8.	Penyediaan listrik, air minum, dan instalasi limbah pembuangan sampah. / Provision of electricity, drinking water and waste disposal waste installations.	Telah terlaksana / Implemented
9.	Jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan / Fuel filling services for vessels and vehicles in the port environment.	Belum terlaksana / Not yet implemented
10.	Kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. / Consolidation and distribution activities for goods including animals.	Telah terlaksana / Implemented
11.	Jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan. / Consultancy, education and training services related to the port.	Telah terlaksana / Implemented
12.	Depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i> , fumigasi, serta pelayanan logistik. / Container depots and repair, cleaning, fumigation and logistics services.	Telah terlaksana / Implemented
13.	Kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. / Customs areas and temporary storage.	Telah terlaksana / Implemented
Kategori Kegiatan Usaha Pendukung / Supporting Business Activities Category		
14.	Jasa angkutan. / Transportation.	Telah terlaksana / Implemented
15.	Persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan. / Rental and repair of equipment.	Telah terlaksana / Implemented
16.	Perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan. / Ship and equipment maintenance in the port sector.	Telah terlaksana / Implemented
17.	Pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (<i>ship to ship transfer</i>) termasuk jasa ikutan lainnya. / Ship to ship transfer including other follow-up services.	Telah terlaksana / Implemented
18.	Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan. / Property outside the main port activities.	Telah terlaksana / Implemented
19.	Kawasan industri. / Industrial estate.	Telah terlaksana / Implemented
20.	Fasilitas pariwisata. / Tourism facilities.	Telah terlaksana / Implemented
21.	Perhotelan. / Hospitality.	Belum terlaksana / Not yet implemented

No.	Kegiatan Usaha / Business Activity	Status Pelaksanaan / Implementation Status
22.	Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhan. / Port consultancy and surveyor services.	Telah terlaksana / Implemented
23.	Jasa komunikasi dan informasi. / Information and communication services.	Telah terlaksana / Implemented
24.	Jasa konstruksi kepelabuhan. / Port construction services.	Telah terlaksana / Implemented
25.	Jasa <i>forwarding</i> /ekspedisi. / Forwarding/expediting services.	Telah terlaksana / Implemented
26.	Jasa kesehatan. / Health services.	Telah terlaksana / Implemented
27.	Perbekalan dan <i>catering</i> . / Supplies and catering.	Telah terlaksana / Implemented
28.	Tempat tunggu kendaraan bermotor dan <i>shuttle bus</i> . / Motor vehicles and shuttle buses parking places.	Telah terlaksana / Implemented
29.	Jasa penyelaman (<i>salvage</i>). / Salvage diving services.	Telah terlaksana / Implemented
30.	Jasa <i>tally</i> dan jasa pas pelabuhan. / Tally services and port pass services.	Telah terlaksana / Implemented
31.	Jasa timbangan. / Weighing services.	Telah terlaksana / Implemented

PRODUK DAN JASA

Sesuai dengan Akta Perseroan, produk/jasa yang disediakan oleh Perseroan terdiri dari Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, dan Pelayanan Rupa-Rupa.

Pelayanan Kapal

Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi:

1. Jasa Tambat

Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat.

2. Jasa Pandu

Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

3. Jasa Tunda

Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga.

4. Jasa Pelayanan Air, Sampah dan Limbah

Jasa yang diberikan untuk pelayanan air, pengelolaan sampah dan limbah kapal.

PRODUCTS AND SERVICES

In accordance with the Company's Certificate, the Company's products/services include Ship Services, Cargo Services, and Miscellaneous Services.

Ship Services

Ship services are services for vessel operations from the time of entering the port until exit. Ship services include:

1. Berthing services

Services provided for docked ships to carry out loading and unloading activities.

2. Pilotage services

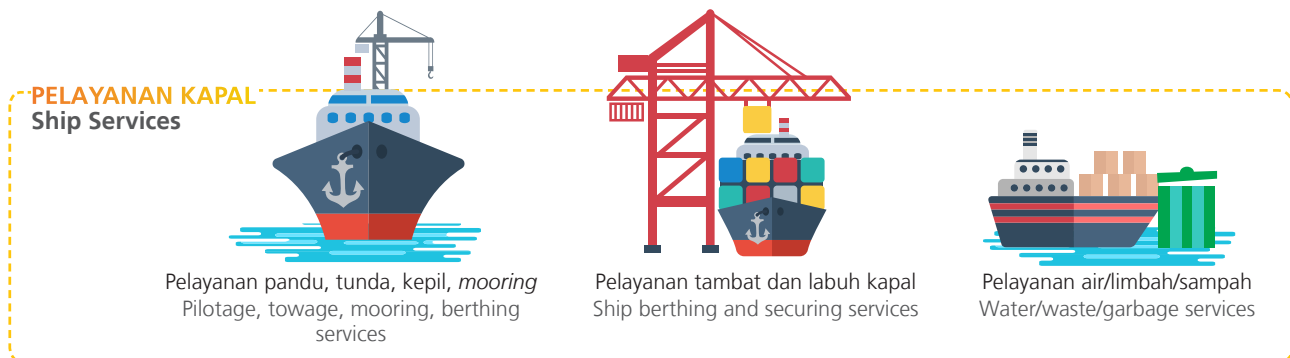
Services provided for ships going in and out of the dock through the port channel, so that navigation can be carried out safely, orderly and smoothly for the safety of ships and the environment.

3. Towage services

Services provided by tugs to push or pull ships to or out of the dock.

4. Fresh Water, Garbage and Waste Services

Services provided for water services, waste management and ship waste.





Pelayanan Barang

Pelayanan barang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi:

1. Dermaga

Bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal.

2. Gudang Penumpukan

Suatu bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.

3. Lapangan Penumpukan

Sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menempatkan atau menumpuk Peti Kemas atau barang lainnya yang disusun secara berencana baik barang yang akan dimuat ke kapal ataupun barang setelah dibongkar dari kapal.

4. Receiving/Delivery

Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Cargo Services

Cargo services are stevedoring services from the vessels to cargo delivery to the owners. Cargo services includes:

1. Berthing

Buildings specifically designed at the port or a place for ships to be tethered or docked to carry out loading and unloading activities of goods and passengers.

2. Storage Warehouse

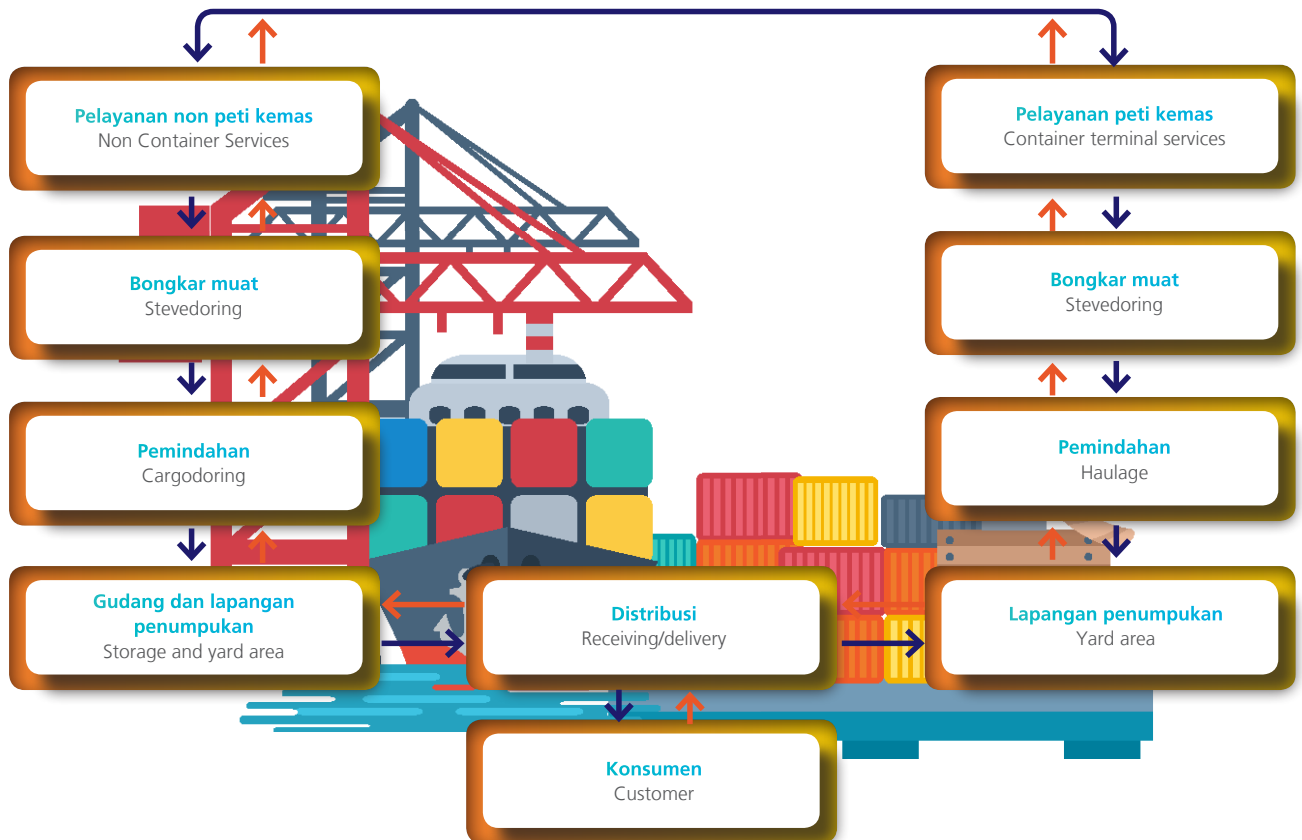
A building or closed place used to store items originating from ships, or to be loaded onto ships.

3. Storage Yards

An open area within the terminal area used to place or stack containers or other items, arranged in a planned manner, for goods to be loaded onto ships, or for goods after being unloaded from ships.

4. Receiving/Delivery

Moving goods from stockpiles in warehouses/stacking areas, onto vehicles at the warehouse/stacking gates or vice versa.



Pelayanan Rupa-Rupa

Pelayanan rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. Pelayanan rupa-rupa meliputi:

1. Pas Pelabuhan

Biaya masuk area pelabuhan untuk perseorangan dan kendaraan bermotor.

2. Jasa Pemeliharaan Alat-Alat Pelabuhan

Jasa yang diberikan, berupa persewaan *forklift*, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, *motorboat*, dan alat pemadam kebakaran.

3. Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik (TBAL)

Merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

Miscellaneous Services

Miscellaneous services are services that support the port activities. Miscellaneous Services include:

1. Port Pass

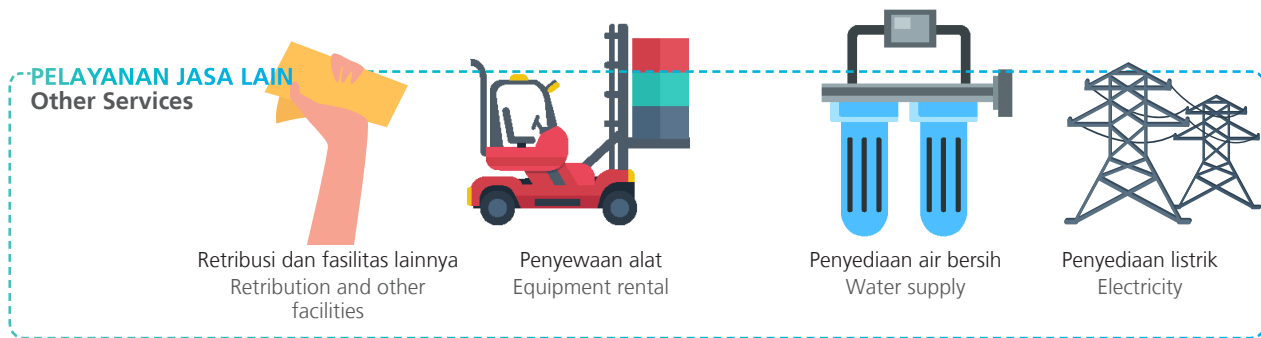
Cost of entering a port area for individuals and motorized vehicles

2. Port Equipment Maintenance Services

Services provided, in the form of forklift rental, faucets (land, buoyancy and electricity), tugboats, motorboats and fire extinguishers

3. Land, Building, Water and Electricity Rental Services (TBAL)

Rental services for land, buildings, clean water and electricity.





Alamat dan Kontak Jaringan Kantor IPC

Address and Contact of IPC Office Network

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasos No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp. : (6221) 4301080
Faks. : (6221) 43911704
Email : corp_sec@indonesiaport.co.id; investor.relations@indonesiaport.co.id
Website : www.indonesiaport.co.id

CABANG PELABUHAN UTAMA / MAIN PORT BRANCH

<p>1. Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia 14310 Telp. : +62-21 4301080, +62-21 4367505 Faks. : +62-21 4372933 <i>Email</i> : cs.tanjungpriok@indonesiaport.co.id; pelanggan_ctpk@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.priokport.co.id</p>	<p>2. Pelabuhan Banten Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Ciwandan, Banten, Indonesia 42166 Telp. : +62-254 601221 / 602 703 Faks. : +62-254 601419 <i>Hotline CS</i> : 08111 250 111 <i>Email</i> : banten@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.bantenport.co.id</p>	<p>3. Pelabuhan Panjang Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 35241 Telp. : +62-721 31149, 31146 Faks. : +62-721 31155 <i>Email</i> : cs.panjangport@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.panjangport.co.id</p>
---	---	---

CABANG PELABUHAN MADYA / MEDIUM PORT BRANCH

<p>4. Pelabuhan Teluk Bayur Jl. Semarang No. 3, Teluk Bayur, Sumatera Barat, Indonesia 25217 Telp. : +62-751 61646, 61639 Faks. : +62-751 611169 <i>Email</i> : telukbayur@indonesiaport.co.id; telukbayuripc@gmail.com <i>Website</i> : www.telukbayurport.co.id</p>	<p>5. Pelabuhan Pontianak Jl. Pak Kasih No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 78113 Telp. : +62-561 732181, 732094 Faks. : +62-561 732612 <i>Email</i> : pontianak@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.pontianakport.co.id</p>	<p>6. Pelabuhan Palembang Jl. Belinyu No.1, Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia 30115 Telp. : +62-711 710611 Faks. : +62-711 711758 <i>Mail CS</i> : cs.palembang@indonesiaport.co.id; marketing.plg@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.palembangport.co.id</p>
<p>7. Pelabuhan Bengkulu/Pulau Baai Jl. Yos Sudarso No.9, Pulau Baai, Bengkulu, Indonesia 38216 Telp. : +62-736 51409 Faks. : +62-736 51956 <i>Email</i> : bengkulu@indonesiaport.co.id; cs.bengkulu@indonesiaport.co.id; bengkulu2@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.ipcbengkulu.co.id</p>	<p>8. Pelabuhan Jambi Jl. Raya Pelabuhan Km. 9, Talang Duku, Jambi, Indonesia 36383 Telp. : +62-741 35067 Faks. : +62-741 7553323 <i>Hotline CS</i> : 0811 7434 282 <i>Email CS</i> : cs.jambi@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.jambiport.co.id</p>	<p>9. Pelabuhan Cirebon Jl. Pertiagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45112 Telp. : +62-231 204109 Faks. : +62-231 203201 <i>Email</i> : cirebon@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.cirebonport.co.id</p>

CABANG PELABUHAN PRATAMA / SMALL PORT BRANCH

<p>10. Pelabuhan Pangkal Balam Jl. Yos Sudarso No. 01, Pangkalbalam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia 33114 Telp. : +62-717 423500 <i>Email</i> : pelabuhan2_pangkalbalam@yahoo.co.id; ipcpangkalbalam@gmail.com <i>Website</i> : www.indonesiaport.co.id/pangkalbalam</p>	<p>11. Pelabuhan Sunda Kelapa Jl. Raya Maritim No.8, Sunda Kelapa, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 14430 Telp. : +62-21 6928888 Faks. : +62-21 6904759 <i>Email</i> : sundakelapa@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.sundakelapa.co.id</p>	<p>12. Pelabuhan Tanjung Pandan Jl. Pelabuhan No.1, Tanjung Pandan, Bangka Belitung, Indonesia 33411 Telp. : +62-719 21049 Faks. : +62-719 21885 <i>Email</i> : tanjungpandan@indonesiaport.co.id</p>
--	---	--

Untuk informasi mengenai Alamat Entitas Anak, Entitas Cucu, Entitas Cicit, Entitas Asosiasi, dan Kerja Sama Operasi (KSO) Perusahaan telah diuraikan pada halaman 172-213.

Information on Address of Subsidiaries, Second-tier Subsidiaries, Third-tier Subsidiaries, Associates, Joint Operations (KSO) can be seen on page 172-213.

Wilayah Operasional Perusahaan

Operational Areas of the Company

Hingga akhir tahun 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berkantor pusat di Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah menjalankan usahanya pada wilayah operasi di 10 (sepuluh) provinsi dan mengelola 12 (dua belas) cabang pelabuhan.

Until the end of 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which is headquartered on Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, conducted business in 10 (ten) provinces and managed 12 (twelve) port branches.



Cabang Pelabuhan Utama / Main Port Branch

1. Tanjung Priok
2. Banten
3. Panjang



Cabang Pelabuhan Madya / Medium Port Branch

4. Teluk Bayur
5. Pontianak
6. Palembang
7. Bengkulu
8. Jambi
9. Cirebon



Cabang Pelabuhan Pratama / Small Port Branch

10. Pangkal Balam
11. Sunda Kelapa
12. Tanjung Bandan



Wilayah Operasional Perusahaan Operational Areas of the Company

Jenis Kantor / Type of Office	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat / Head Office	1	1	1	1	1
Kantor Cabang / Branch Office	12	12	12	12	12



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Moermahadi Soerja Djanegara

Komisaris Utama dan Komisaris Independen Merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi /
President Commissioner, Independent Commissioner, and Head of Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 regarding Termination and Appointment of President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Bandung, 31 Mei 1955 / Bandung, May 31, 1955
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	65 tahun / years old
Domisili / Domicile	Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia / Bogor City, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) / Doctoral degree in Accounting Economics from Padjadjaran University, Bandung (2005)
Sertifikasi yang Dimiliki / Certifications	Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2009) / Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) from Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) (2009)
Keahlian / Expertise	Keuangan / Finance
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit PT Dahana (Persero) (2007 - 2009) • Anggota Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) (2008 - 2009) • Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI (2009 - 2014) • Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan RI (2014 - 2017) • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017 - 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee Member of PT Dahana (Persero) (2007 - 2009) • Audit Committee Member of PT Djakarta Lloyd (Persero) (2008 - 2009) • Member I of the Audit Board of the Republic of Indonesia (2009 - 2014) • Member V of the Audit Board of the Republic of Indonesia RI (2014 - 2017) • Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia (2017 - 2019)



Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Montty Girianna

**Komisaris Merangkap Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko /
Commissioner and Head of Risk Management Monitoring Committee**

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Bandung, 22 Januari 1963 / Bandung, January 22, 1963
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	57 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia / South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S3 Sistem Transportasi University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), Amerika Serikat (2002) / Doctoral degree in Transportation System from the University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), United States (2002)
Keahlian / Expertise	Transportasi, Keuangan / Transportation, Finance
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan Tetap Dewan Energi Nasional (DEN) mewakili Menteri PPN/Ketua BAPPENAS (2009 - 2014) • Sekretaris Tim Kerja Konektivitas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (2012 - 2014) • Staf Pengajar Program Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Indonesia (2012 - saat ini) • Ketua Tim Teknis Kerja Sama Indonesia Green Global Growth Institute (GGGI) (2013 - 2014) • Deputi Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perekonomian (2014 - saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • Permanent Representative of the National Energy Board on behalf of the Minister of National Development Planning/Chair of National Development Planning Agency (2009 - 2014) • Secretary of Indonesian Economic Development Acceleration and Expansion Masterplan (MP3EI) Connectivity Work Team (2012 - 2014) • Lecturer of Energy Security Program at Indonesian Defense University (2012 - present) • Head of Indonesia Green Global Growth Institute (GGGI) Cooperation Technical Team (2013 - 2014) • Deputy Coordinating Minister of Energy, Natural Resources, and Environmental Management of the Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014 - present)

Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Suaidi Marasabessy

**Komisaris Independen Merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /
Independent Commissioner and Member of Nomination and Remuneration Committee**

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Ambon, 5 Januari 1947 / Ambon, January 5, 1947
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	73 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S1 Ilmu Politik Universitas Terbuka, Jakarta (1995) / Bachelor's degree in Politics, Indonesia Open University, Jakarta (1995)
Keahlian / Expertise	Keuangan / Finance
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT SSW (2008 - saat ini) • Direktur Utama PT TMU (2010 - saat ini) • Direktur Utama PT PKU (2011 - saat ini) • Direktur Utama PT Sindo Mandiri (2012 - saat ini) • Direktur PT Kutai Energi (2015 - saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • President Commissioner of PT SSW (2008 - present) • President Director of PT TMU (2010 - present) • President Director of PT PKU (2011 - present) • President Director of PT Sindo Mandiri (2012 - present) • Director of PT Kutai Energi (2015 - present)



Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Kushari Suprianto

Komisaris Merangkap Ketua Komite Audit /
Commissioner and Head of Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Madiun, 2 Oktober 1966 / Madiun, October 2, 1966
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	54 tahun / years old
Domisili / Domicile	Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia / Bogor Regency, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Borobudur, Jakarta (2007) / • Master's degree in Human Resources, Borobudur University, Jakarta (2007) • S2 Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Depok (2009) / Master's degree in Public Policy Economics, University of Indonesia, Depok (2009)
Keahlian / Expertise	Keuangan / Finance <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (2008 - 2009) • Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (2009 - 2012) • Direktur Teknis Kepabeanan (2012 - 2015) • Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2015 - 2018) • Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai (2018 - saat ini)
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Head of Type A Customs and Excise Main Service Office Tanjung Priok (2008 - 2009) • Director of Admissions and Regulations of Customs and Excise (2009 - 2012) • Technical Director of Customs (2012 - 2015) • Secretary of the Directorate General of Customs and Excise (2015 - 2018) • Director of Audit of Customs and Excise (2018 - present)

Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



D. Andhi Nirwanto

**Komisaris Merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi /
Commissioner and Secretary of Nomination and Remuneration Committee**

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 3, 2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Kudus, 8 Januari 1956 / Kudus, January 8, 1956
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	64 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S3 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (2015) / Doctoral degree in Law, Padjajaran University, Bandung (2015)
Keahlian / Expertise	Logistik Keuangan / Finance Logistics <ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2011 - 2013) • Wakil Jaksa merangkap Ketua Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung RI (2013 - 2016) • Dosen Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang (2015 - saat ini) • Senior Advisor Santosa Hospital, Bandung (2016 - saat ini) • Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) (2016 - saat ini)
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Deputy Attorney General for Special Criminal Actions at the Provincial Attorney General's Office of DKI Jakarta (2011 - 2013) • Deputy Attorney and Chair of Corruptor Hunter Team of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (2013 - 2016) • Lecturer of Master's and Doctoral Program in Law at Tujuh Belas Agustus University, Semarang (2015 - present) • Senior Advisor at Santosa Hospital, Bandung (2016 - present) • Chairman of the Supervisory Board of Center for Study of National Strategy (PPSN) (2016 - present)



Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



R. Agus H. Purnomo

**Komisaris Merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /
Commissioner and Member of Nomination and Remuneration Committee**

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 regarding Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Sleman, 24 Agustus 1961 / Sleman, August 24, 1961
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	59 tahun / years old
Domisili / Domicile	Surabaya, Jawa Timur, Indonesia / Surabaya, East Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Arta Bodhi Iswara, Surabaya (2008) / Master's degree in Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Arta Bodhi Iswara, Surabaya (2008)
Keahlian / Expertise	Keuangan / Finance <ul style="list-style-type: none"> Executive Chief Foundry (2001) Operational Director PT Barata Indonesia (Persero) (2001 - 2008) Chief Executive Officer PT Barata Indonesia (2008 - 2012) Chief Executive Officer PT INKA (Persero) (2012 - 2017) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (2017 - saat ini)
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Executive Chief Foundry (2001) Operational Director of PT Barata Indonesia (Persero) (2001 - 2008) Chief Executive Officer of PT Barata Indonesia (2008 - 2012) Chief Executive Officer of PT INKA (Persero) (2012 - 2017) Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation (2017 – present)

Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Nurrachman

Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 (Periode Pertama) / December 14, 2020 – December 13, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Klaten, Jawa Tengah, 10 November 1968 / Klaten, Central Java, November 10, 1968
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	52 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia / Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Management Marketing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triandora, Jakarta (2001) / Master's degree in Marketing Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triandora, Jakarta (2001)
Keahlian / Expertise	Teknik, Keuangan / Engineering, Finance
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Chairman</i> Adyawinsa Group of Companies (2003 - sekarang) • Komisaris PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - sekarang) • Anggota Unit Pelaksana Program Percepatan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015 - 2016) • Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015 - 2018) • Komisaris Independen PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2018 - 2020) <ul style="list-style-type: none"> • Business Chairman at Adyawinsa Group of Companies (2003 - present) • Commissioner of PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - present) • Member of National Electricity Acceleration Program Implementation Unit (UP3KN) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2015 - 2016) • Independent Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015 - 2018) • Independent Commissioner of PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2018 - 2020)



Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Tumpak Hatorangan Panggabean

Komisaris Utama/Komisaris Independen /

President Commissioner/Independent Commissioner

	Pengukuhan Pemberhentian pada tanggal 2 Maret 2020 / Officially ended service on March 2, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 79/MBU/6/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK- 79/MBU/6/2015 dated June 3, 2015 regarding Transfer of Assignment and Appointment of President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Dasar Hukum Pemberhentian / Legal Basis of Dismissal	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 regarding Termination and Appointment of President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	3 Juni 2015 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / June 3, 2015 – March 2, 2020 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Sanggau, 29 Juli 1943 / Sanggau, July 29, 1943
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	77 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S1 Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak (1972) / Bachelor's degree in Law, Tanjungpura University, Pontianak (1972)
Keahlian / Expertise	Hukum / Law
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejaksaan Agung RI (2003) • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003 - 2007) • Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) (2008 - 2009) • Pimpinan/Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (2009 - 2010) • Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) (2010 - 2015) <ul style="list-style-type: none"> • Secretary of Deputy Attorney General for Special Criminal Actions of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (2003) • Vice Chairman of Corruption Eradication Commission (2003 - 2007) • Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Pesero) (2008 - 2009) • Acting Chairman of Corruption Eradication Commission (2009 - 2010) • Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Pesero) (2010 - 2015)

Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners



Djadmiko
Komisaris /
Commissioner

Berhenti Menjabat pada tanggal 14 Desember 2020 / Ended service on December 14, 2020

**Dasar Hukum Pengangkatan /
Legal Basis of Appointment**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK- 40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Dasar Hukum Pemberhentian /
Legal Basis of Dismissal**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK- 391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Periode Jabatan /
Term of Office**

1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – December 14, 2020 (First Period)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

**Tempat Tanggal Lahir /
Place, Date of Birth**

Magelang, 3 Februari 1955 / Magelang, February 3, 1955

**Usia per 31 Desember 2020 /
Age per December 31, 2020**

65 tahun / years old

Domisili / Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia / South Tangerang, Banten, Indonesia

**Pendidikan Terakhir /
Latest Education**

S2 Social Science in Development Finance University of Birmingham, Inggris (1988) /
Master's degree in Social Science in Development Finance, University of Birmingham, United Kingdom (1988)

Keahlian / Expertise

Keuangan / Finance

**Riwayat Pekerjaan /
Career History**

- Asisten Deputi Urusan UKM, Jasa & Industri Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005 - 2007)
- Asisten Deputi Urusan Peningkatan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2007 - 2009)
- Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah Swasta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009 - 2011)
- Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2011 - 2015)
- Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window Kementerian Keuangan (sejak tahun 2015)
- Assistant Deputy of Tourism SME, Services & Industry, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2005 - 2007)
- Assistant Deputy of Export Improvement, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2007 - 2009)
- Expert Staff in Investment and Partnership of Government and Private Sector, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2009 - 2011)
- Deputy of Administration, State Secretariat of the Republic of Indonesia (2011 - 2015)
- Head of Indonesia National Single Window Portal Manager Work Unit, Ministry of Finance (since 2015)



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Arif Suhartono
Direktur Utama /
President Director

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial IPC / Previously served as Commercial Director of IPC

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	<p>Pengangkatan sebagai Direktur Utama / Appointment as President Director Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).</p> <p>Pengangkatan sebagai Direktur Komersial / Appointment as Commercial Director Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).</p>
Periode Jabatan / Term of Office	<p>Sebagai Direktur Utama / As President Director 2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)</p> <p>Sebagai Direktur Komersial / As Commercial Director 8 April 2019 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – March 2, 2020 (First Period)</p>
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Banyumas, 8 Mei 1970 / Banyumas, May 8, 1970
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	50 tahun / years old
Domisili / Domicile	Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia / Bekasi City, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	<ul style="list-style-type: none"> S2 Manajemen Infrastruktur Yokohama National University, Jepang (2001) / Master's degree in Infrastructure Management, Yokohama National University, Japan (2001) S2 Business Administration Nanyang Technological University, Singapura (2017) / Master's degree in Business Administration, Nanyang Technological University, Singapore (2017)
Keahlian / Expertise	Manajemen Infrastruktur dan Administrasi Bisnis / Infrastructure Management and Business Administration
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia (2014 - 2015) Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017) Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017 - 2019) Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020) Plt. Komisaris Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019 - saat ini) President Director of PT Pengerukan Indonesia (2014 - 2015) President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017) President Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017 - 2019) Commercial Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020) Acting President Commissioner of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019 - present)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Hamba

Wakil Direktur Utama /
Vice President Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning Appointment of Vice President Director of PT Pelindo II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Ketapang, 10 Oktober 1968 / Ketapang, October 10, 1968
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	52 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2010) / Master's degree in Business Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2010)
Keahlian / Expertise	Hukum Bisnis / Business Law
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial Kementerian BUMN (2015 - 2016) • Komisaris PT PGN LNG Indonesia (2016 - 2017) • Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN (2016 - 2019) • Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) (2017 - 2018) • Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2018 - 2019) • Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2019 - 2019) • Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020) • Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019-2020) • Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2020 - saat ini) • Komisaris Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2020 - saat ini) • Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2020 - saat ini)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Rima Novianti
Direktur Komersial /
Commercial Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Sukabumi, 1 November 1970 / Sukabumi, November 1, 1970
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	50 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia, Depok (2005) / Master's degree in Communication Management, Universitas Indonesia, Depok (2005)
Keahlian / Expertise	Manajemen Komunikasi dan Komersial / Communication Management and Commerce
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Multi Terminal Indonesia (2014 - 2015) • Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017) • Senior Vice President Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019) • Direktur Komersial PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020) • Pjt. Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia (2014 - 2015) • Commercial Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017) • Senior Vice President of Commerce at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019) • Commercial Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020) • Acting President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - present)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Zuhri Iryansyah
Direktur Teknik /
Technical Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 (Periode Pertama) / June 18, 2020 – June 17, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Medan, 15 Juli 1969 / Medan, July 15, 1969
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	51 tahun / years old
Domisili / Domicile	Bekasi, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Belanda (2011) / Master's degree in Coastal Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Netherlands (2011)
Keahlian / Expertise	Manajemen Proyek, Teknik dan Pengembangan Pelabuhan / Project Management, Engineering and Port Development
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014 – 2015) • Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015 – 2017) • Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017) • Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019) • Senior Vice President Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020) • Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia (2020 - saat ini) • Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020 - saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • Engineering Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014 – 2015) • Construction Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015 – 2017) • Commercial & Business Development Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017) • Strategic Project Coordinator at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019) • Senior Vice President of Strategic Project Management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020) • President Commissioner of PT Electronic Data Interchange Indonesia (2020 - present) • President Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020 - present)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Muarip

Direktur Operasi /
Operation Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Juwana, 20 Juli 1970 / Juwana, July 20, 1970
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	50 tahun / years old
Domisili / Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia / Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Administrasi Bisnis Kuehne Logistics University, Jerman (2017) / Masters's degree in Business Administration, Kuehne Logistics University, Germany (2017)
Keahlian / Expertise	Hukum, Administrasi Bisnis, Operasional Pelabuhan / Law, Business Administration, Port Operation
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2013 - 2015) • Direktur Operasi dan Teknik PT IPC Terminal Peti Kemas (2015 - 2017) • Junior Chief Specialist Operasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020) • Komisaris Utama PT IPC Terminal Petikemas (2020 - saat ini) • Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2020 - saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • Operation Director of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2013 - 2015) • Operation and Technical Director of PT IPC Terminal Peti Kemas (2015 - 2017) • Junior Chief Specialist of Operation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020) • President Commissioner of PT IPC Terminal Petikemas (2020 - present) • President Commissioner of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2020 - present)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Mega Satria
Direktur Keuangan /
Finance Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	15 Maret 2021 – 14 Maret 2026 (Periode Pertama) / March 15, 2021 – March 14, 2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Pekanbaru, 23 Oktober 1977 / Pekanbaru, October 23, 1977
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	43 tahun / years old
Domisili / Domicile	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia / South Tangerang, Banten, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Master of Business Administration dari Loyola University of Chicago (1999) / Master of Business Administration from Loyola University of Chicago (1999)
Keahlian / Expertise	Keuangan, <i>Human Capital</i> , Manajemen Risiko, Digitalisasi & IT / Finance, Human Capital, Risk Management, Digitalization & IT
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President – Head of Business Development & National Distribution Financial Service Group – Sampoerna Strategic (2008 – 2012) • Corporate Treasurer PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012 – 2015) • Finance Director PT Citilink Indonesia (2015 – 2017) • Director of Finance & Human Capital PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017 – 2018) • Finance Director PT Bukit Asam Tbk (2018 – 2021) <ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President – Head of Business Development & National Distribution Financial Service Group – Sampoerna Strategic (2008 – 2012) • Corporate Treasurer of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (2012 – 2015) • Finance Director of PT Citilink Indonesia (2015 – 2017) • Director of Finance & Human Capital of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017 – 2018) • Finance Director of PT Bukit Asam Tbk. (2018 – 2021)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Ihsanuddin Usman

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum /
Human Capital & General Affairs Director

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 7 Juli 1969 / Jakarta, July 7, 1969
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	51 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Innovation & Technology Management TSM Business School – Twente University, Belanda (2000) / Master's degree in Innovation & Technology Management, TSM Business School – Twente University, Netherlands (2000)
Keahlian / Expertise	<i>Innovation & Technology Management, Human Capital Development</i>
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) (2017 - 2018) • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018 - 2020) • Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2002 – 2021) • Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Peti Kemas Koja (2020 - saat ini) • Komisaris Utama PT NPCT 1 (2020 – saat ini) <ul style="list-style-type: none"> • SVP Human Capital Development of PT Pertamina (Persero) (2017 - 2018) • Transformation and Business Development Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018 - 2020) • President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2002 – 2021) • Chair of Supervisory Board of KSO Terminal Peti Kemas Koja (2020 - present) • President Commissioner of PT NPCT 1 (2020 – present)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Ogi Rulino

**Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis /
Transformation and Business Development Director**

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Banda Aceh, 27 September 1968 / Banda Aceh, September 27, 1968
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	52 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia / South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Teknik University of Electro-Communications, Jepang (1995) / Master's degree in Engineering, University of Electro-Communications, Japan (1995)
Keahlian / Expertise	<i>Business Development</i> dan Logistik / <i>Business Development and Logistics</i>
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Portco Infranasantara, member of Rajawali Corpora (2014) • Direktur Logistik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015 -2018) • Direktur Logistik dan Pengembangan Bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018 - 2019) • Komisaris Utama PT Multi Terminal Indonesia (2019 - saat ini) • Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Director of PT Portco Infranasantara, member of Rajawali Corpora (2014) • Logistics Director of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015 -2018) • Logistics and Business Development Director of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018 - 2019) • President Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia (2019 - present) • President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - present)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Yon Irawan
Direktur Keuangan /
Finance Director

Berhenti Menjabat pada tanggal 14 Maret 2021 / Ended service on March 14, 2021

**Dasar Hukum Pengangkatan /
Legal Basis of Appointment**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Dasar Hukum Pemberhentian /
Legal Basis of Dismissal**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Periode Jabatan /
Term of Office**

2 Maret 2020 – 14 Maret 2021 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 14, 2021 (First Period)

**Kewarganegaraan /
Citizenship**

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

**Tempat Tanggal Lahir /
Place, Date of Birth**

Yogyakarta, 13 Februari 1974 / Yogyakarta, February 13, 1974

**Usia per 31 Desember 2020 /
Age per December 31, 2020**

46 tahun / years old

Domisili / Domicile

Jakarta, Indonesia

**Pendidikan Terakhir /
Latest Education**

S2 Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya (2013) /
Master's degree in Management, Universitas Airlangga, Surabaya (2013)

Keahlian / Expertise

Manajemen Keuangan / Financial Management

**Riwayat Pekerjaan /
Career History**

- Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014 - 2017)
- Komisaris PT Terminal Teluk Lamong (2014 - 2017)
- Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya (2017)
- Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017 - 2020)
- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020 - saat ini)
- Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014 - 2017)
- Commissioner of PT Terminal Teluk Lamong (2014 - 2017)
- President Director of PT Terminal Peti Kemas Surabaya (2017)
- Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017 - 2020)
- President Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020 - present)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Elvyn G. Masassya
Direktur Utama /
President Director

Berhenti Menjabat pada tanggal 1 Maret 2020 / Ended service on March 1, 2020

**Dasar Hukum Pengangkatan /
Legal Basis of Appointment**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016 concerning Appointment of President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Dasar Hukum Pemberhentian /
Legal Basis of Dismissal**

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**Periode Jabatan /
Term of Office**

22 April 2016 – 1 Maret 2020 (Periode Pertama) / April 22, 2016 – March 1, 2020 (First Period)

**Kewarganegaraan /
Citizenship**

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

**Tempat Tanggal Lahir /
Place, Date of Birth**

Medan, 18 Juni 1967 / Medan, June 18, 1967

**Usia per 31 Desember 2020 /
Age per December 31, 2020**

53 tahun / years old

Domisili / Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia / South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

**Pendidikan Terakhir /
Latest Education**

S2 Keuangan Institut Teknologi Bandung, Bandung (2000) /
Master's degree in Finance, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2000)

**Pendidikan Non-Formal /
Non-Formal Education**

Professional Development Program, Institut Bankir Indonesia, Jakarta (1991)

Keahlian / Expertise

Keuangan / Finance

**Riwayat Pekerjaan /
Career History**

- Investment Director of PT Jamsostek (Persero) (2008 - 2012)
- President Director of PT Jamsostek (Persero) (2012 - 2013)
- President Director of BPJS Ketenagakerjaan (2014 - 2016)
- Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017 - 2020)
- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 - 2020)
- Investment Director of PT Jamsostek (Persero) (2008 - 2012)
- President Director of PT Jamsostek (Persero) (2012 - 2013)
- President Director of BPJS Ketenagakerjaan (2014 - 2016)
- President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017 - 2020)
- President Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 - 2020)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Rizal Ariansyah
Direktur Sumber Daya Manusia /
Human Capital Director

	Berhenti Menjabat pada tanggal 1 Maret 2020 / Ended service on March 1, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Dasar Hukum Pemberhentian / Legal Basis of Dismissal	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	14 Juli 2017 – 1 Maret 2020 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – March 1, 2020 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Surabaya, 24 Juni 1975 / Surabaya, June 24, 1975
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	45 tahun / years old
Domisili / Domicile	Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia / Bekasi City, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Hukum Universitas Indonesia, Depok (2006) / Master's degree in Law, Universitas Indonesia, Depok (2006)
Keahlian / Expertise	Hukum / Law
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012 - 2016) • Executive Vice President PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016 - 2017) • Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018 - 2020) • Vice President Commissioner PT Jakarta International Container Terminal (2018 - 2020) • Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019 - 2020)
	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012 - 2016) • Executive Vice President of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016 - 2017) • President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018 - 2020) • Vice President Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (2018 - 2020) • President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019 - 2020)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Prasetyadi

Direktur Operasi /
Operation Director

Berhenti Menjabat pada tanggal 1 Maret 2020 / Ended service on March 1, 2020

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Dasar Hukum Pemberhentian / Legal Basis of Dismissal

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Periode Jabatan / Term of Office

16 Mei 2016 – 1 Maret 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – March 1, 2020 (First Period)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth

Bandung, 7 Agustus 1969 / Bandung, August 7, 1969

Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020

51 tahun / years old

Domisili / Domicile

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia / Surabaya, East Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir / Latest Education

- S2 Port Engineering University of Le Havre, Prancis (1998) / Master's degree in Port Engineering, University of Le Havre, France (1998)
- S2 Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya (2015) / Master's degree in Management, Universitas Airlangga, Surabaya (2015)

Keahlian / Expertise

Manajemen, Teknik Kepelabuhanan / Management, Port Engineering

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2017)
- Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia (2017 - 2019)
- Komisaris New Priok Container Terminal 1 (2018)
- Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2019 - 2020)
- Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Peti Kemas Koja (2019 - 2020)
- President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2017)
- President Commissioner of PT Electronic Data Interchange Indonesia (2017 - 2019)
- Commissioner of New Priok Container Terminal 1 (2018)
- President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia (2019 - 2020)
- Chairman of Supervisory Board of KSO Terminal Peti Kemas Koja (2019 - 2020)



Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Widyaka Nusapati
Direktur Keuangan /
Finance Director

	Berhenti Menjabat pada tanggal 1 Maret 2020 / Ended service on March 1, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Dasar Hukum Pemberhentian / Legal Basis of Dismissal	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Termination, Changes in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	26 November 2018 – 1 Maret 2020 (Periode Pertama) / November 26, 2018 – March 1, 2020 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 12 Januari 1967 / Jakarta, January 12, 1967
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	53 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia / Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Business Administration major in Financial Management/Quantitative Analysis Cleveland State University, Amerika Serikat (1994) / Master's degree in Business Administration in Financial Management/Quantitative Analysis, Cleveland State University, United States (1994)
Keahlian / Expertise	Administrasi Bisnis dan Keuangan / Business Administration and Finance <ul style="list-style-type: none"> • Finance Director of PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (2013 - 2015) • Founder PT Widyaka Propertindo (Developer Properti) (2015 - 2018) • Investment Director di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Persero) (2018) • Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - 2020) • Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (sejak tahun 2019 - 2020)
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Finance Director of PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (2013 - 2015) • Founder of PT Widyaka Propertindo (Developer Properti) (2015 - 2018) • Investment Director of PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Persero) (2018) • President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - 2020) • President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (since 2019 - 2020)

Profil Direksi Profile of the Board of Directors



Dani Rusli Utama
Direktur Teknik /
Technical Director

	Berhenti Menjabat pada tanggal 18 Juni 2020 / Ended service on June 18, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Dasar Hukum Pemberhentian / Legal Basis of Dismissal	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning Termination and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
Periode Jabatan / Term of Office	16 Mei 2016 – 17 Juni 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – June 17, 2020 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Bandung, 14 Januari 1971 / Bandung, January 14, 1971
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	49 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Manajemen Infrastruktur Yokohama University, Jepang (1999) / Master's degree in Infrastructure Management, Yokohama University, Japan (1999)
Keahlian / Expertise	Manajemen Infrastruktur / Infrastructure Management
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012) • Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (2015) • Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2017 - 2019) • Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia (2017 - 2020) • Komisaris Utama PT EDI Indonesia (2019 - 2020) <ul style="list-style-type: none"> • President Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012) • President Director of PT Jakarta International Container Terminal (2015) • President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia (2017 - 2019) • President Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia (2017 - 2020) • President Commissioner of PT EDI Indonesia (2019 - 2020)



Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris

Profile of Organs under the Board of Commissioners

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS / SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Rizqi Kurnianto
Sekretaris Dewan Komisaris /
Secretary of the Board of Commissioners

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 dated August 1, 2019 concerning Termination and Appointment of Secretary of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).	Keahlian / Expertise	Kesekretariatan / Secretary <ul style="list-style-type: none"> • Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2008-2011) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2011 - 2016) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016 - 2019)
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen	Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Staff of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2008-2011) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2011 - 2016) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016 - 2019)
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 22 Maret 1985 / Jakarta, March 22, 1985		
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	35 tahun / years old		
Domisili / Domicile	Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia / West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia		
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S2 Manajemen Universitas Indonesia (2014) / Master's degree in Management, University of Indonesia (2014)		

Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris Profile of Organs under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT / AUDIT COMMITTEE



Muhdi Al Fajar

Anggota Komite Audit / Audit Committee Member

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai Anggota Komite Audit serta Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 dated February 1, 2018 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Audit Committee and Appointment of Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero), which is extended through Letter of the Board of Commissioners No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2019 concerning Extension of the Term of Office of Member of Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).	Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020 52 tahun / years old
		Domisili / Domicile Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia / South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
		Pendidikan Terakhir / Latest Education S2 Akuntansi Universitas Indonesia, Depok (2013) / Master's degree in Accounting, University of Indonesia, Depok (2013)
		Keahlian / Expertise Keuangan / Finance
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010 - sekarang) • <i>General Manager of Finance and Accounting</i> PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010 - sekarang) • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2018)
		Riwayat Pekerjaan / Career History <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee Member of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010 - present) • General Manager of Finance and Accounting of PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010 - present) • Nomination and Remuneration Member of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2018)
Periode Jabatan / Term of Office	1 Februari 2018 – 16 Maret 2021 (Periode Pertama) / February 1, 2018 – March 16, 2021 (First Period)	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen	
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Wonogiri, 20 Juni 1968 / Wonogiri, June 20, 1968	



Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris Profile of Organs under the Board of Commissioners



Pionir Harapan

Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Audit Committee Member and Risk Management Monitoring Committee Member

Dasar Hukum
Pengangkatan / Legal
Basis of Appointment

Sebagai Anggota Komite Audit / As Audit Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Dasar Hukum
Pengangkatan / Legal
Basis of Appointment

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II-2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan No. 07/KEP-DK/PI.II/III-2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/II-2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II-2016 dated February 29, 2016 concerning Termination and Appointment of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) and No. 07/KEP-DK/PI.II/III-2016 dated March 17, 2016 concerning Appointment of Chairperson and Member of Risk Management Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero), which was later extended based on Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/II-2019 dated February 28, 2019 concerning Extension of the Term of Office of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Audit / As Audit Committee Member

8 April 2020 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – February 28, 2021 (First Period)

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

1 Maret 2016 - 16 Maret 2016, 17 Maret 2016 - 16 (Periode Pertama), kemudian diperpanjang hingga dialihutugaskan sebagai Anggota Komite Audit pada tanggal 8 April 2020 / March 1, 2016 – March 16, 2016, March 17, 2016 – March 16, 2019 (First Period), which was later extended and assigned as Audit Committee Member on April 8, 2020

Periode Jabatan /
Term of Office

Kewarganegaraan /
Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir /
Place, Date of Birth

Bandung, 9 Juli 1956 / Bandung, July 9, 1956

Usia per 31 Desember
2020 / Age per December
31, 2020

64 tahun / years old

Domisili / Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir /
Latest Education

S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IPWI, Jakarta (2002) / Master's Degree in Finance Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IPWI, Jakarta (2002)

Keahlian / Expertise

Keuangan, SDM / Finance, HR

Riwayat Pekerjaan /
Career History

- Anggota Komite Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (2010 - 2014)
- Anggota Komite Manajemen Risiko PT Dirgantara Indonesia (2014 - 2016)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2020)
- Risk Management Committee Member of PT Angkasa Pura II (2010 - 2014)
- Risk Management Committee Member of PT Dirgantara Indonesia (2014 - 2016)
- Risk Monitoring Committee Member of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2020)

Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris Profile of Organs under the Board of Commissioners

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO / RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE



Rakhmat Adi Santosa

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Anggota Komite Audit / Risk Management Monitoring Committee Member and Audit Committee Member

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Audit Committee as Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Audit / As Audit Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 03/KEP-DK/PI.II/III-2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 04/KEP-DK/PI.II/III-2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 03/KEP-DK/PI.II/III-2017 dated March 6, 2017 concerning Appointment of Member of Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero), which was later extended based on Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 04/KEP-DK/PI.II/III-2020 dated March 4, 2020 concerning Extension of the Term of Office of Member of Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

8 April 2020 – 7 April 2023 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – April 7, 2023 (First Period)

Sebagai Anggota Komite Audit / As Audit Committee Member

6 Maret 2017 – 5 Maret 2020 (Periode Pertama), kemudian diperpanjang hingga dialihugaskan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 8 April 2020 / March 6, 2017 – March 5, 2020 (First Period), which was later extended and assigned as Risk Management Monitoring Committee on April 8, 2020

Periode Jabatan / Term of Office

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth

Banyumas, 20 November 1969 / Banyumas, November 20, 1969

Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020

51 tahun / years old

Domisili / Domicile

Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia / North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir / Latest Education

S2 Akuntansi Universitas Indonesia, Depok (2005) / Master's degree in Accounting, University of Indonesia, Depok (2005)

Keahlian / Expertise

Keuangan / Finance

- Managing Partner PT Cipta Inspirasi Pratama (2011 - sekarang)
- Akuntan Publik KAP Sohibul, Kaslani, Komarianto & Santosa (2016 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Managing Partner of PT Cipta Inspirasi Pratama (2011 - present)
- Public Accountant of KAP Sohibul, Kaslani, Komarianto & Santosa (2016 - present)
- Audit Committee Member of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020)

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment



Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris Profile of Organs under the Board of Commissioners



Aries Fikiran

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Risk Management Monitoring Committee Member and Nomination and Remuneration Committee Member

Dasar Hukum Penggangkatan / Legal Basis of Appointment

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / As Nomination and Remuneration Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/I-2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Audit serta Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.II/I-2018 dated February 1, 2018 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Audit Committee and Appointment of Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

8 April 2020 – 31 Januari 2021 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – January 31, 2021 (First Period)

Periode Jabatan / Term of Office

Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / As Nomination and Remuneration Committee Member

Sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga dialihutugaskan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 8 April 2020 (Periode Pertama) / Since February 1, 2018 before being assigned as Nomination and Remuneration Committee Member on April 8, 2020 (First Period)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth

Sukabumi, 21 Maret 1964 / Sukabumi, March 21, 1964

Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020

56 tahun / years old

Domisili / Domicile

Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia / Bandung City, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir / Latest Education

S2 Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran, Bandung (2005) / Master's degree in Finance Management, Padjajaran University, Bandung (2005)

Keahlian / Expertise

Keuangan / Finance

- Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Bisnis Syariah, dan Pasar PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung (2017)
- Pjs. Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung (2017)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018 - 2020)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Head of Planning, Sharia Business Development, and Market Division of PT Pos Indonesia (Persero) in Bandung (2017)
- Temporary Head of Sharia Business Development Project of PT Pos Indonesia (Persero) in Bandung (2017)
- Nomination and Remuneration Committee Member of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018 - 2020)

Profil Organ di Bawah Dewan Komisaris Profile of Organs under the Board of Commissioners

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI / NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE



R. Nurhidayat

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko /
Nomination and Remuneration Committee Member and Risk Management Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / As Nomination and Remuneration Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning Termination and Appointment of Chairperson and Member of Nomination and Remuneration Committee and Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2017 dated May 31, 2017 concerning Appointment of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / As Nomination and Remuneration Committee Member

15 April 2020 – 30 Mei 2022 (Periode Pertama) / April 15, 2020 – May 30, 2022 (First Period)

Periode Jabatan / Term of Office

Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / As Risk Management Monitoring Committee Member

Sejak tanggal 31 Mei 2017 hingga dialih tugaskan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 15 April 2020 (Periode Pertama) / Since May 31, 2017 before being assigned as Nomination and Remuneration Committee Member on April 15, 2020 (First Period)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth

Pekalongan, 2 Maret 1973 / Pekalongan, March 2, 1973

Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020

47 tahun / years old

Domisili / Domicile

Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia / Depok City, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir / Latest Education

S2 Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2012) / Master's degree in Development Economics, Gajah Mada University, Yogyakarta (2012)

Keahlian / Expertise

Desain Sistem Informasi Akuntansi, Analisis atas Laporan Keuangan, Keuangan Mikro Syariah / Accounting Information System Design, Financial Statements Analysis, Sharia Micro Finance

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Peneliti Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (2006 - sekarang)
- Pengajar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2010 - 2015)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020)
- Researcher of Economics and Finance, Fiscal Policy Agency (BKF) of the Ministry of Finance (2006 - present)
- Lecturer of the Indonesian State College of Accountancy (2010 - 2015)
- Risk Monitoring Committee Member of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020)



IPC



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade, Energizing Indonesia

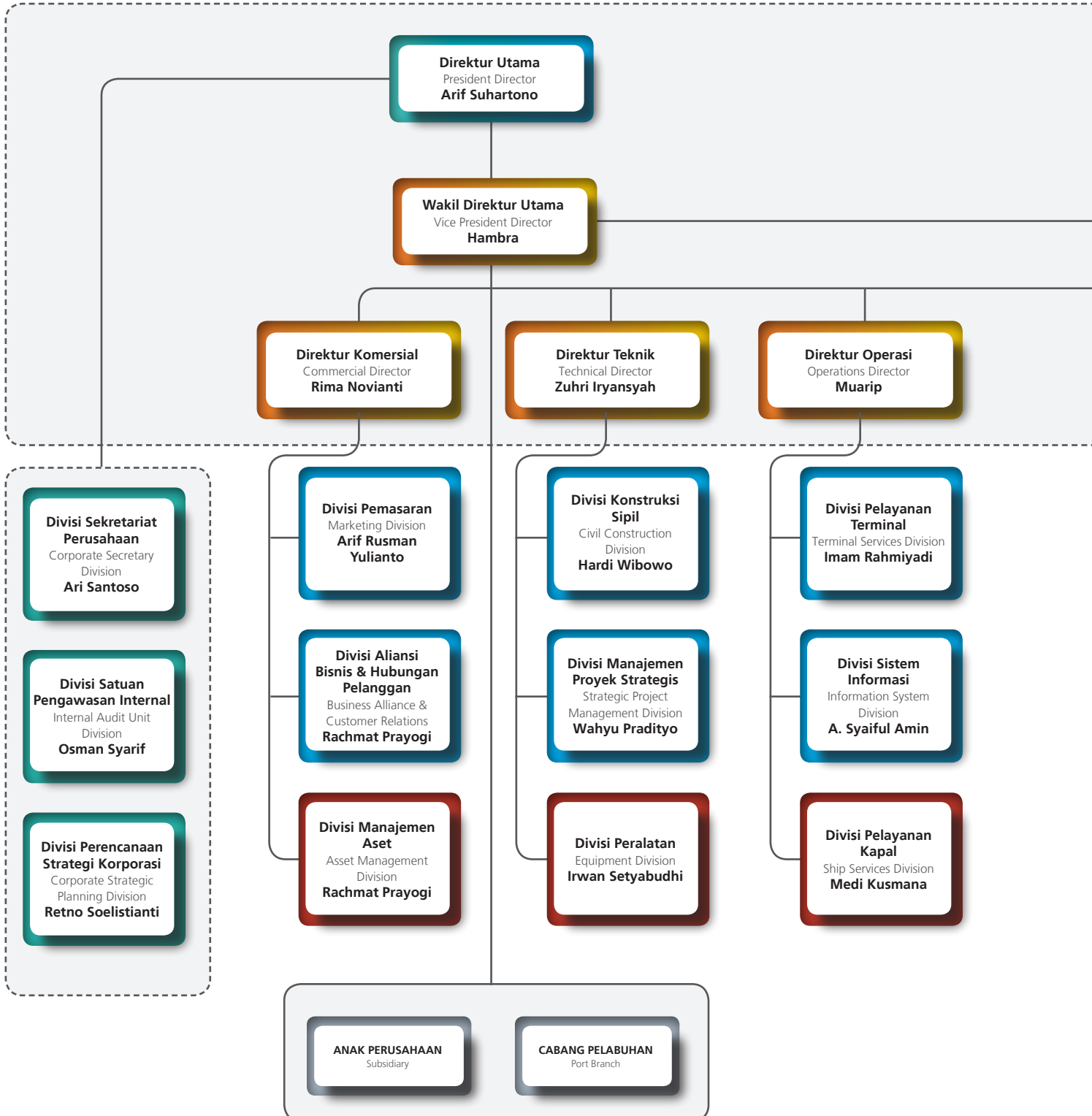


Struktur Organisasi

Organization Structure

Struktur organisasi IPC disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PLII-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Kemudian, pada tahun 2020, IPC melakukan perubahan susunan organisasi pada Direktorat Sumber Daya Manusia & Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PLII-20 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PLII-19 Tanggal 20 November 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

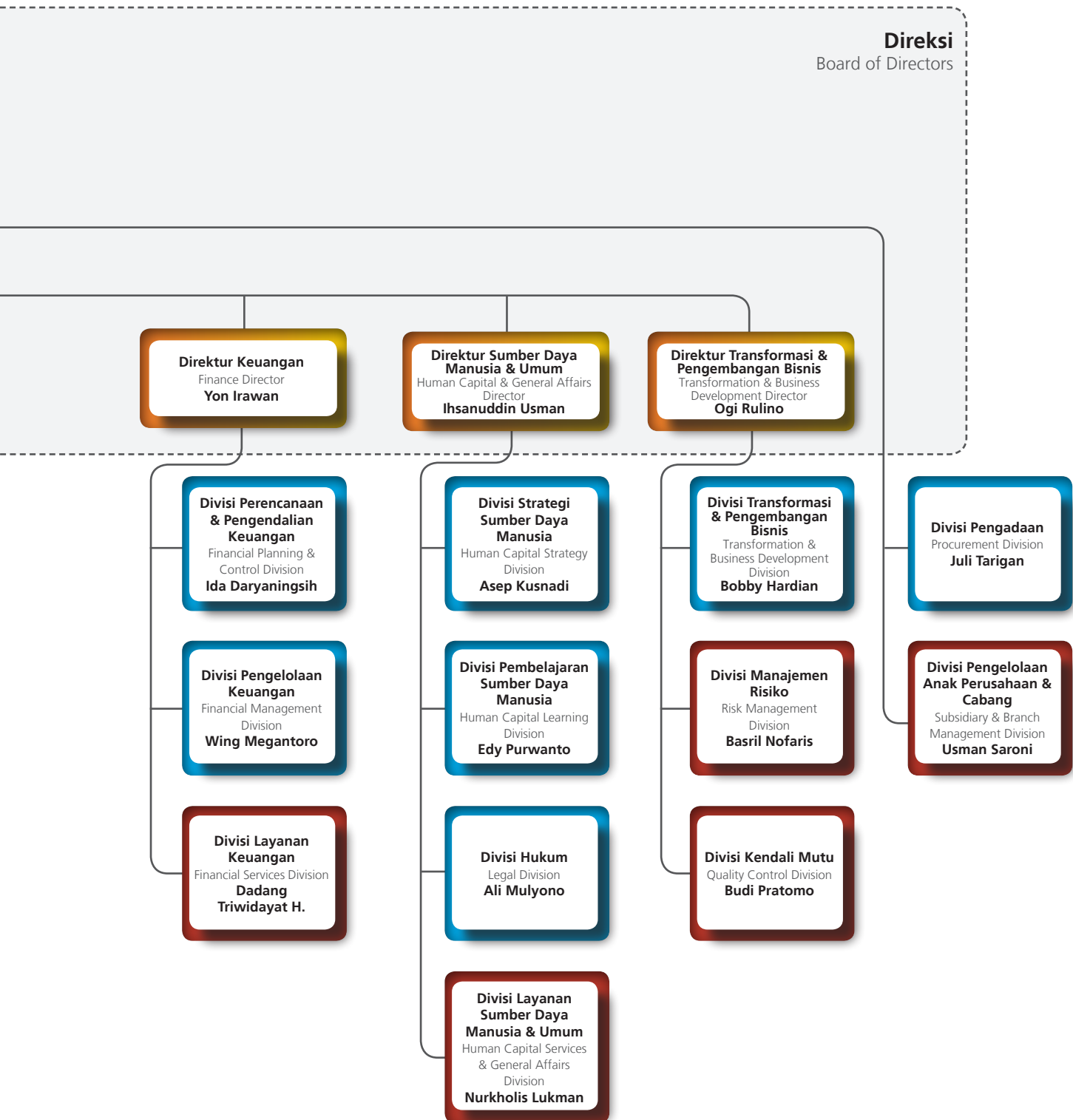
IPC organization structure was established through Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PLII-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). In 2020, IPC subsequently changed the organization composition in the Directorate of Human Capital & General Affairs as established in Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PLII-20 dated August 13, 2020 regarding Amendment to Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PLII-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).





Struktur Organisasi Organization Structure

- Direksi
Board of Directors
 - Executive Vice President
Executive Vice President
 - Senior Vice President
Senior Vice President
 - Vice President
Vice President
- Garis konfirmasi & penyampaian informasi
Information confirmation & delivery lines
- Garis koordinasi & supervise
Coordination & supervision lines



Profil Pejabat Eksekutif

Profiles of Executive Officers

PROFIL SEKRETARIAT PERUSAHAAN / PROFILE OF CORPORATE SECRETARY



Ari Santoso
EVP Sekretariat Perusahaan / EVP Corporate Secretary

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 Agustus 2020 / Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated August 3, 2020
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	47 tahun / years old
Domisili / Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia / East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S-2 Business Administration dari Renmin University / Master's degree in Business Administration from Renmin University
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial & Teknik PT Pengerukan Indonesia (25 Juli 2019 – 2 Agustus 2020) / Commercial & Engineering Director of PT Pengerukan Indonesia (July 25, 2019 – August 2, 2020) Direktur Komersial & Teknik PT Pengerukan Indonesia (24 Januari – 24 Juli 2019) / Commercial & Engineering Director of PT Pengerukan Indonesia (January 24 – July 24, 2019) VP Hubungan Pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (27 Februari 2018 – 23 Januari 2019) / VP Customer Relations of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (February 27, 2018 – January 23, 2019)

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL / PROFILE OF INTERNAL AUDIT UNIT HEAD



Osman Syarif
EVP Satuan Pengawasan Internal / EVP Internal Audit Unit

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	53 tahun / years old
Domisili / Domicile	Bandung, Jawa Barat, Indonesia / Bandung, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir / Latest Education	S-2 <i>Business Administration</i> dari Monash University / Master's degree in Business Administration from Monash University
Riwayat Pekerjaan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan & SDM PT Energi Pelabuhan Indonesia (19 Desember 2019 – 13 Juli 2020) / Finance & HC Director of PT Energi Pelabuhan Indonesia (December 19, 2019 – July 13, 2020) Jr. Chief Specialist Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (20 November – 18 Desember 2019) / Jr. Chief Specialist HC Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (November 20 – December 18, 2019) Jr. Chief Specialist SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (25 Juni – 19 November 2019) / Jr. Chief Specialist HC of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (June 25 – November 19, 2019)



Profil Pejabat Eksekutif Profiles of Executive Officers

Adapun profil Pejabat Eksekutif selain EVP Sekretariat Perusahaan dan EVP Satuan Pengawasan Internal yang posisinya berada 1 (satu) level di bawah Direksi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Profile of Executive Officers other than the Corporate Secretary and EVP Internal Audit Unit whose position is 1 (one) level under the Board of Directors is presented in the following table:

Profil Pejabat Eksekutif Lainnya

Profile of Other Executive Officers

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan Terakhir / Latest Education	Tahun Bergabung di IPC / Year Joining IPC
Direktur Utama / President Director						
Retno Soelistianti	EVP Perencanaan Strategi Korporasi / EVP Corporate Strategic Planning	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020	47 tahun / years old	Wanita / Female	S2 / Master's degree	1998
Wakil Direktur Utama / Vice President Director						
Juli Tarigan	SVP Pengadaan / SVP Procurement	KP.06.02/21/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 tanggal 21 Agustus 2017 / KP.06.02/21/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 dated August 21, 2017	52 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1989
Usman Saroni	VP Pengelolaan Anak Perusahaan / VP Subsidiary & Branch Management & Cabang	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 / KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019	42 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2012
Direktur Komersial / Commercial Director						
Arif Rusman Yulianto	SVP Pemasaran / SVP Marketing	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 17 Desember 2019 / KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	45 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1997
Rachmat Prayogi	SVP Aliansi Bisnis & Hubungan Pelanggan / SVP Business Alliance & Customer Relations	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020	48 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1996
Rachmat Prayogi	Plt. VP Manajemen Aset / Acting VP Asset Management	KP.20.01/5/11/1/MAT/KOM/PI.II-20 tanggal 5 November 2020 / KP.20.01/5/11/1/MAT/KOM/PI.II-20 dated November 5, 2020	48 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1996
Direktur Teknik / Technical Director						
Hardi Wibowo	SVP Konstruksi Sipil / SVP Civil Construction	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	46 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1999
Wahyu Pradityo	SVP Manajemen Proyek Strategis / SVP Strategic Project Management	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	37 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2007
Irwan Setyabudhi	VP Peralatan / VP Equipment	KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 4 Agustus 2020 / KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated August 4, 2020	49 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2014



Profil Pejabat Eksekutif Profiles of Executive Officers

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan Terakhir / Latest Education	Tahun Bergabung di IPC / Year Joining IPC
Direktur Operasi / Operations Director						
Imam Rahmiyadi	SVP Pelayanan Terminal / SVP Terminal Services	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 / KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019	43 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1999
A. Syaiful Amin	SVP Sistem Informasi / SVP Information System	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	42 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2001
Medi Kusmana	VP Pelayanan Kapal / VP Ship Services	KP.10.02/9/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 12 Oktober 2020 / KP.10.02/9/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated October 12, 2020	52 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1998
Direktur Keuangan / Finance Director						
Ida Daryaningsih	SVP Perencanaan & Pengendalian Keuangan / SVP Financial Planning & Control	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	54 tahun / years old	Wanita / Female	S2 / Master's degree	1998
Wing Megantoro	SVP Pengelolaan Keuangan / SVP Financial Management	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 / KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019	48 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2001
Dadang Triwidayat H.	VP Layanan Keuangan / VP Financial Services	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	42 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2016
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum / Human Capital & General Affairs Director						
Asep Kusnadi	SVP Strategi SDM / SVP HC Strategy	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	54 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1996
Edy Purwanto	SVP Pembelajaran SDM / SPV HC Learning	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	48 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1997
Ali Mulyono	SVP Hukum / SVP Legal	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	51 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1999
Nurkholis Lukman	VP Layanan SDM / VP HC Services	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 / KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019	47 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1997
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis / Transformation & Business Development Director						
Bobby Hardian	SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis / SVP Transformation & Business Development	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 14 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 dated July 14, 2020	40 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2007
Basril Nofaris	Plt. VP Manajemen Risiko / Acting VP Risk Management	KP.20.01/30/9/1/TUD/TRS/PI.II-20 tanggal 30 September 2020 / KP.20.01/30/9/1/TUD/TRS/PI.II-20 dated September 20, 2020	47 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1996
Budi Pratomo	VP Kendali Mutu / VP Quality Control	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 / KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019	42 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2015

Profil Pejabat Eksekutif Profiles of Executive Officers

Profil General Manager Cabang

Kinerja operasional IPC juga didukung oleh keberadaan 12 (dua belas) cabang pelabuhan yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah kerja. Adapun profil General Manager dari kedua belas cabang pelabuhan Perseroan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Profiles of Branch General Managers

IPC's operations are supported by 12 (twelve) port branches spread in 10 (ten) work areas. The profiles of the General Managers of the Company's twelve port branches is presented in the following table:

Profil General Manager 12 (Dua Belas) Cabang Pelabuhan IPC

Profiles of General Managers of 12 (Twelve) IPC Port Branches

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan Terakhir / Latest Education	Tahun Bergabung di IPC / Year Joining IPC
Cabang Pelabuhan Utama / Main Port Branch						
Guna Mulyana	General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / General Manager of Tanjung Priok Port Branch	KP.10.02/5/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 / KP.10.02/5/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated June 5, 2020	53 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1993
Agus Hendrianto	General Manager Cabang Pelabuhan Banten / General Manager of Banten Port Branch	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 / KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019	54 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1996
Adi Sugiri	General Manager Cabang Pelabuhan Panjang / General Manager of Panjang Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	43 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	2000
Cabang Pelabuhan Madya / Medium Port Branch						
Nunu Husnul Khitam	General Manager Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / General Manager of Teluk Bayur Port Branch	KP.10.02/30/9/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 1 Oktober 2020 / KP.10.02/30/9/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated October 1, 2020	50 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1994
Udin Mahmudin	General Manager Cabang Pelabuhan Pontianak / General Manager of Pontianak Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	53 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1996
Silo Santoso	General Manager Cabang Pelabuhan Palembang / General Manager of Palembang Port Branch	KP.10.02/13/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 / KP.10.02/13/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020	54 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1993
Titah Yudhana	General Manager Cabang Pelabuhan Bengkulu / General Manager of Bengkulu Port Branch	KP.10.02/13/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 / KP.10.02/13/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020	55 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1996
Sandha Trisharjantho	General Manager Cabang Pelabuhan Jambi / General Manager of Jambi Port Branch	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 / KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019	45 tahun / years old	Pria / Male	D4 / Diploma	1999
Abdul Wahab	General Manager Cabang Pelabuhan Cirebon / General Manager of Cirebon Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020	55 tahun / years old	Pria / Male	S1 / Bachelor's degree	1997



Profil Pejabat Eksekutif Profiles of Executive Officers

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Usia per 31 Desember 2020 / Age per December 31, 2020	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan Terakhir / Latest Education	Tahun Bergabung di IPC / Year Joining IPC
Cabang Pelabuhan Pratama / Small Port Branch						
Nofal Hayin	General Manager Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / General Manager of Pangkal Balam Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 dated July 15, 2020	49 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1999
Kurnia Jaya	General Manager Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / General Manager of Sunda Kelapa Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 dated July 15, 2020	45 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1999
Hambar Wiyadi	General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / General Manager of Tanjung Pandan Port Branch	KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II -2020 dated July 15, 2020	52 tahun / years old	Pria / Male	S2 / Master's degree	1994

PROFIL SDM PERUSAHAAN

Human Capital Profile of the Company



Hingga berakhirnya tahun buku 2020, jumlah Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan, baik Pegawai Organik maupun Pegawai Non-Organik, berjumlah 10.257 orang, tercapai 99,79 persen dari RKAP 2020 dan lebih rendah dari tahun 2019 sebanyak 1.556 orang.

As of the end of 2020 fiscal year, the total employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries, which include Organic Employees and Non-Organic Employees, amounted to 10,257 people, reaching 99.79 percent of 2020 RKAP and lower than the total employees in 2019 of 1,556 people.





Secara umum, Grup IPC memiliki 2 (dua) kategori pegawai, yaitu Pegawai Organik dan Pegawai Non-Organik. Pegawai Organik adalah Pekerja Perseroan (termasuk Pekerja Dalam Masa Percobaan) yang diangkat/ditetapkan oleh Perseroan dan memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP). Dengan demikian, Pegawai Organik merupakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Sedangkan Pegawai Non-Organik adalah Pegawai yang ditetapkan oleh Perseroan, namun tidak memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP). Pegawai Non-Organik juga dapat digolongkan sebagai pegawai kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga *outsourcing* atau alih daya.

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, jumlah pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan, baik Pegawai Organik maupun Pegawai Non-Organik, berjumlah 10.257 orang, tercapai 99,79 persen dari RKAP 2020 dan lebih rendah dari tahun 2019 sebanyak 1.556 orang.

Jumlah SDM Grup IPC Tahun 2020

IPC	3.523 (34,35%)
Anak Perusahaan / Subsidiaries	6.743 (65,65%)
Total	10.257 (100,00%)

Pegawai IPC (Induk Perusahaan)

Per 31 Desember 2020, Pegawai IPC secara keseluruhan, baik Pegawai Organik dan Pegawai Non-Organik, berjumlah 3.523 karyawan, tercapai 95,50 persen dari RKAP 2020 dan lebih rendah 121 orang dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah Pegawai IPC berdasarkan status kepegawaian (Pegawai Organik dan Pegawai Non-Organik) dalam 5 (lima) tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut ini.

Jumlah Pegawai IPC Berdasarkan Status Kepegawaian dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun / Year	Jumlah Pegawai IPC / Total IPC Employees		Jumlah / Total
	Organik / Organic	Non-Organik / Non-Organic	
2016	2.734	1.177	3.911
2017	2.656	1.488	4.144
2018	2.603	6.489	9.092
2019	2.669	975	3.644
2020	2.609	914	3.523

In general, IPC Group has 2 (two) categories of employee, namely Organic Employee and Non-Organic Employee. Organic employees are workers of the Company including probation workers who are appointed/stipulated by the Company and have Port Employee Identification Number (NIPP). Thus, Organic Employees are permanent employees under permanent employment agreement.

Meanwhile, Non-Organic Employees are workers of the Company who are appointed by the Company and do not have Port Employee Identification Number (NIPP). Non-Organic Employees are contract employees under fixed-term employment agreement, outsourced, or transferred employees.

As of the end of 2020 fiscal year, the employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) at the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries, including Organic Employees and Non-Organic Employees, amounted to 10,257 people, which reached 99.79 percent of the 2020 RKAP and lower by 1,556 people than 2019.

Total HC of IPC Group in 2020

IPC Employees (Holding Company)

As of December 31, 2020, the total IPC Employees including Organic Employees and Non-Organic Employees amounted to 3,523 people, reaching 95.45 percent of 2020 RKAP and lower by 121 people than the previous year. The number of IPC Employees based on employment status (Organic Employees and Non-Organic Employees) in the last 5 (five) years are illustrated in the following charts

Total IPC Employees by Employment Status in the Last 5 (Five) Years

Pegawai Organik IPC

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sebanyak 2.609 orang atau 74,06 persen dari total keseluruhan Pegawai IPC merupakan Pegawai Organik Perseroan. Komposisi jumlah Pegawai Organik IPC berdasarkan jenis kelamin diuraikan dalam ilustrasi berikut ini.

IPC Organic Employees

As previously explained, 2,609 people or 74.06 percent of the total IPC employees are Organic Employees. The composition of the Company's Organic Employees based on gender is illustrated as follows.

Komposisi Pegawai Organik Berdasarkan Jenis Kelamin

Organic Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin / Gender	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Pria (P) / Male	2.156	82,64%	2.206	82,65%
Wanita (W) / Female	453	17,36%	463	17,35%
Jumlah / Total	2.609	100,00%	2.669	100,00%

Karena posisi IPC sebagai Induk Perusahaan, Perseroan memiliki kebijakan untuk menugaskan Pegawai Organik ke Anak Perusahaan. Adapun proporsi jumlah Pegawai Organik yang ditugaskan ke Anak Perusahaan diuraikan dalam tabel berikut ini.

As a Parent Company, IPC has a policy to assign Organic Employees to its Subsidiaries. The proportion of Organic Employees assigned to Subsidiaries is described in the following table.

Proporsi Jumlah Pegawai Organik IPC

Proportion of IPC Organic Employees

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Pegawai Organik Induk Perusahaan dan Cabang Pelabuhan / Organic Employees of Holding Company and Port Branches	1.434	54,96%	1.498	82,65%
Pegawai Organik yang Ditugaskan ke Anak Perusahaan / Organic Employees Assigned to Subsidiaries	1.175	45,04%	1.171	17,35%
Jumlah Pegawai Organik IPC / Total IPC Organic Employees	2.609	100,00%	2.669	100,00%

Pegawai Organik Induk Perusahaan dan Cabang Pelabuhan

Pegawai Organik Induk Perusahaan dan Cabang Pelabuhan adalah Pegawai Organik yang bertugas/bekerja di Kantor Pusat dan 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan. Berikut ini disampaikan komposisi Pegawai Organik Induk Perusahaan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, unit kerja, level jabatan, dan pusat pelayanan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Organic Employees of Holding Company and Port Branches

Organic Employees of Holding Company and Port Branches work at the Head Office and 12 (twelve) Port Branches. The composition of the Organic Employees of Holding Company (IPC) based on age, latest education, work unit, position level, and field of service in the last 2 (two) years is described as follows.

Komposisi Pegawai Organik IPC Berdasarkan Usia

Composition of IPC Organic Employees by Age

Usia / Age	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Di atas 55 tahun / Above 55 years old	28	1,95%	20	1,34%
51 – 55 tahun / years old	112	7,81%	111	7,41%
46 – 51 tahun / years old	259	18,06%	254	16,96%



Usia / Age	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
36 – 46 tahun / years old	411	28,66%	421	28,10%
26 – 36 tahun / years old	609	42,47%	655	43,72%
Di bawah 26 tahun / Under 26 years old	15	1,05%	37	2,47%
Jumlah / Total	1.434	100,00%	1.498	100,00%

Komposisi Pegawai Organik IPC Berdasarkan Jenjang Pendidikan **Composition of IPC Organic Employees by Education Level**

Pendidikan Terakhir / Latest Education	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Pascasarjana / Postgraduate	275	19,18%	290	19,36%
Sarjana / Undergraduate	711	49,58%	716	47,80%
Sarjana Muda / Diploma	193	13,46%	224	14,95%
SLTA / Senior High School	254	17,71%	263	17,56%
SLTP / Junior High School	1	0,07%	5	0,33%
Jumlah / Total	1.434	100,00%	1.498	100,00%

Komposisi Pegawai Organik IPC Berdasarkan Unit Kerja **Composition of IPC Organic Employees by Work Unit**

Unit Kerja / Work Unit	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Kantor Pusat / Head Office	588	41,00%	676	45,13%
Cabang Pelabuhan: / Port Branch:				
• Tanjung Priok	271	18,90%	259	17,29%
• Palembang	93	6,49%	91	6,07%
• Panjang	89	6,21%	83	5,54%
• Pontianak	101	7,04%	105	7,01%
• Teluk Bayur	48	3,35%	48	3,20%
• Cirebon	35	2,44%	31	2,07%
• Sunda Kelapa	49	3,42%	51	3,40%
• Banten	64	4,46%	66	4,41%
• Bengkulu	36	2,51%	35	2,34%
• Jambi	38	2,65%	36	2,40%
• Pangkal Balam	14	0,98%	12	0,80%
• Tanjung Pandan	8	0,56%	5	0,33%
Jumlah / Total	1.434	100,00%	1.498	100,00%

Komposisi Pegawai Organik IPC Berdasarkan Kelas Jabatan **Composition of IPC Organic Employees by Grade**

Kelas Jabatan / Grade	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
1	-	-	-	-
2	1	0,07%	1	0,07%

Kelas Jabatan / Grade	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
3	3	0,21%	7	0,47%
4	26	1,81%	29	1,94%
5	16	1,12%	8	0,53%
6	54	3,77%	49	3,27%
7	70	4,88%	76	5,07%
8	64	4,46%	51	3,40%
9	152	10,60%	177	11,82%
10	354	24,69%	333	22,23%
11	196	13,67%	223	14,89%
12	187	13,04%	194	12,95%
13	104	7,25%	122	8,14%
14	70	4,88%	65	4,34%
15	21	1,46%	42	2,80%
16	116	8,09%	121	8,08%
Jumlah / Total	1.434	100,00%	1.498	100,00%

Komposisi Pegawai Organik IPC Berdasarkan Pusat Pelayanan

Composition of IPC Organic Employees by Field of Service

Pusat Pelayanan / Field of Service	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Personil Operasi Langsung / Direct Operations Personnel	244	17,02%	268	17,89%
Personil Operasi Tidak Langsung / Non-Direct Operations Personnel	130	9,07%	78	5,21%
Personil Penunjang Operasional / Operation Support Personnel	1.060	73,92%	1.152	76,90%
Personil Pengelolaan / Management Personnel	-	-	-	-
Jumlah / Total	1.434	100,00%	1.498	100,00%

Pegawai Organik IPC yang Ditugaskan ke Anak Perusahaan

IPC Organic Employees Assigned to Subsidiaries

Pada tahun 2020, Pegawai IPC yang diperbantukan berjumlah 1.175, terserap 95,92 persen dari RKAP tahun 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya alih tugas dari Induk Perusahaan ke Anak Perusahaan.

In 2020, the number of seconded IPC Employees amounted to 1,175 people or 95.92 percent of 2020 RKAP. It was mainly due to transfer from the Holding Company to Subsidiaries.

Proporsi Pegawai Organik IPC yang Ditugaskan Ke Anak Perusahaan*)

Proportion of IPC Organic Employees Assigned to Subsidiaries*)

Grup Perusahaan / Company Group	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
KSO TPK Koja	6	0,51%	5	0,43%
PT Rumah Sakit Pelabuhan**)	-	-	3	0,26%
PT Multi Terminal Indonesia	20	1,70%	7	0,60%
PT Electronic Data Interchange Indonesia	2	0,17%	2	0,17%



Grup Perusahaan / Company Group	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	10	0,85%	7	0,60%
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	54	4,60%	41	3,50%
PT Energi Pelabuhan Indonesia	12	1,02%	8	0,68%
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	18	1,53%	17	1,45%
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	69	5,87%	76	6,49%
PT Pengerukan Indonesia	11	0,94%	7	0,60%
PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia	2	0,17%	2	0,17%
PT Pelabuhan Tanjung Priok	356	30,30%	366	31,26%
PT IPC Terminal Petikemas	476	40,51%	480	40,99%
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	137	11,66%	142	12,13%
PT Pelabuhan Indonesia Investama	2	0,17%	8	0,68%
Jumlah / Total	1.175	100,00%	1.171	100,00%

*) Jumlah Pegawai Organik termasuk Direksi dan GM/DGM IPC / Total Organic Employees include the Board of Directors and GM/DGM of IPC

***) Mengalami perubahan status dari Entitas Anak menjadi Entitas Asosiasi sejak bulan Agustus 2020 / Changed status from Subsidiary into Associate since August 2020

Pegawai Non-Organik IPC

Per 31 Desember 2020, jumlah Pegawai Non-Organik IPC sebanyak 914 orang atau 25,94 persen dari total Pegawai Induk Perusahaan (IPC) secara keseluruhan. Berikut ini disampaikan komposisi Pegawai Non-Organik IPC berdasarkan Pusat Pelayanan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

IPC Non-Organic Employees

As of December 31, 2020, total IPC Non-Organic Employees amounted to 914 people or 25.94 percent of the total Holding Company (IPC) Employees in general. The composition of IPC Non-Organic Employees based on field of service in the last 2 (two) years is as follows.

Komposisi Pegawai Non-Organik IPC Berdasarkan Pusat Pelayanan

Composition of IPC Non-Organic Employees by Field of Service

Pusat Pelayanan / Field of Service	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realization		Realisasi Tahun 2019 / 2019 Realization	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Personil Operasi Langsung / Direct Operations Personnel	206	22,51%	280	28,72%
Personil Operasi Tidak Langsung / Non-Direct Operations Personnel	246	26,89%	195	20,00%
Personil Penunjang Operasional / Operation Support Personnel	463	50,60%	433	44,41%
Personil Pengelolaan / Management Personnel	-	-	67	6,87%
Jumlah / Total	914	100,00%	975	100,00%

Program Pengembangan Kompetensi Karyawan

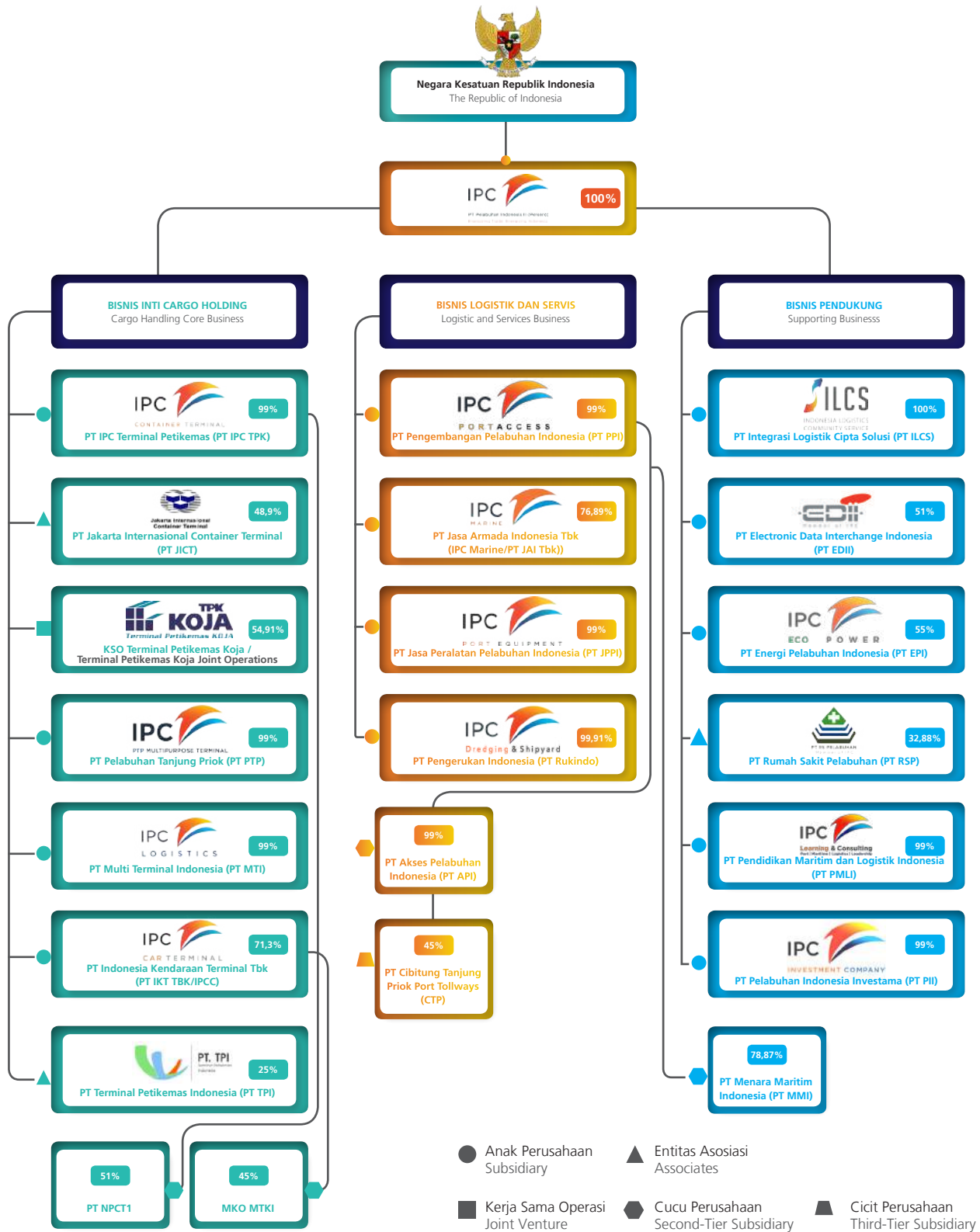
Uraian mengenai Program Pengembangan Kompetensi Karyawan yang meliputi pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan pada tahun 2020, adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk program pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 telah diuraikan pada Sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dalam Laporan Tahunan ini.

Employee Competency Development Program

Description of Employee Competency Development programs, which include employee trainings which have been and would be carried out in 2020, equal opportunity for all employees, and cost for employee competency development program in 2020, is available in Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health & Safety (OHS) Sub-Chapter in this Annual Report.

Struktur Grup Perusahaan

Organization Group Structure



Sampai dengan 31 Desember 2020, IPC tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2020, IPC did not have a *Special Purpose Vehicle* (SPV).



Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

Sampai akhir tahun 2020, IPC masih berstatus sebagai Perusahaan BUMN *Non Listed*, sehingga Pemegang Saham Perseroan bersifat Pemilik dan Pemegang Saham Tunggal, yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai Pemegang Saham Tunggal, Negara Indonesia berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000. Keseluruhan saham yang dikeluarkan tersebut menjadi modal ditempatkan serta disetor penuh Perseroan hingga saat ini.

As of the end of 2020, IPC is a Non-Listed SOE, thus its sole Owner and Shareholder is the Republic of Indonesia as represented by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). As the Sole Shareholder, the Republic of Indonesia is entitled to 1,444,029 shares with a par value of Rp1,000,000.00 or totaling Rp1,444,029,000,000. All shares are the Company's issued and fully paid capital up to present.

Modal Saham IPC Per 31 Desember 2020

IPC Share Capital Per December 31, 2020

Pemegang Saham / Shareholder	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (lembar saham) / Total Issued and Fully Paid Capital (share)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
Negara Republik Indonesia / Republic of Indonesia			100,00%
• Seri A / Series A	1	1.000.000	
• Seri B / Series B	1.444.028	1.444.028.000.000	
Jumlah / Total	1.444.029	1.444.029.000.000	

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2020, IPC merupakan BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar tidak relevan untuk ditampilkan.

COMPOSITION OF TOP 20 SHAREHOLDERS

As of December 31, 2020, IPC is a State-Owned Enterprises of which shares are 100 percent owned by the Republic of Indonesia. Therefore, information on the composition of top 20 (twenty) shareholders is not available.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5 PERSEN ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2020, Pemegang Saham IPC, yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki 100 persen saham di Perseroan.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS OWNING 5 PERCENT OR MORE

As of December 31, 2020, Shareholder of IPC, namely the Republic of Indonesia, which is represented by the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), has 100 percent shares in the Company.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5 PERSEN

Sampai dengan 31 Desember 2020, Pemegang Saham IPC, yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki 100 persen saham di Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat pemegang saham yang memiliki kurang dari 5 persen saham di Perseroan.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS OWNING LESS THAN 5 PERCENT

As of December 31, 2020, the Republic of Indonesia as represented by the Ministry of State-Owned Enterprises owned 100 percent of the Company's shares. Therefore, information on the composition of shareholders owning less than 5 percent of the Company's shares is not available.

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi maupun Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaannya (Grup IPC). Kepemilikan saham Perseroan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah sebesar 100 persen. Dengan demikian, IPC tidak menyajikan rincian anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) per 31 Desember 2020 merupakan salah satu BUMN *Non Listed/Non Keuangan* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

Hingga akhir tahun 2020, telah terjadi beberapa kali perubahan modal saham Perseroan, baik modal dasar maupun modal yang ditempatkan dan disetor. Adapun kronologi perubahan modal saham Perseroan hingga tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Kronologi Perubahan Modal Saham IPC Hingga Tahun 2020

No.	Dasar Hukum / Legal Basis	Uraian / Description
1.	Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. / Decision of General Meeting of Shareholders as notarized through Deed of Articles of Association Amendment No. 2 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, S.H.	Modal dasar Perseroan sebesar Rp4.000.000.000, terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham. / The Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.
2.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 sehubungan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia. / Extraordinary General Shareholders Meeting (EGMS) of the Company as stipulated in the Minutes of EGMS No. RIS-269/MBU/S/2012 related to the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 of 2011 dated December 22, 2011 regarding Additional Capital Contribution of the Republic of Indonesia.	<p>a. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. / Approved the disbursement/ placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.</p> <p>b. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui: / Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan; / Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 of 2011 regarding Additional Capital Contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital; • Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012. / Rp24 taken from the Company's reserve capital as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) do not own any shares of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its Subsidiaries (IPC Group). The Company's shares are 100 percent owned by the Government of Indonesia. Therefore, IPC does not present information on members of the Board of Directors and Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

SHARE ISSUANCE CHRONOLOGY

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as of December 31, 2020 is a Non-Listed/Non-Financial SOE which does not list its shares on Stock Exchange. Therefore, there is no information on corporate action, share offering price for each corporate action, number of listed shares after each corporate action, and the name of stock exchange on which the Company's shares are listed.

Until the end of 2020, the Company's share capital changed several times, which include authorized capital and issued and fully paid capital. The chronology of the Company's share capital changes until 2020 is described in the following table:

Chronology of IPC Share Capital Changes Until 2020



Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

No.	Dasar Hukum / Legal Basis	Uraian / Description
3.	Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013. / Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013.	<p>Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Rukindo dalam rangka restrukturisasi PT Rukindo. / The Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in PT Rukindo for restructuring of PT Rukindo.</p> <p>Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000. / With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.</p>
4.	Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019. / Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019.	<p>Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. / The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.</p> <p>Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh). / With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).</p>

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak memiliki efek lainnya sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya selain obligasi.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2020

Uraian mengenai penghargaan dan sertifikasi yang diterima oleh Perseroan selama tahun 2020, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang memuat informasi mengenai masa berlaku, nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional), tahun perolehan, dan badan pemberi penghargaan/sertifikasi, telah disajikan pada Bab Kilas Kinerja 2020 dalam Laporan Tahunan ini.

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND/OR LISTING

As of December 31, 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has no other securities, hence there is no information regarding chronology of issuance and/or listing of other securities other than bond.

AWARDS AND CERTIFICATIONS IN 2020

Description of the awards and certifications received by the Company in 2020, both at national and international scale, which includes information on the validity period, name of award/certification (national and international), year of receipt, and awarding/certifying body, is available in the 2020 Performance Highlights Chapter in this Annual Report.

Informasi Entitas Anak, Entitas Cucu, Entitas Cicit, Entitas Asosiasi, dan Kerja Sama Operasi (KSO) Perusahaan

Information on Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, Third-Tier Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures of the Company

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan memiliki 13 (tiga belas) Entitas Anak Perusahaan, 3 (tiga) Entitas Cucu, 1 (satu) Entitas Cicit, 3 (tiga) Entitas Asosiasi, dan 2 (dua) Kerja Sama Operasi (KSO).

As of the end of 2020, the Company had 13 (thirteen) Subsidiaries, 3 (three) Second-Tier Subsidiaries, 1 (one) Third-Tier Subsidiary, 3 (three) Associates, and 2 (two) Joint Operations (KSO).

ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini merupakan daftar Entitas Anak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) per 31 Desember 2020:

SUBSIDIARIES

The Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as of December 31, 2020 are as follows:

ENTITAS ANAK IPC

IPC SUBSIDIARIES

No.	Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset Tahun 2020 / Total Assets in 2020	Domisili / Domicile
1.	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)	Terminal <i>Multipurpose</i> Non-Peti Kemas dan Konvensional / <i>Multipurpose</i> Non-Container and Conventional Terminal	99,00%	2013	Beroperasi / Operating	Rp4.711,00 miliar / billion	Jakarta
2.	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)	Pengembangan Pelabuhan / Port Development	99,89%	2012	Beroperasi / Operating	Rp5.136,95 miliar / billion	Jakarta
3.	PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)	Jasa Logistik / Logistics Services	99,00%	2002	Beroperasi / Operating	Rp906,37 miliar / billion	Jakarta
4.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk)	Penyedia Jasa Transportasi Laut / Sea Transportation Services Provider	76,89%	2013	Beroperasi / Operating	Rp1.397,38 miliar / billion	Jakarta
5.	PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)	Pengerukan Alur / Groove Dredging	99,93%	1991	Beroperasi / Operating	Rp373,78 miliar / billion	Jakarta
6.	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk)	Terminal Kendaraan / Vehicle Terminal	71,28%	2012	Beroperasi / Operating	Rp1.827,72 miliar / billion	Jakarta
7.	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)	Sistem Informasi / Information System	100,00%	2012	Beroperasi / Operating	Rp137,13 miliar / billion	Jakarta
8.	PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)	Sistem Informasi / Information System	51,00%	1995	Beroperasi / Operating	Rp95,08 miliar / billion	Jakarta
9.	PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)	Penyedia Energi Listrik / Electrical Power Supplier	55,00%	2012	Beroperasi / Operating	Rp175,93 miliar / billion	Jakarta
10.	PT IPC Terminal Peti Kemas (PT IPC TPK)	Terminal Peti Kemas dan Konvensional / Container and Conventional Terminal	99,00%	2013	Beroperasi / Operating	Rp4.555,08 miliar / billion	Jakarta
11.	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)	Jasa Peralatan Pelabuhan / Port Equipment Services	99,00%	2012	Beroperasi / Operating	Rp199,24 miliar / billion	Jakarta
12.	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistics Training and Education Services	99,00%	2013	Beroperasi / Operating	Rp64,53 miliar / billion	Jakarta
13.	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII)	Investasi Pasar Modal dan Konsultan Bisnis / Capital Market Investment and Business Consultant	99,00%	2017	Beroperasi / Operating	Rp1.073,89 miliar / billion	Jakarta



PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl Raya Pelabuhan No 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : 021 – 4301080, 4367505 Faks. : 021 – 4372933 Email : ptpmultipurpose@ptp.co.id Website : www.ptp.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2013
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal <i>Multipurpose</i> Non-Peti Kemas dan Konvensional / Multipurpose Non-Container and Conventional Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp4.711,00 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 1.081 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) didirikan berdasarkan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 27 tanggal 10 Juli 2013. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT Tanjung Priok Port (PT PTP) is a subsidiary established on June 10, 2013 through the Certificate of Establishment no. 27 dated June 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. and has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-42024.AH.01.01. Year 2013 dated August 1, 2013.

Berdasarkan Perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (IPC) dan PT PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) IPC pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, IPC setuju untuk memberikan hak kepada PT PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik IPC untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan Addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PT PTP dan IPC sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, di antaranya tidak lagi mengadakan kerja sama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13 dated December 27, 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (IPC) and PT PTP entered into an Agreement on Handover of Port Facility Operations and Port Support Facilities and Port Land Use based on IPC Management Rights (HPL) at Tanjung Priok Port Branch. Based on the agreement, IPC agreed to grant PT PTP the right to operate port facilities and port support facilities as well as port land use which are assets owned by IPC for the implementation of port services and other services based on the terms and conditions as stipulated in agreement. The agreement has been extended several times. Latest with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated December 27, 2017 where PT PTP and IPC agreed to add and reduce a number of things, including no longer cooperating to hand over the management right operations (HPL) owned by IPC Tanjung Priok Port Branch.

Berdasarkan Akta Notaris Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 30 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jual Beli Saham, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PT PTP kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.000.

Modal dasar PT PTP sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,00 persen atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000;
- PT PII memiliki 1,00 persen atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi IPC tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PT PTP di cabang pelabuhan IPC, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerja sama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PT PTP melakukan *spin-off* operasi peti kemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (PT IPC TPK), pihak berelasi. Selain itu, selama tahun 2018, PT PTP melakukan kerja sama dengan beberapa cabang pelabuhan IPC, antara lain Cabang Pelabuhan Bengkulu, Jambi, Panjang, dan Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal non-petikemas.

Kemudian, selama tahun 2019, PT PTP melakukan kerja sama dengan Cabang Pelabuhan Palembang, Pangkal Balam, Cirebon, Tanjung Pandan, dan Teluk Bayur terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal non-petikemas.

Saat ini, PT PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal peti kemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Bidang usaha PT PTP terkait kepelabuhanan sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri dari 2 (dua) kelompok usaha yaitu:

1. Penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
2. Penyediaan dan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 30 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., substitute notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) transferred and surrendered all of its shares, namely as many as 250 shares in PT PTP to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) with a purchase price of Rp16,549,000,000.

PT PTP's authorized capital of Rp100,000,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.00 percent or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000,000;
- PT PII has 1.00 percent or as many as 250 shares with a value of Rp250,000,000.

Based on the Decree of Board of Directors of IPC dated December 22, 2017, as amended on May 18, 2018, it is regulated regarding the PT PTP business zoning in IPC port branch, including operating activities and cooperation patterns and their distribution.

On July 16, 2018, PT PTP carried out spin-off on its container operations at Tanjung Priok port to PT IPC Terminal Petikemas (PT IPC TPK), related party. In addition, during 2018, PT PTP entered into partnership with several IPC port branches, namely Bengkulu, Jambi, Panjang, and Banten Port Branches regarding the operation and management of non-container terminals.

Then, during 2019, PT PTP cooperated with Palembang, Pangkal Balam, Cirebon, Tanjung Pandan, and Teluk Bayur Port Branches regarding the operation and management of non-container terminals.

Currently, PT PTP is engaged in container terminal services, dry bulk services, liquid bulk, bunkering as well as warehousing and field services.

The business sector of PT PTP is related to port according to Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, consisting of 2 (two) business groups, namely:

1. Provision of port services; and
2. Provision of port-related services.



Sementara itu, untuk kelompok jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan pelayanan barang terdiri dari:

1. Pelayanan Barang

Merupakan pelayanan bongkar muat dari kapal ke lapangan/gudang atau sebaliknya yakni antara lain:

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; dan
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.

2. Pelayanan Lain-Lain

Meliputi pelayanan yang mendukung aktivitas kepelabuhanan antara lain:

- Penyewaan alat-alat pelabuhan; dan
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa *Stuffing*.

Meanwhile, for port service groups, the provision and service of goods consists of:

1. Goods Services

Is a loading and unloading service from the ship to the field/warehouse or vice versa namely:

- Provision and/or dock services for carrying out loading and unloading activities of goods and containers;
- Provision of and/or warehouse services and stockpiling of goods, loading and unloading equipment, and port equipment; and
- Provision and/or service of container, liquid bulk, dry bulk and Ro-Ro terminals;

2. Other Services

Includes services that support port activities including:

- Rental of port equipment; and
- Provision and/or *Stuffing* services.

Adapun visi dan Misi PT Pelabuhan Tanjung Priok yakni:

Vision and mission of PT Pelabuhan Tanjung Priok are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Operator <i>Smart Terminal</i> Kelas Dunia Berbasis Platform yang merupakan Pilihan Pertama Pelanggan.	To become a world-class platform-based smart terminal and the customers' first choice.
Misi Perusahaan	Company Mission
<p>Sebagai Operator Terminal <i>Multipurpose</i>, Curah Cair, dan Curah Kering dengan menciptakan ekosistem guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara berkesinambungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan layanan terminal secara terintegrasi, berkualitas, dan modern demi memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan semua pelanggan dan mitra; Menumbuhkan Nilai perusahaan secara berkesinambungan bagi pemegang saham dengan memenuhi aspek aspek tata kelola perusahaan yang baik; Menerapkan budaya perusahaan yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan profesionalitas karyawan; Mewujudkan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien, ramah lingkungan, dan berkepedulian sosial yang membanggakan bangsa dan negara. 	<p>As an operator of multipurpose, liquid bulk, and dry bulk terminal by creating an ecosystem to continuously give added value for all stakeholders.</p> <ul style="list-style-type: none"> Providing integrated, high quality, and modern terminal services to meet the needs and exceed the expectations of all customers and partners; Growing the company's values continuously for the shareholders by fulfilling aspects of good corporate governance; Implementing a corporate culture that improves work convenience and professionalism of the employees; Realizing a national logistics system that is effective and efficient, environmentally friendly, and socially aware as a pride of the nation and the country.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ogi Rulino	Komisaris Utama / President Commissioner	13 Mei 2020 – 12 Mei 2025 / May 13, 2020 – May 12, 2025	SK.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 13 Mei 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. SK-002/PII-SKD1/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 / SK.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated May 13, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 and No. SK-002/PII-SKD1/X/2020 dated October 6, 2020
Sabri Saiman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	25 Oktober 2018 – 24 Oktober 2023 / October 25, 2018 – October 24, 2023	SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 tanggal 25 Oktober 2018 / SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 dated October 25, 2018

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Arif Rusman Yulianto	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/3/MTA/UT/PI.II-20 dan No. SK- 002/PII.SK.D1/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. SK-002/PII-SKD1/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 / KP.03/14/7/3/MTA/UT/PI.II-20 and No. SK- 002/PII.SK.D1/VII/2020 dated July 14, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 and No. SK-002/PII-SKD1/X/2020 dated October 6, 2020
Nugroho Indrio	Komisaris / Commissioner	20 April 2017 – 19 April 2022 / April 20, 2017 – April 19, 2022	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/20/4/6/PI.II-17 dan Nomor: HK.476/20/4/5/MTI-17 tanggal 20 April 2017 / Circular Shareholders Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders Number: HK.568/20/4/6/PI.II-17 and Number: HK.476/20/4/5/MTI-17 dated April 20, 2017
Direksi / Board of Directors			
Drajad Sulisty	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 dan No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 and No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 dated November 5, 2020
Rino Wisnu Putro	Direktur Operasi / Operations Director	19 Desember 2019 – 18 Desember 2024 / December 19, 2019 – December 18, 2024	SK.03/19/12/9/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 / SK.03/19/12/9/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
Yossianis Marciano	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 dan No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 and No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 dated November 5, 2020
Reini Delfianti	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 dan No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/15/7/6/MTA/UT/PI.II-20 and No. SK- 006/PII.SK.D1/VII/2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/2/MTA/UT/PI.II- 2020 dated November 5, 2020

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Kobexindo Tower, 4th Floor Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia – 14430 Telp. : 021) 6471 8081 Email : corp.sec@portdevco.com Website : www.portdevco.com
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,89%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2012
Bidang Usaha / Line of Business	: Pengembangan Pelabuhan / Port Development
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp5.136,95 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 88 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)

PT PPI didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulianti Irawati, S.H., notaris pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 5 November 2012. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

PT PPI was established based on Deed No. 9 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., a substitute Notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-57925.AH.01.01 of 2012 dated November 13, 2012.



Berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 13 September 2018, PT PPI melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000.000 yang diambil bagian oleh IPC dan PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) masing-masing sebesar Rp224.750.000.000 dan Rp250.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0019856.AH.01.02 tanggal 25 September 2018.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., a notary in Jakarta, PT PPI increased its authorized capital to Rp900,000,000,000 and its issued and fully paid capital to Rp225,000,000,000, which was acquired by IPC and PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) respectively at the amount of Rp224,750,000,000 and Rp250,000,000. This Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0019856.AH.01.02 on September 25, 2018.

Berdasarkan Akta Notaris Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 37 tanggal 28 Desember 2018, PT MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PT PPI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Based on Notary Deed of Silfia, S.H., substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 37 dated December 28, 2018, PT MTI transferred and handed over all of its 25,000 shares in PT PPI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) at a purchase price of Rp342,000.

Modal dasar PT PPI sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

PT PPI's authorized capital in the amount of Rp100,000,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp 10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,89 persen atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.000;
- PT PII memiliki 0,11 persen atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000.

- IPC owns 99.89 percent or 22,475,000 shares with a value of Rp224,750,000,000;
- PT PII owns 0.11 percent or 25,000 shares with a value of Rp250,000,000.

Saat ini, PT PPI bergerak dalam bidang pengembangan dan konstruksi infrastruktur dan fasilitas pelabuhan.

At present, PT PPI is engaged in the development and construction of port infrastructure and facilities.

Adapun visi dan Misi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.	To become the best and most comprehensive provider of solutions for port infrastructure development in Indonesia.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan sesuai dengan standar internasional; • Menciptakan infrastruktur pelabuhan yang inovatif, unggul, dan kompetitif; • Meningkatkan konektivitas logistik; • Membangun keberhasilan dan saling menguntungkan dengan mitra kerja; • Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemegang Saham; • Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan karyawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Providing port facilities and infrastructure according to international standards; • Creating innovative, excellent, and competitive port infrastructure; • Improving logistics connectivity; • Building success and mutual benefits with business partners; • Giving sustainable added value for all Shareholders; • Improving competency, professionalism, and welfare of the employees.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Hambra	Komisaris Utama / President Commissioner	13 Mei 2020 – 12 Mei 2025 / May 13, 2020 – May 12, 2025	KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 13 Mei 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / KP.03/6/10/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated May 13, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020
Dachamer Munthe	Komisaris / Commissioner	7 Juli 2017 – 6 Juli 2022 / July 7, 2017 – July 6, 2022	SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 tanggal 7 Juli 2017 dan HK.476/7/7/2/MTI/2017 tanggal 7 Juli 2017 / SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 dated July 7, 2017 and HK.476/7/7/2/MTI/2017 dated July 7, 2017
Irsal Yunus	Komisaris / Commissioner	20 April 2017 – 19 April 2022 / April 20, 2017 – April 19, 2022	HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan HK.476/20/4/2/MTI-17 tanggal 20 April 2017 / HK.568/20/4/4/PI.II-17 and HK.476/20/4/2/MTI-17 dated April 20, 2017
Amrin	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020
Direksi / Board of Directors			
M. Hadi Syafitri Noor	Direktur Utama / President Director	3 November 2020 – 2 November 2025 / November 3, 2020 – November 2, 2025	KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Eko Afrilianto	Direktur Teknik / Technical Director	1 Juli 2019 – 31 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 31, 2024	SK-03/1/7/4/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK-03/1/7/4 MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Herman Susilo	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Sumarno	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020

PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)

PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Pulau Payung No.1A, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : (021) 29104000 Email : cs@multiterminal.co.id Website : www.ipclogistic.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2002
Bidang Usaha / Line of Business	: Jasa Logistik / Logistics Services
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp906,37 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 811 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

PT MTI was established based on Notarial Certificate of Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The Certificate obtained legal status based on the Ministry of Law and Human Rights Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 dated April 11, 2002.



Modal dasar PT MTI sebesar Rp28.500.000.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.500.

PT MTI's authorized capital of Rp28,500,000,000 consists of 57,000,000 shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The total issued and fully paid capital is 34,629,439 shares or equal to Rp17,314,719,500.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

The composition of the capital that has been placed and fully paid is:

- IPC memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.000;
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.000.

- IPC has 99.00% or 34,283,150 shares with a nominal value of Rp17,141,575,000;
- The Maritime Employee Cooperative has 1.00% or as many as 346,289 shares with a nominal value of Rp173,144,000.

Saat ini, PT MTI bergerak dalam bidang jasa logistik, transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan kepabeanan.

At present, PT MTI is engaged in logistics, transportation, warehousing, cargo consolidation, provision of cargo space, and customs services.

Adapun visi dan Misi PT Multi Terminal Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Multi Terminal Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi logistik nasional terkemuka dengan layanan digital berstandar internasional.	To become a leading national logistics company with digital services of international standards.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan: Menyediakan pelayanan logistik yang handal dan terintegrasi; • Pemegang Saham: Memaksimalkan nilai dan kesehatan perusahaan secara profesional; • Pekerja: Meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan lingkungan kerja; • Negara: Berperan aktif dalam mendukung ekosistem logistik nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Customer: Providing reliable and integrated logistics services; • Shareholders: Maximizing the company's values and soundness professionally; • Employees: Improving welfare and work environment convenience; • Country: Actively participating in supporting national logistics ecosystem.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Multi Terminal Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ogi Rulino	Komisaris Utama / President Commissioner	14 Juni 2019 – 13 Juni 2024 / June 14, 2019 – June 13, 2024	SK.03/14/6/4/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 14 Juni 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / SK.03/14/6/4/MTA/UT/PI.II-19 dated June 14, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020
Buyung Lalana	Komisaris / Commissioner	27 Desember 2017 – 26 Desember 2023 / December 27, 2017 – December 26, 2023	SK.03/27/12/2/PBI.UT/PI.II-17 tanggal 27 Desember 2017 / SK.03/27/12/2/PBI.UT/PI.II-17 dated December 27, 2017
Edison Simanjuntak	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/7/MTA/PI.II-20 dan No. HK.566/01/19/KPM.TPK-20 / KP.03/14/7/7/MTA/PI.II-20 and No. HK.566/01/19/KPM.TPK-20
Solikhin	Komisaris / Commissioner	19 Desember 2019 – 18 Desember 2024 / December 19, 2019 – December 18, 2024	SK.03/19/12/10/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 / SK.03/19/12/10/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Direksi / Board of Directors			
Bimo Widhiatmoko	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	SK.03/15/7/9/MTA/UT/PI.II-19 dan No. HK.566/02/02/KPM.TPK-020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/15/7/9/MTA/UT/PI.II-19 and No. HK.566/02/02/KPM.TPK-020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Andi Hamdani	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director	19 Juli 2017 – 18 Juli 2022 / July 19, 2017 – July 18, 2022	SK.03/17/7/4/PAC/UT/PI.II-17 tanggal 17 Juli 2017 dan SK Definitif No. SK.03/21/8/1/PBI/UT/PI.II-18 tanggal 21 Agustus 2018 / SK.03/17/7/4/PAC/UT/PI.II-17 dated July 17, 2017 and Definitive Decree No. SK.03/21/8/1/PBI/UT/PI.II-18 dated August 21, 2018
Budi Priyanto	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	SK.03/15/7/9/MTA/UT/PI.II-19 dan No. HK.566/02/02/KPM.TPK-020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/15/7/9/MTA/UT/PI.II-19 and No. HK.566/02/02/KPM.TPK-020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi / Operations Director	3 November 2020 – 2 November 2025 / November 3, 2020 – November 2, 2025	SK.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 3 November 2020 / SK.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-20 dated November 3, 2020

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk)

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	:	Jalan Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14430 Telp. : (021) 430-6789 Email : contact@ipcmarine.co.id Website : www.ipcmarine.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	:	76,89%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	:	2013
Bidang Usaha / Line of Business	:	Penyedia Jasa Transportasi Laut / Sea Transportation Services Provider
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	:	Rp1.397,38 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	:	865 orang / employees
Status	:	Beroperasi / Operating

PT JAI Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 24 tanggal 10 Juli 2013. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

PT JAI Tbk was established based on Certificate No. 24 dated July 10, 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01. Year 2013 dated September 9, 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, pemegang saham PT JAI Tbk menyetujui di antaranya:

Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 14 dated October 11, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, PT JAI Tbk shareholders agreed on:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham;

- Changes in the nominal value of shares from the initial Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share;



- Pengeluaran saham dari portepel PT JAI Tbk, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham PT JAI Tbk;
- Meningkatkan modal dasar PT JAI Tbk dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreg 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreg kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

- Issuance of shares from portfolio of PT JAI Tbk which are as many as 30 percent of new shares issued from the portfolio of issued and paid-up capital after the public offering has been completed or a maximum of 1,743,987,600 new shares offered to the public through initial public offering of PT JAI Tbk;
- Increase authorized capital of PT JAI Tbk from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000,000 divided into 15,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share and increase issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 where the increase in the amount of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares carried out by the Company through the inbreg of 21 units of vessels, consisting of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tugboats and 2 units of mooring vessels. The inbreg of vessels was assessed by KJPP Toto Suharto & Rekan with the results of assessment No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

Modal dasar PT JAI Tbk sebesar Rp1.500.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

Authorized capital of PT JAI Tbk of Rp1,500,000,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 76,89 persen atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.000;
- PT MTI memiliki 0,11 persen atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.000;
- PT PII memiliki 11,05 persen atau sebanyak 583.715.200 saham dengan nilai sebesar Rp58.371.520.000;
- Masyarakat memiliki 11,80 persen atau sebanyak 623.751.500 saham dengan nilai sebesar Rp62.375.150.000;
- Saham treasury 0,15 persen atau sebanyak 8.039.800 saham dengan nilai sebesar Rp803.980.000

- IPC has 76.89 percent or 4,063,504,600 shares with a value of Rp406,350,460,000;
- PT MTI has 0.11 percent or 5,800,000 shares with a value of Rp580,000,000;
- PT PII have 11.05 percent or as many as 583,715,200 shares with a value of Rp58,371,520,000;
- The public owns 11.80 percent or 623,751,500 shares with a value of Rp62,375,150,000.
- Treasury shares at 0.15 percent or 8,039,800 shares amounting to Rp803,980,000

Saat ini, PT JAI Tbk bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Currently, PT JAI Tbk's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

Adapun visi dan Misi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yakni:

Vision and mission of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, are as follows:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi fasilitator pertumbuhan perdagangan melalui pelayanan pemanduan dan penundaan berkelas dunia dalam ekosistem kepelabuhanan.	To become a facilitator of trade growth through world-class pilotage and towage services in the port ecosystem.
Misi Perusahaan	Company Mission
Memaksimalkan nilai tambah untuk pemangku kepentingan/ <i>Stakeholders</i> .	Maximizing added value for the stakeholders.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama / President Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / October 13, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 12 tanggal 13 Oktober 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 12 dated October 13, 2020
Bay Mokhamad Hasan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	15 Juli 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / July 15, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 24 tanggal 15 Juli 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 24 dated July 15, 2020
Sayed Junaidi Rizaldi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / October 13, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 12 tanggal 13 Oktober 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 12 dated October 13, 2020
Eko Putro Adijayanto	Komisaris / Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / October 13, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 12 tanggal 13 Oktober 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 12 dated October 13, 2020
Direksi / Board of Directors			
Amri Yusuf	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / July 15, 2020 – Annual GMS that will be held in 2024	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 24 tanggal 15 Juli 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 24 dated July 15, 2020
Rizki Pribadi Hasan	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	15 Oktober 2019 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / October 15, 2019 – Annual GMS that will be held in 2024	Berita Acara RUPS No. 5 tanggal 15 Oktober 2019 / GMS Minutes No. 5 dated October 15, 2019
M. Iqbal	Direktur Armada dan Teknik / Fleet and Technical Director	13 Oktober 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / October 13, 2020 – Annual GMS that will be held in 2024	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 12 tanggal 13 Oktober 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 12 dated October 13, 2020
Shanti Puruhita	Direktur Komersial dan Operasi / Commercial and Operations Director	15 Juli 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / July 15, 2020 – Annual GMS that will be held in 2024	Akta Notaris Fathia Helmi, S.H., No. 24 tanggal 15 Juli 2020 / Deed of Notary Fathia Helmi, S.H., No. 24 dated July 15, 2020



PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Raya Ancol Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14430 Telp. : (021) 4301380 Email : admin@rukindo.co.id Website : www.rukindo.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,93%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 1991
Bidang Usaha / Line of Business	: Pengerukan Alur / Groove Dredging
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp373,78 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 181 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)

PT Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta Notaris Achmad Bajumi, S.H., notaris pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 11 Februari 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01. Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

PT Rukindo was established under the name PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Certificate No. 2 dated October 1, 1991 from Achmad Bajumi, S.H., replacement to Notary Imas Fatimah, S.H., which was later amended by Certificate No. 51 dated February 11, 1992 from Notary Imas Fatimah, S.H. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

Modal dasar PT Rukindo sebesar Rp2.000.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PT Rukindo's authorized capital of Rp2,000,000,000,000 consists of 2,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders agreed to the following matters:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

- The increase in issued and paid-up capital from the original amounted to Rp195,000,000,000 which will be converted into capital at the end of the 10th (tenth) year. Shares issued amounted to 195,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHUAH. 01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang PT Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di PT Rukindo bertambah menjadi 99,93 persen.

Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated 28 December 2017 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights No AHUAH. 01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 new shares as a result of the conversion of PT Rukindo's debt to the Company. The Company's share ownership in PT Rukindo increased to 99.93 percent.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,93 persen atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.000;

- IPC has 99.93 percent or 806,622 shares with a value of Rp806,622,000,000;

- PT PPI memiliki 0,09 persen atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.000.

- PT PPI has 0.09 percent or 542 shares with a value of Rp542,000,000

Saat ini, PT Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

At present, PT Rukindo is mainly engaged in the dredging of shipping lanes, port pools, reclamation and transportation of dredged products.

Adapun Visi dan Misi PT Pengerukan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Pengerukan Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Perusahaan Pengerukan dan Galangan Nasional Berkelas Dunia.	To become a world-class national dredging and shipyard company.
Misi Perusahaan	Company Mission
Memaksimalkan nilai tambah untuk pemangku kepentingan.	Maximizing added value for the stakeholders.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengerukan Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengerukan Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Hambra	Komisaris Utama / President Commissioner	5 Juni 2020 – 4 Juni 2025 / June 5, 2020 – June 4, 2025	KP.03/5/6/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/5/6/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated June 5, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Bambang S. Ervan	Komisaris / Commissioner	19 Desember 2019 – 18 Desember 2024 / December 19, 2019 – December 18, 2024	SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Syaiful Islam	Komisaris / Commissioner	19 Desember 2019 – 18 Desember 2024 / December 19, 2019 – December 18, 2024	SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/19/12/14/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/6/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Direksi / Board of Directors			
Wahyu Hardiyanto	Direktur Utama / President Director	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/1/7/6/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/1/7/6/MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Indra Sigit S.	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/1/7/6/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/1/7/6/MTA/UT/PI.II-19 Ta dated July 1, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Rizki Widhiono	Direktur Komersial dan Teknik / Commercial and Technical Director	3 November 2020 – 2 November 2025 / November 3, 2020 – November 2, 2025	KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/3/11/5/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020



PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk)

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14110 Telp. : (021) 4393 2251 Faks. : (021) 4393 2250 Email : info@indonesiacarterminal.co.id Website : www.indonesiacarterminal.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 71,28%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2012
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal Kendaraan / Vehicle Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp1.827,72 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 385 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT IKT Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 5 November 2012. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

PT IKT Tbk was established based on Certificate No. 10 dated November 5, 2012 by Yulianti Irawati, SH., a substitute to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Year 2012 dated November 19, 2012.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Juli 2018 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IKT Tbk para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana PT IKT Tbk, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10 persen dari saham baru yang dikeluarkan dengan program *Employee Stock Option* (ESA).

Based on the Certificate of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT IKT Tbk No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, the shareholders agreed that the number of shares issued in the context of a Public Offering of no more than 30 percent of the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or maximum of 557,142,800 new shares offered to the public through Initial Public Offering of PT IKT Tbk, each with a nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of a maximum of 10 percent of new shares issued with the ESA program (Employee Stock Option).

Modal dasar PT IKT Tbk sebesar Rp181.838.482.000 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh PT IKT Tbk adalah sebagai berikut:

Authorized capital of PT IKT Tbk of Rp181,838,482,000 consists of 1,818,384,820 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. Issued and fully paid capital of PT IKT Tbk composition is as follows:

- IPC memiliki 71,28 persen atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.474.900;
- PT MTI memiliki 0,72 persen atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.100;
- PT PII memiliki 5,54 persen atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.000;
- Masyarakat memiliki 22,46 persen atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.486.510.000.

- IPC has 71.28 percent or 1,296,144,749 shares with a value of Rp129,614,474,900;
- PT MTI has 0.72 percent or 13,092,371 shares with a value of Rp1,309,237,100;
- PT PII have 5.54 percent or as many as 100,682,600 shares with a value of Rp10,068,260,000;
- The public has 22.46 percent or as many as 408,465,100 shares with a value of Rp40,486,510,000.

Saat ini, PT IKT Tbk bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

At present, PT IKT Tbk is engaged in managing vehicle terminals, loading and unloading of goods, stacking services and other logistics services.

Adapun Visi dan Misi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yakni:

Vision and mission of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi pengelola terminal kendaraan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan.	To be a world class car terminal operator which is excellent in operational and services.
Misi Perusahaan	Company Mission
Sebagai pengelola terminal kendaraan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.	As a car terminal operator that maximize benefit for all stakeholders on an ongoing basis in order to improve the national economy.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Yon Irawan	Komisaris Utama / President Commissioner	4 Agustus 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / August 4, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Berita Acara RUPS / Deed of Notary Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 dated August 26, 2020 regarding GMS Minutes
Dwijanti Tjahjaningsih	Komisaris / Commissioner	4 Agustus 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / August 4, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Berita Acara RUPS / Deed of Notary Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 dated August 26, 2020 regarding GMS Minutes
Marta Hardisarwono	Komisaris / Commissioner	15 Juni 2017 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / June 15, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	HK.568/15/6/1/PI.II-17 tanggal 15 Juni 2017 / HK.568/15/6/1/PI.II-17 dated June 15, 2017
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	4 Agustus 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / August 4, 2020 – Annual GMS that will be held in 2025	Akta Notaris Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Berita Acara RUPS / Deed of Notary Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 dated August 26, 2020 regarding GMS Minutes
Direksi / Board of Directors			
	Plt. Direktur Utama / Acting President Director	11 Februari 2021 / February 11, 2021	Berita Acara RUPS LB Nomor: 36 / Minutes of EGMS Number: 36
Arif Isnawan	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director	26 Maret 2018 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 / March 26, 2018 – Annual GMS that will be held in 2025	RUPS (Sirkuler) No. SK.03/26/3/1//PBI/UT/PI.II-18 dan No. HK.476/26/3/2/MTI-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Maret 2018. / GMS (Circular) No. SK.03/26/3/1//PBI/UT/PI.II-18 and No. HK.476/26/3/2/MTI-18 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated March 26, 2018.
Dessy Emastari	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	4 Agustus 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / August 4, 2020 – Annual GMS that will be held in 2024	Akta Notaris Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Berita Acara RUPS / Deed of Notary Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 dated August 26, 2020 regarding GMS Minutes
Rio T.N Lasse	Direktur Operasi dan Teknik / Operations and Technical Director	4 Agustus 2020 – RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 / August 4, 2020 – Annual GMS that will be held in 2024	Akta Notaris Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Berita Acara RUPS / Deed of Notary Lelolin Jayanti, S. H. No. 48 dated August 26, 2020 regarding GMS Minutes



PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Telkom Plaza North Jakarta 4th Floor Jl. Yos Sudarso 22-24, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14320 Telp. : (021) 1500950 Email : customercare@ilcs.co.id Website : www.ilcs.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 100,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2012
Bidang Usaha / Line of Business	: Sistem Informasi / Information System
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp137,13 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 120 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT ILCS didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 21 September 2012. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

PT ILCS was established based on the Certificate of Establishment No. 11 dated September 21, 2012 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU.50211.AH.01.01 Year 2012 dated September 26, 2012.

Modal dasar PT ILCS sebesar Rp400.000.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

PT ILCS' authorized capital of Rp400,000,000,000 consists of 40,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share.

Pada awalnya, komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh PT ILCS terdiri dari IPC sebesar 51,00 persen atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.000 dan PT Multimedia Nusantara sebesar 49,00 persen atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.000.

Initially, the composition of PT ILCS' issued and fully paid capital consisted of IPC at 51.00 percent or 5,100,000 shares with a value of Rp 51,000,000,000 and PT Multimedia Nusantara at 49.00 percent or 4,900,000 shares with a value of Rp49,000,000,000.

Kemudian, pada tanggal 9 Oktober 2020, Perseroan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS. Dengan demikian, komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah pengambilalihan saham sebagai berikut:

Furthermore, on October 9, 2020, the Company acquired the shares owned by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,000 shares or equivalent to 49 percent of share ownership in PT ILCS. Therefore, the composition of issued and fully paid capital after the share acquisition is as follows:

- IPC memiliki 100,00 persen atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000.

- IPC has 100.00 percent or 10,000,000 shares with a value of Rp100,000,000,000.

Saat ini, PT ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

At present, PT ILCS is engaged in the provision of e-trade logistic services and other services which include data management services, e-commerce services, computer consulting and informatics engineering, software manufacturing services, multimedia supply and utilization services through telecommunications equipment and services and information technology consultant.

Adapun Visi dan Misi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yakni:

Vision and mission of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi <i>digital player</i> yang unggul di bidang <i>Port</i> dan <i>Logistic Ecosystem</i> yang diakui secara global.	To become an excellent digital player in port and logistics ecosystem with global recognition.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan dan logistik melalui digitalisasi; Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan mampu serta unggul dalam menghadapi persaingan; Meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan tata kelola perusahaan yang baik; Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi melalui digitalisasi <i>port</i> dan <i>logistics ecosystem</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Providing ease for users of port and logistics services through digitalization; Build the competency of an innovative, capable, and excellent company in facing competition; Improving the company's soundness professionally through good corporate governance; Giving significant contribution to efficiency through digitalization of port and logistics ecosystem.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Hambra	Komisaris Utama / President Commissioner	16 Juni 2019 – 15 Juni 2024 / June 16, 2019 – June 15, 2024	KP.03/16/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 16 Juni 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/16/6/2/MTA/UT/PI.II-2020 dated June 16, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Hengki Angkasawan	Komisaris / Commissioner	21 Juli 2020 – 20 Juli 2024 / July 21, 2020 – July 20, 2024	KP.03/21/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 21 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/21/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 21, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Direksi / Board of Directors			
Heru Satrio	Direktur Utama / President Director	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/1/7/5/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / SK.03/1/7/5/MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Budi Setijadi Kurjanto	Direktur Administrasi dan Keuangan / Administration and Finance Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/11/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/15/7/11/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020
Judi Ginta Irawan	Direktur IT dan Operasi / IT and Operations Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/11/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/15/7/11/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/3/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 3, 2020



PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)

PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Wisma SMR 10th Floor Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14350 Telp. : (021) 6505829 Faks. : (021) 6505987 Email (Call Center) : callcenter@edi-indonesia.co.id Website : www.edi-indonesia.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 51,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 1995
Bidang Usaha / Line of Business	: Sistem Informasi / Information System
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp95,08 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 256 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris Sulami Mustafa, S.H., No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

PT EDII was established based on Notarial Certificate No. 1 dated June 1, 1995 from Notary Sulami Mustafa, S.H., and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No.C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar PT EDII adalah sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

As of December 31, 2016, PT EDII's authorized capital of Rp100,000,000,000 consist of 100,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000 (full amount) per share. The amount of issued and fully paid capital is 25,000,000 shares or in the amount of Rp25,000,000,000 with the following composition:

- IPC memiliki 51,00 persen atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.000;
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00 persen atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.000.

- IPC has 51.00 percent or 12,750,000 shares with a value of Rp12,750,000,000;
- PT Sisindokom Teknologi has 49.00 percent or as many as 12,250,000 shares with a nominal value of Rp12,250,000,000.

Saat ini, PT EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan *software* dan pelayanan administrasi efek.

At present, PT EDII is engaged in providing information data, data transfer, software sales and securities administration services.

Adapun Visi dan Misi PT Electronic Data Interchange Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Electronic Data Interchange Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi penyedia layanan <i>e-Business</i> yang terkemuka di Asia.	To become a leading <i>e-Business</i> service provider in Asia.
Misi Perusahaan	Company Mission
Memberikan layanan <i>e-Business</i> yang inovatif, berstandar internasional dengan menjunjung tinggi <i>Good Corporate Governance</i> untuk memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi <i>stakeholder</i> .	Providing innovative <i>e-Business</i> service with international standards by upholding <i>Good Corporate Governance</i> to give a continuous added value for the stakeholders.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Electronic Data Interchange Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Electronic Data Interchange Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Electronic Data Interchange Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Electronic Data Interchange Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama / President Commissioner	10 Juli 2020 – 9 Juli 2025 / July 10, 2020 – July 9, 2025	KP.03/10/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan KS- 014/LGG/SISTEK-PELINDOII/VII/2020 / KP.03/10/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 and KS-014/LGG/SISTEK-PELINDOII/VII/2020
Herry Andriejanssen	Komisaris / Commissioner	2 Desember 2019 – 1 Desember 2024 / December 2, 2019 – December 1, 2024	SK.03/2/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 2 Desember 2019 / SK.03/2/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 2, 2019
Nur Ikhsan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	10 Juli 2020 – 9 Juli 2025 / July 10, 2020 – July 9, 2025	KP.03/10/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan KS- 014/LGG/SISTEK-PELINDOII/VII/2020 / KP.03/10/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 and KS- 014/LGG/SISTEK-PELINDOII/VII/2020
Direksi / Board of Directors			
E. Helmi Wantono	Direktur Utama / President Director	2 Desember 2019 – 1 Desember 2024 / December 2, 2019 – December 1, 2024	SK.03/2/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 2 Desember 2019 / SK.03/2/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 2, 2019
Yan Budi Santoso	Direktur / Director	14 November 2018 – 13 November 2023 / November 14, 2018 – November 13, 2023	SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 tanggal 14 November 2018 dan No. KP.03/15/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 dated November 14, 2018 and No. KP.03/15/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020

PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)

PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jalan Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14321 Telp. : (021) 4305047 Faks. : (021) 4305052 Email : sekper@ecopowerport.co.id Website : www.ecopowerport.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 55,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2012
Bidang Usaha / Line of Business	: Penyedia Energi Listrik / Electrical Power Supplier
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp175,93 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 108 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT EPI didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 5 November 2012. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

PT EPI was established based on the Certificate of Establishment No. 11 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., a substitute to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-58019.AH.01.01.Year 2012 dated November 14, 2012.



Modal dasar PT EPI sebesar Rp174.543.000.000 terdiri dari 17.454.300 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 55,00 persen atau sebanyak 2.400.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.000.000.000;
- PT Haleyora Power memiliki 45,00 persen atau sebanyak 1.963.575 saham dengan nilai sebesar Rp19.635.750.000.

Saat ini, PT EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Adapun Visi dan Misi PT Energi Pelabuhan Indonesia yakni:

Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan utilitas terintegrasi yang terkemuka di kawasan pelabuhan nasional dengan keunggulan layanan.
Misi Perusahaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pasokan tenaga listrik yang andal di seluruh kawasan pelabuhan. 2. Mengelola ketenagalistrikan terintegrasi berbasis IT. 3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 4. Mewujudkan budaya perusahaan dan menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara berkesinambungan.

PT EPI's authorized capital of Rp174,543,000,000 consists of 17,454,300 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 55.00 percent or 2,400,000 shares with a value of Rp24,000,000,000;
- PT Haleyora Power has 45.00 percent or 1,963,575 shares with a value of Rp19,635,750,000.

At present, PT EPI is engaged in providing electricity in the port area and its surroundings.

Vision and mission of PT Energi Pelabuhan Indonesia are:

Company Vision
To become an integrated and leading utilities company in the national port area with excellent service.
Company Mission
<ol style="list-style-type: none"> 1. Providing reliable electrical power supply in all port areas. 2. Managing IT-based integrated electrical power. 3. Improving Human Capital competency and professionalism. 4. Realizing the corporate culture and implementing <i>Good Corporate Governance</i> continuously.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Energi Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Energi Pelabuhan Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Rima Novianti	Plt. Komisaris Utama / Acting President Commissioner	16 Juni 2019 – 15 Juni 2024 / June 16, 2019 – June 15, 2024	KP.03/16/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 16 Juni 2020 / KP.03/16/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated June 16, 2020
Ida Bagus Ari Wardana	Komisaris / Commissioner	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/17/3/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 / SK.03/17/3/MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019
Sudiono	Plt. Komisaris / Acting Commissioner	17 Juli 2020 – 16 Juli 2025 / July 17, 2020 – July 16, 2025	KP.03/17/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan 003.RUPS/HKM.00.03/DIR.HP/2020 / KP.03/17/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 and 003.RUPS/HKM.00.03/DIR.HP/2020
Direksi / Board of Directors			
Imanuddin	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/10/MTA/UT/PI.II-2020 dan 002.RUPS/HKM.00.02/DIR.HP/2020 / KP.03/15/7/10/MTA/UT/PI.II-2020 and 002.RUPS/HKM.00.02/DIR.HP/2020
Try Djunaidy	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia / Finance and Human Capital Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/10/MTA/UT/PI.II-2020 dan 002.RUPS/HKM.00.02/DIR.HP/2020 / KP.03/15/7/10/MTA/UT/PI.II-2020 and 002.RUPS/HKM.00.02/DIR.HP/2020
Ramaedi	Direktur Operasi dan Niaga / Operations and Commercial Director	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/17/3/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 / SK.03/17/3/MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019

PT IPC Terminal Peti Kemas (PT IPC TPK)

PT IPC Terminal Peti Kemas (PT IPC TPK)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Raya Pelabuhan No. 23, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : (021) 4301080; (021) 4003899/77 Website : www.ipctpk.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2013
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal Peti Kemas dan Konvensional / Container and Conventional Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp4.555,08 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 1.903 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT IPC TPK didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 25 tanggal 10 Juli 2013. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

PT IPC TPK was established through a Certificate of Establishment No. 25 dated July 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Year 2013 dated July 25, 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 36 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jual Beli Saham, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PT IPC TPK kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.000.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 36 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., a substitute notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) transferred and handed over all of its shares, namely as many as 250 shares in PT IPC TPK to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) with a purchase price of Rp7,915,500,000.

Modal dasar PT IPC TPK sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The authorized capital of PT IPC TPK of Rp100,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,00 persen atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000;
- PT PII memiliki 1,00 persen atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000.

- IPC has 99.00 percent or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000,000;
- PT PII has 1.00 percent or 250 shares with a value of Rp250,000,000.

Saat ini, PT IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal peti kemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

At present, PT IPC TPK is engaged in container terminal services and other port services.

Adapun Visi dan Misi PT IPC Terminal Peti Kemas yakni:

Vision and Mission of PT IPC Terminal Peti Kemas are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Operator Terminal Petikemas Berstandar Internasional yang Unggul dalam Operasional dan Layanan.	To become an International Standard Container Terminal Operator that excels in Operations and Services.
Misi Perusahaan	Company Mission
Sebagai Operator Terminal Petikemas yang dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh Pemangku Kepentingan secara berkesinambungan dalam mendukung Perekonomian Nasional.	As a container terminal operator that continuously gives maximum added value for all stakeholders to support the national economy.



Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IPC TPK per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT IPC TPK as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IPC Terminal Peti Kemas Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT IPC Terminal Peti Kemas in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Muarip	Komisaris Utama / President Commissioner	13 Mei 2020 – 12 Mei 2025 / May 13, 2020 – May 12, 2025	KP.03/13/5/3/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 13 Mei 2020 / KP.03/13/5/3/MTA/UT/PI.II-20 dated May 13, 2020
Hary Kriswanto	Komisaris / Commissioner	20 April 2017 – 19 April 2022 / April 20, 2017 – April 19, 2022	HK.568/20/4/7/PI.II-17 tanggal 20 April 2017 / HK.568/20/4/7/PI.II-17 dated April 20, 2017
Asmai Ishak	Komisaris Independen / Independent Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan SK.003/PII.SK.D1/VII/2020 / KP.03/14/7/2/MTA/UT/PI.II-2020 and SK.003/PII.SK.D1/VII/2020
Direksi / Board of Directors			
Inwan Favoriet	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia / Finance and Human Capital Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/8/MTA/UT/PI.II.2020 Dan SK-007/PII.SK.D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/8/MTA/UT/PI.II.2020 Dan SK-007/PII.SK.D1/VII/2020 dated July 15, 2020
David Pandapotan Sirait	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director	3 November 2020 – 2 November 2025 / November 3, 2020 – November 2, 2025	KP.03/3/1/1/2/MTA/UT/PI.II-2020 dan SK-002/PIISK.D1/XI/2020 tanggal 3 November 2020 / KP.03/3/1/1/2/MTA/UT/PI.II-2020 and SK-002/PIISK.D1/XI/2020 dated November 3, 2020

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6A No. 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14240 Telp. : (021) 45874549 / 45874548 Email : mail@jppi.co.id Website : www.jppi.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2012
Bidang Usaha / Line of Business	: Jasa Peralatan Pelabuhan / Port Equipment Services
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp199,24 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 558 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT JPPI didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 5 November 2012. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 57978.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

PT JPPI was established based on Certificate No. 8 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., substitute to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-57978.AH.01.01. Year 2012 dated November 13, 2012.

Berdasarkan Akta Notaris Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 38 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jual Beli Saham, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PT JPPI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.000.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) a transferred and handed over all of its shares, namely 25,000 shares in PT JPPI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) with a purchase price of Rp227,500,000.

Modal dasar PT JPPI sebesar Rp100.000.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,00 persen atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.000;
- PT PII memiliki 1,00 persen atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.000.

Saat ini, PT JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

Adapun Visi dan Misi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yakni:

Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan kelas dunia berbasis total solusi di bidang Peralatan Bongkar Muat, Alat Berat dan Alat Apung untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan.
Misi Perusahaan
Menjadi mitra utama yang paling andal dalam peralatan pelabuhan, memastikan jasa kami berkualitas unggul untuk meningkatkan nilai usaha klien kami.

PT JPPI's authorized capital of Rp100,000,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.00 percent or 2,475,000 shares with a value of Rp24,750,000,000;
- PT PII has 1.00 percent or as many as 25,000 shares with a value of Rp250,000,000.

At present, PT JPPI is engaged in the field of technical business services including installation/assembly, repair and maintenance (maintenance) and installation of technical equipment, installation of equipment for water, gas, telecommunications, electrical and mechanical, pressure vessels (boilers/pressure vessels) and related business fields.

Vision and mission of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia are:

Company Vision
To become a world-class company presenting total solutions in the field of Loading and Unloading equipment, Heavy Equipment and Floating Equipment to provide added value to customers.
Company Mission
To be the most reliable main partner in port equipment ensuring our service are of outstanding quality to enhance business value of our clients.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
Arif Suhartono	Plt. Komisaris Utama / Acting President Commissioner	14 Juni 2019 – 13 Juni 2024 / June 14, 2019 – June 13, 2024
Lukita Dinarsyah Tuwo	Plt. Komisaris / Acting Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025
Mochammad Imron Zubaidy	Plt. Komisaris / Acting Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025
Direksi / Board of Directors		
Bunyamin Sukur	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025
Paul July Supatrio	Direktur Teknik dan Operasi / Technical and Operations Director	1 Oktober 2020 – 30 September 2025 / October 1, 2020 – September 30, 2025
Urip Nurhayat	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia / Finance and Human Capital Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia in 2020

Nomor RUPS / GMS Number
SK.03/14/6/3/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 14 Juni 2019 / SK.03/14/6/3/MTA/UT/PI.II-19 dated June 14, 2019
KP.03/14/7/5/MTA/UT/PI.II-2020 dan SK.010/PII.SK.D1/VII/2020 / KP.03/14/7/5/MTA/UT/PI.II-2020 and SK.010/PII.SK.D1/VII/2020
KP.03/14/7/5/MTA/UT/PI.II-2020 dan SK.010/PII.SK.D1/VII/2020 / KP.03/14/7/5/MTA/UT/PI.II-2020 and SK.010/PII.SK.D1/VII/2020
KP.03/15/7/2/MTA/UT/PI.II-20 dan SK.009/PI.IISK/D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/15/7/2/MTA/UT/PI.II-20 and SK.009/PI.IISK/D1/VII/2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 5, 2020
KP.03/1/10/1/MTA/UT/PI.II-20 dan SK.001/PII.SKD1/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 / KP.03/1/10/1/MTA/UT/PI.II-20 and SK.001/PII.SKD1/X/2020 dated October 1, 2020
KP.03/15/7/2/MTA/UT/PI.II-20 dan SK.009/PI.IISK/D1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/15/7/2/MTA/UT/PI.II-20 and SK.009/PI.IISK/D1/VII/2020 dated July 15, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 5, 2020



PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Raya Puncak – Jl Beringin I No.1 Gadog Pandansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia – 16720 Telp. : (0251) 7555622 Email : corpsec@pmlt.co.id Website : www.pmlt.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2013
Bidang Usaha / Line of Business	: Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistics Training and Education Services
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp64,53 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 209 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) atau juga dikenal dengan IPC Corporate University didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 26 tanggal 10 Juli 2013. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) or also known as IPC Corporate University was established based on Certificate of Establishment No. 26 dated July 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights AHU-45955.AH.01.01. Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 38 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jual Beli Saham, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PT PMLI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.000.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., a substitute notary for Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) transferred and handed over all of its shares, namely as many as 300 shares in PT PMLI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) with a purchase price of Rp173,500,000.

Modal dasar PT PMLI sebesar Rp120.000.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

PT PMLI's authorized capital of Rp120,000,000,000 consists of 120,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,00 persen atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.000;
- PT PII memiliki 1,00 persen atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.000.

- IPC has 99.00 percent or 29,700 shares with a value of Rp29,700,000,000;
- PT PII has 1.00 percent or 300 shares with a value of Rp300,000,000.

Saat ini, PT PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

At present, PT PMLI is engaged in providing education, training, consulting services in the maritime and logistics fields and managing education and training facilities and infrastructure.

Adapun Visi dan Misi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi pusat keunggulan dan mitra strategis dalam pengembangan pelabuhan, maritim dan bisnis logistik di Indonesia dan Asia Pasifik.	To be the center of excellence and strategic partner in developing port, maritime, and logistics businesses in Indonesia and Asia Pacific.
Misi Perusahaan	Company Mission
Menjadi pilihan utama dan kebanggaan bagi pelanggan, karyawan dan Pemangku Kepentingan dalam mempersiapkan manusia unggul dan membangun kapasitas organisasi bagi pengembangan maritime dan logistik di Indonesia dan Asia Pasifik.	Being the top choice and pride of customers, employees, and Stakeholders in providing excellent people and building organization capacity for maritime and logistics development in Indonesia and Asia Pacific.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Muarip	Komisaris Utama / President Commissioner	13 Mei 2020 – 12 Mei 2025 / May 13, 2020 – May 12, 2025	KP.03/13/5/4/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 13 Mei 2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/13/5/4/MTA/UT/PI.II-20 dated May 13, 2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 5, 2020
Bambang Ghiri Arianto	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 dan SK.001/PII.SKD1/VI/2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 and SK.001/PII.SKD1/VI/2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 5, 2020
Hernadi	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 dan SK.001/PII.SKD1/VI/2020 dan RUPS Definitif No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 November 2020 / KP.03/14/7/4/MTA/UT/PI.II-20 and SK.001/PII.SKD1/VI/2020 and Definitive GMS No. KP.03/5/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated November 5, 2020
Direksi / Board of Directors			
Chiefy Adi	Direktur Utama / President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020
Nurjadin Surur	Plt. Direktur / Acting Director	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	SK.03/1/7/9/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019, SK Perubahan Nomenklatur No. KP.03/15/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / SK.03/1/7/9/MTA/UT/PI.II-19 dated July 15, 2019, Decree of Nomenclature Change No. KP.03/15/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020

PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII)

PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : (021) 573-9977 Email : corsec@ipc-investco.com Website : www.ipc-investco.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 99,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2017
Bidang Usaha / Line of Business	: Investasi Pasar Modal dan Konsultan Bisnis / Capital Market Investment and Business Consultant
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp1.073,89 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 21 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating



PT PII didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., No. 112 tanggal 17 November 2017. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

PT PII was established based on the Certificate of Establishment No. 112 dated November 17, 2017 from Notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. This certificate of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0052776.AH.01.01.Year 2017 dated November 21, 2017.

Modal dasar PT PII sebesar Rp800.000.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The authorized capital of PT PII is Rp800,000,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,00 persen atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.000;
- PT MTI memiliki 1,00 persen atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000.

- IPC has 99.00 percent or 198,000 shares with a nominal value of Rp198,000,000,000;
- PT MTI has 1.00 percent or 2,000 shares with a nominal value of Rp2,000,000,000.

Saat ini, PT PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

At present, PT PII is engaged in investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in the capital market and money market, business consulting services and acting as an advisor.

Adapun Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia Investama yakni:

Vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia Investama are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi perusahaan investasi global di sektor kepelabuhanan dan pendukungnya demi menciptakan nilai tambah bagi <i>stakeholders</i> .	To become a global investment company in the port and supporting sector to create added value for stakeholders.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi IPC melalui konsolidasi kepemilikan anak perusahaan. Pengembangan SDM yang profesional dan sistem pengelolaan berkelas dunia. • Memperkuat pendanaan untuk anak perusahaan melalui inisiatif capital raising baik dari internal IPC maupun sumber dana eksternal untuk mencapai pertumbuhan investasi yang optimal. • Mengoptimalkan potensi sinergi dalam Kepelabuhanan Terintegrasi demi mencapai produktivitas aset IPC yang maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Improve the effectiveness of IPC investment management through consolidated subsidiary ownership, professional HC development, and world-class management system. • Strengthen funding for subsidiaries through capital raising initiatives both from internal IPC as well as from external funding sources to achieve optimal investment growth. • Optimizing the potential for synergy in integrated ports to achieve maximum productivity of IPC's assets.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Investama per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Investama as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PII Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PII in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ito Warsito	Komisaris Utama / President Commissioner	25 November 2019 – 24 November 2024 / November 25, 2019 – November 24, 2024	SK. 03/25/11/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 November 2019 / SK. 03/25/11/1/MTA/UT/PI.II-19 dated November 25, 2019
M. Ali Yusuf	Komisaris / Commissioner	25 November 2019 – 24 November 2024 / November 25, 2019 – November 24, 2024	SK. 03/25/11/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 November 2019 / SK. 03/25/11/1/MTA/UT/PI.II-19 dated November 25, 2019
Direksi / Board of Directors			
Sugeng Mulyadi	Direktur / Director	20 Desember 2019 – 19 Desember 2024 / December 20, 2019 – December 19, 2024	SK.03/20/12/3/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 20 Desember 2019 / SK.03/20/12/3/MTA/UT/PI.II-19 dated December 20, 2019

ENTITAS CUCU DAN ENTITAS CICIT

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Cucu dan 1 (satu) Entitas Cicit, dengan uraian sebagai berikut:

SECOND-TIER AND THIRD-TIER SUBSIDIARIES

As of December 31, 2020, the Company had 3 (three) Second-Tier Subsidiaries and 1 (one) Third-Tier Subsidiary as described below:

ENTITAS CUCU DAN ENTITAS CICIT IPC

IPC SECOND-TIER AND THIRD-TIER SUBSIDIARIES

No.	Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset Tahun 2020 / Total Assets in 2020	Domisili / Domicile
Entitas Cucu / Second-Tier Subsidiary							
1.	PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API)	Penyertaan Saham pada Proyek Jalan Tol / Share Investment in Toll Road Project	99,52% melalui PT PPI selaku Anak Perusahaan IPC / 99.52% through PT PPI as IPC Subsidiary	2014	Belum Beroperasi / Not Yet Operating	Rp1.000,15 miliar / billion	Jakarta
2.	PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI)	Jasa Pengelola Properti / Property Management Services	70,00% melalui PT PPI selaku Anak Perusahaan IPC / 70.00% through PT PPI as IPC Subsidiary	2018	Belum Beroperasi / Not Yet Operating	Rp655,09 miliar / billion	Jakarta
3.	PT New Priok Container Terminal One (PT NPCT1)	Terminal Peti Kemas / Container Terminal	51,00% melalui PT IPC TPK selaku Anak Perusahaan IPC / 51.00% through PT IPC TPK as IPC Subsidiary	2014	Beroperasi / Operating	Rp3.629,48 miliar / billion	Jakarta
Entitas Cicit / Third-Tier Subsidiary							
1.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP)	Operasi Jalan Tol / Toll Road Operations	45,00% melalui PT API selaku Cucu Perusahaan IPC / 45.00% through PT API as IPC Second-Tier Subsidiary	2006	Beroperasi / Operating	Rp8.966,94 miliar / billion	Jakarta

PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API)

PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Kobexindo Tower, 1st Floor Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14430 Telp. : (021) 6456310 Faks. : (021) 6546311 Email : aksespelabuhanina@gmail.com Website : www.portaccess.co.id
Kepemilikan Saham IPC (Kepemilikan Tidak Langsung) / IPC Indirect Share Ownership	: 99,52% melalui PT PPI selaku Anak Perusahaan IPC / 99.52% through PT PPI as IPC Subsidiary
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2014
Bidang Usaha / Line of Business	: Penyertaan Saham pada Proyek Jalan Tol / Share Investment in Toll Road Project
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp1.000,15 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 22 orang / employees
Status	: Belum Beroperasi / Not Yet Operating

PT API didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulianti Irawati, S.H., notaris pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 29 tanggal 24 Juli 2014. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus

PT API was established based on Certificate No. 29 dated July 24, 2014 from Yulianti Irawati, S.H., substitute to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-19255.40.10.2014 dated 4 August 2014.



2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 April 2015.

The Articles of Association of API have been amended based on Certificate No. 29 dated March 26, 2015 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, concerning the increase in authorized capital and paid-up capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0934117.AH.01.02. Year 2015 dated April 27, 2015.

Berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 33 tanggal 21 Desember 2017, PT API melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000.000 yang diambil bagian oleh PT PPI dan PT PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000.000 dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Based on Certificate No. 33 dated December 21, 2017 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, PT API increased its authorized capital to Rp1,000,000,000,000 and issued and fully paid-up capital to Rp386,000,000,000 which was taken part by PT PPI and PT PTP amounting to Rp382,140,000,000 and Rp3,860,000,000, respectively. This Certificate has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0027756.AH.01.02. Year 2017 dated December 27, 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 26 tanggal 28 Desember 2018, PT API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000.000 yang diambil bagian oleh PT PPI dan PT PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000.000 dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

Based on Certificate No. 26 December 28, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, PT API increased its issued and fully paid capital to Rp805,760,000,000, which was taken part by PT PPI and PT PTP amounting to Rp801,900,000,000 and Rp3,860,000,000 respectively. This Certificate has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- PT PPI memiliki 99,52 persen atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.000;
- PT PTP memiliki 0,48 persen atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.000.

- PT PPI has 99.52 percent or 80,190,000 shares with a nominal value of Rp801,900,000,000;
- PT PTP has 0.48 percent or 386,000 shares with a nominal value of Rp3,860,000,000.

Saat ini, kegiatan PT API terutama terkonsentrasi pada investasi pada PT CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

Currently, activities of PT API are mainly concentrated in investment in PT CTP, an associate engaged in the operation of toll road projects.

Adapun Visi dan Misi PT Akses Pelabuhan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Akses Pelabuhan Indonesia are as follows:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi pengembang jalan akses Pelabuhan (berupa Jalan Tol atau jalan non Tol) dalam rangka peningkatan efisiensi biaya logistik di Indonesia.	To become port access road developer (toll road or non-toll road) to improve logistics cost efficiency in Indonesia.
Misi Perusahaan	Company Mission
Memperlancar arus barang dari area industri dan menuju pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik nasional.	Facilitating the flow of cargo from industrial areas to ports to reduce national logistics cost.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Akses Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Akses Pelabuhan Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Eko Afrilianto	Komisaris Utama / President Commissioner	23 Juli 2019 – 22 Juli 2024 / July 23, 2019 – July 22, 2024	PPI-623-23072019 dan HK.55/23/7/2/PTP-19 tanggal 23 Juli 2019 / PPI-623-23072019 and HK.55/23/7/2/PTP-19 dated July 23, 2019
Direksi / Board of Directors			
Iwan Ridwan	Direktur Utama / President Director	22 Juli 2019 – 21 Juli 2024 / July 22, 2019 – July 21, 2024	PPI-623-22072019-010 dan HK.55/22/7/2/PTP-19 tanggal 22 Juli 2019 / PPI-623-22072019-010 and HK.55/22/7/2/PTP-19 dated July 22, 2019
Cucu Kuswoyo	Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis / Operations and Business Development Director	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	PPI-623-14072020-019 tanggal 14 Juli 2020, Akta No. 22 tanggal 16 Oktober 2017 / PPI-623-14072020-019 dated July 14, 2020, Deed No. 22 dated October 16, 2017
Agus Edi Santoso	Direktur Keuangan dan SDM / Finance and HC Director	1 Maret 2020 – 28 Februari 2025 / March 1, 2020 – February 28, 2025	PPI-623-03012020 tanggal 1 Maret 2020 / PPI-623-03012020 dated March 1, 2020

PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI)

PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Lt.6 Jl. Raya Pelabuhan No.9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : (021) 22444557 Email : corporate@menara-maritim.co.id Website : www.menara-maritim.co.id
Kepemilikan Saham IPC (Kepemilikan Tidak Langsung / IPC Indirect Share Ownership)	: 70,00% melalui PT PPI selaku Anak Perusahaan IPC / 70.00% through PT PPI as IPC Subsidiary
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2018
Bidang Usaha / Line of Business	: Jasa Pengelola Properti / Property Management Services
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp655,09 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 19 orang / employees
Status	: Belum Beroperasi / Not Yet Operating

PT MMI didirikan berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 5 Juli 2018. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

PT MMI was established based on Certificate No. 16 dated July 5, 2018 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. This certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033122.AH.01.01. Year 2018 on July 16, 2018.



Modal dasar PT MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PPI memiliki 78,87 persen atau sebanyak 2.450.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp245.000.000.000;
- PT PP Properti Tbk memiliki 21,13 persen atau sebanyak 656.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp65.625.000.

Saat ini, PT MMI belum melakukan kegiatan komersial.

Adapun Visi dan Misi PT Menara Maritim Indonesia yakni:

Visi Perusahaan
Menjadi pengelola Gedung perkantoran yang dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi tanggung jawab sosial & lingkungan.
Misi Perusahaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan layanan pengelolaan gedung yang profesional; 2. Menjalinkan kemitraan strategis dengan mitra kerja secara berkualitas; 3. Mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kompetensi.

Authorized capital of PT MMI is Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- PT PPI owns 78.87 percent or 2,450,000,000 shares with a nominal value of Rp245,000,000,000;
- PT PP Properti Tbk owns 21.13 percent or 656,250,000 shares with a nominal value of Rp65,625,000.

PT MMI has not operated commercially as of today.

Vision and mission of PT Menara Maritim Indonesia are as follows:

Company Vision
To become office building manager that gives optimal added value to the stakeholders and complies with social and environmental responsibilities.
Company Mission
<ol style="list-style-type: none"> 1. Developing professional building management services; 2. Building strategic and quality partnership with business partners; 3. Realizing excellent and professional human capital through competency development.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Menara Maritim Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Menara Maritim Indonesia Tahun 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Kiki M. Hikmat	Komisaris Utama / President Commissioner	21 Mei 2019 s.d 31 Agustus 2020 / May 21, 2019 to August 31, 2020	PPI-623-21052019-015 dan 610/EXT/PP-PROP/2019 / PPI-623-21052019-015 and 610/EXT/PP-PROP/2019
Mulyadi	Komisaris / Commissioner	31 Agustus 2020 s.d 23 Maret 2021 / August 31, 2020 to March 23, 2021	PPI-623-31082020-001 dan 868/EXT/PP-PROP/2020 / PPI-623-31082020-001 and 868/EXT/PP-PROP/2020
Hadi Safitri Noor	Komisaris / Commissioner	23 Maret 2021 s.d sekarang / March 23, 2021 - present	PPI-623-23032021-016 dan 01/PERJ/PPRO/DIR/2021 / PPI-623-23032021-016 and 01/PERJ/PPRO/DIR/2021
Nanang Siswanto	Komisaris / Commissioner	5 Juli 2018 s.d. sekarang / July 5, 2018 - present	Akta Nomor 16 Tanggal 5 Juli 2018 / Deed No. 16 dated July 5, 2018
Akta Nomor 16 Tanggal 5 Juli 2018 / Deed No. 16 dated July 5, 2018			
Bagus Dwipoyono	Direktur Utama / President Director	5 Juli 2018 – sekarang / July 5, 2018 - present	Akta Nomor 16 Tanggal 5 Juli 2018 / Deed No. 16 dated July 5, 2018
Yunas Rudianto	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	5 Juli 2018 – 16 April 2021 / July 5, 2017 – April 16, 2021	Akta Nomor 16 Tanggal 5 Juli 2018 / Deed No. 16 dated July 5, 2018
Rudy Istiawan	Direktur / Director	5 Juli 2018 – sekarang / July 5, 2018 - present	Akta Nomor 16 Tanggal 5 Juli 2018 / Deed No. 16 dated July 5, 2018

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Menara Maritim Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Menara Maritim Indonesia in 2020

PT New Priok Container Terminal One (PT NPCT1)

PT New Priok Container Terminal One (PT NPCT1)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1, Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14110 Telp. : (021) 29144888 Website : www.npct1.co.id
Kepemilikan Saham IPC (Kepemilikan Tidak Langsung) / IPC Indirect Share Ownership	: 51,00% melalui PT IPC TPK selaku Anak Perusahaan IPC / 51.00% through PT IPC TPK as IPC Subsidiary
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2014
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal Peti Kemas / Container Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp3.629,48 miliar / billion
Status	: Beroperasi / Operating

PT NPCT1 didirikan berdasarkan Akta Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., No. 33 tanggal 28 Mei 2014. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

PT NPCT1 was established based on Certificate No. 33 dated May 28, 2014 from Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

Modal dasar PT NPCT1 sebesar Rp340.725.600.000 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The authorized capital of PT NPCT1 is Rp340,725,600,000 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- PT IPC TPK memiliki 51,00 persen atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.000;
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00 persen atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.000.

- PT IPC TPK owns 51.00 percent or 510 Class A shares with a nominal value of Rp173,770,056,000;
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00 percent or as many as 490 Class B shares with a nominal value of Rp166,955,544,000.

Saat ini, PT NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang. Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan terdiri dari 3 (tiga) kelompok usaha, dengan uraian sebagai berikut:

At present, PT NPCT1 is engaged in stevedoring services. The business activities that have been carried out consist of 3 (three) business categories as follows:

1. Untuk memuat dan membongkar Peti Kemas di Pelabuhan;
2. Untuk memindahkan Peti Kemas ke dan dari Pelabuhan ke Pangkalan Peti Kemas;
3. Untuk menangani dan mengelola peti kemas di Terminal Peti Kemas dan kegiatan yang terkait termasuk kegiatan penampungan, pengawasan, penyusunan dan pengangkutan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan petikemas dan kegiatan *Container Freight Station (CFS)* pada umumnya.

1. Loading and unloading containers at the port;
2. Moving containers to and from the Port to the Base of Containers;
3. Handling and managing containers at the Container Terminals and related activities including storage, supervision, preparation and transportation activities related to container handling and management activities and Container Freight Station (CFS) activities in general.



Adapun Visi dan Misi PT New Priok Container Terminal One yakni:

Vision and Mission of PT New Priok Container Terminal One are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi pengelola terminal terkemuka di Indonesia.	To be the leading gateway terminal operator in Indonesia.
Misi Perusahaan	Company Mission
Menyediakan jasa terminal petikemas terbaik di kelasnya untuk mendorong perdagangan internasional Indonesia dan mencapai pertumbuhan maksimal dengan menjalin kemitraan yang sukses dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.	Provide best-in-class container terminal services to energize Indonesia's international trade and achieve its full growth potential by building successful partnerships with our customers and stakeholders.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT New Priok Container Terminal One per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT New Priok Container Terminal One as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT New Priok Container Terminal One Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT New Priok Container Terminal One in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ihsanuddin Usman	Komisaris Utama / President Commissioner	18 Mei 2020 / May 18, 2020	DR/200518/01
Irwan Favoriet	Komisaris / Commissioner	23 Oktober 2020 / October 23, 2020	DR/201027/01
Takayuki Hori	Komisaris / Commissioner	1 April 2019 / April 1, 2019	Akta nomor 19/ 7 Mei 2019 / Deed No. 19/ May 7, 2019
Eiji Onishi	Komisaris / Commissioner	12 Mei 2016 / May 12, 2016	Akta nomor 81/ 16 Juni 2016 / Deed No. 81/ June 16, 2016
Darwin Silalahi	Komisaris / Commissioner	8 Mei 2014 / May 8, 2014	Akta nomor 33/ 8 Mei 2014 / Deed No. 33/ May 8, 2014
Direksi / Board of Directors			
Takao Omori	Direktur Utama / President Director	1 April 2019 / April 1, 2019	Akta nomor 19/ 7 Mei 2019 / Deed No. 19/ May 7, 2019
Kenneth Wu Kek Fong	Direktur / Director	1 Oktober 2020 / October 1, 2020	DR/201001/01
Ahmad Mimbar	Direktur / Director	25 Juni 2020 / June 25, 2020	DR/200610/01
Hudadi Soerja Djanegara	Direktur / Director	24 Juli 2020 / July 24, 2020	DR/200724/01

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP)

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Tamansari Hive Office Lantai Unit B Jl. D.I Panjaitan Kav 2, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia – 13340 Telp. : (021) 2286 4760 Faks. : (021) 2286 4761 Website : www.ctptollways.co.id
Kepemilikan Saham IPC (Kepemilikan Tidak Langsung) / IPC Indirect Share Ownership	: 45,00% melalui PT API selaku Cucu Perusahaan IPC / 45.00% through PT API as IPC Second-Tier Subsidiary
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2006
Bidang Usaha / Line of Business	: Operasi Jalan Tol / Toll Road Operations
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp8.966,94 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 57 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

Berdasarkan Perjanjian Pengambil bagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, PT API, MTD Capital Bhd (MTDX) dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45 persen kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan PT API menjadi pemilik 45 persen saham MTDX.

Based on the Conditional Share Taking Agreement and Shareholder Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, PT API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by taking part of 130,220 new shares with a total nominal value of Rp118,500,200 (representing 45 percent share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and PT API became the owner of 45 percent of MTDX shares.

Berdasarkan Akta Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 17 tanggal 24 Mei 2017, MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

Based on Deed No. 17 May 24, 2017 made before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX changed its name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP). This Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-0011468.AH.01.02 on May 26, 2017.

Saat ini, PT CTP bergerak dalam bidang Operasi Jalan Tol.

At present, PT CTP is engaged in Toll Road Operations.

Adapun Visi dan Misi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways yakni:

The vision and mission of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pengelolaan jalan tol.	To become a leading Indonesian company in the investment and management of toll road
Misi Perusahaan	Company Mission
Meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui SDM yang berkompeten, Sistem dan teknologi terintegrasi, sinergi dengan mitra usaha, dan inovasi.	Increase sustainable corporate value through competent human capital, integrated systems and technology, synergy with business partners, and innovation.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Iwan Ridwan	Komisaris Utama / President Commissioner
Oktarina Kartika Ayu	Komisaris / Commissioner
Direksi / Board of Directors	
Thorry Hendrarto	Direktur Utama / President Director
Novianto Ari Nugroho	Direktur Keuangan / Finance Director
Ari Sunaryono	Direktur Teknik / Technical Director



ENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Asosiasi, dengan uraian sebagai berikut:

ASSOCIATES

As of December 31, 2020, the company had 3 (three) Associates as described below:

ENTITAS ASOSIASI IPC

No.	Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset Tahun 2020 / Total Assets in 2020	Domisili / Domicile
1.	PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)	Rumah Sakit / Hospital	32,88%	1999	Beroperasi / Operating	Rp548,05 miliar / billion	Jakarta
2.	PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT)	Terminal Peti Kemas / Container Terminal	48,90% (sedang dalam proses IPC menjadi pemegang saham mayoritas / IPC to become the majority shareholder)	1999	Beroperasi / Operating	Rp18.09,450 miliar / billion	Jakarta
3.	PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)	Terminal Peti Kemas / Container Terminal	25,00%	2013	Belum Beroperasi / Not Yet Operating	Rp134,14 miliar / billion	Jakarta

IPC ASSOCIATES

PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)

PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Kramat Jaya - Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14260 Telp. : (021) 4403026 Email : humas.rsp@rspelabuhan.com Website : www.rs-pelabuhan.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 32,88%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 1999
Bidang Usaha / Line of Business	: Rumah Sakit / Hospital
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp548,05 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 1250 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

PT RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

PT RSP was established based on Notarial Certificate Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

Modal dasar PT RSP sebesar Rp153.979.000.000 terdiri dari 153.979 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

PT RSP's authorized capital of Rp153,979,000,000 consists of 153,979 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PT Pertamedika Bina Medika IHC (PT PBM IHC) melakukan pengambilalihan sebanyak 103.166 lembar saham PT RSP yang dimiliki oleh IPC sebesar 67 persen atau senilai Rp167.500.000.000.

Based on the Conditional Share Acquisition Agreement on June 30, 2020, PT Pertamedika Bina Medika IHC (PT PBM IHC) acquired 103,166 shares of PT RSP owned by IPC amounting to 67 percent or Rp167,500,000,000.

Dengan demikian, komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh PT RSP setelah pengambilalihan saham dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina Bina Medika IHC memiliki 67 persen atau sebanyak 103.166 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp103.166.000.000;
- IPC memiliki 32,88 persen atau sebanyak 50.633 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.633.000.000;
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12 persen atau sebanyak 180 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000.

Saat ini, PT RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

Adapun Visi dan Misi PT Rumah Sakit Pelabuhan yakni:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi perusahaan terbaik dalam industri kesehatan nasional dengan layanan profesional kelas dunia.	To become the best company in the national health industry with world-class professional services.
Misi Perusahaan	Company Mission
Menjalankan usaha layanan kesehatan berkualitas, berorientasi pada sinergi sumber daya dan teknologi terkini serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.	Running a quality healthcare business, oriented towards the synergy of resources and the latest technology as well as sustainable growth of the company.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan Tahun 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ihsanuddin Usman	Komisaris Utama / President Commissioner	5 Juni 2020 – 4 Juni 2025 / June 5, 2020 – June 4, 2025	KP.03/5/6/3/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 dan RUPS Definitif tanggal 1 Desember 2020 / KP.03/5/6/3/MTA/UT/PI.II-2020 dated June 5, 2020 and Definitive GMS dated December 1, 2020
Syaiful Amin	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2020 – 13 Juli 2025 / July 14, 2020 – July 13, 2025	KP.03/14/7/6/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020 dan RUPS Definitif tanggal 1 Desember 2020 / KP.03/14/7/6/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020 and Definitive GMS dated December 1, 2020
Donny Aldian	Komisaris / Commissioner	1 Desember 2020 – 30 November 2025 / December 1, 2020 – November 30, 2025	RUPS tanggal 1 Desember 2020 / GMS dated December 1, 2020
Said Aqil Siradj	Komisaris / Commissioner	19 Desember 2019 – 18 Desember 2024 / December 19, 2019 – December 18, 2024	SK.03/19/12/11/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 / SK.03/19/12/11/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
Direksi / Board of Directors			
Banu Astrini	Plt. Direktur Utama / Acting President Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 dated July 15, 2020
Aris Subagyo	Plt. Direktur Keuangan dan SDM / Acting Finance and HC Director	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 dated July 15, 2020
R. Suhasbagyo	Direktur Medik dan Pengembangan Bisnis / Medical and Business Development Director	10 Maret 2017 – 9 Maret 2022 / March 10, 2017 – March 9, 2022	HK.568/10/3/10/PI.II-17 tanggal 10 Maret 2017 juncto KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juli 2020 / HK.568/10/3/10/PI.II-17 dated March 10, 2017 juncto KP.03/15/7/5/MTA/UT/PI.II-20 dated July 15, 2020

Accordingly, the composition of PT RSP's issued and fully paid-up capital after the acquisition of shares and as of December 31, 2020 is as follows:

- PT Pertamina Bina Medika IHC has 67 percent or 103,166 shares with a nominal value of Rp103,166,000,000;
- IPC has 32,88 percent or 50,633 shares with a nominal value of Rp50,633,000,000;
- The Maritime Employee Cooperative has 0.12 percent or 180 shares with a nominal value of Rp180,000,000.

At present, PT RSP is engaged in health services and other health support services.

Vision and mission of PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia are:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Rumah Sakit Pelabuhan as of December 31, 2020 is as follows:

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Rumah Sakit Pelabuhan in 2020



PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT)

PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, DKI Jakarta, Indonesia – 14310 Telp. : (021) 80678100 Faks. : (021) 80678111 Email : corsec@jict.co.id Website : www.jict.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	48,90% (sedang dalam proses IPC menjadi pemegang saham mayoritas / IPC to become the majority shareholder)
Tahun Pendirian / Year of Establishment	1999
Bidang Usaha / Line of Business	Terminal Petikemas / Container Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	Rp18.09,450 miliar / billion
Status	Beroperasi / Operating

PT JICT didirikan berdasarkan Akta Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn., No. 72 tanggal 27 Maret 1999. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01. TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

PT JICT was established based on Certificate No. 72 dated March 27, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar PT JICT adalah sebesar Rp221.450.406.500 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

Based on the Amendment Certificate No. 77 and No. 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, SH, stated that the authorized capital of PT JICT amounted to Rp221,450,406,500 divided into 1 series A share of the Government of the Republic of Indonesia and 442,900,812 series B shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 48,90 persen atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.000;
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10 persen atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.500;
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51,00 persen atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.500.

- IPC has 48.90 percent or 216,578,498 series B shares with a nominal value of Rp108,289,249,000;
- The Maritime Employee Cooperative has 0.10 percent or as many as 442,899 Series B shares with a nominal value of Rp221,449,500;
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51.00 percent or as many as 225,879,415 series B shares with a nominal value of Rp112,939,707,500.

Saat ini, PT JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal peti kemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya. Bidang usaha PT JICT yaitu melaksanakan pelayanan jasa terminal peti kemas antara lain:

At present, PT JICT is engaged in port services, container terminal services, stacking and other services. The business field of PT JICT is to carry out container terminal services including:

1. Memuat dan membongkar petikemas di dermaga terminal peti kemas;
2. Memindahkan peti kemas dari dermaga ke lapangan peti kemas dan sebaliknya;
3. Menangani peti kemas di lapangan peti kemas, termasuk pengangkatan, penurunan, penyerahan dan penerimaan peti kemas;
4. Memberikan jasa pengelolaan dan pengoperasian terminal peti kemas;

1. Loading and unloading containers at the container terminal dock;
2. Transferring containers from the dock to the container field and vice versa;
3. Handling containers in the container field, including lifting, dropping, submitting and receiving containers;
4. Providing management and operation services for container terminals;

5. Melakukan kegiatan transportasi multimoda;
6. Melakukan kegiatan gudang transit (*Container Freight Station*) yang meliputi *stuffing* dan *unstuffing* peti kemas dan penumpukan barang di gudang transit; dan
7. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan pembersihan (*cleaning*), pemeriksaan laik guna (*Pre-Trip Inspection*), fumigasi, dan perbaikan peti kemas.

5. Conducting multimodal transportation activities;
6. Conducting transit warehouse activities (*Container Freight Station*) which includes container stuffing and unstuffing and stacking of goods in the transit warehouse; and
7. Conducting activities related to container terminal activities including but not limited to cleaning activities, Pre-Trip Inspection, fumigation and container repair.

Adapun Visi dan Misi PT Jakarta International Container Terminal yakni:

Vision and Mission of PT Jakarta International Container Terminal are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadikan PT Jakarta International Container Terminal sebagai "Terminal Petikemas Pilihan" dan terminal petikemas yang handal dan profesional dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan.	To make PT Jakarta International Container Terminal "A Preferred Container Terminal" as well as reliable and professional container terminal in providing customer satisfaction.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham: Mencapai pertumbuhan laba maksimum yang stabil dan sehat kepada pemegang saham. 2. Fokus Pelanggan: Memberi daya tarik terhadap pelanggan baru dan Mempertahankan pelanggan untuk memperluas basis pelanggan yang lebih besar. 3. Operasional Terbaik: Menyediakan jasa yang akurat, cepat, efisien dan dapat diandalkan. 4. Keselamatan dan Keamanan: Memenuhi terhadap IMO/ISPS tanpa toleransi. 5. Efektivitas Organisasi: Membangun pekerja yang kompeten, terampil dan motivasi tim yang tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders: Achieve stable and healthy maximum profit growth to shareholders 2. Customer Focus: Attract new customers and retain customers to expand a larger customer base 3. Best Operations: Provide accurate, fast, efficient, and reliable services 4. Safety and Security: Comply with IMO/ISPS with zero tolerance 5. Organization Effectiveness: Build competent, skilled, and highly motivated team workers.

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jakarta International Container Terminal per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jakarta International Container Terminal as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jakarta International Container Terminal Tahun 2020

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jakarta International Container Terminal in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Wibowo Suseno Wirjawan	Komisaris Utama / President Commissioner	7 Juli 2015 / July 7, 2015	<i>Circular resolution</i> 7 Juli 2015 / Circular Resolution, July 7, 2015
Arif Suhartono	Plt. Wakil Komisaris Utama / Acting Vice President Commissioner	7 Juli 2020 / July 7, 2020	<i>Circular resolution</i> 7 Juli 2020 / Circular Resolution, July 7, 2020
Supomo Hidjazie	Komisaris / Commissioner	27 Juli 2017 / July 27, 2017	<i>Circular resolution</i> 27 Juli 2017 / Circular Resolution, July 27, 2017
Retno Soelistianti	Komisaris / Commissioner	15 Juli 2020 / July 15, 2020	<i>Circular resolution</i> 15 Juli 2020 / Circular Resolution, July 15, 2020
Riri Satria	Komisaris / Commissioner	19 Desember 2019 / December 19, 2019	<i>Circular resolution</i> 19 Desember 2019 / Circular Resolution, December 19, 2019
Rianti Ang	Komisaris / Commissioner	23 Maret 2017 / March 23 2017	<i>Circular resolution</i> 23 Maret 2017 / Circular Resolution, March 23, 2017
Ruth Sin Ling Tsim	Komisaris / Commissioner	27 Juli 2017 / July 27, 2017	<i>Circular resolution</i> 27 Juli 2017 / Circular Resolution, July 27, 2017
John Stephen Ashworth	Komisaris / Commissioner	7 Juli 2015 / July 7, 2015	<i>Circular resolution</i> 7 Juli 2015 / Circular Resolution July 7, 2015



Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Direksi / Board of Directors			
Ade Hartono	President Director	15 Juli 2017 / July 15, 2017	Circular resolution 15 Juli 2017 / Circular Resolution, July 15, 2017
Budi Cahyono	Vice President Director	11 November 2020 / November 11, 2020	Circular resolution 11 November 2020 / Circular Resolution, November 11, 2020
Marvin Setiawan	Finance Director	11 November 2020 / November 11, 2020	Circular resolution 11 November 2020 / Circular Resolution, November 11, 2020
Rati Farini	Administration Director	15 Juli 2020 / July 15, 2020	Circular resolution 15 Juli 2020 / Circular Resolution, July 15, 2020
Widodo	Human Resources Director	15 Juli 2020 / July 15, 2020	Circular resolution 15 Juli 2020 / Circular Resolution, July 15, 2020
Thavaneswaran P.	Operation & Engineering Director	6 Maret 2019 / March 6, 2019	Circular resolution 6 Maret 2019 / Circular Resolution, March 6, 2019

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	:	Kobexindo Tower Lt. 2 Jl. Pasir Putih Raya Blok No.E-5-D, RT.8/RW.10, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14430 Telp. : (021) 645 6301 Faks. : (021) 645 6302 Website : www.petikemas-indonesia.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	:	25,00%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	:	2013
Bidang Usaha / Line of Business	:	Terminal Peti Kemas / Container Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	:	Rp134,14 miliar / billion
Status	:	Belum Beroperasi / Not Yet Operating

PT TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 36 tanggal 10 April 2013. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

PT TPI was established based on Certificate No. 36 dated 10 April 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree AHU-21873.AH.01.01. 2013 dated April 24, 2013.

Modal dasar PT TPI sebesar Rp500.000.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

PT TPI's authorized capital of Rp500,000,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- Perseroan memiliki 25,00 persen atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000;
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00 persen atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00 persen atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000;
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00 persen atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.

- The Company has 25.00 percent or 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000;
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00 percent or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00 percent or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000;
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00 percent or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000,000.

Saat ini, PT TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

At present, PT TPI has yet not carried out commercial operations.

Adapun Visi dan Misi PT Terminal Petikemas Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Terminal Petikemas Indonesia are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Operator Terminal Peti Kemas terpercaya di Indonesia, yang memfasilitasi dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelayanan yang efisien, handal, dan biaya yang efektif.	To Become a trusted Container Terminal Operator in Indonesia, which facilitates and fosters national economic growth through efficient, reliable, and cost-effective services.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> Bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam pelayanan terminal peti kemas di Indonesia dengan memberikan keandalan dan produktivitas terbaik; Menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui pengelolaan terminal peti kemas secara terintegrasi (internasional dan terminal domestik) yang bisa memfasilitasi jadwal pelayaran yang teratur dan biaya handling yang efektif di seluruh terminal yang dioperasikan dalam sebuah konektivitas yang efisien; Mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (dari barat ke timur Indonesia) dengan memberikan pengelolaan terminal peti kemas yang profesional dan efisien; Memberikan produktivitas terbaik dan konsisten di tiap terminal yang dioperasikan melalui implementasi perbaikan proses yang berkelanjutan; Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Compete at the national and international level in container terminal services in Indonesia by providing the best reliability and productivity; Create values for the stakeholder through the management of integrated containers (international and domestic terminals) that facilitates regular shipping schedules and cost-effective handling across all terminals operated in an efficient connectivity; Support and facilitate sustainable national economic growth (from west to east of Indonesia) by providing professional and efficient container terminal management; Ensure productivity and consistency at every operational terminal through implementing an improving and sustainable process; Provide a safe and healthy working environment for employees and other stakeholders.

Sementara itu, susunan Direksi PT Terminal Petikemas Indonesia per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Board of Directors of PT Terminal Petikemas Indonesia as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Direksi PT Terminal Petikemas Indonesia Tahun 2020

Composition of the Board of Directors of PT Terminal Petikemas Indonesia in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Direksi / Board of Directors			
Hadi Mohammad Lukmanty	Direktur Utama / President Director	31 Mei 2018 – 30 Mei 2023 / May 31, 2018 – May 30, 2023	SK.03/31/5/1/PBJ/UT/PI.II-18 tanggal 31 Mei 2018 / SK.03/31/5/1/PBJ/UT/PI.II-18 dated May 31, 2018

KERJA SAMA OPERASI (KSO) PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 2 (dua) Kerja Sama Operasi (KSO), dengan uraian sebagai berikut:

JOINT OPERATIONS

As of December 31, 2020, the Company had 2 (two) Joint Operations as described below:

KERJA SAMA OPERASI (KSO) IPC

IPC JOINT OPERATIONS

No.	Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset Tahun 2020 / Total Assets in 2020	Domisili / Domicile
1.	Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Kojak (KSO TPK Kojak)	Terminal Petikemas / Container Terminal	54,91%	1994	Beroperasi / Operating	Rp3.718,06 miliar / billion	Jakarta
2.	Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKT)	Terminal Kendaraan / Vehicle Terminal	45,00% melalui PT IKT Tbk selaku Anak Perusahaan IPC / 45,00% through PT IKT Tbk as IPC Subsidiary	2015	Beroperasi / Operating	Rp 3.083,28 miliar / billion	Jawa Timur / East Java



KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO TPK KOJA) TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO TPK KOJA) JOINT OPERATIONS

Alamat dan Kontak Perusahaan / Company Address and Contact	: Jl. Digul No.1, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia – 14220 Telp. : (021) 4374142 Email : corsec@tpkkoja.co.id Website : www.tpkkoja.co.id
Kepemilikan Saham IPC / IPC Share Ownership	: 54,91%
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 1994
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal Peti Kemas / Container Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp3.718,06 miliar / billion
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 1.330 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

KSO TPK Koja didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 dan Perjanjian Induk Kerja Sama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 (Amandemen I) dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 (Amandemen II), tanggal 5 Agustus 2014 (Amandemen III) dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039.

TPK Koja Joint Operations was established based on Certificate No. 53 dated October 23, 1996 by Imas Fatimah, S.H. and the Agreement on Joint Operations Koja on August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was amended substantially on March 26, 1999 (Amendment I) and further amended on June 22, 2011 (Amendment II), August 5, 2014 (Amendment III) and June 22, 2015. The agreement is valid for 20 years from the date of commercial operation, namely November 1, 1998 and has been extended to March 26, 2039.

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91 persen untuk IPC dan 45,09 persen untuk HPI. Saat ini, KSO TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal peti kemas. Adapun kegiatan usaha tersebut diuraikan sebagai berikut:

The participant investment proportion for 2018 is 54.91 percent for IPC and 45.09 percent for HPI. At present, KSO TPK Koja is engaged in the operation and management of port and container terminals. The business activities are described as follows:

- *Discharging* adalah Kegiatan pembongkaran peti kemas dari kapal;
- *Loading* adalah kegiatan pemuatan peti kemas ke kapal;
- *Receiving* adalah kegiatan penerimaan peti kemas ekspor;
- *Delivery* adalah kegiatan penyerahan peti kemas ekspor;
- *Transshipment* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari terminal satu ke terminal lain;
- *Over Brengen* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari *container yard* ke Tempat Penimbunan Sementara;
- *Behandle* adalah kegiatan pemeriksaan isi peti kemas oleh instansi Bea Cukai;
- Karantina adalah kegiatan pemisahan dan pemeriksaan isi peti kemas hewan dan tumbuhan oleh instansi Karantina terkait; dan

- Discharging is the activity of dismantling containers from the ship;
- Loading is the activity of loading containers to ships;
- Receiving is an export container receiving activity;
- Delivery is the activity of delivering export containers;
- Transshipment is the activity of moving containers from one terminal to another;
- Over Brengen is the activity of transferring containers from container yards to Temporary Hoarding Places;
- Behandle is an activity of checking container contents by Customs authorities;
- Quarantine is the activity of separating and examining the contents of animal and plant containers by the relevant Quarantine agency; and

- *Verified Gross Mass (VGM)* adalah Penimbangan berat kotor peti kemas yang terverifikasi.
- *Verified Gross Mass (VGM)* is weighing the gross weight of verified containers.

Adapun Visi dan Misi KSO Terminal Peti Kemas Koja yakni:

Vision and Mission of KSO Terminal Peti Kemas Koja are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi Terminal Peti Kemas Kelas Dunia.	To be a World Class Container Terminal.
Misi Perusahaan	Company Mission
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan terminal peti kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan; • Mengembangkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, dan profesional; • Menjaga kepercayaan para <i>Stakeholder</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Providing comprehensive and innovative container terminal services, as well as providing added value to the customers; • Developing reliable, qualified, and professional human capital; • Maintaining the confidence of the Stakeholders

Sementara itu, susunan Dewan Pengawas dan Manajemen KSO TPK Koja per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Supervisory Board and Management of KSO TPK Koja as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Pengawas dan Manajemen KSO TPK Koja Tahun 2020

Composition of the Supervisory Board and Management of KSO TPK Koja in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Nomor RUPS / GMS Number
Dewan Pengawas / Supervisory Board			
Ihsanuddin Usman	Ketua Dewan Pengawas / Chair of Supervisory Board	6 Mei 2020 – 5 Mei 2023 / May 6, 2020 – May 5, 2023	KP.03/6/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 6 Mei 2020 / KP.03/6/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated May 6, 2020
Hari Gursida	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	15 Juli 2020 – 14 Juli 2023 / July 15, 2020 – July 14, 2023	KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020
Ahmad	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	15 Juli 2020 – 14 Juli 2023 / July 15, 2020 – July 14, 2023	KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020
Yos Nugroho	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	30 Januari 2015 – saat ini / January 30, 2015 – present	-
Marinus R. Saroengallo	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	31 Mei 2019 – 30 Mei 2022 / May 31, 2019 – May 30, 2020	-
Seto Baskoro	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	13 Januari 2012 – saat ini / January 13, 2012 – present	-
Manajemen / Management			
Ahmad Syaichu	General Manager	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020
Yana Pratapa	DGM SDM dan Administrasi / HC and Administration DGM	1 Juli 2019 – 30 Juni 2024 / July 1, 2019 – June 30, 2024	KP.03/1/7/8/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 1 Juli 2019 / KP.03/1/7/8/MTA/UT/PI.II-19 dated July 1, 2019
Chang Ho Song	DGM Operasi dan Informasi / Operations and Information DGM	11 Maret 2019 – 10 Maret 2024 / March 11, 2019 – March 10, 2024	KP.06.03/11/3/2/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Maret 2019 / KP.06.03/11/3/2/MTA/UT/PI.II-19 dated March 11, 2019
Uzaimah	DGM Teknik / Technical DGM	11 Maret 2019 – 10 Maret 2024 / March 11, 2019 – March 10, 2024	KP.06.03/11/3/2/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Maret 2019 / KP.06.03/11/3/2/MTA/UT/PI.II-19 dated March 11, 2019
Benny Ariadi	DGM Komersial / Commercial DGM	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020
Aftina Wiedarini	DGM Keuangan / Finance DGM	15 Juli 2020 – 14 Juli 2025 / July 15, 2020 – July 14, 2025	KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juli 2020 / KP.03/15/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 15, 2020



Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI)

Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI) Joint Operations Management

Tempat Kedudukan / Domicile	: Jl. Beta Kawasan Industri Maspion V Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur Telp. : (031) 99006314/39921490
Kepemilikan Saham IPC (Kepemilikan Tidak Langsung) / IPC Indirect Share Ownership	: 45,00% melalui PT IKT Tbk selaku Anak Perusahaan IPC / 45.00% through PT IKT Tbk as IPC Subsidiary
Tahun Pendirian / Year of Establishment	: 2015
Bidang Usaha / Line of Business	: Terminal Kendaraan / Vehicle Terminal
Total Aset per 31 Desember 2020 / Total Assets per December 31, 2020	: Rp 3.083.275
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2020 / Total Employees per December 31, 2020	: 9 orang / employees
Status	: Beroperasi / Operating

Pada tanggal 9 April 2015, PT IKT Tbk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (PT MIE) dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan PT IKT Tbk dan MIE masing-masing sebesar 45,00 persen dan 55,00 persen. Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

On April 9, 2015, PT IKT Tbk entered into a Cooperation Agreement for the Construction and Operation of Vehicle Terminal in Gresik East Java with PT Maspion Industrial Estate ("PT MIE") by forming MTKI MKO. The term of the agreement is 25 years with the portion of PT IKT Tbk and MIE funding respectively 45.00 percent and 55.00 percent. In March 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and is engaged in the management of vehicle terminals.

Adapun Visi dan Misi Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia yakni:

The Vision and Mission of Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operations Management are:

Visi Perusahaan	Company Vision
Menjadi salah satu pengelola Terminal Kendaraan yang membanggakan di Indonesia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.	To be one of the leading operators of Vehicle Terminals in Indonesia that excels in operations and services.
Misi Perusahaan	Company Mission
Sebagai pengelola terminal kendaraan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.	As a vehicle terminal manager that maximizes added value for all Stakeholders on an ongoing basis in order to improve the national economy.

Sementara itu, susunan Dewan Komite dan Pengurus MKO MTKI per 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The composition of the Committee Board and Management of MKO MTKI as of December 31, 2020 is as follows:

Susunan Dewan Komite dan Pengurus MKO MTKI Tahun 2020

Composition of the Committee Board and Management of MKO MTKI in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komite / Committee Board	
Direksi PT IKT Tbk / Board of Directors of PT IKT Tbk	Komisaris Utama / President Commissioner
Direksi PT MIE / Board of Directors of PT MIE	Komisaris / Commissioner
Pengurus / Management	
Wasistianto	Kepala Unit / Unit Head
Widhiono	Wakil Kepala Unit / Deputy Head of Unit

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Institutions and/or Professions Supporting Capital Market

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Purwantono, Sungkoro & Surja

(Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia – 12190

Telp. : +62 21 52895000

Faks. : +62 21 52895555

Email : mochamad.syachruna@id.ey.com; wibisono.wibisono@id.ey.com

Website : www.ey.com

Jasa Utama / Main Services

Melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. / Carry out general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2020, which are presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Jasa Lainnya / Other Services

- Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; / Carry out the procedure on the Report of Performance Evaluation and KPI Achievement (Key Performance Indicator) for the fiscal year ending on December 31, 2020;
- Melaksanakan audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2020; / Carry out the audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for fiscal year 2020;
- Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; / Carry out the audit of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the fiscal year ending on December 31, 2020;
- Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. / Carry out the procedure agreed upon in the Report of the Application of Prudential Principles (KPPK) in accordance with Bank Indonesia Regulations and Circular Letters.

Periode Penugasan / Assignment Period

15 September 2020 – 30 April 2021 /

September 15, 2020 – April 30, 2021

Besaran Fee / Fee Amount

Rp3.802.636.200 (sudah termasuk PPN) / Rp3,802,636,200 (including VAT)

TEMPAT PENCATATAN OBLIGASI / BOND LISTING

Singapore Exchange Securities Trading

2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore – 068804

Telp. : +65 6236 8888

Faks. : +65 6535 6994

Email : sgxnet.services@sgx.com

Website : www2.sgx.com

Jasa yang Diberikan / Service Rendered

Pencatatan Obligasi Global (*Global Bond*) Seri 1 dan 2. / Listing of Global Bond Series 1 and 2.

Periode Penugasan / Assignment Period

2015 – saat ini / 2015 – present

Besaran Fee / Fee Amount

Nihil / None

LEMBAGA PEMERINGKAT / RATING AGENCY

1. Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd.

50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower, Singapore – 048623

Telp. : +65 6398 8300 | Faks. : +65 6398 8301 | Website : www2.sgx.com

2. Standard & Poor's Singapore Pte. Ltd.

12 Marina Boulevard, #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore – 018982

Telp. : +65 6438 2881 | Faks. : +65 6438 2320 | Website : www.standardandpoors.com

Jasa yang Diberikan / Service Rendered

Lembaga Pemeringkat // Rating agency

Periode Penugasan / Assignment Period

2015 – saat ini / 2015 – present

WALI AMANAT / TRUSTEE

The Bank of New York

Mellon One Temasek Avenue #03-01, Millenia Tower, Singapore – 039192

Telp. : +65 6432 0222 | Faks. : +65 6883 0338 | Website : www.bnymellon.com

Jasa yang Diberikan / Service Rendered

Wali Amanat. / Trustee.

Periode Penugasan / Assignment Period

2015 – saat ini / 2015 – present

NOTARIS / NOTARY

1. Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn

Royal Palace Block C/16

Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.178 A, Jakarta

2. Notaris Dewi Sugina S.H., M.Kn

Ruko Mall Of Indonesia Blok K.5 Lantai 2

Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta

Jasa yang Diberikan / Service Rendered

Notarialisasi. / Notarial services

Periode Penugasan / Assignment Period

Penugasan per kegiatan / Assignment per activity

Besaran Fee / Fee Amount

Besaran fee sesuai dengan penawaran yang dikirimkan oleh Notaris per kegiatan / Fee according to the offer submitted by Notary for each activity



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Institutions and/or Professions Supporting Capital Market

KONSULTAN HUKUM / LEGAL CONSULTANT

1. Radjiman Bilita & Partner

The H Tower, Lantai 19 Suite E Jl. H.R. Rasuna Said Kav.20, Blok X-10 Setiabudi-Jakarta.

2. Tjajo & Partner

Satrio Tower Lantai 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.C4, Jakarta.

3. PT Justika Siar Publika

AD Premier Lantai 9 Jl. TB. Simatupang Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta.

4. Akmalsyah & Co.

The Abisatya 2nd Floor Jl. Kalibata Utara II No. 25 Jakarta Selatan 12740.

5. Sugih Ardhan Pramono & Partners

Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat .

6. Imanuddin, Ghazali & Partners

Apartemen Cilandak Lantai 5 ruang 506 Jl. TB Simatupang Kav. 17 Jakarta Selatan.

7. Kiagus Ahmad & Associates

Menara Rajawali, Lt.8 Mega Kuningan Jakarta Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 51, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950.

8. Dwi Untoro PH & Partners

Jl. Melur 4 Blok E No. 3 Lt. 2, Jakarta Utara.

Jasa yang Diberikan	Service Rendered
Radjiman Bilita & Partner	
<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan advis-advis hukum dan konsultasi di bidang korporasi sehubungan dengan kegiatan usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehari-harinya, maupun kegiatan transaksi khusus lainnya; b. Mempersiapkan dan/atau melakukan review terhadap draft-draft korespondensi yang diterbitkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); c. Mempersiapkan dan/atau melakukan review terhadap draft-draft Perjanjian yang diperlukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam menjalankan kegiatan usahanya; d. Melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pihak ketiga dengan kegiatan usaha sehari-hari dan/atau transaksi-transaksi perusahaan; e. Memberikan pendapat hukum atas permasalahan korporasi; f. Megadakan pertemuan-pertemuan dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan dengan pihak-pihak terkait guna memberikan paparan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan maupun atas pendapat hukum yang disampaikan oleh RBP; g. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan tindakan-tindakan dan/atau kebijakan yang diambil terkait kegiatan perusahaan; h. Melakukan identifikasi resiko-resiko, kajian strategis atas penyusunan mitigasi-mitigasi penanganan resiko kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan pemeriksaan dokumen hasil kajian hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehubungan dengan transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Providing legal advice and consultation in corporation related to the daily business activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or other special transaction activities; b. Preparing and/or reviewing correspondence drafts issued by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); c. Preparing and/or reviewing Agreement drafts required by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in conducting business activities; d. Examining laws and regulations related to third parties in daily business activities and/or transactions of the company; e. Providing legal opinion on corporate issues; f. Organizing meetings with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and related parties to provide explanation on relevant laws and regulations or legal opinions provided by RBP; g. Examining all documents related to actions and/or policies taken regarding company activities; h. Identifying risks, strategic reviews of the preparation of risk handling mitigation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the examination of documents resulting from legal assessments as described above, in connection with the transaction.
Tjajo & Partner	
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembuatan amandemen atas perjanjian-perjanjian Kerjasama pengoperasian PT JICT serta korespondensi terkait dengan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa-PT JICT tertanggal 5 Agustus 2015; 2) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham-PT JICT tertanggal 5 Agustus 2015; 3) Amandemen Perjanjian Penggunaan Tanah-PT JICT tertanggal 5 Agustus 2015; 4) Perjanjian Pengalihan Aset Terminal II dari PT JICT kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.566/14/12/1/PL.II-15 tanggal 14 Desember 2015 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada PT JICT; 5) Perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama (apabila diperlukan); 6) Dokumen terkait aksi korporasi dalam rangka pengambilan saham menjadi 51 persen (angka 1) sampai dengan 6) secara Bersama-sama disebut sebagai "Dokumen Transaksi"). b. Menghadiri atau turut serta dan mendampingi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam proses negosiasi Dokumen Transaksi; c. Memberikan nasihat dan kajian hukum, termasuk sehubungan dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dibidang korporasi dan kepelabuhanan terkait dengan pekerjaan dan Dokumen Transaksi; d. Sebagaimana diperlukan, mendampingi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk melakukan diskusi dengan lembaga pemerintahan seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Lembaga terkait lainnya yang sekiranya berhubungan dengan Dokumen Transaksi dan Pekerjaan; e. Sebagaimana diperlukan, menyesuaikan buku putih (<i>white book</i>) Kerja Sama Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT JICT sehubungan dengan penandatanganan Dokumen Transaksi; f. Sebagaimana diperlukan, menyampaikan legal opini atas penyelesaian transaksi (<i>closing</i>) dari segi hukum sehubungan dengan penandatanganan Dokumen Transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Preparing amendments to the Cooperation agreements for the operation of PT JICT as well as correspondence related to: <ul style="list-style-type: none"> 1) Amendment to the PT JICT-Authorization Agreement dated August 5, 2015; 2) Amendment to Shareholder Agreement-PT JICT dated August 5, 2015; 3) Amendment to the PT JICT-Land Use Agreement dated August 5, 2015; 4) Terminal II Asset Transfer Agreement from PT JICT to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: HK.566/14/12/1/PL.II-15 dated December 14, 2015 between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to PT JICT; 5) Other agreements related to the implementation of the Cooperation (if necessary); 6) Documents related to corporate actions in the context of taking shares to 51 percent (numbers 1) to 6) are Collectively referred to as "Transaction Documents"). b. Attend or participate in and assist PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the negotiation process of Transaction Documents; c. Provide legal advice and assessments, including in relation to compliance with laws and regulations in the field of corporations and ports related to work and Transaction Documents; d. If required, accompanying PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to conduct discussions with government institutions such as the Prosecutor's Office, the Audit Board and other related institutions that relate to Transaction and Work Documents; e. If required, adjust the white book on the Cooperation in the Management and Maintenance of the Container Terminal at Tanjung Priok Port by PT JICT in relation to the signing of the Transaction Document; f. If required, submit a legal opinion on the transaction settlement (<i>closing</i>) from a legal perspective in connection with the signing of the Transaction Document.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Institutions and/or Professions Supporting Capital Market

PT Justika Siar Publika

PT Justika Siar Publika memberikan Layanan Profesional Berlangganan Hukum Online kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang terdiri dari :

- Hukumonline Legal Database Online* ("HOLD Online"), berupa pusat data digital peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia yang disusun sistematis secara hirarkis, dilengkapi penjelasan dan relasi antar peraturan, disertai informasi sejarah dan peraturan pelaksana tertentu serta dapat diunduh melalui portal pro.hukumonline.com.
- Indonesian Legal Brief* ("ILB"), berupa telaah singkat, cermat dan padat dari peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dikirimkan ke 10 (sepuluh) e-mail PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) setiap hari kerja sebagaimana tertera di dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini dan dipublikasikan secara *online* melalui portal pro.hukumonline.com.
- Indonesian Law Digest* ("ILD"), berupa kupasan dan ulasan mendalam mengenai perkembangan hukum serta analisis komprehensif terkait kasus-kasus dan putusan pengadilan terkini, yang disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dikirimkan ke 10 (sepuluh) e-mail PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) satu kali seminggu sebagaimana tertera di dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini dan dipublikasikan secara *online* melalui portal pro.hukumonline.com.
- Monthly Law Review* ("MLR") berupa publikasi bulanan berisi ringkasan peraturan perundang-undangan terbaru di berbagai sektor usaha dalam Bahasa Inggris yang dikirimkan ke 10 (sepuluh) e-mail PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) satu kali sebulan sebagaimana tertera di dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini dan dipublikasikan secara *online* melalui portal pro.hukumonline.com.
- Listing Regulations* berupa Peraturan terbaru yang dikirimkan setiap dua minggu sekali dengan format excel ke e-mail PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Hukum online Pro* berupa Koleksi *ILB*, *ILD*, *MLR* dan *Daily Updates* yang dapat di unduh.
- Hukum online English Regulation* berupa koleksi ratusan regulasi terkait dengan sektor Bisnis yang ditranslasi ke Bahasa Inggris dan disajikan dalam bentuk PDF yang mudah disalin.
- Consolidation Regulation* berupa naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak peraturan tersebut. Selain itu, Peraturan Konsolidasi juga memuat anotasi putusan pengadilan yang membatalkan atau memberikan tafsir terhadap pasal atau ayat dalam peraturan tersebut.
- Daily Updates* berupa intisari peraturan dan kebijakan Pemerintah terkini yang terbit setiap hari dan disajikan dalam bentuk *pointer* dalam Bahasa Inggris.
- Regulation Translation* berupa koleksi ratusan regulasi terkait dengan sektor Bisnis yang ditranslasi ke Bahasa Inggris dan disajikan dalam bentuk PDF yang mudah disalin.

PT Justika Siar Publika provides Professional Online Legal Subscription Services to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which consists of:

- Hukumonline Legal Database Online* ("HOLD Online"), in the form of a digital data center for laws and regulations and court decisions in Indonesia that are systematically arranged in a hierarchical manner, presented with explanations and relations between regulations, accompanied by historical information and certain implementing regulations and can be downloaded via pro.hukumonline.com.
- Indonesian Legal Brief* ("ILB"), in the form of a brief, thorough and concise review of the laws and regulations presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English, and sent to 10 (ten) e-mails of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) every working day as stated in Attachment II to this Cooperation Agreement and published online through the pro.hukumonline.com.
- Indonesian Law Digest* ("ILD"), in the form of an in-depth review and assessments of legal developments as well as a comprehensive analysis of the latest cases and court decisions, which are presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English, and sent to 10 (ten) e-mail PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) once a week as stated in Attachment II to this Cooperation Agreement and published online through the pro.hukumonline.com.
- Monthly Law Review* ("MLR") in the form of a monthly publication containing a summary of the latest legislation in various business sectors in English which is sent to 10 (ten) e-mails of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) once a month as stated in the Attachment II to this Cooperation Agreement and published online through the pro.hukumonline.com.
- Listing Regulations* in the form of the latest regulations sent every two weeks in excel format to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) e-mail.
- Hukumonline Pro* is a collection of *ILB*, *ILD*, *MLR* and *Daily Updates* that can be downloaded.
- Hukumonline English Regulation* is a collection of hundreds of regulations related to the Business sector which are translated into English and presented in easy-to-copy PDF form.
- Consolidation Regulation* in the form of an incorporation of a statutory regulation and any amendments thereto, and other regulations that have an impact on these regulations. In addition, the Consolidated Regulations also contain annotations for court decisions that revoke or provide interpretations of articles or paragraphs in these regulations.
- Daily Updates* are the substance of the latest Government regulations and policies published daily and presented in the form of pointers in English.
- Regulation Translation* is a collection of hundreds of regulations related to the Business sector which are translated into English and presented in an easy-to-copy PDF format.

Akmalsyah & Co

- Pekerjaan pembuatan kajian hukum Pemanfaatan tanah dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh atas permasalahan di Bojonegara Banten.
- Pekerjaan pembuatan Kajian Hukum Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Pontianak.
- Pekerjaan Pendampingan Hukum di Tingkat Penyidikan pada Kejaksaaan Agung Republik Indonesia terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perpanjangan Kerjasama Usaha Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).
- Pekerjaan Penanganan upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Ali Rahman Bin (Alm) Madraf selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Srg.
- Preparation of legal study on land utilization and possible legal remedies for issue in Bojonegara Banten.
- Preparation of legal study on pilotage and tug services in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pontianak Port Branch.
- Legal assistance at investigation level at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia related to Alleged Corruption Crime in the extension of Business Cooperation for Port Operation and Management of PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).
- Handling of appeal legal remedy filed by Ali Rahman Bin (Alm) Madraf as Appellant on the Ruling of District Court of Serang Number: 6/Pdt.G/2020/PN.Srg.

Sugih Ardhan Pramono & Partners.

- Pekerjaan penanganan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 25/PDT/2020/PT BTN tanggal 17 Maret 2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 27/PDT.G/PN.SRG tanggal 26 September 2019 terkait gugatan yang diajukan oleh Aminah binti H. Somad Dkk.
- Pekerjaan penanganan permasalahan hukum Pekerjaan Perbaikan Berat Dermaga Petikemas Pelabuhan Talang Duku Jambi.
- Pekerjaan Jasa Hukum dalam rangka upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2225 K/Pdt/2019 terkait gugatan PT. Resource Alam Indonesia.
- Handling of cassation legal remedy on the Ruling of the High Court of Banten Number: 25/PDT/2020/PT BTN dated March 17, 2020 juncto Ruling of the High Court of Serang Number: 27/PDT.G/PN.SRG dated September 26, 2019 related to the lawsuit filed by Aminah binti H. Somad, et al.
- Handling of legal dispute on the Heavy Repair of Container Dock of Talang Duku Port, Jambi.
- Legal service for judicial review legal remedy on the Ruling of the Supreme Court Number: 2225 K/Pdt/2019 related to the lawsuit of PT. Resource Alam Indonesia.



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Institutions and/or Professions Supporting Capital Market

Imanuddin Gazali & Partners.

Pekerjaan Jasa hukum dalam rangka pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : PUT -002489.15/2018/PP/M.A Tahun 2019.

Legal service for judicial review legal remedy on the Appeal Ruling of the Tax Court Number: PUT -002489.15/2018/PP/M.A Tahun 2019.

Kiagus Ahmad & Associates.

a. Pekerjaan Advokat permbuatan Kajian Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 1176K/Pdt/2018.
b. Pekerjaan Advokat dalam Rangka Penanganan Perkara Hukum gugatan Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah, Kalimantan Barat.

a. Advocate work for the preparation of legal study on the execution of Ruling Number: 1176K/Pdt/2018.
b. Advocate work for the handling of legal dispute of Civil Lawsuit Number: 35/Pdt.G/2020/PN.MPW at the District Court of Mempawah, West Kalimantan.

Dwi Untoro PH & Partners.

Pekerjaan jasa hukum penanganan permasalahan hukum penyusunan Kajian Hukum terkait dengan kekuatan Hukum Nota Pemeriksaan Khusus dan Anjuran dari instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan serta Penanganan Permasalahan Hukum terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial di Pelabuhan Panjang.

Legal service for the handling of dispute on the preparation of legal study related to the legal power of Special Investigation Report and Recommendation from manpower authorities as well as handling of legal dispute related to industrial relations in Panjang Port.

Periode Penugasan / Assignment Period

1. Radjiman Bilitea & Partner

18 November 2020 – 17 November 2021 (12 bulan) / November 18, 2020 – November 17, 2021 (12 months)

2. Tjajo & Partner

24 Januari 2019 – 31 Desember 2021 / January 24, 2019 – December 31, 2021

3. PT Justika Siar Publika

22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2021 (12 bulan) / October 22, 2020 – October 21, 2021 (12 months)

4. Akmalsyah & Co.

- 27 Desember 2020-26 Juni 2021 (6 Bulan) / December 27, 2020 – June 26, 2021 (6 months)
- 16 Desember 2020-15 Desember 2021 (365 Hari) / December 16, 2020 – December 15, 2021 (365 days)
- 21 April 2021-20 April 2022 (365 Hari). / April 21, 2021 – April 20, 2022 (365 days)
- 26 Februari 2021-salinan Putusan Banding diterima / February 26, 2021 – copy of Appeal Ruling received

5. Sugih Ardhian Pramono & Partners.

- 28 September 2020-Salinan Putusan Kasasi diterima / September 28, 2020 – Copy of Cassation Ruling received
- 26 Januari 2021-25 Januari 2022. (365 Hari) / January 26, 2021 – January 25, 2022 (365 days)
- 9 Oktober 2020-salinan Putusan PK diterima. / October 9, 2020 – copy of Judicial Review Ruling received.

6. Imanuddin Gazali & Partners

11 Oktober 2019-Salinan Putusan PK diterima / October 11, 2019 – Copy of Judicial Review Ruling received

7. Kiagus Ahmad & Associates

- 27 Oktober 2020-26 Oktober 2021 (365 Hari) / October 27, 2020 – October 26, 2021 (365 days)
- 16 Desember 2021-15 Desember 2022 (365 Hari) / December 16, 2021 – December 15, 2022 (365 days)

8. Dwi Untoro PH & Partners

2 Januari 2021- Salinan Putusan PHI diterima / January 2, 2021 – Copy of Industrial Relations Court Ruling received

Besaran Fee / Fee Amount

1. Radjiman Bilitea & Partner

Rp867.350.000 sudah termasuk pajak-pajak / including taxes

2. Tjajo & Partner

Rp1.757.800.000 sudah termasuk pajak-pajak / including taxes

3. Justika Siar Publika

Rp31.680.000 sudah termasuk pajak-pajak / including taxes

4. Akmalsyah & Co.

- Rp354.900.000,- (Tidak termasuk PPN 10% / Excluding 10% VAT)
- Rp1.211.650.000,- (Tidak termasuk PPN 10% / Excluding 10% VAT)
- Rp2.520.000.000,- (Tidak termasuk PPN 10% / Excluding 10% VAT)
- Rp904.200.000,- (Tidak termasuk PPN 10% / Excluding 10% VAT)

5. Sugih Ardhian Pramono & Partners

- Rp845.501.250,-
- Rp1.323.784.000,-
- Rp929.500.000,-

6. Imanuddin Gazali & Partners

Rp936.650.000,-

7. Kiagus Ahmad & Associates

- Rp1.292.000.000,- (Termasuk PPN 10% / Including 10% VAT)
- Rp483.505.000,- (Termasuk PPN 10% / Including 10% VAT)

8. Dwi Untoro PH & Partners

Rp500.500.000,- (Termasuk PPN 10% / Including 10% VAT)

A photograph of three business professionals in a meeting room. A man with glasses, wearing a white shirt with blue stripes on the sleeve, is leaning over a desk, pointing at a tablet held by a woman in a blue shirt. Another woman in a blue shirt and a grey hijab is also looking at the tablet. They are all smiling and appear to be in a collaborative discussion. The room has large windows overlooking an industrial facility with cranes and structures.

04



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



Realisasi pendapatan usaha pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp10.453,61 miliar atau 1,33 persen di atas target revisi RKAP tahun 2020. Terealisasinya pendapatan usaha dari target Revisi RKAP 2020 disebabkan oleh realisasi pendapatan dari jasa kapal, TBAL, rupa-rupa dan terminal petikemas yang berhasil tercapai dengan optimal dari target Revisi RKAP 2020.

Realization of operating revenues in 2020 was recorded at Rp10,453.61 billion or 1.33 percent above the revised RKAP 2020 target. The realization of operating revenues from 2020 Revised RKAP target was due to the realization of revenue from ship services, TBAL, miscellaneous and container terminal services that have been achieved optimally from 2020 Revised RKAP target.





TINJAUAN UMUM

TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL

Sepanjang tahun 2020, kondisi makroekonomi berada dalam ketidakpastian karena Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 9 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa jenis baru coronavirus telah teridentifikasi, dan penyebarannya terus meluas seiring dengan berjalannya waktu. Pada tanggal 23 Januari 2020, pemerintah China secara resmi memberlakukan kebijakan *lockdown* dan restriksi yang ketat di kota Wuhan dalam rangka menekan laju persebaran virus Covid-19.

Setelah kota Wuhan, kasus-kasus Covid-19 mulai bermunculan di berbagai negara lain. Menurut data WHO, jumlah kasus positif Covid-19 di tingkat global sampai dengan akhir tahun 2020 telah mencapai lebih dari 82 juta jiwa, sedangkan kasus kematian global akibat Covid-19 tercatat lebih dari 1,8 juta jiwa.

GENERAL OVERVIEW

GLOBAL MACROECONOMIC REVIEW

Throughout 2020, the macroeconomic condition fell into uncertainty due to Covid-19 Pandemic that hit almost all countries in the world. The first Covid-19 case was discovered in the city of Wuhan, China, in December 2019. On January 9, 2020, the World Health Organization (WHO) announced the identification of a new type of coronavirus, of which spread continued to expand over time. On January 23, 2020, the Chinese government officially imposed a strict lockdown and restriction policy in the city of Wuhan in order to reduce the rate of the Covid-19 virus infection.

After Wuhan, Covid-19 cases began to appear in numerous other countries. According to WHO data, the number of Covid-19 positive cases at the global level until the end of 2020 reached more than 82 million, while the global death toll of Covid-19 were recorded at more than 1.8 million.

Jumlah Kasus Positif dan Kasus Kematian Covid-19 di Tingkat Global Per 31 Desember 2020 / Total Covid-19 Positive Cases and Death Toll at Global Level Per December 31, 2020		
Kawasan / Region	Jumlah Kasus Positif Covid-19 / Total Covid-19 Positive Cases	Jumlah Kematian Akibat Covid-19 / Total Covid-19 Death Toll
Amerika / America	35.393.388	855.297
Eropa / Europe	27.112.298	581.769
Asia Tenggara / Southeast Asia	11.961.922	183.032
Mediterania Timur / East Mediterranean	4.912.922	120.880
Afrika / Africa	1.895.467	42.157
Pasifik Barat / West Pacific	1.087.676	20.044
Jumlah / Total	82.363.673	1.803.179

Sumber: World Health Organization, diolah / Source: World Health Organization, processed

Untuk menangani penyebaran virus Covid-19, sejumlah negara mengikuti langkah China, yaitu memberlakukan kebijakan *lockdown*, *travel warning*, hingga restriksi yang ketat atau *social distancing*. Kondisi ini tentu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis serta aktivitas perdagangan dan ekspor impor dunia, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi global.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Monetary Fund* (IMF), dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2021, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 diproyeksikan mengalami resesi sebesar minus 3,5 persen. Estimasi pertumbuhan ekonomi tersebut terbilang kontras bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang tercatat berada di zona positif di level 2,8 persen.

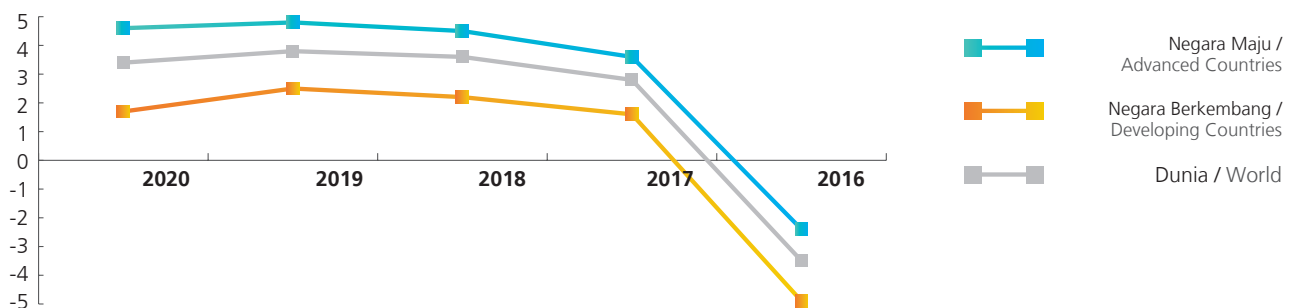
To mitigate the spread of Covid-19 virus, a number of countries followed China's measures of imposing lockdown policies, travel warnings, and strict restrictions or social distancing. Such condition certainly limited people's activities and mobility, including economic and business activities as well as world trade and export-import activities, thus negatively affecting the rate of global economic growth.

Based on data by the International Monetary Fund (IMF) in its report entitled *World Economic Outlook Update*, January 2021 edition, the global economic growth in 2020 was projected to be in a recession of minus 3.5 percent. The estimated economic growth was in contrast to the positive economic growth of 2019 at 2.8 percent.

Pertumbuhan Ekonomi Global (dalam %) /
Global Economic Growth (in %)

Negara/Kelompok Negara / Country/Group of Countries	2020	2019	2018	2017	2016
Dunia / World	(3,5)	2,8	3,6	3,8	3,4
Negara Maju / Advanced Countries	(4,9)	1,6	2,2	2,5	1,7
Amerika Serikat / United States	(3,4)	2,2	2,9	2,4	1,6
Eropa / Europe	(7,2)	1,3	1,9	2,5	1,9
Jepang / Japan	(5,1)	0,3	0,3	1,9	0,6
Negara Berkembang / Developing Countries	(2,4)	3,6	4,5	4,8	4,6
Asia / Asia	(1,1)	5,4	6,4	6,6	6,7
Tiongkok / China	2,3	6,0	6,6	6,8	6,7
India	(8,0)	4,2	6,8	7,2	8,2
Amerika Latin / Latin America	(7,4)	0,2	1,1	1,2	(0,6)
Eropa Timur / Eastern Europe	(2,8)	2,2	3,1	3,9	1,8
Timur Tengah dan Asia Tengah / Middle East and Central Asia	(3,2)	1,4	1,9	2,3	5,0
Afrika Sub Sahara / Sub-Saharan Africa	(2,6)	3,2	3,2	3,0	1,4

Sumber: *World Economic Outlook Update January 2021, IMF* / Source: World Economic Outlook Update January 2021, IMF

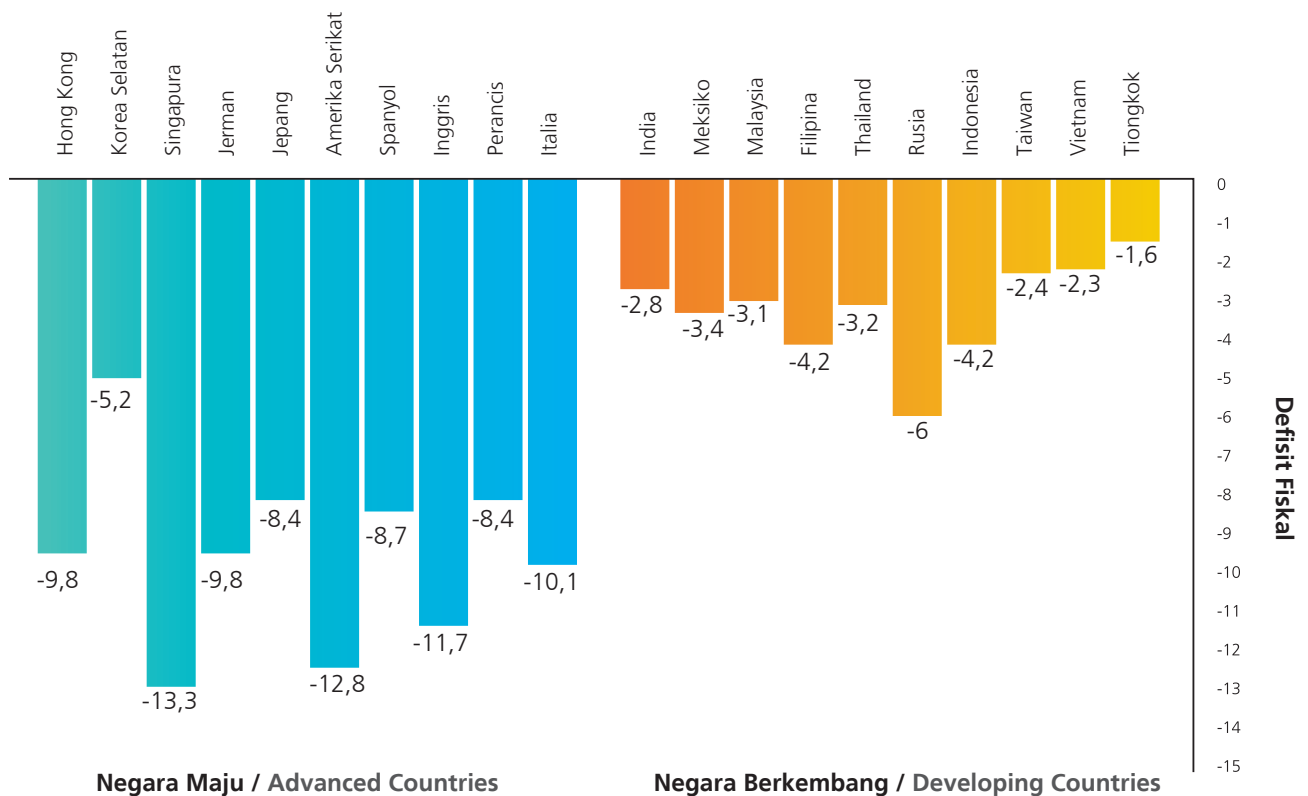


Secara keseluruhan, tingkat inflasi global tercatat terjaga di tahun 2020 akibat rendahnya permintaan, kebijakan moneter yang ekspansif, baik melalui penurunan suku bunga maupun melalui penambahan likuiditas untuk menjaga stabilitas, mengatasi ketahanan dan kecukupan likuiditas, serta mendukung penyaluran kredit. Sepanjang tahun 2020, stimulus fiskal telah dikucurkan berbagai negara yang secara total mencapai kisaran USD11,7 triliun atau mendekati 12 persen PDB dunia, dengan besaran respon negara maju lebih besar dibandingkan negara berkembang.

In general, the global inflation rate was sustained in 2020 due to low demand, expansive monetary policies, both by lowering interest rates and by injecting liquidity in order to maintain stability, resilience, and adequate liquidity, and to support lending. Throughout 2020, various countries disbursed fiscal stimulus which totals at USD11.7 trillion or almost 12 percent of world GDP, with a greater response rate in advanced countries than in developing countries.



Kenaikan Defisit Fiskal di Negara Maju dan Berkembang / Fiscal Deficit Increase in Advanced and Developing Countries



Sumber : Bloomberg, Kementerian Keuangan, diolah / Source: Bloomberg, Ministry of Finance, processed

Mayoritas negara memberikan dukungan stimulus moneter dan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Pada negara maju, dengan tingkat suku bunga kebijakan moneter yang mendekati nol persen, stimulus moneter ditempuh bank-bank sentral dengan injeksi likuiditas atau *Quantitative Easing (QE)* ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal tersebut diterapkan melalui program pembelian aset keuangan (*asset purchase program*) dari pasar baik obligasi pemerintah, obligasi swasta, maupun sekuritas kredit.

The majority of countries provided monetary and fiscal stimulus to encourage economic recovery from the impact of Covid-19 pandemic. In advanced countries, with interest rates from monetary policies nearing zero percent, central banks provided monetary stimulus by injecting liquidity or Quantitative Easing (QE) into the financial sector, particularly the banking sector. This was carried out through an asset purchase program in the market, which covered government bonds, private bonds, and credit securities.

Sedangkan pada kawasan negara berkembang, stimulus moneter dilakukan melalui kombinasi penurunan suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas ke perbankan dan pasar keuangan. Besarnya penurunan suku bunga disesuaikan dengan penurunan inflasi dan kestabilan nilai tukar mata uang. Sementara itu, QE umumnya dilakukan melalui operasi moneter.

In developing countries, monetary stimulus was provided through a combination of lowering policy interest rates and injecting liquidity into banks and financial markets. The amounts of interest rate reduction were adjusted to the decline in inflation and the stability of the currency exchange rate. On the other hand, QE was generally carried out through monetary operations.

Respon kebijakan moneter dan fiskal yang terintegrasi dilakukan oleh negara-negara untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Keberlanjutan dorongan stimulus diestimasikan dapat memberi dampak positif atas kegiatan konsumsi dan investasi, baik di negara maju maupun negara berkembang pada tahun yang akan datang.

TINJAUAN MAKROEKONOMI NASIONAL

Seperti yang telah diuraikan di atas, pandemi Covid-19 telah melanda sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Kasus Covid-19 pertama terjadi di Indonesia pada bulan Februari 2020 dan diumumkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, angka kasus positif terus meningkat di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 di tanah air yang terus meninggi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 30 Maret 2020 seperti yang diberlakukan oleh pemerintah China dan menetapkan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 13 April 2020.

Penerapan kebijakan PSBB dimaksudkan untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut antara lain pelarangan/pembatasan perjalanan keluar kota, pembatasan kapasitas moda transportasi, penutupan sementara pusat perbelanjaan, peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan sosial dan keagamaan, penutupan sementara tempat-tempat rekreasi dan hiburan, anjuran bagi perusahaan untuk menerapkan bekerja dari rumah dan tidak mengunjungi keramaian. Namun demikian, pemberlakuan kebijakan PSBB selama tahun 2020 cukup memberi tekanan yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami resesi hingga minus 2,07 persen (yoy), berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2018 yang masih berada di zona positif, masing-masing sebesar 5,02 persen dan 5,17 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau USD3.911,7.

Countries responded through integrated monetary and fiscal stimulus to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic. Continued support from this stimulus is estimated to bring positive impact on consumption and investment activities, both in advanced and developing countries in the coming year.

NATIONAL MACROECONOMIC REVIEW

As elaborated above, the Covid-19 pandemic hit numerous of countries in the world, including Indonesia. The first Covid-19 case occurred in Indonesia in February 2020 and was announced by the President of the Republic of Indonesia on March 2, 2020. Over time, the number of positive cases continues to increase in Indonesia. Thus, to reduce the rapidly increasing Covid-19 infection in the country, the Indonesian government implemented Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy on March 30, 2020, similar to the policy of the Chinese government, and announced the Non-Natural Disaster of Covid-19 Spread as a National Disaster in Presidential Decree No. 12 of 2020 signed by the President of the Republic of Indonesia on April 13, 2020.

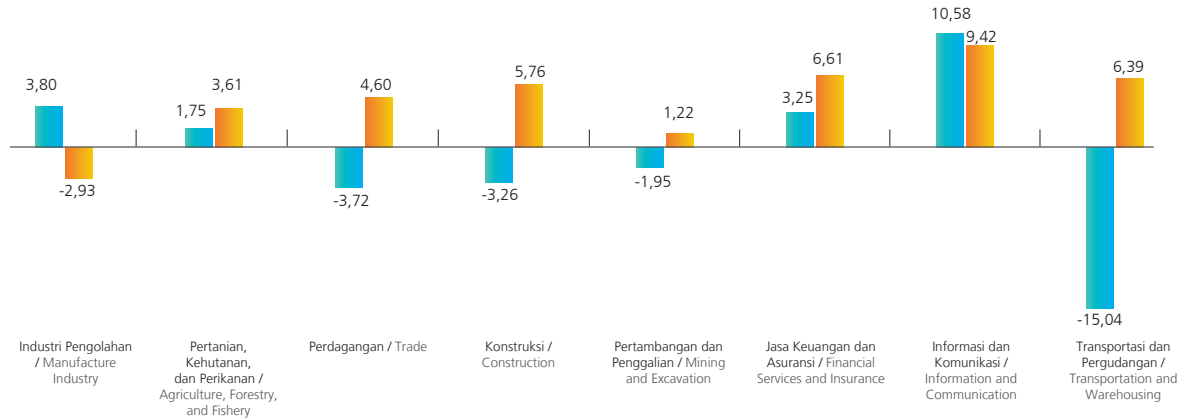
The implementation of PSBB policy was intended to limit the people's mobility in order to prevent the transmission of Covid-19 virus. Forms of this policy implementation include prohibition/restriction of intercity travel, limited capacity of transportation modes, temporary closure of shopping centers, temporary dismissal of schools and workplaces, social and religious restrictions, temporary closure of recreational and entertainment destinations, recommendation for companies to implement work from home, and discouraging crowds. Nevertheless, the implementation of PSBB policy during 2020 also put a great pressure on the national economic growth.

Based on data collected by Statistics Indonesia (SI), the Indonesian economy in 2020 experienced a recession of up to minus 2.07 percent (yoy), contrary to the positive economic growth in 2019 and 2018 at 5.02 percent and 5.17 percent, respectively. The Indonesian economy in 2020 as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp15,434.2 trillion, while the GDP per capita reached Rp56.9 million or USD3,911.7.

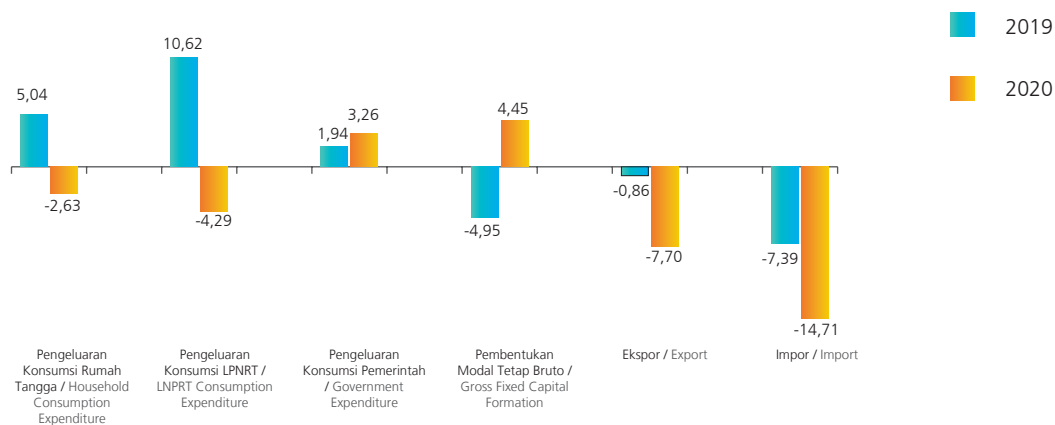


Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019 – 2020 Berdasarkan Sisi Produksi dan Pengeluaran / National Economic Growth 2019 – 2020 by Production and Expenditure

Menurut Produksi (Lapangan Usaha) / By Production (Business Sector)



Menurut Pengeluaran / By Expenditure



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah / Source: Statistics Indonesia, processed

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 15,04 persen. Hal tersebut terjadi karena Lapangan Usaha ini pada umumnya sangat terpengaruh dengan adanya Covid-19 akibat pemberlakuan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang secara signifikan mengurangi permintaan dan kebutuhan masyarakat untuk bepergian. Berdasarkan komposisi, Industri Pertanian, Perdagangan, Konstruksi dan Pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDB tahun 2020, yaitu 63,66 persen.

In terms of production, the lowest contraction of growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Sector by minus 15.04 percent. This Business Sector was overall strongly affected by Covid-19 with the enforcement of lockdown and social distancing policies that significantly reduced the demand and need for people to travel. Based on the composition, the Agriculture, Trade, Construction and Mining Industry provided the largest contribution to total GDP in 2020 at 63.66 percent.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, 89,40 persen total PDB tahun 2020 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di tahun 2020, hampir semua komponen pengeluaran mengalami kontraksi yang cukup besar, namun Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen yang terkontraksi paling dalam hingga mencapai minus 7,70 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa menjadi faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71 persen.

Cadangan devisa Indonesia sampai dengan akhir Desember 2020 tercatat sebesar USD135,9 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Membaiknya posisi cadangan devisa di akhir tahun 2020 dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor acuan yang mengukur stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

Selama tahun 2020, nilai tukar Rupiah secara rata-rata melemah 2,66 persen ke level Rp14.525 per dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah di tahun 2019 yang berada di level Rp14.139 per dolar Amerika Serikat. Pada awal munculnya kasus Covid-19 di Indonesia, Rupiah sempat tertekan hingga mencapai Rp16.575 per dolar AS pada tanggal 23 Maret 2020. Secara *point-to-point* (ptp), Rupiah terdepresiasi 1,19 persen dan ditutup di level Rp14.050 per dolar Amerika Serikat pada akhir 2020.

Faktor utama yang mempengaruhi depresiasi nilai tukar Rupiah adalah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat akibat kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua Pandemi Covid-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan kenaikan tensi geopolitik Amerika Serikat dan China. Kondisi tersebut dapat memicu para investor untuk menarik aliran modal di sejumlah negara, khususnya kelompok negara berkembang yang mengalami peningkatan risiko. Pembalikan modal tersebut kemudian menekan berbagai mata uang global, terutama mata uang dari kelompok negara berkembang, termasuk Rupiah Indonesia.

Meski nilai tukar Rupiah terdepresiasi secara tahunan, namun lebih terbatas bila dibandingkan dengan pelemahan beberapa mata uang negara berkembang lainnya, seperti Rand Afrika Selatan, Lira Turki, dan Real Brazil. Di sisi lain, volatilitas nilai tukar rupiah secara tahunan mengalami peningkatan dari 7,0 persen pada tahun 2019 menjadi 15,9 persen pada tahun 2020. Akan tetapi, angka ini masih lebih rendah dibandingkan

In terms of expenditure, 89.40 percent of total GDP in 2020 came from household consumption and investment. In 2020, almost all components of expenditure experienced a substantial contraction, but the component of goods and services exports saw the largest contraction reaching minus 7.70 percent. Meanwhile, goods and services imports reduced the contraction by 14.71 percent.

Indonesia's foreign exchange reserves as of the end of December 2020 were recorded at USD135.9 billion. The position of foreign exchange reserves was equivalent to the financing of 10.2 months of imports or 9.8 months of imports and payment of government foreign debt, and exceeded the international adequacy standard by approximately 3 months of imports. The improvement in foreign exchange reserves position at the end of 2020 was influenced by the withdrawal of government foreign loans and tax revenue. This will serve as a reference factor for a maintained economic stability and prospects.

In 2020, the Rupiah exchange rate weakened by 2.66 percent on average to Rp14,525 per US dollar, compared to the Rupiah exchange rate in 2019 at Rp14,139 per US dollar. At the initial discovery of Covid-19 case in Indonesia, Rupiah was pressured to Rp16,575 per US dollar on March 23, 2020. On a point-to-point basis (ptp), Rupiah depreciated 1.19 percent and closed at Rp14,050 per United States dollar by the end of 2020.

The main factor affecting the depreciation of Rupiah exchange rate was the heightened uncertainty of the global financial market due to concerns over the second wave of the Covid-19 Pandemic, the prospects for global economic recovery, and the rising geopolitical tension between the United States and China. Such condition may trigger investors to withdraw capital from several of countries, especially developing countries with higher risk. This withdrawal of capital put pressure on various global currencies, especially currencies from groups of developing countries, including the Indonesian Rupiah.

Although the Rupiah exchange rate depreciates on an annual basis, its depreciation is more restrained compared to several other currencies of developing countries, such as the South African Rand, Turkish Lira, and Brazilian Real. On the other hand, the annual volatility of rupiah exchange rate increased from 7.0 percent in 2019 to 15.9 percent in 2020. However, this figure remained lower than the average volatility in



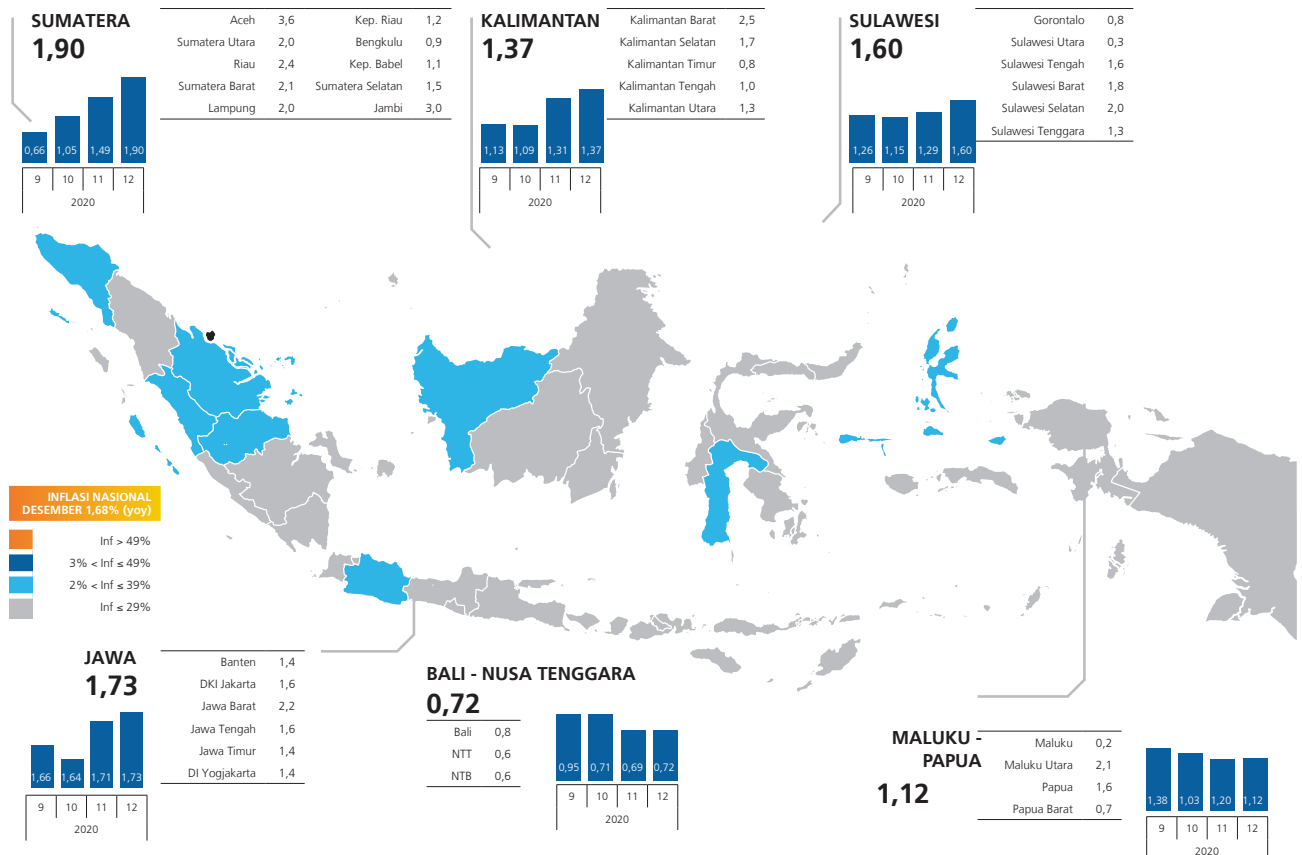
dengan rata-rata volatilitas kawasan negara berkembang, terutama Rand Afrika Selatan, Real Brazil, dan Lira Turki.

developing countries, especially the South African Rand, Brazilian Real, and Turkish Lira.

Sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan diiringi dengan pasokan yang memadai, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran BI sebesar 3,0 persen \pm 1 persen. Realisasi IHK tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat sebesar 1,60 persen (yoy), sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, dan dampak nilai tukar terhadap inflasi yang menurun. Selain itu, inflasi kelompok *administered prices* juga tercatat rendah sebesar 0,25 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya Pemerintah untuk menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat. Sejalan dengan tingkat inflasi inti dan *administered prices* yang masih rendah, inflasi kelompok *volatile food* masih terkendali sebesar 3,62 persen (yoy).

Due to insufficient demand coupled with adequate supply, the Consumer Price Index (CPI) inflation in 2020 was recorded at 1.68 percent (yoy) and fell below the BI target range of 3.0 percent \pm 1 percent. The CPI realization in 2020 was influenced by core inflation which was recorded at 1.60 percent (yoy), in line with weak domestic demand, consistency of BI policy in directing inflation expectations towards the target range, and the impact of exchange rate on declining inflation. In addition, administered prices inflation was also low at 0.25 percent (yoy), which was influenced by the limited mobility of the people and the Government's efforts to reduce energy prices to boost people's purchasing power. Proportional to the low level of core inflation and administered prices inflation, inflation in the volatile food category remained under control at 3.62 percent (yoy).

Peta Inflasi Daerah Tahun 2020 / 2020 Regional Inflation Map



Sumber: BPS, Bank Indonesia / Source: SI, Bank Indonesia

Pada bulan Desember 2020, hampir seluruh wilayah mengalami peningkatan inflasi dibandingkan pencapaian bulan sebelumnya, terkecuali Maluku-Papua yang mengalami perlambatan menjadi 1,12 persen (yoy) dari nilai sebelumnya sebesar 1,20 persen (yoy). Mayoritas provinsi mencatatkan inflasi tahunan yang lebih rendah dari batas bawah 2 persen dan terdapat 9 (sembilan) daerah dengan inflasi tahunan yang tercatat lebih rendah dari 1 persen (yoy).

Pemerintah berupaya untuk mengakomodasi pelaku usaha nasional melalui peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat selama Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, realisasi program PEN tercatat sebesar 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun atau mencapai Rp579,78 triliun. Adapun realisasi alokasi dana program PEN tersebut terdiri dari sektor Kesehatan sebesar Rp63,51 triliun, Sektor K/L dan Pemda sebesar Rp66,59 triliun, Perlindungan Sosial sebesar Rp220,39 triliun, Insentif Usaha sebesar Rp56,12 triliun, Dukungan UMKM sebesar Rp112,44 triliun dan Pembiayaan BUMN dan Korporasi sebesar Rp60,73 triliun.

Selain itu, selama tahun 2020 Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko Covid-19 terhadap perekonomian dan mendorong program PEN. Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut meliputi 6 (enam) aspek berikut ini:

1. Penurunan suku bunga kebijakan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 5 (lima) kali dalam 2020 sebesar 125 bps menjadi 3,75 persen. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah rendahnya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah.
2. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
3. Pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) dengan injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Pelonggaran moneter dilakukan antara lain melalui ekspansi moneter dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM).

In December 2020, almost all regions saw increased inflation compared to the previous month's achievement, with the exception of Maluku-Papua which experienced a slowdown to 1.12 percent (yoy) from the previous figure at 1.20 percent (yoy). The majority of provinces recorded annual inflation that was less than the bottom limit of 2 percent and there were 9 (nine) regions with annual inflation lower than 1 percent (yoy).

The government sought to accommodate national businesses through the National Economic Recovery (PEN) program which aims to protect, maintain, and improve the people's economic capacity during Covid-19 Pandemic. In 2020, the realization of the PEN program was recorded at 83.4 percent of the ceiling of Rp695.2 trillion, or reaching Rp579.78 trillion. The realized funding of the PEN program was allocated to the Health sector amounting to Rp63.51 trillion, Ministry/ Institution Sectors and Regional Government Rp66.59 trillion, Social Protection Rp220.39 trillion, Business Incentives Rp56.12 trillion, MSME Support Rp112.44 trillion, and SOE and Corporate Financing Rp60.73 trillion.

In addition, during 2020 Bank Indonesia took various policies to mitigate the risk of Covid-19 to the economy and promote the PEN program. The strengthening of Bank Indonesia's policy combination covers the following 6 (six) aspects:

1. The policy of BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) cut by 5 (five) times in 2020 by 125 bps to 3.75 percent. This decision was in line with the need to boost economic growth amidst low inflation and the relatively stable Rupiah exchange rate. This Bank Indonesia policy interest rate is the lowest level in history.
2. Rupiah exchange rate stabilization policy through intervention on the spot market, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), and purchases of Government Securities (SBN) from the secondary market, amid persisting global financial market uncertainty.
3. Monetary easing (*Quantitative Easing*) by injecting large amounts of liquidity into banks to support the national economic recovery program. Monetary easing is carried out through, among others, monetary expansion and a reduction in the minimum statutory reserve (GWM).



4. Pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi perekonomian, seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio *Loan to Value* (LTV) atau uang muka penyaluran kredit termasuk untuk kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.
5. Penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN Tahun 2020 guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar perdana dan secara langsung. Selain itu, penyediaan pendanaan bagi LPS untukantisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme *repo* dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 2020).
6. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial Pemerintah, perluasan QRIS, serta kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk kemudahan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.
4. Relaxing macroprudential policies to encourage credit and financing for the economy, such as the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), Loan to Value (LTV) ratio, or advances for lending, including for environmentally sound motor vehicle loans.
5. Provision of funding and burden sharing for the 2020 State Budget to support the national economic recovery program by purchasing SBN from the primary market and directly. In addition, the provision of funding for Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) to anticipate and handle problematic banks through the repo mechanism and/or purchase of SBN (PP No. 33 of 2020).
6. Accelerate the digitalization of payment systems based on the Payment System Blueprint (BSPI) 2025 to expand the digital economy and finance as part of economic recovery efforts, through electrification of Government social assistance distribution, expansion of QRIS, and collaboration between banks and fintech for easy access for MSMEs and the public to economic and financial services.

TINJAUAN INDUSTRI

TINJAUAN INDUSTRI TRANSPORTASI

Sektor transportasi nasional sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Pertumbuhan sektor usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 15,04 persen pada tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020 yaitu sebesar minus 0,64 persen.

INDUSTRY REVIEW

TRANSPORTATION INDUSTRY REVIEW

The national transportation sector throughout 2020 experienced a growth contraction. Based on data compiled by Statistics Indonesia, the growth of the transportation and warehousing business sector contracted by 15.04 percent in 2020 compared to 2019. The transportation and warehousing sector were the largest contributor to the decline in 2020 Gross Domestic Product (GDP) by minus 0.64 percent.

Jumlah Penumpang Moda Transportasi di Indonesia Tahun 2019-2020 (dalam ribuan orang) / Total Passengers of Transportation Means in Indonesia 2019-2020 (in thousands of people)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Angkutan Udara Domestik / Domestic Air Transportation	32.392	76.685	(44.293)	(57,76%)
Angkutan Udara Internasional / International Air Transportation	3.656	18.855	(15.199)	(80,61%)
Angkutan Kereta Api / Rail Transportation	186.128	426.877	(240.749)	(56,40%)
Angkutan Laut / Sea Transportation	14.202	23.932	(9.730)	(40,66%)

(sumber: BPS / source: SI)

BPS mencatatkan 3 (tiga) sektor transportasi penyumbang kontraksi pertumbuhan di tahun 2020, yaitu angkutan udara, angkutan rel dan angkutan laut. Transportasi udara di tahun 2020 mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar minus 53,01 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah penumpang domestik dan internasional.

SI recorded 3 (three) transportation sectors contributing to growth contraction in 2020, namely air transportation, rail transportation and sea transportation. Air transportation in 2020 recorded a growth contraction of minus 53.01 percent. This was due to the decrease in the number of domestic and international passengers. Total domestic plane passengers

Jumlah penumpang pesawat domestik di tahun 2020 hanya tercatat sebanyak 32,4 juta orang, turun 57,76 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 76,7 juta orang. Tren penurunan yang lebih signifikan ditunjukkan oleh penerbangan internasional yang mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 3,7 juta orang atau turun 80,61 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 18,7 juta orang.

Realisasi pertumbuhan angkutan kereta di tahun 2020 menjadi penyumbang kedua tertinggi terhadap penurunan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar minus 42,34 persen. BPS mencatatkan jumlah penumpang kereta api sebanyak 186,1 juta orang di tahun 2020 atau terkontraksi sebesar minus 56,40 persen sepanjang tahun 2020.

BPS mencatatkan angkutan laut hanya terkontraksi sebesar minus 4,57 persen pada tahun 2020. Namun di sisi lain, jumlah penumpang angkutan laut turun menjadi 14,2 juta orang atau turun sebesar minus 40,66 persen di tahun 2020.

Penurunan pertumbuhan sektor transportasi di tahun 2020 disebabkan oleh berkurangnya mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 untuk menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan penularan virus tersebut. Pemerintah juga berupaya untuk menghambat laju penularan virus Covid-19 melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana kebijakan tersebut juga membatasi penggunaan moda transportasi umum.

TINJAUAN MARITIM

Transportasi maritim memegang peranan penting dalam memastikan berjalannya aktivitas perdagangan untuk menjaga ketersediaan bahan baku pokok dan konektivitas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dalam laporannya yang berjudul "*Review of Maritime Transport 2020*", di tengah rentannya kondisi perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, perubahan paradigma dalam pengelolaan risiko untuk menjaga ketahanan usaha yang kuat menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan perlu diintegrasikan dalam proses bisnis pelaku usaha dan pembuat kebijakan di industri maritim. Sejumlah faktor utama yang memiliki implikasi kebijakan yang luas pada transportasi maritim dan perdagangan selama masa pandemi di antaranya, pergeseran pola globalisasi dan rantai pasokan, pola konsumsi masyarakat yang baru, kenaikan signifikan atas penggunaan dokumentasi berbasis elektronik, penyesuaian standar di industri maritim, semakin pentingnya keamanan digital dan kebijakan global yang terkoordinasi.

in 2020 were only 32.4 million people, down 57.76 percent compared to 2019 at 76.7 million people. A more significant downward trend was evident in international airlines which recorded 3.7 million passengers or a decrease of 80.61 percent compared to 2019 at 18.7 million people.

The realization of rail transportation growth in 2020 was the second highest contributor to the declining growth in the transportation and warehousing sector with a contraction of growth of minus 42.34 percent. SI recorded total train passengers at 186.1 million people in 2020 or contracted by minus 56.40 percent throughout 2020.

SI noted that sea transportation only contracted by minus 4.57 percent in 2020. On the other hand, the number of sea transportation passengers fell to 14.2 million people or down by minus 40.66 percent in 2020.

The declining growth of the transportation sector in 2020 was due to reduced mobility of the people during the Covid-19 pandemic to avoid activities that may cause transmission of the virus. The government also sought to inhibit Covid-19 transmission rate by enforcing Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy, which also restricted the use of public transportation.

MARITIME REVIEW

Maritime transportation plays an important role in sustaining trade activities to maintain the availability of basic raw materials and connectivity. Based on data compiled by the *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* in its report entitled "*Review of Maritime Transport 2020*", amidst precarious economic conditions caused by the Covid-19 pandemic, a paradigm shift in risk management to maintain strong business resilience is inevitable and needs to be integrated in the business processes of business entities and policy makers in the maritime industry. A number of main factors with broad policy implications for maritime transportation and trade during the pandemic include shifting patterns of globalization and supply chains, new patterns of public consumption, a significant increase in the use of electronic-based documentation, adjustment of standards in the maritime industry, the increasing importance of digital security and coordinated global policies.



Percepatan pergeseran pola globalisasi dan rantai pasokan dapat dilihat dari menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara dan pola regionalisasi perdagangan yang cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari rantai pasokan yang lebih singkat (*near shoring, reshoring*) dan adanya surplus stok/inventaris. Investasi pada pembangunan gudang dan tempat penyimpanan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam menjaga ketersediaan stok barang. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada *e-commerce* selama masa pandemi semakin meningkatkan permintaan akan gudang dan tempat penyimpanan untuk menjaga pasokan barang.

Semakin meningkatnya proses digitalisasi dan inovasi teknologi akan mempengaruhi rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk transportasi dan logistik. Oleh karena itu penerapan solusi teknologi dan adopsi kemajuan terbaru di bidang teknologi dalam kegiatan operasional transportasi maritim menjadi suatu keharusan. Masa pandemi ini telah membuktikan bahwa industri yang memiliki fleksibilitas dalam mengadopsi kemajuan teknologi, seperti *commerce* dan *online platforms*, akan dapat lebih mempertahankan kelangsungan usahanya.

Proses interaksi secara digital dan proses berbagi informasi merupakan faktor yang penting dalam menjaga kelangsungan transportasi maritim. Hal tersebut akan sangat menunjang kesinambungan kegiatan operasional transportasi dan proses perdagangan, sekaligus mengurangi proses risiko penularan virus. Pemerintahan di berbagai negara telah berupaya untuk menjaga kelangsungan operasi pelabuhan dan mempercepat penggunaan teknologi baru. Terlebih, asosiasi industri maritim telah secara aktif mempromosikan penggunaan proses digital.

Kerja sama dan koordinasi internasional akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha di seluruh dunia dapat dengan mudah menerima dan menggunakan sistem yang memadai dalam memproses dokumen legal dalam bentuk elektronik. Namun perusahaan kecil dan menengah yang berasal dari negara berkembang memiliki kemungkinan atas kurangnya akses teknologi dan sarana yang diperlukan untuk menerapkan sistem teknologi yang memadai.

Penyesuaian standar operasi juga menjadi semakin penting bagi perusahaan pelabuhan dan pelayaran. Namun untuk mendapatkan keuntungan dari penyesuaian standar, diperlukan data yang sebanding, dan adanya standarisasi jenis kapal, indikator kinerja utama, serta definisi dan parameter yang seimbang. Sebagai contoh, dalam jangka panjang,

The acceleration of the shift in globalization and supply chain patterns is evident in the declining Gross Domestic Product (GDP) in various countries and the increasing pattern of trade regionalization. This is visible in a shorter supply chain (*near shoring, reshoring*) and a surplus in stock/inventory. Investments in the construction of warehouses and storage areas are important to maintain the availability of item stocks. Changes in public consumption patterns that increasingly depend on *e-commerce* during the pandemic have increased the demand for warehouses and storage areas to maintain the supply of goods.

The rapid progress of digitalization and technology innovation will affect the supply chain and distribution network, including transportation and logistics. Therefore, the application of technology solutions and the adoption of the latest advances in technology in maritime transportation operations became a necessity. This pandemic period has proven that industries that have the flexibility to adopt technological advances, such as *commerce* and *online platforms*, will be able to further sustain their business continuity.

The process of digital interaction and information sharing is an important factor in maintaining the continuity of maritime transportation. This will greatly support the continuity of transportation operational activities and the trade process, as well as reduce the risk of virus transmission. Governments in various countries have made efforts to maintain the continuity of port operations and accelerate the use of new technology. Moreover, maritime industry associations have been actively promoting the use of digital processes.

International cooperation and coordination are necessary to ensure that businesses around the world can easily receive and use adequate systems for processing legal documents in electronic form. However, small and medium enterprises originating from developing countries are likely to lack access to technology and the means necessary to implement an adequate technology system.

Adjustment of operating standards has also become increasingly important for port and shipping companies. However, to benefit from standard adjustment, comparable data are required, and standardization of vessel types, key performance indicators, and balanced definitions and parameters. For example, in the long term, the UNCTAD

kartu skor kinerja pelabuhan UNCTAD berpotensi untuk dijadikan standar industri sehingga dapat menjadi tolak ukur yang dapat diterima secara global. Standarisasi tersebut akan membantu sektor pelabuhan untuk kian menjaga tingkat efisiensinya.

Di tengah peningkatan penggunaan teknologi, masih banyak perusahaan transportasi maritim yang belum memiliki level keamanan digital (*cybersecurity*) yang memadai, disebabkan oleh pembatasan aktivitas perjalanan, penjagaan jarak sosial dan resesi ekonomi. Dengan semakin membaiknya koneksi antar kapal dan pelabuhan dalam jaringan informasi teknologi, implementasi dan penguatan langkah-langkah *cybersecurity* harus diprioritaskan untuk menjaga ketahanan level pasokan barang dan jasa.

Pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya kebijakan sistemik dan koordinasi di tingkat global untuk menangani gangguan lintas batas. Hal tersebut diilustrasikan oleh ajakan bertindak oleh *Covid-19 Task Force on Geopolitical Risks and Responses of the Sustainable Ocean Business Action Platform of the United Nations Global Compact* yang merekomendasikan tindakan politik untuk menjaga rantai pasokan global terkait transportasi maritim.

Terdapat 6 (enam) bidang prioritas terkait kebijakan dalam menanggapi pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh transportasi maritim dan perdagangan pada negara berkembang.

1. Dukungan perdagangan yang kuat dengan menghindari ketegangan perdagangan dan aksi proteksionisme, khususnya pembatasan ekspor untuk barang-barang pokok di saat krisis. Selanjutnya, tindakan non-tarif dan kendala lainnya yang dapat menghambat proses perdagangan harus dibenahi, termasuk memfasilitasi aktivitas perdagangan dan otomatisasi bea cukai.
2. Membantu membentuk kembali globalisasi untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan kegiatan manufaktur internasional dan rantai pasokan yang terganggu oleh pandemi Covid-19.
3. Mempromosikan kebijakan yang mendukung proses transformasi digital yang dapat memperkuat ketahanan rantai pasokan dan jaringan transportasi maritim. Investasi pada penerapan proses digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional perdagangan.
4. Memanfaatkan data untuk memonitor dan memberikan tanggapan kebijakan yang lebih terukur dengan memakai informasi yang bersifat *real-time*, seperti data pergerakan kapal, lalu lintas laut, dan informasi mengenai jadwal kapal untuk memberikan peringatan dini.

port performance scorecard has the potential to become an industry standard so that it can become a globally acceptable benchmark. This standardization will help the port sector to further maintain its level of efficiency.

In the midst of increasing use of technology, many maritime transportation companies still do not have an adequate level of digital security (*cybersecurity*) due to travel restrictions, social distancing, and economic recession. As connection between ships and ports in information technology networks improves, the *cybersecurity* implementation and enhancement measures must be prioritized to maintain the supply of goods and services.

The Covid-19 pandemic has emphasized the importance of systemic policies and coordination at the global level to deal with trans-boundary disruptions. This is illustrated by the call to action by Covid-19 Task Force on Geopolitical Risks and Responses of the Sustainable Ocean Business Action Platform of the United Nations Global Compact, which recommended political action to safeguard global supply chains related to maritime transportation.

There were 6 (six) priority areas related to policies in response to the Covid-19 pandemic and the various challenges faced by maritime transportation and trade in developing countries.

1. Strong trade support by avoiding trade tensions and protectionist actions, particularly restrictions on exports of basic goods in times of crisis. Furthermore, nontariff measures and other obstacles that could hinder the trade process must be addressed, including facilitating trade activities and customs automation.
2. Help reshape globalization to ensure the sustainability and resilience of international manufacturing activities and supply chains which were disrupted by the Covid-19 pandemic.
3. Promote policies that support digital transformation process that can strengthen the resilience of maritime supply chains and transportation networks. Investing in the implementation of the digitalization process will increase efficiency and productivity in trading operations.
4. Utilize data to monitor and provide more measurable policy responses by using real-time information, such as data on vessel movements, sea traffic, and information on vessel schedules to provide early warning.



5. Menciptakan sistem transportasi maritim yang kuat melalui investasi pada manajemen risiko dan kesiapan tanggap darurat yang melebihi krisis pandemi Covid-19. Visibilitas moda transportasi *door-to-door* dibutuhkan untuk mempertahankan rantai pasokan dan manajemen risiko yang memadai melalui perumusan rencana yang menetapkan tindakan dan protokol dalam menghadapi krisis dan pada saat bersamaan memastikan kelangsungan usaha.
6. Mempertahankan momentum keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang pada saat ini telah dilakukan dengan mengurangi tingkat emisi karbon dari kapal dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Upaya menjaga lingkungan tersebut dapat didukung oleh pemerintah melalui paket stimulus langsung untuk menjaga proses rehabilitasi lingkungan. Selain itu, menjaga konektivitas antar pulau kecil dan berkembang tetap menjadi program prioritas dikarenakan infrastruktur transportasi maritim pada pulau-pulau tersebut merupakan jalur utama yang memastikan ketahanan ekonomi bagi penduduknya, berupa aktivitas perdagangan, pariwisata dan ketahanan pangan dan energi.

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan, bukan hanya terkait globalisasi, namun juga terhadap solidaritas dan kolaborasi antar negara. Tingkat kesuksesan pada program-program prioritas tersebut sangat bergantung pada tingkat efektivitas kolaborasi yang dapat mengkoordinasikan bauran kebijakan antar negara. Dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa dukungan finansial, kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas pembangunan dapat diberikan kepada negara berkembang, khususnya kelompok negara yang rentan.

TINJAUAN INDUSTRI PELABUHAN

Pandemi Covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap kinerja industri di hampir seluruh sektor, tak terkecuali sektor pelabuhan. Berbagai kegiatan operasional pelabuhan tersibuk dan terpenting di dunia dibatasi guna menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga menyebabkan penurunan trafik logistik. Bahkan pelabuhan yang memiliki jalur pelayaran utama di dunia, seperti Pelabuhan di Amerika Serikat dan China, juga tidak mampu mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 ini hingga periode kuartal kedua tahun 2020. Berikut ini merupakan *hub* pelabuhan terbesar di dunia yang memiliki dampak terbesar akibat virus corona.

5. Create a strong maritime transportation system through investment in risk management and emergency response preparedness that goes beyond the Covid-19 pandemic crisis. Visibility of door-to-door modes of transportation is required to maintain adequate supply chain and risk management through the formulation of plans that define actions and protocols in the face of crises and at the same time ensure business continuity.
6. Maintain the momentum of sustainability and adaptation to climate change which is currently being done by reducing the level of carbon emissions from ships and reducing the use of fossil fuels. Efforts to protect the environment can be supported by the government through direct stimulus packages to safeguard the environmental rehabilitation process. In addition, maintaining connectivity between small and developing islands remains a priority program because maritime transportation infrastructure on these islands is the main route that ensures economic resilience for its residents, in the form of trade activities, tourism, as well as food and energy security.

The Covid-19 pandemic is a challenge, not only related to globalization, but also to solidarity and collaboration between countries. The success of these priority programs is highly dependent on the effectiveness of collaboration that can coordinate the policy mix between countries. In facing future challenges, policy makers must ensure that financial support, technical cooperation, and capacity building for development can be provided to developing countries, especially the group of vulnerable countries.

PORT INDUSTRY REVIEW

The Covid-19 pandemic brought significant impacts on industrial performance in almost all sectors, including the port sector. The operational activities of the busiest and most important ports in the world were limited in order to restrain the spread of Covid-19, thus causing a decrease in logistics traffic. Even ports at major global shipping routes, such as ports in the United States and China, were also unable to overcome the Covid-19 Pandemic problem until the second quarter of 2020. The following are the largest port hubs in the world with most significant impacts of the corona virus.

1. Pelabuhan Long Beach dan Los Angeles

Pelabuhan kembar yang berlokasi di pantai barat Amerika Serikat merupakan pelabuhan yang paling terkena dampak dari virus corona di wilayah Amerika Utara, meskipun kasus positif Covid-19 hanya berkembang di *hub* pantai barat lainnya dan kota New York, Amerika Serikat. Kedua pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan tersibuk di Amerika Serikat dan memegang peranan penting dalam perdagangan Amerika Serikat dan China. Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach mengalami penurunan trafik YoY pada bulan Januari 2020, masing-masing sebesar 5,4 persen dan 4,6 persen.

Selama triwulan pertama 2020, trafik di kedua pelabuhan tersebut terus mengalami penurunan secara kumulatif, tercermin dari turunnya *throughput* Pelabuhan Long Beach sebesar 9,5 persen menjadi 2.202.650 TEU dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh dampak dari pemberlakuan kebijakan *lockdown* pelabuhan tersebut. Menurunnya aktivitas impor dan ekspor akibat penurunan aktivitas produksi dan permintaan konsumen selama periode *stay at home* turut menyebabkan banyaknya pembatalan sejumlah jadwal pelayaran di kedua pelabuhan tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas perekonomian dan bisnis global berangsur pulih secara bertahap atau dikenal dengan era *New Normal*. Kondisi ini tentu mempengaruhi perbaikan kinerja di kedua pelabuhan tersebut. Berdasarkan data dari PTI, *throughput* pelabuhan di kuartal keempat 2020 tercatat sebesar 2.406.010 TEU, meningkat 23 persen dari periode yang sama di tahun 2019 dan jauh melampaui dari *throughput* kuartal ketiga 2020 yang hanya mencapai 131740 TEU. Aktivitas perdagangan, impor, dan ekspor juga mengalami pertumbuhan pada bulan Desember 2020, masing-masing sebesar 22,6 persen, 25,6 persen, dan 5,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Kontainer kosong yang kembali ke luar negeri mengalami lonjakan hingga 26,3 persen dari Desember 2019 sehingga menjadi 263.852 TEU di akhir tahun 2020.

2. Pelabuhan Shanghai

China adalah negara maritim terbesar pertama yang menderita akibat Pandemi Covid-19, terlihat dari kinerja ekspor yang jatuh pada akhir 2019 dan awal 2020. Sebelum pandemi, China menyumbang 14 persen dari total kargo kontainer global. Pada bulan Februari 2020, jumlah *call* di pelabuhan China turun 30 persen (yoy)

1. Ports of Long Beach and Los Angeles

The twin ports located on the west coast of the United States were the ports most affected by the corona virus in the North America region, although Covid-19 positive cases only developed in other hubs in the west coast and New York City, United States. These two ports are the busiest ports in the United States and hold an important role in the trade between the United States and China. The Ports of Los Angeles and Long Beach experienced a year-on-year decrease in traffic in January 2020 by 5.4 percent and 4.6 percent, respectively.

During the first quarter of 2020, traffic at the two ports saw a cumulative decline as reflected in the decline in Long Beach Port throughput by 9.5 percent to 2,202,650 TEU compared to the same period in 2019. This was due to the impact of lockdown policy implementation by the port. The drop in import and export activities due to decreasing production activity and consumer demand during the stay-at-home period contributed to the large number of cancellations of shipping schedules at the two ports.

Over time, global economic and business activities gradually recovered into the New Normal era. This condition certainly influenced the performance improvement in the two ports. Based on data from PTI, the port throughput in the fourth quarter of 2020 was recorded at 2,406,010 TEU, an increase of 23 percent from the same period in 2019 and far exceeding the third quarter of 2020 throughput which only reached 131,740 TEU. Trade, import and export activities by December 2020 also grew by 22.6 percent, 25.6 percent, and 5.6 percent respectively, compared to the same period in 2019. Empty containers returned to overseas surged by up to 26.3 percent from December 2019 to 263,852 TEU by the end of 2020.

2. Shanghai Port

China was the first largest maritime country to suffer from the Covid-19 pandemic, as seen from its falling export performance in late 2019 and early 2020. Before the pandemic, China accounted for 14 percent of total global container cargo. In February 2020, the number of calls at Chinese ports fell 30 percent (yoy) due to the



akibat semakin bertambahnya kasus positif Covid-19 di negara tersebut, sehingga banyak kapal komersial yang mengalihkan lalu lintas ke negara lain di Asia Tenggara.

Pelabuhan Shanghai merupakan pelabuhan tersibuk di China dan dunia yang juga terkena dampak signifikan akibat Covid-19. Selama tahun 2020, Pelabuhan Shanghai telah menangani 43,5 juta ton kargo, turun 0,5 persen dari tahun 2019. Menurut otoritas pelabuhan, *throughput* peti kemas pada bulan Desember 2020 melebihi 3,6 juta TEU.

Meskipun kinerja di Pelabuhan Shanghai kurang baik pada tahun 2020, namun sebagian besar pelabuhan di China berangsur pulih dari pandemi Covid-19, tercermin dari meningkatnya marjinal *throughput* sebesar 0,8 persen (yoy). Pelabuhan Shenzhen menjadi pelabuhan China yang menunjukkan performa terbaik dalam periode Januari hingga November 2020, dengan pertumbuhan *throughput* mencapai 15,3 persen (yoy).

Di tengah Pandemi Covid-19, rencana pembangunan ekonomi utama China, yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) terus berlanjut. Pada bulan Maret, Komisi Pembangunan dan Reformasi China mengatakan bahwa Kereta Api *Express* yang menghubungkan China dengan Eropa telah pulih dan kembali ke kapasitas 90 persen saat lalu lintas dilanjutkan. Pada bulan Mei 2020, Pelabuhan Hamburg meluncurkan layanan kereta api baru ke China, yaitu *Shandong – Europe Express*. Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas pelabuhan di China akan berangsur membaik.

3. Pelabuhan Singapura

Pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan tersibuk kedua di dunia dan mitra dagang terbesar China. Pada tahap awal wabah Covid-19, Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan utama di dunia yang terdampak, dan menjadi salah satu pelabuhan yang pertama bereaksi dan menerapkan prosedur pemeriksaan suhu yang ketat pada pelaut dari kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut. Beberapa pengunjung dari China, khususnya yang berasal dari Provinsi Hubei dan Wuhan juga tidak diizinkan masuk ke negara tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Maritime and Port Authority of Singapore*, total *throughput* peti kemas tahun 2020 tercatat sebesar 590.738 TEU, turun 5,71 persen dari tahun 2019 sebesar 626.521 TEU. Penurunan tersebut juga dialami oleh *throughput* kontainer sebesar 0,87 persen dari tahun 2019 sebesar 37.196 TEU menjadi 36.871 TEU di tahun 2020.

increasing number of positive cases of Covid-19 in the country, which diverted many commercial vessels to other countries in Southeast Asia.

The port of Shanghai is the busiest port in China and the world which was significantly affected by Covid-19 as well. During 2020, the Port of Shanghai handled 43.5 million tons of cargo, a decrease of 0.5 percent from 2019. According to port authorities, the container throughput in December 2020 exceeded 3.6 million TEUs.

Despite underperformance at the Port of Shanghai in 2020, most ports in China were gradually recovering from the Covid-19 pandemic as reflected in the marginal throughput increase by 0.8 percent (yoy). The Port of Shenzhen was the best performing Chinese port in the January to November 2020 period, with throughput growth reaching 15.3 percent (yoy).

In the midst of the Covid-19 Pandemic, China's main economic development plan, namely the Belt and Road Initiative (BRI) continued. In March, the China Development and Reform Commission stated that the Express Railway connecting China with Europe had recovered and returned to 90 percent capacity as traffic resumed. In May 2020, the Port of Hamburg launched a new rail service to China, namely the Shandong – Europe Express. This condition indicates that port activity in China will gradually improve.

3. Port of Singapore

The port of Singapore is the second busiest port in the world and China's largest trading partner. In the early stages of the Covid-19 outbreak, the Port of Singapore was one of the world's major ports affected, and was one of the first to react and implement strict temperature inspection on sailors from vessels entering the port. A number of visitors from China, especially those from Hubei and Wuhan Provinces, were also not allowed to enter the country.

Based on data collected by the Maritime and Port Authority of Singapore, the total container throughput in 2020 was recorded at 590,738 TEU, down 5.71 percent from that of 2019 at 626,521 TEU. This decline also occurred in container throughput by 0.87 percent from 37,196 TEU in 2019 of to 36,871 TEU in 2020.

Pandemi Covid-19 berdampak pula terhadap pembangunan mega proyek Pelabuhan Tuas Singapura. Proyek Pelabuhan Tuas merupakan proyek terbesar di industri maritim dan akan menjadi pelabuhan terbesar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pelabuhan Singapura mengubah strategi dengan tidak menganggap *customer* sebagai “pelanggan” saja, namun juga menjadikan mereka sebagai “mitra”. Untuk pengembangan proyek ke depannya ditawarkan kepada mitra/pelanggan untuk *join partnership* dalam rangka mengembangkan pengoperasian selanjutnya di pelabuhan tersebut, sehingga skema pengembangan terminal/pelabuhan menjadi *sharing risk* dan *sharing benefit*.

Di level nasional, kinerja sektor pelabuhan sempat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19, namun tidak berlangsung lama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS atas total barang dalam negeri di pelabuhan utama dalam satuan ton, jumlah barang yang dibongkar pada Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak dan Makassar mencatatkan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020, khususnya pada Pelabuhan Belawan yang turun sebesar 9,09 juta ton atau 81,51 persen. Di sisi lain, jumlah barang yang dibongkar pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar menunjukkan tren peningkatan masing-masing sebesar 1,55 persen dan 2,98 persen.

Jumlah barang yang dimuat di tahun 2020 pada seluruh pelabuhan utama mencatatkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan terdalam tercatat berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok yang turun sebesar minus 2,77 juta ton atau berkontraksi sebesar minus 18,80 persen. Namun dari sisi persentase, penurunan jumlah barang yang dimuat pada tahun 2020 berasal dari Pelabuhan Belawan yang turun sebesar minus 90,71 persen.

The Covid-19 pandemic also affected the construction of the Singapore Tuas Port mega project. The Tuas Port project is the largest project in the maritime industry and will be the largest port. With these conditions, the Port of Singapore changed its strategy by regarding customers not only as “customers”, but also “partners”. Joint partnership for future project developments will be offered to partners/customers in order to develop further operations at the port, so that the terminal/port development will progress under risk sharing and benefit sharing scheme.

At the national level, performance of the port sector experienced a decline due to Covid-19 Pandemic, although it did not last long. Based on data collected by SI on total domestic cargo at major ports in tons, the amount of cargo unloaded at the Ports of Belawan, Tanjung Perak and Makassar recorded a significant decline in 2020, especially at the Port of Belawan which fell by 9.09 million tons or 81.51 percent. On the other hand, the amount of cargo unloaded at the Ports of Tanjung Priok and Makassar showed an increasing trend of 1.55 percent and 2.98 percent, respectively.

The number of cargos loaded in 2020 in all major ports recorded a decrease compared to 2019. The deepest decline was recorded at the Port of Tanjung Priok which fell by minus 2.77 million tons or contracted by minus 18.80 percent. However, in terms of percentage, the decrease in total cargo loaded in 2020 came from the Port of Belawan which fell by minus 90.71 percent.

Total Barang Dalam Negeri di Pelabuhan Utama Tahun 2019-2020 (dalam satuan Ton) /
Total Domestic Cargo at Major Ports 2019-2020 (in Ton unit)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Barang yang Dibongkar / Cargo Unloaded				
Belawan	2.060.909	11.146.756	(9.085.847)	(81,51%)
Tanjung Priok	10.179.891	10.024.863	155.028	1,55%
Tanjung Perak	5.706.953	6.810.532	(1.103.579)	(16,20%)
Balikpapan	9.193.844	8.927.864	265.980	2,98%
Makassar	5.759.373	6.248.335	(488.962)	(7,83%)



Total Barang Dalam Negeri di Pelabuhan Utama Tahun 2019-2020 (dalam satuan Ton) /
Total Domestic Cargo at Major Ports 2019-2020 (in Ton unit)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Barang yang Dimuat / Cargo Loaded				
Belawan	68.040	732.512	(664.472)	(90,71%)
Tanjung Priok	11.950.492	14.717.243	(2.766.751)	(18,80%)
Tanjung Perak	3.972.011	4.728.030	(756.019)	(15,99%)
Balikpapan	9.403.765	9.562.032	(158.267)	(1,66%)
Makassar	3.575.981	3.880.954	(304.973)	(7,86%)

Sumber: BPS / Source: SI

Aktivitas ekspor dan impor yang memiliki hubungan erat dengan lalu lintas pelabuhan tercatat terus membaik sampai dengan akhir tahun 2020. Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif ekspor non-migas pada Desember 2020 sebesar 4,9 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan November 2020 sebesar 3,3 persen (yoy). Kenaikan tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan.

Secara spasial, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah Indonesia. Kinerja ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh positif pada bulan November 2020, didukung oleh kinerja ekspor manufaktur, antara lain ekspor alas kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan ke negara ASEAN. Sementara itu, kinerja ekspor di wilayah luar Jawa, seperti Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua dan Kalimantan juga terus mencatat pertumbuhan ekspor yang positif. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring dengan meningkatnya permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Sedangkan perbaikan kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua ditopang dari ekspor besi baja dan konsentrat tembaga.

ANALISIS POSISI IPC DALAM INDUSTRI PELABUHAN

Untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan sasaran Perseroan tahun 2020 – 2024, maka IPC telah melakukan Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal Perusahaan dengan menggunakan *framework* SWOT (*Strength – Weakness – Opportunities – Threats*). Analisis lingkungan internal Perseroan menghasilkan *strength* dan *weakness*, sedangkan analisis eksternal menghasilkan *opportunities* dan *threats*.

Export and import activities that are closely related to port traffic continued to improve until the end of 2020. Bank Indonesia recorded a positive growth in non-oil and gas exports in December 2020 at 4.9 percent (yoy), an increase from the growth in November 2020 at 3.3 percent (yoy). This increase was mainly driven by improvement in the export performance of the manufacturing and mining groups.

Spatially, the improvement in export performance was supported by positive performance in most regions of Indonesia. The export performance of the Java region began to grow positively in November 2020, supported by the performance of manufacturing exports, including export of footwear to the United States and vehicles to ASEAN countries. Meanwhile, export performance in regions outside Java, such as Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, and Sulawesi-Maluku-Papua and Kalimantan, also recorded continuous and positive export growth. The improving exports of Sumatera and Kalimantan was mainly supported by the performance of CPO export in line with the increasing demand from India, Pakistan, and China as well as the improvement in export prices. Meanwhile, the improving export performance in Sulawesi, Maluku and Papua region was supported by exports of steel and copper concentrate.

ANALYSIS OF IPC'S POSITION IN THE PORT INDUSTRY

To plan the Company's strategies and targets for 2020-2024, IPC conducted analysis of the Company's External and Internal Environment using the SWOT (*Strength – Weakness – Opportunities – Threats*) framework. The analysis of the Company's internal environment will produce the strengths and weaknesses, while the analysis of external environment will produce the opportunities and threats.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Opportunities

Analisis *opportunities* merupakan bagian dari analisis lingkungan eksternal Perseroan yang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang IPC dalam mengembangkan bisnis inti maupun non-inti pada pasar domestik maupun internasional. Dalam pengembangan analisis *opportunities*, IPC memiliki 4 (empat) peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Perseroan, antara lain:

1. Peluang pertumbuhan yang meningkat dari bisnis turunan pelabuhan

Pertumbuhan pesat dari arus barang masuk dan keluar Indonesia, khususnya arus barang impor menjadi peluang bagi IPC untuk mengembangkan bisnisnya di sektor pelabuhan. Selain itu, moda pengiriman barang laut telah dan akan terus menjadi moda transportasi terbesar di dunia. Dengan porsi mencapai sekitar 88 persen dari total pangsa dunia, diprediksi akan tumbuh pada 7 persen CAGR hingga 2030. Sejalan dengan tren global, moda laut sejauh ini merupakan moda transportasi terbesar untuk impor dan ekspor di Indonesia karena sifat geografis Indonesia. Nilai impor dan ekspor melalui laut lebih dari 10 kali dari jumlah moda transportasi lainnya.

Peluang bisnis Perseroan juga dipengaruhi oleh inisiatif *Belt and Road* yang digagas oleh pemerintah China. Inisiatif tersebut diperkirakan mampu mendorong peningkatan arus dan volume transportasi kapal di Asia Tenggara, sehingga dapat menjadi peluang IPC untuk berekspansi. Inisiatif *Belt and Road* juga akan meningkatkan peran Selat Sunda sebagai jalur laut untuk perdagangan internasional yang dapat meningkatkan trafik barang dan kapal ke Tanjung Priok.

Selain peluang dari segi pertumbuhan arus barang, peran pelabuhan saat ini telah berevolusi menjadi *“one-stop service provider”* dan *“integrator ekosistem kepelabuhan”* yang menyebabkan revolusi operasi dan skala bisnis kepelabuhan. Secara global, terdapat pola pengembangan pelabuhan dari pelabuhan yang terpisah-pisah menjadi kawasan yang terintegrasi dan perusahaan kepelabuhan global sudah mulai memasuki bisnis-bisnis pendukung dan *adjacencies* yang ada di rantai nilai. Beberapa perusahaan pelabuhan juga mulai berekspansi dalam rantai nilai kepelabuhan sendiri atau *“within port boundaries”*, dari operasi pelabuhan menjadi bisnis *adjacent* seperti produk dan jasa TI, jasa investasi dan konsultasi keuangan maupun transportasi turis dan

EXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS

Opportunities

Opportunities analysis is part of the analysis of the Company's external environment to identify opportunities for IPC to develop core and non-core businesses in the domestic and international markets. In developing opportunities analysis, IPC has 4 (four) opportunities that can be utilized for the Company's development, which include:

1. Increased growth opportunities from port derivative businesses

The rapid growth of goods entering and leaving Indonesia, especially the flow of imported goods, provides an opportunity for IPC to develop its business in the port sector. In addition, cargo shipping by sea has been and will continue to be the largest mode of transportation in the world. With a share of about 88 percent of the total world share, it is predicted to grow at 7 percent CAGR until 2030. In line with global trends, sea transportation is by far the largest mode of transportation for imports and exports in Indonesia due to the country's geographic characteristics. The value of imports and exports by sea is more than 10 times of other modes of transportation.

The Company's business opportunities are also influenced by the Belt and Road initiative by the Chinese government. This initiative is expected to increase the flow and volume of ship transportation in Southeast Asia, thus providing an opportunity for IPC to expand. The Belt and Road initiative will also increase the role of the Sunda Strait as a sea route for international trade, which can increase the traffic of cargo and ships to Tanjung Priok.

Apart from opportunities in terms of growth in cargo flow, the role of ports has evolved to become a *“one-stop service provider”* and a *“port ecosystem integrator”* which revolutionized port operations and business scale. Globally, the pattern of port development shifted from separate ports to an integrated area. Global port companies began exploring supporting businesses and adjacencies in the value chain. Several port companies also expanded within their own port value chains or *“within port boundaries”*, from port operations to adjacent businesses such as IT products and services, investment services and financial consulting, as well as tourist and human transportation. In addition, several port companies also began expansion into *“beyond port*



manusia. Selain itu, beberapa perusahaan pelabuhan juga mulai berekspansi ke bisnis “*beyond port boundaries*”, seperti jasa logistik, *area development* dan *warehousing*.

2. Potensi ekspansi domestik dengan memanfaatkan tren perdagangan positif antar pulau di Indonesia

Secara garis besar, terdapat beberapa hal mengenai arus perdagangan domestik di Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Jawa adalah pusat perdagangan regional dengan DKI Jakarta & Jawa Barat sebagai eksportir dan importir utama;
- Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa sebagian besar saling melakukan impor dan ekspor satu sama lain. Akibatnya, provinsi Jawa menggunakan jalur darat sebagai moda transportasi utama mereka untuk perdagangan antar provinsi yang ada di Jawa;
- Mitra dagang regional utama untuk provinsi Kalimantan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Akibatnya, moda laut menjadi mode perdagangan yang lebih dominan, dilihat dari kondisi geografis Kalimantan dan Jawa yang dipisahkan oleh Laut Jawa;
- Untuk provinsi Sumatra sebagian besar rute perdagangan dalam pulau adalah moda transportasi darat. DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan mitra dagang utama dari Sumatra karena kedekatan jarak antara Lampung dan Banten, sehingga transportasi darat tetap dimungkinkan melalui kapal feri.

Selain itu, wilayah Jawa merupakan wilayah Indonesia yang terbesar untuk perdagangan internasional, diikuti oleh Sumatra dan Kalimantan.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu peluang pengembangan bisnis bagi Perseroan, karena wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta wilayah Sumatra dan Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, termasuk dalam jaringan pelabuhan yang dikelola IPC.

3. Tren digital membuka bidang-bidang baru peningkatan bisnis dan operasi

Pada sektor kepelabuhanan, terdapat potensi pengembangan teknologi digital yang dapat meningkatkan performa, memperkuat konektivitas dan membuka peluang bisnis bagi ekosistem pelabuhan. Secara keseluruhan, konsep tersebut dikenal sebagai

“*beyond port boundaries*” businesses, such as logistics services, area development, and warehousing.

2. Potential for domestic expansion by taking advantage of positive trends in Indonesian inter-island trade in

In general, several facts regarding the flow of domestic trade in Indonesia are as follows:

- Java is a regional trading center with DKI Jakarta & West Java as the main exporters and importers;
- Most of the provinces in Java Island import and export each other. As a result, the provinces of Java use the land route as the main mode of transportation for trade between provinces in Java;
- The main regional trading partners for Kalimantan provinces are DKI Jakarta, West Java and East Java. As a result, sea transportation becomes the dominant mode of trade, as seen from the geographical conditions of Kalimantan and Java, which are separated by the Java Sea;
- In Sumatra provinces, most of the intra-island trade routes are land transportation. DKI Jakarta and West Java are the main trading partners of Sumatra due to the close distance between Lampung and Banten, which enables land transportation via ferry.

In addition, the Java region is Indonesia's largest area for international trade, followed by Sumatra and Kalimantan.

This condition provides opportunities for business development for the Company, because the Java region, particularly DKI Jakarta, West Java and Banten, as well as Sumatra and Kalimantan region, particularly East Kalimantan, are covered by the port network managed by IPC.

3. Digital trends open up new fields of business and operations enhancement

In the port sector, there is a potential for digital technology development that can improve performance, strengthen connectivity, and open business opportunities for the port ecosystem. Overall, this concept is known as a digital port. Since the 1980s, the idea of digital port continued to

digital port. Sejak tahun 1980-an, ide *digital port* terus berkembang dan sejak tahun 2010 tren terbaru yang muncul adalah pertukaran alur informasi *big data* pada ekosistem logistik.

Saat ini, IPC telah memulai dan akan terus melakukan upaya implementasi *digital port* yang terbagi menjadi 2 (dua) inisiatif, yaitu inisiatif *Smart Terminal System* yang akan mendorong efisiensi operasional dan inisiatif yang akan menjadi katalis sumber pendapatan baru untuk mendorong pertumbuhan. Adapun inisiatif yang telah diimplementasikan oleh IPC hingga saat ini masih berfokus pada efisiensi operasional, antara lain:

- a. Layanan Terminal Elektronik (digitalisasi pengoperasian peti kemas, NPK, *car terminal*);
- b. *Auto Tally* (perhitungan jumlah kontainer yang dibongkar/muat di pelabuhan);
- c. *Auto Gate System* (perlancaran arus barang yang masuk pelabuhan melalui pintu otomatis);
- d. *Integrated Bilingual System* (sistem *billing* terintegrasi untuk seluruh aktivitas kepelabuhanan);
- e. *Vessel Management System* (standarisasi sistem pelayanan kapal di lingkungan IPC);
- f. *Warehouse Management System* (standarisasi sistem manajemen *warehouse* di lingkungan IPC);
- g. *Auto Identification System* (otomatisasi identifikasi *vessel* pada pelabuhan-pelabuhan IPC);
- h. Aplikasi Sistem E-FM (aplikasi pemeliharaan aset dan fasilitas di dalam pelabuhan IPC).

Jika dibandingkan dengan perusahaan kepelabuhanan domestik, maturitas digital IPC masih yang terdepan. Akan tetapi, saat dibandingkan dengan perusahaan kepelabuhanan global, terlihat bahwa maturitas IPC masih tertinggal. Oleh sebab itu, ke depannya IPC akan berfokus dalam melakukan implementasi inisiatif *digital port* yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan.

4. Visi Pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritim berpotensi mendukung ekspansi bisnis IPC

Fokus Pemerintah untuk mengembangkan konektivitas laut tercermin melalui rencana pengembangan kawasan pada 7 (tujuh) pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar *New Port*, Bitung, dan Sorong, yang dirancang menjadi titik konsolidasi angkutan barang domestik serta memungkinkan kapal-kapal berukuran lebih besar untuk singgah membentuk rute jaringan saling terhubung

develop and since 2010 the latest trend is the exchange of big data information flow in the logistics ecosystem.

Currently, IPC has started and will continue to undertake efforts for digital port implementation, which are divided into 2 (two) initiatives, namely the Smart Terminal System initiative that will drive operational efficiency and initiatives that serve as a catalyst for new revenue sources to drive growth. The initiatives implemented by IPC to date still focus on operational efficiency, which includes:

- a. Electronic Terminal Services (digitalization of container operations, NPK, *car terminal*);
- b. Auto Tally (calculation of the number of containers unloaded/loaded at the port);
- c. Auto Gate System (streamlining the flow of goods entering the port through automatic doors);
- d. Integrated Bilingual System (integrated billing system for all port activities);
- e. Vessel Management System (standardization of vessel service system in IPC environment);
- f. Warehouse Management System (standardization of warehouse management system in IPC environment);
- g. Auto Identification System (automation of vessel identification at IPC ports);
- h. E-FM System Application (asset and facility maintenance application inside IPC ports).

Compared to domestic port companies, IPC's digital maturity remains at the forefront. Nevertheless, IPC's maturity is still lagging behind to global port companies. Therefore, in the future IPC will focus on implementing digital port initiatives that can support revenue growth.

4. The Government's vision for maritime infrastructure development potentially supports IPC's business expansion

The Government's focus on developing maritime connectivity is reflected on the regional development plan for 7 (seven) main ports, namely the ports of Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar *New Port*, Bitung, and Sorong, which are designed to be points of consolidation for domestic cargo transportation and to allow larger vessels to transit to form a network of interconnected routes (loop). This is a potential for IPC



(loop). Hal tersebut tentu dapat menjadi potensi IPC dalam mengembangkan bisnisnya, baik pada 2 (dua) pelabuhan yang ada di area kerjanya, yaitu Tanjung Priok dan Kijing maupun berkolaborasi dengan pelabuhan lain di luar area kerjanya. Kolaborasi dengan seluruh pelabuhan utama yang ada dapat membantu meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global dan diperkirakan mampu menjadi eksportir terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045 mendatang.

Threats

Analisis *threats* merupakan bagian dari analisis lingkungan eksternal Perseroan yang dilakukan untuk membantu Perseroan dalam mengidentifikasi potensi hambatan yang ada, pada ranah geopolitik maupun kompetisi bisnis. Dalam pengembangan analisis *threats*, IPC dihadapkan pada 4 (empat) ancaman eksternal yang harus diwaspadai dalam mengembangkan Perseroan ke depan, antara lain:

1. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional akibat pandemi Covid-19

Meskipun titik cerah terhadap penemuan vaksin Covid-19 telah mulai bermunculan di berbagai belahan dunia dan optimisme perbaikan ekonomi mulai terbangun seiring dengan adaptasi kebiasaan baru, namun tetap perlu disadari bahwa Pandemi Covid-19 belumlah usai hingga saat ini. Begitu pun dalam beberapa tahun ke depan, sebagian ahli masih memprediksi bahwa ketidakpastian kondisi ekonomi masih membayangi seluruh negara di dunia dan seluruh sektor aktivitas manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi kondisi krisis akibat Pandemi Covid-19, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis khusus agar mampu menjaga kelangsungan usahanya dalam beberapa tahun mendatang.

2. Entry barriers dalam bisnis pelabuhan semakin rendah, sehingga tingkat kompetisi semakin tinggi

Secara spesifik di industri kepelabuhanan di Indonesia, terdapat ancaman persaingan usaha yang semakin hari semakin tinggi intensitasnya sebagai akibat dari rendahnya *entry barriers* dalam bisnis pelabuhan. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya pelabuhan-pelabuhan baru yang mulai dibangun dan beroperasi secara komersial serta bermunculannya Terminal Khusus (Tersus) yang bertransformasi menjadi pelabuhan umum. Di satu sisi, hal tersebut baik untuk menciptakan iklim kompetisi dalam bisnis pelabuhan, namun dari sisi IPC, hal ini dapat menjadi ancaman yang perlu diwaspadai agar tidak memberi dampak buruk pada posisi Perseroan.

in developing its business, both at the 2 (two) ports in its work area, namely Tanjung Priok and Kijing, and in collaborating with other ports outside its working area. Collaboration with all existing major ports can help improve Indonesia's position as a key player in the global market and its expectation to become the world's 10th largest exporter by 2045.

Threats

Analysis of threats is part of the analysis of the Company's external environment to assist the Company in identifying existing potential barriers in the geopolitics area and business competition. Based on the threat analysis, IPC faces 4 (four) external threats that must be taken into consideration in future development of the Company, which include:

1. Global and national economic uncertainty due to the Covid-19 pandemic

Although the discovery of Covid-19 vaccine started to emerge in various parts of the world and optimism for economic improvement grew along with the adaptation of new habits, it is still necessary to realize that the Covid-19 Pandemic is not yet over. In the next few years, some experts predict that uncertain economic conditions will remain in all countries in the world and all sectors of human activity. Therefore, to face the crisis caused by the Covid-19 Pandemic, companies are required to have a special business strategy to be able to maintain their business continuity in the next few years.

2. Entry barriers in the port business are getting lower, so the level of competition is getting higher

Specifically in the port industry in Indonesia, there is a threat of increasingly intense business competition as a result of the low entry barriers in the port business. This is evident in the increasing number of new ports being built and operating commercially as well as the emergence of Special Terminals (Tersus) which are transformed into public ports. On the one hand, this is good for creating a competitive climate in the port business, although from IPC's point of view, this can be a threat that needs to be taken into account so as not to adversely affect the Company's position.

3. Pelabuhan pesaing yang telah siap beroperasi

Salah satu pelabuhan pesaing yang kini menjadi perhatian besar IPC adalah Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Perseroan. Pelabuhan tersebut dibangun dan dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan dan siap beroperasi untuk terminal kendaraan dengan kapasitas 225.000 CBU (*Compelety Build Up Unit*) di akhir tahun 2020 dan terminal kontainer baru dengan kapasitas 250.000 TEUs di awal tahun 2021. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dan diproyeksikan menjadi pelabuhan besar yang difungsikan untuk kegiatan ekspor industri otomotif dari Indonesia ke luar negeri dalam beberapa tahun mendatang.

4. Tingkat konektivitas maritim nasional yang masih rendah, sehingga belum mencapai *network* maritim yang terintegrasi

Sebagai negara kepulauan maritim yang terletak di antara 2 (dua) samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia dituntut untuk memiliki konektivitas maritim yang baik dan terintegrasi, terutama dalam hal hubungan antar negara di kawasan regional maupun global. Namun demikian, Indonesia masih menyimpan persoalan yang masih perlu diselesaikan berkenaan dengan konektivitas maritim, sehingga berdampak pada tingginya biaya logistik nasional. Beberapa isu utama konektivitas maritim di Indonesia, antara lain:

a. *Demand-Supply Imbalance*

Isu *Demand-Supply Imbalance* yang disebabkan oleh ketidakseimbangan konsentrasi populasi penduduk dan aktivitas perekonomian antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang menyebabkan *imbalance demand* dan *supply* pada aktivitas bongkat/muat kargo yang berdampak pada ketidakefisienan proses transportasi kargo melalui laut.

b. *Suboptimal Port Performance*

Dari sekian banyak pelabuhan yang dikelola oleh 4 (empat) entitas BUMN Layanan Pelabuhan, tidak semua pelabuhan dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar yang memerlukan kedalaman minimal 10 meter, terlebih untuk kapal internasional yang memerlukan kedalaman minimal 14 meter. Hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam upaya meningkatkan konektivitas maritim dimana kapal-kapal yang besar hendak berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan

3. Competitor ports that are ready to operate

One of the competitor ports that are currently a major concern of IPC is Patimban Port, located in Subang, West Java, not far from the location of the Tanjung Priok Port which is managed by the Company. The port was built and managed directly by the Ministry of Transportation and is ready to operate a vehicle terminal with a capacity of 225,000 CBU (Completely Build Up Unit) by the end of 2020 and a new container terminal with a capacity of 250,000 TEUs in early 2021. Development of the Patimban Port will be carried out in 3 (three) stages and is projected to become a large port that serves export activities of the automotive industry from Indonesia to overseas in the next few years.

4. Low level of national maritime connectivity that has not reached an integrated maritime network

As a maritime archipelago located between 2 (two) oceans, namely the Indian Ocean and the Pacific Ocean, Indonesia is required to have good and integrated maritime connectivity, especially in terms of relations between countries in the regional and global spheres. However, Indonesia still needs to resolve the problems of maritime connectivity which results in the high cost of national logistics. Some of the main issues of maritime connectivity in Indonesia include:

a. Demand-Supply Imbalance

The issue of Demand-Supply Imbalance is caused by an imbalance in population concentration and economic activity between the Western Indonesia Region (KBI) and Eastern Indonesia Region (KTI), which results in an imbalance in demand and supply for cargo loading and unloading activities and causes inefficiency in cargo transportation process by sea.

b. Less Optimal Port Performance

Of the many ports managed by 4 (four) Port Services SOEs, not all ports can be visited by large vessels that require a minimum depth of 10 meters, especially international ships that require a minimum depth of 14 meters. This certainly poses an obstacle in efforts to improve maritime connectivity where large vessels can sail from one port to another. Apart from the limitations of lanes, pool, and port capacity, another obstacle in the efforts to improve maritime



lainnya. Selain terkait keterbatasan alur, kolam, dan kapasitas pelabuhan, hal lainnya yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan konektivitas maritim adalah masih tertinggalnya kinerja di beberapa pelabuhan utama dibanding dengan tolok ukur yang menjadi *benchmark*.

c. *Low Maritime Value Chain Efficiency*

Pasar transportasi petikemas domestik di Indonesia saat ini dikuasai oleh perusahaan pelayaran swasta yang mengambil porsi sampai dengan 94 persen dari total volume, adapun sisanya 6 persen volume diperebutkan oleh 20 perusahaan pelayaran kecil. Hal ini kemudian menghasilkan jaringan rute pelayaran nasional yang tidak efisien akibat jumlah rute yang berlebihan dan saling tumpang tindih. Kondisi ini tentu jauh berbeda dibanding dengan perusahaan-perusahaan pelayaran internasional yang bersama-sama membangun aliansi untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam proses transportasi peti kemas ke seluruh dunia.

d. *Low Land Value Chain Efficiency*

Dari sisi transportasi darat yang menjadi penyambung moda dari pelabuhan menuju gudang atau *cargo owner*, terdapat pula permasalahan yang masih menjadi kendala dalam upaya membangun konektivitas yang terintegrasi. Hal ini karena ketersediaan moda transportasi yang hemat biaya, seperti kereta api dan tongkang, dan konektivitasnya terhadap pelabuhan masih sangat terbatas. Dengan demikian, ketergantungan terhadap truk masih tinggi, sehingga biaya logistik pun juga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga semakin diperburuk oleh kualitas layanan truk di Indonesia yang belum sepenuhnya profesional dan tingkat kinerja yang masih rendah.

e. *Unconducive Government Regulations*

Pengelolaan regulasi di Indonesia dipandang masih belum optimal, sehingga berdampak negatif pada produktivitas, biaya operasional, dan tingkat investasi oleh pemangku kepentingan serta ketidakefisienan di seluruh rantai nilai maritim. Oleh sebab itu, diperlukan suatu terobosan dalam pengelolaan regulasi di Indonesia yang mana hal tersebut sejalan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 -2024, khususnya pada poin "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Ketahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)

connectivity is the lagging performance of several major ports compared to the benchmark standards.

c. *Low Maritime Value Chain Efficiency*

The domestic container transportation market in Indonesia is currently controlled by private shipping company which account for up to 94 percent of the total volume, while the remaining 6 percent of the volume is seized by 20 small shipping companies. This in turn resulted in an inefficient national shipping route network due to the excessive number of routes that overlap with each other. This condition is far different from that of international shipping companies that jointly build an alliance to create synergy and efficiency in container transportation process around the world.

d. *Low Land Value Chain Efficiency*

In view of land transportation as the connector from the hub to the warehouse or cargo owner, there were also issues that posed a challenge in the efforts to build integrated connectivity. This is due to the limited availability of cost-effective modes of transportation, such as rail and barge, as well as their connectivity to ports. Therefore, dependence on trucks remains high, thus raising the logistics costs. This condition is also exacerbated by the quality of truck service in Indonesia which is not fully professional with low performance level.

e. *Unconducive Government Regulations*

Regulatory management in Indonesia is still deemed less optimum, resulting in a negative impact on productivity, operational costs, and levels of investment by stakeholders as well as inefficiencies throughout the maritime value chain. Therefore, a breakthrough is needed in the management of regulations in Indonesia, which is in line with the 7 Development Agenda of RPJMN for 2020-2024, particularly on the item "Strengthening Political, Legal, Resilience, and Security Stability (Polhukhankam) and

dan Transformasi Pelayanan Publik” yang di dalamnya terdapat aspek reformasi kelembagaan birokrasi dan penataan regulasi.

Public Service Transformation” which includes aspects of bureaucratic institutional reform and regulatory organization.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Strengths

Analisis *strengths* merupakan bagian dari analisis lingkungan internal Perseroan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kapabilitas IPC dalam mengembangkan bisnis inti maupun non-inti pada pasar domestik maupun internasional. Dalam pengembangan analisis *strengths*, IPC memiliki 4 (empat) kekuatan yang dapat dijadikan landasan untuk pengembangan Perseroan, antara lain:

1. Kemampuan yang baik dalam manajemen dan operator pelabuhan di Indonesia

Dari segi pangsa pasar kontainer di Indonesia, IPC adalah pemimpin, dengan tingkat pendapatan dan laba bisnis yang telah tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh 3 (tiga) lini bisnis inti pelabuhan, yaitu layanan peti kemas dan non-peti kemas serta perusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL), seperti penyewaan lahan *idle* di Cabang Pelabuhan, perusahaan listrik *reefer container* di beberapa terminal peti kemas 4 (empat) Cabang Pelabuhan oleh Anak Perusahaan IPC, yaitu PT EPI, dan bisnis *port developer* yang dikelola Anak Perusahaan IPC, yaitu PT PPI. Pertumbuhan IPC tidak hanya didorong oleh peran IPC di dalam bisnis kepelabuhanan, tetapi juga ekspansi awal IPC ke area potensial ekosistem kepelabuhanan lainnya.

2. Memiliki Anak Perusahaan yang terdiversifikasi di beberapa bisnis selain bisnis inti pelabuhan

Portofolio Anak Perusahaan IPC beragam dan mencakup seluruh area dalam rantai nilai pelabuhan. IPC memiliki portofolio bisnis terdiversifikasi (*core and adjacent*) yang didukung oleh 13 Anak Perusahaan, 3 Cucu Perusahaan, 1 Cicit Perusahaan, 3 Entitas Asosiasi, dan 2 Kerja Sama Operasi (KSO) di sepanjang rantai nilai pelabuhan. Struktur anak perusahaan yang menyumbang fungsi terpusat, layanan bersama, dan investasi tambahan (bisnis non-inti)/*treasury*. Struktur Anak Perusahaan yang terstruktur dan terdiversifikasi dengan baik adalah modal masa depan IPC untuk terus bertumbuh ke depannya. Beberapa anak perusahaan yang berkontribusi atas *wide-range of portfolio* IPC berpotensi menjadi *growth drivers* IPC di masa mendatang.

INTERNAL ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Strengths

Strengths analysis is part of the Company's internal environmental analysis which is carried out to identify the strengths and capabilities of IPC in developing core and non-core businesses in the domestic and international markets. In the development of strengths analysis, IPC has 4 (four) strengths that can be used as the basis for the development of the Company, including:

1. Good ability in port management and operator in Indonesia

In terms of share of the container market in Indonesia, IPC is a leader, with well-established business revenue and profit levels. This growth is largely driven by 3 (three) core port business lines, namely container and non-container services as well as land, building, water, and electricity (TBAL) services, such as leasing idle land at Port Branches, reefer container electricity services in several container terminals at 4 (four) Port Branches by IPC Subsidiaries, namely PT EPI, and the port developer business managed by IPC Subsidiaries, namely PT PPI. The growth of IPC is not only driven by the role of IPC in the port business, but also the initial expansion of IPC to other potential areas of the port ecosystem.

2. Has subsidiaries diversified in several businesses other than the core port business

The portfolio of IPC Subsidiaries is diverse and covers all areas of the port value chain. IPC has a diversified (*core and adjacent*) business portfolio supported by 13 Subsidiaries, 3 Second-Tier Subsidiaries, 1 Third-Tier Subsidiary, 3 Associates, and 2 Joint Operations (KSO) along the port value chain. Subsidiary structure that contributes centralized functions, shared services, and additional investment (non-core business)/*treasury*. A well-structured and well-diversified Subsidiary structure is the future capital of IPC to continuously grow in the future. Several subsidiaries that contribute to a wide range of IPC portfolio have the potential to become IPC growth drivers going forward.



3. Memiliki pelabuhan paling strategis di Indonesia (Tanjung Priok)

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang perekonomian nasional dan memiliki posisi strategis sebagai cabang pelabuhan utama yang mendukung “*International Connectivity*” di Indonesia. Per 31 Desember 2020, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai cabang utama masih memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan operasi eksternal Perseroan, yaitu sebesar 71,51 persen.

4. Memiliki portofolio kemitraan bisnis pelabuhan yang baik, terutama dengan pemain global

Sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, IPC telah menjalin kerja sama dengan beberapa operator pelabuhan global untuk mengoperasikan beberapa terminal di area kerja IPC, khususnya di Tanjung Priok. Adapun skema kerja yang telah terjalin dalam bentuk *joint venture* (Pembentukan Perseroan) dan Kerja Sama Operasi (KSO), baik langsung dengan IPC maupun melalui Anak/Cucu Perusahaan IPC.

Weakness

Analisis *weakness* merupakan bagian dari analisis lingkungan internal Perseroan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan internal yang ada, pada ranah operasional bisnis maupun fungsional, seperti kondisi SDM, Keuangan, dan Teknologi Informasi. Dalam pengembangan analisis *weakness*, IPC memiliki 4 (empat) kelemahan yang harus segera diatasi dalam pengembangan Perseroan, antara lain:

1. Masih sangat bertumpu pada bisnis inti kepelabuhanan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa operator pelabuhan, tentunya aktivitas terkait kepelabuhanan menjadi inti dari bisnis Perseroan. Hal tersebut terlihat dari 89,05 persen porsi total pendapatan IPC tahun 2020 masih disumbang dari kegiatan inti pelabuhan yang terdiri dari pelayanan peti kemas, non-peti kemas, kapal, dan TBAL.

Namun, melihat tren yang saat ini sudah berkembang, dimana operator pelabuhan global telah berevolusi menjadi “*one step service provider*” dan “*integrator ekosistem kepelabuhanan*”, maka dapat dikatakan bahwa IPC masih tertinggal dan memiliki keterbatasan kapabilitas untuk keluar dari “*port boundaries*”. Meski saat ini IPC mulai memasuki bisnis *adjacent*, namun masih harus mengembangkan *hard & soft competencies* untuk dapat bersaing dan menjadi *emerging player*.

3. Has the most strategic port in Indonesia (Tanjung Priok)

Tanjung Priok Port is the gateway to the national economy and has a strategic position as a major port branch that supports “*International Connectivity*” in Indonesia. As of December 31, 2020, Tanjung Priok Port as the main branch still had the largest contribution to the Company’s external operating income amounting to 71.51 percent.

4. Have good port business partnership portfolio, especially with global players

As the largest port operator in Indonesia, IPC has partnered with several global port operators to operate several terminals in the IPC work area, particularly in Tanjung Priok. The work schemes that have been established are in the form of joint ventures (Company Formation) and Joint Operations (KSO), either directly with IPC or through IPC Subsidiaries/Sub-Subsidiaries.

Weakness

Weakness analysis is part of an analysis of the Company’s internal environment which is carried out to identify existing potential internal barriers in the field of business and functional operations, such as the condition of human resources, finance and information technology. In developing weakness analysis, IPC has 4 (four) weaknesses that must be addressed in the Company’s development, among others:

1. Still highly reliant on port core business

As a company engaged in port operator services port-related activities are surely the core of the Company’s business. This can be seen from the 89.05 percent portion of the total IPC revenue in 2020 that was still contributed by port core activities which consist of container, non-container, ship and TBAL services.

However, observing the currently developing trend, where global port operators have evolved into “*one step service providers*” and “*port ecosystem integrators*”, it is safe to say that IPC is still lagging behind and has limited capabilities to move beyond the “*port boundaries*”. Although currently IPC has begun to enter the adjacent business, it still has to develop hard & soft competencies to be able to compete and become an emerging player.

Bila melakukan *benchmarking* dengan beberapa pelabuhan global, maka *positioning* IPC dalam hal kapabilitas pengembangan bisnis pada ekosistem pelabuhan terintegrasi masih dikatakan lemah dengan tingkat diferensiasi pada level 1, jauh di bawah *best practice* yang berada pada level 5. Dengan demikian, IPC masih memiliki tugas rumah untuk terus mengembangkan bisnis, sehingga dapat bersaing pada level ekosistem pelabuhan dan maritim.

When benchmarking with several global ports, IPC's positioning in light of business development capabilities in the integrated port ecosystem is still considered weak with a differentiation level of 1, far below best practice at level 5. Thus, IPC still has a homework to do, namely to continuously develop the business in order to compete at the port and maritime ecosystem level.

2. Masih ada kesenjangan dalam standarisasi proses bisnis

Belum semua operasional di cabang pelabuhan yang dikelola IPC menguntungkan. Secara rata-rata, kinerja IPC masih tertinggal jika dibandingkan dengan standar pelabuhan global. Efisiensi bongkar-muat peti kemas dan utilisasi area pelabuhan masih dapat dioptimalisasi lebih lanjut. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan antara lain *waiting time for pilot*, utilisasi pelabuhan, dan B/M peti kemas.

2. There is still gap in the standardization of business processes

Not all operations at port branches managed by IPC are profitable. On average, IPC's performance still lags behind global port standards. Efficiency of loading and unloading containers and utilization of the port area should be further optimized. Several things that could be improved include waiting time for pilots, port utilization, and container loading and unloading.

3. Belum optimal dalam utilisasi sistem TI pada proses operasional dan *back office*

Adanya kesenjangan berkelanjutan dalam standarisasi proses bisnis, ketersediaan data manajemen, dan optimalisasi sistem TI dikarenakan proses bisnis dan manajemen data masih belum sepenuhnya dioptimalkan.

3. Utilization of IT system in operational and back office process is not yet optimum

There is continuous gap in business process standardization, availability of management data, and optimization of IT systems because business processes and data management are still not fully optimized.

4. Pelabuhan di luar Tanjung Priok masih berusaha untuk membangun "keunggulan kompetitif" masing-masing

Hingga saat ini, tidak ada proposisi nilai yang jelas/pesan pemasaran yang dikomunikasikan pelabuhan lainnya selain Pelabuhan Tanjung Priok. Mayoritas Cabang Pelabuhan saat ini mengelola bisnis non-peti kemas dengan dukungan bisnis inti lainnya. Tidak adanya proporsi khusus Cabang dan perbedaan standarisasi Cabang dalam mengelola komoditas tertentu di Cabang Pelabuhan IPC terefleksi pada kinerja arus non-peti kemas IPC dalam 4 (empat) tahun terakhir yang menunjukkan tren penurunan.

4. Ports outside Tanjung Priok still struggles to build their own "competitive advantage"

There is currently no clear value proposition/marketing messages communicated by other ports other than Tanjung Priok Port. Most of the Port Branches currently manage non-container businesses with the support of other core businesses. The absence of a special proportion of branches and differences in branch standardization in managing certain commodities at IPC Port Branches is reflected on the performance of non-container traffic of IPC in the last 4 (four) years which shows a downward trend.

Perbedaan arus barang antar pelabuhan mencerminkan perbedaan dalam hal standarisasi infrastruktur dan peralatan, *safety*, efisiensi, dan biaya bongkar muat di Cabang Pelabuhan IPC yang berbeda. Selain itu, kemampuan yang terbatas di beberapa Cabang Pelabuhan dalam mengidentifikasi potensi "*hinterland*" dan potensi komoditas turut mengakibatkan adanya peluang-peluang yang belum mampu dimanfaatkan secara optimal.

The differences in the cargo traffic between ports reflect differences in infrastructure and equipment standardization, safety, efficiency, and loading costs at different IPC Port Branches. In addition, the limited ability of several Port Branches to identify potential "*hinterlands*" and potential commodities also resulted in many untapped opportunities.



ANALISIS POSISI PERUSAHAAN

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas, kekuatan Perseroan lebih unggul dari kelemahan, sedangkan potensi peluang lebih besar dibanding ancaman. Hal tersebut menandakan bahwa IPC saat ini berada pada posisi yang dapat memanfaatkan “*strengths to capture opportunities*”.

TINJAUAN OPERASIONAL

TINJAUAN STRATEGI PERUSAHAAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada bangsa melalui visi “*To be World-Class Maritime Ecosystem*” dan misi “*Develop Indonesia’s Port Logistic Maritime Integrated Network to Reduce Logistic Cost and Energize Trade.*” Perencanaan strategi IPC dibuat dengan penekanan untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Agenda Prioritas Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 melalui *alignment* strategi usaha yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Industri pelabuhan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah berupa penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Dalam RPJMN tersebut dinyatakan bahwa visi Presiden adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong*”. Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

ANALYSIS OF COMPANY POSITION

Based on the results of the internal and external environmental analysis described above, the Company’s strengths are superior to weaknesses, while the potential opportunities are greater than threats. This indicates that IPC is well-positioned to take advantage of the “*strengths to capture opportunities*”.

OPERATIONAL REVIEW

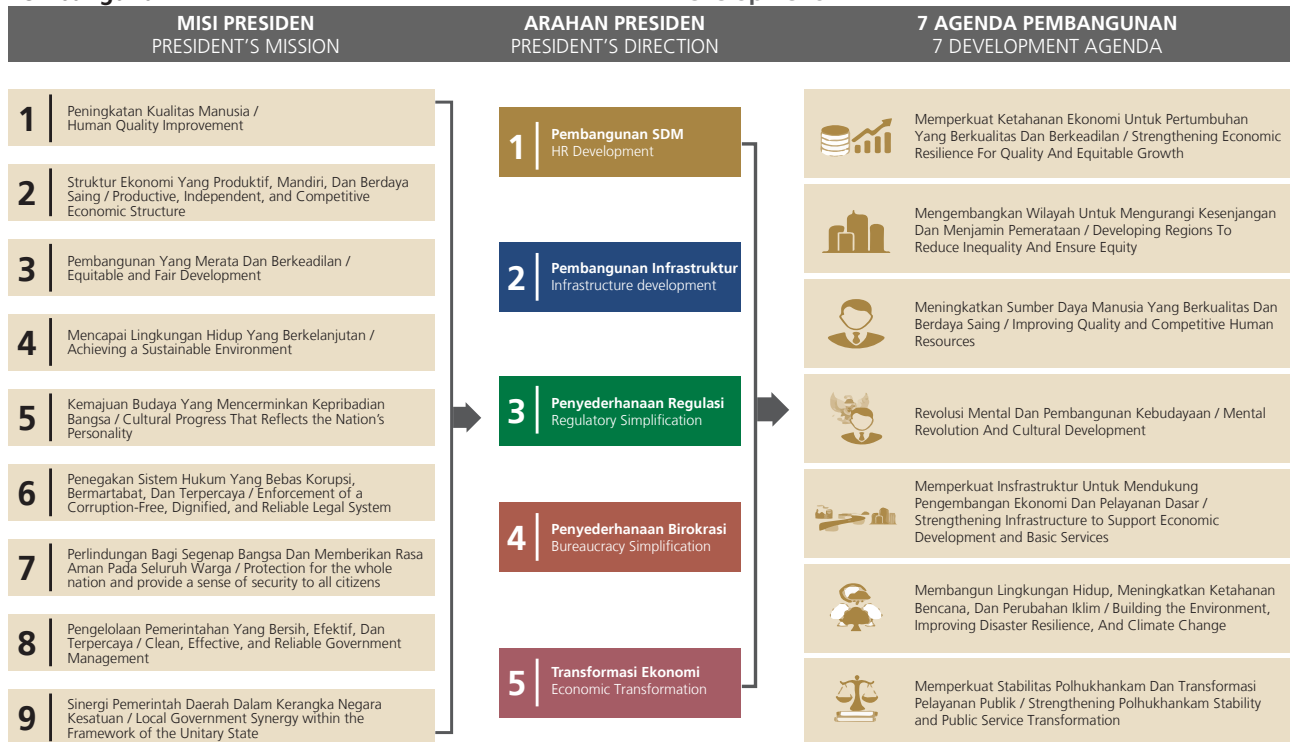
CORPORATE STRATEGY REVIEW

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is committed to contributing to the nation through the vision “*To be a World-Class Maritime Ecosystem*” and the mission to “*Develop Indonesia’s Port Logistic Maritime Integrated Network to Reduce Logistic Cost and Energize Trade.*” IPC’s strategic planning is made with an emphasis on realizing the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Ministry of SOEs Priority Agenda for 2020-2024 through alignment of business strategies with the vision and mission of the Government.

National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024

The port industry has been fully supported by the government in the form of the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) through Presidential Regulation No. 18/2020. The RPJMN states the President’s vision is the “*Realization of an Advanced Indonesia through Sovereignty, Independence, and Gotong Royong Character*”. To support this vision, the Government has set 7 (seven) RPJMN Development Agenda IV for 2020-2024 as outlined as follows:

Penurunan Visi Presiden ke dalam 7 Agenda Pembangunan Derivation of the President's Vision to 7 Areas of Development



Salah satu fokus kegiatan Pemerintah pada agenda ke-5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, Pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan infrastruktur ekonomi pada sektor konektivitas laut. Hal ini menjadi perhatian pemerintah mengingat pada sektor konektivitas laut ini belum terwujud efisiensi kinerja angkutan logistik yang antara lain disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang belum memenuhi standar, jaringan pelayaran yang masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan *hinterland*, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman.

Selain itu, RPJMN 2020-2024 tersebut mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Hal tersebut menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi bisnis jangka panjang Perseroan.

One focus of Government activities on the 5th agenda “Strengthening Infrastructure to Support Economic Development and Basic Services”, the Government seeks to develop economic infrastructure in the marine connectivity sector. This is the government’s concern considering the lack of efficiency of logistics transportation performance in the maritime connectivity sector, which is due to, among others, substandard port performance, suboptimal ship sizes used in shipping networks and routes that do not form an interconnected network (*loop*), underdeveloped port supporting areas (*hinterland*), limited multimodal and intermodal connectivity at ports and hinterlands, and limited use of maritime logistics information technology.

In addition, the 2020-2024 RPJMN is geared towards *Sustainable Development Goals* (SDGs). The targets of the 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) and their indicators have become an integral part of Indonesia’s 7 development agenda going forward. This is a consideration for the Company to integrate the SDGs into the long-term business strategy of the Company.



Agenda Prioritas Kementerian BUMN Tahun 2020-2024

Selain ketujuh agenda pembangunan dalam RPJMN, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang memiliki 5 (lima) Agenda Prioritas Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER/08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Ministry of SOEs Priority Agenda for 2020-2024

In addition to seven development agenda in the RPJMN, the government through the Ministry of SOEs established the Strategic Plan of the Ministry of SOEs with 5 (five) Priority Agenda of the Ministry of SOEs as stated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-08/MBU/08/2020 dated August 7, 2020, with description as follows:

Agenda Prioritas Kementerian BUMN Tahun 2020-2024

Ministry of SOEs Priority Agenda for 2020-2024

No.	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	Deskripsi / Description
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia	Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi dan kesehatan. / Increasing economic value and social impacts, especially in food security, energy, and health.
2	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business. / Business model restructuring through ecosystem building, development of stakeholders needs, and focus on core business.
3	Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership	Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti <i>data management, advanced management, big data, artificial intelligence</i> , dan lain-lain. / Being global leader in strategic technology and institutionalizing digital capabilities, such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, etc.
4	Peningkatan Investasi / Investment Increase	Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. / Optimizing asset value and creating a sound investment ecosystem.
5	Pengembangan Talenta / Talent Development	Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM. / Educating and training workforce, developing high quality human capital for Indonesia, improving professionalism in governance and human capital selection system.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 / Source: Ministry of SOEs Strategic Plan for 2020-2024

Salah satu inisiatif Kementerian BUMN adalah melaksanakan agenda Inovasi Model Bisnis, yang dicerminkan antara lain melalui Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan dan pembentukan *Cluster* Logistik Laut. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membangun ekosistem bisnis dan konektivitas laut yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebagaimana amanat dari RPJMN IV Tahun 2020 – 2024.

One of the initiatives of the Ministry of SOEs is implementing the Business Model Innovation agenda, which is reflected, among others, through the Synergy and Integration of Port Services SOEs and the formation of a Sea Logistics Cluster. The aim of this initiative is to build a business ecosystem and maritime connectivity, which in turn is expected to reduce national logistics costs as mandated by RPJMN IV for 2020-2024.

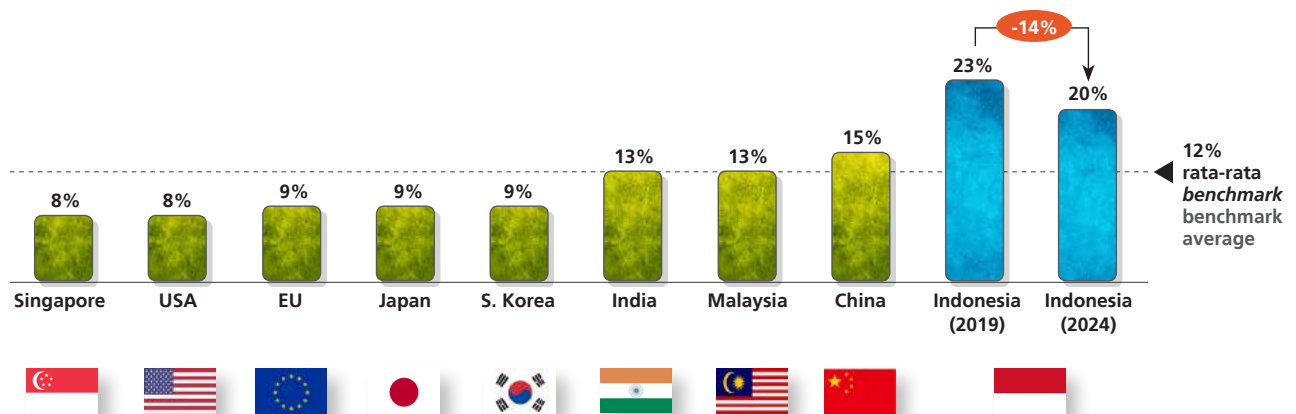
Target Penurunan Biaya Logistik Melalui Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan

Target of Reducing Logistics Costs through Synergy and Integration of SOE Port Services

Jumlah Beban Logistik dalam % PDB

Total Logistics Cost in % GDP
(dalam % GDP, 2016, kecuali Indonesia / % of GDP, 2016, except Indonesia)

Target RPJMN 2020-2024 / RPJMN 2020-2024 Target



Sumber / Source: World Bank, RPJMN 2020-24

Konsep besar dari Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan adalah menggabungkan 4 (empat) entitas BUMN Layanan Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV. Inisiatif tersebut tentu membawa manfaat bagi IPC dalam mengembangkan bisnisnya, antara lain:

- Melalui sinergi dan integrasi memungkinkan IPC memiliki akses terhadap pasar baru di luar area penugasan yang ada sekarang.
- Pemerataan standardisasi kinerja operasional seluruh lini bisnis secara nasional melalui upaya berbagi pengetahuan dan *best practice*.
- Sinergi efisiensi biaya antar seluruh anggota entitas, misalkan penurunan biaya proses pengadaan alat dan barang, termasuk untuk IPC.
- Penawaran produk yang lebih komprehensif dengan kemungkinan adanya *bundling* antar berbagai lini bisnis yang ada dalam entitas yang baru.
- Peningkatan kapabilitas SDM & Budaya Kerja yang dicerminkan melalui peningkatan kapabilitas dan daya saing SDM, budaya kerja, fleksibilitas dan optimasi *talent*.

Sasaran Perusahaan

Guna mendukung perjalanan IPC menuju *World Class Maritime Ecosystem*, maka perlu disusun sasaran perusahaan, baik berupa sasaran kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai perusahaan BUMN, sasaran perusahaan yang ditetapkan oleh IPC harus sejalan dengan 5 (lima) agenda prioritas BUMN, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Talenta.

Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

The grand concept of Port Services SOEs Synergy and Integration is the consolidation of 4 (four) Port Services SOEs, namely PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV. This initiative benefits IPC in developing its business, among others:

- Synergy and integration enable IPC to access new markets outside the current area assignment.
- Equality of operational performance standardization of all lines of business at national scale through knowledge sharing and best practices.
- Synergy for cost efficiency between all members of the entity, such as reduction of equipment and goods procurement cost, including for IPC.
- More comprehensive product offering through possibility of bundling of various lines of business in the new entity.
- Improvement of HC capability & Work Culture as reflected on the improvement of HC capability and competitiveness, work culture, flexibility, and talent optimization.

Company Targets

To support IPC's journey to become World Class Maritime Ecosystem, it is necessary to set qualitative and quantitative company targets. Based on the direction from the Ministry of SOEs, the Company's targets shall be in accordance with the 5 (five) priority agendas of SOEs, namely Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Increase and Talent Development.

Accordingly, the Company's targets are defined as follows:

Sasaran Perusahaan Berdasarkan Agenda Prioritas BUMN | Company Targets Based on SOE Priority Agenda

Tema / Subject	Sasaran Perusahaan / Company Target
Nilai Ekonomi dan Sosial / Economic and Social Value	Finansial / Financial Keseimbangan kepentingan Jangka Pendek dengan Investasi perusahaan untuk pertumbuhan bisnis Jangka Panjang / Balance between short-term interests and the Company's investments for long-term business growth
	Operasional / Operational Peningkatan Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan / Improving ship and cargo service in ports
	Sosial / Social Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan / Improving welfare of communities around ports
Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	Sinergi dan Integrasi pelabuhan untuk pengelolaan bisnis kepelabuhan yang lebih efektif & efisien guna penciptaan nilai (<i>value creation</i>) yang lebih optimal / Port synergy and integration for more effective and efficient port business management to reach optimal value creation
Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi proses bisnis Perusahaan / Digitalization of company business processes • Inisiasi penggunaan teknologi ramah lingkungan / Initiation of environmentally friendly technology use
Peningkatan Investasi / Investment Increase	Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan optimalisasi penayagunaan aset / Development of port infrastructure and optimization of asset utilization
Pengembangan Talenta / Talent Development	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi dan performansi pegawai / Increasing employee competency and performance • Mendorong lingkungan inklusif untuk memberikan <i>diversity</i> pemikiran pada level Struktural / Encouraging an inclusive environment to create diversity of thoughts at structural level



RUMAH STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Perusahaan didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan. Visi dan misi Perusahaan tersebut kemudian ditopang oleh 4 (empat) pilar strategis yang merupakan sekumpulan tindakan atau aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Keempat strategi pilar tersebut juga merupakan aktivitas atau tindakan yang berbeda dari aktivitas rutin perusahaan karena diharapkan akan mengantarkan nilai yang unik bagi perusahaan di masa yang akan datang.

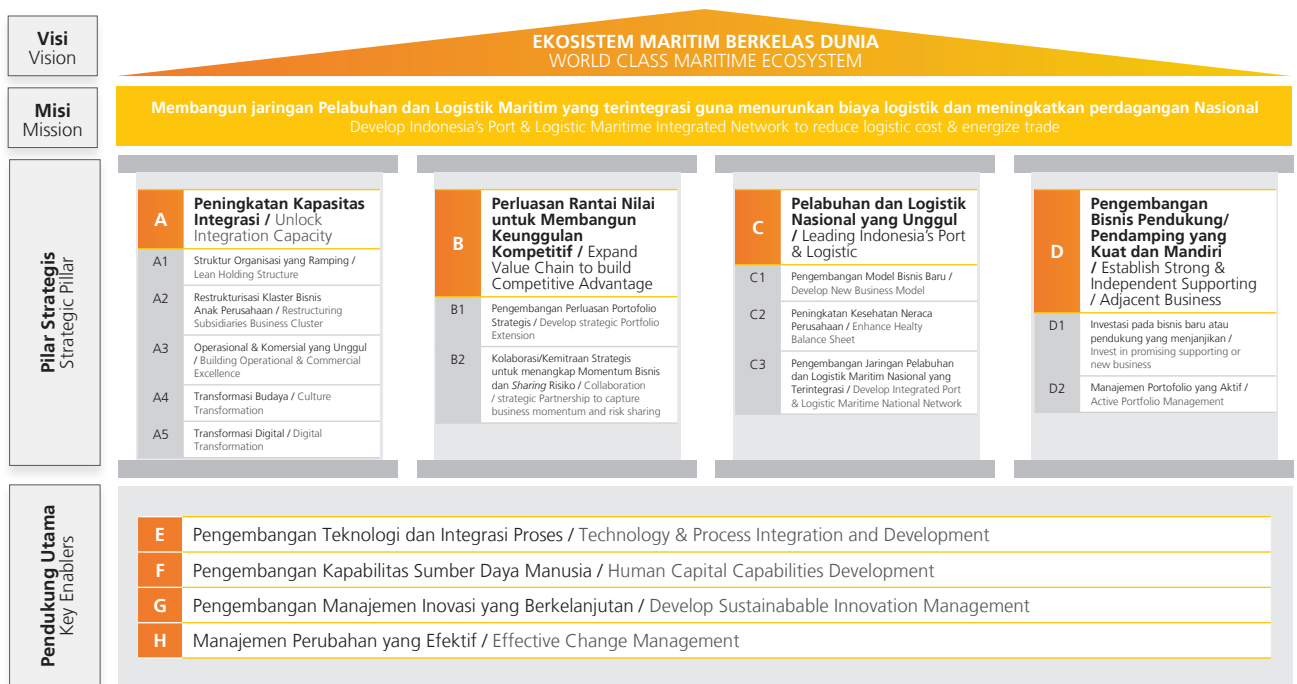
Selain itu, untuk mendukung terimplementasinya tindakan atau aktivitas dalam pilar strategis tersebut, telah dirancang pula beberapa pendukung utama yang merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama pada sisi fungsional yang akan mendorong kelancaran proses implementasi strategi. Secara visual strategi yang dirancang oleh perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai visi dan misi digambarkan dalam rumah strategi sebagai berikut.

CORPORATE STRATEGY HOUSE

The Company's strategy is based on a predetermined vision and mission as the goals that the Company is striving to achieve. The Company's vision and mission are supported by 4 (four) strategic pillars, which are a set of important actions or activities required to achieve its goals. These four strategic pillars are also activities or actions that are different from the Company's regular activities because they are expected to give unique values for the Company in the future.

In addition, to support the implementation of actions or activities in the strategic pillars, the Company set up several key enablers, which are a set of actions and main activities on the functional side that will facilitate the process of strategy implementation. The overall strategy designed by the Company to achieve its vision and mission are illustrated visually in a strategy house as follows.

Rumah Strategi Perusahaan 2020-2024 / Corporate Strategy House 2020-2024



Sumber: Analisis Internal IPC / Source: IPC Internal Analysis

Penjelasan dari masing-masing komponen dalam rumah strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pilar Strategis

A. Peningkatan Kapasitas Integrasi

Merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas grup perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan melakukan pengembangan bisnis korporasi ke arah yang lebih luas sesuai dengan target yang dicita-citakan dalam visi perusahaan yaitu membangun ekosistem *maritime* yang berkelas dunia. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka *unlock integration capacity* meliputi perencanaan struktur bisnis perusahaan beserta anak perusahaan, peningkatan kapasitas operasional dan komersial, transformasi budaya perusahaan, serta transformasi digital.

B. Perluasan Rantai Nilai untuk Membangun Keunggulan Kompetitif

Merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperluas layanan bisnis perusahaan di luar *core business* yang telah ada saat ini. Strategi ini dilakukan sejalan pula dengan visi perusahaan yang hendak masuk dan membangun ekosistem maritim sehingga dapat menjadi keunggulan perusahaan dalam berkompetisi dengan pelaku industri lainnya. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka implementasi *strategic pillars* ini meliputi penyusunan strategi perluasan portofolio serta membangun kolaborasi atau *partnership* dengan mitra dalam rangka perluasan bisnis dan *sharing* risiko.

C. Pelabuhan dan Logistik Nasional yang Unggul

Merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat dan mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pelaku utama dalam bisnis pelabuhan dan logistik yang merupakan bagian dari sebuah bisnis besar ekosistem maritim. Untuk mendukung strategi tersebut perusahaan telah merencanakan aktivitas atau tindakan yang meliputi pengembangan model bisnis, penguatan permodalan perusahaan (*healthy balance sheet*), serta pengembangan jaringan *Integrated Port & Logistic Maritime*.

D. Pengembangan Bisnis Pendukung/Pendamping yang Kuat dan Mandiri

Merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat aktivitas bisnis pendukung perusahaan yang telah ada sehingga dapat terus

The explanation of each component in the strategy house is described as follows:

Strategic Pillars

A. Unlock Integration Capacity

A strategic plan to increase the company group's capacity in order to improve service quality and develop corporate business in a more expansive direction according to the target set in the company's vision, namely to build a world-class maritime ecosystem. Activities or actions prepared in unlocking capacity integration include planning the business structure of the company and its subsidiaries, increasing operational and commercial capacity, transforming corporate culture, and digital transformation.

B. Expand Value Chain to Build Competitive Advantage

A strategic plan to expand the company's business services beyond the existing core business. This strategy is carried out in line with the company's vision of entering and building a maritime ecosystem to become the company's advantage in competing with other industry players. Activities or actions prepared in implementing these strategic pillars include developing a portfolio expansion strategy and building collaborations or partnerships for business expansion and risk sharing.

C. Leading Indonesia's Port & Logistics

A strategic plan to strengthen and solidify the company's position as a major player in the port and logistics business, which is part of a larger maritime ecosystem business. To support this strategy, the company planned activities or actions that include developing business model, strengthening the company's capital (healthy balance sheet), and developing the Integrated Port & Logistic Maritime network.

D. Establish Strong & Independent Supporting/ Adjacent Business

A strategic plan to strengthen the existing supporting business activities of the company so that it can continue to provide value and contribute to the company's core



memberikan nilai dan kontribusi bagi bisnis inti perusahaan. Strategi ini didukung oleh beberapa rencana aktivitas yang meliputi belanja modal/investasi pada sektor bisnis pendukung yang memiliki potensi pendapatan dan pengelolaan portofolio bisnis secara aktif.

Pendukung Utama

E. Pengembangan Teknologi dan Integrasi Proses

Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk memadukan antara kebutuhan proses kerja dan standar operasi yang diharapkan dengan tren teknologi dan *best practices* yang berkembang di industri. Inisiatif-inisiatif yang direncanakan sebagai bagian dari *enabler* ini diantaranya pengembangan IT *Infrastructure* dan sistemisasi proses bisnis.

F. Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan *human capital* yang unggul dan adaptif untuk dapat memasuki era bisnis perusahaan yang semakin luas dari yang semula dalam bidang *port & logistic* menjadi ekosistem maritim.

G. Pengembangan Manajemen Inovasi yang Berkelanjutan

Merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk membangun suatu tata kelola inovasi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keunggulan bersaing dalam setiap proses kerja maupun model bisnis perusahaan.

H. Manajemen Perubahan yang Efektif

Merupakan rencana strategi yang disusun untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung unit kerja maupun individu dalam perusahaan untuk dapat mengadopsi setiap perubahan-perubahan yang dihadapi dalam perjalanannya mencapai visi dan misi perusahaan.

ROADMAP PERUSAHAAN

Guna memastikan proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2024 menjadi **World Class Maritime Ecosystem**, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi perusahaan.

Perusahaan telah menyusun *roadmap* untuk setiap tahun sampai dengan tahun akhir periode RJPP ini dimana sasaran perusahaan hendak diraih dan akan menjadi acuan

business. This strategy is supported by several activity plans that include capital expenditure/investment in supporting business sectors with potential income and active management of business portfolios.

Key Enablers

E. Technology & Process Integration and Development

Activity or action to integrate the needs of the work process and the expected standard of operation with technological trends and best practices developing in the industry. Initiatives planned as part of this enabler include IT Infrastructure development and business process systemization.

F. Human Capital Capabilities Development

Activity or action to prepare excellent and adaptive human capital to enter into an era of the company's business that is expanding from the original field of ports & logistics into a maritime ecosystem.

G. Develop Sustainable Innovation Management

Activity or action to build sustainable innovation governance with the aim of increasing efficiency, effectiveness and competitive advantage in every work process and the company's business model.

H. Effective Change Management

A strategic plan to prepare, complement, and support work units and individuals in the company to be able to adopt any changes they face in achieving the company's vision and mission.

CORPORATE ROADMAP

To ensure that the process of achieving the targets is in line with the strategy and vision set for 2024 to become a World Class Maritime Ecosystem, it is necessary to develop a road map that serves as a guidance which provides an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the ultimate goal or the company's vision.

The company prepared a roadmap for each year up to the end of this RJPP period in which the company's targets are to be achieved. The roadmap serves as a reference in the

dalam proses implementasi strategi pada setiap tahun. Satu hal yang turut menjadi perhatian dalam penyusunan *roadmap* ini adalah berkenaan dengan *strategic direction* dari Pemegang Saham/Kementerian BUMN terkait Sinergi dan Integritas BUMN Layanan Pelabuhan dan *master plan cluster* Angkutan Laut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perusahaan merencanakan *roadmap* dengan asumsi bahwa di pertengahan tahun 2021 telah terimplementasi Integrasi dan Sinergi BUMN Layanan Pelabuhan.

process of strategy implementation every year. Another concern in the preparation of this roadmap was the strategic direction from the Shareholder or the Ministry of SOEs on the Synergy and Integrity of SOEs in Port Services as well as the Sea Transportation cluster master plan. In this regard, the company planned a roadmap with the assumption that in mid-2021, the Port Services SOEs Integration and Synergy has been implemented.

Adapun *corporate roadmap* IPC yang dimaksud adalah sebagai berikut:

The corporate roadmap of IPC is as follows:

Roadmap Perusahaan dan Tahapan Tujuan Bisnis 2020-2024 /
Corporate Roadmap and Staging of Business Objectives 2020-2024



Sumber: Analisis Internal IPC / Source: IPC Internal Analysis

Berikut penjelasan masing-masing *roadmap* pada setiap tahun:

Explanation of the roadmap in every year is as follows:

1. 2020 – Business Stabilization

1. 2020 - Business Stabilization

Setelah implementasi perbaikan pada berbagai aspek di tahun 2016-2019, IPC telah siap untuk menjadi pelabuhan kelas dunia pada tahun 2020 sebagaimana telah dicanangkan pada RJPP Periode 2015-2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka *staging* yang ingin dicapai perusahaan sebagai pijakan menuju visi di tahun 2024 adalah stabilisasi bisnis perusahaan sebagaimana telah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini *roadmap* disusun dengan asumsi bahwa perusahaan masih sebagai *stand alone company* BUMN Pelabuhan.

After implementing improvements in various aspects in 2016-2019, IPC is ready to become a world-class port in 2020 as set forth in the 2015-2019 RJPP. To that end, the staging that the company wants to achieve as a stepping stone towards the 2024 vision is the stabilization of the company's business as built in the previous years. In 2020, the roadmap is prepared with the assumption that the company is still a standalone SOE in the port sector.



Adapun beberapa *milestone* yang harus dicapai pada tahun 2020 sebagai komponen yang mendukung stabilitas bisnis adalah sebagai berikut:

- a. *Health and Safety of environment;*
- b. *Business Process Improvement;*
- c. *Revenue Optimization and Cost Effectiveness;*
- d. *Improvement Digital Capability;*
- e. *Capex Optimization for Value Creation.*

2. 2021 – Synergy & Improvement

Pada pertengahan tahun 2021 ditargetkan telah terbentuk Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan, berkenaan dengan hal tersebut maka *roadmap* yang disusun di tahun 2021 sampai dengan periode akhir RJPP di tahun 2024 adalah dengan mengakomodir kebutuhan dalam pencapaian strategi Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan selain untuk pencapaian strategi IPC sebagai *stand-alone company*. Oleh karena itu, *staging* yang ingin dicapai perusahaan sebagai pijakan menuju visi adalah *synergy & improvement* dengan *milestone* yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. *Digital Transformation;*
- b. *Culture Transformation;*
- c. *Business Model Innovation;*
- d. *Innovation Management;*
- e. *Subsidiaries Restructuring;*
- f. *Pelindo Synergy and Integration.*

3. 2022 – Growth Through Integration

Pada tahun 2022 IPC sebagai bagian dari Sinergi Integrasi Pelindo akan berfokus untuk membangun *Growth Through Integration* melalui beberapa strategi pada bidang operasi dan komersial yang ditargetkan tercapai di tahun ini yang meliputi:

- a. *Container Subsidiaries Integration;*
- b. *Operational Standardized Nationwide;*
- c. *Key Account Management Integration;*
- d. *Asset Optimization to Capture Business Opportunities;*
- e. *Logistic Marketplace Establishment.*

4. 2023 – Value Chain Expansion

Pada tahun 2023 IPC sebagai bagian dari Sinergi Integrasi Pelindo akan berfokus dalam mengembangkan kapasitas bisnis dengan melakukan *value chain expansion* untuk meningkatkan *competitive advantage*. Adapun beberapa *milestones* yang hendak dicapai di tahun ini adalah:

- a. *Develop Strategic Portfolio Extension;*
- b. *Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing;*

The milestones that must be achieved in 2020 as components that support business stability are as follows:

- a. Health and Safety of the environment;
- b. Business Process Improvement;
- c. Revenue Optimization and Cost Effectiveness;
- d. Improvement Digital Capability;
- e. Capex Optimization for Value Creation.

2. 2021 - Synergy & Improvement

The Synergy and Integration of Port Services SOEs is targeted to be established by mid-2021. Thus, the roadmap prepared for 2021 until the end of the RJPP period in 2024 accommodates the needs in achieving the strategy of Port Services SOEs Synergy and Integration in addition to achieving IPC's strategy as a standalone company. Thus, the staging that the company wants to achieve as a stepping stone towards the vision is synergy & improvement, whereas the milestones that must be achieved in 2021 are as follows:

- a. Digital Transformation;
- b. Culture Transformation;
- c. Business Model Innovation;
- d. Innovation Management;
- e. Restructuring Subsidiaries;
- f. Pelindo Synergy and Integration.

3. 2022 - Growth Through Integration

In 2022, IPC as part of the Pelindo Integration Synergy will focus on building Growth Through Integration through several strategies in the operational and commercial fields that are targeted to be achieved in this year, which include:

- a. Container Subsidiaries Integration;
- b. Operational Standardized Nationwide;
- c. Key Account Management Integration;
- d. Asset Optimization to Capture Business Opportunities;
- e. Logistic Marketplace Establishment.

4. 2023 - Value Chain Expansion

In 2023, IPC as part of the Pelindo Integration Synergy will focus on developing business capacity by carrying out value chain expansion to increase competitive advantage. The milestones to be achieved in this year are as follows:

- a. Develop Strategic Portfolio Extension;
- b. Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing;

- c. *Integrated Port Network (National Port Network Program);*
- d. *Strategic Projects (e.g. NPCT2) Realization.*

5. 2024 – Value Chain Integration

Setelah melakukan ekspansi dalam *value chain*, IPC kemudian mulai berperan aktif untuk menjadi integrator di sepanjang *value chain* tersebut untuk memberikan kemudahan dan *distinctive customer experience* bagi pengguna jasa. Adapun *milestones* yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. *Invest in Promising Supporting or New Businesses;*
- b. *Integrated Port & Logistic Network;*
- c. *Active Portfolio Management.*

Mengingat semua *milestones* pada setiap *roadmap* yang telah direncanakan adalah “pijakan” untuk mencapai visi *World Class Maritime Ecosystem*, maka penting bagi perusahaan untuk memastikan dan mendayagunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan semua *strategic pillars* beserta *key enablers* sehingga *milestones* dan sasaran perusahaan dapat tercapai.

KEBIJAKAN UMUM DAN FUNGSIONAL

Kebijakan Umum dan Fungsional IPC mencakup respon perusahaan terhadap kondisi eksternal, terutama terkait pandemi Covid-19, dan juga alur kerja dari Kantor Pusat, Cabang dan Anak Usaha. Berikut adalah penjelasan dari Kebijakan Umum dan Fungsional IPC.

Strategi Menghadapi Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid-19 terjadi secara global, Perusahaan perlu merumuskan beberapa kebijakan umum maupun fungsional agar dapat melaksanakan strategi dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Hampir semua sektor industri merasakan dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020. Banyak perusahaan yang pada akhirnya harus memutuskan untuk berhenti beroperasi hingga waktu yang tidak bisa ditentukan karena belum sempat mempersiapkan strategi bertahan/*survive* di situasi darurat seperti ini, sehingga kehilangan arah untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis baru.

- c. Integrated Port Network (National Port Network Program);
- d. Strategic Projects (e.g. NPCT2) Realization.

5. 2024 - Value Chain Integration

After expanding in the value chain, IPC will perform an active role as an integrator along the value chain to provide convenience and a distinctive customer experience for its service users. The milestones that must be achieved in 2024 are as follows:

- a. Invest in Promising Supporting or New Businesses;
- b. Integrated Port & Logistic Network;
- c. Active Portfolio Management.

Considering that all the milestones in each roadmap that have been planned are the “stepping stones” to achieve the vision of World Class Maritime Ecosystem, the company shall ensure and utilize all available resources to implement all strategic pillars and key enablers so as to achieve the milestones and company targets.

GENERAL AND FUNCTIONAL POLICIES

IPC’s General and Functional Policies cover the company’s response to external conditions, especially related to Covid-19 pandemic, as well as the workflow of the Head Office, Branches, and Subsidiaries. The explanation of IPC’s General and Functional Policies is as follows.

Strategies for Facing Covid-19 Pandemic

With the global occurrence of Covid-19 pandemic, the Company needs to formulate general and functional policies in order to carry out strategies to achieve the company’s vision and mission.

Almost all industrial sectors were affected by Covid-19 outbreak in Indonesia since the beginning of March 2020. Numerous companies ultimately decided to cease operations indefinitely as they have not prepared a survival strategy for such emergency situation, thus losing direction to adapt to the new business environment.



Untuk mengantisipasi kondisi buruk yang mungkin terjadi akibat pandemi sebagaimana terjadi di masa awal Covid-19 merebak di China dan Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional, Perusahaan telah merancang secara khusus suatu strategi *Business Stabilization* dengan pendekatan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan operasional dapat tetap berjalan di tengah kondisi pandemi.

Strategi *Business Stabilization* ini terdiri dari 3 (tiga) fase yang dibangun untuk menjaga stabilisasi kondisi ekonomi di masa pandemi, menangkan peluang bisnis pada era *New Normal*/Paska Pandemi, dan membangun *competitive advantage* perusahaan untuk *business sustainability* ke depan. Strategi *Business Stabilization* dengan pendekatan BCM ini diuraikan pada tabel di bawah ini.

To anticipate bad conditions that might occur due to the pandemic as in the early phases of Covid-19 outbreak in China and Indonesia, which caused uncertainty in global and national economic conditions, the Company specially designed a Business Stabilization strategy with a Business Continuity Management (BCM) approach to ensure operations can continue in the midst of a pandemic.

This Business Stabilization Strategy consists of 3 (three) phases that are built to stabilize economic conditions during the pandemic, win business opportunities in the New Normal/Post-Pandemic era, and build the company's competitive advantage for future business sustainability. The Business Stabilization Strategy with BCM approach is described in the table below.

Strategi di Masa Pandemi dengan Pendekatan BCM Framework / Strategy During Pandemic Using BCM Framework Approach		
Tahapan & Strategi Respon / Phase & Response Strategy	Key Initiatives	
1. Periode Covid-19/Pandemi Lainnya / Covid-19 Period/Other Pandemic		
Stabilisasi Bisnis / Business Stabilization	Keselamatan dan Kesehatan di Lingkungan Kerja Safety and Health in the Work Environment <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan protokol kesehatan dan SOP <i>New Normal</i> - Penerapan pola <i>Smart Work</i> - Pembentukan Satgas Covid-19 	
	Mempertahankan dan Meningkatkan Pelayanan Maintaining and Improving Service <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan pelayanan operasional sesuai dengan protokol - Pemberian insentif tarif dan fasilitas serta <i>loyalty reward</i> kepada pelanggan - Reviu proses bisnis 	
	Optimalisasi Pendapatan and Efektivitas Biaya Revenue Optimization dan Cost Effectiveness <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan terintegrasi dan <i>tailored service</i>, serta peningkatan layanan <i>online</i> kepada <i>customer</i> - Peningkatan Digitalisasi di Operasional (termasuk pelayanan <i>online</i> kepada <i>customer</i>) dan Kantor/<i>back office</i> (termasuk <i>online training</i>) - Prioritas pada <i>must have</i> program 	
	2. Periode Dampak Industri / Industry Impact Period	
	Perbaikan Bisnis / Business Recovery	Penyempurnaan Metode Kerja <i>New Normal</i> Improvement of the New Normal Work Method <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan metode <i>Smart Work</i> pada masa <i>New Normal</i> untuk bekerja secara fleksibel & efektif - Penyempurnaan struktur dan jalur komunikasi yang jelas, efektif & efisien
		Peningkatan Kapabilitas Digital Enhanced Digital Capability <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapabilitas IT (Operasional, <i>Back Office</i>, <i>Front End</i>) yang berkelanjutan, baik di level Induk maupun Anak Perusahaan pada grup IPC
		Optimalisasi Capex untuk Value Creation dan Mengoptimalkan Diversifikasi Usaha Optimizing Capex for Value Creation and Optimizing Business Diversification <ul style="list-style-type: none"> - Investasi pada Anak Perusahaan bidang IT - Investasi pada Anak Perusahaan Jalan Tol

Strategi di Masa Pandemi dengan Pendekatan BCM Framework /
Strategy During Pandemic Using BCM Framework Approach

Tahapan & Strategi Respon / Phase & Response Strategy	Key Initiatives	
3. Periode Normal Selanjutnya / The Next Normal Period		
Keberlanjutan Bisnis / Business Sustainability	<p>Transformasi Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital dengan merepresentasikan cara baru dalam berbisnis, melalui perbaikan dalam: <i>technology, people, process & budaya</i> - Mendorong digitalisasi pada ekosistem maritim (<i>enterprise dan stakeholder</i>) 	<p>Digital Transformation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital in representing a new way of doing business through improvements in: <i>technology, people, process & culture</i> - Encouraging digitalization in the maritime ecosystem (<i>enterprise and stakeholders</i>)
	<p>Inovasi Model Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terutama terkait <i>Value Propositions, Key Partnership/ Resources, Channel, Customer Segment</i> - Mengelola terminal di luar lingkungan Pelindo - Mendorong penggunaan produk lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) - Ekspansi bisnis secara vertikal 	<p>Business Model Innovation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Particularly on <i>Value Propositions, Key Partnership/ Resources, Channels, Customer Segment</i> - Managing terminals outside Pelindo environment - Encouraging the use of local products or Domestic Component Level (TKDN) - Vertical business expansion
	<p>Pengembangan Inovasi yang Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Exploit</i>: Optimalisasi dan improvement terhadap potensi/ <i>resource</i> yang dimiliki untuk dapat meningkatkan produktivitas secara efektif & efisien - <i>Explore</i>: Mencari ide untuk menangkap peluang & mengembangkan bisnis "<i>the New and the Next</i>" 	<p>Sustainable Innovation Development</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Exploit</i>: Optimization and improvement of existing potential/resources to increase productivity effectively & efficiently - <i>Explore</i>: Looking for ideas to seize opportunities & develop "<i>the New and the Next</i>" business

Sumber: Analisis Internal IPC / Source: IPC Internal Analysis

INISIATIF STRATEGIS PERUSAHAAN

Guna menuju visi perusahaan sesuai dengan yang dijelaskan pada *Roadmap* Perusahaan maka program atau inisiatif strategis yang mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut harus diterapkan. Sasaran strategis perusahaan tersebut tertuang dalam *strategic pillars* dan *key enablers* pada rumah strategi perusahaan.

Inisiatif strategis yang didefinisikan dari turunan sasaran strategis tersebut harus selaras dengan arahan dari Kementerian BUMN terkait 5 agenda prioritas BUMN. Adapun implementasi inisiatif strategis tersebut juga telah dipetakan kebutuhan anggarannya, beberapa inisiatif strategis membutuhkan anggaran investasi dan beberapa lainnya menggunakan anggaran operasional (Opex).

Adapun inisiatif strategis IPC tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Implementasi *e-equipment* untuk mendukung manajemen peralatan kelas dunia;
- Penguatan kapabilitas *project management* untuk memastikan ketercapaian proyek;
- Implementasi Program *Green Port/Green Technology*;
- Standarisasi metodologi kerja operasional di seluruh cabang pelabuhan;
- Peningkatan *brand value* melalui nasional/internasional dan publikasi/aktivitas;
- Pembentukan dan implementasi *governance risk compliance* secara berkelanjutan;

COMPANY STRATEGIC INITIATIVES

To achieve the company's vision as described in the Company Roadmap, the company executes strategic programs or initiatives that support the achievement of these strategic targets. The strategic targets of the company are incorporated in the strategic pillars and key enablers of the corporate strategy house.

Strategic initiatives derived from the strategic objectives must be in line with the direction of the Ministry of SOEs regarding 5 priority agenda of SOE. To implement these strategic initiatives, the company mapped the budget requirements, in which some strategic initiatives require an investment budget while the others use the operational budget (Opex).

IPC's strategic initiatives in 2020 are as follows:

- Implementation of *e-equipment* to support world-class equipment management;
- Strengthening project management capabilities to ensure project achievement;
- Implementation of *Green Port/Green Technology* Program;
- Standardization of operational work methodologies in all port branches;
- Increasing brand value through national and international publications and activities;
- Establishment and implementation of *governance risk compliance* in a sustainable manner;



- Integrasi dan sinergi BUMN pelabuhan;
- Pembentukan *innovation excellence* untuk mempercepat pertumbuhan IPC;
- Peningkatan efisiensi biaya melalui pengelolaan biaya pajak dari *intertransaction* Anak Perusahaan
- Pengembangan bisnis pendukung untuk mendukung bisnis inti;
- Peningkatan sistem audit digital;
- *Review* dan *monitoring* implementasi perencanaan strategis Perusahaan;
- Peningkatan sistem operasional pelabuhan (TOS, MOS, dll);
- Implementasi *shared service centres*;
- *Smart work* dan integrasi sistem pelayanan SDM berdasarkan analisis data;
- Ekspansi pasar melalui pengembangan area industri;
- Implementasi pengembangan pelabuhan (Kijing, New Priok, dll);
- Program transformasi budaya;
- Pembentukan program *integrated leadership pipeline*;
- *Smart learning*;
- Transformasi Divisi Legal untuk mewujudkan tujuan bisnis Perusahaan.
- Integration and synergy of port SOEs;
- Establishment of innovation excellence to accelerate the growth of IPC;
- Increasing cost efficiency by managing tax costs from Subsidiary intertransactions
- Development of supporting businesses to support core businesses;
- Improvement of the digital audit system;
- Reviewing and monitoring the implementation of the Company's strategic planning;
- Improving port operational systems (TOS, MOS, etc.);
- Implementation of shared service centers;
- Smart work and integration of HC service systems based on data analysis;
- Market expansion through industrial area development;
- Implementation of port development (Kijing, New Priok, etc.);
- Cultural transformation program;
- Establishment of an integrated leadership pipeline program;
- Smart learning;
- Transformation of the Legal Division to achieve the Company's business goals.

PROGRAM TRANSFORMASI PERUSAHAAN

Guna mempersiapkan diri untuk menghadapi era *New Normal* serta dalam rangka membangun *Competitive Advantage* untuk menjadi lebih kompetitif, *resilience* dalam menghadapi krisis lainnya di masa mendatang, serta untuk membangun *Sustainability Business* Perusahaan ke depan, telah direncanakan beberapa Program Transformasi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.

COMPANY TRANSFORMATION PROGRAM

To prepare for the New Normal era and in order to build Competitive Advantage to be more competitive and resilient in the face of future crises, as well as to build the Company's Business Sustainability in the future, several Transformation Programs have been planned at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the 2020 – 2024 period.

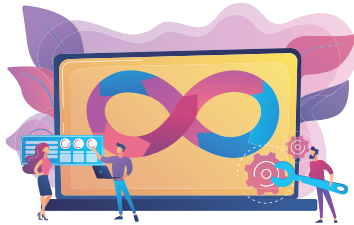


ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Implementasi strategi pemasaran yang dilakukan IPC selama tahun 2020 difokuskan pada pendekatan pelanggan dan percepatan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Aspek Pelanggan



CUSTOMER ACQUISITION PEROLEHAN PELANGGAN

Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru dan pelayanan yang menarik.

New customers are obtained by providing easy access to information, new innovations and attractive services.



Kategori Pelanggan / Customer Categories

- Diskon tarif jasa /
Discount for Service Tariff
- Diferensiasi jasa /
Service Differentiation
- Layanan logistik terintegrasi /
Integrated Logistics Services
- Implementasi i-Hub & e-Services /
Implementation of i-Hub & e-Services

MARKETING ASPECT

MARKETING STRATEGY

The marketing strategy implementation by IPC during 2020 was focused on customer approach and acceleration of the services needed by customers.

Customer Aspect



CUSTOMER COMMUNICATION KOMUNIKASI PELANGGAN

Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya (End User).

The company tries to establish relationships with customers through providing good service to its customers (End User).



- Jumpa Pelanggan /
Customer Gathering
- Kunjungan Pelanggan /
Customer Visit
- Sapa Pagi /
Coffee Morning



CUSTOMER RETENTION RETENSI PELANGGAN

Usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan.

Businesses get customer loyalty by listening to customers and trying to fulfill customer desires.



- Penghargaan Pelanggan /
Customer Award
- Perjalanan Dinas /
Business Trip
- Manajemen Pelanggan Utama /
Key Account Management
- Layanan Pelanggan /
Customer Care

Berikut adalah uraian mengenai strategi pemasaran IPC di tahun 2020 yang melingkupi Aspek Pasar, Aspek Produk/Service, Aspek Saluran Promosi dan Aspek Harga.

Aspek Pasar

Aspek pasar pada tahun 2020 mengedepankan kekuatan IPC dalam mempertahankan dan mengoptimalkan pasar yang ada, seperti sinergitas kerja sama di dalam IPC Group dan meningkatkan kerja sama dengan mitra/pelanggan yang telah dimiliki. Di masa pandemi Covid-19 yang sudah dimulai pada akhir Triwulan I-2020, IPC memberikan stimulus untuk jasa kepelabuhan kepada pelanggan berupa *reward*, kelonggaran waktu pembayaran dan keringanan lainnya.

The following is the description of IPC marketing strategy in 2020 which covers Market Aspect, Product/Service Aspect, Promotion Channel Aspects and Price Aspect.

Market Aspect

Market aspect in 2020 prioritized IPC's strengths in maintaining and optimizing existing markets, such as cooperation synergy within IPC Group and improving cooperation with existing partners/customers. During the Covid-19 pandemic which began at the end of the first quarter of 2020, IPC provided stimulus for port services to customers in the form of rewards, leniency in payment schedule, and other relief.



Aspek Produk/Layanan

Aspek Produk/Layanan di tahun 2020 diperkuat melalui percepatan komersialisasi Pelabuhan Kijing, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, IPC juga mendorong percepatan pengembangan Terminal Kalibaru (CT-2 & CT-3, PT-1 & PT-2).

Aspek Saluran Promosi

IPC memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada para pengguna jasa atau calon mitra/investor berupa Jasa Kepelabuhan (Jasa Kapal, Jasa Barang, Jasa Rupa-Rupa). Selain produk/jasa, IPC juga menawarkan proyek pengembangan pelabuhan serta pemanfaatan aset perusahaan. Untuk itu saluran promosi yang digunakan oleh IPC adalah sebagai berikut:

1. *Coffee Morning/Marketing Outlook/Gathering/Business Forum*;
2. Ekshibisi/pameran;
3. *Join marketing in IPC Group*; dan
4. Publikasi melalui media cetak (surat kabar, majalah dan lainnya) dan media elektronik (TC dan media sosial).

Aspek Harga

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga dalam memasarkan produk/jasa, antara lain:

1. Menawarkan tarif yang kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan kompetitor;
2. Memberikan potongan tarif (diskon);
3. Memberikan kompensasi (*reward*);
4. Memberikan insentif; dan
5. Memberikan kelonggaran waktu pembayaran dalam periode waktu tertentu.

Product/Service Aspect

Product/Service Aspect in 2020 was strengthened by accelerating the commercialization of Kijing Port, Mempawah, West Kalimantan Province. In addition, IPC also encouraged accelerated development of Kalibaru Terminals (CT-2 & CT-3, PT-1 & PT-2).

Promotion Channel Aspect

IPC offers products/services to service users or potential partners/investors in the form of Port Services (Vessel Services, Cargo Services, and Miscellaneous Services). Apart from products/services, IPC also offers port development projects as well as utilization of company assets. For this reason, the promotion channels used by IPC are as follows:

1. *Coffee Morning/Marketing Outlook/Gathering/Business Forum*;
2. Exhibition;
3. *Join marketing in the IPC Group*; and
4. Publication through print media (newspapers, magazines and others) and electronic media (TC and social media).

Price Aspect

Marketing strategy using rates or price approach in marketing products/services include:

1. Offering competitive rates compared to competitor ports;
2. Providing discounts;
3. Providing compensation (*reward*);
4. Providing incentives; and
5. Providing leniency for payment within a certain period of time.

PANGSA PASAR

MARKET SHARE

Pangsa Pasar Tahun 2019 – 2020 / Market Share in 2019 – 2020		
Uraian / Description	Tahun / Year	
	2020	2019
Petikemas / Container		
IPC	44,80%	46,04%
Pesaing / Competitor	55,20%	53,96%
Non Petikemas / Non-container		
IPC	26,09%	25,76%
Pesaing / Competitor	73,91%	74,24%

Pada tahun 2020, pangsa pasar yang dilayani oleh IPC untuk bongkar muat petikemas tercatat sebesar 44,80 persen, turun dibandingkan pangsa pasar tahun 2019 yang sebesar 46,04 persen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19 yang membuat beberapa negara tujuan ekspor maupun impor *me-lockdown* pelabuhan sebagai pintu masuk perdagangannya dari negara lain, sehingga membuat beberapa terminal di Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani kegiatan ekspor-impor mengalami penurunan trafik petikemas. Selain itu, adanya kelangkaan *empty-container* membuat arus petikemas ekspor-impor tersendat, dan secara akumulatif membuat penurunan arus petikemas di pelabuhan-pelabuhan IPC.

Sementara itu, pangsa pasar non petikemas yang dilayani IPC pada tahun 2020 tercatat sebesar 26,09 persen, naik dibandingkan pangsa pasar tahun 2019 sebesar 25,76 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan bongkar-muat domestik yang tumbuh 5 persen.

UNIT PENUNJANG OPERASIONAL PERUSAHAAN

ALAT PRODUKSI

IPC memiliki alat-alat produksi yang berfungsi untuk menunjang aktivitas operasional Perseroan di bidang jasa kepelabuhanan. Berikut ini merupakan uraian mengenai kekuatan Alat Produksi IPC pada tahun 2020.

PELAYANAN JASA KAPAL

Terdapat 2 (dua) jenis alat produksi yang menunjang Pelayanan Jasa Kapal Perseroan, yaitu Tambatan Beton dan Kapal Tunda.

TAMBATAN BETON

Realisasi tahun 2020 untuk Tambatan Beton adalah sepanjang 26.612 meter, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sepanjang 26.541 meter. Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Pontianak sepanjang 55 meter karena merupakan *Jetty* untuk tambatan beton.
- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Bengkulu sepanjang 16 meter Dermaga *Conveyor A* yang mulai beroperasi.

In 2020, the market share served by IPC for container loading and unloading was recorded at 44.80 percent, down from the market share in 2019 at 46.04 percent. This was caused by Covid-19 pandemic which forced several export and import destination countries to impose lockdown on ports as the entry for trade from other countries, causing several terminals at Tanjung Priok Port which serve export and import activities to experience traffic reduction. In addition, the scarcity of empty containers hampered export-import container flow, leading to a decrease in accumulative container flow in IPC ports.

Meanwhile, non-container market share served by IPC in 2020 was recorded at 26.09 percent, increased from the market share in 2019 at 25.76 percent. This was due to the growth of domestic loading and unloading activities by 5 percent.

COMPANY OPERATIONAL SUPPORT UNIT

PRODUCTION TOOLS

IPC has production tools that support the Company's operational activities in the port services sector. The description of the capacity of IPC's Production Tools in 2020 is as follows.

VESSEL SERVICES

There are 2 (two) types of production tools that support the Company's Vessel Services, namely Concrete Mooring and Tugboats.

CONCRETE MOORING

The 2020 realization of Concrete Mooring amounted to 26,612 meter, while the 2019 realization amounted to 26,541 meter. This difference was due to:

- Additional 55 meter in Pontianak Port Branch as a *Jetty* for concrete mooring.
- Additional 16 meters in Bengkulu Port Branch in *Conveyor A Dock* which commenced operations.



KAPAL TUNDA

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk Kapal Tunda sebanyak 44 Unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 38 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2 unit dari hasil investasi.
- Penambahan pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebanyak 4 unit dari hasil investasi.

PELAYANAN JASA BARANG

Terdapat 3 (tiga) jenis alat produksi yang menunjang Pelayanan Jasa Barang Perseroan, yaitu Dermaga, Gudang Penumpukan, dan Lapangan Penumpukan.

DERMAGA

Realisasi tahun 2020 untuk Dermaga adalah seluas 604.150 m², sedangkan realisasi tahun 2019 adalah seluas 603.974 m². Perbedaan ini disebabkan oleh penambahan pada Cabang Pelabuhan Bengkulu seluas 176 m² karena Dermaga *Conveyor A* yang mulai beroperasi.

GUDANG PENUMPUKAN

Realisasi tahun 2020 untuk Gudang Penumpukan adalah seluas 209.113 m², sedangkan realisasi tahun 2019 adalah seluas 204.613 m². Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan seluas 2.900 m² pada PT MTI hasil dari koreksi pencatatan.
- Penambahan seluas 1.600 m² Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa hasil BOT oleh PT Karya Terpadu.

LAPANGAN PENUMPUKAN

Realisasi tahun 2020 untuk Lapangan Penumpukan adalah seluas 2.864.262 m², sedangkan realisasi tahun 2019 adalah seluas 2.760.682 m². Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok seluas 38.639 m² karena pembangunan bekas Lapangan Smart, Lapangan Pacific Paint Tahap II dan Lapangan *Common Gate* Sisi Selatan *Long Room* yang berasal dari kegiatan investasi.
- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Palembang seluas 251 m² yang berasal dari kegiatan investasi.
- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa seluas 3.200 m² merupakan lapangan bekas Kantor Bea Cukai yang berasal dari kegiatan investasi.
- Penambahan pada Cabang Pelabuhan Pangkal Balam seluas 40 m² akibat dari koreksi pencatatan.
- Penambahan pada PT MTI seluas 61.450 m² yang berasal dari kegiatan investasi.

TUGBOATS

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Tugboats amounted to 44 units, while the 2019 realization amounted to 38 units. This difference was due to:

- Additional 2 units in Tanjung Priok Port Branch from investment returns.
- Additional 4 units of PT Jasa Armada Indonesia Tbk from investment returns.

CARGO SERVICES

There are 3 (three) types of production tools that support the Company's Cargo Services, namely Docks, Storage Warehouse, and Storage Yard.

DOCKS

The 2020 realization of Docks amounted to 604,150 m², while the 2019 realization amounted to 603,974 m². This difference was due to additional 176 m² in Bengkulu Port Branch as *Conveyor A Dock* commenced operations.

STORAGE WAREHOUSE

The 2020 realization of Storage Warehouse amounted to 209,113 m², while the 2019 realization amounted to 204,613 m². This difference was due to:

- Additional 2,900 m² in PT MTI from record corrections.
- Additional 1,600 m² in Sunda Kelapa Port Branch from BOT result by PT Karya Terpadu.

STORAGE YARD

The 2020 realization of Storage Yard amounted to 2,864,262 m², while the 2019 realization amounted to 2,760,682 m². This difference was due to:

- Additional 38.639 m² in Tanjung Priok Port Branch due to the construction of former Smart Yard, Pacific Paint Yard Phase II, and Common Gate Yard at the Southern Side of Long Room from investment activities.
- Additional 251 m² in Palembang Port Branch from investment activities.
- Additional 3,200 m² in Sunda Kelapa Port Branch from former Customs and Excise Office Yard from investment activities.
- Additional 40 m² in Pangkal Balam Port Branch from record corrections.
- Additional 61,450 m² in PT MTI from investment activities.

PELAYANAN TERMINAL

Terdapat 10 (sepuluh) jenis alat produksi yang menunjang Pelayanan Terminal Perseroan, yaitu *Rubber Tired Gantry (RTG)*, *Forklift*, *Dump Truck*, *Bulldozer*, *Excavator*, *Head Truck*, *Road Truck*, *Chassis Trailer*, *Conveyor*, dan *Jembatan Timbang*.

RUBBER TIRED GANTRY (RTG)

Milik Konservasi

Pada tahun 2020, jumlah *Rubber Tired Gantry (RTG)* tercatat nihil, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 5 unit, yang merupakan hasil dari koreksi pencatatan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

FORKLIFT

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Forklift* sebanyak 91 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 90 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak 2 unit yang semula kategori pelayanan Terminal Petikemas menjadi pelayanan Terminal dan pengurangan 1 unit yang semula siap guna menjadi konservasi karena akan diusulkan penghapusan.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Forklift* sebanyak 3 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 2 unit. Perbedaan ini terjadi karena terdapat penambahan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak 1 unit, yang semula siap guna menjadi konservasi karena akan diusulkan penghapusan.

DUMP TRUCK

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Dump Truck* sebanyak 10 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 sebanyak 11 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh pengurangan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 1 unit, yang semula siap guna menjadi konservasi karena akan diusulkan penghapusan.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Dump Truck* sebanyak 2 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 1 unit. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 1 unit yang semula siap guna menjadi konservasi, karena akan diusulkan penghapusan.

TERMINAL SERVICES

There are 10 (ten) types of production tools that support the Company's Terminal Services, namely *Rubber Tired Gantry (RTG)*, *Forklift*, *Dump Truck*, *Bulldozer*, *Excavator*, *Head Truck*, *Road Truck*, *Chassis Trailer*, *Conveyor*, and *Weighbridge*.

RUBBER TIRED GANTRY (RTG)

Conserved Ownership

In 2020, total *Rubber Tired Gantry (RTG)* was recorded at zero, while the 2019 realization amounted to 5 units from correction of records in PT Pelabuhan Tanjung Priok.

FORKLIFT

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of *Forklift* amounted to 91 units, while the 2019 realization amounted to 90 units. This difference was due to the addition of 2 units in Teluk Bayur Port Branch which changed in category from Container Terminal services to Terminal services as well as the reduction of 1 unit which changed in status from ready-to-use to conserved due to proposed write-off.

Conserved Ownership

The 2020 realization of *Forklift* amounted to 3 units, while the 2019 realization amounted to 2 units. This difference was due to the addition of 1 unit in Teluk Bayur Port Branch which changed in status from ready-to-use to conserved due to proposed write-off.

DUMP TRUCK

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of *Dump Truck* amounted to 10 units, while the 2019 realization amounted to 11 units. This difference was due to the reduction of 1 unit in Tanjung Priok Port Branch which changed in status from ready-to-use to conserved due to proposed write-off.

Conserved Ownership

The 2020 realization of *Dump Truck* amounted to 2 units, while the 2019 realization amounted to 1 unit. This difference was due to the addition of 1 unit in Tanjung Priok Port Branch which changed in status from ready-to-use to conserved due to proposed write-off.



BULDOZER

Milik Siap Guna

Realisasi Tahun 2020 untuk *Buldozer* sebanyak 2 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 1 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit dari hasil investasi pada Cabang Pelabuhan Bengkulu.

EXCAVATOR

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Excavator* sebanyak 16 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 15 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit dari hasil investasi pada Cabang Pelabuhan Bengkulu.

HEAD TRUCK

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Head Truck* sebanyak 134 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 87 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan 48 unit *Chassis Trailer* yang berasal dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada PT Multi Terminal Indonesia.
- Pengurangan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak 1 unit karena yang semula siap guna menjadi konservasi.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Head Truck* sebanyak 7 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 6 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak 1 unit karena yang semula siap guna menjadi konservasi.

ROAD TRUCK

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Road Truck* sebanyak 15 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 14 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit *Road Truck* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Pontianak.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Road Truck* tercatat nihil, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 1 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan 1 unit *Road Truck* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Pontianak.

BULLDOZER

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Bulldozer amounted to 2 units, while the 2019 realization amounted to 1 unit. This difference was due to the addition of 1 unit from investment returns in Bengkulu Port Branch.

EXCAVATOR

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Excavator amounted to 16 units, while the 2019 realization amounted to 15 units. This difference was due to the addition of 1 unit from investment returns in Bengkulu Port Branch.

HEAD TRUCK

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Head Truck amounted to 134 units, while the 2019 realization amounted to 87 units. This difference was due to:

- Addition of 48 units of Chassis Trailer from investment returns of Port Facility Equipment in PT Multi Terminal Indonesia.
- Reduction of 1 unit in Teluk Bayur Port Branch which changed in status from ready-to-use to conserved.

Conserved Ownership

The 2020 realization of Head Truck amounted to 7 units, while the 2019 realization amounted to 6 units. This difference was due to the addition of 1 unit in Teluk Bayur Port Branch which changed in status from ready-to-use to conserved.

Road Truck

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Road Truck amounted to 15 units, while the 2019 realization amounted to 14 units. This difference was due to the addition of 1 unit of Road Truck which changed in status from conserved to ready-to-use in Pontianak Port Branch.

Conserved Ownership

The 2020 realization of Road Truck was zero, while the 2019 realization amounted to 1 unit. This difference was due to the reduction of 1 unit which changed in status from conserved to ready-to-use in Pontianak Port Branch.

CHASSIS TRAILER

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Chassis Trailer* adalah sebanyak 159 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 120 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 39 unit *Chassis Trailer* yang berasal dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada PT Multi Terminal Indonesia.

CONVEYOR

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Conveyor* sebanyak 4 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 3 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit *Conveyor* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Bengkulu.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Conveyor* tercatat nihil, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 1 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan 1 unit *Conveyor* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Bengkulu.

JEMBATAN TIMBANG

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk Jembatan Timbang adalah sebanyak 24 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 18 unit. Perbedaan terjadi karena terdapat:

- Penambahan 2 unit Jembatan Timbang dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada Cabang Pelabuhan Pontianak.
- Penambahan 4 unit Jembatan Timbang dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS

Terdapat 4 (empat) jenis alat produksi yang menunjang Pelayanan Terminal Petikemas Perseroan, yaitu *Head Truck*, *Chassis Trailer*, *Forklift*, dan *Terminal Tractor*.

HEAD TRUCK

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Head Truck* sebanyak 12 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 13 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan 1 unit *Head Truck* yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.

CHASSIS TRAILER

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Chassis Trailer amounted to 159 units, while the 2019 realization amounted to 120 units. This difference was due to the addition of 39 units of Chassis Trailer from investment returns of Port Facilities Equipment in PT Multi Terminal Indonesia.

CONVEYOR

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Conveyor amounted to 4 units, while the 2019 realization amounted to 3 units. This difference was due to the addition of 1 unit of Conveyor which changed in status from conserved to ready-to-use in Bengkulu Port Branch.

Conserved Ownership

The 2020 realization of Conveyor was zero, while the 2019 realization amounted to 1 unit. This difference was due to the reduction of 1 unit of Conveyor which changed in status from conserved to ready-to-use in Bengkulu Port Branch.

WEIGHBRIDGE

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Weighbridge amounted to 24 units, while the 2019 realization amounted to 18 units. This difference was due to:

- Addition of 1 unit of Weighbridge from investment returns of Port Facilities Equipment in Pontianak Port Branch.
- Addition of 4 units of Weighbridge from investment returns of Port Facilities Equipment in PT Pelabuhan Tanjung Priok.

CONTAINER TERMINAL SERVICES

There are 4 (four) types of production tools that support the Company's Container Terminal Services, namely *Head Truck*, *Chassis Trailer*, *Forklift*, and *Terminal Tractor*.

HEAD TRUCK

Conserved Ownership

The 2020 realization of Head Truck amounted to 12 units, while the 2019 realization amounted to 13 units. This difference was due to the reduction of 1 unit of Head Truck which changed in status from ready-to-use to conserved in Teluk Bayur Port Branch.



CHASSIS TRAILER

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Chassis Trailer* adalah sebanyak 57 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 58 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan 1 unit *Chassis Trailer* yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.

Milik Konservasi

Realisasi Tahun 2020 untuk *Chassis Trailer* sebanyak 13 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 12 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit *Chassis Trailer* yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.

FORKLIFT

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Forklift* sebanyak 7 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 9 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak 2 unit yang semula kategori pelayanan Terminal Petikemas menjadi pelayanan Terminal.

TERMINAL TRACTOR

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Terminal Tractor* sebanyak 45 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 46 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengurangan 1 unit *Terminal Tractor* yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Pontianak.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Terminal Tractor* sebanyak 5 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 4 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit *Terminal Tractor* yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Pontianak.

LAIN-LAIN

Ramp Door (Pelayanan Terminal)

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Ramp Door* (Pelayanan Terminal) adalah sebanyak 8 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 9 unit. Perbedaan ini terjadi karena adanya :

- Penambahan 1 unit dari hasil koreksi pencatatan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Pengurangan 2 unit yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Banten.

CHASSIS TRAILER

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Chassis Trailer amounted to 57 units, while the 2019 realization amounted to 58 units. This difference was due to the reduction of 1 unit of Chassis Trailer which changed in status from ready-to-use to conserved in Teluk Bayur Port Branch.

Conserved Ownership

The 2020 realization of Chassis Trailer amounted to 13 units, while the 2019 realization amounted to 12 units. This difference was due to the addition of 1 unit of Chassis Trailer which changed in status from ready-to-use to conserved in Teluk Bayur Port Branch.

FORKLIFT

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Forklift amounted to 7 units, while the 2019 realization amounted to 9 units. This difference was due to the reduction of 2 units of Chassis Trailer in Teluk Bayur Port Branch which changed in category from Container Terminal services to Terminal services.

TERMINAL TRACTOR

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Terminal Tractor amounted to 45 units, while the 2019 realization amounted to 46 units. This difference was due to the reduction of 1 unit of Terminal Tractor which changed in status from ready-to-use to conserved in Pontianak Port Branch.

Conserved Ownership

The 2020 realization of Terminal Tractor amounted to 5 units, while the 2019 realization amounted to 4 units. This difference was due to the addition of 1 unit of Terminal Tractor which changed in status from ready-to-use to conserved in Pontianak Port Branch.

OTHERS

Ramp Door (Terminal Services)

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of Ramp Door (Terminal Services) amounted to 8 units, while the 2019 realization amounted to 9 units. This difference was due to:

- Addition of 1 unit from correction of records in PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Reduction of 2 units which changed in status from ready-to-use to conserved in Banten Port Branch.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Ramp Door* (Pelayanan Terminal) sebanyak 5 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 3 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 2 unit yang semula siap guna menjadi konservasi pada Cabang Pelabuhan Banten.

Hopper

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Hopper* sebanyak 36 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 28 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh:

- Penambahan 4 unit *Hopper* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Banten.
- Penambahan 4 unit *Hopper* dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Milik Konservasi

Realisasi tahun 2020 untuk *Hopper* tercatat nihil, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 4 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh pengurangan 4 unit *Hopper* yang semula konservasi menjadi siap guna pada Cabang Pelabuhan Banten.

Grab

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk *Grab* sebanyak 22 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 14 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 8 unit *Grab* karena dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Jembatan Timbang (Pelayanan TPK)

Milik Siap Guna

Realisasi tahun 2020 untuk Jembatan Timbang (Pelayanan TPK) sebanyak 5 unit, sedangkan realisasi tahun 2019 adalah sebanyak 4 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 unit Jembatan Timbang (Pelayanan TPK) dari hasil investasi Alat Fasilitas Pelabuhan pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.

Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Bongkar Muat

Fasilitas utama untuk menunjang pelayanan jasa pelabuhan meliputi Dermaga Petikemas, Dermaga *Multipurpose*, Gudang, Gudang CFS, Lapangan Penumpukan, dan Lapangan Petikemas.

Conserved Ownership

The 2020 realization of *Ramp Door* (Terminal Services) amounted to 5 units, while the 2019 realization amounted to 3 units. This difference was due to the addition of 2 units which changed in status from ready-to-use to conserved in Banten Port Branch.

Hopper

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of *Hopper* amounted to 36 units, while the 2019 realization amounted to 28 units. This difference was due to:

- Addition of 4 units of *Hopper* which changed in status from conserved to ready-to-use in Banten Port Branch.
- Addition of 4 units of *Hopper* from investment returns of Port Facilities Equipment in PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Conserved Ownership

The 2020 realization of *Hopper* was zero, while the 2019 realization amounted to 4 units. This difference was due to the reduction of 4 units of *Hopper* which changed in status from conserved to ready-to-use in Banten Port Branch.

Grab

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of *Grab* amounted to 22 units, while the 2019 realization amounted to 14 units. This difference was due to the addition of 8 units of *Grab* from investment returns of Port Facilities Equipment in PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Weighbridge (TPK Services)

Ready-to-Use Ownership

The 2020 realization of *Weighbridge* (TPK Services) amounted to 5 units, while the 2019 realization amounted to 4 units. This difference was due to the addition of 1 unit of *Weighbridge* (TPK Services) from investment returns of Port Facilities Equipment in Teluk Bayur Port Branch.

Loading and Unloading Facilities and Equipment Utilization

The main facilities to support port services include Container Docks, *Multipurpose* Docks, Warehouse, CFS Warehouse, Storage Yard, and Container Yard.



Dermaga Konvensional mencakup dermaga-dermaga di terminal *multipurpose*, terminal curah kering, dan terminal curah cair sedangkan dermaga petikemas hanya mencakup dermaga yang terdapat di terminal petikemas.

Gudang penumpukan yang berfungsi untuk *buffer* area penumpukan atau penunjang kegiatan bongkar muat khususnya untuk penyimpanan cargo yang memerlukan area tertutup (*closed area*).

Lapangan penumpukan *Multipurpose* digunakan sebagai tempat penumpukan cargo mencakup *general cargo*, *bag cargo*, *dry bulk cargo*, dan *unitized* sedangkan lapangan petikemas (*Container Yard*) digunakan khusus untuk penumpukan petikemas di Terminal Petikemas.

REALISASI TINGKAT PENGGUNAAN FASILITAS PERUSAHAAN TAHUN 2020

Tingkat penggunaan fasilitas dermaga, gudang, dan lapangan tersebut diukur dengan parameter *Berth Occupancy Ratio* (BOR), *Shed Occupation Ratio* (SOR), dan *Yard Occupation Ratio* (YOR). Secara keseluruhan, tingkat penggunaan fasilitas dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan mengalami penurunan dari tahun 2019, seiring dengan penurunan *throughput* kapal, barang, dan petikemas dengan rentang penurunan sebesar minus 10 persen hingga minus 17 persen. Adapun penggunaan fasilitas yang mengalami tren peningkatan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dermaga:
 - Dermaga Petikemas NPCT
 - Dermaga Petikemas Panjang
 - Dermaga Curah Kering Panjang
 - Dermaga *Multipurpose* Teluk Bayur
 - Dermaga *Multipurpose* Tanjung Pandan
2. Gudang:
 - Gudang Tanjung Priok
 - Gudang Panjang
 - Gudang Palembang
 - Gudang Pontianak
3. Lapangan Penumpukan:
 - Petikemas Tanjung Priok 2
 - *Multipurpose* Panjang
 - *Multipurpose* Teluk Bayur
 - *Multipurpose* Pangkal Balam
 - *Multipurpose* Tanjung Pandan

Conventional Docks include docks in multipurpose terminals, dry bulk terminals, and liquid bulk terminals, while container docks only include docks at container terminals.

Storage warehouse functions as buffer for the storage area or support for loading and unloading activities, especially for storage of cargo that requires a closed area.

Multipurpose storage yard is used as a storage place for cargo, which includes general cargo, bag cargo, dry bulk cargo, and unitized cargo, while container yard is used specifically for storing containers at Container Terminal.

REALIZATION OF COMPANY FACILITIES USAGE IN 2020

The usage level of docks, warehouse, and yard facilities is measured by the parameters of *Berth Occupancy Ratio* (BOR), *Shed Occupation Ratio* (SOR), and *Yard Occupation Ratio* (YOR). Overall, the usage level of docks, warehouse, and yard facilities decreased from 2019, in line with the decrease in the throughput of vessels, cargo, and containers within a range of minus 10 percent to minus 17 percent. Facilities of which usage showed an increasing trend in 2020 are as follows:

1. Docks:
 - NPCT Container Dock
 - Panjang Container Dock
 - Panjang Dry Bulk Dock
 - Teluk Bayur Multipurpose Dock
 - Tanjung Pandan Multipurpose Dock
2. Warehouse:
 - Tanjung Priok Warehouse
 - Panjang Warehouse
 - Palembang Warehouse
 - Pontianak Warehouse
3. Storage Yard:
 - Tanjung Priok Container 2
 - Panjang Multipurpose
 - Teluk Bayur Multipurpose
 - Pangkal Balam Multipurpose
 - Tanjung Pandan Multipurpose

STANDAR UTILISASI FASILITAS TAHUN 2020

Nilai realisasi utilisasi fasilitas Tahun 2020 secara keseluruhan berada di bawah batas nilai maksimal Revisi RKAP 2020 (standar kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/2/18/DJPL-16), sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat utilisasi fasilitas memenuhi nilai standar, kecuali untuk beberapa fasilitas Pelabuhan yang nilai utilitasnya masih di atas batas maksimal, yaitu:

1. Nilai rata-rata penggunaan Dermaga *Multipurpose* (BOR) di Pelabuhan Sunda Kelapa tahun 2020 sebesar 95,61 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kunjungan kapal petikemas domestik. Selain itu, di Pelabuhan ini masih melayani kunjungan kapal rakyat berukuran di bawah 1000 GT. Tingginya jumlah kunjungan kapal dibandingkan fasilitas dermaga yang tersedia dan lamanya waktu tambatan kapal, khususnya untuk kapal rakyat, mengakibatkan metode penambatan kapal dilakukan dengan pola susun siri sehingga nilai rasio utilisasi mendekati 100 persen.
2. Nilai rata-rata penggunaan Dermaga *Multipurpose* (BOR) sebesar 70,48 persen di Pelabuhan Pangkal Balam dan penggunaan Dermaga *Multipurpose* (BOR) sebesar 96,29 persen di Pelabuhan Tanjung Pandan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kinerja pelayanan barang sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas, jumlah peralatan bongkar muat dan pola penanganan *cargo* yang masih ditangani secara konvensional (tidak menggunakan alat bongkar muat yang standar).

TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan visi Perseroan untuk Menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia, IPC berinisiatif untuk mengimplementasikan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja di sektor jasa kepelabuhanan. Adapun pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi
 - a. Pelayanan Kapal
 - 1) *Enhancement Vessel Management System* sebagai bagian dari pemenuhan *compliance* terhadap proses pelayanan kapal dengan Kementerian Perhubungan.
 - 2) Implementasi *Marine Operating System* pada Cabang Pelabuhan Panjang dan Teluk Bayur guna meningkatkan layanan kapal khususnya terkait pemanduan.

FACILITY UTILIZATION STANDARD IN 2020

The realization value of facility utilization in 2020 as a whole was below the maximum limit based on the Revised RKAP 2020 (Directorate General of Sea Transportation Performance Standard No. HK.103/2/18/DJPL-16). Thus, the facility utilization level has met the standard value, except for several port facilities of which utilization value exceeded the maximum limit, namely:

1. The average utilization value of Multipurpose Dock (BOR) in Sunda Kelapa Port in 2020 was 95.61 percent. This was influenced by increasing domestic container ship calls. In addition, this port still serves ship calls for public ships measuring under 1000 GT. The high number of ship calls compared to the available dock facilities and the long mooring period of ships, especially for public ships, resulted in a stacking pattern for the mooring method so that the utilization ratio was close to 100 percent.
2. The average utilization value of Multipurpose Dock (BOR) at Pangkal Balam Port was 70.48 percent and Multipurpose Dock (BOR) at Tanjung Pandan Port was 96.29 percent due to the underperformance of cargo services as a result of limited facilities, number of loading and unloading equipment, and conventional cargo handling (not using standard loading and unloading equipment).

INFORMATION TECHNOLOGY

In line with the Company's vision to become a World Class Maritime Ecosystem, IPC took the initiative to utilize Information Technology (IT) in the Company's operational activities in order to increase efficiency and productivity in the port services sector. Development of information technology carried out by the Company during 2020 is as follows:

1. Application Development and Implementation
 - a. Vessel Services
 - 1) Enhancement of Vessel Management System as part of compliance of vessel services process with the Ministry of Transportation.
 - 2) Implementation of Marine Operating System at Panjang and Teluk Bayur Port Branches to improve vessel services, especially related to scouting.



- 3) Pengembangan dan Implementasi VMS *Mobile* pada platform IOS dan Android peningkatan *user experience* melalui *platform mobile application* guna memudahkan pelanggan Perusahaan dalam melakukan permintaan pelayanan.
 - 4) *Enhancement* pada *Ship Maintenance Reporting & Monitoring System (SMRMS)* untuk meningkatkan performansi pada sistem.
- b. Pelayanan Terminal
- 1) Implementasi *Terminal Operating System* pada Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Sunda Kelapa guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan petikemas.
 - 2) Implementasi NPK TOS Cabang Pelabuhan Pontianak dan Bengkulu guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan non-peti kemas.
 - 3) Implementasi NPKS Cabang Pelabuhan Palembang dan Jambi untuk kegiatan *stuffing* dan *stripping*.
 - 4) Implementasi i-HUB dan IODB.
- c. Pelayanan Keuangan
- 1) Implementasi *Oracle Project Costing* Anak Perusahaan.
 - 2) Implementasi Arus Kas.
 - 3) *Enhancement Fixed Asset*.
 - 4) Implementasi *Enterprise Planning and Budgeting System*.
 - 5) Implementasi *Intercompany Advanced Global Intercompany System (AGIS)*.
 - 6) Implementasi *e-Invoice*.
 - 7) Implementasi *Cash Management*
- d. Pelayanan SDM
- 1) Integrasi *Learning Management System* dengan sistem SDM.
 - 2) Pengembangan Data HR & *Payroll*.
 - 3) Implementasi aplikasi manajemen talenta.
 - 4) Implementasi Sistem Manajemen Absensi.
- e. Pelayanan Dukungan Lainnya
- 1) *Management Tracking*.
 - 2) SISKAKU aplikasi yang mencatat seluruh kegiatan kerja sama IPC dengan mitra.
 - 3) *Advancing Monitoring* Realisasi merupakan digitalisasi proses pencatatan pencapaian Rencana Kerja Perusahaan untuk *capital expenditure*.
 - 4) Implementasi DMS sebagai *inventory* dan *approval* dokumen-dokumen Divisi Sistem Informasi secara *digital*.
 - 5) *Rollout* aplikasi e-Katalog dan *Contract Management System*.
- 3) Development and Implementation of VMS *Mobile* on IOS and Android platforms to increase user experience through mobile application platforms to facilitate Company customers in making service requests.
 - 4) Enhancement of Ship Maintenance Reporting & Monitoring System (SMRMS) to improve system performance.
- b. Terminal Service
- 1) Implementation of Terminal Operating System at Bengkulu and Sunda Kelapa Port Branches to increase the speed and accuracy of container services.
 - 2) Implementation of NPK TOS Pontianak and Bengkulu Port Branches to increase the speed and accuracy of non-container services.
 - 3) Implementing NPKS Palembang and Jambi Port Branches for stuffing and stripping activities.
 - 4) Implementation of i-HUB and IODB.
- c. Financial Services
- 1) Implementation of Oracle Project Costing for Subsidiaries.
 - 2) Implementation of Cash Flows.
 - 3) Fixed Asset Enhancement.
 - 4) Implementation of Enterprise Planning and Budgeting System.
 - 5) Implementation of Advanced Global Intercompany System (AGIS).
 - 6) Implementation of e-Invoice.
 - 7) Implementation of Cash Management
- d. HR services
- 1) Integration of Learning Management System with HR system.
 - 2) HR & Payroll Data Development.
 - 3) Implementation of talent management application.
 - 4) Implementation of Attendance Management System.
- e. Other Support Services
- 1) Management Tracking.
 - 2) SISKAKU application that records all cooperation activities between IPC and partners.
 - 3) Realization Advancing Monitoring is the digitalization of the recording process of the Company Work Plan achievement for capital expenditure.
 - 4) Implementation of DMS as inventory and digital approval of Information System Division documents.
 - 5) Rollout of e-Catalog and Contract Management System applications.

- 6) *Enhancement* aplikasi EPIC untuk melakukan *monitoring* terhadap inisiatif-inisiatif yang terdapat di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - 7) Implementasi *Customer Mobile Application* untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.
 - 8) *Enhancement* aplikasi PKBL dan CSR.
2. Pengembangan Infrastruktur
- a. *Data Center* (DC) & *Disaster Recovery Center* (DRC) *Enhancement*.
 - b. Implementasi *Security Event & Incident Management* (SIEM) yang merupakan *tools* keamanan untuk mengetahui seluruh *log* dan kejadian yang berkaitan dengan upaya dalam melakukan peretasan keamanan teknologi informasi.
 - c. Implementasi dan *Roll-out Enterprise Service Bus* sebagai *middleware* guna mengintegrasikan seluruh aplikasi pada ekosistem PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - d. Peningkatan keamanan dan layanan infrastruktur TI Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mendukung implementasi aplikasi ITOS.
 - e. Peningkatan *Oracle Database* untuk *Disaster Recovery Center*.
 - f. Pembangunan jaringan *fiber optic* pada Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa

TINJAUAN PER SEGMENT OPERASI

Segmen usaha Perseroan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: Segmen Operasi, Segmen Geografis dan Segmen Anak Perusahaan – KSO. Segmen Operasi meliputi Segmen Operasi Kepelabuhan dan Segmen Jasa Lainnya. Segmen Geografis terdiri dari Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan dan Sunda Kelapa. Sedangkan Segmen Anak Perusahaan – KSO menjelaskan kinerja finansial dari masing-masing Anak Perusahaan dan KSO yang dimiliki langsung oleh IPC.

Penjelasan, produktivitas, pendapatan dan profitabilitas dari masing-masing segmen diuraikan sebagai berikut.

- 6) Enhancement of EPIC application to monitor initiatives at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - 7) Implementation of Customer Mobile Applications to improve services for service users.
 - 8) Enhancement of PKBL and CSR application.
2. Infrastructure Development
- a. *Data Center* (DC) & *Disaster Recovery Center* (DRC) *Enhancement*.
 - b. Implementation of Security Event & Incident Management (SIEM), which is a security tool to find out all logs and events related to attempts to hack the information technology security.
 - c. Implementation and roll-out of the Enterprise Service Bus as a middleware to integrate all applications in the ecosystem of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - d. Increased security and services of IT infrastructure at Sunda Kelapa Port Branch to support the implementation of ITOS application.
 - e. Enhancement of Oracle Database for Disaster Recovery Center.
 - f. Development of fiber optic network at Sunda Kelapa Port Branch

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

The Company's business segments are grouped into 3 (three) categories: Operation Segment, Geographic Segment, and Subsidiaries – Joint Operations Segment. The Operation Segment includes Port Operation Segment and Other Services Segment. The Geographic Segment consists of Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan and Sunda Kelapa Port Branches. The Subsidiaries – Joint Operations Segment describes the financial performance of each Subsidiary and Joint Operation owned directly by IPC.

Explanation, productivity, revenue and profitability of each business segment are described as follows.



SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi Kepelabuhanan

Segmen Operasi Kepelabuhanan meliputi Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Terminal, Pengusahaan Alat, Pelayanan Terminal Petikemas.

Pelayanan Jasa Kapal

Pelayanan Jasa Kapal merupakan pelayanan yang diberikan kepada kapal mulai masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan jasa kapal meliputi:

1. Jasa Labuh

Jasa yang diberikan untuk kapal melakukan lego jangkar di area kolam pelabuhan sebelum kapal sandar;

2. Jasa Tambat

Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat;

3. Jasa Pandu

Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;

4. Jasa Tunda

Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga.

Produktivitas Pelayanan Jasa Kapal

Realisasi untuk produksi Pelayanan Jasa Kapal tahun 2020 di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Produksi Jasa Pelayanan Kapal Tahun 2019 – 2020 / Vessel Services Production in 2019 – 2020					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
a. Labuh / Anchorage	GT	-	-	-	-
b. Tambatan / Berthing	Gt-Etm	327.304.890	345.982.640	(18.677.750)	(5,40%)
c. Pemanduan / Pilotage	Kpl-Grk	65.356	65.901	(545)	(0,83%)
	GT	470.644.567	512.262.353	(41.617.786)	(8,12%)
d. Penundaan / Towage	Kpl-Jam	149.145	147.483	1.662	1,13%
	GT	420.312.948	1.363.889.185	(943.576.237)	(69,18%)

Labuh

Realisasi produksi Jasa Labuh di pelabuhan umum tahun 2019 dan 2020 tidak dipungut dan dicatatkan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

OPERATION SEGMENT

Port Operation Segment

The Port Operation Segment includes Vessel Services, Cargo Services, Terminal Services, Equipment Services, and Container Terminal Services.

Vessel Services

Vessel Services are services provided to ships entering the port until their departure. Vessel Services include:

1. Anchorage

Services provided for ships anchoring in the port pool area before berthing;

2. Berthing

Services provided for ships berthing at the dock to carry out stevedoring activities;

3. Pilotage

Services provided for ships entering and leaving docks through the port channel, so that navigation can be carried out in safe, orderly, and smooth manner for the safety of ships and the environment;

4. Towage

Services provided by tugboats to push or pull ships to or out of the dock.

Productivity of Vessel Services Segment

The production of Vessel Services in 2020 in IPC is described in the following table:

Anchorage

Actual production of anchorage services in public ports in 2019 and 2020 was not collected and recorded based on the Minister of Transportation Regulation No. 69 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Directorate General of Sea Transportation.

Tambatan

Realisasi produksi Jasa Tambat di pelabuhan umum tahun 2020 tercatat sebesar 327.304.890 Gt-Etm, turun 5,40 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 345.982.640 Gt-Etm. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan kunjungan kapal dalam negeri dan luar negeri sebagai dampak adanya penurunan kegiatan perdagangan selama masa pandemi.

Pemanduan

Realisasi produksi Jasa Pemanduan dalam jumlah gerakan tahun 2020 tercatat sebesar 65.356 Kpl-Grk, turun 0,83 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 65.901 Kpl-Grk. Sedangkan realisasi produksi Jasa Pemanduan dalam satuan GT tahun 2020 tercatat sebesar 470.644.567 GT, turun 8,12 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 512.262.353 GT. Menurunnya kegiatan pemanduan di dermaga umum dikarenakan adanya penurunan kunjungan kapal, terutama kapal luar negeri.

Penundaan

Realisasi produksi Jasa Penundaan dalam satuan Kpl-Jam tahun 2020 tercatat sebesar 149.145 Kpl-Jam, naik 1,13 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 147.483 Kpl-Jam. Sedangkan realisasi produksi Jasa Penundaan dalam satuan GT di tahun 2020 tercatat sebesar 420.312.948 GT, turun 69,18 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.363.889.185 GT. Meningkatnya jam penundaan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jam penundaan di Terminal Khusus seiring dengan terealisasinya kerja sama penundaan pada Terminal Khusus di Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Cirebon dan Pontianak.

Berthing

Actual production of berthing services in public ports in 2020 amounted to 327,304,890 Gt-Etm, down 5.40 percent from that of 2019 at 345,982,640 Gt-Etm. This was mainly due to the decline in domestic and international ship calls as an impact of decreasing trade activities during the pandemic.

Pilotage

Actual production of pilotage services in number of movements in 2020 was 65,356 Kpl-Grk, down 0.83 percent from that of 2019 at 65,901 Kpl-Grk. Actual production of pilotage services in GT unit in 2020 was recorded at 470,644,567 GT, down 8.12 percent from that of 2019 at 512,262,353 GT. The decline in pilotage activities in public ports resulted from declining ship calls, particularly international ships.

Towage

Actual production of towage services in number of movements in 2020 was 149,145 Kpl-Jam, up 1.13 percent from that of 2019 at 147,483 Kpl-Jam. Actual production of towage services in GT unit in 2020 was recorded at 420,312,948 GT, down 69.18 percent from that of 2019 at 1,363,889,185 GT. The increase in towage hours was due to the increasing towage hours in Special Terminal with the realization of towage cooperation in Special Terminals at Panjang, Palembang, Cirebon, and Pontianak Port Branches.

Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Vessel Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Vessel Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues (in millions of Rupiah)						
Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pelayanan Jasa Kapal / Vessel Services	1.332.080	12,74%	1.322.241	11,87%	9.839	0,74%



Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.332,08 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp9,84 miliar atau 0,74 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.322,24 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kinerja pelayanan jasa kapal di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri, terutama untuk kegiatan penundaan dan realisasi pendapatan kapal *Ship-to-Ship* (STS) yang ada di Cabang Pelabuhan Panjang.

Realisasi Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 12,74 persen, lebih tinggi dari kontribusi Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 11,87 persen.

Pelayanan Jasa Barang

Merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan Jasa Barang meliputi:

1. Jasa Dermaga
Pelayanan yang disediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.
2. Gudang dan Lapangan Penumpukan merupakan jasa penyimpanan atau penempatan kontainer.

Produktivitas Pelayanan Jasa Barang

Realisasi sampai dengan periode tahun 2020 untuk produksi Pelayanan Jasa Barang di IPC dapat dilihat pada tabel berikut.

Vessel Services Revenue in 2020 was recorded at Rp1,332.08 billion, up Rp9.84 billion or 0.74 percent from that of 2019 at Rp1,322.24 billion. This increase was mainly due to improving performance of vessel services at Docks for Own Interests, especially for towage activities and the realization of Ship-to-Ship (STS) revenue at Panjang Port branch.

Vessel Services Revenue contributed 12.74 percent to the total Operating Revenues in 2020, higher than the contribution of Vessel Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 11.87 percent.

Cargo Services

Stevedoring services from the ship until delivery to the owner of the goods. Cargo services include:

1. Dock Services
Services provided for stevedoring activities as well as passenger boarding and departure through the dock.
2. Warehouse and Storage Yard Container storage or placement services.

Cargo Services Productivity

Cargo Services production at IPC until the 2020 period is described in the following table.

Produksi Jasa Pelayanan Jasa Barang Tahun 2019 – 2020 / Cargo Services Production in 2019 – 2020					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
a. Dermaga Umum / General Dock	Ton	40.024.617	49.632.970	(9.608.353)	(19,36%)
	m ³	3.283.228	5.582.922	(2.299.694)	(41,19%)
	Box	208.272	327.645	(119.373)	(36,43%)
	Ekor / Animal	599.735	588.833	10.902	1,85%
	Unit	562.959	935.280	(372.321)	(39,81%)
b. Gudang Penumpukan / Storage Warehouse	Ton-Hari / Ton-Day	2.298.780	2.993.366	(694.586)	(23,20%)
	m ³ -Hari / m ³ -Day	382.049	475.201	(93.152)	(19,60%)
c. Lapangan Penumpukan / Storage Yard	Ton-Hari / Ton-Day	7.235.350	9.935.920	(2.700.570)	(27,18%)
	m ³ -Hari / m ³ -Day	5.886.500	9.517.687	(3.631.187)	(38,15%)
	Ekor-Hari / Animal-Day	7.770	287.266	(279.496)	(97,30%)
	Box-Hari / Box-Day	406.097	5.843	400.254	6850,15%
	Unit-Hari / Unit-Day	471.467	924.370	(452.903)	(49,00%)

Dermaga Umum

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga untuk tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 40.024.617 Ton, turun 19,36 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 49.632.970 Ton. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan *import steel product* seiring dengan penurunan kegiatan industri otomotif dan baja konstruksi, serta muatan berupa *spare part* maupun alat berat yang melalui Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, terjadinya penurunan juga disebabkan oleh muatan curah kering, terutama bahan pangan di Cabang Pelabuhan Banten yang menurun, dan ekspor curah kering berupa batu bara di Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Cirebon. Di samping itu, penurunan ekspor curah cair, khususnya CPO (*Crude Palm Oil*) juga mempengaruhi penurunan produksi pelayanan jasa barang seiring dengan kebijakan Uni-Eropa terhadap CPO Indonesia di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dan Panjang.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Barang di dermaga umum untuk tahun 2020 dalam satuan m³ tercatat sebesar 3.283.228 m³, turun 35,21 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5.582.922 m³. Hal ini dipengaruhi oleh dampak menurunnya kegiatan ekspor-impor karena wabah Covid-19 di berbagai negara asal dan tujuan perdagangan.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga di terminal *multipurpose* dalam satuan Box tahun 2020 tercatat sebesar 208.772 Box, turun 36,43 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 327.645 Box. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak terealisasinya kegiatan petikemas di Cabang Pelabuhan Cirebon dan tidak terealisasinya rencana pengoperasian pelabuhan Batam, serta menurunnya arus petikemas di Cabang Pelabuhan Bangkal Balam sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga dalam satuan Ekor di tahun 2020 tercatat sebesar 599.735 Ekor, naik 1,85 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 588.833 Ekor. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan permintaan jumlah hewan kurban menjelang Hari Idul Adha tahun 2020.

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Dermaga dalam satuan Unit di tahun 2020 tercatat sebesar 562.959 Unit, turun 39,81 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 935.280 Unit. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan *handling* kendaraan melalui Terminal Kendaraan PT IKT Tbk seiring dengan lesunya industri otomotif dan muatan barang *unitized* yang melewati Cabang Pelabuhan Tanjung Priok akibat pandemi Covid-19.

General Dock

Production of Dock Services in 2020 in Ton unit was 40,024,617 tons, down 19.36 percent from that of 2019 at 49,632,970 tons. This was influenced by the decrease in steel product import activities in line with declining activities in automotive and construction steel industry, as well as cargo in the form of spare parts or heavy equipment that passes through Tanjung Priok Port Branch. Moreover, the drop was also attributable to decreasing dry bulk cargo, particularly food supply, in Banten Port Branch, as well as dry bulk export in the form of coals at Bengkulu and Cirebon Ports Branch. Additionally, the decline in liquid bulk export, especially CPO (*Crude Palm Oil*), also contributed to the decline in cargo services production, in light of the European Union policy on Indonesia's CPO in Teluk Bayur and Panjang Port Branches.

In 2020, Cargo Services production in general docks in m³ unit was recorded at 3,283,228 m³, down 35.21 percent from that of 2019 at 5,582,922 m³. This was caused by deteriorating export and import activities as a result of Covid-19 pandemic in numerous origin or destination countries for trade.

In 2020, Dock Services production in multipurpose terminal in Box unit amounted to 208,772 Boxes, down 36.43 percent from that of 2019 at 327,645 Boxes. This was due to unrealized container activities in Cirebon Port Branch and unrealized plan of Batam Port operation, as well as declining container flow in Pangkal Balam Port Branch as an impact of Covid-19 pandemic.

In 2020, Dock Services production in number of animals amounted to 599,735 animals, up 1.85 percent from that of 2019 at 588,833 animals. This was influenced by rising demand for sacrificial animals in the days leading up to Eid al-Adha in 2020.

In 2020, Dock Services production in Unit amounted to 562,959 Units, down 39.81 percent from that of 2019 at 935,280 Units. This was influenced by the drop in vehicle handling activities through the Vehicle Terminal of PT IKT Tbk as a result of deteriorating automotive industry and unitized goods cargo that passed Tanjung Priok Port Branch due to Covid-19 pandemic.



Gudang

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Gudang untuk tahun 2020 dalam satuan Ton-Hari tercatat sebesar 2.298.780 Ton-Hari, turun 23,20 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2.993.366 Ton-Hari. Sedangkan realisasi produksi Pelayanan Jasa Penumpukan melalui Gudang dalam satuan m³-Hari tahun 2020 tercatat sebesar 382.049 m³-Hari, turun 19,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 475.201 m³-Hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penumpukan melalui gudang terutama untuk kegiatan bongkar *steel product* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok khususnya pada komoditi hasil perkebunan serta *metal box* karet di Cabang Pelabuhan Palembang dan Jambi.

Lapangan Penumpukan

Realisasi produksi Pelayanan Jasa Lapangan Penumpukan untuk tahun 2020 dalam satuan Ton-Hari tercatat sebesar 7.235.350 Ton-Hari, turun 27,18 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 9.935.920 Ton-Hari. Realisasi produksi Pelayanan Jasa Lapangan Penumpukan dalam satuan m³-Hari tahun 2020 tercatat sebesar 5.886.500 m³-Hari, turun minus 38,15 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 9.517.687 m³-Hari. Realisasi produksi Pelayanan Jasa Lapangan Penumpukan dalam satuan Ekor-Hari tahun 2020 tercatat sebesar 7.770 Ekor-Hari, turun minus 97,30 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 287.266 Ekor-Hari. Realisasi produksi Pelayanan Jasa Lapangan Penumpukan dalam satuan Box-Hari tahun 2020 tercatat sebesar 406.097 Box-Hari, naik 6850,15 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5.843 Box-Hari. Realisasi produksi Pelayanan Jasa Lapangan Penumpukan dalam satuan Unit-Hari tahun 2020 tercatat sebesar 471.467 Unit-Hari, turun minus 49,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 924.370 Unit-Hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan penumpukan *steel product*, *spare part*, maupun alat berat di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kendaraan PT IKT Tbk akibat dampak dari penyebaran Covid-19 semenjak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini.

Warehouse

In 2020, Warehouse Services production in Ton-Day unit amounted to 2,298,780 Tons-Day, down 23.20 percent from that of 2019 at 2,993,366 Tons-Day. Meanwhile, Storage Warehouse Services production in m³-Day unit in 2020 was recorded at 382,049 m³-Day, down 19.60 percent from that of 2019 at 475,201 m³-Day. This was caused by the decline in storage through warehouse, particularly for unloading of steel products in Tanjung Priok Port Branch as well as plantation products and rubber metal box in Palembang and Jambi Port Branches.

Storage Yard

In 2020, Storage Yard Services production in Ton-Day unit amounted to 7,235,350 Tons-Day, down 27.18 percent from that of 2019 at 9,935,920 Tons-Day. Meanwhile, Storage Yard Services production in m³-Day unit in 2020 was recorded at 5,886,500 m³-Days, down 38.15 percent from that of 2019 at 9,517,687 m³-Day. Storage Yard Services production in Animal-Day unit in 2020 amounted to 7,770 Animals-Day, down minus 97.30 percent from that of 2019 at 287,266 Animals-Day. Storage Yard Services production in Box-Day unit in 2020 was recorded at 406,097 Boxes-Day, up 6850.15 percent from that of 2019 at 5,843 Boxes-Day. Storage Yard Services production in Unit-Day in 2020 was recorded at 471,467 Units-Day, down 49.00 percent from that of 2019 at 924,370 Units-Day. This was caused by decreasing storage of steel products, spare parts, and heavy equipment in Tanjung Priok Port Branch and Vehicle Terminal of PT IKT Tbk as an impact of Covid-19 outbreak since the end of 2019 until present.

Pendapatan Pelayanan Jasa Barang dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Cargo Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pelayanan Jasa Barang dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /						
Cargo Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 - 2020 (in millions of Rupiah)						
Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 - 2020 / 2019 - 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pelayanan Jasa Barang / Cargo Services	42.767	0,41%	107.221	0,96%	(64.454)	(60,11%)

Pendapatan Pelayanan Jasa Barang tahun 2020 tercatat sebesar Rp42,77 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp64,45 miliar atau 60,11 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp107,22 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya produktivitas Dermaga Umum, Gudang Penumpukan dan Lapangan Penumpukan di tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Pelayanan Jasa Barang memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 0,41 persen, lebih rendah dari kontribusi Pendapatan Pelayanan Jasa Barang terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 0,96 persen.

Pelayanan Terminal

Pelayanan terminal ini, antara lain termasuk penanganan petikemas domestik, *break bulk*, *dry bulk*, curah cair dan kendaraan domestik maupun penumpang.

Produktivitas Pelayanan Terminal

Realisasi sampai dengan periode tahun 2020 untuk produksi Pelayanan Terminal di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Cargo Services Revenue in 2020 was posted at Rp42.77 billion, down Rp64.45 billion or 60.11 percent from that of 2019 at Rp107.22 billion. This was due to declining productivity of General Dock, Storage Warehouse, and Storage Yard in 2020.

Cargo Services Revenue contributed 0.41 percent to the total Operating Revenues in 2020, lower than the contribution of Cargo Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 0.96 percent.

Terminal Services

Terminal services include domestic container handling, break bulk, dry bulk, liquid bulk, domestic vehicles and passenger.

Terminal Services Productivity

Terminal Services production at IPC until the 2020 period is described in the following table:

Produksi Pelayanan Terminal Tahun 2019 - 2020 / Terminal Services Production in 2019 - 2020					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
Stevedoring	Ton	39.944.656	34.433.553	5.511.103	16,01%
	m ³	845.115	2.450.173	(1.605.058)	(65,51%)
Cargodoring	Ton	540.242	2.784.890	(2.244.648)	(80,60%)
	m ³	3.492	-	-	-
Overbremen	TEUs	-	-	-	-
Receiving/Delivery	Ton	236.788	2.449	234.339	9568,76%
	Unit	4.751	275.035	(270.284)	(98,27%)
	Box	-	15.141	(15.141)	(100,00%)
Roro	Paket / Package	127.608	737.830	(610.222)	(82,70%)
Supervisi / Supervision					
GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo	Ton	3.332.552	6.455.287	(3.122.735)	(48,37%)
Petikemas / Container	Box	-	-	-	-
Hewan Ternak / Livestock	Ekor / Animal	-	-	-	-
Alat Berat/Kendaraan / Heavy Equipment/ Vehicle	Unit	-	-	-	-
Bongkar Muat Petikemas / Container Loading and Unloading					
Operasi Kapal / Ship Operation	Box	120.930	1.189.093	(1.068.163)	(89,83%)
	Unit	-	776	(776)	(100,00%)
Operasi Lapangan / Field Operation	Box	791.852	1.101.425	(309.573)	(28,11%)
Operasi Penumpukan / Storing Operation	Box-Hari / Box-Day	383.876	1.697.799	(1.313.923)	(77,39%)



Produksi Pelayanan Terminal Tahun 2019 - 2020 /
Terminal Services Production in 2019 - 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
Lift On/Lift Off	Box	-	-	-	-
Overbremen	Box	-	-	-	-
Operasi CFS / CFS Operation	Box	-	51.541	(51.541)	(100,00%)
	Ton-Hari / Ton-Day	2.605	-	2.605	-
	Ton/m ³	-	424	(424)	(100,00%)
	Ton	15.388	-	15.388	-
	m ³	-	238.745	(238.745)	(100,00%)
	m ³ -Hari / m ³ -Day	-	3.573	(3.573)	(100,00%)
Angkutan Langsung / Direct Transportation	Ton	13.239.785	-	13.239.785	-
	m ³	-	620	(620)	(100,00%)
Lainnya / Others	Ton	4.713.056	3.824.065	888.991	23,25%
	Unit	-	-	-	-
	Jam / Hour	-	-	-	-

Stevedoring

Realisasi produksi Pelayanan Terminal *Stevedoring* di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 39.944.656 Ton, naik 16,01 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 34.433.553 Ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan *market share* kegiatan bongkar-muat selama masa pandemi di Indonesia.

Realisasi produksi Pelayanan Terminal *Stevedoring* di tahun 2020 dalam satuan m³ tercatat sebesar 845.115 m³, turun minus 65,51 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2.450.173 m³. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya *handling* Metal Box Karet di Cabang Pelabuhan Palembang & Jambi, penurunan ekspor curah kering di Cabang Pelabuhan Bengkulu, menurunnya kegiatan bongkar curah & *unitize* barang industri di Cabang Pelabuhan Banten dan penurunan ekspor kendaraan yang melewati Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.

Cargodoring

Realisasi produksi Pelayanan Terminal *Cargodoring* di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 540.242 Ton, turun 80,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2.784.890 Ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh terutama berasal dari Cabang Pelabuhan Teluk Bayur seiring dengan perubahan pola operasi yang diterapkan oleh Cabang Pelabuhan Teluk Bayur kepada Anak Perusahaan.

Stevedoring

In 2020, *Stevedoring* Terminal Services production in Ton unit was recorded at 39,944,656 Tons, up 16.01 percent from that of 2019 at 34,433,553 Tons. Such increase was due to increasing market share of *stevedoring* activities during the pandemic in Indonesia.

In 2020, *Stevedoring* Terminal Services production in m³ unit was recorded at 845,115 m³, down 65.51 percent from that of 2019 at 2,450,173 m³. Such decrease was due to declining Rubber Metal Box handling in Palembang & Jambi Port Branches, declining dry bulk export in Bengkulu Port Branch, declining *stevedoring* activities for bulk & unitized industrial goods in Banten Port Branch, and declining vehicle export that passed through Tanjung Priok Port Branch.

Cargodoring

In 2020, *Cargodoring* Terminal Services production in Ton unit was recorded at 540,242 Tons, down 80.60 percent from that of 2019 at 2,784,890 Tons. Such decrease mainly came from Teluk Bayur Port Branch due to the change in the operational pattern applied by Teluk Bayur Port Branch to Subsidiary.

Receiving/Delivering (R/D)

Realisasi produksi Pelayanan Terminal *Receiving/Delivering* (R/D) di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 236.788 Ton, naik 9.568,76 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 275.035 Ton. Realisasi produksi Pelayanan Terminal *Receiving/Delivering* (R/D) di tahun 2020 dalam satuan Unit tercatat sebesar 4.751 Unit, turun 98,27 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 15.141 Unit. Sedangkan realisasi produksi Pelayanan Terminal *Receiving/Delivering* (R/D) di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat nihil. Untuk tahun 2020, realisasinya tidak dicatatkan seiring adanya *spin-off* kegiatan pelayanan petikemas ke terminal petikemas.

Roro

Realisasi produksi Pelayanan Terminal Roro di tahun 2020 dalam satuan Paket tercatat sebesar 127.608 Paket, turun 82,70 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 737.830 Paket. Penurunan tersebut disebabkan oleh beralihnya kegiatan Roro PT Atosim ke Pelabuhan Patimban.

Supervisi

Realisasi produksi Pelayanan Terminal Supervisi untuk *GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo* di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 3.332.552 Ton, turun 48,37 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5.126.866 Ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya beberapa kerja sama kegiatan *handling* bongkar-muat terutama curah cair di Cabang Pelabuhan Panjang dan Teluk Bayur.

Bongkar Muat Petikemas di Terminal *Multipurpose*

Realisasi produksi Pelayanan Petikemas untuk Operasi Kapal di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat sebesar 120.930 Box, turun 89,83 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.189.093 Box. Realisasi produksi Pelayanan Terminal Bongkar Muat Petikemas untuk Operasi Kapal di tahun 2020 dalam satuan Unit tercatat nihil. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pola operasi dari dermaga konvensional di beberapa cabang pelabuhan yang mulai beralih ke anak usaha terminal petikemas.

Realisasi produksi Pelayanan Operasi Lapangan di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat sebesar 791.852 Box, turun 28,11 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.020.561 Box. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan pola operasi dari dermaga konvensional cabang pelabuhan ke anak usaha terminal petikemas.

Receiving/Delivering (R/D)

In 2020, *Receiving/Delivering* (R/D) Terminal Services production in Ton unit was recorded at 236,788 Tons, up 9,568.76 percent from that of 2019 at 275,035 Tons. *Receiving/Delivering* (R/D) Terminal Services production in Unit in 2020 was recorded at 4,751 Units, down 98.27 percent from that of 2019 at 15,141 Units. Meanwhile, *Receiving/Delivering* (R/D) Terminal Services production in Box unit in 2020 was recorded at zero. In 2020, the realization was not recorded due to the spin-off of container services activities to container terminal.

Roro

In 2020, Roro Terminal Services production in Package unit was recorded at 127,608 Packages, down 82.70 percent from that of 2019 at 737,830 Packages. Such decrease was due to the transfer of Roro activities of PT Atosim to Patimban Port.

Supervision

In 2020, Supervision Terminal Services production for *GC, Bag, Dry Bulk, and Liquid Cargo* in Ton unit was recorded at 3,332,552 Tons, down 48.37 percent from that of 2019 at 5,126,866 Tons. Such decrease was due to several unrealized cooperation for stevedoring activities, particularly for liquid bulk in Panjang and Teluk Bayur Port Branches.

Container Loading and Unloading at *Multipurpose Terminal*

In 2020, the production of Container Services for Ship Operations in Box unit was recorded at 120,930 Boxes, down 89.83 percent from that of 2019 at 1,189,093 Boxes. The production of Container Loading and Unloading Terminal Services for Ship Operations in Unit in 2020 was recorded at zero. Such decrease was caused by declining conventional dock operation pattern in several port branches, which began shifting into a container terminal subsidiary.

In 2020, the production of Services for Field Operations in Box unit was recorded at 791,852 Boxes, down 28.11 percent from that of 2019 at 1,020,561 Boxes. Such decrease was caused by the changing operational pattern in port branches from conventional dock to container terminal subsidiary.



Realisasi produksi Pelayanan Petikemas untuk Operasi Penumpukan di tahun 2020 dalam satuan Box-Hari tercatat sebesar 383.876 Box-Hari, turun 77,39 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.697.799 Box-Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh berpindahnya pelayanan Petikemas ke Anak Perusahaan.

In 2020, the production of Container Services for Storing Operations in Box-Day unit was recorded at 383,876 Boxes-Day, down 77.39 percent from that of 2019 at 1,697,799 Boxes-Day. Such decrease was caused by the transfer of container services to subsidiary.

Pendapatan Pelayanan Terminal dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Terminal Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pelayanan Terminal dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Terminal Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 – 2020 (in millions of Rupiah)						
Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pelayanan Jasa Terminal / Terminal Services	1.775.217	16,98%	2.529.506*	22,70%	(754.289)	(29,82%)

*) Terdapat reklasifikasi atas pendapatan IPC TPK tahun 2019 sebesar Rp738,11 miliar yang semula tercatat di pendapatan pelayanan terminal menjadi pendapatan pelayanan terminal petikemas. / There was a reclassification of IPC TPK revenues in 2019 amounting to Rp738.11 billion, which was originally recorded in terminal service revenue into container terminal service revenue.

Pendapatan Pelayanan Terminal tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.775,22 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp754,29 miliar atau 29,82 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.529,51 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan *handling cargo multipurpose* yang diakibatkan menurunnya kegiatan impor *steel product* seiring dengan penurunan kegiatan industri otomotif dan baja konstruksi, serta muatan berupa *spare part* maupun alat berat yang melalui Cabang Pelabuhan Tanjung Priok serta adanya penurunan permintaan domestik untuk komoditi *gypsum*, *klinker* dan batu bara yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Terminal Services Revenue in 2020 was posted at Rp1,775.22 billion, which decreased by Rp754.29 billion or 29,82 percent from that of 2019 at Rp2,529.51 billion. This was due to the decline in multipurpose cargo handling as a result of diminishing steel product import activities in line with the deterioration in automotive and construction steel industry, cargo in the form of spare parts and heavy equipment that passed through Tanjung Priok Port Branch, as well as the drop in domestic demand for gypsum, clinker, and coal commodities as an impact of Covid-19 pandemic.

Realisasi Pendapatan Pelayanan Terminal memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 16,98 persen, lebih rendah dari kontribusi Pendapatan Pelayanan Terminal terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 22,70 persen.

Terminal Services Revenue contributed 16.98 percent to the total Operating Revenues in 2020, lower than the contribution of Terminal Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 22.70 percent.

Pengusahaan Peralatan

Jasa yang diberikan Pengusahaan Peralatan berupa persewaan *forklift*, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, *motor boat* dan alat pemadam kebakaran.

Equipment Services

Equipment Services provide rental of forklifts, cranes (land, floating, and electrical), tugboats, motorboats, and fire extinguishers.

Pendapatan Pengusahaan Peralatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Equipment Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pengusahaan Peralatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /

Equipment Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 – 2020 (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pengusahaan Peralatan / Equipment Services	58.820	0,56%	66.735	0,60%	(7.915)	(11,86%)

Pendapatan Pengusahaan Peralatan tahun 2020 tercatat sebesar Rp58,82 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp7,92 miliar atau 11,86 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp66,74 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan impor barang yang berasal dari China dan Negara Asia Lainnya yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Equipment Services Revenue in 2020 was posted at Rp58.82 billion, which decreased by Rp7.92 billion or 11.86 percent from that of 2019 at Rp66.74 billion. This was caused by the decline in goods import from China and other Asian countries due to Covid-19 pandemic.

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Peralatan memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 0,56 persen, lebih rendah dari kontribusi Pendapatan Pengusahaan Peralatan terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 0,60 persen.

Equipment Services Revenue contributed 0.56 percent to the total Operating Revenues in 2020, lower than the contribution of Equipment Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 0.60 percent.

Pelayanan Terminal Petikemas

Terminal Petikemas merupakan terminal pengumpulan petikemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan.

Container Terminal Services

Container Terminal is a terminal to store containers for further transportation to destination.

Produktivitas Pelayanan Terminal Petikemas

Realisasi sampai dengan periode tahun 2020 untuk produksi Pelayanan Terminal Petikemas di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Container Terminal Services Productivity

Container Terminal Services production at IPC until the 2020 period is described in the following table:

Produksi Pelayanan Terminal Petikemas Tahun 2019 – 2020 / Container Terminal Services Production in 2019 – 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
Operasi Kapal / Ship Operation	Box	2.118.519	1.718.931	399.588	23,25%
	Unit	47.595	11.485	36.110	314,41%
Operasi Lapangan / Field Operation	Box	1.836.528	1.911.228	(74.700)	(3,91%)
	Box-Shift	72.462	76.524	(4.062)	(5,31%)
CFS	Ton	-	-	-	-
	m ³	-	-	-	-
	Ton-Hari / Ton-Day	-	-	-	-
	m ³ -Hari / m ³ -Day	-	-	-	-
	Box	-	-	-	-



Produksi Pelayanan Terminal Petikemas Tahun 2019 – 2020 /
Container Terminal Services Production in 2019 – 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
Penumpukan / Storage	Box-Hari / Box-Day	2.531.910	2.918.117	(386.207)	(13,23%)
	Unit-Hari / Unit-Day	-	-	-	-
Lift On/Lift Off	Box	197.630	-	197.630	-
Stripping/Stuffing	Box	-	-	-	-
Trucking/Share Handling Container	Box	-	-	-	-

Operasi Kapal

Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Kapal di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat sebesar 2.118.519 Box, naik 23,25 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.718.931 Box. Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Kapal di tahun 2020 dalam satuan Unit tercatat sebesar 47,595 Unit, naik 314,41 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 11.485 Unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh berpindahannya kegiatan *handling* petikemas ke terminal petikemas dan meningkatnya volume bongkar muat domestik di Tanjung Priok.

Operasi Lapangan

Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Lapangan di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat sebesar 1.836.528 Box, turun 3,91 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.911.228 Box. Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Lapangan di tahun 2020 dalam satuan Box-Shift tercatat sebesar 72.462 Box-Shift, turun 5,31 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 76.524 Box-Shift. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kegiatan *Lift On Lift Off* (LOLO) seiring dengan menurunnya kunjungan kapal dengan muatan petikemas luar negeri di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, serta penurunan ekspor karet melalui Cabang Pelabuhan Jambi dan Palembang.

Operasi Penumpukan

Realisasi produksi Terminal Petikemas untuk Operasi Penumpukan di tahun 2020 dalam satuan Box-Hari tercatat sebesar 2.531.910 Box-Hari, turun 13,23 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2.918.117 Box-Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penumpukan petikemas dalam dan luar negeri seiring dengan pola operasi TL domestik di Tanjung Priok dan penurunan penumpukan petikemas ekspor untuk komoditi karet dan pinang.

Ship Operation

In 2020, the production of Container Terminal Services for Ship Operation in Box unit was recorded at 2,118,519 Boxes, up 23.25 percent from that of 2019 at 1,718,931 Boxes. The production of Container Terminal Services for Ship Operation in Unit in 2020 was recorded at 47,595 Units, up 314.41 percent from that of 2019 at 11,485 Units. Such increase was caused by the transfer of container handling activities to container terminal and the increase in domestic stevedoring volume in Tanjung Priok.

Field Operation

In 2020, the production of Container Terminal Services for Field Operation in Box unit was recorded at 1,836,528 Boxes, down 3.91 percent from that of 2019 at 1,911,228 Boxes. The production of Container Terminal Services for Field Operation in Box-Shift unit in 2020 was recorded at 72.462 Boxes-Shift, down 5.31 percent from that of 2019 at 76,524 Boxes-Shift. Such decrease was caused by the declining Lift On Lift Off (LOLO) activity in line with the decrease in ship calls carrying international container cargo in Tanjung Priok Port Branch, as well as the decline in rubber export through Jambi and Palembang Port Branches.

Storing Operation

In 2020, the production of Container Terminal for Storing Operation in Box-Day unit was recorded at 2,531,910 Boxes-Day, down 13.23 percent from that of 2019 at 2,918,117 Boxes-Day. Such decrease was caused by the decrease in domestic and international container storage in line with the operational pattern of domestic TL at Tanjung Priok as well as the decrease in export container storage for rubber and betel nut.

Kerja Sama dengan Mitra Usaha

Realisasi produksi kerja sama dengan Mitra Usaha tahun 2019 dan 2020 di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut:

Cooperation with Business Partners

Production of cooperation with Business Partners in 2019 and 2020 at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is described in the following table:

Produksi Kerja Sama dengan Mitra Usaha Tahun 2019 – 2020 / Production of Cooperation with Business Partners in 2019 – 2020					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
Kerja Sama dengan Mitra Usaha KSO TPK Koja / Cooperation with Business Partner KSO TPK Koja					
Operasi Kapal: Intra Asia - Trans Ocean - Inter Island / Ship Operation: Intra Asia - Trans Ocean - Inter Island	Box	547.929	605.706	(53.085)	(8,83%)
	TEUs	851.041	914.310	(60.017)	(6,59%)

Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Kapal melalui Kerja Sama dengan Mitra Usaha (KSMU) KSO TPK Koja di tahun 2020 dalam satuan Box tercatat sebesar 547.929 Box, turun 8,83 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 601.014 Box. Realisasi produksi Pelayanan Terminal Petikemas untuk Operasi Kapal Kerjasama dengan KSO TPK Koja di tahun 2020 dalam satuan TEUs tercatat sebesar 851.041 TEUs, turun 6,59 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 911.058 TEUs. Penurunan tersebut disebabkan oleh rencana perbaikan dermaga yang bertepatan dengan menurunnya kunjungan kapal luar negeri untuk kegiatan ekspor-impor pada masa pandemi Covid-19.

In 2020, the production of Container Terminal Services for Ship Operation through Cooperation with Business Partner (KSMU) KSO TPK Koja in Box unit was recorded at 547,929 Boxes, down 8.83 percent from that of 2019 at 601,014 Boxes. The production of Container Terminal Services for Ship Operation through Cooperation with Business Partner KSO TPK Koja in TEUs unit was recorded at 851,041 TEUs, down 6.59 percent from that of 2019 at 911,058 TEUs. Such decrease was caused by the plan of dock repair that coincided with the decline in international ship calls for export-import activities during Covid-19 pandemic.

Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Container Terminal Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Container Terminal Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 – 2020 (in millions of Rupiah)						
Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pelayanan Terminal Petikemas / Container Terminal Services	3.178.043	30,40%	3.341.636*	29,99%	(163.593)	(4,90%)

*) Terdapat reklasifikasi atas pendapatan IPC TPK tahun 2019 sebesar Rp738,11 miliar yang semula tercatat di pendapatan pelayanan terminal menjadi pendapatan pelayanan terminal petikemas. / There was a reclassification of IPC TPK revenues in 2019 amounting to Rp738.11 billion, which was originally recorded in terminal service revenue into container terminal service revenue.

Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.178,04 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp163,59 miliar atau 4,90 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.341,64 miliar. Hal tersebut

Container Terminal Services Revenue in 2020 was posted at Rp3,178.04 billion, which decreased by Rp163.59 billion or 4.90 percent from that of 2019 at Rp3,341.64 billion. This was in line with the drop in container traffic in 2020, which



sejalan dengan penurunan trafik petikemas pada tahun 2020 yang terealisasi sebesar 6,92 juta TEUs atau turun 9,64 persen dari realisasi tahun 2019, terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi karena adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 30,40 persen, lebih tinggi dari kontribusi Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 29,99 persen.

Segmen Jasa Lainnya

Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air Dan Listrik (TBAL)

TBAL merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

Produktivitas Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)

Realisasi sampai dengan tahun 2020 untuk produksi pengusahaan TBAL di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

was realized at 6.92 million TEUs or down 9.64 percent from that of 2019, especially due to economic slowdown caused by Covid-19 pandemic throughout 2020.

Container Terminal Services Revenue contributed 30.40 percent to the total Operating Revenues in 2020, higher than the contribution of Container Terminal Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 29.99 percent.

Other Services Segment

Other services segment includes Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services and Miscellaneous Facility.

Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services

TBAL Services provide leasing of land, building, clean water, and electricity services.

Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services Productivity

TBAL Services production at IPC until 2020 is described in the following table:

Tabel Produksi Pengusahaan TBAL / Table of TBAL Services Production					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
Persewaan Tanah / Land Lease	m ²	25.396.459	12.428.681	12.967.778	104,34%
Persewaan Perairan / Water Lease	m ²	16.500	-	16.500	100,00%
Persewaan Bangunan / Building Lease	m ²	65.139	98.509	(33.370)	(33,88%)
Pengusahaan Air / Water Services					
Air Perkantoran / Office Water	Ton	43.581	241.430	(197.849)	(81,95%)
Air Kapal / Ship Water	Ton	282.261	256.215	26.046	10,17%
Pengusahaan Listrik / Electricity Services	KWH	89.557.459	63.934.730	25.622.729	40,08%

Persewaan Tanah

Realisasi produksi Pengusahaan TBAL untuk Persewaan Tanah di tahun 2020 dalam satuan m² tercatat sebesar 25.396.459 m², naik 104,34 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 12.428.681 m².

Land Lease

In 2020, the production of TBAL Services for Land Lease in m² was recorded at 25,396,459 m², up 104.34 percent from that of 2019 at 12,428,681 m².

Persewaan Perairan

Realisasi produksi Pengusahaan TBAL untuk Persewaan Perairan di tahun 2020 dalam satuan m² tercatat sebesar 16.500 m², sedangkan realisasi tahun 2019 tercatat nihil.

Water Lease

In 2020, the production of TBAL Services for Water Lease in m² was recorded at 16,500 m², while the production in 2019 was zero.

Persewaan Bangunan

Realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk Persewaan Bangunan di tahun 2020 dalam satuan m² tercatat sebesar 65.139 m², turun 33,88 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 98.509 m².

Pengusahaan Air

Realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk Pengusahaan Air Perkantoran di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 43.581 Ton, turun 81,95 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 241.430 Ton.

Sedangkan realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk Pengusahaan Air Kapal di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 282.261 Ton, naik 10,17 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 256.215 Ton.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk Pengusahaan Listrik di tahun 2020 dalam satuan KWH tercatat sebesar 89.557.459 KWH, naik 40,08 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 63.934.730 KWH.

Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan

Building Lease

In 2020, the production of TBAL Services for Building Lease in m² was recorded at 65,139 m², down 33.88 percent from that of 2019 at 98,509 m².

Water Services

In 2020, the production of TBAL Services for Office Water Services in Ton unit was recorded at 43,581 Tons, down 81.95 percent from that of 2019 at 241,430 Tons.

Meanwhile, the production of TBAL Services for Ship Water Services in Ton unit was recorded at 282,261 Tons, up 10.17 percent from that of 2019 at 256,215 Tons.

Electricity Services

In 2020, the production of TBAL Services for Electricity Services in KWH unit was recorded at 89,557,459 KWH, up 40.08 percent from that of 2019 at 63,934,730 KWH.

Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues

Pendapatan Pengusahaan TBAL dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /

Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 – 2020 (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Pengusahaan TBAL / TBAL Services	3.023.333	28,92%	2.852.741	25,60%	170.592	5,98%

Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.023,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp170,59 miliar atau 5,98 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.852,74 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kurs USD, dimana kurs USD tahun 2019 adalah Rp13.901 per dolar AS, sedangkan pada tahun 2020 Rp14.105 per dolar AS.

Realisasi Pendapatan Pengusahaan TBAL memberi kontribusi terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2020 sebesar 28,92 persen, lebih tinggi dari kontribusi Pendapatan Pengusahaan TBAL terhadap total Pendapatan Usaha di tahun 2019 sebesar 25,60 persen.

Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) Services Revenue in 2020 was posted at Rp3,023.33 billion, which increased by Rp170.59 billion or 5.98 percent from that of 2019 at Rp2,852.74 billion. This was mainly caused by USD exchange rate increase, which was Rp13,901 per US dollar in 2019, whereas the rate in 2020 was Rp14,105 per US dollar.

TBAL Services Revenue contributed 28.92 percent to the total Operating Revenues in 2020, higher than the contribution of TBAL Services Revenue to the total Operating Revenues in 2019 at 25.60 percent.



Fasilitas Rupa-Rupa Usaha

Jasa Rupa-Rupa ini antara lain termasuk jasa angkutan, jasa konsultan dan *surveyor* pelabuhan, jasa kesehatan, dan lain-lain.

Produktivitas Fasilitas Rupa-Rupa Usaha

Realisasi tahun 2020 untuk produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Miscellaneous Facility

Miscellaneous services include, among others, transportation services, consultant and port surveyor services, health services, and others.

Miscellaneous Facility Productivity

Miscellaneous Facility production at IPC in 2020 is described in the following table:

Tabel Produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha / Table of Miscellaneous Facility Production					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
Pas Pelabuhan / Port Entry	Lembar / Piece	12.029.950	12.997.455	(967.505)	(7,44%)
Kontribusi Mekanis/Alat / Mechanical/Equipment Contribution	Lumpsum	4.759	1.511	3.248	214,96%
Jasa Kebersihan / Cleaning Services	Ton	4.216.651	10.567.047	(6.350.396)	(60,10%)
Retribusi / Retribution	Lembar / Piece	4.402	970.160	(965.758)	-99,55%
Lainnya / Others	Ton	8.484.766	11.097.031	(2.612.265)	(23,54%)

Pas Pelabuhan

Realisasi produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha untuk Pas Pelabuhan di tahun 2020 dalam satuan Lembar tercatat sebesar 12.029.950 Lembar, turun 7,44 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 12.997.455 Lembar.

Port Entry

In 2020, the production of Miscellaneous Facility from Port Entry in Piece unit was recorded at 12,029,950 Pieces, down 7.44 percent from that of 2019 at 12,997,455 Pieces.

Kontribusi Mekanis/Alat

Realisasi produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha untuk Kontribusi Mekanis/Alat di tahun 2020 dalam satuan *Lump sum* tercatat sebesar 4.759 *Lump sum*, naik 214,96 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.511 *Lump sum*.

Mechanical/Equipment Contribution

In 2020, the production of Miscellaneous Facility from Mechanical/Equipment Contribution in Lump sum was recorded at 4,759 Lump sum, up 214.96 percent from that of 2019 at 1,511 Lump sum.

Jasa Kebersihan

Realisasi produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha untuk Jasa Kebersihan di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 4.216.651 Ton, turun 60,10 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 10.567.047 Ton.

Cleaning Services

In 2020, the production of Miscellaneous Facility from Cleaning Services in Ton was recorded at 4,216,651 Tons, down 60.10 percent from that of 2019 at 10,567,047 Tons.

Retribusi

Realisasi produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha untuk Retribusi di tahun 2020 dalam satuan Lembar tercatat sebesar 4.402 Lembar, turun 99,55 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 970.160 Lembar.

Retribution

In 2020, the production of Miscellaneous Facility from Retribution in Piece unit was recorded at 4,402 Pieces, down 99.55 percent from that of 2019 at 970,160 Pieces.

Lainnya

Realisasi produksi Fasilitas Rupa-Rupa Usaha untuk Lainnya di tahun 2020 dalam satuan Ton tercatat sebesar 8.484.766 Ton, turun 23,54 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 11.097.031 Ton.

Others

In 2020, the production of Miscellaneous Facility from Cleaning Services in Ton was recorded at 8,484,766 Tons, down 23.54 percent from that of 2019 at 11,097,031 Tons.

Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan dan **Miscellaneous Facility Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues**

Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Operasi Perusahaan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /

Miscellaneous Facility Revenue and the Contribution to the Company's Operating Revenues in 2019 – 2020 (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020		2019		Fluktuasi 2019 – 2020 / 2019 – 2020 Fluctuation	
	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	Kontribusi (%) / Contribution (%)	Nominal	%
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha / Miscellaneous Facility	1.043.350	9,98%	921.673	8,27%	121.677	13,20%

Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.043,35 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp121,68 miliar atau 13,20 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp921,67 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kegiatan *freight forwarding* PT MTI yang didorong oleh adanya Kerjasama Pengoperasian Lini II di Cabang Pelabuhan Pontianak dan Cabang Pelabuhan Jambi.

Miscellaneous Facility Revenue in 2020 was posted at Rp1,043.35 billion, which increased by Rp121.68 billion or 13.20 percent from that of 2019 at Rp921.67 billion. This was mainly caused by the increase in freight forwarding activities of PT MTI, which was supported by Joint Operation of Line II in Pontianak Port Branch and Jambi Port Branch.

Profitabilitas Segmen Operasi

Operating Segment Profitability

Tabel Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Operating Segment Profitability in 2020 (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020				
	Operasi Kepelabuhan / Port Operation	Jasa Lainnya / Other Services	Total Sebelum Eliminasi / Total Prior to Elimination	Eliminasi / Elimination	Total
Pendapatan Operasi Segmen / Segment Operating Revenue					
Pendapatan Operasi Eksternal / External Operating Revenue	9.719.063	734.547	10.453.610	-	10.453.610
Pendapatan Operasi Antar Segmen / Inter-Segment Operating Revenue	2.720.466	23.170	2.743.636	(2.743.636)	-
Total Pendapatan Operasi Segmen / Total Segment Operating Revenue	12.439.529	757.717	13.197.246	(2.743.636)	10.453.610
Beban Operasi / Operating Expenses	(10.003.696)	(904.881)	(10.908.577)	2.636.594	(8.271.983)
Pendapatan Operasi Lainnya – Neto / Other Operating Income – Net	(79.946)	109.412	29.466	(115.017)	(85.552)
Laba Usaha / Income from Operations					2.096.075
Pendapatan Keuangan / Finance Income	506.495	2.021	508.516	-	508.516
Beban Keuangan / Finance Costs	(1.817.018)	(15.159)	(1.832.177)	709.335	(1.122.842)
Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas – Neto / Equity in Income of Associates and Joint Control Entities – Net	(206.375)	-	(206.375)	108.838	(97.538)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Income Before Final Tax and Corporate Income Tax					1.384.212
Beban Pajak Final / Final Tax Expense	(396.053)	(1.492)	(397.545)	-	(397.545)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Income Before Corporate Income Tax					986.667
Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax	160.672	9.449	170.120	-	170.120
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year					1.156.787



Tabel Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2019 (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Operating Segment Profitability in 2019 (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2019				
	Operasi Kepelabuhan / Port Operation	Jasa Lainnya / Other Services	Total Sebelum Eliminasi / Total Prior to Elimination	Eliminasi / Elimination	Total
Pendapatan Operasi Segmen / Segment Operating Revenue					
Pendapatan Operasi Eksternal / External Operating Revenue	10.054.867	1.086.886	11.141.752	-	11.141.752
Pendapatan Operasi Antar Segmen / Inter-Segment Operating Revenue	3.627.525	27.156	3.654.682	(3.654.682)	-
Total Pendapatan Operasi Segmen / Total Segment Operating Revenue	13.682.392	1.114.042	14.796.434	(3.654.682)	11.141.752
Beban Operasi / Operating Expenses	(10.862.669)	(1.164.951)	(12.027.621)	3.507.263	(8.520.358)
Pendapatan Operasi Lainnya – Neto / Other Operating Income – Net	720.321	51.672	771.993	(54.878)	717.115
Laba Usaha / Income from Operations					3.338.509
Pendapatan Keuangan / Finance Income	832.478	3.782	836.260	-	836.260
Beban Keuangan / Finance Costs	(1.196.139)	(17.046)	(1.213.186)	12.949	(1.200.237)
Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas – Neto / Equity in Income of Associates and Joint Control Entities – Net	979.957	-	979.957	(739.389)	240.568
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Income Before Final Tax and Corporate Income Tax					3.215.100
Beban Pajak Final / Final Tax Expense	(505.945)	(3.748)	(509.692)	-	(509.692)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Income Before Corporate Income Tax					2.705.408
Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax	(200.813)	(784)	(201.598)	-	(201.598)
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year					2.503.810

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2019-2020 (dalam %) /
Table of Operating Segment Profitability Growth in 2019-2020 (in %)

Pendapatan / Revenue	2019-2020				
	Operasi Kepelabuhan / Port Operation	Jasa Lainnya / Other Services	Total Sebelum Eliminasi / Total Prior to Elimination	Eliminasi / Elimination	Total
Pendapatan Operasi Segmen / Segment Operating Revenue					
Pendapatan Operasi Eksternal / External Operating Revenue	(3,34%)	(32,42%)	(6,18%)	-	(6,18%)
Pendapatan Operasi Antar Segmen / Inter-Segment Operating Revenue	(25,00%)	(14,68%)	(24,93%)	(24,93%)	-
Total Pendapatan Operasi Segmen / Total Segment Operating Revenue	(9,08%)	(31,98%)	(10,81%)	(24,93%)	(6,18%)
Beban Operasi / Operating Expenses	(7,91%)	(22,32%)	(9,30%)	(24,82%)	(2,92%)
Pendapatan Operasi Lainnya – Neto / Other Operating Income – Net	(111,10%)	111,74%	(96,18%)	109,59%	(111,93%)
Laba Usaha / Operating Expenses					(37,22%)
Pendapatan Keuangan / Finance Income	(39,16%)	(46,57%)	(39,19%)	-	(39,19%)
Beban Keuangan / Finance Costs	51,91%	(11,07%)	51,02%	5378,06%	(6,45%)
Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas – Neto / Equity in Income of Associates and Joint Control Entities – Net	(121,06%)	-	(121,06%)	(114,72%)	(140,54%)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Income Before Final Tax and Corporate Income Tax					(56,95%)
Beban Pajak Final / Final Tax Expense	(21,72%)	(60,19%)	(22,00%)	-	(22,00%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Income Before Corporate Income Tax					(63,53%)
Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax	(180,01%)	(1304,68%)	(184,39%)	-	(184,39%)
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year					(53,80%)

Profitabilitas Segmen Operasi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.156,79 miliar, turun Rp1.347,02 miliar atau 53,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.503,81 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Operasi Eksternal dan Pendapatan Keuangan, serta diiringi dengan pencatatan bagian Rugi dari Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas – Neto.

In 2020, Operating Segment Profitability was posted at Rp1,156.79 billion, down Rp1,347.02 billion or 53.08 percent from that of 2019 at Rp2,503.81 billion. This was caused by decreasing External Operating Revenue and Finance Income, coupled by the statement of Equity in Loss of Associates and Joint Control Entities – Net.

KINERJA LALU LINTAS PELABUHAN DAN SEGMENT GEOGRAFIS

LALU LINTAS PELABUHAN

Kunjungan Kapal

Lalu lintas pelabuhan berdasarkan Kunjungan Kapal terdiri dari Pelayaran Luar Negeri, Pelayaran Dalam Negeri, Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis dan Kapal Negara/Tamu.

PERFORMANCE OF PORT TRAFFIC AND GEOGRAPHIC SEGMENT

PORT TRAFFIC

Ship Calls

Port traffic based on Ship Calls consists of International Shipping, Domestic Shipping, Traditional Shipping, Pacer Shipping and Visitor Shipping.

Tabel Kunjungan Kapal /
Table of Ship Calls

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a – b)	% (a – b) / b
Pelayaran Luar Negeri: / International Shipping:					
- Reguler / Regular	Unit	518	645	(127)	(19,69%)
	GT	9.413.154	11.936.402	(2.523.248)	(21,14%)
- Non Reguler / Non Regular	Unit	4.529	5.127	(598)	(11,66%)
	GT	99.404.551	106.155.793	(6.751.242)	(6,36%)
Total Pelayaran Luar Negeri / Total International Shipping	Unit	5.047	5.772	(725)	(12,56%)
	GT	108.817.705	118.092.195	(9.274.490)	(7,85%)
Pelayaran Dalam Negeri / Domestic Shipping	Unit	20.647	23.939	(3.292)	(13,75%)
	GT	68.175.415	89.695.416	(21.520.001)	(23,99%)
Pelayaran Rakyat / Traditional Shipping	Unit	2.778	3.024	(246)	(8,13%)
	GT	515.431	563.031	(47.600)	(8,45%)
Pelayaran Perintis / Pacer Shipping	Unit	149	163	(14)	(8,59%)
	GT	200.381	201.916	(1.535)	(0,76%)
Kapal Negara/Tamu / Visitor Shipping	Unit	235	184	51	27,72%
	GT	701.439	604.642	96.797	16,01%
Jumlah / Total	Unit	28.856	33.082	(4.226)	(12,77%)
	GT	178.410.371	209.157.200	(30.746.829)	(14,70%)

Secara keseluruhan, Kunjungan Kapal pada tahun 2020 terealisasi sebesar 28.856 Unit dan 178.410.371 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, Kunjungan Kapal mengalami penurunan, baik dalam satuan Unit sebesar 12,77 persen maupun dalam satuan GT sebesar 14,70 persen. Realisasi arus Kunjungan Kapal mengalami tren penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di akhir

Overall, the realization of Ship Calls in 2020 was 28,856 Units and 178,410,371 GT. Compared to 2019, Ship Calls have decreased, both in Units by 12.77 percent and in GT by 14.70 percent. The realization of Ship Calls flow experienced a downward trend due to Covid-19 pandemic, which started to occur at the end of 2019 and spread to Indonesia at the end of February 2020. The impact of the pandemic affected



tahun 2019 dimana pandemi tersebut mulai dirasakan di akhir bulan Februari 2020 di Indonesia. Akibat pandemi ini mempengaruhi kunjungan kapal di tahun 2020, khususnya pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pintu gerbang perekonomian nasional.

Kunjungan Kapal Luar Negeri

Kunjungan Kapal Luar Negeri dalam satuan unit kapal tahun 2020 tercatat sebesar 5.047 Unit, turun 12,56 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.772 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal di tahun 2020 tercatat sebesar 108.817.705 GT, turun 7,85 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 118.092.195 GT. Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Arus kunjungan kapal *General Cargo* luar negeri tahun 2020 tercatat sebesar 700 Unit dan 8.518.232 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kapal *General Cargo* luar negeri mengalami penurunan, baik dalam satuan Unit sebesar 36,19 persen maupun dalam satuan GT sebesar 35,59 persen. Tren penurunan kunjungan kapal *General Cargo* luar negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Teluk Bayur, Banten, dan Tanjung Pandan.
- Arus kunjungan kapal curah cair luar negeri tahun 2020 tercatat sebesar 552 Unit dan 4.696.449 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kapal curah cair luar negeri mengalami penurunan, baik dalam satuan Unit sebesar 1,25 persen maupun dalam satuan GT sebesar 9,89 persen. Tren penurunan kunjungan kapal curah cair luar negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Balam.
- Arus kunjungan kapal curah kering luar negeri tahun 2020 tercatat sebesar 620 Unit dan 10.533.501 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kapal curah kering luar negeri mengalami peningkatan, baik dalam satuan Unit sebesar 10,32 persen maupun dalam satuan GT sebesar 11,33 persen. Kenaikan ini terjadi karena rata-rata GT kunjungan kapal curah kering lebih kecil, tetapi dalam satuan unit lebih banyak. Tren peningkatan kunjungan kapal curah kering luar negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.
- Arus kunjungan kapal petikemas luar negeri mengalami tren penurunan, terutama di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 14,32 persen dari tahun 2019 untuk satuan unit. Sedangkan dalam satuan GT, arus kunjungan kapal petikemas luar negeri di tahun 2020 meningkat sebesar 0,65 persen dari tahun 2019.

Ship Calls in 2020, especially at Tanjung Priok Port Branch as the gateway to national economy.

International Ship Calls

International Ship Calls in ship units in 2020 were recorded at 5,047 Units, a decrease of 12.56 percent compared to 2019 at 5,772 Units. Meanwhile, in 2020, the ship's GT unit was recorded at 108,817,705 GT, a decrease of 7.85 percent compared to 2019 at 118,092,195 GT. This was influenced by:

- The call flow for international General Cargo ships in 2020 was recorded at 700 units and 8,518,232 GT. Compared to 2019, calls from international General Cargo ships decreased, both in units of 36.19 percent and in GT units of 35.59 percent. The trend of declining international General Cargo ship calls in 2020 against 2019 occurred at Tanjung Priok Port Branch, Palembang Port Branch, Teluk Bayur Port Branch, Banten Port Branch, and Tanjung Pandan Port Branch.
- The call flow of international liquid bulk ship in 2020 was recorded at 552 units and 4,696,449 GT. Compared to 2019, international liquid bulk ship calls decreased, both in units of 1.25 percent and in GT units of 9.89 percent. The trend of declining international liquid bulk ship calls in 2020 against 2019 occurred in Panjang Port Branch, Palembang Port Branch, Teluk Bayur Port Branch, Cirebon Port Branch, Jambi Port Branch, Bengkulu Port Branch, and Pangkal Balam Port Branch.
- The call flow of international dry bulk ships in 2020 was recorded at 620 Units and 10,533,501 GT. Compared to 2019, international dry bulk ship call increased, both in units of 10.32 percent and in GT units of 11.33 percent. This increase occurred because while the average GT of dry bulk ship calls was smaller, the unit count was bigger in comparison. The trend of increasing international dry bulk ship calls in 2020 against 2019 occurred at Tanjung Priok Port Branch.
- The call flow of international container ships experienced a downward trend, especially at Tanjung Priok Port Branch, at 14.32 percent from 2019 in unit. Meanwhile, in GT units, the call flow of international container ships in 2020 increased by 0.65 percent from 2019.

- Arus kunjungan kapal ro-ro luar negeri tahun 2020 tercatat sebesar 202 Unit dan 9.247.122 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kapal ro-ro luar negeri mengalami penurunan, baik dalam satuan Unit sebesar 16,18 persen maupun dalam satuan GT sebesar 16,70 persen. Trafik kapal ro-ro mengalami penurunan di pelabuhan Tanjung Priok yang membawa muatan kendaraan dan alat berat untuk ekspor maupun impor akibat pandemi Covid-19.

Kunjungan Kapal Dalam Negeri

Kunjungan Kapal Dalam Negeri dalam satuan unit kapal tahun 2020 tercatat sebesar 20.647 Unit, turun 13,75 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 23.939 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal di tahun 2020 tercatat sebesar 68.175.415 GT, turun 23,59 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 89.695.416 GT. Secara nasional, penurunan arus kunjungan kapal dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Adapun penjelasan mengenai trafik kunjungan kapal dalam negeri di tahun 2020 yang mengalami tren penurunan dari tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Arus kunjungan kapal *General Cargo* dalam negeri tahun 2020 tercatat sebesar 6.008 Unit dan 5.385.409 GT. Dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kapal *General Cargo* dalam negeri mengalami penurunan, baik dalam satuan Unit sebesar 15,72 persen maupun dalam satuan GT sebesar 43,41 persen. Tren penurunan kunjungan kapal *General Cargo* dalam negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Banten, Sunda Kelapa, dan Bengkulu.
- Arus kunjungan kapal curah cair dalam negeri tahun 2020 tercatat sebesar 2.588 Unit dan 5.227.154 GT. Untuk satuan unit, arus kunjungan kapal curah cair dalam negeri pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen dari tahun 2019. Akan tetapi, untuk satuan GT, arus kunjungan kapal curah cair dalam negeri pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,38 persen dari tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran rata-rata kapal yang berkunjung relatif lebih kecil. Adapun tren kenaikan dalam satuan unit terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Sunda Kelapa, dan Tanjung Pandan.
- Arus kunjungan kapal curah kering dalam negeri tahun 2020 untuk satuan GT mengalami penurunan sebesar 12,42 persen dari tahun 2019. Tren penurunan kunjungan kapal curah kering dalam negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Jambi, dan Bengkulu.

- The call flow of international Roll-on Roll-off (RoRo) ships in 2020 was recorded at 202 units and 9,247,122 GT. Compared to 2019, international RoRo ship calls have decreased, both in units of 16.18 percent and in GT units of 16.70 percent. The traffic of RoRo ships, which carried loads such as vehicles and heavy equipment for export and import activities, has decreased at Tanjung Priok Port due to Covid-19 pandemic.

Domestic Ship Calls

Domestic Ship Calls in ship units in 2020 were recorded at 20,647 Units, a decrease of 13,75 percent compared to 2019 at 23,939 Units. Meanwhile, in 2020, the ship's GT unit was recorded at 68,175,415 GT, a decrease of 23.59 percent compared to 2019 at 89,695,416 GT. The decline in domestic ship calls flow was caused by Covid-19 pandemic. The explanation regarding the traffic of domestic ship visits in 2020, which has experienced a downward trend from 2019, is as follows:

- The call flow for domestic General Cargo ships in 2020 was recorded at 6,008 units and 5,385,409 GT. Compared to 2019, calls from domestic General Cargo ships decreased, both in units of 15,72 percent and in GT units of 43,41 percent. The trend of declining domestic General Cargo ship calls in 2020 against 2019 occurred at Tanjung Priok Port Branch, Panjang Port Branch, Palembang Port Branch, Teluk Bayur Port Branch, Pontianak Port Branch, Banten Port Branch, Sunda Kelapa Port Branch, and Bengkulu Port Branch.
- The call flow of domestic liquid bulk ship in 2020 was recorded at 2,588 units and 5,227,154 GT. In units, the call flow of domestic liquid bulk ship in 2020 increased by 0.90 percent from 2019. However, for GT units, the call flow of domestic liquid bulk ship in 2020 decreased by 2.38 percent from 2019. This was due to the relatively smaller size of the visiting vessels. The increasing trend in units occurred in Tanjung Priok Port Branch, Panjang Port Branch, Teluk Bayur Port Branch, Pontianak Port Branch, Sunda Kelapa Port Branch, and Tanjung Pandan Port Branch.
- The call flow of domestic dry bulk ships in 2020 in GT unit decreased by 12.42 percent from 2019. The trend of decreasing domestic dry bulk ship calls in 2020 against 2019 occurred at Tanjung Priok Port Branch, Palembang Port Branch, Teluk Bayur Port Branch, Cirebon Port Branch, Banten Port Branch, Sunda Kelapa Port Branch, Jambi Port Branch and Bengkulu Port Branch.



- Arus kunjungan kapal petikemas dalam negeri tahun 2020 untuk satuan GT mengalami penurunan sebesar 4,55 persen dari tahun 2019. Tren penurunan kunjungan kapal petikemas dalam negeri tahun 2020 terhadap tahun 2019 terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Jambi, Sunda Kelapa, dan Pangkal Balam
- Arus kunjungan kapal ro-ro dalam negeri tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, terutama di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, dan Palembang.
- The call flow of domestic container ships in 2020 in GT unit decreased by 4.55 percent from 2019. The decreasing domestic container ship calls in 2020 against 2019 occurred at Tanjung Priok Port Branch, Panjang Port Branch, Palembang Port Branch, Pontianak Port Branch, Jambi Port Branch, Sunda Kelapa Port Branch, and Pangkal Balam Port Branch.
- The call flow of domestic Roll-on Roll-off (RoRo) ships in 2020 declined from 2019, particularly at Tanjung Priok Port Branch, Panjang Port Branch, and Palembang Port Branch.

Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat

Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat dalam satuan unit kapal tahun 2020 tercatat sebesar 2.778 Unit, turun 8,13 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.024 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal di tahun 2020 tercatat sebesar 515.413 GT, turun 8,45 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 561.597 GT. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang komoditi pangan dan sandang sehingga jumlah kapal rakyat yang datang ke pelabuhan berkurang.

Kunjungan Kapal Pelayaran Perintis

Arus kunjungan kapal pelayaran perintis hanya terdapat di 2 (dua) cabang pelabuhan, yaitu Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Pontianak. Pada tahun 2020, kunjungan kapal pelayaran perintis dalam satuan unit kapal tahun 2020 tercatat sebesar 149 Unit, turun 8,59 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 163 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal di tahun 2020 tercatat sebesar 200.381 GT, turun 0,76 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 201.916 GT. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kunjungan kapal pelayaran perintis di Cabang Pelabuhan Bengkulu yang melayani rute pulau Enggano.

Kunjungan Kapal Negara/Tamu

Kunjungan Kapal Negara/Tamu dalam satuan unit kapal tahun 2020 tercatat sebesar 235 Unit, naik 27,72 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 184 Unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal di tahun 2020 tercatat sebesar 701.439 GT, naik 16,01 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 604.642 GT. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Panjang.

Traditional Ship Calls

Traditional Ship Calls in ship units in 2020 were recorded at 2,778 units, a decrease of 8.13 percent compared to 2019 of 3,024 units. Meanwhile, in 2020, the ship's GT unit was recorded at 515,413 GT, a decrease of 8.45 percent compared to 2019 of 561,597 GT. This was influenced by a decrease in the demand for food and clothing commodities, thus causing the declining number of visiting traditional ships to the ports.

Pacer Ship Calls

The call flow of pacer ships occurred only at 2 (two) port branches, namely Bengkulu Port Branch and Pontianak Port Branch. In 2020, pacer ships call in ship unit in 2020 was recorded at 149 units, a decrease of 8.59 percent compared to 2019 at 163 units. Meanwhile, in 2020, the call in GT ship unit was recorded at 200,381 GT, a decrease of 0.76 percent compared to 2019 at 201,916 GT. This was influenced by the declining call at Bengkulu Port Branch that served the Enggano Island route.

Visitor/State Ship Calls

Visitor/State Ship calls in ship units in 2020 was recorded at 235 Units, an increase of 27.72 percent compared to 2019 at 184 Units. Meanwhile, in 2020, the call in GT ship unit was recorded at 701,439 GT, an increase of 16.01 percent compared to 2019 of 604,642 GT. This was influenced by the increasing number of ship calls to Tanjung Priok and Panjang Port Branches.

Arus Barang

Lalu lintas pelabuhan berupa Arus Barang terdiri dari *General Cargo*, *Bag Cargo*, Curah Cair, Curah Kering, Petikemas dan Lain-lain.

Container Traffic

Port traffic in the form of container traffic consists of General Cargo, Bag Cargo, Liquid Bulk, Dry Bulk, Containers, and others.

Tabel Arus Barang / Table of Container Traffic					
Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
<i>General Cargo</i>	Ton	8.832.316	12.206.856	(3.374.540)	(27,64%)
<i>Bag Cargo</i>	Ton	3.791.109	4.032.931	(241.822)	(6,00%)
Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	10.090.113	10.159.602	(69.489)	(0,68%)
Curah Kering / Dry Bulk	Ton	23.943.857	28.297.406	(4.353.549)	(15,38%)
Petikemas / Container	Box	5.061.936	5.616.445	(554.509)	(9,87%)
	TEUs	6.921.750	7.660.485	(738.735)	(9,64%)
Lain-lain / Others	Ton	3.473.694	5.338.646	(1.864.952)	(34,93%)
Jumlah / Total	Ton	50.131.089	60.035.441	(9.904.352)	(16,50%)
	Box	5.061.936	5.616.445	(554.509)	(9,87%)
	TEUs	6.921.750	7.660.485	(738.735)	(9,64%)

Secara keseluruhan, realisasi Arus Barang dalam kemasan tahun 2020 untuk satuan Ton tercatat sebesar 50.131.089 Ton, sedangkan untuk Petikemas dalam satuan Box, mencapai 5.061.936 Box dan dalam satuan TEUs sebesar 6.921.750 TEUs, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Overall, the realization of Container Traffic in 2020 for Ton unit was recorded at 50,131,089 tons. Meanwhile, Container in Box unit reached 5,061,936 boxes and 6,921,750 TEUs in TEU, a decline compared to 2019.

Arus Barang *General Cargo*

Arus Barang *General Cargo* di tahun 2020 mencapai 8.832.316 Ton, turun 27,64 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.206.856 Ton. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya perdagangan impor sebesar 37,43 persen dari tahun 2019 sebesar 6.217.155 ton menjadi 3.890.106 ton di tahun. Arus barang *general cargo* mengalami penurunan di hampir semua pelabuhan di wilayah IPC kecuali Cabang Pelabuhan Palembang yang justru mengalami peningkatan.

General Cargo Traffic

General Cargo traffic in 2020 reached 8,832,316 tons, down by 27.64 percent compared to 2019 of 12,206,856 tons. This decline was mainly influenced by the decline in import trade by 37.43 percent from 2019 of 6,217,155 tons to 3,890,106 tons in the year. The flow of general cargo traffic decreased in almost all ports in the IPC area except Palembang Port Branch, which experienced an increase.

Arus Barang *Bag Cargo*

Pada tahun ini, arus barang *bag cargo* didominasi oleh perdagangan domestik. Realisasi arus Barang *Bag Cargo* di tahun 2020 mencapai 3.791.109 Ton, turun 6,00 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.032.931 Ton. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan perdagangan domestik, khususnya bongkar muat sebesar 8,31 persen dari tahun 2019 sebesar 3.671.035 Ton menjadi 3.365.836 Ton di tahun 2020.

Bag Cargo Traffic

This year, bag cargo traffic was dominated by domestic trade. The realization of Bag Cargo traffic in 2020 reached 3,791,109 tons, a decrease of 6.00 percent compared to 2019 of 4,032,931 tons. This decline was influenced by a decrease in domestic trade, particularly loading and unloading by 8.31 percent from 2019 of 3,671,035 tons to 3,365,836 tons in 2020.



Arus Barang Curah Cair

Arus Barang Curah Cair di tahun 2020 mencapai 10.090.113 Ton, turun 0,68 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.159.602 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya pertumbuhan permintaan baik dari luar negeri maupun domestik dan penurunan yang terjadi pada kegiatan ekspor, terutama CPO. Sebaliknya, kegiatan bongkar dan muat domestik pada tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,00 persen.

Arus Barang Curah Kering

Arus Barang Curah Kering di tahun 2020 mencapai 23.943.857 Ton, turun 15,38 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.298.590 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya arus barang curah kering yang menjadi komoditi unggulan di beberapa Cabang Pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Cirebon, Banten, Jambi, dan Bengkulu.

Arus Barang Petikemas

Arus Barang Petikemas dalam satuan Ton di tahun 2020 mencapai 5.061.936 Box, turun 9,87 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.616.445 Box. Sedangkan dalam satuan TEUs tahun 2020 tercatat sebesar 6.921.750 TEUs, turun 9,64 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.660.485 TEUs. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan arus petikemas di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Jambi, Bengkulu, Sunda Kelapa, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.

Arus Barang Lain-lain

Arus Barang Lain-lain yang meliputi kemasan hewan, kendaraan, dan alat berat di tahun 2020 mencapai 3.473.694 Ton, turun 34,93 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.338.646 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya ekspor impor untuk komoditas kendaraan dan impor untuk komoditas hewan, khususnya sapi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami di hampir semua negara yang menjadi tujuan ekspor maupun impor.

Arus Penumpang

Lalu lintas pelabuhan berupa Arus Penumpang terdiri dari Kunjungan Kapal Luar Negeri dan Dalam Negeri dengan aktivitas Embarkasi dan Debarkasi.

Liquid Bulk Traffic

Liquid Bulk traffic in 2020 reached 10,090,113 tons, a decrease of 0.68 percent compared to 2019 of 10,159,602 tons. This was influenced by the absence of both foreign and domestic demands and the decline that occurred in export activities, especially CPO. In contrast, domestic loading and unloading activities in 2020 increased by an average of 5.00 percent.

Dry Bulk Traffic

Dry Bulk traffic in 2020 reached 23,943,857 tons, a decrease of 15.38 percent compared to 2019 of 28,298,590 tons. This was influenced by the decline in dry bulk traffic, which was a leading commodity in several port branches, such as Tanjung Priok Port Branch, Cirebon Port Branch, Banten Port Branch, Jambi Port Branch and Bengkulu Port Branch.

Container Traffic

Container traffic in ton in 2020 reached 5,061,936 boxes, a decrease of 9.87 percent compared to 2019 of 5,616,445 boxes. Meanwhile, the TEUs in 2020 were recorded at 6,921,750 TEUs, a decrease of 9.64 percent compared to 2019 of 7,660,485 TEUs. This was influenced by declining container traffic at Tanjung Priok Port Branch, Panjang Port Branch, Palembang Port Branch, Pontianak Port Branch, Jambi Port Branch, Bengkulu Port Branch, Sunda Kelapa Port Branch, Pangkal Balam Port Branch, and Tanjung Pandan Port Branch.

Other Cargo Traffic

Other Cargo traffic, which included animals, vehicles and heavy equipment in 2020, reached 3,473,694 tons, a decrease of 34.93 percent compared to 2019 of 5,338,646 tons. This was influenced by the decline in export and import for vehicle commodities and imports for animal commodities, especially cattle, due to Covid-19 Pandemic in almost all export and import destination countries.

Passenger Traffic

Port traffic in the form of Passenger Traffic consists of International and Domestic Ship Calls with Departure and Arrival activities.

Tabel Arus Penumpang /
Table of Passenger Traffic

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
				Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
Luar Negeri / International					
Embarkasi / Departure	Orang / Person	-	4.097	-	-
Debarkasi / Arrival	Orang / Person	-	2.585	-	-
Jumlah Luar Negeri / Total International	Orang / Person	-	6.682	(6.682)	(100,00%)
Dalam Negeri / Domestic					
Embarkasi / Departure	Orang / Person	164.289	564.108	(399.819)	(70,88%)
Debarkasi / Arrival	Orang / Person	168.737	567.389	(398.652)	(70,26%)
Jumlah Dalam Negeri / Total Domestic	Orang / Person	333.026	1.131.497	(798.471)	(70,57%)
Jumlah / Total	Orang / Person	333.026	1.138.179	(805.153)	(70,74%)

Realisasi Arus Penumpang pada tahun 2020 mencapai 333.026 Orang, menurun 70,74 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.138.179 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penghentian moda transportasi laut pada bulan April 2020 sampai bulan Juli 2020 dan serta adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan *rapid test*, *swab* PCR dan *swab* antigen untuk pengguna transportasi umum baik di darat, laut maupun udara.

Luar Negeri

Realisasi Arus Penumpang Luar Negeri pada tahun 2020 tercatat nihil. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menghentikan pertumbuhan arus penumpang dari luar negeri.

Dalam Negeri

Realisasi Arus Penumpang Dalam Negeri pada tahun 2020 mencapai 333.026 Orang, menurun 70,57 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.131.497 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh penghentian moda transportasi laut secara sementara dalam beberapa bulan di tahun 2020 dan adanya kebijakan tes Covid-19 untuk menggunakan transportasi laut oleh pemerintah.

SEGMENT GEOGRAFIS

Segmen Geografis terdiri dari 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan, yaitu Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan dan Sunda Kelapa.

Realization of Passenger Traffic in 2020 reached 333,026 people, decreased by 70.74 percent compared to 2019 at 1,138,179 people. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused the termination of marine transportation modes from April 2020 to July 2020 and the government policy to carry out rapid tests, PCR swabs and antigen swabs for land, sea, and air public transport users.

International

The realization of international passenger traffic in 2020 was recorded at zero. This was influenced by Covid-19 pandemic which stopped the traffic growth of international passengers.

Domestic

The realization of domestic passengers Traffic in 2020 reached 333,026 people, a decrease of 70.57 percent compared to 2019 of 1,131,497 people. This was due to temporary suspension of marine transportation modes for several months in 2020 and the enforcement of Covid-19 test policy to use sea transportation by the government.

GEOGRAPHIC SEGMENT

Geographic Segment consists of 12 (twelve) Port Branches managed by the Company, namely Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan and Sunda Kelapa.



Cabang Pelabuhan Tanjung Priok

Cabang Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di pesisir Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada akhir abad ke-19. Ketika itu Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun pelabuhan baru karena pelabuhan yang ada yakni Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu menerima kapal-kapal besar yang datang dari berbagai belahan dunia.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal penumpang, barang domestik dan mancanegara. Fasilitas intermoda yang lengkap di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu mendistribusikan logistik ke seluruh kota di Indonesia. Letaknya yang strategis dengan *hinterland* yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadikan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa.

Tingginya aktivitas bongkar muat tersebut didukung oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan bongkar muat yang dimiliki Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan dukungan teknologi dan fasilitas modern, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir dengan kapasitas di atas 4.000 TEUs, yang langsung datang dari dan menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional.

Tanjung Priok Port Branch

Tanjung Priok Port Branch is the largest and busiest port in Indonesia, located on the coast of North Jakarta. This port serves as the gateway for the flow of import-export goods and inter-island goods. Tanjung Priok Port was built in the late 19th century when the Dutch Colonial Government decided to build a new port since the existing Sunda Kelapa Port was no longer capable of receiving large ships coming from different parts of the world.

Currently, Tanjung Priok Port Branch serves passenger ships as well as domestic and international cargo. Complete intermodal facilities at Tanjung Priok Port Branch are capable of distributing logistics to all cities in Indonesia. Its strategic location and a hinterland that is an area of trade and industry established Tanjung Priok Port Branch as the main port on the island of Java.

High rate of stevedoring activities in the port is supported by complete stevedoring facilities and equipment owned by Tanjung Priok Port Branch. With the support of modern technology and facilities, Tanjung Priok Port Branch is able to serve ships of the latest generation with a capacity above 4,000 TEUs, which directly come from and depart to various international trade centers.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok

Tanjung Priok Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok /
Table of Tanjung Priok Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	11.081	12.650	(1.569)	(12,40%)
		GT	130.626.696	147.243.178	(16.616.482)	(11,29%)
	General Cargo	Ton	59.389	6.689.322	(6.629.933)	(99,11%)
	Bag Cargo	Ton	-	461.871	(461.871)	(100,00%)
2	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	1.537.139	2.471.239	(934.100)	(37,80%)
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	1.289.986	2.471.239	(1.181.253)	(47,80%)
	Lain-lain / Others	Ton	3.655	5.906.918	(5.903.263)	(99,94%)
3	Petikemas / Container	Box	4.361.561	4.861.726	(500.165)	(10,29%)
		TEUs	6.134.006	6.812.064	(678.058)	(9,95%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	119.128	524.279	(405.151)	(77,28%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 11.081 Unit, turun 12,04 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12.650 Unit. Dari sisi GT juga turut mengalami penurunan sebesar 11,29 persen dari 147.243.178 GT di tahun 2019 menjadi 130.626.696 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Luar Negeri, khususnya kapal yang berasal dari China, Korea, dan Jepang.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 59.839 Ton, turun 99,11 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.689.322 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh berhentinya berbagai proyek dan perbaikan fasilitas umum di wilayah Jabodetabek akibat pandemi Covid-19, sehingga permintaan akan berbagai bahan proyek dalam bentuk *general cargo* terhenti.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat nihil, turun 100,00 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 461.871 Ton. Arus barang *bag cargo* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mengalami tren negatif untuk komoditi beras, jagung, dan pupuk dalam kemasan *bag*, yang mana disebabkan oleh penurunan permintaan konsumen akibat pandemi Covid-19.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 1.537.139 Ton, turun 37,80 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.471.239 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik bongkar curah cair mengalami pembekuan sehingga perlu dilakukan pemanasan dan adanya proses *cleaning* pada saat akhir bongkaran.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 1.289.986 Ton, turun 47,80 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.471.239 Ton. Penurunan tersebut terutama terjadi pada muatan pasir akibat adanya kompetitor, yaitu Pelabuhan Marunda.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk Arus Barang dalam Kemasan Lainnya di tahun 2020 tercatat sebesar 3.655 Ton, turun 99,94 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.906.918 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekspor impor kendaraan yang mengalami penurunan yang sangat besar akibat pandemi corona di hampir semua negara yang menjadi tujuan ekspor maupun impor.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Tanjung Priok Port Branch in unit was recorded at 11,081 Units, down 12.04 percent from that of 2019 at 12,650 Units. The total GT decreased by 11.29 percent from 147,243,178 GT in 2019 to 130,626,696 in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic that caused International Ship Calls to decrease, especially ships coming from China, Korea, and Japan.

In 2020, the productivity of General Cargo in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 59,839 Tons, down 99.11 percent from that of 2019 at 6,689,322 Tons. This was influenced by the halt of numerous projects and public facility improvements in Jabodetabek area as a result of Covid-19 pandemic, thus halting the demand for various project materials in the form of general cargo.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Tanjung Priok Port Branch was zero, down 100.00 percent from that of 2019 at 461,871 Tons. Bag cargo flow in Tanjung Priok Port Branch showed a negative trend for rice, corn, and bagged fertilizer commodities, which was caused by dwindling consumer demand due to Covid-19 pandemic.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 1,537,139 Tons, down 37.80 percent from that of 2019 at 2,471,239 Tons. This was influenced by the characteristics of liquid bulk which coagulated, thus requiring reheating and cleaning at the end of unloading process.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 1,289,986 Tons, down 47.80 percent from that of 2019 at 2,471,239 Tons. Such decrease mainly occurred in sand cargo with the presence of a competitor, namely Marunda Port.

In 2020, the productivity of Other Packaged Goods Flow in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 3,655 Tons, down 99.94 percent from that of 2019 at 5,906,918 Tons. This was influenced by the major slump in vehicle export and import as a result of Corona pandemic in almost all countries for export or import destinations.



Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2020 tercatat sebesar 4.361.561 Box, menurun 10,29 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.861.726 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 9,95 persen dari 6.812.064 TEUs di tahun 2019 menjadi 6.134.006 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekspor impor dan jumlah barang yang dikemas, seperti barang-barang jadi untuk berbagai kebutuhan, akibat tidak beroperasinya pabrik dan gudang sehubungan dengan berlakunya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia.

In 2020, the productivity of Container Flow in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 4,361,561 Boxes, down 10.29 percent from that of 2019 at 4,861,726 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 9.95 percent from 6,812,064 TEUs in 2019 to 6,134,006 TEUs in 2020. This was caused by the drop in export and import activities as well as the number of packaged goods, such as ready-use goods for various needs, as a result of ceasing factory and warehouse operations due to the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation by the government since March 2020, which was a measure to reduce Covid-19 spread in Indonesia.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 119.128 Orang, turun 77,28 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 524.279 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Passenger in Tanjung Priok Port Branch was recorded at 119,128 Persons, down 77,28 percent from that of 2019 at 524,279 Persons. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok

Tanjung Priok Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Tanjung Priok Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	1.775.543	1.842.598	(67.055)	(3,64%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.775,54 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp67,05 miliar atau 3,64 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.842,59 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan pendapatan dari hampir seluruh segmen pelayanan, di antaranya Pendapatan Kapal terealisasi sebesar Rp684,17 miliar mengalami penurunan 7,68 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp741,07 miliar seiring dengan tidak tercapainya Trafik Kapal dalam satuan GT maupun unit yang disebabkan adanya penurunan untuk Jenis Kapal Curah Cair, Kapal Petikemas dan Kapal Roro juga merupakan efek dari mewabahnya Covid-19 pada awal tahun 2020. Sebaliknya, pendapatan TBAL dan perusahaan alat mengalami peningkatan.

The revenue of Tanjung Priok Port Branch in 2020 was posted at Rp1,775.54 billion, which decreased by Rp67.05 billion or 3.64 percent from that of 2019 at Rp1,842.59 billion. This was mainly caused by declining revenue from almost all service segments, including Vessel Revenue, which was realized at Rp684.17 billion, a decrease by 7.68 percent from 2019 at Rp741.07 billion. This was due to unreached Vessel Traffic both in GT and in unit as a result of the decline in Liquid Bulk Ship, Container Ship, and Roro Ship types as an impact of Covid-19 spread at the beginning of 2020. On the contrary, revenue from TBAL and equipment increased.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok

Tanjung Priok Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (dalam jutaan Rupiah) / Table of Tanjung Priok Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	745.213	778.159	(32.946)	(4,23%)

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2020 tercatat sebesar Rp745,21 miliar mengalami penurunan sebesar Rp32,95 miliar atau 4,23 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp778,16 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya Biaya Usaha sebesar 4,70 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,01 triliun menjadi Rp957,81 miliar di tahun 2020. Selain itu, hampir seluruh segmen biaya mengalami penurunan, terutama biaya KSMU seiring dengan menurunnya pendapatan usaha, namun beberapa biaya lain mengalami kenaikan, seperti biaya pemeliharaan, penyusutan, dan asuransi dikarenakan adanya beberapa aset yang baru tercatat pada periode tahun 2020 setelah program investasi selesai dilaksanakan.

The net profit of Tanjung Priok Port Branch in 2020 was posted at Rp745.21 billion, which decreased by Rp32.95 billion or 4.23 percent from that of 2019 at Rp778.16 billion. This was mainly caused by decreasing Operating Cost by 4.70 percent from Rp1.01 trillion in 2019 to Rp957.81 billion in 2020. In addition, almost all cost segments decreased, particularly KSMU cost in line with declining operating revenue. However, there was an increase in other costs, such as the cost for maintenance, depreciation, and insurance due to the recognition of several assets in 2020 period after the completion of investment program.

Cabang Pelabuhan Panjang

Pada abad ke-17, Pemerintah Hindia Belanda membangun Cabang Pelabuhan Panjang dengan dermaga sepanjang 200 meter, menggunakan konstruksi *caisson* dengan kedalaman minus 7 meter *Low Water Spring* (m LWS) beserta satu unit gudang seluas 1.000 m². Pelabuhan Panjang kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar di Pulau Sumatera dan berperan sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung hingga saat ini.

Panjang Port Branch

In the 17th century, the Dutch Colonial Government built Panjang Port with 200-meter long pier, using the construction of *caisson* with a depth minus 7 meter Low Water Spring (m LWS) along with one unit warehouse with an area of 1,000 m². Panjang Port evolved into a major port on the Sumatera Island and serves as the lifeblood of economic growth in Lampung province until today.

Berada pada titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Cabang Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas area/lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agribisnis. Saat ini lingkup *hinterland* tersebut masih menunggu para investor untuk dikembangkan secara optimal. Cabang Pelabuhan Panjang melayani kapal dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan petikemas. Arus petikemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu. Dengan tersedianya terminal

Located at the transshipment node between the island of Sumatera and Java, Panjang Port Branch is a highly prospective port for the future. The expanse of the port's land can still be developed for a variety of terminal development cooperation to serve the needs of port services users. In addition, the vast area of agricultural land and plantations in Lampung province is very fertile for agribusiness activities. Currently, this hinterland scope is still waiting for investors to be developed optimally. Panjang Port Branch serves ships carrying various kinds of goods, such as general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, and containers. The flow of containers continues to grow every year along with the growth in industrial, mining, and plantation activities in the region. With the availability of container terminal equipped with 3 (three) container cranes, 5 (five) transtainers, and top loader, and supported by an



petikemas yang dilengkapi dengan 3 (tiga) *container crane*, 5 (lima) *transtainer*, dan *top loader* serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Cabang Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

existing specialized bulk terminal, Panjang Port Branch is ready to provide better service to its customers.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang

Panjang Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang / Table of Panjang Port Branch Productivity						
No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	1.764	2.199	(435)	(19,78%)
		GT	14.201.880	23.820.341	(9.618.461)	(40,38%)
	<i>General Cargo</i>	Ton	52.081	82.066	(29.985)	(36,54%)
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	303.392	320.491	(17.099)	(5,34%)
2	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	1.805.228	2.109.628	(304.400)	(14,43%)
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	3.653.851	3.698.724	(44.873)	(1,21%)
	Lain-lain / Others	Ton	660.943	1.826.654	(1.165.711)	(63,82%)
3	Petikemas / Container	Box	102.810	103.719	(909)	(0,88%)
		TEUs	120.969	125.040	(4.071)	(3,26%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	498	4.518	(4.020)	(88,98%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Panjang dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 1.764 Unit, turun 19,78 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2.199 Unit. Dari sisi GT mengalami penurunan 40,38 persen dari 23.820.341 GT di tahun 2019 menjadi 14.201.880 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya kunjungan kapal Roro dan adanya pengalihan kapal domestik yang bermuatan Cargo milik PT SIP yang bersandar ke dermaga PT SIP. Tren penurunan kunjungan kapal juga terjadi pada arus kunjungan kapal Luar Negeri akibat adanya Pandemi Covid-19, sehingga membatasi jumlah kunjungan kapal dari beberapa negara, terutama kapal yang berasal dari China. Selain itu, penurunan jumlah kunjungan kapal Luar Negeri juga disebabkan oleh berkurangnya kapal Petikemas dengan alasan pengurangan trayek untuk kapal MSC dan adanya *joint cargo* dengan kapal Maersk Line.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Panjang Port Branch in unit was recorded at 1,764 Units, down 19.78 percent from that of 2019 at 2,199 Units. The total GT decreased by 40.38 percent from 23,820,341 GT in 2019 to 14,201,880 GT in 2020. This was influenced by declining Roro ship calls and the transfer of domestic ships carrying cargo owned by PT SIP which berthed at the dock of PT SIP. The downward trend in ship calls also occurred in international ship calls due to Covid-19 pandemic which limited the number of ship calls from several countries, particularly from China. Moreover, the decline in international ship calls was also caused by decreasing container ships due to the reduction of routes for MSC ships and joint cargo with Maersk Line.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 52.081 Ton, turun 36,54 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 82.066 Ton. Penurunan tersebut terutama terjadi pada *cargo* proyek seperti tiang listrik, tiang pancang, dan *barrier*.

In 2020, the productivity of General Cargo in Panjang Port Branch was recorded at 52,081 Tons, down 36.54 percent from that of 2019 at 82,066 Tons. Such decrease mainly occurred in cargo for projects, such as electricity poles, piles, and barrier.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 sebesar 303.392 Ton, turun 5,34 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 320.491 Ton. Hal tersebut terjadi karena beralihnya pengapalan komoditi *palm kernel* (biji sawit) dari kemasan *bag cargo* menjadi curah kering, menurunnya pengapalan tepung tapioka karena belum musim panen, dan berkurangnya produksi tepung karena pabrik belum beroperasi total akibat pandemi Covid-19.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 1.805.228 Ton, turun 14,43 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.109.628 Ton. Hal tersebut terjadi karena belum tibanya musim panen raya untuk hasil hortikultura, terutama muatan molasses serta produksi CPO dan turunannya masih belum maksimal.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 3.653.851 Ton, turun 1,21 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.698.724 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh jauhnya lokasi gudang penerima/pemilik barang dari pelabuhan serta terdapat perusahaan bongkar muat swasta yang tidak bisa melayani selama 24 jam.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk Lain-lain di tahun 2020 tercatat sebesar 660.943 Ton, turun 63,82 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.826.654 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh jauhnya lokasi gudang penerima/pemilik barang dari pelabuhan serta terdapat perusahaan bongkar muat swasta yang tidak bisa melayani selama 24 jam.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Panjang pada tahun 2020 tercatat sebesar 102.810 Box, menurun 0,88 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 103.719 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 3,26 persen dari 125.040 TEUs di tahun 2019 menjadi 120.969 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya trafik petikemas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Panjang untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 498 Orang, turun 88,98 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 4.518 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Panjang Port Branch was recorded at 303,392 Tons, down 5.34 percent from that of 2019 at 320,491 Tons. This was due to the shift in palm kernel commodity shipping from bag cargo packaging into dry bulk, the decrease in tapioca flour shipping as harvest season has not set in, and the decrease in flour production due to reduced operation of factories during Covid-19 pandemic.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Panjang Port Branch was recorded at 1,805,228 Tons, down 14.43 percent from that of 2019 at 2,109,628 Tons. Such decrease occurred because horticulture products were not yet in harvest season, particularly molasses, and suboptimal production of CPO and its derivatives.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Panjang Port Branch was recorded at 3,653,851 Tons, down 1.21 percent from that of 2019 at 3,698,724 Tons. This was influenced by the remoteness of goods receiver/owner warehouse from the port and the unavailability of private loading and unloading company to provide service for 24 hours a day.

In 2020, the productivity of Others in Panjang Port Branch was recorded at 660,943 Tons, down 63.82 percent from that of 2019 at 1,826,654 Tons. This was influenced by the remoteness of goods receiver/owner warehouse from the port and the unavailability of private loading and unloading company to provide service for 24 hours a day.

In 2020, the productivity of Container Flow in Panjang Port Branch was recorded at 102,810 Boxes, down 0.88 percent from that of 2019 at 103,719 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 3.26 percent from 125,040 TEUs in 2019 to 120,969 TEUs in 2020. This was caused by the declining container traffic due to Covid-19 pandemic.

In 2020, the productivity of Passenger in Panjang Port Branch was recorded at 498 Persons, down 88.98 percent from that of 2019 at 4,518 Persons. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.



Pendapatan Cabang Pelabuhan Panjang

Panjang Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Panjang (dalam jutaan Rupiah) / Table of Panjang Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	264.563	264.984	(421)	(0,16%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Panjang tahun 2020 tercatat sebesar Rp264,56 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp0,42 miliar atau 0,16 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp264,98 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan Pelayanan Jasa Barang dan Pelayanan Jasa Terminal dikarenakan dermaga umum sudah dikelola oleh Anak Perusahaan, yaitu PT PTP *Multipurpose* pada tahun 2020. Penurunan Pendapatan juga disebabkan oleh turunnya Pendapatan TBAL yang disebabkan oleh turun angka *Rental Fee* PT PTP dan *Sharing Revenue* PT IKT Tbk.

The revenue of Panjang Port Branch in 2020 was posted at Rp264.56 billion, which decreased by Rp0.42 billion or 0.16 percent from that of 2019 at Rp264.98 billion. This was mainly caused by declining revenue from Cargo Services and Terminal Services since the general dock had been managed by a Subsidiary, namely PT PTP *Multipurpose*, in 2020. The decline in revenue also came from the decrease in TBAL revenue as a result of dwindling Rental Fee of PT PTP and Sharing Revenue of PT IKT Tbk.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Panjang

Panjang Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Panjang (dalam jutaan Rupiah) / Table of Panjang Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	60.641	67.850	(7.388)	(10,89%)

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Panjang tahun 2020 tercatat sebesar Rp60,46 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp7,39 miliar atau 10,89 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp67,85 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya realisasi Pendapatan pada tahun 2020 karena turunnya Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Jasa Terminal, dan Pendapatan TBAL serta naiknya Biaya Beban pada tahun 2020, yaitu pada Beban Pegawai, Beban Penyusutan serta Beban Sewa.

The net profit of Panjang Port Branch in 2020 was posted Rp60.46 billion, which decreased by Rp7.39 billion or 10.89 percent from that of 2019 at Rp67.85 billion. This was mainly caused by the decrease in Revenue realization of 2020 as a result of declining Cargo Services, Terminal Services, and TBAL Revenue, coupled with the increase in Expenses Cost in 2020 for Employee Expenses, Depreciation Expenses, and Lease Expenses.

Cabang Pelabuhan Palembang

Cabang Pelabuhan Palembang atau dikenal Pelabuhan sebagai Boom Baru dibangun Pemerintahan Kolonial Belanda menggantikan Pelabuhan Sungai Rendang pada tahun 1924. Pelabuhan ini terletak di antara dua muara anak sungai Musi, yaitu sungai Lawang Kidul dan sungai Belabak. Pada masa itu, Pelabuhan Boom Baru memiliki dermaga dengan panjang sekitar 250 meter. Selain dermaga, di tempat ini juga terdapat Kantor atau Bea Cukai yang posisinya terapung.

Palembang Port Branch

Palembang Port Branch, also known as Boom Baru Port, was built by the Dutch Colonial Government to replace Sungai Rendang Port in 1924. The port is situated between two estuary tributaries of the Musi river, which are Lawang Kidul River and Belabak River. At that time, Port of Boom Baru has a dock with a length of about 250 meters. In addition to the dock, a floating Customs and Excise Office was also established in this place.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Palembang menjadi pelabuhan sungai terbesar di wilayah Sumatera dan sekaligus merupakan tumpuan urat nadi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh barang curah kering dan petikemas, di samping juga melayani barang dengan jenis kemasan lain. Cabang Pelabuhan Palembang memiliki sub-pelabuhan yang sangat potensial dan terbuka bagi kerjasama investasi, yaitu Pelabuhan Sungai Lais, didukung oleh areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditas di masa mendatang, pelabuhan ini telah memiliki terminal petikemas yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

Today, Palembang Port Branch is the largest river port in Sumatera and the heart of economic growth in South Sumatera province. Stevedoring activities are dominated by dry bulk and container cargo, in addition to other forms of packaging. Palembang Port Branch has a highly potential sub-port for cooperation and investment, namely Sungai Lais port, supported by a wide area for processing industry activities. In anticipation of the increased flow of commodities in the future, this port has had a container terminal supported by a range of modern equipment that assists vessel and cargo services.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang

Palembang Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang /
Table of Palembang Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	1.416	1.611	(195)	(12,10%)
		GT	2.921.975	3.724.138	(802.163)	(21,54%)
2	General Cargo	Ton	404.749	252.351	152.398	60,39%
	Bag Cargo	Ton	376.058	367.356	8.702	2,37%
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	935.493	964.847	(29.354)	(3,04%)
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	222.727	177.016	45.711	25,82%
3	Petikemas / Container	Box	115.738	128.782	(13.044)	(10,13%)
		TEUs	129.408	145.540	(16.132)	(11,08%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	19.558	81.196	(61.638)	(75,91%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Palembang dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 1.416 Unit, turun 12,10 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.611 Unit. Dari sisi GT mengalami penurunan 802.163 GT atau 21,54 persen dari 3.724.138 GT di tahun 2019 menjadi 2.921.975 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Luar Negeri, khususnya kapal *General Cargo*, kapal Curah Cair; Kunjungan Kapal Dalam Negeri, khususnya kapal *General Cargo* dalam satuan GT, Curah Cair dalam satuan Unit, kapal Petikemas dalam satuan GT, dan kapal Roro; dan Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Palembang Port Branch in unit was recorded at 1,416 Units, down 12.10 percent from that of 2019 at 1,611 Units. The total GT decreased by 802,163 GT or 21.54 percent from 3,724,138 GT in 2019 to 2,921,975 GT in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused a downward trend in International Ship Calls, particularly General Cargo ships, Liquid Bulk ships; Domestic Ship Calls, particularly General Cargo ships in GT unit, Liquid Bulk ships in Unit, Container ships in GT unit, and Roro ships; and Traditional Ship Calls in 2020.



Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 376.058 Ton, naik 60,39 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 252.351 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan bongkar muat jenis barang MDF dan bongkar *EQUIPMENT* yang dilakukan oleh PBM selain PT PTP Cabang Palembang.

In 2020, the productivity of General Cargo in Palembang Port Branch was recorded at 376,058 Tons, up 60.39 percent from that of 2019 at 252,351 Tons. This was influenced by the high amount of cargo unloading for MDF and EQUIPMENT goods carried out by PBM other than PT PTP Palembang Branch.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 376.058 Ton, naik 2,37 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 367.356 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pangsa pasar akan kebutuhan konsumen semen dan pupuk sehingga berdampak pada banyaknya kegiatan bongkar muat semen dan pupuk di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Palembang Port Branch was recorded at 376,058 Tons, up 2.37 percent from that of 2019 at 367,356 Tons. This was influenced by the increasing market share demand by cement and fertilizer consumers, which led to the increase in cement and fertilizer loading and unloading activities at Boom Baru Port, Palembang.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 935.493 Ton, turun 3,04 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 964.847 Ton. Hal tersebut terjadi karena tingginya curah hujan sehingga menyebabkan gagal panen dan kurang bagus hasil panen untuk komoditi CPO.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Palembang Port Branch was recorded at 935,493 Tons, down 3.04 percent from that of 2019 at 964,847 Tons. This was attributable to heavy rainfall that caused failure of harvest and lacking harvest quality of CPO commodity.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 222.727 Ton, naik 25,82 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 177.016 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh lancarnya arus kegiatan bongkar muat.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Palembang Port Branch was recorded at 222,727 Tons, up 25.82 percent from that of 2019 at 177,016 Tons. This was influenced by the smooth operation of loading and unloading activities.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Palembang pada tahun 2020 tercatat sebesar 115.738 Box, menurun 10,13 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 128.782 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 11,08 persen dari 145.540 TEUs di tahun 2019 menjadi 129.408 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya trafik petikemas selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Container Flow in Palembang Port Branch was recorded at 115,738 Boxes, down 10.13 percent from that of 2019 at 128,782 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 11.08 percent from 145,540 TEUs in 2019 to 129,408 TEUs in 2020. This was caused by declining container traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Palembang untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 19.558 Orang, turun 75,91 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 81.196 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Passenger in Palembang Port Branch was recorded at 19,558 Persons, down 75.91 percent from that of 2019 at 81,196 Persons. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Palembang

Palembang Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Palembang (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Palembang Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch	237.655	254.856	(17.231)	(6,76%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Palembang tahun 2020 tercatat sebesar Rp237,66 miliar mengalami penurunan sebesar Rp17,23 miliar atau 6,76 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp254,86 miliar. Secara umum, penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh adanya *spin off* dengan PT PTP, sehingga pendapatan jasa barang dan pendapatan terminal mengalami penurunan secara signifikan. Di sisi lain, pendapatan per segmen mengalami peningkatan yang disebabkan oleh:

- Penyesuaian tarif paket atas pelayanan jasa kapal, sehingga berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan jasa kapal;
- Kenaikan kontrak *rental fee* PT IPC TPK, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp29,68 miliar/tahun berubah ditahun 2020 menjadi Rp31,16 miliar, kenaikan *rental fee* atas *rental fee variable* 7,5 persen dari PT PTP.

The revenue of Palembang Port Branch in 2020 was posted at Rp237.66 billion, which decreased by Rp17.23 billion or 6.76 percent from that of 2019 at Rp254.86 billion. In general, the decrease in revenue was caused by the spin-off of PT PTP, resulting in significant drop of cargo services revenue and terminal revenue. On the other hand, revenue per segment increased as a result of:

- Adjustment of package tariff for vessel services, thus contributing to the increase in vessel services revenue;
- Increase in rental fee contract of PT IPC TPK from Rp29.68 billion/year in 2019 to Rp31.16 billion in 2020, an increase in rental fee variable by 7.5 percent from PT PTP.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Palembang

Palembang Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Palembang (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Palembang Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)

Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch	42.924	42.195	729	1,73%

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Palembang tahun 2020 tercatat sebesar Rp42,92 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp0,73 miliar atau 1,73 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp42,19 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Penurunan Beban KSMU akibat pemisahan kewajiban biaya dengan Anak Perusahaan PT PTP dan beralihnya pembukuan Biaya Buruh ke anak perusahaan PT PTP
- Penurunan Beban Administrasi Kantor akibat perubahan pola kerja WFH yang berkontribusi atas penurunan beban administrasi kantor dan pemisahan *cut off* beban dengan PT PTP.
- Penurunan Beban Umum sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga beban perjalanan dinas menurun serta tidak diselenggarakannya acara *gathering* Perseroan.

The net profit of Palembang Port Branch in 2020 was posted at Rp42.92 billion, which increased by Rp0.73 billion or 1.73 percent from that of 2019 at Rp42.19 billion. This was mainly caused by:

- The decrease in KSMU Expenses due to separation of cost liabilities from Subsidiary PT PTP and the transfer of Labor Cost to subsidiary PT PTP.
- Decrease in Office Administration Expenses due to the implementation of WFH work pattern, which contributed to the decrease in office administration expenses and expenses cut-off with PT PTP.
- Decrease in General Expenses as a result of Covid-19 pandemic, in which official travel expenses decreased and the Company did not organize gathering event.



Cabang Pelabuhan Pontianak

Saat Singapura diberlakukan sebagai pelabuhan bebas internasional 1819, Pontianak menjadi poros terdepan Hindia Belanda dalam menarik sebagian perdagangan luar negeri. Pada 1834 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Pontianak dan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Cabang Pelabuhan Pontianak berada di tepi sungai Kapuas yang menghubungkan area seluas 146,8 ribu km di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini menjadi urat nadi perekonomian wilayah Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang dan Singkawang. Cabang Pelabuhan Pontianak memiliki terminal petikemas, dilengkapi dengan berbagai peralatan modern guna mendukung kegiatan bongkar muat secara optimal. Keberadaan subpelabuhan di sekitarnya, makin memperkuat posisi Cabang Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat.

Pontianak Port Branch

When Singapore was established as an international free port in 1819, Pontianak became the leading port of the Dutch East Indies in attracting most foreign trade. In 1834, the Dutch East Indies government established Pontianak and Sambas as free ports. Pontianak Port Branch is located on the edge of Kapuas river that connects an area of 146.8 thousand km in West Kalimantan province. This port is the artery of the regional economy of Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang, and Singkawang. Pontianak Port Branch has a container terminal equipped with a range of modern equipment to support optimal stevedoring activities. The existence of sub-port in the vicinity further strengthened the position of Pontianak Port Branch as the main port in West Kalimantan.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak

Pontianak Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	2.422	2.419	3	0,12%
		GT	5.564.231	5.904.171	(339.940)	(5,76%)
2	General Cargo	Ton	1.245.839	1.342.311	(96.472)	(7,19%)
	Bag Cargo	Ton	170.086	192.617	(22.531)	(11,70%)
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	324.593	121.620	202.973	166,89%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	27.682	15.848	11.834	74,67%
3	Petikemas / Container	Box	201.724	231.293	(29.569)	(12,78%)
		TEUs	237.992	263.891	(25.899)	(9,81%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	68.467	147.881	(79.414)	(53,70%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Pontianak dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 2.422 Unit, naik 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2.419 Unit. Meski demikian, dari sisi GT mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dari 5.904.171 GT di tahun 2019 menjadi 5.564.231 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kunjungan kapal dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki ukuran GT lebih besar sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, sedangkan kunjungan kapal rakyat dan perintis yang memiliki ukuran GT lebih kecil mengalami peningkatan.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Pontianak Port Branch in unit was recorded at 2,422 Units, up 0.12 percent from that of 2019 at 2,419 Units. However, total GT decreased by 5.76 percent from 5,904,171 GT in 2019 to 5,564,231 GT in 2020. This was influenced by the decrease in domestic and international calls from ships with large GT as a result of Covid-19 pandemic, while calls from traditional and pacer ships with smaller GT increased.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 1.245.839 Ton, turun 7,19 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.342.311 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya trafik kapal *general cargo* selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of General Cargo in Pontianak Port Branch was recorded at 1,245,839 Tons, down 7.19 percent from that of 2019 at 1,342,311 Tons. This was influenced by the decline in general cargo ship traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 170.086 Ton, turun 11,70 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 192.617 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya trafik kapal *bag cargo* selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Pontianak Port Branch was recorded at 170,086 Tons, down 11.70 percent from that of 2019 at 192,617 Tons. This was influenced by the decrease in bag cargo ship traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 324.593 Ton, naik 166,89 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 121.620 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya trafik kapal curah cair selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Pontianak Port Branch was recorded at 324,593 Tons, up 166.89 percent from that of 2019 at 121,620 Tons. This was influenced by the increase in liquid bulk ship traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 27.682 Ton, naik 74,67 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 15.848 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya trafik kapal curah kering selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Pontianak Port Branch was recorded at 27,682 Tons, up 74.67 percent from that of 2019 at 15,848 Tons. This was influenced by the increase in dry bulk ship traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Pontianak pada tahun 2020 tercatat sebesar 201.724 Box, menurun 12,78 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 231.293 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 9,81 persen dari 263.891 TEUs di tahun 2019 menjadi 237.992 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya trafik kapal petikemas pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Container Flow in Pontianak Port Branch was recorded at 201,724 Boxes, down 12.78 percent from that of 2019 at 231,293 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 9.81 percent from 263,891 TEUs in 2019 to 237,992 TEUs in 2020. This was caused by the decrease in container ship traffic during Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pontianak untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 68.467 Orang, turun 53,70 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 147.881 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Passenger in Pontianak Port Branch was recorded at 68,467 Persons, down 53.70 percent from that of 2019 at 147,881 Persons. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Pontianak

Pontianak Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Pontianak (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Pontianak Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	169.409	224.989	(55.580)	(24,70%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.



Pendapatan Cabang Pelabuhan Pontianak tahun 2020 tercatat sebesar Rp169,41 miliar mengalami penurunan sebesar Rp55,58 miliar atau 24,70 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp224,99 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Pengakuan pendapatan PT Djakarta Lloyd di tahun 2019 sebesar Rp58,17 miliar sedangkan di tahun 2020 tidak ada;
- Turunnya *throughput* petikemas karena adanya uji coba terminal PT Shinada Jaya Lestari (PT Temas Tbk) sebesar 33.245 TEUs;
- Penurunan trafik kapal akibat beroperasinya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di sepanjang alur Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pontianak, namun pendapatan kapal mengalami kenaikan dari tahun 2019, yang disebabkan oleh adanya uji coba Terminal Kawasan Kijing pada bulan Agustus 2020;
- Penurunan jumlah penumpang kapal akibat dari Pandemi Covid-19;
- Belum terimplementasinya tarif penundaan tahun 2020 yang mampu mendorong potensi pendapatan hingga Rp+5 Miliar.

The revenue of Pontianak Port Branch in 2020 was posted at Rp169.41 billion, which decreased by Rp55.58 billion or 24.70 percent from that of 2019 at Rp224.99 billion. This was mainly caused by:

- The recognition of revenue from PT Djakarta Lloyd in 2019 amounting to Rp58.17 billion, while in 2020 the amount was zero;
- The decline in container throughput due to the try-out of terminal of PT Shinada Jaya Lestari (PT Temas Tbk) amounting to 33,245 TEUs;
- The decline in ship traffic due to the operation of Terminal for Own Interests (TUKS) along Pontianak Working Environment Area (DLKr). However, vessel revenue increased from 2019 due to the try-out of Kijing Area Terminal in August 2020;
- The decline in total ship passengers due to Covid-19 pandemic;
- Tug tariff of 2020 had not been implemented, which could boost revenue to Rp±5 billion.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Pontianak

Pontianak Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Pontianak (dalam jutaan Rupiah) / Table of Pontianak Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	(63.825)	64.390	(128.125)	(200,88%)

Pada tahun 2020, Cabang Pelabuhan Pontianak mencatatkan rugi bersih sebesar Rp63,83 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp128,23 miliar atau 200,88 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp64,39 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Adanya beban penyisihan piutang PT Djakarta Lloyd sebesar Rp58,17 miliar sebagai dampak dari implementasi PSAK 71 pada tahun 2020.
- Naiknya beban KSMU akibat:
 - Kenaikan *sharing revenue* PT MTI sebesar 55 – 45 persen atau Rp16,02 miliar seiring dengan pengambilalihan operasi Terminal Dwikora;
 - Kenaikan *sharing* pendapatan penundaan PT JAI Tbk sebesar 35 – 65 persen, dengan Cabang Pelabuhan Pontianak sebesar Rp5,5 miliar.
 - PT IPC TPK *Business to Business* sebesar Rp8,54 miliar.

In 2020, Pontianak Port Branch posted net loss amounting to Rp63.83 billion, which decreased by Rp128.23 billion or 200.88 percent from the net profit of 2019 at Rp64.39 billion. This was mainly caused by:

- Allowance expense for receivables of PT Djakarta Lloyd amounting to Rp58.17 billion as an impact of PSAK 71 implementation in 2020.
- Increasing KSMU expenses due to:
 - Increase in revenue sharing of PT MTI by 55-45 percent or Rp16.02 billion along with the acquisition of Dwikora Terminal operation;
 - Increase in tug revenue sharing of PT JAI Tbk by 35-65 percent with Pontianak Port Branch amounting to Rp5.5 billion.
 - PT IPC TPK Business to Business amounting to Rp8.54 billion.

- PT IPC TPK atas pemeliharaan alat-alat fasilitas pelabuhan (*Reengine* RMGC) tahun 2019 yang dibebankan di tahun 2020 sebesar Rp2,5 miliar
- Beban penataan arsip PT ANRI tahun 2019 yang dibebankan di tahun 2020 sebesar Rp1,3 miliar.
- Pengadaan perlengkapan operasional Kijing.
- Adanya tambahan 10 orang Tenaga Pandu per tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp3,44 miliar menyebabkan beban pegawai tidak dapat turun signifikan, meskipun operasional Lini 2 telah diambil alih oleh PT MTI.
- Naiknya beban asuransi tahun 2020 sebesar Rp1,8 miliar karena adanya kenaikan beban asuransi tenaga kerja.
- PT IPC TPK for port facility maintenance (*Re-engine* RMGC) of 2019 which was accounted in 2020 amounting to Rp2.5 billion.
- Expenses for organizing archives of PT ANRI of 2019 which was accounted in 2020 amounting to Rp1.3 billion.
- Procurement of operational equipment in Kijing.
- Addition of 10 Pilots as of May 1, 2020 amounting to Rp3.44, so that employee expenses could not be reduced significantly despite the acquisition of Line 2 operations by PT MTI.
- Increasing insurance expenses in 2020 amounting to Rp1.8 billion due to rising labor insurance;

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, sebelumnya bernama Emmahaven, dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893 di Kota Padang. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional di provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas seperti kayu manis, teh, *moulding*, furnitur dan karet, yang merupakan komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika.

Teluk Bayur Port Branch

Teluk Bayur Port Branch, formerly named Emmahaven, was built in the Dutch colonial era between 1888 and 1893 in Padang City. Teluk Bayur Port Branch is an open ocean port for international trade activities in West Sumatera province. This port has several areas that are centers of economic activity in West Sumatera, including Muara Padang and Air Bangis.

Teluk Bayur Port Branch currently has a standard service procedure based on ISO 9002. Teluk Bayur Port Branch is supported by modern equipment that is capable of handling various kinds of cargo, among others, bulk cargo such as coal, cement, clinker, CPO, and commodities using container such as cinnamon, tea, moulding, furniture, and rubber, which are the main export commodities to the United States, Europe, Asia, Australia, and Africa.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Teluk Bayur Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur /
Table of Teluk Bayur Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	1.523	1.791	(268)	(14,96%)
		GT	6.265.303	6.098.413	166.890	2,74%
2	<i>General Cargo</i>	Ton	211.104	261.070	(49.966)	(19,14%)
		<i>Bag Cargo</i>	Ton	371.671	499.245	(127.574)
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	2.206.180	2.239.411	(33.231)	(1,48%)
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	1.414.062	1.723.604	(309.542)	(17,96%)
3	Petikemas / Container	Box	89.755	80.848	8.907	11,02%
		TEUs	97.601	89.156	8.445	9,47%
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	58.057	113.886	(55.829)	(49,02%)



Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 1.523 Unit, turun 14,96 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.791 Unit. Dari sisi GT mengalami peningkatan 2,74 persen dari 6.098.413 GT di tahun 2019 menjadi 6.265.303 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya tingkat trafik kapal karena pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Teluk Bayur Port Branch in unit was recorded at 1,523 Units, down 14.96 percent from that of 2019 at 1,791 Units. The total GT increased by 2.74 percent from 6,098,413 GT in 2019 to 6,265,303 GT in 2020. This was influenced by the decrease in ship traffic due to Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 211.104 Ton, turun 19,14 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 261.070 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan volume *General Cargo*.

In 2020, the productivity of General Cargo in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 211,104 Tons, down 19.14 percent from that of 2019 at 261,070 Tons. This was influenced by the decline in General Cargo volume.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 371.671 Ton, turun 25,55 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 499.245 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan bongkar muat pupuk.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 371,671 Tons, down 25.55 percent from that of 2019 at 499,245 Tons. This was influenced by the decrease in fertilizer stevedoring.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 2.206.180 Ton, turun 1,48 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.239.411 Ton. Penurunan tersebut terjadi terutama pada kemasan CPO, sejalan dengan turunnya permintaan, khususnya di negara-negara Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor CPO.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 2,206,180 Tons, down 1.48 percent from that of 2019 at 2,239,411 Tons. Such decrease mainly occurred in CPO packaging, in line with the declining demand particularly from European countries that are the main destination of CPO export.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 1.414.062 Ton, turun 17,96 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.723.604 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya muatan batu bara untuk PLTU Teluk Sirih, ekspor bungkil inti sawit ke Selandia Baru, dan impor gipsum dari Oman.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 1,414,062 Tons, down 17.96 percent from that of 2019 at 1,723,604 Tons. This was influenced by declining coal cargo for Teluk Sirih Steam Power Plant, export of palm kernel to New Zealand, and import of gypsum from Oman.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 2020 tercatat sebesar 89.755 Box, meningkat 11,02 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 80.848 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami peningkatan sebesar 9,47 persen dari 89.156 TEUs di tahun 2019 menjadi 97.601 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan petikemas *empty ex transshipment* dari Bengkulu ke Jakarta via Teluk Bayur.

In 2020, the productivity of Container Flow in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 89,755 Boxes, up 11.02 percent from that of 2019 at 80,848 Boxes. In terms of TEUs, container flow increased by 9.47 percent from 89,156 TEUs in 2019 to 97,601 TEUs in 2020. This was caused by the increase in empty ex-transshipment container activities from Bengkulu to Jakarta via Teluk Bayur.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 58.057 Orang, turun 49,02 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 113.886 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Passenger in Teluk Bayur Port Branch was recorded at 58,057 Persons, down 49.02 percent from that of 2019 at 113,886 Persons. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Teluk Bayur Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (dalam jutaan Rupiah) / Table of Teluk Bayur Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch	187.227	266.716	(74.489)	(29,80%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur tahun 2020 tercatat sebesar Rp187,23 miliar mengalami penurunan sebesar Rp74,49 miliar atau 29,80 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp266,72 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kunjungan kapal luar negeri untuk kegiatan ekspor komoditi CPO & turunannya, bungkil beserta karet, yang puncaknya terjadi pada triwulan II dan III akibat diterapkannya kebijakan *lockdown* di beberapa negara saat mewabahnya virus Covid-19. Sedangkan untuk kunjungan kapal dalam negeri juga terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya penerapan PSBB di beberapa kota saat mewabahnya virus Covid-19 yang puncaknya terjadi pada triwulan II, sehingga aktivitas pengiriman barang menurun, terutama pada kegiatan muat semen *bag*, batu *split*, biji besi, dan coklat. Adapun aktivitas tongkang penerimaan batu bara PT Semen Padang pada tahun 2020 mulai terhenti karena PT Semen Padang mulai melakukan penerimaan batu bara yang dikirim melalui jalur darat menggunakan *dump truck* dari daerah Sumatra Selatan.

The revenue of Teluk Bayur Port Branch in 2020 was posted at Rp187.23 billion, which decreased by Rp74.49 billion or 29.80 percent from that of 2019 at Rp266.72 billion. This was mainly caused by declining international ship calls for export of CPO & its derivatives commodities, kernel, and rubber, which peaked in Q2 and Q3 due to lockdown policy in several countries during the spread of Covid-19 virus. Domestic ship calls also decreased as a result of PSBB enforcement in several cities due to Covid-19, which peaked in Q2 and led to a decrease in goods transportation, particularly the loading of bag cement, split stones, iron ore, and cocoa. Barge activities for the receipt of coal of PT Semen Padang in 2020 ceased since PT Semen Padang began receiving coal sent through land routes using dump trucks from South Sumatra.

Selain dari jasa kapal, penurunan juga terjadi di jasa terminal, yang mana pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp71,9 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp56,08 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya *spin off* dari Cabang Pelabuhan Teluk Bayur ke Anak Perusahaan pada pertengahan tahun 2019, sehingga sebagian pendapatan tahun 2019 masih dibukukan oleh Cabang Pelabuhan Teluk Bayur. Namun pada tahun 2020, tidak ada pendapatan usaha Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang dikontribusikan dari sektor jasa terminal.

In addition to vessel services, terminal services also declined from the 2019 realization at Rp71.9 billion to Rp56.08 million in 2020. This was caused by the spin-off from Teluk Bayur Port Branch to Subsidiary in mid-2019, so that a portion of 2019 revenues was still accounted by Teluk Bayur Port Branch. However, in 2020 there were no contribution from terminal services to the operating revenues of Teluk Bayur Port Branch.



Profitabilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur

Teluk Bayur Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (dalam jutaan Rupiah) / Table of Teluk Bayur Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch	60.544	39.661	20.883	52,65%

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Teluk Bayur tahun 2020 tercatat sebesar Rp60,54 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp20,88 miliar atau 52,65 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp39,66 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya beban pemeliharaan pada tahun 2020 akibat tidak adanya pembebanan atas beban *Total Solution Maintenance Contract* (TSMC) dengan PT JPPI sehubungan dengan adanya kerja sama optimalisasi kegiatan bongkar muat dengan PT PTP, sehingga beban tersebut menjadi beban PT PTP.

The net profit of Teluk Bayur Port Branch in 2020 was posted at Rp60.54 billion, which increased by Rp20.88 billion or 52.65 percent from that of 2019 at Rp39.66 billion. This was mainly caused by the decrease in maintenance expenses in 2020 as there were no expenses for Total Solution Maintenance contract (TSMC) with PT JPPI since the cooperation for optimizing loading and unloading activities with PT PTP, so that the expenses were accounted by PT PTP.

Selain itu, peningkatan laba bersih Cabang Pelabuhan Teluk Bayur di tahun 2020 juga disebabkan oleh penurunan beban pada jamuan rapat sejalan dengan menurunnya intensitas tamu, baik dari Kantor Pusat maupun pihak ketiga dan tidak terealisasinya *employee gathering* yang disebabkan oleh adanya kebijakan *social distancing* dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 dan adanya kenaikan pendapatan di luar usaha karena adanya *cleansing* data saldo Biaya Yang Masih Harus Dibayar (BYMH) yang memberikan peningkatan laba bersih secara signifikan.

In addition, the increase in net profit of Teluk Bayur Port Branch in 2020 was also attributable to the decline in expenses for meeting entertainment, in line with decreasing guests from Head Office and third parties, unrealized employee gathering due to social distancing policy to suppress Covid-19 spread, as well as the increase in non-operating revenues from data cleansing of Accrued Cost balance, which significantly increased net profit.

Cabang Pelabuhan Banten

Cabang Pelabuhan Banten telah menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan domestik dan mancanegara selama lebih dari tiga abad. Pelabuhan yang terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Serang ini pernah menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan internasional di abad ke-15 dan disinggahi kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, China, Inggris dan Portugis.

Banten Port Branch

Banten Port Branch has facilitated domestic and foreign trade transactions for more than three centuries. The port which is located about 10 kilometers from the center of Serang city was once an important port in international trade in the 15th century and visited by international ships coming from Persian, Arabic, Indian, Chinese, English and Portuguese areas.

Cabang Pelabuhan Banten memiliki potensi berkembang pesat karena ditopang daerah industri yang tumbuh pesat, seperti industri pengolahan logam, mesin, kimia, dan minyak kelapa sawit. Cabang Pelabuhan Banten memiliki 3 (tiga) terminal batu bara dan dermaga *Multipurpose* yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat petikemas. Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Banten didominasi pelayanan *cargo* curah cair dan curah kering.

Banten Port Branch has the potential to grow rapidly because it is sustained by fast-growing industrial areas, such as metal processing, machinery, chemical, and oil palm industries. Banten Port Branch has 3 (three) coal terminals and multipurpose dock supported by container stevedoring equipment. Stevedoring activities in Banten Port Branch is dominated by liquid bulk and dry bulk cargo.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Banten

Banten Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Banten / Table of Banten Port Branch Productivity						
No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	838	1.155	(317)	(27,45%)
		GT	6.843.671	8.479.035	(1.635.364)	(19,29%)
2	General Cargo	Ton	1.299.737	1.961.983	(662.246)	(33,75%)
	Bag Cargo	Ton	60.322	32.551	27.771	85,32%
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	493.723	570.718	(76.995)	(13,49%)
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	4.185.551	5.821.449	(1.635.898)	(28,10%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Banten dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 838 Unit, turun 27,45 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.155 Unit. Dari sisi GT juga turut mengalami penurunan dari 8.479.035 GT di tahun 2019 menjadi 6.843.671 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Luar Negeri, khususnya kapal *General Cargo*; serta Kunjungan Kapal Dalam Negeri, khususnya kapal *General Cargo* dan kapal Curah Kering.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Banten Port Branch in unit was recorded at 838 Units, down 27.45 percent from that of 2019 at 1,155 Units. The total GT also decreased from 8,479,035 GT in 2019 to 6,843,671 GT in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused a downward trend in International Ship Calls, particularly General Cargo ships; Domestic Ship Calls, particularly General Cargo ships and Dry Bulk ships.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Banten untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 1.299.737 Ton, turun 33,75 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.961.983 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakcukupan alat bantu bongkar yang digunakan.

In 2020, the productivity of General Cargo in Banten Port Branch was recorded at 1,299,737 Tons, down 33,75 percent from that of 2019 at 1,961,983 Tons. This was influenced by the insufficiency of unloading equipment being used.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Banten untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 60.322 Ton, naik 85,32 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 32.551 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan muat barang dalam karung (*bag cargo*) yaitu Semen *Bag* dan Cokelat.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Banten Port Branch was recorded at 60,322 Tons, up 85.32 percent from that of 2019 at 32,551 Tons. This was influenced by the decline in bag cargo loading for cement and cocoa.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Banten untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 493.723 Ton, turun 13,49 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 570.718 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan ekspor dari negara tujuan yang menerapkan sistem *lockdown* karena dampak Pandemi Covid-19.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Banten Port Branch was recorded at 493,723 Tons, down 13.49 percent from that of 2019 at 570,718 Tons. This was influenced by the decrease in export demand from countries that applied lockdown due to Covid-19 pandemic.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Banten untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 4.185.551 Ton, turun 28,10 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.821.449 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan permintaan pabrik untuk

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Banten Port Branch was recorded at 4,185,551 Tons, down 28.10 percent from that of 2019 at 5,821,449 Tons. This was influenced by the Covid-19 pandemic that resulted in declining factory demand for food bulk, such as wheat, raw sugar, palm kernel, and



curah pangan seperti gandum, *raw sugar*, bungkil inti sawit, dan curah pangan lainnya berkurang akibat berhentinya pabrik dan gudang penerima tidak beroperasi.

other types of food bulk due to the halt in factory and receiving warehouse operations.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Banten

Banten Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Banten (dalam jutaan Rupiah) / Table of Banten Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	276.140	333.531	(57.390)	(17,21%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Banten tahun 2020 tercatat sebesar Rp276,14 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp57,39 miliar atau 17,21 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp333,53 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

The revenue of Banten Port Branch in 2020 was posted at Rp276.14 billion, which decreased by Rp57.39 billion or 17.21 percent from that of 2019 at Rp333.53 billion. This was mainly due to the following:

1. Sampai dengan triwulan IV tahun 2019, Cabang Pelabuhan Banten masih menerbitkan nota jasa barang dan jasa terminal sebesar Rp58,36 miliar milik PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP), sehingga masih mencatatkan pendapatan jasa barang & jasa terminal, yang kemudian dicatat pada Beban KSMU Terminal.
2. Pendapatan Non-Tanah & Bangunan atas *rental fee* PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) tahun 2019 menggunakan metode *fixed* atau *prorate* setiap bulannya, sedangkan untuk realisasi pendapatan *rental fee* tahun 2020 menggunakan *metode fixed* dan *variabel* setiap bulannya. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 23,44 persen atau sebesar Rp10,72 miliar.

1. Until Q4/2019, Banten Port Branch still issued receipts for cargo services and terminal services amounting to Rp58.36 billion by PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP), thus the revenues from cargo services & terminal services were still recorded in Terminal KSMU Expenses.
2. Non-Land & Building revenue from rental fee of PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) in 2019 used fixed or prorated method every month, while the realization of rental fee in 2020 used fixed and variable method every month. Compared to the realization of Q4/2019, there was a decrease by 23.44 percent or Rp10.72 billion.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Banten

Banten Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Banten (dalam jutaan Rupiah) / Table of Banten Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	70.515	128.808	(58.293)	(45.26%)

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Banten tahun 2020 tercatat sebesar Rp70,52 miliar mengalami penurunan sebesar Rp56,29 miliar atau 45,26 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp128,81 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

The net profit of Banten Port Branch in 2020 was posted at Rp70.52 billion, which decreased by Rp56.29 billion or 45,26 percent from that of 2019 at Rp128.81 billion. This was mainly caused by:

1. Kenaikan biaya KSMU kapal kepada PT JAI Tbk sebagai biaya KSMU (*Sharing Fee* sebesar 90 persen) sebesar Rp9,08 miliar seiring dengan kenaikan pendapatan jasa kapal sebesar Rp18,24 miliar atau 15,34 persen.
2. Penurunan pendapatan di luar usaha sebesar Rp52,93 miliar dari tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp53,20 miliar menjadi sebesar Rp271,28 juta di tahun 2020. Hal ini dikarenakan oleh pendapatan atas pengakuan aset tanah hasil reklamasi PT Indochlor Prakasa Industries sebesar Rp58,46 miliar dan CV Putri Duyung sebesar Rp6,7 miliar yang tidak dimasukkan ke dalam pendapatan di luar usaha pada tahun 2020.

Cabang Pelabuhan Cirebon

Pada 1865, pemerintahan kolonial Belanda membangun Pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon Jawa Barat. Cabang Pelabuhan Cirebon sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan usaha bagi *hinterland* yang luas, yaitu provinsi Jawa Barat dan sebagian provinsi Jawa Tengah. Cabang Pelabuhan Cirebon juga menjadi sangat strategis karena berada di lokasi dekat lintasan jalur jalan raya dan rel kereta api ke seluruh kota di Pulau Jawa. Cabang Pelabuhan Cirebon dilengkapi dengan fasilitas penumpukan petikemas, terminal batu bara, terminal aspal curah dan tangki penampungan minyak kelapa sawit. Cabang Pelabuhan Cirebon dapat melayani barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung.

Cirebon Port Branch

In 1865, the Dutch colonial government built the Cirebon Port in Cirebon City, West Java. Cirebon Port Branch is a highly strategic port that serves as the gateway for business activities for its broad hinterland, namely West Java province and part of Central Java province. Cirebon Port Branch is also strategic as it is located close to highways and railways to all cities in the Java Island. Cirebon Port Branch is equipped with container storing facility, coal terminal, bulk asphalt terminal, and palm oil storage tank. Cirebon Port Branch is capable of serving dry bulk, liquid bulk, and bag cargo.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon

Cirebon Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon / Table of Cirebon Port Branch Productivity						
No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	1.860	1.896	(36)	(1,90%)
		GT	3.064.370	3.134.056	(69.686)	(2,22%)
2	<i>General Cargo</i>	Ton	62.619	47.652	14.967	31,41%
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	76.899	76.959	(60)	(0,08%)
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	536.632	465.134	71.498	15,37%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	3.422.180	3.962.445	(540.265)	(13,63%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Cirebon dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 1.860 Unit, turun 1,90 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.896 Unit. Dari sisi GT juga turut mengalami penurunan 2,22 persen dari 3.134.056 GT di tahun 2019 menjadi 3.064.370 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Luar Negeri, khususnya kapal Curah Cair; serta Kunjungan Kapal Dalam Negeri, khususnya kapal Curah Kering.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Cirebon Port Branch in unit was recorded at 1,860 Units, down 1.90 percent from that of 2019 at 1,896 Units. The total GT also decreased by 2.22 percent from 3,134,056 GT in 2019 to 3,064,370 GT in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused a downward trend in International Ship Calls, particularly Liquid Bulk ships; and Domestic Ship Calls, particularly Dry Bulk ships.



Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 62.619 Ton, naik 31,41 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 47.652 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan alat bongkar muat dalam melayani kegiatan.

In 2020, the productivity of General Cargo in Cirebon Port Branch was recorded at 62,619 Tons, up 31.41 percent from that of 2019 at 47,652 Tons. This was influenced by the readiness of loading and unloading equipment to support activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 76.899 Ton, turun 0,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 76.959 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena lokasi gudang penerima/pemilik barang jauh dari pelabuhan serta terdapat perusahaan bongkar muat swasta yang tidak bisa melayani selama 24 jam.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Cirebon Port Branch was recorded at 76,899 Tons, down 0.08 percent from that of 2019 at 76,959 Tons. This was influenced by the remoteness of goods receiver/owner warehouse from the port and the unavailability of private loading and unloading company to provide service for 24 hours a day.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 536.632 Ton, naik 15,27 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 465.134 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena muatan sudah tersedia di tangki penimbunan pada saat kegiatan.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Cirebon Port Branch was recorded at 536,632 Tons, up 15.27 percent from that of 2019 at 465,134 Tons. This was due to the fact that the cargo was already in the storage tank during the activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Cirebon untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 3.422.180 Ton, turun 13,63 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.962.445 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh jarak yang cukup jauh antara pabrik dengan Pelabuhan dan armada truk yang kurang memadai.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Cirebon Port Branch was recorded at 3,422,180 Tons, down 13.63 percent from that of 2019 at 3,962,445 Tons. This was influenced by the remoteness of factories from the port and insufficient fleet of trucks.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Cirebon

Cirebon Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Cirebon (dalam jutaan Rupiah) / Table of Cirebon Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch	65.508	133.731	(68.223)	(51,02%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Cirebon tahun 2020 tercatat sebesar Rp65,51 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp68,22 miliar atau 51,02 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp133,73 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh beralihnya Pendapatan Jasa Barang, Pendapatan Jasa Terminal dan Pendapatan Sewa Alat ke PT Pelabuhan Tanjung Priok, sejalan dengan perjanjian kerja sama pengelolaan terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok, di mana pada tahun 2019 pendapatan tersebut masih tercatat di Cabang Pelabuhan Cirebon, sedangkan di tahun 2020 sudah berpindah di PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The revenue of Cirebon Port Branch in 2020 was posted at Rp65.51 billion, which decreased by Rp68.22 billion or 51.02 percent from that of 2019 at Rp133.73 billion. This was mainly caused by the transfer of Cargo Services Revenue, Terminal Services Revenue, and Equipment Rent Revenue to PT Pelabuhan Tanjung Priok, in line with cooperation agreement for terminal management with PT Pelabuhan Tanjung Priok. In 2019, this revenue was still recorded in Cirebon Port Branch, while in 2020 it had been transferred to PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Cirebon

Cirebon Port Branch Profitability

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Cirebon (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Cirebon Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)

Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch	(2.642)	5.738	(8.380)	(146,04%)

Pada tahun 2020, Cabang Pelabuhan Cirebon mencatatkan rugi bersih sebesar Rp2,64 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp8,38 miliar atau 53,96 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp5,74 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Penurunan pendapatan TBAL dari *rental fee* kerja sama terminal PT PTP, karena terjadinya penurunan trafik barang dari tahun 2019 sebesar 4,5 juta Ton menjadi 4,1 juta Ton pada tahun 2020 atau turun sebesar 10 persen;
- Penurunan pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha dari tahun 2019 sebesar Rp14,4 miliar menjadi sebesar Rp10,3 miliar pada tahun 2020 akibat dampak dari penurunan trafik barang terhadap pendapatan pas dan retribusi;
- Beralihnya proses bisnis terminal ke PT PTP.

In 2020, Cirebon Port Branch posted net loss amounting to Rp2.64 billion, which decreased by Rp8.38 billion or 53.96 percent from that of 2019 at Rp5.74 billion. This was mainly caused by:

- The decrease in TBAL revenue from rental fee of terminal cooperation with PT PTP, since cargo traffic declined from 4.5 million Tons in 2019 to 4.1 million Tons in 2020 or equivalent to 10 percent;
- The decrease in miscellaneous facilities revenue from Rp14.4 billion in 2019 to Rp10.3 billion in 2020 as an impact of cargo traffic decrease to revenue from pass and retribution;
- The transfer of terminal business process of PT PTP.

Cabang Pelabuhan Bengkulu

Cabang Pelabuhan Bengkulu merupakan kota pelabuhan tua yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Cabang Pelabuhan Bengkulu berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu. Pelabuhan ini memiliki *hinterland* yang cukup luas, dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung dan petikemas, sementara untuk menampung kegiatan pelayanan barang curah kering, pelabuhan ini dilengkapi dengan 3 (tiga) *Belt Conveyor* pemuatan batu bara untuk percepatan pelaksanaan bongkar muat.

Bengkulu Port Branch

Bengkulu Port Branch is a former port city that was transformed into an occupational and trade city by the British colony in the 18th to 19th century. Bengkulu Port Branch is located on Baai Island, around 20 kilometers from the center of Bengkulu city. This port has a fairly extensive hinterland, with the potential for mining, agriculture, and forestry.

Stevedoring activity in Bengkulu Port Branch is mainly dominated by dry bulk, liquid bulk, and bag cargo and container services. To accommodate dry bulk services, this port is equipped with 3 (three) coal loading conveyor belts in order to accelerate the stevedoring process.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu

Bengkulu Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu /
Table of Bengkulu Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	1.084	140	944	674,29%
		GT	2.130.420	266.274	1.864.146	700,09%



Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu /
Table of Bengkulu Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
2	General Cargo	Ton	13.823	172	13.651	7.936,63%
	Bag Cargo	Ton	117.277	3.659	113.618	3.105,17%
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	457.368	35.836	421.532	1176,28%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	3.433.899	346.633	3.087.266	890,64%
3	Petikemas / Container	Box	20.512	23.624	(3.112)	(13,17%)
		TEUs	20.796	24.123	(3.327)	(13,79%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	10.013	18.475	8.462	(45,80)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Bengkulu dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 1.084 Unit, naik 674,29 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 140 Unit. Dari sisi GT mengalami peningkatan 700,09 persen dari 2.130.420 GT di tahun 2019 menjadi 266.274 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya kapal yang *upsized* ukuran kapal.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Bengkulu Port Branch in unit was recorded at 1,084 Units, up 674.29 percent from that of 2019 at 140 Units. The total GT increased by 700.09 percent from 2,130,420 GT in 2019 to 266,274 GT in 2020. This was influenced by the high amount of ship upsize.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 13.823 Ton, naik 7.936,63 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 172 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan alat bongkar muat *gantry jib crane* dalam melakukan kegiatan bongkar muat.

In 2020, the productivity of General Cargo in Bengkulu Port Branch was recorded at 13,823 Tons, up 7,936.63 percent from that of 2019 at 172 Tons. This was influenced by the usage of gantry jib crane equipment for loading and unloading activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 117.277 Ton, naik 3.105,17 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.659 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan barang sebelum kegiatan bongkar muat.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Bengkulu Port Branch was recorded at 117,277 Tons, up 3,105.17 percent from that of 2019 at 3,659 Tons. This was influenced by the readiness of cargo prior to loading and unloading activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 457.368 Ton, naik 1.176,28 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 35.836 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh muatan sudah tersedia di tangki penimbunan pada saat kegiatan.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Bengkulu Port Branch was recorded at 457,368 Tons, up 1,176.28 percent from that of 2019 at 35,836 Tons. This was due to the fact that the cargo was already in the storage tank during the activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 3.433.899 Ton, naik 890,64 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 346.633 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan arus kargo curah kering, terutama batu bara.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Bengkulu Port Branch was recorded at 3,433,899 Tons, up 890.64 percent from that of 2019 at 346,633 Tons. This was influenced by the increase in dry bulk cargo flow, particularly coal.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Bengkulu pada tahun 2020 tercatat sebesar 20.512 Box, menurun 13,17 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 23.624 Box. Dari sisi TEUs petikemas mengalami penurunan sebesar 13,79 persen dari 24.123 TEUs di tahun 2019 sebesar 24.123 TEUs menjadi 20.796 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kunjungan kapal yang menurun akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Container Flow in Bengkulu Port Branch was recorded at 20,512 Boxes, down 13.17 percent from that of 2019 at 23,624 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 13.79 percent from 24,123 TEUs in 2019 to 20,796 TEUs in 2020. This was caused by the decline in ship calls due to Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Bengkulu untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 10.013 Orang, turun 45,80 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 18.475 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

In 2020, the productivity of Passenger in Bengkulu Port Branch was recorded at 10,013 Persons, down 45.80 percent from that of 2019 at 18,475 Persons. This was influenced by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Bengkulu

Bengkulu Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Bengkulu (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Bengkulu Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch	69.041	100.821	(31.780)	(31,52%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Bengkulu tahun 2020 tercatat sebesar Rp69,04 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp31,78 miliar atau 31,52 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp100,82 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya *Business to Business* (B2B) senilai Rp4,1 miliar dengan PT PTP. Selain itu, operasi jasa barang telah diserahkan kepada PT PTP, sehingga secara keseluruhan pada tahun 2020 terjadi penurunan bersama *rental fee* dengan PT PTP sebagaimana perhitungan ulang yang dilakukan bersama Direktorat Komersial Kantor Pusat, yang semula dianggarkan sebesar Rp49,05 miliar menjadi Rp36,39 miliar atau turun Rp12,65 miliar.

The revenue of Bengkulu Port Branch in 2020 was posted at Rp69.04 billion, which decreased by Rp31.78 billion or 31.52 percent from that of 2019 at Rp100.82 billion. This was attributable to Business-to-Business (B2B) amounting to Rp4.1 billion with PT PTP. Cargo services operations were also transferred to PT PTP, so that in 2020 there was an overall decrease in rental fee with PT PTP as recalculated by the Commercial Directorate of the Head Office, in which the initial budget decreased from Rp49.05 billion to Rp36.39 billion or down Rp12.65 billion.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Bengkulu

Bengkulu Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Bengkulu (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Bengkulu Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)

Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch	16.489	8.541	7.948	93,05%



Laba Bersih Cabang Pelabuhan Bengkulu tahun 2020 tercatat sebesar Rp16,49 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp7,95 miliar atau 93,05 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp8,54 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya koreksi penyisihan piutang sebesar Rp48 miliar dan koreksi atas beban penyusutan sebesar Rp3,8 miliar dari hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 oleh auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik).

Cabang Pelabuhan Jambi

Cabang Pelabuhan Jambi awalnya terletak di kota Jambi (Boom Batu) dan mulai tahun 1996 dipindahkan ke Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, 10 kilometer dari kota Jambi. Sebagian besar kegiatan di Cabang Pelabuhan Jambi, adalah melayani bongkar muat barang curah, baik curah cair maupun curah kering.

Hinterland Pelabuhan Jambi menghasilkan karet, kayu lapis, dan *moulding*, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang dan Korea. Pelabuhan lain dalam lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi adalah Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak. Pelabuhan Kuala Tungkal terletak di muara sungai Pengabuan, sekitar 10 mil dari ambang luar. Dermaga Kuala Tungkal, terbuat dari beton sepanjang 156 m, saat ini lebih banyak untuk melayani kapal-kapal penumpang dengan tujuan Batam. Sedangkan Pelabuhan Muara Sabak terletak di sekitar 10 mil dari muara sungai Batanghari dan berada pada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura (IMS), serta berdampingan dengan area lintas perdagangan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO). Dengan lokasinya yang strategis, Pelabuhan Muara Sabak, yang memiliki dermaga beton sepanjang 100 meter, akan berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Pelabuhan Muara Sabak dirancang untuk menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri dan perdagangan. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan terminal petikemas, terminal barang umum, terminal curah kering dan terminal curah cair.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Jambi didominasi pelayanan cargo curah kering, curah cair dan petikemas, terutama untuk komoditas batu bara, pupuk, CPO, BBM, dan perdagangan barang kebutuhan pokok antar pulau.

The net profit of Bengkulu Port Branch in 2020 was posted at Rp16.49 billion, which increased by Rp7.95 billion or 93,05 percent from that of 2019 at Rp8.54 billion. This was mainly caused by the correction of allowance for receivables amounting to Rp48 billion as well as correction of depreciation expenses amounting to Rp3.8 billion from the audit results on 2019 Fiscal Year Financial Statements by external auditor (Public Accounting Firm).

Jambi Port Branch

Jambi Port Branch was originally located in the city of Jambi (Boom Batu) and since 1996 it was relocated to Talang Duku, at the downstream of Batang Hari River, 10 kilometers from the city of Jambi. Most of the activities at Jambi Port are stevedoring of bulk cargo, both dry and liquid.

The hinterland of Jambi Port produces rubber, plywood and moulding, which are export commodities to the USA, Europe, Middle East, Japan and Korea. Other ports managed by Jambi Port Branch are Kuala Tungkal Port and Muara Sabak Port. Kuala Tungkal Port is located in the estuary of Pengabuan River, around 10 miles from the outer threshold. Kuala Tungkal Dock, made out of 156-meter long concrete, is currently primarily used to serve passenger ships heading to Batam. Muara Sabak Port is located around 10 miles from the estuary of Batanghari River in the heart of the Growth Triangle of Indonesia, Malaysia and Singapore (IMS), adjacent to the cross-trade area of Singapore, Batam and Johor (SIBAJO). With its strategic location, Muara Sabak Port, which has a 100-meter long concrete pier, is projected to have a vital role in advancing the national economic growth and trade activities. Muara Sabak Port is designed to be a modern port integrated with industrial and trade areas. This port is equipped with a container terminal, general cargo terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal.

Stevedoring activities in Jambi Port is dominated by dry bulk, liquid bulk, and container services, particularly for coal, fertilizer, palm oil, fuel, and inter-island trade of basic goods.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi

Jambi Port Branch Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi /
Table of Jambi Port Branch Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	987	1.245	(258)	(20,72%)
		GT	1.214.242	1.473.916	(259.674)	(17,62%)
2	General Cargo	Ton	22.112	30.684	(8.572)	(27,94%)
	Bag Cargo	Ton	89.581	70.250	19.331	27,52%
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	268.064	228.091	39.973	17,53%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	1.443.774	2.029.755	(585.981)	(28,87%)
3	Petikemas / Container	Box	31.577	35.272	(3.695)	(10,48%)
		TEUs	40.454	46.532	(6.078)	(13,06%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Jambi dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 987 Unit, turun 20,72 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.245 Unit. Dari sisi GT juga turut mengalami penurunan sebesar 17,62 persen dari 1.473.916 GT di tahun 2019 menjadi 1.214.242 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Luar Negeri, khususnya kapal Curah Cair; Kunjungan Kapal Dalam Negeri, khususnya kapal Curah Kering dan kapal Petikemas; serta Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat.

In 2020, the productivity of Ship Calls in Jambi Port Branch in unit was recorded at 987 Units, down 20.72 percent from that of 2019 at 1,245 Units. The total GT also decreased by 17.62 percent from 1,473,916 GT in 2019 to 1,214,242 GT in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused a downward trend in International Ship Calls, particularly Liquid Bulk ships; Domestic Ship Calls, particularly Dry Bulk ships and Container ships; and Traditional Ship Calls.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 22.112 Ton, turun 27,94 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 30.684 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh *waiting truck* akibat kemacetan di sekitar pelabuhan.

In 2020, the productivity of General Cargo in Jambi Port Branch was recorded at 22,112 Tons, down 27.94 percent from that of 2019 at 30,684 Tons. This was influenced by waiting trucks due to traffic jam around the port.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 89.581 Ton, naik 27,52 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 70.250 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan barang sebelum kegiatan bongkar muat.

In 2020, the productivity of Bag Cargo in Jambi Port Branch was recorded at 89,581 Tons, up 27.52 percent from that of 2019 at 70,250 Tons. This was influenced by the readiness of cargo prior to loading and unloading activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 268.064 Ton, naik 17,53 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 228.091 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kecepatan muat ekspor CPO tujuan *port* Klang/Malaysia.

In 2020, the productivity of Liquid Bulk in Jambi Port Branch was recorded at 268,064 Tons, up 17.53 percent from that of 2019 at 228,091 Tons. This was influenced by increasing loading speed of CPO export cargo towards Klang Port, Malaysia.



Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Jambi untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 1.443.774 Ton, turun 28,87 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.029.755 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh jarak yang cukup jauh antara pabrik dengan pelabuhan dan armada truk yang kurang memadai.

In 2020, the productivity of Dry Bulk in Jambi Port Branch was recorded at 1,443,774 Tons, down 28.87 percent from that of 2019 at 2,029,755 Tons. This was influenced by the remoteness of factories from the port and insufficient fleet of trucks.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Jambi pada tahun 2020 tercatat sebesar 31.577 Box, menurun 10,48 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 35.272 Box. Dari sisi TEUs petikemas mengalami penurunan sebesar 13,06 persen dari 46.532 TEUs di tahun 2019 menjadi 40.454 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya trafik kapal petikemas semenjak Covid-19 di tahun 2020.

In 2020, the productivity of Container Flow in Jambi Port Branch was recorded at 31,577 Boxes, down 10.48 percent from that of 2019 at 35,272 Boxes. In terms of TEUs, container flow declined by 13.06 percent from 46,532 TEUs in 2019 to 40,454 TEUs in 2020. This was caused by the decline in container ship traffic since Covid-19 in 2020.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Jambi

Jambi Port Branch Revenue

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Jambi (dalam jutaan Rupiah) / Table of Jambi Port Branch Revenue (in millions of Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch	51.524	61.527	9.734	(15,89%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 tercatat sebesar Rp51,52 miliar mengalami penurunan sebesar Rp9,73 miliar atau 15,89 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp61,26 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

The revenue of Jambi Port Branch in 2020 was posted at Rp51.52 billion, which decreased by Rp9,73 billion or 15,89 percent from that of 2019 at Rp61,26 billion. This was mainly caused by:

- Turunnya pendapatan TBAL atas nilai kesepakatan *rental fee* dengan Anak Perusahaan IPC, yaitu PT PTP, yang semula sebesar Rp13,25 miliar di tahun 2019 menjadi Rp4,58 miliar di tahun 2020;
- Turunnya pendapatan jasa barang dan terminal sebesar 46,07 persen karena pada tahun 2019 masih dikelola oleh Cabang Pelabuhan Jambi dan terealisasi sebesar Rp14,54 miliar, sedangkan pada tahun 2020 mulai dikelola oleh Anak Perusahaan IPC, yaitu PT MTI dan terealisasi sebesar Rp7,84 miliar;
- Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya kegiatan perekonomian, sehingga berdampak pada penurunan kegiatan ekspor impor.
- Decrease in TBAL revenue from the rental fee agreement with IPC subsidiary, PT PTP, which was originally Rp13.25 billion in 2019 to Rp4.58 billion in 2020;
- Decrease in revenue from cargo and terminal services by 46.07 percent. These services were still managed by Jambi Port Branch in 2019 with a realization of Rp14.54 billion, whereas in 2020 it was managed by IPC Subsidiary, PT MTI, with a realization of Rp7.84 billion;
- Covid-19 pandemic which resulted in weak economic activities, thus causing a decline in export-import activities.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Jambi

Jambi Port Branch Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Jambi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Jambi Port Branch Profitability (in millions of Rupiah)

Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch	8.807	6.927	1.880	27,14%

Laba Bersih Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,81 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp1,88 miliar atau 27,14 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6,93 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya koreksi beban penyisihan piutang sebesar Rp10,84 miliar.

The net profit of Jambi Port Branch in 2020 was posted at Rp8.81 billion, which increased by Rp1.88 billion or 27.14 percent from that of 2019 at Rp6.93 billion. This was mainly caused by the correction of allowance for receivables amounting to Rp10.84 billion.

Cabang Pelabuhan Pangkal Balam

Cabang Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dermaga sepanjang 787 meter, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, serta lapangan parkir. Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang ekspor impor, perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta dengan kapal Feri/Ro-Ro dan tujuan Tanjung Pandan dengan *jetfoil*/kapal cepat.

Pangkal Balam Port Branch

Pangkal Balam Port Branch is located on Bangka Island, Bangka Belitung province. Pangkal Balam Port is equipped with various facilities, including 787m long dock, storing facilities, passenger terminal, and a parking lot. Pangkal Balam Port serves the transportation of imported and exported goods, inter-island trade, and the transportation of passengers to Jakarta by ferry/Ro-Ro vessels and to Tanjung Pandan by jetfoil boats/speedboats.

Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Muntok, yang berada di pantai barat sebelah utara Pulau Bangka. Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Sungai Selan di pedalaman sebelah selatan Pulau Bangka berdermaga kayu sepanjang 118 m, serta Pelabuhan Belinyu yang memiliki dermaga beton sepanjang 101 m.

Another port in this area is Muntok Port, located on the west coast next to the northern part of Bangka Island. Other ports are Sungai Selan Port, located deep in the southern part of Bangka Island, with a 118-m long wooden dock, and Belinyu Port, which has a 101-m long concrete dock.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam

Pangkal Balam Port Branch's Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam /
Table of Pangkal Balam Port Branch's Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth		
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b	
1	Kapal / Ship	Unit	2.168	2.513	(345)	(13,73%)	
		GT	2.729.593	3.133.781	(404.188)	(12,90%)	
	<i>General Cargo</i>	Ton	93.440	149.119	(55.679)	(37,34%)	
		<i>Bag Cargo</i>	Ton	351.061	333.726	17.335	5,19%
2	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	483.648	544.280	(60.632)	(11,14%)	
		Curah Kering / Dry Bulk	Ton	54.690	40.383	14.307	35,43%
		Lain-lain / Others	Ton	428.766	537.822	(109.056)	(20,28%)
3	Petikemas / Container	Box	48.202	51.945	(3.743)	(7,21%)	
		TEUs	48.387	52.258	(3.871)	(7,41%)	
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	32.344	133.318	(100.974)	(75,74%)	



Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Pangkal Balam dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 2.168 Unit, turun 13,73 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2.513 Unit. Dari sisi GT mengalami penurunan sebesar 12,90 persen dari 3.133.781 GT di tahun 2019 menjadi 2.729.593 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan kunjungan kapal luar negeri dan dalam negeri akibat dampak pandemi Covid-19.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch Ship Calls in units of 2020 was recorded at 2,168 Units, down by 13.73 percent compared to 2019 of 2,513 Units. In terms of GT, it has decreased by 12.90 percent from 3,133,781 GT in 2019 to 2,729,593 GT in 2020. This was influenced by declining international and domestic ship calls due to Covid-19 pandemic.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 93.440 Ton, turun 37,34 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 149.119 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidaksiapan alat bongkar muat pada saat kegiatan.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for General Cargo in 2020 was recorded at 93,440 Tons, down by 37.34 percent compared to 2019 amounting to 149,119 Tons. This was influenced by the unreadiness of loading and unloading equipment during activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 351.061 Ton, naik 5,19 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 333.726 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan barang sebelum bongkar muat, cuaca yang mendukung kegiatan, dan meningkatnya pengiriman barang-barang seperti bungkil, pakan ternak, dan semen.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for Bag Cargo in 2020 was recorded at 351,061 Tons, up by 5.19 percent compared to 2019 of 333,726 Tons. This was influenced by the readiness of goods prior to loading and unloading, favorable weather to support the activities, and increase in cargo transportation, such as kernel, livestock feed, and cement.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 483.648 Ton, turun 11,14 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 544.280 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi CPO di wilayah Pangkal Pinang, tidak adanya tank timbun, serta jarak yang cukup jauh antara pabrik dengan pelabuhan.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for Liquid Bulk in 2020 was recorded at 483,648 Tons, down by 11.14 percent compared to 2019 of 544,280 Tons. This was influenced by declining CPO production in Pangkal Pinang area, unavailability of storage tank, and the remoteness of factories from the port.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 54.690 Ton, naik 35,43 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 40.383 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pengiriman cangkang kelapa sawit dan pasir kuarsa serta kesiapan alat bongkar muat pada saat kegiatan.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for Dry Bulk in 2020 was recorded at 54,690 Tons, up by 35.43 percent compared to 2019 of 40,383 Tons. This was influenced by increasing transportation of palm kernel shell and quartz sand as well as the readiness of loading and unloading equipment during activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk Lain-lain di tahun 2020 tercatat sebesar 428.766 Ton, turun 20,28 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 537.822 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh jarak yang cukup jauh antara pabrik dengan Pelabuhan dan armada truk yang kurang memadai.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for Others in 2020 was recorded at 428,766 Tons, down by 20.28 percent compared to 2019 of 537,822 Tons. This was influenced by the remoteness of factories from the port and insufficient fleet of trucks.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam pada tahun 2020 tercatat sebesar 48.202 Box, menurun 7,21 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 51.945 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 7,41 persen dari 52.258 TEUs di tahun 2019 menjadi 48.387 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor timah dan trafik kapal petikemas akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch Container flow in 2020 was recorded at 48,202 Boxes, a decrease of 7.21 percent compared to 2019, which amounted to 51,945 Boxes. In terms of TEUs, containers decreased by 7.41 percent from 52,258 TEUs in 2019 to 48,387 TEUs in 2020. This was due to the decline in tin export and container ship traffic due to Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 32.344 Orang, turun 75,74 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 133.318 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

The productivity realization of Pangkal Balam Port Branch for Passengers in 2020 was recorded as 32,344 People, down by 75.74 percent compared to 2019 with 133,318 people. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam

Pangkal Balam Port Branch's Revenues

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam (dalam jutaan Rupiah) / Table of Pangkal Balam Port Branch Revenues (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch	19.234	35.887	(16.653)	(46,41%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam tahun 2020 tercatat sebesar Rp19,23 miliar mengalami penurunan sebesar Rp16,65 miliar atau 46,41 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp35,89 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

Pangkal Balam Port Branch Revenue in 2020 was recorded at Rp19.23 billion, decreased by Rp16.65 billion or 46.41 percent compared to 2019 at Rp35.89 billion. This was mainly due to:

- Penurunan Pendapatan Jasa Kapal turun sebesar 15 persen atau Rp0,60 miliar, dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp3,94 miliar menjadi Rp3,34 miliar di tahun 2020 akibat penurunan kunjungan Kapal *General Cargo* yang membawa bahan bangunan (semen, besi, asbes, keramik, dll.), Kapal Roro, dan Kapal Penumpang yang disebabkan adanya pandemi Covid-19; penurunan produksi Curah Kering batu *split* sehingga tidak terdapat pengiriman ke luar daerah; penurunan Curah Cair (CPO, CPKO, dan sejenisnya) dikarenakan menurunnya permintaan ekspor CPO; serta sulitnya para *Cargo Owner* untuk mencari *market* di Eropa pada Semester 1 2020;
- Penurunan Pendapatan Jasa Barang sebesar 91,98 persen atau Rp5,23 miliar, dari tahun 2019 sebesar Rp5,69 miliar menjadi tahun 2020 sebesar Rp456,21 juta. Hal tersebut disebabkan oleh beralihnya kegiatan penanganan pelayanan barang ke PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Ship service revenue decreased by 15 percent or Rp0.60 billion from Rp3.94 billion in 2019 to Rp3.34 billion in 2020 due to decrease in ships calls from General Cargo carrying building materials (cement, iron, asbestos, ceramics, etc.), Roro Ships, and Passenger Ships due to the Covid-19 pandemic; decrease in the Dry Bulk production of split stone so that there were no shipments outside the region; decrease in Liquid Bulk (CPO, CPKO, and the likes) due to the declining demand for CPO exports; and the difficulty of cargo owners to find markets in Europe in semester 1 of 2020;
- Revenue from Cargo Services decreased by 91.98 percent or Rp5.23 billion from Rp5.69 billion in 2019 to Rp456.21 million in 2020. This was due to the shifting of goods service handling activities to PT Pelabuhan Tanjung Priok;



- Penurunan Pendapatan Jasa Terminal sebesar 83,61 persen atau Rp11,72 miliar, dari tahun 2019 sebesar Rp14,01 miliar menjadi tahun 2020 sebesar Rp2,3 miliar. Hal ini disebabkan beralihnya kegiatan penanganan pelayanan terminal ke PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Terminal Services Revenue decreased by 83.61 percent or Rp11.72 billion from Rp14.01 billion in 2019 to Rp2.3 billion in 2020. This was due to the shifting of terminal service handling activities to PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam

Pangkal Balam Port Branch's Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam (dalam jutaan Rupiah) / Table of Pangkal Balam Port Branch's Profitability (in million Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch	(7.644)	888	(8.532)	(960,81%)

Pada tahun 2020, Cabang Pelabuhan Pangkal Balam mencatatkan rugi bersih sebesar Rp7,64 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp8,53 miliar atau 960,81 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp0,89 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan Usaha Cabang Pangkal Balam sebesar 46,41 persen atau Rp16,65 miliar akibat penurunan Pendapatan Kapal yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 dan beralihnya pelayanan jasa barang dan terminal ke PT Pelabuhan Tanjung Priok.

In 2020, Pangkal Balam Port Branch posted net loss amounting to Rp7,64 billion, which decreased by Rp8.53 billion or 960.81 percent from net profit of 2019 at Rp0.89 billion. This was mainly due to a decrease in Pangkal Balam Branch Operating Revenues by 46.41 percent or Rp16.65 billion as the result of a decrease in Vessel Revenue due to the Covid-19 pandemic throughout 2020 and the shift of cargo and terminal services to PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan berada di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sejak 11 Juni 2011, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki terminal penumpang yang dikenal dengan Pelabuhan Laskar Pelangi untuk mendukung kemajuan pariwisata di Pulau Belitung. Untuk mendukung kemajuan pariwisata tersebut, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan telah direnovasi menjadi terminal modern berkapasitas 200 penumpang yang dilengkapi ruang VIP dan pertokoan.

Tanjung Pandan Port Branch

Tanjung Pandan Port branch is located on Belitung Island, Bangka Belitung Province. Since June 11, 2011, Tanjung Pandan Port Branch has a passenger terminal known as Laskar Pelangi Port to support the advancement of tourism on Belitung Island. To support the action, the Tanjung Pandan Port Branch has been renovated into a modern terminal with a capacity of 200 passengers and is equipped with VIP rooms and shops.

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki *hinterland* yang meliputi 80.000 hektar, perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain seperti kaolin, granit, dan pasir kuarsa.

Tanjung Pandan Port Branch has an 80,000-hectare hinterland, palm oil plantation and other commodities, such as kaolin, granite, and quartz sand.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan

Tanjung Pandan Port Branch's Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan /
Table of Tanjung Pandan Port Branch's Productivity

No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	978	1.012	(34)	(3,36%)
		GT	434.669	474.026	(39.357)	(8,30%)
2	<i>General Cargo</i>	Ton	267.301	305.076	(37.775)	(12,38%)
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	441.005	494.012	(53.007)	(10,73%)
	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	25.461	7.835	17.626	224,96%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	20.513	12.185	8.328	68,35%
3	Petikemas / Container	Box	12.110	12.863	(753)	(5,85%)
		TEUs	12.110	12.863	(753)	(5,85%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	24.690	89.010	(64.320)	(72,26%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 978 Unit, turun 3,36 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.012 Unit. Dari sisi GT mengalami penurunan 8,30 persen dari 474.026 GT di tahun 2019 menjadi 434.669 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum terwujudnya kerja sama lapangan lini 2 untuk TBAL dan pemanduan di Terminal Khusus Tanjung Keluang.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch Ship Calls in units of 2020 was recorded at 978 Units, down by 3.36 percent compared to 2019 of 1,012 Units. In terms of GT, it has decreased by 8.30 percent from 474,026 GT in 2019 to 434,669 GT in 2020. This was influenced by unrealized line 2 field cooperation for TBAL and pilotage in Tanjung Keluang Special Terminal.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 267.301 Ton, turun 12,38 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 305.076 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena ketidaksiapan alat bongkar muat pada saat kegiatan.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch for General Cargo in 2020 was recorded at 267,301 Tons, down by 12.38 percent compared to 2019 amounting to 305,076 Tons. This was influenced by the unreadiness of loading and unloading equipment during activities.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 441.005 Ton, turun 10,73 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 494.012 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi gudang penerima/pemilik barang jauh dari pelabuhan serta terdapat perusahaan bongkar muat swasta yang tidak bisa melayani selama 24 jam.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch for Bag Cargo in 2020 was recorded at 441,005 Tons, down by 10.73 percent compared to 2019 of 494,012 Tons. This was influenced by the remoteness of goods receiver/owner warehouse from the port and the unavailability of private loading and unloading company to provide service for 24 hours a day.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 25.461 Ton, naik 224,96 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.835 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena muatan yang sudah tersedia di tangki penimbunan pada saat kegiatan.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch for Liquid Bulk in 2020 was recorded at 25,461 Tons, up by 224.96 percent compared to 2019 of 7,835 Tons. This was due to the fact that the cargo was already in the storage tank during activities.



Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 20.513 Ton, naik 68,35 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.185 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan alat bongkar muat pada saat kegiatan.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch for Dry Bulk in 2020 was recorded at 20,513 Tons, up by 68.35 compared to 2019 of 12,185 Tons. This was influenced by the readiness of loading and unloading equipment during activities.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan pada tahun 2020 tercatat sebesar 12.110 Box, menurun 5,85 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.863 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 5,85 persen dari 12.863 TEUs di tahun 2019 menjadi 12.110 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya trafik kapal petikemas akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch Container flow in 2020 was recorded at 12,110 Boxes, a decrease of 5.85 percent compared to 2019, which amounted to 12,863 Boxes. In terms of TEUs, containers decreased by 5,85 percent from 12,863 TEUs in 2019 to 12,110 TEUs in 2020. This was due to the decline in container ship traffic due to Covid-19 pandemic in 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 24.690 Orang, turun 72,26 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 89.010 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

The productivity realization of Tanjung Pandan Port Branch for Passengers in 2020 was recorded as 24,690 People, down by 72.26 percent compared to 2019 with 89,010 people. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan

Tanjung Pandan Port Branch's Revenues

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan (dalam jutaan Rupiah) / Table of Tanjung Pandan Port Branch's Revenues (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch	4.252	14.047	(9.795)	(69,73%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan tahun 2020 tercatat sebesar Rp4,25 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp9,80 miliar atau 69,73 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp14,05 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

The revenues of Tanjung Pandan Port Branch in 2020 was recorded at Rp4.25 billion, a decrease of Rp9.80 billion or 69.73 percent from that of 2019 at Rp14.05 billion. This was due to:

- Adanya pengalihan proses bisnis penanganan Bongkar Muat dari Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan ke PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Tanjung Pandan, sehingga Pendapatan Jasa Barang dan Pendapatan Terminal tidak dimasukkan lagi ke dalam Pendapatan Usaha Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan;
- Tidak tercapainya Pendapatan Kapal untuk pemanduan luar biasa di Perairan Manggar/Tanjung Keluang yang sampai tahun 2020 belum terlaksana, karena masih menunggu penetapan pemanduan luar biasa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- The transfer of the Loading and Unloading business process from Tanjung Pandan Port Branch to PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Tanjung Pandan, so that the Cargo Revenue and Terminal Revenue were no longer included in the Operating Revenue of Tanjung Pandan Port Branch.
- Unachieved Vessel Revenue for extraordinary pilotage in the waters of Manggar/Tanjung Keluang which until 2020 has not been implemented as it was still waiting for the determination of extraordinary pilotage from the Directorate General of Sea Transportation.

3. Penurunan Pendapatan TBAL karena masih dalam proses pembangunan lahan Lini II yang baru selesai pada bulan Juli 2020, yang saat ini dikerjasamakan dengan Anak Perusahaan IPC, yaitu PT MTI, pada bulan Oktober, dengan menggunakan sistem *sharing revenue*. Akan tetapi, PT MTI belum bisa mengoptimalkan lahan tersebut karena masih belum mendapatkan mitra yang sesuai; dan
4. Penurunan Pendapatan Rupa-Rupa Usaha atas Pendapatan Pas Pelabuhan akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang menyebabkan pemberlakuan kebijakan *lockdown* untuk wilayah Belitung atas larangan mudik dan pembatasan kapal penumpang beroperasi.
3. Declining TBAL Revenue as it was still in the process of developing Line II land which was just completed in July 2020 and currently in collaboration with IPC subsidiary, PT MTI, in October with a revenue sharing system. However, PT MTI has not been able to optimize the land due to the lack of suitable partners; and
4. Declining Miscellaneous Revenues for Port Entry Fee due to Covid-19 pandemic that hit Indonesia in March 2020, which led to a lockdown policy in Belitung area in the form of prohibition on homecoming and restrictions on operating passenger ships.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan

Tanjung Pandan Port Branch's Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Tanjung Pandan Port Branch's Profitability (in million Rupiah)

Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch	(4.860)	67	(4.927)	(7.353,73%)

Pada tahun 2020, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp4,86 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4,93 miliar atau 7.353,73 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp0,07 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

1. Adanya pengalihan proses bisnis dari Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan ke PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Tanjung Pandan pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan;
2. Tidak tercapainya Pendapatan Kapal, Pendapatan TBAL dan Pendapatan Rupa-Rupa Usaha akibat pandemi Covid-19;
3. Beban usaha menjadi tinggi akibat bertambahnya jumlah pegawai organik sebanyak 3 (tiga) orang, yang mana tahun 2019 hanya 5 (lima) orang, sedangkan bulan November 2020 menjadi 8 (delapan) orang.

In 2020, Tanjung Pandan Port Branch posted net loss amounting to Rp4.86 billion, which decreased by Rp4.93 billion or 7,353.73 percent from net profit of 2019 at Rp0.07 billion. This was mainly caused by:

1. The transfer of business processes from Tanjung Pandan Port Branch to PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Tanjung Pandan in 2019, which caused a decline in revenue;
2. Unachieved Vessel Revenue, TBAL Revenue and Miscellaneous Revenue due to Covid-19 pandemic;
3. Increasing operating expenses in 2020 with the addition of 3 (three) organic employees, from only 5 (five) people in 2019 to 8 (eight) people in November 2020.

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan di Teluk Jakarta yang menjadi persinggahan pelayaran antar bangsa semasa Pemerintahan Portugis sejak 1527. Pelabuhan Sunda Kelapa mulai dikenal pada abad ke-12 sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah yang membawa porselen, kopi, kain sutra, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya.

Sunda Kelapa Port Branch

Sunda Kelapa Port Branch is located in Jakarta Bay and served as the transit point for ships between nations during the Portuguese administration since 1527. Sunda Kelapa Port became known in the 12th century as a port of transit by ships from China, Japan, South India and the Middle East that brings porcelain, coffee, silk fabric, and others in exchange for spices and other agricultural crops.



Pelabuhan Sunda Kelapa kini merupakan pelabuhan bongkar muat barang dan petikemas. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal Pinisi atau *Bugis Schooner* dengan bentuknya yang khas. Komoditas yang diangkut selain kayu adalah bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan.

Nowadays, Sunda Kelapa Port is mainly utilized for local cargo stevedoring. Inter-island ships and commercial vessels, such as Pinisi or Bugis Schooner with its distinctive shape, visits this port, carrying commodities. These commodities include wood, essential supplies, haberdashery, and building materials.

Produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa

Sunda Kelapa Port Branch's Productivity

Tabel Produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / of Sunda Kelapa Port Branch's Productivity						
No.	Uraian / Description	Satuan / Unit	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
					Satuan / Unit (a - b)	% (a - b) / b
1	Kapal / Ship	Unit	2.735	3.184	(449)	(14,10%)
		GT	2.413.321	2.788.480	(375.159)	(13,45%)
	<i>General Cargo</i>	Ton	810.259	1.033.475	(223.216)	(21,60%)
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	1.050.942	1.100.560	(49.618)	(4,51%)
2	Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	5.673	2.600	3.073	118,19%
	Curah Kering / Dry Bulk	Ton	413.289	648.478	(235.189)	(36,27%)
	Lain-lain / Others	Ton	81.336	64.593	16.743	25,92%
3	Petikemas / Container	Box	77.947	86.373	(8.426)	(9,76%)
		TEUs	80.027	89.018	(8.991)	(10,10%)
4	Penumpang / Passenger	Orang / Person	271	22.876	(22.605)	(98,82%)

Realisasi produktivitas Kunjungan Kapal Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dalam satuan unit tahun 2020 tercatat sebesar 2.735 Unit, turun 14,10 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3.184 Unit. Dari sisi GT juga turut mengalami penurunan sebesar 13,45 persen dari 2.788.480 GT di tahun 2019 menjadi 2.413.321 GT di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tren penurunan pada Kunjungan Kapal Dalam Negeri, khususnya kapal *General Cargo*, kapal Curah Cair, kapal Curah Kering, kapal Petikemas; serta Kunjungan Kapal Pelayaran Rakyat.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch Ship Calls in units of 2020 was recorded at 2,735 Units, down by 14.10 percent compared to 2019 of 3,184 Units. In terms of GT, it also decreased by 13.45 percent from 2,788,480 GT in 2019 to 2,413,321 GT in 2020. This was influenced by the Covid-19 pandemic, which caused a downward trend in Domestic Ship Calls, particularly General Cargo ships, Liquid Bulk ships, Dry Bulk ships, Container ships; and Traditional Ship Calls.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk *General Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 810.259 Ton, turun 21,60 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.033.475 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena kondisi kedangkalan alur kolam pelabuhan sehingga kapal lebih lama berada di tambatan menunggu air pasang untuk keluar.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for General Cargo in 2020 was recorded at 810,259 Tons, down by 21.60 percent compared to 2019 amounting to 1,033,675 Tons. This was influenced by the shallowness of port lanes which forced ships to wait for high tide at the berthing to sail out.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk *Bag Cargo* di tahun 2020 tercatat sebesar 1.050.942 Ton, turun 4,51 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.100.560 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi gudang

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for Bag Cargo in 2020 was recorded at 1,050,942 Tons, down by 4.51 percent compared to 2019 of 1,100,560 Tons. This was influenced by the remoteness of goods receiver/owner

penerima/pemilik barang jauh dari pelabuhan serta terdapat perusahaan bongkar muat swasta yang tidak bisa melayani selama 24 jam.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar 5.673 Ton, naik 118,19 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.600 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena muatan sudah tersedia di tangki penimbunan pada saat kegiatan.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar 413.289 Ton, turun 36,27 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 648.478 Ton. Hal tersebut dipengaruhi karena jarak yang cukup jauh antara pabrik dengan pelabuhan dan armada truk yang kurang memadai.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk Lain-lain di tahun 2020 tercatat sebesar 81.336 Ton, naik 25,92 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 64.593 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Realisasi produktivitas arus Petikemas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 2020 tercatat sebesar 77.947 Box, menurun 9,76 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 86.373 Box. Dari sisi TEUs, petikemas mengalami penurunan sebesar 10,10 persen dari 89.018 TEUs di tahun 2019 menjadi 80.027 TEUs di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Realisasi produktivitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa untuk Penumpang di tahun 2020 tercatat sebanyak 271 Orang, turun 98,82 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 22.876 Orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlakunya aturan PSBB sejak bulan Maret 2020 sebagai langkah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, sehingga membatasi jumlah orang yang bepergian dengan menggunakan transportasi umum, termasuk kapal.

warehouse from the port and the unavailability of private loading and unloading company to provide service for 24 hours a day.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for Liquid Bulk in 2020 was recorded at 5,673 Tons, up by 118.19 percent compared to 2019 of 2,600 Tons. This was due to the fact that the cargo was already in the storage tank during activities.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for Dry Bulk in 2020 was recorded at 413,289 Tons, down by 36.27 percent compared to 2019 of 648,478 Tons. This was influenced by the remoteness of factories from the port and insufficient fleet of trucks.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for Others in 2020 was recorded at 81,336 Tons, up by 25.92 percent compared to 2019 which was none. This was influenced by the occurrence of Covid-19 pandemic in 2020.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch Container flow in 2020 was recorded at 77,947 Boxes, a decrease of 9.76 percent compared to 2019, which amounted to 86,373 Boxes. In terms of TEUs, containers decreased by 10.10 percent from 89,018 TEUs in 2019 to 80,027 TEUs in 2020. This was due to the occurrence of Covid-19 pandemic in 2020.

The productivity realization of Sunda Kelapa Port Branch for Passengers in 2020 was recorded as 271 People, down by 98.82 percent compared to 2019 with 22,876 people. This was caused by the implementation of Large-Scale Social Restriction (PSBB) regulation since March 2020 as a measure to reduce Covid-19 spread, thus limiting the number of people traveling using public transportation, including ships.

Pendapatan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa

Sunda Kelapa Port Branch's Revenues

Tabel Pendapatan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Sunda Kelapa Port Branch's Revenues (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch	51.365	56.554	(5.189)	(9,18%)

Catatan: Nilai Pendapatan Usaha pada tabel di atas tidak termasuk pendapatan dari Anak Perusahaan IPC / Note: Figures of Operating Revenue in the table above exclude revenue from IPC Subsidiaries.



Pendapatan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa tahun 2020 tercatat sebesar Rp51,37 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,18 persen atau Rp5,19 miliar atau dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp56,55 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan secara berturut-turut pada bulan Maret hingga Agustus tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi jumlah *throughput* barang dan trafik kapal yang berkunjung atau melalui Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga mempengaruhi jumlah permintaan dan pengiriman barang dari dan menuju ke Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. Terjadinya banjir rob yang melanda Pelabuhan Sunda Kelapa juga sedikit mempengaruhi kondisi proses pencetakan pranota karena ada beberapa dokumen pendukung dan fasilitas yang terendam, sehingga membutuhkan waktu untuk pemrosesan perhitungan pada pranota. Kondisi pandemi Covid-19 juga mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa, terutama wisatawan mancanegara.

The revenues of Sunda Kelapa Port Branch in 2020 was recorded at Rp51,37 billion, a decrease of 9.18 percent or Rp5.19 billion compared to 2019 amounting to Rp56.55 billion. This was due to a decrease in revenue consecutively from March to August 2020 due to the Covid-19 pandemic, which affected the amount of cargo throughput and vessel traffic visiting or passing through Sunda Kelapa Port Branch, thus affecting the number of demand and delivery of cargo to and from Sunda Kelapa Port Branch. Tidal flood that hit Sunda Kelapa Port also slightly affected the printing process of ship reports as there were several supporting documents and facilities that were submerged, so it took time to process the calculations on the ship reports. The Covid-19 pandemic also affected the number of tourists visiting Sunda Kelapa Port, especially foreign tourists.

Profitabilitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa

Sunda Kelapa Port Branch's Profitability

Tabel Profitabilitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa (dalam jutaan Rupiah) / Table of Sunda Kelapa Port Branch's Profitability (in million Rupiah)				
Profitabilitas / Profitability	2020 (a)	2019 (b)	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal (a-b)	% (a-b)/b
Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch	(750)	3.559	(4.309)	(121,08%)

Pada tahun 2020, Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa mencatatkan rugi bersih sebesar Rp0,75 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4,31 miliar atau 121,07 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3,56 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Pendapatan operasional tidak tercapai;
- Masuknya pencatatan aset cabang yang sudah selesai ke dalam aset register sehingga meningkatnya beban penyusutan;
- Penyesuaian atas beban konsesi;
- Penyesuaian atas beban persediaan;
- Penyesuaian pencatatan *accrue* pendapatan diterima di muka atas sewa.

In 2020, Sunda Kelapa Port Branch posted net loss amounting to Rp0.75 billion, which decreased by Rp4.31 billion or 121.07 percent from that of 2019 at Rp3.56 billion. This was mainly caused by:

- Unachieved operating revenue;
- The recording of the completed branch assets into the asset register which caused an increase in depreciation expenses;
- Adjustment of concession expenses;
- Adjustment of inventory expenses;
- Adjustment of the recording of accrued unearned revenues on rent.

SEGMENT ANAK PERUSAHAAN - KSO

Sampai dengan tahun 2020, IPC memiliki saham secara langsung di 13 (tiga belas) Entitas Anak, 2 (dua) Entitas Asosiasi dan 1 (satu) Kerja sama Operasi (KSO). Penjelasan lebih lengkap mengenai Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan KSO disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut ini merupakan kinerja Entitas Anak IPC pada tahun 2020, kecuali kinerja Anak Perusahaan Afiliasi PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT), PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP), dan PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) tidak dikonsolidasi karena menggunakan *equity method* dan dicatat di Kantor Pusat sebagai Bagian laba (rugi) entitas asosiasi.

KINERJA ENTITAS ANAK PERUSAHAAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	1.312.855	1.699.071	(386.216)	(22,73%)
Beban Usaha / Operating Expenses	1.470.615	1.540.351	(69.736)	(4,53%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(138.426)	147.270	(285.696)	(193,99%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.312,86 miliar, turun Rp386,22 miliar atau 22,73 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.695,12 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan terminal yang cukup signifikan akibat menurunnya aktivitas impor yang terjadi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Banten karena dampak pandemi Covid-19, serta beralihnya beberapa pengguna jasa ke Terminal Marunda.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.470,62 miliar, turun Rp69,74 miliar atau 4,53 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.532,48 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Penurunan biaya pegawai yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai organik karena adanya mutasi internal IPC serta penyesuaian jasa produksi/bonus berdasarkan capaian kinerja keuangan.
- Penurunan beban pemeliharaan karena adanya diskon dari PT JPPI terkait pemeliharaan alat dan fasilitas pelabuhan di setiap cabang PT PTP.

SUBSIDIARY - JOINT OPERATION SEGMENT

Up to 2020, IPC directly owns shares in 13 (thirteen) Subsidiaries, 2 (two) Associates and 1 (one) Joint Operation. A more complete description on Subsidiaries, Associates, and Joint Operations is presented in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

The following is the performance of IPC's Subsidiaries in 2020, except the performance of Subsidiaries of Affiliates PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT), PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP), and PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) which was not consolidated because they used the equity method and were recorded at the Head Office as part of the profit (loss) of the associates.

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP)

Net Operating Revenues

Net Operating Revenues in 2020 was recorded at Rp1,312.86 billion, down Rp386.22 billion or 22.73 percent compared to that of 2019 at Rp1,695.12 billion. This was due to a significant decrease in terminal revenue as a result of reduced import activities in the Tanjung Priok and Banten Port Branches due to the impact of the Covid-19 pandemic, as well as the shift of several service users to Marunda Terminal.

Operating Expenses

Operating Expenses in 2020 was recorded at Rp1,470.62 billion, decreased by Rp69.74 billion or 4.53 percent compared to that of 2019 at Rp1,532.48 billion. This was due to:

- A decrease in employee expenses caused by a reduction in the number of organic employees due to the IPC internal transfer and adjustments to production services/bonuses based on financial performance achievements.
- A Decrease in maintenance expenses due to discounts from PT JPPI regarding the maintenance of port equipment and facilities at each PT PTP branch.



- Penurunan beban asuransi karena pada tahun 2019 PT PTP menanggung beban asuransi atas fasilitas pelabuhan yang disewakan oleh Cabang.
- Penurunan beban KSMU seiring dengan penurunan pendapatan terminal pada PT PTP Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.
- Penurunan beban umum akibat dampak penerapan sistem kerja *New Normal* sehingga dapat mengurangi beban biaya.
- A decrease in insurance expenses because in 2019 PT PTP carried the insurance expense on port facilities leased by the Branch.
- A decrease in KSMU expenses in line with a decrease in terminal revenues at PT PTP Tanjung Priok Port Branch.
- A decrease in general expenses due to an impact of implementing the New Normal work system, reducing expenses.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT PTP mencatatkan rugi komprehensif bersih sebesar Rp138,43 miliar, turun Rp285,70 miliar atau 193,99 persen dibandingkan dengan perolehan laba komprehensif bersih di tahun 2019 sebesar Rp152,32 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 serta penerapan PSAK baru, yaitu PSAK 71, 72 dan 73 di tahun ini.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2020, PT PTP recorded a net comprehensive loss of Rp138.43 billion, down Rp285.70 billion or 193.99 percent compared to the net comprehensive profit of Rp152.32 billion in 2019. This was due to the impact of the Covid-19 Pandemic and the implementation of new PSAKs, including PSAK 71, 72 and 73 this year.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (PT JAI TBK)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (PT JAI TBK)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	696.555	681.677	14.878	2,18%
Beban Usaha / Operating Expenses	568.257	574.117	(5.860)	(1,02%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	80.252	90.047	(9.795)	(10,88%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp696,56 miliar, naik Rp14,48 miliar atau 2,18 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp681,68 miliar. Hal tersebut sebagian besar berasal dari kenaikan pendapatan dari pelayanan di Terminal Khusus.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp696.56 billion, up Rp14.48 billion or 2.18 percent compared to that of 2019 at Rp681.68 percent. This was mainly due to an increase in revenues from services in Special Terminal.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp568,26 miliar, turun Rp5,86 miliar atau 1,02 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp574,12 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp568.26 billion, down Rp5.86 billion or 1.02 percent compared to that of 2019 at Rp574.12 billion. This was due to:

- Beban pegawai menurun sejalan dengan penurunan jumlah pekerja serta penurunan biaya pendidikan dan latihan yang karena pandemi banyak menggunakan sistem *online* dengan biaya yang lebih murah.
- Beban bahan menurun signifikan karena penerapan formula harga yang lebih baik dari *supplier* dan penurunan produksi tunda di pelabuhan umum.
- Beban asuransi menurun terkait dengan mundurnya jadwal penyelesaian pembangunan empat kapal tunda menjadi tahun 2021.
- A Decrease in employee expenses in line with the reduced number of employees and a decrease in education and training costs, which due to the pandemic has been using online system with lower costs.
- A significant decrease in material expenses due to the application of better price formulas from suppliers and decreased production of tugs at public ports.
- A decrease in insurance expenses due to postponement of the completion schedule for the construction of the four tug vessels to 2021.

- Beban KSMU tetap turun karena perubahan jangka sewa beberapa kapal menjadi jangka panjang sehingga bebannya sesuai PSAK 73 terdistribusi kepada beban penyusutan aset hak guna dan bunga sewa usaha.
- Beban Administrasi Kantor menurun terkait dengan penyesuaian pola kerja dan kebiasaan baru sebagai dampak Pandemi Covid-19 di antaranya adalah penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH), berkurangnya perjalanan dinas dan rapat di luar kantor. Selain itu, terdapat reklasifikasi beberapa beban ke beban umum, di antaranya beban administrasi pelabuhan dan beban administrasi kantor lainnya.
- A decrease in KSMU expenses due to change in the lease term of several vessels to be long term so that the expenses in accordance with PSAK 73 are distributed to assets depreciation expense for right-of-use assets and lease interest.
- A decrease in Office Administration expenses due to adjustments to work system and new habits as a result of the Covid-19 pandemic, including the implementation of Work From Home (WFH) policy, reduced official trips and meetings outside the office. In addition, there was a reclassification of several expenses to general expenses, including port administration expenses and other office administrative expenses.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp80,25 miliar, turun Rp9,80 miliar atau 10,88 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp90,05 miliar. Seiring dengan Pendapatan di luar usaha yang menurun karena berkurangnya pendapatan lain-lain seperti tahun 2019 yang berasal klaim asuransi dan denda keterlambatan penyelesaian pembangunan kapal tunda serta biaya di luar usaha meningkat terutama karena penyelesaian beban pajak masa lalu secara bertahap dan timbulnya beban bunga sewa usaha atas aset hak guna.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2020, Comprehensive Profit (Loss) for the Year was recorded at Rp80.25 billion, down Rp9.80 billion or 10.88 percent compared to that of 2019 at Rp90.05 billion. Along with the decrease in non-operating revenues due to a decrease in other revenues, such as in 2019 which came from insurance claims and fines for late completion of construction of tug vessels as well as increased non-operating expenses, mainly due to the gradual settlement of past tax expenses and the incurring of lease interest expenses on right-of-use assets.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	356.532	523.219	(166.687)	(31,86%)
Beban Usaha / Operating Expenses	368.788	386.613	(17.825)	(4,61%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(23.983)	135.302	(159.285)	(117,73%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp356,53 miliar, turun Rp166,69 miliar atau 31,86 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp523,22 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Penurunan pendapatan pelayanan jasa barang yaitu kegiatan ekspor-impor kendaraan dibandingkan realisasi sampai dengan Desember 2019 turun sebesar minus 34,17 persen, ekspor impor alat berat turun sebesar minus 33,02 persen dibandingkan realisasi sampai dengan Desember 2019, dan salah satu negara tujuan besar ekspor seperti Filipina dan Vietnam melakukan *lock down* di masa Pandemi Covid-19;
- A decrease in cargo services revenue, namely vehicle export-import activities compared to the realization up to December 2019, fell by minus 34.17 percent, exports and imports of heavy equipment decreased by minus 33.02 percent compared to realization until December 2019, and one of the major destination countries exports such as Philippines and Vietnam locked down during the Covid-19 Pandemic;

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp356.53 billion, down Rp166.69 billion or 31.86 percent compared to that of 2019 at Rp523.22 billion. This was due to:



- Penurunan kinerja pelayanan jasa terminal seperti kegiatan *stevedoring* dan *cargodoring* sejalan dengan penurunan kinerja jasa barang;
 - Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air & Listrik dibandingkan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 49,31 persen dikarenakan dampak Pandemi Covid-19;
 - Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha dibandingkan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 63,41 persen dikarenakan dampak Pandemi Covid-19. Salah satu komponen Fasilitas Rupa-Rupa Usaha adalah kebersihan CBU, alat berat dan *truck* sedangkan pada pelayanan jasa barang CBU dan Alat Berat mengalami penurunan sehingga berpengaruh kepada pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha.
- A decrease in terminal services performance, such as *stevedoring* and *cargodoring* activities, in line with the decline in cargo services performance;
 - Revenues from Utilization of Land, Building, Water & Electricity compared to the realization in 2019 decreased by minus 49.31 percent due to the impact of the Covid-19 Pandemic;
 - Compared to realization in 2019, Miscellaneous Facilities Revenues decreased by minus 63.41 percent due to the impact of the Covid-19 Pandemic. One of the components of the Miscellaneous Facilities is the cleanliness of the CBU, heavy equipment and trucks, while the CBU and heavy equipment services have decreased so that it has an effect on the Miscellaneous Facility revenue.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp368,79 miliar, turun Rp17,83 miliar atau 4,61 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp386,79 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban Pegawai mengalami penurunan sebesar minus 27 persen dikarenakan pada tahun 2019 jumlah pegawai PT IKT Tbk sebanyak 79 orang dan pada tahun akhir tahun 2020 total pegawai sebanyak 66 orang, terdapat pengurangan pegawai akibat mutasi;
- Beban Bahan mengalami penurunan sebesar minus 9,87 persen dikarenakan pada tahun 2019 bahan makanan untuk pegawai kantor dianggarkan dan terealisasi, sedangkan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 tidak disediakan makan siang;
- Beban Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar minus 22,81 persen dikarenakan pada tahun 2020 banyak kontrak-kontrak pemeliharaan yang sudah habis dan belum diperpanjang;
- Beban Asuransi mengalami penurunan sejalan dengan berkurangnya jumlah pegawai;
- Beban Administrasi Kantor mengalami penurunan sejalan dengan diterapkannya *Work From Home* di masa Pandemi Covid-19.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT IKT Tbk mencatatkan rugi komprehensif sebesar Rp23,98 miliar, turun Rp159,29 miliar atau 117,73 persen dibandingkan dengan perolehan laba komprehensif bersih di tahun 2019 sebesar Rp135,30 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan *throughput cargo* alat berat/truk/bis dan *spare part (general cargo)* karena dampak dari pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan pendapatan

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp368.79 billion, down Rp17.83 billion or 4.61 percent compared to that of 2019 at Rp386.79 billion. This was due to:

- Employee expenses decreased by minus 27 percent because the number of employees at PT IKT Tbk was 79 people in 2019 and at the end of 2020 the total number of employees was 66 people, there was a reduction in employees due to transfer;
- Material expenses decreased by minus 9.87 percent because in 2019 foodstuff for office employees were budgeted and realized, while in 2020 due to the Covid-19 Pandemic, lunch was not provided;
- Maintenance expense decreased by minus 22.81 percent because many maintenance contracts have expired and have not been extended;
- Insurance expenses decreased in line with the reduction in the number of employees;
- Office Administration Expenses decreased in line with the implementation of *Work From Home* during the Covid-19 Pandemic.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2020, PT IKT Tbk recorded a comprehensive loss of Rp23.98 billion, down Rp159.29 billion or 117.73 percent compared to the net comprehensive profit in 2019 at Rp135.30 billion. This was mainly due to a decrease in throughput cargo for heavy equipment/trucks/buses and spare part (general cargo) as the impact of the Covid-19 pandemic, decreasing revenues.

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	799.168	772.360	26.808	3,47%
Beban Usaha / Operating Expenses	268.005	464.999	(196.994)	(42,36%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	232.043	241.106	(9.063)	(3,76%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp799,17 miliar, naik Rp26,81 miliar atau 3,47 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp772,36 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan amortisasi pendapatan atas penerimaan *Advance Site Rent* (ASR) CY 57 meter sebesar USD23.500.000 pada bulan Desember 2020.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp268,01 miliar, turun Rp196,99 miliar atau 42,36 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp465,58 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban Pegawai mengalami penurunan 24,63 persen dikarenakan pada tahun 2019 terdapat penyesuaian angka pengakuan beban bonus 2019 sesuai PKB atas arahan dari Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) mengalami penurunan minus 96,72 persen dibandingkan realisasi tahun 2019, hal ini disebabkan adanya reklasifikasi akun pencatatan yang semula pada beban kompensasi tanah dan bangunan menjadi aset sewaan bangunan sebagai dampak dari penerapan PSAK 73 terkait *site lease container* terminal 1 (CT1) dari PT PPI ke IPC;
- Beban Asuransi mengalami penurunan minus 7,79 persen dikarenakan adanya realisasi beban asuransi *Directors & Officers Liability* yang dapat dinegosiasi lebih rendah dibandingkan RKAP 2020.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp232,04 miliar, turun Rp9,06 miliar atau 3,76 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp242,05 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Adanya dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang sewa di mana harus mencatatkan transaksi sewa jangka panjang sebagai aset sewaan dengan jangka waktu penyusutan sepanjang masa sewa;
- Peningkatan beban perjalanan dinas dengan adanya *Project Management* Kijing dan Kalibaru;

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp799.17 billion, up Rp26.81 billion or 3.47 percent compared to that of 2019 at Rp772.36 billion. This was due to additional amortization of revenue on *Advance Site Rent* (ASR) CY 57 meters amounting to USD23,500,000 in December 2020.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp268.01 billion, down Rp196.99 billion or 42.36 percent compared to that of 2019 at Rp465.58 billion. This was due to:

- Employee expenses decreased by 24.63 percent due to adjustments to the amount of recognition bonus expenses in 2019 according to the PKB at the direction of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Directors;
- Partnership (KSMU) expenses decreased by minus 96.72 percent compared to the realization in 2019, this was due to the reclassification of recording accounts which were originally from compensation expenses for land and buildings into building leased assets as a result of the application of PSAK 73 related to *site lease containers* terminal 1 (CT1) from PT PPI to IPC;
- Insurance expenses decreased by minus 7.79 percent due to the realization of *Directors & Officers Liability* insurance expenses negotiable lower than the 2020 RKAP.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2020, Comprehensive Profit for the Year was recorded at Rp232.04 billion, down Rp9.06 billion or 3.76 percent compared to that of 2019 at Rp242.05 billion. This was due to:

- An impact of the application of the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 73 concerning leases, obligation to record long-term lease transactions as a leased asset with a depreciation period over the lease term;
- An increase in official travel expenses with the existence of the Kijing and Kalibaru Project Management;



- Peningkatan beban konsultan terkait adanya proses survei kelayakan pengembangan proyek baru;
- Adanya beban penyisihan piutang pada PT API sebagai dampak dari penerapan PSAK 71 terkait instrumen keuangan yang mengharuskan menghitung nilai penurunan dari Piutang atau pendapatan yang masih akan diterima (PYMAD);
- Peningkatan biaya perawatan kesehatan pekerja sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.
- An increase in consultant expenses related to the surveys for new project development;
- An allowance for receivables at PT API as a result of the application of PSAK 71 related to financial instruments which requires calculating the impairment value of Receivables or Accrued Revenues;
- An increase in health care costs for employees as a result of the Covid-19 pandemic.

PT ELEKTRONIK DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII) PT ELEKTRONIK DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	102.411	201.969	(99.558)	(49,29%)
Beban Usaha / Operating Expenses	184.833	181.680	3.153	1,74%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(83.144)	15.114	(98.258)	(650,11%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp102,41 miliar, turun Rp99,56 miliar atau 49,29 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp202,27 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para pelaku usaha melakukan penghematan pengeluaran termasuk belanja modal dan adanya sanksi daftar hitam yang diterbitkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atas PT EDII yang menyebabkan PT EDII tidak dapat mengikuti lelang di Kementerian/Lembaga secara langsung.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp184,83 miliar, naik Rp3,15 miliar atau 1,74 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp179,08 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh beban operasi naik dari realisasi tahun 2019 karena beban pengembalian kepada negara atas proyek BPS, meningkatnya proyek-proyek yang bersifat pengadaan barang/infrastruktur yang keuntungan tipis dan pembiayaan di muka atas proyek-proyek yang penagihannya akan dilakukan setelah proyek selesai.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp102.41 billion, down Rp99.56 billion or 49.29 percent compared to that of 2019 at Rp202.27 billion. This was due to the impact of the Covid-19 Pandemic which caused businesses to save on expenditures including capital expenditures and the black list sanctions issued by the Electronic Procurement Services (LPSE) on PT EDII, which prevented PT EDII from directly participating in tenders at Ministries/Institutions.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp184.83 billion, up Rp3.15 billion or 1.74 percent compared to that of 2019 at Rp179.08 billion. This was due to the increase in operating expenses from the realization in 2019 due to the expense of returns to the state for BPS projects, the increase in goods/infrastructure procurement projects with thin profits and upfront financing of projects that the collection will be made after the project is completed.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT EDII mencatatkan rugi komprehensif bersih sebesar Rp98,26 miliar, turun Rp98,26 miliar atau 650,11 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh Laba Komprehensif Bersih sebesar Rp15,44 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya proyek-proyek yang bersifat pengadaan barang/infrastruktur yang memiliki keuntungan tipis, serta adanya selisih pendapatan dan beban di luar usaha sebesar Rp4,26 miliar karena penurunan jumlah pendapatan bunga deposito seiring dengan penurunan jumlah deposito yang ditempatkan dan adanya penerbitan PN ke PT PII di akhir tahun 2019 dan pemanfaatan fasilitas *Demand Loan* dari OCBC NISP untuk pembiayaan pekerjaan proyek tahun 2020.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, PT EDII recorded Comprehensive Loss of Rp98.26 billion, down Rp98.26 billion or 650.11 percent compared to the Net Comprehensive Profit in 2019 amounted to Rp15.44 billion. This was due to the increase in goods/infrastructure procurement projects with thin profits, as well as a difference in income and expenses other than operations of Rp4.26 billion due to a decrease in the amount of deposit interest income in line with a decrease in the amount of deposits placed and the issuance of PN to PT PII at the end of 2019 and utilization of the Demand Loan facility from OCBC NISP to finance projects in 2020.

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	545.801	492.878	52.923	10,74%
Beban Usaha / Operating Expenses	536.081	468.800	67.281	14,35%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(10.113)	19.781	(29.894)	(151,12%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp545,80 miliar, naik Rp52,92 miliar atau 10,74 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp492,88 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan *Freight Forwarding* dalam penanganan kegiatan proyek strategis infrastruktur nasional.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp545.80 billion, up Rp52.92 billion or 10.74 percent compared to that of 2019 at Rp492.88 billion. This was due to an increase in Freight Forwarding activities in handling strategic national infrastructure project activities.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp536,08 miliar, naik Rp67,28 miliar atau 14,35 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp468,34 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh sejalan dengan kenaikan biaya KSMU dalam penanganan *Freight Forwarding* untuk kegiatan proyek strategis infrastruktur nasional.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp536.08 billion, up Rp67.28 billion or 14.35 percent compared to that of 2019 at Rp468.34 billion. This was in line with an increase in KSMU costs in handling Freight Forwarding for strategic national infrastructure project activities.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT MTI mencatatkan Rugi Komprehensif Bersih tercatat sebesar Rp10,11 miliar, turun Rp29,89 miliar atau 19,78 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh Laba Komprehensif Bersih sebesar Rp19,78 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset hasil dari *appraisal* aktiva tetap.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, PT MTI posted Comprehensive Loss at Rp10.11 billion, down Rp29.89 billion or 19.78 percent compared to the Net Comprehensive Profit in 2019 amounted to Rp19.78 billion. This was due to a decrease in the value of assets resulting from appraisal of fixed assets.



PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	155.702	156.205	(503)	(0,32%)
Beban Usaha / Operating Expenses	158.728	166.967	(8.239)	(4,93%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(15.053)	(10.562)	(4.491)	(42,52%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp156,21 miliar, turun Rp0,50 miliar atau 0,32 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp156,21 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Pendapatan Pengerukan dan Reklamasi meningkat menjadi sebesar Rp107,72 miliar di tahun 2020 atau 104,12 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp103,45 miliar.
- Pendapatan Penyewaan Alat Produksi sampai dengan tahun 2020 terealisasi Rp28,74 miliar atau 98,33 persen dari target sebesar Rp29,23 miliar.
- Pendapatan Jasa Galangan terealisasi Rp19,39 miliar di tahun 2020 atau 93,30 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp20,79 miliar.
- Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha terealisasi Rp2,42 miliar di tahun 2020 atau 88,55 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp2,73 miliar.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp158,73 miliar, turun Rp8,24 miliar atau 4,93 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp167,00 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban pemeliharaan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp4,15 miliar atau 76,48 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp5,43 miliar.
- Beban asuransi terealisasi Rp2,12 miliar atau 62,81 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp3,37 miliar.
- Beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) terealisasi Rp56,05 miliar atau mengalami penurunan 15,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp65,97 miliar.
- Beban administrasi kantor turun di tahun 2020 menjadi Rp1,48 miliar atau 61,13 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2,42 miliar.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp156.21 billion, down Rp0.50 billion or 0.32 percent compared to that of 2019 at Rp156.21 billion. This was due to:

- Dredging and Reclamation Revenues increased to Rp107.72 billion in 2020 or 104.12 percent of the 2019 realization of Rp103.45 billion.
- Production equipment rental revenue as of 2020 was realized at Rp28.74 billion or 98.33 percent of the target of Rp29.23 billion.
- Shipyard Service Revenue was realized at Rp19.39 billion in 2020 or 93.30 percent compared to the same period in 2019 of Rp20.79 billion.
- Revenue from Miscellaneous Facilities was realized at Rp2.42 billion in 2020 or 88.55 percent compared to the same period in 2019 of Rp2.73 billion.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp158.73 billion, down Rp8.24 billion or 4.93 percent compared to that of 2019 at Rp167.00 billion. This was due to:

- Maintenance expenses decreased in 2020 to Rp4.15 billion or 76.48 percent of the 2019 realization of Rp5.43 billion.
- Insurance expense was realized at Rp2.12 billion or 62.81 percent of the realization in 2019 of Rp3.37 billion.
- Partnership (KSMU) expense was realized at Rp56.05 billion or decreased by 15.03 percent compared to the same period in 2019 of Rp65.97 billion.
- Office administration expenses decreased in 2020 to Rp1.48 billion or 61.13 percent of the 2019 realization of Rp2.42 billion.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT Rukindo mencatatkan Rugi Komprehensif Bersih sebesar Rp15,05 miliar, turun Rp4,49 miliar atau 42,52 persen dibandingkan Rugi Komprehensif Bersih tahun 2019 sebesar Rp10,56 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pencatatan Beban Pajak sebesar Rp4,67 miliar.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, PT Rukindo posted Net Comprehensive Loss of Rp15.05 billion, down Rp4.49 billion or 42.52 percent compared to the Net Comprehensive Loss in 2019 at Rp10.56 billion. This was due to the recording of Tax Expenses amounting to Rp4.67 billion.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	192.985	176.606	16.379	9,27%
Beban Usaha / Operating Expenses	175.438	158.701	16.737	10,55%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	13.236	14.926	(1.690)	(11,32%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp192,99 miliar, naik Rp16,38 miliar atau 9,27 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp176,61 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari segmen penjualan energi listrik sebesar 2,25 persen dan juga kenaikan pendapatan dari segmen pemeliharaan/kontraktor sebesar 34,04 persen.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp192.99 billion, up Rp16.38 billion or 9.27 percent compared to that of 2019 at Rp176.61 billion. This was due to an increase in revenue from the electrical energy sales segment by 2.25 percent and an increase in revenue from the maintenance/contractor segment by 34.04 percent.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp175,44 miliar, naik Rp16,77 miliar atau 10,55 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp158,70 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban pegawai terealisasi sebesar Rp21,09 miliar atau meningkat 18 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,87 miliar;
- Beban bahan tahun 2020 naik 7,47 persen menjadi Rp126,96 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp118,13 miliar. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan biaya bahan proyek sejalan dengan pendapatan kontraktor/pemeliharaan proyek;
- Beban penyusutan terealisasi sebesar Rp9,36 miliar atau 274,55 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp2,50 miliar. Peningkatan beban penyusutan ini sebagai implikasi dari penerapan PSAK 73 atas perjanjian sewa di lingkungan PT EPI, di mana sewa jangka panjang diklasifikasikan sebagai aset PT EPI yang harus disusutkan selama jangka waktu sewa atas aset tersebut;
- Beban umum terealisasi sebesar Rp8,05 miliar atau 104,74 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2019 sebesar Rp3,93 miliar, hal ini dikarenakan adanya

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp175.44 billion, up Rp16.77 billion or 10.55 percent compared to that of 2019 at Rp158.70 billion. This is caused by:

- Employee expenses was realized at Rp21.09 billion, or increased by 18 percent from the same period in the previous year at Rp17.87 billion;
- Material expenses in 2020 increased by 7.47 percent to Rp126.96 billion compared to the realization in 2019 of Rp118.13 billion. This increase was due to an increase in the project materials expense in line with project contractor/maintenance revenue;
- Depreciation expense was realized at Rp9.36 billion or 274.55 percent higher than the previous year at Rp2.50 billion. This increase in depreciation expense is an implication of the application of PSAK 73 on lease agreements within PT EPI, where long-term leases are classified as PT EPI's assets that must be depreciated during the lease term of these assets;
- General expense was realized at Rp8.05 billion or 104.74 percent higher than the 2019 period of Rp3.93 billion. This was due to an increase in employee benefits expense in



kenaikan biaya imbalan kerja masa bakti sejalan dengan perhitungan dari aktuaris dan adanya implikasi penerapan PSAK 71 pada penyisihan piutang.

line with the calculation of the actuary and the implication of applying PSAK 71 on allowance for receivables.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp13,24 miliar, turun Rp1,69 miliar atau 11,32 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp14,26 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang antara lain disebabkan penerapan PSAK 71, 72, dan 73 dan sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, Net Comprehensive Profit was recorded at Rp13.24 billion, down Rp1.69 billion or 11.32 percent compared to that of 2019 at Rp14.26 billion. This was due to an increase in operating expenses which, among others, was due to the application of PSAK 71, 72 and 73 and as a result of the Covid-19 Pandemic.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	222.022	212.909	9.113	4,28%
Beban Usaha / Operating Expenses	206.963	196.934	10.029	5,09%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	3.545	851	2.694	316,57%

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp222,02 miliar, naik Rp9,11 miliar atau 4,28 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp212,91 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Pendapatan perusahaan alat meningkat menjadi sebesar Rp123,79 miliar di tahun 2020 atau 1463,1 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp8,46 miliar karena meningkatnya perolehan *sharing revenue* berdasarkan *throughput* dari PT IPC TPK dan PT PTP.
- Pendapatan konsultasi alat sampai dengan tahun 2020 terealisasi Rp27,12 miliar atau 41,04 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp66,07 miliar. Pendapatan ini berasal dari FCP Bahamas untuk pendapatan atas teknisi *supply* sebanyak 5 orang.
- Pendapatan *sparepart* di tahun 2020 terealisasi Rp40,65 miliar atau 339,80 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp10,59 miliar, yang berasal dari pendapatan *spare part* PT IKT Tbk, PT PTP, PT MTI, PT Ekatama Putra Perkasa, dan cabang-cabang pelabuhan IPC. Perolehan pendapatan *spare part* berasal dari pekerjaan di luar kontrak TSMC, seperti *overhaul* dan pekerjaan besar lainnya yang ditagihkan melalui SPK sebagai pendapatan *spare part*.
- Pendapatan KSMU tahun 2020 terealisasi Rp28,24 miliar di tahun 2020.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp222.02 billion, up Rp9.11 billion or 4.28 percent compared to that of 2019 at Rp212.91 billion. This was due to:

- Revenue from equipment business increased to Rp123.79 billion in 2020 or 1463.1 percent of the 2019 realization of Rp8.46 billion due to an increase in sharing revenue based on throughput from PT IPC TPK and PT PTP.
- Revenue from equipment consulting up to 2020 was realized at Rp27.12 billion or 41.04 percent of the realization in 2019 of Rp66.07 billion. This revenue was derived from FCP Bahamas for the income of 5 supply technicians.
- Revenue from spare part in 2020 was realized at Rp40.65 billion or 339.80 percent compared to the same period in 2019 of Rp10.59 billion, which came from spare parts revenue from PT IKT Tbk, PT PTP, PT MTI, PT Ekatama Putra Perkasa, and IPC Ports branches. The revenue for spare parts was derived from work outside the TSMC contract, such as overhaul and other large jobs that were billed through SPK as spare parts income.
- Revenue from KSMU in 2020 was realized at Rp28.24 billion in 2020.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp206,96 miliar, naik Rp10,03 miliar atau 5,09 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp196,93 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban pegawai terealisasi Rp47,81 miliar atau meningkat 15,55 persen di atas realisasi tahun 2019 sebesar Rp 41,37 miliar.
- Beban bahan terealisasi Rp73,76 miliar atau 65,54 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp112,54 miliar.
- Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 terealisasi menjadi Rp2,18 miliar dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp88 juta.
- Beban asuransi di tahun 2020 terealisasi Rp2,15 miliar atau 115,2 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1,87 miliar.
- Beban KSMU terealisasi di tahun 2020 sebesar Rp73,64 miliar atau 237,08 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp31,06 miliar.
- Beban administrasi kantor terealisasi menjadi Rp1,13 miliar di tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp561 juta

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp3,55 miliar, naik Rp2,69 miliar atau 316,57 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp851 juta. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Usaha Bersih yang signifikan di tahun 2020.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	70.252	107.188	(36.936)	(34,46%)
Beban Usaha / Operating Expenses	65.603	89.226	(23.623)	(26,48%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	2.658	10.809	(8.151)	(75,41%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp70,25 miliar, turun Rp36,94 miliar atau 34,36 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp107,19 miliar, yang merupakan pendapatan fasilitas rupa-rupa atas pendapatan jasa pembelajaran.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp206.96 billion, up Rp10.03 billion or 5.09 percent compared to that of 2019 at Rp196.93 billion. This was due to:

- Employee expense was realized at Rp47.81 billion or increased by 15.55 percent above the realization in 2019 of Rp41.37 billion.
- Material expense was realized at Rp73.76 billion or 65.54 percent of the realization in 2019 at Rp112.54 billion.
- Depreciation and amortization expense in 2020 was realized to be Rp2.18 billion from the 2019 realization of Rp88 million.
- Insurance expenses in 2020 was realized at Rp2.15 billion or 115.2 percent of the realization in 2019 at Rp1.87 billion.
- KSMU expense in 2020 was realized at Rp73.64 billion or 237.08 percent of the 2019 realization of Rp31.06 billion.
- Office administration expense was realized to be Rp1.13 billion in 2020 with realization in 2019 amounting to Rp561 million.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, Net Comprehensive Profit was recorded at Rp3.55 billion, up Rp2.69 billion or 316.57 percent compared to that of 2019 at Rp851 million. This was due to a significant increase in Net Operating Income in 2020.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Business Performance (in million Rupiah)				
Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	70.252	107.188	(36.936)	(34,46%)
Beban Usaha / Operating Expenses	65.603	89.226	(23.623)	(26,48%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	2.658	10.809	(8.151)	(75,41%)

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp70.25 billion, down Rp36.94 billion or 34.36 percent compared to that of 2019 at Rp107.19 billion, which was miscellaneous facility revenue from training activity services.



Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp65,60 miliar, turun Rp23,67 miliar atau 26,48 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp89,23 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Beban pegawai terealisasi Rp11,39 miliar atau 67,32 persen di atas realisasi tahun 2019 sebesar Rp16,92 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengurangan pegawai organik IPC di PT PMLI.
- Beban bahan terealisasi Rp6,24 miliar atau 45,93 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp13,59 miliar karena efisiensi biaya bahan yang dilakukan oleh Manajemen PT PMLI.
- Beban kerja sama mitra usaha terealisasi di tahun 2020 *audited* sebesar Rp40,04 miliar atau 78,16 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp52,00 miliar.
- Beban umum terealisasi menjadi Rp4,82 miliar di tahun 2020 *audited* dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5,34 miliar yang dipengaruhi adanya koreksi KAP terkait asuransi Direksi PT PMLI.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,66 miliar, turun Rp8,15 miliar atau 75,41 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp10,81 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah Pendapatan di tahun 2020.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp65.60 billion, down Rp23.67 billion or 26.48 percent compared to that of 2019 at Rp89.23 billion. This was due to:

- Employee expense was realized at Rp11.39 billion or 67.32 percent above the realization in 2019 of Rp16.92 billion. The decrease was due to the reduction of IPC organic employees at PT PMLI.
- Material expense was realized at Rp6.24 billion or 45.93 percent of the 2019 realization of Rp13.59 billion due to the efficiency of material expense carried out by management of PT PMLI.
- Partnership expense was realized in 2020 audited amounting to Rp40.04 billion or 78.16 percent of the realization in 2019 of Rp52.00 billion.
- General expense was realized to be Rp4.82 billion in 2020 audited with realization in 2019 of Rp5.34 billion which was influenced by KAP corrections related to PT PMLI Directors' insurance.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, Net Comprehensive Profit was recorded at Rp2.66 billion, down Rp8.15 billion or 75.41 percent compared to that of 2019 at Rp10.81 billion. This was due to the increase in Revenue in 2020.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	10.584	212.558	(201.974)	(95,02%)
Beban Usaha / Operating Expenses	101.830	392.477	(290.647)	(74,05%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	38.369	(179.839)	218.208	(121,34%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp10,85 miliar, turun Rp201,97 miliar atau 95,02 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp212,56 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan usaha dengan dihentikannya sementara segala kegiatan usaha perusahaan yang berhubungan dengan investasi pada perusahaan sektor kepelabuhanan, *business consultant* dan kegiatan usaha lainnya.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp10.85 billion, down Rp201.97 billion or 95.02 percent compared to that of 2019 at Rp212.56 billion. This was due to business restrictions with the temporary suspension of all company business activities related to investments in port sector companies, business consultants and other business activities.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp101,83 miliar, turun Rp290,65 miliar atau 74,05 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp155,36 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya efektivitas dan efisiensi biaya operasional sejalan dengan adanya pembatasan usaha perusahaan sesuai dengan arahan pemegang saham untuk memperkecil kerugian.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp38,77 miliar, naik Rp218,21 miliar atau 121,34 persen dibandingkan dengan perolehan Rugi Komprehensif Bersih di tahun 2019 sebesar Rp179,84 miliar. Hal tersebut berasal dari pencatatan kerugian di tahun 2019 sebesar Rp179,84 miliar yang disebabkan oleh kenaikan harga saham PT JAI Tbk.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp101.83 billion, down Rp290.65 billion or 74.05 percent compared to that of 2019 at Rp155.36 billion. This was due to the effectiveness and efficiency of operating costs in line with restrictions on the company's business in accordance with shareholders' directions to minimize loss.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, Net Comprehensive Profit was recorded at Rp38.77 billion, up Rp218.21 billion or 121.34 percent compared to the Net Comprehensive Loss in 2019 at Rp179.84 billion. This was derived from the recording of loss in 2019 amounting to Rp179.84 billion caused by an increase in PT JAI Tbk's. share price.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	166.067	205.546	(39.479)	(19,21%)
Beban Usaha / Operating Expenses	170.857	211.470	(40.613)	(19,21%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	5.731	(26.395)	32.126	121,71%

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp166,07 miliar, turun Rp39,48 miliar atau 19,21 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp205,55 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 sehingga beberapa pekerjaan mengalami penundaan atau pembatalan.

Net Operating Revenues

In 2020, Net Operating Revenues was recorded at Rp166.07 billion, down Rp39.48 billion or 19.21 percent compared to that of 2019 at Rp205.55 billion. This was due to the impact of the Covid-19 Pandemic so that some works were postponed or cancelled.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp170,86 miliar, turun Rp40,61 miliar atau 19,21 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp211,47 miliar. Hal tersebut sejalan dengan tidak tercapainya pendapatan usaha serta dampak penerapan sistem kerja WFH, sehingga dapat mengurangi beban biaya.

Operating Expenses

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp170.86 billion, down Rp40.61 billion or 19.21 percent compared to that of 2019 at Rp211.47 billion. This was in line with the unreachable revenue and the impact of implementing the WFH work system, reducing costs.



Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,73 miliar, naik Rp32,13 miliar atau 121,71 persen dibandingkan dengan perolehan Rugi Komprehensif Bersih di tahun 2019 sebesar Rp26,40 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh selisih pendapatan dan beban di luar usaha sampai dengan tahun 2020 *audited* terealisasi sebesar Rp8,97 miliar atau 161,10 persen di atas realisasi tahun 2019 sebesar minus Rp14,68 miliar hal ini dipengaruhi oleh penghapusan utang PT ILCS kepada PT Multimedia Nusantara terkait pekerjaan PCS.

Comprehensive (Profit) Loss for the Year

In 2020, Net Comprehensive Profit was recorded at Rp5.73 billion, up Rp32.13 billion or 121.71 percent compared to the Net Comprehensive Loss in 2019 at Rp26.40 billion. This was due to the difference in revenue and non-operating expenses until 2020 audited was realized amounting to Rp8.97 billion or 161.10 percent above the realization in 2019 of minus Rp14.68 billion, this was influenced by debt write-off of PT ILCS PT Multimedia Nusantara related to PCS work.

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS (PT IPC TPK)

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS (PT IPC TPK)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	2.419.905	2.453.290	(33.385)	(1,36%)
Beban Usaha / Operating Expenses	2.148.001	2.196.575	(48.574)	(2,21%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(12.542)	307.337	(319.879)	(104,08%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.419,91 miliar, turun Rp33,39 miliar atau 1,36 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.453,29 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan *throughput* di semua Area Terminal Petikemas karena jumlah ekspor serta kegiatan bongkar muat yang tidak sesuai dengan rencana akibat Pandemi Covid-19.

Net Revenue

Net Revenue in 2020 was recorded at Rp2,419.91 billion, decreased by Rp33.39 billion or 1.36 percent compared to 2019 of Rp2,453.29 billion. This was due to a decrease in throughput in all Container Terminal Areas due to the number of exports and loading and unloading activities that were not according to plan due to the Covid-19 Pandemic.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.148,00 miliar, turun Rp48,57 miliar atau 2,21 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.196,58 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan pengendalian *budgeting control* yang baik di tahun 2020. Perusahaan telah dapat mengidentifikasi kegiatan mana saja yang *must have* dan *nice to have*.

Operating Expenses

Operating Expenses in 2020 were recorded at Rp2,148.00 billion, decreased by Rp48.57 billion or 2.21 percent compared to 2019 amounting to Rp2,196.58 billion. This was due to the implementation of good budgeting control in 2020. The Company has been able to identify which activities must have and which are nice to have.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, PT IPC TPK mencatatkan Rugi Komprehensif Bersih tercatat sebesar Rp12,54 miliar, turun Rp319,88 miliar atau 104,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp307,34 miliar. Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya realisasi pendapatan usaha serta adanya penerapan PSAK terbaru yaitu PSAK 71, 72 dan 73.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2020, PT IPC TPK recorded a Net Comprehensive Loss of Rp12.54 billion, a decrease of Rp319.88 billion or 104.08 percent compared to 2019 of Rp307.34 billion. This happened because the realization of revenues was not achieved, as well as the implementation of the latest PSAK, namely PSAK 71, 72 and 73.

KINERJA KSO PERUSAHAAN

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO TPK KOJA)

COMPANY'S KSO PERFORMANCE

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO TPK KOJA)

Tabel Kinerja Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Business Performance (in million Rupiah)

Pendapatan / Revenue	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Bersih / Net Operating Revenues	727.735	816.083	(88.348)	(10,83%)
Beban Usaha / Operating Expenses	518.458	666.771	(148.313)	(22,24%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit (Loss) for the Year	11.621	137.060	(125.439)	(91,52%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan Usaha Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp727,74 miliar, turun Rp88,35 miliar atau 10,83 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp816,08 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target *throughput* akibat dampak Pandemi Covid-19.

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp518,46 miliar, turun Rp148,31 miliar atau 22,24 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp666,77 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya *throughput* yang berpengaruh pada berkurangnya penggunaan bahan, adanya beberapa alat fasilitas pelabuhan yang masih dalam proses lelang, serta efisiensi biaya yang dilakukan oleh KSO TPK Kojja.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,62 miliar, turun Rp125,44 miliar atau 91,52 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp137,06 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya selisih pendapatan dan beban di luar usaha yang cukup signifikan yaitu rugi sebesar Rp198,66 miliar.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Net Revenue

Net Revenue in 2020 was recorded at Rp727.74 billion, decreased by Rp88.35 billion or 10.83 percent compared to 2019 amounting to Rp816.08 billion. This was caused by failure to achieve the throughput target due to the impact of the Covid-19 Pandemic.

Operating Expenses

Operating Expenses in 2020 were recorded at Rp518.46 billion, decreased by Rp148.31 billion or 22.24 percent compared to 2019 amounting to Rp666.77 billion. This was due to the failure to achieve throughput which had an effect on the reduced use of materials, the presence of several port facilities that are still in the auction process, and the cost efficiency carried out by KSO TPK Kojja.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

Net Comprehensive Income for 2020 was recorded at Rp11.62 billion, decreased by Rp125.44 billion or 91.52 percent compared to 2019 amounting to Rp137.06 billion. This was due to a significant difference in income and expenses outside the business, namely a loss of Rp198.66 billion.

FINANCIAL REVIEW

The financial review described below refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 which are presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) and have received an unqualified opinion, in all material aspects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia II and its Subsidiaries as of December 31, 2020, and the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

The Company's financial performance consists of the performance of the Consolidated Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Profit and Loss and Income as well as the Consolidated Statements of Cash Flow which are presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statement of Financial Position per December 31, 2019-2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Aset / Assets	51.684.651	52.040.600	(355.949)	(0,68%)
Aset Lancar / Current Assets	19.163.488	21.061.762	(1.898.275)	(9,01%)
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	32.521.163	30.978.837	1.542.326	4,98%
Liabilitas / Liabilities	34.597.686	33.914.389	683.297	2,01%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	5.040.477	5.353.723	(313.246)	(5,85%)
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	29.557.209	28.560.666	996.543	3,49%
Ekuitas / Equity	17.086.965	18.126.211	(1.039.246)	(5,73%)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan penurunan Aset sebesar Rp355,95 miliar atau 0,68 persen dari tahun 2019 sebesar Rp52.040,60 miliar menjadi Rp51.684,65 miliar. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp34.597,69 miliar, naik Rp683,30 miliar atau 2,01 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp33.914,39 miliar. Perubahan pada nilai Aset dan Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas menurun sebesar Rp1.039,25 miliar atau 5,73 persen menjadi Rp17.086,97 miliar di akhir tahun 2020 bila dibandingkan dengan Rp18.126,21 miliar di tahun 2019.

As of December 31, 2020, the Company recorded a decrease in Assets of Rp355.95 billion or 0.68 percent from 2019 amounting to Rp52,040.60 billion to Rp51,684.65 billion. Liabilities as of December 31, 2020 were recorded at Rp34,597.69 billion, an increase of Rp683.30 billion or 2.01 percent when compared to 2019 amounting to Rp33,914.39 billion. Changes in the value of Assets and Liabilities as of December 31, 2020 caused the value of Equity to decrease by Rp1,039.25 billion or 5.73 percent to Rp17,086.97 billion at the end of 2020 when compared to Rp18,126.21 billion in 2019.

ASET

Pada akhir tahun 2020, jumlah Aset Perseroan tercatat sebesar Rp51.684,65 miliar. Nilai jumlah Aset ini turun Rp355,95 miliar atau 0,68 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp52.040,60 miliar. Penurunan Aset tersebut terutama berasal dari Aset Lancar yang mencatatkan penurunan sebesar Rp1.898,28 miliar atau 9,01 persen. Di sisi lain, jumlah Aset Tidak Lancar sampai dengan akhir tahun 2020 meningkat sebesar Rp1.542,33 miliar atau 4,98 persen dari tahun 2019.

ASSETS

At the end of 2020, the total assets of the Company were recorded at Rp51,684.65 billion. The total value of these assets decreased by Rp355.95 billion or 0.68 per cent compared to 2019 amounting to Rp52,040.60 billion. The decrease in Assets mainly originated from Current Assets, which recorded a decrease of Rp1,898.28 billion or 9.01 percent. On the other hand, the number of Non-Current Assets by the end of 2020 increased by Rp1,542.33 billion or 4.98 percent from 2019.

Penurunan nilai Aset sampai dengan akhir tahun 2020 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap likuiditas Perseroan dikarenakan jumlah penurunan yang tidak material, sehingga kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajibannya masih sangat terjaga di tahun tersebut.

The decrease in Assets value until the end of 2020 did not have a significant impact on the Company's liquidity due to the immaterial decrease in the amount, so that the Company's ability to settle its obligations was maintained in that year.

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Current Assets per December 31, 2019-2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	5.298.274	15.603.533	(10.305.259)	(66,04%)
Investasi Jangka Pendek / Short-Term Investment	11.090.879	2.596.701	8.494.178	327,11%
Piutang Usaha – Neto / Trade receivables – Net	621.235	848.025	(226.791)	(26,74%)
Piutang Lain-lain – Neto / Other receivables – Net	1.191.805	830.069	361.736	43,58%
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka / Advances and prepaid expense	93.350	104.182	(10.832)	(10,40%)
Pendapatan Masih Akan Diterima / Accrued revenues	278.739	305.452	(26.713)	(8,75%)
Persediaan / Inventories	55.314	82.941	(27.626)	(33,31%)
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid taxes	524.069	680.605	(156.536)	(23,00%)
Aset Lancar Lainnya / Other current assets	9.823	10.253	(431)	(4,20%)
Jumlah / Total	19.163.488	21.061.762	(1.898.275)	(9,01%)

Aset Lancar Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp19.163,49 miliar, turun Rp1.898,28 miliar atau 9,01 persen dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp21.061,76 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Penurunan saldo kas setara kas sebesar Rp10.305,26 miliar atau 66,04 persen dari tahun 2019 sebesar Rp15,603,53 miliar menjadi Rp5.298,27 miliar di tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya penempatan deposito yang ditempatkan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan mulai Oktober 2020;
2. Penurunan saldo piutang usaha – neto sebesar Rp226,79 miliar atau 26,74 persen dari saldo piutang usaha – neto tahun 2019 sebesar Rp848,03 miliar menjadi Rp621,24 miliar di tahun 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha (pelayanan terminal, pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, dan fasilitas rupa-rupa usaha), piutang PT RSP yang tidak lagi dikonsolidasi, serta adanya kenaikan perhitungan penyisihan piutang usaha sebagai dampak penerapan PSAK 71 mulai 1 Januari 2020.

Namun demikian, terdapat saldo yang mengalami kenaikan, di antaranya saldo piutang lain-lain – neto yang tumbuh sebesar Rp361,74 miliar atau 43,58 persen dari tahun 2019 sebesar Rp830,07 miliar menjadi Rp1.191,81 miliar, di mana kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan piutang PT JICT atas pembayaran *Quarterly Site Rent* (QSR) serta piutang dari PT API ke PT CTP setelah dikurangi provisi penurunan nilai sebesar Rp386,61 miliar.

The Company's Current Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp19,163.49 billion, decreased by Rp1,898.28 billion or 9.01 percent compared to the value on December 31, 2019 of Rp21,061.76 billion. This was mainly due to:

1. Decrease in cash and cash equivalents by Rp10,305.26 billion or 66.04 percent from 2019 amounting Rp15,603.53 billion to Rp5,298.27 billion in 2020, which was due to the placement of time deposits with a maturity of more than 3 (three) months starting on October 2020;
2. Decrease in trade receivables - net amounting to Rp.226.79 billion or 26.74 percent of the 2019 net trade receivables balance of Rp848.03 billion to Rp621.24 billion in 2020. This was mainly due to a decrease in operating revenues (terminal services, ship services, goods services, and miscellaneous business facilities), PT RSP's receivables that were no longer consolidated, and an increase in the calculation of allowance for trade accounts receivable as a result of the application of PSAK 71 starting from January 1, 2020.

However, there were balances that experienced an increase, including the net balance of other receivables which grew by Rp361.74 billion or 43.58 percent from Rp830.07 billion in 2019 to Rp1,191.81 billion, where the increase occurred because there was an increase in PT JICT's receivables on *Quarterly Site Rent* (QSR) payments and receivables from PT API to PT CTP after deducting provision for impairment of Rp386.61 billion.



Penurunan Aset Lancar di tahun 2020 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, ditunjukkan oleh Rasio Lancar yang masih berada di level stabil di level 380,19 persen.

The decline in Current Assets in 2020 does not have a significant impact on the Company's ability to pay off its short-term liabilities, as indicated by the Current Ratio, which was still at

Aset Tidak Lancar

Other Current Assets

Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Non-Current Assets per December 31, 2019 – 2020 (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment	2.776.394	3.211.024	(434.630)	(13,54%)
Properti Investasi – Neto / Investment Properties – Net	337.942	357.295	(19.354)	(5,42%)
Aset Tetap – Neto / Fixed Assets – Net	14.190.174	13.387.156	803.018	6,00%
Aset Kerja Sama Operasi – Neto / Joint Operation Assets – Net	434.117	461.100	(26.983)	(5,85%)
Aset Hak-Guna – Neto / Use Rights Assets – Net	162.801	-	162.801	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	158.035	73.874	84.162	113,93%
Aset Tak Berwujud – Neto / Intangible Assets - Net	11.863.511	10.818.271	1.045.239	9,66%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak / Estimated Claims for Tax Refund	1.052.310	958.917	93.393	9,74%
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	1.545.880	1.711.200	(165.320)	(9,66%)
Jumlah / Total	32.521.163	30.978.837	1.542.326	4,98%

Aset Tidak Lancar Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp32.521,16 miliar, naik Rp1.542,33 miliar atau 4,98 persen dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp30.978,84 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Kenaikan aset tetap – neto (termasuk aset tetap dalam konstruksi) sebesar Rp803,02 miliar atau 6,00 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp13.387,16 miliar menjadi sebesar Rp14.190,17 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan atas progres investasi Perseroan sampai dengan akhir tahun ini yang terserap sebesar Rp992,20 miliar (tidak termasuk investasi Terminal Kijing dan Kalibaru, penyertaan modal, kapitalisasi bunga, dan non-fisik);
2. Kenaikan aset tak berwujud – neto (termasuk aset tetap dalam konstruksi) sebesar Rp1.045,24 miliar atau 9,66 persen dari saldo tahun 2019 yang sebesar Rp10.818,27 miliar menjadi sebesar Rp11.863,51 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan serapan investasi atas pekerjaan Terminal Kijing dan Kalibaru sebesar Rp52,01 miliar atau 3,37 persen dari tahun 2019 sebesar Rp1.542,70 miliar menjadi sebesar Rp1.594,70 miliar di tahun 2020;
3. Adanya realisasi aset hak guna – neto sebesar Rp162,80 miliar sebagai dampak dari penerapan PSAK 73 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

The Company's Non-Current Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp32,521.16 billion, an increase of Rp1,542.33 billion or 4.98 percent compared to the value on December 31, 2019 of Rp30,978.84 billion. This was mainly due to:

1. The increase in fixed assets - net (including fixed assets in construction) was Rp803.02 billion or 6.00 percent compared to the realization in 2019 of Rp13,387.16 billion to Rp14,190.17 billion in 2020. This was due to the absorption of the Company's investment progress up to the end of this year amounting to Rp992.20 billion (excluding investment in Kijing and Kalibaru Terminals, equity participation, interest capitalization, and non-physical);
2. The increase in intangible assets - net (including fixed assets in construction) amounted to Rp1,045.24 billion or 9.66 percent from the 2019 balance of Rp10,818.27 billion to Rp11,863.51 billion in 2020. This was due to an increase in investment absorption for the work of Kijing and Kalibaru Terminals by Rp52.01 billion or 3.37 percent from 2019 amounting to Rp1,542.70 billion to Rp1,594.70 billion in 2020;
3. Realization of use rights assets - net amounting to Rp162.80 billion as a result of the application of PSAK 73 which came into effect on January 1, 2020.

Peningkatan pada Aset Tidak Lancar di tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya di tahun tersebut.

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2020, jumlah Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp34.597,69 miliar. Nilai jumlah Liabilitas ini meningkat Rp683,30 miliar atau 2,01 persen dibandingkan akhir tahun 2019 yang sebesar Rp33.914,39 miliar. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp996,54 miliar atau 3,49 persen.

Kenaikan Liabilitas Jangka Panjang tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kekuatan likuiditas Perseroan karena telah diimbangi dengan penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp313,25 miliar atau 5,85 persen dan telah sesuai dengan kebijakan struktur modal Perseroan yang menitikberatkan penggunaan Liabilitas Jangka Panjang sebagai sumber modalnya.

The increase in Non-current Assets in 2020 had a positive impact on the Company's ability to pay off its short-term and long-term liabilities in that year.

LIABILITIES

At the end of 2020, the Company's total Liabilities were recorded at Rp34,597.69 billion. The total value of Liabilities increased by Rp683.30 billion or 2.01 percent compared to the end of 2019 amounting to Rp33,914.39 billion. The increase in Liabilities mainly came from an increase in Non-Current Liabilities of Rp996.54 billion or 3.49 percent.

The increase in Non-Current Liabilities did not have a negative impact on the Company's liquidity strength because it was offset by a decrease in Current Liabilities of Rp313.25 billion or 5.85 percent and was in accordance with the Company's capital structure policy which emphasized the use of Non-Current Liabilities as its capital source.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Current Liabilities per December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-term bank loans	4.000	34.194	(30.194)	(88,30%)
Utang Usaha / Trade Payable	1.581.921	1.436.482	145.439	10,12%
Pendapatan Diterima di muka - Jangka Pendek / Short-term unearned revenues	957.176	845.489	111.687	13,21%
Utang Pajak / Taxes Payable	357.031	445.016	(87.985)	(19,77%)
Beban Akrual / Accrued Expenses	1.765.278	2.274.727	(509.449)	(22,40%)
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current maturities of long-term liabilities	71.050	19.900	51.150	257,04%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other current liabilities	304.020	297.915	6.105	2,05%
Jumlah / Total	5.040.477	5.353.723	(313.246)	(5,85%)

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.040,48 miliar, turun Rp313,25 miliar atau 5,85 persen dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp5.353,72 miliar. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Penurunan saldo pinjaman jangka pendek sebesar Rp30,19 miliar atau 88,30 persen dari saldo pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp34,19 miliar menjadi Rp4,00 miliar per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Perseroan masih membukukan pinjaman bank atas PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) sebesar Rp28,19 miliar, sementara

The Company's Current Liabilities as of December 31, 2020 were recorded at Rp5,040.48 billion, decreased by Rp313.25 billion or 5.85 percent compared to the value on December 31, 2019 of Rp5,353.72 billion. This, among others, was caused by:

1. A decrease in the short-term loan balance of Rp30.19 billion or 88.30 percent of the short-term loan balance as of December 31, 2019 amounting to Rp34.19 billion to Rp4.00 billion as of December 31, 2020. This was because in 2019 the Company still booked bank loans for PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) amounting to Rp28.19 billion, while in 2020 PT RSP was no longer consolidated



tahun 2020 PT RSP tidak lagi dikonsolidasikan dengan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Penurunan Pinjaman Bank Jangka Pendek memberikan efek keringanan terhadap beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perseroan dalam 1 (satu) tahun mendatang.

2. Penurunan saldo beban akrual sebesar Rp509,45 miliar atau 22,40 persen dari saldo per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.274,73 miliar menjadi sebesar Rp1.865,28 miliar per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan menurunnya beban usaha, antara lain beban bahan bakar dan bahan habis pakai, beban pemeliharaan, beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU), dan beban administrasi kantor. Penurunan Beban Akrual di tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban yang harus dibayarkan oleh Perseroan di tahun yang akan datang.

Penurunan Liabilitas Jangka Pendek di tahun 2020 memberikan dampak keringanan terhadap jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

into the Company's consolidated financial statements. The reduction in Short-Term Bank Loans provided a relief effect on the burden of obligations that must be paid by the Company in the next 1 (one) year.

2. A decrease in the balance of accrued expenses by Rp509.45 billion or 22.40 percent from the balance as of December 31, 2019 amounting to Rp2,274.73 billion to Rp1,865.28 billion as of December 31, 2020. The decrease occurred in line with the decline in operating expenses, including fuel and consumables expenses, maintenance expenses, Business Partner Cooperation (KSMU) expenses, and office administration expenses. A reduction in Accrual Expenses in 2020 had a positive impact on reducing expenses to be paid by the Company in the coming year.

The decrease in Current Liabilities in 2020 had a mitigating effect on the amount of obligations that must be fulfilled by the Company.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Non-Current Liabilities per December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Utang Obligasi / Bonds Payable	22.333.703	21.984.178	349.525	1,59%
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-term liabilities - net of current maturities	354.835	350.242	4.593	1,31%
Pendapatan Diterima di Muka - Jangka Panjang / Long-term unearned revenue	4.060.901	4.005.631	55.270	1,38%
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee benefit liabilities	2.764.262	1.966.326	797.936	40,58%
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred tax liabilities	43.508	254.289	(210.781)	(82,89%)
Jumlah / Total	29.557.209	28.560.666	996.543	3,49%

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp29.557,21 miliar, naik Rp996,54 miliar atau 3,49 persen dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp28.560,67 miliar. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kenaikan atas saldo utang obligasi – net (setelah dikurangi diskonto obligasi) sebesar Rp349,53 miliar atau 1,59 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp21.984,18 miliar menjadi Rp22.333,70 miliar per 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut merupakan akibat dari peningkatan kurs dolar AS dalam pencatatan, di mana per 31 Desember 2019 menggunakan kurs Rp13.901 per dolar AS, sedangkan per 31 Desember 2020 menggunakan kurs Rp14.105 per dolar AS.

The Company's Non-Current Liabilities as of December 31, 2020 were recorded at Rp29,557.21 billion, an increase of Rp996.54 billion or 3.49 percent compared to the value on December 31, 2019 of Rp28,560.67 billion. This, among others, was caused by:

1. The increase in the balance of bonds payable - net (after deducting discount on bonds) amounted to Rp349.53 billion or 1.59 percent from 2019 amounting to Rp21,984.18 billion to Rp22,333.70 billion as of December 31, 2020. This increase was the result of an increase in the US dollar exchange rate in recording, where as of December 31, 2019, the exchange rate was used at Rp13,901 per US dollar, while as of December 31, 2020, it used an exchange rate of Rp. 14,105 per US dollar.

2. Kenaikan saldo liabilitas imbalan kerja terealisasi sebesar Rp797,94 miliar atau 40,58 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp1.966,33 miliar menjadi Rp2.764,26 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pengakuan kesehatan pensiunan, di mana perhitungan aktuarial menggunakan tabel mortalitas tahun 2019.
3. Kenaikan pendapatan diterima di muka – jangka panjang sebesar Rp55,27 miliar atau 1,38 persen dari per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.005,63 miliar menjadi Rp4.060,90 miliar per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya penerimaan *Advance Site Rent* (ASR) atas NPCT 1 di PT PPI sebesar USD23,5 juta pada bulan Desember 2020.

Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dorongan pada kinerja pendapatan di masa yang akan datang. Selain itu, peningkatan Liabilitas Jangka Panjang telah sesuai dengan kebijakan Manajemen atas struktur modal yang menitikberatkan penggunaan Liabilitas Jangka Panjang sebagai sumber pendanaan utama sehingga kenaikan Liabilitas Jangka Panjang di tahun 2020 memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

2. The increase in realized employee benefits liabilities amounted to Rp797.94 billion or 40.58 percent from 2019 amounting to Rp1,966.33 billion to Rp2,764.26 billion in 2020. This was due to the increase in retirement health recognition, where actuarial calculations used the 2019 mortality table.
3. The increase in income received in advance – Non-Current amounted to Rp55.27 billion or 1.38 percent from as of December 31, 2019 amounting to Rp4,005.63 billion to Rp.4,060.90 billion as of December 31, 2020. This was due to the receipt of Advance Site Rent (ASR) for NPCT 1 at PT PPI amounting to US\$23.5 million in December 2020.

The increase in Non-Current Liabilities was used to support the smooth running of the Company's operations, which in turn would provide a boost to future revenue performance. In addition, the increase in Non-Current Liabilities was in accordance with the Management's policy on capital structure which emphasized the use of Non-Current Liabilities as the main source of funding so that the increase in Non-Current Liabilities in 2020 had a positive impact on the Company's financial performance.

EKUITAS

EQUITY

Ekuitas per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Equity per December 31, 2019 – 2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal Saham / Share Capital	1.444.029	1.444.029	-	0,00%
Modal Donasi / Donated Capital	26.826	26.826	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	(205.005)	(317.597)	112.593	35,53%
Saldo Laba / Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	15.021.059	13.273.515	1.747.544	13,17%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	907.448	2.455.763	(1.548.315)	(63,05%)
Penghasilan (Beban)Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income (Expenses)	(1.119.690)	(105.009)	(1.014.681)	866,67%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Neto / Equity attributable to owners of the parent entity – Net	16.074.667	16.777.526	(702.859)	(4,19%)
Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling interests	1.012.298	1.348.685	(336.387)	(24,94%)
Ekuitas – Neto / Equity – Net	17.086.965	18.126.211	(1.039.246)	(5,73%)



Pada akhir tahun 2020, jumlah Ekuitas – Neto Perseroan tercatat sebesar Rp17.086,97 miliar, menurun Rp1.039,25 miliar atau 5,73 persen dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar Rp18.126,21 miliar. Penurunan Ekuitas – Neto disebabkan oleh:

1. Kenaikan beban komprehensif lainnya sebesar Rp1.014,68 miliar atau 866,67 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp105,01 miliar menjadi Rp1.119,69 miliar di tahun 2020, yang disebabkan oleh pembukuan kerugian aktuarial program pensiun.
2. Penurunan tambahan modal disetor sebesar Rp112,59 miliar atau 35,53 persen dari tahun 2019 menjadi sebesar Rp205,00 miliar di tahun 2020 karena adanya pelepasan saham PT RSP dan pengambilalihan saham PT ILCS.

At the end of 2020, the total Equity - Net of the Company was recorded at Rp17,086.97 billion, decreased by Rp1,039.25 billion or 5.73 percent compared to the end of 2019 of Rp18,126.21 billion. Decrease in Equity – Net was due to:

1. The increase in other comprehensive expenses amounted to Rp1,014.68 billion or 866.67 percent compared to 2019 amounting to Rp105.01 billion to Rp1,119.69 billion in 2020, which was due to the bookkeeping of pension program's actuarial losses.
2. A decrease in additional paid-in capital by Rp112.59 billion or 35.53 percent from 2019 to Rp205.00 billion in 2020 due to the divestment of PT RSP shares and the acquisition of PT ILCS shares.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha / Operating revenues	10.453.610	11.141.752	(688.142)	(6,18%)
Beban Usaha / Operating expenses	(8.271.983)	(8.520.358)	248.375	(2,92%)
Labanya Usaha / Income from Operations	2.181.627	2.621.395	(439.768)	(16,78%)
Pendapatan di Luar Usaha / Revenues outside Operation	826.946	2.093.547	(1.266.601)	(60,50%)
Beban di Luar Usaha / Expenses outside Operation	(1.624.362)	(1.499.841)	(124.521)	8,30%
Labanya Usaha Sesudah Pendapatan (Beban) di Luar Usaha / Income After Revenue (Expenses) Outside Operation	1.384.212	3.215.100	(1.830.889)	(56,95%)
Manfaat (Beban) Pajak / Tax Benefit (Expense)	(227.424)	(711.290)	483.866	(68,03%)
Labanya Tahun Berjalan / Income for the Year	1.156.787	2.503.810	(1.347.023)	(53,80%)
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income				
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti / Remeasurements of defined benefit plans	(794.030)	(68.568)	(725.463)	1058,02%
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / Exchange differences due to financial statements translation	(329.194)	254.858	(584.052)	(229,17%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Changes in fair value of available-for-sale financial assets	108.347	(170.054)	278.401	(163,71%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	141.910	2.520.047	(2.378.137)	(94,37%)
Labanya Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Income for the Year Attributable To:				
Pemilik Induk / Owners of the parent entity	1.184.857	2.455.763	(1.270.906)	(51,75%)
Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling interests	(28.070)	48.048	(76.118)	(158,42%)
Labanya Periode Tahun Berjalan / Income for the Year	1.156.787	2.503.810	(1.347.023)	(53,80%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Income for the Year Attributable To:				
Pemilik Induk / Owners of the parent entity	170.176	2.473.311	(2.303.135)	(93,12%)
Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling interests	(28.266)	46.736	(75.002)	(160,48%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	141.910	2.520.047	(2.378.137)	(94,37%)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019-2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Labar per Saham Dasar (Nilai Penuh) / Basic Earnings Per Share (Full Amount)	820.522	1.700.633	(880.111)	(51,75%)
Operating Ratio	79,13%	76,47%	2,66%	3,48%
EBITDA	3.123.762	3.485.100	(361.338)	(10,37%)
Marjin EBITDA / EBITDA Margin	29,88%	31,28%	(1,40%)	(4,48%)

PENDAPATAN USAHA

OPERATING REVENUES

Pendapatan Usaha per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Operating Revenues per December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pelayanan Jasa Terminal / Container Terminal Services	1.775.217	2.529.506	(754.283)	(29,82%)
Pelayanan Jasa Kapal / Ship Services	1.332.080	1.322.241	9.839	0,74%
Pelayanan Jasa Barang / Goods Services	42.767	107.221	(64.454)	(60,11%)
Pelayanan Terminal Petikemas / Container Terminal Service	3.178.043	3.341.636	163.587	4,90%
Pengusahaan Peralatan / Equipment Services	58.820	66.735	(7.915)	(11,86%)
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik / Land, Building, Water and Electricity Business	3.023.333	2.852.741	170.592	5,98%
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha / Miscellaneous Facility				
- Jasa Logistik / Logistics Services	500.350	385.564	114.786	29,77%
- Pelayanan Kesehatan / Health Service	263.284	271.457	(8.172)	(3,01%)
- Pendapatan Pas Pelabuhan / Port Entry Fee	143.869	109.219	34.650	31,72%
- Pelayanan Jaringan dan Konsultasi Sistem Informasi / Network Services and Consultant of Information System	56.400	126.790	(70.390)	(55,52%)
- Jasa Keuangan / Financial Service	8.736	6.387	2.349	36,77%
- Pendapatan Kebersihan / Cleaning Services	4.512	8.817	(4.305)	(48,83%)
- Lain-lain / Others	66.199	13.439	52.760	392,57%
Jumlah Fasilitas Rupa-Rupa Usaha / Total Miscellaneous Facility	1.043.350	921.673	121.677	13,20%
Jumlah / Total	10.453.610	11.141.752	(688.142)	(6,18%)

Catatan: Terdapat reklasifikasi atas pendapatan IPC TPK tahun 2019 sebesar Rp738,11 miliar yang semula tercatat di pendapatan pelayanan terminal menjadi pendapatan pelayanan terminal petikemas.

Note: There was a reclassification of IPC TPK revenues in 2019 amounting to Rp738.11 billion, which was originally recorded in terminal service revenue into container terminal service revenue.

Pendapatan Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp10.453,61 miliar, turun Rp688,14 miliar atau 6,18 persen dibandingkan nilai pada tahun 2019 sebesar Rp11.141,75 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh:

Operating Revenues in 2020 was recorded at Rp10,453.61 billion, decreased by Rp688.14 billion or 6.18 percent compared to the value in 2019 of Rp11,141.75 billion. The decrease was caused by:

1. Penurunan pendapatan pelayanan jasa barang sebesar Rp64,45 miliar atau 60,11 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp107,22 miliar menjadi Rp42,77 miliar di tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya

1. Decrease in goods services revenue by Rp64.45 billion or 60.11 percent from the 2019 realization of Rp107.22 billion to Rp42.77 billion in 2020. This occurred due to a decrease in revenue from public port docks of Rp56.31



penurunan pendapatan dermaga pelabuhan umum sebesar Rp56,31 miliar, terutama di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, Cirebon, Palembang, dan PT IKT Tbk, sejalan dengan turunnya arus barang;

2. Penurunan pendapatan pelayanan terminal sebesar Rp754,29 miliar atau 29,82 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp2.529,51 miliar menjadi Rp1.775,22 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penurunan *handling cargo multipurpose* yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan *impor steel product* seiring dengan penurunan kegiatan industri otomotif dan baja konstruksi, penurunan muatan berupa *sparepart* maupun alat berat melalui Pelabuhan Tanjung Priok, serta adanya penurunan permintaan domestik untuk komoditi *gypsum*, *klinker*, dan batu bara yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19;
3. Penurunan pendapatan perusahaan alat terealisasi sebesar Rp7,92 miliar atau 11,86 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp66,74 miliar menjadi Rp58,82 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan impor barang yang berasal dari China dan Negara Asia Lainnya yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19;
4. Penurunan pendapatan pelayanan terminal petikemas sebesar Rp163,59 miliar atau 4,90 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp3.341,64 miliar menjadi Rp3.178,04 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan trafik petikemas pada tahun 2020 yang terealisasi sebesar 6,92 juta TEUs atau turun 9,64 persen dari realisasi tahun 2019, terutama disebabkan perlambatan ekonomi karena adanya Pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

Namun demikian, terdapat pendapatan yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antara lain:

1. Pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha terealisasi sebesar Rp1.043,35 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp121,68 miliar atau 13,20 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp921,67 miliar. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan kegiatan *freight forwarding* PT MTI yang didorong oleh adanya Kerja Sama Pengoperasian Lini II di Cabang Pelabuhan Pontianak dan Cabang Pelabuhan Jambi;
2. Pendapatan perusahaan TBAL terealisasi sebesar Rp3.023,33 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp170,59 miliar atau 5,98 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.852,74 miliar, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kurs dolar AS, di mana pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp13.901,00 per dolar AS, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp14.105,00 per dolar AS;

billion, especially at Teluk Bayur Port Branch, Cirebon Port Branch, Palembang Port Branch, and PT IKT Tbk, in line with the decreasing goods traffic;

2. The decrease in terminal service revenue amounted to Rp754.29 billion or 29.82 percent from the 2019 realization of Rp2,529.51 billion to Rp1,775.22 billion in 2020. This was due to a decrease in multipurpose cargo handling due to a decrease in the import of steel products, along with a decrease in the activities of the automotive and construction steel industries, decrease in cargo in the form of spare parts and heavy equipment through Tanjung Priok Port, and decrease in domestic demand for gypsum, clinker, and coal commodities affected by the Covid-19 Pandemic;
3. The decrease in revenue from operating equipment was Rp7.92 billion or 11.86 percent from the 2019 realization of Rp66.74 billion to Rp58.82 billion. This was mainly due to the decline in imports of goods originating from China and Other Asian Countries caused by the Covid-19 Pandemic;
4. The decline in container terminal service revenue was Rp163.59 billion or 4.90 percent from the realization in 2019 of Rp3,341.64 billion to Rp3,178.04 billion. This decline was in line with the decline in container traffic in 2020 which was realized by 6.92 million TEUs or a 9.64 percent decrease from the realization in 2019, mainly due to the economic slowdown due to the Covid-19 Pandemic during 2020.

However, there were increase in revenues compared to the previous year, including:

1. The realized miscellaneous facility revenue amounted to Rp1,043.35 billion, an increase of Rp121.68 billion or 13.20 percent from the realization in 2019 of Rp921.67 billion. The increase occurred due to an increase in PT MTI's freight forwarding activities which was driven by the Line II Cooperation Operation at Pontianak Port Branch and Jambi Port Branch;
2. The realized Land, Building, Water and Electricity Business (TBAL) revenue amounted to Rp3,023.33 billion, an increase of Rp170.59 billion or 5.98 percent from the 2019 realization of Rp2,852.74 billion, which was mainly due to the increase in the US dollar exchange rate, where in 2019 it was recorded in the amount of Rp13,901.00 per US dollar, while in 2020 it was Rp14,105.00 per US dollar;

- Pendapatan pelayanan jasa kapal terealisasi Rp1.332,08 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp9,84 miliar atau 0,74 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.322,24 miliar, yang terutama disebabkan oleh realisasi pendapatan penundaan di DUKS pada Cabang Pelabuhan Palembang serta adanya pendapatan *Ship to Ship* (STS) pada Cabang Pelabuhan Panjang.
- The realized ship services revenue of Rp1,332.08 billion, an increase of Rp9.84 billion or 0.74 percent compared to the realization in 2019 of Rp1,322.24 billion, which was mainly due to the realization of postponement revenue at DUKS at Palembang Port Branch and Ship to Ship (STS) revenue at Panjang Port Branch.

BEBAN USAHA

OPERATING EXPENSES

Beban Usaha per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Operating Expenses as of December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Kerja Sama Mitra Usaha / Partnership	2.361.541	2.568.723	(207.182)	(8,07%)
Pegawai / Employees	2.402.704	2.639.837	(237.133)	(8,98%)
Umum / General	1.380.948	1.211.702	169.246	13,97%
Penyusutan dan Amortisasi / Depreciation and Amortization	942.135	863.706	78.429	9,08%
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai / Fuels and Supplies	843.741	897.935	(54.194)	(6,04%)
Pemeliharaan / Maintenance	160.725	168.628	(7.903)	(4,69%)
Asuransi / Insurance	93.568	64.908	28.661	44,16%
Administrasi Kantor / Office Administration	86.455	104.293	(17.838)	(17,10%)
Lain-lain / Others	166	626	(460)	(73,50%)
Jumlah / Total	8.271.983	8.520.358	(248.375)	(2,92%)

Beban Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp8.271,98 miliar, turun Rp248,38 miliar atau 2,92 persen dibandingkan nilai pada tahun 2019 sebesar Rp8.520,36 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh:

- Penurunan beban administrasi kantor sebesar Rp17,84 miliar atau 17,10 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp104,29 miliar menjadi Rp86,46 miliar di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh efisiensi beban cetak, fotokopi, pemakaian kertas dan alat tulis kantor, serta penurunan beban jamuan rapat di lingkungan kerja IPC;
- Penurunan beban pegawai sebesar Rp237,13 miliar atau 8,98 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2.639,84 miliar menjadi Rp2.402,70 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh masih tercatatnya beban pegawai PT Rumah Sakit Pelabuhan pada tahun 2019 yang telah bergabung ke PT Pertamedika IHC di tahun 2020;
- Penurunan beban bahan bakar dan bahan habis pakai sebesar Rp54,19 miliar atau 6,04 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp897,93 miliar menjadi sebesar Rp843,74 miliar di tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan menurunnya beban bahan bakar seiring dengan penurunan pendapatan perusahaan alat dan terminal di beberapa Anak Perusahaan IPC;

Operating Expenses in 2020 were recorded at Rp8,271.98 billion, decreased by Rp248.38 billion or 2.92 percent compared to 2019's value of Rp8,520.36 billion. The decrease was caused by:

- Decrease in office administrative expenses by Rp17.84 billion or 17.10 percent compared to the realization in 2019 of Rp104.29 billion to Rp86.46 billion in 2020. This was influenced by the efficiency of printing, photocopy, paper and office stationery expenses, as well as a reduction in the meeting banquets expenses in the IPC work environment;
- The decrease in employee expenses was Rp237.13 billion or 8.98 percent compared to 2019 amounting to Rp2,639.84 billion to Rp2,402.70 billion in 2020. This was due to the recorded expenses of PT Rumah Sakit Pelabuhan's employees in 2019 who have joined PT Pertamedika IHC in 2020;
- The decrease in fuel and supplies expenses was Rp54.19 billion or 6.04 percent compared to 2019 amounting to Rp897.93 billion to Rp843.74 billion in 2020. This was mainly due to lower fuel expenses in line with lower operating revenues for equipment and terminals in several IPC Subsidiaries;



4. Penurunan beban KSMU sebesar Rp207,18 miliar atau 8,07 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp2.568,72 miliar menjadi Rp2.361,54 miliar di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan lebih rendahnya capaian Pendapatan Usaha, terutama pendapatan pelayanan terminal.

4. A decrease in KSMU expenses by Rp207.18 billion or 8.07 percent compared to the 2019 realization of Rp2,568.72 billion to Rp2,361.54 billion in 2020. This was in line with the lower achievement of Operating Revenues, especially terminal service revenue.

Namun demikian, terdapat beban operasi yang nilai realisasinya lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019, antara lain:

However, there were operating expenses whose realized value was higher than the realization in 2019, including:

1. Realisasi beban asuransi pada tahun 2020 sebesar Rp93,56 miliar, naik Rp28,66 miliar atau 44,16 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp64,90 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan biaya asuransi tenaga kerja akibat kenaikan premi iuran BPJS mulai tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang besaran iuran BPJS kesehatan;
2. Realisasi beban umum pada tahun 2020 sebesar Rp1.380,95 miliar atau 13,92 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.211,70 miliar. Hal ini disebabkan kenaikan beban perawatan kesehatan dan beban bantuan sosial terkait dengan Pandemi Covid-19 serta adanya kenaikan beban imbalan kerja perhitungan aktuarial;
3. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2020 sebesar Rp942,13 miliar atau 9,08 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp863,70 miliar, yang disebabkan oleh dampak dari penerapan PSAK 73 yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2020 dan kenaikan beban penyusutan bangunan fasilitas pelabuhan yang disebabkan oleh penambahan aset.

1. The realization of insurance expenses in 2020 amounted to Rp93.56 billion, an increase of Rp28.66 billion or 44.16 percent from the realization in 2019 of Rp64.90 billion. This was mainly influenced by an increase in labor insurance costs due to an increase in BPJS premiums starting on January 1, 2020 in accordance with Presidential Regulation Number 75 of 2019 which regulates the amount of BPJS Health contributions;
2. The realization of general expenses in 2020 amounted to Rp1,380.95 billion or 13.92 percent compared to 2019 amounting to Rp1,211.70 billion. This was due to an increase in healthcare and social assistance expenses related to the Covid-19 Pandemic as well as an increase in work benefits for actuarial calculations;
3. The realization of depreciation and amortization expenses in 2020 amounted to Rp942.13 billion or 9.08 percent compared to 2019 amounting to Rp863.70 billion, which was due to the impact of the application of PSAK 73 which came into effect on January 1, 2020 and the increase in depreciation expense for port facilities caused by the addition of assets.

PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA

Pendapatan di luar usaha tahun 2020 terealisasi sebesar Rp826,94 miliar, turun Rp1.266,60 miliar atau 60,50 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.093,55 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pencatatan pengakuan pendapatan atas perolehan aset *Build, Operate, and Transfer* (BOT) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang dan Banten yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019.

INCOME (EXPENSES) OUTSIDE OF OPERATIONS

The income outside of operations in 2020 was realized at Rp826.94 billion, a decrease of Rp1,266.60 billion or 60.50 percent compared to the realization in 2019 of Rp2,093.55 billion. The decrease was due to the recording of revenue recognition for the acquisition of Build, Operate, and Transfer (BOT) assets in Tanjung Priok Branch, Panjang Branch and Banten Branch carried out by the Company in 2019.

Beban di luar operasi tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.624,36 miliar, naik Rp124,52 miliar atau 8,30 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp499,84 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya beban denda dan kekurangan bayar pajak yang dibukukan di tahun 2020 sebesar Rp170,90 miliar, dengan rincian PT PPI sebesar Rp117,22 miliar, PT PTP Rp6,39 miliar, PT IPC TPK sebesar Rp11,25 miliar, dan Perusahaan Induk sebesar Rp33,05 miliar.

Expenses outside of operations in 2020 amounted to Rp1,624.36 billion, an increase of Rp124.52 billion or 8.30 percent compared to the realization in 2019 of Rp499.84 billion. The increase was due to the expenses of fines and underpayment of taxes recorded in 2020 amounting to Rp170.90 billion, with details of PT PPI at Rp117.22 billion, PT PTP at Rp6.39 billion, PT IPC TPK at Rp11.25 billion, and the Parent Company at Rp33.05 billion.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba Tahun Berjalan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.156,79 miliar, turun Rp1.347,02 miliar atau 53,80 persen dibandingkan nilai pada tahun 2019 sebesar Rp2.503,81 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan di Luar Usaha dan Pendapatan Usaha, masing-masing sebesar 60,50 persen dan 6,18 persen dari tahun 2019, sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

Penurunan laba bersih tersebut menyebabkan penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1.270,91 miliar atau 51,75 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.455,76 miliar menjadi Rp1.184,86 miliar pada tahun 2020. Selain itu, laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali di tahun 2020 tercatat mengalami kerugian sebesar Rp28,07 miliar, turun Rp76,12 miliar atau 158,42 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat laba/untung sebesar Rp48,05 miliar.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.014,88 miliar, turun Rp1.031,11 miliar atau 6.350,70 persen dibandingkan nilai pada tahun 2019 sebesar Rp16,24 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dari pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp725,46 miliar atau 1058,02 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, telah terjadi pencatatan kerugian atas pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dari selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan sebesar Rp329,19 miliar di tahun 2020.

Penurunan jumlah penghasilan komprehensif lain di tahun 2020 memberikan dampak penurunan pada total laba komprehensif tahun berjalan 2020 sebesar Rp2.378,14 miliar atau 94,37 persen dari tahun 2019 sebesar Rp2.520,05 miliar menjadi Rp141,91 miliar. Hal tersebut menyebabkan turunnya laba komprehensif bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dari tahun 2019 serta tercatatnya rugi komprehensif bersih yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali di tahun 2020.

EBITDA

Realisasi EBITDA pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.123,76 miliar, turun Rp361,34 miliar atau 10,37 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp3.485,10 miliar.

PROFIT FOR THE YEAR

Profit for the Year in 2020 was recorded at Rp1,156.79 billion, decreased by Rp1,347.02 billion or 53.80 percent compared to the value in 2019 of Rp2,503.81 billion. This was due to a decrease in Non-Operating Income and Operating Revenues, by 60.50 percent and 6.18 percent, respectively, from 2019 as an impact of Covid-19 pandemic.

The decrease in net income resulted in a decrease in net profit attributable to the Parent Entity owners by Rp1,270.91 billion or 51.75 percent compared to 2019 amounting to Rp2,455.76 billion to Rp1,184.86 billion in 2020. In addition, profit (loss) for the year attributable to Non-Controlling Interests in 2020 recorded a loss of Rp28.07 billion, decreased by Rp76.12 billion or 158.42 percent compared to 2019 which recorded a profit of Rp48.05 billion.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2020 was recorded at Rp1,014.88 billion, decreased by Rp1,031.11 billion or 6,350.70 percent compared to the value in 2019 of Rp16.24 billion. This was due to the decrease in items that would not be reclassified to profit or loss from the remeasurement of defined benefit plans amounting to Rp725.46 billion or 1058.02 percent from the previous year. In addition, there was a recorded loss on items that would be reclassified to profit or loss from a foreign exchange difference in the translation of the Financial Statements amounting to Rp329.19 billion in 2020.

The decrease in the amount of other comprehensive income in 2020 has a decrease in the total comprehensive income for the year 2020 amounting to Rp2,378.14 billion or 94.37 percent from 2019 amounting to Rp2,520.05 billion to Rp141.91 billion. This has resulted in a decrease in net comprehensive income attributable to the Parent Entity Owners from 2019 and recorded net comprehensive loss attributable to Non-Controlling Interests in 2020.

EBITDA

EBITDA realization in 2020 was recorded at Rp3,123.76 billion, decreased by Rp361.34 billion or 10.37 percent compared to the realization in 2019 of Rp3,485.10 billion.



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Laporan Arus Kas Konsolidasian Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Consolidated Statement of Cash Flows per December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities (Used in) Operating Activities	1.353.531	1.123.892	229.639	20,43%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Flows from Operating Activities (Used in) Investing Activities	(10.927.592)	(2.373.180)	(8.554.412)	360,46%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows from Operating Activities (Used in) Financing Activities	(761.998)	(687.558)	(74.440)	10,83%
Dampak Selisih Kurs atas Kas terhadap Setara Kas pada Akhir Tahun / Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents at the end of the year	30.800	(478.291)	509.091	106,44%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(10.305.259)	(2.415.138)	(7.890.121)	326,69%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	15.603.533	18.018.671	(2.415.138)	(13,40%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	5.298.274	15.603.533	(10.305.259)	(66,04%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS USED IN OPERATING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Cash Flows Used in Operating Activities as of December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan / Cash receipts from customers	9.943.466	11.677.176	(1.733.710)	(14,85%)
Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok dan Lainnya / Payment to contractors, suppliers and others	(5.105.621)	(5.642.396)	536.775	(9,51%)
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to employees	(2.631.603)	(2.609.390)	(22.213)	0,85%
Pembayaran Pajak Penghasilan / Payment for income taxes	(249.151)	(1.995.196)	1.746.045	(87,51%)
Penghasilan Bunga / Interest received	505.409	719.435	(214.026)	(29,75%)
Pembayaran Bunga dan Keuangan Lainnya / Payment of interest and other financial charges	(1.108.968)	(1.025.737)	(83.231)	8,11%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided by Operating Activities	1.353.531	1.123.892	229.640	20,43%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.353,53 miliar, naik Rp229,64 miliar atau 20,43 persen bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.123,89 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Berkurangnya Pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp1.746,05 miliar atau 87,51 persen dari tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019, Perseroan membukukan denda atas kekurangan bayar pajak atas PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp1,23 triliun;

Cash flow from Operating Activities up to December 31, 2020 was recorded at Rp1,353.53 billion, an increase of Rp229.64 billion or 20.43 percent when compared to the value on December 31, 2019, which amounted to Rp1,123.89 billion. This was caused by:

1. The decrease Income Tax Payments amounting to Rp1,746.05 billion or 87.51 percent from 2019. This occurred because in 2019, the Company recorded a fine for underpayment of tax on 2019 Corporate Income Tax amounting to Rp1.23 trillion;

2. Penurunan Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok dan Lainnya sebesar Rp536,78 miliar atau 9,51 persen dari tahun sebelumnya, seiring dengan menurunnya beban bahan bakar dan bahan habis pakai, pemeliharaan, KSMU dan administrasi kantor.

2. Decrease in Payments to Contractors, Suppliers and Others by Rp536.78 billion or 9.51 percent from the previous year, in line with the decrease in expenses for fuel and supplies, maintenance, KSMU and office administration.

Peningkatan Arus Kas dari Aktivitas Operasi memberikan dampak yang positif terhadap likuiditas Perseroan di tahun buku.

The increase in Cash Flows from Operating Activities had a positive impact on the liquidity of the Company in the fiscal year.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Cash Flows Used in Investing Activities as of December 31, 2019 - 2020 (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Penerimaan Dividen / Receipt of dividend	223.174	281.859	(58.685)	(20,82%)
Laba Penjualan Aset Tetap / Gain on disposal assets	8.503	80.630	(72.126)	(89,45%)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud / Acquisition of fixed assets and intangible assets	(2.627.005)	(3.312.164)	685.158	(20,69%)
Penerimaan Investasi Jangka Pendek / Receipt of short-term investments	(8.494.178)	1.239.306	(9.733.484)	(785,40%)
Penerimaan Sewa di Muka / Receipt of advance rental fee	127.469	124.256	3.213	2,59%
Penempatan Investasi Saham / Placement of investment in shares of stock	(165.555)	(787.067)	621.512	(78,97%)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Provided by (Use in) Investing Activities	(10.927.592)	(2.373.180)	(8.554.412)	360,46%

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.927,59 miliar, naik Rp8.554,41 miliar atau 360,46 persen bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.373,18 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh:

Cash Flow for Investing Activities up to December 31, 2020 was recorded at Rp10,927.59 billion, an increase of Rp8,554.41 billion or 360.46 percent when compared to the value on December 31, 2019 of Rp2,373.18 billion. This was caused by:

1. Penurunan pembayaran atas pemerolehan aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar Rp685,16 miliar atau 20,69 persen dari tahun 2019, seiring dengan progres investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 (serapan investasi tahun 2020 sebesar Rp2.980,67 miliar, sementara tahun 2019 sebesar Rp3.443,56 miliar);
2. Kenaikan penempatan investasi jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp9.733,48 miliar atau 785,40 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yang dikarenakan oleh adanya tambahan penempatan deposito, di mana deposito tersebut ditempatkan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan mulai Oktober 2020.
3. Penurunan penerimaan dividen sebesar Rp58,69 miliar atau 20,82 persen dari tahun 2019, yang disebabkan oleh penurunan penerimaan dividen dari PT JICT dan escrow KSO TPK Koja.

1. Decrease in payments for the acquisition of fixed assets and intangible assets of Rp685.16 billion or 20.69 percent from 2019, in line with the smaller investment progress compared to 2019 (investment absorption in 2020 amounted to Rp2,980.67 billion, while in 2019 it was amounted to Rp3,443.56 billion);
2. The increase in short-term investment placements in 2020 amounted to Rp9,733.48 billion or 785.40 percent compared to the realization in 2019, which was due to additional deposit placements, where these deposits were placed with a maturity of more than 3 (three) months starting from October 2020.
3. Decrease in dividend receipts of Rp58.69 billion or 20.82 percent from 2019, which was caused by a decrease in dividend receipts from PT JICT and KSO TPK Koja's escrow.



4. Peningkatan penempatan investasi saham dan surat hutang di PT PII, di mana PT PII membeli utang negara dan surat berharga syariah negara.

4. Increased placement of investment in shares and debt securities in PT PII, where PT PII purchased state bonds and state sharia securities.

Peningkatan Arus Kas untuk Aktivitas Investasi di tahun 2020 akan memberikan nilai tambah pada kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dikarenakan adanya penambahan Investasi Jangka Pendek.

The increase in Cash Flow for Investing Activities in 2020 provided added value to the Company's financial performance in the future due to the addition of short-term investments.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Cash Flows from Financing Activities as of December 31, 2019-2020 (in million Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya / Receipt of Bank Loans and Other Financial Institution	(2.000)	145.184	(147.184)	(101,38%)
Pembayaran Liabilitas Sewa / Payment of Lease Liabilities	(51.779)	-	(51.779)	-
Pembayaran Dividen / Payment of Dividend	(708.219)	(832.742)	124.523	(14,95%)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash from (Used in) Financing Activities	(761.998)	(687.558)	(74.440)	10,83%

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp762,00 miliar, naik Rp74,44 miliar atau 10,83 persen bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp687,56 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran atas pinjaman yang dilakukan oleh PT EDII, sedangkan pada tahun 2019 terdapat penerimaan pinjaman yang dilakukan oleh PT RSP sebesar Rp145,18 miliar. Namun demikian, terdapat penurunan pembayaran dividen yang semula Rp832,74 miliar menjadi Rp708,22 miliar, di mana pembayaran dividen tahun 2020 dibayar secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp177,05 miliar.

Cash flows for Financing Activities up to December 31, 2020 were recorded at Rp762.00 billion, increased by Rp74.44 billion or 10.83 percent compared to the value on December 31, 2019 at Rp687.56 billion. This was caused by the payment of borrowings of PT EDII, whereas in 2019 there was a receipt of borrowings of PT RSP amounting to Rp145.18 billion. However, dividend payment decreased from Rp832.74 billion to Rp708.22 billion. The dividend of 2020 was paid in phases 4 (four) times at a value of Rp177.05 billion at each payment.

Dampak Perubahan Selisih Kurs

Dampak perubahan selisih kurs pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp30,80 miliar, naik Rp509,09 miliar atau 106,44 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar minus Rp478,29 miliar. Hal ini disebabkan oleh melemahnya kurs Rupiah terhadap dolar AS, di mana kurs tahun 2020 sebesar Rp14.105 per dolar AS, sedangkan kurs tahun 2019 sebesar Rp13.901 per dolar AS. Sementara itu, perhitungan selisih kurs pada tahun 2019 mengalami penguatan, di mana kurs Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.481 per dolar AS, sehingga dampak perubahan selisih kurs tahun 2019 sebesar minus Rp478,29 miliar.

Effect of Exchange Rate Changes

Effect of exchange rate changes in 2020 was realized at Rp30.80 billion, up Rp509.09 billion or 106.44 percent compared to 2019 realization at minus Rp478.29 billion. This was due to the depreciation of Rupiah against US dollar, where the exchange rate of 2020 was at Rp14,105 per US dollar compared to the 2019 exchange rate at Rp13,901 per US dollar. Meanwhile, the calculation of exchange rate changes in 2019 increased with Rupiah exchange rate at Rp14,481 per US dollar, so that the effect of exchange rate changes in 2019 was minus Rp478.29 billion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan IPC dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, antara lain: kondisi keuangan jangka pendek, kondisi keuangan jangka panjang, rasio aktivitas dan rasio hasil usaha.

Kemampuan membayar utang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas, sedangkan kemampuan membayar utang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Selain itu, Perseroan juga menggunakan tolok ukur kemampuan membayar utang dari efek yang diterbitkan. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan kemampuan membayar utang dari obligasi global disajikan sebagai berikut.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Tabel Likuiditas (dalam satuan %) / Table of Liquidity (in % unit)			
Likuiditas / Liquidity	2020	2019	Perubahan / Change
Cash Ratio	325,15%	339,95%	(4,55%)
Current Ratio	380,19%	393,40%	(3,47%)

Cash Ratio Perseroan diperoleh dari penambahan nilai Kas, Deposito, dan Surat Berharga Jangka Pendek, lalu dibagi dengan nilai Liabilitas Jangka Pendek. Pada tahun 2020, *Cash Ratio* tercatat sebesar 325,15 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 339,95 persen.

Current Ratio diperoleh dari pembagian nilai Aset Lancar dengan Liabilitas Jangka Pendek. Pada tahun 2020, *Current Ratio* tercatat sebesar 377,36 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 393,40 persen.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Nilai solvabilitas Perseroan cenderung stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari tingkat solvabilitas Perseroan relatif baik. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY DEBT AND COLLECTABILITY

ABILITY TO PAY DEBT

The Company is always committed to fulfilling creditors' rights by making timely repayments of loan principal and interest. IPC's ability to meet its obligations can be seen from a number of indicators, including: short-term financial condition, long-term financial condition, activity ratios, and operating results ratios.

The ability to pay short-term liability is reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. In addition, the Company also uses a measure of the ability to pay liability from the securities issued. The liquidity ratio, solvency ratio, and the ability to pay debts of global bonds are presented as follows.

Ability to Pay Short-Term Liabilities (Liquidity)

The Company's Cash Ratio is obtained from the addition of Cash, Deposits, and Short-Term Securities, then divided by the value of Short-Term Liabilities. The Cash Ratio in 2020 was recorded at 325.15 percent, a decrease compared to that of 2019 at 339.95 percent.

Current Ratio is obtained by dividing Current Assets with Current Liabilities. The Current Ratio in 2020 was recorded at 377.36 percent, a decrease compared to that of 2019 at 393.40 percent.

Ability to Pay Long-Term Liabilities (Solvency)

Solvency ratio that shows the Company's ability to pay its liabilities, especially long-term liabilities. The Company's solvency value tends to be stable compared to the previous year. The Company's solvency level was relatively good. The solvency ratio is described as follows.



Tabel Rasio Kondisi Keuangan Jangka Panjang (dalam satuan %) /
Table of Long Term Financial Condition Ratio (in % unit)

Rasio Keuangan Jangka Panjang / Long Term Financial Ratio	2020	2019	Perubahan / Change
Total Assets to Total Debt	231,38%	236,00%	(1,96%)
Total Debt to Equity	130,73%	121,00%	8,04%
Total Debt to Total Fixed Assets	149,29%	155,00%	(3,68%)
Long-Term Debt to Equity	130,73%	121,00%	8,04%
Net Debt to EBITDA	545,48%	184,00%	196,46%

Total Assets to Total Debt di tahun 2020 tercatat sebesar 231,38 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 236,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah Aset yang diiringi dengan kenaikan pinjaman di tahun 2020. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa telah proporsi pinjaman yang harus dibiayai oleh aset semakin meningkat di tahun 2020.

Total Assets to Total Debt in 2020 was recorded at 231.38 percent, a decrease compared to that of 2019 at 236.00 percent. This was due to the decrease in total Assets coupled with the increase in debt in 2020. Such decrease shows that the proportion of debt funded by assets increased in 2020.

Total Debt to Equity di tahun 2020 tercatat sebesar 130,73 persen, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 121,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan Ekuitas yang diiringi dengan peningkatan pinjaman di tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan Perseroan untuk membayarkan pinjaman yang dibukukan dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia pada tahun 2020.

Total Debt to Equity in 2020 was recorded at 130.73 percent, an increase compared to that of 2019 at 121.00 percent. This was due to the decrease in Equity coupled with the increase in debt in 2020. Such increase shows a decline in the Company's ability to pay debt using available Equity in 2020.

Total Debt to Fixed Assets di tahun 2020 tercatat sebesar 149,29 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 155,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap di tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajibannya di tahun 2020 dengan menggunakan aktiva tetap telah meningkat.

Total Debt to Fixed Assets in 2020 was recorded at 149.29 percent, a decrease compared to that of 2019 at 155.00 percent. This was due to the increase in Fixed Assets in 2020. Such increase shows that the Company's ability to pay liabilities using fixed assets has increased in 2020.

Long-Term Debt to Equity di tahun 2020 tercatat sebesar 130,73 persen, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 121,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang yang diiringi dengan penurunan jumlah Ekuitas. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia di tahun 2020.

Long-Term Debt to Equity in 2020 was recorded at 130.73 percent, an increase compared to that of 2019 at 121.00 percent. This was due to the increase in long-term debt coupled with the decrease in total Equity. Such increase shows a decline in the Company's ability to pay long-term liabilities using available Equity in 2020.

Net Debt to EBITDA di tahun 2020 tercatat sebesar 545,48 persen, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 184,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan Usaha di tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan hasil usaha yang direalisasikan pada tahun 2020.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, Obligasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu Standard and Poor's (S&P), Moody's dan Fitch.

Net Debt to EBITDA in 2020 was recorded at 545.48 percent, an increase compared to that of 2019 at 184.00 percent. This was due to the decrease in Operating Revenues in 2020. Such increase shows a decline in the Company's ability to pay liabilities using realized operating revenues in 2020.

Ability to Pay Debt from Securities Issued

The ability to pay debt can also be reflected based on the bond rating, the bonds of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are regularly assessed by rating agencies to support the feasibility of the bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and has received international ratings from various rating agencies namely Standard and Poor's (S&P), Moody's and Fitch.

Tabel Kemampuan Membayar Utang dari Obligasi Global /
Table of Ability to Pay Debts from Global Bonds

Uraian / Description	Peringkat / Rating	
	2020	2019
Obligasi Global / Global Bonds	- S&P	BBB- (<i>Outlook: Stable</i>)
	- Moody's	Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)
	- Fitch	BBB (<i>Outlook: Stable</i>)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

The definition of each bond rating given is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global /
Table of Definition of Global Bond Rating

Pemeringkat / Rating Agency	Peringkat / Rating	Definisi / Definition
Standard & Poor's (S&P)	BBB	Termasuk ke dalam kategori investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan / Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Moody's	Baa3 Baa2	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif / Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.
Fitch	BBB	Termasuk ke dalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan / Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Outlook		
Stable		Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. / Indicating a stable prospect, hence the rating results will be stable.
Positive		Prospek yang berpotensi untuk meningkatkan peringkat. / Prospect that has the potential to increase rating.
Tanda Tambah (+)		Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. / At certain rating indicates that the rating is relatively strong in each rating category.
Tanda Minus (-)		Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. / At certain rating indicates that the rating is relatively weak in each rating category.



KOLEKTIBILITAS PIUTANG

RECEIVABLES COLLECTABILITY

Kolektibilitas Piutang (dalam satuan hari) / Receivables Collectability (in days)			
Rasio Aktivitas / Activity Ratio	2020	2019	Perubahan / Change
Average Payment Period (APP)	114	114	0,00%
Average Collection Period (ACP)	26	27	(3,70%)
Collection Period	22	28	(21,43%)

Average Payment Period (APP) di tahun 2020 dan 2019 tercatat stabil, yaitu selama 114 hari. Average Collection Period (ACP) tahun 2020 tercatat selama 26 hari, turun dibandingkan tahun 2019 selama 27 hari. Sedangkan Collection Period tahun 2020 tercatat selama 22 hari, turun dibandingkan tahun 2020 selama 28 hari. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kolektibilitas piutang Perseroan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.

Average Payment Period (APP) in 2020 and 2019 was stable at 114 days. Average Collection Period (ACP) in 2020 was 26 days, a decrease from that of 2019 at 27 days. Meanwhile, Collection Period in 2020 was 22 days, a decrease from that of 2019 at 28 days. This shows that the collectability of the Company's receivables has improved from the previous year.

Tabel Analisa Umur Piutang Usaha (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Analysis of the Aging of Receivables (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet	120.748	255.115	(134.367)	(52,67%)
Lewat Jatuh Tempo / Past Due				
1-30 Hari / 1-30 Days	264.642	255.539	9.103	3,56%
31-60 Hari / 31-60 Days	62.519	111.820	(49.301)	(44,09%)
61-150 Hari / 61-150 Days	76.876	102.438	(25.562)	(24,95%)
Lebih dari 150 Hari / More than 150 days	726.358	535.679	190.679	35,60%
Saldo Awal / Initial Balance	1.251.143	1.260.592	(9.449)	(0,75%)
Penyisihan Penurunan Nilai / Allowance for Depreciation	(629.908)	(412.566)	(217.342)	52,68%
Neto / Net	621.235	848.025	(226.791)	(26,74%)

Analisa umur piutang Perseroan di tahun 2020 yang Belum Jatuh Tempo sebesar Rp120,75 miliar, lebih besar dibandingkan jumlah piutang yang Lewat Jatuh Tempo 31 – 60 hari sebesar Rp62,52 miliar maupun Piutang Usaha yang Lewat Jatuh Tempo 61-150 hari sebesar Rp76,88 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolektibilitas piutang Perseroan masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

Analysis of the age of the Company's receivables in 2020 that were not yet overdue amounted to Rp120.75 billion, higher than total overdue receivables by 31-60 days at Rp62.52 billion or overdue receivables by 61-150 days at Rp76.88 billion. This shows that the Company's receivables collectability remained in good category and was able to support the Company's activities.

Rasio Hasil Usaha

Operating Revenues Ratio

Tabel Rasio Hasil Usaha (dalam jutaan Rupiah) / Table of Operating Revenues Ratio (in million Rupiah)			
Rasio Hasil Usaha / Operating Revenues Ratio	2020	2019	Pertumbuhan / Growth
BOPO atau OR (<i>Operating Ratio</i>) / BOPO or OR (<i>Operating Ratio</i>)	79,13%	76,47%	3,48%
<i>Return on Capital Employed</i> (ROCE)	2,61%	6,76%	(61,39%)
<i>Return on Equity</i> (ROE)	7,23%	15,72%	(54,01%)
<i>EBITDA Margin</i>	29,88%	31,28%	(4,48%)
<i>EBITDA/Debt Service</i>	262,83%	292,29%	(10,08%)
<i>EBITDA/Beban Bunga</i> / <i>EBITDA/Interest Expense</i>	262,83%	292,29%	(10,08%)
<i>Sales to Average Asset</i>	20,16%	21,54%	(6,41%)
<i>Net Profit Margin</i>	11,07%	22,47%	(50,73%)
<i>Operating Cash Flow to Sales</i>	12,95%	10,09%	28,34%

BOPO *Ratio* pada tahun 2020 tercatat sebesar 79,13 persen, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,47 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 6,17 persen dan penurunan beban usaha sebesar 2,92 persen jika dibandingkan tahun 2019.

Return on Capital Employed (ROCE) pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,61 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,76 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun 2020 sebesar 53,80 persen dibandingkan tahun 2019.

Return on Equity (ROE) pada tahun 2020 tercatat sebesar 7,23 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 15,72 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun 2020 sebesar 53,80 persen dibandingkan tahun 2019.

EBITDA Margin pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,88 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 31,28 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan EBITDA tahun 2020 sebesar 10,37% dibandingkan tahun 2019.

EBITDA/Debt Service dan *EBITDA/Beban Bunga* pada tahun 2020 masing-masing tercatat sebesar 262,83 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 292,29 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan EBITDA tahun 2020 sebesar 10,37% dibandingkan tahun 2019.

Sales to Average Assets pada tahun 2020 tercatat sebesar 20,16 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 21,54 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha tahun 2020 sebesar 6,17% dibanding tahun 2019.

BOPO *Ratio* in 2020 was recorded at 79.13 percent, increased from that of 2019 at 76.47 percent. This was due to decrease in operating revenues by 6.17 percent and decrease in operating expenses by 2.92 percent compared to 2019.

Return on Capital Employed (ROCE) in 2020 was recorded at 2.61 percent, decreased from that of 2019 at 6.76 percent. This was due to decrease in net profit by 53.80 percent in 2020 compared to 2019.

Return on Equity (ROE) in 2020 was recorded at 7.23 percent, decreased from that of 2019 at 15.72 percent. This was due to decrease in net profit by 53.80 percent in 2020 compared to 2019.

EBITDA Margin in 2020 was recorded at 29.88 percent, decreased from that of 2019 at 31.28 percent. This was due to decrease in EBITDA by 10.37 percent in 2020 compared to 2019.

EBITDA/Debt Service and *EBITDA/Interest Expense* in 2020 were both recorded at 262.83 percent, decreased from that of 2019 at 292.29 percent. This was due to decrease in EBITDA by 10.37 percent in 2020 compared to 2019.

Sales to Average Assets in 2020 was recorded at 20.16 percent, decreased from that of 2019 at 21.54 percent. This was due to decrease in operating revenues by 6.17 percent in 2020 compared to 2019.



Net Profit Margin pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,07 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 22,47 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun 2020 sebesar 53,80% dibandingkan tahun 2019.

Net Profit Margin in 2020 was recorded at 11.07 percent, decreased from that of 2019 at 22.47 percent. This was due to decrease in net profit by 53.80 percent in 2020 compared to 2019

Operating Cash Flow to Sales pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,95 persen, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,09 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar 20,43% dan penurunan pendapatan usaha tahun 2020 sebesar 6,17% dibanding tahun 2019.

Operating Cash Flow to Sales in 2020 was recorded at 12.95 percent, increased from that of 2019 at 10.09 percent. This was due to the increase in net cash from operating activities in 2020 by 20.43 percent and a decrease in operating revenues by 6.17 percent in 2020 compared to 2019.

STRUKTUR MODAL

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, saldo laba, dan penghasilan komprehensif lainnya).

CAPITAL STRUCTURE

DETAILS OF CAPITAL STRUCTURE

The capital structure of the Company consists of equity attributable to owners of the Parent Entity (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

Tabel Rincian Struktur Modal (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Capital Structure Details (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal Saham / Share Capital	1.444.029	1.444.029	-	0,00%
Modal Donasi / Donated Capital	26.826	26.826	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-In Capital	(205.005)	(317.597)	112.593	(35,45%)
Saldo Laba / Retained Earnings	15.928.507	15.729.278	199.229	1,27%
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income (Expenses)	(1.119.690)	(105.009)	(1.014.681)	966,28%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Neto / Equity attributable to owners of the parent entity – Net	16.074.667	16.777.526	(702.859)	(4,19%)

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, pengelolaan permodalan juga ditujukan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. In addition, the Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Manajemen menilai bahwa struktur modal Perseroan di tahun 2020 masih berada dalam kategori Aman, karena rasio *Total Debt to Equity* (DER) masih berada di bawah batas DER yang diizinkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1, yaitu 4 : 1. Adapun uraian mengenai rasio *Total Debt to Equity* (DER) dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Management considers that the Company's capital structure in 2020 remained in the Safe category because the Total Debt to Equity Ratio (DER) was still below the DER limit permitted by the government as stipulated in the Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 169 of 2015, namely 4: 1. The description of Total Debt to Equity Ratio (DER) in the last 2 (two) years is as follows:

Rasio Total Debt to Equity Tahun 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Total Debt to Equity Ratio in 2019-2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman / Loans				
Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-term Loan	4.000	34.194	(30.194)	(88,30%)
Utang Obligasi / Bond Payable	22.333.703	21.984.178	349.525	1,59%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar / Non-Current Liabilities – net current portion	-	-	-	-
Total Pinjaman / Total Loans	22.337.703	22.018.372	319.331	1,45%
Total Ekuitas / Total Equity	17.086.965	18.126.211	(1.039.246)	(5,73%)
Total Debt to Equity (%)	130,73%	121,00%	8,04%	(4,19%)

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

IPC menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Struktur modal tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis IPC dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), dan Menteri Negara BUMN.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY SELECTION ON CAPITAL STRUCTURE

IPC prepares a Capital Plan based on a review and assessment of the required capital adequacy requirements and combines it with a review of the latest economic developments. The capital structure plan was prepared by the Board of Directors as part of the IPC Business Plan and approved by the Board of Commissioners, the Coordinating Minister for Economic Affairs as the Chairman of the Foreign Commercial Loan Team (PKLN), and the State Minister for State-Owned Enterprises.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2020, IPC melakukan material untuk Investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2020, IPC made material agreement for capital goods investment which are presented as follows.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal /
Table of Material Commitments for Capital Goods Investment

No.	Jenis Ikatan / Type of Commitment	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Program / Name of Program Implementing Vendor	Mata Uang uang Menjadi Denominasi / Denominated Currency
1.	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I / Construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Rupiah
2.	Pembangunan Terminal Kijing, Kalimantan Barat Fase 1 / Construction of Kijing Terminal, West Kalimantan Phase 1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Rupiah
3.	Maritim Tower	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Rupiah
4.	Pelebaran Dermaga C1 Pelabuhan Panjang / Expansion of C1 Dock at Panjang Port	PT Brantas Abhipraya	Rupiah
5.	Perbaikan Berat Dermaga Beton Umum di Pelabuhan Teluk Bayur / Heavy Repair of General Concrete Dock at Teluk Bayur Port	PT Nindya Karya (Persero)	Rupiah
6.	Pengadaan 4 Unit Kapal Tunda / Procurement of 4 Tugboats	PT Citra Shipyard, PT Golden Sunrise, dan BKI	Rupiah



Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal /
Table of Material Commitments for Capital Goods Investment

No.	Jenis Ikatan / Type of Commitment	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Program / Name of Program Implementing Vendor	Mata Uang yang Menjadi Denominasi / Denominated Currency
7.	Perbaikan Berat dan Perkuatan Dermaga TPK Koja / Heavy Repair and Strengthening of TPK Koja Dock	PT Hajar Aswad Konstruksindo	Rupiah
8.	Modifikasi Conveyor A di Pelabuhan Bengkulu / Modification of Conveyor A at Bengkulu Port	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah
9.	Penyesuaian Rail Span GLC pada Dermaga C2 dan Penyesuaian Elevasi Apron Dermaga C1 Pelabuhan Panjang / Adjustment of Rail Span GLC at C2 Dock and Adjustment of C1 Dock Apron Elevation at Panjang Port	PT SAC Nusantara	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2020, IPC melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat, dan pengerukan.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal IPC dan penerbitan *Global Bond* dengan nilai total USD1,6 miliar, terdiri dari Seri I senilai USD1,1 miliar dan Seri II senilai USD500 juta.

Sumber dana dari *Global Bond* tersebut dipergunakan untuk mengembangkan proyek pelabuhan dan fasilitas pendukung yang terangkum dalam proyek-proyek strategis Perseroan.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2020, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

PURPOSES OF MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2020, IPC entered into material commitments for capital goods investment with the objective to increase capacity, productivity, and services to build docks, storage yards, and procure equipment for loading/unloading and dredging.

SOURCE OF FUNDS

The source of funds for capital expenditure came from IPC's internal funds and the issuance of *Global Bond* totaling USD1.6 billion, consisting of Series I at a value of USD1.1 billion and Series II at a value of USD500 million.

The funds obtained from the *Global Bond* were used to develop port projects and supporting facilities as summarized in the Company's strategic projects.

PROTECTION FROM CURRENCY RISK

From the commitments made in 2020, there were no commitments in foreign currency in accordance with Bank Indonesia Regulation on the mandatory use of Rupiah currency for every transaction in the region of the Republic of Indonesia.

Furthermore, the Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are presented using Rupiah currency, whereas transactions in foreign currency are translated into Rupiah using the foreign exchange rate at the date of transaction.

At the reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currency are translated using the foreign exchange rate effective at the date, whereas the resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year, except for foreign exchange differences attributable to certain assets which are capitalized to assets in progress and intangible assets.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (nilai penuh):

The main foreign exchange rates used for explanation on December 31, 2020 and 2019 (in full amount) are as follows:

Nama Mata Uang / Currency	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
1 Dolar Amerika Serikat (USD) / 1 United States Dollar (USD)	14.105	13.901
1 Euro Eropa (EUR) / 1 Euro (EUR)	17.330	15.589
1 Dolar Singapura (SGD) / 1 Singaporean Dollar (SGD)	10.644	10.321

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

JENIS DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal dan Penyertaan Modal yang terealisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.980,67 miliar. Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal dan penyertaan modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investment in the form of capital goods (*Capital Expenditure*) is an activity of spending funds that is used to buy a number of fixed assets or add value to fixed assets which are expected to provide future benefits.

TYPES AND INVESTMENT VALUE OF CAPITAL GOODS

Realized Capital Goods Investment and Equity Participation in 2020 amounted to Rp2,980.67 billion. The details per type related to the investment value of capital goods and equity participation are described in the table as follows:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Type and Value of Capital Goods Investment (in million Rupiah)

Jenis / Type	Nilai Tahun 2020 / Value in 2020	Nilai Tahun 2019 / Value in 2019
Perusahaan Induk / Parent Company		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan / Port Buildings	1.945.638	1.879.754
Kapal / Vessels	14.036	3.638
Alat Fasilitas Pelabuhan / Port Equipment	28.695	56.442
Instalasi Fasilitas Pelabuhan / Port Installation	67.829	49.558
Tanah / Land	5.331	13.887
Jalan dan Bangunan / Roads and Buildings	98.632	94.023
Peralatan / Equipment	57.307	81.322
Kendaraan / Vehicles	1.351	2.231
Emplasemen / Emplacement	966	18.561
Investasi Non Fisik / Non-physical Investment	76.854	115.459
Kapitalisasi Bunga / Interest Capitalization	267.950	193.856
Investasi Perusahaan Induk / Parent Company's Investment	2.564.587	2.508.732
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiaries' Investment	366.882	934.832
Total Investasi Konsolidasi / Total Consolidated Investment	2.931.468	3.443.563
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Equity Participation of Parent Company	49.200	-
Total Investasi + Penyertaan Modal / Total Investment + Equity Participation	2.980.668	3.443.563



Bangunan Fasilitas Pelabuhan

Realisasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.945,64 miliar atau mencapai 107,35 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp1.812,41 miliar. Serapan investasi ini dipengaruhi oleh:

1. Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat *Phase 1* terealisasi sebesar Rp988,21 miliar atau terserap 97,92 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1.009,23 miliar. Realisasi tersebut di antaranya adalah untuk pembangunan fisik terminal;
2. Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I terealisasi sebesar Rp606,49 miliar atau terserap 134,25 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp451,77 miliar. Tingginya realisasi investasi tersebut antara lain disebabkan oleh pembayaran penyesuaian harga untuk *all items* selain 3 item pekerjaan pemancangan, pengerukan, dan reklamasi pada periode Oktober 2013 s.d Desember 2017, pembayaran atas pekerjaan tambah/kurang dan klaim, serta pembayaran retensi terhadap item Pekerjaan Terkonstruksi yang telah di serahterimakan oleh PT PP (Persero) Tbk kepada IPC;
3. Pengerukan Pendalaman di Kolam Depan Dermaga 001 sampai 004 dan 005 sampai 007 di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp17,11 miliar atau terserap 339,59 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,04 miliar. Pekerjaan dimulai sejak Januari 2020. Saat ini, pekerjaan tersebut telah selesai;
4. Perkuatan Lapangan Ex. Gudang Perca termasuk SID dan Supervisi di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp19,30 miliar atau 462,29 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp4,17 miliar. Pekerjaan dimulai sejak Mei 2019 dengan masa pelaksanaan fisik selama 11 bulan kalender. Saat ini, pekerjaan tersebut telah selesai;
5. SID dan Pemasangan *Pipe Rack* di Dermaga *Jetty* di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur terealisasi sebesar Rp37,63 miliar atau terserap 3.763,64 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Pekerjaan ini dimulai sejak Februari 2020 dan selesai Agustus 2020. Awalnya RKAP 2020 pekerjaan ini direncanakan hanya untuk pekerjaan SID desain, namun dengan adanya kerja sama dengan mitra yaitu PT Asianagro Agung Jaya pada akhir tahun 2019 maka pekerjaan fisik dipercepat pelaksanaannya pada awal tahun 2020 untuk kebutuhan operasional curah cair di Dermaga *Jetty* tersebut;

Port Facilities Building

Realization of Port Facilities Building in 2020 was posted at Rp1,945.64 billion or 107.35 percent of RKAP 2020 at Rp1,812.41 billion. This investment realization was influenced by:

1. The construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase 1, which was realized at Rp988.21 billion or 97.92 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1,009.23 billion. This realization was used, among others, for the physical construction of the terminal;
2. The construction of Kalibaru Utara Terminal Phase 1, which was realized at Rp606.49 billion or 134.25 percent of Revised RKAP 2020 at Rp451.77 billion. The high investment figure was due to, among others, payment of price adjustment for all items other than 3 items of piling, dredging, and reclamation work during October 2013 until December 2017 period, payment of additional work and claims, and payment of retention of Constructed Work handed over by PT PP (Persero) Tbk to IPC;
3. Dredging to deepen Front Ponds from Dock 001 to 004 and from 005 to 007 at Tanjung Priok Port Branch, which was realized at Rp17.11 billion or 339.59 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.04 billion. The work commenced in January 2020 and is currently complete;
4. Strengthening of Former Patchwork Warehouse Yard including SID and Supervision at Tanjung Priok Port Branch, which was realized at Rp19.30 billion or 462.29 percent of Revised RKAP 2020 at Rp4.17 billion. The work commenced in May 2019 with 11 calendar months of physical work implementation. The work is currently complete;
5. SID and Pipe Rack Installation on Jetty Dock at Teluk Bayur Port Branch, which was realized at Rp37.63 billion or 3,763.64 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. The work commenced in February 2020 and finished in August 2020. Based on RKAP 2020, this work initially only covered design SID. Cooperation with partner PT Asianagro Agung Jaya at the end of 2019 accelerated the physical work implementation at the beginning of 2020 for liquid bulk operational needs in the Jetty Dock;

6. Perbaikan Berat Dermaga Beton Umum Pelabuhan Teluk Bayur terealisasi sebesar Rp60,07 miliar atau terserap 115,53 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp52,00 miliar. RKAP 2020 direncanakan hanya untuk pekerjaan SID desain namun dengan adanya percepatan dari proses SID sehingga pekerjaan fisik dimulai dari Mei 2020. Saat ini pekerjaan sedang proses konstruksi dengan progres fisik telah mencapai 80 persen. Serapan yang tinggi disebabkan oleh pengadaan tiang pancang yang merupakan *item* yang paling besar bobotnya dalam pekerjaan ini;
7. Perkuatan dermaga TKS di Pelabuhan Teluk Bayur terealisasi sebesar Rp14,65 miliar atau terserap 292,97 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,00 miliar. Pekerjaan ini telah dimulai konstruksinya sejak Juni 2018 dengan total nilai kontrak sebesar Rp63,41 miliar dan telah mengalami 2 (dua) kali adendum biaya dan waktu karena adanya penambahan *volume* pekerjaan pada item pekerjaan dermaga. Pekerjaan fisik telah selesai pada Mei 2020. Serapan yang tinggi disebabkan oleh sisa pekerjaan yang belum selesai pada tahun 2019;
8. Penyesuaian *Rail Span Gantry Luffing Crane* pada Dermaga C2 dan Penyesuaian elevasi apron dermaga C1 Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp29,88 miliar atau terserap 142,94 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp20,91 miliar. Nilai kontrak pekerjaan fisik yaitu sebesar Rp27,46 miliar. Saat ini pekerjaan sedang proses konstruksi dengan progres fisik sebesar 78 persen;
9. Pembangunan Terminal Curah Cair di Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp14,90 miliar atau terserap 298,05 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,00 miliar. Nilai kontrak pekerjaan yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp16,59 miliar. Saat ini pekerjaan yang berjalan yaitu Pekerjaan Perbaikan Berat *Jetty Eks. PTPN VII* dengan progres fisik sebesar 93 persen.
6. Heavy Repair of General Concrete Dock at Teluk Bayur Port, which was realized at Rp60.07 billion or 115.53 percent of Revised RKAP 2020 at Rp52.00 billion. The RKAP 2020 only planned for design SID work, but the SID process was accelerated so that physical work commenced in May 2020. Currently, the work is in construction process at 80 percent physical progress. The high figure was due to the procurement of piles as item with the largest portion in this work;
7. Strengthening of TKS dock at Teluk Bayur Port, which was realized at Rp14.65 billion or 292.97 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.00 billion. Construction began in June 2018 with total contract value of Rp63.41 billion, with 2 (two) addendums for cost and time due to the addition of work volume in dock work item. Physical work completed in May 2020. The high figure was due to unfinished work in 2019;
8. Adjustment of Rail Span Gantry Luffing Crane in C2 Dock and apron elevation adjustment in C1 Dock at Panjang Port, which was realized at Rp29.88 billion or 142.94 percent of Revised RKAP 2020 at Rp20.91 billion. The contract value of physical work amounted to Rp27.46 billion. Currently, the work is in construction process at 78 percent physical progress;
9. Construction of Liquid Bulk Terminal at Panjang Port, which was realized at Rp14.90 billion or 298.05 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.00 billion. The contract value of ongoing work amounted to Rp16.59 billion. Currently, the ongoing work is the heavy repair of former PTPN VII Jetty at 78 percent physical progress.

Kapal

Realisasi Investasi Kapal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp14,03 miliar atau terserap 39,43 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp35,60 miliar. Serapan investasi yang telah tercapai adalah pekerjaan *Docking* Kapal yang dioperasikan oleh PT JAI Tbk Cabang Pelabuhan Palembang yaitu Kapal Tunda Tanjung Buyut 2 212 dan 1 - 206 terealisasi sebesar Rp5,44 miliar atau terserap 82,40 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp6,60 miliar. Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.

Vessel

Realization of Vessel Investment in 2020 was posted at Rp14.03 billion or 39.43 percent of RKAP 2020 at Rp35.60 billion. The realized investment was Vessel Docking work operated by PT JAI Tbk at Palembang Port Branch. Tanjung Buyut Tugboat 2 212 and 1 – 206 were realized at Rp5.44 billion or 82.40 percent of Revised RKAP 2020 at Rp6.60 billion. The work is currently complete.



Alat Fasilitas Pelabuhan

Realisasi investasi Alat Fasilitas Pelabuhan tahun 2020 sebesar Rp28,70 miliar atau terserap 48,95 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp58,62 miliar. Serapan investasi ini dipengaruhi oleh:

1. Modifikasi *conveyor* A dengan Kapasitas 1 x 1500 Ton/jam lengkap dengan *ship loader* dan fasilitas *stock pile* pendukung di Cabang Pelabuhan Bengkulu terealisasi sebesar Rp11,15 miliar atau terserap 557,76 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp2,00 miliar;
2. Pekerjaan Pengembangan Sistem *Single Truck Identification* (TID) berikut Pengadaan 8 (delapan) unit Jembatan Timbang di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp2,30 miliar atau terserap 76,74 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp3,00 miliar;
3. Pekerjaan *General Overhaul Engine Genset* dan Alat Bongkar Muat milik Cabang Pelabuhan Bengkulu terealisasi sebesar Rp2,89 miliar atau terserap 289,70 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Paket pekerjaan ini yaitu Pekerjaan *General Overhaul On Ground Feeder Conveyor Belt C*, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Case Transmisi* berikut Aksesoris untuk *Wheel Loader 02*, Pekerjaan Penedokan (Pelimbung) *Floating Barge BG Teluk Sepang*, Pekerjaan *General Overhaul Wheel Loader 01*;
4. Modifikasi *Conveyor System* Untuk Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Talang Duku, Jambi terealisasi sebesar Rp2,69 miliar atau terserap 269,16 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Saat ini masih proses pelaksanaan pekerjaan dengan progres fisik sebesar 59 persen;
5. *General Overhaul* Alat Bongkar Muat Milik Cabang Pelabuhan Palembang terealisasi sebesar Rp4,92 miliar atau 96,57 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,10 miliar. Paket pekerjaan ini yaitu Pekerjaan *General Overhaul* Alat Bongkar Muat GJC, RS dan SL, Pekerjaan *General Overhaul Engine* dan Transmisi FOD 3T, Pekerjaan *General Overhaul Head Truck* Terberg TPK dan Hino. Saat ini pekerjaan telah selesai.

Instalasi Fasilitas Pelabuhan

Realisasi investasi Instalasi Fasilitas Pelabuhan tahun 2020 sebesar Rp67,83 miliar atau terserap 97,52 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp69,56 miliar. Realisasi tersebut di antaranya terdapat pada:

Port Facilities Equipment

Realization of Port Facilities Equipment investment in 2020 was posted at Rp28.70 billion or 48.95 percent of RKAP 2020 at Rp58.62 billion. The realized investment was influenced by:

1. Modification of conveyor A with a capacity of 1 x 1500 Ton/hour, complete with ship loader and supporting stock pile facility at Bengkulu Port Branch, which was realized at Rp11.15 billion or 557.76 percent of RKAP 2020 at Rp2.00 billion;
2. Development of Single Truck Identification (TID) System and Procurement of 8 (eight) units of Weighbridge at Tanjung Priok Port Branch, which was realized at Rp2.30 billion or 76.74 percent of Revised RKAP 2020 at Rp3.00 billion;
3. General Overhaul Engine Genset and Loading and Unloading Equipment of Bengkulu Port Branch, which was realized at Rp2.89 billion or 289.70 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. This work includes General Overhaul On Ground Feeder Conveyor Belt C, Procurement and Installation of Transmission Case and Accessories for Wheel Loader 02, Docking of Floating Barge BG Teluk Sepang, and General Overhaul Wheel Loader 01;
4. Modification of Conveyor System for Coal Loading and Unloading at Talang Duku Port, Jambi, which was realized at Rp2.69 billion or 269.16 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. Currently, the work is ongoing at 59 percent physical progress;
5. General Overhaul of Loading and Unloading Equipment of Palembang Port Branch, which was realized at Rp4.92 billion or 96.57 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.10 billion. This work includes General Overhaul of Loading and Unloading Equipment GJC, RS, and SL, General Overhaul Engine and Transmission FOD 3T, and General Overhaul Head Truck Terberg TPK and Hino. The work is currently complete.

Port Facilities Installation

Realization of Port Facilities Installation investment in 2020 was posted at Rp67.83 billion or 97.52 percent of RKAP 2020 at Rp69.56 billion. The investment was realized through:

1. Pengadaan dan Pemasangan *Smart Lighting System* di Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp3,08 miliar atau terserap 100 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp3,08 miliar. Pekerjaan telah selesai dengan durasi pelaksanaan selama 5 bulan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3,08 miliar;
 2. Pengadaan dan Pemasangan Panel Distribusi dan Kabel *Feeder* untuk Alat B/M Dermaga dan Lapangan 300 s/d 303 Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp10,93 miliar atau terserap 96,22 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp11,36 miliar. Pekerjaan ini telah selesai di bulan Desember 2020;
 3. Pekerjaan Pengadaan dan Pembangunan Instalasi *Hydrant* dan *Hydrant Pilar* Area Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp10,11 miliar atau terserap 112,38 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp9,00 miliar. Saat ini pekerjaan fisik telah selesai;
 4. Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah Area Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp6,99 miliar atau terserap 88,25 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp7,92 miliar;
 5. Peningkatan infrastruktur IT LINI II Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp12,04 miliar atau terserap 401,36 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp3,00 miliar. Pekerjaan masih proses konstruksi dengan progres fisik sebesar 84 persen dari nilai kontrak sebesar Rp14,38 miliar;
 6. Pengadaan *Auto Gate System* dan *Network Enhancement* di Pelabuhan Banten terealisasi sebesar Rp8,29 miliar atau terserap 165,76 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,00 miliar. Pekerjaan ini masih proses pelaksanaan dengan progres fisik sebesar 84 persen;
 7. Pekerjaan Penambahan Instalasi Air Bersih Di Dermaga Pelita Cabang Pelabuhan Cirebon terealisasi sebesar Rp1,09 miliar atau terserap 216,57 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp504,47 juta. Pekerjaan ini telah selesai;
 8. Pekerjaan Penerangan Jalan Dari Dermaga Nusantara Ke Dermaga Samudera Berikut Dengan Aksesorisnya Cabang Pelabuhan Bengkulu terealisasi sebesar Rp3,01 miliar atau terserap 301,30 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Pekerjaan ini telah selesai.
1. Procurement and Installation of Smart Lighting System at Tanjung Priok Port Branch Building, which was realized at Rp3.08 billion or 100 percent of Revised RKAP 2020 at Rp3.08 billion. The work is complete with implementation duration of 5 months and work value amounting to Rp3.08 billion;
 2. Procurement and Installation of Distribution Panel and Feeder Cable for Loading and Unloading Equipment in Dock and Yard 300 to 303 at Tanjung Priok Port, which was realized at Rp10.93 billion or 96.22 percent of Revised RKAP 2020 at Rp11.36 billion. The work was completed in December 2020;
 3. Procurement and Installation of Hydrant and Hydrant Pillar Area at Panjang Port, which was realized at Rp10.11 billion or 112.38 percent of Revised RKAP 2020 at Rp9.00 billion. The physical work is currently complete;
 4. Arrangement and Repair of Medium Voltage and Low Voltage Electricity Networks at Panjang Port Area, which was realized at Rp6.99 billion or 88.25 percent of Revised RKAP 2020 at Rp7.92 billion;
 5. Improvement of IT infrastructure LINI II at Panjang Port, which was realized at Rp12.04 billion or 401.36 percent of RKAP 2020 at Rp3.00 billion. The work is in construction process at 84 percent physical progress with contract value amounting to Rp14.38 billion;
 6. Procurement of Auto Gate System and Network Enhancement at Banten Port, which was realized at Rp8.29 billion or 165.76 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.00 billion. The work is ongoing at 84 percent physical progress;
 7. Addition of Clean Water Installation in Pelita Dock at Cirebon Port Branch, which was realized at Rp1.09 billion or 216.57 percent of Revised RKAP 2020 at Rp504.47 million. The work is currently complete;
 8. Street Lighting Work from Nusantara Dock to Samudera Dock along with Accessories at Bengkulu Port Branch, which was realized at Rp3.01 billion or 301.30 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. The work is currently complete.



Tanah

Realisasi investasi tanah tahun 2020 sebesar Rp5,33 miliar atau terserap 44,70 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp11,93 miliar. Realisasi tersebut di antaranya terdapat pada:

1. Pembebasan Lahan di Belakang Kantor Cabang Pelabuhan Teluk Bayur termasuk *Appraisal* (Tahap II) terealisasi sebesar Rp3,40 miliar atau terserap 340,26 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Sampai dengan saat ini progres pekerjaan sedang dalam tahapan pembebasan lahan dan perencanaan untuk bangunan pengganti;
2. Pembebasan Lahan HPL Di Pelabuhan Teluk Bayur Termasuk *Appraisal* (Tahap III) terealisasi sebesar Rp1,51 miliar atau terserap 151,35 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan jasa konsultasi pembebasan lahan di Jalan Belawan (Tahap III). Saat ini pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan;
3. Pembebasan lahan Sungai Lais yang terealisasi sebesar Rp336,66 juta atau terserap 336,67 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp100 juta. Pekerjaan ini meliputi jasa advokat pembuatan kajian hukum pengosongan lahan di Sungai Lais dan pekerjaan jasa penilaian harga (*appraisal*) atas ganti rugi tanah tumbuh di area pengosongan lahan.

Jalan dan Bangunan

Realisasi investasi Jalan dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp98,63 miliar atau terserap 65,25 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp151,17 miliar. Realisasi tersebut di antaranya terdapat pada:

1. Renovasi berat Gedung Cabang sebagai *Gallery* IPC di Cabang Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp4,12 miliar atau terserap 392,44 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,05 miliar. Pekerjaan ini telah selesai dan merupakan pekerjaan melimpah dari tahun 2016;
2. Penataan Pagar dan Jaringan Kabel serta Perbaikan Jalan *Inner Road* di Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp11,33 miliar atau terserap 247,60 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp4,57 miliar. Saat ini pekerjaan ini telah selesai;
3. Penataan Pos Masuk dan Area Perkantoran IPC di Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp9,90 miliar atau terserap 147,13 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp6,73 miliar. Saat ini pekerjaan telah selesai;
4. *Re-layout landscape area* Kantor Cabang Pelabuhan Panjang terealisasi sebesar Rp7,37 miliar atau terserap 81,66 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp9,02 miliar. Saat ini masih proses pelaksanaan konstruksi dengan progres fisik sebesar 97 persen;

Land

Realization of land investment in 2020 was posted at Rp5.33 billion or 44,70 percent of RKAP 2020 at Rp11.93 billion. The investment was realized through:

1. Acquisition of land behind Teluk Bayur Port Branch Office, including *Appraisal* (Phase II), which was realized at Rp3.40 billion or 340.26 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. Currently, the work is in the stage of land acquisition and planning for replacement building;
2. HPL land acquisition at Teluk Bayur Port, including *Appraisal* (Phase III), which was realized at Rp1.51 billion or 151.35 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.00 billion. This work includes consultation services for the acquisition of land on Jalan Belawan (Phase III). The work is currently on progress;
3. Acquisition of land at Sungai Lais, which was realized at Rp336.66 million or 336.67 percent of Revised RKAP 2020 at Rp100 million. This work includes advocate services for legal study of land clearance at Sungai Lais and price appraisal service for compensation of growing land in the land clearance area.

Roads and Buildings

Realization of Roads and Buildings investment in 2020 was posted at Rp98.63 billion or 65.25 percent of RKAP 2020 at Rp151.17 billion. The investment was realized through:

1. Heavy renovation of Branch Building as IPC *Gallery* at Tanjung Priok Branch, which was realized at Rp4.12 billion or 392.44 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.05 billion. The work is currently complete and was a carry-over work from 2016;
2. Fence and Cable Network arrangement and Inner Road repair at Tanjung Priok Port, which was realized at Rp11.33 billion or 247.60 percent of Revised RKAP 2020 at Rp4.57 billion. The work is currently complete;
3. Arrangement of Entry Posts and IPC Office Area at Tanjung Priok Port, which was realized at Rp9.90 billion or 147.13 percent of Revised RKAP 2020 at Rp6.73 billion. The work is currently complete;
4. *Re-layout of landscape* of Panjang Port Branch Office area, which was realized at Rp7.37 billion or 81.66 percent of Revised RKAP 2020 at Rp9.02 billion. Currently, the work is in construction process at 97 percent physical progress;

5. Pembangunan Gedung Pengganti Kantor KLP di Jalan Husein Cabang Pelabuhan Pontianak berikut SID dan Supervisi terealisasi sebesar Rp2,28 miliar atau terserap 456,77 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp500 juta;
6. Pembangunan Gedung Parkir Di Halaman Kantor Cabang Pelabuhan Pontianak terealisasi sebesar Rp3,28 miliar atau terserap 91,11 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp3,60 miliar. Saat ini sedang proses pekerjaan konstruksi dengan progres fisik sebesar 81 persen;
7. Penataan *Main Gate* Cabang Banten terealisasi sebesar Rp2,88 miliar atau terserap 57,53 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,00 miliar. Saat ini sedang proses pekerjaan konstruksi;
8. Pembangunan *Gate Multipurpose* dan Pemasangan *Autogate Pass* di Pelabuhan Talang Duku, Jambi terealisasi sebesar Rp1,77 miliar atau terserap 177,52 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,00 miliar;
9. Pembangunan *Gate* Utama dan Pagar Batas Wilayah Pelabuhan Bengkulu terealisasi sebesar Rp5,03 miliar atau terserap 1.007,17 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp500 juta. Serapan di tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan RKAP 2020 karena diasumsikan serapan pada tahun 2020 hanya untuk konsultan SID;
10. Perluasan Masjid Al Ikhlas Kantor Pusat tahun 2020 terealisasi sebesar Rp6,54 miliar atau terserap 92,12 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp7,09 miliar. Saat ini pekerjaan telah selesai;
11. *Upgrade* Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi terealisasi sebesar Rp7,57 miliar atau terserap 112,61 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp6,72 miliar. Saat ini masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan progres fisik sebesar 65 persen.

Peralatan

Realisasi Investasi Peralatan tahun 2020 sebesar Rp57,31 miliar atau 58,69 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp97,64 miliar. Realisasi tersebut di antaranya terdapat pada:

1. Pengembangan Infrastruktur *Dashboard* di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp13,06 miliar atau terserap 63,12 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp20,71 miliar. Pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Implementasi *Visualisasi Dashboard Business Intelligence & Analytics* di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Server* Infrastruktur IT *Oracle DB Disaster Recovery Center*, dan Pengadaan Perangkat *Server* Infrastruktur IT *Virtualisasi Oracle DB Data Center*;

Equipment

Realization of Equipment investment in 2020 was posted at Rp57.31 billion or 58.69 percent of RKAP 2020 at Rp97.64 billion. The investment was realized through:

1. Development of Dashboard Infrastructure at IPC Head Office, which was realized at Rp13.06 billion or 63.12 percent of Revised RKAP 2020 at Rp20.71 billion. This work includes Implementation of Dashboard Business Intelligence & Analytics Visualization at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Procurement of IT Infrastructure Server Equipment Oracle DB Disaster Recovery Center, and Procurement of IT Infrastructure Server Equipment Oracle DB Data Center Virtualization;



2. Pengembangan Perangkat *Remote Crane Management & Monitoring System* Tahap II di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp16,17 miliar atau terserap 80,88 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp20,00 miliar. Progres pekerjaan saat ini sebesar 70 persen dan masih berlanjut di tahun 2021;
 3. Implementasi Efisiensi Energi di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp2,73 miliar atau terserap 260,34 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,05 miliar. Saat ini masih proses pelaksanaan pekerjaan dengan progres fisik sebesar 50 persen;
 4. Pengadaan 1 (satu) Unit Alat *Survey Echosounder Multibeam* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp2,48 miliar atau terserap 79,07 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp3,15 miliar;
 5. Pengadaan 2 (dua) Unit Indikator Lingkungan *Real Time* di Cabang Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp1,85 miliar atau terserap 206 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp900 juta;
 6. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Guna Mendukung Kegiatan Operasional Pelabuhan Teluk Bayur terealisasi sebesar Rp4,04 miliar atau terserap 115,59 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp3,50 miliar. Pekerjaan ini telah selesai dan dikerjakan oleh PT ILCS.
2. Development of Remote Crane Management & Monitoring System Equipment Phase II at IPC Head Office, which was realized at Rp16.17 billion or 80.88 percent of Revised RKAP 2020 at Rp20.00 billion. The work is currently at 70 percent progress and will continue in 2021;
 3. Energy Efficiency Implementation at IPC Head Office, which was realized at Rp2.73 billion or 260.34 percent of Revised RKAP 2020 at Rp1.05 billion. The work is currently ongoing at 50 percent physical progress;
 4. Procurement of 1 (one) unit of Echosounder Multibeam Survey Equipment at Tanjung Priok Port Branch, which was realized at Rp2.48 billion or 79.07 percent of Revised RKAP 2020 at Rp3.15 billion;
 5. Procurement of 2 (two) units of Real Time Environmental Indicator at Tanjung Priok Port Branch, which was realized at Rp1.85 billion or 206 percent of Revised RKAP 2020 at Rp900 million;
 6. Development of Information Technology Infrastructure to support operational activities at Teluk Bayur Port Branch, which was realized at Rp4.04 billion or 115.59 percent of Revised RKAP 2020 at Rp3.50 billion. This work was completed by PT ILCS.

Kendaraan

Realisasi Investasi Kendaraan tahun 2020 sebesar Rp1,35 miliar atau 64,34 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp2,10 miliar. Realisasi tersebut yaitu Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Cabang Pelabuhan Pangkal Balam terealisasi sebesar Rp1,35 miliar atau terserap 64,34 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp2,10 miliar. Pekerjaan ini telah selesai.

Vehicle

Realization of Vehicle investment in 2020 was posted at Rp1.35 billion or 64.34 percent of RKAP 2020 at Rp2.10 billion. The investment was realized through the procurement of fire trucks at Pangkal Balam Port Branch, which was realized at Rp1.35 billion or 64.34 percent of RKAP 2020 at Rp2.10 billion. This work is currently complete.

Emplasemen

Realisasi investasi Emplasemen tahun 2020 terealisasi sebesar Rp966 juta atau terserap 24,94 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp3,87 miliar. Realisasi tersebut di antaranya terdapat pada:

1. Pekerjaan Pemagaran Batas Lahan di Pelabuhan Kawasan Cabang Pelabuhan Pontianak terealisasi sebesar Rp852,37 juta atau terserap 89,30 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp954,54 juta. Saat ini sedang proses pelaksanaan dengan progres fisik sebesar 49 persen dan ditargetkan tahun 2021 selesai;
2. Pembangunan Fasilitas (pagar, sistem *hydran*, rambu dan marka) untuk memenuhi Sertifikasi *Statement of Compliance of Port Facility* (SoCPF) di Cabang Pelabuhan Pangkal Balam terealisasi sebesar Rp113,18 juta atau terserap 22,64 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp500 juta. Pekerjaan yang sudah selesai yaitu Pekerjaan Pembaruan Sertifikasi SoCPF.

Emplacement

Realization of Emplacement investment in 2020 was posted at Rp966 million or 24.94 percent of RKAP 2020 at Rp3.87 billion. The investment was realized through:

1. Fencing work around port area at Pontianak Port Branch, which was realized at Rp852.37 million or 89.30 percent of RKAP 2020 at Rp954.54 million. This work is currently ongoing at 49 percent physical progress and targeted to complete in 2021;
2. Construction of facilities (fence, hydrant system, signs, and markings) to meet Statement of Compliance of Port Facility (SoCPF) Certification at Pangkal Balam Port Branch, which was realized at Rp113.18 million or 22.64 percent of Revised RKAP 2020 at Rp500 million. The work that is already complete is the Update of SoCPF Certification.

Investasi Non Fisik

Realisasi Investasi Non Fisik tahun 2020 sebesar Rp76,85 miliar atau 88,56 persen dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp86,78 miliar. Realisasi tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Pendukung *Back Office* di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp30,34 miliar atau terserap 85,83 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp35,35 miliar. Saat ini pekerjaan masih berjalan;
2. Pengembangan dan Implementasi ERP untuk Bidang Keuangan dan Personalia di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp2,15 miliar atau terserap 100 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp2,15 miliar. Pekerjaan ini telah selesai;
3. Implementasi *Enterprise Service Bus* di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp5,93 miliar atau terserap 69,12 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp8,58 miliar;
4. Pengembangan Sistem *Dashboard* & Penunjang Operasional di Kantor Pusat IPC sebesar Rp4,37 miliar atau terserap 77,11 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp5,67 miliar;
5. Pengembangan Sistem Operasional Terminal di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp11,51 miliar atau terserap 101,46 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp11,34 miliar;
6. Pembangunan Sistem Operasi Pelayanan Pemanduan & Penundaan Kapal di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp5,03 miliar atau terserap 139,86 persen dari Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp3,59 miliar;
7. Pembangunan Digitalisasi Terminal di Kantor Pusat IPC terealisasi sebesar Rp16,09 miliar atau terserap 91,86 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar Rp17,53 miliar.

Investasi Anak Perusahaan

Realisasi Investasi Anak Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp366,88 miliar atau terserap 39,78 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp922,39 miliar. Serapan terbesar terdapat pada PT PPI yang mencapai Rp197,82 miliar atau terserap 76,44 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp258,80 miliar yang merupakan progres dari pembangunan PT Menara Maritim Indonesia.

Investasi Penyertaan Modal Perusahaan Induk (PMPI)

Akuisisi 49 persen saham PT Multimedia Nusantara pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Direksi (BAKD) Nomor KU.02.08/11/5/1/PCB/UT/PI.II-20 tanggal 11 Mei 2020 perihal Rencana akuisisi 49 persen saham PT Multimedia Nusantara pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dan Penganggaran Akuisisi pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Hal tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Nomor S.589/MBU/08/2020

Non-Physical Investment

Realization of Non-Physical Investment in 2020 was posted at Rp76.85 billion or 88.56 percent of RKAP 2020 at Rp86.78 billion. The investment was realized through:

1. Development of Back Office Supporting System at IPC Head Office, which was realized at Rp30.34 billion or 85.83 percent of RKAP 2020 at Rp35.35 billion. This work is currently ongoing;
2. Development and Implementation of ERP for Finance and Personnel Departments at IPC Head Office, which was realized at Rp2.15 billion or 100 percent of Revised RKAP 2020 at Rp2.15 billion. This work is currently complete;
3. Implementation of Enterprise Service Bus at IPC Head Office, which was realized at Rp5.93 billion or 69.12 percent of Revised RKAP 2020 at Rp8.58 billion;
4. Development of Dashboard & Operations Support System at IPC Head Office, which was realized at Rp4.37 billion or 77.11 percent of Revised RKAP 2020 at Rp5.67 billion;
5. Development of Terminal Operations System at IPC Head Office, which was realized at Rp11.51 billion or 101.46 percent of Revised RKAP 2020 at Rp11.34 billion;
6. Development of Vessel Pilotage & Towage Service Operations System at IPC Head Office, which was realized at Rp5.03 billion or 139.86 percent of Revised RKAP 2020 at Rp3.59 billion;
7. Development of Terminal Digitalization at IPC Head Office, which was realized at Rp16.09 billion or 91.86 percent of Revised RKAP 2020 at Rp17.53 billion;

Subsidiaries Investment

Realization of Subsidiaries Investment in 2020 was posted at Rp366.88 billion or 39.78 percent of RKAP 2020 at Rp922.39 billion. The largest investment was made in PT PPI which reached Rp197.82 billion or 76.44 percent of RKAP 2020 at Rp258.80 billion for the construction progress of PT Menara Maritim Indonesia.

Parent Company Capital Investment (PMPI)

Acquisition of 49 percent of shares owned by PT Multimedia Nusantara in PT Integrasi Logistik Cipta Solusi based on Minutes of Board of Directors Agreement (BAKD) No. KU.02.08/11/5/1/PCB/UT/PI.II-20 dated May 11, 2020 regarding the plan of acquisition of 49 percent of shares owned by PT Multimedia Nusantara in PT Integrasi Logistik Cipta Solusi and the acquisition budget in Company Work Plan and Budget of 2020. This has been approved by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) through Letter



tanggal 24 Agustus 2020 perihal Persetujuan Akuisisi saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS. Akuisisi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai akuisisi sebesar Rp49,20 miliar.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategi dan juga inisiatif strategis yang telah disusun untuk tahun 2020, IPC harus melakukan kegiatan investasi guna menutup kesenjangan kapasitas dan kapabilitas IPC antara kondisi eksisting dengan aspirasi yang ingin dicapai IPC. Besaran investasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga macam investasi yaitu investasi terkait inisiatif strategis, investasi rutin (*business as usual*), dan investasi proyek strategis Perseroan. Investasi rutin bertujuan memenuhi *minimal requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif.

IPC akan terus melanjutkan program investasi yang sudah berjalan, seperti pembangunan terminal. Investasi yang ada juga akan diprioritaskan pada pembangunan Proyek Strategis Perseroan yang meliputi Pembangunan Terminal Kalibaru/Newpriok, Terminal Tanjungpura/Kijing, Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru, dan Rekonfigurasi Cabang Pelabuhan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

INVESTASI

IPC melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan. Informasi mengenai investasi jangka pendek dan jangka panjang IPC disajikan sebagai berikut.

No. S.589/MBU/08/2020 dated August 24, 2020 regarding approval of acquisition of shares owned by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS. The acquisition was carried out on October 9, 2020 with a value of Rp49.20 billion.

PURPOSES OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Based on the strategic direction and strategic initiatives formulated for 2020, IPC must carry out investment activities to close the IPC's capacity and capability gap between the existing conditions and the aspirations of IPC. The amount of investment required consisted of three types of investment, namely investments related to strategic initiatives, routine investment (*business as usual*), and investment in the Company's strategic projects. Routine investment aims to meet minimum requirements, improve work security and safety, and support administrative objectives.

IPC will continue its existing investment programs, such as the construction of terminal. Investments will also be prioritized for the development of the Company's Strategic Projects, which include the construction of Kalibaru/Newpriok Terminal, Tanjungpura/Kijing Terminal, Kalibaru Timur Access Road, and Reconfiguration of Port Branches.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTMENT

IPC makes short and long term investments to increase the profitability and financial performance of the Company. Information regarding short-term and long-term investments in IPC is presented as follows.

Tabel Investasi per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Investment as of December 31, 2019-2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Investasi Jangka Pendek / Short-term Investments				
Deposito Berjangka / Time Deposits				
Rupiah / Rupiah				
Pihak Berelasi / Related Parties	-	104.642	(104.642)	(100,00%)
Dolar AS / US Dollar				
Pihak Berelasi / Related Parties	10.946.891	2.154.655	8.792.236	408,06%
Jumlah Deposito Berjangka / Total Time Deposits	10.946.891	2.259.297	8.687.593	384,53%
Efek yang Diperdagangkan / Marketable Securities	143.989	337.404	(193.415)	(57,32%)
Jumlah Investasi Jangka Pendek / Total Short-term Investments	11.090.879	2.596.701	8.494.178	327,11%

Tabel Investasi per 31 Desember 2019 – 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Investment as of December 31, 2019-2020 (in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Investasi Jangka Panjang / Long-term Investment				
Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates	2.121.040	2.757.291	(636.251)	(23,08%)
Investasi pada Penyertaan Saham / Investment in share of stocks	138.912	50.906	88.006	172,88%
Investasi pada Surat Utang / Investment in bonds	516.441	402.826	113.615	28,20%
Jumlah Investasi Jangka Panjang / Total Long-term Investment	2.776.394	3.211.024	(434.630)	(13,54%)
Jumlah Investasi / Total Investment	13.867.273	5.807.725	8.059.548	138,77%

Sampai dengan akhir tahun 2020, IPC memiliki Jumlah Investasi sebesar Rp13.867,27 miliar, naik Rp8.059,55 miliar atau 138,77 persen dibandingkan nilai pada akhir tahun 2019 yang sebesar Rp5.807,73 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Investasi Jangka Panjang yang terutama disebabkan oleh kenaikan Deposito Berjangka dalam mata uang Dolar AS sebesar Rp8.792,25 miliar atau 408,06 persen. Dari segi komposisi, jumlah Investasi sebesar Rp13.867,27 miliar memberikan kontribusi sebesar 26,83 persen terhadap jumlah Aset sampai dengan akhir tahun 2020, komposisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan komposisi pada tahun 2019 sebesar 11,16 persen.

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Berikut adalah rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

As of the end of 2020, total investment of IPC amounted to Rp13,867.27 billion, increased by Rp8,059.55 billion or 138.77 percent compared to that of 2019 at Rp5,807.73 billion. Such increase originated from an increase in Long-term Investments which was mainly due to an increase in Time Deposits in US dollars by Rp8,792.25 billion or 408.06 percent. In terms of composition, total investment amounted to Rp13,867.27 billion, contributed 26.83 percent to total assets by the end of 2020, this composition has increased compared to the composition in 2019 at 11.16 percent.

Time deposits are deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and are not used as collateral.

Below is a breakdown of the annual interest rates for time deposits based on currency types as follows:

Uraian / Description	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended on December 31	
	2020	2019
Rupiah / Rupiah	3,50% - 7,30%	5,00% - 9,00%
Dolar AS / US Dollar	0,75% - 3,30%	1,35% - 3,55%

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham jangka pendek dan reksadana pasar uang.

Marketable securities are financial instruments in the form of short-term stocks and money market mutual funds.

EKSPANSI

Selama tahun 2020, IPC tidak melakukan kegiatan ekspansi.

EXPANSION

In 2020, IPC did not conduct any expansion activities.



DIVESTASI

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan melakukan penjualan saham PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) kepada PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 67 persen, sehingga kepemilikan saham Perseroan di PT RSP menjadi sebesar 32,88 persen.

AKUISISI

IPC memiliki informasi material mengenai Akuisisi PT ILCS dalam rangka Penggabungan Usaha, berikut adalah progres proses akuisisi tersebut sepanjang tahun 2020:

- Telah dilakukan kesepakatan nilai atas hasil valuasi dengan PT Telkom Metra dalam rencana akuisisi PT ILCS;
- Sesuai hasil negosiasi telah disepakati dengan PT Telkom Metra nilai akuisisi PT ILCS atas saham PT Telkom Metra;
- Telah terbit Surat tanggapan Dewan Komisaris nomor 39/DK/PI.II/VII-2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS;
- Telah terbit Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-589/MBU/08//2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Persetujuan Akuisisi Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS;
- Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PPJB") antara Telkom Metra dan IPC secara sirkuler;
- Telah selesai dilakukan *Due Diligence* oleh Konsultan SKHA;
- Telah terbit Akta Jual B A Nomor: 6 Tanggal 9 Oktober 2020 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PPJB") antara Telkom Metra dan IPC;
- Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi tentang Penetapan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sebagai IT *Solution Provider* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

Selama tahun 2020, IPC tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal.

DIVESTMENT

In August 2020, the Company sold the shares of PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) to PT Pertamina Bina Medika IHC by 67 percent, therefore the Company's share ownership in PT RSP became 32.88 percent.

ACQUISITION

IPC has material information regarding the Acquisition of PT ILCS for Business Merger, the following is the progress of the acquisition process throughout 2020:

- An agreement has been made on the value of the valuation result with PT Telkom Metra in the planned acquisition of PT ILCS;
- In accordance with the results of the negotiations with PT Telkom Metra, the acquisition value of PT ILCS of the shares of PT Telkom Metra has been agreed;
- The response letter of the Board of Commissioners No. 39/DK/PI.II/VII-2020 has been published on July 1, 2020 regarding the Response to the Planned Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's Shares at PT ILCS;
- Letter of the Minister for State-Owned Enterprises No. S-589/MBU/08/2020 dated August 24, 2020 regarding the Approval of the Share Acquisition of PT Multimedia Nusantara at PT ILCS has been issued;
- The signing of the Share Purchase Agreement ("PPJB") between Telkom Metra and IPC in a circular manner;
- Has completed Due Diligence by the SKHA Consultant;
- A Deed of Sale B A No: 6 dated October 9, 2020 has been issued in accordance with the Share Sale and Purchase Agreement ("PPJB") between Telkom Metra and IPC;
- Signing of a Memorandum of Understanding between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi on the Establishment of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi as an IT Solution Provider in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment.

CAPITAL AND DEBT RESTRUCTURING

In 2020, IPC did not conduct any capital and debt restructuring.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Perbandingan target dan realisasi tahun 2020 berupa Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Pemasaran dan Aspek Investasi diuraikan sebagai berikut.

ASPEK KEUANGAN

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2020

The comparison of targets and realization in 2020 in the form of financial aspects, operational aspects, marketing aspects, and investment aspects are described as follows.

FINANCIAL ASPECT

Comparison of Target and Realization of Consolidated Statements of Financial Position

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Comparison between Target and Realization in Consolidated Statements of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020 / 2020 RKAP	Realisasi 2020 / 2020 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
ASET / ASSETS			
Aset Lancar / Current Assets			
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	17.451.745	5.298.274	30,36%
Investasi Jangka Pendek / Short-term Investment	421.227	11.090.879	2.632,99%
Piutang Usaha – Neto / Trade Receivables – Net	979.755	621.235	63,41%
Piutang Lain-lain – Neto / Other Receivables – Net	1.099.286	1.191.805	108,42%
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka / Advances and Prepaid Expenses	184.344	93.350	50,64%
Pendapatan yang Masih Akan Diterima / Accrued Revenues	348.448	278.739	79,99%
Persediaan / Inventories	70.199	55.314	78,80%
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Taxes	890.769	524.069	58,83%
Aset Lancar Lainnya / Other Current Assets	-	9.823	-
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	21.445.773	19.163.488	89,36%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets			
Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates	3.396.071	2.776.394	81,75%
Properti Investasi – Neto / Investment Property – Net	337.942	337.942	100,00%
Aset Tetap – Neto / Fixed Assets – Net	14.383.277	14.190.174	98,66%
Aset Tetap Sewaan – Neto / Leased Fixed Assets – Net	254.330	162.801	64,01%
Aset Pengelolaan Bersama – Neto / Joint Operation Assets – Net	447.241	434.117	97,07%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	21.891	158.035	721,92%
Aset Tak Berwujud – Neto / Intangible Assets – Net	12.106.829	11.863.511	97,99%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak / Estimated Claims for Tax Refund	782.780	1.052.310	134,43%
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	1.309.842	1.545.880	118,02%
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	33.040.202	32.521.163	98,43%
Jumlah Aset / Total Assets	54.485.976	51.684.651	94,86%
LIABILITAS / LIABILITIES			
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities			
Utang Bank Jangka Pendek / Short-term Bank Loans	1.418.472	1.581.921	111,52%
Utang Usaha / Trade Payables	1.114.055	957.176	85,92%
Pendapatan Diterima di muka - Jangka Pendek / Short-term Unearned Revenues	453.015	357.031	78,81%
Utang Pajak / Taxes Payable	2.044.251	1.765.278	86,35%
Beban Akrua / Accrued Expenses	89.700	10.836	12,08%
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current Maturities of Long-term Liabilities	12.519	60.214	480,98%
Liabilitas Hak Guna Jangka Pendek / Current Right-of-use Liabilities	449.131	304.020	67,69%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other Current Liabilities	5.581.142	5.040.477	90,31%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	11.000.000	10.000.000	90,91%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities			
Utang Bank Jangka Panjang / Long-term Bank Loans	22.964.589	22.333.703	97,25%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Comparison between Target and Realization in Consolidated Statements of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020 / 2020 RKAP	Realisasi 2020 / 2020 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Utang Obligasi / Bonds Payable	242.831	242.158	99,72%
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-term Liabilities – net of current maturities	4.084.804	4.060.901	99,41%
Pendapatan Diterima di Muka - Jangka Panjang / Long-term Unearned Revenue	193.023	112.677	58,38%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang / Long-term Lease Liabilities	2.093.200	2.764.262	132,06%
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefit Liabilities	265.481	43.508	16,39%
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities	30.843.928	29.557.209	95,83%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	36.425.070	34.597.686	94,98%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities			
EKUITAS / EQUITY	1.444.029	1.444.029	100,00%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	26.826	26.826	100,00%
Modal Saham / Share Capital	(214.782)	(205.005)	95,45%
Modal Donasi / Donated Capital			
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	15.021.035	15.021.059	100,00%
Saldo Laba / Retained Earnings	526.855	907.447	172,24%
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	(126.418)	(1.119.690)	885,71%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	16.677.545	16.074.667	96,39%
Pendapatan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	1.383.361	1.012.298	73,18%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Neto / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity – Net	18.060.906	17.086.965	94,61%
Kepentingan Nonpengendali / Non-Controlling Interest	1.383.361	1.012.298	73,18%
Ekuitas – Neto / Equity - Net	18.060.906	17.086.965	94,61%

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas realisasi jumlah Aset di tahun 2020 tercatat sebesar Rp51.684,65 miliar atau mencapai 94,86 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp54.485,98 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya investasi pada entitas asosiasi di PT JICT, tidak tercapainya progres investasi tahun 2020, dan penurunan saldo kas setara kas karena belum terealisasinya pinjaman bank pada PT PPI.

Realisasi jumlah Liabilitas di tahun 2020 tercatat sebesar Rp34.597,69 miliar atau mencapai 94,98 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp36.425,07 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi hutang obligasi karena selisih kurs di mana RKAP 2020 menggunakan asumsi kurs Rp14.800 per Dolar AS sementara kurs pada 31 Desember 2020 Rp14.105 per Dolar AS dan belum terealisasinya pinjaman bank sebesar Rp1 triliun di PT PPI.

Realisasi jumlah Ekuitas di tahun 2020 tercatat sebesar Rp17.086,97 miliar atau mencapai 94,61 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp18.060,91 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan komprehensif lainnya di mana terdapat realisasi *Past Service Liabilities* (PSL) yang tidak diperhitungkan pada RKAP 2020.

Based on the detailed data in the table above, the realization of total assets in 2020 was recorded at Rp51,684.65 billion or 94.86 percent of the 2020 RKAP at Rp54,485.98 billion. This was caused by low investment in PT JICT associate, unachieved investment progress in 2020, and decrease in cash and cash equivalents due to unrealized bank loans to PT PPI.

Realization of total Liabilities in 2020 was recorded at Rp34,597.69 billion or 94.98 percent of the 2020 RKAP at Rp36,425.07 billion. This was caused by low realization of bond debts due to exchange rate difference, where the 2020 RKAP used exchange rate assumption at Rp14,800 per US Dollar while the exchange rate on December 31, 2020 was Rp14,105 per US Dollar, as well as unrealized bank loans amounting to Rp1 trillion in PT PPI.

Realization of total Equity in 2020 was recorded at Rp17,086.97 billion or 94.61 percent of the 2020 RKAP at Rp18,060.91 billion. This was due to other comprehensive income, in which the realization of Past Service Liabilities (PSL) was not calculated in 2020 RKAP.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Comparison between Target and Realization of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /

Table of Comparison between Target and Realization of Consolidated Statements of Profit or Loss and Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020 / 2020 RKAP	Realisasi 2020 / 2020 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	10.316.572	10.453.610	101,33%
Beban Usaha / Operating Expenses	(8.190.236)	(8.271.983)	101,00%
Laba Usaha / Income from Operations	2.126.336	2.181.627	102,60%
Pendapatan di Luar Usaha / Income outside Operations	996.449	826.946	82,99%
Beban di Luar Usaha / Expenses outside Operations	(2.131.063)	(1.624.362)	76,22%
Laba Usaha Sesudah Pendapatan (Beban) di Luar Usaha / Profit After Income (Expenses) outside Operations	991.722	1.384.212	139,58%
Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax	(430.191)	(227.424)	52,87%
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year	561.531	1.156.788	206,01%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Item that will not be reclassified to profit or loss			
Pajak Penghasilan (efek DTA (DTL) atas pengukuran kembali imbalan kerja) / Income Tax (DTA effect (DTL) on remeasurement of employee benefit)	-	(794.030)	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak / Exchange Differences due to Subsidiaries Financial Statements Translation	-	(329.194)	-
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Changes in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	(21.409)	108.347	(506,08%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	540.122	141.910	26,27%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Induk / Owners of the Parent Entity	526.855	1.184.857	224,89%
Kepentingan Non Pengendali / Non-controlling Interest	34.676	(28.070)	(80,95%)
Laba Periode Tahun Berjalan / Income for the Year	561.531	1.156.787	206,01%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Induk / Owners of the Parent Entity	505.446	170.176	33,67%
Kepentingan Nonpengendali / Non-Controlling Interest	34.676	(28.266)	(81,52%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	540.122	141.910	26,27%

Laba Tahun Berjalan 2020 terealisasi sebesar Rp1.156,79 miliar atau mencapai 206,01 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp561,53 miliar. Pencapaian yang tinggi tersebut berasal dari Pendapatan Usaha yang mencapai 101,33 persen dari RKAP 2020 yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Realisasi Pendapatan Jasa Kapal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1.332,08 miliar atau mencapai 100,84 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp1.320,97 miliar yang terutama disebabkan oleh kenaikan kinerja pelayanan jasa kapal di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri terutama untuk kegiatan penundaan dan realisasi pendapatan kapal *Ship-to-Ship* (STS) yang ada di cabang Pelabuhan Panjang.

Income for the Year in 2020 amounted to Rp1,156.79 billion or 206.01 percent of the 2020 RKAP at Rp561.53 billion. Such high achievement came from Operating Revenues which reached 101.33 percent of the 2020 RKAP which was caused by several factors, including:

- Realization of Revenue from Ship Services in 2020 amounted to Rp1,332.08 billion or 100.84 percent of the 2020 RKAP at Rp1,320.97 billion which was mainly due to an increase in the performance of ship services at the Dock for Own Interests, especially for postponement activities and the realization of Ship-to-Ship (STS) vessel revenue at the Pelabuhan Panjang branch.



- Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp3.178,04 miliar atau mencapai 101,85 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp3.120,23 miliar yang disebabkan oleh:
 - » *Throughput Area* Domestik Tanjung Priok 2 terealisasi sebesar 4,21 persen di atas target dikarenakan peningkatan volume *Shipping Line* Meratus Line dan serta adanya penambahan layanan baru dari Maersk Line di Semester II Tahun 2020 Terminal *Ocean Going* di Area Tanjung Priok 2;
 - » *Throughput Area* Pontianak juga mengalami kenaikan pada petikemas *Ocean Going* sebesar 186 persen atau 2.466 TEUs dari target RKAP 2020 sebesar 1.344 TEUs.
- Pendapatan Perusahaan TBAL tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp3.023,33 miliar atau mencapai 101,83 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp2.968,97 miliar yang disebabkan adanya realisasi pendapatan TBAL Lainnya yang berasal dari reduksi pendapatan PT PPI.
- Pendapatan Fasilitas Rupa-rupa Usaha tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1.043,45 miliar atau mencapai 114,85 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp908,44 miliar yang terutama disebabkan oleh:
 - » Realisasi Pendapatan Pas Pelabuhan yang terealisasi sebesar Rp92,76 miliar atau meningkat senilai 8,11 persen dari target RKAP 2020 sebesar Rp85,79 miliar utamanya di Cabang Tanjung Priok yang juga sejalan dengan lebih tingginya arus petikemas dibandingkan dengan RKAP 2020;
 - » Adanya realisasi kontribusi terminal PT PTP sebesar Rp35,43 miliar yang berasal dari *Port Facility Service* di area PT PTP Cabang Banten dan Cabang Teluk Bayur;
 - » Masih tercatatnya Pendapatan Kesehatan dari PT RSP yang sudah tidak dianggarkan pada RKAP 2020.
- Container Terminal Service Revenue in 2020 amounted to Rp3,178.04 billion or 101.85 percent of the 2020 RKAP at Rp3,120.23 billion due to:
 - » Tanjung Priok 2 Domestic Throughput Area was realized by 4.21 percent above the target due to an increase in the volume of the Meratus Line Shipping Line and the addition of new services from the Maersk Line in Semester II of 2020, the Ocean Going Terminal in the Tanjung Priok 2 Area;
 - » Pontianak area throughput also experienced an increase in Ocean Going containers by 186 percent or 2,466 TEUs of the 2020 RKAP target at 1,344 TEUs.
- TBAL Business Revenue in 2020 amounted to Rp3,023.33 billion or 101.83 percent of the 2020 RKAP at Rp2,968.97 billion due to the realization of Other TBAL revenue which came from the reduction of PT PPI's income.
- Miscellaneous Business Facility revenue in 2020 amounted to Rp1,043.45 billion or 114.85 percent of the 2020 RKAP at Rp908.44 billion which was mainly due to:
 - » Realized Port Entry Fee amounted to Rp92.76 billion or an increase of 8.11 percent of the 2020 RKAP target at Rp85.79 billion mainly at the Tanjung Priok Branch which is also in line with the higher flow of containers compared to the 2020 RKAP;
 - » There was a realization of the contribution of PT PTP's terminal amounting to Rp35.43 billion, which came from the Port Facility Service in the PT PTP Banten Branch and Teluk Bayur Branch areas;
 - » Medical Services Income from PT RSP is still recorded which has not been budgeted for in the 2020 RKAP.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2020 terealisasi sebesar Rp141,91 miliar atau mencapai 26,27 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp540,12 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pencatatan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti sebesar minus Rp794,03 miliar dan Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak sebesar minus Rp329,19 miliar.

Total Realized Comprehensive Profit for the Year in 2020 amounted to Rp141.91 billion or 26.27 percent of the 2020 RKAP at Rp540.12 billion. This was due to the recording of the Remeasurements of Defined Benefit Plans amounting to minus Rp794.03 billion and the Exchange Rate Difference in the Translation of Subsidiaries' Financial Statements of minus Rp329.19 billion.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Arus Kas Konsolidasian

Comparison between Target and Realization of Consolidated Statements of Cash Flows

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Kas Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Comparison between Target and Realization of Consolidated Cash Flows (in million Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / 2020 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities			
Penerimaan dari Pelanggan / Cash Receipt from Customers	10.213.452	9.943.466	97,36%
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to Employees	(2.541.844)	(2.631.603)	103,53%
Pembayaran Pajak / Payment for Income Taxes	(770.862)	(249.151)	32,32%
Pembayaran kepada Pihak Ketiga / Payment to Third Parties	(4.964.217)	(5.105.621)	107,71%
Penghasilan Bunga / Interest Received	654.270	505.409	77,25%
Pembayaran Bunga & Beban Keuangan Lainnya / Payment of Interest and Other Financial Charges	(1.216.681)	(1.108.968)	91,15%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided by Operating Activities	1.374.118	1.353.531	98,50%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities			
Penerimaan (Penempatan) Investasi Jangka Pendek / Receipt of (Placement) of Short-term Investments	2.564.001	(8.494.178)	(331,29%)
Perolehan Aset Tetap & Aset Tak Berwujud / Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(3.468.160)	(2.618.502)	75,50%
Penerimaan Dividen / Receipt of Dividend	82.365	223.174	270,96%
Penerimaan Sewa di Muka / Receipt of Advance Rental Fee	187.909	127.469	67,84%
Penerimaan (Penempatan) Investasi Saham / Placement of Investment in Shares of Stock	6.651	(165.555)	(2489,18%)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(627.234)	(10.927.592)	1742,19%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities			
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank / Receipt (Payment) of Bank Loans	1.000.000	(2.000)	(0,20%)
Pembayaran Dividen / Receipt of Dividend	(708.242)	(708.219)	100%-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Used in Investing Activities	291.758	(761.998)	(261,17%)
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas / Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	809.570	30.800	3,80%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	1.848.212	(10.305.259)	(557,58%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	15.603.533	15.603.533	100%
Kas dan Setara Kas Periode Berjalan / Cash and Cash Equivalents for the Current Year	17.451.745	5.298.274	30,36%

Realisasi Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.298,27 miliar atau mencapai 30,36 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp17.451,75 miliar. Pencapaian yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.353,53 miliar atau mencapai 98,50% dari RKAP 2020 sebesar Rp1.374,12 miliar yang disebabkan oleh:
 - » Penurunan penerimaan kas dari pelanggan yang disebabkan oleh kebijakan IPC untuk memberikan relaksasi piutang kepada pengguna jasa selama masa pandemi Covid-19;
 - » Penerimaan pendapatan bunga terealisasi lebih rendah dari RKAP 2020 yang disebabkan oleh selisih kurs di mana tahun 2020 kurs yang digunakan sebesar Rp14.105 per dolar AS, sementara asumsi RKAP 2020 sebesar Rp14.800 per dolar AS, serta adanya penurunan *rate* bunga deposito selama tahun 2020.

Realization of Cash and Cash Equivalents at the end of 2020 was recorded at Rp5,298.27 billion or 30.36 percent of the 2020 RKAP of Rp17,451.75 billion. Such lower achievement was due to several factors, including:

- Realized Net Cash from Operating Activities amounted to Rp1,353.53 billion or 98.50% of the 2020 RKAP at Rp1,374.12 billion due to:
 - » Decrease in cash receipts from customers was due to the IPC policy to provide credit relaxation to service users during the Covid-19 pandemic;
 - » Realized interest income received was lower than the 2020 RKAP due to the exchange rate difference where in 2020 the exchange rate used was Rp14,105 per US dollar, while the 2020 RKAP assumption was Rp14,800 per US dollar, as well as a decrease in deposit interest rates during 2020.



- Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp10.927,59 miliar atau mencapai 1742,19 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp627,23 miliar. Belum tercapainya target RKAP 2020 disebabkan oleh adanya tambahan penempatan deposito yang ditempatkan mulai bulan Oktober 2020 dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp762,00 miliar atau mencapai 261,17 persen dari RKAP 2020 yang menargetkan Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp291,76 miliar. Hal tersebut dikarenakan asumsi pinjaman sebesar Rp1 triliun yang akan dilakukan oleh PT PPI tidak terealisasi. Selain itu, terdapat pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp51,66 miliar yang merupakan dampak penerapan PSAK 73 mulai 1 Januari 2020.
- Realized Net Cash for Investing Activities amounted to Rp10,927.59 billion or reaching 1742.19 percent of the 2020 RKAP of Rp627.23 billion. The 2020 RKAP target has not been achieved due to additional deposits placed starting in October 2020 with a maturity of more than 3 (three) months.
- Realized Net Cash for Financing Activities amounted to Rp762.00 billion or 261.17 percent of the 2020 RKAP which targets Net Cash from Financing Activities of Rp291.76 billion. This was because the assumption of a loan of Rp1 trillion to be made by PT PPI has not been realized. In addition, there were lease liability payments of Rp51.66 billion, which was the impact of the implementation of PSAK 73 starting January 1, 2020.

Dampak Perubahan Selisih Kurs pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp30,80 miliar atau mencapai 3,80 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp809,57 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh menguatnya realisasi kurs tahun 2020 sebesar Rp14.105 per dolar AS sementara asumsi kurs dalam RKAP 2020 adalah sebesar Rp14.800 per dolar AS.

The impact of Changes in Exchange Differences in 2020 was realized at Rp30.80 billion or 3.80 percent of the 2020 RKAP at Rp809.57 billion. This was due to the strengthened 2020 exchange rate of Rp14,105 per US dollar, while the assumption of the exchange rate in the 2020 RKAP was Rp14,800 per US dollar.

Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Keuangan

Comparison of Target and Realization of Financial Ratio

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Keuangan /
Table of Comparison of Target and Realization of Financial Ratio

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Kondisi Keuangan Jangka Pendek (Likuiditas) / Short-Term Financial Condition (Liquidity)				
a. <i>Current Ratio</i>	x	3,84	3,80	98,96%
b. <i>Cash Ratio</i>	x	3,20	3,25	101,56%
Kondisi Keuangan Jangka Panjang / Long Term Financial Condition				
a. <i>Total Assets to Total Debt</i>	x	2,27	2,31	101,76%
b. <i>Total Debt to Equity (Borrowing/Equity)</i>	x	1,33	1,31	98,50%
c. <i>Total Debt to Total Fixed Assets</i>	x	1,58	1,49	94,30%
d. <i>Long-term Debt to Equity</i>	x	1,33	1,31	98,50%
e. <i>Net Debt to EBITDA</i>	x	2,17	5,45	251,15%
Rasio Aktivitas / Activity Ratio				
a. <i>Average Payment Period</i>	Hari / Days	110	112	101,82%
b. <i>Average Collection Period</i>	Hari / Days	32	25	78,13%
c. <i>Collection Period</i>	Hari / Days	36	21	58,33%
Rasio Hasil Usaha / Performance Ratio				
a. <i>BOPO / OR (Operating Ratio)</i>	%	79,39	79,13	99,67%
b. <i>Return on Capital Employed (ROCE)</i>	%	1,51	2,61	172,85%
c. <i>EBITDA</i>	Rp ribu / Rp thousand	3.001.969	3.123.762	104,06%
d. <i>EBITDA Margin</i>	%	29,10	29,88	102,68%
e. <i>EBITDA/Debt Service</i>	%	238,63	262,83	110,14%
f. <i>EBITDA/Beban Bunga / EBITDA/Interest Expense</i>	%	238,63	262,83	110,14%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Keuangan /
Table of Comparison of Target and Realization of Financial Ratio

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
g. Sales to Average Asset	%	19,37	20,16	104,08%
h. Net Profit Margin	%	5,44	11,07	203,49%
i. Operating Cash Flow to Sales	%	13,32	12,95	97,22%

Secara keseluruhan, realisasi rasio keuangan Perseroan pada tahun 2020 dengan RKAP 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Meski demikian, realisasi rasio *Operating Cash Flow to Sales* dan *Net Debt to Ebitda* tahun 2020 belum mampu tercapai dengan optimal dari target RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi kurs dolar AS terhadap Rupiah pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari RKAP 2020, sehingga mempengaruhi jumlah beban bunga yang harus dibayarkan Perseroan dalam mata uang dolar AS.

Overall, the realization of the Company's financial ratios in 2020 with the 2020 RKAP showed good performance. However, the realization of the *Operating Cash Flow to Sales* and *Net Debt to EBITDA* ratios in 2020 was not optimally achieved from the 2020 RKAP target. This was due to the realization of the US dollar exchange rate against the Rupiah in 2020 which was higher than the 2020 RKAP, affecting the number of interest expense to be paid by the Company in US dollars.

ASPEK OPERASIONAL

Perbandingan Target dan Realisasi Produksi

OPERATIONAL ASPECT

Comparison between Target and Realization of Production

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi /
Table of Comparison between Target and Realization of Production

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Kunjungan Kapal / Ship Calls				
Pelayaran Luar Negeri / International Shipping				
a. Reguler	Unit	558	518	92,83%
	GT	9.997.018	9.413.154	94,16%
b. Non Reguler	Unit	4.486	4.529	100,96%
	GT	97.105.549	99.404.551	102,37%
Jumlah / Total	Unit	5.044	5.047	100,06%
	GT	107.102.567	108.817.705	101,60%
Pelayanan Dalam Negeri / Domestic Shipping				
Pelayaran Rakyat / Traditional Shipping	Unit	20.618	20.647	100,14%
	GT	68.005.204	68.175.415	100,25%
Pelayaran Perintis / Pacer Shipping	Unit	2.254	2.778	123,25%
	GT	431.234	515.431	119,52%
Kapal Negara/Tamu / Visitor/State Shipping	Unit	80	149	186,25%
	GT	92.880	200.381	215,74%
Arus Barang Berdasarkan Kemasan / Cargo Traffic Based on Packaging	Unit	110	235	213,64%
	GT	354.236	701.439	198,01%
Arus Barang Berdasarkan Kemasan / Cargo Traffic Based on Packaging				
General Cargo	Ton	8.746.111	8.832.316	100,99%
Bag Cargo	Ton	4.022.722	3.791.109	94,24%
Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	8.886.503	10.090.113	113,54%
Curah Kering / Dry Bulk	Ton	26.366.546	23.943.857	90,81%
Lain-lain / Others	Ton	2.837.748	3.473.694	122,41%
Petikemas / Container	Box	4.961.440	5.061.936	102,03%
	TEUs	6.855.461	6.921.750	100,97%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi /
Table of Comparison between Target and Realization of Production

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Arus Petikemas / Container Traffic				
Terminal Konvensional / Conventional Terminal	Box	2.877.157	2.202.444	76,55%
	TEUs	4.228.007	2.739.972	64,81%
Terminal Petikemas / Container Terminal	Box	2.084.282	2.859.492	137,19%
	TEUs	2.627.454	4.181.778	159,16%
Arus Penumpang / Passenger Traffic				
Dalam Negeri / Domestic	Orang / Person	397.057	333.026	83,87%
a. Embarkasi / Departure	Orang / Person	185.140	164.289	88,74%
b. Debarkasi / Arrival	Orang / Person	211.916	168.737	79,62%

Secara umum, pencapaian target produksi tahun 2020 menunjukkan hasil yang memuaskan. Pencapaian Kunjungan Kapal Luar Negeri untuk satuan Unit dan GT masing-masing mencapai 100,06 persen dan 101,60 persen berada di atas target RKAP 2020. Demikian pula dengan Kunjungan Kapal Pelayaran Dalam Negeri, Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, dan Kapal Negara/Tamu yang berhasil mencatatkan kinerja melebihi target RKAP 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh mulai normalnya Kunjungan Kapal Luar Negeri, terutama kapal-kapal yang berasal dari China serta meningkatnya trafik kapal dengan muatan petikemas di beberapa cabang seperti Tanjung Priok, Panjang, Palembang dan Teluk Bayur.

Pada produksi Arus Barang Berdasarkan Kemasan, komponen *General Cargo*, Curah Cair, Lain-lain dan Petikemas berhasil membukukan tingkat produktivitas yang melebihi target RKAP 2020. Namun, realisasi produksi *Bag Cargo* dan Curah Kering hanya mencapai masing-masing 94,24 persen dan 90,81 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan *General Cargo* pada kegiatan impor terutama di PT PTP dan Curah Kering pada kegiatan Bongkar terutama di cabang Banten dan PT PTP.

Arus Petikemas di tahun 2020 yang terdiri dari Terminal Konvensional dan Terminal Petikemas terealisasi sebesar 6,92 juta TEUs atau 0,97 persen melebihi target RKAP 2020 sebesar 6,86 juta TEUs. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan arus petikemas di KSO TPK Koja dan PT IPC TPK yang dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekspor impor sebagai dampak mulai dibukanya perdagangan di beberapa negara.

Realisasi produksi Arus Penumpang di tahun 2020 yang terdiri dari Embarkasi dan Debarkasi Dalam Negeri belum mencapai target RKAP 2020 dikarenakan adanya himbauan Pemerintah untuk tidak bepergian selama masa pandemi sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

In general, the achievement of 2020 production target has shown satisfactory results. International Ship Calls for Unit and GT respectively reached 100.06 percent and 101.60 percent above the 2020 RKAP target. Likewise, Calls of Domestic Shipping, Traditional Shipping, Pacer Shipping, and Visitor/State Shipping were recorded to exceed 2020 RKAP target. This was due to improving International Ship Calls, especially ships originating from China as well as the increase in ship traffic with container loads in several branches such as Tanjung Priok, Panjang, Palembang, and Teluk Bayur.

In terms of Cargo Traffic production based on Packaging, the components of General Cargo, Liquid Bulk, Others, and Containers managed to record productivity levels that exceeded the RKAP target 2020. However, the realization of Bag Cargo and Dry Bulk production only reached 94.24 percent and 90.81 percent respectively of the target set. This was contributed by the decline in General Cargo in import activities, especially at PT PTP and Dry Bulk in Unloading activities, particularly in Banten and PT PTP branches.

Container Traffic in 2020 consisting of Conventional Terminal and Container Terminal was realized by 6.92 million TEUs or 0.97 percent exceeding the 2020 RKAP target of 6.86 million TEUs. This was due to an increase in container traffic at the KSO TPK Koja and PT IPC TPK which was affected by the increase in export-import activities as a result of trade opening in several countries.

The realization of Passenger Flow production in 2020 which consisted of Domestic Departure and Arrival has not yet reached the 2020 RKAP target due to the Government's encouragement of avoiding travelling during the pandemic period as an effort to break the chain of Covid-19 spread.

ASPEK PEMASARAN

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

MARKETING ASPECT

Comparison between Target and Realization of Marketing

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran (dalam jutaan Rupiah) / Table of Comparison between Target and Realization of Marketing (in million Rupiah)				
Uraian / Description	Satuan / Unit	Revisi RKAP 2020 / Revised RKAP 2020	Realisasi 2020 / 2020 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Terminal Konvensional / Conventional Terminal				
- Non Petikemas / Non-Container	Ton	50.859.630	60.035.441	98,57%
	Boxes	2.877.157	3.252.606	76,55%
- Petikemas / Container	TEUs	4.228.007	4.736.282	64,81%
	Boxes	2.084.282	2.363.839	137,19%
Terminal Petikemas / Container Terminal	TEUs	2.627.454	2.924.203	159,16%
	Ton	50.859.630	60.035.441	98,57%
Jumlah / Total	Boxes	4.961.439	5.061.936	102,03%
	TEUs	6.855.461	6.921.750	100,97%

Secara keseluruhan, pasar yang dilayani oleh IPC untuk bongkar muat petikemas pada tahun 2020 dalam satuan box sebanyak 5.061.936 box atau 102,03 persen dari Revisi RKAP 2020 sebanyak 4.961.439 box, dalam satuan TEUs terealisasi sebesar 6.921.750 TEUs atau 100,97 persen dari Revisi RKAP 2020 sebesar 6.855.461 TEUs, sedangkan dalam satuan ton terealisasi sebesar 50.131.089 ton atau 98,57 persen dari Revisi RKAP 2020 sebanyak 50.859.630 ton.

Overall, the market served by IPC for container loading and unloading in 2020 in box unit amounted to 5,061,936 boxes or 102.03 percent of the Revised RKAP 2020 at 4,961,439 boxes, in TEUs amounted to 6,921,750 TEUs or 100.97 percent of the 2020 Revised RKAP at 6,855,461 TEUs, while in tons amounted to 50,131,089 tons or 98.57 percent of the Revised RKAP 2020 at 50,859,630 tons.

ASPEK INVESTASI

Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Barang Modal

INVESTMENT ASPECT

Comparison between Target and Realization of Capital Goods Investment

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Barang Modal (dalam jutaan Rupiah) / Table of Comparison between Target and Realization of Capital Goods Investment (in million Rupiah)			
Jenis / Type	RKAP 2020	Realisasi / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Perusahaan Induk / Parent Company			
Bangunan Fasilitas Pelabuhan / Port Buildings	1.812.410	1.945.638	107,35%
Kapal / Ship	35.600	14.036	39,43%
Alat Fasilitas Pelabuhan / Port Equipment	58.621	28.695	48,95%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan / Port Installation	69.557	67.829	97,52%
Tanah / Land	11.926	5.331	44,70%
Jalan dan Bangunan / Roads and Buildings	151.169	98.632	65,25%
Peralatan / Equipment	97.636	57.307	58,69%
Kendaraan / Vehicles	2.100	1.351	64,33%
Emplasemen / Emplacement	3.871	966	24,95%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Barang Modal (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Comparison between Target and Realization of Capital Goods Investment (in million Rupiah)

Jenis / Type	RKAP 2020	Realisasi / Realization 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Investasi Non Fisik / Non-Physical Investment	86.786	76.854	88,56%
Kapitalisasi Bunga / Interest Capitalization	147.798	267.950	181,29%
Investasi Perusahaan Induk / Parent Company's Investment	2.477.473	2.564.587	103,52%
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiaries' Investment	922.393	366.882	39,78%
Total Investasi Konsolidasi / Total Consolidated Investment	3.399.865	2.931.468	86,22%
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Equity Participation of Parent Company	49.200	49.200	100,00%
Total Investasi + Penyertaan Modal / Total Investment + Equity Participation	3.449.065	2.980.668	86,42%

Realisasi Investasi dan Penyertaan Modal di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.980,67 miliar atau 86,42 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp3.449,07 miliar. Secara umum, kontribusi utama yang mempengaruhi pencapaian serapan investasi di tahun 2020, antara lain:

1. Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I
Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I tahun 2020 terealisasi sebesar Rp606,49 miliar atau terserap 134,25 persen dari nilai RKAP 2020 sebesar Rp451,77 miliar. Tingginya realisasi investasi tersebut antara lain disebabkan oleh pembayaran penyesuaian harga untuk *all items* selain 3 item pekerjaan pemancangan, pengerukan, dan reklamasi pada periode Oktober 2013 s.d Desember 2017, pembayaran atas pekerjaan tambah/ kurang dan klaim, serta pembayaran retensi terhadap item Pekerjaan Terkonstruksi yang telah di serahterimakan oleh PT PP (Persero) Tbk kepada IPC.
2. Pembangunan Terminal Kijing, Kalimantan Barat Phase 1
Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Phase 1 tahun 2020 terealisasi sebesar Rp988,21 miliar atau terserap 97,92 persen dari nilai RKAP 2020 sebesar Rp1,01 triliun. Realisasi tersebut di antaranya adalah untuk pembangunan fisik terminal.
3. Pembangunan Menara Maritim Indonesia
Pembangunan Menara Maritim Indonesia tahun 2020 terealisasi sebesar Rp197,82 miliar atau terserap sebesar 76,44 persen dari RKAP 2020 sebesar Rp258,80 miliar. Realisasi tersebut di antaranya untuk pembangunan fisik dan pengurusan dokumen perijinan.
4. Akuisisi saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)
Akuisisi 49 persen saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sesuai persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Nomor S.589/MBU/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Persetujuan Akuisisi saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS.

Realization of Investment and Equity Participation in 2020 was recorded at Rp 2,980.67 billion or 86.42 percent of the 2020 RKAP of Rp3,449.07 billion. In general, the main contributions affecting the achievement of investment absorption in 2020 include:

1. Construction of North Kalibaru Terminal Phase I
The construction of North Kalibaru Terminal Phase I in 2020 was realized at Rp606.49 billion or 134.25 percent of the 2020 RKAP of Rp451.77 billion was absorbed. The high figure of investment realization was due to, among others, the payment of price adjustments for all items other than the 3 items of erection, dredging and reclamation work in the period of October 2013 to December 2017, payments for additional/deduction of work and claims, as well as retention payments for Constructed Work items that had already been handed over by PT PP (Persero) Tbk to IPC.
2. Construction of Kijing Terminal, West Kalimantan Phase 1
The construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase 1, in 2020 was realized at Rp988.21 billion or 97.92 percent of the 2020 RKAP of Rp1.01 trillion was absorbed. The realization includes the construction of a physical terminal.
3. Construction of the Indonesian Maritime Tower
The construction of the Indonesian Maritime Tower in 2020 was realized at Rp197.82 billion or 76.44 percent of the 2020 RKAP of Rp258.80 billion was absorbed. The realization includes physical development and seeking permits.
4. Share acquisition of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)
Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's shares in PT ILCS according to the approval of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) through Letter Number S.589/MBU/08/2020 dated August 24, 2020 regarding the Approval of Share Acquisition of PT Multimedia Nusantara at PT ILCS.

INFORMASI MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN DAMPAKNYA

PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI

Setelah periode pelaporan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat pergantian susunan Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan, Bapak Mega Satria resmi diangkat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan, menggantikan posisi Bapak Yon Irawan.

Pergantian susunan Direksi tersebut tidak memberi dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan di tahun depan.

KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya operasi secara signifikan dan kondisi keuangan Perseroan. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi lainnya di luar kendali Perseroan. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perseroan. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2020, IPC tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Selama tahun 2020, IPC tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih Perseroan.

MATERIAL INFORMATION SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS AND ITS IMPACTS

CHANGE TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

After the reporting period for the fiscal year ending on 31 December 2020, there was a change in the composition of the Board of Directors. Based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Directors, Mr. Mega Satria was officially appointed as the Finance Director of the Company, replacing Mr. Yon Irawan.

The change in the composition of the Board of Directors did not significantly impacted the Company's performance in the following year.

MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, which caused macroeconomic uncertainty related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. This condition resulted in the significant decrease in the Company's operation and financial condition. Future developments may change due to market changes or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties with regard to this matter in the future.

REPORTED FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

In 2020, IPC did not have any reported financial information containing extraordinary and rare events.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES OR NET INCOME OF THE COMPANY

In 2020, IPC was not significantly affected by price changes in terms of the Company's sales or net income.



KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Selama tahun 2020, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20 persen dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/ PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2020, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

IPC melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai dengan PMK No.05/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham, Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) IPC yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha IPC.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Kebijakan dividen terkait informasi persentase jumlah dividen yang akan dibagikan terhadap Laba Bersih, tanggal pembayaran dividen, jumlah dividen per saham dan jumlah dividen per tahun yang dibayar pada tahun buku 2018 dan 2019 diuraikan pada tabel berikut.

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF INCOME AND OTHER EXPENSES

In 2020, there were no components of income and other expenses that were equal to or more than 20 percent of total income and other expenses.

MATERIAL INCREASE/DECREASE FROM NET SALES/INCOME

In 2020, there was no material increase or decrease from net sales/income.

DIVIDEND POLICY, ANNOUNCEMENT AND PAYMENT

DIVIDEND POLICY

IPC makes dividend payments every year based on resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS), in accordance with PMK No. 05/PMK.02/2013 concerning Procedures for Paying Non-Tax State Revenues from dividends, dividend payments are made no later than 1 (one) month after dividends are determined by the Shareholders. The amount of dividends decided is a certain percentage of the IPC net profit (after tax) attributable to the Shareholders. Dividend policy based on fulfillment of Shareholders' interest as well as the IPC business development plan.

ANNOUNCEMENT AND DIVIDEND PAYMENT

Dividend policy on the percentage of dividend amount to be distributed to Net Income, dividend payment date, amount of dividend per share and total dividend per year paid in the 2018 and 2019 financial years is described in the following table.

Tabel Pembagian Dividen / Dividend Distribution Table		
Uraian / Description	Tahun Buku / Fiscal Year	
	2019	2018
Jumlah Dividen Kas / Total Cash Dividend (Rupiah penuh / Full Rupiah)	708.242.000.000	832.742.000.000
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Income for the year attributable to Owner of Parent Entity (Rupiah penuh / Full Rupiah)	2.455.762.799.999	2.379.261.695.356
Jumlah Saham Beredar (dalam lembar) / Total Outstanding Shares (in share)	1.444.029	1.444.029.000
Dividen Kas Per Lembar Saham / Cash Dividend per Share (Rupiah penuh / Full Rupiah)	490.446	576.679
<i>Dividend Payout Ratio</i>	28,84%	35,00%
Tanggal Pengumuman / Date of Announcement	24 Agustus 2020 / August 24, 2020	29 April 2019 / April 29, 2019
Tanggal Pembayaran / Date of Payment	30 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 1 Oktober 2020, dan 3 November 2020 / July 30, 2020, August 31, 2020, October 1, 2020, and November 3, 2020	27 Mei 2019 / May 27, 2019

Tahun Buku 2019

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 dari Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- Penggunaan laba neto konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 28,84 persen dari laba neto atau sebesar Rp708.218.661.061.
 - Penetapan cadangan sebesar 71,16 persen dari laba neto atau sebesar Rp1.747.544.138.938.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-164/MK.2/2020 tanggal 29 Juli 2020, penjadwalan pembayaran dividen Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)		
Tahap / Phase	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Kewajiban Dividen / Dividend Obligation
I	4 Agustus 2020 / August 4, 2020	177.054.665
II	4 September 2020 / September 4, 2020	177.054.665
III	5 Oktober 2020 / October 5, 2020	177.054.665
IV	5 November 2020 / November 5, 2020	177.054.665
Jumlah / Total		708.218.661

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 1 Oktober 2020 dan 3 November 2020 masing-masing untuk pembayaran Tahap I, II, III, dan IV.

Tahun Buku 2018

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 13 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaan Laba Neto Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai sebesar 35 persen dari Laba Neto atau sebesar Rp832.742.000 ribu.
- Penetapan Cadangan sebesar 65 persen dari Laba Neto atau sebesar Rp1.546.519.695 ribu.

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 2019.

Fiscal Year 2019

Based on Minutes of General Meeting of Shareholders of the Company which have been drawn up in Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company No. 12 dated August 24, 2020 from Notary Dewi Sugina Mulyani, S.H., the Company's shareholders decided the following, among others:

- The use of the Company's consolidated net profit for the 2019 financial year as follows:
 - Distribution of cash dividends of 28.84 percent of net profit or amounting to Rp708,218,661,061.
 - Determination of reserves at 71.16 percent of net profit or amounting to Rp1,747,544,138,938.

Based on the Letter from the Minister of Finance Number S-16 /MK.2/2020 dated July 29, 2020, the schedule for the Company's dividend payment is determined as follows:

The Company paid the above dividend on July 30, 2020, August 31, 2020, October 1, 2020, and November 3, 2020, each for payment Phase I, II, III, and IV.

Fiscal Year 2018

Based on the Company's General Meeting of Shareholders which has been drawn up in the Minutes of the Company's General Meeting of Shareholders No. 13 dated April 29, 2019 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn, the Company's shareholders approved the use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2018 fiscal year as follows:

- Distribution of cash dividends of 35 percent of Net Profit or amounting to Rp832,742,000 thousand.
- Determination of reserves at 65 percent of Net Profit or amounting to Rp1,546,519,695 thousand.

The Company paid the dividend mentioned above on May 27, 2019.



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2020, sesuai dengan karakteristik IPC yang 100 persen dimiliki oleh Pemerintah maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) di IPC. Dengan demikian tidak terdapat informasi program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak melakukan penerbitan saham untuk publik sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini. Meskipun demikian, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan dua seri *global bond* dengan nilai total USD1,6 miliar. Seri pertama *global bond* tersebut bernilai USD1,1 miliar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 tahun atau pada tahun 2025, dengan bunga 4,250 persen dan *yield* 4,375 persen. Sementara seri kedua bernilai USD500 juta dengan jangka waktu 30 tahun atau jatuh tempo pada tahun 2045, dengan bunga 5,375 persen dan *yield* 5,50 persen.

Berdasarkan *Bond Indenture* baik untuk obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2025 dan 2045, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak disyaratkan untuk melaporkan penggunaan dana tersebut.

Realisasi penggunaan dana obligasi yang diperoleh digunakan untuk pelunasan utang sindikasi 7 (tujuh) bank, rencana kegiatan ekspansi Perseroan dan untuk modal kerja IPC. Rencana kegiatan ekspansi perusahaan yang sedang dilaksanakan seperti keperluan proyek strategis (Proyek Terminal Petikemas Kalibaru (New Priok), Proyek Pelabuhan Kijing) sebagaimana yang telah disebutkan pada *offering circular*. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk Proyek Cikarang Bekasi Laut *Waterway* serta untuk *capital expenditure* lainnya.

EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

As of December 31, 2020, according to IPC's shares characteristics which is 100 percent owned by the Government, the Company does not implement employee/management stock option plan (ESOP/MSOP). Therefore, there is no information on employee/management stock option plan (ESOP/MSOP) such as the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management and exercise price.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) does not issue shares to the public so that information regarding the realization of use of proceeds from the public offering cannot be presented in this annual report. However, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has issued two series of global bonds with a total value of USD 1.6 billion. The first series of global bonds is worth USD1.1 billion, which will mature in 10 years or in 2025, with an interest rate of 4.250 percent and yield of 4.375 percent. Meanwhile, the second series is worth USD500 million with a period of 30 years or will mature in 2045, with an interest rate of 5.375 percent and a yield of 5.50 percent.

Based on Bond Indenture for bonds maturing in 2025 and 2045, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not required to report the appropriation of these funds.

The realization of use of the bond proceeds obtained is used for the repayment of syndicated loan of 7 (seven) banks, the Company's expansion plan, and IPC working capital. The Company's expansion plan being carried out includes strategic projects (Kalibaru Container Terminal Project (New Priok), Kijing Port Project) as mentioned in the offering circular. In addition, the funds were also used for the Cikarang Bekasi Laut Waterway Project and for other capital expenditure.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Bapepam LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang dimaksud Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.

Sampai dengan akhir tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori benturan kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Definisi pihak afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Berdasarkan ketentuan Bapepam LK No.IX.E.1 yang dimaksud Transaksi Afiliasi adalah transaksi tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalik

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

Based on the provisions of Bapepam LK No.IX.E.1 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Conflict of Interest is defined as the difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that could harm the Company.

Until the end of 2020, there were no transactions that met the category of conflict of interest.

AFFILIATED TRANSACTIONS

The definition of an affiliate is:

1. Family relationships due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationship between the Party and employees, directors or commissioners of that Party;
3. Relationship between 2 (two) companies, where there are one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners;
4. Relationship between the Company and the Party, both directly and indirectly, either controls or is controlled by the Company;
5. Relationship between 2 (two) companies that are controlled, directly or indirectly, by the same Party; or
6. Relationship between the Company and Major Shareholders.

Based on the provisions of Bapepam LK No.IX.E.1, Affiliated Transaction is defined as certain transactions carried out by a Company or Controlled Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or a major shareholder of the Company. As of the end of 2020, there were no transactions that met the category of transactions with affiliated parties.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

In normal business activities, the Company enters into transactions with related parties. The entity is considered to be related if the entity, among others, either directly or indirectly, can control or jointly control, or has a significant



bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Perseroan.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Nama Pihak Dan Sifat Hubungan Berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

influence on the Company in financial and operational decision making. The entity is also considered to be related if the entity is under common control with the Company.

The Government of the Republic of Indonesia is the Company's shareholder. All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and entities where the Government of the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Names of Parties and Nature of Related Relationships

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi / Table of Transaction with Related Parties		
Sifat Relasi / Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi / Name of Related Parties	Jenis Transaksi / Type of Transactions
Pemegang Saham / Shareholders	Negara Republik Indonesia / The Republic of Indonesia	Jasa Konsesi / Concession Services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman / Banking Services and Loans
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa Perbankan dan Pinjaman / Banking Services and Loans
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Bank BNI Syariah	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT BRI Agroniaga Tbk	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Entity having relationship with the Government	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales of Operational Services and Activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Semen Padang	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Djakarta Llyod (Persero)	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan Jasa / Sales of Services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan Jasa / Sales of Services
	Instansi Pemerintah	Penjualan Jasa / Sales of Services
	BPJS Kesehatan	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT BNI Life Insurance	Penjualan Jasa / Sales of Services

Tabel Transaksi Pihak Berelasi /
Table of Transaction with Related Parties

Sifat Relasi / Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi / Name of Related Parties	Jenis Transaksi / Type of Transactions
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan Jasa / Sales of Services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan / Construction Services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan / Construction Services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa Pembangunan / Construction Services
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa Pembangunan / Construction Services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa Pensiun / Pension Services
	PT Jasa Asuransi Jiwasraya	Jasa Asuransi / Insurance Services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman / Loans
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman / Loans
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman / Loans
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman / Loans
	PT JICT	Sewa dan Royalti / Rental and Royalty
Entitas Asosiasi / Associates	PT NPCT1	Investasi / Investment
	PT RSP	Kesehatan / Health
	PT CTP	Jasa Pembangunan / Construction Services

Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

Alasan Dilakukan Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Perseroan serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Realisasi Transaksi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Fairness of Transaction

Transactions with related parties have been conducted fairly in accordance with the interests of the Company (*Arm's Length Transaction*). Transactions have been carried out in accordance with statutory regulations and are free from conflicts of interest.

Reasons of Transaction

All transactions with related parties are carried out on the grounds of the Company's business needs and are intended to improve the Company's performance.

Realization of Transactions

Details of significant account with related parties (government, government entities or otherwise stated) are as follows:



a. Kas dan Setara Kas

a. Cash and Cash Equivalents

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)
Bank				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	506.968	0,96%	516.128	0,99%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	\145.236	0,28%	\140.963	0,27%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.264	0,04%	19.976	0,04%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.124	0,02%	1.244	0,00%
PT Bank Syariah Mandiri	8.754	0,02%	10.387	0,02%
PT Bank BNI Syariah	-	0,00%	9.671	0,02%
Jumlah / Total	693.346	1,32%	698.370	1,34%
Dolar AS / US Dollar				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.543	0,30%	193.637	0,37%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	133.444	0,25%	36.288	0,07%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.759	0,01%	24.318	0,05%
PT Bank BNI Syariah	2.820	0,01%	-	-
Jumlah / Total	302.566	0,57%	254.243	0,49%
Euro				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00%	0	0,37%
Jumlah / Total	-	0,00%	0	0,49%
Deposito Berjangka / Time Deposit				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	555.194	1,06%	1.073.097	2,05%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	409.072	0,78%	583.241	1,11%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	333.003	0,63%	548.298	1,05%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	304.400	0,58%	131.816	0,25%
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	64.200	0,12%	19.500	0,04%
PT Bank Syariah Mandiri	41.707	0,08%	275.290	0,53%
Jumlah / Total	1.707.576	3,25%	2.631.242	5,03%
Dolar AS / US Dollar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	705.384	1,34%	4.906.697	9,37%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	604.710	1,15%	6.144.937	11,73%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.672	0,00%	67.168	0,13%
Jumlah / Total	1.311.766	2,49%	11.118.802	21,23%

b. Investasi Jangka Pendek

b. Short-Term Investment

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)
Bank				
Rupiah				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	0,00%	104.642	0,20%
Dolar AS / US Dollar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.555.388	16,52%	2.154.655	4,11%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.391.503	4,62%	-	0,00%
Jumlah / Total	10.946.891	21,14%	2.259.297	4,31%

c. Piutang Usaha

c. Trade Receivables

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Piutang Usaha / Trade Receivables	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)
PT Djakarta Llyod (Persero)	63.483	0,12%	63.483	0,12%
Tentara Nasional Indonesia / Indonesian Armed Forces	28.497	0,06%	13.198	0,03%
PT Semen Padang	19.692	0,04%	17.401	0,03%
PT Pertamina Trans Kontinental	14.953	0,03%	12.776	0,02%
PT Pertamina (Persero)	9.862	0,02%	9.830	0,02%
PT Dharma Lautan Nusantara	4.798	0,01%	4.798	0,01%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.398	0,01%	1.024	0,00%
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	3.276	0,01%	5.896	0,01%
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.143	0,00%	5.569	0,01%
Instansi Pemerintah / Government Institutions	1.918	0,00%	191	0,00%
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.697	0,01%	1.448	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.386	0,00%	4.724	0,01%
PT Bukit Asam	607	0,00%	607	0,00%
BPJS Kesehatan	-	0,00%	67.590	0,13%
Lain-lain / Others	1.514	0,00%	136.857	0,26%
Sub Jumlah / Sub Total	159.223	0,31%	345.392	0,65%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment	(102.579)	(0,20%)	(210.194)	(0,41%)
Jumlah / Total	56.644	0,11%	135.199	0,24%



d. Piutang Lain-lain

d. Other Receivables

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Piutang Lain-lain / Other Receivables	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)
PT JICT	740.737	1,40%	659.702	1,26%
PT CTP	387.256	0,75%	111.546	0,22%
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989	0,02%	11.989	0,02%
PT Nindya Karya (Persero)	8.746	0,02%	-	0,00%
PT Jakarta Llyod (Persero)	4.926	0,01%	4.926	0,01%
PT RSP	4.275	0,01%	-	0,00%
Instansi Pemerintah / Government Institutions	2.512	0,00%	2.688	0,01%
PT NPCT1	1.171	0,00%	1.391	0,00%
Tentara Nasional Indonesia / Indonesian Armed Forces	935	0,00%	935	0,00%
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336	0,00%	336	0,00%
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234	0,00%	234	0,00%
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230	0,00%	230	0,00%
PT Utama Karya (Persero)	-	0,00%	1.551	0,00%
Lain-lain / Others	27.964	0,05%	25.690	0,05%
Sub Jumlah / Sub Total	1.191.311	2,26%	821.219	1,57%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment	(39.784)	-0,07%	(36.267)	-0,07%
Jumlah / Total	1.151.527	2,19%	784.951	1,50%

e. Pendapatan Masih akan Diterima

e. Accrued Revenues

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Pendapatan Masih akan Diterima / Accrued Revenue	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Aset / Percentage to Total Assets (%)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.715	0,01%	560	0,00%
PT JICT	8.058	0,02%	2.600	0,00%
PT NPCT1	1.753	0,00%	1.731	0,00%
BPJS Kesehatan	-	0,00%	40.513	0,08%
Lainnya / Others	354	0,00%	1.182	0,00%
Jumlah / Total	12.882	0,03%	46.586	0,08%

f. Pinjaman Bank Jangka Pendek

f. Short-Term Bank Loans

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-Term Bank Loans	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00%	28.194	0,08%
Jumlah / Total	-	0,00%	28.194	0,08%

g. Utang Usaha

g. Trade Payables

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Utang Usaha / Trade Payables	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	539.150	1,54%	573.631	1,69%
PT Wijaya Karya (Persero)	248.223	0,71%	9.571	0,03%
PT RSP	11.771	0,03%	-	0,00%
PT Utama Karya (Persero)	10.030	0,03%	10.030	0,03%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.721	0,02%	6.608	0,02%
Koperasi Pegawai Maritim	6.535	0,02%	4.773	0,01%
PT Pertamina Patra Niaga	3.139	0,01%	3.869	0,01%
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.972	0,01%	478	0,00%
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1.831	0,01%	-	0,00%
PT Nusantara Regas	1.392	0,00%	1.366	0,00%
PT Pertamina (Persero)	1.015	0,00%	241	0,00%
PT Waskita Karya (Persero)	631	0,00%	631	0,00%
PT PLN (Persero)	328	0,00%	-	0,00%
PT Jakarta International Container Terminal	27	0,00%	30	0,00%
PT Multimedia Nusantara	-	0,00%	12.207	0,04%
Lain-lain / Others	455.352	1,30%	453.117	1,30%
Jumlah / Total	1.288.115	3,68%	1.076.553	3,12%

h. Uang untuk Diperhitungkan

h. Advances from Customer

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Uang untuk Diperhitungkan / Advances from Customer	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
Instansi Pemerintah / Government Institutions	19	0,00%	19	0,00%
PT Semen Padang	16	0,00%	1	0,00%
PT Pertamina Trans Kontinental	1	0,00%	55	0,00%
Tentara Nasional Indonesia / Indonesian Armed Forces	0	0,00%	709	0,00%



Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Uang untuk Diperhitungkan / Advances from Customer	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	-	0,00%	50	0,00%
Lain-lain / Others	88	0,00%	117	0,00%
Jumlah / Total	124	0,00%	950	0,00%

i. Uang Titipan Pelanggan

i. Deposits from customer

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Uang Titipan Pelanggan / Deposits from customer	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
PT BNI Life Insurance	8.828	0,03%	5.834	0,02%
Instansi Pemerintah / Government Institutions	1.993	0,01%	1.683	0,00%
PT Bhandha Ghara Reksa	1.211	0,00%	1.211	0,00%
BPJS Kesehatan	839	0,00%	345	0,01%
Lain-lain / Others	13.911	0,06%	9.309	0,01%
Jumlah / Total	26.782	0,10%	18.382	0,04%

j. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya dan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

j. Other Current Liabilities and Other Non-Current Liabilities

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya dan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Current Liabilities and Other Non-Current Liabilities	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
Jangka Pendek / Short-Term				
PT JICT	38.981	0,11%	38.981	0,11%
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666	0,09%	31.666	0,09%
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	1.084	0,00%	2.715	0,01%
Jumlah / Total	71.731	0,20%	73.362	0,21%
Jangka Panjang / Long-Term				
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	24.678	0,07%	27.138	0,08%
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	0,00%	3.000	0,01%
Jumlah / Total	24.678	0,07%	30.138	0,09%

k. Utang Bank Jangka Panjang

k. Long-Term Bank Loan

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam jutaan Rupiah) /
Table of Realization of Related Party Transaction (in million Rupiah)

Utang Bank Jangka Panjang / Long-Term Bank Loan	31 Desember 2020 / December 31, 2020		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)	Total	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%) / Percentage of Total Liabilities (%)
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00%	114.990	0,00%
Jumlah / Total	-	0,00%	114.990	0,00%

l. Remunerasi Personil Manajemen Kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp242,32 miliar dan Rp220,17 miliar masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

l. Key Management Personnel Remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp242.32 billion and Rp220.17 billion for 2020 and 2019, respectively.

Kebijakan Mekanisme Reviu Transaksi

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme reviu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar.

Transaction Review Mechanism Policy

Every transaction with related parties must go through a review mechanism as determined by the Company. All significant transactions and balances with related parties are carried out on normal and fair terms.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are made based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions made with unrelated parties.

Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang direviu oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

The terms and conditions of transactions with related parties are generally carried out as with third parties which are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

Pemenuhan Ketentuan Terkait

Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

Fulfillment of Related Provisions

During 2020, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties.

PEMBAYARAN PAJAK

PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

IPC dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, di mana hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PAYMENT OF TAXES

TAX PAYMENT PUBLICATION

In its operational activities, IPC has implemented Good Corporate Governance which is carried out in a transparent and accountable manner, particularly in managing its taxation rights and obligations, where taxation rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations.



PEMBAYARAN PAJAK

Total Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2020, sebagai berikut:

PAYMENT OF TAXES

Total Tax Payments and Non-Tax State Revenues for the period January to December 2020 are as follows:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP (dalam jutaan Rupiah) / Table of Tax and PNBP Payment (in million Rupiah)		
Uraian Pajak / Tax Description	Tahun 2020 / Year 2020	Tahun 2019 / Year 2019
Kontribusi Pajak / Tax Contribution		
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 / Deposit of Income Tax Article 25 and Article 29	80.214	116.123
Penyetoran PPN + PPN Impor + PPN WAPU / Deposit of VAT + Import VAT + WAPU VAT	582.242	520.697
Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 26 / Deposit of Income Tax 21, Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	541.102	491.425
Penyetoran Pajak Lainnya (termasuk PBB) / Deposit of Income Tax 21, Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	42.811	43.810
Total Kontribusi Pajak / Total Tax Contribution	1.246.369	1.172.056
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) / Non-Tax State Revenues (PNBP)		
Pajak dan Tunda / Pilotage and Towage	46.003	43.335
Konsesi / Concession	201.970	223.067
Total PNBP	247.973	266.402
Jumlah / Total	1.494.342	1.438.458

Keterangan *): Tidak termasuk perhitungan pajak atas sanksi dan denda / Note *): Does not include the calculation of taxes on sanctions and fines

Secara keseluruhan, jumlah Pembayaran Pajak yang direalisasikan IPC pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.246,37 miliar, sedangkan pembayaran PNBP tercatat sebesar Rp247,97 miliar. Jumlah tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.172,06 miliar berupa Pembayaran Pajak dan Rp266,40 miliar berupa Pembayaran PNBP.

Overall, the amount of tax payments realized by IPC in 2020 was recorded at Rp1,246.37 billion, while PNBP payments were recorded at Rp247.97 billion. This amount has changed when compared to the realization in 2019 of Rp1,172.06 billion in the form of tax payments and Rp266.40 billion in the form of PNBP payments.

Realisasi pembayaran PPN, PPN Impor dan PPN WAPU tahun 2020 tercatat sebesar Rp582,24 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp520,70 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pencatatan atas beban pajak menggunakan metode *cash basis* sehingga terdapat pembebanan pajak PPN WAPU tahun 2019 yang tercatat di tahun 2020 yaitu atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kalibaru & Pelabuhan Kijing dengan nilai investasi sebesar Rp1,7 triliun. Selain itu adanya penurunan atas pembayaran PPN sebesar Rp108,97 miliar yang disebabkan oleh menurunnya PPN Keluaran yang sejalan dengan penurunan pendapatan di tahun 2020.

The realization of VAT, Import VAT and WAPU VAT payments in 2020 was recorded at Rp582.24 billion, higher than the realization in 2019 of Rp520.70 billion. Such increase was due to the recording of the tax expense using the cash basis method, thus, there was a 2019 WAPU VAT tax imposition recorded in 2020, namely for the construction of Kalibaru Port & Kijing Port project with an investment value of Rp1.7 trillion. In addition, there was a decrease in VAT payments of Rp108.97 billion due to a decrease in Output VAT which is in line with the decline in income in 2020.

Realisasi pembayaran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 26 tahun 2020 tercatat sebesar Rp541,10 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp491,43 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tagihan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan

The realization of payment of Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 (2) and Income Tax Article 26 in 2020 was recorded at Rp541.10 billion, higher than the realization in 2019 of Rp491.43 billion. Such increase was due to the invoice for the construction of Kalibaru Port and

Kalibaru dan Pelabuhan Kijing di tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020 sehingga mengakibatkan kenaikan pembayaran PPh pasal 4(2) sebesar Rp51 miliar.

Penerapan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan pada Takasi tahun 2020 merupakan asumsi penyetoran periode Triwulan IV tahun 2019 sampai dengan Triwulan III tahun 2020. Untuk penyajian periode usulan RKAP tahun 2021 merupakan asumsi penyetoran periode Triwulan IV tahun 2020 sampai dengan Triwulan III tahun 2021.

Pembayaran konsesi untuk penyajian periode tahun 2019 merupakan penyetoran periode Triwulan IV tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2019. Sedangkan untuk penyajian realisasi periode tahun 2020 merupakan pembayaran atas beban konsesi periode Triwulan IV tahun 2019 sampai dengan Triwulan III tahun 2020.

Permasalahan Perpajakan

Bahwa pada tahun 2017 perusahaan dilakukan audit pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (KPP WPBE) Jakarta untuk Tahun Pajak 2015. Salah satu objek pajak yang diaudit adalah objek pajak penghasilan badan. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Pajak Penghasilan Badan nomor 00172/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 3 April 2017, yang menjadi objek sengketa pajak atas Pajak Penghasilan Badan perusahaan adalah adanya koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar USD265 juta (ekuivalen Rp3.466.002.569.445,- dengan kurs Rp13.079/USD) atas pendapatan premium (*upfront fee*) yang diterima dari Hutchison Port Jakarta Pte.Ltd (HPJ) sebesar USD215 juta dan Hutchison Port Indonesia (HPI) sebesar USD50 juta yang diakui secara pro rata selama 25 tahun sesuai dengan jangka waktu perpanjangan tetapi KPP WPBE menyatakan bahwa 'pajak atas pendapatan premium harus dibayar sekaligus' yang selanjutnya KPP WPBE pada tanggal 20 April 2017 mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor 00002/206/15/093/17 dengan nilai kewajiban pajak sebesar Rp 805.287.733.489,-.

Selanjutnya atas SKPKB tersebut, pada tanggal 18 Juli 2017 Perusahaan mengajukan keberatan ke Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar melalui surat nomor KU.05.03/18/7/1/KEU/KEU/PI.II-17 akan tetapi permohonan keberatan tersebut dikabulkan sebagian berdasarkan Surat Keputusan nomor KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nilai kewajiban pajak menjadi sebesar Rp 614.304.124.120,-.

Kijing Port in 2019 which was paid in 2020, resulting in an increase in the payment of Income Tax article 4 (2) of Rp51 billion.

The application of Government Regulation Number 11 of 2015 concerning the types and rates of PNBP that applies to the Ministry of Transportation in Takasi in 2020 is an assumption of deposits for the fourth quarter of 2019 to the third quarter of 2020. The presentation of the proposed RKAP period in 2021 is an assumption of deposits for the period of the fourth quarter of 2020 to the third quarter of 2021.

The concession payment for the presentation of the 2019 period is a deposit for the fourth Quarter of 2018 to the third quarter of 2019. Meanwhile, the presentation of the 2020 period realization is a payment for the concession expense for the fourth quarter of 2019 to the third quarter of 2020.

Tax Issues

That in 2017 the company was subjected to a tax audit by the Jakarta Large Tax Office Four (KPP WPBE) for the 2015 Fiscal Year. One of the tax objects audited is corporate income tax. Based on the Notification of Tax Audit Findings (SPHP) Letter Number 00172/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2017 dated April 3, 2017, the object of tax disputes over Corporate Income tax is the correction of Non-Operating Revenue amounting to USD265 million (equivalent to Rp3,466,002,569,445, - at an exchange rate of Rp13,079/USD) on premium income (upfront fee) received from Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd (HPJ) of USD215 million and Hutchison Port Indonesia (HPI) of USD50 million which is recognized on a prorated basis for 25 years in accordance with the extension period but KPP WPBE states that 'tax on premium income must be paid at once' which subsequently KPP WPBE on April 20, 2017 issued Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) number 00002/206/15/093/17 with a tax liability value of Rp805,287,733,489, -.

Subsequently, based on the SKPKB, on July 18, 2017 the Company submitted an objection to the Large Taxpayer Regional Office through letter number KU.05.03/18/7/1/KEU/KEU/PI.II-17, however the objection request was partially granted based on Decree number KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 with a tax liability value of Rp614,304,124,120, -.



Selanjutnya atas Surat Keputusan nomor KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tersebut, pada tanggal 20 Maret 2018 Perusahaan mengajukan permohonan banding pajak ke Pengadilan Pajak melalui surat nomor KU.05.03/20/3/1/KEU/UT/PI.II-18, akan tetapi permohonan banding pajak ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-002489.15/2018/PP/M.XXA tanggal 9 Juli 2019. Pada dasarnya putusan banding pajak tersebut tidak bulat karena salah satu anggota Majelis Hakim berpendapat berbeda (*Dissenting Opinion*).

Berdasarkan putusan banding pajak tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak yang menjadi pokok hutang pajak sebesar Rp 614.304.124.120,- yang kemudian atas putusan banding pajak tersebut KPP WPBE mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 persen dari pokok hutang pajak sebesar Rp614.304.124.120,- sehingga total kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan menjadi sebesar Rp 1.228.608.248.240,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- 1) Pokok hutang dan sanksi administrasi pajak sebesar Rp614.304.124.120,- dibayar pada tanggal 22 Agustus 2019;
- 2) Sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124.120,- dibayar pada tanggal 5 Desember 2019.

Selanjutnya atas putusan banding pajak tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2019 Perusahaan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui surat nomor 0031/PK-PLD/IGP/X/2019.

Berdasarkan putusan PK dari MA pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Register 4223B/PK/PJK/2020 dan Surat Pengantar Nomor: PKMA-2281/VIII/PAN.WK/2020 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut dinyatakan batal.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Selama tahun 2020, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas operasional IPC.

Furthermore, based on the Decree number KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017, on March 20, 2018 the Company submitted a tax appeal request to the Tax Court through letter number KU.05.03/20/3/1/KEU/UT/PI. II-18, however, the tax appeal application was rejected by the Tax Court Judges based on the Tax Court Decision Number Put-002489.15/2018/PP/M.XXA dated July 9, 2019. Basically, the decision on the tax appeal was not unanimous as one of the members of the Panel of Judges had a Dissenting Opinion.

Based on the decision on the tax appeal, the Company is obliged to pay the tax which is the principal amount of the tax debt amounting to Rp614,304,124,120, - which then for the tax appeal decision, KPP WPBE issued a Tax Collection Letter (STP) for administrative sanctions in the form of a fine of 100 percent of the principal amount of tax payable amounting to Rp614,304,124,120, so that the total tax liability paid by the Company was Rp1,228,608,248,240 with details of the payment as follows:

- 1) Principal debt and tax administration sanction amounting to Rp614,304,124,120,- paid on August 22, 2019;
- 2) Administrative sanctions amounting to Rp614,304,124,120,- paid on December 5, 2019.

Furthermore, on the decision of the tax appeal, on October 17, 2019, the Company made extraordinary legal remedy, namely an application for Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through letter number 0031/PK-PLD/IGP/X/2019.

Based on the PK decision from the Supreme Court on December 14, 2020 with Register Number 4223B/PK/PJK/2020 and Cover Letter Number: PKMA-2281/VIII/PAN.WK/2020 stated that the Tax Court Decision was declared null and void.

REGULATORY CHANGES AND THE IMPACT

In 2020, there were no regulatory changes that affected the operational activities of IPC.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan senantiasa menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. Sepanjang tahun 2020, IPC telah menerapkan sejumlah amandemen/PSAK baru yang relevan dengan operasinya. Berikut adalah uraian terkait perubahan kebijakan akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- **Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020**

Amandemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020**

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020**

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* ("IASB") dan *Financial Accounting Standards Board* ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- **PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020**

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Company continues to apply the applicable Statement of Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) in the current year. Throughout 2020, IPC has implemented a number of new amendments/PSAKs relevant to its operations. The following is a description of changes in accounting policies that are relevant to financial reporting and effective for the period starting on or after January 1, 2020 as follows:

- **Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.**

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

- **PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020.**

This PSAK provides classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting in information that are more timely, relevant and understandable to users of the financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirement based on management's judgment.

- **PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020.**

This PSAK is a single standard that is a joint project between the International Accounting Standards Board ("IASB") and the Financial Accounting Standards Board ("FASB"), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to perform analysis before recognizing the revenue.

- **PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020.**

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 (two) optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.



Perseroan telah menerapkan standar akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73 “Sewa”, oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” telah dibebankan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan untuk PSAK 73 “Sewa”, Perseroan telah mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73 “Sewa” pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 4, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dari penerapan pertama kali PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

PSAK 71

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

The Company has implemented new accounting standards and such adjustments or amendments since January 1, 2020. The Company did not restate comparative information in 2019 on the implementation of PSAK 71 “Financial Instruments” and PSAK 73 “Leases”, therefore comparative information for 2019 cannot be compared to financial information presented for the year ended December 31, 2020.

Differences arising from the implementation of PSAK 71 “Financial Instruments” have been charged to the retained earnings on January 1, 2020. As for PSAK 73 “Leases”, the Company has recorded right-of-use assets and lease liabilities as of January 1, 2020. The impact of the application of PSAK 71 “Financial Instruments” and PSAK 73 “Leases” on January 1, 2020 were disclosed in Note 4, the impact on the application of new standards and adjustments or other amendments is not material to the consolidated financial statements.

The impact to the Company’s financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows:

PSAK 71

Classification of financial assets and liabilities

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020:

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)				
Catatan / Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019 / Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020 / Classification based on PSAK 55 January 1, 2020	Saldo Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019 / Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020 / Balance based on PSAK 71 January 31, 2020
Aset Keuangan / Financial assets				
Kas dan Setara Kas / Financial assets	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	15.603.533	15.603.533
Investasi Jangka Pendek / Short-term investment	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	2.259.297	2.259.297
	Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi / Fair value through profit or loss	Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi / Fair value through profit or loss	337.404	337.404
Piutang Usaha – Neto / Short-term investment	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	848.025	572.349
Piutang Lain-lain – Neto / Other receivables - net	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	830.069	830.069
Pendapatan yang Masih Harus Diterima / Accrued revenues	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	305.452	303.719
Investasi Jangka Panjang / Long-term investments	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables	Biaya Perolehan Amortisasi / Amortised cost	2.777.919	2.777.919
	Tersedia untuk Dijual / Loans and receivables	Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi / Fair value through profit or loss	433.104	433.104

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)				
Catatan / Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019 / Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020 / Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019 / Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo Berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020 / Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
Liabilitas Keuangan / Financial liabilities				
Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-term bank loans	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	34.194	34.194
Utang Usaha / Trade payables	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	1.436.482	1.436.482
Beban Akrua / Accrued expenses	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	2.274.727	2.274.727
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current maturities of long- term liabilities	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost		
Utang Bank / Bank loans			12	12
Liabilitas Sewa / Lease liabilities			-	28.449
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi / Other long-term liabilities related parties			19.888	19.888
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other current liabilities			297.915	297.915
Utang Obligasi / Bonds payable	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	21.984.178	21.984.178
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-term liabilities-net of current maturities	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Financial liabilities at amortised cost		
Utang Bank / Bank loans			114.978	114.978
Liabilitas Sewa / Lease liabilities			-	144.442
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other long-term liabilities			235.264	235.264

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Impact on the adoption of PSAK 71 to the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019:

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)				
Uraian / Description	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71 / Balance before Implementation PSAK 71	Klasifikasi / Classification	Kerugian Kredit Ekspektasian / Expected Credit Loss	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71 / Balance after Implementation PSAK 71
ASET / ASSETS				
Aset Lancar / Current Assets				
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	15.603.533		-	15.603.533
Investasi Jangka Pendek / Short-term investment	2.596.701		-	2.596.701
Piutang Usaha – Neto / Trade receivables – Net	848.025		(275.677)	572.348
Piutang Lain-lain – Neto / Other receivables - net	830.069		-	830.069
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka / Advances and prepaid expense	104.182		-	104.182
Pendapatan Masih Akan Diterima / Accrued revenues	305.452		(1.733)	303.719
Persediaan / Inventories	82.941		-	82.941
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid taxes	680.605		-	680.605
Aset Lancar Lainnya / Other current assets	10.253		-	10.253
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	21.061.762		(277.410)	20.784.353



(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71 / Balance before Implementation PSAK 71	Klasifikasi / Classification	Kerugian Kredit Ekspektasian / Expected Credit Loss	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71 / Balance after Implementation PSAK 71
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets				
Investasi Jangka Panjang / Long-term investment	3.211.024	-	-	3.211.024
Properti Investasi – Neto / Investment properties - net	357.295	-	-	357.295
Aset Tetap – Neto / Fixed assets - net	13.387.156	-	-	13.387.156
Aset Kerja Sama Operasi – Neto / Joint operation assets - net	461.100	-	-	461.100
Aset Hak-Guna - Neto / Right of use asset - net	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax assets	73.874	-	-	73.874
Aset Tak Berwujud – Neto / Intangible assets - net	10.818.271	-	-	10.818.271
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak / Estimated claims for tax refund	958.917	-	-	958.917
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other non-current assets	1.711.200	-	-	1.711.200
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	30.978.837	-	-	30.978.837
Jumlah Aset / Total Assets	52.040.600	-	(277.410)	51.763.190
LIABILITAS / LIABILITIES				
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities				
Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-term bank loans	34.194	-	-	34.194
Utang Usaha / Trade payables	1.436.482	-	-	1.436.482
Pendapatan Diterima di muka - Jangka Pendek / Short-term unearned revenues	845.489	-	-	845.489
Utang Pajak / Taxes payable	445.016	-	-	445.016
Beban Akrua / Accrued expenses	2.274.727	-	-	2.274.727
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current maturities of long-term liabilities	19.900	-	-	19.900
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other current liabilities	297.915	-	-	297.915
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	5.353.723	-	-	5.353.723
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities				
Utang Obligasi / Bonds payable	21.984.178	-	-	21.984.178
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-term liabilities -net of current maturities	350.242	-	-	350.242
Pendapatan Diterima di Muka - Jangka Panjang / Long-term unearned revenue	4.005.631	-	-	4.005.631
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee benefit liabilities	1.966.326	-	-	1.966.326
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred tax liabilities	254.289	-	-	254.289
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	28.560.666	-	-	28.560.666
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	33.914.389	-	-	33.914.389
EKUITAS / EQUITY				
Modal Saham / Share capital	1.444.029	-	-	1.444.029
Modal Donasi / Donated capital	26.826	-	-	26.826
Tambahan Modal Disetor / Additional paid-in capital	(317.597)	-	-	(317.597)
Saldo Laba / Retained earnings	15.729.277	-	(277.410)	15.451.868
Penghasilan Komprehensif Lain / Other comprehensive income	(105.009)	-	-	(105.009)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Neto / Equity attributable to owners of the parent entity – Net	16.777.526	-	(277.410)	16.500.116
Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling interests	1.348.685	-	-	1.348.685
Ekuitas – Neto / Equity – net	18.126.211	-	-	17.848.801

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020:

PSAK 73

The following table presents the impact of the implementation of PSAK 73 on January 1, 2020:

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)			
Uraian / Description	1 Januari 2020 / January 1, 2020		
	Sebelum Penyesuaian / Before Adjustment	Penyesuaian PSAK 73 / PSAK 73 Adjustments	Setelah Penyesuaian / After Adjustment
Aset / Assets			
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka / Advances and prepaid expenses	2.355	(2.355)	-
Aset Hak-Guna – Neto / Right-of-use assets - net	-	(227.050)	227.050
Liabilitas / Liabilities			
Liabilitas Sewa - Jangka Pendek / Lease liabilities – current	-	(88.888)	88.888
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang / Lease liabilities – non current	-	(135.807)	135.807

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

Effective beginning on or after 1 January 2021

Amendments to PSAK No. 22: Definition of Business, effective from 1 January 2021 and early adoption is permitted.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan *output*, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

Perseroan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada bulan Maret 2020 di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja Perseroan pada tahun 2020. Efek masa depan dari penyebaran virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih sulit diukur.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan *throughput* di seluruh Cabang dan Anak Perusahaan, adanya beberapa proyek strategis yang dibatalkan, perpindahan beberapa jenis komoditas *cargo* ke terminal pesaing dikarenakan adanya *tariff* yang lebih murah, dan rencana penyesuaian *tariff* pada beberapa layanan jasa kepelabuhan tertunda karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

Manajemen menganalisa bahwa kendala-kendala yang tengah dihadapi oleh IPC masih dapat diakomodir dengan menggunakan inisiatif strategis yang tepat dan dengan utilisasi sumber daya yang optimal, sehingga kelangsungan usaha IPC dapat terjaga dengan baik.

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen IPC telah menganalisa kemampuan Perseroan dalam melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa IPC memiliki kemampuan yang optimal dan didukung oleh sumber daya yang tersedia untuk melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Walaupun kondisi ekonomi dan sosial masih belum pulih, namun Manajemen IPC tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan IPC untuk melanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan Manajemen dalam melakukan analisa terhadap kelangsungan usaha adalah Tingkat Kesehatan Perusahaan yang masih berada pada posisi yang kuat, serta analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) yang menggambarkan posisi keunggulan IPC yang melebihi kelemahannya.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

POTENTIALLY INFLUENCING MATTERS OF BUSINESS CONTINUITY

The Covid-19 pandemic, which began in March 2020 in Indonesia, has had a significant impact on the Company's performance in 2020. The long-term impact of the spread of the Covid-19 virus on Indonesia and the Company are still difficult to measure.

There are several factors that have influenced the Company's business continuity, namely the Covid-19 pandemic which resulted in a decrease in throughput in all branches and subsidiaries, several strategic projects that were canceled, the transfer of several types of cargo commodities to competing terminals due to lower tariffs, and plans to adjust tariffs for some port services have been delayed due to unstable economic conditions.

Management analyzes that the obstacles that are being faced by IPC can still be accommodated by using the right strategic initiatives and with optimal resource utilization, so that the continuity of IPC's business can be well maintained.

MANAGEMENT ASSESSMENT ON POTENTIALLY INFLUENCING MATTERS ON BUSINESS CONTINUITY

IPC management has assessed the Company's ability to continue as a going concern and believes that IPC has optimal capabilities and is supported by available resources to continue its business in the future. Despite the economic and social conditions that have not yet recovered, IPC Management does not see any material uncertainty that could raise significant doubts about IPC's ability to continue its business.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT FOR THE ASSESSMENT

Some of the factors considered by management in conducting an assessment of business continuity are the Company's soundness level, which remains in a strong position, as well as a SWOT analysis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) which illustrates the position of IPC's advantages that exceed its weaknesses.

Manajemen juga telah menganalisa bahwa IPC memiliki kekuatan yang optimal dalam menjawab tantangan dan meraih peluang usaha yang ada di masa yang akan datang. Adapun kekuatan yang dimiliki IPC antara lain:

- Memiliki struktur keuangan yang kuat;
- *Corporate branding* dan *networking* yang luas dengan pelaku industri nasional dan internasional sehingga investor cenderung memilih IPC sebagai mitra pengembangan pelabuhan di Indonesia;
- Keunggulan dan pemahaman yang mendalam sebagai *landlord* dan operator terminal dalam bisnis kepelabuhan Indonesia;
- Pengalaman dalam pengembangan pelabuhan skala internasional;
- Portofolio bisnis Anak dan Cucu Perusahaan yang telah terstruktur dan terdiversifikasi dengan baik dalam memberikan layanan terkait kepelabuhan logistik dan layanan pendukungnya;
- Lokasi geografis wilayah operasi IPC yang berada pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- Memiliki kemampuan *handling cargo* untuk seluruh jenis kargo dengan fasilitas dan peralatan cabang-cabang pelabuhan yang dapat melayani hampir semua jenis kargo;
- Memiliki hubungan dengan *stakeholder* pelabuhan yang baik antara lain dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, Perguruan Tinggi dan *Global Network*;
- Memiliki talenta SDM yang telah terdidik dan terlatih dalam lingkup kepelabuhan dan logistik.

Untuk memastikan keberlangsungan bisnis jasa kepelabuhanan apabila terjadi bencana atau risiko usaha lainnya, Perseroan telah menyusun kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/23/12/1/RNO/UT/PI.II-19 tanggal 23 Desember 2019. Dokumen *Business Continuity Management* (BCM) berisi tentang:

- a. *Business Impact Analysis* (BIA),
- b. *Risk Assessment* (RA),
- c. *Threat Assessment*,
- d. *Business Continuity Strategy* (BCS),
- e. *Procedure drill/Exercise*.

Hingga saat ini, BCM telah diterapkan di 5 (lima) Cabang Pelabuhan IPC yaitu Cabang Pelabuhan Jambi, Cabang Pelabuhan Palembang, Cabang Pelabuhan Cirebon, Cabang Pelabuhan Pontianak, dan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam.

The management also analyzed that IPC has optimal strength in responding to challenges and seizing business opportunities in the future. IPC's strengths are, among others:

- Possess a strong financial structure;
- Extensive corporate branding and networking with national and international industry players, hence investors tend to choose IPC as a port development partner in Indonesia;
- Excellence and deep understanding as landlord and terminal operator in the port business in Indonesia;
- Sufficient experience in developing international scale ports;
- Well-structured and well-diversified business portfolio of subsidiaries and second-tier subsidiaries in providing services related to port, logistics and supporting services;
- The geographical location of IPC's operational areas is in areas with high economic growth;
- Have cargo handling capabilities for all types of cargo with facilities and equipment of port branches that can serve almost all types of cargo;
- Have a good relationship with port stakeholders, among others, with the Central and Regional Government, Universities, and the Global Network;
- Have talents that have been educated and trained in the scope of port and logistics.

To ensure the continuity of the port services business in the event of a disaster or other business risk, the Company has formulated policies and guidelines of *Business Continuity Management* (BCM) as outlined in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: HK.01/23/12/1/RNO/UT/PI.II-19 dated December 23, 2019. The *Business Continuity Management* (BCM) document contains:

- a. *Business Impact Analysis* (BIA),
- b. *Risk Assessment* (RA),
- c. *Threat Assessment*,
- d. *Business Continuity Strategy* (BCS),
- e. *Procedure drill/Exercise*.

Until now, BCM has been implemented in 5 (five) IPC Port Branches, namely Jambi Port Branch, Palembang Port Branch, Cirebon Port Branch, Pontianak Port Branch, and Pangkal Balam Port Branch.



Di tahun 2020, capaian skor Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 tercatat sebesar **77,50** dan belum mencapai target revisi RKAP tahun 2020 sebesar **78,00**. Dengan total skor sebesar **77,50** maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masuk dalam kategori perusahaan **"SEHAT"** dengan nilai **"A"**. Penjelasan mengenai Tingkat Kesehatan Perusahaan akan dijelaskan secara lebih mendalam di Laporan Tahunan ini pada sub bab berikutnya.

In 2020, the achievement of the Company's Soundness Level score for 2020 was recorded at **77.50** and has not yet reached the revised RKAP target for 2020 of **78.00**. With a total score of **77.50**, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is classified in the **"HEALTHY"** company category with an **"A"** score. The explanation regarding the Company's Soundness Level will be explained in more depth in this Annual Report in the next sub-chapter.

Selain itu, IPC telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis di tahun 2020 untuk menghadapi dampak dari kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, antara lain:

In addition, IPC has issued various strategic policies in 2020 to deal with the impact of constraints that may affect its business continuity, including:

1. Berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* (pelanggan, asosiasi, dan regulator);
2. Pemberian relaksasi berupa insentif tarif pelayanan jasa kapal kepada beberapa *customer* terbesar;
3. Melakukan pemasaran intensif atas *asset idle* dan yang belum optimal;
4. Penyelesaian perpanjangan kerja sama dengan mitra;
5. Melakukan penjajakan pada mitra-mitra baru; dan
6. Melaksanakan program *Revenue Enhancement* di beberapa Anak Perusahaan.

1. Coordinating and establishing good relationships with stakeholders (customers, associations and regulators);
2. Providing relaxation in the form of incentives for ship service rates to some of the largest customers;
3. Conduct intensive marketing of idle and suboptimal assets;
4. Settlement of the extension of cooperation with partners;
5. Exploring new partners; and
6. Implemented Revenue Enhancement programs in several Subsidiaries.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY SOUNDNESS LEVEL

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 / Company Soundness Level in 2020

No	Indikator / Indicators	Satuan / Unit	Polaritas / Polarity	Bobot / Weight	Realisasi 2019 / Realization in 2019		RKAP 2020 / 2020 RKAP		Realisasi 2020 / Realization in 2020	
					Nilai / Value	Skor / Score	Nilai / Value	Skor / Score	Nilai / Value	Skor / Score
I ASPEK KEUANGAN / FINANCIAL ASPECT										
A.	Return on Equity (ROE)	%	↑	15	15,72%	15,00	3,20%	4,00	7,23%	7,50
B.	Return on Investment (ROI)	%	↑	10	13,37%	8,00	7,92%	4,00	9,25%	4,00
C.	Rasio Kas / Cash Ratio	%	↑	3	341,11%	3,00	320,24%	3,00	327,21%	3,00
D.	Rasio Lancar / Current Ratio	%	↑	4	394,74%	4,00	384,25%	4,00	383,17%	4,00
E.	Collection Period	Hari / Days	↓	4	28	4,00	35	4,00	22	4,00
F.	Perputaran Persediaan / Inventory Turnover	Hari / Days	↓	4	3	4,00	2	4,00	2	4,00
G.	Perputaran Total Aset / Total Assets Turnover	%	↑	4	3,26%	2,50	29,20%	1,00	30,00%	1,00
H.	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset / Equity To Total Assets Ratio	%	↑	6	34,83%	6,00	33,15%	6,00	33,06%	6,00
Skor untuk Aspek Keuangan / Financial Aspect Score				50,00	46,50	30,00	33,50			
II ASPEK OPERASIONAL / OPERATIONAL ASPECT										
A.	Waiting Time For Pilot	Jam / Hour	↓	9	BS (0,30)	9,00	BS (0,50)	9,00	BS (0,37)	9,00
B.	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas / Container Mooring Effectiveness	%	↑	9	BS (73,15)	9,00	BS (65,00)	9,00	BS (71,95)	9,00
C.	Produktivitas B/MBongkar Muat Petikemas / Container Loading/ Unloading Productivity	B/S/H	↑	8	BS (51,01)	8,00	BS (40,00)	8,00	BS (53,24)	8,00
D.	Yard Occupancy Ratio Petikemas / Container Yard Occupancy Ratio	%	↓	9	BS (40,20)	9,00	BS (40,00)	9,00	BS (36,68)	9,00
Skor untuk Aspek Operasional / Score For Operational Aspect				35,00	35,00	35,00	35,00			

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 / Company Soundness Level in 2020

No	Indikator / Indicators	Satuan / Unit	Polaritas / Polarity	Bobot / Weight	Realisasi 2019 / Realization in 2019		RKAP 2020 / 2020 RKAP		Realisasi 2020 / Realization in 2020	
					Nilai / Value	Skor / Score	Nilai / Value	Skor / Score	Nilai / Value	Skor / Score
III ASPEK ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ASPECT										
A.	Laporan Perhitungan Tahunan / Annual Calculation Report	Hari / Days	↓	3	< 4	3,00	< 4	3	< 4	3
B.	Rancangan RKAP / RKAP Draft	Hari / Days	↓	3	< 2	3,00	< 2	3	< 2	3
C.	Laporan Periodik / Periodic Report	Tanggal / Date	↓	3	≤ 0	3,00	≤ 0	3	≤ 0	3
D.	Efektivitas Penyaluran Dana / Fund Distribution Effectiveness	%	↑	3	0,00%	-	100,00%	3	0,00%	-
E.	Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman / Loan Collectability Rate	%	↑	3	0,00%	1,00	20,14%	1	3,19%	-
Skor untuk Aspek Administratif / Administrative Aspect Score		15,00		15,00		10,00		13,00		9,00
Total Skor / Total Score		100,00		100,00		91,50		78,00		77,50
Keterangan / Remark					AA (SEHAT)		A (SEHAT)		A (SEHAT)	

Capaian skor Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 yaitu sebesar **77,50** dan belum mencapai target revisi RKAP tahun 2020 sebesar **78,00**. Dengan total skor sebesar **77,50** maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masuk dalam kategori perusahaan **"SEHAT"** dengan nilai **"A"**.

The achievement of the Company's Soundness Level score for 2020 is **77.50** and has not yet reached the revised RKAP target for 2020 of **78.00**. With a total score of **77.50**, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is classified in the **"HEALTHY"** company category with an **"A"** score.

Berikut penjelasan pencapaian pada masing-masing aspek untuk Taksasi tahun 2020:

The following is the achievements in each aspect for Transactions in 2020:

• **Aspek Keuangan**

Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada aspek ini telah mencapai target yaitu 33,50 dari target.

• **Financial Aspect**

The Company's Soundness Level score in this aspect has reached the target, namely 33.50 of the target.

• **Aspek Operasional**

Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada aspek ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKAP, yaitu 35,00.

• **Operational Aspect**

the Company's soundness score in this aspect reached the target set in RKAP at 35.00.

• **Aspek Administrasi**

Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan pada aspek ini belum mencapai target yaitu 9,00 dari target RKAP yaitu 13,00 dikarenakan ketidaktercapaian indikator efektivitas penyaluran dana dan indikator kolektibilitas pengembalian pinjaman terhadap target RKAP 2020.

• **Administrative aspect**

The Company's Soundness Level score in this aspect has not reached the target, which is 9.00 from the RKAP target of 13.00 due to the failure to achieve the effectiveness of the effectiveness of fund distribution and the collectability indicator of loan repayments against the 2020 RKAP target.

PROSPEK USAHA KE DEPAN

PROSPEK MAKROEKONOMI GLOBAL

Pemulihan perekonomian global diproyeksikan akan berlanjut pada tahun 2021. Peningkatan Aktivitas ekonomi global diperkirakan akan didorong oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara dan didukung oleh keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

FUTURE BUSINESS PROSPECTS

GLOBAL MACROECONOMIC PROSPECTS

The global economic recovery is projected to continue in 2021. Increasing global economic activity is expected to be driven by the implementation of the Covid-19 vaccination in many countries and supported by the sustainability of fiscal and monetary policy stimulus.



Berdasarkan data yang dihimpun oleh IMF, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diestimasikan akan mencapai 5,5 persen dan di tahun 2022 mencapai 4,2 persen. Proyeksi positif atas pertumbuhan ekonomi global di tahun yang akan datang diharapkan berasal dari kenaikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 6,3 persen dan negara maju sebesar 4,3 persen.

Based on data compiled by the IMF, global economic growth in 2021 is estimated to reach 5.5 percent and in 2022 it will reach 4.2 percent. The positive projection for global economic growth in the coming year is expected to come from an increase in the economic growth of developing countries by 6.3 percent and developed countries by 4.3 percent.

Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2021 - 2022

Estimated Global Economic Growth 2021 - 2022

Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth	Tahun 2021 / The Year 2021	Tahun 2022 / The Year 2022
Global / Global	5,5%	4,2%
Negara Maju / Developed Country	4,3%	3,1%
Negara Berkembang / Developing Country	6,3%	5,0%
Volume Perdagangan Dunia / World Trade Volume	8,1%	6,3%
Harga Minyak / Oil Price	21,2%	-2,4%

Sumber: *World Economic Outlook Update, Januari 2021 (IMF)*

Pemulihan ekonomi global pada tahun 2021 diperkirakan akan didorong oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara. Ketersediaan vaksin akan sangat menentukan peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi. Sampai dengan pertengahan Januari 2021, sejumlah negara telah memulai proses vaksinasi, antara lain Inggris (6,5 persen populasi), AS (3,6 persen populasi), Uni Eropa (1,5 persen populasi) dan Tiongkok (0,7 persen populasi). *Herd immunity* diharapkan akan mendorong mobilitas ke level normal sebelum adanya pandemi Covid-19 sehingga dapat meningkatkan konsumsi, kegiatan produksi dan perdagangan global.

The global economic recovery in 2021 is expected to be driven by the implementation of the Covid-19 vaccination in many countries. The availability of vaccines will highly determine the increase in mobility and economic activity. As of mid-January 2021, a number of countries have started the vaccination, including the UK (6.5 percent of population), the US (3.6 percent of population), the European Union (1.5 percent of population) and China (0.7 percent of population). Herd immunity is expected to encourage mobility to the normal level before the Covid-19 pandemic so as to increase consumption, production and global trade activities.

Untuk tahun yang akan datang, Bank Indonesia (BI) optimis bahwa pemulihan ekonomi global akan terealisasi melalui kebijakan moneter yang akomodatif. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan *The Fed* yang melanjutkan kebijakan ekstra akomodatif hingga awal tahun 2021. Kebijakan moneter AS yang akomodatif tersebut diiringi dengan potensi pembelian aset pada *current pace*, 80 miliar dolar AS untuk UST dan 40 miliar dolar AS pada *Mortgage-Backed Securities* (MBS) per bulan, dengan perluasan horizon tenor yang lebih panjang. Pada kawasan Uni Eropa, *European Central Bank* (ECB) diyakinkan akan menjaga tingkat suku bunga yang rendah, memperpanjang periode diskon suku bunga *Targeted Longer-Term Refinancing Operations* (TLTRO) hingga Juni 2022, serta meningkatkan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) hingga 1,85 triliun euro dengan perpanjangan waktu hingga Maret 2022. Sementara itu, *Bank of Japan* (BoJ) memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter meliputi *short-term interest rate target* minus 0,1 persen dan menjaga target *long-term rates* di sekitar 0 persen dengan

For the coming year, Bank Indonesia (BI) is optimistic that the global economic recovery will be realized through accommodative monetary policy. This can be seen from The Fed policy which continues its extra accommodative policy until early 2021. This accommodative US monetary policy is accompanied by the potential for asset purchases at a current pace, US \$80 billion for UST and US \$40 billion in Mortgage-Backed Securities (MBS) per month, with an extension of a longer tenor horizon. In the European Union, the European Central Bank (ECB) is convinced to keep interest rates low, extend the discounted interest rate period for the Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) to June 2022, and increase the Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) to 1.85 trillion euros with an extension to March 2022. Meanwhile, the Bank of Japan (BoJ) decided to maintain monetary policy including the short-term interest rate target of minus 0.1 percent and maintain the long-term rate target at around 0 percent with a commitment to purchase government bonds without any limits, maintain the equity purchasing

komitmen pembelian surat utang negara tanpa adanya limit, mempertahankan program pembelian ekuitas ETFs (*Exchange Trade Funds*) dan J-REITs hingga 12 triliun yen dalam setahun, serta memperpanjang *emergency funding* program hingga 6 bulan hingga September 2021.

Kebijakan fiskal ekspansif diperkirakan akan terus berlanjut untuk memitigasi risiko dampak Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. AS telah mempersiapkan *pandemic relief bill* sebesar 908 miliar dolar AS yang ditujukan untuk subsidi *unemployment benefit* dan *direct payment* kepada kepala rumah tangga, distribusi vaksin, pembiayaan sekolah, bantuan kepada usaha kecil, dan pendanaan rumah sakit. Di kawasan Uni Eropa, beberapa negara seperti Jerman, Perancis dan Italia memberikan stimulus tambahan sebesar 1,8 triliun euro untuk dialokasikan pada tahun 2021-2027 yang terdiri dari 1,074 triliun euro berupa *Multiannual Financial Framework* (MFF) dan 750 miliar euro berupa *NextGenerationEU* (NGEU). Jepang turut memberikan dorongan fiskal melalui stimulus sebesar 2,8 triliun dolar AS untuk memberikan kepastian pada pasar keuangan dan mereformasi ekonomi Jepang untuk era pascapandemi, seperti transformasi digital, realisasi *green society*, reorganisasi Usaha Kecil Menengah, serta reorganisasi rantai pasokan.

Implementasi vaksin, kebijakan akomodatif moneter dan kebijakan fiskal yang ekspansif diyakini akan dapat meningkatkan volume perdagangan dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh lembaga *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update January 2021*, volume perdagangan dunia diestimasikan akan tumbuh sebesar 8,1 persen di tahun 2021 dan 6,3 persen di tahun 2022. Sejalan dengan perbaikan volume perdagangan dunia, harga komoditas juga diharapkan dapat meningkat seiring dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global. IMF mengestimasi harga minyak dunia untuk meningkat sebesar 21,2 persen di tahun 2021. Harga minyak berada dalam tren meningkat sebagai respons optimisme pemulihan ekonomi global dan sentimen positif di pasar aset di tengah prakiraan suplai yang lebih rendah dikarenakan keputusan OPEC+ untuk menahan besaran peningkatan produksi.

PROSPEK MAKROEKONOMI NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 diestimasikan akan pulih secara bertahap, sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global dan didukung oleh kebijakan ekonomi domestik yang akomodatif. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 serta kebijakan

program of ETFs (*Exchange Trade Funds*) and J-REITs up to 12 trillion yen in a year, and extend the emergency funding program for up to 6 months until September 2021.

Expansionary fiscal policy is expected to continue to mitigate the risk of the impact of the Covid-19 and promote economic recovery. The US has prepared pandemic relief bill of US \$908 billion aimed at unemployment benefit subsidies and direct payments to household heads, vaccine distribution, school financing, assistance to small businesses, and hospital funding. In the European Union, several countries such as Germany, France and Italy provided an additional stimulus of 1.8 trillion euros to be allocated in 2021-2027 consisting of 1.074 trillion euros in the form of the Multiannual Financial Framework (MFF) and 750 billion euros in the form of NextGenerationEU (NGEU). Japan also provided a fiscal boost through a stimulus of 2.8 trillion US dollars to provide certainty to financial markets and reform the Japanese economy for the post-pandemic era, such as digital transformation, realization of green society, reorganization of Small and Medium Enterprises, and reorganization of supply chains.

The implementation of vaccines, accommodative monetary policy and expansionary fiscal policy are believed to be able to increase the volume of world trade. Based on data compiled by the International Monetary Fund (IMF) in its report entitled *World Economic Outlook Update January 2021*, the world trade volume is estimated to grow by 8.1 percent in 2021 and 6.3 percent in 2022. In line with the improvement in world trade volume, commodity prices are also expected to increase in line with expectations of global economic recovery. The IMF estimates that world oil prices will increase by 21.2 percent in 2021. Oil prices are on an upward trend in response to optimism for global economic recovery and positive sentiment on the asset market amidst lower supply forecasts due to OPEC+'s decision to hold the production growth level.

National Macroeconomic Prospects

National economic growth in 2021 is estimated to recover gradually in line with the improvement in global economic growth and supported by accommodative domestic economic policy. The national vaccine program which began in early January 2021 and policies that prioritize Covid-19 protocols



untuk selalu mengutamakan protokol Covid-19 pada setiap pelaksanaan aktivitas sosial juga diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik di tahun depan.

Bank Indonesia (BI) mengestimasi pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai kisaran 4,8 persen - 5,8 persen, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi belanja modal Pemerintah dari masuknya PMA sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja. Pemulihan ekonomi diproyeksikan akan terjadi di seluruh wilayah, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya. Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia khususnya menekankan 5 (lima) kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yaitu: 1) pembukaan sektor produktif dan aman, 2) percepatan realisasi stimulus fiskal, 3) peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, 4) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta 5) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

at every social activity are expected to support the domestic economic recovery process in the next year.

Bank Indonesia (BI) estimates national economic growth to reach the range of 4.8 percent - 5.8 percent, supported by an increase in export performance, private and government consumption, and investment in Government capital expenditures from foreign direct investment as a positive response to the Job Creation Law. Economic recovery is projected to occur in all regions, especially Java and Sulawesi, Maluku and Papua.

The momentum for national economic recovery needs to be continuously driven by strengthening synergies to build optimism by all parties, including the Central and Regional Governments, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), banks and other parties. Vaccination and the discipline of the Covid-19 protocol are prerequisite conditions for national economic recovery. Bank Indonesia in particular emphasizes 5 (five) policies to strengthen the national economic recovery, namely: 1) opening productive and safe sectors, 2) accelerating the realization of fiscal stimulus, 3) increasing loan/financing to businesses, 4) sustainability of monetary and macroprudential stimuli, and 5) economic and financial digitization, especially MSMEs.

Kondisi Prasyarat dan 5 (Lima) Respons Kebijakan

Prerequisite Conditions and 5 (Five) Policy Responses



Sumber: Bank Indonesia / Source: Bank Indonesia

Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dengan stimulus kebijakan moneter yang akan ditempuh melalui: 1) stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga, 2) suku bunga yang akan tetap rendah, sembari menunggu penguatan inflasi, dan 3) melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (*non-competitive bidder*) dan kebijakan makroprudensial yang juga akan tetap akomodatif pada tahun 2021.

Kesiapan Pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional tercerminkan dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang mencapai Rp688,3 triliun, meningkat dibandingkan realisasi program PEN tahun 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Anggaran PEN 2021 akan difokuskan untuk mendukung 5 (lima) bidang, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Berikut adalah uraian mengenai alokasi anggaran Pen 2021 di masing-masing bidang.

- Bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran PEN sebesar Rp173,3 triliun meliputi program vaksinasi Covid-19, diagnostik, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian. Selain itu, anggaran kesehatan juga melingkupi bantuan iuran BPJS untuk PBU/BP, *earmark* TKDD untuk kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, dan anggaran komunikasi PEN.
- Bidang perlindungan sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp150,21 triliun meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM), kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, diskon listrik, dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
- Program prioritas mendapatkan anggaran sebesar Rp123,8 triliun meliputi pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
- Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi mendapatkan anggaran sebesar Rp187,17 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, BPUM, penjaminan *loss limit* UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan PEN lainnya.
- Bidang kelima berupa insentif usaha mendapatkan anggaran sebesar Rp53,86 triliun meliputi PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, serta PPN tidak dipungut KB/KITE.

In 2021, the national economic recovery will continue to be supported by monetary policy stimuli that will be pursued through: 1) stability of the Rupiah exchange rate according to fundamentals and market mechanism that continues to be maintained, 2) interest rates will remain low while waiting for inflation to strengthen, and 3) continue purchasing state securities from the primary market to finance the 2021 State Budget as non-competitive bidder and macroprudential policies that will also remain accommodative in 2021.

The Government's readiness in recovering the national economy is reflected in the 2021 National Economic Recovery (PEN) program budget which reached Rp688.3 trillion, an increase compared to the realization of the PEN program in 2020 at Rp579.78 trillion. The PEN budget for 2021 will be focused on supporting 5 (five) sectors, namely health, social protection, priority programs, business incentives, and MSME support and corporate financing. The following is a description of the 2021 PEN budget allocation in each sector.

- The health sector receives PEN budget allocation of Rp173.3 trillion covering the Covid-19 vaccination program, diagnostics, treatment claim, incentives for health workers and death compensation. In addition, the health budget also includes BPJS contribution assistance for PBU/BP, TKDD earmark for health, health tax incentives, and PEN communication budget.
- The social protection sector receives Rp150.21 trillion including Family Hope Program (PKH) for 10 million Human Development Worker (KPM), basic food cards, Pre-Employment, BLT Dana Desa, cash assistance for 10 million KPM, PJJ quota subsidy, electricity discount, and job loss insurance contributions.
- Priority programs receives Rp123.8 trillion covering tourism, food security, ICT development, loans to regions and subsidies to regions, ministries/agencies labor intensive, industrial areas, and other priority programs.
- Support for MSMEs and corporate financing receives Rp187.17 trillion with a focus on interest subsidies for KUR and non-KUR, BPUM, insurance for loss limits for MSMEs and corporations, IJP for MSMEs and corporations, exemption from electricity accounts and subscription fees, and other PEN financing.
- The fifth sector is in the form of business incentives which receive Rp53.86 trillion including PPh 21 DTP, exemption of PPh 22 Imports, preliminary VAT refunds, Final PPh for MSME DTP, reduced PPh Article 25 installments, reduced corporate income tax rates, and free VAT KB/KITE.



Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang terkendali di sasaran level 3 ± 1 persen serta nilai tukar Rupiah yang bergerak stabil dan berpotensi menguat di tengah permintaan domestik yang meningkat sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan harga komoditas global yang meningkat.

Di tahun 2021, stabilitas sistem keuangan diprediksikan semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke kisaran 7-9 persen.

PROSPEK INDUSTRI PELABUHAN

Pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung sejak Maret 2021 di Indonesia memberikan tantangan bagi pertumbuhan industri pelabuhan. Namun sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional di tahun 2021 yang cerah, perkembangan industri pelabuhan juga diharapkan akan turut membaik.

Selain didorong oleh pertumbuhan ekonomi global dan nasional, prospek usaha industri pelabuhan juga terbilang masih sangat cerah. Berikut adalah peluang usaha yang dimiliki oleh industri pelabuhan nasional:

- Industri pelabuhan memiliki peluang pertumbuhan yang luas dari bisnis turunan pelabuhan,
- Potensi ekspansi domestik yang masih terbuka lebar dengan memanfaatkan tren perdagangan positif antar pulau di Indonesia,
- Tren digital yang membuka bidang-bidang baru untuk meningkatkan bisnis dan operasi, serta
- Dukungan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritim yang berpotensi mendukung ekspansi bisnis IPC.

Sebagaimana diuraikan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan konektivitas transportasi laut dilakukan untuk mendukung kinerja logistik nasional yang dilaksanakan melalui standarisasi kinerja pada sejumlah pelabuhan utama. Selain itu didukung pula dengan pengembangan kawasan pada sejumlah pelabuhan utama yang diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi angkutan barang domestik serta memungkinkan kapal-kapal berukuran lebih besar untuk singgah membentuk rute jaringan saling terhubung (*loop*).

Macroeconomic stability is maintained with controlled inflation at the target level of 3 ± 1 percent and the Rupiah exchange rate which is stable and has the potential to strengthen amid rising domestic demand in line with increased mobility of society and rising global commodity prices.

In 2021, financial system stability is predicted to improve, with high capital ratios, low Non-Performing Loan (NPL), and an increase in deposits and loan to the range of 7-9 percent respectively.

PORT INDUSTRY PROSPECTS

The Covid-19 pandemic that has been ongoing since March 2021 in Indonesia gives challenges for the growth of the port industry. However, in line with the bright projection of global and national economic growth in 2021, the development of the port industry is also expected to improve.

Apart from being driven by global and national economic growth, the port industry business prospects remain bright. The following are business opportunities of the national port industry:

- The port industry has wide growth opportunities from the port derivative business,
- The potential for domestic expansion is still wide open by taking advantage of the positive trend of inter-island trade in Indonesia,
- Digital trends that open up new fields to improve business and operations, and
- The government's support for the development of maritime infrastructure that has the potential to support IPC business expansion.

As outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) Policy and Strategy Direction, the development of sea transportation connectivity is carried out to support national logistics performance which is carried out through performance standardization at a number of main ports. Moreover, it is also supported by the development of areas in a number of main ports which are expected to increase the consolidation of domestic freight transport and allow larger ships to stopover to form a network route connected to each other (*loop*).

Fokus pemerintah untuk mengembangkan konektivitas laut juga dapat memberikan dorongan bagi IPC dalam mengembangkan bisnisnya baik pada 2 (dua) pelabuhan yang ada di area kerjanya, yaitu Tanjung Priok dan Kijing, maupun berkolaborasi dengan pelabuhan lain di luar area kerjanya. Kolaborasi dengan seluruh pelabuhan utama yang ada akan membantu meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global, dan Indonesia diperkirakan akan mengklaim gelar sebagai eksportir terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045.

Selain itu, pembangunan konektivitas laut akan membantu daerah di luar Jawa untuk memperkuat peran mereka dalam ekonomi nasional. Terutama di Indonesia Timur di mana kurangnya akses telah mencegah daerah untuk terhubung ke pasar domestik. Pada tahun 2045, KTI (Kawasan Timur Indonesia), diprediksi akan berkontribusi pada 25,1 persen ekonomi nasional, meningkat 5,6 persen dari 19,5 persen pada tahun 2015. Pembentukan infrastruktur dan lebih banyak akses telah menyebabkan penurunan disparitas harga sebanyak 20-25 persen di Indonesia Timur.

Selain adanya 7 agenda pembangunan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN, telah mencanangkan 5 (lima) Agenda Prioritas Kementerian BUMN. Salah satu inisiatif Kementerian BUMN dalam melaksanakan agenda Inovasi Model Bisnis adalah melalui Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan dan pembentukan *Cluster* Logistik Laut. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membangun ekosistem bisnis dan konektivitas laut yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional.

INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2021

Hampir semua industri, tidak terkecuali sektor pelabuhan, merasakan dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga saat ini. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan *review* terhadap langkah-langkah Perseroan ke depan. Tahun 2020 menjadi tahun di mana Perseroan melakukan stabilisasi bisnis untuk memitigasi dampak ekonomi pandemi terhadap bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya untuk meningkatkan *commercial* dan *operational excellence* dengan melakukan perbaikan bisnis proses maupun mempertahankan kinerja operasional dengan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

The government's focus on developing sea connectivity can also provide a boost for IPC in developing its business both in the 2 (two) ports in its working area, namely Tanjung Priok and Kijing, as well as collaborating with other ports outside its working area. Collaboration with all existing main ports will help enhance Indonesia's position as a key player in the global market, and Indonesia is expected to claim the title as the world's 10th largest exporter by 2045.

In addition, the development of sea connectivity will help regions outside Java to strengthen their role in the national economy. Especially in Eastern Indonesia where the limited access has prevented the regions from connecting to the domestic market. In 2045, Eastern Indonesia Region is predicted to contribute to 25.1 percent of the national economy, an increase of 5.6 percent from 19.5 percent in 2015. The establishment of infrastructure and more access has led to a decrease in price disparity by 20-25 percent in Eastern Indonesia.

In addition to the 7 development agenda, the Government through the Ministry of SOEs as stated in the Minister of SOEs Regulation PER-08/MBU/08/2020 dated August 7, 2020 concerning Strategic Plan of the Ministry of SOEs, has announced 5 (five) Priority Agenda for the Ministry of SOEs. One of the initiatives of the Ministry of SOEs in implementing the Business Model Innovation agenda is through the Synergy and Integration of SOE Port Services and the formation of Marine Logistics Cluster. The aim of this initiative is to build a business ecosystem and sea connectivity which in turn is expected to reduce national logistics costs.

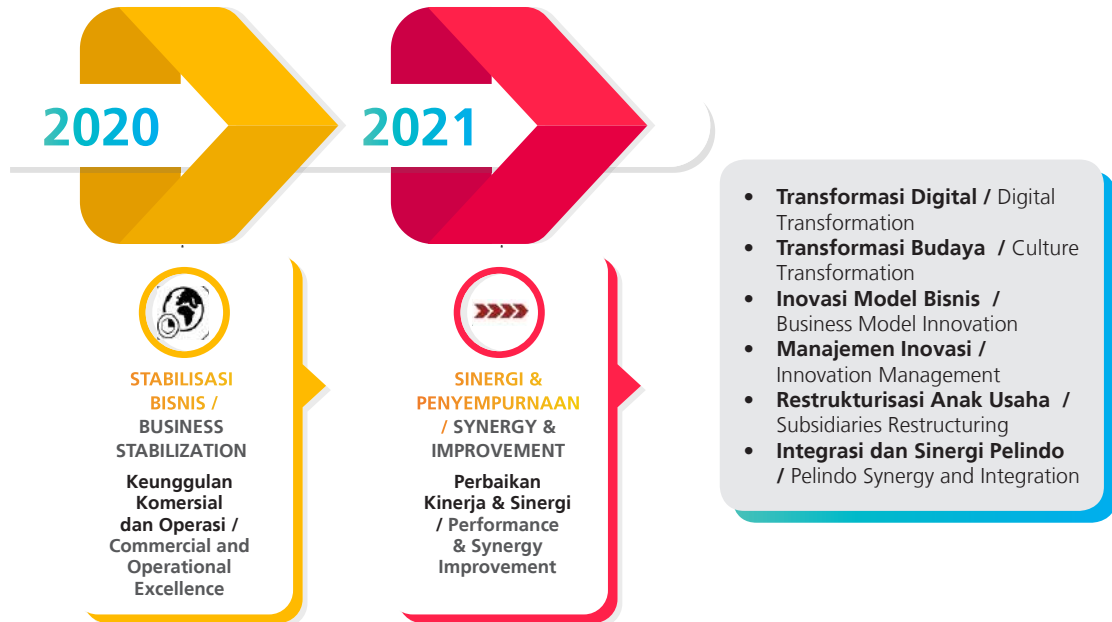
STRATEGIC INITIATIVES IN 2021

Almost all industries, including the port sector, have been affected by the Covid-19 outbreak that occurred in Indonesia from the beginning of March 2020 to the present. With these conditions, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) conducted a review of the Company's steps forward. 2020 is the year when the Company conducted business stabilization to mitigate the economic impact of the pandemic on the business it runs. Therefore, the Company strives to increase commercial and operational excellence by improving business processes and maintaining operational performance by remaining disciplined in implementing health protocols.



Adapun di tahun 2021, guna menangkap peluang bisnis ke depan pascapandemi, Perseroan berupaya untuk melakukan peningkatan daya saing serta melakukan sinergi guna memperkuat bisnis kepelabuhan di masa yang akan datang.

As for 2021, in order to seize future business opportunities after the pandemic, the Company seeks to increase competitiveness and create synergies to strengthen the port business in the future.



FOKUS UTAMA TAHUN 2021

IPC memiliki 6 (enam) fokus utama di tahun 2021, antara lain:

1. Digital Transformation

IPC memiliki visi untuk menjadi pelopor serta pemimpin transformasi digital pada ekosistem maritim dengan melakukan digitalisasi pada model bisnis perusahaan, kegiatan operasional, pendekatan antarmuka komunikasi dengan pelanggan, serta mengambil peran strategis dalam mendorong dan/atau memberdayakan mitra bisnis dan pemangku kepentingan terkait untuk turut serta dalam mendigitalisasi proses bisnisnya di dalam kesatuan ekosistem kemaritiman.

Pada pelaksanaannya, transformasi digital merupakan sebuah perjalanan strategis yang tidak mudah. Untuk itu, secara bertahap IPC akan membangun budaya baru, pola pikir baru dan merombak sistem dan hierarki untuk terus mendukung proses perubahan yang sedang berlangsung di tengah era disrupsi digital.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan mewujudkan operasional yang unggul di industri pelabuhan, Perseroan telah menyusun inisiatif-inisiatif yang di antaranya meliputi hal-hal berikut:

- a. Review Strategi Digital;
- b. Peningkatan Sistem Audit Digital;

2021 MAIN FOCUSES

IPC possesses 6 (six) main focuses for 2021, among others:

1. Digital Transformation

IPC has a vision to be a pioneer and leader of digital transformation in the maritime ecosystem by digitizing the company's business model, operational activities, approaching communication interfaces with customers, and taking a strategic role in driving and/or empowering partners and related stakeholders to participate in digitizing its business processes within the maritime ecosystem.

In practice, digital transformation is a strategic journey that is not easy. For this reason, IPC will gradually build a new culture, new mindset and overhaul the system and hierarchy to continue to support the ongoing process of change in the era of digital disruption.

To achieve this and superior operations in the port industry, the Company has formulated several initiatives which include the following:

- a. Review of Digital Strategy;
- b. Digital Audit System Improvement;

- c. Digitalisasi Manajemen Bisnis Performansi Anak Perusahaan;
- d. Peningkatan Sistem Operasional Pelabuhan (TOS, MOS, dll.);
- e. Peningkatan IT *Security System* & IT *Enterprise Architecture*; dan
- f. Implementasi pengelolaan dan analisis data di seluruh Grup IPC.

2. Culture Transformation

Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Disampaikan bahwa setiap BUMN wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, disingkat AKHLAK, menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.

Nilai-nilai utama (*core values*) tersebut diharapkan dapat menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perubahan nilai tersebut juga menjadi salah satu aspek transformasi *Human Capital* guna meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Untuk mendukung Transformasi Budaya Perusahaan dari semula CINTA menjadi AKHLAK, Perseroan telah menyusun inisiatif strategis yaitu Program *Culture Transformation* yang di antaranya berupa integrasi kanal komunikasi Budaya Perusahaan dan pembaharuan konten komunikasi.

3. Business Model Innovation

Inovasi model bisnis adalah tentang meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan produk/jasa dan teknologi yang ada. Dengan menyusun proposisi nilai yang menarik yang mampu mendorong model bisnis baru untuk meningkatkan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan semuanya dimulai dengan menguasai pelanggan utama. Sebagai bagian dari upaya untuk melakukan inovasi dalam model bisnis, Perseroan telah menyusun inisiatif-inisiatif yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Merger* dan akuisisi untuk peningkatan pertumbuhan bisnis anorganik;

- c. Digitization of Subsidiary Performance Management Business;
- d. Port Operational System Improvement (TOS, MOS, etc.);
- e. IT Security System & IT Enterprise Architecture enhancement; and
- f. Implementation of data management and analysis throughout the IPC Group.

2. Culture Transformation

Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises (SOE) states that every SOE must apply the Core Values of SOE Human Resources which consist of Amanah (Responsible), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative), abbreviated as AKHLAK, which becomes a Corporate Culture and serves as the basis for building the character of human resources within BUMN, Subsidiaries, and Consolidated Affiliated Companies.

These core values are expected to become the identity and serve as a work culture that supports continuous performance improvement. In addition, this change is also one of the aspects of the transformation of Human Capital in order to increase the competitiveness of SOEs to become global players and to turn SOEs into talent factories. To support the transformation of its corporate culture from being CINTA to AKHLAK, the Company has developed a strategic initiative, namely the Culture Transformation Program, which includes the integration of corporate culture communication channels and updating of communication content.

3. Business Model Innovation

Business model innovation is about increasing the Company's success with the existing products/services and technology by crafting an attractive value proposition that is able to drive new business models to increase customers and create a sustainable competitive advantage and it all starts with mastering the main customer. As part of its efforts to innovate in its business model, the Company has developed initiatives which include the following:

- a. Mergers and acquisitions to increase inorganic business growth,



- b. Restrukturisasi dan klusterisasi anak perusahaan untuk peningkatan efektivitas bisnis;
- c. Ekspansi pasar melalui pengembangan area industri; dan
- d. Menjalinkan kolaborasi untuk mempersiapkan bisnis logistik.

4. Innovation Management

Tantangan industri 4.0 membuat industri-industri di dunia beradaptasi agar dapat bersaing dan *survive*. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi untuk *business excellence*. Industri pelabuhan menjadi salah satu industri yang juga terdampak oleh adanya kemajuan teknologi pada era industri 4.0. Pelabuhan-pelabuhan besar di dunia juga telah menerapkan inovasi untuk tetap kompetitif. PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) pun perlu untuk menerapkan inovasi dalam rangka optimalisasi bisnis.

5. Subsidiaries Restructuring

Selaras dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN, perusahaan memandang perlu untuk melakukan konsolidasi terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang memiliki bidang usaha atau fokus bisnis yang sama. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnis dan pengelolaan Anak Perusahaan dimaksud. Rencana penataan anak usaha di lingkungan IPC ke depan juga akan diselaraskan dengan rencana Sinergi & Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan, di mana klusterisasi bisnisnya akan menyesuaikan klusterisasi perusahaan induk, yang terbagi ke dalam kluster bisnis:

- a. *Container*;
- b. *Non-Container*;
- c. *Equipment*;
- d. *Information Technology*;
- e. *Logistic*;
- f. *Adjacent*.

Berkenaan dengan hal tersebut, inisiatif strategis yang akan diimplementasikan di tahun 2021 adalah sinergi Anak Perusahaan untuk memaksimalkan *value creation* dan restrukturisasi dan klusterisasi Anak Perusahaan untuk peningkatan efektivitas bisnis.

- b. Restructuring and clustering of subsidiaries to increase business effectiveness,
- c. Market expansion through industrial area development, and
- d. Collaborating to prepare a logistics business.

4. Innovation Management

The Industry 4.0 challenges the industries in the world to adapt in order to compete and survive. One form of adaptation is by innovating for business excellence. The port industry is one of the industries that is also affected by technological advances in the industrial era 4.0. The world's major ports have also implemented innovations to remain competitive. PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) also needs to implement innovation in order to optimize its business.

5. Subsidiaries Restructuring

In line with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-315/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 concerning the Structuring of Subsidiaries or Joint Ventures in SOEs, the Company considers it is necessary to consolidate its Subsidiaries and Joint Venture that have the same business fields or focus the same business. This is to improve the effectiveness of the business and management of the said Subsidiary. The plan for structuring a subsidiary in the IPC environment in the future will also be aligned with the Port Service SOE Synergy & Integration plan, where the business clustering will adjust the clustering of the parent company, which is divided into business clusters:

- a. Container;
- b. Non-Container;
- c. Equipment;
- d. Information Technology;
- e. Logistic;
- f. Adjacent.

In this regard, the strategic initiatives that will be implemented in 2021 are Subsidiary Synergy to Maximize Value Creation and Subsidiary Restructuring and Clustering to Increase Business Effectiveness.

6. Pelindo Synergy and Integration

Program Sinergitas dan integrasi BUMN Layanan Pelabuhan ini merupakan program penugasan dari Pemegang Saham. Tujuan besarnya adalah untuk menurunkan biaya logistik nasional dengan memperbaiki konektivitas logistik maritim melalui perbaikan kinerja kepelabuhanan dan sinergi bisnis kepelabuhanan. Sinergi dan integrasi ini akan melibatkan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) dengan rencana program yang akan diselaraskan pula dengan lima Agenda Prioritas Kementerian BUMN.

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2021

Perseroan mengajukan RKAP tahun 2021 berdasarkan sesuai dengan beberapa asumsi yang bersifat makro, antara lain:

6. Pelindo Synergy and Integration

The Port Service SOE Synergy and Integration Program is an assignment program from the Shareholders. The main goal is to minimize national logistics costs by improving maritime logistics connectivity by improving port performance and port business synergies. This synergy and integration will involve PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) with a program plan that will also be aligned with the five Priority Agenda of the Ministry of SOEs.

TARGET/PROJECTION FOR 2021

The Company submits RKAP for 2021 based on several macro assumptions, including:

Tabel Asumsi Dasar Makro /
Table of Basic Macro Assumption

Indikator / Indicator	Asumsi Makro Ekonomi 2021 / 2021 Macro Economic Assumption
Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth	4,5%
Tingkat Inflasi / Inflation Rate	3,0%
Kurs Rupiah per USD / Rupiah per USD Exchange Rate	Rp14.600/USD
Suku Bunga / Interest Rate	7,9%
Harga Minyak Mentah / Crude Oil Price	USD45/barrel

(Sumber: APBN 2021 Surat Kementerian BUMN No.5-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021) / Source: State Budget 2021, Letter of the Ministry of SOEs No. 5-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020 regarding the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2021 RKAP)

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Perseroan menyusun proyeksi untuk tahun 2021 yang terbagi dalam 4 (empat) aspek yaitu Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Pemasaran dan Aspek Investasi seperti yang diuraikan sebagai berikut.

ASPEK KEUANGAN

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Based on the aforementioned assumptions, the Company prepares projections for 2021 which are divided into 4 (four) aspects, namely Financial Aspects, Operational Aspects, Marketing Aspects, and Investment Aspects as described below.

FINANCIAL ASPECT

Projection of Consolidated Statement of Financial Position

Projection of Consolidated Statement of Financial Position is 2021 are presented as follows.

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Projection of Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
ASET / ASSETS	
Aset Lancar / Current Assets	
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	5.681.565
Investasi Jangka Pendek / Short-term Investments	10.796.233
Piutang Usaha – Neto / Trade Receivables – Net	868.507
Piutang Lain-lain – Neto / Other Receivables – Net	978.162



Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Projection of Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka / Advances and Prepaid Expenses	113.517
Pendapatan yang Masih Akan Diterima / Accrued Revenues	391.569
Persediaan / Inventories	62.399
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Taxes	758.814
Aset Lancar Lainnya / Other Current Assets	40.135
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	19.690.900
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	
Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates	4.226.270
Properti Investasi – Neto / Investment Properties – Net	318.588
Aset Tetap – Neto / Fixed Assets – Net	14.637.675
Aset Tetap Sewaan – Neto / Leased Fixed Assets – Net	182.643
Aset Pengelolaan Bersama – Neto / Joint Operation Assets – Net	422.685
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	46.906
Aset Tak Berwujud – Neto / Intangible Assets – Net	14.436.808
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak / Estimated Claims for Tax Refund	919.206
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	410.231
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	35.601.012
Jumlah Aset / Total Assets	55.291.912
LIABILITAS / LIABILITIES	
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	
Utang Bank Jangka Pendek / Short-term Bank Loans	-
Utang Usaha / Trade Payables	1.485.526
Pendapatan Diterima di muka - Jangka Pendek / Short-term Unearned Revenues	938.478
Utang Pajak / Taxes Payable	490.622
Beban Akrual / Accrued Expenses	2.279.869
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current Maturities of Long-term Liabilities	56.980
Liabilitas Hak Guna Jangka Pendek / Short-term Right-of-use Liabilities	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other Current Liabilities	285.293
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	5.536.865
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	
Utang Bank Jangka Panjang / Long-term Bank Loans	1.000.000
Utang Obligasi / Bonds Payable	23.146.601
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-term Liabilities – Net of Current Maturities	259.115
Pendapatan Diterima di Muka - Jangka Panjang / Long-term Unearned Revenue	4.017.241
Liabilitas Sewa Jangka Panjang / Long-term Lease Liabilities	115.232
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefit Liabilities	2.669.200
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities	206.674
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	31.414.063
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	36.950.928
EKUITAS / EQUITY	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent entity	
Modal Saham / Share Capital	1.444.029
Modal Donasi / Donated Capital	26.826
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	(236.575)
Saldo Laba / Retained Earnings	
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	15.099.352

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Projection of Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated	1.401.290
Pendapatan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	(807.369)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Neto / Equity attributable to owners of the parent entity – net	16.927.553
Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling Interest	1.413.432
Ekuitas – Neto / Equity – Net	18.340.985

Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Konsolidasian

Uraian proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Projection of Consolidated Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income

Projection of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for 2021 is presented as follows.

Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) /
Projection of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Pendapatan Operasi / Operating Revenues	11.594.150
Pendapatan Konstruksi / Construction Revenues	2.438.868
Beban Operasi / Operating Expenses	(8.837.921)
Beban Konstruksi / Construction Expenses	(2.438.868)
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya – Neto / Other Operating Income (Expense) - Net	(134.476)
Labanya Usaha / Income from Operations	2.621.753
Pendapatan Keuangan / Finance Income	644.148
Beban Keuangan / Finance Costs	(1.188.361)
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Equity in Income (Loss) of Associates	81.074
Labanya Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan / Income Before Final Tax and Income Tax	2.158.613
Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax	(727.252)
Labanya Tahun Berjalan / Income for the Year	1.431.361
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Item that will not be reclassified to profit or loss	
Pajak Penghasilan (efek DTA (DTL) atas pengukuran kembali imbalan kerja) / Income Tax (DTA (DTL) effect on remeasurement of employee benefit plans)	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak / Exchange Differences due to Financial Translation of Subsidiaries Financial Statements	-
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Changes in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	(699.360)
Total Labanya Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	732.001
Labanya Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Income for the Year Attributable to:	
Pemilik Induk / Owners of the Parent Entity	1.401.074
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	30.286
Labanya Periode Tahun Berjalan / Income for the Year	1.431.361
Total Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:	
Pemilik Induk / Owners of the Parent Entity	701.715
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	30.286
Total Labanya Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	732.001



Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian

Uraian proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Projection of Consolidated Statement of Cash Flows

Projection of Consolidated Statement of Cash Flows for 2021 are presented as follows.

Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) / Projection of Consolidated Statement of Cash Flows (in million Rupiah)	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities	
Penerimaan dari Pelanggan / Cash Receipt from Customers	10.314.744
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to Employees	(2.504.919)
Pembayaran Pajak / Payment for Taxes	253.071
Pembayaran kepada Pihak Ketiga / Payment to Third Parties	(5.614.865)
Penghasilan Bunga / Interest Received	644.148
Pembayaran Bunga & Beban Keuangan Lainnya / Payment of Interest and Other Financial Charges	(1.173.214)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided by Operating Activities	1.918.965
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities	
Penerimaan (Penempatan) Investasi Jangka Pendek / Receipt of (Placement) of Short-term Investments	-
Perolehan Aset Tetap & Tak Berwujud / Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(2.133.859)
Penerimaan Dividen / Receipt of Dividend	39.397
Penerimaan Sewa di Muka / Receipt of Advance Rental Fee	111.830
Penerimaan (Penempatan) Investasi Saham / Placement of Investment in Shares of Stock	(752.077)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(2.734.709)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities	
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank / Receipt (Payment) of Bank Loans	700.000
Pembayaran Dividen / Payment of Dividend	(501.806)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Used in Financing Activities	198.194
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas / Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	195.928
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(421.622)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	6.103.187
Kas dan Setara Kas Periode Berjalan / Cash and Cash Equivalents at the End of Year	5.681.565

Proyeksi Rasio Keuangan

Uraian proyeksi Rasio Keuangan tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Projection of Financial Ratios

Projection of Financial Ratios for 2021 is presented as follows.

Proyeksi Rasio Keuangan / Projection of Financial Ratios		
Uraian / Description	Satuan / Unit	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Kondisi Keuangan Jangka Pendek (Likuiditas) / Short-term Financial Condition (Liquidity)		
a. <i>Current Ratio</i>	x	3,56
b. <i>Cash Ratio</i>	x	2,98
Kondisi Keuangan Jangka Panjang / Long-term Financial Condition		
a. <i>Total Assets to Total Debt</i>	x	2,29
b. <i>Total Debt to Equity (Borrowing/Equity)</i>	x	1,32
c. <i>Total Debt to Total Fixed Assets</i>	x	1,57
d. <i>Long-term Debt to Equity</i>	x	1,32
e. <i>Net Debt to EBITDA</i>	Kali / times	5,04

Proyeksi Rasio Keuangan / Projection of Financial Ratios		
Uraian / Description	Satuan / Unit	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Rasio Aktivitas / Activity Ratio		
a. Average Payment Period	Hari / Days	101
b. Average Collection Period	Hari / Days	28
c. Collection Period	Hari / Days	28
Rasio Hasil Usaha / Return Ratio		
a. BOPO atau OR (Operating Ratio)	%	76,23
b. Return on Capital Employed (ROCE)	%	3,69
c. EBITDA	Rp ribu / Rp thousand	3.664.727.628
d. EBITDA Margin	%	31,61
e. EBITDA/Debt Service	%	308,38
f. EBITDA/Beban Bunga / EBITDA/Interest Expense	%	308,38
g. Sales to Average Asset	%	21,32
h. Net Profit Margin	%	12,35
i. Operating Cash Flow to Sales	%	16,55

ASPEK OPERASIONAL

Proyeksi Produksi

Uraian proyeksi Produksi tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

OPERATIONAL ASPECT

Projection of Production

Projection of Production for 2021 is described as follows.

Aspek Operasional / Operational Aspect		
Uraian / Description	Satuan / Unit	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Pelayaran Luar Negeri / International Shipping		
Pelayaran Luar Negeri / International Shipping		
a. Reguler / Regular	Unit	529
	GT	9.824.784
b. Non Reguler / Non-Regular	Unit	4.564
	GT	101.857.496
Jumlah / Total	Unit	5,093
	GT	111.682.280
Pelayanan Dalam Negeri / Domestic Shipping		
	Unit	21.194
	GT	70.719.792
Pelayaran Rakyat / Traditional Shipping		
	Unit	2.631
	GT	508.811
Pelayaran Perintis / Pacer Shipping		
	Unit	158
	GT	201.685
Kapal Negara/Tamu / Visitor/State Shipping		
	Unit	156
	GT	448.131
Arus Barang Berdasarkan Kemasan / Cargo Traffic by Packaging		
General Cargo	Ton	9.151.215
Bag Cargo	Ton	3.884.193
Curah Cair / Liquid Bulk	Ton	9.446.000
Curah Kering / Dry Bulk	Ton	26.729.007
Lain-lain / Others	Ton	4.273.068



Aspek Operasional / Operational Aspect		
Uraian / Description	Satuan / Unit	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Petikemas / Container	Box	5.305.991
	TEUs	7.204.599
Arus Petikemas / Container Traffic		
Terminal Konvensional / Conventional Terminal	Box	2.298.538
	TEUs	2.797.581
Terminal Petikemas / Container Terminal	Box	3.007.453
	TEUs	4.407.018
Arus Penumpang / Passenger Traffic		
Dalam Negeri / Domestic	Orang / Person	409.936
a. Embarkasi / Departure	Orang / Person	190.410
b. Debarkasi / Arrival	Orang / Person	219.527

ASPEK PEMASARAN

Proyeksi Pemasaran

Uraian proyeksi Pemasaran tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

MARKETING ASPECT

Projection of Marketing

Projection of Marketing for 2021 is described as follows.

Proyeksi Pemasaran / Projection of Marketing	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Market Share	92,21%

ASPEK INVESTASI

Proyeksi Investasi Barang Modal

INVESTMENT ASPECT

Projection of Capital Goods Investment

Proyeksi Investasi Barang Modal (dalam jutaan Rupiah) / Projection of Capital Goods Investment (in million Rupiah)	
Jenis / Type	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Perusahaan Induk / Holding Company	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan / Building and Port Facilities	2.896.662
Kapal / Vessels	45.400
Alat Fasilitas Pelabuhan / Port Equipment	189.334
Instalasi Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Installation	66.487
Tanah / Land	15.329
Jalan dan Bangunan / Road and Building	248.700
Peralatan / Equipment	59.850
Kendaraan / Vehicles	390
Emplasemen / Emplacement	4.514
Investasi Non Fisik / Non-Physical Investment	69.299
Kapitalisasi Bunga / Interest Capitalization	311.479
Investasi Perusahaan Induk / Holding Company's Investment	3.907.444
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiaries' Investment	829.555
Total Investasi Konsolidasi / Total Consolidated Investment	4.736.999
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Holding Company Capital Participation	947.431
Total Investasi & Penyertaan Modal / Total Investment & Capital Participation	5.684.431



05



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



BUMN

IPC

|||||



ALHILAK

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



Pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan *assessment* GCG sesuai parameter Kementerian BUMN yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), dengan didampingi oleh pihak eksternal, dengan pencapaian skor sebesar 98,73 dari skor maksimal 100, atau setara dengan predikat "Sangat Baik". Capaian skor tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan perolehan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sebesar 98,55 atau setara dengan predikat "Sangat Baik."

In 2020, the Company conducted GCG self-assessment independently with assistance from external party, according to the parameters of the Ministry of SOEs, with score achievement of 98.73 from a maximum score of 100, or equivalent to "Excellent" predicate. This score achievement shows higher score than the score obtained last year, which was 98.55 or equivalent to "Excellent" predicate.





KOMITMEN DAN DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pada dasarnya, prinsip GCG diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian untuk mendukung pelaksanaan aktivitas operasional dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berlandaskan etika, mewujudkan integritas dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta menjadi landasan bagi Perseroan dalam membangun hubungan dan sinergi dengan para pemangku kepentingan demi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan usaha di masa depan.

Berkaca pada perspektif tersebut, IPC menyadari pentingnya penerapan praktik GCG pada proses pelaksanaan aktivitas operasional dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sekaligus menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para Pemegang Saham maupun para *stakeholders*. Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka IPC berkomitmen penuh untuk selalu menerapkan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik secara konsisten dan menyeluruh di setiap lini bisnisnya.

Dalam menerapkan praktik GCG, IPC mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006;

GCG COMMITMENT AND LEGAL BASIS OF IMPLEMENTATION

Pursuant to Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises *juncto* Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, Good Corporate Governance is a principle for governance process and mechanism that is based on laws and regulations and business ethics.

Fundamentally, GCG principles are established as supervision and control system to support the implementation of responsible and ethical operational activities and decision-making, upholding integrity in the preparation of financial statements, proper risk management, and to serve as the Company's foundation in establishing relations and synergy with the stakeholders to maintain future business continuity and harmony.

Based on this perspective, IPC realizes the importance of GCG practice implementation in operational activities to leverage business success and the Company's accountability as well as to create added value for the Shareholders and Stakeholders. To that end, IPC is fully committed to implementing GCG best practices consistently and thoroughly in all lines of business by referring to GCG best standard.

In practicing GCG, IPC refers to several laws and regulations as follows:

- Republic of Indonesia Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies (PT);
- Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs);
- Ministry of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance for State-Owned Enterprises (SOEs), as amended by Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
- Indonesia's General GCG Guidelines issued by the National Committee of Governance Policy (KNKG) Year 2006;

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penetapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017–2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Surat Keputusan Direksi Nomor OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pembentukan *Change Agent* Budaya Perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/15/6/1/KPP/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning Establishment of 2017–2020 Good Corporate Governance (GCG) Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 dated January 2, 2019 concerning the Guidelines of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Board of Directors Decree Number OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19 dated May 6, 2019 concerning the Establishment of Change Agent of Corporate Culture and Good Corporate Governance (GCG) in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK.01/15/6/1/KPP/UT/PI.II-20 dated June 15, 2020 concerning Guidelines for Good Corporate Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-20 dated August 14, 2020 concerning Guidelines for Business Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG

IPC memandang bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Lebih dari itu, ada sejumlah tujuan penting dalam implementasi GCG, antara lain:

- Mampu memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi;
- Meningkatkan pengelolaan IPC secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
- Menjadi acuan pengelolaan IPC dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial IPC terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan kelestarian lingkungan di sekitar IPC;
- Meningkatkan *stakeholders value* dengan memperhatikan *Stakeholders* lainnya;

GCG OBJECTIVES AND PURPOSE

IPC sees GCG as more than a tool to comply with all regulations by the authorities, as it also helps the Company to achieve many other objectives.

- To leverage the Company's performance and values for the sake of stakeholders through transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness principles so that the Company has a strong competitive edge;
- To improve IPC management professionally, transparently, and efficiently, and encourage the functional empowerment and independency of General Meetings of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors;
- To serve as references for IPC management in making decisions and taking actions based on high moral standards and legal compliance and awareness as well as IPC'S social corporate responsibility for all stakeholders and environmental preservation in the vicinity of IPC;
- To improve Stakeholder value by paying attention to Stakeholders;



- Meningkatkan daya saing IPC secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN GCG PERUSAHAAN

Untuk memperkuat praktik GCG di setiap lini bisnis, IPC telah melaksanakan beberapa inisiatif strategis, yang meliputi:

- Penetapan *Roadmap* GCG IPC.
- *Cascading Roadmap* dan seluruh kebijakan GCG ke seluruh Divisi, Cabang, dan Anak Perusahaan.
- *Website* sebagai *showcase* program dan inisiatif GCG.
- Optimalisasi pelaksanaan WBS dengan meningkatkan sosialisasi dan efektivitas penanganan kasus.
- Penguatan *Subsidiary Governance*.
- Asesmen GCG yang diakui secara Nasional dan Internasional.
- Penguatan peran unit GCG untuk melakukan koordinasi pelaksanaan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC).
- Kompetisi Internal Inisiatif Pelaksanaan GCG.
- Inisiatif Bisnis yang berorientasi pada manfaat *win-win* dengan pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan hidup.
- Implementasi *Corporate Social Responsibility* berbasis ISO 26000, *Guidance on Social Responsibility*.

RUANG LINGKUP GCG PERUSAHAAN

Terdapat 3 (tiga) ruang lingkup GCG di lingkungan Perseroan, yaitu:

- *Corporate Governance* (CG) dalam arti sempit yang mengatur tentang tata kerja, mekanisme, dan komunikasi antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
- Manajemen Korporasi yang mengatur tentang kebijakan, struktur, dan mekanisme antara Perseroan dengan seluruh karyawan.
- *Corporate Governance* (CG) dalam arti luas yang mengatur tentang kebijakan, struktur, dan mekanisme Perusahaan dengan seluruh karyawan.

- To enhance IPC's competitive edge on a national and international scale, in order to improve market trust that can later boost investment flows and sustainable national economic growth.

STRATEGIC INITIATIVES FOR GCG IMPROVEMENT

To strengthen GCG practice in each line of business, IPC carried out several strategic initiatives that cover:

- Establishing IPC GCG Roadmap.
- Cascading Roadmap and all GCG policies to all Divisions, Branches, and Subsidiaries.
- Website to showcase GCG programs and initiatives.
- Optimizing WBS implementation by improving dissemination and case handling effectiveness.
- Strengthening Subsidiary Governance.
- Nationally and internationally recognized GCG assessment.
- Strengthening the role of GCG units to coordinate the implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC).
- Internal competition for GCG implementation initiatives.
- Business initiatives oriented towards win-win benefits for the stakeholders and environmental protection.
- Corporate Social Responsibility implementation based on ISO 26000, Guidance on Social Responsibility.

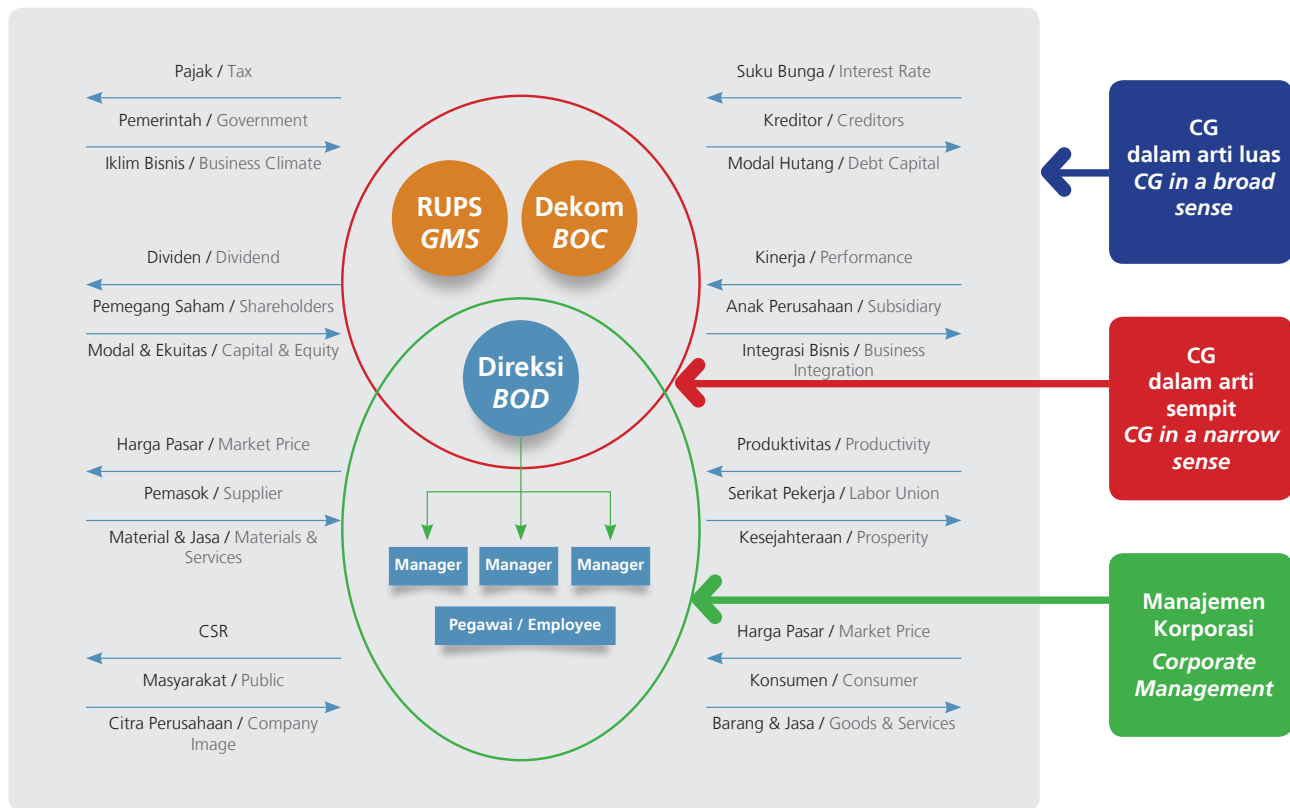
GCG SCOPE AT THE COMPANY

There are 3 (three) scopes of GCG at the Company, namely:

- Corporate Governance (CG) in a limited sense which regulates the work procedure, mechanism, and communication between the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors.
- Corporate Management which regulates policies, structure, and mechanism between the Company and all employees.
- Corporate Governance (CG) in a broader sense which regulates policies, structures, and mechanisms of the Company and all employees.

RUANG LINGKUP GCG IPC

IPC GCG SCOPE



KERANGKA GCG PERUSAHAAN

Secara garis besar, kerangka kerja tata kelola IPC memuat lima elemen pokok, yang meliputi:

1. Governance Principles

Merupakan prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di IPC.

2. Governance Commitment

Merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi (*board*) dan satuan kerja untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola IPC yang termuat dalam visi, misi, *values*, *code of ethics* dan menjadi rujukan dalam menyusun RJPP dan RKAP.

3. Governance Structure

Merupakan organ internal dan eksternal IPC yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan pengawasan terhadap IPC.

4. Governance Process

Merupakan serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPC dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.

GCG FRAMEWORK AT THE COMPANY

In general, the IPC governance framework contains five key elements:

1. Governance Principles

The principles underlying the governance implementation in IPC.

2. Governance Commitment

The Board of Commissioners, Board of Directors and work units' commitment to implement and enforce IPC Governance as contained in the vision, mission, values, code of ethics and as a reference to developing RJPP and RKAP.

3. Governance Structure

IPC's internal and external bodies authorized to carry out the mandate to implement IPC's duties, and to supervise IPC.

4. Governance Process

A series of standards and procedures used by the bodies and work units to ensure IPC's Governance implementation and enforcement is conducted in a planned, consequential, and sustainable manner.



5. Governance Outcome

Merupakan manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG IPC terhadap *Stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

5. Governance Outcome

Results of IPC's GCG implementation and enforcement for *Stakeholders* having a positive impact on value creation and business continuity.

KERANGKA GCG IPC

IPC GCG FRAMEWORK



PRINSIP-PRINSIP GCG PERUSAHAAN

Sejalan dengan *Roadmap* GCG yang telah ditetapkan oleh Perseroan, IPC telah menetapkan 6 (enam) prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam pengelolaan Perseroan berbasis GCG, yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness, dan Trusted*.

GCG PRINCIPLES AT THE COMPANY

In line with the GCG Roadmap established by the Company, IPC set out 6 (six) GCG principles as the foundation in managing the Company based on GCG, namely *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trusted*.

PRINSIP-PRINSIP GCG IPC

IPC GCG PRINCIPLES



Transparansi
Transparency

Keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan.

Transparency in every decision-making process and in disclosing material and relevant information.



Akuntabilitas
Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ hingga setiap unit IPC.

Clarity of function, implementation and accountability of all IPC organs and units.



Responsibilitas
Responsibility

Kesesuaian pengelolaan IPC terhadap peraturan dan perundang-undangan serta *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku.

Compliance of IPC's Management to all applicable laws and regulations, as well as SOPs.



Independensi
Independency

Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain.

Professional management that is free from conflict of interest or pressure and influence of others



Fairness
Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan.

Fairness and equity in fulfilling the rights of Stakeholders.



Terpercaya
Trusted

Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

Earning the trust and full support of all Stakeholders.



ROADMAP GCG PERUSAHAAN

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Direksi Perseroan menetapkan *Roadmap Good Corporate Governance (GCG) 2017 – 2020* dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK. 568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017.

Penetapan *Roadmap GCG IPC* bertujuan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur serta sistem GCG secara terukur dan berkesinambungan, sehingga GCG menjadi suatu budaya yang tidak dapat terpisahkan dari setiap pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan. *Roadmap GCG IPC* disusun untuk jangka panjang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan praktik dan sistem GCG di lingkungan Perseroan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan nilai bersama (*shared value*) dengan para pemangku kepentingan.

GCG ROADMAP OF THE COMPANY

In upholding GCG principles at the Company as mandated in Ministry of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of SOEs Regulation No. 09/MBU/2012 dated July 6, 2012, the Company's Board of Directors established Good Corporate Governance Roadmap (GCG) 2017 – 2020 through Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK. 568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017.

The establishment of IPC GCG Roadmap aims to build and develop GCG infrastructure and system in a measured and continuous manner, making GCG an integral culture of each operational activity of the Company. IPC GCG Roadmap was prepared for the long-term and thus can be used as reference for the development of GCG practice and system at the Company in order to support business performance and create shared value with the stakeholders.

Roadmap GCG IPC Tahun 2017 – 2020

The 2017 – 2020 IPC GCG Roadmap



Dengan adanya *Roadmap* GCG ini, Perseroan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada para *Stakeholder* IPC, baik internal maupun eksternal, tentang komitmen dan posisi IPC dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menegakkan bisnis yang beretika di seluruh lingkungan kerja Perseroan. Sejak disahkan, *Roadmap* GCG ini telah berjalan dengan baik, tercermin dari beberapa capaian jangka pendek (*quick win*), antara lain adanya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *roadmap* penyempurnaan GCG), meningkatnya hasil *assessment* GCG berdasarkan aturan Kementerian BUMN, dan perolehan penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

PENCAPAIAN ROADMAP GCG TAHUN 2020

Berdasarkan *Roadmap* GCG di atas, pelaksanaan GCG di tahun 2020 adalah "**Citizenship**", yang berfokus pada upaya untuk menjadi perusahaan berkelas dunia dan menjadi rujukan penerapan GCG bagi perusahaan lain di tingkat nasional dan internasional. Beberapa pencapaian yang dilakukan oleh IPC pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

With the GCG Roadmap, the Company creates awareness and understanding for IPC internal and external stakeholders regarding IPC's commitment and position in applying Good Corporate Governance to uphold and ethical business in all working environment of the Company. Since it was validated, the GCG Roadmap has functioned well and as expected. Some of the GCG 2017-2020 Roadmap results are considered to be a quick win, including governance structure and GCG infrastructure (guidelines and Roadmap for GCG improvements), which have increased the GCG assessment scores based on the Ministry of SOEs regulations, and has earned GCG awards at national level.

2020 GCG ROADMAP ACHIEVEMENT

Based on the given GCG Roadmap, the GCG implementation in 2020 was "**Citizenship**" which focused on the efforts to become a world-class company that serves as an example in GCG implementation for other companies in the national and international levels. Several IPC achievements in 2020 are as follows:

Pencapaian Roadmap GCG Tahun 2020

2020 GCG Roadmap Achievement

Program	Pencapaian / Achievement
Pengukuran internasional atas pelaksanaan GCG. / International assessment on GCG implementation.	<p>Kegiatan ini telah dilakukan dengan pencapaian yaitu Pengukuran Pelaksanaan GCG IPC Tahun 2019 menggunakan parameter <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> dengan Skor 89,74 dan pengukuran Skor GCG IPC Tahun Buku 2019 dengan menggunakan parameter dari Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 adalah 98,55.</p> <p>Laporan Tahunan IPC tahun 2019, mendapatkan <i>Gold Award</i> dan peringkat 29 dengan nilai 98 (nilai maksimal 100), dalam <i>League of American Communications Professionals (LACP) Annual Report Competition</i>.</p> <p>IPC GCG Implementation Assessment of 2019 was carried out using ASEAN Corporate Governance Scorecard parameter and resulted in a score of 89.74, whereas the GCG Score of IPC in 2019 Fiscal Year using the parameter from the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 was 98.55.</p> <p>The 2019 IPC Annual Report earned the Gold Award and the 29th position with the score of 98 (out of maximum 100) in the League of American Communications Professionals (LACP) Annual Report Competition.</p>
<i>Expose</i> pencapaian GCG IPC ke mitra bisnis dan <i>stakeholder</i> skala internasional. / <i>Expose</i> of IPC GCG achievement to business partners and stakeholders at international scale.	<i>Expose</i> mengenai perusahaan yang dibawakan oleh Direksi maupun Manajemen pada tahun 2020 selalu mengandung pencapaian GCG yang diperoleh Perusahaan. / <i>Expose</i> of the Company delivered by the Board of Directors or Management in 2020 always included the GCG achievements of the Company.
Keterlibatan aktif dalam kancah internasional untuk mempromosikan GCG dan bisnis berkelanjutan. / Active participation in the international sphere to promote GCG and sustainable business.	Ikut serta dalam mempromosikan pencapaian GCG Perusahaan pada GRC Summit 2020 tanggal 17-18 September 2020. / Participated in the promotion of the Company's GCG achievements at the GRC Summit 2020 on September 17-18, 2020.
<i>Monitoring</i> pelaksanaan dan pencapaian hasil GCG hingga anak perusahaan secara terintegrasi. / <i>Monitoring</i> GCG implementation and achievement down to the subsidiaries in an integrated manner.	<p>Melakukan <i>monitoring</i> penilaian GCG di Anak Perusahaan agar seluruh Anak Perusahaan dapat mencapai skor GCG sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan.</p> <p>Perusahaan juga rutin memonitor penyelesaian <i>Area of Improvement (Aoi)</i> yang dilaksanakan oleh Anak Perusahaan IPC .</p> <p>Monitoring GCG assessment at Subsidiaries so that all Subsidiaries reach the GCG score according to the established KPI.</p> <p>The Company also regularly monitored settlement of Areas of Improvement by IPC Subsidiaries.</p>



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola IPC mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Sistem kepengurusan di Perseroan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan organ tata kelola tertinggi di Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh organ-organ pendukung. Organ pendukung Dewan Komisaris antara lain Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko. Sedangkan organ pendukung Direksi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Di samping organ internal, struktur tata kelola Perseroan juga melibatkan organ eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Organ eksternal yang dilibatkan antara lain penilai (*assessor*) GCG untuk melakukan penilaian/*assessment* pelaksanaan GCG di Perseroan dan Akuntan Publik yang bertugas untuk melaksanakan audit eksternal.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

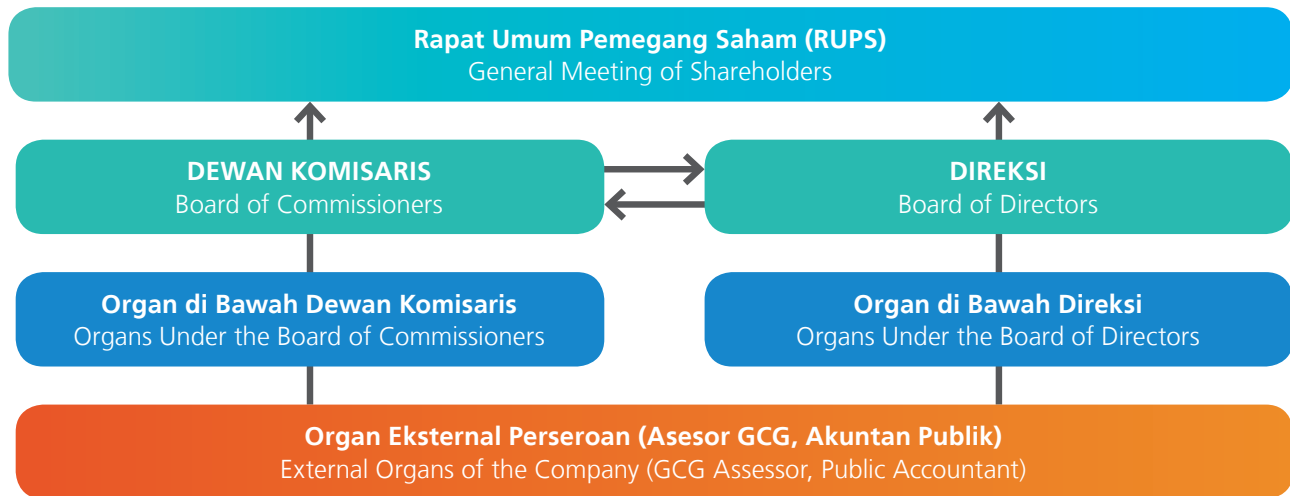
The GCG structure of IPC refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which states that there should be at least 3 (three) organs: General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision-making forum for the Shareholders, a Board of Commissioners as the highest supervisory body and a Board of Directors as the caretaker of business. The Company's management system is two-tiered with the presence of a Board of Commissioners and a Board of Directors which hold clear authority and responsibilities in their respective functions based on the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to the GMS as the highest governance organ at the Company.

In performing duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors are assisted by supporting organs. The Board of Commissioners' supporting organs are the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee. Whereas the Board of Directors' supporting organs are established in Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization and Governance Structure PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 dated August 13, 2020 regarding Amendment to Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization and Governance Structure PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In addition to internal organs, the Company's governance structure also includes external organs in order to improve GCG implementation quality. The external organs include GCG assessor that conducts GCG assessment at the Company and Public Accountant that is tasked to perform external audit.

STRUKTUR TATA KELOLA IPC

IPC GOVERNANCE STRUCTURE



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, IPC memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. Beberapa *governance soft structure* yang telah dimiliki IPC hingga saat ini antara lain:

1. Anggaran Dasar;
2. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
3. *Charter* Komite Audit;
4. *Charter* Komite Pemantau Manajemen Risiko;
5. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Kode Etik Bisnis;
7. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan;
8. Kebijakan *Whistleblowing System*;
9. Kebijakan Gratifikasi;
10. Roadmap GCG;
11. Piagam Satuan Pengawasan Internal;
12. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu;
13. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
14. Kebijakan Manajemen Risiko.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, IPC has a variety of policies/guidelines in carrying out its functions and tasks which are called *governance soft structures*. The IPC *governance soft structure* is as follows:

1. Articles of Association;
2. Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Audit Committee Charter;
4. Risk Management Monitoring Committee Charter;
5. Nomination and Remuneration Committee Charter;
6. Code of Conduct;
7. Guidelines for GCG Implementation;
8. Whistleblowing System Policy;
9. Gratification Policy;
10. GCG Roadmap;
11. Internal Audit Unit Charter;
12. Quality Management System Policy;
13. Internal Control System Policy;
14. Risk Management Policy.



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan entitas usaha, lembaga, ataupun perorangan yang memiliki saham di suatu perusahaan dan namanya tercantum dalam surat saham. Hingga saat ini, hanya ada 1 (satu) pemegang saham Perseroan, yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham sebesar 100 persen di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pemegang Saham Tunggal IPC



SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS

Shareholders are business entities, institutions, or individuals that own shares in a company and of which names are registered in shareholding letter. To date, the Company only has 1 (one) shareholder, namely the Republic of Indonesia as represented by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) with 100 percent share ownership in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Thus, the Republic of Indonesia becomes the Controlling Shareholder of the Company.

IPC Sole Shareholder

Berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai perubahan jenis saham dan Anggaran Dasar Perusahaan, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna sebanyak 1 lembar saham dan saham Seri B sebanyak 1.444.028 lembar saham.

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
2. Persetujuan perubahan permodalan;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen;
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

Based on Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 09 dated August 21, 2019 regarding changes to type of shares and the articles of association of the Company, the Government of the Republic of Indonesia as represented by the Minister of SOEs changed the type of shares from without series into Dwiwarna Series A amounting to 1 share and Series B amounting to 1,444,028 shares.

Shareholders' Rights

Shareholders' rights stipulated in the Company's Articles of Association are the rights to approve at the GMS regarding the following matters:

1. Approval of amendments to Articles of Association;
2. Approval of capital changes;
3. Approval of appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Approval related to merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution;
5. Request and access data and documents;
6. Approval of remuneration for members of Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Approval for assets transfer based on Articles of Association requires approval of the GMS;
8. Approval regarding participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies which based on Articles of Association requires approval of the GMS;

9. Persetujuan penggunaan laba;
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
11. Pengusulan agenda RUPS;
12. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di IPC dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor IPC. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

Jenis Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan IPC setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan IPC dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan IPC.

Tahapan dan Proses Penyelenggaraan RUPS

Pelaksanaan RUPS di Perseroan didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Dalam Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51 persen (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang meliputi RUPS RKAP Tahun 2020 pada tanggal 24 Januari 2020 dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2019 pada tanggal 6 Juli 2020.

9. Approval for use of profit;
10. Approval for long-term investment and financing based on Articles of Association requires approval of the GMS;
11. Proposal of GMS agenda;
12. Proposal of prospective members of Board of Directors and Board of Commissioners.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in IPC and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in IPC's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of announcement and invitation of the GMS in accordance with applicable regulations. After the announcement and invitation letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at IPC office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

Type of GMS Convention

GMS at the Company consists of Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS). AGMS is held annually by IPC, and includes AGMS for IPC Annual Report and AGMS for the Company's Work Plan and Budget (RKAP GMS), while the EGMS can be held at any time based on the needs and for the benefit of IPC.

Stages and Process of GMS Convention

GMS convention at the Company starts with a GMS invitation 14 (fourteen) days before the GMS convention date. The Company's Articles of Association stipulates that the GMS shall be held at the Company's place of domicile or where the Company conducts its main business activities. The GMS can be held if at least 51 percent (fifty one percent) of total shareholders with voting rights are present or represented.

Annual GMS in 2020

In 2020, the Company held Annual GMS which consists of 2020 RKAP GMS on January 24, 2020 and GMS for Validation of Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2019 Fiscal Year on July 6, 2020.



Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2020

Tahapan Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2020

Tahapan penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2020 tergambar dalam tabel berikut ini:

2020 RKAP GMS

Stages of 2020 RKAP GMS Convention

Stages of 2020 RKAP GMS Convention are illustrated in the following table.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2020

Stages of 2020 RKAP GMS Convention

Pemanggilan RUPS / GMS Invitation	Pemanggilan RUPS RKAP Tahun 2020 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali disampaikan melalui Surat Undangan Rapat No. SK.03/3/1/4/TUD/UT/PI.II-2020 tanggal 3 Januari 2020. / 2020 RKAP GMS invitation to the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder was delivered through Letter of Meeting Invitation No. SK.03/3/1/4/TUD/UT/PI.II-2020 dated January 3, 2020.
Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	<ul style="list-style-type: none"> RUPS RKAP Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 pukul 15.30 – 16.30 WIB di Kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta. / 2020 RKAP GMS was held on Friday, January 24, 2020 from 15.30 – 16.30 WIB at the Republic of Indonesia Ministry of SOEs Office, Jakarta. RUPS RKAP Tahun 2020 dipimpin oleh Liliek Mayasari selaku Pemegang Kuasa dari Pemegang Saham Perseroan. / 2020 RKAP GMS was chaired by Liliek Mayasari as the Authorized Representative of the Company's Shareholder.
Risalah RUPS / GMS Minutes	Risalah RUPS RKAP Tahun 2020 diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 24 Januari 2020 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2020. / 2020 RKAP GMS Minutes was stipulated in Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 09 dated January 24, 2020 regarding Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding the Company Work Plan and Budget and the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program of 2020.

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS RKAP Tahun 2020

RUPS RKAP Tahun 2020 dihadiri oleh Pemegang Saham IPC, Dewan Komisaris dan Direksi IPC, dengan uraian sebagai berikut:

2020 RKAP GMS Attendance Recapitulation

2020 RKAP GMS was attended by IPC Shareholder, Board of Commissioners, and Board of Directors with details as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS RKAP Tahun 2020

2020 RKAP GMS Attendance Recapitulation

Pemegang Saham IPC / IPC Shareholder	<ol style="list-style-type: none"> Liliek Mayasari (Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN) sebagai Pemegang Kuasa dengan Hak Substitusi dari Pemegang Saham Perseroan. / Liliek Mayasari (Acting Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs) as the Authorized Representative with Substitution Rights of the Company's Shareholder. Indriani Widiastuti (Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN). / Indriani Widiastuti (Assistant Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs).
Dewan Komisaris IPC / IPC Board of Commissioners	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> Djadmiko (Komisaris merangkap Komisaris Utama) / Commissioner and President Commissioner Montty Girianna (Komisaris merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko / Commissioner and Head of Risk Monitoring Committee) Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) Raden Agus Haryoto Purnomo (Komisaris / Commissioner) Kushari Suprianto (Komisaris merangkap Ketua Komite Audit / Commissioner and Head of Audit Committee) Djaman Andhi Nirwanto (Komisaris merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Commissioner and Head of Nomination and Remuneration Committee) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>
Direksi IPC / IPC Board of Directors	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> Elvyn Gani Masassya (Direktur Utama / President Director) Hambra (Wakil Direktur Utama / Vice President Director) Arif Suhartono (Direktur Komersial / Commercial Director) Widyaka Nusapati (Direktur Keuangan / Finance Director) Dani Rusli Utama (Direktur Teknik / Technical Director) Prasetyadi (Direktur Operasi / Operations Director) Rizal Ariansyah (Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director) Ogi Rulino (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2020

RUPS RKAP Tahun 2020 telah dihadiri dan diwakili oleh sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A dan 1.444.028 lembar saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 yang 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS RKAP Tahun 2020 telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Rapat ini bersifat sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

2020 RKAP GMS Attendance Quorum and Resolutions

2020 RKAP GMS was attended and represented by 1 (one) share of Series A and 1,444,028 shares of Series B or totaling Rp1,444,029,000,000.00, 100 percent of which are owned by the Republic of Indonesia, issued and fully paid in the Company. The attendance quorum of 2020 RKAP GMS was fulfilled as required in Article 25 Paragraph (1) Letter a and Paragraph (6) of the Company's Articles of Association. Therefore, the Meeting was valid and capable of making binding decisions.

Keputusan RUPS RKAP Tahun 2020

2020 RKAP GMS Resolutions

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA																																													
Agenda	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. / Validation of 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP)																																												
Hasil Keputusan / Resolution	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: / Validated the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with summary as follows:</p> <p>1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian / Consolidated Statements of Profit or Loss</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a651; color: white;">Uraian / Description</th> <th style="background-color: #ffc107; color: white;">Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan Usaha / Operating Revenues</td> <td style="text-align: right;">13.500.795</td> </tr> <tr> <td>Laba Setelah Pajak / Income After Tax</td> <td style="text-align: right;">3.105.693</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidated Statements of Financial Position</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a651; color: white;">Uraian / Description</th> <th style="background-color: #ffc107; color: white;">Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Aset / Total Assets</td> <td style="text-align: right;">59.176.641</td> </tr> <tr> <td>Liabilitas / Liabilities</td> <td style="text-align: right;">38.600.649</td> </tr> <tr> <td>Ekuitas / Equity</td> <td style="text-align: right;">20.575.992</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Investasi / Investment</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Investasi tahun 2020 sebagai berikut: / The 2020 Investment Plan is as follows: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a651; color: white;">Uraian / Description</th> <th style="background-color: #ffc107; color: white;">Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan fasilitas pelabuhan / Building and port facilities</td> <td style="text-align: right;">1.953.926</td> </tr> <tr> <td>Kapal / Vessels</td> <td style="text-align: right;">38.600</td> </tr> <tr> <td>Alat fasilitas pelabuhan / Port equipment</td> <td style="text-align: right;">67.170</td> </tr> <tr> <td>Instalasi fasilitas pelabuhan / Port facility installation</td> <td style="text-align: right;">48.944</td> </tr> <tr> <td>Tanah / Land</td> <td style="text-align: right;">13.026</td> </tr> <tr> <td>Jalan dan bangunan / Road and building</td> <td style="text-align: right;">232.030</td> </tr> <tr> <td>Peralatan / Equipment</td> <td style="text-align: right;">102.721</td> </tr> <tr> <td>Kendaraan / Vehicles</td> <td style="text-align: right;">4.600</td> </tr> <tr> <td>Emplasemen / Emplacement</td> <td style="text-align: right;">4.871</td> </tr> <tr> <td>Non-fisik / Non-physical</td> <td style="text-align: right;">126.395</td> </tr> <tr> <td>Kapitalisasi bunga / Interest capitalization</td> <td style="text-align: right;">147.798</td> </tr> <tr> <td>Anak Perusahaan / Subsidiaries</td> <td style="text-align: right;">1.579.960</td> </tr> <tr> <td>Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Parent Company Capital Investment</td> <td style="text-align: right;">1.998.470</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffc107;">Total Investasi / Total Investment</td> <td style="background-color: #ffc107; text-align: right;">6.318.511</td> </tr> </tbody> </table> <p>Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10 persen (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi, sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi. / Delegated authority to the Board of Commissioners to provide approval for actions that may cause changes, in the event of any action that causes changes to the investment budget allocation at maximum 10 percent (ten percent) of the value of each investment program/item, insofar as those actions neither change the investment program/item nor exceed the total investment value.</p>	Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)	Pendapatan Usaha / Operating Revenues	13.500.795	Laba Setelah Pajak / Income After Tax	3.105.693	Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)	Total Aset / Total Assets	59.176.641	Liabilitas / Liabilities	38.600.649	Ekuitas / Equity	20.575.992	Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)	Bangunan fasilitas pelabuhan / Building and port facilities	1.953.926	Kapal / Vessels	38.600	Alat fasilitas pelabuhan / Port equipment	67.170	Instalasi fasilitas pelabuhan / Port facility installation	48.944	Tanah / Land	13.026	Jalan dan bangunan / Road and building	232.030	Peralatan / Equipment	102.721	Kendaraan / Vehicles	4.600	Emplasemen / Emplacement	4.871	Non-fisik / Non-physical	126.395	Kapitalisasi bunga / Interest capitalization	147.798	Anak Perusahaan / Subsidiaries	1.579.960	Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Parent Company Capital Investment	1.998.470	Total Investasi / Total Investment	6.318.511
Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)																																												
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	13.500.795																																												
Laba Setelah Pajak / Income After Tax	3.105.693																																												
Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)																																												
Total Aset / Total Assets	59.176.641																																												
Liabilitas / Liabilities	38.600.649																																												
Ekuitas / Equity	20.575.992																																												
Uraian / Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) / Total (in Millions of Rupiah)																																												
Bangunan fasilitas pelabuhan / Building and port facilities	1.953.926																																												
Kapal / Vessels	38.600																																												
Alat fasilitas pelabuhan / Port equipment	67.170																																												
Instalasi fasilitas pelabuhan / Port facility installation	48.944																																												
Tanah / Land	13.026																																												
Jalan dan bangunan / Road and building	232.030																																												
Peralatan / Equipment	102.721																																												
Kendaraan / Vehicles	4.600																																												
Emplasemen / Emplacement	4.871																																												
Non-fisik / Non-physical	126.395																																												
Kapitalisasi bunga / Interest capitalization	147.798																																												
Anak Perusahaan / Subsidiaries	1.579.960																																												
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Parent Company Capital Investment	1.998.470																																												
Total Investasi / Total Investment	6.318.511																																												
Status	Terealisasi. / Realized.																																												



MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA

Agenda	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020. / Validation of 2020 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program (RKA PKBL).															
Hasil Keputusan / Resolution	Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan Risalah Rapat No. RIS-29/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 18 November 2019. / Validated the 2020 (two thousand twenty) Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) according to Meeting Minutes No. RIS-29/D7.MBU.3/11/2019 dated November 18, 2019.															
	RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / 2020 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian / Description</th> <th colspan="2">Jumlah (dalam Rupiah Penuh) / Total (in Full Rupiah)</th> </tr> <tr> <th>Kemitraan / Partnership</th> <th>Bina Lingkungan / Community Development</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Tersedia / Available Funds</td> <td>47.847.674.685</td> <td>24.737.964.260</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Dana / Funds Usage</td> <td>47.847.674.685</td> <td>24.737.964.260</td> </tr> <tr> <td>Sisa Dana / Remaining Funds</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Uraian / Description	Jumlah (dalam Rupiah Penuh) / Total (in Full Rupiah)		Kemitraan / Partnership	Bina Lingkungan / Community Development	Dana Tersedia / Available Funds	47.847.674.685	24.737.964.260	Penggunaan Dana / Funds Usage	47.847.674.685	24.737.964.260	Sisa Dana / Remaining Funds	-	-
Uraian / Description	Jumlah (dalam Rupiah Penuh) / Total (in Full Rupiah)															
	Kemitraan / Partnership	Bina Lingkungan / Community Development														
Dana Tersedia / Available Funds	47.847.674.685	24.737.964.260														
Penggunaan Dana / Funds Usage	47.847.674.685	24.737.964.260														
Sisa Dana / Remaining Funds	-	-														
Status	Terealisasi. / Realized.															

MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA

Agenda	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. / Approval and validation of management contract (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholder for 2020.
Hasil Keputusan / Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. / Approved and validated management contract (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholder for 2020.
Status	Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / FOURTH MEETING AGENDA

Agenda	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. / Approval and validation of management contract (Key Performance Indicator) between the Board of Commissioners and the Shareholder for 2020.
Hasil Keputusan / Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. / Approved and validated management contract (Key Performance Indicator) between the Board of Commissioners and the Shareholder for 2020.
Status	Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KELIMA / FIFTH MEETING AGENDA

Agenda	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. / Establishment of Operational Aspect Indicator for Company Soundness Assessment for 2020.																																		
Hasil Keputusan / Resolution	Menetapkan indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. / Established Operational Aspect Indicator for Company Soundness Assessment for 2020.																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator / Indicator</th> <th>Satuan / Unit</th> <th>Skor / Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Pelayanan Jasa Kapal / Vessel Services</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Waiting Time for Pilot</td> <td>Jam</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas / Container Berthing Effectiveness</td> <td>%</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Pelayanan Jasa Barang / Cargo Services</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas / Container Stevedoring Productivity</td> <td>B/S/H</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Yard Occupancy Ratio Peti Kemas / Container Yard Occupancy Ratio</td> <td>%</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Bobot / Total Value</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indikator / Indicator	Satuan / Unit	Skor / Score	I. Pelayanan Jasa Kapal / Vessel Services				1.	Waiting Time for Pilot	Jam	9,00	2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas / Container Berthing Effectiveness	%	9,00	II. Pelayanan Jasa Barang / Cargo Services				1.	Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas / Container Stevedoring Productivity	B/S/H	8,00	2.	Yard Occupancy Ratio Peti Kemas / Container Yard Occupancy Ratio	%	9,00	Total Bobot / Total Value			35,00		
No.	Indikator / Indicator	Satuan / Unit	Skor / Score																																
I. Pelayanan Jasa Kapal / Vessel Services																																			
1.	Waiting Time for Pilot	Jam	9,00																																
2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas / Container Berthing Effectiveness	%	9,00																																
II. Pelayanan Jasa Barang / Cargo Services																																			
1.	Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas / Container Stevedoring Productivity	B/S/H	8,00																																
2.	Yard Occupancy Ratio Peti Kemas / Container Yard Occupancy Ratio	%	9,00																																
Total Bobot / Total Value			35,00																																
Status	Terealisasi. / Realized.																																		

Arahan RUPS RKAP Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2020 RKAP GMS Directives and Follow-Up

In implementing the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) of 2020, the Board of Commissioners and Board of Directors shall pay attention to the following matters:

Arahan RUPS RKAP Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya 2020 RKAP GMS Directives and Follow-Up

No.	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Directive	Tindak Lanjut / Follow-Up
1.	RKAP Tahun 2020 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2019. / The validated 2020 RKAP shall be detailed into monthly targets and cascading to all personnel of the Company. The Board of commissioners shall report the details and cascading to the Shareholder in Q1/2019.	Telah direalisasikan. / Realized.
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan Perseroan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen Perseroan. / Increase revenues and cost reduction program in all lines of business to create more effective and efficient Company management, where net income is the minimum target that must be achieved by all management of the Company.	Telah direalisasikan. / Realized.
3.	Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i> , serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. / Follow up on cooperation and synergy established with Port SOEs and other SOEs related to business development, port, asset utilization, HR development, joint procurement, and information technology utilization and development.	Telah direalisasikan. / Realized.
4.	Melakukan <i>review</i> dan <i>mapping</i> terhadap bisnis Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dan menetapkan kebijakan strategis terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan sinergitas dalam <i>group</i> untuk meningkatkan <i>value</i> serta senantiasa melakukan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja Perseroan secara konsolidasi. / Conduct review and mapping of the business of Subsidiaries and Joint Ventures and establish strategic policies for the Subsidiaries and Joint Ventures in order to optimize group synergy to increase value, particularly those with significant contribution to the consolidated performance of the Company.	Telah direalisasikan. / Realized.
5.	Memastikan program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier, dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i> . / Ensure comprehensive implementation of HC management and development program by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of HC development policy, career path, and talent management to support the achievement of the Company's short-term and long-term targets shall be improved, and HC policies shall be evaluated to align with the best practices.	Telah direalisasikan. / Realized.
6.	Dalam menyusun Laporan Keuangan, Direksi agar memperhatikan <i>Chart of Account</i> (CoA) yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dan standar akuntansi keuangan. / In preparing Financial Statements, the Board of Directors shall consider Chart of Account (CoA) in accordance with Indonesian Port Company Accounting Guidelines and financial accounting standards.	Telah direalisasikan. / Realized.
7.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait terhadap peraturan-peraturan dan isu-isu yang bersinggungan dengan kegiatan usaha Pelindo bersama-sama dengan Pelindo I – IV agar dapat berkoordinasi melalui <i>workshop</i> dan FGD untuk memperoleh solusi terhadap isu-isu tersebut. / Coordinate with relevant Ministries/Institutions concerning regulations and issues related to the business activities of Pelindo and Pelindo I – IV through workshop and FGD to find solutions for such issues.	Telah direalisasikan. / Realized.
8.	Investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, yang dapat memberikan <i>return</i> . Sebelum dilaksanakan, disiapkan kajian yang komprehensif, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. / Investment shall be made based on priority scale of those providing the most returns. Prior to execution, a comprehensive study shall be made according to standard operating procedure with transparent and accountable fair prices.	Telah direalisasikan. / Realized.
9.	Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2019 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaiannya pada tahun 2020. / The Board of Directors shall take account of findings and recommendations from BPK, Independent Auditor, and Internal Audit Unit that are not yet settled until 2019 and set target to settle these matters in 2020.	Telah direalisasikan. / Realized.
10.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar melakukan persiapan dalam rangka integrasi layanan pelabuhan bersama-sama dengan Pelindo I, II, III, dan IV. / The Board of Directors under supervision of the Board of Commissioners shall prepare for port service integration with Pelindo I, II, III, and IV.	Telah direalisasikan. / Realized.
11.	Komisaris agar dapat mengawal dan mengawasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tepat waktu sehingga target dapat tercapai. / The Board of Commissioners shall guide and supervise the implementation of National Strategic Projects in a timely manner to achieve the targets.	Telah direalisasikan. / Realized.
12.	Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris, dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. / The RKAP, RKA PKBL, RKA of the Board of Commissioners, and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020 which have been approved and validated by the General Meeting of Shareholders are an integral part of GMS Resolution Minutes and shall serve as guidelines for the Board of Directors in implementing work programs and performance targets in 2019 and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.	Telah direalisasikan. / Realized.

Persetujuan Revisi RKAP dan KPI Perusahaan Tahun 2020

Menunjuk hasil pembahasan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan *Key Performance Indicator* (KPI) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Menteri BUMN RI selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyampaikan hal-hal terkait Persetujuan Revisi RKAP dan KPI melalui Surat No. S-1008/MBU/11/2020 tanggal 16 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

2020 RKAP and Company KPI Revision Approval

Based on the discussion result on the Revision of Company Work Plan and Budget (RKAP) and Key Performance Indicator (KPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Republic of Indonesia Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) delivered the Approval of RKAP and KPI Revision through Letter No. S-1008/MBU/11/2020 dated November 16, 2020 with details as follows:



1. Menyetujui revisi/perubahan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Asumsi

Uraian / Description	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
	Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c)-1
Nilai Tukar Rupiah / USD / Rupiah-USD Exchange Rate	13.901	14.231	14.400	14.800	6,47	2,78
Tingkat Inflasi (%) / Inflation Rate (%)	3,50	1,09	3,10	3,90	11,43	25,81
Pertumbuhan Ekonomi (%) / Economic Growth (%)	5,30	(3,80)	5,30	2,30	(56,60)	(56,60)
ICP (USD/Barrel)	67,18	36,68	59,82	38,00	(43,44)	(36,48)
Perbaikan Covid-19 / Covid-19 Recovery	-	-	-	Kuartal IV 2020	-	-

1. Approved the revision/change to 2020 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) due to the impact of Covid-19 pandemic with summary as follows:

a. Assumptions

b. Laba Rugi (dalam miliar Rupiah)

b. Profit or Loss (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
	Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c)-1
Pendapatan / Revenues	11.141,75	4.965,89	13.500,79	10.316,57	(7,41)	(23,59)
Beban Pokok Pendapatan (BPP) / Cost of Revenues	7.203,74	3.378,66	7.825,59	6.678,34	(7,29)	(14,66)
Laba Kotor / Gross Income	3.938,02	1.587,23	5.675,21	3.638,24	(7,61)	(35,89)
Beban Usaha / Operating Expenses	1.316,62	605,72	1.460,18	1.511,90	14,83	3,54
Laba Usaha / Operating Income	2.621,39	981,51	4.215,03	2.126,34	(18,89)	(49,55)
EBITDA	3.485,10	1.402,49	5.141,73	3.001,87	(13,87)	(41,62)
Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	3.215,10	216,45	4.086,44	991,72	(69,15)	(75,73)
Laba Bersih / Net Income	2.503,81	(57,89)	3.105,69	561,53	(77,57)	(81,92)

c. Arus Kas (dalam miliar Rupiah)

c. Cash Flows (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
	Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c)-1
Kas dari Aktivitas Operasi / Cash from Operating Activities	1.124,03	171,94	2.521,95	1.374,12	22,25	(45,51)
Kas dari Aktivitas Investasi / Cash from Investing Activities	(2.373,18)	1.637,05	(2.503,32)	(627,23)	(73,57)	(74,94)
Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash from Financing Activities	(687,56)	-	(475,62)	291,76	(142,43)	(161,34)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase in Cash and Cash Equivalents	(2.415,00)	2.134,89	(456,99)	1.848,21	(176,53)	(504,43)
Kas Akhir Periode / Cash at End of Period	15.603,67	17.738,42	16.373,42	17.451,75	11,84	6,59

d. Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah)

d. Financial Position (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
	Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c-1)
Aset Lancar / Current Assets	21.061,76	21.728,38	23.284,94	21.445,77	1,82	(7,90)
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	30.978,84	31.595,53	35.891,71	33.040,2	6,65	(7,94)
Total Aset / Total Assets	52.040,60	53.323,91	59.176,64	54.485,98	4,70	(7,93)
Kewajiban Jangka Pendek / Current Liabilities	5.353,72	6.001,00	8.238,23	5.581,14	4,25	(32,25)
Kewajiban Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	28.560,67	29.594,15	30.362,42	30.843,93	7,99	1,59
Ekuitas / Equity	18.126,21	17.728,76	20.575,99	18.060,91	(0,36)	(12,22)
Kewajiban + Ekuitas / Liabilities + Equity	52.040,60	53.323,91	59.176,64	54.485,98	4,70	(7,93)

e. Investasi (dalam miliar Rupiah)

e. Investment (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
	Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c-1)
Bangunan fasilitas pelabuhan / Building and port facilities	1.879,75	998,89	1.953,93	1.812,41	(3,58)	(7,24)
Kapal / Vessels	3,64	-	38,60	35,6	878,02	(7,77)
Alat fasilitas pelabuhan / Port equipment	56,44	9,83	67,17	58,62	3,86	(12,73)
Instalasi fasilitas pelabuhan / Port facility installation	49,56	15,07	48,94	69,56	40,36	42,13
Tanah / Land	13,89	2,67	13,03	11,93	(14,11)	(8,44)
Jalan dan bangunan / Road and building	94,02	24,84	232,03	151,17	60,78	(34,85)
Peralatan / Equipment	81,32	26,84	102,72	97,64	20,07	(4,95)
Kendaraan / Vehicles	2,23	-	4,60	2,1	(5,83)	(54,35)
Emplasemen / Emplacement	18,56	-	4,87	3,87	(79,15)	(20,53)
Investasi Non-fisik / Non-Physical Investment	309,32	177,80	274,19	234,58	(24,16)	(14,45)
Investasi Anak Perusahaan / Investment in Subsidiaries	934,83	80,43	1.579,96	922,39	(1,33)	(41,62)
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Parent Company Capital Investment	-	-	1.998,47	49,2	-	(97,54)
Total Investasi / Total Investment	3.443,56	1.336,36	6.318,51	3.449,07	0,16	(45,41)



f. Main Dashboard

Uraian / Description	Satuan / Unit	2019	2020			% Pertumbuhan / Growth %	
		Audit	Realisasi s.d. Juni / Realization until June	RKAP Awal / Initial RKAP	RKAP Revisi / Revised RKAP		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(a)-1	(d)/(c)-1
EBITDA	Rp miliar / Rp billion	3.485,10	1.402,49	5.141,73	3.001,97	(13,86)	(41,62)
CFO	Rp miliar / Rp billion	1.124,03	171,94	2.521,95	1.374,12	22,25	(45,51)
Interest Bearing Debt	Rp miliar / Rp billion	22.133,35	22.538,64	23.809,65	23.964,60	8,27	0,65
Debt/EBITDA	kali (x) / times (x)	6,35	16,07	4,63	7,98	25,67	72,35

f. Main Dashboard

2. Sehubungan dengan penetapan revisi RKAP Tahun 2020 tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Target-target RKAP Tahun 2020 tersebut di atas agar di-breakdown ke dalam target triwulanan dan cascade kepada seluruh unit dan/atau jajaran Perseroan serta dilaporkan realisasinya kepada kami bersamaan dengan laporan triwulanan.
 - b. Perseroan agar segera menyampaikan buku Revisi RKAP Tahun 2020 yang telah disetujui oleh RUPS ini.

2. Related to the revision to 2020 RKAP, the Board of Commissioners and Board of Directors shall pay attention to the following matters:
 - a. The targets of 2020 RKAP shall be broken down into quarterly targets and cascaded to all units and/or personnel of the Company and the realization reported to us along with the quarterly report.
 - b. The Company shall immediately submit the 2020 RKAP Revision book which has been approved by this GMS.

Sementara itu, untuk penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Meanwhile, the 2020 *Key Performance Indicators* (KPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are described in the following table:

Key Performance Indicators (KPI) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

2020 Key Performance Indicators (KPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

No.	KPI	Satuan / Unit	Target	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	
					Sub	Total
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia						
1.	Debt – Service Coverage Ratio	Kali / Times	2,14	Maximize		5
2.	Debt to Equity Ratio	Kali / Times	1,33	Minimize		6
3.	Total Debt to EBITDA	Kali / Times	7,98	Minimize		5
4.	Pangsa Pasar Pelabuhan / Port Market Share	%	91,98	Maximize		6
5.	Retensi Pelanggan / Customer Retention	%	-15,84	Maximize		10
6.	Number of Ship/Customer Served	GT	175.986.121	Maximize		6
7.	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) / Partnership and Community Development Program (PKBL)	Skor % / Score %	75,00	Maximize		4

42

No.	KPI	Satuan / Unit	Target	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	
					Sub	Total
B. Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation						
Standarisasi Performansi Pelabuhan / Port Performance Standardization						
8.	a. <i>Dwelling Time</i>	Hari / Day	3,20	Minimize	3	
	b. <i>Turn Around Time (Kapal)</i>	Jam / Hour	81,63	Minimize	3	22
9.	<i>Service Level Agreement</i>	%	100,00	Maximize	10	
10.	Pemenuhan Audit Sertifikasi / Certification Audit Fulfillment	%	100,00	Maximize	6	
C. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership						
11.	Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan / Service Digitalization and Integration	%	100,00	Maximize	6	6
D. Pengembangan Investasi / Investment Development						
12.	<i>Capital Expenditure (CAPEX)</i>	%	87,50	Maximize	4	10
13.	Sinergi BUMN / SOE Synergy	Rupiah	72.201.450	Maximize	6	
E. Pengembangan Talenta / Talent Development						
14.	Pemenuhan Standar Keahlian Melalui Sertifikasi / Competency Standard Fulfillment through Certification	%	100,00	Maximize	8	
15.	Produktivitas Pegawai / Employee Productivity	Rp/Orang / Rp/Person	512.646.285	Maximize	7	20
16.	Pemenuhan <i>Talent Pool</i> BUMN / SOE Talent Pool Fulfillment	%	20,00	Maximize	5	
TOTAL						100

Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Tahapan penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 tergambar dalam tabel berikut ini:

GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

Stages of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

Stages of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report are described in the following table:

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

Pemanggilan RUPS / GMS Invitation	Pemanggilan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali disampaikan melalui Surat Keputusan No. HM.04.03/10/6/2/TUD/UT/PT.II-2020 tanggal 10 Juni 2020. / Invitation of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report to the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder was delivered through Decree No. HM.04.03/10/6/2/TUD/UT/PT.II-2020 dated June 10, 2020.
Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.30 – 10.30 WIB melalui <i>Video Conference Zoom Meeting</i>. / Held on Monday, June 6, 2020 from 09.30 – 10.30 WIB through Zoom Meeting Video Conference. Dipimpin oleh Yohanes Babtista Priyatmo Hadi selaku Pemegang Kuasa dari Pemegang Saham Perseroan / Chaired by Yohanes Babtista Priyatmo Hadi as the Authorized Representative of the Company's Shareholder.
Risalah RUPS / GMS Minutes	Risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 diaktakan dalam Akta Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H. No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Minutes of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report was stipulated in Deed of Notary Dewi Sugina Mulyani, S.H. No. 12 dated August 24, 2020 regarding Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dihadiri oleh Pemegang Saham IPC, Dewan Komisaris dan Direksi IPC, dengan uraian sebagai berikut:

Attendance Recapitulation at GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report was attended by IPC Shareholder, Board of Commissioners, and Board of Directors with details as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Attendance Recapitulation at GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

Pemegang Saham IPC / IPC Shareholder	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi (Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN) sebagai Pemegang Kuasa dengan Hak Substitusi dari Pemegang Saham Perseroan. / Yohanes Babtista Priyatmo Hadi (Assistant Deputy of Transportation Facilities and Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs) as the Authorized Representative with Substitution Rights of the Company's Shareholder.
Dewan Komisaris IPC / IPC Board of Commissioners	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama & Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / President Commissioner & Independent Commissioner and Head of Nomination and Remuneration Committee) 2. Montty Girianna (Komisaris merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko / Commissioner and Head of Risk Monitoring Committee) 3. Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) 4. D. Andhi Nirwanto (Komisaris merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Commissioner and Secretary of Nomination and Remuneration Committee) 5. Djadmiko (Komisaris / Commissioner) 6. Kushari Suprianto (Komisaris merangkap Ketua Komite Audit / Commissioner and Head of Audit Committee) 7. R. Agus H. Purnomo (Komisaris / Commissioner) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>
Direksi IPC / IPC Board of Directors	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono (Direktur Utama / President Director) 2. Hambra (Wakil Direktur Utama / Vice President Director) 3. Rima Novianti (Direktur Komersial / Commercial Director) 4. Yon Irawan (Direktur Keuangan / Finance Director) 5. Zuhri Iryansyah (Direktur Teknik / Technical Director) 6. Muarip (Direktur Operasi / Operations Director) 7. Ihsanuddin Usman (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director) 8. Ogi Rulino (Direktur Transformasi Dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 telah dihadiri dan diwakili oleh sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A dan 1.444.028 lembar saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 yang 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Rapat ini bersifat sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Attendance Quorum and Resolutions of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report was attended and represented by 1 (one) share of Series A and 1,444,028 shares of Series B or totaling Rp1,444,029,000,000.00, 100 percent of which are owned by the Republic of Indonesia, issued and fully paid in the Company. The attendance quorum of 2020 RKAP GMS was fulfilled as required in Article 25 Paragraph (1) Letter a and Paragraph (6) of the Company's Articles of Association. Therefore, the Meeting was valid and capable of making binding decisions.

Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Resolutions of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA /
FIRST MEETING AGENDA**

Agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. / Approval of Annual Report and Validation of Consolidated Financial Statements of the Company for 2019 Fiscal Year and Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2019 Fiscal Year.

Hasil Keputusan / Resolution Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (*member of Ernst and Young Global*) sesuai laporannya Nomor 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. / Approved the Annual Report for 2019 Fiscal Year and Supervisory Report of the Board of Commissioners and validated the Financial Statements of the Company for 2019 Fiscal Year which has been audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (*member of Ernst and Young Global*) according to report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 dated March 31, 2020 with the opinion "fair in all material respects", and granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the fiscal year ending on December 31, 2019, insofar as those actions are not criminal and are reflected on the Company's reports.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. / Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II per 31 Desember 2019 ditutup dengan total aset serta total liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp52,04 triliun, Rp33,91 triliun, dan Rp18,12 triliun dengan rincian: / The Consolidated Statements of Financial Position of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as of December 31, 2019 was closed with total assets and total liabilities and equity at Rp52.04 trillion, Rp33.91 trillion, and Rp18.12 trillion respectively with the following details:

Uraian / Description	Jumlah per 31 Desember 2019 (dalam Ribuan Rupiah) / Total per December 31, 2019 (in Thousands of Rupiah)
Aset / Assets	
Aset Lancar / Current Assets	21.061.762.458
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	30.978.837.277
Total Aset / Total Assets	52.040.599.735
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity	
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	5.353.722.601
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	28.560.666.356
Ekuitas / Equity	18.126.210.778
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	52.040.599.735

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. / Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laba Bersih Konsolidasian dan Laba Komprehensif Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Tahun Buku 2019 masing-masing sebesar Rp2,50 triliun dan Rp2,52 triliun, dengan rincian: / Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2019 Fiscal Year was at Rp2.50 trillion and Rp2.52 trillion respectively with details as follows:

Uraian / Description	Jumlah per 31 Desember 2019 (dalam Ribuan Rupiah) / Total per December 31, 2019 (in Thousands of Rupiah)
Pendapatan Operasi / Operating Revenues	11.141.752.225
Beban Operasi / Operating Expenses	(8.520.357.673)
Pendapatan Non Usaha (Net) / Non-Operating Revenues (Net)	717.114.514
Laba (Rugi) Usaha / Operating Income (Loss)	3.338.509.066
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Income (Loss) Before Tax	3.215.100.432
Laba (Rugi) Bersih / Net Income (Loss)	2.503.810.348
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas / Income Attributable to Owner of Entity	2.455.762.801
Laba yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali / Income Attributable to Non-Controlling Interests	48.047.547

Status Terealisasi. / Realized.



MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA

Agenda Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019. / Approval and Validation of Financial Statements of Partnership and Community Development Program of the Company for 2019 Fiscal Year.

Hasil Keputusan / Resolution Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) sesuai laporannya Nomor 00370/2.1032/AU.2/06/0240-3/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. / Approved and validated Annual Report of Partnership and Community Development Program for 2019 Fiscal Year including Financial Statements of Partnership and Community Development Program which has been audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) according to report No. 00370/2.1032/AU.2/06/0240-3/1/III/2020 dated March 31, 2020 with the opinion "fair in all material respects", and granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their PKBL management and supervisory actions during 2019 fiscal year, insofar as those actions are not criminal and are reflected on the Company's reports.

1. Laporan Posisi Keuangan PKBL / PKBL Statements of Financial Position
Laporan Posisi Keuangan PKBL per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah Aset serta jumlah Liabilitas dan Aset Neto masing-masing sebesar Rp50,11 miliar, Rp6,35 miliar, dan Rp43,76 miliar, dengan rincian: / PKBL Statements of Financial Position as of December 31, 2019 was closed with total Assets and total Liabilities and Net Assets at Rp50.11 billion, Rp6.35 billion, and Rp43.76 billion respectively with details as follows:

Total Aset / Total Assets	Jumlah per 31 Desember 2019 (dalam Ribuan Rupiah) / Total per December 31, 2019 (in Thousands of Rupiah)
Aset Lancar / Current Assets	43.059.479
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	7.049.100
Total Aset / Total Assets	50.108.579

Total Liabilitas dan Aset Neto / Total Liabilities and Net Assets	Jumlah per 31 Desember 2019 (dalam Ribuan Rupiah) / Total per December 31, 2019 (in Thousands of Rupiah)
Liabilitas / Liabilities	6.352.694
Aset Neto / Net Assets	43.755.895
Total Liabilitas dan Aset Neto / Total Liabilities and Net Assets	50.108.579

2. Laporan Aktivitas PKBL / PKBL Activity Report
Laporan Aktivitas PKBL per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah Aset Neto Akhir Periode sebesar Rp43,76 miliar dengan rincian: / PKBL Activity Report as of December 31, 2019 was closed with total Net Assets at End of Period amounting to Rp43.76 billion with details as follows:

Uraian / Description	Jumlah per 31 Desember 2019 (dalam Ribuan Rupiah) / Total per December 31, 2019 (in Thousands of Rupiah)
Pendapatan / Revenues	26.787.261
Penyaluran, Beban & Pengeluaran / Disbursement, Expenses & Expenditure	53.807.870
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto / Increase (Decrease) in Net Assets	(27.020.609)
Aset Neto Awal Tahun / Net Assets at Beginning of Year	70.776.494
Aset Neto Akhir Tahun / Net Assets at End of Year	43.755.885

Status Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA

Agenda Penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019. / Determination of appropriation of Consolidated Net Income of the Company for 2019 Fiscal Year.

Hasil Keputusan / Resolution Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.455.762.801.000,00 dengan alokasi sebagai berikut: / Determined the appropriation of Net Income of the Company for 2019 Fiscal Year amounting to Rp2,455,762,801,000.00 with allocation as follows:
1. Dividen sebesar 28,84 persen dari laba bersih atau sebesar Rp708.218.661.061,00. / Dividend amounting to 28.84 percent of net income or Rp708,218,661,061.00.
2. Cadangan sebesar 71,16 persen dari laba bersih atau sebesar Rp1.747.544.138.938,00. / Reserves amounting to 71.16 percent of net income or Rp1,747,544,138,938.00.

Status Terealisasi. / Realized.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT /
FOURTH MEETING AGENDA**

Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2019. / Determination of Salary/Honorarium including facilities and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2020 Fiscal Year and tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance in 2019 Fiscal Year.
Hasil Keputusan / Resolution	Memutuskan penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri. / Decided that Salary/Honorarium including facilities and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2020 Fiscal Year and tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance in 2019 Fiscal Year will be determined separately.
Status	Terealisasi. / Realized.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA /
FIFTH MEETING AGENDA**

Agenda	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020. / Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2020 Fiscal Year.
Hasil Keputusan / Resolution	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020. / Reappointed Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2020 Fiscal Year. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. / Delegated authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of fees for audit services and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.
Status	Terealisasi. / Realized.

Arahan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Tindak Lanjutnya

Direksi dan seluruh jajaran Perseroan diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Directives of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report and the Follow-Up

The Board of Directors and all personnel of the company shall pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Tindak Lanjutnya

Directives of GMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report and the Follow-Up

No.	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Directive	Tindak Lanjut / Follow-Up
1.	Pemegang saham memberikan apresiasi atas kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh seluruh Direksi beserta jajaran dan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2019 dimana walaupun belum mencapai target namun beberapa indikator dari sisi keuangan berhasil tumbuh dari tahun 2018 serta atas pencapaian beberapa penghargaan selama tahun buku 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The shareholder appreciated the hard work and efforts of the Board of Directors and all personnel as well as the supervision of the Board of Commissioners for 2019 performance. Although it did not reach the target, several financial indicators managed to grow from 2018. The shareholder also appreciated the achievement of several awards during 2019 fiscal year by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Telah direalisasikan. / Realized.
2.	Terkait dengan adanya dampak Covid-19 terutama dalam jasa keuangan serta sektor kepelabuhanan sebagaimana Surat Wakil Menteri BUMN No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris diminta untuk segera mengajukan revisi RKAP tahun 2020 dengan harapan pengesahan dapat dilakukan pada akhir Juli 2020. / Related to the impact of Covid-19, particularly in financial services and port sector based on Letter of Deputy Minister of SOEs No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding Amendment to 2020 RKAP of SOEs under Deputy Minister of SOEs II, the Board of Directors with approval of the Board of Commissioners shall immediately propose revision of 2020 RKAP with validation targeted at the end of July 2020.	Telah direalisasikan. / Realized.
3.	Tema revisi RKAP 2020 adalah agar Perseroan dapat bertahan dari dampak pandemi Covid-19, untuk itu, pada era <i>new normal</i> , agar Direksi melakukan efisiensi untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari dampak Covid-19, melakukan revaluasi kembali terhadap <i>capital expenditure</i> (capex) atau investasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan prospek bisnis ke depan. / The theme of 2020 RKAP revision was so that the Company will be able to survive the impact of Covid-19 pandemic. Therefore, in the new normal era, the Board of Directors shall improve efficiency to balance declining revenues as an impact of Covid-19, reviewing capital expenditure (capex) or investment while considering the Company's financial condition and future business outlook.	Telah direalisasikan. / Realized.
4.	Capex yang menjadi prioritas adalah capex yang mendorong peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, termasuk meningkatkan pelayanan kepada <i>customer</i> . / Priority capex are those that support revenue increase in the short-term, including improvement of service to customers.	Telah direalisasikan. / Realized.
5.	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS. / The Board of Directors shall pay attention to and follow-up on the advices and recommendations of the Board of Commissioners as delivered at the GMS.	Telah direalisasikan. / Realized.
6.	Memberi kuasa kepada Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dengan hak substitusi untuk menyatakan risalah ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. / Granted authority to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with substitution rights to restate these minutes in authentic form before a Notary or authorized officials.	Telah direalisasikan. / Realized.



Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan hanya menggelar RUPS Tahunan saja, sehingga tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Pelaksanaan RUPS 1 (Satu) Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019, Perseroan hanya menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang meliputi RUPS RKAP Tahun 2019 pada tanggal 7 Januari 2020 dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018 pada tanggal 29 April 2020. Untuk RUPS Luar Biasa, pada tahun 2019 tidak diselenggarakan oleh Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2019

Tahapan Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2019

Tahapan penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2019 tergambar dalam tabel berikut ini:

Tahapan Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2019

Pemanggilan RUPS / GMS Invitation	Pemanggilan RUPS RKAP Tahun 2019 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali disampaikan melalui Surat Undangan Rapat No. SK.03/21/12/1/TUD/UT/PI.II-18 tanggal 21 Desember 2018. / 2019 RKAP GMS invitation to the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder was delivered through Letter of Meeting Invitation No. No. SK.03/21/12/1/TUD/UT/PI.II-18 dated December 21, 2018.
Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 pukul 14.00 – 15.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 6, Kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta. / Held on Monday, January 7, 2019 from 14.00 – 15.00 WIB in the 6th Floor Meeting Room, Republic of Indonesia Ministry of SOEs Office, Jakarta.
Risalah RUPS / GMS Minutes	Risalah RUPS RKAP Tahun 2019 diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 7 Januari 2019 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. / 2019 RKAP GMS Minutes was stipulated in Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 11 dated January 7, 2019 regarding Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding the Company Work Plan and Budget and the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program.

2020 Extraordinary GMS Convention

In 2020, the Company only convened Annual GMS and did not convene any Extraordinary GMS.

GMS Convention 1 (One) Year Prior

In 2019, the Company only held Annual GMS which consisted of 2019 RKAP GMS on January 7, 2020 and GMS for Validation of Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2018 Fiscal Year on April 29, 2020. The Company did not convene any Extraordinary GMS in 2019.

2019 RKAP GMS Convention

Stages of 2019 RKAP GMS Convention

Stages of 2019 RKAP GMS Convention are illustrated in the following table.

Stages of 2019 RKAP GMS Convention

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS RKAP Tahun 2019

RUPS RKAP Tahun 2019 dihadiri oleh Pemegang Saham IPC, Dewan Komisaris dan Direksi IPC, dengan uraian sebagai berikut:

2019 RKAP GMS Attendance Recapitulation

2019 RKAP GMS was attended by IPC Shareholder, Board of Commissioners, and Board of Directors with details as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS RKAP Tahun 2019

2019 RKAP GMS Attendance Recapitulation

Pemegang Saham IPC / IPC Shareholder	<p>1. Edwin Hidayat (Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN) sebagai Kuasa dengan Hak Substitusi dari Pemegang Saham Perseroan. / Edwin Hidayat (Deputy of Energy, Logistics, District, and Tourism Sector of the Ministry of SOEs) as the Authorized Representative with Substitution Rights of the Company's Shareholder.</p> <p>2. Raden Roro Dewi Ariyani (Asisten Deputi Kementerian BUMN) / Raden Roro Dewi Ariyani (Assistant Deputy of the Ministry of SOEs)</p>
Dewan Komisaris IPC / IPC Board of Commissioners	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpak H. Panggabean (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) 2. Djadmiko (Komisaris / Commissioner) 3. Montty Girianna (Komisaris merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko / Commissioner and Head of Risk Monitoring Committee) 4. Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) 5. Raden Agus Haryoto Purnomo (Komisaris / Commissioner) 6. Kushari Suprianto (Komisaris merangkap Ketua Komite Audit / Commissioner and Head of Audit Committee) 7. Djaman Andhi Nirwanto (Komisaris merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Commissioner and Head of Nomination and Remuneration Committee) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>
Direksi IPC / IPC Board of Directors	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elvyn Gani Masassya (Direktur Utama / President Director) 2. Saptono Rahayu Irianto (Direktur Komersial / Commercial Director) 3. Widyaka Nusapati (Direktur Keuangan / Finance Director) 4. Dani Rusli Utama (Direktur Teknik / Technical Director) 5. Prasetyadi (Direktur Operasi / Operations Director) 6. Rizal Ariansyah (Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2019

RUPS RKAP Tahun 2019 telah dihadiri dan diwakili oleh sebanyak 1.444.029 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 yang 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS RKAP Tahun 2019 telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Rapat ini bersifat sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

2019 RKAP GMS Attendance Quorum and Resolutions

2019 RKAP GMS was attended and represented by 1 (one) share of Series A and 1,444,028 shares of Series B or totaling Rp1,444,029,000,000.00, 100 percent of which are owned by the Republic of Indonesia, issued and fully paid in the Company. The attendance quorum of 2020 RKAP GMS was fulfilled as required in Article 25 Paragraph (1) Letter a and Paragraph (6) of the Company's Articles of Association. Therefore, the Meeting was valid and capable of making binding decisions.



Keputusan RUPS RKAP Tahun 2019

2019 RKAP GMS Resolutions

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA

Agenda

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019. / Validation of the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Corporate Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget in 2019.

Hasil Keputusan / Resolution

Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: / Approved/validated the Company's 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Corporate Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the following main points:

1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian / Consolidated Statements of Profit or Loss

Uraian / Description	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah) / Total (in Thousands of Rupiah)
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	13.503.396.813
Laba Setelah Pajak / Income After Tax	2.610.493.265

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidated Statements of Financial Position

Uraian / Description	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah) / Total (in Thousands of Rupiah)
Total Aset / Total Assets	54.165.045.021
Liabilitas / Liabilities	36.675.255.631
Ekuitas / Equity	17.489.789.390

3. Investasi / Investment

- Rencana Investasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut: / Investment plan of 2019 (two thousand and nineteen) as follows:

Uraian / Description	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah) / Total (in Thousands of Rupiah)
Investasi Perusahaan Induk / Parent Company Investment	4.851.410.099
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiaries Investment	2.191.636.600
Penyertaan Modal Perusahaan Induk / Parent Company Capital Investment	4.942.691.130
Total Investasi / Total Investment	11.985.738.729

- Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. / Investment expenditure is based on priority, according to standard operating procedures, transparency and accountability of price fairness.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10 (sepuluh) persen dari nilai masing-masing program/item investasi, sepanjang tidak mengubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi. / Delegate authority to Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes in the investment budget allocation with a maximum value of 10 (ten) percent of the value of each investment program/item, as long as it does not change the investment program/item and does not exceed total investment value.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Partnership and Community Development Program

Uraian / Description	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah) / Total (in Thousands of Rupiah)	
	Kemitraan / Partnership	Bina Lingkungan / Community Development
Dana Tersedia / Available Funds	68.699.858	27.844.689
Penggunaan Dana / Funds Usage	68.699.858	27.844.689
Sisa Dana / Remaining Funds	-	-

- Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp68.699.858.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang bersumber dari saldo dana Program Kemitraan, penerimaan dari angsuran pinjaman serta penerimaan jasa administrasi dan bunga. / Partnership program distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp.68,699,858,000 (sixty eight billion six hundred ninety nine million eight hundred fifty eight thousand Rupiah) sourced from the Partnership Program fund balance receipts from loan installments as well as receiving administrative services and interest.
- Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp27.844.689.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah), atau diperhitungkan setara/ekuivalen 1,15 (satu koma satu lima) persen dari proyeksi laba tahun 2018 (dua ribu delapan belas). / The Community Development program distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp27,844,689,000.00 (twenty seven billion eight hundred forty four million six hundred eighty nine thousand Rupiah) originating from the additional allocation of Community Development funds originating from allowance for company profit in the amount of Rp27,844,689,000.00 (twenty seven billion eight hundred forty four million six hundred eighty nine thousand Rupiah), or equivalent to 1.15 (one point one five) percent of the 2018 (two thousand eighteen) profit projection.

Status

Terealisasi. / Realized

MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA

Agenda	Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019. / Determination of Board of Directors and Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2019.
Hasil Keputusan / Resolution	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Established Key Performance Indicators in 2019 (two thousand and nineteen) contained in the Management Contract signed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.
Status	Terealisasi. / Realized

MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA

Agenda	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019. / Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of Company's Soundness Level in 2019.																		
Hasil Keputusan / Resolution	Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut: / Determined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Operational Aspect Indicators for calculating the Soundness Level for 2019 (two thousand and nineteen), as follows:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator / Indicator</th> <th>Bobot / Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>Waiting Time for Pilot</i> (Jam)</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas (%) / Container Berthing Effectiveness (%)</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/S/H) / Container Stevedoring Productivity (B/S/H)</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>Yard Occupancy Ratio</i> Peti Kemas (%) / Container Yard Occupancy Ratio (%)</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Bobot</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indikator / Indicator	Bobot / Value	1.	<i>Waiting Time for Pilot</i> (Jam)	9%	2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas (%) / Container Berthing Effectiveness (%)	9%	3.	Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/S/H) / Container Stevedoring Productivity (B/S/H)	8%	4.	<i>Yard Occupancy Ratio</i> Peti Kemas (%) / Container Yard Occupancy Ratio (%)	9%	Jumlah Bobot		35%
No.	Indikator / Indicator	Bobot / Value																	
1.	<i>Waiting Time for Pilot</i> (Jam)	9%																	
2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas (%) / Container Berthing Effectiveness (%)	9%																	
3.	Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/S/H) / Container Stevedoring Productivity (B/S/H)	8%																	
4.	<i>Yard Occupancy Ratio</i> Peti Kemas (%) / Container Yard Occupancy Ratio (%)	9%																	
Jumlah Bobot		35%																	
Status	Terealisasi. / Realized																		

Arahan RUPS RKAP Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2019 RKAP GMS Directives and Follow-Up

In implementing the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) of 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors shall pay attention to the following matters:

Arahan RUPS RKAP Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya

2019 RKAP GMS Directives and Follow-Up

No.	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Directive	Tindak Lanjut / Follow-Up
1.	RKAP Tahun 2019 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2019. / The 2019 RKAP has been validated with specific targets per month cascading to all levels of the Company. Board of Commissioners must report the results of cascading to Shareholders in the first quarter of 2019.	Telah direalisasikan. / Realized.
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan Perseroan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen Perseroan. / The income increase and cost reduction programs in all business lines to realize a more effective and efficient corporate management, and net income to reach at least the minimum target must be achieved by all levels of company management.	Telah direalisasikan. / Realized.
3.	Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i> , serta pemanfaatan dan pengembangan TI. / Following up on the cooperation and synergy that has been announced with Port SOEs and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HC development, joint procurement, and IT utilization and development.	Telah direalisasikan. / Realized.
4.	Senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja Perseroan secara konsolidasi. / Always provide guidance and supervision of the performance of subsidiaries and joint ventures, especially those that contribute significantly to the Company's performance on a consolidated basis.	Telah direalisasikan. / Realized.
5.	Mempersiapkan langkah-langkah pembentukan <i>holding maritime</i> dan melaksanakan tahapan pembentukan Pelindo Incorporated, dimulai dengan mengimplementasikan kesepakatan program <i>quick win</i> pada bulan April 2019. / Preparing steps for establishing a maritime holding and carrying out the stages of forming Pelindo Incorporated, starting with implementing a quick win program agreement in April 2019.	Telah direalisasikan. / Realized.
6.	Memastikan program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier, dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target Perseroan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i> . / Ensuring that HC management and development programs are carried out comprehensively by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of HC development policies, career path and talent management to support the achievement of company targets both in the short and long term to be improved, as well as an evaluation of HC policies to always be in accordance with best practice.	Telah direalisasikan. / Realized.



No.	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Directive	Tindak Lanjut / Follow-Up
7.	<p>Terkait PKBL diminta untuk: / Regarding PKBL, requested to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merealisasikan penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar dana tersedia. / Managing the distribution of Partnership and Community Development Program in the amount of available funds. Mengupayakan pengembalian piutang mitra binaan secara optimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait (baik internal maupun eksternal). / Seek to return receivables of fostered partners optimally by involving relevant parties (both internal and external). Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP Pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN dimaksud. / With the issuance of Minister of SOEs Regulation Number PER-02/MBU/07/2017 concerning the Second Amendment to Minister of SOEs Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 concerning SOE PKBL, Board of Directors are asked to set SOPs for the Implementation of PKBL that have been adjusted to Minister of SOEs regulation as referred to. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu secara elektronik sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo PER-02/MBU/07/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang PKBL BUMN dan PER-18/MBU/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penyampaian Data, Laporan dan Dokumen BUMN secara Elektronik melalui Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id). / Submit periodic reports in a timely manner electronically as stipulated in RI Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Disbanding of SOEs, Minister of SOEs Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo PER-02/MBU/07/2018 dated July 05, 2018 against SOE PKBL and PER-18/MBU/2014 dated October 16, 2014 concerning the submission of SOE Data, Reports and Documents Electronically through PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id). 	Telah direalisasikan. / Realized.
8.	<p>Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Investasi tersebut juga memperhitungkan pelaksanaan sinergi dengan BUMN, khususnya PT Pertamina (Persero). / Investment expenditures should be carried out based on priority scale, according to standard operating procedures, transparent and can be accounted for with reasonable price. The investment also takes into account the implementation of synergies with SOEs, especially PT Pertamina (Persero).</p>	Telah direalisasikan. / Realized.
9.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern Perseroan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2018 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaiannya pada tahun 2019. / Board of Directors must pay attention to the findings and recommendations of BPK, independent auditors and the Company's Internal Audit Unit that have not been resolved until 2018 and make this a target for completion in 2019.</p>	Telah direalisasikan. / Realized.
10.	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. / The RKAP, RKA, PKBL, Board of Commissioners RKA and Board of Directors and Board of Commissioners KPI (Key Performance Indicator) for 2019 that have been approved and validated by the General Meeting of Shareholders (GMS), and form an integral part of the GMS Resolution Minutes, are a guideline for Board of Directors to implement the work programs and performance targets in 2019 as well as a guideline for Board of Commissioners to monitor and supervise.</p>	Telah direalisasikan. / Realized.

Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

Stages of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

Tahapan penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 tergambar dalam tabel berikut ini:

Stages of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report are described in the following table:

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

Stages of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

Undangan RUPS / GMS Invitation	Nomor Undangan KU.04.02/15/4/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 15 April 2019 perihal Undangan RUPS Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018. / Invitation No. KU.04.02/15/4/1/TUD/UT/PI.II-19 dated April 15, 2019 regarding Invitation to Annual GMS of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2018 Fiscal Year.
Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pukul 11.00 sampai dengan 12.00 WIB di Kantor Kementerian BUMN RI Lt. 7 / Held on Monday April 29, 2019 at 11.00-12.00 WIB in the 7th Floor Meeting Room, Ministry of SOEs Office.
Risalah RUPS / GMS Minutes	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. / The GMS results were recorded in PT Pelabuhan Indonesia II 2018 Annual Report Endorsement GMS Minutes of Meeting number 13 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi IPC, dengan uraian sebagai berikut:

Attendance Recapitulation at GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report was attended by IPC Shareholder, Board of Commissioners, and Board of Directors with details as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Peserta pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

Attendance Recapitulation at GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

Dewan Komisaris IPC / IPC Board of Commissioners	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpak H. Panggabean (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) 2. Djadmiko (Komisaris / Commissioner) 3. Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) 4. Raden Agus Haryoto Purnomo (Komisaris / Commissioner) 5. Djaman Andhi Nirwanto (Komisaris merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Commissioner and Chair of Nomination and Remuneration Committee) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montty Girianna (Komisaris merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko), karena mendapat tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Montty Girianna (Commissioner and Head of Risk Monitoring Committee), due to assignment from the Coordinating Ministry for Economic Affairs 2. Kushari Suprianto (Komisaris merangkap Ketua Komite Audit), karena mendapat tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Kushari Suprianto (Commissioner and Head of Audit Committee), due to assignment from the Coordinating Ministry for Economic Affairs
Direksi IPC / IPC Board of Directors	<p>Hadir / Present:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elvyn Gani Masassya (Direktur Utama / President Director) 2. Arief Suhartono (Direktur Komersial / Commercial Director) 3. Widyaka Nusapati (Direktur Keuangan / Finance Director) 4. Dani Rusli Utama (Direktur Teknik / Technical Director) 5. Prasetyadi (Direktur Operasi / Operations Director) 6. Rizal Ariansyah (Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director) 7. Ogi Rulino (Direktur Transformasi Dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director) <p>Berhalangan Hadir dan Alasannya / Absent and the Reason: Nihil / None</p>

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 telah dihadiri dan diwakili oleh sebanyak 1.444.029 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000,00 yang 100 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Rapat ini bersifat sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Attendance Quorum and Resolutions of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report was attended and represented by 1 (one) share of Series A and 1,444,028 shares of Series B or totaling Rp1,444,029,000,000.00, 100 percent of which are owned by the Republic of Indonesia, issued and fully paid in the Company. The attendance quorum of 2020 RKAP GMS was fulfilled as required in Article 25 Paragraph (1) Letter a and Paragraph (6) of the Company's Articles of Association. Therefore, the Meeting was valid and capable of making binding decisions.



Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

Resolutions of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report

MATA ACARA RAPAT PERTAMA / FIRST MEETING AGENDA

Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisari dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2018. / Approval of the Company's Annual Report for the 2018 fiscal year including the Supervisory Duty Report of Board of Commissioners and Validation of Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2018.

Hasil Keputusan / Resolution

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisari untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sunkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana Laporan Auditor Independen No. 00029/2.1032/JL.0/06/0240-2/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019. / Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report carried out by Board of Commissioners for fiscal year ending 31-12-2018, and validated the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year ended on 31-12-2018, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sunkoro & Surja with unqualified opinion in Independent Auditor's Report Number 00029/2.1032/JL.0/06/0240-2/1/III/2019 dated 15-03-2019.
 - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidated Statements of Financial Position

Uraian / Description	Jumlah per 31 Desember 2018 (dalam Jutaan Rupiah) / Total per December 31, 2018 (in Millions of rupiah)
Aset / Assets	
Aset Lancar / Current Assets	24.554.336
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	26.878.541
Total Aset / Total Assets	51.432.877
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity	
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	5.498.194
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	29.500.226
Ekuitas / Equity	16.434.457
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	51.432.877

- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi / Consolidated Statements of Financial Position

Uraian / Description	Jumlah per 31 Desember 2018 (dalam Jutaan Rupiah) / Total per December 31, 2018 (in Millions of rupiah)
Pendapatan Operasi / Operating Revenues	11.436.701
Beban Operasi / Operating Expenses	8.042.555
Pendapatan Non Usaha (Net) / Non-Operating Revenues (Net)	(196.361)
Laba (Rugi) Usaha / Operating Income (Loss)	3.197.785
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Income (Loss) Before Tax	2.775.005
Laba (Rugi) Bersih / Net Income (Loss)	2.430.709
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas / Income Attributable to Owner of Entity	2.379.262
Laba yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali / Income Attributable to Non-Controlling Interests	51.448

- Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen. / Validated the Partnership Program and Community Development Program Financial Report for the fiscal year 2018 (two thousand and eighteen) ending on December 31, 2018 (thirty-first of December two thousand and eighteen) audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with the Independent Auditor's Report.
 - Laporan Posisi Keuangan PKBL / PKBL Statements of Financial Position

Uraian / Description	Tahun 2018 (dalam Ribuan Rupiah) / 2018 (in Thousands of Rupiah)
Aset / Assets	
Aset Lancar / Current Assets	63.296.779
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	14.119.646
Total Aset / Total Assets	77.416.425
Liabilitas dan Aset Neto / Liabilities and Net Assets	
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	6.639.931
Aset Bersih / Net Assets	70.776.493
Total Liabilitas dan Aset Neto / Total Liabilities and Net Assets	77.416.425



- Laporan Aktivitas PKBL / PKBL Activity Report.

Uraian / Description	Tahun 2018 (dalam Ribuan Rupiah) / 2018 (in Thousands of Rupiah)
Alokasi Dana dari BUMN Pembina / Fund Allocation from Supervisor of SOEs	
Pendapatan / Revenues	11.697.196
Penyaluran, Beban & Pengeluaran / Disbursement, Expenses & Expenditure	24.774.650
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih / Increase (Decrease) in Net Assets	(13.047.454)
Aset Bersih Awal Tahun / Net Assets at Beginning of Year	83.823.947
Aset Bersih Akhir Tahun / Net Assets at End of Year	70.776.493

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. / With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report carried out by Board of Commissioners and the validation of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year to December 31, 2018 and the Program Partnership and Community Development Financial Statements for the fiscal year on December 31, 2018, the GMS provided full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervision actions carried out during the fiscal year to December 31, 2018, insofar as such actions were not criminal actions and were reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for the fiscal year to December 31, 2018.

Status Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KEDUA / SECOND MEETING AGENDA

Agenda Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) / Determination of the Net Profit Use for the 2018 (two thousand and eighteen) Fiscal Year.

Hasil Keputusan / Resolution Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp2.379.261.695.356,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah) sebagai berikut: / Determined the consolidated net profit of 2018 (two thousand and eighteen) in the amount of Rp2,379,261,695,356 (two trillion three hundred seventy nine billion two hundred sixty one million six hundred ninety five thousand three hundred fifty six Rupiah) as described below:

1. Sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari laba bersih atau sebesar Rp832.742.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah) ditetapkan sebagai dividen. / 35 (thirty five) percent of net profit or Rp832,742,000,000 (eight hundred thirty two billion seven hundred forty two million Rupiah) was to be distributed as dividends.
2. Sebesar 65 (enam puluh lima) persen dari laba bersih atau sebesar Rp1.546.519.695.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan. / 65 (sixty five) percent of net profit or Rp1,546,519,695,000 (one trillion five hundred forty six billion five hundred nineteen million six hundred ninety five thousand Rupiah) was to be posted as reserves.

Status Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KETIGA / THIRD MEETING AGENDA

Agenda Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). / Determination of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2019 (two thousand and nineteen) Fiscal Year and the Partnership and Community Development Program Financial Report for 2019 (two thousand and nineteen).

Hasil Keputusan / Resolution

1. Menetapkan kembali KAP Purwantono Sungkoro dan Surja sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). / Reassigned the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja as auditors to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2019 (two thousand and nineteen).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. / Delegated authority to Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other appointment requirements that are reasonable for the KAP

Status Terealisasi. / Realized.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT / FOURTH MEETING AGENDA

Agenda Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). / Determination of the 2018 (two thousand and eighteen) Fiscal Year Tantiem, Salary, Honorarium and Benefits and Other Facilities for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen).

Hasil Keputusan / Resolution Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium, dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri. / Tantiem for fiscal year 2018 (two thousand and eighteen), and the Salary, Honorarium, allowances and other facilities for members of the Boards of Directors and Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen) was determined in a separate decision.

Status Terealisasi. / Realized.



Arahan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

Direksi dan seluruh jajaran Perseroan diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Directives of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report and the Follow-Up

The Board of Directors and all personnel of the company shall pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

Directives of GMS for Validation of 2018 Fiscal Year Annual Report and the Follow-Up

No.	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Directive	Tindak Lanjut / Follow-Up
1.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor eksternal (SPI) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. / Board of Directors was asked to follow up on the findings, suggestions from external auditors, namely BPK RI and/or KAP or auditor external (SPI) for 2018 (two thousand and eighteen) and previous years, and resolve them thoroughly in order to avoid the re-occurrence of the same auditor's findings in the future and discuss comprehensively with Board of Commissioners. Follow up on the resolution of findings/suggestions of external auditors to be reported in writing to the Shareholders.	Telah direalisasikan. / Realized.
2.	Direksi harus terus berupaya melakukan <i>cost effectiveness</i> serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan Perseroan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). / Board of Directors must strive to implement cost effectiveness and optimize corporate management performance to realize a more effective and efficient corporate management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Telah direalisasikan. / Realized.
3.	Direksi diminta untuk meningkatkan <i>monitoring</i> , pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Kantor Cabang dan Anak Perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada Induk Perusahaan dan tidak ada lagi cabang/anak perusahaan yang merugi, serta menjamin keselarasan strategi Induk dan Anak Perusahaan anata lain dengan melakukan <i>review</i> bisnis Anak dan Afiliasi Perusahaan yang berisikan. / Board of Directors was asked to improve monitoring and guidance for the branch offices and subsidiaries performance so that they can increase revenue contributions to the parent company and there are no more loss experienced by branches/subsidiaries, and guarantee the alignment of the parent and subsidiary strategies, among others by conducting business reviews of related subsidiary and affiliated companies.	Telah direalisasikan. / Realized.
4.	Mengingat relisasi penyerapan investasi relatif rendah, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan perencanaan investasi lebih realistis untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha. / Considering the relatively low investment absorption, Board of Directors with the supervision of Board of Commissioners was asked to make more realistic investment planning to support increased productivity and business development.	Telah direalisasikan. / Realized.
5.	Direksi agar melakukan inventarisasi aset dan IP4T (Inventarisasi Pemilikan, Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah) untuk mengantisipasi permasalahan aset yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari sekaligus untuk optimalisasi aset. / Board of Directors should conduct an inventory of assets and IP4T (Inventory of Ownership, Utilization, Use and Control of Land) to anticipate asset problems that are likely to arise in the future as well as to optimize assets.	Telah direalisasikan. / Realized.
6.	Setoran dividen agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. / Dividend payments must be carried out in accordance with Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.02/017 concerning Procedures for Paying Non-Tax State Revenues from Separated State Assets Management Results.	Telah direalisasikan. / Realized.
7.	Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk menindaklanjuti arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor RIS-39/D7.MBU.3.4.2019 tanggal 8 April 2019. / Regarding PKBL activities, Board of Directors is requested to follow up on directives as the Minutes of PKBL Annual Report Discussion Meeting 2018 (two thousand and eighteen) Number RIS-39/D7.MBU.3.4.2019 dated April 8, 2019.	Telah direalisasikan. / Realized.
8.	Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional yang menjadi tanggung jawab Perseroan. / Board of Directors with Supervision of Board of Commissioners are required to optimize the completion of construction of the National Strategic Projects which are responsibility of the Company.	Telah direalisasikan. / Realized.
9.	Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus untuk meningkatkan <i>compliance</i> /pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data pada Portal Aset, Portal Sistem Laporan Berkala (Silaba), Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen. / Board of Directors with supervision of Board of Commissioners was asked to continue to improve compliance/fulfillment of the asset portal data filling and updating, including the Periodic Report System (Silaba) portal, HC portal, PKBL portal, and Public portal. In connection with improving the quality of supervision and guidance of the Company, we request that data updates, accuracy and completeness of filling out the portals be the main concern of Board of Commissioners, Board of Directors and Management.	Telah direalisasikan. / Realized.
10.	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS. / Board of Directors must pay attention to and follow up on the advice and recommendations of Board of Commissioners presented at this GMS.	Telah direalisasikan. / Realized.
11.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini. / The Financial Statements, PKBL Implementation Report, Performance Evaluation Report, Legislation and Internal Control Compliance Report, Key Performance Indicators (KPI) Assessment Report that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) and Board of Commissioners' responses are an integral part of the minutes this meeting.	Telah direalisasikan. / Realized.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai IPC maupun usaha IPC, serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IPC, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah Perseroan melalui pengelolaan bisnis yang didasarkan pada 6 (enam) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan, dan Terpercaya, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/2/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Board Manual berisi pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta proses hubungan fungsi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan antara kedua Organ Perseroan tersebut, agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif, dan efisien. Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
6. Kewajiban Dewan Komisaris;
7. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
8. Hak Dewan Komisaris;
9. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS

Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners is a Company organ that is responsible for supervising management policies, general implementation of management, concerning both IPC and IPC's business, and advising the Board of Directors for IPC's interests in accordance with the Company's purpose and objectives.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As part of the Company's commitment in implementing GCG consistently to maintain business continuity and add value to the Company through business management based on 6 (six) GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality, and Trusted, the Board of Commissioners and Board of Directors established the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/2/KPP/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020.

The Board Manual is a guideline that provides general explanation on the work procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the functional relation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and between both organs in order to create good, professional, transparent, effective, and efficient governance. The contents of the Board Manual of the Board of Commissioners are specifically explained in Chapter III, which covers:

1. Board of Commissioners Function;
2. Board of Commissioners Membership;
3. Introduction and Capability Improvement Programs;
4. Board of Commissioners Ethics;
5. Board of Commissioners Duties and Authority;
6. Board of Commissioners Obligations;
7. Board of Commissioners Responsibility;
8. Board of Commissioners Rights;
9. Board of Commissioners Decision-Making Principles;
10. Board of Commissioners Supporting Organs;
11. Board of Commissioners Performance Evaluation;
12. Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria.



KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris mencakup persyaratan umum yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Organ yang dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- Dinyatakan pailit;
- Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan IPC atau Perum dinyatakan pailit; atau
- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Persyaratan Lainnya

- Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
- Masa jabatan berakhir;
- Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemegang Saham. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP

Board of Commissioners Member Requirements

The requirements to become a member of Board of Commissioners include general requirements which are the basic requirements determined by the Articles of Association and other requirements which are requirements that are adjusted to the needs and nature of the Company's business, as follows:

1. General Requirements

Those who can be appointed to Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:

- Have been declared bankrupt;
- Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners or a member of a Supervisory Board that was found guilty of causing IPC or a Public Company to be declared bankrupt; or
- Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector.

2. Other Requirements

- In addition to meeting the general requirements, members of the Board of Commissioners are appointed by taking account of the provisions of applicable laws and regulations.

Board of Commissioners Term of Office

The term of office for members of Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on GMS decision by stating the reason. Members of the Board of Commissioners may end service if:

- Deceased;
- Term of office ends;
- Dismissed by GMS; and/or
- No longer meeting the requirements of Board of Commissioners members based on the Articles of Association and other laws and regulations.

Board of Commissioners Dismissal

Members of the Board of Commissioners can be dismissed based on GMS decision at any time by stating the reasons, notifying the plan of dismissal to the member of the Board of Commissioners concerned, both verbally and in writing on behalf of the Shareholder. Dismissal of Board of Commissioners members is carried out based on the following conditions of the member concerned:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Pemberhentian sesuai dengan alasan pada Nomor 3 dan 5 di atas dikategorikan sebagai pemberhentian tidak hormat, kecuali karena alasan sebagaimana disebutkan dalam Nomor 5, 6, dan 7 di atas, keputusan pemberhentian baru diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, dengan mekanisme:

1. Pada saat forum RUPS, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan dalam forum RUPS; atau
2. Secara tertulis, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan di luar forum RUPS, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
3. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang

1. Unable to carry out their duties properly;
2. Not implementing the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
3. Engaging in actions that harm the Company and/or the State.
4. Conducting actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a SOE Board of Commissioners Member;
5. Have been declared guilty by a court ruling that has a permanent legal force;
6. Has resigned;
7. Has family relations up to the third degree, both according to straight lines and side lines, including relationships arising marriages between Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners;
8. Based on other reasons that are appropriately valued by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Dismissal based on reasons stated in Number 3 and 5 above constitutes dishonorable termination, unless according to reasons stated in Number 5, 6, and 7 above, the decision for termination is made only after the member concerned is given the opportunity to defend themselves with the following mechanism:

1. During GMS forum, if the plan of termination is carried out during GMS forum; or
2. In writing, if the plan of termination is carried out outside GMS forum, within 14 (fourteen) days since the date of notification.
3. While the plan of termination is being processed, the Board of Commissioners member concerned is obliged to carry out their duties as usual.

Board of Commissioners Resignation

Members of the Board of Commissioners have the right to resign with the following requirements:

1. Notify in writing about their intention to the Shareholders with copies to other Members of Board of Commissioners and Board of Directors at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation. If the effective date stated in the resignation letter is less than 30 (thirty) days after the date of letter receipt, it is deemed that the effective date of resignation has not been stated.
2. At the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of application is received (in the case of not mentioning the effective date of resignation), then the Board of Commissioners member concerned automatically resigns on the date requested or after



diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengisian Jabatan Lowong Anggota Dewan Komisaris

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;
2. Dalam hal lowong jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
3. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris tersebut, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

Kedadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;
2. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris, dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

30 (thirty) days since the date the resignation letter is received, without requiring GMS approval.

3. Resignation of Board of Commissioners member may occur in less than 30 (thirty) days if laws and regulations prohibit the member concerned to hold concurrent positions.
4. If a Board of Commissioners member does not resign while laws and regulations prohibit the member concerned to hold concurrent positions, then the Board of Commissioners member concerned is deemed to have resigned and the GMS only determines or validates the resignation based on laws and regulations.

Fulfillment of Vacant Position in the Board of Commissioners

If there is vacancy in the Board of Commissioners' membership due to any reason:

1. Within 30 (thirty) days since the vacancy occurs, GMS shall be held to fill the vacant position;
2. If the vacancy was due to the end of Board of Commissioners member's term of office, then the Board of Commissioners member concerned may be appointed by the GMS to temporarily perform their usual duties as a Board of Commissioners member with the same duties, authority, and obligations, and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;
3. The acting member of the Board of Commissioners concerned is given honorarium and allowances/facilities as a Board of Commissioners member, except Post-Employment Allowance.

Complete Vacancy of Board of Commissioners

If the Company does not have any member in the Board of Commissioners due to any reasons:

1. Within 30 (thirty) days since the vacancy occurs, GMS shall be held to fill the vacancy;
2. During vacancy of the Board of Commissioners due to the end of term of office, the GMS shall appoint other parties to temporarily perform the duties of the Board of Commissioners, and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;

3. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama, dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

Kepada pelaksana tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dan 3 di atas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

Komposisi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih. Jika Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan RUPS dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sepanjang tahun 2020, komposisi anggota Dewan Komisaris IPC mengalami perubahan, dengan uraian sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 2 Maret 2020

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bapak Tumpak H. Panggabean mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan karena diangkat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan beliau sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan resmi berakhir berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Komisaris Utama, pada tanggal 2 Januari 2020, Dewan Komisaris Perseroan menggelar rapat internal yang menyepakati penunjukan Bapak Djadmiko untuk melaksanakan fungsi Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditunjuknya Komisaris Utama definitif oleh RUPS berdasarkan Surat Keputusan

3. If the vacancy was due to the end of Board of Commissioners member's term of office, then the Board of Commissioners member concerned may be appointed by the GMS to temporarily perform their usual duties as a Board of Commissioners member with the same duties, authority, and obligations, and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;

The acting members of the Board of Commissioners concerned as referred to in Number 2 and 3 above are given honorarium and allowances/facilities as Board of Commissioners members, except Post-Employment Allowance.

Board of Commissioners Composition in 2020

The Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more. If the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, then one member shall be appointed as the President Commissioner. The appointment of Board of Commissioners members does not coincide with the appointment of Board of Directors members. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares.

In 2020, the member composition of IPC Board of Commissioners changed with the following description:

January 1 – March 2, 2020 Period

On December 20, 2019, Mr. Tumpak H. Panggabean submitted letter of resignation from his position as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company due to his appointment as the Supervisory Board of Corruption Eradication Committee (KPK). His service as President Commissioner and Independent Commissioner officially ended based on a Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-79/MBU/6/2015 dated March 2, 2020 regarding Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

To fill the vacant President Commissioner position, on January 2, 2020 the Company's Board of Commissioners held internal meeting which agreed upon the appointment of Mr. Djadmiko to perform the function of the Company's President Commissioner until the appointment of a definitive President Commissioner based on Decree of the Board of



Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.III-2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Fungsi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 1 Januari hingga 2 Maret 2020 berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris yang merangkap sebagai Komisaris Utama Sementara, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 4 (empat) orang Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:

Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.III-2020 dated January 2, 2020 regarding the Appointment of Member of the Board of Commissioners to Perform the Function of President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Therefore, the member composition of the Board of Commissioners during January 1 until March 2, 2020 period consisted of 6 (six) people, comprising 1 (one) Commissioner and Interim President Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner, and 4 (four) Commissioners with description as follows:

Komposisi Anggota Dewan Komisaris IPC Periode 1 Januari – 2 Maret 2020

IPC Board of Commissioners Member Composition January 1 – March 2, 2020 Period

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Djadmiko	Komisaris merangkap Komisaris Utama Sementara / Commissioner and Interim President Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – December 14, 2020 (First Period)
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 2, 2022 (First Period)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 concerning Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period)

Periode 2 Maret – 14 Desember 2020

Pada tanggal 2 Maret 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan mengangkat Bapak Moermahadi Soerja Djanegara sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 2 Maret hingga 14 Desember 2020 berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama yang merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:

Komposisi Anggota Dewan Komisaris IPC Periode 2 Maret – 14 Desember 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and the Appointment of Commissioners Independent of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)

March 2 – December 14, 2020 Period

On March 2, 2020, the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder of the Company appointed Mr. Moermahadi Soerja Djanegara as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company based on a Copy of the Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 regarding Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Therefore, the member composition of the Board of Commissioners during March 2 until December 14, 2020 period consisted of 7 (seven) people, comprising 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner, and 5 (five) Commissioners with description as follows:

IPC Board of Commissioners Member Composition March 2 – December 14, 2020 Period



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 2, 2022 (First Period)
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 concerning Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period)
7.	Djadmiko	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – December 14, 2020 (First Period)

Periode 14 – 31 Desember 2020

Pada tanggal 14 Desember 2020, jabatan Bapak Djadmiko sebagai Komisaris Perseroan resmi berakhir. Oleh sebab itu, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan mengangkat Bapak Nurrachman sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan posisi Bapak Djadmiko selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris pada periode 14 hingga 31 Desember 2020 berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 4 (empat) orang Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:

December 14 – 31, 2020 Period

As of December 14, 2020, the service of Mr. Djadmiko as Commissioner of the Company officially ended. Therefore, the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder of the Company appointed Mr. Nurrachman as Independent Commissioner of the Company to replace Mr. Djadmiko as Commissioner of the Company based on a Copy of the Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 concerning Appointment and Dismissal of a Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Therefore, the member composition of the Board of Commissioners during December 14 – 31, 2020 period consisted of 7 (seven) people, comprising 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 4 (four) Commissioners with description as follows:

**Komposisi Anggota Dewan Komisaris IPC
Periode 14 – 31 Desember 2020**

**IPC Board of Commissioners Member Composition
December 14 – 31, 2020 Period**

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – July 13, 2022 (First Period)
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama) / October 4, 2017 – October 3, 2022 (First Period)
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 concerning Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama) / January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period)
7.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 (Periode Pertama) / December 14, 2020 – December 13, 2025



ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Etika Berkaitan dengan Keteladanan

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan seluruh Pekerja Perseroan.

Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Etika Berkaitan dengan Peluang Perseroan dan Keuntungan Pribadi

Selama menjabat, anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk:

1. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya, dan/atau pihak lain.
2. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan, atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
3. Berkompetisi dengan Perseroan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan selain kepentingan Perseroan.
4. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditentukan oleh RUPS.

Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;

ETHICS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Ethics as Role Model

The Board of Commissioners shall encourage ethical attitude and uphold the highest ethical standard at the Company, among others by being a good role model for the Board of Directors and all employees of the Company.

Ethics Related to Compliance with Laws and Regulations

The Board of Commissioners shall comply with the applicable laws and regulations, the Articles of Association, Code of Good Corporate Governance, as well as established policies of the Company.

Ethics Related to Transparency and Information Confidentiality

The Board of Commissioners shall disclose information according to the applicable laws and regulations and protect the Company's confidential information that they are trusted with according to the applicable laws and regulations and the Company's policies.

Ethics Related to the Company's Opportunity and Personal Gains

During service, members of the Board of Commissioners are prohibited from:

1. Taking the Company's business opportunity for personal interests, their family, business group, and/or other parties.
2. Using the Company's assets, the Company's information, or their position as member of the Board of Commissioners for personal interests or other people that are against the applicable laws and regulations and Company policies.
3. Competing with the Company, namely by using insider knowledge/information for gains other than the Company's interests.
4. Take personal gains from the Company's activities other than the salary and facilities they receive as a member of the Company's Board of Commissioners as stipulated by GMS.

Ethics Related to Conflict of Interests

The Board of Commissioners shall avoid conflict of interests at any time by:

1. Avoiding any activities that may affect their independence in performing duties;

2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, adalah pemberian insentif kepada Pekerja atau pihak lain yang telah ditetapkan Perseroan dalam rangka kepentingan Perseroan.

Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan

1. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris dimaksud meninggal dunia, maka ahli waris anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan Nomor 1 di atas.

2. Filling out Special List consisting of information of their share ownership and/or that of their family in other companies, including if they do not own any shares, periodically updating the information at end of year, and informing the Company of any data changes in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Not responding to request from any party for any reason, including direct request from certain parties that include but not limited to officials/employees of government institutions and political parties, related to donation request, including those related to goods and services procurement at the Company, insofar as those actions may influence decision-making;
4. Not using their position for personal interests or for other people or related parties that are against the Company's interests;
5. Disclosing any conflict of interests and the Board of Commissioners member concerned is not allowed to be involved in the Company's decision-making process related to the matter.

Ethics in Business and Anti-Corruption

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from giving or offering or receiving, both directly and indirectly, valuable/unlawful items to or from government officials, in order to influence or as a reward for their actions or any other actions, in accordance with the applicable laws and regulations.
2. Not included in the definition stated in Number 1 is the provision of incentives to employees or other parties as determined by the Company for the Company's interests.

Ethics After the End of Service

1. Returning all documents related to their former position to the Company within 30 (thirty) calendar days since the end of their service.
2. If a member of the Board of Commissioners is deceased, the heir of the Board of Commissioners member concerned shall return the documents as stated in Number 1 above.



3. Menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*).

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan, jalannya Pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen IPC, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan IPC;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IPC;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IPC;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar IPC;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IPC;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IPC, jika dianggap perlu;

3. Submitting State Officials Assets Report (LHKPN) within 3 (three) months since the end of their service as a State Official.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES, AUTHORITY, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners Duties, Authority, Obligations and Responsibilities are regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Duties

The Board of Commissioners has the duty to supervise the policies and management of the Company, general administration of the Company and the Company's business by Board of Directors, and to provide advice to Board of Directors, covering the Company's development plans, the Annual Work Plan and Budget, the implementation of the Articles of Association, GMS decisions, and the prevailing laws and regulations for the benefit of IPC and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Board of Commissioners Authorities

In conducting its supervisory duties, the Board of Commissioners is authorized to:

1. Inspect IPC's books, letters, and documents, examine cash for purposes of verification and others, examine IPC's securities and assets;
2. Enter IPC's yards, buildings, and offices;
3. Request an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to IPC's management;
4. Know about all policies and actions that have been and will be carried out by Board of Directors;
5. Request Board of Directors and/or other officials under Board of Directors with the knowledge of Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of Board of Directors in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association;
8. Establish Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by observing IPC's capabilities;
9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at IPC's expense, if deemed necessary;

10. Melakukan tindakan pengurusan IPC dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan IPC;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IPC;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP IPC dan RKAP IPC mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP IPC;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan IPC, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan IPC;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja IPC;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP IPC;
9. Membentuk Komite Audit. Keanggotaan komite tersebut, terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS yang disertai dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang akan diberikan untuk auditor eksternal;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada IPC mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada IPC dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dikeluarkan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

10. Carry out IPC's management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority to the extent that it is not contrary to law, regulation, the Articles of Association and/or the GMS decision.

Board of Commissioners Obligations

In relation to the implementation of their duties, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Advise Board of Directors in conducting the management of IPC;
2. Examine, review and sign the RJPP and RKAP stipulated by Board of Directors, in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's RJPP and RKAP regarding the reasons Board of Commissioners signed IPC's RJPP and RKAP;
4. Follow the development of IPC's activities, provide opinions and suggestions to the GMS on any issues deemed important to IPC's management;
5. Report immediately to the GMS in the event of any indications of declining performance in IPC;
6. Study and review periodic reports and annual reports prepared by Board of Directors and sign the annual reports;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS on the annual report, if requested;
8. Prepare an annual work program incorporated in IPC's RKAP;
9. Establish an Audit Committee, the membership of which to consist of one or more members of Board of Commissioners and is responsible to Board of Commissioners;
10. Propose a Public Accountant to the GMS accompanied by the reasons for nominations and the amount of honorarium/fee to be provided for the external auditor;
11. Take minutes of meetings of Board of Commissioners and keep copies thereof;
12. Report to IPC regarding their own and/or their families share ownership in IPC and other Companies;
13. Provide reports on supervisory duties issued during the past fiscal year to the GMS;



14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

14. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory tasks, as long as they are not contrary to statutory regulations, statutes, and/or decisions of the GMS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Responsibilities

In relation to the implementation of their duties, the Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. In performing its duties, Board of Commissioners is responsible to the GMS;
2. Board of Commissioners shall supervise the management policies, the general management of IPC and its business and provide advice to Board of Directors;
3. Each Commissioners shall act in good faith, be prudent and be responsible in carrying out their supervisory and advisory roles to Board of Directors;
4. Each Commissioner shall be personally liable for the losses IPC bears if they fail to carry out their duties as referred to in point 3 (three);
5. In the event that Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibilities referred to in number 4 (four) shall be borne jointly by each member of Board of Commissioners.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, maka perlu ditetapkan kembali pembagian tugas anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03/KEP-DK/PI.II/III-2020 tanggal 4 Maret 2020, dengan uraian sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To improve the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function, their duties are divided among members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The division of duties of the Board of Commissioners in 2020 was established based on Board of Commissioners Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/III-2020 dated March 4, 2020 with the following description:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris IPC per 4 Maret 2020

Division of Duties of IPC Board of Commissioners as of March 4, 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Job Description
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator umum dan GCG. / General and GCG coordinator.
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Bidang teknik, komersial, manajemen risiko, dan sebagai Ketua Pemantau Manajemen Risiko. / Engineering, commercial, risk management divisions, and Head of Risk Management Monitoring Committee.
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Bidang sosial, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemasayarakatan. / Social affairs, Partnership and Community Development Program (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), and community affairs.

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Job Description
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Bidang audit, keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit. / Audit and finance divisions and Head of Audit Committee.
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) remunerasi, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. / Human Capital, remuneration, legal, goods and services procurement divisions, and Head of Nomination and Remuneration Committee.
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis. / Transformation and business development division.
7.	Djadmiko	Komisaris / Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi. / Operations and information system division.

Pembagian tugas tersebut kemudian mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.III-2021 tanggal 6 Januari 2021, dengan uraian sebagai berikut:

This division of duties was amended based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 01/KEP-DK/PI.III-2021 dated January 6, 2021 with details as follows:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris IPC per 6 Januari 2021

Division of Duties of IPC Board of Commissioners as of January 6, 2021

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Job Description
1.	Moermahadi Soerjaja Djanegara	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator umum dan GCG dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. / General and GCG coordinator and Head of Nomination and Remuneration Committee.
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Bidang teknik, komersial, manajemen risiko, dan sebagai Ketua Pemantau Manajemen Risiko. / Engineering, commercial, risk management divisions, and Head of Risk Management Monitoring Committee.
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Bidang sosial, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan kemasayarakatan. / Social affairs, Partnership and Community Development Program (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), and community affairs.
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	Bidang audit, keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit. / Audit and finance divisions and Head of Audit Committee.
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) remunerasi, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi. / Human Capital, remuneration, legal, goods and services procurement divisions, and Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis. / Transformation and business development division.
7.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi. / Operations and information system division.

PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DEWAN KOMISARIS

Program Pengenalan Dewan Komisaris

IPC mewajibkan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pertama kali untuk mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham.

BOARD OF COMMISSIONERS ORIENTATION PROGRAM AND CAPABILITY IMPROVEMENT

Board of Commissioners Orientation Program

IPC requires new members of the Board of Commissioners to participate in the orientation program of the Company, since the background of members of the Board of Commissioners represents several Shareholders.



Tujuan program pengenalan adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah memberikan Program Pengenalan Dewan Komisaris kepada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris baru, yaitu:

1. Bapak Moermahadi Soerja Djanegara selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen IPC, yang diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 November 2020 melalui pertemuan tatap muka; dan
2. Bapak Nurrachman selaku Komisaris Independen IPC, yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 23 Desember 2020 melalui Daring.

Adapun materi yang diberikan pada program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

The objective of orientation program is to introduce the Board of Commissioners members so that they can establish cooperation as a solid, comprehensive, and effective team. The Corporate Secretary or any person acting as Corporate Secretary is responsible for organizing the orientation program.

In 2020, the Company organized Board of Commissioners Orientation Program for 2 (two) new Commissioners, namely:

1. Mr. Moermahadi Soerja Djanegara as IPC President Commissioner and Independent Commissioner, which was held from November 13-14, 2020 through direct meeting;
2. Mr. Nurrachman as IPC Independent Commissioner, which was held from December 21-23, 2020 online;

The materials provided at the Board of Commissioners Orientation Program include:

1. Implementation of GCG principles by IPC;
2. An overview of the Company in relation to its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information related to delegation of authority, internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee; and
4. Information about the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors and matters unlawful for them;

Board of Commissioners Capability Improvement Program

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Commissioners to update their knowledge on the latest developments in the Company's core business and applicable laws and regulations in order to improve the Board of Commissioners' effectiveness.

Realization of capability improvement program attended by the Board of Commissioners in 2020 is described in the following table:

Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris IPC Tahun 2020 **Capability Improvement Program of IPC Board of Commissioners in 2020**

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Nama Program Peningkatan Kapabilitas / Name of Capability Improvement Program	Penyelenggara / Organizer	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Venue
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / In Active Service as of December 31, 2020					
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	<i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	IPC	13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN / Training on Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs <i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs IPC	4 November 2020 secara Daring / November 4, 2020 online 13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
3.	Suaidi Marasabesy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	<i>Workshop "Great Business through Great People"</i> Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN / Training on Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs <i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dan Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (YPK BUMN) / Corporate Leadership Development Institute (CLDI) and SOEs Leadership Development Foundation (YPK BUMN) Kementerian BUMN / Ministry of SOEs IPC	5 Februari 2020 di Jakarta / February 5, 2020 in Jakarta 4 November 2020 secara Daring / November 4, 2020 online 13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	<i>Workshop "Great Business through Great People"</i> <i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dan Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (YPK BUMN) / Corporate Leadership Development Institute (CLDI) and SOEs Leadership Development Foundation (YPK BUMN) IPC	5 Februari 2020 di Jakarta / February 5, 2020 in Jakarta 13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	<i>Workshop "Great Business through Great People"</i> Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN / Training on Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs <i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dan Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (YPK BUMN) / Corporate Leadership Development Institute (CLDI) and SOEs Leadership Development Foundation (YPK BUMN) Kementerian BUMN / Ministry of SOEs IPC	5 Februari 2020 di Jakarta / February 5, 2020 in Jakarta 4 November 2020 secara Daring / November 4, 2020 online 13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	<i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	IPC	13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java
7.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	<i>Principles of Fraud Examination</i>	Lembaga Pengembangan Auditor Internal (LPAI) / Internal Auditor Development Institution (LPAI)	21 – 23 Desember 2020 secara Daring / December 21 – 23, 2020 online
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Not in Active Service as of December 31, 2020					
8.	Djadmiko	Komisaris / Commissioner	<i>Executive Training Commissioners and Directors</i>	IPC	13 – 14 November 2020 di Bogor, Jawa Barat / November 13 – 14, 2020 in Bogor, West Java



INFORMASI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat (26), anggota Dewan Komisaris Perseroan dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik, dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris IPC Tahun 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Term of Office	Informasi Rangkap Jabatan / Concurrent Positions	
				Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain / Position in Other Company/ Institution	Nama Perusahaan/ Instansi Lain / Name of Other Company/ Institution
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / In Active Service as of December 31, 2020					
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi manapun / No concurrent positions in any companies/institutions	
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 / March 1, 2016 – February 28, 2021	Deputi Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup / Deputy Coordinating Minister of Energy, Natural Resources, and Environmental Management	Kementerian Koordinator Perekonomian / Ministry for Economic Affairs
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 / March 1, 2016 – February 28, 2021	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi manapun / No concurrent positions in any companies/institutions	
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 / July 14, 2017 – July 13, 2022	Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai / Director of Customs and Excise Audit	Kementerian Keuangan / Ministry of Finance
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 / October 4, 2017 – October 3, 2022	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi manapun / No concurrent positions in any companies/institutions	
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 / January 22, 2018 – January 21, 2023	Dirjen Perhubungan Laut / Director General of Sea Transportation	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation
7.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 / December 14, 2020 – December 13, 2025	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi manapun / No concurrent positions in any companies/institutions	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Not in Active Service as of December 31, 2020					
8.	Djadmiko	Komisaris / Commissioner	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 / March 1, 2016 – December 14, 2020	Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window / Head of Indonesia National Single Window Portal Manager Work Unit	Kementerian Keuangan / Ministry of Finance

INFORMATION ON BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

Based on the Company's Articles of Association Article 14 Paragraph (26), the Company's Board of Commissioners members are not allowed to hold concurrent positions as:

1. Board of Directors member in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, or Private Enterprises;
2. Other positions according to laws and regulations, administrator of political parties, and/or legislative candidate/member and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidate; and/or
3. Other positions that may cause conflict of interests.

In 2020, the Board of Commissioners does not hold any concurrent positions prohibited in the Company's Articles of Association. Information on the concurrent positions of Board of Commissioners members in 2020 is described as follows:

Information on IPC Board of Commissioners Concurrent Positions in 2020

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan IPC yang dapat mempengaruhi independensinya.

BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATIONS

All members of the Company's Board of Commissioners do not have financial, management, shareholding and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholder or other relations with IPC that may affect their independence.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris IPC Tahun 2020

Disclosure of IPC Board of Commissioners Affiliations in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Term of Office	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations with			Hubungan Keluarga Dengan / Family Relations with			Hubungan Kepengurusan / Management Relations
				Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholder	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholder	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / In Active Service as of December 31, 2020										
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 / March 1, 2016 – February 28, 2021	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 / March 1, 2016 – February 28, 2021	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	14 Juli 2017 – 13 Juli 2022 / July 14, 2017 – July 13, 2022	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 / October 4, 2017 – October 3, 2022	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 / January 22, 2018 – January 21, 2023	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No
7.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 / December 14, 2020 – December 13, 2025	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Term of Office	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations with			Hubungan Keluarga Dengan / Family Relations with			Hubungan Kepengurusan / Management Relations
				Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholder	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholder	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Not in Active Service as of December 31, 2020										
8.	Djadmiko	Komisaris / Commissioner	1 Maret 2016 – 14 Desember 2020 / March 1, 2016 - December 14, 2020	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No	Tidak / No

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris IPC telah melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki. Hingga akhir tahun 2020, Dewan Komisaris tidak memiliki saham, baik di IPC maupun pada perusahaan lain.

KOMISARIS INDEPENDEN PERUSAHAAN

Berdasarkan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*), dijelaskan bahwa dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20 persen merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Per 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang atau 42,85 persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.

INFORMATION ON BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

All members of IPC Board of Commissioners have reported their share ownership. As of the end of 2020, the Board of Commissioners did not own any shares in IPC or other companies.

INDEPENDENT COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Based on the Board Manual of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners composition shall at least consist of 20 percent Independent Commissioners which is stated in their appointment decree.

As of December 31, 2020, there were 3 (three) Independent Commissioners or 42.85 percent of a total of 7 (seven) members of the Board of Commissioners, thus fulfilling the requirement of minimum 20 percent of total members of the Company's Board of Commissioners.

Keanggotaan Komisaris Independen IPC Tahun 2020

IPC Independent Commissioners in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
3.	Nurrachman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 (Periode Pertama) / December 14, 2020 – December 13, 2025 (First Period)

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, Komisaris Independen IPC telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Komisaris Independen

Selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris yang telah diuraikan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Masing-masing Komisaris Independen IPC Tahun 2020

Persyaratan Komisaris Independen / Independent Commissioner Requirement	Komisaris Independen IPC / IPC Independent Commissioner		
	Moermahadi Soerja Djanegara	Suaidi Marasabessy	Nurrachman
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. / Not a person who works or has authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company concerned within the last 6 (six) months, except for reappointment of Independent Commissioner of the Issuer or Public Company for a subsequent period.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Not owning shares directly or indirectly in the Issuer or Public Company concerned.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Not affiliated with the Issuer or Public Company concerned, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the majority shareholder of the Issuer or Public Company concerned.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Not having business relations directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company concerned.	✓	✓	✓

Criteria of Independent Commissioner Appointment

In accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011, IPC Independent Commissioners have met the criteria as none of the members has financial relationship, management, share ownership and/or familial relationships with fellow members of BOC, members of BOD, nor Controlling Shareholders of related SOEs, which may keep them from acting independently.

Independent Commissioner Statement

In addition to meeting the aforementioned requirements of the Board of Commissioners, Independent Commissioners shall meet the following requirements:

Fulfillment of Requirements by Each Independent Commissioner of IPC in 2020



Bukti Penandatanganan Surat Pernyataan Independen dalam Pengawasan Operasional Perusahaan oleh Komisaris Independen IPC Tahun 2020

Signing of Statement of Independence in Supervising the Company's Operations by IPC Independent Commissioners in 2020

Moermahadi Soerja Djanegara Suaidi Marasabessy Nurrachman

The image shows three identical copies of a document titled "SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN". Each document is signed by one of the independent commissioners: Moermahadi Soerja Djanegara, Suaidi Marasabessy, and Nurrachman. The documents include the IPC logo, the commissioner's name, position, and address, followed by a declaration of independence and a list of five points regarding their supervision role.

Selain Komisaris Independen, seluruh anggota Dewan Komisaris IPC yang menjabat selama periode tahun 2020 juga telah menandatangani Surat Pernyataan Independen dalam Pengawasan Operasional Perusahaan pada tanggal 15 Januari 2020.

In addition to the Independent Commissioners, all members of IPC Board of Commissioners serving in 2020 also signed Statement of Independence in Supervising the Company's Operations on January 15, 2020.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil salah satunya dalam Rapat Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* IPC.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Decisions of the Board of Commissioners are made among others in the meeting of the Board of Commissioners. The organization of Board of Commissioners meeting is regulated in the Articles of Association and Board Manual of IPC.

Jadwal Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih Dewan Komisaris;
2. Permintaan tertulis dari Direksi.

Meeting Schedule

Board of Commissioners meetings can be held at any time, if deemed necessary by:

1. One or more Commissioners;
2. Written request from the Board of Directors.

Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

This Board of Commissioners meeting is an immediate and/or strategic meeting.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Meeting Location

Meetings of Board of Commissioners can be held at the domicile or at the place of IPC business activity or at other places within the territory of the Republic of Indonesia.

Peserta Rapat Dewan Komisaris

Peserta rapat Dewan Komisaris terdiri dari semua Anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadiri dalam rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

Undangan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut rapat Dewan Komisaris;
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

Kuorum Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Board of Commissioners Meeting Participants

Participants in Board of Commissioners meeting consist of all members of Board of Commissioners. If Board of Commissioners considers it necessary, other parties may be attended at Board of Commissioners meeting to provide the necessary explanation.

Meeting Summons

Meeting summons are arranged as follows:

1. Summons for Board of Commissioners' Meeting shall be made in writing by President Commissioner (or a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner) and delivered within a minimum of 3 (three) working days before the meeting is held, or in a shorter time if in a situation urgent;
2. Summons of meetings and holding of meetings of Board of Commissioners can be delegated to Secretary of Board of Commissioners, unless otherwise stipulated in a meeting of Board of Commissioners;
3. Summons for Board of Commissioners meeting must state the agenda, date, time and place of the meeting;
4. Summons for Board of Commissioners meeting can be made via electronic means (SMS, e-mail, and other electronic means) so that notice of the meeting agenda can be delivered more quickly, without prejudice to the provisions of the Articles of Association regarding the procedure for meeting summons in writing.

Meeting summons is not required if all members of Board of Commissioners are present at the meeting.

Board of Commissioners Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are legal and have the right to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one half) of Board of Commissioners members. Representation of members of Board of Commissioners in a meeting can only be done by representing other members of Board of Commissioners in writing specifically given for this purpose and with the condition that 1 (one) member of Board of Commissioners can only represent 1 (one) other member of Board of Commissioners.

Chair of the Meeting

Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner. In the event that President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting will be chaired by another member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner.



Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Setiap peserta rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Oleh sebab itu, peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris, kecuali mengenai diri orang, dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Dalam hal terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat. Risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

In the event that President Commissioner does not appoint, the longest serving member of the Board of Commissioners acts as the chairman of the Board of Commissioners meeting. If there are more than 2 (two) members of Board of Commissioners who are most senior in position, then the oldest in age acts as the chairman of the meeting.

Decision-Making in Meeting

Each participant in the Board of Commissioners meeting shall be involved in decision-making process at the meeting. Therefore, participants who are absent during decision-making shall be contacted to return to meeting process. If the member cannot be contacted, then they are deemed to have agreed the meeting decision that has been made. The Board of Commissioners meeting decisions are made through deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached, then the decision shall be made through voting.

Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote with additional 1 (one) vote for the Board of Commissioners member represented. If the number of agreeing and disagreeing votes are equal, then the meeting decision shall follow the opinion of the chairman of the meeting, while taking account of provisions on accountability as regulated in the Company's Articles of Association. Decision-making at the Board of Commissioners meeting, unless relating to person, is carried out through closed voting. Abstaining votes are deemed to have agreed on the meeting decision. Invalid votes are deemed nonexistent and are not calculated in counting the total votes casted at the meeting.

In the event of more than 2 (two) alternative proposals and the voting has not resulted in one alternative with more than 1/2 of total votes, then a second voting shall be carried out for 2 (two) alternatives with the most votes until one alternative gains more than 1/2 of total votes casted.

Results of meeting decisions shall be stated in meeting decision document as an integral part of the meeting minutes. The meeting minutes shall be signed by the chairman of the meeting and all Board of Commissioners members present at the meeting.

Khusus terhadap agenda lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir, dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan Pendapat diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (sesuai dengan konsep *fiduciary duties*);
3. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Risalah asli rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

Pencatatan/Notulis Rapat Dewan Komisaris

Pencatatan/Notulis Rapat Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris.

PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris

Terdapat 3 (tiga) jenis rapat internal yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris IPC, yaitu rapat internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh seluruh Anggota Komisaris, rapat internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisaris dan seluruh Anggota Komite, dan rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi.

Specifically regarding other agendas, the Board of Commissioners meeting is unauthorized to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representative are present and agree on the addition of the meeting agenda.

Dissenting Opinion

Dissenting opinion is regulated as follows:

1. Dissenting opinion that occurs shall be recorded in the Meeting Minutes and the Board of Commissioners member who expresses dissenting opinion shall explain the reason of their difference in opinion from the meeting decision;
2. Dissenting opinion does not give any right to the Board of Commissioners member concerned not to carry out the meeting decision. Despite any dissenting opinion, all Board of Commissioners members are obligated to follow and implement the meeting decision (in accordance with fiduciary duties concept);
3. The collective Board of Commissioners are fully and personally responsible if they are proved guilty or to have neglected their duties for the interests and business of the Company.

Meeting Minutes

Each Board of Commissioners meeting shall produce meeting minutes. The meeting minutes shall be signed by the chairman of the meeting and all Board of Commissioners members present at the meeting. The meeting minutes are made and organized by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed by the Board of Commissioners. The original minutes of the Board of Commissioners meeting are delivered to the Board of Directors to be kept, while the Board of Commissioners keeps a copy.

Clerk of the Board of Commissioners Meeting

The clerk of the Board of Commissioners Meeting is the Secretary of the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS IN 2020

Board of Commissioners Internal Meetings

There are 3 (three) types of internal meetings held by IPC Board of Commissioners, namely Board of Commissioners internal meeting attended by all members of the Board of Commissioners only, Board of Commissioners internal meeting attended by all members of the Board of Commissioners and Committees, and Board of Commissioners internal meeting inviting the Board of Directors.



Rapat Internal Dewan Komisaris yang Hanya Dihadiri oleh Seluruh Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, tidak terdapat rapat internal khusus yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Seluruh rapat internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Dewan Komisaris dengan organ pendukung Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Internal Meetings Attended by All Members of the Board of Commissioners Only

In 2020, there were no special internal meetings attended only by all members of the Board of Commissioners. All internal meetings of the Board of Commissioners were attended by the Board of Commissioners and supporting organs of the Board of Commissioners.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite

Rencana rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Komite yang akan diselenggarakan selama tahun 2020 telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Board of Commissioners Internal Meetings by Inviting Committees

Plan of Board of Commissioners Internal Meetings by Inviting Committees

Plan of Board of Commissioners internal meetings by inviting committees throughout 2020 was set out in the Board of Commissioners Work Plan and Budget of 2020 with description as follows:

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite IPC Tahun 2020

Plan of IPC Board of Commissioners Internal Meetings by Inviting Committees in 2020

No.	Minggu / Week	Agenda	
Januari / January			
1.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2019. Pembahasan realisasi KPI Individu Dewan Komisaris Tahun 2019. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2019. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of the realization of KPI for Board of Commissioners in 2019. Discussion of the realization of individual KPI for Board of Commissioners in 2019. Discussion of the work plan realization and report on the activities of Board of Commissioners committees in 2019. Others.
2.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
3.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Persiapan Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir). Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Februari / February			
4.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
5.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
6.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Persiapan Rakomdir. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of audit results on Financial Statements for 2019 Fiscal Year. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.

No.	Minggu / Week	Agenda	
Maret / March			
7.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Board of Commissioners Annual Report for 2019 Fiscal Year. Others.
8.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
9.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Persiapan bahan Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom). Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Preparation of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
April / April			
10.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
11.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan KPI Dewan Komisaris Triwulan I/2020 Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan I/2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Board of Commissioners KPI in Q1/2020. Discussion of the work plan realization and report on the activities of Board of Commissioners committees in Q1/2020. Others.
12.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan Kinerja Perusahaan Triwulan I/2020. Pembahasan bahan Radirkom. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Company Performance in Q1/2020. Discussion of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Mei / May			
13.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I/2020. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of response to Management Report of Q1/2020. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Others.
14.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
15.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan bahan Radirkom. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Juni / June			
16.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
17.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Others.



No.	Minggu / Week	Agenda	
18.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan bahan Radirkom. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Juli / July			
19.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
20.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semester I/2020. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Semester I/2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Supervisory Report concept and KPI of the Board of Commissioners in H1/2020. Discussion of the work plan realization and report on the activities of Board of Commissioners committees in H1/2020. Others.
21.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan kinerja Perusahaan Semester II/2020. Persiapan Rakomdir. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Company Performance in H1/2020. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Agustus / August			
22.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I/2020. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of response to Management Report of H1/2020. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
23.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Others.
24.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan bahan Radirkom. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
September / September			
25.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
26.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan persiapan audit laporan keuangan tahun buku 2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of preparation for audit on financial statements for 2020 fiscal year. Others.
27.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan bahan Radirkom. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of materials for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.

No.	Minggu / Week	Agenda	
Oktober / October			
28.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Pembahasan Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Triwulan III/2020. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan III/2020. Pembahasan RKA Dewan Komisaris Triwulan III/2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Discussion of Supervisory Report and KPI of the Board of Commissioners in Q3/2020. Discussion of the work plan realization and report on the activities of Board of Commissioners committees in Q3/2020. Discussion of Board of Commissioners RKA in Q3/2020 Others.
29.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan usulan RKAP 2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of RKAP 2020 proposal. Others.
30.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan kinerja Perusahaan Triwulan III/2020. Persiapan Rakomdir. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of Company Performance in Q3/2020. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
November / November			
31.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III/2020. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of response to Management Report of Q3/2020. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Others.
32.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Others.
33.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Persiapan Rakomdir. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.
Desember / December			
34.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. Pembahasan atas konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Tahun 2020. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Discussion of evaluation concept and Board of Commissioners directives on the Company's management policies. Discussion of concept for Board of Commissioners response to RKAP 2020 proposal. Others.
35.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Others.
36.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris. Persiapan Rakomdir. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners. Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. Others.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris IPC menyelenggarakan rapat internal dengan mengundang Komite sebanyak 46 kali, atau melebihi dari jumlah rapat internal yang direncanakan dalam RKA Dewan Komisaris sebanyak 12 kali.

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Komite yang diselenggarakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite Tahun 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	37	37	100%
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	46	37	80%
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	46	42	91%
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	46	45	98%
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	46	46	100%
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	46	33	72%
7.	Nurrachman**	Komisaris Independen / Independent Commissioner	2	2	100%
8.	Djadmiko***	Komisaris / Commissioner	44	42	95%
Rata-rata Kehadiran / Average Attendance Rate					92%

Keterangan: / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-68/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Effectively serving as IPC President Commissioner and Independent Commissioner since March 2, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-68/MBU/03/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

**) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Independen IPC sejak tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Effectively serving as IPC Independent Commissioner since December 14, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

***) Masa jabatan sebagai Komisaris IPC resmi berakhir per tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Term of office as IPC Commissioner ended on December 14, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite

Secara umum, materi yang dibahas dalam rapat telah sesuai dengan rencana rapat tahun 2020 yang telah diuraikan di atas, dengan pokok pembahasan mengenai hal-hal yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris, rencana kerja dan realisasi kerja Dewan Komisaris, perkembangan pengurusan perusahaan, tindak lanjut rapat sebelumnya, dan hal-hal lain yang memerlukan pembahasan.

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Members in Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Committees

In 2020, IPC Board of Commissioners held internal meetings by inviting committees 46 times or exceeding the total internal meetings planned in the RKA of Board of Commissioners at 12 times.

The frequency and attendance of each Board of Commissioners member in the Board of Commissioners internal meetings by inviting Committees in 2020 is as follows.

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Members in Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Committees in 2020

Agenda, Time, and Participants of Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Committees

In general, the matters discussed in the meeting were in accordance with the meeting plan for 2020 as described above. The discussion agendas covered matters requiring recommendation/approval by the Board of Commissioners, work plan and work realization of the Board of Commissioners, development of company management, follow-up on previous meetings, and other matters requiring discussion.

Berikut ini disampaikan informasi mengenai agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2020.

Information on the agenda, time, and participants who attended the Board of Commissioners internal meetings in 2020 is as follows.

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Komite IPC Tahun 2020

Agenda, Time, and Participants of IPC Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Committees in 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
1.	2 Januari 2020 / January 2, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penetapan Plh. Komisaris Utama PT Pelindo II (Persero); (2) Usulan Persetujuan Pejabat Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelindo II (Persero); (3) Hal-hal Strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Appointment of Acting President Commissioner of PT Pelindo II (Persero); (2) Proposal for Approval of Officials of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Subsidiaries of PT Pelindo II (Persero); (3) Other Strategic Matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto
2.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Perubahan Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pelindo II (Persero); (2) Progres Audit Laporan Keuangan PT Pelindo II (Persero) Tahun Buku 2019; (3) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) The Board of Commissioners' response letter to the Amendment to the 2020 RKAP Proposal of PT Pelindo II (Persero); (2) Audit Progress on the Financial Statements for 2019 Fiscal Year of PT Pelindo II (Persero); (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
3.	15 Januari 2020 / January 15, 2020	<p>Pembahasan (1) Hal-hal strategis lainnya. Rapat yang bersifat <i>urgent</i>.</p> <p>Discussion (1) Other strategic matters. Urgent meeting.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
4.	22 Januari 2020 / January 22, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persiapan Pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Preparation of the 2020 RKAP Validation GMS of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Djadmiko 2. Kushari Suprianto 3. D. Andhi Nirwanto 4. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
5.	28 Januari 2020 / January 28, 2020	(1) Laporan Pelaksanaan PKPT Tahun 2019 dan PKPT Tahun 2020; (2) Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2019; (3) Persiapan Rakomdir tanggal 28 Januari 2020; (4) Hal-hal strategis lainnya. (1) 2019 PKPT and 2020 PKPT Implementation Reports; (2) Risk Management Implementation Report 2019; (3) Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting on January 28, 2020; (4) Other strategic matters.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo Komite Audit / Audit Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. Aries Fikirman Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto Peserta Lain (Manajemen IPC) / Other Participants (IPC Management) - Widodo, Risman, Dhena, Mintarso - Urip, Sumarman, Basril
6.	5 Februari 2020 / February 5, 2020	(1) Penyampaian Buku Laporan Manajemen Unaudited tahun 2019; (2) Draft SOP Pengadaan; (3) Hal-hal strategis lainnya. (1) Submission of the 2019 Unaudited Management Report Book; (2) Procurement SOP Draft; (3) Other strategic matters.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. D. Andhi Nirwanto Komite Audit / Audit Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. Aries Fikirman Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
7.	12 Februari 2020 / February 12, 2020	(1) Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan Tahun 2020; (2) Hal-hal strategis lainnya. (1) Planned Work Visit of the Board of Commissioners to the Port Branch in 2020; (2) Other strategic matters.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo Komite Audit / Audit Committee 1. Rakhmat Adi Santosa Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. Aries Fikirman Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
8.	19 Februari 2020 / February 19, 2020	(1) Progres KAP Tahun Buku 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Hal-hal strategis lainnya. (1) Progress of KAP for the 2019 Fiscal Year of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Other strategic matters.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. R. Agus H. Purnomo Komite Audit / Audit Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. Aries Fikirman Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto Peserta Lain (Manajemen IPC) / Other Participants (IPC Management) - Jongki, Wibisono, Osric, Tighfa



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
9.	26 Februari 2020 / February 26, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persiapan Rapat koordinasi 26 Februari 2020; Hal-hal strategis lainnya. (2) Preparation for the 26 February 2020 coordination meeting; Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Djadmiko 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
10.	4 Maret 2020 / March 4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Perkenalan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (3) Hal-hal strategis lainnya. (4) Introduction of the President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (5) Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (6) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
11.	11 Maret 2020 / March 11, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penyesuaian Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris *); (2) Fasilitas Kendaraan Dinas Direksi; (3) Penyusunan KPI Individual Dewan Komisaris (4) Adjustment of Remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners*); (5) Official Vehicle Facility for the Board of Directors; (6) Preparation of Individual KPI for the Board of Commissioners 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
12.	18 Maret 2020 / March 18, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Presentasi KAP atas Progres Audit Tahun Buku 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) SOP Pengadaan (3) Presentation of KAP on Audit Progress for the 2019 Fiscal Year of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (4) SOP for procurement 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Muhdi Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan 2. R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
13.	8 April 2020 / April 8, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) SOP Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) SOP for goods and services procurement; (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Montty Girianna 4. Suaidi Marasabessy 5. Kushari Suprianto 6. D. Andhi Nirwanto 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
14.	15 April 2020 / April 15, 2020	<p>Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Mengenai Manajemen Talenta dan Suksesi Direksi BUMN; (2) Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Talent Management and Succession of SOE Board of Directors; (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 3. Suaidi Marasabessy 3. Djadmiko 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
15.	20 April 2020 / April 20, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Kriteria Penilaian <i>Talent Management System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Talent Management System Assessment Criteria of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
16.	22-23 April 2020 / April 22-23, 2020	Pembahasan Wawancara top <i>talent</i> BUMN / SOE top talent interview discussion	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>-</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>-</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
17.	29 April 2020 / April 29, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Mengenai <i>Top Talent</i> BUMN; (2) Penghapusbukuan Aset tetap cabang Teluk Bayur dan Bengkulu; (3) Rencana kerjasama Pendayagunaan Aset cabang Pontianak oleh PT IPC TPK. <ul style="list-style-type: none"> (1) SOE Top Talent; (2) Write-off of fixed assets of Teluk Bayur and Bengkulu branches; (3) Cooperation plan for the utilization of assets of Pontianak branch by PT IPC TPK. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
18.	5 Mei 2020 / May 5, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persetujuan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan; (2) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Approval of Commissioners and Directors of Subsidiaries; (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>-</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>-</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
19.	14 Mei 2020 / May 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persetujuan Direktur Utama Anak Perusahaan; (2) Hal-hal strategis <ul style="list-style-type: none"> (1) Approval of President Director of Subsidiaries; (2) Strategic matters 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
20.	3 Juni 2020 / June 3, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Evaluasi KAP; (2) Laporan Manajemen TW 1 Tahun 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) KAP evaluation; (2) Management Report for Q1 2020; (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
21.	17 Juni 2020 / June 17, 2020	<p>(1) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Audit tahun buku 2019;</p> <p>(2) Usulan Pengangkatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;</p> <p>(3) Usulan Pengangkatan Kepala SPI & Sekretaris Perusahaan;</p> <p>(4) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>(1) The Board of Commissioners' response to the 2019 Audit Report;</p> <p>(2) Proposal for Appointment of Board of Commissioners of Subsidiaries;</p> <p>(3) Proposal for Appointment of Head of SPI & Corporate Secretary;</p> <p>(4) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
22.	17 Juni 2020 / June 17, 2020	<p>Pembahasan Pemaparan perhitungan laba, perhitungan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta pembahasan Tanggapan atas Laporan Audit Tahun Buku 2019. / Discussion on the explanation of profit calculation, calculation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2020, and discussion of response to the Audit Report for the 2019 Fiscal Year.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto <p>Peserta Lain (Manajemen IPC) / Other Participants (IPC Management)</p> <p>- Yon Irawan, Wing Megantoro</p>
23.	24 Juni 2020 / June 24, 2020	<p>(1) Rencana Akuisisi Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS;</p> <p>(2) Persiapan Rapat Koordinasi 24 Juni 2020;</p> <p>(3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>(1) Planned Acquisition of PT Multimedia Nusantara's Shares in PT ILCS;</p> <p>(2) Preparation for Coordination Meeting of June 24, 2020;</p> <p>(3) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
24.	1 Juli 2020 / July 1, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) mengenai Usulan Divestasi Saham PT ILCS; (2) Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap di beberapa Cabang; (3) Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Proposal for Divestment of PT ILCS Shares; (2) Proposal for Fixed Asset Write-off in several Branches; (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
25.	15 Juli 2020 / July 15, 2020	<ol style="list-style-type: none"> (1) Usulan Pergantian Pejabat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Usulan Penempatan Komisaris dan Direksi pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); (3) Penghapusbukuan Aset Tetap di beberapa Cabang Pelabuhan; (4) Usulan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Pelindo II (Persero); (5) Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> (1) Proposal for Change of Officials of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Proposal for the Placement of Commissioners and Directors in Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); (3) Write-off of Fixed Assets in several Port Branches; (4) Proposal for Revision of 2020 RKAP of PT Pelindo II (Persero); (5) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
26.	22 Juli 2020 / July 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> (1) Usulan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> (1) Proposal for Head Office Organizational Structure of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
27.	29 Juli 2020 / July 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana Akuisisi Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS; (2) Persiapan Rapat Koordinasi 29 Juli 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> (1) Planned Acquisition of PT Multimedia Nusantara's Shares in PT ILCS; (2) Preparation for Coordination Meeting of July 29, 2020; (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
28.	5 Agustus 2020 / August 5, 2020	<ol style="list-style-type: none"> (1) Usulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan; (2) Revisi RKAP 2020; (3) Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> (1) Recommendations for the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries; (2) Revised RKAP 2020; (3) Planned Land Use Cooperation with PT Styrimdo Mono Indonesia. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
29.	12 Agustus 2020 / August 12, 2020	<p>(1) Penjelasan Direktur Utama tentang Usulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan;</p> <p>(2) Penjelasan Direktur Utama mengenai rencana investasi dan aksi korporasi dalam revisi RKAP 2020;</p> <p>(3) Laporan Manajemen Semester I 2020;</p> <p>(4) Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Pangkal Balam;</p> <p>(5) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>(1) Explanation of the President Director regarding recommendations for the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries;</p> <p>(2) Explanation of the President Director regarding the plan of investment and corporate action in the revised RKAP 2020;</p> <p>(3) Management Report Semester I 2020;</p> <p>(4) Proposal for Write-off of Fixed Assets at Pangkal Balam Port Branch;</p> <p>(5) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
30.	19 Agustus 2020 / August 19, 2020	<p>(1) Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Tahun Buku 2020;</p> <p>(2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>(1) Appointment of KAP to conduct Audit for the 2020 Fiscal Year;</p> <p>(2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
31.	26 Agustus 2020 / August 26, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 26 Agustus 2020;</p> <p>(2) Hal-hal strategis lainnya</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Preparation for Coordination Meeting of August 26, 2020;</p> <p>(2) Other strategic matters</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
32.	9 September 2020 / September 9, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Permohonan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Tanah Cabang Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pertamina (Persero);</p> <p>(2) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021;</p> <p>(3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Request for Approval of the Cooperation Agreement for the Use of Land of Tanjung Priok Port Branch by PT Pertamina (Persero);</p> <p>(2) Discussion on the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2021;</p> <p>(3) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
33.	23 September 2020 / September 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Persetujuan Rencana Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Lapangan Petikemas Eks Inggom; (2) Pembahasan Usulan Calon Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan; (3) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Approval of Cooperation Plan for the Utilization of Fixed Asset of PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok Branch at the Ex Inggom Container Yard; (2) Discussion on the proposed candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries; (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
34.	30 September 2020 / September 30, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Persiapan Rapat Koordinasi 30 September 2020 pukul 10.00 WIB; (3) Pembahasan Hal-hal strategis lainnya <ul style="list-style-type: none"> (1) Monitoring of the Follow-Up of BPK Recommendations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) Preparation for the Coordination Meeting of September 30, 2020 at 10.00 WIB; (3) Discussion on other strategic matters 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
35.	7 Oktober 2020 / October 7, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap di Sukapura, Jakarta Utara; (2) Pembahasan Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Proposal for Fixed Asset Write-off in Sukapura, North Jakarta; (2) Discussion on other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
36.	14 Oktober 2020 / October 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> (1) Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Calang Sejati Indah di Cabang Pelabuhan Palembang; (2) Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Planned Land Use Cooperation with PT Calang Sejati Indah at Palembang Port Branch; (2) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
37.	21 Oktober 2020 / October 21, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Persiapan Rapat Koordinasi 21 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB;</p> <p>(2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Preparation for the Coordination Meeting of October 21, 2020 at 10.00 WIB;</p> <p>(2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara</p> <p>2. Djadmiko</p> <p>3. Suaidi Marasabessy</p> <p>4. Kushari Suprianto</p> <p>5. D. Andhi Nirwanto</p> <p>6. Montty Girianna</p> <p>7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar</p> <p>2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Aries Fikiran</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>
38.	27 Oktober 2020 / October 27, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021;</p> <p>(2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) 2021 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in;</p> <p>(2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara</p> <p>2. Djadmiko</p> <p>3. Suaidi Marasabessy</p> <p>4. Kushari Suprianto</p> <p>5. D. Andhi Nirwanto</p> <p>6. Montty Girianna</p> <p>7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar</p> <p>2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Aries Fikiran</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>
39.	4 November 2020 / November 4, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia;</p> <p>(2) Kerjasama Pendayagunaan Aset Cabang Tanjung Priok seluas 238.118,50 M2 dengan PT Indonesia Power;</p> <p>(3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia;</p> <p>(2) Tanjung Priok Branch Asset Utilization Cooperation with an area of 238,118.50 M2 with PT Indonesia Power;</p> <p>(3) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara</p> <p>2. Djadmiko</p> <p>3. Suaidi Marasabessy</p> <p>4. Kushari Suprianto</p> <p>5. D. Andhi Nirwanto</p> <p>6. Montty Girianna</p> <p>7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar</p> <p>2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Aries Fikiran</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>
40.	4 November 2020 / November 4, 2020	<p>(1) Presentasi Direktur Komersial atas <i>Draft</i> Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Pedoman Kerjasama dengan Mitra;</p> <p>(2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>(1) Presentation of the Commercial Director on the Draft Decree (SK) of the Board of Directors concerning Guidelines for Cooperation with Partners;</p> <p>(2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara</p> <p>2. Djadmiko</p> <p>3. Suaidi Marasabessy</p> <p>4. Kushari Suprianto</p> <p>5. D. Andhi Nirwanto</p> <p>6. Montty Girianna</p> <p>7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar</p> <p>2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Aries Fikiran</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
41.	11 November 2020 / November 11, 2020	<p>(1) Usulan Kerjasama dengan PT MMI; (2) Usulan Calon Pengurus Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (3) Tanggapan atas Review GCG; (4) Pembahasan Tanggapan Kinerja s.d Triwulan III 2020; (5) Progres Audit Tahun Buku 2020 oleh KAP; (6) Hal-hal strategis lainnya</p> <p>(1) Proposal for Cooperation with PT MMI; (2) Proposal for Management Candidates of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (3) Response to GCG Review; (4) Discussion of Performance Response up to Quarter III 2020; (5) Audit Progress for the 2020 Fiscal Year by KAP; (6) Other strategic matters</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>
42.	18 November 2020 / November 18, 2020	<p>Pembahasan (1) Implementasi ISO 37001:2016; (2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion (1) Implementation of ISO 37001:2016; (2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>
43.	25 November 2020 / November 25, 2020	<p>Pembahasan (1) RKAP 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) RJPP 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (3) Persiapan Rapat Koordinasi 25 November 2020; (4) Hal-hal strategis lainnya</p> <p>Discussion (1) 2021 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2) 2020-2024 RJPP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (3) Preparation for Coordination Meeting of November 25, 2020; (4) Other strategic matters</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>
44.	10 Desember 2020 / December 10, 2020	<p>Pembahasan (1) Rencana Amandemen Perjanjian Kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT; (2) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion (1) Planned Amendment to Cooperation Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT; (2) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Komite Audit / Audit Committee 1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
45.	16 Desember 2020 / December 16, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentasi Progres Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2020 oleh KAP; Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> Presentation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Progress for the 2020 Fiscal Year by KAP; Other strategic matters 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara Suaidi Marasabessy Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto Montty Girianna R. Agus H. Purnomo Nurrachman <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Muhdi Al Fajar Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizqi Kurnianto Ditya Akbar Henryanto
46.	23 Desember 2020 / December 23, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggapan Tertulis atas Usulan Penyesuaian Skema Kerjasama Jangka Panjang antara Anak Perusahaan dengan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok; Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan dan Penghapusan Tagih Piutang Bunga dan Denda atas Pinjaman PT Rukindo; Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 WIB; Hal-hal strategis lainnya <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> Written Response to the Proposal for Adjustment of the Long-Term Cooperation Scheme between Subsidiaries and the Tanjung Priok Port Branch; Request for Approval of Write-off and Claim Write-off of Interest and Penalties on PT Rukindo's Loans; Preparation for Coordination Meeting of December 23, 2020 at 10.00 WIB; Other strategic matters 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara Suaidi Marasabessy Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto Montty Girianna R. Agus H. Purnomo Nurrachman <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Muhdi Al Fajar Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizqi Kurnianto Ditya Akbar Henryanto

Meskipun tingkat kehadiran dalam rapat tersebut masih belum mencapai 100 persen, namun dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan secara sirkuler, sehingga seluruh keputusan/persetujuan yang diambil oleh Dewan Komisaris telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris (tidak terdapat *dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020). Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat telah memberikan Surat Kuasa kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang hadir.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi merupakan bagian dari rapat internal Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Rapat internal Dewan Komisaris mengundang Direksi selama periode tahun 2020 antara lain:

Although the attendance rate in the meetings did not reach 100 percent, the decisions of the Board of Commissioners were also made circularly, so that all decisions/approvals made by the Board of Commissioners were agreed upon by all members of the Board of Commissioners (no dissenting opinion among members of the Board of Commissioners in 2020). All members of the Board of Commissioners who were absent in the meetings have given Power of Attorney to other members of the Board of Commissioners who attended the meetings.

Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Board of Directors

Board of Commissioners Internal Meetings by Inviting Board of Directors are part of the Board of Commissioners internal meetings with Supporting Organs as described above. The Board of Commissioners Internal Meetings by Inviting Board of Directors during 2020 period are as follows:

Agenda dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi Tahun 2020

Agenda and Participants of Board of Commissioners Internal Meeting by Inviting Board of Directors

No.	Tanggal / Date	Direksi yang Diundang / Invited Directors	Agenda
1.	8 April 2020 / April 8, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Keuangan Direktur SDM dan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> President Director Vice President Director Technical Director Finance Director HC and General Affairs Director
			<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Perubahan Organisasi; Pembahasan Rencana Penyertaan Modal di PT RSP; Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Proyek Kalibaru.
2.	22-23 April 2020 / April 22-23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Komersial Direktur Teknik Direktur Operasi Direktur Keuangan Direktur SDM dan Umum Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Direktur Anak Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> President Director Vice President Director Commercial Director Technical Director Operations Director Finance Director HC and General Affairs Director Business Transformation and Development Director Directors of Subsidiaries
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Discussion of Plan of Organizational Structure Change; 2) Discussion on the Equity Participation Plan in PT RSP; 3) Discussion on the completion of Kalibaru Project Physical Work.
3.	17 Juni 2020 / June 17, 2020	Direktur Keuangan	Finance Director
			<p>Pemaparan perhitungan pembagian laba, perhitungan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta pembahasan tanggapan atas Laporan Audit Tahun Buku 2019.</p>
			<p>Presentation of profit-sharing calculations, calculation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020, as well as discussion of responses to the Audit Report for the 2019 Fiscal Year.</p>
4.	12 Agustus 2020 / August 12, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur SDM dan Umum Direktur Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> President Director HC and General Affairs Director Finance Director
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan Direktur Utama atas Pengangkatan Direktur Utama Anak Perusahaan; 2) Penjelasan Direktur Utama mengenai rencana investasi dan aksi korporasi dalam revisi RKAP 2020; 3) Pembahasan Laporan Manajemen Semester I 2020; 4) Pembahasan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Pangkal Balam; 5) Hal-hal strategis lainnya.
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Explanation from the President Director on the appointment of the President Director of Subsidiaries; 2) Explanation from the President Director on the plan of investment and corporate action in the revised RKAP 2020; 3) Discussion on the Management Report Semester I 2020; 4) Discussion on the Proposal for Fixed Asset Write-off at Pangkal Balam Port Branch; 5) Other strategic matters.

PENYELENGGARAAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang akan diselenggarakan selama tahun 2020 telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Plan of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

Plan of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings throughout 2020 was set out in the 2020 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners with details as follows:

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi IPC Tahun 2020

Plan of IPC Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings in 2020

No.	Agenda	Keterangan / Description
Januari / January		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results.	
2.	Pembahasan kinerja <i>unaudited</i> tahun 2019. / Discussion of 2019 unaudited performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2020. / Discussion of 2020 RKAP Implementation Plan.	
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	



No.	Agenda	Keterangan / Description
Februari / February		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Januari 2020. / Discussion of January 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2019. / Discussion of Audit Results of 2019 Fiscal Year.	
5.	Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2019. / Discussion of GCG Assessment Results of 2019 Fiscal Year.	
6.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Maret / March		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Februari 2020. / Discussion of February 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya. / Discussion of audit findings and follow-up.	
5.	Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2020. / Discussion of Plan of External Auditor (KAP) Appointment for 2020 Fiscal Year.	
6.	Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2019. / Discussion of Preparation of GMS for Validation of 2019 Annual Report.	
7.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
April / April		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
3.	Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2020. / Discussion of Management Report of Q1/2020.	
4.	Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2019. / Discussion of Results of GMS for Validation of 2019 Annual Report.	
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
		RUPS Laporan Tahunan 2019 diperkirakan pada awal April 2020. / GMS for 2019 Annual Report was estimated at the beginning of April 2020.
Mei / May		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan April 2020. / Discussion of April 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Juni / June		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Mei 2020. / Discussion of May 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Juli / July		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2020. / Discussion of Management Report of H1/2020.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Telaah atas pelaksanaan RKAP 2020. / Review of 2020 RKAP implementation.	
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Agustus / August		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Juli 2020. / Discussion of July 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	

No.	Agenda	Keterangan / Description
September / September		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Agustus 2020. / Discussion of August 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan Usulan RKAP 2020. / Discussion of 2020 RKAP proposal.	
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Oktober / October		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2020. / Discussion of Management Report of Q3/2020.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan Usulan RKAP 2020. / Discussion of 2020 RKAP proposal.	
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
November / November		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan Oktober 2020. / Discussion of October 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2020. / Discussion of GMS for Validation of 2020 RKAP.	RKAP 2020 diperkirakan disetujui pada bulan Desember 2020. / 2020 RKAP was estimated to be approved in December 2020.
5.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	
Desember / December		
1.	Pembahasan hasil rapat terdahulu. / Discussion of previous meeting results	
2.	Pembahasan kinerja bulan November 2020. / Discussion of November 2020 performance.	
3.	Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat. / Progress report on performance of each Directorate.	
4.	Pembahasan hal-hal strategis lainnya. / Discussion of other strategic matters.	

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Selain rapat internal, anggota Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan bersama Direksi selama tahun 2020 sebanyak 12 kali, sesuai dengan jumlah rencana rapat gabungan dengan Direksi yang tertuang dalam RKA Dewan Komisaris.

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi IPC Tahun 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	10	10	100%
2.	Montty Girianna	Komisaris / Commissioner	12	12	100%

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Members in Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners also holds joint meetings with the Board of Directors 12 times in 2020, in accordance with the planned number of joint meetings with the Board of Directors as set out in the RKA of Board of Commissioners.

The frequency and attendance of each Board of Commissioners member in the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting in 2020 is as follows.

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Members in IPC Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting in 2020



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
3.	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen / Independent Commissioner	12	12	100%
4.	Kushari Suprianto	Komisaris / Commissioner	12	12	100%
5.	D. Andhi Nirwanto	Komisaris / Commissioner	12	12	100%
6.	R. Agus H. Purnomo	Komisaris / Commissioner	12	9	75%
7.	Nurrachman**	Komisaris Independen / Independent Commissioner	1	1	100%
8.	Djadmiko***	Komisaris / Commissioner	11	11	100%
Rata-rata Kehadiran / Average Attendance Rate					97%

Keterangan: / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-68/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Effectively serving as IPC President Commissioner and Independent Commissioner since March 2, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-68/MBU/03/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

**) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Independen IPC sejak tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Effectively serving as IPC Independent Commissioner since December 14, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

***) Masa jabatan sebagai Komisaris IPC resmi berakhir per tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Term of office as IPC Commissioner ended on December 14, 2020 based on Copy of Decree of the Minister of SOEs as GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Untuk frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilihat pada halaman 601.

The frequency and rate of attendance of members of the Board of Directors in the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings are available on page 601.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat memberikan Surat Kuasa kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang hadir. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris tersebut akan mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam periode mendatang.

All Board of Commissioners members who were absent in the meetings have given Power of Attorney to other Board of Commissioners members who attended the meetings. The attendance rate of the Board of Commissioners will be taken into account and improved in the following period.

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Agenda, Time, and Participants of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

Secara umum, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020 membahas tentang kinerja perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya.

In general, the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings held in 2020 discussed periodical company performance, reports of each Directorate, follow-up on previous meetings, and several other agendas.

Berikut ini disampaikan informasi mengenai agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2020.

Information on the agenda, time, and participants who attended the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings in 2020 is as follows.

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi IPC Tahun 2020

Agenda, Time, and Participants of IPC Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting in 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
1.	28 Januari 2020 / January 28, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 18 Desember 2019;</p> <p>(2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Desember 2019;</p> <p>(3) Laporan masing-masing Direktur Bidang;</p> <p>(4) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Follow-up on Coordination Meeting results on December 18, 2019;</p> <p>(2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until December 2019;</p> <p>(3) Report of each Division Director;</p> <p>(4) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Djadmiko</p> <p>2. Súaidi Marasabessy</p> <p>3. Kushari Suprianto</p> <p>4. D. Andhi Nirwanto</p> <p>5. Montty Girianna</p> <p>6. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Elvyn Gani Masassya</p> <p>2. Hambra</p> <p>3. Arif Suhartono</p> <p>4. Dani Rusli Utama</p> <p>5. Prasetyadi</p> <p>6. Widyaka Nusapati</p> <p>7. Rizal Ariansyah</p> <p>8. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Muhdi Al Fajar</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Pionir Harapan</p> <p>2. R. Nurhidayat</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. Aries Fikiran</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>
2.	26 Februari 2020 / February 26, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Januari 2020;</p> <p>(2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Januari 2020;</p> <p>(3) Laporan masing-masing Direktur Bidang;</p> <p>(4) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Follow-up on Coordination Meeting results on January 28, 2020;</p> <p>(2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until January 2020;</p> <p>(3) Report of each Division Director;</p> <p>(4) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Djadmiko</p> <p>2. Súaidi Marasabessy</p> <p>3. Kushari Suprianto</p> <p>4. D. Andhi Nirwanto</p> <p>5. Montty Girianna</p> <p>6. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Elvyn Gani Masassya</p> <p>2. Hambra</p> <p>3. Arif Suhartono</p> <p>4. Dani Rusli Utama</p> <p>5. Prasetyadi</p> <p>6. Widyaka Nusapati</p> <p>7. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa</p> <p>2. Muhdi Al Fajar</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Pionir Harapan</p> <p>2. R. Nurhidayat</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. Aries Fikiran</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto</p> <p>2. Ditya Akbar Henryanto</p>



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
3.	31 Maret 2020 / March 31, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 26 Februari 2020; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Februari 2020; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> Follow-up on Coordination Meeting results on February 26, 2020; Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until February 2020; Report of each Division Director; Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara Djadmiko Suaidi Marasabessy Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto Montty Girianna R. Agus H. Purnomo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Pionir Harapan R. Nurhidayat <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Aries Fikirman <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizqi Kurnianto Ditya Akbar Henryanto
4.	8 April 2020 / April 8, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> mengenai CT2 dan CT3 Kalibaru; Pembahasan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4); mengenai Struktur Organisasi. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> CT2 and CT3 of Kalibaru; Discussion of Port and Dredging Company Pension Funds (DP4); Organizational Structure. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara Djadmiko Suaidi Marasabessy Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto Montty Girianna R. Agus H. Purnomo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Dani Rusli Utama Yon Irawan Ihsanuddin Usman <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Muhamad Al Fajar Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizqi Kurnianto Ditya Akbar Henryanto
5.	12 Mei 2020 / May 12, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 31 Maret 2020; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan April 2020; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> Follow-up on Coordination Meeting results on March 31, 2020; Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until April 2020; Report of each Division Director; Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara Djadmiko Suaidi Marasabessy Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto Montty Girianna R. Agus H. Purnomo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Muhamad Al Fajar Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rizqi Kurnianto Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
6.	24 Juni 2020 / June 24, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 12 Mei 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Mei 2020; (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang; (4) Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Follow-up on Coordination Meeting results on May 12, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until May 2020; (3) Report of each Division Director; (4) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhti Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
7.	29 Juli 2020 / July 29, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 Juni 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Juni 2020; (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang; (4) Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Follow-up on Coordination Meeting results on June 24, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until June 2020; (3) Report of each Division Director; (4) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhti Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto
8.	26 Agustus 2020 / August 26, 2020	<p>Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 29 Juli 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Juli 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya. <p>Discussion</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Follow-up on Coordination Meeting results on July 29, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until July 2020; (3) Other strategic matters. 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhti Al Fajar 2. Pionir Harapan <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikiran <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Nurhidayat <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
9.	30 September 2020 / September 30, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 26 Agustus 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Agustus 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Follow-up on Coordination Meeting results on August 26, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until August 2020; (3) Other strategic matters</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>
10.	21 Oktober 2020 / October 21, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Progres NLE dan Project IT; (2) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 September 2020; (3) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan September 2020; (4) Pemaparan Restrukturisasi cabang oleh Direktur SDM dan Umum; (5) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Progress of NLE and IT Project; (2) Follow-up on Coordination Meeting results on September 30, 2020; (3) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until September 2020; (4) Explanation of branch restructuring by the Human Capital and General Affairs Director; (5) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna 7. R. Agus H. Purnomo</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>
11.	24 November 2020 / November 24, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 21 Oktober 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Oktober 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Follow-up on Coordination Meeting results on October 21, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until October 2020; (3) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Djadmiko 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. Montty Girianna</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henryanto</p>

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
12.	23 Desember 2020 / December 23, 2020	<p>Pembahasan</p> <p>(1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 25 November 2020; (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan November 2020; (3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Discussion</p> <p>(1) Follow-up on Coordination Meeting results on November 25, 2020; (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until November 2020; (3) Other strategic matters.</p>	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>1. Moermahadi Soerja Djanegara 2. Suaidi Marasabessy 3. Kushari Suprianto 4. D. Andhi Nirwanto 5. Montty Girianna 6. R. Agus H. Purnomo 7. Nurrachman</p> <p>Direksi / Board of Directors</p> <p>1. Arif Suhartono 2. Hamba 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino</p> <p>Komite Audit / Audit Committee</p> <p>1. Muhdi Al Fajar 2. Pionir Harapan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <p>1. Rakhmat Adi Santosa 2. Aries Fikirman</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <p>1. R. Nurhidayat</p> <p>Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat</p> <p>1. Rizqi Kurnianto 2. Ditya Akbar Henyanto</p>

EVALUASI/ARAHAN/TANGGAPAN/PERSETUJUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari Direksi dan memberikan tanggapan dan persetujuan sesuai dengan batas kewenangannya, dalam jangka waktu yang dipersyaratkan yaitu paling lama 14 hari sejak usulan diterima. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan baik dalam forum rapat maupun melalui surat. Adapun evaluasi/arahan/tanggapan/persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Persetujuan RJPP

Pada tahun 2020, Direksi mengajukan usul persetujuan Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui Surat No. PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 tanggal 25 September 2020, yang kemudian telah diberikan tanggapan dan persetujuan oleh Dewan Komisaris melalui Surat No. 67/DK/PI.II/IX-2020 tanggal 30 September 2020 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 15 ayat (2) huruf b. nomor 2) dan 3) Dewan Komisaris berkewajiban meneliti, menelaah dan menandatangani RJPP, serta memberikan pendapat/saran dan alasan ditandatanganinya RJPP tersebut oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah RJPP 2020-2024 Perubahan melalui pembahasan dengan Direksi tanggal 28 September 2020. Dari telaah tersebut, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan masukan secara garis besar agar Direksi:

EVALUATION/DIRECTION/RESPONSE/APPROVAL BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners evaluated the proposals from the Board of Directors and provided responses and approvals in accordance with the limits of their authority within 14 days after the proposal is received. In addition, the Board of Commissioners also provided direction and advice to the Board of Directors in managing the company, both through meetings and letters. The evaluations/directions/responses/approvals submitted by the Board of Commissioners during 2020 are described as follows:

RJPP Approval

In 2020, the Board of Directors requested approval for the Draft of 2020-2024 RJPP Amendments of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Letter No. PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 dated September 25, 2020, which received response and approval by the Board of Commissioners through Letter No. 67/DK/PI.II/IX-2020 dated September 30, 2020 as follows:

1. In accordance with the Company's Articles of Association article 15 paragraph (2) letter b. numbers 2) and 3), the Board of Commissioners is obligated to study, review, and sign the RJPP, and provide opinions/suggestions and reasons for the signing of the RJPP by the Board of Commissioners before submission to the Shareholders.
2. The Board of Commissioners has studied and reviewed 2020-2024 RJPP Amendments through discussions with the Board of Directors on September 28, 2020. From this review, the Board of Commissioners provided a summary of opinions and input for the Board of Directors to:



- a. Memperhatikan perubahan situasi eksternal terkait dengan *logistic ecosystem* yang berpengaruh pada visi dan misi Perusahaan.
 - b. Mengantisipasi pengaruh rencana pembentukan *cluster* pelabuhan terhadap hak dan kewajiban Perusahaan.
 - c. Memastikan rencana transformasi dan restrukturisasi Anak Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi Anak Perusahaan.
 - d. Memprioritaskan kebijakan Perusahaan dalam investasi tahun 2020-2024 pada investasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kinerja Perusahaan.
 - e. Memperhatikan strategi *cluster* laut Kementerian BUMN, penelarasan *strategic initiative* Perusahaan dengan Lima Program Prioritas Kementerian BUMN.
 - f. Menggunakan asumsi yang rasional berdasarkan *update* kondisi internal dan eksternal untuk menyusun proyeksi dalam penyusunan proyeksi operasi dan keuangan sebagai dampak Pandemi Covid-19.
3. Rancangan RJPP 2020-2024 Perubahan yang disampaikan Direksi secara garis besar telah memuat:
- a. Visi Perusahaan dirumuskan menjadi "*World Class Maritime Ecosystem*".
 - b. Misi Perusahaan telah dirumuskan menjadi "*Develop Indonesia's port and logistic maritime integrated network to reduce logistic cost and energize trade*".
 - c. Budaya Perusahaan dirumuskan menjadi AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
 - d. IPC telah menyusun *roadmap* selama 5 tahun, yaitu *Fine Tuning* pada tahun 2020, *Synergy and Improvement* pada tahun 2021, *Growth Through Integration* pada tahun 2022, *Value Chain Expansion* pada tahun 2023, dan *Value Chain Integration* pada tahun 2024, dan akan di-*cascade* ke RJPP Anak Perusahaan dan menjadi *business plan* di Cabang Pelabuhan.
 - e. Strategi *cluster* laut dan *strategic initiative* Perusahaan dengan Lima Program Prioritas Kementerian BUMN.
 - f. Asumsi yang rasional dalam menyusun proyeksi dalam penyusunan proyeksi operasi dan keuangan sebagai dampak Pandemi Covid-19.
 - g. Rencana transformasi dan restrukturisasi Anak Perusahaan.
- a. Pay attention to changes in the external situation related to the logistics ecosystem that affect the Company's vision and mission.
 - b. Anticipate the effect of the planned port cluster formation on the rights and obligations of the Company.
 - c. Ensure that the plan of Subsidiaries transformation and restructuring can improve the performance and contribution of the Subsidiaries.
 - d. Prioritize the Company's investment policies in 2020-2024 on investments that have a direct impact on increasing the Company's revenue and performance.
 - e. Take into account the maritime cluster strategy of the Ministry of SOEs, align the Company's strategic initiative with the Five Priority Programs of the Ministry of SOEs.
 - f. Use rational assumptions based on updates of internal and external conditions to prepare operational and financial projections as a result of the Covid-19 Pandemic.
3. The Draft of 2020-2024 RJPP Amendments submitted by the Board of Directors in general contains the following matters:
- a. The Company's vision is formulated as "*World Class Maritime Ecosystem*".
 - b. The Company's mission is formulated as "*Develop Indonesia's port and logistic maritime integrated network to reduce logistic cost and energize trade*".
 - c. The Company's culture is formulated as AKHLAK (Responsible, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative).
 - d. IPC has prepared a roadmap for 5 years, namely *Fine Tuning* in 2020, *Synergy and Improvement* in 2021, *Growth Through Integration* in 2022, *Value Chain Expansion* in 2023, and *Value Chain Integration* in 2024, and will be cascaded into RJPP of Subsidiaries and become the business plan at Port Branches.
 - e. The maritime cluster strategy and the Company's strategic initiative with the Five Priority Programs of the Ministry of SOEs.
 - f. Rational assumptions in preparing operational and financial projections with the impact of the Covid-19 Pandemic.
 - g. Subsidiary transformation and restructuring plan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dapat menyetujui Rancangan RJPP 2020-2024 Perubahan dengan pertimbangan:
 - a. Rancangan RJPP 2020-2024 Perubahan telah disusun dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid-19 serta kebijakan Kementerian BUMN dalam pembentukan *cluster* BUMN dan agenda Kementerian BUMN terkait 5 Prioritas BUMN.
 - b. Rancangan RJPP 2020-2024 Perubahan telah mengakomodir Surat KBUMN Nomor: S-57/Wk2.MBU/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Penyampaian RJPP 2020-2024.
 - c. Rancangan RJPP 2020-2024 Perubahan telah mengakomodir masukan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Direksi mengajukan usul persetujuan Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor: PR.05/26/1/1/STR/UT/PI.II-2021 tanggal 26 Januari 2021.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor: 07/DK/PI.II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan memberikan tanggapan dan masukan agar Direksi:

1. Menyesuaikan RJPP Tahun 2020-2024 dengan hasil Rapat Pembahasan Tahun Buku 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 18 Januari 2021 di Kementerian BUMN.
2. Melakukan pengelolaan arus kas dengan baik dalam pendanaan investasi (*capital expenditure*).

Evaluasi Usulan Revisi RKAP 2020

Dengan adanya dampak pandemi Covid-19 dan Surat Wakil Menteri BUMN II No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, yang pada pokoknya menyampaikan agar penyusunan revisi RKAP 2020 mempertimbangkan inisiatif penghematan biaya, inisiatif optimalisasi *capital expenditure*, dan mengedepankan prinsip *financial sustainability* serta mengacu pada asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, Direksi memohon tanggapan terkait usulan perubahan RKAP Tahun 2020 melalui Surat No. KU.01.01/29/7/2/RKU/UT/PI.II-2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Penyampaian Buku Revisi RKAP Tahun 2020.

4. Based on the aforementioned matters, the Board of Commissioners approved the Draft of 2020-2024 RJPP Amendments by considering:

- a. The Draft of 2020-2024 RJPP Amendments was prepared by taking into account the impact of the Covid-19 pandemic and the policy of the Ministry of SOEs in the formation of SOE clusters and the agenda of the Ministry of SOEs regarding the 5 Priorities of SOEs.
- b. The Draft of 2020-2024 RJPP Amendments accommodated the Ministry of SOEs Letter Number: S-57/Wk2.MBU/09/2020 dated September 22, 2020 regarding Submission of the 2020-2024 RJPP.
- c. The Draft of 2020-2024 RJPP Amendments accommodated the input of the Board of Commissioners.

Furthermore, in 2021, the Board of Directors requested approval for the Draft of 2020-2024 RJPP Amendments of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Letter Number: PR.05/26/1/1/STR/UT/PI.II-2021 dated January 26, 2021.

The Board of Commissioners has approved the Draft of 2020-2024 RJPP Amendments of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Letter Number: 07/DK/PI.II/2021 dated January 29, 2021, by providing feedback and input for the Board of Directors to:

1. Adjust the 2020-2024 RJPP with the results of the 2021 Fiscal Year Discussion Meeting of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on January 18, 2021 at the Ministry of SOEs.
2. Perform proper cash flow management in investment funding (*capital expenditure*).

Evaluation of the Proposed Revision to 2020 RKAP

With regard to the impact of the Covid-19 pandemic and the Letter of the Deputy Minister of SOEs II No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding the Amendment to the 2020 RKAP of SOEs supervised by the Deputy Minister of SOEs II, which basically states that the preparation of 2020 RKAP revision shall consider cost-saving initiatives, initiatives to optimize capital expenditure, and prioritize the principles of financial sustainability and refer to the assumptions set by the Ministry of SOEs, the Board of Directors requested response to the proposed 2020 RKAP revision No. KU.01.01/29/7/2/RKU/UT/PI.II-2020 dated July 29, 2020 regarding Submission of 2020 RKAP Revision Book.



Evaluasi usulan rencana kerja dan target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2020 dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli, 5 Agustus, 12 Agustus 2020, rapat koordinasi dengan Direksi serta penyampaian surat mengenai tanggapan atas usulan perubahan RKAP Tahun 2020 kepada Direksi melalui surat Nomor 52/DK/PI.II/VIII-2020 tanggal 5 Agustus 2020. Beberapa hal yang menjadi catatan serta pendapat dan saran Dewan Komisaris terkait usulan perubahan RKAP Tahun 2020:

1. Untuk mencapai target laba Perseroan tahun 2020, Direksi agar meningkatkan efisiensi biaya khususnya biaya yang berada dalam kendali manajemen; mempercepat implementasi *cost accounting* agar biaya dapat dikendalikan dengan baik; dan menerapkan perencanaan pajak dengan baik.
2. Direksi perlu memprioritaskan realisasi rencana investasi yang segera menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan.
3. Terkait rencana aksi korporasi pembelian saham PT CTP dan PT PP Properti Tbk, Direksi agar tetap mengacu kepada surat Wakil Menteri BUMN II No. S-46/Wk2.MBU/06/2020.

Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2021 dan Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris

Evaluasi usulan rencana kerja dan target tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2021 dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 27 dan 25 November 2020, rapat koordinasi dengan Direksi, dan penyampaian surat mengenai persetujuan rancangan RKAP kepada Direksi melalui Surat No. 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan 08/DK/PI.II/I-2021 tanggal 29 Januari 2021. Beberapa hal yang menjadi catatan serta pendapat dan saran Dewan Komisaris terkait RKAP Tahun 2021:

1. Atas rancangan RKAP Tahun 2021 yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah rancangan tersebut dalam rapat Komite Dewan Komisaris dengan jajaran Manajemen dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Dewan Komisaris memberi masukan atas rancangan RKAP Tahun 2021 dalam hal:
 - a. Dampak penerapan PSAK 73 Akuntansi Sewa terhadap kinerja Anak Perusahaan.
 - b. Pengaruh pendapatan (biaya) komprehensif lain terhadap laba (rugi) konsolidasi.

Evaluation of the proposed work plan and targets of 2020 as stated in the 2020 RKAP has been carried out by the Board of Commissioners through discussions at the Board of Commissioners internal meetings on July 15, August 5, and 12 August 2020, coordination meeting with the Board of Directors, and submission of a letter regarding the response to the proposed changes to the 2020 RKAP to the Board of Directors through letter Number 52/DK/PI.II/VIII-2020 dated August 5, 2020. Concerns, opinions and suggestions from the Board of Commissioners regarding the proposed changes to the 2020 RKAP are as follows:

1. In order to achieve the Company's profit target for 2020, the Board of Directors is advised to increase cost efficiency, particularly costs that are under the management's control; accelerate the implementation of cost accounting so as to properly control costs; and implement tax planning properly.
2. The Board of Directors shall prioritize the realization of investment plans that will immediately generate added value for the Company.
3. Regarding the corporate action plan to purchase shares of PT CTP and PT PP Properti Tbk, the Board of Directors shall refer to the Letter of the Deputy Minister of SOEs II Number: S-46/Wk2.MBU/06/2020.

Evaluation of the Proposed 2021 RKAP and Preparation of Response of the Board of Commissioners

Evaluation of the proposed work plan and targets for 2021 as stated in the 2021 RKAP was carried out by the Board of Commissioners through discussions in the Board of Commissioners internal meetings on November 27 and 25, 2020, coordination meetings with the Board of Directors, and submission of letter regarding the approval of the RKAP draft to the Board of Directors through Letter No. 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020 and 08/DK/PI.II/I-2021 dated January 29, 2021. Several concerns, opinions, and suggestions from the Board of Commissioners regarding the 2021 RKAP are as follows:

1. On the draft 2021 RKAP submitted by the Board of Directors, the Board of Commissioners has studied and reviewed the draft in the Board of Commissioners Committee meeting with the Management and the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors. From these discussions, the Board of Commissioners provided input on the 2021 RKAP draft in terms of:
 - a. Impact of the implementation of PSAK 73 Lease Accounting on the performance of Subsidiaries.
 - b. Effect of other comprehensive income (cost) on consolidated profit (loss).

- c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Banding Pajak di Mahkamah Agung.
 - d. Perubahan struktur organisasi di Kantor Pusat dan Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - e. Perubahan KPI dan target KPI.
 - f. Rencana akuisisi saham PT PP Properti Tbk dan PT CTP.
 - g. Rencana divestasi saham PT CTP.
 - h. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung operasional perusahaan.
2. Dalam rangka pelaksanaan RKAP Tahun 2021, Dewan Komisaris menyarankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk mencapai target laba Perseroan tahun 2021, Direksi diminta untuk:
 - 1) Mengupayakan efisiensi biaya khususnya biaya yang berada dalam kendali manajemen dan mengusahakan agar peningkatan biaya dapat mengakselerasi peningkatan pendapatan (*effectiveness cost*), sebagai langkah antisipasi masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
 - 2) Meningkatkan pendapatan dari penggunaan kapasitas yang masih belum maksimal utilitasnya.
 - 3) Meningkatkan pangsa pasar perusahaan, dengan mencari peluang baru di luar bisnis reguler Perusahaan.
 - 4) Melakukan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
 - 5) Menerapkan perencanaan pajak yang baik termasuk mitigasi risikonya.
 - b. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, Direksi agar:
 - 1) Meningkatkan penerapan manajemen risiko baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan, dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam penilaian risiko Perusahaan, terutama yang terkait dengan perubahan lingkungan eksternal.
 - 2) Mempercepat penyelesaian permasalahan hukum, terutama yang bersifat non-litigasi untuk memberi kepastian terhadap kegiatan usaha Perseroan.
 - 3) Mengkaji terhadap Anak Perusahaan yang kelangsungan usahanya terganggu (*going concern*).
 - 4) Mempercepat implementasi sistem informasi yang mendukung operasional Perusahaan dan meningkatkan *maturity level* sistem informasi yang ada.
- c. Judicial Review on the Tax Appeal Ruling at the Supreme Court.
 - d. Changes in organizational structure at the Head Office and Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - e. Changes in KPI and KPI targets.
 - f. Plan of acquisition of shares of PT PP Properti Tbk and PT CTP.
 - g. Plan of divestment of shares of PT CTP.
 - h. Development of information system to support company operations.
2. For the implementation of the 2021 RKAP, the Board of Commissioners recommended:
 - a. To achieve the Company's profit target for 2021, the Board of Directors shall:
 - 1) Strive for cost efficiency, especially costs that are under management control, and aim increased costs at accelerating revenues increase (*effectiveness cost*), as a measure to anticipate ongoing Covid-19 pandemic.
 - 2) Increase revenues by using capacity that is still not optimally utilized.
 - 3) Increase the Company's market share by seeking new opportunities outside of the Company's regular business.
 - 4) Make investments that can increase the Company's revenues in the short and long term.
 - 5) Implement proper tax planning including its risk mitigation.
 - b. To improve the performance of the Company, the Board of Directors shall:
 - 1) Improve risk management implementation at the Head Office, Branch Offices, and Subsidiaries by increasing the human capital capacity in assessing the Company's risks, especially those related to changes in the external environment.
 - 2) Accelerate the resolution of legal issues, especially non-litigations, to ascertain the Company's business activities.
 - 3) Review Subsidiaries with disrupted business continuity (*going concern*).
 - 4) Accelerate the implementation of information system that support the Company's operations and increase the maturity level of existing information system.



- 5) Segera mengimplementasikan Pasar Digital UMKM sehingga dapat *live* transaksi pada Triwulan II/2021.
 - 6) Selalu menjaga tingkat kesehatan Perusahaan yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN.
- c. Dalam rangka peningkatan kinerja Anak Perusahaan, Direksi agar melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang lebih baik, serta mempercepat pelaksanaan restrukturisasi Anak Perusahaan yang berkinerja kurang baik.
- d. Direksi agar berupaya merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengarahkan penggunaan dana-dana tersebut sesuai tujuan Perseroan.
- 5) Immediately implement the MSME Digital Market to enable live transactions in Quarter II/2021.
 - 6) Maintain the Company soundness level based on the guidelines set by the Ministry of SOEs.
- c. To improve the performance of Subsidiaries, the Board of Directors shall carry out better coordination, guidance, and supervision, as well as accelerate the restructuring of underperforming subsidiaries.
- d. Strive to realize the distribution of funds for the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) in accordance with the targets set and direct the use of these funds according to the Company's objectives.

Evaluasi Pelaksanaan RKAP Tahun 2020 dan Membuat Tanggapan Dewan Komisaris tentang Realisasi Triwulan I, II dan III Disampaikan ke Pemegang Saham

Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2020, antara lain melalui:

1. Pembahasan kinerja Perseroan bulanan, melalui rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan telaahan dan menyusun tanggapan atas kinerja triwulanan Perseroan.

Tanggapan triwulanan telah disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Pemegang Saham melalui surat sebagai berikut:

1. Tanggapan atas kinerja Triwulan I melalui Surat No. 32/DK/PI.II/VI-2020 tanggal 3 Juni 2020.
2. Tanggapan atas kinerja Triwulan II (Semester I) melalui Surat No. 53/DK/PI.II/VIII-2020 tanggal 12 Agustus 2020.
3. Tanggapan atas kinerja Triwulan III melalui Surat No. 76/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 11 November 2020.

Dalam tanggapan tersebut disampaikan hasil evaluasi Dewan Komisaris beserta arahan untuk peningkatan kinerja.

Evaluation of the 2020 RKAP Implementation and Preparing Responses to the Board of Commissioners regarding the Realization of Quarters I, II and III Submitted to Shareholders

The Board of Commissioners evaluates the implementation of the 2020 RKAP, including through:

1. Monthly discussion of the Company's performance, through coordination meetings of the Board of Commissioners and Directors.
2. Reviewing and preparing responses to the Company's quarterly performance.

Quarterly responses have been submitted to the Board of Directors and forwarded to the Shareholders via the following letters:

1. Responses to the performance of Quarter I through Letter No. 32/DK/PI.II/VI-2020 dated June 3, 2020.
2. Responses to the performance of Quarter II (Semester I) through Letter No. 53/DK/PI.II/VIII-2020 dated August 12, 2020.
3. Responses to the performance of Quarter III through Letter No. 76/DK/PI.II/XI-2020 dated November 11, 2020.

In the response, the results of the evaluation of the Board of Commissioners and directions for performance improvement were presented.

Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019

Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019 disampaikan melalui Surat No. 35/DK/Pl.II/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020. Beberapa pendapat dan saran Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat tersebut antara lain:

1. Dari sisi profitabilitas, laba tahun 2019 tidak dapat mencapai target dalam RKAP. Memperhatikan kondisi tersebut, Dewan Komisaris meminta agar Direksi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan optimalisasi usaha eksisting serta pengembangan usaha baru kepelabuhanan dan pendukungnya sehingga pendapatan dari kegiatan usaha pokok dapat terus meningkat.
 - b. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk meningkatkan pendapatan serta melakukan efisiensi biaya perusahaan.
 - c. Meningkatkan optimalisasi kinerja anak perusahaan, melalui perluasan pangsa pasar serta meningkatkan kemandirian, sehingga tidak bergantung pada kegiatan usaha di induk perusahaan.
 - d. Meningkatkan pendapatan dari kegiatan operasional Cabang Perusahaan melalui perluasan pangsa pasar dan mempertahankan pelanggan eksisting agar tidak berpindah ke operator lain.
 - e. Memastikan implementasi *roadmap* teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya digitalisasi pada *back office* dengan penerapan ERP agar dapat berjalan secara komprehensif di semua level Perusahaan.
 - f. Meningkatkan mutu pelayanan melalui percepatan implementasi program-program yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan antara lain melalui penyediaan *CFS Center*, *DO Online*, *Auto Gate System*, dan Pengembangan *Digital Port* baik di kantor pusat, cabang, maupun anak perusahaan.
 - g. Memperbaiki perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga ke arah yang lebih menguntungkan Perusahaan dan membuka kemungkinan dikelola sendiri apabila perjanjian telah berakhir.
 - h. Melakukan pengelolaan perpajakan dengan optimal melalui *tax planning* yang baik.
2. Realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp3,44 triliun atau terserap sebesar 28,73 persen dari RKAP sebesar Rp11,99 triliun. Memperhatikan kondisi tersebut, Dewan Komisaris meminta agar Direksi melakukan hal-hal sebagai berikut:

Prepare Responses to the 2019 Financial Accountability Report

The response of the Board of Commissioners to the Financial Accountability Report for the 2019 Fiscal Year was submitted through Letter No. 35/DK/Pl.II/VI-2020 dated June 17, 2020. Some of the opinions and suggestions of the Board of Commissioners conveyed through the letter included:

1. In terms of profitability, profit in 2019 could not reach the target in the RKAP. Therefore, the Board of Commissioners requests that the Board of Directors take the following actions:
 - a. Optimizing existing businesses as well as developing new port businesses and their backing to ensure that income from main business activities can continue to increase.
 - b. Increase the optimization of the use of company assets to increase revenue and perform cost efficiency of the company.
 - c. Increasing the optimization of the performance of subsidiaries, through expanding market share and increasing independence, so that they do not depend on the business activities of the parent company.
 - d. Increase revenue from operational activities of the Company's Branches through expanding market share and retaining existing customers from switching to other operators.
 - e. Ensure the implementation of the information technology roadmap in the company's operational activities, especially digitization in the back office with the implementation of ERP so that it can run comprehensively at all levels of the Company.
 - f. Improving the quality of service by accelerating the implementation of programs oriented towards improving services to customers, among others through the provision of CFS Center, DO Online, Auto Gate System, and Digital Port Development at the head office, branches, and subsidiaries
 - g. Improve cooperation agreements with third parties in a direction that is more profitable for the Company and opens up the possibility of self-management when the agreement has expired.
 - h. Carry out optimal tax management through good tax planning.
2. Realization of investment in 2019 was Rp3.44 trillion or absorbed by 28.73 percent of the RKAP of Rp11.99 trillion. Taking into account these conditions, the Board of Commissioners requests that the Board of Directors take the following actions:



- a. Mempercepat pelaksanaan investasi khususnya yang berada di bawah kendali penuh Perusahaan, antara lain investasi *non* strategis.
 - b. Mempercepat penerapan SOP pengadaan barang dan jasa serta penerapan *e-procurement* yang dapat mendukung pelaksanaan investasi Perseroan.
 - c. Memperbaiki proses bisnis pengambilan keputusan pelaksanaan investasi dengan memperkuat *feasibility study* dan pemetaan risikonya.
 - d. Memperbaiki sistem manajemen proyek dengan pengawasan yang cukup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menanganinya.
3. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan baik oleh pemeriksa internal dan eksternal yang bersifat berulang. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi meminta komitmen dari seluruh pimpinan unit untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut dan menerapkan *reward and punishment* yang dapat mendorong percepatan penyelesaiannya.

Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan di Perseroan, beberapa hal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain:

1. *Monitoring* dalam tindakan Direksi, seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, penghapusbukuan aset, dan kerja sama aset.
2. Menyampaikan surat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai GCG, antara lain melalui Surat Nomor 75/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 11 November 2020.

Penilaian penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2020 dilakukan secara *self assessment*, dengan didampingi oleh pihak eksternal, dengan capaian skor sebesar 98,73 dari skor maksimal 100,00 dan termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Terdapat beberapa *Area of Improvement* (AoI) yang harus dipenuhi baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Tindak lanjut AoI tersebut dipantau oleh Dewan Komisaris, serta surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Seluruh AoI Dewan Komisaris yang perlu ditindaklanjuti pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris pada tahun ini.

Supervision of the Implementation of Good Corporate Governance Principles

To ensure that the principles of good corporate governance are applied in the Company, several things have been carried out by the Board of Commissioners, including:

1. Monitoring the actions of the Board of Directors, such as the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, write-offs of assets, and asset cooperation.
2. Submitting a letter of direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors regarding GCG, through Letter Number 75/DK/PI.II/XI-2020 dated November 11, 2020.

The assessment of the implementation of good corporate governance principles in 2020 was carried out by self-assessment, accompanied by external parties, with an achievement score of 98.73 out of a maximum score of 100.00 under the category "Very Good". There are several Areas of Improvement (AoI) that must be fulfilled by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders. The AoI follow-up is monitored by the Board of Commissioners, as well as the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors. All AoI of the Board of Commissioners that needed to be followed up in the previous year have been followed up by the Board of Commissioners this year.

Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi telah dilaksanakan yaitu melalui tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan tahun buku 2020 serta tanggapan kinerja Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan I, II, dan III Tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi KPI Direksi sebesar 103,43 dari skor maksimal sebesar 100,00. Dari pencapaian KPI tersebut, seluruh perspektif yang digunakan dalam kriteria KPI, yaitu Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta, berhasil mencapai target.

Apabila di-breakdown untuk tiap indikator kinerja dalam 1 perspektif, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu KPI PKBL. Hal tersebut dikarenakan oleh rendahnya efektivitas Program Kemitraan dan Kolektabilitas Dana Program Kemitraan akibat penyaluran hibah kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang ditunda oleh Kementerian BUMN serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beralihnya status pinjaman mitra binaan dari lancar menjadi diragukan.

Tanggapan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggapan atas remunerasi Komisaris dan Direksi tahun 2020 telah dilakukan melalui analisis dan pembahasan atas usulan dari Direksi yang disertai dengan kajian dari konsultan independen atas penetapan gaji tahun 2020 dan tantiem tahun buku 2019. Berdasarkan hasil analisa tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas penetapan remunerasi melalui Surat Dewan Komisaris No. 35/DK/PI.II/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020. Usulan tersebut berdasarkan hasil kajian konsultan yang telah mempertimbangkan:

1. Pencapaian kinerja Perseroan tahun 2019;
2. Hasil *benchmarking* dengan BUMN lain dan pasar tenaga profesional;
3. Kemampuan keuangan Perseroan.

Pengawasan Kepatuhan Direksi terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memastikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik di Perseroan, beberapa hal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain:

Board of Directors Performance Evaluation

Evaluation of the Board of Directors performance has been carried out, namely through the response of the Board of Commissioners on the company's performance for the 2020 fiscal year and the response of the Board of Commissioners performance on the performance of Quarter I, II, and III of 2020. In 2020, the realization of the Board of Directors' KPI was 103.43 from a maximum score of 100.00. Based on the achievement of these KPIs, all the perspectives used in the KPI criteria, namely the Economic and Social Value Perspective for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development, succeeded in achieving the target.

If it is described for each performance indicator in 1 perspective, there is 1 performance indicator that is not achieved, namely the PKBL KPI. This is due to the low effectiveness of the Partnership Program and the Collectability of Partnership Program Funds due to the distribution of grants to PT Permodalan Nasional Madani (Persero) which was postponed by the Ministry of SOEs as well as the Covid-19 pandemic which caused the transfer of the loan status of fostered partners from expeditious to doubtful.

Response to the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The response to the remuneration of the Commissioners and Directors in 2020 has been carried out through analysis and discussion of the proposals from the Board of Directors accompanied by a study from an independent consultant on the determination of salaries for 2020 and bonuses for the 2019 fiscal year. Based on the results of the analysis, the Board of Commissioners has provided recommendations on the determination of remuneration through the Board of Commissioners Letter No. 35/DK/PI.II/VI-2020 dated June 17, 2020. The proposal is based on the results of a consultant study that has considered:

1. Achievement of the Company's performance in 2019;
2. Benchmarking results with other SOEs and the professional labor market;
3. The Company's financial capability.

Supervision of Compliance of the Board of Directors with Law and Legislation

To ensure that the legal provisions and laws and regulations are implemented properly in the Company, several things have been carried out by the Board of Commissioners, including:



1. Melakukan telaah atas laporan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Direksi secara berkala.
 2. Melakukan pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur SDM maupun rapat bersama antara Komisaris dengan Direksi, yang membahas mengenai permasalahan kepegawaian dan tuntutan masyarakat dan penyampaian perkembangan permasalahan tentang hukum di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 3. *Monitoring* dalam kesesuaian tindakan Direksi dengan ketentuan, seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, penghapusbukuan aset, dan kerja sama aset.
 4. Menyampaikan surat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain Surat No. 83/DK/PI.II/XII-2020 tanggal 11 Desember 2020 terkait dengan rencana Amandemen Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT.
1. Reviewing reports on legal issues submitted by the Board of Directors on a regular basis.
 2. Conduct discussions in the internal meeting of the Board of Commissioners by inviting the Director of Human Resources as well as joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors, which discusses personnel issues and community demands and conveys the development of regulation issues in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 3. Monitoring the compliance of the actions of the Board of Directors with the provisions, such as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries, write-offs of assets, and asset cooperation.
 4. Submitting a letter of direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors, including Letter No. 83/DK/PI.II/XII-2020 dated December 11, 2020, related to the plan for the Amendment to the Agreement on the Granting of Authorization between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal

Selama tahun 2020, pengawasan atas tindak lanjut temuan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain melalui rapat koordinasi antara Komite Audit dengan SPI secara berkala (3 bulanan), kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan, dan rapat koordinasi dengan Direksi.

Pengawasan Pelaksanaan Audit Eksternal dan Mengajukan Usulan Auditor Eksternal

Terkait usulan auditor eksternal, pembahasan mengenai usulan auditor eksternal dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan mengenai tanggapan atas kinerja tahun buku 2019, sehingga pengajuan usulan dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham akan dilaksanakan bersamaan dengan tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Dalam proses pemilihan tersebut, Komite Audit melakukan telaahan atas kinerja KAP yang melaksanakan audit laporan keuangan tahun buku 2019. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat internal Dewan Komisaris, dan disepakati untuk mengusulkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun buku 2020. Penyampaian usulan kepada RUPS ditetapkan dalam Surat Dewan Komisaris No. 59/DK/PI.II/VIII-2020 tanggal 19 Agustus 2020. Usulan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan

Follow-up Monitoring of Internal Auditor Audit Results

During 2020, monitoring of the follow-up to these findings was carried out by the Board of Commissioners, among others through coordination meetings between the Audit Committee and SPI periodically (3 months), working visits to Port Branches, and coordination meetings with the Board of Directors.

Supervision of External Audit Implementation and Submitting Proposals to External Auditors

Regarding the external auditor's proposal, the discussion regarding the external auditor's proposal was carried out simultaneously with the discussion on the response to the 2019 fiscal year performance, so that the submission of the proposal from the Board of Commissioners to the Shareholders will be carried out in conjunction with the Board of Commissioners' response in the GMS Ratification of the 2019 Financial Statements. In the selection process, the Audit Committee conducted a review of the performance of the KAP that carried out an audit of the financial statements for the 2019 fiscal year. The results of the evaluation were discussed in an internal meeting of the Board of Commissioners, and it was agreed to re-propose KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the financial statements for the 2020 fiscal year. Submission of the proposal to the GMS is stipulated in the Board of Commissioners Letter No. 59/DK/PI.II/VIII-2020 dated August 19, 2020. Proposed appointment of

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dengan pertimbangan:

1. KAP dimaksud telah menerapkan standar *auditing* dan Standar Profesional Akuntan Publik yang memadai.
2. Berkoordinasi dengan baik dengan Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit dalam pelaksanaan audit.
3. Audit *fee* tidak melebihi audit *fee* tahun sebelumnya.
4. Dalam RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, RUPS menyetujui usulan Dewan Komisaris tersebut.

Memberikan Arahan Perubahan Lingkungan Bisnis yang Diperkirakan Akan Berdampak Besar pada Usaha dan Kinerja Perusahaan

Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris tahun 2020, beberapa arahan utama Dewan Komisaris terkait perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan, antara lain:

1. Tindak lanjut atas Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315 MBU/12/2019, sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 04/DK/PI.III-2020 tanggal 22 Januari 2020. Hal ini didasarkan pada adanya surat Menteri dimaksud agar Direksi melakukan *review* dan evaluasi terhadap *going concern* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian.
2. Persetujuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 10/DK/PI.III-2020 tanggal 4 Maret 2020 dan No. 19/DK/PI.IV-2020 tanggal 8 April 2020. Hal ini dalam rangka mendukung tercapainya realisasi investasi di Perseroan dengan tetap disertai dengan mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian.
3. Tanggapan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat, sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 21/DK/PI.IV-2020 tanggal 22 April 2020 dan No. 46/DK/PI.VII-2020 tanggal 22 Juli 2020. Hal ini didasari bahwa perlu adanya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program for 2020 Fiscal 2020, taking into account:

1. The KAP in question has implemented adequate auditing standards and Professional Standards of Public Accountants.
2. Coordinate well with the Internal Audit Unit and the Audit Committee in the implementation of the audit.
3. The audit fee does not exceed the previous year's audit fee.
4. In the GMS for the 2019 Fiscal Year Annual Report, the GMS approved the proposal from the Board of Commissioners.

Provide Directions on Changes in the Business Environment Expected to Have a Major Impact on the Company's Business and Performance

Based on the evaluation of the Board of Commissioners in 2020, some of the main directions of the Board of Commissioners regarding changes in the business environment that are expected to have a major impact on the company's business and performance, include:

1. Follow-up on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-315 MBU/12/2019, in accordance with the Letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors No. 04/DK/PI.III-2020 dated January 22, 2020. This is based on the Minister's letter instructing the Board of Directors to review and evaluate the going concern of Subsidiaries and Joint Ventures who are underperforming and make the best decisions based on the assessment.
2. Approval of Guidelines for the Procurement of Goods and Services, in accordance with the Letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors No. 10/DK/PI.III-2020 dated March 4, 2020 and No. 19/DK/PI.IV-2020 dated April 8, 2020. This is in order to support the realization of investment in the Company while still being accompanied by risk mitigation and the principle of prudence.
3. Responses to the Proposed Changes in the Head Office Organizational Structure, in accordance with the Letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors No. 21/DK/PI.IV-2020 dated April 22, 2020 and No. 46/DK/PI.VII-2020 dated July 22, 2020. This is based on the need to adjust the organizational structure in accordance with the direction of the Ministry of SOEs.



4. Penyampaian kajian dan arahan mengenai upaya optimalisasi lahan. Kajian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite tersebut didasari pada kondisi pemanfaatan lahan yang relatif masih belum optimal di Perseroan.

Evaluasi dan Menyampaikan Arahan tentang Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier Pekerja, Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK, Pengadaan dan Pelaksanaan, dan Kebijakan Mutu Pelayanan dan Pelaksanaan Perusahaan

1. Arahan mengenai penguatan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dan Manajemen Risiko, antara lain adalah surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 70/DK/PI.II/X-2020 tanggal 7 Oktober 2020 terkait dengan Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko (MR) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan persetujuan kerja sama-kerja sama yang dilakukan oleh Perseroan.
2. Arahan mengenai teknologi informasi dilakukan melalui pembahasan dalam rapat koordinasi bulanan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dalam forum rakernas, maupun melalui surat tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi. Arahan Dewan Komisaris khususnya adalah agar Direksi mempercepat pelaksanaan *masterplan* teknologi informasi di Perseroan, khususnya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, serta dalam kegiatan operasional khususnya untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan dan selanjutnya dilakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasinya.
3. Arahan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier Pekerja antara lain dilakukan melalui pembahasan dalam rapat koordinasi bulanan antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun melalui surat tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain melalui Surat Dewan Komisaris No. 65/DK/PI.II/IX-2020 tanggal 30 September 2020 terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dewan Komisaris juga telah melakukan *interview* kepada *talent* di Perseroan sekaligus membuat Surat Usulan *Top Talent* BUMN No. 22/DK/PI.II/IV-2020 tanggal 30 April 2020 kepada Kementerian BUMN.

4. Submission of reviews and directions regarding land optimization efforts. The review conducted by the Board of Commissioners through the Committee is based on the condition of land use which is still relatively not optimal in the Company.

Evaluation and Delivering Directions on Strengthening Internal Control Systems, Risk Management, Information Technology, Policy and Implementation of Employee Career Development, Accounting Policies and Preparation of Financial Statements in accordance with PSAK, Procurement and Implementation, and Service Quality Policies and Company Implementation

1. Directions regarding strengthening the Company's Internal Control System and Risk Management, among others are the letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors No. 70/DK/PI.II/X-2020 dated October 7, 2020 related to the Strengthening of the Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management (MR) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the approval of the cooperation carried out by the Company.
2. Directions regarding information technology are carried out through discussions in monthly coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, in national working meeting forums, as well as through written letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors. The direction of the Board of Commissioners in particular is for the Board of Directors to accelerate the implementation of the information technology master plan in the Company, especially those related to the preparation of financial reports, as well as in operational activities in particular to accelerate service to customers and subsequently conduct periodic evaluations of its implementation.
3. Directions regarding policies and implementation of employee career development are carried out through discussions in monthly coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as through written letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors, including through Board of Commissioners Letter No. 65/DK/PI.II/IX-2020 dated September 30, 2020 related to the follow-up to the recommendations of the BPK examination results. The Board of Commissioners has also conducted interviews with the talents in the Company as well as made the SOE Top Talent Proposal Letter No. 22/DK/PI.II/IV-2020 dated April 30, 2020 to the Ministry of SOEs.

4. Arahan mengenai penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK dilakukan dalam rapat koordinasi bulanan antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun surat tanggapan untuk Laporan Kinerja Keuangan pada tiap triwulan.
5. Arahan mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya dalam rapat koordinasi bulanan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, maupun surat, antara lain Surat Dewan Komisaris No. 10/DK/PI.III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan No. 19/DK/PI.IV/2020 tanggal 8 April 2020.
6. Arahan mengenai kebijakan mutu pelayanan dan pelaksanaan dilaksanakan melalui surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan, serta dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, di mana pada pokoknya Dewan Komisaris meminta agar manajemen dapat terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan, serta percepatan inisiatif strategis dalam rangka pelayanan yang lebih baik. Adapun melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 79/DK/PI.XI-2020 tanggal 18 November 2020 tentang Persetujuan atas Implementasi Sistem Anti Penyuapan.

Evaluasi Usulan/Rekomendasi kepada RUPS tentang Calon Anggota Direksi (Apabila Diperlukan), serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan

Rekomendasi calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris, dimana pada tahun 2020 telah disampaikan sebanyak 17 surat.

Penyampaian bakal calon Direksi PT Pelindo II (Persero), maupun rekomendasi calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, serta hasil pembahasan bersama Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung.

4. Directions regarding the application of accounting policies and preparation of financial statements in accordance with PSAK are carried out in monthly coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as in response letters for quarterly Financial Performance Reports.
5. Directions regarding policies for the procurement of goods and services and their implementation in monthly coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as letters, including Letter of the Board of Commissioners No. 10/DK/PI.III-2020 dated March 4, 2020 and No. 19/DK/PI.IV-2020 dated April 8, 2020.
6. Directions regarding service quality policies and implementation are carried out through a response letter from the Board of Commissioners on Quarterly performance, as well as in Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, where in essence the Board of Commissioners requests that management can continue to make continuous improvements in service delivery to customers, as well as accelerate strategic initiatives in the context of better services. As for the letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors No. 79/DK/PI.XI-2020 dated November 18, 2020 concerning Approval of the Implementation of the Anti-Bribery System.

Evaluation of Proposals/Recommendations to the GMS regarding Candidates for Members of the Board of Directors (If Necessary), as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries

Recommendations for candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures are submitted through the Letter of the Board of Commissioners, of which in 2020 17 letters have been submitted.

Submission of candidates for the Board of Directors of PT Pelindo II (Persero), as well as recommendations for candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary/Joint Venture is carried out based on the results of the evaluation by the Nomination and Remuneration Committee, as well as the results of discussions with the Board of Commissioners with the Supporting Organs.



Memberikan Tanggapan terhadap Hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menerima usulan rekomendasi dan persetujuan dari Direksi. Kajian atas usulan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Anggota Komite dan dibahas dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan Komite. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan tersebut, Dewan Komisaris telah menetapkan surat rekomendasi/tanggapan/persetujuan, antara lain mengenai tindakan Direksi sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset. Usulan penghapusbukuan aset pada tahun 2020 sebagian besar merupakan aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Perseroan.
2. Kerja sama, khususnya kerja sama pemanfaatan lahan HPL, baik dengan Anak Perusahaan maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset dan pendapatan bagi Perseroan.
3. Tanggapan atas Rencana Akuisisi 49 persen saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS.
4. Tanggapan Divestasi PT RSP ke dalam *Holding* Rumah Sakit.
5. Rekomendasi pengangkatan calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
6. Rekomendasi usulan bakal calon Direksi PT Pelindo II (Persero).
7. Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
8. Laporan hasil kunjungan ke Cabang.
9. Tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja triwulanan dan tahunan.
10. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP.
11. Rencana kerja Dewan Komisaris.
12. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan tahunan.
13. Tanggapan atas Usulan Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus.
14. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perseroan.
15. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
16. Arahan terkait Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko (MR) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
17. Tanggapan atas Rencana Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT.

Provide Feedback on Matters related to the Duties of the Board of Commissioners in Company Management

During 2020, the Board of Commissioners has received proposed recommendations and approvals from the Board of Directors. The review of the proposal is carried out by the Board of Commissioners assisted by Committee Members and discussed in the Board of Commissioners' internal meeting with the Committee. Based on the results of the review and discussion, the Board of Commissioners has issued a letter of recommendation/response/approval, among others regarding the following actions of the Board of Directors:

1. Write-off and transfer of assets. The proposed write-off of assets in 2020 are mostly assets that have been damaged and are no longer used in the Company's operational activities.
2. Cooperation, especially cooperation in the use of HPL land, both with Subsidiaries and with third parties. This collaboration aims to increase the optimization of assets and revenues for the Company.
3. Response to the Proposed Acquisition of PT Multimedia Nusantara's 49 percent shares in PT ILCS.
4. Response to PT RSP's Divestment into Hospital Holding.
5. Recommendations for the appointment of candidates for the Board of Directors/Board of Commissioners of Subsidiaries.
6. Recommendations for candidates for the Board of Directors of PT Pelindo II (Persero).
7. Proposed appointment of a Public Accounting Firm.
8. Report on the results of visits to the Branch.
9. Board of Commissioners' response to quarterly and annual performance.
10. The Board of Commissioners' response to the RKAP.
11. Board of Commissioners work plan.
12. Quarter and annual reports the Board of Commissioners.
13. Response to the Proposal for the Distribution of Partnership Program Funds through Special SOEs.
14. Approval of Changes in the Company's Organizational Structure.
15. Follow-up Monitoring of BPK Inspection Results Recommendations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
16. Directions related to Strengthening the Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management (MR) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
17. Response to the Amendment Plan for the Cooperation Agreement for the Granting of Authorization between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT.

18. Tanggapan atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
19. Tanggapan Tertulis atas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 PT Pelindo II (Persero).

Selain itu, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan, menyusun telaahan, pendapat, dan saran atas beberapa area sebagai berikut:

1. Pembahasan Perkembangan Pengelolaan Perseroan.

Pembahasan perkembangan pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi, dimana salah satu agenda rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan setiap bulan adalah laporan kinerja bulan sebelumnya, serta laporan masing-masing Direktur atas berbagai permasalahan strategis yang dihadapi.

2. Pengelolaan PKBL/CSR

Dewan Komisaris merekomendasikan usulan penyaluran dana Program Kemitraan dengan metode hibah kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai BUMN Khusus melalui Surat No. 48/DK/PI.II/VII-2020 tanggal 29 Juli 2020. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas penyaluran dana PKBL, antara lain melalui kunjungan ke lapangan, untuk mengetahui realisasi dan kendala yang ditemui dan memberikan arahan penyelesaiannya.

3. Pengelolaan Anak Perusahaan

Pengawasan terhadap pengelolaan Anak Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris bersamaan dengan pembahasan kinerja dan pengelolaan perusahaan secara konsolidasi, antara lain melalui rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta penelaahan laporan kinerja berkala manajemen. Selain itu, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa hal terkait dengan pengelolaan Anak Perusahaan, antara lain:

- Rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS.
- Tanggapan untuk Divestasi PT RSP ke dalam *Holding* Rumah Sakit.

18. Response to the proposed 2020 RKAP revision of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

19. Written Response to the Draft of the Company's 2020-2024 Long Term Plan of PT Pelindo II (Persero).

In addition, during 2020 the Board of Commissioners has conducted discussions, prepare reviews, opinions, and suggestions on the following areas:

1. Discussion on the Development of the Company's Management.

The discussion on the development of the Company's management is carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors, where one of the agenda for the coordination meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors which is held every month is the performance report of the previous month, as well as the report of each Director on various strategic problems faced.

2. PKBL/CSR Management

The Board of Commissioners recommends the proposed distribution of Partnership Program funds using the grant method to PT Permodalan Nasional Madani (Persero) as a Special SOE through Letter No. 48/DK/PI.II/VII-2020 dated July 29, 2020. In addition, the Board of Commissioners also supervises the distribution of PKBL funds, including through field visits, to find out the realization and obstacles encountered and provide direction for their resolution.

3. Subsidiary Management

Supervision of the management of Subsidiaries is carried out by the Board of Commissioners in conjunction with discussions on the performance and management of the company on a consolidated basis, among others through coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the review of management's periodic performance reports. In addition, in 2020 several matters have been carried out related to the management of Subsidiaries, including:

- Recommendation of the Board of Commissioners on the proposed appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries.
- Planned Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's shares in PT ILCS.
- Response to PT RSP's Divestment into Hospital Holding.



4. Rancangan Perubahan RJPP 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah Rancangan Perubahan RJPP 2020-2024 melalui pembahasan-pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris, pertemuan Komite Dewan Komisaris dengan Manajemen, serta rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari telaah tersebut, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan masukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Memperhatikan perubahan situasi eksternal terkait dengan *logistic ecosystem* yang berpengaruh pada visi dan misi Perseroan.
- Mengantisipasi pengaruh rencana pembentukan *cluster* pelabuhan terhadap hak dan kewajiban Perseroan.
- Memastikan rencana transformasi dan restrukturisasi Anak Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi Anak Perusahaan.
- Memprioritaskan kebijakan Perusahaan dalam investasi dari tahun 2020-2024 pada investasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kinerja Perseroan.
- Memperhatikan strategi kluster laut Kementerian BUMN, penyesuaian *strategic initiative* Perusahaan dengan Lima Program Prioritas Kementerian BUMN.
- Menggunakan asumsi yang rasional berdasarkan *update* kondisi internal dan eksternal untuk menyusun proyeksi dalam penyusunan proyeksi operasi dan keuangan sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Kunjungan Kerja ke Cabang-cabang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan kerja ke Cabang-Cabang baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu seperti pengecekan fisik aset yang akan dihapusbukukan dan dipindahtanggankan. Untuk Dewan Komisaris, kunjungan dilaksanakan sebagai berikut:

4. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2020-2024 RJPP Amendment Draft

The Board of Commissioners has researched and reviewed the Draft Amendment to the 2020-2024 RJPP through discussions in internal meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners' Committees with Management, and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors. Accordingly, the Board of Commissioners provides opinions and input on the following matters:

- Paying attention to changes in external situations related to the logistics ecosystem that affect the Company's vision and mission.
- Anticipating the effect of the planned port cluster formation on the rights and obligations of the Company.
- Ensuring the transformation and restructuring plan of the Subsidiaries can improve the performance and contribution of the Subsidiaries.
- Prioritizing the Company's policies in investment from 2020-2024 on investments that have a direct impact on increasing the Company's revenue and performance.
- Taking into account the marine cluster strategy of the Ministry of SOEs, aligning the Company's strategic initiatives with the Five Priority Programs of the Ministry of SOEs.
- Using rational assumptions based on updated internal and external conditions to prepare projections in the preparation of operational and financial projections as a result of the Covid-19 Pandemic.

Working Visit of the Board of Commissioners

Working Visits to Branches for the Implementation of the Work Program of the Board of Commissioners in 2020

During 2020, the Board of Commissioners and the Supporting Organs of the Board of Commissioners have carried out working visits to the Branches both specifically regarding performance, as well as visits in the context of certain activities such as physical checking of assets that will be written off and transferred. For the Board of Commissioners, visits are carried out as follows:

No.	Nama dan Jabatan / Name and Position	Tanggal / Date	Tujuan Kunjungan Kerja / Work Visit Destination	Kegiatan / Activity
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Muhdi Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) • Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	24 Februari 2020 / February 24, 2020	Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	Melaksanakan cek fisik penghapusan aset di Cabang Pelabuhan Pontianak / Physical examination for asset write-off at Pontianak Port Branch

No.	Nama dan Jabatan / Name and Position	Tanggal / Date	Tujuan Kunjungan Kerja / Work Visit Destination	Kegiatan / Activity
2.	<ul style="list-style-type: none"> Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	28 Februari 2020 / February 28, 2020	Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	Melaksanakan inventarisasi aset di Cabang Pelabuhan Banten pada tanggal 28 Februari 2020 / Asset inventory at Banten Port Branch on February 28, 2020
3.	<ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) Djadmiko (Komisaris / Commissioner) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) R. Nurhidayat (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member) Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) Aries Fikirman (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	25-26 Juni 2020 / June 25-26, 2020	Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Harbor Branch	Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk <i>monitoring</i> dan evaluasi Cabang Pelabuhan Cirebon tanggal 25 s.d 26 Juni 2020 / Implementing the 2020 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Cirebon Port Branch from June 25 to 26, 2020
4.	<ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) Kushari Suprianto (Komisaris / Commissioner) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) R. Nurhidayat (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member) Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	6 Juli 2020 / July 6, 2020	Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk <i>monitoring</i> dan evaluasi Cabang Pelabuhan Banten tanggal 6 Juli 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Banten Port Branch on July 6, 2020
5.	<ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner) Djadmiko (Komisaris / Commissioner) Kushari Suprianto (Komisaris / Commissioner) D. Andhi Nirwanto (Komisaris / Commissioner) Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) R. Nurhidayat (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member) Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) Aries Fikirman (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	8 Juli 2020 / July 8, 2020	Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Harbor Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk <i>monitoring</i> dan evaluasi Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 8 Juli 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Sunda Kelapa Port Branch on July 8, 2020
6.	Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member)	9 Juli 2020 / July 9, 2020	Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Pontianak / Write-off of Fixed Assets at Pontianak Port Branch
7.	<ul style="list-style-type: none"> Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) 	27 Juli 2020 / July 27, 2020	Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Panjang / Write-off of Fixed Assets at Panjang Port Branch
8.	<ul style="list-style-type: none"> Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) 	3 Agustus 2020 / August 3, 2020	Cabang Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Write-off of Fixed Assets at Tanjung Pandan Port Branch
9.	Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member)	6 Agustus 2020 / August 6, 2020	Cabang Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch	Melaksanakan Penghapusan Aktiva Tetap Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Write-off of Fixed Assets at Pangkal Balam Port Branch
10.	<ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner) Djadmiko (Komisaris / Commissioner) Kushari Suprianto (Komisaris / Commissioner) melalui <i>Video Conference</i> / via Video Conference D. Andhi Nirwanto (Komisaris / Commissioner) Muhamad Al Fajar (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) Pionir Harapan (Anggota Komite Audit / Audit Committee Member) R. Nurhidayat (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member) Rakhmat Adi Santosa (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) Aries Fikirman (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Member) 	6 Agustus 2020 / August 6, 2020	Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	Melaksanakan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk <i>monitoring</i> dan evaluasi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 6 Agustus 2020 / Implementing the 2020 Work Plan of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for monitoring and evaluation of Tanjung Priok Port Branch on August 6, 2020



Laporan Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, laporan yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemegang Saham yaitu:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019 melalui Surat Nomor 26/DK/PI.II/IV-2020 tanggal 30 April 2020.
2. Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 31/DK/PI.II/VI-2020 tanggal 3 Juni 2020.
3. Laporan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 56/DK/PI.II/VIII-2020 tanggal 14 Agustus 2020.
4. Laporan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui surat Nomor 78/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 11 November 2020.

Penugasan Khusus

Selama tahun 2020, tidak terdapat penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam risalah rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;
4. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN;
5. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*;
6. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung;

Board of Commissioners Report

In 2020, reports that have been prepared and submitted to Shareholders are:

1. Board of Commissioners 2019 Supervision Report through Letter Number 26/DK/PI.II/IV-2020 dated April 30, 2020.
2. Board of Commissioners Quarter I of 2020 Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 31/DK/PI.II/VI-2020 dated June 3, 2020.
3. Board of Commissioners Quarter II of 2020 Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 56/DK/PI.II/VIII-2020 dated August 14, 2020.
4. Board of Commissioners Quarter III of 2020 Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through letter Number 78/DK/PI.II/XI-2020 dated November 11, 2020.

Special Assignment

During 2020, there were no special assignments carried out by the Board of Commissioners.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners performance assessment is based on Decree of the Board of Commissioners that is evaluated periodically under the following conditions:

1. Board of Commissioners has a policy regarding Board of Commissioners performance measurement and assessment;
2. Board of Commissioners sets out the Indicators for Performance Achievement that is approved by the GMS every year;
3. Board of Commissioners or organs of Board of Commissioners evaluates Board of Commissioners performance, and submits the results in Board of Commissioners meeting minutes and includes them in the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners;
4. The GMS shall establish Key Performance Indicators for Board of Commissioners to measure the success of their duties and responsibilities based on proposals from Board of Commissioners, and submits quarterly reports on the realization development to the Shareholder/Minister of SOEs;
5. Board of Commissioners performance assessments are carried out using a self-assessment method;
6. Board of Commissioners performance assessment results will be included in the annual report and informed to the GMS with supporting data/evidence;

7. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KPI yang ditetapkan;
8. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan mengusulkan capaiannya berdasarkan data dan masukan dari setiap komite penunjang Dewan Komisaris dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dirapatkan di tingkat Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perseroan yang dituangkan dalam pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang lalu.

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris telah menyampaikan Usulan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 114/DK/PI.II/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan telah ditetapkan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menetapkan KPI Individual Anggota-Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 05/KEP-DK/PI.III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan *Key Performance Indicators* Individual Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 2020.

7. Board of Commissioners performance assessment is determined based on the established KPI;
8. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for preparing the data needed for evaluating and proposing the achievements based on data and input from each supporting committee of the Board of Commissioners and proposes them to Board of Commissioners to be discussed at Commissioner level.

Board of Commissioners Performance Assessment Procedure

Board of Commissioners performance is evaluated by the Shareholder in the GMS based on the Company's performance as set forth in the validation of the Company's Financial Statements by the GMS. The performance assessment of the Board of Commissioners in the GMS is reflected on the GMS resolutions that grant approval and validation of the Financial Statements including the Report of Board of Commissioners concerning the Company's supervisory duties for the past fiscal year.

The assessment refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Board of Commissioners has submitted the Proposal for Performance Indicators of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 114/DK/PI.II/X-2019 dated October 29, 2019 and have been established by the Shareholder at the 2020 RKAP Validation GMS.

In addition, the Board of Commissioners also determined the Individual KPI for Board of Commissioners members based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 05/KEP-DK/PI.III/2020 dated March 11, 2020 concerning the Determination of Individual Key Performance Indicators for Members of the Board of Commissioners PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020.



Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan;
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Sedangkan *Key Performance Indicators* (KPI) Individual adalah sebagai berikut:

1. KPI Umum
 - a. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris;
 - c. Kunjungan kerja Dewan Komisaris.
2. KPI Khusus
KPI Khusus ditetapkan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kategori penilaian KPI Individual Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. "Sangat Baik" apabila pencapaian KPI 100 -120 persen;
2. "Baik" apabila pencapaian KPI 85 - 99 persen;
3. "Kurang Baik" apabila pencapaian KPI 60 - 84 persen;
4. "Tidak Baik" apabila pencapaian KPI kurang dari 60 persen.

Pihak yang Melakukan Assessment

Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan Komisaris juga dapat melakukan penilaian sendiri atas kinerjanya, yang antara lain mencakup ketajaman pengawasan, kehadiran dalam rapat, pengetahuan bisnis, identifikasi risiko usaha dan implementasi GCG.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2020 dilakukan secara *self assessment* dengan tidak menghilangkan prinsip bahwa Keputusan Dewan Komisaris bersifat *Collective Collegial*. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) are as follows:

1. Contribution to the Company's performance achievement;
2. Timeliness of delivery of mandatory Board of Commissioners opinions and advice;
3. Contribution to GCG implementation;
4. Meetings and work visits of the Board of Commissioners;
5. Supervision and directives to Board of Directors on the Company's plans and policies;
6. Effectiveness of supporting activities of Board of Commissioners.

Individual Key Performance Indicators (KPI) include:

1. General KPI
 - a. Attendance rate at Board of Commissioners Meeting;
 - b. Participation in Board of Commissioners competency development program;
 - c. Board of Commissioners work visits.
2. Special KPI
Special KPI are determined based on the division of duties and functions of each member of Board of Commissioners.

Individual KPI assessment categories for Board of Commissioners are as follows:

1. "Excellent" when achieving KPI of 100 - 120 percent;
2. "Good" when achieving KPI of 85 - 99 percent;
3. "Poor" when achieving KPI of 60 - 84 percent;
4. "Very Poor" when achieving KPI of less than 60 percent.

Parties Conducting Assessment

In carrying out its main functions, Board of Commissioners may conduct its own performance assessment, which includes supervisory acumen, meeting attendance, business knowledge, business risk identification and GCG implementation.

Board of Commissioners performance assessment in 2019 was conducted in a self-assessment and collegial manner as part of the BOC's Supervisory Task Report. Implementation of duties and responsibilities has been planned at the beginning of each year in the Company's Work Plan and Budget/RKAP. At the end of the year, Board of Commissioners prepares a Supervisory Task Report submitted to the Shareholder at the AGMS for evaluation and approval.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS juga tercermin dari keputusan RUPS untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris atas aktivitas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Performance Assessment of Board of Commissioners in the AGMS is also reflected in the resolution of the AGMS to grant a full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to Board of Commissioners for supervisory activities carried out during the past Fiscal Year, provided that such action is neither a criminal act nor a violation of the provisions and applicable legal procedures.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil KPI Dewan Komisaris Tahun 2020

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan secara kolegal tercermin dari hasil KPI Dewan Komisaris Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Board of Commissioners KPI Results in 2020

The Board of Commissioners collegial performance assessment results are reflected on the Board of Commissioners KPI Results in 2020 as follows:

Hasil KPI Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners KPI Results in 2020

No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan. / Contribution to Company Performance Achievement.		10,00				10,34
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi. / Contribution to Board of Directors KPI realization.	Poin / Points	10,00	100	103,43	103%	10,34
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris. / Timeliness of delivery of mandatory Board of Commissioners opinions and advices.		20,00				24,00
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2020, Laporan Triwulanan 2020, dan Laporan Tahunan 2019. / Board of Commissioners' opinions and suggestions on 2020 RKAP, 2020 Quarterly Report, and 2019 Annual Report.	Hari / Days	5,00	30	10	120%	6,00
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri. / Response to Board of Directors actions that must be approved by the GMS/Minister.	Hari / Days	5,00	14	10	120%	6,00
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. / Response to Board of Directors actions that must be approved by Board of Commissioners.	Hari / Days	5,00	14	12	120%	6,00
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan. / Quarterly and annual report of Board of Commissioners.	Hari / Days	5,00	30	12	120%	6,00
3.	Kontribusi terhadap Penerapan GCG. / Contribution to GCG implementation.		10,00				9,62
	a. Kontribusi kualitas penerapan GCG. / Contribution to the quality of GCG Implementation.	Poin / Points	5,00	31,5	34,452	109%	5,47
	c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG Aspek Dewan Komisaris. / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners.	%	5,00	100	83	83%	4,15
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris. / Board of Commissioners meetings and work visits.		18,00				18,34
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris / Total Board of Commissioners internal meetings.	Jumlah / Total	6,00	12	44	120%	7,20
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi / Total Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings.	Jumlah / Total	6,00	12	12	100%	6,00



No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang / Board of Commissioners work visits to branches.	Jumlah / Total	6,00	7	6	86%	5,14
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan. / Supervision and directives to Board of Directors on the Company's plans and policies.	Jumlah / Total	14,00	7	7	100%	14,00
6.	Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris. / Effectiveness of Board of Commissioners supporting activities.		28,00				29,80
a.	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Board of Commissioners competency development.						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris. / Board of Commissioners competency development.	Pelaksanaan / Implementation	10,00	4	4	100%	10,00
b.	Efektivitas Organ Pendukung. / Supporting organs effectiveness.						
1)	Komite Audit / Audit Committee						
	a) Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit. / Audit Committee internal meetings.	Jumlah / Total	3,00	12	43	120%	3,60
	b) Laporan Penugasan Komite Audit. / Audit Committee duty report.	Laporan / Reports	3,00	4	4	100%	3,00
1)	Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR) / Risk Management Monitoring Committee (RMC)						
	a) Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR. / RMC internal meetings.	Jumlah / Total	3,00	12	19	120%	3,60
	b) Laporan Penugasan Komite PMR. / RMC duty report.	Laporan / Reports	3,00	4	4	100%	3,00
2)	Komite Nominasi dan Remunerasi (NR) / Nomination and Remuneration Committee (NRC)						
	a) Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR. / NRC internal meetings.	Jumlah / Total	3,00	12	20	120%	3,60
	b) Laporan Penugasan Komite NR. / NRC duty report.	Laporan / Reports	3,00	4	4	100%	3,00
Jumlah / Total			100,00				106,10

HASIL KPI INDIVIDUAL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Hasil penilaian kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tercermin dari hasil KPI Individual Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

INDIVIDUAL KPI RESULTS OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS IN 2020

The performance assessment results of each Board of Commissioners member are reflected on the Individual KPI results of Board of Commissioners members in 2020 as follows:

Hasil KPI Individual Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020

Individual KPI Results of Board of Commissioners Members in 2020

No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama/Komisaris Independen) / President Commissioner/Independent Commissioner)							
A.	KPI Umum / General KPI		40				45,4
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	48	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	1	100%	13
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	5	120%	15,6

No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
B. KPI Khusus / Special KPI			60				65,9
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	14	11	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	31,5	34,5	110%	22
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	100	100	100%	20
Total							111,3
Suaidi Marasabessy (Komisaris Independen / Independent Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				48,0
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	49	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	3	120%	15,6
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	3	120%	15,6
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	1	12	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	1	12	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	1	12	120%	24
Total							120,0
Djadmiko (Komisaris / Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				46,4
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	52	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	1	100%	13
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	4	120%	15,6
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	1	11	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	1	11	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	1	11	120%	24
Total							117,4
Montty Girianna (Komisaris / Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				32,4
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	56	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	2	120%	15,6
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	0	0%	0



No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	2	12	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	14	11	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	14	11	120%	24
Total							104,4
Kushari Suprianto (Komisaris / Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				48,0
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	58	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	2	120%	15,6
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	3	120%	15,6
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	2	12	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	14	11	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	14	11	120%	24
Total							120,0
D. Andhi Nirwanto (Komisaris / Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				45,4
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	59	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	3	120%	15,6
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	2	100%	13
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	2	12	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	14	11	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	14	11	120%	24
Total							117,4
R. Agus H. Purnomo (Komisaris / Commissioner)							
A. KPI Umum / General KPI			40				29,8
1.	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris / Attendance rate in Board of Commissioners meetings	Jumlah / Total	14	24	43	120%	16,8
2.	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris / Participation in Board of Commissioners competency development programs	Jumlah / Total	13	1	1	100%	13
3.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners work visits	Jumlah / Total	13	2	0	0%	0

No.	Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target / Target	Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor Capaian / Achievement Score
B. KPI Khusus / Special KPI			60				72,0
a.	Koordinasi atas Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi / Coordination of Board of Commissioners approval/recommendations for Board of Directors proposals	Hari Maksimal / Maximum Days	20	1	9	120%	24
b.	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target / Evaluation of GCG achievement concerning Board of Commissioners according to target	Poin GCG / GCG Points	20	1	9	120%	24
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG aspek Dewan Komisaris / Follow-up on recommendations for GCG assessment results concerning Board of Commissioners	%	20	1	9	120%	24
Total							101,8

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (tiga) Komite, yang meliputi:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu jumlah rapat Komite serta jumlah laporan Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI Dewan Komisaris di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100 persen dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120 persen.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit telah melaksanakan rapat internal sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE ASSESSMENT BASIS

In performing supervisory duty on the Company management, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners, which constitute 3 (three) committees:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; and
3. Risk Management Monitoring Committee.

In 2020, the Board of Commissioners assessed that the committees under the Board of Commissioners have performed their duties and responsibilities properly.

Performance evaluation of Committees under Board of Commissioners is part of Board of Commissioners KPI, in which the criteria is the number of Committee meetings and the number of Committee reports. Based on performance measurements in the Board of Commissioners KPI above, all Committees under the Board of Commissioners were able to achieve the targets set by KPI. All committees have carried out duties with 100 percent achievement and held meetings with 120 percent achievement.

Audit Committee Performance Assessment

The Audit Committee is a committee formed to assist the Board of Commissioners in supervising IPC management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

During 2020, the Audit Committee has carried out its duties properly. The basis of consideration is that the Audit Committee has held 33 (thirty-three) internal meetings and performed the following duties:



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. <i>Monitoring</i> audit laporan keuangan oleh KAP tahun buku 2019;2. Evaluasi kinerja dan pemilihan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2020;3. <i>Monitoring</i> audit laporan keuangan oleh KAP tahun buku 2020;4. Kunjungan kerja untuk cek fisik atas aset yang diusulkan untuk dihapuskan;5. Kunjungan kerja untuk evaluasi kinerja cabang bersama Dewan Komisaris;6. Penyusunan laporan tahunan Komite Audit;7. Tanggapan laporan manajemen tahun 2019;8. Tanggapan atas laporan manajemen triwulan I tahun 2020;9. Tanggapan atas laporan manajemen semester I tahun 2020;10. Tanggapan atas laporan manajemen triwulan III tahun 2020;11. Rapat koordinasi triwulan dengan SPI;12. <i>Seminar, workshop, pelatihan, dan study banding</i>;13. Rapat dengan Dewan Komisaris;14. Rapat internal Komite Audit. | <ol style="list-style-type: none">1. Monitoring of Financial Statements Audit by KAP for 2019 Fiscal Year;2. Performance Evaluation and KAP Selection for Audit of Financial Statements of 2020 Fiscal Year;3. Monitoring of Financial Statements Audit by KAP for 2020 Fiscal Year;4. Work visits for physical check of assets proposed for write-off;5. Work visits for branch performance evaluation with the Board of Commissioners;6. Preparation of Audit Committee annual report;7. Response to 2019 management report;8. Response to management report for Q1/2020;9. Response to management report for H1/2020;10. Response to management report for Q3/202011. Quarterly coordination meeting with SPI;12. Seminar, workshop, training, and comparative study;13. Meetings with Board of Commissioners;14. Audit Committee internal meetings |
|---|---|

Pembahasan lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit selanjutnya akan dibahas dalam sub pembahasan tersendiri, yakni pada halaman 624.

Details on the implementation of Audit Committee duties are discussed in a separate section on page 624.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to assist the Board of Commissioners in providing support to the Board of Commissioners in overseeing the implementation of Nomination and Remuneration policy for the Board of Directors, Management Team and employees.

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat internal 20 kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

During 2020, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties properly. The basis of consideration is that the Nomination and Remuneration Committee has held 20 internal meetings and performed the following duties:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan usulan atas kenaikan remunerasi manajemen tinggi;2. Memberikan usulan terkait program Top Talent BUMN;3. Memberikan pandangan terkait penempatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan serta perubahan penggantian pejabat Perseroan;4. Memberikan pandangan terkait implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. | <ol style="list-style-type: none">1. Provided recommendation on remuneration increase for top management;2. Provided recommendation on SOE Top Talent program;3. Provided opinion on the placement of Commissioners and Directors of Subsidiaries and changes to the Company's officials;4. Provided opinion on ISO 37001:2016 implementation at the Company. |
|--|--|

Pembahasan lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi selanjutnya akan dibahas dalam sub pembahasan tersendiri, yakni pada halaman 664.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan atau *Enterprise Risk Management* (ERM).

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat internal sebanyak 19 kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Memantau kinerja operasional dengan koordinasi secara berkala bersama kepala fungsi terkait;
2. Memberikan pandangan terkait rencana kerja sama pemanfaatan lahan PT IP dengan Pemberian HGB di Cabang Pelabuhan Banten;
3. Memberikan pandangan terkait permohonan persetujuan rencana kerja sama pendayagunaan aset tetap Cabang Pelabuhan Pontianak oleh PT IPC TPK;
4. Dan hal-hal lain yang bersifat strategis dalam langkah operasional Perseroan.

Pembahasan lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko selanjutnya akan dibahas dalam sub pembahasan tersendiri, yakni pada halaman 646.

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan IPC seperti Strategi Perusahaan, Pengawasan Internal, Kegiatan Sekretaris Perusahaan, Komersial dan Pengembangan Usaha, Teknik dan Manajemen Risiko, Operasi dan Sistem Informasi, Keuangan, SDM dan Hukum, Pengelolaan Anak Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus pengelolaan dan perlindungan kekayaan perusahaan, pengelolaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur.

Further details on the implementation of Nomination and Remuneration Committee duties are described in a separate section on page 664.

Risk Management Monitoring Committee Performance Assessment

The Risk Management Monitoring Committee is formed to improve the quality of supervision and provide advice from Board of Commissioners on enterprise risk management (ERM).

During 2020, the Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties properly. The basis of consideration is that the Risk Management Monitoring Committee has held 19 internal meetings and performed the following duties:

1. Monitored operational performance by periodically coordinating with the head of the relevant function;
2. Provided opinion on the cooperation plan to use the land of PT IP under HGB at Banten Port Branch;
3. Provided opinion on the request for approval of the cooperation plan to utilize fixed assets of Pontianak Port Branch by PT IPC TPK; and
4. Other strategic matters for the Company's operations.

Further details on the implementation of Risk Management Committee duties are described in a separate section on page 646.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is the Corporate Organ with the responsibility to manage all IPC activities, such as Corporate Strategy, Internal Control, Corporate Secretary, Commercial and Business Development, Technical and Risk Management, Operations and Information System, Finance, Human Capital and Legal Affairs, Subsidiary Management, operational efficiency and effectiveness all in accordance with GCG principles. Board of Directors is also the Company's representative both internally and externally. Board of Directors conducts business management as well as the management and protection of corporate assets, management, strategies, and budget plans on a regular basis.



Secara khusus, Direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan *Corporate Roadmap*. Direksi juga memastikan agar seluruh komponen IPC bekerja dalam koridor nilai-nilai perusahaan secara konsisten.

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah Perseroan melalui pengelolaan bisnis yang didasarkan pada 6 (enam) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan, dan Terpercaya, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/2/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Board Manual berisi pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta proses hubungan fungsi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan antara kedua Organ Perseroan tersebut, agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif, dan efisien. Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Direksi dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

1. Fungsi Direksi;
2. Keanggotaan Direksi;
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
4. Independensi (Kemandirian) Direksi;
5. Etika Jabatan Direksi;
6. Tugas dan Wewenang Direksi;
7. Kewajiban Direksi;
8. Tanggung Jawab Direksi;
9. Hak Direksi;
10. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi;
11. Organ Pendukung Direksi;
12. Penilaian Kinerja Direksi;
13. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi;
14. Hubungan IPC dengan Anak Perusahaan.

KEANGGOTAAN DIREKSI

Persyaratan Anggota Direksi

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi mencakup persyaratan umum yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

Specifically, Board of Directors implements the established strategies to achieve the Company's vision, mission, values and Corporate Roadmap. Board of Directors also ensures that all components of the Company consistently work within the corporate values.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

As part of the Company's commitment in implementing GCG consistently to maintain business continuity and add value to the Company through business management based on 6 (six) GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality, and Trusted, the Board of Commissioners and Board of Directors established the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/2/KPP/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020.

The Board Manual is a guideline that provides general explanation on the work procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the functional relation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and between both organs in order to create good, professional, transparent, effective, and efficient governance. The contents of the Board Manual of the Board of Directors are specifically explained in Chapter II, which covers:

1. Board of Directors Function;
2. Board of Directors Membership;
3. Introduction and Capability Improvement Programs;
4. Board of Directors Independence;
5. Board of Directors Ethics;
6. Board of Directors Duties and Authority;
7. Board of Directors Obligations;
8. Board of Directors Responsibility;
9. Board of Directors Rights;
10. Board of Directors Decision-Making Principles;
11. Board of Directors Supporting Organs;
12. Board of Directors Performance Evaluation;
13. Board of Directors Performance Evaluation Criteria;
14. IPC Relationship with Subsidiaries.

BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP

Board of Directors Member Requirements

The requirements to become a member of Board of Directors include general requirements which are the basic requirements determined by the Articles of Association and other requirements which are requirements that are adjusted to the needs and nature of the Company's business, as follows:

1. Persyaratan Umum

Orang yang dapat diangkat sebagai Direksi adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu IPC atau Perum dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

2. Persyaratan Lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

1. General Requirements

Those who can be appointed to Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:

- a. Have been declared bankrupt;
- b. Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners or a member of a Supervisory Board that was found guilty of causing IPC or a Public Company to be declared bankrupt; or
- c. Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector.

Fulfillment of these requirements shall be proven with a statement letter signed by the Board of Directors candidate and kept by the Company.

2. Other Requirements

In addition to meeting the general requirements, members of the Board of Directors are appointed by taking account of the provisions of applicable laws and regulations.

Board of Directors Term of Office

The term of office for members of Board of Directors is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. If the term of office of a Board of Directors member ends while the GMS is not yet able to appoint a substitute, then the duties of the vacant Director position are carried out according to the provisions on the fulfillment of vacant Director position. Members of the Board of Directors may end service if:

1. Deceased;
2. Term of office ends;
3. Dismissed by GMS resolutions; and/or
4. No longer meeting the requirements of Board of Directors members based on the provisions of the Company's Articles of Association and legislation

Board of Directors Dismissal

1. GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons;
2. Dismissal of Board of Directors members may take place under the following conditions of the member concerned:
 - a. Unable to fulfill their obligations as agreed upon in the Management Contract;
 - b. Unable to carry out their duties properly;



- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana yang diuraikan di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
 4. Keputusan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada Nomor 2 poin a, b, c, d, dan e, serta Nomor 3 di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Direksi dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak diperbolehkan yang bersangkutan rangkap jabatan.

Pengisian Jabatan Lowong Anggota Direksi

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;

- c. Not implementing the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
 - d. Engaging in actions that harm the Company and/or the State;
 - e. Conducting actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a SOE Board of Directors Member;
 - f. Have been declared guilty by a court ruling that has a permanent legal force;
 - g. Has resigned.
3. In addition to the aforementioned reasons for Board of Directors dismissal, the Board of Directors may be dismissed by the GMS for the interests and objectives of the Company;
 4. Dismissal based on reasons stated in Number 2 items a, b, c, d, and e, and Number 3 above is made only after the member concerned is given the opportunity to defend themselves.

Board of Directors Resignation

1. Members of the Board of Directors have the right to resign by notifying in writing about their intention to the Company with copies to the Shareholders, Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation. If the effective date stated in the resignation letter is less than 30 (thirty) days after the date of letter receipt, it is deemed that the effective date of resignation has not been stated;
2. If there is no GMS decision until the date requested by the member of Board of Directors concerned, or within 30 (thirty) days from the date the letter of application is received if there is no mention of the effective date of resignation, then the member of the Board of Directors concerned resigns at the date requested or after 30 (thirty) days since the receipt of the resignation letter without requiring GMS approval;
3. Resignation of Board of Directors member may occur in less than 30 (thirty) days if laws and regulations prohibit the member concerned to hold concurrent positions.

Fulfillment of Vacant Position in the Board of Directors

If there is vacancy in the Company's Board of Directors membership due to any reason:

1. Within 30 (thirty) days since the vacancy occurs, GMS shall be held to fill the vacant position;

2. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 3. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 4. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong tersebut, selain anggota Direksi yang menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk Santunan Purna Jabatan.
2. If the vacancy was due to the end of Board of Directors member's term of office, then the Board of Commissioners may appoint other member of the Board of Directors or the GMS may appoint parties other than the existing Board of Directors members to temporarily perform the duties of the vacant Director position with the same power and authority and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;
 3. If the vacancy was due to the end of term of office and the GMS has not filled the vacant Director position, then the Board of Directors member ending term of office may be appointed by the GMS to temporarily perform the duties of the vacant Director position with the same power and authority and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;
 4. The acting member of the Board of Directors for the vacant position, except existing members of the Board of Directors, is given the same salary and allowances/facilities for the vacant Director position, except Post-Employment Allowance.

Keadaan Seluruh Anggota Direksi Lowong

Apabila oleh suatu waktu oleh sebab apa pun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;
2. Selama jabatan tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dan Keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perusahaan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
3. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
4. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong tersebut, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk Santunan Purna Jabatan.

Complete Vacancy of Board of Directors

If the Company's Board of Directors position is entirely vacant due to any reasons:

1. Within 30 (thirty) days since the vacancy occurs, GMS shall be held to fill the vacancy;
2. During the vacancy and while the GMS has not filled the vacant Board of Directors position, the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners or the GMS and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares. Other parties may be appointed to temporarily manage the Company with the same power and authority;
3. If the vacancy of the Board of Directors was due to the end of term of office and the GMS has not appointed substitutes, then the Board of Directors members ending term of office may be appointed by the GMS to temporarily perform their usual duties as Board of Directors members with the same power and authority and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares;
4. The acting members of the Board of Directors, except the Board of Commissioners, are given the same salary and allowances/facilities for the vacant Board of Directors positions, except Post-Employment Allowance.



Komposisi Anggota Direksi Tahun 2020

Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perseroan. Jika Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sepanjang tahun 2020, komposisi anggota Direksi IPC mengalami perubahan, dengan uraian sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 2 Maret 2020

Komposisi anggota Direksi pada periode 1 Januari hingga 2 Maret 2020 berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur, dengan uraian sebagai berikut:

Komposisi Anggota Direksi IPC

Periode 1 Januari – 2 Maret 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Elvyn G. Masassy	Direktur Utama / President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016 concerning Appointment of the President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	22 April 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / April 22, 2016 – March 2, 2020 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II Nomor: SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning Appointment of the Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Arif Suhartono	Direktur Komersial / Commercial Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
4.	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan / Finance Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	26 November 2018 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / November 26, 2018 – March 2, 2020
5.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016 concerning Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – June 18, 2020 (First Period)

Board of Directors Composition in 2020

The number of Directors is adjusted to the needs, complexity, and strategic plans of the Company. If the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, then one member shall be appointed as the President Director and, if necessary, one member as Vice President Director. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS and the GMS decision shall be approved by the Holder of Dwiwarna Series A Shares.

In 2020, the member composition of IPC Board of Directors changed with the following description:

January 1 – March 2, 2020

Member composition of the Board of Directors from January 1 until March 2, 2020 consisted of 8 (eight) people, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors with description as follows:

IPC Board of Directors Member Composition

January 1 – March 2, 2020 Period

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
6.	Prasetyadi	Direktur Operasi / Operations Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016 concerning Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – March 2, 2020 (First Period)
7.	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	14 Juli 2017 – 11 Februari 2020 (Periode Pertama) / July 14, 2017 – February 11, 2020 (First Period)
8.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)

Periode 2 Maret – 18 Juni 2020

Pada tanggal 2 Maret 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan melakukan perombakan jajaran Direksi Perseroan. Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), perubahan jajaran Direksi IPC adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat terhadap 4 (empat) anggota Direksi, yaitu Bapak Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama, Bapak Prasetyadi sebagai Direktur Operasi, Bapak Widyaka Nusapati sebagai Direktur Keuangan, dan Bapak Rizal Ariansyah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
2. Penunjukan Bapak Arif Suhartono, yang semula menjabat Direktur Komersial, sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru;
3. Pengangkatan 4 (empat) anggota Direksi baru, Ibu Rima Novianti sebagai Direktur Komersial, Bapak Muarip sebagai Direktur Operasi, Bapak Yon Irawan sebagai Direktur Keuangan, serta Bapak Ihsanuddin Usman sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

March 2 – June 18, 2020 Period

On March 2, 2020, the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder of the Company changed the Company's Board of Directors composition. Based on Copy of Decree of Minister of SOEs of The Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), changes to IPC Board of Directors are as follows:

1. Honorable dismissal of 4 (four) members of the Board of Directors, namely Mr. Elvyn G. Masassya as President Director, Mr. Prasetyadi as Operations Director, Mr. Widyaka Nusapati as Finance Director, and Mr. Rizal Ariansyah as Human Capital Director;
2. Appointment of Mr. Arif Suhartono, formerly Commercial Director, as the new President Director of the Company;
3. Appointment of 4 (four) new members of the Board of Directors, namely Ms. Rima Novianti as Commercial Director, Mr. Muarip as Operations Director, Mr. Yon Irawan as Finance Director, and Mr. Ihsanuddin Usman as Human Capital and General Affairs Director.



Dengan demikian, komposisi anggota Direksi pada periode 2 Maret hingga 18 Juni 2020 berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur, dengan uraian sebagai berikut:

Therefore, the member composition of the Board of Directors from March 2 until June 18, 2020 consisted of 8 (eight) people, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors with description as follows:

Komposisi Anggota Direksi IPC Periode 2 Maret – 18 Juni 2020

IPC Board of Directors Member Composition March 2 – June 18, 2020 Period

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II Nomor: SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning Appointment of Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 (Periode Pertama) / May 16, 2016 – June 18, 2020 (First Period)
4.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
5.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
6.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
7.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
8.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)

Periode 18 Juni – 31 Desember 2020

Pada tanggal 18 Juni 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan memberhentikan Bapak Dani Rusli Utama dari posisinya sebagai Direktur Teknik Perseroan karena dipindahtugaskan sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan mengangkat Bapak Zuhri Iryansyah untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik IPC yang baru. Pergantian Direksi Teknik Perseroan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi pada periode 18 Juni hingga 31 Desember 2020 masih sama seperti periode sebelumnya, yakni berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur, dengan uraian sebagai berikut:

Komposisi Anggota Direksi IPC

Periode 18 Juni – 31 Desember 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)

June 18 – December 31, 2020 Period

On June 18, 2020, the Minister of SOEs as the Sole and Controlling Shareholder of the Company dismissed Mr. Dani Rusli Utama from his position as Technical Director due to his assignment as the President Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and appointed Mr. Zuhri Iryansyah as the new Technical Director of IPC. The change in the Company's Technical Director was stipulated in Copy of Decree of Minister of State-Owned Enterprises of The Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Therefore, the member composition of the Board of Directors from June 18 until December 31, 2020 remained the same as the previous period, consisting of 8 (eight) people which comprise 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors with description as follows:

IPC Board of Directors Member Composition

June 18 – December 31, 2020 Period



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II Nomor: SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning Appointment of Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama) / November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	8 April 2019 – 7 April 2024 (Periode Pertama) / April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Nomenclature, Duty Transfer, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama) / March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period)
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No: 208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 (Periode Pertama) / June 18, 2020 – June 17, 2025 (First Period)

ETIKA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Etika Berkaitan dengan Keteladanan

Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan seluruh Pekerja Perseroan.

Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.

Etika Berkaitan dengan Peluang Perseroan

Selama menjabat, setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk:

1. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya, dan/atau pihak lain.
2. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan, atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
3. Berkompetisi dengan Perseroan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan selain kepentingan Perseroan.

Etika Berkaitan dengan Keuntungan Pribadi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan

ETHICS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Ethics as Role Model

Each member of the Board of Directors shall encourage ethical attitude and uphold the highest ethical standard at the Company, among others by being a good role model for the Board of Directors and all employees of the Company.

Ethics Related to Compliance with Laws and Regulations

Each member of the Board of Directors shall comply with the applicable laws and regulations, the Articles of Association, Code of Good Corporate Governance, as well as established policies of the Company.

Ethics Related to Transparency and Information Confidentiality

Each member of the Board of Directors shall disclose information according to the applicable laws and regulations and protect the Company's confidential information that they are trusted with according to the applicable laws and regulations and/or the Company's provisions.

Ethics Related to the Company's Opportunity

During service, each member of the Board of Directors is prohibited from:

1. Taking the Company's business opportunity for personal interests, their family, business group, and/or other parties.
2. Using the Company's assets, the Company's information, or their position as member of the Board of Commissioners for personal interests or other people that are against the applicable laws and regulations and Company policies.
3. Competing with the Company, namely by using insider knowledge/information for gains other than the Company's interests.

Ethics Related to Personal Gains

Each member of the Board of Directors is prohibited from taking direct or indirect personal gains from the Company's activities other than their official income.

Ethics Related to Conflict of Interests

Each member of the Board of Directors shall comply with the ethics concerning conflict of interests as follows:

1. Filling out Special List consisting of information of their share ownership and/or that of their family in other companies, including if they do not own any shares,



saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - d. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perseroan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, adalah pemberian insentif kepada Pekerja atau pihak lain yang telah ditetapkan Perseroan dalam rangka kepentingan Perseroan.

Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan

1. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
2. Apabila anggota Direksi dimaksud meninggal dunia, maka ahli waris anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan Nomor 1 di atas.

periodically updating the information at end of year, and informing the Company of any data changes in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. A member of the Board of Directors is unauthorized to represent the Company if:
 - a. A legal case is filed to court between the Company and the Board of Directors member concerned;
 - b. The Board of Directors member concerned has conflict of interests with the Company;
 - c. If condition as referred to in Item a above occurs, the parties authorized to represent the Company are:
 - 1) Other Board of Directors members who have no conflict of interests with the Company;
 - 2) The Board of Commissioners if all Board of Directors members have conflict of interests with the Company;
 - 3) Other parties appointed by the GMS if all Board of Directors and Board of Commissioners members have conflict of interests with the Company.
 - d. If all Board of Directors members have conflict of interests with the Company and no member of the Board of Commissioners is available, then the Company is represented by other parties appointed by the GMS.

Ethics in Business and Anti-Corruption

1. Members of the Board of Directors are prohibited from giving or offering or receiving, both directly and indirectly, valuable/unlawful items to or from government officials, in order to influence or as a reward for their actions or any other actions, in accordance with the applicable laws and regulations.
2. Not included in the definition stated in Number 1 is the provision of incentives to employees or other parties as determined by the Company for the Company's interests.

Ethics After the End of Service

1. Returning all documents related to their former position to the Company within 30 (thirty) calendar days since the end of their service.
2. If a member of the Board of Directors is deceased, the heir of the Board of Directors member concerned shall return the documents as stated in Number 1 above.

- Menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perseroan.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur dalam Tata Laksana Kerja Direksi (*Board Manual*).

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan IPC untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan IPC serta mewakili IPC baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Setiap Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IPC. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan IPC dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar IPC dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Direksi juga bertugas untuk:

- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen Perseroan lainnya.

- Submitting State Officials Assets Report (LHKPN) within 3 (three) months since the end of their service as a State Official.

Ethical violations committed by any member of the Board of Directors are treated the same with violations against the Company's Business Code of Conduct.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITY, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors Duties, Authority, Obligations and Responsibilities are regulated in the Board Manual of the Board of Directors.

Board of Directors Duties

Board of Directors is responsible for carrying out all actions relating to IPC management for and in the best interest of IPC and in accordance with the intents and purposes of IPC, and to represent IPC inside and outside court on all matters and events except for matters considered unlawful by legislation and GMS Decisions for the Board to do so.

Each Director shall in good faith and full responsibility carry out the duties for the interests and business of IPC. Board of Directors is fully responsible for performing its duties for the benefit of IPC in achieving its goals and objectives.

In discharging its duties, Board of Directors complies with IPC's Articles of Associations and all applicable regulations and implements the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability and fairness.

Board of Directors also has the duty to:

- Prepare Shareholders List, Special List, GMS Minutes, and Board of Directors Meeting Minutes;
- Prepare annual reports and financial documents of the Company;
- Maintain all Shareholders List, Special List, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Reports and Financial Documents, and other company documents.



Wewenang Direksi

Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan IPC;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IPC baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja IPC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja IPC berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IPC, mengikat IPC dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IPC serta mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Tugas dan Kewenangan Direksi

Terkait Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

Board of Directors Authorities

Board of Directors has the authority to:

1. Stipulate IPC management policy;
2. Arrange the transfer of Board of Directors power to one or more members of Board of Directors to take decisions for and on behalf of Board of Directors or to represent IPC in and out of court;
3. Arrange the submission of the power of Board of Directors to a person or several employees of IPC individually or jointly or to others, to represent IPC in and out of court;
4. Arrange provisions concerning the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age pensions and other income for IPC's workers under applicable laws and regulations, with the provision that salaries, pension or old age benefits and other income for workers exceeding the obligations stipulated by law and regulations must obtain prior approval from the GMS;
5. Appoint and dismiss IPC employees in accordance with IPC's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
7. Conduct all other actions and acts concerning the administration or ownership of IPC's assets, binding IPC with other parties and/or other parties with IPC and representing IPC in and out of court of all matters and events, with limitations as stipulated in legislation, the Articles of Association and/or GMS decisions.

The division of duties and authority of each Director is stipulated by the GMS. If the GMS does not determine the division of duties and authority, then such division among Board of Directors members is based on the Board of Directors decision.

Board of Directors Duties and Authorities

Related to the General Meeting of Shareholders (GMS)

Board of Directors organizes Annual GMS and Extraordinary GMS with prior GMS invitations in accordance with the procedures set forth in the Articles of Association and applicable laws and regulations:

1. The GMS invitation is announced no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS, without counting the date of GMS invitation and GMS convention;

2. Pemanggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor IPC sebelum RUPS diselenggarakan.

Terkait Dengan Strategi dan Rencana Kerja Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan tertulis, dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

1. Susunan Materi RJPP

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan IPC yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN:

 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang baru lalu;
 - c. Posisi Perseroan saat ini;
 - d. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - e. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.
2. Penyampaian RJPP kepada RUPS

Tata laksana penyampaian RJPP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

 - a. Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
 - b. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP dalam RUPS;
 - c. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;
 - d. Sebelum waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.
3. Perubahan RJPP

Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 - a. Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;

2. The GMS invitation shall include information on each agenda items to be discussed, including proposals planned by Board of Directors to be submitted to the GMS, provided that if such information is not available at the time of GMS invitation, then they must be made available at IPC's office before the GMS begins;

Related to Strategy and Work Plan Preparation and Delivery of Corporate Long-Term Plan (RJPP)

Board of Directors is obligated to prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP) and its revisions in a timely manner and submits the RJPP to the Board of Commissioners for written approval and to the Shareholder for GMS validation.

1. RJPP Material

The RJPP is a strategic plan that contains IPC goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The RJPP format referred to the preparation of the Company's Long-Term Plan as issued by from the Ministry of State- Owned Enterprises:

 - a. Introduction;
 - b. Evaluation of previous Long-Term Plan;
 - c. The Company's current position;
 - d. Assumptions used in preparing the Long-Term Plan;
 - e. Goals, targets and strategies used to achieve them.
2. Submission of RJPP to the GMS

The procedure of RJPP submission to the GMS is regulated as follows:

 - a. The RJPP draft signed by Board of Commissioners is submitted to the GMS for approval;
 - b. The RJPP validation will be given no later than 60 (sixty) days after the RJPP draft is received by the GMS;
 - c. If within 60 (sixty) days such validation has not been issued then the RJPP draft is considered to have been validated;
 - d. Prior to 60 (sixty) days before the end of the current RJPP, Board of Directors shall propose the RJPP draft for the following period.
3. Changes in RJPP

If changes to the RJPP is necessary, the following provisions apply:

 - a. Changes to RJPP can only be made when there are significant changes over which Board of Directors has no control;



- b. Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20 persen;
- c. Perubahan RJPP harus ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Penyusunan, Penyampaian dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS yang berisikan sekurang-kurangnya:

1. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja/kegiatan;
2. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3. Proyeksi keuangan perusahaan dan Anak Perusahaannya; dan
4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RKAP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Rancangan RKAP yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
3. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan);
4. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 3, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.

- b. The referred changes are changes that result in a more than 20 percent downward deviation in terms of achievement;
- c. Any changes made in RJPP must be signed by Board of Commissioners and Board of Directors to be further submitted to the GMS for validation.

Preparation, Delivery and Change of Corporate Work Plan and Budget (RKAP)

The Company's Work Plan and Budget (RKAP) is an elaboration of the Company's Long-Term Plan. The RKAP format refers to the Corporate Work Plan and Budget provisions issued by the State Ministry of State-Owned Enterprises and/or is based on the GMS Decision and contains at least:

1. Mission, business goals, business strategy, company policy and work programs/activities;
2. The Company's budget presented in detail for each work program/activity budget;
3. Financial projections of the Company and its Subsidiaries; and
4. Other matters that require GMS decision.

Board of Directors is obligated to prepare the RKAP and its revisions in a timely manner and submit the RKAP to the Board of Commissioners and Shareholder for GMS approval.

The procedure of RKAP submission to the GMS is regulated as follows:

1. The RKAP draft signed by Board of Directors will be submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before it is submitted to the Shareholders;
2. The RKAP draft signed by Board of Commissioners and Board of Directors will be submitted by Board of Directors to the Shareholders no later than 60 (sixty) days prior to the beginning of new fiscal year for approval by the GMS;
3. The RKAP validation will be given by the GMS no later than 30 (thirty) days after the start of the current fiscal year (the year of the RKAP concerned);
4. If the RKAP draft has not been submitted by Board of Directors and/or the RKAP has not been approved in the period as referred to in Number 3, then the previous year RKAP automatically applies;

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan RKAP adalah sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi yang signifikan di luar kendali Direksi;
2. Terdapat tambahan rencana sesuai kebutuhan IPC;
3. Berdasarkan penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah.

Perubahan RKAP memerlukan persetujuan RUPS apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Terdapat tambahan rencana yang belum ditetapkan dalam RKAP;
2. Adanya penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah yang belum ditetapkan dalam RKAP.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.

Selain Laporan Manajemen Perusahaan, bagi BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara terpisah yang pedoman penyusunan dan penyampaiannya diatur melalui ketentuan tersendiri.

Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian BUMN.

1. Laporan Manajemen Triwulanan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.

2. Laporan Manajemen Tahunan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Direksi wajib menyampaikan

Conditions that may result in changes to RKAP are as follows:

1. Significant changes in assumptions beyond Board of Directors control;
2. Additional plans based on IPC's needs;
3. Assignments/policies from the Shareholders and/or the Government.

Any change in the RKAP requires approval from the GMS if it meets any of the following criteria:

1. There are additional plans not covered in the RKAP;
2. There are assignments/policies from the Shareholders and/or the Government not covered in the RKAP.

Preparation and Submission of Management Reports

Board of Directors shall submit periodic reports in a manner and time that is in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by Board of Commissioners and/or Shareholders. Periodic reports are the Company's Management Reports that contain the implementation of the Company's Work Plan and Budget and cover Quarterly Management Reports, Annual Management Reports, and Annual Reports.

In addition to the Management Reports, a SOE that runs the Partnership and Community Development Program shall submit a separate accountability report of which preparation and submission guidelines are stipulated in a separate provision.

The format of Quarterly Management Reports and Annual Management Reports refer to the management report provisions issued by the Ministry of SOEs.

1. Quarterly Management Report

Board of Directors shall submit the Quarterly Management Report signed by President Director and President Commissioner no later than 1 (one) month after the end of the quarter for which the report is made. The quarterly Management Report for Q4 shall be attached to the Annual Management Report.

2. Annual Management Report

Board of Directors shall submit an Annual Management Report signed by all Directors and Commissioners to the Shareholders no later than 2 (two) months after the end of the fiscal year. Board of Directors shall submit the Annual Financial Statements that have been audited by



Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan IPC. Format Laporan Tahunan merujuk pada Anggaran Dasar IPC dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS

Tata Laksana penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku IPC berakhir dan/atau dalam bulan Mei setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan;
2. Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
3. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham;
4. Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor IPC sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS atau dikirim untuk diperiksa oleh Pemegang Saham.

internal Auditors to the shareholders no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year. Should there be any discrepancy between the Annual Management Report submitted to the Shareholders and the Annual Financial Statements that have been audited by an External Auditor, Board of Directors shall first make revisions to the former and then submit them to the General Meeting of Shareholders for approval and validation. Approval for the Annual Management Report and Validation of Financial Statements that have been audited by an External Auditor shall be given by GMS no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.

Preparation and Submission of Annual Reports

Board of Directors shall prepare and submit the Annual Report as a form of accountability for the management of IPC. The Annual Report format refers to IPC's Articles of Associations and includes Financial Statements that have been prepared based on the Financial Accounting Standards and audited by a Public Accountant appointed by the General Meeting of Shareholders.

Submission of Annual Report to the GMS

The procedure for the submission of Annual Report to GMS is as follows:

1. Board of Directors submits the Annual Report to the GMS after it is reviewed by Board of Commissioners no later than 5 (five) months after IPC's fiscal year ends and/or in May following the close of the fiscal year concerned;
2. The draft of Annual Report, including the audited financial statements by an External Auditor and signed by all members of Board of Directors is submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before its submitted to the Shareholders;
3. The Annual Report signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners is submitted by Board of Directors to the Shareholders;
4. The Annual Report must be made available at IPC's office from the date on which a GMS call is announced to the date the GMS is held, or sent for a prior review by the Shareholders.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan

Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka:

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;
2. Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

Terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, dengan cara:

1. Identifikasi Risiko, yaitu proses menemukan dan mengenali kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan;
2. Analisis Risiko, yaitu proses mengukur tingkat risiko berdasarkan besaran nilai dampak dan kemungkinannya untuk menentukan peringkat risiko sebagai dasar prioritas tindakan penanganan risiko;
3. Evaluasi Risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan batas toleransi risiko guna menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak;
4. Perlakuan Risiko, yaitu proses tindak lanjut terhadap risiko yang dalam proses evaluasi risiko sebelumnya merupakan risiko yang tidak diterima berdasarkan toleransi Perusahaan;
5. Pemantauan dan Peninjauan Risiko, yaitu proses memantau realisasi kinerja manajemen risiko berdasarkan rencana awal dan pengukuran ulang tingkat risiko;
6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses melaporkan pelaksanaan sistem manajemen risiko beserta pengungkapan risiko kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Direksi memiliki Unit Kerja Manajemen Risiko yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi risiko Perseroan dan berkewajiban memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan memiliki kaitan erat dengan Pedoman Komite Manajemen Risiko.

Members of Board of Directors and Board of Commissioners Who Do Not Sign the Annual Report

If there is one or more members of the Boards of Directors or Board of Commissioners who do not sign the Annual Report, then:

1. The referred members of Board of Directors and Board of Commissioners shall state the reason for not signing in writing; or such statement can be made by Board of Directors or Board of Commissioners in a letter that is attached to the Annual Report;
2. If one or more members of Board of Directors or Board of Commissioners decide not to sign the Annual Report without giving their reason in writing, then they are considered to have approved the contents of the Annual Report.

Related to Risk Management

Board of Directors shall develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of the GCG program with:

1. Risk Identification, a process of finding and recognizing the possibilities of an event that can be a constraint to the achievement of the Company's goals and objectives;
2. Risk Analysis, a process of measuring risk levels based on the magnitude of the impact value and the possibility to determine risk rating as the priority basis for risk management measures;
3. Risk Evaluation, a process of comparing the results of risk analysis with risk tolerance limits to determine whether or not a risk is acceptable;
4. Risk treatment, a follow-up process on a certain risk that based on previous evaluation was not unacceptable based on Company's tolerance;
5. Risk Monitoring and Review, a process of monitoring the realization of risk management performance based on the initial plan and re-measurement of risk levels;
6. Reporting and Disclosure, a process of reporting the implementation of the risk management system and risk disclosure to related parties in accordance with applicable provisions.

Board of Directors has a Risk Management Unit responsible for monitoring and evaluating the Company's risks where it is made mandatory to work with a Risk Management Unit Charter as a part of the risk management system that is closely related to Risk Management Committee Charter.



Terkait dengan Teknologi Informasi

1. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;
3. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di IPC.

Terkait Dengan Sumber Daya Manusia

1. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan uraian tugasnya;
2. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi sistem perencanaan Sumber Daya Manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi IPC, promosi dan demosi serta mutasi;
3. Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi IPC;
4. Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
5. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan;
6. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan;
7. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan;
8. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
9. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi

1. Mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada IPC;

Related to Information Technology

1. Establish effective information technology governance;
2. Submit periodic reports on the implementation of information technology governance to Board of Commissioners;
3. Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions at IPC.

Related to Human Capital

1. Prepare the organizational structure of IPC complete with job descriptions;
2. Develop and implement Human Capital management guidelines that covers Planning, Recruitment, Selection, Placement of Workers and Positions across IPC's organizational structure, promotion and demotion and mutation;
3. Ensure that workers are assigned according to the criteria for positions in IPC's organizational structure;
4. Request approval from Board of Commissioners for the organizational structure up to 1 (one) level under Board of Directors;
5. Request approval from Board of Commissioners on the appointments of the Head of Internal Audit Unit and Corporate Secretary;
6. Ensure that education and training to Workers is given in accordance with competencies needed for each position;
7. Conduct performance evaluations and assessments on work units and positions in the organization in an objective and transparent manner;
8. Make provisions on employment including salary determination, pension or post-retirement benefits and other income for workers in compliance with applicable laws and regulations and resolutions made by GMS;
9. Hire and dismiss workers following IPC personnel regulations and all other laws that apply in employment.

Related to Business Ethics and Anti-Corruption

1. Develop and lead the implementation of Good Corporate Governance Guidelines (GCG);
2. Establish all provisions to govern reporting the mechanism for alleged violations (*Whistleblowing system*) at IPC;

3. Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman Gratifikasi IPC;
4. Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga Pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dalam lingkungan IPC.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun Piagam Satuan Pengawasan Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal dan memiliki kaitan yang erat dengan Piagam Komite Audit.

3. Refrain from practices of offering or receiving either directly or indirectly any gift of high worth to and/or from any public servant and/or other parties that may affect objectivity or lead to the need to return such favor that is common in such practice and from other actions unlawful by fiat of bylaws and IPC's Gratification Guidelines;
4. Ensure that all obligations for entitled high rank officials at IPC as specified in the Decision of IPC's BOD to submit state officials assets report (LHKPN) to the authorized government agency are fulfilled.

Related to Internal Control System

Board of Directors must establish an effective Internal Control System policy to ensure confidence in the reliability of financial statements, protection of assets, efficient and effective operations, and encourage compliance with internal policies and regulations.

The Internal Control System includes the following:

1. Internal structured corporate control environment carried out in a disciplined manner;
2. Assessment of business risk management as a process for identifying, analyzing, assessing the management of relevant risks;
3. Control activities as actions taken in a process control of Company activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of duties, and security of Company assets;
4. Information and communication systems as a process of presenting reports on operational, financial, and compliance activities and compliance with the provisions of laws and Company regulations;
5. Monitoring of the internal control system quality assessment process, including the internal audit function at each level and unit within the organizational structure of the Company, so that control can be implemented optimally.

Board of Directors has the obligation to develop an Internal Audit Unit Charter as part of the internal control system that is closely linked to the Audit Committee Charter.



Terkait Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Mengungkapkan penerapan GCG di Perseroan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif;
2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan individu dan kelompok.

Terkait Dengan Penerapan *Good Corporate Governance*

1. Melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) GCG di IPC melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di IPC yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*) dan penerapan GCG di Perseroan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada Butir a., yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (*self assessment*).
2. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan;
3. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di IPC melalui mekanisme rapat Direksi;
4. Terkait dengan pengawasan kepatuhan IPC, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam IPC.

Terkait Hubungan dengan *Stakeholders*

Direksi mengembangkan hubungan dengan *Stakeholders* IPC berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Menghormati hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan *Stakeholders*;
2. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Related to Information Disclosure and Confidentiality

1. Disclose GCG implementation at the Company and important information in the Annual Report and Financial Statements as well as other information to other parties in accordance with the applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner;
2. Confidential information obtained during service as the Company's Board of Directors member shall remain confidential in accordance with the applicable laws and regulations;
3. In keeping the confidentiality of the Company's information, the Board of Directors is required to prioritize the Company's interests over individual and group interests.

Related to Good Corporate Governance Implementation

1. Measure Good Corporate Governance (GCG) implementation in terms of:
 - a. GCG Assessment through a measurement on GCG applications conducted once every 2 (two) years;
 - b. Review and implementation of GCG at SOEs conducted in the year following the assessment as provided for in point a., which covers an evaluation of assessment results and follow-up actions on recommended improvements (self-assessment);
2. The assessment and evaluation results are reported to the same GMS in which IPC's annual report is submitted;
3. Appointing a Director as the person in charge for monitoring GCG at IPC at Board of Directors meetings;
4. Related to monitoring IPC compliance, it is exercised jointly by related functions within IPC.

Related to Relationships with Stakeholders

Board of Directors develops relationships with IPC Stakeholders based on the following principles:

1. Respect of Stakeholder rights that are regulated by applicable regulations and/or become due under agreements made by the Company and the Stakeholders;
2. Ensuring that the Company carries out its social responsibility. One form being the Partnership and Community Development Program in accordance with prevailing laws and regulations;

3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 4. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
 5. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.
3. Ensuring that the Company assets and premises and other facilities are in compliance with applicable laws and regulations when it comes to environmental conservation, and work health and safety;
 4. In recruiting, setting base salary, training, establishing career paths, and determining other employment requirements for its employees, the Company does not discriminate based on ethnic background, religious belief, gender, age, and disability of a person nor is discriminative in other specific circumstances as detailed by laws and regulations;
 5. Provides a work environment that is free from all forms of pressure.

Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

1. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
2. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi IPC.

Terkait Respons Terhadap Peluang Bisnis dan Perubahan Lingkungan Bisnis

1. Mekanisme untuk merespons peluang bisnis dan merespons isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis melalui langkah:
 - a. Usulan peluang bisnis dapat berasal dari manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/Dewan Komisaris;
 - b. Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dan/atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada Perseroan secara intensif, termasuk di dalamnya analisa risiko atas peluang dan atau perubahan kondisi tersebut;
 - c. Direksi mengambil keputusan atas usulan tersebut;
 - d. Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.

Related to Accounting and Bookkeeping System

1. Develops an accounting system based on the principles of internal control, specifically the necessary separation of functions of management, entry, filing and supervision;
2. Prepares financial statements based on financial accounting standards and hand them over to public accountants for auditing purpose;
3. Maintains and manages IPC's bookkeeping and administration to provide neatly ordered bookkeeping, efficient working capital adequacy, a sound and robust balance sheet structure, timely and accurate presentation of reports and financial analysis and other principles in accordance with all prevailing norms that are applicable to IPC.

Related to Response to Business Opportunities and Changes in Environment

1. The mechanism used to respond to business opportunities and respond to current external issues in business environment includes the following steps:
 - a. Business opportunities proposed by the executives under Board of Directors or Boards of Directors and Commissioners;
 - b. Board of Directors identifies business opportunities and environmental changes that may have a major impact on the Company via, among other measures, analysis of risk within opportunities and possible changes in those conditions;
 - c. Board of Directors makes a decision on any proposal;
 - d. Based on an approved proposal for a business opportunity, if the task to approve is within the scope of authority of Board of Commissioners and/or AGMS, then Board of Directors submits it and/or discusses the proposal with Board of Commissioners for further study.



2. Pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan dimaksudkan untuk menangkap peluang bisnis atau yang berakibat menjadi permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perseroan;
3. Direksi harus segera merespons informasi yang diterima pada setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja IPC dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris.

Terkait Dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Direksi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IPC sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPC;
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan IPC, serta dokumen keuangan IPC sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak IPC yang tidak tercatat dalam pembukuan sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Discussions on current issues concerning changes in business environment and issues that may or do have a major impact on the Company's business and performance are held to capture business opportunities or overcome issues that may otherwise develop into major constraints;
3. All information on changes in the business will be responded to quickly by Board of Directors who then reports this immediately to Board of Commissioners.

Related to Other Tasks and Obligations

Fulfill other obligations in accordance with the provisions set forth in IPC's Articles of Association or made by the GMS and contained in all applicable laws.

Board of Directors Obligations

In carrying out its main duties, Board of Directors is obliged to:

1. Undertake and ensure implementation of IPC business and activities in accordance with the purposes and objectives and business activities of IPC;
2. Prepare in due course the RJPP, RKAP, and any changes and submit to Board of Commissioners and Shareholders to obtain validation of the GMS;
3. Provide explanation to the GMS regarding the RJPP and RKAP;
4. Prepare lists of Shareholders, Special Register, minutes of the GMS and minutes of Board of Directors meetings;
5. Prepare the Annual Report as a form of accountability of IPC management, as well as the IPC financial documents as referred to in the law on Company Documents;
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;
7. Submit Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and validation, as well as reports on IPC rights that are not recorded in the books as a result of the write-off of accounts receivable;
8. Provide an explanation to the GMS on the Annual Report;
9. Deliver the balance sheet and Income Statement already validated by the GMS to the Ministry in charge of law and human rights in accordance with the provisions of the Laws and Regulations;

- | | |
|--|---|
| <p>10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;</p> <p>11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Nomor 4 dan 5 di atas;</p> <p>12. Menyimpan di tempat kedudukan IPC: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya sebagaimana dijelaskan pada Nomor 11 di atas;</p> <p>13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham dengan ditembuskan ke Dewan Komisaris;</p> <p>15. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan perincian tugasnya;</p> <p>16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;</p> <p>17. Menyusun dan menetapkan <i>blue print</i> organisasi IPC;</p> <p>18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>19. Memenuhi permintaan dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> | <p>10. Convey reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry in charge of law and human rights;</p> <p>11. Maintain lists of Shareholders, Special Register, minutes of meeting, minutes of Board of Commissioners meetings and minutes of meetings of Board of Directors, IPC Annual Report and financial documents and other IPC documents as described in Number 4 and 5 above;</p> <p>12. Retain at the Company domicile: the Shareholder Register, Special Register, briefing of shareholders, minutes of Board of Commissioners meetings, minutes of Board of Directors meetings, Annual Reports and financial documents and other IPC documents as described in Number 11 above;</p> <p>13. Develop an accounting system in accordance with the financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the functions for handling, recording, storage, and supervision;</p> <p>14. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder forwarded to Board of Commissioners;</p> <p>15. Prepare the IPC organizational structure complete with details of duties;</p> <p>16. Provide an explanation of all matters asked or requested by members of Board of Commissioners and the Shareholders;</p> <p>17. Prepare and establish the blueprint of IPC organization;</p> <p>18. Carry out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are stipulated by the GMS based on legislation.</p> <p>19. Fulfilling the request and access of company data and documents submitted by the Shareholder of Series A Dwiwarna Shares.</p> |
|--|---|

Tanggung Jawab Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal IPC menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan IPC.

Board of Directors Responsibilities

1. In executing its duties, Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that IPC shows any symptoms of a setback, Board of Directors must immediately report to the GMS, accompanied by a proposal on corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding important management issues for IPC.



PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi telah menetapkan pembagian tugas untuk masing-masing anggota Direksi dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 Tanggal 20 November 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan uraian sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengurusan perusahaan dengan memimpin perusahaan. Direktur Utama menyelenggarakan sebagian pengurusan Perseroan di bidang Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, dan Perencanaan Strategi Korporasi.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. Divisi Sekretariat Perusahaan

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait komunikasi Perseroan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, dan pelayanan masyarakat;

2. Divisi Satuan Pengawasan Internal

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan internal, dan pengendalian pengawasan internal;

3. Divisi Perencanaan Strategi Korporasi

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan strategis, pengendalian implementasi strategi dan inovasi, *project management office*, dan pengendalian kinerja.

DIVISION OF BOARD OF DIRECTORS DUTIES

To improve the Company's management duty, the Board of Directors established the division of duties for each Board of Directors member through PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *juncto* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 regarding Amendment to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The description is as follows:

President Director

The President Director has the main task of managing the Company by leading the Company. President Director carries out part of the management of the Company in the fields of Corporate Secretariat, Internal Audit Unit and Corporate Strategy Planning.

The main duties and responsibilities of each Division led by President Director are as follows:

1. Corporate Secretariat Division

Formulate policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate communication, implementation of corporate governance, protocols and administration of Board of Directors, institutional relations and community development;

2. Internal Audit Unit Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to planning of internal audit, implementation of internal audit and internal audit controls;

3. Corporate Strategy Planning Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main tasks and responsibilities related to strategic planning, controlling strategy implementation and innovation, project management office and controlling performance.

Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang pengadaan barang/jasa serta Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Wakil Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- 1. Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang**
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pengelolaan anak perusahaan dan pengelolaan cabang;
- 2. Divisi Pengadaan**
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait dengan pengadaan teknik, pengadaan non-teknik dan administrasi, dan dokumen pengadaan.

Direktur Komersial

Direktur Komersial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang Manajemen Aset, Pemasaran, Aliansi Bisnis dan Pengelolaan Hubungan Pengelolaan.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Komersial adalah sebagai berikut:

- 1. Divisi Pemasaran**
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait strategi pemasaran, pentarifan, dan kerja sama usaha;
- 2. Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan**
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait aliansi bisnis, hubungan pelanggan peti kemas, dan hubungan pelanggan non-peti kemas;
- 3. Divisi Manajemen Aset**
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait portofolio aset, dan penyelesaian aset bermasalah.

Vice President Director

The Vice President Director has the main task of carrying out some of the management tasks of the Company in the field of goods/services procurement and Management of Subsidiaries and Branches.

The main duties and responsibilities of each Division led by Vice President Director are as follows:

- 1. Subsidiary and Branch Management Division**
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main tasks and responsibilities related to subsidiary management and branch management;
- 2. Procurement Division**
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to technical procurement, non-technical and administrative procurement and procurement documents.

Commercial Director

The Commercial Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the areas of Asset Management, Marketing, Business Alliance and Management Relations Management.

The main duties and responsibilities of each Division led by Commercial Director are as follows:

- 1. Marketing Division**
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to marketing strategies, pricing and business cooperation;
- 2. Business Alliance and Customer Relations Division**
Formulate policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to business alliances, container customer relations and non-container customer relations;
- 3. Asset Management Division**
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to portfolio assets and solving problem assets.



Direktur Teknik

Direktur Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang Konstruksi Sipil, Peralatan dan Manajemen Proyek Strategis.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Teknik adalah sebagai berikut:

1. Divisi Konstruksi Sipil

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan sipil, survei dan lingkungan, konstruksi, dan pemeliharaan fasilitas;

2. Divisi Peralatan

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait teknik mesin dan listrik, alat apung dan alat bongkar muat;

3. Divisi Manajemen Proyek Strategis

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan proyek strategis dan pengendalian proyek strategis.

Direktur Operasi

Direktur Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang pelayanan kapal, pelayanan terminal dan sistem informasi.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Operasi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Kapal

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pemanduan dan penundaan serta sarana dan prasarana pelayanan kapal;

2. Divisi Pelayanan Terminal

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pelayanan petikemas, pelayanan non-petikemas, dan manajemen Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L);

Technical Director

The Technical Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the field of Civil Construction, Equipment and Strategic Project Management.

The main duties and responsibilities of each Division led by Technical Director are as follows:

1. Civil Construction Division

Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to civil planning, surveying and the environment, construction and maintenance of facilities;

2. Equipment Division

Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to mechanical and electrical engineering, floating tools and loading and unloading equipment;

3. Strategic Project Management Division

Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main tasks and responsibilities related to strategic project planning and strategic project control.

Operations Director

The Operations Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the field of ship services, terminal services and information systems.

The main duties and responsibilities of each Division led by Operations Director are as follows:

1. Ship Service Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in relation to their main duties and responsibilities related to scouting and delays as well as facilities and infrastructure for ship services;

2. Terminal Services Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in relation to their main duties and responsibilities related to container service, non-container service, and K3L (Health, Safety and Environment) management;

3. Divisi Sistem Informasi

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan dan manajemen informasi, pengembangan sistem informasi, dan pengoperasian dan pengendalian sistem informasi.

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang perencanaan dan pengendalian keuangan, pengelolaan keuangan, layanan keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, dan penganggaran investasi;

2. Divisi Pengelolaan Keuangan

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perbendaharaan keuangan korporasi, dan pencatatan aset;

3. Divisi Layanan Keuangan

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait akuntansi umum dan sistem keuangan, pajak, pusat layanan keuangan dan pelanggan.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang strategi SDM, pembelajaran SDM, layanan SDM dan hukum.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah sebagai berikut:

1. Divisi Hukum

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait dukungan hukum, litigasi, dan pemeriksaan kepatuhan pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan;

3. Information Systems Division

Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to planning and management of information, development of information systems and operation and control of information systems.

Finance Director

The Finance Director has the main task of carrying out some of the management tasks of the Company in the areas of financial planning and control, financial management, financial services.

The main duties and responsibilities of each Division led by Finance Director are as follows:

1. Financial Planning and Control Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to financial planning, financial control and investment budgeting;

2. Financial Management Division

Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate financial treasury and asset recording;

3. Financial Services Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to general accounting and financial systems, taxes, financial service centers and customers.

Human Capital and General Affairs Director

The Human Capital and General Affairs Director has the main task of carrying out Company management tasks in the areas of HC strategy, HC learning, HC services and legal.

The main duties and responsibilities of each Division led by Human Capital and General Affairs Director are as follows:

1. Legal Division

Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to legal support, litigation and compliance checks on the Parent Company and Subsidiaries;



2. Divisi Strategi Sumber Daya Manusia

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan SDM dan organisasi, kebijakan remunerasi dan fasilitas SDM, serta menyusun dan mengendalikan kebijakan pengelolaan SDM pada Anak Perusahaan;

3. Divisi Pembelajaran Sumber Daya Manusia

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan pengembangan kepemimpinan dan budaya Perseroan, pengelolaan talenta dan pembelajaran;

4. Divisi Layanan Sumber Daya Manusia

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait hubungan pekerja, kearsipan, layanan administrasi SDM, umum dan rumah tangga, pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan.

2. Human Capital Strategy Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to HC and organization planning, HC remuneration and facilities, and prepare and control HC management policies in Subsidiaries;

3. Human Capital Learning Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to planning leadership development and corporate culture, talent management and learning;

4. Human Capital Services Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to employee relations, archiving, HC administration services, general and household affairs at the Parent Company and Subsidiaries.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang transformasi dan pengembangan bisnis, manajemen risiko dan kendali mutu.

Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Divisi Transformasi dan Pengembangan Bisnis

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait portofolio bisnis, pengembangan bisnis inti dan pengembangan bisnis pendukung;

2. Divisi Manajemen Risiko

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait risiko operasional dan non operasional;

3. Divisi Kendali Mutu

Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait kendali mutu korporasi, dan standar prosedur operasi.

Transformation and Business Development Director

The Transformation and Business Development Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the areas of business transformation and development, risk management and quality control.

The main duties and responsibilities of each Division led by Transformation and Business Development Director are as follows:

1. Business Transformation and Development Division

Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to business portfolios, core business development and supporting business development;

2. Risk Management Division

Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to operational and non-operational risks;

3. Quality Control Division

Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate quality control, and standard operating procedures.

PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

Program Pengenalan Direksi

IPC mewajibkan anggota Direksi yang baru diangkat pertama kali untuk mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan. Tujuan program pengenalan ini adalah agar para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program Pengenalan Direksi Baru Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi baru.

Penyelenggaraan Program Pengenalan Direksi Baru sepanjang tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Program Pengenalan Direksi Baru Tahun 2020

No.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Place of Implementation	Nama Peserta dan Jabatannya / Name of Participants and Positions	Metode Pelaksanaan / Implementation Method
1.	17 Maret 2020 di Kantor Pusat IPC / March 17, 2020 at IPC Head Office	<ul style="list-style-type: none"> a. Arif Suhartono (pengalih tugas dari Direktur Komersial menjadi Direktur Utama / transfer from Commercial Director to President Director) b. Rima Novianti (Direktur Komersial / Commercial Director) c. Muarip (Direktur Operasi / Operations Director) d. Yon Irawan (Direktur Keuangan / Finance Director) e. Ihsanuddin Usman (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director) 	Pertemuan/Rapat bersama Direksi lama IPC / Meeting with the former IPC Board of Directors
2.	7 Juli 2020 di Kantor Pusat IPC / July 7, 2020 in Head Office	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zuhri Iryansyah (Direktur Teknik / Technical Director) 	Tatap muka / Face-to-face

Adapun materi yang diberikan pada Program Pengenalan Direksi Baru meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

BOARD OF DIRECTORS INTRODUCTION AND CAPABILITY IMPROVEMENT PROGRAM

Board of Directors Introduction Program

IPC requires members of the Board of Directors who are newly appointed for the first time to take part in the introduction program regarding the Company. The purpose of this introduction program is to ensure that members of the Board of Directors can get to know each other and work together as a solid, comprehensive and effective team.

The Corporate Secretary or anyone who functions as the Corporate Secretary is responsible for the implementation of the introduction program. The Company's New Directors Introduction Program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides the appointment of a new member of the Board of Directors.

The implementation of the New Directors Introduction Program throughout 2020 is described as follows:

The Implementation of the New Directors Introduction Program in 2020

The topics provided in the New Directors Introduction Program includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. Description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as other things that are not prohibited.



Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan serta meningkatkan efektivitas kerja Direksi.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2020 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Board of Directors Capability Improvement Program

Capability improvement is considered important so that the Board of Directors can always update information about the latest developments in the Company's core business and applicable laws and regulations in order to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company and to increase the effectiveness of the Board of Directors work.

The realization of the capability improvement program that the Board of Directors participated in throughout 2020 is described in the following table:

Program Peningkatan Kapabilitas Direksi IPC Tahun 2020

IPC Board of Directors Capability Improvement Program in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Nama Program Peningkatan Kapabilitas / Name of the Program	Penyelenggara / Organizer	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Time of Implementation
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
3.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
4.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Engineering Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	<i>Key Performance Indicators and Optimisation: Delivering Results by Aligning Measures with Strategy</i>	Aztech	31 Agustus - 04 September 2020, <i>Online / Daring / August 31 – September 4, 2020, Online</i>
			<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM & Umum / HC & General Affairs Director	Komisaris Profesional / Professional Commissioner	PT Intipesan Pariwara	10 - 11 November 2020, <i>Online / Daring / November 10-11, 2020, Online</i>
			<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor
8.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis / Business Transformation & Development Director	<i>Executive Training for Commissioners and Directors</i>	PT Pelindo II / IPC	13-14 November 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor / November 13-14, 2020, Hotel Tulip Gunung Geulis – Bogor

INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain mana pun dilarang melakukan campur tangan dalam pengurusan Perseroan;
2. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

INFORMASI RANGKAP JABATAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi Perseroan dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik, dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2020 tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat sepanjang tahun 2020 hanya memiliki rangkap jabatan di perusahaan yang tergabung dalam Grup IPC. Adapun informasi rangkap jabatan anggota Direksi tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

In order for the Board of Directors to act in the best possible way for the benefit of the Company as a whole, the independence of the Board of Directors is an important factor that must be maintained. To maintain independence, it is necessary to stipulate the following provisions:

1. Apart from the Board of Directors, any other party is prohibited from interfering in the management of the Company;
2. Each member of the Board of Directors is prohibited from engaging in activities that could interfere with his/her independence in managing the Company.

INFORMATION ON CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the Company's Articles of Association, members of Board of Directors may not hold the following positions:

1. Members of Board of Directors in SOE, Regional SOE and Privately Owned Enterprises;
2. Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in SOE;
3. Other structural and functional positions in the Central and or Regional Government Agencies/Institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of legislation, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

All members of the Board of Directors of the Company who served in 2020 do not have concurrent positions prohibited in the Articles of Association of the Company. All members of the Company's Board of Directors who served throughout 2020 only have concurrent positions in companies that are members of the IPC Group. The information on concurrent positions of members of the Board of Directors in 2020 is described in the following table:



Informasi Rangkap Jabatan Direksi IPC Tahun 2020

Information on IPC Board of Directors Concurrent Positions

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Terms of Office	Informasi Rangkap Jabatan / Information on Concurrent Positions	
				Jabatan pada Grup IPC (Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi/Kerja Sama Operasi) / Position in IPC Group (Subsidiaries/Affiliates/ Joint Operation)	Jabatan pada Perusahaan dan/atau Instansi Lain / Position in Other Companies/ Agencies
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Active as of December 31, 2020					
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / Presiden Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 – April 7, 2024	Plt. Komisaris Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia / Acting President Commissioner of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Nihil / Nil
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	18 November 2019 – 17 November 2024 / November 18, 2019 – November 17, 2024	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Integrasi Logistic Cipta Solusi / President Commissioner of PT Integrasi Logistic Cipta Solusi Komisaris Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia / President Commissioner of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia / President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia 	Nihil / Nil
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 – April 7, 2024	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Multi Terminal Indonesia / President Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok / President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok 	Nihil / Nil
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Plt. Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia / Acting President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia	Nihil / Nil
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT IPC Terminal Petikemas / President Commissioner of PT IPC Terminal Petikemas Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia / President Commissioner of PT Pendidikan Maritim and Logistik Indonesia 	Nihil / Nil
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Finance Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk / President Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Nihil / Nil
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Peti Kemas Koja / Chairman of the Supervisory Board of the KSO Terminal Peti Kemas Koja	Nihil / Nil
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 / June 18, 2020 – June 17, 2025	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia / President Commissioner of PT Electronic Data Interchange Indonesia Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk / President Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia Tbk 	Nihil / Nil
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Inactive as of December 31, 2020					
1.	Elvyn G. Masassya	Direktur Utama / President Director	22 April 2016 – 2 Maret 2020 / April 22, 2016 – March 2, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok / President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk / President Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk 	Nihil / Nil
2.	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan / Finance Director	26 November 2018 – 2 Maret 2020 / November 26, 2018 – March 2, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia / President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi / President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi 	Nihil / Nil
3.	Prasetyadi	Direktur Operasi / Operations Director	16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 / May 16, 2016 – March 2, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia / President Commissioner of PT Electronic Data Interchange Indonesia Komisaris New Priok Container Terminal 1 / Commissioner of New Priok Container Terminal 1 Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia / President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Peti Kemas Koja / Chairman of the Supervisory Board of the KSO Terminal Peti Kemas Koja 	Nihil / Nil
4.	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	14 Juli 2017 – 11 Februari 2020 / July 14, 2017 – February 11, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia / President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi / President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi 	Nihil / Nil
5.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 / May 16, 2016 – June 18, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia / President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia / President Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia Komisaris Utama PT EDI Indonesia / President Commissioner of PT EDI Indonesia 	Nihil / Nil

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan IPC yang dapat mempengaruhi independensinya.

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATIONS

All members of the Board of Directors of the Company do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or with Shareholders or other relationships with IPC that may affect their independence.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi IPC Tahun 2020

Disclosure of IPC Board of Directors Affiliate Relationships in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Terms of Office	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relationship with			Hubungan Keluarga Dengan / Family Relationship with			Hubungan Kepengurusan / Management Relationship
				Sesama Direksi / Fellow Directors	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Pemegang Saham / Shareholders	Sesama Direksi / Fellow Directors	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Pemegang Saham / Shareholders	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Active as of December 31, 2020										
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 / April 7, 2024	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	18 November 2019 – 17 November 2024 / November 18, 2019 – November 17, 2024	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 – April 7, 2024	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Financial Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 / June 18, 2020 – June 17, 2025	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Terms of Office	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relationship with			Hubungan Keluarga Dengan / Family Relationship with			Hubungan Kepengurusan / Management Relationship
				Sesama Direksi / Fellow Directors	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Pemegang Saham / Shareholders	Sesama Direksi / Fellow Directors	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Pemegang Saham / Shareholders	
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Inactive as of December 31, 2020										
1.	Elwyn G. Masassya	Direktur Utama / President Director	22 April 2016 – 2 Maret 2020 / April 22, 2016 – March 2, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
2.	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan / Finance Director	26 November 2018 – 2 Maret 2020 / November 26, 2018 – March 2, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
3.	Prasetyadi	Direktur Operasi / Operations Director	16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 / May 16, 2016 – March 2, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
4.	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	14 Juli 2017 – 11 Februari 2020 / July 14, 2017 – February 11, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
5.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 / May 16, 2016 – June 18, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None
6.	Elwyn G. Masassya	Direktur Utama / President Director	22 April 2016 – 2 Maret 2020 / April 22, 2016 – March 2, 2020	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None	Tidak / None

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di IPC maupun di perusahaan lainnya selama tahun 2020. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INFORMATION ON BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

All Directors have reported to the Company regarding share ownership both in IPC and in other companies in 2020. Share ownership of each Board of Directors can be seen in the table below:

Informasi Kepemilikan Saham Direksi IPC Tahun 2020

Information on IPC Board of Directors Share Ownership in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Jabatan / Terms of Office	Kepemilikan Saham di / Share Ownership at	
				IPC	Perusahaan Lain / Other Company
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Active as of December 31, 2020					
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama / President Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 – April 7, 2024		
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	18 November 2019 – 17 November 2024 / November 18, 2019 – November 17, 2024		
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	8 April 2019 – 7 April 2024 / April 8, 2019 – April 7, 2024		
4.	Rima Novianti	Direktur Komersial / Commercial Director	2 Maret 2020 – 1 Maret / March 2, 2020 – March 1	Nihil / Nil	Nihil / Nil
5.	Muarip	Direktur Operasi / Operations Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025		
6.	Yon Irawan	Direktur Keuangan / Financial Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 / March 2, 2020 – March 1, 2025		
7.	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 // March 2, 2020 – March 1, 2025		
8.	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik / Technical Director	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025 / June 18, 2020 – June 17, 2025		
Berstatus Tidak Aktif Menjabat per 31 Desember 2020 / Inactive as of December 31, 2020					
1.	Elvyn G. Masassya	Direktur Utama / President Director	22 April 2016 – 2 Maret 2020 / April 22, 2016 – March 2, 2020		
2.	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan / Finance Director	26 November 2018 – 2 Maret 2020 / November 26, 2018 – March 2, 2020		
3.	Prasetyadi	Direktur Operasi / Operations Director	16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 / May 16, 2016 – March 2, 2020	Nihil / Nil	Nihil / Nil
4.	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	14 Juli 2017 – 11 Februari 2020 / July 14, 2017 – February 11, 2020		
5.	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik / Technical Director	16 Mei 2016 – 18 Juni 2020 / May 16, 2016 – June 18, 2020		

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan terkait penyelenggaraan rapat Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan.

Hal-hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan melalui Rapat Direksi

Direksi telah menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Meeting is a meeting held by the Board of Directors. Binding decisions can also be stipulated without holding a meeting of the Board of Directors, as long as the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

Board of Directors Meeting Policy

Policies related to the holding of Board of Directors meetings have been regulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.

Matters that Require Decision Making through a Board of Directors Meeting

The Board of Directors has determined matters that require decision making through the Board of Directors Meeting, with the following descriptions:

1. Actions related to the exercise of authority in accordance with the provisions of the Articles of Association, namely:



- a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - c. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
 3. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
 - a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perseroan;
 - b. Di luar rencana dalam RKAP;
 - c. Bersifat mendadak;
 - d. Menyangkut Pekerja dalam jabatan strategis.
- a. Authorities that require the approval of the Board of Directors;
 - b. Authorities that require the approval of the Board of Commissioners; and
 - c. Authorities that require GMS approval.
2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with applicable regulations in the Company.
 3. Other strategic actions, with limitations:
 - a. Has a strategic nature/has significant influence on the Company's operations;
 - b. Outside the plan in the RKAP;
 - c. Unexpected;
 - d. Concerning workers in strategic positions.

Jadwal Rapat

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan;
4. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;

Meeting Schedule

The Board of Directors Meeting is held whenever deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. The Board of Directors meeting may be held outside of the routine schedule, if deemed necessary by:

1. One or more members of the Board of Directors;
2. A written request from the Board of Commissioners;
3. A written request from one or more Shareholders who have the largest number of shares stating the matters being discussed;
4. This Board of Directors Meeting is an urgent and strategic meeting with an agenda of matters requiring decision-making at the Board of Directors level.

Meeting Venue

Board of Directors Meetings may be held at the domicile of IPC or at the operational business location of IPC or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by Board of Directors.

Implementation of Electronic Meetings

Directors' meetings can be held through teleconferencing, video conferencing, or other electronic means that allow all Board of Directors meeting participants to see and hear each other directly and participate in meetings.

Call for Board of Directors Meetings

The meeting call is set as follows:

1. The call for Board of Directors meetings is in writing by a member of Board of Directors entitled to represent the Company and delivered within a period of at least 3 (three) days before the meeting, or in a shorter time for urgent matters;

2. Panggilan dan penyelenggaraan Rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain menurut Rapat Direksi;
3. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
4. Panggilan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Kuorum Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakilkan dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.

Pimpinan Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

- a. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;
- c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana dijelaskan dalam huruf b di atas, maka:
 1. Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat;
 2. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi;
 3. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Oleh sebab itu, anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali

2. The call and implementation of Board of Directors meetings may be delegated to the Corporate Secretary, unless arranged otherwise by a meeting of Board of Directors;
3. A call for a meeting of Board of Directors will include the event, date, time and venue, as well as agenda and material;
4. The call for Board of Directors meeting may be conducted through electronic means (SMS, email and other electronic means) so that the notices of the meeting agenda may be delivered more quickly, by following the procedures outlined in the Articles of Association concerning the formatting of written notices.

Board of Directors Quorum Meeting

Meetings of Board of Directors are valid and titled to make legally binding decisions, when attended by more than 1/2 (one-half) the number of Members of Board of Directors or their representatives. A Member of Board of Directors may be represented in a meeting only by one other Director by virtue of a written authority granted exclusively for that purpose. A Member of Board of Directors may only represent one other Member of Board of Directors

The leadership in Board of Directors meeting is regulated as follows:

- a. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director.
- b. In the event that the President Director is absent or unable to attend, the meeting shall be chaired by an Acting President Director/Director who is appointed or authorized by the President Director.
- c. In the event that the President Director does not make an appointment as explained in letter b above, then:
 1. The Vice President Director shall chair the meeting;
 2. If the Vice President Director is absent, then one of the longest-serving Directors in the office is appointed as the chairman of the Board of Directors meeting;
 3. If the longest serving Director is more than 1 (one) person, then the longest serving Director the oldest by age shall act as the chairperson of the Board of Directors meeting.

Decision-Making in Meetings

Involvement in the Decision-Making Process

The Board of Directors must be involved in every decision-making process at the meeting. Therefore, members of the Board of Directors who are not present at the time the decision will be made must be contacted to immediately



mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:

1. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;
2. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi;
3. Apabila terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
4. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;
5. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
6. Hasil keputusan rapat mengikat seluruh Direktur, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh Direktur telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat;
7. Tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
8. Direksi mengkomunikasikan keputusan yang telah disahkan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengesahan.

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan Pendapat diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

return to the meeting process. If they cannot be contacted, then the meeting participants are deemed to agree with the meeting decision taken.

Decision-Making

Decisions of the Board of Directors Meeting shall be determined by deliberation to reach consensus, if no agreement is reached, the decisions shall be determined by an ordinary majority vote, provided that:

1. Each member of the Board of Directors has the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for the member of the Board of Directors he/she represents;
2. If the number of votes for in favor and against are even, then the decision of the meeting is in accordance with the opinion of the chairman of the meeting while still paying attention to the provisions regarding accountability as a member of the Board of Directors;
3. If there are suggestions for more than 2 (two) alternatives and the voting results have not received one alternative with more than 1/2 of the total votes cast, then a re-election is carried out for the 2 (two) alternatives that received the most votes so that one of the alternatives gets more than 1/2 part of the number of votes cast;
4. A blank vote (*abstain*) is deemed to agree with the proposal submitted in the meeting and is responsible for the results of the meeting's decision;
5. The invalid votes are deemed non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting;
6. The resolutions of the meeting are binding on all Directors, both present and absent, on the basis of the consideration that the Directors are collegial in nature and all Directors have been given sufficient time to be informed of the outcome of the meeting;
7. The level of urgency for the decision-making of the Board of Directors is determined by no later than 7 (seven) days;
8. The Board of Directors relays the decision that has been approved to the organization below the Board of Directors level related to the decision no later than 7 (seven) days after the ratification.

Dissenting Opinion

Dissenting opinions are regulated as follows:

1. Dissenting opinions that occur must be included in the Minutes of Meeting and members of the Board of Directors who differ in opinion must disclose the reasons for the difference in opinion regarding the results of the decision;

2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (sesuai dengan konsep *fiduciary duties*);
3. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Risalah Rapat

Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi, termasuk yang diadakan melalui sarana elektronik, harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah Rapat Direksi juga disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dikumpulkan dalam kumpulan risalah rapat tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Materi Risalah Rapat

Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

1. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
2. Daftar hadir dan salinan Surat Kuasa apabila ada;
3. Permasalahan yang dibahas;
4. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
5. Proses pengambilan keputusan;
6. Keputusan yang ditetapkan;
7. *Dissenting Opinion* (jika ada)

Risalah asli dari setiap rapat Direksi dikumpulkan dalam risalah rapat tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

2. The dissenting opinions do not excuse the member of the Board of Directors the right not to exercise the resolutions of the meeting. Despite the dissenting opinion, all members of the Board of Directors are still obliged to follow and carry out the resolutions of the meeting (according to the concept of *fiduciary duties*);
3. Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the Board of Directors Meeting are the personal responsibility of the person concerned until such action is approved by the Meeting of the Board of Directors.

Minutes of Meetings

Each Board of Directors meeting, including electronic meetings shall have minutes of meetings. The minutes of the meeting shall be signed by the meeting Chairman and all Directors who are present. Minutes of meetings shall be made and administered by the Corporate Secretary or other officers appointed by Board of Directors.

Each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the member of the Board of Directors is present or not present at the meeting. A copy of the minutes of the Board of Directors' Meeting is also submitted to the Board of Commissioners for their information. The original minutes of each meeting of the Board of Directors are collected in a collection of minutes of the annual meeting and stored and must be available upon request by each member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Meeting Minutes Material

The minutes of the meeting must describe the course of the meeting, including:

1. The agenda, place, date and time the meeting was held;
2. Attendance list and a copy of the Power of Attorney, if any;
3. Issues discussed;
4. Various opinions expressed in meetings, especially in discussing strategic or material issues, including the person(s) expressing opinions;
5. Decision making process;
6. Decision stipulated;
7. *Dissenting Opinion* (if any)

The original minutes of each Board of Directors meeting are compiled in an annual meeting minutes, stored, and shall be available when requested by any member of the Board of Directors or Board of Commissioners.



Persetujuan atau Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas Risalah Rapat diatur sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat kepada pimpinan rapat tersebut.
2. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat yang bersangkutan.

Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pencatatan/Notulis Rapat Direksi

Pencatatan/Notulis Rapat Direksi adalah Sekretaris Perusahaan.

Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi

Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dibicarakan atas undangan dari Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

1. Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris;
2. Direksi melaksanakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;

Approval or Minutes of Meeting

The provisions for approval of the Minutes of Meeting are stipulated as follows:

1. Within a period of 14 (fourteen) days from the date of delivery of the minutes of meeting, each member of the Board of Directors who is present and/or represented in the Meeting of the Board of Directors concerned must submit his or her approval or objection and/or suggestion of correction, if any, what is stated in the minutes of the meeting to the chairman of the meeting.
2. If the objections and/or suggestions for corrections to the minutes of meeting are not accepted within that time period, it can be concluded that there are no objections and/or corrections to the minutes of the meeting concerned.

Electronic Documents as a Medium for Minutes of Meetings

Electronic documents can be used as valid evidence of minutes of meetings in addition to written minutes of meetings. The policy on the use of electronic documents as Company documents is stipulated by the Board of Directors by meeting the minimum requirements for the operation of electronic systems in the Company in accordance with statutory provisions concerning electronic information and transactions.

Minute Taker for Board of Director Meetings

The Minute Taker for Board of Directors Meetings is the Corporate Secretary

Evaluation on Follow-up to Previous Meetings

In order to ensure follow-up to previous meetings, the Board of Directors is required to evaluate matters that need to be followed up.

Attendance of the Board of Commissioners at the Board of Directors Meeting

Members of the Board of Commissioners may attend the Meeting of the Board of Directors and provide their opinions on matters discussed at the invitation of the Board of Directors or at the request of the Board of Commissioners. Attendance of the Board of Commissioners at the Board of Directors Meeting is conducted in accordance with the following procedures:

1. The Board of Directors invites the Board of Commissioners to attend the Board of Directors Meeting or at the request of the Board of Commissioners;
2. The Board of Directors conducts the Board of Directors Meeting which is attended by the Board of Commissioners;

3. Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat.

Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Adapun ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi melalui sirkuler diajukan oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi atau oleh unit pengusul melalui salah seorang anggota Direksi, dan seluruh anggota Direksi harus memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan dalam sirkuler tersebut. Apabila terhadap usulan yang diajukan terdapat anggota Direksi yang tidak memberikan persetujuan maka keputusan sirkuler tidak bisa diambil.
2. Keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis.
3. Bukan merupakan sebuah keputusan atas suatu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS.
4. Permasalahan yang diketahui sebelumnya/pernah dibahas.
5. Keputusan yang diambil, disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
6. Keputusan secara sirkuler dilakukan dengan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal penandatanganan pertama sampai dengan penandatanganan terakhir. Dalam hal terdapat seorang atau lebih anggota Direksi tidak menandatangani usulan tersebut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah sirkuler tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, maka Direksi wajib melaksanakan rapat secara fisik.

PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI TAHUN 2020

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi IPC telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 38 kali.

3. The Corporate Secretary prepares minutes of meetings and distributes them to meeting participants.

Circular Decision Making

Decisions can also be taken outside the Board of Directors Meeting as long as all members of the Board of Directors agree on the method and material to be decided. The provisions for decisions taken in the form of a Circular Meeting are as follows:

1. The circular decision of the Board of Directors is submitted by one or more members of the Board of Directors or by the proposing unit through a member of the Board of Directors, and all members of the Board of Directors must give their approval of the proposal submitted in the circular. If there is a member of the Board of Directors who disagrees with the proposal, the circular decision cannot be made.
2. Decisions taken in the form of circular meetings are not decisions of a strategic nature.
3. It is not a decision on an action of the Board of Directors which requires the approval of the Board of Commissioners/GMS.
4. Issues that are known before/have been discussed.
5. Decisions taken are approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.
6. Circular decisions are made with a time limit not later than 14 (fourteen) working days, starting from the date of the first signing until the last signing. In the event that one or more members of the Board of Directors do not sign the proposal, then no later than 14 (fourteen) working days after the circular is not signed by all members of the Board of Directors, the Board of Directors is obliged to hold a meeting physically.

BOARD OF DIRECTORS MEETING IN 2020

Board of Directors Internal Meeting

In 2020, IPC Board of Directors held 38 internal meetings.



Rencana Rapat Internal Direksi
Rencana Rapat Direksi Tahun 2020

Board of Directors Internal Meeting Plan
Board of Directors meeting plans for 2020

No.	Minggu / Week	Agenda	
Januari / January			
1.	Minggu #02 / Week #02	1. <i>CEO Direction</i> ; 2. Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; 3. Arah Pengembangan Anak Perusahaan 2020 sd 2024; 4. Tindak lanjut optimalisasi Bojonegara; 5. Progres penyelesaian Kontrak Komersial yang jatuh tempo tahun 2019; 6. Progres penyusunan SK Bisnis Model Baru; 7. Tindak lanjut pengembangan Tanjung Carat; 8. Tindak lanjut Komersialisasi JICT2; 9. Tindak lanjut pembangunan Kalibaru; 10. Tindak lanjut pembangunan Terminal Kijing; 11. Tindak lanjut pembangunan CBL; 12. Rencana investasi perbaikan/perkuatan dermaga sisi barat JICT; 13. Rekonfigurasi Pelabuhan; 14. Laporan Rencana Kementerian PUPR untuk Pengembangan Pesisir Jakarta; 15. Progres Integrasi System di IPC Group dalam 1 Platform; 16. Progres Pelimpahan Pemanduan di luar IPC; 17. Realisasi kinerja IPC sampai dengan Desember 2019; 18. Kronologis dan progres <i>update</i> Global Bond; 19. Kronologis dan progres <i>update</i> PT JICT dan Koja; 20. Tindak lanjut komersialisasi Jalan Tol Cilincing – Cibitung; 21. Lain-lain.	1. CEO Direction; 2. Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; 3. Development Direction of Subsidiaries 2020-2024; 4. Follow-up on optimization of Bojonegara; 5. Progress of completion of Commercial Contracts maturing in 2019; 6. Progress of drafting a New Business Model Decree; 7. Follow-up on development of Tanjung Carat; 8. Follow-up on JICT2 Commercialization; 9. Follow-up on development of Kalibaru; 10. Follow-up on construction of Kijing Terminal; 11. Follow-up on development of CBL; 12. Investment plan for repair/strengthening of JICT west side dock; 13. Port Reconfiguration; 14. Report on the Ministry of Public Works and Housing Plan for Coastal Development in Jakarta; 15. Progress of System Integration in IPC Group into 1 Platform; 16. Guidance Delegation Progress outside the IPC; 17. Realization of IPC performance up to December 2019; 18. Chronology and progress update of Global Bond; 19. Chronology and progress update of PT JICT and Koja; 20. Follow-up on commercialization of Cilincing – Cibitung Toll Road; 21. Others.
2.	Minggu #03 / Week #03	1. <i>CEO Direction</i> ; 2. Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; 3. Arah Pengembangan Anak Perusahaan 2020 sd 2024; 4. Rekonfigurasi Pelabuhan; 5. Realisasi kinerja IPC sampai dengan Desember 2019; 6. Usulan IT <i>Charging</i> Model IPC Group; 7. <i>Review Prooses Data Center</i> (DC) dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) IPC; 8. Progres <i>Asset Management System</i> ; 9. Tindak lanjut ekspansi komersial ke luar negeri pasca <i>Sister Port / MoU</i> (Sabah, Bangladesh, Zanzibar, dll); 10. <i>Review</i> pentarifan komersial; 11. <i>Review</i> PBM Terminal Operator; 12. <i>Review</i> KSMU; 13. Progres optimalisasi aset per cabang dan plan 2020; 14. <i>Review</i> implementasi RKM 2019 dan plan RKM 2020; 15. Progres tindak lanjut SHA; 16. Tindak lanjut plan pengelolaan Batu Ampar; 17. <i>Report</i> progres pekerjaan Port <i>Maintenance / Development</i> di 12 Cabang; 18. <i>plan</i> Standarisasi Premises termasuk <i>New Face Kantor</i> Tahun 2020; 19. <i>Issue</i> Korporasi per Cabang; 20. Taksasi dan analisa keuangan 2019; 21. Progres Program Modernisasi Keuangan IPC; 22. Program <i>Green Port</i> dan <i>Smart Port</i> IPC 2020; 23. Progres merger PT ILCS dan PT EDII; 24. <i>Update</i> isu-isu Anak Perusahaan; 25. Tindak lanjut akuisisi PT TPI; 26. Tindak lanjut akuisisi KBS; 27. Plan penyelesaian sengketa aset dengan BUMN lain; 28. Tindak lanjut rencana akuisisi UPT; 29. Progres Digital Port di 12 Cabang dan <i>Action Plan</i> 2020; 30. Progres dan rencana pembaruan alat operasional; 31. Persiapan alat Kijing; 32. Rencana peremajaan kapal 2020; 33. Rencana implementasi Sektap Pelindo 2020; 34. Progres <i> Holding RS</i> ; 35. Pipeline Transformasi Program 2020; 36. lain-lain.	1. CEO Direction; 2. Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; 3. Development Direction of Subsidiaries 2020-2024; 4. Port Reconfiguration; 5. Realization of IPC performance up to December 2019; 6. Proposed IT Charging Model for IPC Group; 7. Review of IPC Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) processes; 8. Asset Management System progress; 9. Follow-up on commercial expansion overseas after Sister Port/ MoU (Sabah, Bangladesh, Zanzibar, etc.); 10. Review of commercial rates; 11. PBM Terminal Operator Review; 12. KSMU Review; 13. Progress of asset optimization per branch and 2020 plan; 14. Review of 2019 RKM implementation and 2020 RKM plan; 15. SHA follow-up progress; 16. Follow-up plan for Batu Ampar management; 17. Report on the progress of Port Maintenance/Development work in 12 branches; 18. Plan for Premises Standardization including Office New Face for 2020; 19. Corporate Issue per Branch; 20. Financial analysis and estimation 2019; 21. Progress of IPC Financial Modernization Program; 22. IPC Green Port and Smart Port Program 2020; 23. Progress of PT ILCS and PT EDII merger; 24. Update on Subsidiary issues; 25. Follow-up on PT TPI acquisition; 26. Follow-up on KBS acquisition; 27. Plan for resolving asset disputes with other SOEs; 28. Follow-up on UPT acquisition plan; 29. Progress of Digital Port in 12 Branches and Action Plan 2020; 30. Progress and plan for updating operational equipment; 31. Preparation for Kijing equipment; 32. Ship renovation plan 2020; 33. Sektap Pelindo 2020 implementation plan; 34. Progress of Hospital Holding; 35. Pipeline Transformation Program 2020; 36. Others.

No.	Minggu / Week	Agenda	
3.	Minggu #04 / Week #04	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; 3. Isu korporasi per Cabang; 4. Materi Rakomdir; 5. Restrukturisasi/Transformasi Anak Perusahaan; 6. Progres aset lahan bermasalah; 7. Progres optimalisasi lahan <i>idle</i>; 8. Tindak lanjut rencana pengelolaan Batu Ampar; 9. Rekonfigurasi Pelabuhan; 10. Restrukturisasi PT PII; 11. Taksasi Analisa Keuangan 2019; 12. Realisasi Kinerja IPC sampai dengan Desember 2019; 13. Progres penyelesaian hutang piutang Anak Perusahaan dengan IPC; 14. Rencana Standarisasi Premises termasuk <i>New Face</i> Kantor Tahun 2020; 15. Rencana implementasi HRD System; 16. Apresiasi Pegawai; 17. Persetujuan kerja sama IPC dengan MUI; 18. Materi Penuansaan Budaya: <i>Pin Culture</i>, Budaya Malu; 19. Laporan progres Review Transformasi Korporat; 20. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; 3. Corporate issues per branch; 4. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 5. Subsidiary Restructuring/Transformation; 6. Progress of problematic land assets; 7. Progress of idle land optimization; 8. Follow-up on Batu Ampar management plan; 9. Port Reconfiguration; 10. PT PII; Restructuring; 11. Financial Analysis Estimation 2019; 12. Realization of IPC Performance up to December 2019; 13. Progress of subsidiaries' accounts payable settlement with IPC; 14. Plan for Premises Standardization including Office <i>New Face</i> for 2020; 15. HRD System implementation plan; 16. Employee Appreciation; 17. Cooperation agreement between IPC and MUI; 18. Culture Dissemination Material: <i>Pin Culture</i>, Culture of Shame; 19. Report on the progress of the Corporate Transformation Review; 20. Others.
Februari / February			
4.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat Komersial; 3. Restrukturisasi PT PII; 4. Taksasi Analisa Keuangan 2020; 5. Review Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Sunda Kelapa Heritage Port; 6. Progres Sinergi BUMN; 7. Laporan Komite Investasi per Cabang Anak Perusahaan; 8. Proses Seleksi Operator CT2/3; 9. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Commercial Directorate; 3. PT PII Restructuring; 4. Financial Analysis Estimation 2020; 5. Review of Feasibility Study on Sunda Kelapa Heritage Port Development Plan; 6. BUMN Synergy Progress; 7. Investment Committee Report per Subsidiary Branch; 8. CT2/3 Operator Selection Process; 9. Others.
5.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Implementasi <i>Corporate Culture</i> 2019; 3. Capaian Kinerja keuangan bulan Januari 2020; 4. Materi Rakomdir; 5. Review Organisasi Cabang; 6. Program Konsolidasi Anak Perusahaan; 7. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. 2019 Corporate Culture Implementation; 3. Financial performance achievement for January 2020; 4. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 5. Review of Branch Organizations; 6. Subsidiary Consolidation Program; 7. Others.
Maret / March			
6.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat Teknik; 3. Laporan Dirbina; 4. Capaian kinerja keuangan bulan Februari 2020; 5. Materi Rakomdir; 6. Pembahasan permasalahan strategis Perusahaan; 7. Persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2019; 8. Progres Bisnis Development Organik dan Anorganik di Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan; 9. Review SOP 10. Progres Standarisasi Premises Tahun 2018; 11. Progres Restrukturisasi Anak Perusahaan; 12. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Technical Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Financial performance achievement for February 2020; 5. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 6. Discussion of the Company's strategic issues; 7. Preparation for the GMS for the Annual Report of 2019 Financial Year; 8. Organic and Inorganic Business Development Progress at the Head Office, Branches and Subsidiaries; 9. Review of SOPs; 10. Premises Standardization Progress of 2018; 11. Subsidiary Restructuring Progress; 12. Others.



No.	Minggu / Week	Agenda	
April			
7.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat Operasi; 3. Laporan Dirbina; 4. Materi Rakomdir; 5. Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I dan Rencana Kerja Triwulan II; 6. Pembahasan permasalahan strategis Perusahaan; 7. Progres restrukturisasi Anak Perusahaan; 8. Progres atas hasil evaluasi <i>New Development Industry</i> Pelabuhan Dunia; 9. Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan Triwulan I; 10. Laporan <i>Dwelling Time</i> Triwulan I; 11. Laporan Pelaksanaan Investasi 2020 Triwulan I; 12. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Operations Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 5. Quarter I Financial Performance Achievements and Quarter II Work Plan; 6. Discussion of the Company's strategic issues; 7. Subsidiary restructuring progress; 8. Progress on evaluation of New Development of World Port Industry; 9. Activity implementation report of the Corporate Secretary for Quarter I; 10. Quarter I Dwelling Time Report; 11. Quarter I Investment Implementation Report 2020; 12. Others.
Mei / May			
8.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat Keuangan; 3. Capaian Kinerja Keuangan Bulan April Tahun 2020; 4. Laporan Dirbina; 5. Materi Rakomdir; 6. Progres Monostatus Karyawan; 7. Persiapan penanganan arus barang dan penumpang terkait Idul Fitri; 8. Struktur Biaya Logistik Pelabuhan; 9. Progres Pelindo <i>Incorporated</i>; 10. Laporan <i>Top List</i> Risiko dan Mitigasinya; 11. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Finance Directorate; 3. Financial Performance Achievements for April 2020; 4. Dirbina Report; 5. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 6. Employee Monostatus Progress; 7. Preparation for cargo and passengers flow handling related to Eid Al-Fitr; 8. Port Logistics Fee Structure; 9. Pelindo Incorporated Progress; 10. Top List of Risks and Mitigation Report; 11. Others.
Juni / June			
9.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat SDM; 3. Laporan Dirbina; 4. Materi Rakomdir; 5. Capaian Kinerja Keuangan Bulan Mei Tahun 2020; 6. Review Program Transformasi di seluruh Direktorat; 7. Evaluasi operasional Cabang dan Anak Perusahaan; 8. Progres kerja sama Batu Ampar; 9. Tindak lanjut <i>Sister Port</i>; 10. Pembahasan usulan program SDM dan Kepegawaian; 11. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Human Capital Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 5. Financial Performance Achievements for May 2020; 6. Review of the Transformation Program in all Directorates; 7. Operational evaluation of Branches and Subsidiaries; 8. Progress of Batu Ampar cooperation; 9. Follow-up on Sister Port; 10. Discussion of HC and Employment program proposals; 11. Others.
Juli / July			
10.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis; 3. Laporan Dirbina; 4. Capaian Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020; 5. Rencana Kerja Perusahaan Semester II Tahun 2020; 6. Laporan Rencana Kerja Manajemen Semester I Tahun 2020; 7. Laporan <i>Dwelling Time</i> Triwulan I; 8. Review penanganan arus barang dan penumpang setelah Idul Fitri; 9. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters of the Business Transformation and Development Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Financial Performance Achievements for Semester I of 2020; 5. Company Work Plan Semester II Year 2020; 6. Management Work Plan Report Semester I Year 2020; 7. Quarter I Dwelling Time Report; 8. Review of cargo and passengers flow handling after Eid Al-Fitr; 9. Others.
11.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres masing-masing Direktorat; 3. Laporan Dirbina; 4. Materi Rakomdir; 5. Progres <i>Business Intelligence</i> sebagai <i>Ecosystem</i>; 6. Progres <i>Heritage Port</i> Sunda Kelapa 7. Progres KSMU Cabang dan Anak Perusahaan; 8. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters and Progress Reports of each Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; 5. Progress of Business Intelligence as an Ecosystem; 6. Progress of Sunda Kelapa Heritage Port; 7. Progress of KSMU Branches and Subsidiaries; 8. Others.

No.	Minggu / Week	Agenda	
Agustus / August			
12.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review Keputusan & Pending Matters masing-masing Direktorat; Materi Rakomdir; Laporan Dirbina; Pembahasan permasalahan strategis Perusahaan; Update Earning Asset & Fixed Asset; Tindak lanjut kerja sama dengan Swasta; Progres INSW; Capaian kinerja keuangan Bulan Juli Tahun 2020; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions & Pending Matters of each Directorate; Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Dirbina Report; Discussion of the Company's strategic issues; Update Earning Asset & Fixed Asset; Follow-up on cooperation with private companies; INSW progress; Financial performance achievements for July 2020; Others.
September			
13.	Minggu #03 / Week #03	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review Keputusan & Pending Matters masing-masing Direktorat; Capaian kinerja keuangan bulan Agustus Tahun 2020; Pembahasan usulan investasi tahun 2021 Cabang dan Anak Perusahaan; Materi Rakomdir; Laporan Dirbina; Progres penyelesaian hutang piutang IPC Group; Laporan Implementasi E-Payment di IPC Group; Tindak lanjut Forum Manajemen; Proyek strategis Perusahaan; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions & Pending Matters of each Directorate; Financial performance achievements for August 2020; Discussion of investment proposals for 2021 Branches and Subsidiaries; Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Dirbina Report; Progress of IPC Group's accounts payable settlement; Report on E-Payment Implementation in IPC Group; Follow-up on Management Forum; The Company's strategic projects; Others.
Oktober / October			
14.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review Keputusan & Pending Matters masing-masing Direktorat; Laporan Dirbina; Materi Rakomdir; Review Pengelolaan Common Gate; Laporan Dwelling Time Triwulan I; Pembahasan usulan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2021; Progres Business Intelligence sebagai Ecosystem; Pembahasan usulan RKAP Tahun 2021; Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III dan Rencana Kerja Triwulan IV; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions & Pending Matters of each Directorate; Dirbina Report; Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Review of Common Gate Management; Quarter I Dwelling Time Report; Discussion on the proposed 2021 Management Work Plan; Progress of Business Intelligence as an Ecosystem; Discussion on the proposed 2021 RKAP; Quarter III Financial Performance Achievements and Quarter IV Work Plans; Others.
November			
15.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review Keputusan & Pending Matters masing-masing Direktorat; Materi Rakomdir; Capaian kinerja keuangan bulan Oktober Tahun 2020; Progres Proyek Strategis; Persiapan Rakernas; Pembahasan Finalisasi Usulan RKAP Tahun 2020; Persiapan HUT IPC; Tindak lanjut pengelolaan PKBL; Pembahasan persiapan RUPS RKAP Tahun 2019; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions & Pending Matters of each Directorate; Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Financial performance achievements for October 2020; Strategic Project Progress; Preparation of National Work Meeting; Discussion on the Finalization of the Proposed 2020 RKAP; Preparation for IPC Anniversary; Follow-up on PKBL management; Discussion on the preparations for the 2019 RKAP GMS; Others.
Desember / December			
16.	Minggu #01 / Week #01	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; Pembahasan materi Rakomdir; Laporan persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2020; Rekonfigurasi terminal dan pelabuhan IPC; Progres rencana pengembangan ekosistem pelabuhan; Progres rencana program ekosistem terkait KEK; Review Keputusan & Pending Matters Direktorat; Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; Discussion of Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Report on the preparation for 2020 Christmas and New Year transportation; IPC terminal and port reconfiguration; Progress of port ecosystem development plan; Progress of ecosystem program plan related to KEK; Review of Decisions & Pending Matters of Directorates; Remuneration for the Board of Directors & Board of Commissioners; Others.
17.	Minggu #02 / Week #02	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres masing-masing Direktorat; Materi Rakomdir; Laporan dan Persetujuan RKAP 2021; Laporan progres LHA SPI; Progres proses pengadaan Tahun 2020; Laporan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2020; Laporan RKM Strategis Kantor Pusat; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions & Pending Matters and Progress Report of each Directorate; Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Report and Approval of the 2021 RKAP; LHA SPI progress report; Progress of the 2020 procurement process; Management Work Plan Report 2020; Head Office Strategic RKM Report; Others.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Rate of Members of the Board of Directors at the Board of Directors Meetings

The following is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors at the Board of Directors Meetings held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Rate of Members of the Board of Directors at the Board of Directors Meetings in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama* / President Director	38	37	97%
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	38	38	100%
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director	38	37	97%
4.	Rima Novianti**	Direktur Komersial / Commercial Director	30	24	80%
5.	Muarip**	Direktur Operasi / Operations Director	30	27	90%
6.	Yon Irawan**	Direktur Keuangan / Finance Director	30	30	100%
7.	Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	30	30	100%
8.	Zuhri Iryansyah***	Direktur Teknik / Technical Director	17	16	97%
9.	Elvyn Gani Masassya****	Direktur Utama / President Director	8	8	100%
10.	Widyaka Nusapati****	Direktur Keuangan / Finance Director	8	8	100%
11.	Prasetyadi****	Direktur Operasi / Operations Director	8	8	100%
12.	Rizal Ariansyah****	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	8	6	75%
13.	Dani Rusli Utama *****	Direktur Teknik / Technical Director	21	20	97%

Rata-rata persentase kehadiran Direksi dalam rapat Direksi /

Average attendance rate of the Board of Directors in the Board of Directors meetings

95%

Keterangan: / Description:

*) Efektif dialih tugaskan dari Direktur Komersial menjadi Direktur Utama IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively transferred from Commercial Director to President Director of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively served as Director of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

****) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively served as Director of IPC since June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The term of office as Director of IPC officially ends on March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / The term of office as Director of IPC officially ends on June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Internal Direksi

Berikut ini disampaikan informasi mengenai agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta yang hadir dalam rapat internal Direksi selama tahun 2020.

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Internal Direksi Tahun 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda
1.	Rabu, 08 Januari 2020 / Wednesday, January 8, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Tindak Lanjut Optimalisasi Bojonegara; Arah Pengembangan Anak Perusahaan 2020 s.d 2024; Tindak Lanjut Optimalisasi Bojonegara; Progress Penyelesaian Kontrak Komersial yang Jatuh Tempo Tahun 2019; Progress Penyusunan SK Bisnis Model Baru; Tindak Lanjut Pengembangan Tanjung Carat; Progress Pembangunan Terminal dan Inland Waterways CBL dari seluruh Aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Tindak Lanjut Pembangunan Terminal Kijing; Progress Pembangunan Terminal dan Inland Waterways CBL dari seluruh Aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Rencana Investasi Perbaikan/Perkuatan Dermaga Sisi Barat PT JICT; Rekonfigurasi Pelabuhan; Laporan Rencana Kementerian PUPR untuk Pengembangan Pesisir Jakarta; Progress Integrasi Sistem di IPC Group dalam 1 Platform; Progress Pelimpahan Pemanduan di luar IPC; Realisasi Kinerja IPC sampai dengan Desember 2019 16; Tindak Lanjut Komersialisasi Jalan Tol Cilincing Cibitung; Kronologis dan Progress Update PT JICT dan Koja (Dirsum), Kalibaru (Dirtek), Global Bond (Direktur); Lain-lain.
2.	Selasa, 14 Januari 2020 / Tuesday, January 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; Laporan Dirbina; Reviu Implementasi RKM 2019 dan Plan RKM 2020; Progress Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI; Arah Pengembangan Anak Perusahaan 2020 s.d 2024; Progress Merger PT ILCS dan PT EDII; Issue - Issue per Anak Perusahaan; Tindak Lanjut Akuisisi PT TPI; Progress Holding RS; Progress Asset Management System; Tindak Lanjut Ekspansi Komersial ke Luar Negeri pasca Sister Port/ MoU (Sabah, Bangladesh, Zanzibar, dll); Reviu Pentariffan Komersial; Reviu Perusahaan Bongkar Muat Terminal Operasi; Reviu KSMU Progress Optimalisasi Aset per Cabang dan Plan 2020; Progress Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam; Progress Akuisisi KBS; Tindak Lanjut Rencana Akuisisi UPT; Plan Penyelesaian Sengketa Aset dengan BUMN lain; Rekonfigurasi Pelabuhan; Report Progress Pekerjaan Port Maintenance/Development di 12 Cabang; Progress Physical Appearance per Cabang; Plan Standarisasi Premises termasuk New Face Kantor Tahun 2020; Progress dan Plan Pembaharuan Alat Operasional; Plan Peremajaan Kapal 2020; Persiapan Peralatan Kijing; Progress Digital Port di 12 Cabang dan Action Plan 2020; Program Green Port dan Smart Port IPC 2020 Reviu Proses Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) IPC Taksasi dan Analisa Keuangan 2019 31. Program Green Port dan Smart Port IPC 2020; Taksasi dan Analisa Keuangan 2019; Progress Program Modernisasi Keuangan IPC; Realisasi Kinerja IPC; Plan Implementasi HRD System 2020; Usulan Program Sektap Pelindo 2020; Pipeline Transformasi Program 2020; Lain - lain

Agenda, Time, and Participants of the Board of Directors Internal Meeting

The following is information regarding the agenda, implementation time, and participants who attended the Board of Directors internal meeting during 2020.

Agenda, Time, and Participants of the Board of Directors Internal Meeting in 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
1.	Rabu, 08 Januari 2020 / Wednesday, January 8, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Follow Up on Optimization of Bojonegara; Development Direction of Subsidiaries 2020 to 2024; Follow Up on Optimization of Bojonegara; Progress of Completion of Commercial Contracts due in 2019; Progress of New Business Model Decree preparation; Follow-up on Development of Tanjung Carat; Progress of Development of CBL Terminal and Inland Waterways from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Follow-up on Kijing Terminal construction; Progress of Terminal Development and CBL Inland Waterways from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Investment Plan for Repair/Strengthening of PT JICT West Side Dock; Port Reconfiguration; Report of the Ministry of Public Works and Housing Plan for Coastal Development of Jakarta; Progress of IPC Group System Integration into 1 Platform; Progress of Guidance Delegation outside IPC; Realization of IPC Performance up to December 2019; Follow-up on Commercialization of Cilincing Cibitung Toll Road; Chronology and Progress Update of PT JICT and Koja (Dirsum), Kalibaru (Dirtek), Global Bond (Director); Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Elvyn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Ogi Rulino
2.	Selasa, 14 Januari 2020 / Tuesday, January 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; Dirbina Report; Review of 2019 RKM implementation and 2020 RKM Plan; Progress of the Follow-up on SPI Audit Report; Development Direction of Subsidiaries 2020 to 2024; Merger Progress of PT ILCS and PT EDII; Issues per Subsidiary; Follow-up on PT TPI Acquisition; Progress of Hospital Holding; Progress of Asset Management System; Follow-up on overseas commercial expansion after Sister Port/MoU (Sabah, Bangladesh, Zanzibar, etc.); Commercial Rates Review; Review of loading and unloading companies in operating terminals; KSMU review; Progress of Asset Optimization per Branch and 2020 Plan; Progress of Batu Ampar Port Management, Batam; Progress of KBS Acquisition; Follow-up on UPT Acquisition Plan; Plan of Asset Dispute Settlement with other SOEs; Port Reconfiguration; Report on Progress of Port Maintenance/ Development Work in 12 Branches; Progress of Physical Appearance per Branch; Premises Standardization Plan including Office New Face 2020; Progress and Plan for Operational Equipment Replacement; Ship Renovation Plan 2020; Kijing Equipment Preparation; Progress of Digital Port in 12 Branches and 2020 Action Plan; IPC 2020 Green Port and Smart Port Program IPC Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) Process Review Financial Analysis and Estimation 2019 IPC Green Port and Smart Port Program 2020; Estimation and Financial Analysis 2019; Progress of IPC Financial Modernization Program; Realization of IPC Performance; HRD System Implementation Plan 2020; Proposal of Pelindo Sektap Program 2020; Pipeline Transformation Program 2020; Others 	<ol style="list-style-type: none"> Elvyn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	
3.	Selasa, 21 Januari 2020 / Tuesday, January 21, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; Laporan Dirbina; Restrukturisasi / Transformasi Anak Perusahaan (<i>in detail</i>); Progress Aset Lahan Bermasalah; Progress Optimalisasi Lahan Idle; Progress Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam; Rekonfigurasi Pelabuhan; Restrukturisasi PT PII; Materi Penuasaan Budaya : Pin Culture, Budaya Malu; Realisasi Kinerja IPC sampai dengan Desember 2019; Progress Penyelesaian Hutang Piutang Anak Perusahaan dengan IPC; Plan Standarisasi Premises termasuk New Face Kantor Tahun 2020; Plan Implementasi HRD System 2020; Apresiasi Pegawai Persetujuan Kerja sama IPC dengan MUI Materi Penuasaan Budaya : Pin Culture, Budaya Malu; Laporan Progress Review Transformasi Korporat Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; Dirbina Report; Subsidiary Restructuring/Transformation (<i>in detail</i>); Progress of Troubled Land Assets; Progress of Idle Land Optimization; Progress of Batu Ampar Port Management, Batam; Port Reconfiguration; PT PII Restructuring; Culture Dissemination Material: Pin Culture, Culture of Shame; Realization of IPC Performance up to December 2019; Progress of Subsidiaries' Accounts Receivable Settlement with IPC; Premises Standardization Plan including Office New Face 2020; HRD System Implementation Plan 2020; Employee Appreciation; Cooperation Agreement between IPC and MUI; Culture Dissemination Material: Pin Culture, Culture of Shame; Progress Review Report on Corporate Transformation; Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Elyvn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Ogi Rulino
4.	Selasa, 28 Januari 2020 / Tuesday, January 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan Laporan Dirbina dan Issue Korporasi per Cabang <ol style="list-style-type: none"> Pending Matters Wadirut Pending Matters Dirkom Pending Matters Dirtek Pending Matters Dirops Pending Matters Dirkeu Pending Matters Dirsum Pending Matters Ditrans Pembahasan Materi Rakomdir; Restrukturisasi / Transformasi Anak Perusahaan (<i>in detail</i>); Progress Aset Lahan Bermasalah; Progress Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam; Rekonfigurasi Pelabuhan; Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2015; Laporan Progress Review Transformasi Korporat; Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; Dirbina and Corporate Issue Reports per Branch <ol style="list-style-type: none"> Pending Matters of Vice President Director Pending Matters of Commercial Director Pending Matters of Technical Director Pending Matters of Operations Director Pending Matters of Finance Director Pending Matters of Human Capital Director Pending Matters of Transformation Director Discussion of Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting; Subsidiary Restructuring/Transformation (<i>in detail</i>); Progress of Troubled Land Assets; Progress of Batu Ampar Port Management, Batam; Port Reconfiguration; Review of ISO 14001:2015 Environmental Management System; Progress Review Report on Corporate Transformation; Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Elyvn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino
5.	Kamis, 30 Januari 2020 / Thursday, January 30, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Reviu Keputusan dan Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat; Laporan Dirbina dan Issue Korporasi per Cabang <ol style="list-style-type: none"> Pending Matters Wadirut Pending Matters Dirkom Pending Matters Dirtek Pending Matters Dirops Pending Matters Dirkeu Pending Matters Dirsum Pending Matters Ditrans; Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; Rekonfigurasi Pelabuhan; Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2015 Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Review of Decisions and Pending Matters and Progress Report of the Directorates; Dirbina Reports and Corporate Issue per Branch <ol style="list-style-type: none"> Pending Matters of Vice President Director Pending Matters of Commercial Director Pending Matters of Technical Director Pending Matters of Operations Director Pending Matters of Finance Director Pending Matters of Human Capital Director Pending Matters of Transformation Director Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; Port Reconfiguration; Management Review of ISO 14001:2015 Environmental Management System Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Elyvn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino
6.	Selasa, 04 Februari 2020 / Tuesday, February 4, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Restrukturisasi PT PII; Progress CT2 beserta timeline; Progress Terminal Operator Kijing Port dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Progress Muara Jati Cirebon dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Progress Batu Ampar dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Rekomendasi final dari hasil negosiasi SHA PT NPCT1; Rekonfigurasi; Progress Physical Appearance per Cabang; Rencana Investasi Tahun 2020; Progress Pengembangan Terminal Kijing dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Progress Pembangunan Terminal dan Inland Waterways CBL dari seluruh Aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal); Progress Jalan Tol Cilincing - Cibitung termasuk Rencana Pengembangan TOD (Aspek Financing, dll); Rencana Investasi Tahun 2020; Progress Digital Port per Cabang; Roadmap Implementasi Green Port; Roadmap Implementasi Corporate Culture; Representative di Pelabuhan Batam; Tindak Lanjut Pengembangan KEK Tanjung Carat dan KEK Bengkulu; Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Restructuring of PT PII; CT2 Progress and timeline; Progress of Kijing Port Operator Terminal from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Progress of Muara Jati Cirebon from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Progress of Batu Ampar from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Final recommendation from SHA PT NPCT1 negotiation result; Reconfiguration; Progress of Physical Appearance per Branch; Investment Plan for 2020; Progress of Kijing Terminal development from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Progress of CBL Terminal and Inland Waterways development from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal); Cilincing - Cibitung Toll Road progress including TOD Development Plan (Financing Aspects, etc.); Investment Plan for 2020; Progress of Digital Port per Branch; Roadmap for Green Port Implementation; Roadmap for Corporate Culture Implementation; Representative at Batam Port; Follow-up on the development of KEK Tanjung Carat and KEK Bengkulu; Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Elyvn G. Massya Hambra Samal Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino

No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	
7.	Selasa, 11 Februari 2020 / Tuesday, February 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Laporan Direksi IPC sebagai Komisaris Anak Perusahaan; 3. Kajian Saham WTR (JTCC) 4. Restrukturisasi PT PII 5. Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan 6. Penyelesaian Outstanding Status Setoran Modal Tahun 2012 – 2013 dari IPC ke PT RSP 7. Progress Batu Ampar dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 8. Progress Terminal Operator Kijing Port dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansia I dan Legal) 9. Progress CT3 10. Rencana Pengerukan : a) Rencana Capex dan Opex Dredging Tahun 2020 b) Rencana Pelaksanaan Dredging Tahun 2020 berbasis Kontrak Kedalaman; 11. Progress Jalan Tol Cilincing - Cibitung termasuk Rencana Pengembangan TOD (Aspek Financing, dll) 12. Tindak Lanjut Kerja sama Pengelolaan Kalibaru 13. Progress Digital Port per Cabang 14. Roadmap Implementasi Green Port 15. Roadmap Implementasi Corporate Culture 16. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan BPJS Kesehatan 17. Representative di Pelabuhan Batam 18. Eksekusi 51 persen Saham IPC di PT JICT dalam rangka Pemenuhan PDTT BPK 19. Tindak Lanjut Pengembangan KEK Tanjung Carat dan KEK Bengkulu 20. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Report of the Board of Directors of IPC as Commissioner of the Subsidiaries; 3. WTR Share Review (JTCC) 4. Restructuring of PT PII 5. Implementation of IT Charge to Subsidiaries 6. Settlement of Outstanding Status of Paid-in Capital 2012 - 2013 from IPC to PT RSP 7. Progress of Batu Ampar from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 8. Progress of Kijing Port Operator Terminal from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Finance and Legal) 9. CT3 Progress 10. Dredging Plan: a) Dredging Capex and Opex Plan for 2020 b) Dredging Implementation Plan for 2020 based on Depth Contract; 11. Cilincing - Cibitung Toll Road progress including TOD Development Plan (Financing Aspect, etc.) 12. Follow-up on Kalibaru Management Collaboration 13. Progress of Digital Port per Branch 14. Roadmap for Green Port Implementation 15. Roadmap for Corporate Culture Implementation 16. Employee Health Service Policy with BPJS Kesehatan 17. Representative at Batam Port 18. Execution of 51 percent of IPC's shares in PT JICT to fulfill PDTT BPK 19. Follow-up on the development of KEK Tanjung Carat and KEK Bengkulu; 20. Others. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elvyn G. Massya 2. Hambra Samal 3. Arif Suhartono 4. Dani Rusli Utama 5. Prasetyadi 6. Widyaka Nusapati 7. Ogi Rulino
8.	Selasa, 25 Februari 2020 / Tuesday, February 25, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Restrukturisasi PT PII 4. Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan 5. Standarisasi Premises 6. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Karyawan 7. Representative di Pelabuhan Batu Ampar, Batam 8. Eksekusi 51 persen Saham IPC di PT JICT dalam rangka Pemenuhan PDTT BPK 9. Progress CT3 10. Tindak Lanjut Kalibaru, Meliputi : a. CY 57 meter; b. Pembangunan breakwater isi utara disposal B; c. Pengerukan alur dan kolam 11. Progress Digital Port per Cabang 12. Draft final Laporan Keuangan Audit 2019 13. Tindak Lanjut KEK Bengkulu 14. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Discussion of Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting 3. Restructuring of PT PII 4. Implementation of IT Charge for Subsidiaries 5. Standardization of Premises 6. Employee Health Service Policy 7. Representative at Batu Ampar Port, Batam 8. Execution of 51 percent of IPC's shares in PT JICT to fulfill PDTT BPK 9. CT3 Progress 10. Follow-up on Kalibaru, including: a. CY 57 meters; b. Construction of north breakwater containing B disposal; c. Dredging of lanes and pools 11. Progress of Digital Port per Branch 12. Final draft of 2019 Audited Financial Report 13. Follow-up on KEK Bengkulu 14. Others. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elvyn G. Massya 2. Hambra Samal 3. Prasetyadi 4. Widyaka Nusapati 5. Ogi Rulino
9.	Selasa, 03 Maret 2020 / Tuesday, March 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Progress Terminal Operator Kijing Port dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 3. Progress Batu Ampar dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 4. Progress Muara Jati Cirebon dari seluruh aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 5. Progress CT3 6. Rekonfigurasi Pelabuhan 7. Progress Physical Appearance per Cabang 8. Rencana Pengerukan : a) Rencana Capex dan Opex Dredging Tahun 2020 b) Rencana Pelaksanaan Dredging Tahun 2020 berbasis Kontrak Kedalaman 9. Progress Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan Tanjung Api-Api dari Seluruh Aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 10. Progress Jalan Tol Cilincing - Cibitung termasuk Rencana Pengembangan TOD (Aspek Financing, dll) 11. Progress Pembangunan Terminal dan Inland Waterways CBL dari seluruh Aspek (Komersial, Teknik, Operasi, Finansial dan Legal) 12. Roadmap Implementasi Green Port 13. Tindak Lanjut Kerja sama dengan swasta: PT Jababeka (in detail) 14. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Progress of Kijing Port Operator Terminal from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 3. Progress of Batu Ampar from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 4. Progress of Muara Jati Cirebon from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 5. CT3 Progress 6. Port Reconfiguration 7. Progress of Physical Appearance per Branch 8. Dredging Plan: a) Dredging Capex and Opex Plan for 2020 b) Dredging Implementation Plan for 2020 based on Depth Contract 9. Development Progress of Tanjung Carat and Tanjung Api-Api Ports from All Aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 10. Cilincing - Cibitung Toll Road progress including TOD Development Plan (Financing Aspect, etc.) 11. Progress of CBL Terminal and Inland Waterways Development from all aspects (Commercial, Engineering, Operations, Financial and Legal) 12. Roadmap for Green Port Implementation 13. Follow-up on Cooperation with the private sector: PT Jababeka (in detail) 14. Others. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
10.	Senin, 16 Maret 2020 / Monday, March 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	
11.	Selasa, 17 Maret 2020 / Tuesday, March 17, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Restrukturisasi Hutang dan Modal Anak Perusahaan : a. PT RSP b. PT PII c. PT JPPI d. PT Rukindo Isu PT JICT (Penyelesaian Temuan BPK dan Komersialisasi JICT 2 Tindak Lanjut Penyelesaian Penyesuaian SHA PT NCPT1 Penyelesaian Total Kalibaru Tindak Lanjut Penyelesaian Container Scanner di Terminal Kalibaru Penyelesaian Laporan Keuangan Audited 2019 Delegation of Authority IPC Antisipasi dan Penanggulangan Corona Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Subsidiary Debt and Capital Restructuring: a. PT RSP b. PT PII c. PT JPPI d. PT Rukindo PT JICT Issues (BPK Findings Settlement and JICT 2 Commercialization) Follow-up on the Settlement of SHA of PT NCPT1 Adjustment Kalibaru total completion Follow-up on Container Scanner Completion at Kalibaru Terminal Completion of 2019 Audited Financial Statements Delegation of Authority IPC Anticipating and Mitigating Corona Others 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
12.	Kamis, 26 Maret 2020 / Thursday, March 26, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembelian Saham PT ILCS Persiapan Operasi Batu Ampar Penyelesaian Total Kalibaru Penyelesaian Laporan Keuangan Audited 2019 Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Purchase of PT ILCS Shares Preparation for Batu Ampar Operation Kalibaru total completion Completion of 2019 Audited Financial Statements Others 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
13.	Senin, 30 Maret 2020 / Monday, March 30, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Program Restrukturisasi DP4 Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction DP4 Restructuring Program Others 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
14.	Selasa, 31 Maret 2020 / Tuesday, March 31, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Program Restrukturisasi DP4 Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction DP4 Restructuring Program Others 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
15.	Rabu, 15 April 2020 / Wednesday, April 15, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Organik anorganik growth dan sinergitas (konsultan PWC) Logistic market place (Konsultan Roland Berger) Persiapan operasi Batu Ampar: <ul style="list-style-type: none"> Dirkom: terkait persiapan draft kepada BP Batam, opsi skema perikatan paling optimal (IPC ttd PKS sbg perwakilan konsorsium atau stand alone). Dirtek, Dirops, Dirkom : reviu terkait kebutuhan investasi yg diperlukan (biaya investasi seefisien mungkin) Dirops: reviu terkait anak perusahaan yang akan melakukan pengoperasian di terminal batu ampar dari aspek kesiapan pelaksanaan operasi dan sistem IT. Restrukturisasi Hutang dan Modal Anak Perusahaan : a. PT RSP b. PT PII c. PT JPPI d. PT Rukindo Progress JTATP Progress Amandemen PT JICT dan PT NPCT1 Sinkronisasi SIMOP dan SIMKEU Tindak Lanjut Penyelesaian Container Scanner di Terminal Kalibaru Progress perubahan nama Terminal Kijing Kelanjutan Pengadaan Kapal Visitor Boat Infrastruktur Maintenance Service Laporan keuangan konsolidasi triwulan I tahun 2020 Talent pool Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Organic inorganic growth and synergy (PWC consultant) Logistic marketplace (Roland Berger Consultant) Preparation for Batu Ampar operation: <ul style="list-style-type: none"> Commercial Director: preparation of draft to BP Batam, most optimal binding scheme option (whether IPC signs cooperation agreement as a consortium representative or standalone). Technical Director, Operations Director, Commercial Director: reviews related to the investment needed (investment costs as efficiently as possible) Operations Director: reviews related to subsidiaries that will carry out operations at Batu Ampar terminal in terms of operation readiness and IT system. Subsidiary Debt and Capital Restructuring: a. PT RSP b. PT PII c. PT JPPI d. PT Rukindo Progress of JTATP Progress of PT JICT and PT NPCT1 Amendment Synchronization of SIMOP and SIMKEU Follow-up on Container Scanner Completion at Kalibaru Terminal Progress of Kijing Terminal name change Continuation of Visitor Boat Procurement Infrastructure Maintenance Service Consolidated financial statements for the first quarter of 2020 Talent pool Analysis of Priority Plans for the Development of Tanjung Priok Port Logistic Center Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
16.	Senin, 20 April 2020 / Monday, April 20, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Talent Pool IPC; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Discussion on IPC Talent Pool; Others. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
17.	Selasa, 05 Mei 2020 / Tuesday, May 5, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Materi Rakomdir Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan Restrukturisasi PT PII Dividen Anak Perusahaan Progress Akuisisi KBS Progress proses seleksi mitra CT2 Pengadaan Pekerjaan Elektrifikasi di Cabang-cabang Pelabuhan Hasil Kajian Teknik Pelabuhan Batu Ampar Progress Penyelesaian Hutang Piutang Anak Perusahaan dengan IPC Pembahasan Pembayaran Bonus dan THR Karyawan Usulan Layout, RAB Interior, Dasar Penentuan Tarif Sewa dan Jadwal Penyelesaian Maritime Tower. Kenaikan Kelas Jabatan Anak Perusahaan Organisasi SEKTAP Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
18.	Senin, 11 Mei 2020 / Monday, May 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Materi Rakomdir Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan Restrukturisasi PT PII Dividen Anak Perusahaan; Draft Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 2020 Kenaikan Kelas Jabatan Anak Perusahaan Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
19.	Jumat, 29 Mei 2020 / Friday, May 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Dividen Anak Perusahaan Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan Update pekerjaan pengerukan Tahun 2020 Pengalihan capex untuk kebutuhan perbaikan berat conveyor di Cabang Pelabuhan Bengkulu Revisi RKA Investasi Tahun 2020 Job Evaluation (Konsultan SRW) Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
20.	Rabu, 10 Juni 2020 / Wednesday, June 10, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Restrukturisasi Hutang dan Modal Anak Perusahaan : a. PT RSP b. PT PII c. PT JPPI d. PT Rukindo Dividen Anak Perusahaan Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan Tindak Lanjut Menara Maritim termasuk Keberlangsungan PT MMI kedepannya Restrukturisasi PT PII Tindak Lanjut Terhadap PT TPI Valuasi PT RSP Persiapan Pengadaan Konsultan Implementasi Sinergi Integrasi BUMN Layanan Pelabuhan Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
21.	Rabu, 17 Juni 2020 / Wednesday, June 17, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Progress tindak lanjut penyelesaian Isu PT JICT Progress tindak lanjut penyesuaian SHA PT NPCT1 Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dengan BUMN lain (DKB, Pelni, Djakarta Lloyd, Pertamina, dst) Restrukturisasi Hutang PT JPPI dan PT PMLI Dividen Anak Perusahaan Penetapan Tantiem Anak Perusahaan Tahun 2019 Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan (Opsi Skema Pengalihan Aset IT IPC) Tindak lanjut Menara Maritim termasuk keberlangsungan PT MMI kedepannya Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
22.	Senin, 22 Juni 2020 / Monday, June 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Materi Rakomdir Restrukturisasi Hutang PT JPPI dan PT PMLI Dividen Anak Perusahaan Penerapan IT Charge kepada Anak Perusahaan (Opsi Skema Pengalihan Aset IT IPC) Tindak lanjut Menara Maritim termasuk keberlangsungan PT MMI kedepannya Penetapan Tantiem Anak Perusahaan Tahun 2019 Lain - lain Revisi RKA Investasi Tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	
23.	Selasa, 07 Juli 2020 / Tuesday, July 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja BOC & BOD Anak Perusahaan Tahun 2019 3. Dividen Anak Perusahaan 4. KPI Flow of Goods and Document 5. Progress Tindak Lanjut NPEA 6. Penyelesaian Total Kalibaru 7. Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing; 8. Menginternalisasikan AKHLAK sebagai Value IPC Group dan Knowledge Management 9. Remunerasi dan Golden Handshake 10. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Determination of bonus/performance incentives for BOC & BOD of Subsidiaries in 2019 3. Subsidiary dividends 4. KPI Flow of Goods and Documents 5. NPEA Follow-Up Progress 6. Kalibaru total completion 7. Preparation for Kijing Terminal Operation; 8. Internalizing AKHLAK as IPC Group Value and Knowledge Management 9. Remuneration and Golden Handshake 10. Others 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Zuhri Ihransyah 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino
24.	Selasa, 21 Juli 2020 / Tuesday, July 21, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Progress tindak lanjut menara maritim termasuk keberlangsungan PT MMI kedepannya 3. Tindak Lanjut Penyelesaian Container Scanner di Terminal Kalibaru 4. Skema pembangunan NPEA 5. Review kerja sama cabang dan anak perusahaan dalam kaitannya dengan PSAK 73 6. Progress Heritage Port Sunda Kelapa 7. Parameter flow of good & document masing-masing Direktorat 8. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Follow-up actions on Maritime Tower including the continuity of PT MMI 3. Follow-up on Container Scanner Completion at Kalibaru Terminal 4. NPEA development scheme 5. Review of cooperation between branches and subsidiaries in relation to PSAK 73 6. Progress of Sunda Kelapa Heritage Port 7. Flow of good & document parameters of each Directorate 8. Others 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Zuhri Ihransyah 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino
25.	Selasa, 28 Juli 2020 / Tuesday, July 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Revisi RKAP 2020 dan Laporan Manajemen Semester I 2020 4. Accelerated Leadership Program for IPC (ALPI) 5. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Discussion of Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting 3. Revised RKAP 2020 and Management Report Semester I 2020 4. Accelerated Leadership Program for IPC (ALPI) 5. Others 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Zuhri Ihransyah 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino
26.	Selasa, 11 Agustus 2020 / Tuesday, August 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Proposal kerja sama NPEA antara PT API dan IPC 3. Pencapaian KPI Perusahaan dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Semester I Tahun 2020 4. Tindak Lanjut Terhadap PT TPI 5. Tindak Lanjut PT PII 6. Review Pedoman Kerja sama dan Kerja sama Usaha dengan Anak Perusahaan terkait Dampak PSAK 73 7. Update Progres Rencana Penerapan IT Charge Kepada Anak Perusahaan 8. Progress Penyusunan Delegation of Authority dan Decision Making Process 9. Program Pembinaan Pekerja Fungsional 10. Talent Pool BOD-2 11. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Proposal for NPEA cooperation between PT API and IPC 3. Achievement of Company KPI and Company Soundness Level Semester I of 2020 4. Follow-up on PT TPI 5. Follow-up on PT PII 6. Review of Guidelines for Cooperation and Business Cooperation with Subsidiaries related to the Impact of PSAK 73 7. Update on Progress of Implementation Plan of IT Charge to Subsidiaries 8. Progress of Delegation of Authority and Decision-Making Process Preparation 9. Functional Worker Development Program 10. Talent Pool BOD-2 11. Others 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Zuhri Ihransyah 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino
27.	Selasa, 25 Agustus 2020 / Tuesday, August 25, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Pendudukan bisnis anak perusahaan (PT IPC TPK, PT PTP) 4. Progress tantiem anak perusahaan 5. Update progress tindak lanjut penyelesaian Isu PT JICT 6. Update tindak lanjut kerja sama Batu Ampar 7. Update progress restrukturisasi DP4 8. Update progress kesiapan PT EPI sebagai Utility Company 9. Progress analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok 10. Update KPI Flow of Goods and Document 11. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Discussion of Material for Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting 3. Establishment of subsidiary businesses (PT IPC TPK, PT PTP) 4. Progress of subsidiary tantiem 5. Follow-up update on PT JICT issue settlement 6. Follow-up update on Batu Ampar collaboration 7. Progress update of DP4 restructuring 8. Progress update of PT EPI's readiness as a Utility Company 9. Progress of priority analysis of the development plan of Tanjung Priok Port Logistic Center 10. Update of KPI Flow of Goods and Document 11. Others 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Zuhri Ihransyah 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino
28.	Selasa, 08 September 2020 / Tuesday, September 8, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Update Progress Rencana Akuisisi Saham PP Pro di PT MMI 3. Update Progress Restrukturisasi Hutang PT JPPI, PT Rukindo dan PT PMLI 4. Update progress tindak lanjut penyelesaian Isu PT JICT 5. Update Progress Review Pedoman Kerja sama dan Kerja sama Usaha dengan Anak Perusahaan terkait Dampak PSAK 73 6. Update Progress Penyelesaian Total Kalibaru; 7. Desain Pola Operasi Kijing untuk Persiapan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat 8. Update Progres Rencana Penerapan IT Charge Kepada Anak Perusahaan 9. Implementasi Hadirkoe 10. Mutasi BoD-2, BoD-3 dan transisinya 11. Progress Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Center Pelabuhan Tanjung Priok 12. Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Progress update of Acquisition Plan of PP Pro's shares in PT MMI 3. Progress update of Debt Restructuring for PT JPPI, PT Rukindo and PT PMLI 4. Progress update of PT JICT issue settlement 5. Review progress update of Guidelines for Cooperation and Business Cooperation with Subsidiaries related to the Impact of PSAK 73 6. Update of Kalibaru Total Completion Progress; 7. Kijing Operation Pattern Design for Preparation of Loading and Unloading Equipment Procurement 8. Progress update of Implementation Plan of IT Charge to Subsidiaries 9. Implementation of Hadirkoe 10. BoD-2, BoD-3 transfer and transition 11. Progress of priority analysis of the development plan of Tanjung Priok Port Logistic Center 12. Other. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
29.	Selasa, 22 September 2020 / Tuesday, September 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Update progress tindak lanjut penyelesaian Isu PT JICT 4. Rencana Akuisisi JTCC 5. Update Progress Komunikasi dengan Pemda DKI terkait Tukar Guling Lahan 6. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dengan BUMN lain (DKB, Pelni, Djakarta Lloyd, Pertamina, dst) 7. Progress Persiapan Rencana Pengembangan NPEA dan Rencana Kerja sama NPEA antara API dan IPC 8. Tindak Lanjut PT PII 9. Pendudukan Bisnis Anak Perusahaan - Alat 009 10. Progress PT EPI untuk Mengelola Bisnis Air Bersih di Tanjung Priok 11. Update progress restrukturisasi DP4 12. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
30.	Jumat, 25 September 2020 / Friday, September 25, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 sd 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
31.	Selasa, 06 Oktober 2020 / Tuesday, October 6, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Progress Persiapan Rencana Pengembangan NPEA dan Rencana Kerja sama NPEA antara API dan IPC 3. Update Progress Sinkronisasi SIMOP dan SIMKEU 4. Update Progress Fisik Termasuk Rencana Operasi dan Komersialisasi Terminal Kijing dan Kaitannya dengan Pelabuhan Pontianak 5. Pendudukan Kepemilikan Alat di Anak Perusahaan 6. Kajian Opsi Keberlangsungan PT PII 7. Kajian Arah Pengembangan dan Klasifikasi Anak Perusahaan 8. Progress IT Charge 9. Kelanjutan Project KEK Bengkulu 10. Penutupan Satker Bojonegara dan Sertifikasi Lahan Bojonegara dan Ciwandan 11. Update Progress Review Pedoman Kerja sama dan Kerja sama Usaha dengan Anak Perusahaan terkait Dampak PSAK 73 12. Rencana Kerja sama Jangka Panjang MAL 13. Pembahasan Permasalahan Pelabuhan Bojonegara 14. Tindak Lanjut Perbaikan Pengelolaan Yayasan Barunawati Nusantara 15. Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Cabang 16. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
32.	Rabu, 14 Oktober 2020 / Wednesday, October 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Kelanjutan Project KEK Bengkulu 3. RKAP 2021 4. Pembahasan Materi Rakomdir 5. Penutupan Satker Bojonegara dan Sertifikasi Lahan Bojonegara dan Ciwandan serta permasalahan hukum Bojonegara; 6. Tindak Lanjut Perbaikan Pengelolaan Yayasan Barunawati Nusantara 7. Rencana Kerja sama Jangka Panjang MAL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
33.	Selasa, 20 Oktober 2020 / Tuesday, October 20, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Pembahasan Materi Rakomdir 3. Penutupan Satker Bojonegara dan Sertifikasi Lahan Bojonegara dan Ciwandan serta permasalahan hukum Bojonegara 4. Tindak Lanjut Perbaikan Pengelolaan Yayasan Barunawati Nusantara 5. Rencana Kerja sama Jangka Panjang MAL 6. Rencana Penggunaan Maritim Tower 7. Update Progress NLE dan Project IT 8. Restrukturisasi Hutang PT Rukindo, PT JPPI, dan PT PMLI 9. Pembahasan Buku RJPP 2020-2024 10. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Dani Rusli Utama 5. Muarip 6. Yon Irawan 7. Ihsanuddin Usman 8. Ogi Rulino
34.	Selasa, 27 Oktober 2020 / Tuesday, October 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Restrukturisasi SHL PT PII 3. Update Progress NLE dan Project IT 4. Rencana Penggunaan Maritim Tower 5. Pembahasan Buku RJPP 2020 - 2024 6. Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Suhartono 2. Hambra Samal 3. Rima Novianti 4. Muarip 5. Yon Irawan 6. Ihsanuddin Usman 7. Ogi Rulino



No.	Waktu Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Rapat Internal / Internal Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
35.	Rabu, 11 November 2020 / Wednesday, November 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Update Progress Fisik Termasuk Rencana Operasi dan Komersialisasi Terminal Kijing dan Kaitannya dengan Pelabuhan Pontianak Review Pedoman Kerja sama dan Kerja sama Usaha dengan Anak Perusahaan terkait Dampak PSAK 73 Progress Terminal Curah Cair Bengkulu Update Progress Rencana Akuisisi Saham WTR di JTCC; Progress PT EPI untuk Mengelola Bisnis Air Bersih di Tanjung Priok Update Progress Tindak Lanjut Pendudukan Kepemilikan Alat Anak Perusahaan Update progress tindak lanjut penyelesaian Isu PT JICT Update Progress Sinkronisasi SIMOP dan SIMKEU Kelanjutan Pasca Akuisisi PT ILCS Update Progress Digital Capabilities (Pembagian Peran IT Kantor Pusat dengan PT ILCS) Update Progress Penyiapan Organisasi DGO Rapat Tinjauan Direksi Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
36.	Senin, 23 November 2020 / Monday, November 23, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Materi Rakomdir Update Progress Restrukturisasi Hutang PT JPPI, PT Rukindo dan PT PMLI Kajian Opsi Keberlangsungan PT PII Update Progress Penyelesaian Permasalahan dengan BUMN Lain Update Progress Rencana Pengembangan NPEA dan Rencana Kerjasama NPEA antara API dan IPC Update Progress CT2 Update Progress Kesiapan Operasi dan Peralatan Bongkar Muat di Terminal Kijing Cost Efficiency Bidang SDM Tahun 2020 Laporan Progress Accelerated Leadership Program for IPC (ALPI) Update Progress Implementasi Sinergi dan Integrasi Pelindo; Rapat Tinjauan Direksi/Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
37.	Jumat, 11 Desember 2020 / Friday, December 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Pembahasan Materi Rakomdir Laporan Progress Audit Interim tahun 2020 oleh Auditor EY Progress Akuisisi JTCC Lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Dani Rusli Utama Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino
38.	Senin, 21 Desember 2020 / Monday, December 21, 2020	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Kajian Arah Pengembangan dan Klasifikasi Anak Perusahaan Laporan Persiapan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Program Golden Shake Hand Progress Pembubaran Organisasi Satker Program Pengelolaan dan Pembinaan Pekerja Fungsional Khusus/P3K Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> Arif Suhartono Hambra Samal Zuhri Ihransyah Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman

RAPAT GABUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

Selain menyelenggarakan rapat internal, Direksi juga aktif menghadiri rapat gabungan bersama Dewan Komisaris, yang mana pada tahun 2020 diselenggarakan sebanyak 12 kali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2020.

JOINT MEETING WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

In addition to internal meetings, the Board of Directors also actively attends joint meetings with the Board of Commissioners, which were held 12 times in 2020.

Frequency and Attendance of Members of the Board of Directors in Joint Meetings with the Board of Commissioners

The following is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors in Joint Meetings with the Board of Commissioners throughout 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris Tahun 2020

Frequency and Attendance of Members of the Board of Directors in Joint Meetings with the Board of Commissioners in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
1.	Arif Suhartono	Direktur Utama* / President Director	12	12	100%
2.	Hambra	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	12	12	100%
3.	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	12	11	92%
4.	Rima Novianti**	Direktur Komersial / Commercial Director	9	7	78%
5.	Muarip**	Direktur Operasi / Operations Director	9	8	89%
6.	Yon Irawan**	Direktur Keuangan / Finance Director	9	9	100%
7.	Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	9	9	100%
8.	Zuhri Iryansyah***	Direktur Teknik / Technical Director	7	7	100%
9.	Elvyn Gani Masassya****	Direktur Utama / President Director	2	2	100%
10.	Widyaka Nusapati****	Direktur Keuangan / Finance Director	2	2	100%
11.	Prasetyadi****	Direktur Operasi / Operations Director	2	2	100%
12.	Rizal Ariansyah****	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	2	1	50%
13.	Dani Rusli Utama *****	Direktur Teknik / Technical Director	5	5	100%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					95%

Keterangan: / Description:

*) Efektif dialihutugaskan dari Direktur Komersial menjadi Direktur Utama IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively transferred from Commercial Director to President Director of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively served as Director of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively served as Director of IPC since June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The term of office as Director of IPC officially ends on March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / The term of office as Director of IPC officially ends on June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Agenda, Waktu, dan Peserta Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Uraian mengenai agenda, waktu, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris telah diuraikan pada halaman 515.

Agenda, Time, and Participants of the Joint Meeting with the Board of Commissioners

The description of the agenda, time, and attendance of members of the Board of Directors in the Joint Meeting with the Board of Commissioners has been described on page 515.

KEPUTUSAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS DECISIONS

No.	Nomor Surat Keputusan / Decree Number	Perihal / Subject
1	KU.01.01/1/7/1/MT/UT/PI.II-2020	Pedoman Anggaran Investasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Investment Budget in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2	HK.01/15/1/1/KAN/UT/PI.II-2020	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Official Documents in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)



No.	Nomor Surat Keputusan / Decree Number	Perihal / Subject
3	HK.01/24/2/1/JRT/UT/PI.II-2020	Pedoman Penggunaan Kartu Kredit Korporasi Untuk Kepentingan Dinas Bagi Pejabat Dan Staf Tertentu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for the Use of Corporate Credit Cards for Official Interests by Certain Officials and Staffs in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
4	KU.02.08/6/11/1/SDU/SDU/PI.II-2020	Kodefikasi Barang-Barang Inventaris Perlengkapan Kantor Dan Perlengkapan Rumah Dinas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Codification of Inventory Items for Office Supplies and Official Housing Furnishings of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
5	HK.01/31/8/1/PKN/UT/PI.II-2020	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Implementation of Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
6	HK.01/3/8/1/KAN/SDM/PI.II-2020	Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Dynamic Records Management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
7	HK.01/3/8/2/KAN/SDM/PI.II-2020	Pedoman Tata Naskah Dinas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Official Documents of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8	HK.01/11/2/1/PKN/UT/PI.II-2020	Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Hukum Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Legal Compliance Audit of Company Documents in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
9	KP.07.02/8/9/1/KRF/SDM/PI.II-20	Pemberian Dan Pengaturan Pemakaian Seragam Dinas Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Provision and Regulation of Official Uniform for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
10	HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020	Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Goods and Services Procurement in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
11	KP.07.02/10/2/2/KRF/UT/PI.II-2020	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pensiunan Dan Keluarga Pensiunan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Provision of Health Services for Retirees and Their Families in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
12	HK.01/1/4/1/MTA/UT/KP.II-2020	Pedoman Pengelolaan Kinerja Berbasis Indikator Kinerja Utama (<i>Key Performance Indicator</i>) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Performance Management Based on Key Performance Indicators in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
13	KP.07.02/29/12/2/KRF/SDU/PI.II-20	Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tentang Kesejahteraan Pasca Kerja Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Second Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Post-Employment Welfare for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
14	HK.01/14/7/1/PKN/SDM/PI.II-2020	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : Hk.568/20/3/1/Pi.II-17 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penyusunan Surat Keputusan Direksi Dan Surat Keputusan General Manager di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: Hk.568/20/3/1/Pi.II-17 dated March 20, 2017 regarding Preparation of Decrees of the Board of Directors and General Managers in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
15	KP.07.02/29/12/1/KRF/SDU/PI.II-20	Surat Keputusan Direksi Tentang Perkawinan Antar Pekerja Dan Ikatan Keluarga Antar Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Decree of the Board of Directors regarding Marriage Between Employees and Family Bonds Between Employees in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
16	HK.02/27/8/1/PKN/UT/PI.II-2020	Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan Dalam Sistem Manajemen Anti Penyuaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Duties and Responsibilities of the Anti-Bribery Compliance Function Team in the Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
17	SI.01/28/2/1/PMI/UT/PI.II-2020	Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Guidelines for Information System Governance Policy in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
18	HK.01/20/11/1/KPP/UT/PI.II-2020	Penetapan <i>Roadmap Governance, Risk & Compliance</i> (GRC) 2021-2025 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Establishment of the 2021-2025 Governance, Risk & Compliance (GRC) Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
19	HK.01/18/11/1/KPP/UT/PI.II-2020	Pembentukan Komite Dan Penetapan Piagam (<i>Charter</i>) Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Establishment of Committee and Charter of Governance, Risk Management and Compliance Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
20	HK.01/23/12/1/RIO/UT/PI.II-20	Surat Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pernyataan Selera Risiko (<i>Risk Appetite Statement</i>) Dan Pernyataan Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance Statement</i>) Direksi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Decree of the Board of Directors regarding the Issuance of Risk Appetite Statement and Risk Tolerance Statement of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
21	HK.01/14/8/1/MKR/UT/PI.II-2020	Implementasi Sistem Manajemen Mutu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Implementation of Quality Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
22	HK.02/10/3/1/STR/UT/PI.II-20	Komite Investasi Dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Investment and Risk Management Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

1. Pemegang Saham/RUPS mengesahkan dan menetapkan indikator penilaian kinerja Direksi yaitu *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang memuat indikator kinerja utama, target, bobot, dan pedoman kamus penilaiannya.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Directors Performance Assessment Procedure

1. Shareholders/GMS ratify and determine the performance assessment indicator for the Board of Directors, namely the Board of Directors Key Performance Indicator (KPI) which is stated in the Management Contract which contains the key performance indicators, targets, weights, and guidelines for the assessment dictionary.

2. Dewan Komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS. Kinerja individu anggota Direksi yang telah disepakati oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris adalah turunan dari KPI Direksi.

2. The Board of Commissioners evaluates the performance achievements of the Board of Directors (collegial and individual) to be conveyed to the Shareholders/GMS. The individual performance of the members of the Board of Directors that has been agreed upon by the Board of Directors and recognized by the Board of Commissioners is a derivative of the KPI of the Board of Directors.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang ditetapkan dalam RUPS mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN, yang meliputi:

1. Keuangan dan Pasar;
2. Fokus Pelanggan;
3. Efektivitas Produk dan Layanan;
4. Fokus Tenaga Kerja;
5. Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

Board of Directors performance assessment criteria is submitted by Board of Directors to be determined in the GMS by referring to the Circular of the Minister of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 concerning Submission of Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Superior Performance Assessment to BUMN, which includes:

1. Finance and markets;
2. Customer focus;
3. Effectiveness of products and services;
4. Workforce focus;
5. Leadership in governance and community responsibility.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi tahun 2020 dilihat dari pencapaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya dan diaudit setiap tahunnya oleh KAP. Penilaian tersebut bersifat kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Direksi. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP dan pada akhir tahun, Direksi menyusun Laporan Kinerja Direksi yang disampaikan kepada Direksi yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Assessor

The performance assessment of the Board of Directors in 2020 is seen from the achievements of the KPIs that have been previously set and are audited annually by KAP. The assessment is collegial and constitutes part of the Board of Directors Performance Report. The duty implementation is planned at the beginning of each year in a Work Program listed in the RKAP. At the end of the year, the Board of Directors prepares a Board of Directors Performance Report which is submitted to the Shareholders in the GMS for evaluation and approval.

Realisasi Key Performance Indicators (KPI)

Key Performance Indicators (KPI) Realization

No	KPI Tahun 2020 / 2020 KPI	Satuan / Unit	Bobot / Weight	Target Annual / Annual Target	Realisasi / Realization	Annual	
						Pencapaian / Achievement	Skor / Score
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia							
1	Debt - Service Coverage Ratio	Kali / Times	5	2,14	2,27	106,28%	5,31
2	Debt to Equity Ratio	Kali / Times	6	1,33	1,31	101,50%	6,09
3	Total Debt to EBITDA	Kali / Times	5	7,98	7,15	110,00%	5,50
4	Pangsa Pasar Pelabuhan / Port Market Share	%	6	91,98	92,05	100,08%	6,00
5	Retensi Pelanggan / Customer Retention	%	10	-15,84	-14,69	107,86%	10,79
6	Number of Ship/Customer Served	GT	6	175.986.121	178.410.371	101,38%	6,08
7	PKBL / Partnership and Community Development Program	Skor / Score	4	75,00	52,08	69,44%	2,78
B. Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation							
8	Standarisasi Performansi Pelabuhan / Port Performance Standardization						
	a. Dwelling Time	Hari / Day	3	3,20	2,70	110,00%	3,30



No	KPI Tahun 2020 / 2020 KPI	Satuan / Unit	Bobot / Weight	Target Annual / Annual Target	Realisasi / Realization	Annual	
						Pencapaian / Achievement	Skor / Score
	b. <i>Turn Around Time</i> (Kapal)	Jam / Hour	3	81,63	79,59	102,56%	3,08
9	<i>Service Level Agreement</i>	%	10	100,00	117,14	110,00%	11,00
10	Pemenuhan Audit Sertifikasi / Certification Audit Fulfillment	%	6	100,00	100,00	100,00%	6,00
C. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership							
11	Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan / Digitalization and Service Integration	%	6	100,00	100	100,00%	6,00
D. Pengembangan Investasi / Investment Development							
12	<i>Capital Expenditure</i> (CAPEX)	%	4	87,50	87,79	100,33%	4,01
13	Sinergi BUMN / SOE Synergy	Ribu Rp / Thousand Rp	6	72.201.450	259.375.000	110,00%	6,60
E. Pengembangan Talenta / Talent Development							
14	Pemenuhan Standar Keahlian Melalui Sertifikasi / Fulfillment of Skill Standards through Certifications	%	8	100,00	100,00	100,00%	8,00
15	Produktivitas Pegawai / Employee Productivity	Rp/Orang / Rp/Person	7	563.267.757	596.102.728	105,83%	7,41
16	Pemenuhan <i>Talent Pool</i> BUMN / SOE Talent Pool Fulfillment	%	5	20,00	34,69	110,00%	5,50
Jumlah / Total			100			103,43	

Catatan :

- Perhitungan skor KPI sebesar 103,43 dihitung berdasarkan capaian KPI terhadap target revisi RKAP 2020;
- Perubahan bobot RKAP 2020 dari versi awal ke Usulan perubahan tidak mengalami perubahan dimana bobot yang diajukan tetap 100,00 dengan bobot masing-masing perspektif sebagaimana tabel di atas. Perubahan dalam pengukuran KPI terletak pada target masing-masing KPI;
- Perhitungan skor KPI Perusahaan 2020 perspektif sesuai agenda prioritas BUMN dimana maksimal capaian KPI di setiap perspektif yaitu 110 persen.

Note:

- KPI score of 103.43 is calculated based on KPI achievement to 2020 Revised RKAP targets;
- The weight from the initial 2020 RKAP to the proposed revision did not change, in which the proposed total weight remained at 100.00 with the weight of each perspective as described in the table above. Changes in KPI measurement occurred in the target of each KPI;
- Calculation of the score of 2020 Corporate KPI perspectives is in accordance with SOE priority agendas, in which the maximum KPI achievement of each perspective amounted to 110 percent.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite, yang terdiri dari Komite Investasi dan Manajemen Risiko dan Komite IPC Bersih. Komite Investasi dan Manajemen Risiko, yang kemudian berganti nama menjadi Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) pada tanggal 18 November 2020, merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan investasi dan risiko Perseroan. Kemudian pada tanggal 18 November 2020, Komite Investasi dan Manajemen Risiko berganti nama menjadi Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) dan memiliki tugas untuk meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Manajemen Risiko, dan Kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan

PERFORMANCE APPRAISAL ON COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its management duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees, consisting of the Investment and Risk Management Committee, which underwent name change into Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Committee on November 18, 2020, and the IPC Bersih Committee. The Investment and Risk Management Committee is a committee established to assist the Board of Directors in managing the Company's investment and risk. On November 18, 2020, the Investment and Risk Management Committee underwent name change into Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Committee, which has the duty to improve the aspects of Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance in decision-making process executed by the Board of Directors concerning investment

pengelolaan investasi, kebijakan strategis Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC. Sedangkan Komite IPC Bersih merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas penerapan *Whistleblowing System* di IPC.

Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa kedua komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

HUBUNGAN IPC DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Perseroan. Hubungan antara IPC dengan Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang secara prinsip kepentingan-kepentingan Perseroan dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan.

Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan Anak Perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada Kebijakan Kepengurusan:

1. Penempatan wakil Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Anak Perusahaan;
2. Adanya pejabat yang melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan, terkait pengendalian hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan;
3. Meminta Laporan Berkala tentang perkembangan kinerja Anak Perusahaan;
4. Mengevaluasi rancangan Kebijakan Kepengurusan yang akan menjadi acuan kepengurusan bagi Direksi Anak Perusahaan dan juga menjadi acuan untuk pengawasan bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Transaksi dengan Anak Perusahaan

Transaksi dengan Anak Perusahaan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transaksi dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar persamaan kepentingan usaha sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dan kelaziman usaha (*arm's length principle*);
2. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perseroan dalam jangka panjang berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

management, the Company's strategic policies, and control of business strategy of IPC Group. Meanwhile, the IPC Bersih Committee is a committee established to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of the *Whistleblowing System* at IPC.

Throughout 2020, the Board of Directors considered that the two committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities properly.

IPC RELATIONSHIP WITH SUBSIDIARIES

The Subsidiary is a separate legal entity that is subject to the provisions of the Articles of Association of the Subsidiary and the prevailing laws and regulations in Company law. The relationship between IPC and its Subsidiaries is carried out through a good corporate governance mechanism which in principle the interests of the Company are carried out through the General Meeting of Shareholders of the Subsidiaries.

Supervision Mechanism

The supervisory mechanism for Subsidiaries is carried out by referring to the Management Policy:

1. Placement of representatives of the Company as members of the Board of Commissioners and/or Directors of the Subsidiaries;
2. Officials who carry out guidance and control of corporate governance, related to controlling the relationship between the Company and its subsidiaries;
3. Requesting Periodic Reports on the development of the Subsidiary's performance;
4. Evaluating the draft Management Policy which will be the management reference for the Directors of the Subsidiaries and also as a reference for supervision for the Board of Commissioners of the Company.

Transactions with Subsidiaries

Transactions with Subsidiaries are carried out with the following principles:

1. Transactions with Subsidiaries must be carried out on the basis of the common business interests as transactions with unaffiliated parties and business norms (*arm's length principle*);
2. Special treatment will only be given under certain conditions and time limits as long as it is in accordance with the long-term interests of the Company based on the approval of the Company's GMS and does not conflict with the prevailing laws and regulations;



3. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan, maka kepentingan Perseroan harus didahulukan.

Keterwakilan dalam RUPS Anak Perusahaan

Direksi Perusahaan sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan wajib mewakili Perseroan dalam RUPS Anak Perusahaan. Perseroan dapat melimpahkan kewenangan kepada salah seorang atau lebih anggota Direksi untuk mewakili Perseroan sebagai Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak Perusahaan. Dalam RUPS Anak Perusahaan, Direksi Perseroan memiliki wewenang untuk meminta laporan mengenai pengelolaan dan pengawasan Anak Perusahaan.

Prosedur Mewakili Perseroan dalam RUPS Anak Perusahaan

Prosedur menunjuk wakil Perseroan dalam RUPS Anak Perusahaan diatur sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan mengadakan Rapat Direksi untuk membahas rencana/usulan keputusan-keputusan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perusahaan. Rencana/usulan tersebut meliputi:
 - a. Pengesahan Laporan Keuangan Anak Perusahaan;
 - b. Pembagian dividen/laba Anak Perusahaan;
 - c. Kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Anak Perusahaan;
 - d. Penunjukan/pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
 - e. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
2. Direksi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Direksi selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Anak Perusahaan.
3. Anggota Direksi yang mewakili Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan wajib menyampaikan hasil keputusan RUPS Anak Perusahaan kepada Direksi.

Keluaran Hasil

1. Rencana/usulan keputusan Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perusahaan.
2. Hasil Keputusan RUPS Anak Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan pada saat rapat gabungan (sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 indikator 18 parameter 64).

3. If there is a conflict of interest between the Company and its Subsidiaries, the interests of the Company must take precedence.

Representation in the GMS of Subsidiaries

The Board of Directors of the Company as the Subsidiary's Shareholders must represent the Company in the GMS of the Subsidiary. The Company may delegate authority to one or more members of the Board of Directors to represent the Company as the Representative of Shareholders at the Subsidiary's GMS. In the GMS of Subsidiaries, the Board of Directors of the Company has the authority to request reports on the management and supervision of the Subsidiaries.

Procedure for Representing the Company in the GMS of Subsidiaries

The procedure for appointing a representative of the Company at the GMS of the Subsidiary is stipulated as follows:

1. The Board of Directors of the Company holds a Board of Directors Meeting to discuss plans/proposals for decisions that will be discussed in the GMS of the Subsidiaries. The plan/proposal includes:
 - a. Ratification of Subsidiary Financial Statements;
 - b. Distribution of dividends/profits of Subsidiaries;
 - c. The strategic policies contained in the Subsidiary's Company Work Plan and Budget (RKAP);
 - d. Appointment/dismissal of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Subsidiaries;
 - e. Appointment of a Public Accounting Firm.
2. The Board of Directors may appoint one or more members of the Board of Directors as the Representative of Shareholders in the GMS of the Subsidiary.
3. Members of the Board of Directors who represent the Board of Directors at the GMS of the Subsidiaries are required to convey the resolutions of the GMS of the Subsidiaries to the Board of Directors.

Output

1. Plans/proposals for the decision of the Board of Directors as the Subsidiary Shareholder to be discussed in the GMS of the Subsidiary.
2. The resolutions of the GMS of the Subsidiaries are submitted to the Board of Commissioners of the Company at the joint meeting (according to the Decree of the Minister of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 indicator 18 parameter 64).

PROGRAM REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi IPC berhak memperoleh remunerasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Formulasi penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha; dan
2. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-242/MBU/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION PROGRAM

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of IPC are entitled to receive remuneration as a token of appreciation for the performance of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors. The formulation for determining the remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to:

1. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding the Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended last by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning the Fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding the Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of Business Entities; and
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-242/MBU/07/2020 dated July 16, 2020 concerning Determination of the remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises for 2020.

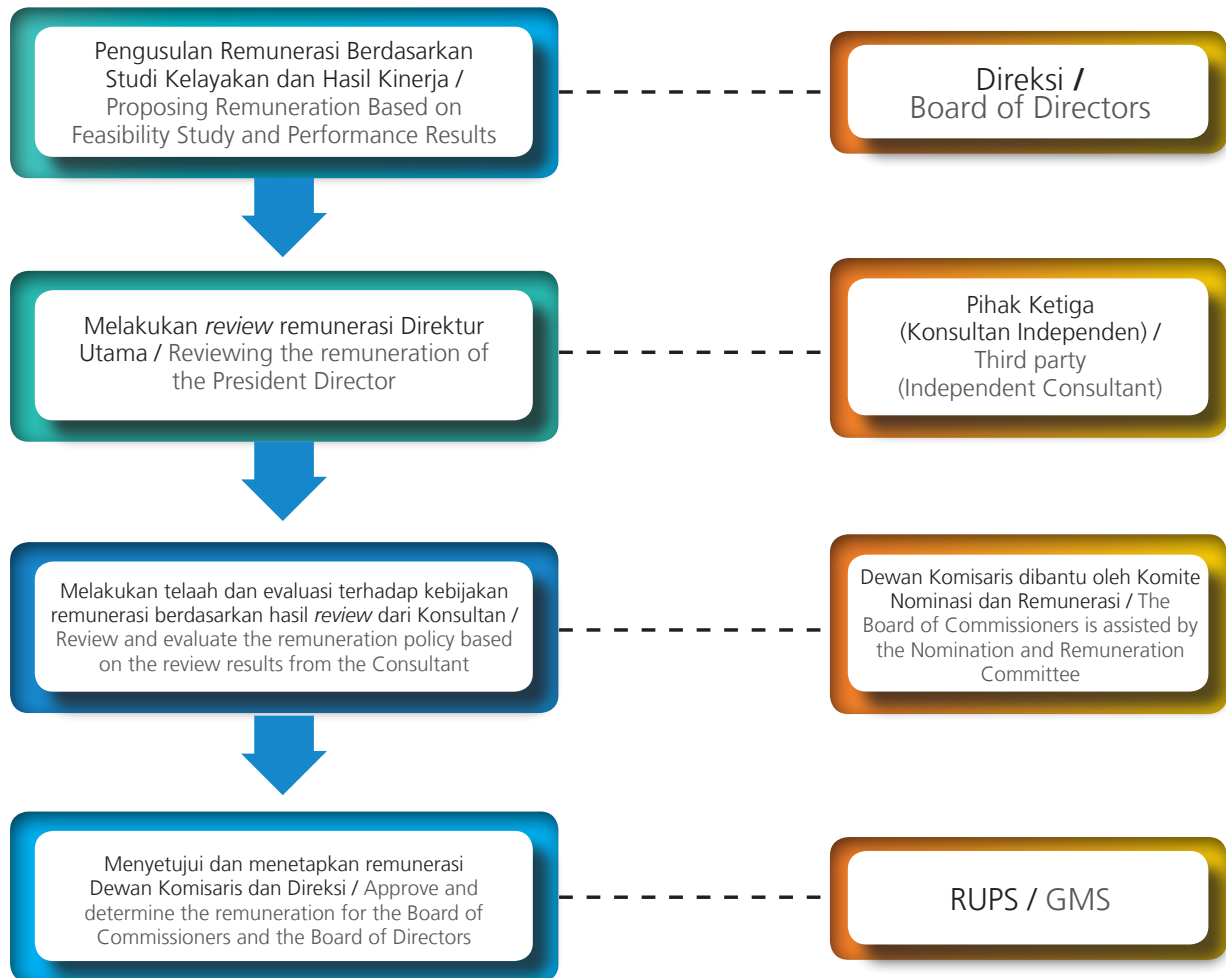
BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The procedures for determining the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors starts with a proposal from Board of Directors. Board of Directors requests a third party (consultant) to perform a review of the remuneration of President Director. The results of consultant's review are submitted to Board of Commissioners for recommendation. Board of Commissioners, assisted by Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. Board of Commissioners recommendations are submitted to Shareholder for approval in the GMS.



Prosedur Penetapan Remunerasi

Remuneration Determination Procedure



Untuk penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi IPC tahun 2020, Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu memberikan hasil telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi IPC tahun 2020 berdasarkan hasil *review* dari Konsultan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: 35/DK/P1.11NI-2020 tanggal 17 Juni 2020.

To determine the remuneration for the Board of Commissioners and Directors of IPC in 2020, the Board of Commissioners of the Company first provides the results of review and evaluation of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors of IPC in 2020 based on the review results from the Consultant to the Minister of BUMN as the Sole Shareholder and Controller of the Company through the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: 35/DK/P1.11NI-2020 dated June 17, 2020.

Kemudian, berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2020, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal dan Pengendali Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi IPC tahun 2020 dalam Surat No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020.

Thereafter, based on the Decision of the Annual GMS for the 2019 Fiscal Year which was held on July 6, 2020, the Minister of BUMN as the Sole Shareholder and Controller of the Company determined the remuneration for the Board of Commissioners and Directors of IPC in 2020 in Letter No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding the Determination of Income for the Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020.

STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi IPC adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER- 12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 concerning the Fifth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding the Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of the State-Owned Enterprises, the structure and the remuneration components of the Board of Commissioners and Board of Directors of IPC are as follows:

Struktur dan Besaran Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi IPC Pada Tahun 2020

Structure and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of IPC in 2020

Struktur Remunerasi / Remuneration Structure	Keputusan / Decision	Nominal
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS		
Honorarium		
• Honorarium	Perhitungan Honorarium Komisaris Utama sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama. / The President Commissioner's honorarium is 45percent of the President Director's salary. Perhitungan Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90 persen dari Honorarium Komisaris Utama. / Honorarium for members of the Board of Commissioners is 90percent of the Honorarium for the President Commissioner.	Komisaris Utama / President Commissioner: Rp103.500.000,00 per bulan / per month. Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners: Rp93.150.000,00 per bulan / per month.
Tunjangan / Allowance		
• Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance	Sebesar 1 kali Honorarium, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019. / 1x Honorarium, in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/05/2019.	Komisaris Utama / President Commissioner : Rp103.500.000,00. Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners : Rp93.150.000,00.
• Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	Sebesar 20 persen x Honorarium per bulan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019. / 20 percent x Honorarium per month, in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/05/2019.	Komisaris Utama / President Commissioner : Rp20.700.000,00 per bulan / per month. Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners : Rp18.630.000,00 per bulan / per month.
• Asuransi Purna Jabatan / Pension Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25 persen dari Honorarium dalam setahun, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019. / The premium borne by the Company is 25 percent of the honorarium in a year, in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/05/2019.	Komisaris Utama / President Commissioner : Rp310.500.000,00 dalam setahun / annually Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners : Rp279.450.000,00 dalam setahun / annually
Fasilitas / Facilities		
• Fasilitas Kesehatan / Healthcare	Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019. / Provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris / All Members of the Board of Commissioners : Biaya pengobatan/asuransi kesehatan (at cost). / Medical Expenses/Health Insurance (at cost)



Struktur Remunerasi / Remuneration Structure	Keputusan / Decision	Nominal
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Bantuan Hukum / Legal Assistance 	<p>Diberikan sebesar pemakaian (<i>at cost</i>), sesuai dengan yang diatur pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/19/2/1/TMH/UT/PI.II-18 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai yang Melakukan Tindakan/Perbuatan untuk dan atas nama Jabatannya Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). <p>Given in the amount of at cost, in accordance with:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Regulation of the Minister of BUMN No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as last amended by Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020. Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/19/2/1/TMH/UT/PI.II-18 dated February 19, 2018 regarding Provision of Legal Assistance to the Board of Directors, Board of Commissioners, Employees, Former Board of Directors, Former Board of Commissioners, and Former Employees Who Took Actions for and on Behalf of Their Position in Performing Duties for the Company in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 	<p>Seluruh Anggota Dewan Komisaris / All Members of the Board of Commissioners: Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan. / Funding of attorney's office/legal consultant services to include examination process as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished, the funding become the person's burden.</p>
Tantiem/Insentif Kinerja (IK) / Bonus/Performance Incentives		
<ul style="list-style-type: none"> Tantiem/IK Tahun Buku 2019 / Bonus/ Performance Incentives for 2019 Fiscal Year 	<p>Tantiem/IK Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019 terdiri Tantiem/IK tunai dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) yang dibayarkan pada tahun ketiga sejak 4 Agustus 2020. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam Tahun Buku 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. / Bonus/Performance Incentives of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2019 Fiscal Year consisting of Cash Bonuses and Long-Term Incentives (LTI) which are paid in the third year since August 4, 2020. The amount of bonus/IK is calculated proportionally according to the term of office of each Board of Commissioners and Board of Directors in the 2019 Fiscal Year, as stipulated in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding the Determination of Income of the Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020.</p>	<p>Komisaris Utama / President Commissioner : 45 persen dari tantiem/IK Direktur Utama tahun buku 2019 / 45 percent of bonus/IK of the President Director for the 2019 fiscal year</p> <p>Anggota Dewan Komisaris / All Members of the Board of Commissioners: 90 persen dari tantiem/IK Komisaris Utama tahun buku 2019 / 90 percent of bonus/IK for the President Commissioner for the 2019 fiscal year</p>
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS		
Gaji / Salary		
<ul style="list-style-type: none"> Gaji / Salary 	<p>Gaji Direktur Utama telah ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020 sebesar Rp230.000.000,00 per bulan. / The President Director's salary has been stipulated in the Letter of the Ministry of BUMN No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding the Determination of Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020 amounting to Rp230,000,000.00 per month.</p> <p>Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama yang sebesar 95 persen dari gaji Direktur Utama. / The Vice President Director's salary is 95 percent of the President Director's salary.</p> <p>Perhitungan gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia (Direktur SDM dan Umum IPC) sebesar 90 persen dari gaji Direktur Utama. / The salary of the Director in charge of Human Capital (HC and General Affairs Director of IPC) is 90 percent of the salary of the President Director.</p> <p>Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama. / Other Directors' salaries are 85 percent of the President Director's salary.</p>	<p>Direktur Utama / President Director : Rp230.000.000,00 per bulan / per month</p> <p>Wakil Direktur Utama / Vice President Director: Rp218.500.000,00 per bulan / per month</p> <p>Direktur SDM dan Umum / HC and General Affairs Director: Rp207.000.000,00 per bulan / per month</p> <p>Direktur Lainnya / Other Directors : Rp195.500.000,00 per bulan / per month</p>
Tunjangan / Allowance		
<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance 	<p>Sebesar 1 kali Gaji, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. / 1x salary, in accordance with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.</p>	<p>Direktur Utama / President Director : Rp230.000.000,00</p> <p>Wakil Direktur Utama / Vice President Director: Rp218.500.000,00</p> <p>Direktur SDM dan Umum / HC and General Affairs Director: Rp207.000.000,00</p> <p>Direktur Lainnya / Other Directors : Rp195.500.000,00</p>

Struktur Remunerasi / Remuneration Structure	Keputusan / Decision	Nominal
<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Perumahan / Housing Allowance Asuransi Purna Jabatan / Pension Insurance 	<p>Sebesar Rp27.500.000 per bulan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Apabila menyediakan rumah jabatan, maka digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan. / Rp27,500,000 per month, in accordance with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020. If official residence is provided, it is used until the term of office of the Board of Directors ends and the person concerned is not given a housing allowance.</p> <p>Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25 persen dari Gaji dalam setahun, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. / The premium borne by the Company is 25 percent of the annual salary, in accordance with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board for State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.</p>	<p>Seluruh Anggota Direksi / All Members of the Board of Directors : Rp27.500.000 per bulan / per month</p> <p>Direktur Utama / President Director : Rp690.000.000,00 dalam setahun / annually</p> <p>Wakil Direktur Utama / Vice President Director: Rp655.500.000,00 dalam setahun / annually</p> <p>Direktur SDM dan Umum / HC and General Affairs Director: Rp621.000.000,00 dalam setahun / annually</p> <p>Direktur Lainnya / Other Directors : Rp586.500.000,00 dalam setahun / annually</p>
Fasilitas / Facilities		
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kendaraan Dinas / Vehicle Kesehatan / Healthcare 	<p>1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. / 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs while taking into account the financial condition of the Company. The specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc.</p> <p>Setiap Dewan Komisaris berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 serta Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/27/8/1/TUD/UT/PI.II-2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hak Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juncto Surat Keputusan Direksi No. HK.01/29/9/1/TUD/UT/PI.II-2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/27/8/1/TUD/UT/PI.II-2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hak Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Each member of Directors is entitled to a health facility provided in the form of medical insurance or reimbursement of medical expenses, with details in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 and Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/27/8/1/TUD/UT/PI.II-2020 dated August 27, 2020 regarding Rights of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juncto Decree of the Board of Directors of No. HK.01/29/9/1/TUD/UT/PI.II-2020 dated September 29, 2020 regarding Amendment to Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/27/8/1/TUD/UT/PI.II-2020 dated August 27, 2020 regarding Rights of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>	<p>Seluruh Anggota Direksi / All Members of the Board of Directors : Fasilitas Kendaraan Dinas / Official Car facility</p> <p>Seluruh Anggota Direksi / All Members of the Board of Directors : Biaya pengobatan/asuransi kesehatan (at cost). / Medical Expenses/Health insurance (at cost)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Hukum / Legal Assistance 	<p>Diberikan sebesar pemakaian (at cost), sesuai dengan yang diatur pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/19/2/1/TMH/UT/PI.II-18 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai yang Melakukan Tindakan/Perbuatan untuk dan atas nama Jabatannya Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). <p>Provided at cost according to the regulations of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020. Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/19/2/1/TMH/UT/PI.II-18 dated February 19, 2018 regarding Provision of Legal Assistance to the Board of Directors, Board of Commissioners, Employees, Former Board of Directors, Former Board of Commissioners, and Former Employees Who Took Actions for and on Behalf of Their Position in Performing Duties for the Company in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 	<p>Seluruh Anggota Direksi / All Members of the Board of Directors : Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan. / Payment disbursement of attorney's office/legal consultant services includes the process of examination as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished this become the person' burden.</p>



Struktur Remunerasi / Remuneration Structure	Keputusan / Decision	Nominal
Tantiem/Insentif Kinerja (IK) / Bonus/Performance Incentives		
<ul style="list-style-type: none"> Tantiem/IK Tahun Buku 2019 / Bonus/ Performance Incentives for 2019 Fiscal Year 	<p>Tantiem/IK Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019 terdiri Tantiem/IK tunai dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) yang dibayarkan pada tahun ketiga sejak 4 Agustus 2020. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam Tahun Buku 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. / Bonus/Performance Incentives of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2019 Fiscal Year consisting of Cash Bonuses and Long-Term Incentives (LTI) which are paid in the third year since August 4, 2020. The amount of bonus/IK is calculated proportionally according to the term of office of each Board of Commissioners and Board of Directors in the 2019 Fiscal Year, as stipulated in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-13/Wk2.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding the Determination of Income of the Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020.</p>	<p>Direktur Utama / President Director : 100 persen / percent.</p> <p>Wakil Direktur Utama / Vice President Director: 95 persen dari tantiem/IK Direktur Utama tahun buku 2019. / 95 percent of bonus/ IK of the President Director for the 2019 fiscal year</p> <p>Direktur SDM dan Umum / HC and General Affairs Director: 90 persen dari tantiem/IK Direktur Utama tahun buku 2019. / 90 percent of bonus/ IK of the President Director for the 2019 fiscal year</p> <p>Direktur Lainnya / Other Directors : 85 persen dari tantiem/IK Direktur Utama tahun buku 2019. / 85 percent of bonus/ IK of the President Director for the 2019 fiscal year</p>

Besaran remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi IPC dalam 1 (satu) tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

The amount of remuneration given to the Board of Commissioners and Board of Directors of IPC within 1 (one) year is grouped into a range of income levels as follows:

Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi IPC dalam 1 (Satu) Tahun

Group of Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of IPC in 1 (One) Year

Jumlah Remunerasi / Total Remuneration	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors
Di atas Rp2 miliar / Above Rp2 billion	Nihil / Nil	8 orang / people
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar / Above Rp1 billion – Rp2 billion	7 orang / people	Nihil / Nil
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar / Above Rp500 million – Rp1 billion	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Rp500 juta ke bawah / Below Rp500 million	Nihil / Nil	Nihil / Nil

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan dinamika bisnis yang semakin masif, sehingga keberadaan level manajemen yang profesional dengan beragam latar belakang disiplin ilmu sangat penting dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha di masa depan.

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a more objective, comprehensive, optimal decision-making process that has a positive impact on the Company's supervision and management. This is in line with the development of increasingly massive business dynamics, so that the existence of a professional management level with various disciplinary backgrounds is crucial in order to maintain business continuity in the future.

Selain itu, adanya komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam juga dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan praktik GCG di lingkup IPC.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi IPC diklasifikasikan berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin, rentang usia, pendidikan terakhir, dan keahlian/skill yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

In addition, the existence of a diverse composition of the Board of Commissioners and Board of Directors can also broaden perspectives and interests in the decision-making process both within the Board of Commissioners and the Board of Directors, so as to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of GCG practices within IPC.

The diversity of the IPC Board of Commissioners and Board of Directors is classified based on nationality, gender, age range, latest education, and the expertise/skills possessed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI IPC

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF IPC

Indikator Keberagaman / Diversity Indicator	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors
Kewarganegaraan / Nationality		
• WNI / Indonesian Citizen	100%	100%
• WNA / Foreigner	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Jenis Kelamin / Gender		
• Laki-laki / Male	100% 1. Moermahadi Soerja Djanegara* 2. Montty Girianna 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. R. Agus H. Purnomo 7. Nurrachman** 8. Tumpak Hatorangan Panggabean*** 9. Djadmiko****	92% 1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Ogi Rulino***** 4. Muarip***** 5. Mega Satria***** 6. Ihsanuddin Usman***** 7. Zuhri Iryansyah***** 8. Yon Irawan***** 9. Elvyn Gani Masassya***** 10. Widyaka Nusapati***** 11. Prasetyadi***** 12. Rizal Ariansyah***** 13. Dani Rusli Utama*****
• Wanita / Female	Nihil / Nil	8% 1. Rima Novianti*****
Usia / Age		
• > 50 tahun / years old	100% 1. Moermahadi Soerja Djanegara* 2. Montty Girianna 3. Suaidi Marasabessy 4. Kushari Suprianto 5. D. Andhi Nirwanto 6. R. Agus H. Purnomo 7. Nurrachman** 8. Tumpak Hatorangan Panggabean*** 9. Djadmiko****	54% 1. Hambra 2. Ogi Rulino***** 3. Ihsanuddin Usman***** 4. Zuhri Iryansyah***** 5. Elvyn G. Masassya***** 6. Widyaka Nusapati***** 7. Prasetyadi*****
• ≤ 50 tahun / years old	Nihil / Nil	46% 1. Arif Suhartono 2. Rima Novianti***** 3. Muarip***** 4. Mega Satria***** 5. Yon Irawan***** 6. Rizal Ariansyah***** 7. Dani Rusli Utama*****



Indikator Keberagaman / Diversity Indicator	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors
Pendidikan Terakhir / Latest Education		
• S1 / Undergraduate	22% 1. Suaidi Marasabessy 2. Tumpak Hatorangan Panggabean***	Nihil / Nil
• S2 / Postgraduate	45% 1. Kushari Suprianto 2. R. Agus H. Purnomo 3. Nurrachman** 4. Djadmiko****	100% 1. Arif Suhartono 2. Hambra 3. Rima Novianti***** 4. Zuhri Iryansyah***** 5. Muarip***** 6. Mega Satria***** 7. Ihsanuddin Usman***** 8. Ogi Rulino***** 9. Yon Irawan***** 10. Elvyn Gani Masassya***** 11. Rizal Ariansyah***** 12. Prasetyadi***** 13. Widyaka Nusapati***** 14. Dani Rusli Utama*****
• S3 / Doctorate	33% 1. Moermahadi Soerja Djanegara* 2. Montty Girianna 3. D. Andhi Nirwanto	Nihil / Nil
Keahlian / Expertise	Moermahadi Soerja Djanegara* - Keuangan / Finance	Arif Suhartono - Manajemen Infrastruktur / Infrastructure Management - Administrasi / Administration
	Montty Girianna - Transportasi / Transportation - Keuangan / Finance	Hambra - Hukum Bisnis / Business Law - <i>Human Capital</i> (SDM) - Restrukturisasi Perusahaan / Corporate Restructuring
	Suaidi Marasabessy - Keuangan / Finance	Rima Novianti***** - Manajemen Komunikasi / Communication Management - Komersial / Commerce
	Kushari Suprianto - Keuangan / Finance	Zuhri Iryansyah***** - Manajemen Proyek / Project Management - Teknik dan Pengembangan Pelabuhan / Port Development and Engineering
	D. Andhi Nirwanto - Logistik Keuangan / Financial Logistics	Muarip***** - Hukum / Law - Administrasi Bisnis / Business Administration - Operasional Pelabuhan / Port Operations
	R. Agus H. Purnomo - Keuangan / Finance	Ihsanuddin Usman***** - Manajemen Inovasi dan Teknologi / Innovation and Technology Management - Pengembangan Sumber Daya Manusia / Human Capital Development
	Nurrachman** - Teknik / Engineering - Keuangan / Finance	Ogi Rulino***** - <i>Business Development</i> - Logistik / Logistics
	Tumpak Hatorangan Panggabean*** - Hukum / Law	Mega Satria***** - Keuangan / Finance - <i>Human Capital</i> - Manajemen Risiko / Risk Management - Digitalisasi & IT / Digitalization & IT
	Djadmiko**** - Keuangan / Finance	Yon Irawan***** - Manajemen Keuangan / Financial Management

**Indikator Keberagaman /
Diversity Indicator**

**Dewan Komisaris /
Board of Commissioners**

**Direksi /
Board of Directors**

Keahlian / Expertise

- Elvyn G. Masassy*******
- Ekonomi / Economics
- Rizal Ariansyah*******
- Hukum / Law
- Prasetyadi*******
- Manajemen Teknik Kepelabuhanan / Port Engineering Management
- Widyaka Nusapati*******
- Administrasi Bisnis, Keuangan / Business Administration, Finance
- Dani Rusli Utama*******
- Manajemen Infrastruktur / Infrastructure Management

Keterangan : / Description :

*) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-68/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively served as President Commissioner/Independent Commissioner of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-68/MBU/03/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

**) Mulai efektif menjabat sebagai Komisaris Independen IPC sejak tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively served as Independent Commissioner of IPC since December 14, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Masa jabatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen IPC resmi berakhir per tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-68/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The term of office as President Commissioner/Independent Commissioner of IPC officially ends on March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-68/MBU/03/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

****) Masa jabatan sebagai Komisaris IPC resmi berakhir per tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The term of office as Commissioner of IPC officially ends on December 14, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Effectively served as Director of IPC since March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively served as Director of IPC since June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / The term of office as Director of IPC officially ends on March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Masa jabatan sebagai Direktur IPC resmi berakhir per tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-208/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / The term of office as Director of IPC officially ends on June 18, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-208/MBU/06/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 resmi diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively served as Director of IPC from March 2, 2020 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-69/MBU/03/2020 concerning Termination, Change in Position Nomenclature, Job Assignment, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero), then on March 15, 2021 officially dismissed from the position based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

*****) Mulai efektif menjabat sebagai Direktur IPC sejak tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively serving as Director of IPC since March 15, 2021 based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

KESEIMBANGAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi harus berjalan selaras, seimbang, dan saling menghormati atas hak dan kewajiban masing-masing sesuai fungsi dan tugasnya.

BALANCE OF WORK RELATIONS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be harmonious, balanced, and mutually respectful of their respective rights and obligations in accordance with their functions and duties.



PRINSIP DASAR DAN ASAS HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja organ di dalam Perseroan harus berlandaskan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi juga didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan.

Prinsip Dasar yang Melandasi Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPC

BASIC PRINCIPLES AND PRINCIPLES OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS

The working relationship of organs within the Company must be based on Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and also Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition to laws and government regulations, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is also based on 5 (five) basic principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Basic Principles Underlying the Work Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors of IPC



Transparansi / Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan Perusahaan diantara Dewan Komisaris dan Direksi dengan memberikan nilai tambah bagi Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya / Openness in carrying out a process of Company activities between the Board of Commissioners and the Board of Directors by providing added value to the Company for the benefit of Shareholders and other Stakeholders.



Akuntabilitas / Accountability

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas dengan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan / Accountability for the implementation of functions and duties with the authority possessed by the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company



Responsibilitas / Responsibility

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi sesuai fungsi di dalam melaksanakan tugasnya dalam Perseroan sebagai bagian dari Masyarakat kepada *Stakeholders* dan lingkungan dimana Perseroan berada / The responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors according to the function in carrying out their duties in the Company as part of the Community to Stakeholders and the environment in which the Company is located.



Independensi / Independency

Keadaan dimana Dewan Komisaris dan Direksi bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme Perseroan / A situation where the Board of Commissioners and the Board of Directors are free from influence or pressure from other parties that are not in accordance with the Company's mechanisms.



Kesetaraan / Fairness

Terciptanya kesetaraan perlakuan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saling berkepentingan / The creation of equal treatment between the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with mutual interests

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip dasar GCG, maka hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi kepentingan Perseroan.

Di samping itu, terdapat 6 (enam) asas yang menjadi landasan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

Based on the prevailing laws and regulations and the basic principles of GCG, the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors can provide added value for the interests of the Company.

In addition, there are 6 (six) principles that form the basis of the working relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the following descriptions:

Asas dalam Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Principles in the Work Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Keterbukaan / Transparency

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak didasarkan pada kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (*no vested interest*). / The working relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors is not based on personal interests and no vested interest.

Asas Formal / Formal Principles

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan tugas/tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku. / The working relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on their respective duties/responsibilities and is carried out through the applicable procedures.

Asas Kelembagaan / Institutional Principles

Dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaannya sebagai *collegial*. / In each implementation of their duties and functions, the Board of Commissioners and the Board of Directors represent their institutions collegially.

Asas Harmonis / Harmonious Principle

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi sebisa mungkin menghindari dan mengeliminir segala bentuk perpecahan atau perselisihan yang dapat merugikan Perseroan. / The working relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors as much as possible avoids and eliminates all forms of division or dispute that could harm the Company.

Asas Saling Menghormati / Principle of Mutual Respect

Dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing-masing, sehingga tidak mencampuri hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. / In every action taken must be in accordance with the duties, obligations, authority of each, so as not to interfere with things that are not within their authority.

Asas Kemitraan / Principle of Partnership

Hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan *partner* kerja sama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perseroan. / The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a collaborative partner who has the same commitment to the interests of the Company.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing Organ Perseroan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, Perseroan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan beberapa prinsip, dengan uraian sebagai berikut:

The establishment of a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the most important aspects, to ensure that each organ of the Company can work according to its function effectively and efficiently. Therefore, in maintaining a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company applies several principles, which are as follows:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut;
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak terdapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;

1. The Board of Commissioners respects the function and role of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association;
2. The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the management policies of the Company;
3. Correspondence between the Board of Commissioners and the Board of Directors shall use a letter format which contains an explanation of the purpose and objectives of the letter;
4. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or accountable correspondence;
5. Every informal work relationship can be carried out by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but it cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence;



6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan antar Organ Perseroan, dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya, sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

6. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a relationship between the Company's Organs, in the sense that the Board of Commissioners and the Board of Directors act as collective positions that represent all of their members, thus, any working relationship between a member of the Board of Commissioners and a member of the Board of Directors must be known by other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PERMINTAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Dalam proses permintaan dan penyampaian informasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan kepentingan Perseroan.
2. Direksi wajib memberikan tanggapan, informasi, alasan, atau jawaban dalam kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris terkait dengan kepentingan Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris maupun Direksi berwenang memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, antara lain:
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - e. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. Dalam hal Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk mengikuti Rapat Direksi atau Dewan Komisaris mengajukan permintaan kehadiran dalam Rapat Direksi.
4. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
5. Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

REQUEST AND SUBMISSION OF INFORMATION

In the process of requesting and submitting information between the Board of Commissioners and the Board of Directors, there are the following provisions:

1. Information requested by the Board of Commissioners from the Board of Directors is only related to the interests of the Company.
2. The Board of Directors must provide responses, information, reasons, or answers at the first opportunity to the Board of Commissioners related to the interests of the Company.
3. Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is authorized to obtain access to information relating to the management of the Company, including:
 - a. To examine books, letters and other documents, check cash for verification purposes and examine the assets of the Company;
 - b. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
 - c. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
 - d. Requesting the Board of Directors and/or other officials with the consent of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting;
 - e. Attend the Board of Directors Meeting and provide views on matters being discussed. In the event that the Board of Directors invites the Board of Commissioners to attend the Board of Directors meeting or the Board of Commissioners submits a request for attendance at the Board of Directors meeting.
4. The Board of Directors is responsible for ensuring that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner according to the needs of the Board of Commissioners in carrying out its duties.
5. The Board of Directors from time to time can also provide a special report to the Board of Commissioners and/or the GMS.

6. Dewan Komisaris wajib memberikan jawaban dan tanggapan atas setiap usulan Direksi yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.
7. Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap pengambilan keputusan berpegang pada prinsip GCG dan peraturan yang berlaku.
8. Organ pendukung Dewan Komisaris dapat pula melakukan pertemuan/mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Perseroan yang bersifat Hubungan Kerja Informal, yaitu:
 - a. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan permintaan Direksi yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - b. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan dengan hal-hal operasional Perseroan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

ATURAN PERALIHAN

Dewan Komisaris menghargai fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang belum diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman GCG, serta *Board Manual* akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

TRANSITIONAL RULES

The Board of Commissioners appreciates the function and role of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company. Various matters relating to the daily work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors that have not been regulated in the provisions/laws and regulations, the Company's Articles of Association, GCG Guidelines, and Board Manual will be further regulated in accordance with the agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors based on GCG principles.

ORGANS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is granted the authority to establish supporting organs in order to promote the effectiveness of the supervisory function and provide advice to the Board of Directors. The policy refers to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board for State-Owned Enterprises.

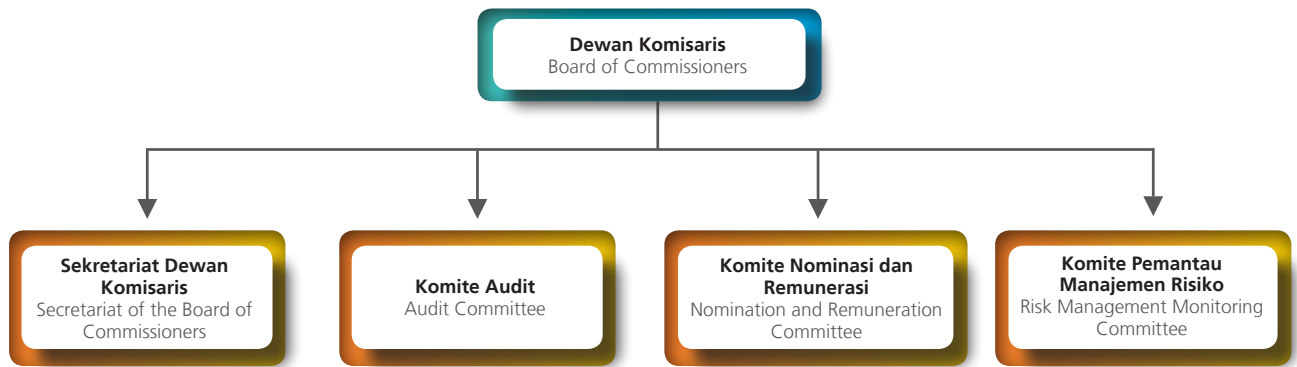


Hingga saat ini, organ di bawah Dewan Komisaris IPC terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Manajemen Risiko.

To date, the organs under the IPC Board of Commissioners consist of the Secretariat of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.

STRUKTUR ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS IPC

ORGAN STRUCTURE UNDER THE IPC BOARD OF COMMISSIONERS



SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

The Secretariat of the Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of the duties of the Board of Commissioners, particularly in the secretariat and liaising the Board of Commissioners with other parties, including the Board of Directors.

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

MEMBERSHIP OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh seorang Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris maupun Staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris IPC.

The Secretariat of the Board of Commissioners of the Company is chaired by a Secretary of the Board of Commissioners and assisted by a Secretariat Staff of the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners and Secretariat Staff of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners of IPC.

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners and Secretariat Staff of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners of the Company for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time.

Adapun anggota Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The members of the Secretariat of the Board of Commissioners of the Company who serve in 2020 are as follows:

Keanggotaan Komisaris IPC Tahun 2020

Members of IPC Commissioners in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan / Term of Office
1.	Rizqi Kurnianto	Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary of the Board of Commissioners	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 dated August 1, 2019, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	1 Agustus 2019 – 31 Juli 2022 (Periode Pertama) / August 1, 2019 – July 31, 2022 (First Period)
2.	Ditya Akbar Henryanto	Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Secretariat Staff of the Board of Commissioners	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 dated August 1, 2019, concerning the Appointment of Staff to the Secretariat of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	1 Agustus 2019 – 31 Juli 2022 (Periode Pertama) / August 1, 2019 – July 31, 2022 (First Period)

Untuk profil lengkap Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Rizqi Kurnianto, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profile of the Secretary of the Board of Commissioners of the Company, namely Mr. Rizqi Kurnianto, has been described in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

The Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are to carry out the following tasks:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

1. Preparing meetings, including Board of Commissioners briefing sheet;
2. Taking minutes of meetings of Board of Commissioners;
3. Administering documents of Board of Commissioners, such as incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents;
4. Drafting Work Plan and Budget of Board of Commissioners;
5. Preparing the draft report of Board of Commissioners;
6. Carrying out other duties tasked by Board of Commissioners.

Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

The Secretary of Board of Commissioners also performs other duties such as:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

1. Ensuring that Board of Commissioners comply with laws and regulations and apply GCG principles;
2. Providing information required by Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested;
3. Coordinating the members of the Committee, if necessary, to facilitate the duties of Board of Commissioners;
4. Acting as liaison officer of Board of Commissioners with other parties.



INFORMASI RANGKAP JABATAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris BUMN tidak boleh merangkap sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
- Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
- Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
- Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.

Baik Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris IPC yang menjabat sepanjang tahun 2020 tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, baik Sekretaris Dewan Komisaris maupun staf Sekretariat Dewan Komisaris tidak mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pelatihan maupun *workshop*.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2020, Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain:

- Mempersiapkan undangan, bahan rapat, dan risalah rapat Dewan Komisaris;
- Menyelenggarakan tertib administrasi dan penyimpanan dokumen;
- Membuat Konsep Usulan RKA Dewan Komisaris Tahun 2020;
- Mendampingi Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris, rapat koordinasi dengan Direksi dan RUPS;
- Mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris;
- Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke cabang Pelabuhan;
- Membantu proses penyusunan surat, serta menyampaikan dan mengadministrasikan surat-surat Dewan Komisaris;
- Membuat konsep Laporan Dewan Komisaris;
- Membantu mempersiapkan pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung;

INFORMATION ON CONCURRENT POSITIONS FOR THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State Owned Enterprises, Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners of BUMN may not concurrently serve as:

- Members of the Board of Commissioners/Board of Supervisors at BUMN/other companies;
- Secretary/Secretariat Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN/other companies;
- Other committee members in the Company; and/or
- Committee members at BUMN/other companies.

Both the Secretary and Secretariat Staff of the IPC Board of Commissioners who served throughout 2020 do not have concurrent positions prohibited in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2020, the Secretary of the Board of Commissioners and the staffs of the Secretariat of the Board of Commissioners did not attend any competency development program in the form of training or workshop.

IMPLEMENTATION OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

Throughout 2020, the Secretariat of the Board of Commissioners has carried out the following tasks:

- Preparing invitation, meeting materials, and minutes of meetings of Board of Commissioners;
- Organizing administrative order and document storage;
- Drafting the RKA Proposal of the Board of Commissioners for 2020;
- Accompanying the Board of Commissioners in internal meetings of the Board of Commissioners, coordination meetings with the Board of Directors and the GMS;
- Preparing data and information needed by the Board of Commissioners;
- Accompanying the Board of Commissioners on a working visit to the Port branch;
- Assisting the process of preparing letters, as well as submitting and administering letters to the Board of Commissioners;
- Drafting the Report of the Board of Commissioners;
- Assisting the preparation on the implementation of the Working Visit of the Board of Commissioners and Supporting Organs;

10. Melakukan proses administrasi terkait realisasi anggaran Dewan Komisaris;
11. Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan untuk membuat/me-review konsep *Board Manual* dan Laporan Tahunan, serta tugas-tugas lain terkait administrasi;
12. Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan terkait pelaksanaan program pengenalan Perusahaan kepada Anggota Komisaris baru;
13. Menghadiri Pelatihan dan Seminar, untuk peningkatan kompetensi;
14. Melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan Dewan Komisaris;
15. Memfasilitasi kebutuhan Dewan Komisaris;
16. Penyelesaian administrasi lainnya terkait dengan tugas Dewan Komisaris.

PENGHASILAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Anggota Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Honorarium untuk Sekretaris Dewan Komisaris maksimal 15 persen dari Honorarium Dewan Komisaris, sedangkan honorarium Staf Sekretariat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perusahaan. Ketentuan pajak dari penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris maupun Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditanggung oleh Perseroan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

10. Conducting the administrative processes related to the realization of the Board of Commissioners' budget;
11. Coordinating with the Corporate Secretary to prepare/ review the concept of the Board Manual and Annual Report, as well as other tasks related to administration;
12. Coordinating with the Corporate Secretary regarding the implementation of the Company introduction program to new members of the Board of Commissioners;
13. Attending Training and Seminars, to increase competence;
14. Carrying out other activities as assigned by the Board of Commissioners;
15. Facilitating the needs of the Board of Commissioners;
16. Other administrative settlements related to the duties of the Board of Commissioners.

INCOME OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Secretariat of the Board of Commissioners of the Company are entitled to receive income, the amount of which is determined by the Board of Commissioners with due observance of the Company's capabilities. Honorarium for the Secretary of the Board of Commissioners is a maximum of 15 percent of the Honorarium of the Board of Commissioners, while honorarium for Secretariat Staff of the Board of Commissioners is in accordance with company provisions. Tax provisions on the income of the Secretary of the Board of Commissioners and the Secretariat Staff of the Board of Commissioners are borne by the Company and are not allowed to receive other income other than the honorarium.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ under the Board of Commissioners which was established to assist the Board of Commissioners in supervising the management of IPC in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). The establishment of the Audit Committee by the Board of Commissioners is carried out with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Minister of BUMN Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board for State-Owned Enterprises;



4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 tanggal 15 Agustus 2008); dan
 7. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 153/DK/PL.II/VIII-2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pembentukan Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
4. Minister of BUMN Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
 5. Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;
 6. Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. No. 1 dated December 1, 1992 which has been amended several times, most recently with the Notary Deed of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 dated August 15, 2008); and
 7. Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 153/DK/PL.II/VIII-2008 dated August 5, 2008 concerning the Establishment of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Komite Audit IPC telah terbentuk sejak tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 17/DK/PI.II/I-2002 tanggal 23 Januari 2002.

The IPC Audit Committee has been formed since 2002 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 17/DK/PI.II/I-2002 dated January 23, 2002.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

1. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
2. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
4. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS;
6. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan Mampu berkomunikasi secara efektif;

MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

1. The Board of Commissioners is obliged to establish an Audit Committee consisting of a Head and Members;
2. The Head and Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
3. Head of the Audit Committee is a Member of the Board of Commissioners who is a Member of the Independent Board of Commissioners or Member of the Board of Commissioners who can act independently;
4. Audit Committee members may consist of members of the Board of Commissioners or from outside the Company;
5. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are reported to the GMS;
6. Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.

Audit Committee Membership Requirements

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
2. Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest within the company;

3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Selama tahun 2020, terdapat pergantian komposisi Komite Audit, dengan uraian sebagai berikut:

1. Periode I (1 Januari – 8 April 2020)

Komposisi anggota Komite Audit per tanggal 1 Januari hingga 8 April 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yang beranggotakan:

- a. Ketua Komite Audit: Bapak Kushari Suprianto (Dewan Komisaris IPC);
- b. Anggota Komite Audit: Bapak Rakhmat Adi Santosa (Pihak Eksternal); dan
- c. Anggota Komite Audit: Bapak Muhdi Al Fajar (Pihak Eksternal).

2. Periode II (8 April – 31 Desember 2020)

Pada tanggal 8 April 2020, terdapat perubahan komposisi anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Rakhmat Adi Santosa dialih tugaskan menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Pionir Harapan dialih tugaskan dari anggota Pemantau Manajemen Risiko menjadi anggota Komite Audit.

3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete the task;
5. One of members of Audit Committee must have an educational background or expertise in accounting and finance;
6. One of members of Audit Committee has the ability and understanding of the Company's business scope.

TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Throughout 2020, the composition of Audit Committee changed with the following details:

1. Period I (January 1 – April 8, 2020)

The member composition of Audit Committee as per January 1 to April 8, 2020 remain unchanged from the previous year, which consists of:

- a. Head of Audit Committee: Mr. Kushari Suprianto (IPC Board of Commissioners);
- b. Audit Committee Member: Mr. Rakhmat Adi Santosa (External Party)
- c. Audit Committee Member: Mr. Muhdi Al Fajar (External Party)

2. Period II (April 8 – December 31, 2020)

On April 8, 2020, the member composition of the Audit Committee changed. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 regarding the Transfer of Duties of Audit Committee Members as a Member of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Rakhmat Adi Santosa was transferred to become a Member of the Risk Management Monitoring Committee and based on the Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 regarding Transfer of Duties of the Risk Management Monitoring Committee Member as a Member of the Audit Committee PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Pionir Harapan was transferred from a member of the Risk Management Monitoring Committee to a member of Audit Committee.



Dengan demikian, komposisi anggota Komite Audit per tanggal 8 April 2020 adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite Audit: Bapak Kushari Suprianto (Dewan Komisaris IPC);
- Anggota Komite Audit: Bapak Muhdi Al Fajar (Pihak Eksternal); dan
- Anggota Komite Audit: Bapak Pionir Harapan (Pihak Eksternal).

Adapun komposisi anggota Komite Audit yang menjabat selama tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Thus, the composition of the Audit Committee members as of April 8, 2020 was as follows:

- Head of Audit Committee: Mr. Kushari Suprianto (IPC Board of Commissioners);
- Audit Committee Member: Mr. Muhdi Al Fajar (External Party); and
- Audit Committee Member: Mr. Pionir Harapan (External Party).

The composition of the Audit Committee members who served during 2020 is described in the following table:

Komposisi Komite Audit Tahun 2020

Composition of the Audit Committee in 2020

Uraian / Description	Ketua Komite Audit / Head of the Audit Committee		Anggota Komite Audit / Audit Committee Members	
Nama / Name	Kushari Suprianto	Rakhmat Adi Santosa*	Muhdi Al Fajar	Pionir Harapan
Status	Anggota Dewan Komisaris IPC / Member of IPC Board of Commissioners	Pihak Eksternal / External Party	Pihak Eksternal / External Party	Pihak Eksternal / External Party
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 16/KEP-DK/PI.II/X-2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 16/KEP-DK/PI.II/X-2017 dated October 11, 2017 concerning the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of a Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP-DK/PI.II/V-2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP-DK/PI.II/III-2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Board of Commissioners Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/V-2017 dated March 6, 2017 regarding Appointment of Audit Committee Members of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, extended through Board of Commissioners Decree No. 04/KEP-DK/PI.II/III-2020 dated March 4, 2020 regarding Extension of Term of Office of Audit Committee Members of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai Anggota Komite Audit serta Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 dated February 1, 2018 concerning the Transfer of Duties of the Nomination and Remuneration Committee Members as Members of the Audit Committee and the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning the Transfer of Duties of Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Audit Committee of the Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II
Masa Jabatan / Term of Office	(Sama dengan Masa Jabatan sebagai Komisaris IPC) / (Same as Tenure as Commissioner of IPC)	6 Maret 2017 – 5 Maret 2020 (Periode Pertama), kemudian diperpanjang hingga tanggal 7 April 2020 / March 6, 2017 – March 5, 2020 (First Period), extended until April 7, 2020	1 Februari 2018 – 16 Maret 2021 (Periode Pertama) / February 1, 2018 – March 16, 2021 (First Period)	8 April 2020 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – February 28, 2021 (First Period)
Pendidikan / Education	Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, SDM / Accounting, Economics, HC Management	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics
Keahlian / Expertise	Kepabeanan / Customs	Keuangan / Finance	Keuangan / Finance	Keuangan, SDM / Finance, HC
Pengalaman Kerja / Employment History	Kepabeanan / Customs	Partner Kantor Akuntan Publik (KAP), Managing Partner, Dosen tetap, Konsultan / Public Accounting Firm Partner (KAP), Managing Partner, Permanent Lecturer, Consultant	Auditor dan konsultan di beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP), Finance and Accounting, dan sebagai Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris di beberapa BUMN / Auditor and consultant in several Public Accounting Firms (KAP), Finance and Accounting, and as Committee Members under the Board of Commissioners in several BUMN	Akuntansi dan sebagai Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris di beberapa BUMN / Accounting and as a Committee Member under the Board of Commissioners in several BUMN

Keterangan : / Description:

*) Pengalihan tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020.

*) Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

Untuk profil lengkap dari Ketua Komite Audit, yaitu Bapak Kushari Suprianto maupun seluruh Anggota Komite Audit yang menjabat selama tahun 2020, yaitu Bapak Rakhmat Adi Santosa, Bapak Muhdi Al Fajar, dan Bapak Pionir Harapan, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM/CHARTER KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/ Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit IPC mengacu pada Piagam Komite Audit, dengan uraian sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

The complete profile of the Head of the Audit Committee, Mr Kushari Suprianto and all members of the Audit Committee in 2020, namely Mr. Rakhmat Adi Santosa, Mr. Muhdi Al Fajar and Mr. Pionir Harapan, has been described in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

STATEMENT OF OWNERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, Audit Committee is guided by Board of Commissioners Decision No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/ Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee. The Charter contains provisions that must be complied with in forming and implementing the activities of Audit Committee in order to be able to work independently, objectively, independently, transparently and responsibly. The charter is organized in the following section:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duty;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibility;
7. Meeting;
8. Report;
9. Access to Information Confidentiality;
10. Work Plan and Budget;
11. Members Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Appraisal;
14. Others;
15. Closing.

DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Audit Committee Duties

The implementation of IPC Audit Committee's duties refers to the Audit Committee Charter as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist Board of Commissioners;
2. Audit Committee is independent in the performance of its duties as well as in the report and is accountable to Board of Commissioners;



3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
 5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
 6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
 8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
 9. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.
3. Audit Committee assists Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the auditor's performance of the Public Accounting Firm (KAP) and the Internal Audit Unit (IAU);
 4. Audit Committee assesses the implementation of activities and audit results conducted by IAU as well as KAP auditors;
 5. Audit Committee provides recommendations on the improvement of the internal control system and its implementation;
 6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the Company;
 7. Audit Committee identifies matters requiring the attention of Board of Commissioners and other duties granted by Board of Commissioners;
 8. Audit Committee proposes to Board of Commissioners the candidate auditor of the Annual Financial Reporting along with the reasons for nomination and the amount of fee proposed for the said KAP auditor;
 9. Special Duty from Board of Commissioners.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

Selain itu, Komite Audit juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan.

Audit Committee Authorities

In performing its duties the Audit Committee is authorized:

1. To look at the books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other promissory notes and check the Company's assets;
2. To enter the yards of buildings and offices used by the Company;
3. To request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's management;
4. To understand all policies and actions that have been and will be carried out by the Company.

In addition, the Audit Committee also has the authority to submit auditor requests from the Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) and the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) to the Board of Commissioners.

In exercising the above powers, the Audit Committee can cooperate with the Company's Internal Control Unit (SPI) Division.

Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
2. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
3. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.

Komite Audit bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pernyataan Independensi Komite Audit IPC

Kriteria Independensi Komite Audit / Audit Committee Independence Criteria	Komite Audit IPC Tahun 2020 / IPC Audit Committee in 2020			
	Kushari Suprianto	Rakhmat Adi Santosa*	Muhdi Al Fajar	Pionir Harapan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. / Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. / Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. / Do not serve as administrators of political parties, officials and the government.	✓	✓	✓	✓
Keterangan : / Description: *) Pengalih tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / *) Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.				

Audit Committee Responsibilities

The Audit Committee reports to the Board of Commissioners. The accountability of the Audit Committee to the Board of Commissioners is presented in the following report:

1. Annual report on the implementation of the Audit Committee's duties;
2. Quarterly reports on the implementation of the Audit Committee's duties;
3. Reports for each implementation of specific duties of the Audit Committee.

The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee carries out its functions and duties in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with statutory regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of the Audit Committee members must meet the following criteria:

Statement of Independence of IPC Audit Committee



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perseroan memberikan program pengembangan kompetensi bagi setiap anggota Komite Audit dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Name of Training	Waktu dan Tempat / Time and Place	Penyelenggara / Organizer
Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Telah diuraikan di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. / This section has been described in the Board of Commissioners Capability Improvement Program section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Muhdi Al Fajar	Anggota Komite Audit / Member Audit Committee	Accounting Series I "Why Lean Accounting is Important"	15 Agustus 2020 secara Daring / August 15, 2020 Online	LEAN Accounting Indonesia
		Scenario Analysis for Top Management	18 September 2020 secara Daring / September 18, 2020 Online	Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia / Center for Accounting Development, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia
		Accounting Series II "Why Lean Accounting is Important"	19 September 2020 secara Daring / September 19, 2020 Online	LEAN Accounting Indonesia
Pionir Harapan	Anggota Komite Audit / Member Audit Committee	Tidak mengikuti Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit sepanjang tahun 2020. / Did not participate in the Audit Committee Competency Development Program throughout 2020.		

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Audit Tahun 2020

Guna mendukung pelaksanaan perannya, Komite Audit menghadiri 4 (empat) jenis rapat, yakni rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Komite Audit, rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Dewan Komisaris

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company provides a competency development program for each member of the Audit Committee in order to improve productivity and effectiveness of the Audit Committee's performance. The following is a table describing the capability improvement program that the Audit Committee participated in throughout 2020.

Implementation of the 2020 Audit Committee Competency Development Program

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Audit Committee Meetings Policy

The Audit Committee holds meetings at least equal to the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. The Audit Committee meeting is chaired by the Head of the Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee, if the Head of the Audit Committee is unable to attend.

If deemed necessary, the Audit Committee may invite Management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting. Each Audit Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting signed by all members of the Audit Committee who are present. The Audit Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.

Audit Committee Meetings in 2020

To support the implementation of its role, the Audit Committee attended 4 (four) types of meeting, including internal meetings of the Audit Committee, internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings between

dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat dengan komite lain/manajemen, serta rapat koordinasi dengan SPI.

the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings with other committees/management, and coordination meetings with SPI.

Rapat Internal Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali.

Audit Committee Internal Meetings

Throughout 2020, the Audit Committee has held 33 (thirty three) internal meetings.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Internal Komite Audit

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat internal Komite Audit yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Audit Committee Members at Audit Committee Internal Meetings

The following is the frequency and attendance level of each member of the Audit Committee at Audit Committee internal meetings held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Internal Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Audit Committee at the 2020 Internal Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	33	33	100%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	8	7	88%
3.	Muhamad Al Fajar	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	33	32	97%
4.	Pionir Harapan**	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	25	25	100%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					98%

Keterangan : / Description:

*) Pengalih tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

**) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit IPC setelah dialih tugas dari jabatan sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020. / Effectively serve as a Member of the IPC Audit Committee after being transferred from his previous position as a Member of the Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020.

Agenda Rapat Internal Komite Audit

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Audit Committee Internal Meeting Agenda

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

Agenda Rapat Internal Komite Audit Tahun 2020

Audit Committee Internal Meeting Agenda for 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
Rapat Internal Komite Audit / Audit Committee Internal Meeting			
1.	14 Januari 2020 / January 14, 2020	1. Rencana kunjungan ke Batu Ampar 2. Permasalahan di PT PII 3. Tema Pemeriksaan SPI 4. Hubungan keluarga antar Pelindo II	1. Visitation plan to Batu Ampar 2. Problems at PT PII 3. SPI Examination Theme 4. Family relations between Pelindo II - Kushari - Muhamad Al Fajar - Rakhmat Adi Santosa
2.	21 Januari 2020 / January 21, 2020	1. Rencana kunjungan ke Batu Ampar 2. Permasalahan di PT PII 3. Tema Pemeriksaan SPI 4. Hubungan keluarga antar Pelindo II	1. Visitation plan to Batu Ampar 2. Problems at PT PII 3. SPI Examination Theme 4. Family relations between Pelindo II - Kushari - Muhamad Al Fajar - Rakhmat Adi Santosa
3.	4 Februari 2020 / February 4, 2020	1. Pemeriksaan tematik oleh SPI 2. SOP Pengadaan 3. Rencana <i>workshop</i> 4. Laporan Manajemen 5. Penertiban rekening	1. Thematic examination by SPI 2. Procurement SOP 3. Workshop plan 4. Management Report 5. Account control - Kushari - Muhamad Al Fajar - Rakhmat Adi Santosa



No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
4.	3 Maret 2020 / March 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Auditor Kinerja Komite Dewan Komisaris SOP Penunjukan Langsung Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Rakhmat Adi Santosa
5.	11 Maret 2020 / March 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Arahan Direksi Pembagian Tugas Anggota Komite Audit Audit KAP SOP Pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Rakhmat Adi Santosa
6.	24 Maret 2020 / March 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen 2019 <i>audited</i> Evaluasi atas Laporan Hasil Audit SPI Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) Dokumen GCG Policy Direksi Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Rakhmat Adi Santosa
7.	3 April 2020 / April 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen 2019 <i>audited</i> Usulan Kerja Sama IPI dan PCT 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar
8.	7 April 2020 / April 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan aset Struktur Organisasi Penyertaan modal di PT RSP Proyek Kalibaru KAP 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Rakhmat Adi Santosa
9.	15 Mei 2020 / May 15, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Draft Nota Dinas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 Draft Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
10.	19 Mei 2020 / May 19, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Whistleblowing System di IPC Penilaian KAP tahun buku 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
11.	2 Juni 2020 / June 2, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan penilaian audit tahun buku 2019 Laporan Kegiatan Triwulan I 2020 Koding temuan SPI Persiapan Pra RUPS Persiapan rapat internal Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
12.	9 Juni 2020 / June 9, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan pra RUPS Tindak lanjut rapat sebelumnya mengenai Coding Temuan SPI Undangan KPMR terkait Penjelasan Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Pionir Harapan
13.	16 Juni 2020 / June 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan rapat internal Dewan Komisaris Bahan Pra RUPS yang harus dibuat oleh Komite Audit Tanggapan atas Surat Direksi mengenai Pra RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
14.	23 Juni 2020 / June 23, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Akuisisi saham PT ILCS Usulan penghapusan aset di beberapa Cabang Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
15.	29 Juni 2020 / June 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Undangan KPMR dalam rangka penjelasan Direksi atas rencana akuisisi saham PT ILCS Penghapusan aset di beberapa Cabang Pelabuhan RUPS Tahun Buku 2019 PT JICT 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
16.	7 Juli 2020 / July 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan aset RKAP 2021 Persiapan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
17.	14 Juli 2020 / July 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kunjungan ke Banten Penghapusan aset Revisi RKAP 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan
18.	21 Juli 2020 / July 21, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan aset RKAP 2021 Laporan Kegiatan Komite Audit Rencana pertemuan dengan SPI Audit oleh KAP Persiapan rapat internal Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Kushari Muhdi Al Fajar Pionir Harapan



No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
19.	28 Juli 2020 / July 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan aset Penjualan saham PT RSP Struktur Organisasi RKAP 2021 Laporan Manajemen Semester I/2020 	<ol style="list-style-type: none"> Asset write-off Sale of PT RSP shares Organizational Structure 2021 RKAP Management Report Semester I/2020 <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
20.	11 Agustus 2020 / August 11, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan aset di Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan Penghapusan aset di Cabang Pelabuhan Pangkal Balam Penghapusan aset di Cabang Pelabuhan Panjang Penunjukan KAP Laporan Manajemen Semester I/2020 	<ol style="list-style-type: none"> Asset write-off at Tanjung Pandan Port Branch Asset write-off at Pangkal Balam Port Branch Asset write-off at the Panjang Port Branch Appointment of KAP Management Report Semester I/2020 <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
21.	25 Agustus 2020 / August 25, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Komite Audit Laporan Manajemen Pertemuan Triwulanan dengan SPI dan MR Rencana pembelian Tol Cilincing – Cibitung Pelabuhan Batu Ampar, Batam Transshipment Persiapan Rakomdir 	<ol style="list-style-type: none"> Audit Committee Activity Report Management Report Quarterly Meetings with SPI and MR Plan to purchase Cilincing – Cibitung Toll Road Batu Ampar Harbor, Batam Transshipment Preparation of Board of Commissioners and Board of Directors Meeting <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
22.	1 September 2020 / September 1, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pertemuan dengan SPI dan MR Kewajiban/imbalan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Meeting with SPI and MR Obligations/reward <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
23.	8 September 2020 / September 8, 2020	Laporan pertemuan dengan SPI dan MR	<ol style="list-style-type: none"> Report of meeting with SPI and MR <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
24.	14 September 2020 / September 14, 2020	Tindak lanjut pemeriksaan BPK	<ol style="list-style-type: none"> Follow-up on BPK audit <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
25.	22 September 2020 / September 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan rapat koordinasi dengan SPI dan MR Telaah atas tindak lanjut pemeriksaan BPK Persiapan rapat internal Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> Report of coordination meeting with SPI and MR Review the follow-up to the BPK audit Preparation of the internal meeting of the Board of Commissioners <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
26.	29 September 2020 / September 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Kerja sama lahan eks Inggom Perubahan atas RJPP 2020 – 2024 Penghapusan aset di Sukapura 	<ol style="list-style-type: none"> Ex-Inggom land cooperation Changes to RJPP 2020 – 2024 Asset write-off in Sukapura <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
27.	6 Oktober 2020 / October 6, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan penghapusan aset di Sukapura SK Tim Counterpart Audit Tahun Buku 2020 Kasus Jambi Hasil Rapat Koordinasi SPI RJPP Perubahan LHA SPI yang baru 	<ol style="list-style-type: none"> Application for asset write-off in Sukapura Decree of the Counterpart Audit Team for 2020 Fiscal Year Jambi Case SPI Coordination Meeting Results RJPP Changes New LHA SPI <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
28.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan Pembangunan National Logistic Ecosystem (NLE) Penghapusan aset di Sukapura Progres audit oleh KAP Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 RJPP Persiapan Rakomdir 	<ol style="list-style-type: none"> National Logistic Ecosystem (NLE) Development Progress Asset write-off in Sukapura Audit progress by KAP Quarter III of 2020 Management Report RJPP Preparation for the Meeting of Commissioners and Directors <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
29.	3 November 2020 / November 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tim Counterpart Audit KAP Laporan Manajemen Triwulan III/2020 Draft SOP Kerja Sama 	<ol style="list-style-type: none"> KAP Audit Counterpart Team Quarter III/2020 Management Report Cooperation SOP Draft <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
30.	10 November 2020 / November 10, 2020	<ol style="list-style-type: none"> SPI Progres audit per 5 November 2020 Akuisisi PT ILCS Persiapan rapat internal Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> SPI Audit progress as of November 5, 2020 Acquisition of PT ILCS Preparation of the internal meeting of the Board of Commissioners <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
31.	1 Desember 2020 / December 1, 2020	<ol style="list-style-type: none"> RKAP 2021 (Perubahan) Hasil sementara audit tahun buku 2020 Rencana rapat koordinasi rutin dengan SPI 	<ol style="list-style-type: none"> RKAP 2021 (Amendment) Provisional results of the 2020 fiscal year audit Regular coordination meetings plan with SPI <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan
32.	8 Desember 2020 / December 8, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tim Counterpart Audit tahun buku 2020 Progres audit Rencana Amendemen Perjanjian Perpanjangan PT JICT 	<ol style="list-style-type: none"> Counterpart Audit Team for fiscal year 2020 Audit progress Plan for Amendment to the PT JICT Extension Agreement <ul style="list-style-type: none"> - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan



No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
Rapat Internal Komite Audit dengan Mengundang Manajemen IPC / Audit Committee Meetings by Inviting Other Committees with IPC Management			
33.	13 Oktober 2020 / October 13, 2020	Pemaparan Progres Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) 2020 – 2024 oleh Direktur Operasi	Presentation on the Development Progress of the National Logistic Ecosystem (NLE) 2020 – 2024 by the Director of Operations - Kushari - Muhdi Al Fajar - Pionir Harapan - Direktur Operasi / Operations Director - Staf Direktorat Operasi / Operations Directorate Staffs

Rapat dengan Dewan Komisaris

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit turut menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, yaitu rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang komite serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Meeting with the Board of Commissioners

As an organ under the Board of Commissioners, the Audit Committee also attends meetings organized by the Board of Commissioners, namely internal meetings of the Board of Commissioners by inviting committees and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat internal Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance of Audit Committee Members in Internal Meetings of the Board of Commissioners

The following is the frequency and attendance level of each member of the Audit Committee in the internal meetings of the Board of Commissioners held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Audit Committee at the 2020 Internal Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	46	46	100%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	12	12	100%
3.	Muhdi Al Fajar	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	46	40	87%
4.	Pionir Harapan**	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	34	32	94%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					95%

Keterangan : / Description:

*) Pengalih tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

**) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit IPC setelah dialih tugas dari jabatan sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020. / Effectively serve as a Member of the IPC Audit Committee after being transferred from his previous position as a Member of the Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020.

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat internal Dewan Komisaris telah diuraikan pada halaman 499.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 499.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Audit Committee Members in Joint Meetings with Board of Commissioners and Board of Directors

The following is the frequency and attendance level of each member of the Audit Committee in meetings with Other Committees and/or Company Management held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Audit Committee at the 2020 Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	12	12	100%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	3	3	100%
3.	Muhdi Al Fajar	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	12	12	100%
4.	Pionir Harapan**	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	9	9	100%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					100%

Keterangan : / Description:

*) Pengalih tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

***) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit IPC setelah dialih tugaskan dari jabatan sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020. / Effectively serve as a Member of the IPC Audit Committee after being transferred from his previous position as a Member of the Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020.

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada halaman 515.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 515.

Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Selain mengikuti rapat Dewan Komisaris, Komite Audit juga menghadiri rapat dengan komite lain dan manajemen, yang mana selama tahun 2020 diselenggarakan sebanyak 23 kali.

Meetings with Other Committees and/or Company Management

In addition to attending Board of Commissioners meetings, the Audit Committee also attended meetings with other committees and management, which during 2020 were held 23 times.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Audit Committee Members in Meetings with Other Committees and/or Company Management

The following is the frequency and attendance level of each member of the Audit Committee in meetings with Other Committees and/or Company Management held during 2020.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Audit Committee at the 2020 Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	23	19	83%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	8	8	100%
3.	Muhdi Al Fajar	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	23	23	100%
4.	Pionir Harapan**	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	15	14	93%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					93%

Keterangan : / Description:

*) Pengalih tugas sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of assignment as Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

**) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit IPC setelah dialih tugas dari jabatan sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020. / Effectively serve as a Member of the IPC Audit Committee after being transferred from his previous position as a Member of the Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020.

Agenda Rapat Komite di Bawah Dewan Komisaris dengan Manajemen Lain

Meeting Agenda of Committees Under the Board of Commissioners with Other Management

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

Agenda, Waktu Pelaksanaan, dan Peserta Rapat dengan Manajemen IPC Tahun 2020

Agenda, Implementation Time, and Meeting Participants with IPC Management in 2020

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
1.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Revisi Usulan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. / Discussion on the Revised 2020 RKAP Proposal of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
2.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Laporan Tim Counterpart atas Pemantauan Pelaksanaan Audit Umum oleh KAP Tahun Buku 2019. / Discussion of the Counterpart Team Report on the Monitoring of the General Audit Implementation by KAP for the 2019 Fiscal Year.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division
3.	16-17 Januari 2020 / January 16-17, 2020	Pembahasan Laporan Triwulan IV tahun 2019. / Discussion of the 4th of 2019 Report.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
4.	27 Januari 2020 / January 27, 2020	Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Discussion of the 2019 Unaudited Management Report.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
5.	28 Januari 2020 / January 28, 2020	Tindak Lanjut Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Follow-up on the 2019 Unaudited Management Report Discussion.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
6.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit <i>Charter SPI</i> . / Discussion of the Proposed Revision of the IAU Audit Charter.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division
7.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit Pedoman Barang dan Jasa dengan PER-08/MBU/12/2019. / Discussion of the Proposed Audit Revision of the Goods and Services Guidelines with PER-08/MBU/12/2019.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Pengadaan / Procurement Division
8.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Konfirmasi Penyampaian Data dari <i>Audited</i> . / Confirmation of Submission of Audited Data.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhamad Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division
9.	24 April 2020 / April 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Quarter of 2020 Management Report. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Nurrachman Muhamad Al Fajar Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
10.	14 Mei 2020 / May 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Triwulan I tahun 2020 Komite Audit dengan EVP Satuan Pengawasan Internal Perseroan. Rapat Komite Triwulan I tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan VP Manajemen Risiko. Hal-hal strategis lainnya. First Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the EVP of the Company's Internal Audit Unit. First Quarter of 2020 Committee Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the VP of Risk Management. Other strategic matters. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Nurrachman Muhamad Al Fajar Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
11.	14 Juli 2020 / July 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushari Suprianto Nurrachman Muhamad Al Fajar Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
12.	23 Juli 2020 / July 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. - Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. - Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
13.	24 Juli 2020 / July 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
14.	14 Agustus 2020 / August 14, 2020	Pembahasan KAK dan KET Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. / Discussion of KAK and KET for Procurement of Audit Services for Financial Statements for 2020 Fiscal Year.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division • Divisi Pengadaan / Procurement Division
15.	3 – 4 September 2020 / September 3-4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Internal. - Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko. - Hal-hal strategis lainnya. - Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit Division. - Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the Risk Management Division. - Other strategic matters. 	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
16.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan mengenai Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 dan Usulan RKAP Tahun 2021. / Discussion on the Quarter III of 2020 Management Report and the 2021 RKAP Proposal.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division • Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
17.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan tindak lanjut Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 / Discussion on the follow-up to the Quarter III of 2020 Management Report	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division • Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
18.	2 November 2020 / November 2, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhdi Al Fajar <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pemasaran / Marketing Division
19.	4 November 2020 / November 4, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
20.	12 – 13 November 2020 / November 12-13, 2020	Rapat Pembahasan <i>Draft</i> SK Pedoman Kerja Sama dan Usulan Skema Kerja Sama Anak Perusahaan atas Dampak Implementasi PSAK 73. / Discussion Meeting on Draft Decision Letter on Cooperation Guidelines and Proposed Subsidiary Cooperation Scheme on the Impact of PSAK 73 Implementation.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division • Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division
21.	17 November 2020 / November 17, 2020	Pembahasan Lanjutan Dokumen Revisi RJPP Tahun 2020 – 2024. / Advanced discussion of the 2020-2024 RJPP Revision Document.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
22.	8 Desember 2020 / December 8, 2020	Pembahasan Rencana Amandemen Perjanjian Kerja Sama PT JICT. / Discussion on the Amendment Plan for the PT JICT Cooperation Agreement.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division
23.	22 Desember 2020 / December 22, 2020	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, SPI, Hukum, dan Manajemen Risiko. / Coordination Meeting of the Board of Commissioners, Committee of the Board of Commissioners, SPI, Legal, and Risk Management.	<p>Komite Audit / Audit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushari Suprianto • Nurrachman • Muhdi Al Fajar • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division • Divisi Hukum / Legal Division

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TRIWULAN DENGAN SPI

Komite Audit melaksanakan rapat koordinasi dengan SPI secara rutin setiap triwulan untuk melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit (LHA), pemutakhiran data, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Pada tahun 2020, Komite Audit melaksanakan rapat koordinasi sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan periode Triwulan IV tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat IPC dan dihadiri oleh Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Divisi SPI, dan Divisi Manajemen Risiko;
2. Hasil pemeriksaan periode Triwulan I tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020. Rapat tersebut dilaksanakan melalui *video conference* dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Divisi SPI, dan Divisi Manajemen Risiko;

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Throughout 2020, the IPC Audit Committee has carried out several activities that have been prepared in the Audit Committee Work Plan in early 2020, with the following descriptions:

1. The audit results for Quarter IV of 2019 were held on March 20, 2020. The meeting was held at IPC Head Office and attended by the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, SPI Division, and Risk Management Division;
2. The audit results for Quarter I of 2020 were held on May 14, 2020. The meeting was held via video conference and was attended by the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Internal Audit Division, and the Risk Management Division;



3. Hasil pemeriksaan periode Semester I tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 3-4 September 2020. Rapat tersebut dilaksanakan di Bogor dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Divisi SPI, dan Divisi Manajemen Risiko;
4. Hasil pemeriksaan periode Triwulan III tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020. Rapat tersebut dilaksanakan melalui *video conference* dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Divisi SPI, dan Divisi Manajemen Risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit IPC telah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Komite Audit pada awal tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

1. *Monitoring Audit Laporan Keuangan oleh KAP Tahun Buku 2019*

Komite Audit melakukan *monitoring* pelaksanaan audit oleh Auditor KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sejak penunjukan oleh RUPS tahun 2019 sampai dengan terbitnya Laporan Auditor Independen. Adapun *monitoring* yang dilaksanakan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. 1 Agustus 2019: *Kick-off meeting*;
- b. 12 Desember 2019: *Progress meeting* interim audit yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, dan KAP;
- c. 28 Januari 2020: Pembahasan perkembangan audit laporan keuangan dengan Tim *Counterpart*;
- d. 30 Januari 2020: Pembahasan progres audit laporan keuangan dengan Dewan Komisaris, Auditor KAP, dan Anggota Komite Dewan Komisaris;
- e. 19 Februari 2020: Pembahasan perkembangan audit laporan keuangan dengan Tim *Counterpart*;
- f. 12 Maret 2020: Pembahasan penyelesaian laporan auditor independen dengan Anggota Tim *Counterpart* dengan Bagian Akuntansi/Keuangan;
- g. 18 Maret 2020: *Closing meeting* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, dan KAP;

3. The audit results for the first semester of 2020 were held on September 3-4, 2020. The meeting was held in Bogor and attended by the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Internal Audit Division, and the Risk Management Division;
4. The audit results for Quarter III of 2020 were held on December 22, 2020. The meeting was held via video conference and was attended by the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Internal Audit Division, and the Risk Management Division.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Throughout 2020, the IPC Audit Committee has carried out several activities that have been prepared in the Audit Committee Work Plan in early 2020, with the following descriptions:

1. *Financial Statement Audit Monitoring by 2019 Fiscal Year KAP*

The Audit Committee has monitored the audit implementation by KAP Auditors Purwanto, Sungkoro & Surja since the appointment by the 2019 GMS until the publication of the Independent Auditor's Report. The monitoring carried out by the Audit Committee is as follows:

- a. August 1, 2019: *Kick-off meeting*;
- b. December 12, 2019: Interim audit progress meeting attended by the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, and KAP;
- c. January 28, 2020: Discussion on the progress of the financial statement audit with the Counterpart Team;
- d. January 30, 2020: Discussion on the progress of the audit of financial statements with the Board of Commissioners, KAP Auditor, and Members of the Committee of the Board of Commissioners;
- e. February 19, 2020: Discussion on the progress of the audit of financial statements with the Counterpart Team;
- f. March 12, 2020: Discussion on the completion of the independent auditor's report with the Counterpart Team Members with the Accounting/Finance Division;
- g. March 18, 2020: *Closing meeting* attended by the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, and KAP;

h. 31 Maret 2020: Penerbitan Laporan Auditor Independen oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020.

2. Evaluasi Kinerja dan Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

Komite Audit telah melakukan evaluasi sesuai dengan Nota Dinas No. 21/KA.DK/PI.II/V-2020 tanggal 19 Mei 2020 kepada Dewan Komisaris dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan audit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah cukup memadai.
- b. Untuk penunjukan KAP tahun buku 2020, Komite Audit berpendapat bahwa proses pemilihan KAP harus dilakukan sesuai prosedur dengan tetap mempertahankan persyaratan utama kualifikasi KAP yang berpengalaman mengaudit perusahaan multinasional sejenis, dengan alternatif penugasan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan penugasan kepada KAP melalui proses pengadaan, dengan pertimbangan:
 - a) Mendapatkan KAP dan Auditor baru yang mempunyai pandangan baru dalam menilai laporan keuangan Perseroan.
 - b) Mencegah hubungan yang panjang antara auditor dan kliennya, yang dapat mengurangi independensi auditor.
 - c) Namun di sisi lain, bisa berakibat mendapatkan KAP yang kurang memahami bisnis IPC, sehingga memerlukan waktu penyesuaian yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan.
 - 2) Memberikan penugasan kembali kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan audit laporan keuangan tahun buku 2020, dengan pertimbangan:
 - a) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja masih dapat melaksanakan audit sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
 - b) Dalam pelaksanaan audit yang dilakukan tahun ini sudah cukup memadai, yaitu dalam hal:
 - (1) kesesuaian pelaksanaan audit dengan Standar Profesi Akuntan Publik
 - (2) hasil audit dan kualitas rekomendasi audit eksternal

h. March 31, 2020: Issuance of the Independent Auditor's Report by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja with Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020.

2. Performance Evaluation and Selection of KAP for Financial Statement Audit for 2020 Fiscal Year

The Audit Committee has conducted an evaluation in accordance with the Memorandum of Service No. 21/KA.DK/PI.II/V-2020 dated May 19, 2020 to the Board of Commissioners with the following conclusions:

- a. The audit implementation by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja has been adequate.
- b. For the appointment of 2020 fiscal year KAP, the Audit Committee is of the opinion that the selection process for KAP must be carried out according to procedures while maintaining the main requirements for qualifications of KAPs with experience in auditing similar multinational companies, with alternative assignments as follows:
 - 1) Appointing KAP through the procurement process, taking into account:
 - a) Obtaining new KAP and Auditors who have fresh opinions in assessing the Company's financial statements.
 - b) Prevent a long relationship between the auditor and its clients, which can reduce the independence of the auditor.
 - c) On the other hand, it can result in appointing a KAP who does not understand the IPC business, so it requires adjustment time which can hinder the course of the audit.
 - 2) Reassignment to KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to carry out an audit of the financial statements for the 2020 fiscal year, taking into account:
 - a) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja can still carry out audits in accordance with Government Regulation no. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants and Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services.
 - b) The audit carried out this year is sufficient, namely in terms of:
 - (1) conformity of audit implementation with Public Accountant Professional Standard
 - (2) audit results and quality of external audit recommendations



- (a) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja agar tetap menjaga kualitas Auditor yang ditugaskan minimal setara dengan auditor yang bertugas di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun ini.
- (b) Besaran audit *fee* mempertimbangkan audit *fee* tahun buku 2019.
- (c) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sudah melaksanakan 6 kali audit, namun dengan 2 *signing partner* yang berbeda, yaitu tahun 2014-2015-2016 dengan Bapak Dadang, dan tahun 2017/2018/2019 dengan Bapak Dudi M. Kurniawan.
- (d) Apabila Dewan Komisaris memberikan penugasan kembali kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dapat dilakukan pengusulan kepada RUPS.

- (a) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to maintain the quality of the assigned auditors at least equal to the auditors assigned to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) this year.
- (b) The amount of the audit fee considers the audit fee for the 2019 fiscal year.
- (c) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja has conducted 6 audits, but with 2 different signing partners, namely in 2014-2015-2016 with Mr. Dadang, and in 2017/2018/2019 with Mr. Dudi M. Kurniawan.
- (d) If the Board of Commissioners reappoints KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, a proposal can be made to the GMS.

3. Monitoring Audit Laporan Keuangan oleh KAP Tahun Buku 2020

Komite Audit melakukan *monitoring* pelaksanaan audit oleh Auditor KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sejak penunjukan oleh RUPS tahun 2019 sampai dengan terbitnya Laporan Auditor Independen. Adapun *monitoring* yang dilaksanakan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. 6 Juli 2020: RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2019 yang salah satu keputusannya adalah menetapkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP EY) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
- b. 14 Agustus 2020: Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kerangka Evaluasi Teknis (KET) pengadaan jasa audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
- c. 15 September 2020: *Kick-off meeting*.
- d. 5 November dan 11 Desember 2020: *Progress meeting* interim audit yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, dan KAP.

4. Kunjungan Kerja

- a. Atas Surat Direksi No. KU.02.08/14/1/1/PAT/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap dan Barang Persediaan Tidak Terpakai, Komite

3. Financial Statement Audit Monitoring by 2020 Fiscal Year KAP

The Audit Committee has monitored the audit implementation by KAP Auditors Purwantono, Sungkoro & Surja since the appointment by the 2019 GMS until the publication of the Independent Auditor's Report. The monitoring carried out by the Audit Committee is as follows:

- a. July 6, 2020: GMS Ratification of the 2019 Annual Financial Statements, one of the decisions of which was to re-appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP EY) to audit the Financial Statements for 2020 Fiscal Year.
- b. August 15, 2020: Discussion of the Terms of Reference (TOR) and Terms of Technical Evaluation (KET) for the procurement of audit services for Financial Statements for the Financial Year 2020.
- c. September 15, 2020: Kick-off meeting.
- d. November 5, and December 11, 2020: Interim audit progress meeting attended by the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, and KAP.

4. Working Visit

- a. Based on the Letter of the Board of Directors No. KU.02.08/14/1/1/PAT/UT/PI.II-2020 dated January 14, 2020 regarding the Application for Approval of Write-off of Fixed Assets and Unused Inventory Goods,

Audit melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan Pontianak pada tanggal 24 Februari 2020, Cabang Pelabuhan Banten pada tanggal 28 Februari 2020, dan Kantor Pusat pada tanggal 2 Maret 2020.

Untuk usulan penghapusan aktiva tetap dan barang persediaan di Cabang Pelabuhan Palembang karena nilai aset bukunya tidak signifikan, maka pemeriksaan fisik diserahkan kepada Kantor Cabang Palembang dengan protokol pemeriksaan sesuai saran Komite Audit dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Manajemen Cabang Palembang disertai foto-foto terakhir aset tersebut (mayoritas aset berupa kertas formulir dan tinta printer lama).

- b. Atas Surat Direksi No. KU.02.08/14/1/1/PAT/PI.II-2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan Rekomendasi Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pangkal Balam, Komite Audit belum dapat melaksanakan pemeriksaan fisik ke Cabang Pelabuhan Pangkal Balam karena adanya kebijakan penghentian perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Komite Audit melaksanakan pemeriksaan fisik ke Cabang Pelabuhan Pangkal Balam pada bulan Agustus 2020.
- c. Atas Surat Direksi No. KU.02.08/16/6/1/UT/PI.II-2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap (Cabang Pelabuhan Cirebon, Pontianak, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan), Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi penghapusbukuan sebagai berikut:
 - 1) No. 40/DK/PI.II/VII-2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Cirebon, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan, dan Pontianak.
 - 2) No. 45/DK/PI.II/VII-2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Cirebon, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan, dan Pontianak.
 - 3) No. 55/DK/PI.II/VII-2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Panjang dan Tanjung Pandan.

the Audit Committee made a working visit to the Pontianak Port Branch on February 24, 2020, Banten Port Branch on February 28, 2020, and Head Office on March 2, 2020.

For the proposed write-off of fixed assets and inventory at the Port of Palembang Branch considering the value of the book assets is not significant, the physical inspection is submitted to the Palembang Branch Office with an inspection protocol according to the advice of the Audit Committee and is stated in the Minutes of Examination by Palembang Branch Management accompanied by recent photos of assets (the majority of assets are form paper and old printer ink).

- b. Based on the Letter of the Board of Directors No. KU.02.08/14/1/1/PAT/PI.II-2020 dated January 14, 2020 regarding the Application for Approval and Recommendation for Write-off of Fixed Assets at the Pangkal Balam Branch, the Audit Committee has not been able to carry out a physical inspection to the Pangkal Balam Port Branch due to the prohibition of business trips policy to prevent the spread of Covid-19. The Audit Committee carried out a physical inspection of the Pangkal Balam Port Branch in August 2020.
- c. Based on the Letter of the Board of Directors No. KU.02.08/16/6/1/UT/PI.II-2020 dated June 16, 2020 regarding Requests for Recommendations and Approval of Proposals for the Elimination of Fixed Assets (Port Branches of Cirebon, Pontianak, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan), the Board of Commissioners has given approval/recommendation for write-offs as follows:
 - 1) No. 40/DK/PI.II/VII-2020 dated July 1, 2020 regarding Approval/Recommendation on the Proposed Write-off of Fixed Assets at the Port Branches of Cirebon, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan, and Pontianak.
 - 2) No. 45/DK/PI.II/VII-2020 dated July 20, 2020 regarding Approval/Recommendation on the Proposed Write-off of Fixed Assets at the Port Branches of Cirebon, Palembang, Panjang, Tanjung Pandan, and Pontianak.
 - 3) No. 55/DK/PI.II/VII-2020 dated August 12, 2020 regarding Approval/Recommendation on the Proposed Write-off of Fixed Assets at the Panjang Port and Tanjung Pandan Branches.



Komite Audit melaksanakan pemeriksaan fisik ke Cabang Pelabuhan atas usulan penghapusbukuan aset tersebut sebagai berikut:

- 1) 25 Juni 2020 ke Cabang Pelabuhan Cirebon;
- 2) 9 Juli 2020 ke Cabang Pelabuhan Pontianak;
- 3) 27 Juli 2020 ke Cabang Pelabuhan Panjang;
- 4) 3 Agustus 2020 ke Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan;
- 5) 6 Agustus 2020 ke Cabang Pelabuhan Pangkal Balam.

5. Tanggapan Laporan Manajemen

Komite Audit telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Manajemen Tahun 2019 (*Audited*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Nota Dinas No. 16/KA.DK/PI.II/III-2020, dengan kesimpulan bahwa "Dari hasil telaah dan evaluasi terhadap Laporan Manajemen tahun 2019 (*Audited*), Komite Audit berpendapat bahwa laporan yang disajikan Manajemen telah sesuai dengan angka-angka dalam Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan tanggal laporan 31 Maret 2019 dan sesuai dengan standar pelaporan yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN. Laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan sebelum memberikan persetujuan untuk dipublikasikan".

Selain itu, Komite Audit juga telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Manajemen dan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2020, Semester I Tahun 2020, dan Triwulan III Tahun 2020.

PENGHASILAN KOMITE AUDIT

Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal sebesar 20 persen dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

The Audit Committee carried out a physical inspection to the Port Branch on the proposed write-off of the asset as follows:

- 1) June 25, 2020 to Cirebon Port Branch;
- 2) July 9, 2020 to Pontianak Port Branch;
- 3) July 27, 2020 to the Panjang Port Branch;
- 4) August 3, 2020 to Tanjung Pandan Port Branch;
- 5) August 6, 2020 to Pangkal Balam Port Branch.

5. Management Report Response

The Audit Committee has submitted a response to the 2019 Management Report (*Audited*) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a Memorandum of Service No. 16/KA.DK/PI.II/III-2020. The memorandum concluded that "Based on [the results] review and evaluation of the 2019 Management Report (*Audited*), the Audit Committee is of the opinion that the report presented by the Management is in accordance with the figures in the Consolidated PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Statements dated December 31, 2019 which has been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja with a report date of March 31, 2019 and in accordance with the reporting standards required by the Ministry of SOEs. The report is submitted to the Board of Commissioners for consideration before giving approval for publication".

In addition, the Audit Committee has also submitted responses to the Management Report and Audit Committee Report for the Quarter I of 2020, Semester I of 2020, and Quarter III of 2020.

AUDIT COMMITTEE INCOME

The Audit Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20 percent of President Director 's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium.

Commissioners who serve as Audit Committee Head/ Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR) sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam manajemen risiko Perseroan atau *Enterprise Risk Management* (ERM). Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Akte Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 tanggal 15 Agustus 2008); dan
7. Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC telah terbentuk sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012.

KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota;

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee (PMR) is a supporting organ for the Board of Commissioners which plays a role in improving the quality of supervision and provision of advice to the Board of Commissioners in Enterprise Risk Management (ERM). The establishment of the Risk Management Monitoring Committee by the Board of Commissioners is carried out with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board for State-Owned Enterprises;
4. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;
6. Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. No. 1 dated December 1, 1992 which has been amended several times, most recently with the Notary Deed of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 dated August 15, 2008); and
7. Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 concerning Updating/Stipulation of the Audit Committee Charter, Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The IPC Risk Management Monitoring Committee has been established since 2012 based on the Decree (SK) of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated December 10, 2012.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEMBERSHIP

Appointment and Dismissal of the Risk Management Monitoring Committee

1. The Board of Commissioners may establish a Risk Management Monitoring Committee consisting of a Head and Members;



2. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
 3. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
 4. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
 5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS;
 6. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
 7. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
2. The Head and Members of the Risk Management Monitoring Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
 3. The Head of the Risk Management Monitoring Committee is a Member of the Board of Commissioners who is a Member of the Independent Commissioner or Member of the Board of Commissioners who can act independently;
 4. Members of the Risk Management Monitoring Committee may consist of the existing members of the Board of Commissioners or from external of the Company;
 5. The appointment and dismissal of Risk Management Monitoring Committee Members are reported to the GMS;
 6. Members of the Risk Management Monitoring Committee who are members of the Board of Commissioners, will automatically terminate their tenure as members of the Board of Commissioners when their term of office is over;
 7. In the event that a Member of the Board of Commissioners who serves as Head of the Risk Management Monitoring Committee resigns as a Member of the Board of Commissioners, the Head of the Risk Management Monitoring Committee must be replaced by another Member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Syarat-syarat keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam Perseroan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah satu dari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang Manajemen Risiko;
6. Salah satu dari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Membership Requirements of the Risk Management Monitoring Committee

The requirements for membership of Risk Management Monitoring Committee are as follows:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
2. Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest within the company;
3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete the task;
5. One of members of Risk Management Monitoring Committee must have an educational background or expertise in the field of Risk Management;
6. One of members of Risk Management Monitoring Committee has the ability and understanding of the Company's scope of business.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, terdapat pergantian komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko, dengan uraian sebagai berikut:

1. Periode I (1 Januari – 8 April 2020, 8 – 15 April 2020)

Komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 1 Januari hingga 8 April tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yang beranggotakan:

- a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Montty Girianna (Dewan Komisaris IPC);
- b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Pionir Harapan (Pihak Eksternal); dan
- c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak R. Nurhidayat (Pihak Eksternal).

Kemudian pada tanggal 8 April 2020, terdapat perubahan komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Aries Fikirman dialihtugaskan dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko;
- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Pionir Harapan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Audit; dan

TERM OF OFFICE OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The term of office of members of the Risk Management Monitoring Committee who is not a member of the Company's Board of Commissioners is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss him at any time.

Composition of Risk Management Monitoring Committee Members

During 2020, there was a change in the composition of the Risk Management Monitoring Committee, with the following description:

1. Period I (January 1 – April 8, 2020, April 8 – 15, 2020)

The composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee as of January 1 to April 8 remain the same as the previous year, which consisted of:

- a. Head of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Montty Girianna (IPC Board of Commissioners);
- b. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Pionir Harapan (External Party); and
- c. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. R. Nurhidayat (External Party).

Then on April 8, 2020, there was a change in the composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee, with the following description:

- Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 regarding the Transfer of Duties of Members of the Nomination and Remuneration Committee as a Member of the Risk Management Monitoring Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Aries Fikirman was transferred from a member of the Nomination and Remuneration Committee to become a member of the Risk Management Monitoring Committee;
- Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 regarding the Transfer of Duties of the Risk Management Monitoring Committee Member as a Member of the Audit Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Pionir Harapan was transferred to become a member of the Audit Committee; and



- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Rakhmat Adi Santosa dialih tugaskan dari Anggota Komite Audit menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Dengan demikian, komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 8 April 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Montty Girianna (Dewan Komisaris IPC);
- b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak R. Nurhidayat (Pihak Eksternal);
- c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Aries Fikirman (Pihak Eksternal); dan
- d. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Rakhmat Adi Santosa (Pihak Eksternal).

2. Periode II (15 April – 31 Desember 2020)

Pada tanggal 15 April 2020, terdapat perubahan komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak R. Nurhidayat dialih tugaskan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dengan demikian, komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 15 April 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Montty Girianna (Dewan Komisaris IPC); dan
- b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Rakhmat Adi Santosa (Pihak Eksternal); dan
- c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko: Bapak Aries Fikirman (Pihak Eksternal).

- Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 regarding the Transfer of Duties of the Audit Committee Members as a Member of the Risk Management Monitoring Committee of the Limited Liability (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Rakhmat Adi Santosa was transferred from a Member of the Audit Committee to become a Member of the Risk Management Monitoring Committee.

Thus, the composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee as of April 8, 2020 is as follows:

- a. Head of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Montty Girianna (IPC Board of Commissioners);
- b. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. R. Nurhidayat (External Party);
- c. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Aries Fikirman (External Party); and
- d. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Rakhmat Adi Santosa (External Party).

2. Period II (April 15 – December 31, 2020)

On April 15, 2020, there was a change in the composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Head and Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Transfer of Duties of the Risk Management Monitoring Committee Members as Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. R. Nurhidayat was transferred to become a member of the Nomination and Remuneration Committee.

Thus, the composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee as of April 15, 2020 is as follows:

- a. Head of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Montty Girianna (IPC Board of Commissioners); and
- b. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Rakhmat Adi Santosa (External Party); and
- c. Member of the Risk Management Monitoring Committee: Mr. Aries Fikirman (External Party).

Adapun komposisi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang menjabat selama tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

The composition of the members of the Risk Management Monitoring Committee who served during 2020 is described in the following table:

Composition of Risk Management Monitoring Committee Members in 2020

Uraian / Description	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Members of Risk Management Monitoring Committee			
Nama / Name	Montty Girianna	Pionir Harapan*	R. Nurhidayat**	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikirman
Status	Anggota Dewan Komisaris IPC / Member of IPC Board of Commissioners	Pihak Eksternal / External Party			
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/KEP-DK/PI.II/X-2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 17/KEP-DK/PI.II/X-2017 dated October 11, 2017 concerning the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/I-2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan No. 07/KEP-DK/PI.II/I-2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/I-2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/I-2016 dated February 29, 2016 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and No. 07/KEP-DK/PI.II/I-2016 dated March 17, 2016 concerning Appointment of Chairperson and Members of Risk Management Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero), which is extended through Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) No. 02/KEP-DK/PI.II/I-2019 dated February 28, 2019 concerning Extension of the Term of Office of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/V-2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 08/KEP-DK/PI.II/V-2017 dated May 31, 2017 regarding the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning the Transfer of Duties of Audit Committee Members as Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning the Transfer of Duties of Nomination and Remuneration Committee Members as Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)
Masa Jabatan / Term of Office	(Sama dengan Masa Jabatan sebagai Komisaris IPC / Same as the term of office as Commissioner of IPC)	1 Maret 2016 – 16 Maret 2016, 17 Maret 2016 - 16 Maret 2019 (Periode Pertama), kemudian diperpanjang hingga tanggal 8 April 2020 / March 1, 2016 – March 16, 2016, March 17, 2016 - March 16, 2019 (First Period), which is then extended until April 8, 2020	31 Mei 2017 – 15 April 2020 (Periode Pertama) / May 31, 2017 – April 15, 2020 (First Period)	8 April 2020 – 7 April 2023 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – April 7, 2023 (First Period)	8 April 2020 – 31 Januari 2021 (Periode Pertama) / April 8, 2020 – January 31, 2021 (First Period)
Pendidikan / Education	Teknik Sipil, Sistem Transportasi, Perencanaan Kota, Keuangan / Civil Engineering, Transportation Systems, Urban Planning, Finance	Akuntansi, Penilaian Properti/Bisnis / Accounting, Property / Business Valuation	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics	SDM, Manajemen Keuangan / HC, Financial Management
Keahlian / Expertise	Transportasi, Keuangan / Transportation, Finance	Desain Sistem Informasi Akuntansi, Analisis atas Laporan Keuangan, Keuangan Mikro Syariah / Accounting Information System Design, Analysis of Financial Statements, Sharia Microfinance	Keuangan, SDM / Finance, HC	Keuangan / Finance	Keuangan / Finance
Pengalaman Kerja / Employment History	Peneliti dan Birokrat / Researcher and Bureaucrat	Peneliti dan Birokrat / Researcher and Bureaucrat	Akuntansi dan sebagai Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris di beberapa BUMN / Accounting and as a Committee Member under the Board of Commissioners in several BUMN	Partner Kantor Akuntan Publik (KAP), <i>Managing Partner</i> , Dosen tetap, Konsultan / Public Accounting and as a Firm Partner (KAP), <i>Managing Partner</i> , Permanent Lecturer, Consultant	Berbagai jabatan di PT Pos Indonesia (Persero) / Various positions at PT Pos Indonesia (Persero)

Keterangan: / Description:

*) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

**) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020.



Untuk profil lengkap dari Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko, yaitu Bapak Montty Girianna dan seluruh Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang menjabat selama tahun 2020, yaitu Bapak Pionir Harapan, Bapak R. Nurhidayat, Bapak Rakhmat Adi Santosa, dan Bapak Aries Fikirman, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM/CHARTER KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC mengacu pada Piagam Pemantau Manajemen Risiko, dengan uraian sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

The complete profile of the Head of the Risk Management Monitoring Committee, namely Mr. Montty Girianna and all Members of the Risk Management Monitoring Committee who served during 2020, namely Mr. R. Nurhidayat, Mr. Rakhmat Adi Santosa, and Mr. Aries Fikirman, has been described in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

STATEMENT OF OWNERSHIP OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Monitoring Committee is entrusted with the Charter of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by Board of Commissioners Decision No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duty;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibility;
7. Meeting;
8. Report;
9. Access to Information Confidentiality;
10. Work Plan and Budget;
11. Members Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Appraisal;
14. Others;
15. Closing.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

Duties of Risk Management Monitoring Committee

The implementation of the IPC Risk Management Monitoring Committee duties refer to the Risk Management Monitoring Charter, with the following description:

1. Risk Management Monitoring Committee works collectively in performing its duties to assist Board of Commissioners;
2. Risk Management Monitoring Committee is independent in its performance of duties as well as in reports and reports to Board of Commissioners;

3. Komite Pemantau Manajemen Risiko memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
6. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - 1) Nama yang diberi tugas;
 - 2) Sifat penugasan;
 - 3) Lingkup pekerjaan;
 - 4) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - 5) Jangka waktu penugasan.
 - b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat:
 - 1) Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - 2) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan beban Perseroan.
 - d. Komite Pemantau Manajemen Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.
3. Risk Management Monitoring Committee provides recommendations on improvements to risk management system and its implementation;
4. Risk Management Monitoring Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the Company;
5. Risk Management Monitoring Committee identifies matters requiring the attention of Board of Commissioners and other duties granted by Board of Commissioners;
6. Special Duty from Board of Commissioners.
 - a. Assignment of special tasks to the Risk Management Monitoring Committee by the Board of Commissioners is carried out by means of a written order containing:
 - 1) Name of the person in charge;
 - 2) The nature of the assignment;
 - 3) Scope of work;
 - 4) Job goals and objectives;
 - 5) Duration of the assignment.
 - b. The scope of work of special duties for the Risk Management Monitoring Committee is fully determined by the Board of Commissioners as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations.
 - c. In carrying out special duties the Risk Management Monitoring Committee may:
 - 1) Review all notes, documents and other information required, including the minutes of the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings, if deemed necessary;
 - 2) Analyze and evaluate, cooperate with Structural Risk Management, and/or related work unit structures or request the assistance of experts or consultants to assist the Risk Management Monitoring Committee borne by the Company.
 - d. The Risk Management Monitoring Committee submits a report on the implementation of special duties to the Board of Commissioners.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;

Authorities of Risk Management Monitoring Committee

In carrying out its duties, the Risk Management Monitoring Committee has the authority to:

1. Access records or information about assets and other resources and enter the yards, buildings and offices used by the Company;
2. The right to obtain and request any results of risk studies conducted by risk owners, related structural officials, risk champions, the Internal Audit Unit and the Board of Directors of the Company;



3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. In exercising its authority, the Committee works closely with related work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.

Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Responsibilities of Risk Management Monitoring Committee

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

1. The Risk Management Monitoring Committee reports to the Board of Commissioners.
2. The accountability of the Risk Management Monitoring Committee to the Board of Commissioners is conveyed in the following report:
 - a. Annual report on the implementation of the duties of the Risk Management Monitoring Committee;
 - b. Quarterly reports on the implementation of duties of the Risk Management Monitoring Committee;
 - c. Reports for each implementation of the special duties of the Risk Management Monitoring Committee;
3. The Risk Management Monitoring Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko, kualifikasi independensi dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

The Risk Management Monitoring Committee carries out its functions and duties in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with laws and regulations. In accordance with the Risk Management Monitoring Committee Charter, the independence qualifications of members of the Risk Management Monitoring Committee must meet the following criteria:

Pernyataan Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC

Statement of Independence of IPC Risk Management Monitoring Committee

Kriteria Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Criteria	Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC Tahun 2020 / IPC Risk Management Monitoring Committee in 2020				
	Montty Girianna	Pionir Harapan*	R. Nurhidayat**	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikiran
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee Criteria	Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC Tahun 2020 / IPC Risk Management Monitoring Committee in 2020				
	Montty Girianna	Pionir Harapan*	R. Nurhidayat**	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikirman
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. / Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. / Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. / Do not serve as administrators of political parties, officials and the government.	✓	✓	✓	✓	✓
Keterangan : / Description *) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020. **) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020.					

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memberikan program pengembangan kompetensi bagi setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company provides a competency development program for each member of the Risk Management Monitoring Committee in order to improve the productivity and effectiveness of the Risk Management Monitoring Committee's performance. The following is a table describing the capability improvement program that the Risk Management Monitoring Committee participated in throughout 2020.

Implementation of the 2020 Risk Management Monitoring Committee Competency Development Program

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Name of Training	Waktu dan Tempat / Time and Place	Penyelenggara / Organizer
Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	Telah diuraikan di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. / This section has been described in the Board of Commissioners Capability Improvement Program section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Member of Risk Management Monitoring Committee	Sertifikasi Kepelabuhanan Indonesia / Indonesian Port Expert Certification	Ahli 16-27 November 2020 secara Daring / November 16 – 27, 2020 Online	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) / Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)
Aries Fikirman	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Member of Risk Management Monitoring Committee	Sertifikasi Kepelabuhanan Indonesia / Indonesian Port Expert Certification	Ahli 16-27 November 2020 secara Daring / November 16 – 27, 2020 Online	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) / Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)



RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir.

Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

Guna mendukung pelaksanaan perannya, Komite Pemantau Manajemen Risiko menghadiri 3 (tiga) jenis rapat, yakni rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko, rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta rapat dengan komite lain/manajemen.

Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 19 kali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat internal Komite Pemantau Manajemen Risiko yang diadakan selama tahun 2020.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

Risk Management Monitoring Committee Meetings Policy

The Risk Management Monitoring Committee holds meetings at least equal to the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. The Risk Management Monitoring Committee meeting is chaired by the Head of the Risk Management Monitoring Committee or the most senior member of the Risk Management Monitoring Committee, if the Head of the Risk Management Monitoring Committee is unable to attend.

If deemed necessary, the Risk Management Monitoring Committee may invite Management related to the meeting material to attend the Risk Management Monitoring Committee meeting. Each Risk Management Monitoring Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting signed by all members of the Risk Management Monitoring Committee who are present. The Risk Management Monitoring Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.

Risk Management Monitoring Committee Meetings in 2020

To support its role, the Risk Management Monitoring Committee attends 3 (three) types of meetings, namely meetings held internally by the Risk Management Monitoring Committee, meetings held internally by the Board of Commissioners and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as meetings with other committees/management.

Internal Meetings of the Risk Management Monitoring Committee

Throughout 2020, the Risk Management Monitoring Committee has held 19 internal meetings.

Frequency and Attendance Level of Risk Management Monitoring Committee at Risk Management Monitoring Committee Internal Meetings

The following is the frequency and attendance level of each member of the Risk Management Monitoring Committee at Risk Management Monitoring Committee internal meetings held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Internal Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Risk Management Monitoring Committee at the 2020 Internal Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	19	14	74%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	19	16	84%
3.	Aries Fikiran*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	19	16	84%

Rata-rata Kehadiran / Attendance Average

81%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (untuk Bapak Rakhmat Adi Santosa) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (untuk Bapak Aries Fikiran). / Effectively serve as a Member of the IPC Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (for Mr. Rakhmat Adi Santosa) and Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (for Mr. Aries Fikiran).

Agenda Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Risk Management Monitoring Committee Internal Meeting Agenda

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

Agenda Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2020

Risk Management Monitoring Committee Internal Meeting Agenda for 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko / Internal Meeting of Risk Management Monitoring Committee			
1.	4 Februari 2020 / February 4, 2020	Pembahasan Teknis dengan VP Pengadaan / Technical Discussion with VP of Procurement	-
2.	1 April 2020 / April 1, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT IPI dengan Pemberian HGB di Cabang Pelabuhan Banten. Pembahasan Tanggapan atas Rencana Kerja sama Pemanfaatan Lahan dengan PT PCT dengan Pemberian HGB di Cabang Pelabuhan Banten. / Discussion of Response to the Planned Land Use Cooperation with PT IPI by Granting HGB at Banten Port Branch. Discussion of Response to the Planned Land Use Cooperation with PT PCT by Granting HGB at Banten Port Branch.	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
3.	29 April 2020 / April 29, 2020	1. Pembahasan Persetujuan Rencana Kerja sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak oleh PT IPC Terminal Petikemas. 2. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Kembali Penyertaan Modal periode tahun 2012-2013 kepada PT RSP. 1. Discussion on the Approval of the Cooperation Plan for Utilization of Fixed Asset of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pontianak Branch by PT IPC Terminal Petikemas. 2. Discussion on the Board of Commissioners' Response to the Request for Re-Approval of Capital Investment in PT RSP for 2012-2013 period.	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
4.	27 Mei 2020 / May 27, 2020	Pembahasan Tanggapan Komisaris Terhadap Penyesuaian Atas Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI) / Discussion of the Board of Commissioners' Response to Adjustments to the Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia (PT PPI)	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
5.	3 Juni 2020 / June 3, 2020	Pembahasan SM 92 tentang permohonan persetujuan rencana Kerja Sama Permohonan Tanggapan Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS / SM 92 discussion regarding the request for approval of the cooperation plan; Request for Response to the Proposed Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's Shares in PT ILCS	-
6.	9 Juni 2020 / June 9, 2020	Penjelasan Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS / Explanation of the Planned Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's Shares in PT ILCS	-
7.	1 Juli 2020 / July 1, 2020	1. Pembahasan Tanggapan atas Rencana Akuisisi 49 persen Saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS. 2. Pembahasan Tanggapan atas Permohonan Tanggapan Tertulis PMPI Periode 2012-2013 kepada PT RSP. 1. Discussion of Response to the Planned Acquisition of 49 percent of PT Multimedia Nusantara's Shares in PT ILCS. 2. Discussion of Response to PMPI Request for Written Response for the 2012-2013 Period to PT RSP.	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran



No.	Waktu Pelaksanaan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
8.	28 Juli 2020 / July 28, 2020	Pembahasan Tanggapan Divestasi PT RSP ke dalam <i> Holding </i> Rumah Sakit BUMN. / Discussion Response to Divestment of PT RSP into SOE Hospital Holding	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
9.	4 Agustus 2020 / August 4, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia dengan Pemberian Rekomendasi HGB di Cabang Pelabuhan Banten / Discussion of Response to the Land Use Cooperation Plan with PT Styrimdo Mono Indonesia by Providing HGB Recommendation at Banten Port Branch	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
10.	8 September 2020 / September 8, 2020	Pembahasan Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Tanah Cabang Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pertamina (Persero) / Discussion on Cooperation Agreement for the Use of Land of Tanjung Priok Port Branch by PT Pertamina (Persero)	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
11.	29 September 2020 / September 29, 2020	Pembahasan Persetujuan Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Lapangan Petikemas Eks Inggom Seluas 15.000 M2 / Discussion on the Approval of the Cooperation Plan for Utilization of Fixed Asset of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch in the Former Inggom Container Yard, covering an area of 15,000 M2	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
12.	13 Oktober 2020 / October 13, 2020	Tanggapan Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Calang Sejati Indah di Cabang Pelabuhan Palembang / Response to the Land Use Cooperation Plan with PT Calang Sejati Indah at Palembang Port Branch	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
13.	3 November 2020 / November 3, 2020	1. Tanggapan atas Permohonan Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Jalan Ketel Uap Kalijapat dengan PT Indonesia Power 2. Tanggapan Penyesuaian Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia 1. Response to the Request for Cooperation for the Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch on Jalan Ketel Uap Kalijapat with PT Indonesia Power 2. Response to Adjustment of Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
14.	10 November 2020 / November 10, 2020	Tanggapan atas Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelindo II (Persero) dengan PT Menara Maritim Indonesia / Response to PT Pelindo II (Persero)'s Fixed Asset Utilization Cooperation with PT Menara Maritim Indonesia	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
15.	10 Desember 2020 / December 10, 2020	Tanggapan atas Rencana Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT / Response to the Proposed Amendment to the Authorization Cooperation Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
16.	22 Desember 2020 / December 22, 2020	Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Skema Kerja Sama Jangka Panjang antara Anak Perusahaan dengan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Response to the Proposed Adjustment of Long-Term Cooperation Scheme between Subsidiaries and Tanjung Priok Port Branch	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
17.	29 Desember 2020 / December 29, 2020	Persetujuan Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Jalan Ketel Uap Kalijapat dengan PT Indonesia Power / Approval of the Cooperation Plan for Utilization of Fixed Asset of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch on Jalan Ketel Uap Kalijapat with PT Indonesia Power	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran
Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko bersama Manajemen IPC / Meeting of Risk Management Monitoring Committee and IPC Management			
18.	21 April 2020 (Pukul 10.00) / April 21, 2020 (at 10.00)	Pembahasan SM 92 tentang permohonan persetujuan rencana Kerja Sama pendayagunaan aset tetap cabang pontianak oleh PT IPC TPK. / Discussion of SM 92 regarding request for approval of cooperation plan for the utilization of fixed assets of Pontianak branch by PT IPC TPK.	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran 4. Arief 5. Ariel 6. Vonny
19.	21 April 2020 (Pukul 13.00) / April 21, 2020 (at 13.00)	Pembahasan SM 90 tentang permohonan persetujuan kembali modal periode 2012 – 2013 kepada PT RSP / Discussion of SM 90 regarding request for re-approval of capital of PT RSP for the 2012 - 2013	1. Montty Girianna 2. Rakhmat Adi Santosa 3. Aries Fikiran 4. Usman 5. Yanuar

Rapat dengan Dewan Komisaris

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko turut menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, yaitu rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang komite serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Meeting with the Board of Commissioners

As an organ under the Board of Commissioners, the Risk Management Monitoring Committee also attends meetings organized by the Board of Commissioners, namely internal meetings of the Board of Commissioners by inviting committees and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat internal Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance of Risk Management Monitoring Committee Members in Internal Meetings of the Board of Commissioners

The following is the frequency and attendance level of each member of the Risk Management Monitoring Committee in the internal meetings of the Board of Commissioners held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Risk Management Monitoring Committee at the 2020 Internal Meetings

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	46	37	80%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	34	32	94%
3.	Aries Fikirman*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	34	31	91%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					88%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (untuk Bapak Rakhmat Adi Santosa) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (untuk Bapak Aries Fikirman). / Effectively serve as a Member of the IPC Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (for Mr. Rakhmat Adi Santosa) and Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 (for Mr. Aries Fikirman).

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat internal Dewan Komisaris telah diuraikan pada halaman 499.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 499.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Risk Management Monitoring Committee Members in Joint Meetings with Board of Commissioners and Board of Directors

The following is the frequency and attendance level of each member of the Risk Management Monitoring Committee in joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Risk Management Monitoring Committee at the 2020 Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Director

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	9	9	100%



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
3.	Aries Fikirman*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	9	9	100%

Rata-rata Kehadiran / Attendance Average

100%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.IV-2020 (untuk Bapak Rakhmat Adi Santosa) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 (untuk Bapak Aries Fikirman). / Effectively serve as a Member of the IPC Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI.IV-2020 (for Mr. Rakhmat Adi Santosa) and Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 (for Mr. Aries Fikirman).

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada halaman 515.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 515.

Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Selain mengikuti rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko juga menghadiri rapat dengan komite lain dan manajemen, yang mana selama tahun 2020 diselenggarakan sebanyak 23 kali.

Meetings with Other Committees and/or Company Management

In addition to attending Board of Commissioners meetings, the Risk Management Monitoring Committee also attended meetings with other committees and management, which during 2020 were held 23 times.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Risk Management Monitoring Committee Members in Meetings with Other Committees and/or Company Management

The following is the frequency and attendance level of each member of the Risk Management Monitoring Committee in meetings with Other Committees and/or Company Management held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Risk Management Monitoring Committee at the 2020 Meetings with Other Committees and/or Company Management

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Montty Girianna	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of Risk Management Monitoring Committee	23	19	83%
2.	Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	15	15	100%
3.	Aries Fikirman*	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko* / Member of Risk Management Monitoring Committee	15	15	100%

Rata-rata Kehadiran / Attendance Average

94%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.IV-2020 (untuk Bapak Rakhmat Adi Santosa) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 (untuk Bapak Aries Fikirman). / Effectively serve as a Member of the IPC Risk Management Monitoring Committee since April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI.IV-2020 (for Mr. Rakhmat Adi Santosa) and Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 (for Mr. Aries Fikirman).

Agenda Rapat Komite di Bawah Dewan Komisaris dengan Manajemen Lain

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Meeting Agenda of the Committees under the Board of Commissioners with Other Management

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
1.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Revisi Usulan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. / Discussion on the Revised 2020 RKAP Proposal of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Pionir Harapan • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
2.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Laporan Tim <i>Counterpart</i> atas Pemantauan Pelaksanaan Audit Umum oleh KAP Tahun Buku 2019. / Discussion of the Counterpart Team Report on the Monitoring of the General Audit Implementation by KAP for the 2019 Fiscal Year.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Pionir Harapan • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division • Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division • Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division
3.	16-17 Januari 2020 / January 16-17, 2020	Pembahasan Laporan Triwulan IV tahun 2019. / Discussion of the 4th of 2019 Report.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Pionir Harapan • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
4.	27 Januari 2020 / January 27, 2020	Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Discussion of the 2019 Unaudited Management Report.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division • Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division • Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
5.	28 Januari 2020 / January 28, 2020	Tindak Lanjut Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Follow-up on the 2019 Unaudited Management Report Discussion.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
6.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit <i>Charter</i> SPI. / Discussion of the Proposed Revision of the IAU Audit Charter.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Pionir Harapan • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division
7.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit Pedoman Barang dan Jasa dengan PER-08/MBU/12/2019. / Discussion of the Proposed Audit Revision of the Goods and Services Guidelines with PER-08/MBU/12/2019.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pionir Harapan <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pengadaan / Procurement Division
8.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Konfirmasi Penyampaian Data dari <i>Audited</i> . / Confirmation of Submission of Audited Data.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Pionir Harapan • R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division
9.	24 April 2020 / April 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Quarter of 2020 Management Report. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
10.	14 Mei 2020 / May 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Triwulan I tahun 2020 Komite Audit dengan EVP Satuan Pengawasan Internal Perseroan. - Rapat Komite Triwulan I tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan VP Manajemen Risiko. - Hal-hal strategis lainnya. - First Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the EVP of the Company's Internal Audit Unit. - First Quarter of 2020 Committee Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the VP of Risk Management. - Other strategic matters. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
11.	14 Juli 2020 / July 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. - Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. - Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
12.	23 Juli 2020 / July 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. - Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. - Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
13.	24 Juli 2020 / July 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. - Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. - Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. - Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
14.	14 Agustus 2020 / August 14, 2020	Pembahasan KAK dan KET Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. / Discussion of KAK and KET for Procurement of Audit Services for Financial Statements for 2020 Fiscal Year.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division • Divisi Pengadaan / Procurement Division
15.	3 – 4 September 2020 / September 3-4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Internal. - Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko. - Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit Division. - Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the Risk Management Division. - Other strategic matters. 	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
16.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan mengenai Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 dan Usulan RKAP Tahun 2021. / Discussion on the Quarter III of 2020 Management Report and the 2021 RKAP Proposal.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division • Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
17.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan tindak lanjut Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 / Discussion on the follow-up to the Quarter III of 2020 Management Report	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division • Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
18.	2 November 2020 / November 2, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pemasaran / Marketing Division
19.	4 November 2020 / November 4, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division
20.	12 – 13 November 2020 / November 12-13, 2020	Rapat Pembahasan Draft SK Pedoman Kerja Sama dan Usulan Skema Kerja Sama Anak Perusahaan atas Dampak Implementasi PSAK 73./ Discussion Meeting on Draft Decision Letter on Cooperation Guidelines and Proposed Subsidiary Cooperation Scheme on the Impact of PSAK 73 Implementation.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division • Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
21.	17 November 2020 / November 17, 2020	Pembahasan Lanjutan Dokumen Revisi RJPP Tahun 2020 – 2024. / Advanced discussion of the 2020-2024 RJPP Revision Document.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
22.	8 Desember 2020 / December 8, 2020	Pembahasan Rencana Amandemen Perjanjian Kerja Sama PT JICT. / Discussion on the Amendment Plan for the PT JICT Cooperation Agreement.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division
23.	22 Desember 2020 / December 22, 2020	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, SPI, Hukum, dan Manajemen Risiko. / Coordination Meeting of the Board of Commissioners, Committee of the Board of Commissioners, SPI, Legal, and Risk Management.	<p>Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division • Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division • Divisi Hukum / Legal Division

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC telah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko pada awal tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC Tahun 2020

- Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan;
- Menyusun kajian atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris;
- Evaluasi Laporan Semesteran ERM dari manajemen dan penerapannya di Perseroan;
- Pemantauan implementasi dari *control* dan mitigasi risiko;
- Kunjungan lapangan, evaluasi cabang dan inventarisasi risiko;
- Rapat koordinasi dengan unit Manajemen Risiko;
- Evaluasi *risk profile*;
- Evaluasi atas implementasi penggunaan ERM dalam proses pengambilan keputusan dalam investasi;
- Inventarisasi kendala dalam melakukan investasi berdasarkan *risk profile*;

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Throughout 2020, the IPC Risk Management Monitoring Committee has carried out several activities that have been prepared in the Risk Management Monitoring Committee Work Plan in early 2020, with the following descriptions:

Realization of the Implementation of the IPC Risk Management Monitoring Committee Activities in 2020

- Provide direction on changes in the business environment that are expected to have a major impact on the Company's business and performance;
- Prepare a study on the proposal of the Board of Directors that requires the response/approval of the Board of Commissioners;
- Evaluation of the ERM Semester Report from management and its implementation in the Company;
- Monitor the implementation of risk control and mitigation;
- Site visits, branch evaluation, and risk inventory;
- Coordination meeting with the Risk Management unit;
- Risk profile evaluation;
- Evaluation of ERM use implementation in the decision-making process for investment;
- Inventory of obstacles in making investments based on risk profile;

- j. Pembahasan dan diskusi perkembangan ERM dalam investasi;
- k. Identifikasi hambatan pencapaian KPI dan mencari KRI untuk peningkatan KPI di masa datang;
- l. Analisis pelaksanaan program kerja dan mengidentifikasi keberhasilan pencapaian dan risiko hambatan yang terjadi dalam pencapaian;
- m. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KPMR Tahun 2020;
- n. Penyusunan Laporan Triwulanan KPMR.

PENGHASILAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko maksimal sebesar 20 persen dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen, dan karyawan. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

- j. Discussion on ERM development in investment;
- k. Identify obstacles in achieving KPI and look for KRI to improve KPI in the future;
- l. Analyze work program implementation and identify the success and the risk of obstacles that occur in the achievement;
- m. Prepare the 2020 KPMR Work Plan and Budget;
- n. Prepare KPMR Quarterly Report.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE INCOME

The Risk Management Monitoring Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20 percent of President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium.

Meanwhile, the Commissioners who sit as Risk Management Monitoring Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee (KNR) is a supporting organ for the Board of Commissioners which has a role to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of the Nomination and Remuneration policy for the Board of Directors, the Management Team, and employees. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners is carried out with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board for State-Owned Enterprises;
4. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;



- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 - Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Akte Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 tanggal 15 Agustus 2008); dan
 - Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;
 - Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II (Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. No. 1 dated December 1, 1992 which has been amended several times, most recently with the Notary Deed of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. No. 2 dated August 15, 2008); and
 - Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 153/DK/PL.II/VIII-2008 dated August 5, 2008 concerning the Establishment of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

- Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
- Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
- Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS;
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
- Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

MEMBERS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee

- The Board of Commissioners may form a Nomination and Remuneration Committee consisting of a Head and Members;
- The Chairperson and Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
- The Head of the Nomination and Remuneration Committee is a Member of the Board of Commissioners who is a Member of the Independent Commissioner or Member of the Board of Commissioners who can act independently;
- Members of the Nomination and Remuneration Committee may consist of the existing members of the Board of Commissioners or from external of the Company;
- The appointment and dismissal of Nomination and Remuneration Committee Members are reported to the GMS;
- Members of the Nomination and Remuneration Committee who are members of the Board of Commissioners, will automatically terminate their tenure as members of the Board of Commissioners when their term of office is over;
- In the event that a Member of the Board of Commissioners who serves as Head of the Nomination and Remuneration Committee resigns as a Member of the Board of Commissioners, the Head of the Risk Management Monitoring Committee must be replaced by another Member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Syarat-syarat keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan perusahaan secara khusus;
2. Harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in fact*);
3. Harus memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen serta memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan, di bidang ketenagakerjaan, dan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk menuangkan evaluasi dan analisis kriteria nominasi dan sistem remunerasi;
5. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif;
6. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
7. Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2020, terdapat pergantian komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Periode I (1 Januari – 8 April 2020)

- Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 1 Januari hingga 8 April 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yang beranggotakan:
- a. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak D. Andhi Nirwanto (Dewan Komisaris IPC);
 - b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak Aries Fikirman (Pihak Eksternal).

Nomination and Remuneration Committee Membership Requirements

Requirements for membership of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Collectively have a balance between expertise and experience with a broad background understanding of business in general and the Company in particular;
2. Must be independent, objective and professional in character, both in appearance and in fact;
3. Must have integrity, dedication, and commitment as well as have good knowledge, experience and understanding of the laws and regulations in the Company sector, in the field of manpower, and other related laws;
4. Have the ability to write excellent reports to present evaluation and analysis of nomination criteria and the remuneration system;
5. Able to work together and communicate effectively;
6. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG);
7. Committee members have a commitment of time and energy to fulfill their duties and responsibilities.

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

COMPOSITION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

During 2020, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee, with the following description:

1. Period I (January 1 – April 8, 2020)

- The composition of the Nomination and Remuneration Committee members as of January 1 to April 8, 2020 remain the same as the previous year, which consisted of:
- a. Head of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. D. Andhi Nirwanto (IPC Board of Commissioners);
 - b. Nomination and Remuneration Committee Member: Mr. Aries Fikirman (External Party).



2. Periode II (8 April – 14 Desember 2020)

Pada tanggal 8 April 2020, Bapak Ariès Fikirman dialih tugaskan menjadi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Kemudian, pada tanggal 15 April 2020, terdapat perubahan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Bapak D. Andhi Nirwanto dialih tugaskan menjadi Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi dan Bapak R. Nurhidayat dialih tugaskan dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Bapak Moermahadi Soerja Djanegara diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Bapak Suaidi Marasabessy, Bapak Djadmiko, dan Bapak R. Agus H. Purnomo diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dengan demikian, komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 15 April 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak Moermahadi Soerja Djanegara (Dewan Komisaris IPC);
- b. Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak D. Andhi Nirwanto (Dewan Komisaris IPC);

2. Period II (April 8 – December 14, 2020)

On April 8, 2020, Mr. Ariès Fikirman was transferred as member of Risk Management Monitoring Committee based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Subsequently, on April 15, 2020, there was a change in the composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee, with the following description:

- Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Head and Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Transfer of Duties of the Risk Management Monitoring Committee Members as Members of the Nomination and Remuneration Committee, Mr. D. Andhi Nirwanto was transferred to be the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee and Mr. R. Nurhidayat was transferred from a member of the Risk Management Monitoring Committee to become a member of the Nomination and Remuneration Committee; and
- Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 regarding the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Mr. Moermahadi Soerja Djanegara was appointed as Head of the Nomination and Remuneration Committee, Mr. Suaidi Marasabessy, Mr. Djadmiko, and Mr. R. Agus H. Purnomo were appointed as members of the Nomination and Remuneration Committee.

Thus, the composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee as of April 15, 2020 is as follows:

- a. Head of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. Moermahadi Soerja Djanegara (IPC Board of Commissioners);
- b. Secretary of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. D. Andhi Nirwanto (IPC Board of Commissioners);

- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:
- Bapak Suaidi Marasabessy (Dewan Komisaris IPC);
 - Bapak Djadmiko (Dewan Komisaris IPC);
 - Bapak R. Agus H. Purnomo (Dewan Komisaris IPC);
 - Bapak R. Nurhidayat (Pihak Eksternal).

3. Periode III (14 – 31 Desember 2020)

Pada tanggal 14 Desember 2020, posisi Djadmiko selaku Komisaris IPC resmi berakhir berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dengan demikian, komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per tanggal 14 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak Moermahadi Soerja Djanegara (Dewan Komisaris IPC);
- b. Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi: Bapak D. Andhi Nirwanto (Dewan Komisaris IPC);
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:
- Bapak Suaidi Marasabessy (Dewan Komisaris IPC);
 - Bapak R. Agus H. Purnomo (Dewan Komisaris IPC);
 - Bapak R. Nurhidayat (Pihak Eksternal).

Adapun komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat selama tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

- c. Members of the Nomination and Remuneration Committee:
- Mr. Suaidi Marasabessy (IPC Board of Commissioners);
 - Mr. Djadmiko (IPC Board of Commissioners);
 - Mr. R. Agus H. Purnomo (IPC Board of Commissioners);
 - Mr. R. Nurhidayat (External Party).

3. Period III (December 14 – 31, 2020)

On December 14, 2020, Djadmiko's position as Commissioner of IPC officially ended based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Thus, the composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as of December 14, 2020 is as follows:

- a. Head of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. Moermahadi Soerja Djanegara (IPC Board of Commissioners);
- b. Secretary of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. D. Andhi Nirwanto (IPC Board of Commissioners);
- c. Members of the Nomination and Remuneration Committee:
- Mr. Suaidi Marasabessy (IPC Board of Commissioners);
 - Mr. R. Agus H. Purnomo (IPC Board of Commissioners);
 - Mr. R. Nurhidayat (External Party).

The composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee who served during 2020 is described in the following table:

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2020

Uraian / Description	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Secretary of the Nomination and Remuneration Committee	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee				
Nama / Name	Moermahadi Soerja Djanegara	D. Andhi Nirwanto*	Suaidi Marasabessy	Djadmiko**	R. Agus H. Purnomo	Aries Fikiran***	R. Nurhidayat
Status	Komisaris Utama IPC / IPC President Commissioner	Anggota Dewan Komisaris IPC / Member of IPC Board of Commissioners				Pihak Eksternal / External Party	
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Head and Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Transfer of Duties of Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)		Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai Anggota Komite Audit serta Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 dated February 1, 2018 regarding the Transfer of Duties of Members of the Nomination and Remuneration Committee as Members of the Audit Committee and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Head and Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Transfer of Duties of Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II / Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 15, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Head and Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Transfer of Duties of Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero)
Masa Jabatan / Term of Office	(Sama dengan Masa Jabatan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen IPC) / (Same as Tenure as President Commissioner and Independent Commissioner of IPC)	(Sama dengan Masa Jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris IPC) / (Same as Tenure as Commissioner of IPC)					15 April 2020 – 30 Mei 2022 (Periode Pertama) / February 1, 2018 – March 16, 2021
Pendidikan / Education	Akuntansi/Ekonomi / Accounting/Economics	Hukum, Internasional / Law, International Management	Manajemen / Law, Science, Military	Ilmu Politik, Militer / Political Science, Military	Administrasi Negara, Keuangan / Administration, State Finance	Teknik Mesin, Manajemen / Mechanical Engineering, Management	SDM, Manajemen Keuangan / HC, Financial Management
Keahlian / Expertise	Keuangan / Finance	Logistik Keuangan / Financial Logistics	Kepemimpinan / Leadership	Kepemimpinan / Leadership	Administrasi dan Manajemen / Administration and management	Manajemen, Transportasi / Management, Transportation	Keuangan / Finance
Pengalaman Kerja / Employment History	Auditor di beberapa KAP dan instansi pemerintah serta Birokrat / Auditor in several PAF and government agencies as well as Bureaucrat	Aparat Penegak Hukum / Law Enforcement Officials	Militer / Military	Birokrat / Bureaucrat	CEO BUMN, Birokrat / CEO of SOE, Bureaucrat	Berbagai jabatan di PT Pos Indonesia (Persero) / Various positions at PT Pos Indonesia (Persero)	Peneliti dan Birokrat / Researcher and Bureaucrat

Keterangan: / Description:

*) Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi IPC, beliau merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 11 Oktober 2017 hingga 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/KEP-DK/PI.II/X-2017. / Prior to serving as Secretary of the IPC Nomination and Remuneration Committee, he was the Head of the Nomination and Remuneration Committee from October 11, 2017 to April 15, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners No. 18/KEP-DK/PI.II/X-2017.

**) Berhenti menjabat per tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Stopped serving as of December 14, 2020 in connection with the end of his term of office as Commissioner of IPC based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Pengalihan tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

Untuk profil lengkap dari Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu Bapak Moermahadi Soerja Djanegara; Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu Bapak D. Andhi Nirwanto; serta seluruh Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat selama tahun 2020, yaitu Bapak Suaidi Marasabessy, Bapak Djadmiko, Bapak R. Agus H. Purnomo, Bapak Aries Fikiranman, dan Bapak R. Nurhidayat, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM/CHARTER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

- a. Landasan Hukum;
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
- c. Tugas;
- d. Kewenangan;
- e. Persyaratan Keanggotaan;
- f. Tanggung Jawab;
- g. Rapat;
- h. Laporan;
- i. Akses Kerahasiaan Informasi;
- j. Rencana Kerja dan Anggaran;
- k. Penghasilan Anggota;
- l. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
- m. Penilaian Kinerja;
- n. Lain-Lain;
- o. Penutup.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi IPC mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

The complete profile of the Head of the Nomination and Remuneration Committee, namely Mr. Moermahadi Soerja Djanegara; Secretary of the Nomination and Remuneration Committee, namely Mr. D. Andhi Nirwanto; and all Members of the Nomination and Remuneration Committee who served during 2020, namely Mr. Suaidi Marasabessy, Mr. R. Agus H. Purnomo, Mr. Aries Fikiranman, and Mr. R. Nurhidayat, has been described in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

STATEMENT OF OWNERSHIP OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In performing its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was established by the Board of Commissioners through the Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI.II/ VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee. The charter is organized into the following sections:

- a. Legal Basis;
- b. Appointment and Dismissal of Members;
- c. Duty;
- d. Authority;
- e. Membership Requirements;
- f. Responsibility;
- g. Meeting;
- h. Report;
- i. Access to Information Confidentiality;
- j. Work Plan and Budget;
- k. Members Income;
- l. Education and Supporting Personnel;
- m. Performance Appraisal;
- n. Others;
- o. Closing.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The implementation of the duties of the IPC Nomination and Remuneration Committee refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter, with a description as follows:

1. To provide recommendations on candidate members for the Company's subsidiary of Board of Directors to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;



2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang:

1. Melakukan reviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait;
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat komite.

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam

2. To prepare and provide recommendations on the system and procedure for the selection and/or replacement of Board of Commissioners and Board of Directors members to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. To evaluate remuneration policy;
4. To provide recommendations to Board of Commissioners, regarding:
 - a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee Authorities

In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the following authorities:

1. Reviewing, examining, analyzing and providing opinions and recommendations within the scope of their duties;
2. Searching for and receiving relevant information (unlimited access) from the Management Information System (MIS), reports, or from all members of Board of Directors, employees or individuals or related sources;
3. Inviting management to attend committee meetings

Nomination and Remuneration Committee Responsibilities

1. The Nomination and Remuneration Committee reports to the Board of Commissioners.
2. The accountability of the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners is presented in the following report:
 - a. Annual report on the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee;
 - b. Quarterly reports on the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee;
 - c. Reports for each implementation of the special duties of the Nomination and Remuneration Committee;
3. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee carries out its functions and duties in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with statutory regulations. In accordance with

Komite Nominasi dan Remunerasi, kualifikasi independensi dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

the Nomination and Remuneration Committee Charter, the independence qualifications of the members of the Nomination and Remuneration Committee must meet the following criteria:

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi IPC

Statement of Independence of IPC Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Independence Criteria	Komite Nominasi dan Remunerasi IPC Tahun 2020 / IPC Nomination and Remuneration Committee in 2020						
	Moermahadi Soerja Djanegara	D. Andhi Nirwanto	Suaidi Marasabessy	Djadmiko*	R. Agus H. Purnomo	Aries Fikiran**	R. Nurhidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. / Has no family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. / Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. / Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. / Do not serve as administrators of political parties, officials and the government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: / Description:
 *) Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi IPC, beliau merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 11 Oktober 2017 hingga 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/KEP-DK/PI.II/X-2017. / Prior to serving as Secretary of the IPC Nomination and Remuneration Committee, he was the Head of the Nomination and Remuneration Committee from October 11, 2017 to April 15, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners No. 18/KEP-DK/PI.II/X-2017.
 **) Berhenti menjabat per tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berhentinya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Stopped serving as of December 14, 2020 in connection with the end of his term of office as Commissioner of IPC based on based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).
 ***) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 concerning Transfer of Assignment of Member of Nomination and Remuneration Committee as Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Perseroan memberikan program pengembangan kompetensi bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja

The Company provides a competency development program for each member of the Nomination and Remuneration Committee in order to improve productivity and effectiveness



Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020.

of the Nomination and Remuneration Committee's performance. The following is a table describing the capability improvement program that the Nomination and Remuneration Committee participated in throughout 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Implementation of the 2020 Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Name of Training	Waktu dan Tempat / Time and Place	Penyelenggara / Organizer
Moermahadi Soerja Djanegara	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of Nomination and Remuneration Committee	Telah diuraikan di bagian Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. / This section has been described in the Board of Commissioners Capability Improvement Program section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
D. Andhi Nirwanto	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Secretary of Nomination and Remuneration Committee			
Suaidi Marasabessy Djadmiko*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee			
R. Agus H. Purnomo				
R. Nurhidayat		Pelatihan dan Uji Certified Risk Management Professional (CRMP) / Certified Risk Management Professional (CRMP) Training and Testing	24-29 Agustus 2020 di PPM Manajemen / August 24 – 29, 2020 at PPM Manajemen	PPM Manajemen / PPM Management
		Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan Indonesia / Indonesian Port Expert Certification	16-27 November 2020 secara Daring / November 16 – 27, 2020 Online	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) / Center for Coastal and Ocean Resources Studies (PKSPL) and Bogor Agricultural University (IPB)

Keterangan: / Description:

*) Berhenti menjabat per tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Stopped serving as of December 14, 2020 in connection with the end of his term of office as Commissioner of IPC based on based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Policy

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior, apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir.

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least equal to the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. The Nomination and Remuneration Committee meeting is chaired by the Head of the Nomination and Remuneration Committee or the most senior member of the Nomination and Remuneration Committee, if the Head of the Nomination and Remuneration Committee is unable to attend.

Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Guna mendukung pelaksanaan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri 3 (tiga) jenis rapat, yakni rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat yang diselenggarakan secara internal oleh Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta rapat dengan komite lain/manajemen.

Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi yang diadakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Internal Tahun 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of Nomination and Remuneration Committee	16	16	100%
2.	D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hingga tanggal 15 April 2020, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee until April 15, 2020, then appointed as Secretary of Nomination and Remuneration Committee	20	19	95%

If deemed necessary, the Nomination and Remuneration Committee may invite Management related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee. Each Nomination and Remuneration Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee who are present. The Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.

Nomination and Remuneration Committee Meetings in 2020

To support the implementation of its role, the Nomination and Remuneration Committee attends 3 (three) types of meetings, namely meetings held internally by the Nomination and Remuneration Committee, meetings held internally by the Board of Commissioners and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as meetings with other committees/management.

Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings

Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 20 (twenty) internal meetings by also inviting the Other Committees and the Company's Management.

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee at Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings

The following is the frequency and attendance level of each member of the Nomination and Remuneration Committee at the Nomination and Remuneration Committee internal meetings held during 2020.

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee at Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings in 2020



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level	
3.	Suaidi Marasabessy*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	16	16	100%	
4.	Djadmiko**		16	16	100%	
5.	R. Agus H. Purnomo*		16	16	100%	
6.	Aries Fikiran***		4	4	100%	
7.	R. Nurhidayat*		16	16	100%	
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					99%	

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 tentang Pembagian Tugas Anggota- Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak Moermahadi Soerja Djanegara) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak R. Nurhidayat). / Effectively serve as Head/Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee since April 15, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 concerning Division of Duties of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. Moermahadi Soerja Djanegara) and Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 concerning Termination and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee and Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. R. Nurhidayat).

**) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 hingga tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively serve as a Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee from April 15, 2020 to December 14, 2020 in connection with the end of his tenure as Commissioner of IPC based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/2020 dated April 8, 2020.

Agenda Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Internal Meeting Agenda

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda for 2020

No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Internal Meeting			
1.	21 Januari 2020 / January 21, 2020	Pembahasan laporan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun Buku 2019 / Discussion on the activity report of the Nomination and Remuneration Committee for the 2019 Fiscal Year	1. Andhi Nirwanto 2. Aries
2.	26 Februari 2020 / February 26, 2020	Pembahasan Usulan Direksi atas Kenaikan Gaji dan Pembayaran Tantiem / Discussion on the Board of Directors' Proposal on Salary Increase and Tantiem Payment	1. Aries 2. Muhdi 3. Shanti 4. Nurrochman 5. Nugroho 6. Ahmad
3.	03 Maret 2020 / March 3, 2020	Pembahasan Telaah atas Usulan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Gaji bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) Tahun 2020 / Review of the Proposed Tantiem for the 2019 Fiscal Year and Salary for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) for 2020	1. Andhi Nirwanto 2. Aries
4.	10 Maret 2020 / March 10, 2020	1. Pembahasan Telaah Usulan penyesuaian remunerasi Sekdekom; 2. Pembahasan Telaah usulan kendaraan dinas Direksi. 1. Review of the proposed remuneration adjustment for the Secretary of the Board of Commissioners; 2. Review of the proposed official vehicles for the Board of Directors.	1. Andhi Nirwanto 2. Aries
5.	14 April 2020 / April 14, 2020	Pembahasan Permintaan Data (<i>Top Talent</i>) / Discussion of Data Requests (Top Talent)	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
6.	20 April 2020 / April 20, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat / Discussion of Response to the Proposed Change in the Organizational Structure of the Head Office	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat

No.	Waktu Pelaksanaan / Time of Implementation	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
7.	28 April 2020 / April 28, 2020	Pembahasan Usulan <i>Top Talent</i> BUMN / Discussion on SOE Top Talent Proposals	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
8.	04 Mei 2020 / May 4, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan PT IPC TPK, PT MTI, dan PT PPI. Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT JAI Tbk dan PT IKT Tbk. 	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
9.	12 Mei 2020 / May 12, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Direktur Utama Anak Perusahaan / Discussion on Response to the Proposed Placement of President Director in Subsidiaries	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
10.	09 Juni 2020 / June 9, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan pada PT JAI Tbk. / Discussion on Response to the Proposed Placement of Commissioners in Subsidiary PT JAI Tbk.	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
11.	12 Juni 2020 / June 12, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan pada PT JICT, PT JPPI, PT EPI & PT TPI. Pembahasan Persetujuan atas Usulan Penggantian Pejabat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
12.	13 Juli 2020 / July 13, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Persetujuan atas Perubahan Usulan Penggantian Pejabat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Direksi Anak Perusahaan PT JICT, PT IKT Tbk & PT EPI. Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan PT ILCS, PT JAI Tbk, PT EDII dan PT PTP. 	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
13.	20 Juli 2020 / July 20, 2020	Pembahasan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi / Discussion on the Proposed Adjustment of Organizational Structure	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
14.	03 Agustus 2020 / August 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Direksi Anak Perusahaan PT Rukindo, PT ILCS, PT IPC TPK & PT PTP; Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Direksi Anak Perusahaan PT JPPI, PT RSP, PT MTI & PT PPI; Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan PT Rukindo, PT RSP & PT PMLI. 	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
15.	24 Agustus 2020 / August 24, 2020	Pembahasan Penjelasan atas Tanggapan Usulan Penempatan Direksi PT PPI / Discussion on Explanation of the Response to the Proposed Placement of the Board of Directors of PT PPI	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
16.	14 September 2020 / September 14, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan pada PT IPC TPK / Discussion on Response to the Proposed Placement of Commissioners in Subsidiary PT IPC TPK	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
17.	21 September 2020 / September 21, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Direksi Anak Perusahaan PT JAI Tbk / Discussion on Response to the Proposed Placement of Directors in Subsidiary PT JAI Tbk	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
18.	28 September 2020 / September 28, 2020	Pembahasan Persetujuan atas Implementasi ISO 37001:2016 / Discussion of Approval for Implementation of ISO 37001:2016	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
19.	16 November 2020 / November 16, 2020	Pembahasan Persetujuan atas Implementasi ISO 37001:2016 / Discussion of Approval for Implementation of ISO 37001:2016	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat
20.	02 Desember 2020 / December 2, 2020	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Penempatan Komisaris Anak Perusahaan PT PII. / Discussion on Response to the Proposed Placement of Commissioners in Subsidiary PT PII.	1. Andhi Nirwanto 2. R. Nurhidayat

Rapat dengan Dewan Komisaris

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi turut menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, yaitu rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang komite serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Meeting with the Board of Commissioners

As an organ under the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee also attends meetings organized by the Board of Commissioners, namely internal meetings of the Board of Commissioners by inviting committees and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat internal Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2020.

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Members in Internal Meetings of the Board of Commissioners

The following is the frequency and attendance level of each member of the Nomination and Remuneration Committee in the internal meetings of the Board of Commissioners held during 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Internal Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Nomination and Remuneration Committee at the Internal Meeting of the Board of Commissioners in 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level	
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of Nomination and Remuneration Committee	34	34	100%	
2.	D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hingga tanggal 15 April 2020, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee until April 15, 2020, then appointed as Secretary of Nomination and Remuneration Committee	46	46	100%	
3.	Suaidi Marasabessy*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	34	30	88%	
4.	Djadmiko**		31	31	100%	
5.	R. Agus H. Purnomo*		34	27	79%	
6.	Aries Fikiriman***		12	12	100%	
7.	R. Nurhidayat*		34	34	100%	
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					95%	

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/Pl.II/2020 tentang Pembagian Tugas Anggota- Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak Moermahadi Soerja Djanegara) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/Pl.II/IV-2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak R. Nurhidayat). / Effectively serve as Head/Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee since April 15, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/Pl.II/2020 concerning Division of Duties of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. Moermahadi Soerja Djanegara) and Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/Pl.II/IV-2020 concerning Termination and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee and Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. R. Nurhidayat).

**) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 hingga tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively serve as a Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee from April 15, 2020 to December 14, 2020 in connection with the end of his tenure as Commissioner of IPC based on based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Pengalih tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/Pl.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/Pl.II/IV-2020 dated April 8, 2020.

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat internal Dewan Komisaris telah diuraikan pada halaman 499.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 499.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Members in Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following is the frequency and attendance level of each member of the Nomination and Remuneration Committee in joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors held during 2020.

Frequency and Attendance Level of the Nomination and Remuneration Committee at the 2020 Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of Nomination and Remuneration Committee	9	9	100%
2.	D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hingga tanggal 15 April 2020, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee until April 15, 2020, then appointed as Secretary of Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%
3.	Suaidi Marasabessy*		9	9	100%
4.	Djadmiko**		8	8	100%
5.	R. Agus H. Purnomo*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	9	6	67%
6.	Aries Fikiran***		3	3	100%
7.	R. Nurhidayat*		9	9	100%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					95%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.III-2020 tentang Pembagian Tugas Anggota- Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak Moermahadi Soerja Djanegara) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.IV-2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak R. Nurhidayat). / Effectively serve as Head/Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee since April 15, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.III-2020 concerning Division of Duties of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. Moermahadi Soerja Djanegara) and Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.IV-2020 concerning Termination and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee and Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. R. Nurhidayat).

**) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 hingga tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively serve as a Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee from April 15, 2020 to December 14, 2020 in connection with the end of his tenure as Commissioner of IPC based on based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Pengalihan tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.IV-2020 dated April 8, 2020.

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada halaman 515.

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants has been described on page 515.



Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Selain mengikuti rapat Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi juga menghadiri rapat dengan komite lain dan manajemen, yang mana selama tahun 2020 diselenggarakan sebanyak 23 kali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan yang diadakan selama tahun 2020.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat dengan Komite Lain dan/atau Manajemen Perusahaan Tahun 2020

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Level
1.	Moermahadi Soerja Djanegara*	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of Nomination and Remuneration Committee	15	14	93%
2.	D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hingga tanggal 15 April 2020, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee until April 15, 2020, then appointed as Secretary of Nomination and Remuneration Committee	23	19	83%
3.	Suaidi Marasabessy*		15	14	93%
4.	Djadmiko**		15	14	93%
5.	R. Agus H. Purnomo*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	15	14	93%
6.	Aries Fikiran***		8	8	100%
7.	R. Nurhidayat*		15	15	100%
Rata-rata Kehadiran / Attendance Average					94%

Keterangan : / Description:

*) Mulai efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 tentang Pembagian Tugas Anggota- Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak Moermahadi Soerja Djanegara) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pelabuhan Indonesia II (untuk Bapak R. Nurhidayat). / Effectively serve as Head/Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee since April 15, 2020 based on Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 concerning Division of Duties of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. Moermahadi Soerja Djanegara) and Decree of the Board of Commissioners No. 10/KEP-DK/PI.II/2020 concerning Termination and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee and Transfer of Assignment of Member of Risk Management Monitoring Committee as Member of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) (for Mr. R. Nurhidayat).

**) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi IPC sejak tanggal 15 April 2020 hingga tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Komisaris IPC berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK- 391/MBU/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. / Effectively serve as a Member of the IPC Nomination and Remuneration Committee from April 15, 2020 to December 14, 2020 in connection with the end of his tenure as Commissioner of IPC based on Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero) Number: SK-391/MBU/12/2020 concerning Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II Corporation (Persero).

***) Pengalihan tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/2020 tanggal 8 April 2020. / Transfer of duties as a Member of the Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 07/KEP-DK/PI.II/2020 dated April 8, 2020.

Meetings with Other Committees and/or Company Management

In addition to attending Board of Commissioners meetings, the Nomination and Remuneration Committee also attended 23 meetings with other committees and management in 2020.

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Members in Meetings with Other Committees and/or Company Management

The following is the frequency and attendance level of each member of the Nomination and Remuneration Committee in meetings with Other Committees and/or Company Management held during 2020.

Frequency and Attendance Level of the Nomination and Remuneration Committee in Meetings with Other Committees and/or Company Management in 2020

Agenda Rapat Komite di Bawah Dewan Komisaris dengan Manajemen Lain

Adapun informasi terkait agenda, waktu pelaksanaan, dan peserta rapat akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Meeting Agenda of Committees under the Board of Commissioners with Other Management

The information related to the agenda, implementation time, and meeting participants will be described in the following table.

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
1.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Revisi Usulan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. / Discussion on the Revised 2020 RKAP Proposal of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
2.	8 Januari 2020 / January 8, 2020	Pembahasan Laporan Tim <i>Counterpart</i> atas Pemantauan Pelaksanaan Audit Umum oleh KAP Tahun Buku 2019. / Discussion of the Counterpart Team Report on the Monitoring of the General Audit Implementation by KAP for the 2019 Fiscal Year.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division
3.	16-17 Januari 2020 / January 16-17, 2020	Pembahasan Laporan Triwulan IV tahun 2019. / Discussion of the 4th of 2019 Report.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
4.	27 Januari 2020 / January 27, 2020	Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Discussion of the 2019 Unaudited Management Report.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
5.	28 Januari 2020 / January 28, 2020	Tindak Lanjut Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> tahun 2019. / Follow-up on the 2019 Unaudited Management Report Discussion.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
6.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit <i>Charter</i> SPI. / Discussion of the Proposed Revision of the IAU Audit Charter.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Andhi Nirwanto Aries Fikiran <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
7.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Pembahasan Usulan Revisi Audit Pedoman Barang dan Jasa dengan PER-08/MBU/12/2019. / Discussion of the Proposed Audit Revision of the Goods and Services Guidelines with PER-08/MBU/12/2019.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Pengadaan / Procurement Division
8.	21 Februari 2020 / February 21, 2020	Konfirmasi Penyampaian Data dari <i>Audited</i> . / Confirmation of Submission of Audited Data.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division
9.	24 April 2020 / April 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Quarter of 2020 Management Report. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
10.	14 Mei 2020 / May 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Triwulan I tahun 2020 Komite Audit dengan EVP Satuan Pengawasan Internal Perseroan. Rapat Komite Triwulan I tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan VP Manajemen Risiko. Hal-hal strategis lainnya. First Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the EVP of the Company's Internal Audit Unit. First Quarter of 2020 Committee Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the VP of Risk Management. Other strategic matters. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
11.	14 Juli 2020 / July 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
12.	23 Juli 2020 / July 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. Discussion on the 2020 RKAP Revision. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division
13.	24 Juli 2020 / July 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite dengan SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2020. Committee meeting with SVP of Financial Planning and Control. Discussion of the First Semester of 2020 Management Report. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
14.	14 Agustus 2020 / August 14, 2020	Pembahasan KAK dan KET Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. / Discussion of KAK and KET for Procurement of Audit Services for Financial Statements for 2020 Fiscal Year.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Layanan Keuangan / Financial Services Division Divisi Pengadaan / Procurement Division
15.	3 – 4 September 2020 / September 3-4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Internal. Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan II tahun 2020 Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko. Hal-hal strategis lainnya. <ul style="list-style-type: none"> Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit Division. Discussion of the Second Quarter of 2020 Coordination Meeting of the Risk Management Monitoring Committee with the Risk Management Division. Other strategic matters. 	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
16.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan mengenai Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 dan Usulan RKAP Tahun 2021. / Discussion on the Quarter III of 2020 Management Report and the 2021 RKAP Proposal.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
17.	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Pembahasan tindak lanjut Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 / Discussion on the follow-up to the Quarter III of 2020 Management Report	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / Financial Planning and Control Division Divisi Pelayanan Terminal / Terminal Services Division
18.	2 November 2020 / November 2, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Pemasaran / Marketing Division
19.	4 November 2020 / November 4, 2020	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Discussion Meeting on Proposal Adjustment Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cooperation.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta / Participants
20.	12 – 13 November 2020 / November 12-13, 2020	Rapat Pembahasan <i>Draft</i> SK Pedoman Kerja Sama dan Usulan Skema Kerja Sama Anak Perusahaan atas Dampak Implementasi PSAK 73./ Discussion Meeting on Draft Decision Letter on Cooperation Guidelines and Proposed Subsidiary Cooperation Scheme on the Impact of PSAK 73 Implementation.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan / Business Alliance and Customer Relations Division Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division
21.	17 November 2020 / November 17, 2020	Pembahasan Lanjutan Dokumen Revisi RJPP Tahun 2020 – 2024. / Advanced discussion of the 2020-2024 RJPP Revision Document.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan Strategi Korporasi / Corporate Strategic Planning Division
22.	8 Desember 2020 / December 8, 2020	Pembahasan Rencana Amandemen Perjanjian Kerja Sama PT JICT. / Discussion on the Amendment Plan for the PT JICT Cooperation Agreement.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang / Subsidiary and Branch Management Division
23.	22 Desember 2020 / December 22, 2020	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, SPI, Hukum, dan Manajemen Risiko. / Coordination Meeting of the Board of Commissioners, Committee of the Board of Commissioners, SPI, Legal, and Risk Management.	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Moermahadi Soerja Djanegara D. Andhi Nirwanto Suaidi Marasabessy Djadmiko R. Agus H. Purnomo R. Nurhidayat <p>Manajemen IPC / IPC Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisi Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit Unit Division Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division Divisi Hukum / Legal Division

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi IPC telah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada awal tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengawasan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Evaluasi kinerja Direksi;
3. Evaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Throughout 2020, the IPC Nomination and Remuneration Committee has carried out several activities that have been prepared in the Nomination and Remuneration Committee Work Plan in early 2020, with the following description:

1. Supervision of good corporate governance principles implementation;
2. Performance evaluation of the Board of Directors;
3. Evaluation of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi (apabila diperlukan), serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan; 5. Rapat koordinasi Triwulanan dengan bagian SDM; 6. Evaluasi usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020; 7. Evaluasi atas desain dan pola struktur organisasi Perseroan; 8. Evaluasi atas penerapan pola karier; 9. Evaluasi atas penerapan HR <i>Contact Center</i> untuk komunikasi antara HR HO dengan Anak Perusahaan dan Cabang Pelabuhan; 10. Evaluasi atas sistem manajemen karier; 11. Evaluasi penerapan GCG Perseroan; 12. Evaluasi peraturan-peraturan mengenai GCG; 13. <i>Updating data talent pool</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 14. Kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan; 15. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KNR Tahun 2020; 16. Penyusunan Laporan Triwulanan KNR. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluation of proposals/recommendations to the GMS regarding candidates for members of the Board of Directors (if necessary), as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries; 5. Quarterly coordination meeting with HR division; 6. Evaluation of remuneration proposal for Board of Commissioners and Board of Directors in 2020; 7. Evaluation of the design and pattern of the Company's organizational structure; 8. Evaluation of career path implementation; 9. Evaluation of HR Contact Center implementation for communication between HR of Head Office with Subsidiaries and Port Branches; 10. Evaluation of career management system; 11. Evaluation of the Company's GCG implementation; 12. Evaluation of regulations regarding GCG; 13. Update of data on the talent pool of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 14. Work visit to Port Branches; 15. Preparation of the 2020 KNR Work Plan and Budget; 16. Preparation of KNR Quarterly Report. |
|--|--|

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi IPC dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, di mana prosesnya akan mengikuti Kebijakan Suksesi Direksi.

Kebijakan tentang pencalonan Direksi kepada Pemegang Saham telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Beberapa pokok kebijakan tersebut adalah:

1. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham yang berasal dari Perusahaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku;
2. Dewan Komisaris meminta akses database personel satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, yang memuat:
 - a. *Curriculum Vitae*;
 - b. Hasil penilaian kinerja pegawai;
 - c. Laporan harta kekayaan.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

One of Nomination and Remuneration Committee task is to provide recommendations regarding prospective members of Board of Directors of IPC and IPC's Subsidiaries to Board of Commissioners to be submitted to General Meeting of Shareholders, where the process will follow Board of Directors' Succession Policy.

The policy regarding the nomination of Board of Directors to Shareholders has been determined based on Board of Commissioners Degree No. 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 dated August 4, 2017 concerning the Establishment of Standard Operating Procedure (SOP) for the Implementation of Duties and Functions of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Some of the key points of policy are:

1. Board of Commissioners proposes prospective members of Board of Directors to Shareholders from the Company in accordance with applicable guidelines;
2. Board of Commissioners requests access to a database of personnel one level below Board of Directors and Subsidiaries' Board of Directors, which contains:
 - a. *Curriculum Vitae*;
 - b. Employee performance appraisal results;
 - c. Property report.



3. Dewan Komisaris menetapkan kriteria calon dari *database personnel* yang diterima dari Direksi untuk selanjutnya ditetapkan bakal calon-calon yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
4. Dewan Komisaris menunjuk lembaga profesional yang dalam keputusan Kementerian BUMN untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, selanjutnya menetapkan calon yang memperoleh nilai "Disarankan" dan "Disarankan dengan Pengembangan" untuk mengikuti wawancara dengan Dewan Komisaris sebagai calon yang akan diusulkan;
6. Dewan Komisaris berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta wawancara menetapkan calon-calon Direksi yang akan diusulkan kepada RUPS;
7. Dewan Komisaris dalam melakukan proses pelaksanaan pencalonan Direksi menggunakan perangkat Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Board of Commissioners determines the criteria for candidates from personnel database received from Board of Directors to further determine candidates who will take the fit and proper test;
4. Board of Commissioners appoints a professional institution which in Ministry of SOEs Degree to conduct a fit and proper test in accordance with applicable regulations;
5. Board of Commissioners evaluates the results of fit and proper test, then determines candidates who get "Recommended" and "Recommended with Development" to follow the interview with Board of Commissioners as candidate to be proposed;
6. Board of Commissioners based on the results of fit and proper test and interviews determine candidates for Board of Directors to be proposed to the GMS;
7. Board of Commissioners conducts the nomination process of Board of Directors using Board of Commissioners' Nomination and Remuneration Committee.

PENGHASILAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal sebesar 20 persen dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Divisi Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* dan membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. Pembentukan Divisi Sekretariat Perusahaan di IPC mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INCOME

The Nomination and Remuneration Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Nomination and Remuneration Committee Members is a maximum of 20 percent of President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium.

Meanwhile, the Commissioners who sit as the Nomination and Remuneration Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARIAT DIVISION

The Corporate Secretariat Division is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer and assists the Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. The establishment of the Corporate Secretariat Division at IPC refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan

Secara struktural, Divisi Sekretariat Perusahaan berada di bawah wewenang Direktur Utama. Berikut ini merupakan struktur organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

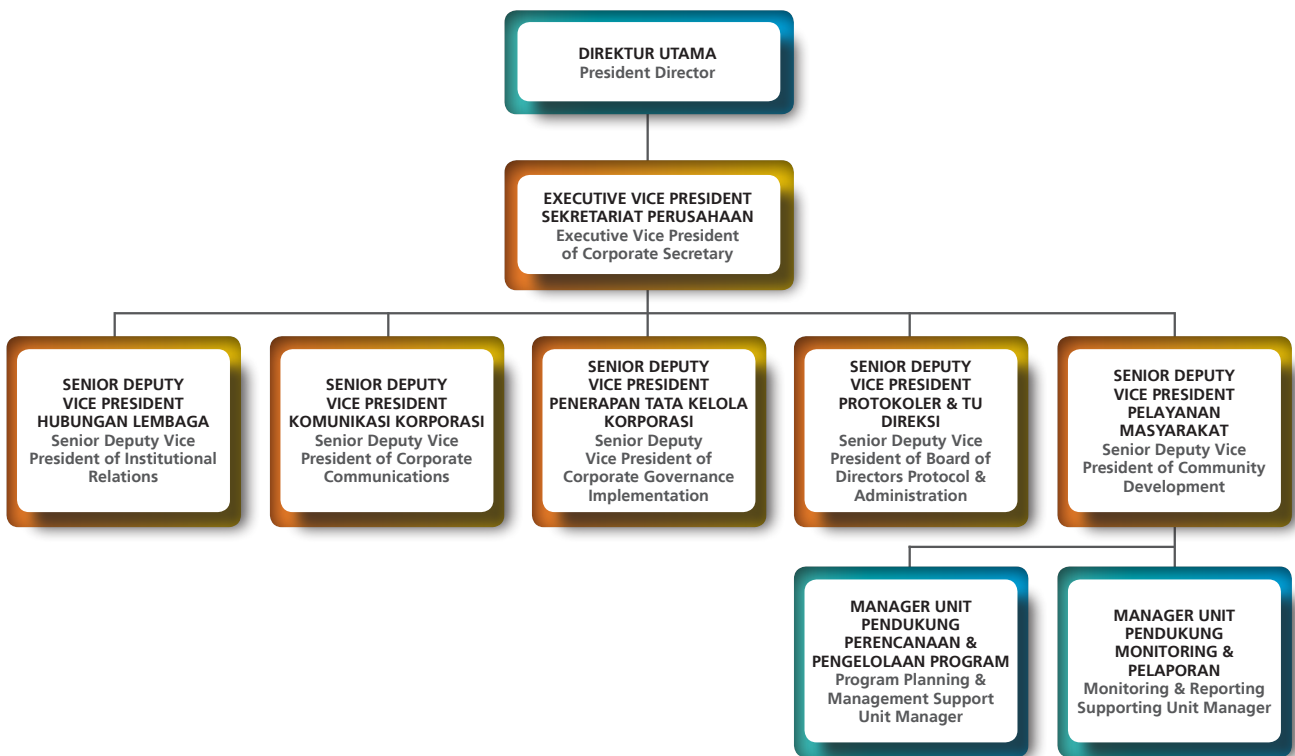
Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan IPC

ORGANIZATION STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF CORPORATE SECRETARY DIVISION

Organization Structure of Corporate Secretary Division

Structurally, Corporate Secretary Division works under the authority of the President Director. Below is the organization structure of the Corporate Secretary Division as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree Number OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Organization Structure of IPC Corporate Secretary Division



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN EVP SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Divisi Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh seorang *Executive Vice President* (EVP) Sekretariat Perusahaan IPC yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

EVP Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EVP CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary Division is led by an *Executive Vice President* (EVP) of Corporate Secretary of IPC who is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with approval from the Board of Commissioners.

EVP Corporate Secretary directly reports to the President Director and is tasked with the mission to create a good corporate image consistently and sustainably through effective communication to the stakeholders.



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 4 Agustus 2020 posisi EVP Sekretariat Perusahaan dijabat oleh Bapak Ari Santoso. Adapun profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEANGGOTAAN DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2020, Divisi Sekretariat Perusahaan terdiri dari seorang *Executive Vice President* (EVP), 5 (lima) *Senior Deputy Vice President* (SDVP), 2 (dua) *Manager*, 42 (empat puluh dua) *officer*, dan 3 (tiga) administrator, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Karyawan Divisi Sekretariat Perusahaan IPC Tahun 2020

No.	Jabatan / Position	Jumlah (orang) / Total (people)
1.	<i>Executive Vice President</i> (EVP)	1
2.	<i>Senior Deputy Vice President</i> (SDVP)	5
3.	<i>Manager</i>	2
4.	<i>Senior Officer</i>	14
5.	<i>Junior Officer</i>	5
6.	<i>Senior Assisstant Officer</i>	16
7.	<i>Junior Assisstant Officer</i>	7
8.	<i>Senior Administrator</i>	2
9.	<i>Junior Administrator</i>	-
10.	<i>Administrator</i>	1
Total		57

FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi Divisi Sekretariat Perusahaan

Secara umum, Divisi Sekretariat Perusahaan memiliki fungsi membantu Direksi dalam pengelolaan program kerja bidang komunikasi korporasi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, serta kegiatan pelayanan masyarakat Perseroan. Adapun fungsi Sekretariat Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. KP.10.02/3/8/1/MTA/UT/PI.II-2020 dated August 4, 2020, the EVP Corporate Secretary is Mr. Ari Santoso. His complete profile is available in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

MEMBERSHIP OF CORPORATE SECRETARY DIVISION

As of December 31, 2020, the Corporate Secretary Division consisted of one Executive Vice President (EVP), 5 (five) Senior Deputy Vice Presidents (SDVP), 2 (two) Managers, 42 (forty-two) officers, and 3 (three) administrators, with description as follows:

Total Employees of IPC Corporate Secretary Division in 2020

No.	Jabatan / Position	Jumlah (orang) / Total (people)
1.	<i>Executive Vice President</i> (EVP)	1
2.	<i>Senior Deputy Vice President</i> (SDVP)	5
3.	<i>Manager</i>	2
4.	<i>Senior Officer</i>	14
5.	<i>Junior Officer</i>	5
6.	<i>Senior Assisstant Officer</i>	16
7.	<i>Junior Assisstant Officer</i>	7
8.	<i>Senior Administrator</i>	2
9.	<i>Junior Administrator</i>	-
10.	<i>Administrator</i>	1
Total		57

FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY DIVISION

Functions of the Corporate Secretary Division

In general, the Corporate Secretary Division has the function of assisting the Board of Directors in managing work programs in the field of corporate communications, institutional relations, implementing corporate governance, protocols and administration of the Directors, as well as the Company's community development activities. The Corporate Secretary's function is in accordance with Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance, namely:

1. Ensuring that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles;
2. Providing information needed by Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or at any time when requested;
3. Acting as a liaison officer;

4. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Divisi Sekretariat Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tugas pokok dan tanggung jawab Divisi Sekretariat Perusahaan adalah:

1. Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait komunikasi Perseroan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, dan pelayanan masyarakat;
2. Memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*), termasuk dalam mengikuti *Annual Report Award* (ARA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perseroan;
5. Sebagai penghubung (*liason officer*) untuk membina hubungan dengan lembaga/instansi Pemerintah dan/atau non-Pemerintah pada skala nasional;
6. Menyelenggarakan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi;
7. Menatausahakan serta menyimpan dokumen yang meliputi daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan risalah RUPS Perseroan;
8. Melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;

4. Administering and storing Company documents, including but not limited to Special Lists, Shareholders List, and Minutes of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners' Meetings and the GMS.

Main Duties and Responsibilities of Corporate Secretary Division

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree Number OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 concerning the Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the main duties and responsibilities of the Corporate Secretary Division include:

1. Formulate policies, Standard Operating Procedures (SPO), and Key Performance Indicators (KPI) related to the duties and responsibilities for corporate communication, corporate governance implementation, protocols and administration of the Board of Directors, institutional relations, and community development;
2. Ensure compliance with regulations regarding information disclosure requirements in line with implementation of Good Corporate Governance Principles;
3. Provide information needed by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
4. Coordinate preparation of Quarterly and Annual Management Reports, including participating in Annual Report Award (ARA) in accordance with applicable regulations;
5. Act as a liaison officer to foster relationships with government and/or non-government institutions/agencies on a national scale;
6. Organize Board of Directors meetings, procurement of the meeting materials and preparation of the meeting minutes;
7. Administer and store documents which include the list of shareholders, special lists, as well as minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and the Company's GMS;
8. Conduct a Company introduction program for newly appointed members of Board of Directors and Board of Commissioners;



- | | |
|---|--|
| <p>9. Pembentukan citra perusahaan yang baik internal maupun eksternal;</p> <p>10. Mengimplementasikan pedoman GCG, Pedoman hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) dan Kode Etik Perusahaan;</p> <p>11. Pengelolaan program kegiatan sosial masyarakat, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>;</p> <p>12. Pengelolaan tata usaha Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>13. Pengelolaan hubungan lembaga dengan instansi pemerintah dan/atau non Pemerintah Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;</p> <p>14. Pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi yang meliputi Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan perizinan korporasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>15. Menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal; dan</p> <p>16. Melakukan pelaporan kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.</p> | <p>9. Establishment of corporate image both internally and externally;</p> <p>10. Implement the GCG guidelines, Board of Directors and Board of Commissioners relationship guidelines (<i>Board Manual</i>) and the Company Code of Conduct;</p> <p>11. Management of social activities programs, both through Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR);</p> <p>12. Administrative management of Board of Directors and Board of Commissioners;</p> <p>13. Management of institutional relations with government agencies and/or non-National Governments, including facilitating communication with potential partners/ investors;</p> <p>14. Compliance and updating of every corporate license which includes Company Registration, Business License (SIUP) and other corporate licenses in accordance with applicable regulations;</p> <p>15. Following up on recommendations on findings from Internal Audit Unit; and</p> <p>16. Report their main duties and responsibilities implementation to the President Director.</p> |
|---|--|

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Perseroan memberikan program pengembangan kompetensi bagi Pekerja Divisi Sekretariat Perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerjanya. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh EVP Sekretariat Perusahaan IPC sepanjang tahun 2020.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF CORPORATE SECRETARY DIVISION

The Company provides competency development programs for employees in the Corporate Secretary Division to improve their productivity and performance effectiveness. The following table describes capability improvement programs attended by EVP Corporate Secretary of IPC in 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi EVP Sekretariat Perusahaan IPC Tahun 2020

Competency Development Program of EVP Corporate Secretary of IPC in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Training Subject	Waktu dan Tempat / Time and Venue	Penyelenggara / Organizer
Ari Santoso	EVP Sekretariat Perusahaan / EVP Corporate Secretary	ISO 37001:2016 Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan / ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness	15 Oktober 2020 Secara Daring / October 15, 2020 Online	IPC

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2020, Divisi Sekretariat Perusahaan telah melaksanakan tugasnya, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tugas Divisi Sekretariat Perusahaan IPC Tahun 2020

DUTY REPORT OF CORPORATE SECRETARY DIVISION

In 2020, the Corporate Secretary Division carried out its duties with the following details:

Duty Report of IPC Corporate Secretary Division in 2020

DEPARTEMEN KOMUNIKASI KORPORASI	CORPORATE COMMUNICATION DEPARTMENT
<p>Program Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dan Sosialisasi Pemutakhiran Panduan Brand IPC; 2. Pelaksanaan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri; 3. Penyusunan dan Penerbitan Majalah Internal IPC; 4. Pengelolaan Informasi Internal; 5. Pengelolaan Informasi Eksternal; 6. Pembuatan Kalender dan Agenda Perusahaan 7. Bekerjasama dengan vendor membuat Cinderamata Perusahaan; 8. Penyediaan Fasilitas Penunjang Kehumasan; 9. Penyelenggaraan <i>Event</i> Internal; 10. Penyelenggaraan <i>Event</i> Eksternal; 11. Menyiapkan Materi Wawancara Direksi oleh Media; 12. Media Monitoring; 13. Mengambil foto dan video udara dan/atau Mapping Pelabuhan; 14. Penerbitan Iklan; 15. Partisipasi Sponsorship dan Bentuk Partisipasi Lainnya; 16. Penyelenggaraan HUT IPC; 17. Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia; 18. Keikutsertaan di Pameran Internasional; 19. Partisipasi dalam award dengan tema masing-masing Direktorat; 20. Penyediaan Surat Kabar di lingkungan kantor; 21. Proses pelaksanaan <i>Benchmarking</i> 22. Publikasi pemberitaan proyek strategis Perusaha; 23. Konsultasi Kehumasan Konvensional. <p>Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan pengesahan SOP IPC <i>Brand Guideline</i>, Mempersiapkan SKD pemutakhiran panduan visual dan <i>brand</i> IPC beserta perangkatnya serta melakukan sosialisasi melalui kanal komunikasi internal IPC 2. Telah melaksanakan kegiatan sinergi BUMN seperti sinergi komunikasi dan aktivitas penanganan wabah Covid-19 serta aktivitas pelaporan terkait <i>new normal</i>; 3. Vendor terpilih telah melaksanakan pekerjaan penerbitan IPC News s.d Edisi Bulan Desember 2020. Meskipun di tengah Pandemi/PSBB peliputan tetap berjalan secara virtual; 4. Telah dilaksanakan melaksanakan update medium pemberitaan yang dimiliki Perseroan. Seperti di antaranya <i>Pop up message</i>; Artikel intranet; CEO Letter terbit rutin bulan Januari s.d Desember 2020; 5. Melaksanakan pembaruan secara berkala terkait informasi terbaru Perseroan melalui seluruh sosial media dan sarana daring yang dimiliki, antara lain, Penyebaran <i>press release</i>, situs resmi, sosial media, serta Portal BUMN; 6. Melaksanakan proses percetakan kalender dan agenda kerja untuk tahun 2021 yang telah selesai pelaksanaannya pada 15 Desember 2020; 7. Melakukan distribusi cinderamata perusahaan telah dilaksanakan dengan baik untuk sejumlah kegiatan internal maupun eksternal perusahaan melalui Surat Permohonan / Formulir Permohonan Pengajuan Souvenir; 8. Melakukan pendataan kebutuhan fasilitas kehumasan; 9. Menyenggarakan kegiatan internal perusahaan secara virtual karena pandemi Covid-19 masih berlangsung seperti HUT Bersama Pelindo I – IV; 10. Melaksanakan <i>Event</i> Eksternal yang telah dilakukan berupa Rangkaian HUT IPC ke – 28; 11. Mempersiapkan wawancara Direksi secara virtual baik dengan media maritim maupun nasional, seperti Bisnis Indonesia dan Kontan; 12. Pelaksanaan Media Monitoring beserta laporannya yang disubmit secara berkala setiap bulan; 13. Pengambilan foto udara di cabang Pelabuhan Tanjung Priok; 14. Melaksanakan penerbitan iklan di beberapa media antara lain pada media Indopos, Men's Obsession, Bisnis Indonesia, Koperasi FORWAMI, Tempo, Berita Kapal, ISG, iklan pengumuman tender, ANTARA, ISL dan IDX Channel.; 15. Melaksanakan proses <i>sponsorship</i> telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai SOP dan SK Direksi yang berlaku; 16. Telah melaksanakan serangkaian kegiatan HUT IPC secara daring yakni Perayaan bersama Pelindo I, III dan IV, Rally lomba competition (lomba vlog, tiktok, foto dan essay) Stakeholder gathering dan acara puncak; 17. Melaksanakan dan menjadi penanggung jawab perayaan kemerdekaan berupa upacara bendera <i>online</i>; 18. Telah mengikuti dan mengadakan pameran ASEAN Ports and Shipping 2020; 19. Melaksanakan partisipasi award perusahaan, yang mana sampai akhir September ini diperoleh 20 award pada empat bidang direktorat yang berbeda; 20. Telah dilakukan pembelian langsung/langganan surat kabar IPC bulan Juli sampai dengan Desember 2020; 21. Melakukan analisis konsep dan kebutuhan <i>benchmarking</i>; 22. Merealisasikan publikasi pemberitaan proyek strategis Perseroan melalui: Press Release Terminal Kijing, JTCC, dan Maritime Tower; dan 23. Menyelesaikan kontrak konsultasi kehumasan konvensional yang mana pekerjaan ini berlangsung selama enam bulan. 	<p>Work program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation and Dissemination of the Updated IPC Brand Guidelines; 2. Implementation of BUMN Hadir Untuk Negeri; 3. Preparation and publication of IPC Internal Magazine; 4. Internal Information Management; 5. External Information Management; 6. Making Company Calendar and Agenda 7. Collaborating with vendors to make Company Souvenirs; 8. Provision of Public Relations Support Facilities; 9. Organizing Internal Events; 10. Organizing External Events; 11. Preparing Media Interview Materials for the Board of Directors; 12. Media Monitoring; 13. Take aerial photos and videos and/or port mapping; 14. Publishing Advertisement; 15. Sponsorship Participation and Other Forms of Participation; 16. Organizing IPC Anniversary; 17. Celebration of Independence of the Republic of Indonesia; 18. Participation in International Exhibitions; 19. Participation in awards with the subjects of each Directorate; 20. Provision of Newspapers in the office environment; 21. Benchmarking implementation process 22. Publication of reports on the Company's strategic projects; 23. Conventional Public Relations Consultation. <p>Realization of Activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validated the IPC Brand Guidelines SOP, Prepared SKD for updated IPC brand and visual guide and its tools, and carried out dissemination through IPC internal communication channel 2. Carried out SOE synergy activities such as communication synergy and activities to handle Covid-19 pandemic as well as reporting activities related to the new normal; 3. Selected vendors have carried out the work of publishing IPC News up to the December 2020 Edition. Even during the Pandemi/PSBB, the coverage still ran virtually; 4. Updated the news media owned by the Company, such as pop-up message; intranet articles; CEO Letter published regularly from January to December 2020; 5. Regularly updated the latest information of the Company through all social media and online means, among others, press releases, official website, social media, and SOE Portal; 6. Printed 2021 calendar and work agenda, which was completed on December 15, 2020; 7. Distributed company souvenirs properly in several internal and external company activities through Application Letter/Souvenir Application Form; 8. Collected data on the need for public relations facilities; 9. Organized virtual internal company activities due to the Covid-19 pandemic, such as Joint Anniversary of Pelindo I - IV; 10. Organized external events as part of the 28th Anniversary of IPC; 11. Prepared virtual interviews of the Board of Directors with both maritime and national media, such as Bisnis Indonesia and Kontan; 12. Implementation of Media Monitoring and submitted the report every month; 13. Taking aerial photographs at Tanjung Priok Port branch; 14. Published advertisement in several media including Indopos media, Men's Obsession, Bisnis Indonesia, Koperasi FORWAMI, Tempo, Berita Kapal, ISG, open tender announcement, ANTARA, ISL and IDX Channel; 15. Carried out sponsorship process according to the applicable mechanism set in SOP and Decree of the Board of Directors; 16. Organized a series of online activities for IPC Anniversary, namely Celebration with Pelindo I, III and IV, Rally competitions (vlog, tiktok, photo and essay competitions), Stakeholder gathering, and main event; 17. Carried out and was responsible for the celebration of Indonesian independence through an online flag ceremony; 18. Participated in and organized the 2020 ASEAN Ports and Shipping exhibition; 19. Organized participation for company awards, which resulted in 20 awards in four different directorates until the end of September; 20. Organized direct purchases/subscriptions of newspapers for IPC from July to December 2020; 21. Conducted analysis of concept and benchmarking needs; 22. Realized news publication on the Company's strategic projects through: Press Release of Kijing Terminal, JTCC, and Maritime Tower; and 23. Completed a conventional public relations consulting contract which lasts six months.



DEPARTEMEN PENERAPAN TATA KELOLA KORPORASI

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION DEPARTMENT

Program Kerja:

1. Pelaksanaan Asesmen GCG;
2. Penyusunan dan pencetakan *Annual Report* dan *Sustainability Report* IPC Tahun 2019;
3. Penetapan, *monitoring*, evaluasi atas kebijakan WBS;
4. Pengadaan Asesmen GCG IPC;
5. Pengadaan *Annual Report* dan *Sustainability Report* IPC Tahun 2020;
6. Pengadaan perangkat WBS;
7. Implementasi *Roadmap* GCG IPC *Fase Citizenship* 2020;
8. Optimalisasi implementasi GCG dan Pemenuhan *Area of Improvement* GCG
9. Pengadaan Konsultan dan Pengadaan Pembuatan *Roadmap* GCG 2021-2024
10. *Training of Trainers* Gratifikasi bekerjasama dengan KPK;
11. Implementasi sistem e-Governance;
12. Sosialisasi penerapan *corporate governance* kepada Anak Perusahaan;
13. Keikutsertaan Perseroan pada seminar GCG/Compliance Nasional dan Internasional;
14. Persiapan pembentukan komite GRC (*Governance Risk Compliance*);
15. Memantau terlaksananya Kode Etik Bisnis dan Pakta Integritas;
16. Pelaksanaan survey pemahaman GCG;
17. Pengendalian Gratifikasi;
18. Review Pedoman GCG;
19. Keikutsertaan dalam penghargaan Bidang GCG;
20. *Monitoring Area of Improvement* Anak Perusahaan;
21. Proses persiapan sertifikasi ISO:37001 Anti Bribery Management System;
22. Pelaksanaan webinar Implementation of GCG & Risk Management to Prevent Fraud at IPC.

Work program:

1. Implementation of GCG Assessment;
2. Preparation and printing of IPC Annual Report and Sustainability Report 2019;
3. Determining, monitoring, evaluating WBS policies;
4. Procurement of IPC GCG Assessment;
5. Procurement of the 2020 IPC Annual Report and Sustainability Report;
6. Procurement of WBS equipment;
7. Implementation of the 2020 Citizenship Phase of the IPC GCG Roadmap;
8. Optimizing GCG implementation and completing GCG Area of Improvement
9. Procurement of Consultant and Creation of the 2021-2024 GCG Roadmap
10. Training of Trainers in Gratification in collaboration with KPK;
11. Implementation of e-Governance system;
12. Dissemination of corporate governance implementation to Subsidiaries;
13. The Company's participation in National and International GCG/Compliance seminars;
14. Preparation for the establishment of GRC (*Governance Risk Compliance*) committee;
15. Monitoring the implementation of the Code of Conduct and Integrity Pact;
16. Performing survey on GCG understanding;
17. Gratuity Control;
18. Review of GCG Guidelines;
19. Participation in GCG awards;
20. Monitoring of Subsidiaries' Area of Improvement;
21. Preparation for ISO:37001 Anti-Bribery Management System certification;
22. Webinar on Implementation of GCG & Risk Management to Prevent Fraud at IPC.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020 berbasis pada kriteria Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang dilaksanakan secara mandiri (*self-assessment*), dengan didampingi oleh pihak eksternal, dengan hasil capaian sebesar 98,73 kategori "Sangat Baik";
2. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG berbasis pada kriteria ASEAN CG Scorecard Tahun Buku 2019 dilaksanakan oleh auditor eksternal yakni PT Multi Utama Indojasa dengan capaian skor untuk level 1 dan 2 sebesar 89,74
3. Melaksanakan proses penyusunan, pencetakan, dan pendistribusian AR dan SR Tahun Buku 2019 ke seluruh Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan serta *soft copy* dan berhasil memperoleh Gold Award dan ranking 29 dengan nilai 98 dari maksimal nilai 100 dalam *League of American Communications Professionals (LACP) Annual Report Competition*.
4. Memantau dan menindaklanjuti 34 laporan yang masuk dalam WBS dengan progres tindak lanjut sebesar 94,12 persen;
5. Melaksanakan pengadaan asesmen GCG IPC tahun 2020 sesuai jadwal;
6. Melaksanakan pengadaan *Annual Report & Sustainability Report* IPC tahun 2020 sesuai jadwal;
7. Proses pelaksanaan pengadaan vendor untuk pengelolaan *Whistleblowing System* IPC Bersih pada 2019 – 2020 telah dilakukan pada bulan September 2019 dan dikelola oleh PT Integrity Indonesia;
8. Menyampaikan nota dinas hasil *monitoring* kepada divisi terkait untuk penyelesaian Aol;
9. Penyusunan *Roadmap* GRC Tahun 2021 – 2025 adalah PT Sinergi Daya Prima;
10. Ikut serta dalam webinar penerapan ISO 37001:2016, WBS, Unit Pengendalian Gratifikasi di BUMN dengan narasumber Inspektorat Kementerian BUMN dan KPK pada 7 Desember 2020;
11. Sampai 31 Desember 2020 sedang dilakukan perbaikan pada aplikasi I *Good, Change Request* untuk pakta integritas, serta *Change Request* untuk *list* Aol pada aplikasi I *Good*.
12. Melaksanakan sosialisasi pemahaman GCG melalui webinar kepada Anak Perusahaan;
13. Mengikuti Webinar GRC Series 2020 yang diselenggarakan oleh PT MRT Jakarta dengan tema "Tantangan dan Peluang Penerapan *Governance, Risk and Compliance* dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi" pada tanggal 3-4 Desember 2020. Selain itu juga mengikuti GRC Summit 2020 Seminar dan Master Class (Online): *Integrated GRC Embracing a Better New Normal* tanggal 17-18 September 2020;
14. Persiapan pembentukan Komite GRC telah sampai pada tahap penerbitan SK Direksi mengenai pembentukan komite dan charter Komite GRC serta penetapan *roadmap* GRC;
15. Berhasil mengkoordinasikan 100 persen karyawan Perseroan menandatangani Pakta Integritas;
16. Survey pemahaman GCG melalui sistem aplikasi I *Good* mendapatkan hasil rata-rata pemahaman 100 persen dari Direksi dan Dewa Komisaris serta karyawan Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan, dengan skor sebesar 85,39 persen dengan masing-masing predikat "SANGAT BAIK";
17. Menyampaikan surat imbauan larangan pungli, pemberian dan penerimaan gratifikasi, dan aktivitas fraud lainnya. Tim UPG IPC telah melaporkan adanya indikasi gratifikasi sebanyak 13 buah melalui aplikasi GOL kepada tim KPK;
18. Telah melakukan review dan pengesahan pedoman terkait GCG yang disahkan melalui SK Direksi;
19. Berhasil memperoleh lebih dari 5 penghargaan di bidang GCG yang seluruhnya dapat dilihat secara lebih rinci dalam bagian "Penghargaan" di Laporan Tahunan ini;
20. Menyampaikan surat dari EVP Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Utama terkait monitoring Aol;
21. Mengumpulkan data dokumen, proses *awareness*, pelatihan audit internal, serta terlibat dalam proses audit eksternal;
22. Bekerjasama dengan Divisi Manajemen Risiko terkait kelancaran pelaksanaan kegiatan Webinar *Implementation of GCG & Risk Management to Prevent Fraud* at IPC yang diselenggarakan pada 21 Desember 2020.

Realization of Activities:

1. GCG implementation assessment for 2020 fiscal year based on the criteria set in Minister of SOEs Decree No. No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises through self-assessment with assistance from external party with score achievement of 98.73 under category "Excellent";
2. The assessment of GCG implementation based on the criteria of ASEAN CG Scorecard for the 2019 Fiscal Year was carried out by an external auditor, namely PT Multi Utama Indojasa with score for level 1 and 2 at 89.74;
3. Organized the process of preparing, printing, and distributing AR and SR for the 2019 Fiscal Year to all Port Branches and Subsidiaries including soft copies and successfully earned Gold Award and ranked 29 with a score of 98 out of a maximum score of 100 in the League of American Communications Professionals (LACP) Annual Report Competition.
4. Monitored and followed up on 34 reports submitted to the WBS with a follow-up progress of 94.12 percent;
5. Carried out the procurement for the 2020 IPC GCG assessment according to schedule;
6. Carried out the procurement for 2020 IPC Annual Report & Sustainability Report according to schedule;
7. Vendor procurement process for the management of IPC Bersih Whistleblowing System in 2019 – 2020 was carried out in September 2019 and managed by PT Integrity Indonesia;
8. Submitted the official document of monitoring results to the related division for Aol completion;
9. Preparation of the 2021 - 2025 GRC Roadmap by PT Sinergi Daya Prima;
10. Participated in the webinar on the implementation of ISO 37001:2016, WBS, Gratification Control Unit in SOEs with speakers from the Inspectorate of the Ministry of SOEs and KPK on December 7, 2020;
11. As of December 31, 2020, improvements were made on I *Good* application, Change Request for integrity pact, and Change Request for the Aol list on the I *Good* application.
12. Disseminated GCG understanding through webinars to the Subsidiaries;
13. Participated in the GRC Series 2020 Webinar organized by PT MRT Jakarta with the theme "Challenges and Opportunities of Implementing Governance, Risk and Compliance in Company Transformation in the Disruption Era" on December 3-4, 2020. Also participated in the 2020 GRC Summit Seminar and Master Class (Online): *Integrated GRC Embracing a Better New Normal* on September 17-18, 2020;
14. Preparation for the establishment of GRC Committee reached the stage of issuance of Board of Directors Decree regarding the establishment of the GRC Committee and the committee charter and the establishment of the GRC roadmap;
15. Successfully coordinated 100 percent of the Company's employees to sign the Integrity Pact;
16. The GCG understanding survey through the I *Good* application system obtained an average result of 100 percent understanding from the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries, with a score of 85.39 percent with each predicate "EXCELLENT";
17. Delivered letter on the prohibition of extortion, giving and receiving of gratuities, and other fraudulent activities. The IPC UPG team reported 13 indications of gratification through the GOL application to the KPK team;
18. Reviewed and validated GCG guidelines, which were validated through Board of Directors Decree;
19. Successfully earned more than 5 awards in GCG, all of which are described in detail in the "Awards" section of this Annual Report;
20. Delivered letter from EVP Corporate Secretary to the President Director regarding Aol monitoring;
21. Collected data on document, awareness process, training of internal audit, and was involved in the external audit process;
22. Cooperated with the Risk Management Division regarding to facilitate Webinar on Implementation of GCG & Risk Management to Prevent Fraud at IPC, which was held on December 21, 2020.



DEPARTEMEN PROTOKOLER & TATA USAHA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROTOCOLS & ADMINISTRATION DEPARTMENT

Program Kerja:

1. Pelaksanaan Rapat Direksi;
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pelaksanaan Rapat Kerja Direksi secara berkala dengan para eselon 1 Perseroan dalam rangka kelancaran koordinasi dan pelaksanaan hal-hal strategis Perseroan;
4. Pelaksanaan administrasi dan keuangan kegiatan operasional Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Koordinasi kegiatan Perusahaan dengan para protokol, sekretaris dan pihak eksternal;
6. Pelaksanaan pelatihan dan *workshop* Direksi;
7. Pemenuhan kelengkapan Direksi terkait citra Perusahaan;
8. Reviu SOP dan Kebijakan terkait Administrasi Direksi;
9. Stabilisasi dan monitoring implementasi sistem i-BOS

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Telah dilaksanakan rapat Direksi selama tahun 2020 sebanyak 36 kali;
2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2020;
3. Rapat kerja Direksi telah dilakukan sebanyak 1 kali;
4. Telah dilaksanakan administrasi dan keuangan kegiatan operasional Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain untuk pembayaran tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS, pembayaran rutin beban Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020, bersama konsultan melakukan penghitungan tantiem tahun 2019 serta gaji Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020, laporan penggunaan dana operasional, operasional kendaraan serta kartu kredit;
5. Telah berkoordinasi dengan fungsi terkait untuk menyusun jadwal kegiatan Direksi selama 1 tahun serta membuat dokumen administrasi yang diperlukan kegiatan Direksi;
6. Telah menyusun kalender pelatihan/workshop Direksi selama tahun 2020 dan melaksanakan program peningkatan kapabilitas yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Laporan Tahunan ini yakni di halaman 577.
7. Telah memastikan dan memenuhi kelengkapan Direksi yang telah disediakan oleh Departemen Protokoler dan TU;
8. Pembuatan dan pengesahan SOP dan Kebijakan terkait Administrasi Direksi yang terdiri dari SK Direksi tentang Hak Direksi dan Dewan Komisaris, SK Direksi tentang Pelaksanaan Harian, SK Direksi tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris 2020, SOP Pembayaran Direksi dan Dewan Komisaris, SOP Rapat Koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris, SOP Pengelolaan Dokumentasi Direksi dan Dewan Komisaris, SOP Pengelolaan Rapat Direksi, SOP Kesekretariatan dan SOP Keprotokoleraan;
9. Telah dilakukan monitoring dan update secara berkala terhadap data user atas perubahan Direksi dan Dekom, data rapat Direksi meliputi undangan, agenda, dll, data pembayaran perjalanan dinas Direksi dan data pembayaran restitusi Direksi.

Work program:

1. Implementation of the Board of Directors Meeting;
2. Implementation of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Organizing regular work meetings of the Board of Directors with echelon 1 of the Company to support coordination and implementation of strategic matters of the Company;
4. Administration and finances of the operational activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
5. Coordination of Company activities with protocols, secretaries, and external parties;
6. Organizing training and workshops for the Board of Directors;
7. Fulfillment of the Board of Directors requirements regarding the Company image;
8. Review of SOPs and Policies related to the Administration of the Board of Directors;
9. Stabilization and monitoring of i-BOS system implementation.

Realization of Activities:

1. Board of Directors meetings were held 36 times in 2020;
2. Coordination Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 12 times in 2020;
3. Work meeting of the Board of Directors were held 1 time;
4. Carried out administrative and financial activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others, the payment of tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners according to GMS resolution, regular payments for the expenses of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020, together with consultant calculated the tantiem for 2019 as well as the salaries of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020, report on the use of operational funds, vehicle operations, and credit cards;
5. Coordinated with related functions to prepare activity schedule for the Board of Directors in 1 year and prepared administrative documents required for the activities of the Board of Directors;
6. Prepared training/workshop calendar for the Board of Directors for 2020 and organized capability improvement program, which can be seen in this Annual Report on page 577.
7. Ensured and fulfilled the requirements of the Board of Directors provided by the Protocols and Administration Department;
8. Preparation and validation of SOPs and policies related to the Administration of the Board of Directors, consisting of Board of Directors Decree on the Rights of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Decree on the Daily Person-in-Charge, Decree on the Provisions for the Board of Directors and Board of Commissioners Official Travel in 2020, SOP for Payments of Board of Directors and Board of Commissioners, SOP for Coordination Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, SOP for Documentation Management of the Board of Directors and Board of Commissioners, SOP for Management of Board of Directors Meetings, Secretarial SOP and Protocols SOP;
9. Regularly monitored and updated user data on changes to the Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Directors meeting data including invitations, agendas, etc., data on payments for official travels of the Board of Directors and data on payment of restitution of the Board of Directors.

DEPARTEMEN HUBUNGAN LEMBAGA

INSTITUTIONAL RELATIONS DEPARTMENT

Program Kerja:

1. Kegiatan bina hubungan dan koordinasi atas isu strategis antar lembaga;
2. Pelaksanaan Kegiatan *Sharing Knowledge & Port Visit* Lembaga;
3. Pelaksanaan Pendampingan RDP dan Kunjungan Kerja DPR-RI ke Cabang Pelabuhan;
4. Pelaksanaan *Stakeholders Gathering*;
5. Sinergi antara IPC dengan Pemerintah /Lembaga lainnya;
6. Keikutsertaan dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan IMO kategori C;
7. Pelaksanaan Forum Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan *Shareholders* dengan Direktur Utama IPC;
8. Keanggotaan aktif pada International Association of Port and Harbour (IAPH);
9. Keanggotaan aktif pada Asean Port Association (APA);
10. Pelaksanaan Penjajakan Kerjasama Internasional;
11. *Arrangement* dan pendampingan Kunker Kementerian/Lembaga ke Proyek Strategis IPC;
12. Pelaksanaan Kegiatan Puncak Perayaan HUT KBUMN.

Work program:

1. Activities to build relationships and coordination on strategic issues between institutions;
2. Implementation of Knowledge Sharing & Port Visit by Institutions;
3. Implementation of RDP and DPR-RI work visits to port branches;
4. Implementation of Stakeholders Gathering;
5. Synergy between IPC and the government/other institutions;
6. Participation in Indonesia's candidacy as a member of the IMO board category C;
7. Implementation of the Board of Commissioners of Subsidiaries and Shareholders Forum with IPC President Director;
8. Active membership in the International Association of Port and Harbour (IAPH);
9. Active membership in the ASEAN Port Association (APA);
10. Exploring International Cooperation;
11. Arrangement and escort of Ministry/Institution Visit to IPC Strategic Projects;
12. Implementation of the main activities of the KBUMN Anniversary Celebration.



Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Atas isu strategis antar lembaga Dilaksanakan pemetaan stakeholder lembaga serta strategi kegiatan bina hubungan sesuai dengan skala prioritasnya terhadap perusahaan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan menjalin inisiasi komunikasi dan silaturahmi dengan *stakeholders* lembaga secara berkesinambungan yaitu 32 kali kegiatan Bina Hubungan yang berupa 15 kali Audiensi antar Pimpinan dan 17 kali rapat terkait isu strategis;
2. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan *Sharing Knowledge* dilakukan 16 kali secara *onsite* maupun virtual melalui webinar dimana Direksi IPC menjadi *Keynote Speaker*;
3. Pelaksanaan Pendampingan RDP dan Kunjungan Kerja DPR-RI ke Cabang Pelabuhan dilakukan sebanyak 9 kali berupa 4 Rapat Dengar Pendapat, 3 Kunjungan Kerja DPR-RI ke Cabang Pelabuhan serta 2 Kunjungan Kerja DPRD ke Kantor Pusat;
4. Telah dilakukan support peninjakan dan *arrangement* Kerjasama sbb: MoU antara IPC dengan Pemkab Belitung tanggal 24 Juni 2020, MoU antara IPC dengan Pemkab Mempawah tanggal 18 Mei 2020, MoU antara IPC dengan BNN pada 3 Juli 2020, MoU antara IPC dengan Jamdatun pada 23 Juli 2020, PKS antara IPC dengan BAIIS TNI pada 18 Agustus 2020 dan MoU antara IPC dengan Dirjen Pajak Tanggal 10 November 2020;
5. Penyelenggaraan IMO 124th *session of the Council* 2020 yang semula akan diadakan tanggal 29 Juni - 3 Juli 2020 dibatalkan karena wabah Covid-19;
6. Telah dilakukan secara bersamaan dalam bentuk Kegiatan Gabungan dalam Peringatan HUT IPC pada tanggal 11-12 Desember 2020 di Lantai 9 Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok yang dihadiri oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan *Shareholders* secara virtual;
7. Telah diselesaikan pembayaran Keanggotaan IAPH Tahun 2020 telah selesai dilakukan. Penyelenggaraan IAPH World Port Conference 2020 yang semula akan diadakan tanggal 17-19 Maret 2020 di Antwerp dibatalkan karena wabah Covid-19;
8. Penyelenggaraan 41st ASEAN Ports Association – Working Committee Meeting yang direncanakan akan dilaksanakan di bulan Juli 2020 dibatalkan karena wabah Covid-19;
9. Telah dilakukan penandatanganan MoU *sisterport* dengan Port of Rotterdam pada 11 Maret 2020 di Museum Maritim;
10. Telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Sabah *Ports Authority* yang menyetujui perpanjangan MoU namun meminta agar penandatanganan MoU *Sisterport* ditunda sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Malaysia;
11. Penyusunan dan pendampingan Kunjungan Kerja Kementerian/Lembaga ke Proyek Strategis IPC dilakukan sebanyak 6 kali yang dilaksanakan bersama DPR-RI, BPK, Kementerian BUMN dan BPTJ;
12. Turut menyemarakkan HUT Kementerian BUMN dengan postingan ucapan di medsos IPC. Sementara pelaksanaan perayaannya dibatalkan karena terjadinya Pandemi Covid-19.

Realization of Activities:

1. On inter-institutional strategic issues, carried out institutional stakeholders mapping as well as the strategy of relationship building activities according to the priority scale of the company, followed up by continuously initiating of communication and relationship with institutional stakeholders, namely 32 Relationship Building activities in the form of 15 Audiences between Leaders and 17 meetings related to strategic issues;
2. Knowledge Sharing activities were carried out 16 times both onsite and virtually via webinars, in which IPC Directors became Keynote Speakers;
3. Escorted RDP and DPR-RI visits to port branches 9 times, namely through 4 Hearing Meetings, 3 DPR-RI Work Visits to Port Branches, and 2 DPRD Work Visits to the Head Office;
4. Supported the exploration and arrangement of cooperation as follows: MoU between IPC and Belitung Regency Government on June 24, 2020, MoU between IPC and Mempawah Regency Government on May 18, 2020, MoU between IPC and BNN on July 3, 2020, MoU between IPC and Jamdatun on July 23, 2020, PKS between IPC and BAIIS TNI on August 18, 2020, and MoU between IPC and the Directorate General of Taxes on November 10, 2020;
5. IMO 124th session of the Council 2020, which was originally planned on June 29 - July 3, 2020, was canceled due to Covid-19 pandemic;
6. Carried out Joint Activities for the Commemoration of IPC Anniversary on December 11-12, 2020 on the 9th Floor of Tanjung Priok Port Branch Building, attended by Board of Commissioners of Subsidiaries and Shareholders virtually;
7. Completed payment for the 2020 IAPH Membership. The IAPH World Port Conference 2020, which was originally planned on March 17-19, 2020 in Antwerp, was canceled due to Covid-19 pandemic;
8. The 41st ASEAN Ports Association - Working Committee Meeting, which was planned in July 2020, was canceled due to Covid-19 pandemic;
9. Signed sister port MoU with the Port of Rotterdam on March 11, 2020 at the Maritime Museum;
10. Received confirmation from Sabah Ports Authority that they approved the extension of the MoU but requested postponing the signing of the sister port MoU due to the increasing number of Covid-19 cases in Malaysia;
11. Arrangement and escort of Ministry/Institution visits to IPC Strategic Projects 6 times, together with DPR-RI, BPK, Ministry of SOEs, and BPTJ;
12. Celebrated The Ministry of SOEs Anniversary by posting on IPC social media. Meanwhile, the celebration was canceled due to Covid-19 Pandemic.

DEPARTEMEN PELAYANAN MASYARAKAT

Program Kerja:

1. Laporan Audited PKBL & CSR Tahun 2019;
2. Pelaksanaan Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2020;
3. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dan/atau CSR dalam rangka Ramadhan Tahun 2020;
4. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dan/atau CSR dalam rangka HUT IPC 2020;
5. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dan/atau CSR dalam rangka Program Idul Adha 2020;
6. Penyusunan RKAP PKBL & CSR Tahun 2020.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

1. Tersedia laporan manajemen audited 2019 sebagai bahan pertanggungjawaban serta laporan penggunaan dana PKBL & CSR;
2. Pelaksanaan program BUMN Hadir untuk Negeri;
3. Kegiatan Program Ramadhan telah terlaksana dengan baik;
4. Terlaksananya program Idul Adha Tahun 2020;
5. Tersedianya RKAP PKBL & CSR tahun 2020.

COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT

Work program:

1. 2019 Audited Partnership and Community Development Program & CSR Report;
2. Implementation of the 2020 BUMN Hadir untuk Negeri Program;
3. Distribution of Community Development Program and/or CSR Funds for Ramadhan 2020;
4. Distribution of Community Development Program and/or CSR Funds for 2020 IPC Anniversary;
5. Distribution of Community Development Program and/or CSR Funds for 2020 Eid Al-Adha Program;
6. Preparation of the 2020 Partnership and Community Development Program & CSR RKAP.

Realization of Activities:

1. The 2019 audited management report is available as an accountability report and report on the use of Partnership and Community Development Program & CSR funds;
2. Organized BUMN Hadir untuk Negeri program;
3. Carried out Ramadhan Program activities properly;
4. Carried out 2020 Eid al-Adha program;
5. Availability of 2020 Partnership and Community Development Program & CSR RKAP

DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Satuan Pengawasan Internal merupakan organ tata kelola perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

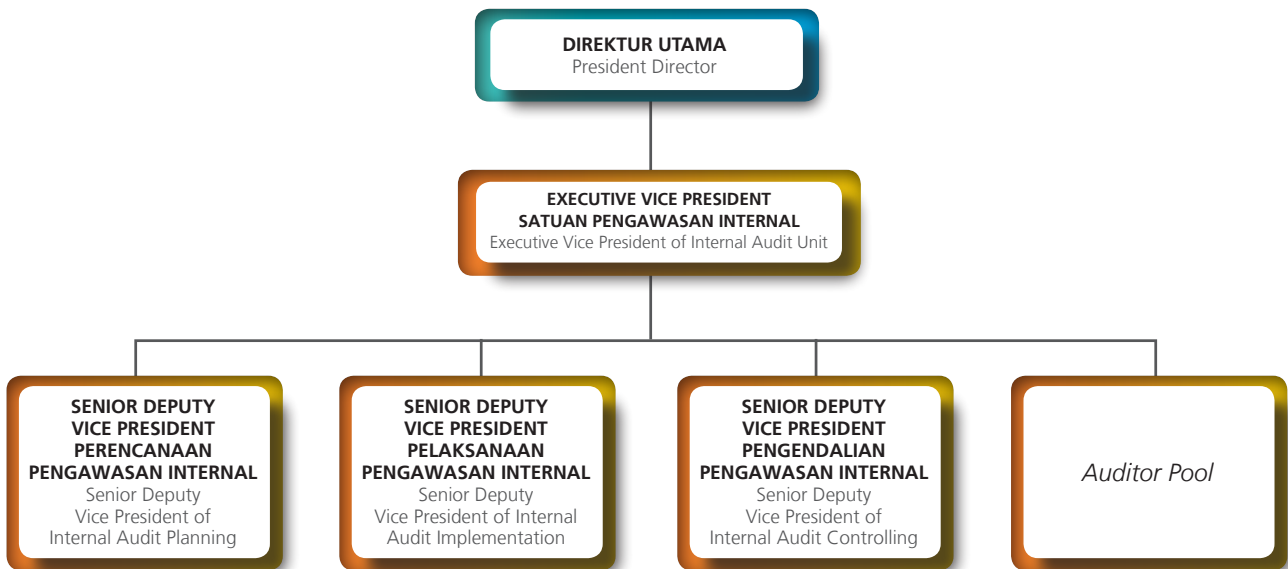
Internal Audit Unit Division is a corporate governance organ that performs internal audit function as mandated by Law No. 11 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER.01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as renewed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Struktur Organisasi Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Utama. Secara struktural, Divisi Satuan Pengawasan Internal berada di bawah wewenang Direktur Utama. Berikut ini merupakan struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Internal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Struktur Organisasi Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC



PENANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN EVP SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang *Executive Vice President* (EVP) Satuan Pengawasan Internal IPC yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Direktur Utama dapat memberhentikan EVP Satuan Pengawasan Internal dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, jika tidak memiliki kecakapan dan persyaratan sesuai kompetensinya. EVP Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab penuh terhadap kinerja dalam unit kerjanya.

ORGANIZATION STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Organization Structure of Internal Audit Unit Division

The Internal Audit Unit Division is established based on decree of the President Director. Structurally, the Internal Audit Unit Division works under the authority of the President Director. Below is the organization structure of the Internal Audit Unit Division as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree Number OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 regarding Organization Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Organization Structure of IPC Internal Audit Unit Division

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EVP INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit Division is led by an Executive Vice President (EVP) of Internal Audit Unit of IPC who is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with approval from the Board of Commissioners.

The President Director may dismiss the EVP Internal Audit Unit with approval from the Board of Commissioners, if the EVP concerned does not meet the required skill and competency requirements. The EVP Internal Audit Unit directly reports to the President Director and is fully responsible for the performance of its work unit.



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Juli 2020, posisi EVP Satuan Pengawasan Internal dijabat oleh Bapak Osman Syarif. Adapun profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

EVP Satuan Pengawasan Internal dapat meminta bantuan tenaga ahli atau auditor dari pihak lain jika Sumber Daya Manusia atau kompetensi yang dimiliki tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam mendukung suatu penugasan tertentu.

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Persyaratan Auditor di Divisi Satuan Pengawasan Internal

Pengangkatan dan pemberhentian Auditor harus mempertimbangkan kompetensi, kriteria, dan penilaian/pendapat EVP Satuan Pengawasan Internal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Auditor/Pekerja di Divisi Satuan Pengawasan Internal Perseroan antara lain:

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, jujur, dan obyektif dalam menjalankan tugas;
2. Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan Perseroan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan Perseroan;
4. Memiliki keahlian mengenai penerapan standar audit internal, prosedur audit, dan teknik audit;
5. Selain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya, pekerja harus memiliki pengetahuan dan keahlian lainnya yaitu *Analytical/Critical Thinking*, *Communication Skill*, *Proses Bisnis Perusahaan*, *Accounting (general)*, dan *Information Technology (general)*.

Rekrutmen auditor/pekerja di Divisi Satuan Pengawasan Internal berasal dari sumber daya internal atau eksternal Perseroan melalui metode rekrutmen yang sesuai ketentuan dan kebijakan Perseroan.

KEANGGOTAAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Per 31 Desember 2020, Divisi Satuan Pengawasan Internal terdiri dari seorang *Executive Vice President* (EVP), 3 (tiga) orang *Senior Deputy Vice President* (SDVP), 20 (dua puluh) orang auditor, dan 6 (enam) *officer*, dengan uraian sebagai berikut:

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. KP.10.02/14/7/4/MTA/UT/PI.II-2020 dated July 14, 2020, the EVP Internal Audit Unit is Mr. Osman Syarif. His complete profile is available in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

EVP Internal Audit Unit may request assistance from experts or auditors and other parties if the existing Human Capital competency is inadequate to obtain sufficient information to support certain assignments.

Appointment, Dismissal, and Requirements of Auditor in Internal Audit Unit Division

The appointment and dismissal of Auditor shall consider the competency, criteria, and evaluation/opinion of EVP Internal Audit Unit. The requirements for an Auditor/Employee in the Internal Audit Unit Division are as follows:

1. Having integrity and professional, honest, and objective attitude in performing duties;
2. Having expertise in risk management, internal control, and good corporate governance;
3. Having knowledge about Company regulations and relevant regulations related to the Company's management;
4. Having expertise in the implementation of internal audit standards, audit procedures, and audit techniques;
5. In addition to the knowledge and expertise relevant to the field of work, the employee shall have knowledge and capability in *Analytical/Critical Thinking*, *Communication Skill*, *Corporate Business Process*, *Accounting (general)*, and *Information Technology (general)*.

Auditor/employee in the Internal Audit Unit Division may be recruited internally or externally through recruitment methods as stipulated by Company provisions and policies.

MEMBERSHIP OF INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

As of December 31, 2020, the Internal Audit Unit Division consisted of one *Executive Vice President* (EVP), 3 (three) *Senior Deputy Vice Presidents* (SDVP), 20 (twenty) auditors, and 6 (six) *officers* with description as follows:

Jumlah Karyawan Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC Tahun 2020

Total Employees of IPC Internal Audit Unit Division in 2020

No.	Jabatan / Position	Jumlah (orang) / Total (people)
1.	Executive Vice President (EVP)	1
2.	Senior Deputy Vice President (SDVP)	3
3.	Senior Auditor	4
4.	Junior Auditor	8
5.	Assisstant Auditor	8
6.	Senior Officer	2
7.	Junior Officer	2
8.	Senior Assisstant Officer	2
Total		30

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Satuan Pengawasan Internal mencakup semua area dan kegiatan operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, EVP Satuan Pengawasan Internal memformulasikan lingkup pekerjaan dan meminta persetujuan kepada Direktur Utama.

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Satuan Pengawasan Internal antara lain:

1. Memberikan jasa *assurance* dan/atau konsultasi terkait kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan *governance*, antara lain:
 - a. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
 - b. Interaksi dengan berbagai unit kerja dan pihak eksternal sesuai kebutuhan dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku;
 - c. Informasi keuangan, manajerial, dan operasional yang signifikan, akurat, andal, dan tepat waktu;
 - d. Tindakan pegawai telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku;
 - e. Sumber daya Perseroan diperoleh secara ekonomis dan digunakan secara efisien;
 - f. Tujuan strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tercapai secara optimal;
 - g. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan;
 - h. Regulasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah diidentifikasi dan dikelola secara wajar.
2. Mengevaluasi kinerja dan kepatuhan Perseroan.
3. Pemeriksaan khusus atau audit investigasi berdasarkan pemeriksaan sebelumnya atau menindaklanjuti laporan dari *whistleblower* atas perintah Direktur Utama.

SCOPE OF WORK OF INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

The scope of work of the Internal Audit Unit Division covers all areas and operational activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). To perform the duties and responsibilities, EVP Internal Audit Unit formulates the scope of work and request for approval from the President Director.

The scope of work of the Internal Audit Unit Division is as follows:

1. Provide assurance and/or consultation on the adequacy and effectiveness of internal control, risk management, and governance, namely:
 - a. Risks have been identified and managed properly;
 - b. Interaction with various work units and external parties is as needed complies with prevailing governance standards;
 - c. Financial, managerial and operational information is significant, accurate, reliable and timely;
 - d. Employee actions comply with applicable policies, standards, procedures and laws;
 - e. Company resources are obtained economically and used efficiently;
 - f. The strategic objectives of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are achieved optimally;
 - g. The quality of internal control is continuously improved;
 - h. Regulations that have a significant effect on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are identified and managed properly.
2. Evaluating the performance and compliance of the Company.
3. Special audits or investigative audits based on previous audits or following up on reports from whistleblowers at the instruction of the President Director.



4. Memberikan jasa konsultasi lainnya yang dibutuhkan oleh Manajemen.
5. Dalam rangka mewujudkan Visi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu “Menjadi fasilitator perdagangan kelas dunia dengan mengintegrasikan ekosistem logistik”, dengan misi sebagai “pengelola pelabuhan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional” yang dilandasi *value* Perseroan.

Pada tahun 2020, *value* Perseroan mengalami perubahan dari “CINTA” (*Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, dan Action*) menjadi *core values* BUMN, yaitu “AKHLAK” (*Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif*). *Value* Perseroan tersebut diwujudkan melalui *Corporate Roadmap 2020 – 2024*, yang terbagi dalam beberapa fase yaitu *World Class, Strengthening Value Chain Expansion, Value Chain Integration, dan World Class Trade Facilitator*, telah dibentuk Aliansi Auditor Internal IPC Group, dengan tujuan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan sinergi antar Auditor Internal IPC Group;
- b. Mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Perseroan;
- c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Auditor Internal IPC Group melalui forum berbagai pengetahuan/pengalaman;
- d. Berkontribusi dalam pemberian masukan dan pengembangan pada tingkat tertinggi terkait metode, teknik, dan prosedur audit internal (*state of the art*) seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pemangku kepentingan.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Perseroan telah memiliki Piagam Satuan Pengawasan Internal yang menjadi pedoman kerja dari Divisi Satuan Pengawasan Internal Perseroan dalam pelaksanaan audit. Piagam tersebut merupakan salah satu bentuk penjabaran dari Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020.

Adapun isi dari Piagam Satuan Pengawasan Internal Perseroan meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Visi, Misi, Tata Nilai Strategis
- Bab III : Kode Etik

4. Providing other consulting services required by Management.
5. In order to realize the Vision of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), namely “To become a world-class trade facilitator by integrating the logistics ecosystem”, with the mission of being a “port manager that maximizes added value for all stakeholders continuously in order to improve the national economy” based on the Company’s values.

In 2020, the Company’s values changed from “CINTA” (*Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, and Action*) to the SOE core values, namely “AKHLAK” (*Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative*). These corporate values are realized through the *Corporate Roadmap 2020 – 2024* that is divided into several phases, namely *World Class, Strengthening Value Chain Expansion, Value Chain Integration, and World Class Trade Facilitator*, the IPC Group Internal Auditors Alliance has been established with the following objectives:

- a. Developing synergy among IPC Group Internal Auditors;
- b. Supporting the improvement of the effectiveness, efficiency and accountability of the Company;
- c. Improving the competency and professionalism of IPC Group Internal Auditors through forum for various knowledge/experiences;
- d. Contributing to providing input and development at state-of-the-art level in terms of internal audit methods, techniques and procedures in line with technology developments and stakeholder demands.

STATEMENT OF INTERNAL AUDIT CHARTER AVAILABILITY

The Company has an Internal Audit Charter that provides the working guidelines for the Internal Audit Unit Division in performing audit. The charter is an implementation of Good Corporate Governance guidelines and was stipulated on February 24, 2020.

The contents of the Company’s Internal Audit Charter are as follows:

- Chapter I : Introduction
- Chapter II : Vision, Mission, Strategic Values
- Chapter III : Code of Conduct

Bab IV : Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Akuntabilitas

Bab V : Pengorganisasian

Bab VI : Program Kerja Pengawasan Tahunan

Bab VII : Pelaporan dan *Monitoring*

Bab VIII : Komunikasi Satuan Pengawasan Internal

Bab IX : Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Internal

Bab X : Penutup

Chapter IV : Functions, Duties, Responsibilities, Authority and Accountability

Chapter V : Organization

Chapter VI : Annual Audit Work Program

Chapter VII : Reporting and Monitoring

Chapter VIII : Communication of Internal Audit Unit

Chapter IX : Evaluation of Internal Audit Unit Charter

Chapter X : Closing

Isi dan materi dari Piagam Satuan Pengawasan Internal ini dapat direvisi secara berkala 2 (dua) tahunan dan/atau sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

The contents and material of this Internal Audit Charter are reviewed every 2 (two) years and/or in accordance with the demands of the development and needs of the Company while referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER.01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises which has been updated by Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER.01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Setiap adanya perubahan Piagam Satuan Pengawasan Internal, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komite Audit dan wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direktur Utama dan Komisaris.

Any changes to the Internal Audit Charter shall be consulted with the Audit Committee beforehand and revalidated by the President Director and Board of Commissioners.

KAIDAH ACUAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC harus mematuhi dan mengacu pada:

1. Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Internal;
2. Kode Etik
3. Standar Profesi Audit Internal yang berlaku, antara lain *International Professional Practices Framework of Internal Auditing* (IPPF);
4. Peraturan-peraturan pengawasan internal yang berlaku di Perseroan; dan
5. Peraturan-peraturan internal lainnya yang terkait dan berlaku di Perseroan.

REFERENCE OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

In carrying out its duties, IPC Internal Supervisory Unit Division must comply with and refer to:

1. Principles of Internal Audit Professional Practice;
2. Code of Conduct;
3. Applicable Internal Audit Professional Standards, including the International Professional Practices Framework of Internal Auditing (IPPF);
4. Internal audit regulations that apply in the Company; and
5. Other internal regulations that are relevant and applicable in the Company.

FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN, DAN AKUNTABILITAS DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Fungsi Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal berfungsi untuk:

1. Membantu Direktur Utama agar dapat bekerja secara efektif menjalankan visi dan misi Perseroan; dan

FUNCTIONS, DUTIES, RESPONSIBILITIES, AUTHORITY AND ACCOUNTABILITY OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Functions of the Internal Audit Unit Division

The Internal Audit Unit Division has the following functions:

1. Assist the President Director to work effectively in carrying out the vision and mission of the Company; and



2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja operasional, prosedur, dan sistem pengendalian internal di semua unit kegiatan Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Satuan Pengawasan Internal

Tugas dan tanggung jawab Divisi Satuan Pengawasan Internal adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola Perusahaan;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran;
3. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Program Kerja dimaksud dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit;
4. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan;
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Memonitor, menganalisis, dan melaporkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi audit;
8. Melakukan audit khusus atas aktivitas yang terindikasi kecurangan (*fraud*) dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Melakukan rapat koordinasi secara periodik dengan Komite Audit;
10. Membuat program penilaian untuk mengevaluasi mutu pelaksanaan audit yang dilakukan;
11. Berkoordinasi dengan audit eksternal;
12. Melaksanakan audit terhadap objek-objek tertentu atas perintah Direktur Utama;
13. Memonitor, menganalisis, dan melaporkan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.

2. Analyze and evaluate the operational performance, procedures and internal control systems in all units of the Company's activities.

In carrying out its functions, the Internal Control Unit Division is directly responsible to the President Director of the Company.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit Division

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit Division are as follows:

1. Evaluating the adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance;
2. Preparing a risk-based audit program and submitting it to Board of Commissioners, also to Audit Committee for consideration and suggestions;
3. Implementing the Annual Audit Work Program approved by President Director and informing the work program to Board of Directors and Board of Commissioners, also to Audit Committee;
4. Maintaining auditor professionalism by providing sufficient knowledge, skills and experience, as well as the necessary certifications;
5. Providing recommendations and information about the audited activities in all work units within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Reporting the audit results to President Director and Board of Commissioners;
7. Monitoring, analyzing and reporting the audit recommendations follow-up results;
8. Conducting special audits on suspected fraudulent activities, and reporting the results of such investigations to President Director and Board of Commissioners;
9. Conducting coordination meetings periodically with the Audit Committee;
10. Creating an assessment program to evaluate the quality of audit performed;
11. Coordinating with external audit;
12. Implementing Probity Audit of certain objects on the orders of President Director;
13. Monitoring, analyzing, and reporting the follow-up on audit findings by internal and external auditors and reporting the results to President Director with copies submitted to Board of Commissioners, particularly the Audit Committee.

Kewenangan Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal berwenang untuk:

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
2. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Direktorat/Divisi/ Unit/ Satuan Kerja terhadap dokumen (*hard copy* dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit;
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih objek pemeriksaan, menemukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
4. Meminta bantuan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada audit dan tenaga ahli lainnya, yang berasal dari pihak internal maupun eksternal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
5. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama;
6. Terhadap adanya hambatan yang membatasi wewenang dan mempersulit pelaksanaan pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal wajib melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama.

Divisi Satuan Pengawasan Internal tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas manajemen, antar lain:

1. Menjalankan fungsi operasional secara langsung untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun Entitas Anak Perusahaan;
2. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal;
3. Memberikan pengarahan/perintah secara langsung kepada karyawan di luar personil Satuan Pengawasan Internal, kecuali karyawan tersebut diperbantukan di Satuan Pengawasan Internal;
4. Bertanggung jawab langsung terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi obyek pemeriksaan;
5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit;
6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi milik obyek pemeriksaan.

Authority of the Internal Audit Unit Division

The Internal Audit Unit Division is authorized to:

1. Arrange, change and implement internal audit policies including determining the audit procedures and scope of implementation;
2. Have unlimited access to all directorates/divisions/ units/work units documents (*hard copy* and electronic), property, and personnel related to audit assignments;
3. Allocate resources, determine the frequency of audit, select audit objects, audit scope, and determine the audit techniques needed to achieve the audit objectives;
4. Request assistance needed during the audit from the auditee and other experts from internal and external parties of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
5. Have direct communication access to President Director;
6. Report any obstacles that limit the Internal Audit Unit authority and make it difficult to carry out the audit to President Director.

The Internal Audit Unit does not have the authority to carry out, or the responsibility for the activities audited, as follows:

1. Conducting operational functions directly for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries;
2. Starting and approving transactions that are not related to the Internal Audit Unit;
3. Providing directives/orders directly to employees outside the Internal Audit Unit, unless the employee is seconded to the Internal Audit Unit;
4. Being directly responsible for personnel, departments or activities that are the object of audit;
5. Dismissing employees or dissolving the department related to audit findings;
6. Arranging and implementing procedures, systems or operational activities that belong to the audit object.



Akuntabilitas Divisi Satuan Pengawasan Internal

Akuntabilitas Divisi Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Menyampaikan dan melaporkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) termasuk anggarannya kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam RKAP tahunan;
2. Melaporkan hasil pengawasan internal, penilaian, dan evaluasi kepada manajemen dalam bentuk tertulis dan lisan di dalam rapat formal ataupun melalui mekanisme lainnya tentang status dan hasil pelaksanaan PKPT;
3. Wajib menyampaikan tembusan Laporan Hasil Penugasan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit;
4. Menyampaikan Laporan QAIP *Internal Assessment* secara periodik tahunan dan *External Assessment* setiap 5 (lima) tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

KODE ETIK DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Independensi dan Objektivitas

1. Seluruh auditor di Satuan Pengawasan internal dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, dan Kerja Sama Operasi yang dapat mengganggu independensi Satuan Pengawasan Internal;
2. Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal dilarang merangkap jabatan dari kegiatan operasional di lingkungan Perusahaan, baik Induk maupun Entitas Anak Perusahaan yang dapat menimbulkan *conflict of interest*;
3. Seluruh personil di Satuan Pengawasan Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif dan independen, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
4. EVP Satuan Pengawasan Internal harus memberikan pernyataan kepada Dewan Komisaris, minimal setahun sekali, terkait dengan pemenuhan sikap independensi organisasi dari Satuan Pengawasan Internal.

Prinsip Dasar

Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal diharapkan dan menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas
Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal

Accountability of the Internal Audit Unit Division

Accountability of the Internal Audit Unit Division in implementing its duties is as follows:

1. Deliver and report the Annual Audit Work Program including (PKPT) its budget to President Director to be approved and included in the Annual RKAP;
2. Report the results of internal audit, assessment, and evaluation to the management in writing and verbally at formal meetings or through other mechanisms related to the status and results of PKPT implementation;
3. Submit a copy of duty report to the Board of Commissioners, particularly Audit Committee;
4. Deliver Internal Assessment QAIP Report periodically every year and External Assessment every 5 (five) years to the President Director and Board of Commissioners.

CODE OF CONDUCT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Independence and Objectivity

1. All auditors in Internal Audit Unit are prohibited from being involved in decisions and operational activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), subsidiaries, affiliated companies, and joint operations that could disrupt the independence of Internal Audit Unit;
2. All auditors in Internal Audit Unit are prohibited from concurrently holding positions in operational activities within the parent company or subsidiaries that could lead to a conflict of interest;
3. All personnel in Internal Audit Unit shall have an objective and independent mental attitude, be impartial and avoid the possibility of conflicts of interest.
4. EVP Internal Audit Unit shall give a statement to the Board of Commissioners at least once a year confirming the organizational independence of the Internal Audit Unit.

Basic Principles

All auditors in Internal Audit Unit are expected to conform to the following principles:

1. Integrity
Integrity of internal auditor builds the foundation of trust in the judgment of internal auditor.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

2. Objectivity

Internal auditor demonstrates professional objectivity at the highest level in obtaining, evaluating, and communicating information on the audited activity or process. Internal auditor makes balanced judgments of every relevant matter and is not influenced by self-interests or other people in making judgments.

3. Confidentiality

Internal auditor respects the value and ownership of information received by not disclosing it without a valid authority, unless required by law or professional obligations.

4. Competency

Internal auditor applies the knowledge, skills, and experience needed in the providing internal audit services.

ATURAN PERILAKU AUDITOR INTERNAL

Aturan Perilaku Auditor Internal yang tertuang dalam Piagam Satuan Pengawasan Internal diadopsi dari Aturan Perilaku Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, yang meliputi:

1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab.
2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
5. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apa pun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
6. Tidak boleh menerima apa pun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
7. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.
8. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
9. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

INTERNAL AUDITOR CODE OF CONDUCT

The Internal Auditor Code of Conduct as stated in the Internal Audit Charter is adopted from the Internal Code of Conduct issued by the Institute of Internal Auditors, which includes:

1. Perform work honestly, carefully and responsibly.
2. Comply with laws and make disclosures as required by law or the profession.
3. Not knowingly engage in illegal activities or perform activities that may discredit the internal audit profession or organization.
4. Respect and support legitimate and ethical organizational goals.
5. Not participate in any activity or relationship that could, or should reasonably be suspected of, hinder the internal auditor's fair judgment. This includes any activity or relationship that results in a conflict of interest with the organization.
6. Not accept anything that can or should be suspected to interfere with professional judgment.
7. Disclose all known material facts, which may distort the report on the activities under review when not disclosed.
8. Be careful in using and safeguarding the information obtained in performing duties.
9. Not use information for personal gain, or in any way that is against the law or detrimental to the organization's legitimate and ethical objectives.



10. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya.
11. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
12. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

10. Only engage in the provision of service which requires the knowledge, skills and experience being possessed.
11. Provide internal audit services in accordance with the International Standards for Internal Audit Professional Practice (Standards).
12. Constantly improve expertise, effectiveness and quality of services on an ongoing basis.

KOMUNIKASI DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

COMMUNICATION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Komunikasi dengan Komite Audit

Communication with the Audit Committee

1. Divisi Satuan Pengawasan Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit secara periodik.
2. Secara berkala, Divisi Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit melakukan rapat koordinasi dan membahas, antara lain efektivitas pengendalian intern, laporan audit, *monitoring* tindak lanjut audit, program kerja audit, hambatan-hambatan pelaksanaan audit dan isu-isu strategis Perseroan.

1. The Internal Audit Unit Division periodically submits the Audit Result Report to the Board of Commissioners, particularly Audit Committee.
2. The Internal Audit Unit Division and the Audit Committee periodically hold coordination meetings and discuss, among others, the effectiveness of internal control, audit reports, audit follow-up monitoring, audit work programs, obstacles to audit implementation and strategic issues of the Company.

Komunikasi dengan Auditor Eksternal

Communication with External Auditors

Divisi Satuan Pengawasan Internal dapat berkoordinasi dengan auditor eksternal atas persetujuan Direktur Utama untuk memperlancar proses pemeriksaan, di antaranya memberikan akses Laporan Hasil Pemeriksaan Internal, mengkomunikasikan keperluan auditor eksternal ke Direktorat/Divisi/Cabang/Unit/Satuan Kerja terkait, serta *support* data lainnya dalam mendukung kecukupan proses pemeriksaan.

The Internal Audit Unit Division may coordinate with external auditors with the approval of the President Director to streamline the audit process, including in providing access to Internal Audit Results Reports, communicating the needs of the external auditors to related Directorates/Divisions/Branches/Units/Work Units, as well as providing other data to support the adequacy of audit process.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Perseroan memberikan program pengembangan kompetensi bagi Pekerja Divisi Satuan Pengawasan Internal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan terhadap teknis audit. Berikut ini merupakan tabel yang menjabarkan program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh EVP Satuan Pengawasan Internal IPC sepanjang tahun 2020.

The Company provides competency development programs for employees of the Internal Audit Unit Division in order to increase their knowledge, skills and insight into audit techniques. The following table describes the capability improvement program attended by EVP Internal Audit Unit of IPC throughout 2020.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi EVP Satuan Pengawasan Internal IPC Tahun 2020

Competency Development Program of EVP Internal Audit Unit of IPC in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Training Subject	Waktu dan Tempat / Time and Venue	Penyelenggara / Organizer
Osman Syarif	EVP Satuan Pengawasan Internal / EVP Internal Audit Unit	<i>Delegate & Monitor Your Remote Team Member Effectively (BOD-1) Batch II</i> ISO 37001:2016 Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan / ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness	2 September 2020 secara Daring / September 2, 2020 15 Oktober 2020 secara Daring / October 15, 2020	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Selain mengikuti program pengembangan kompetensi, Pekerja Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC juga telah memiliki Sertifikasi Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Audit Internal. Adapun daftar Sertifikasi Profesi Audit Internal yang telah dimiliki oleh Pekerja Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sertifikasi Profesi Audit Internal Divisi Satuan Pengawasan Internal IPC Tahun 2020

Nama Sertifikasi / Certificate Name	Instansi Penerbit / Issuer	Jumlah Karyawan (orang) / Total Employees (people)
Qualified Internal Auditor (QIA)	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DSQIA) / Qualified Internal Auditor Certification Board (DSQIA)	16
Certified Internal Auditor (CIA)	Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia	1
Jumlah / Total		17

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

In addition to attending competency development programs, employees of IPC Internal Audit Unit Division also have Internal Audit Professional Certification issued by Internal Audit Professional Organizations. The Internal Audit Professional Certifications possessed by employees of IPC Internal Audit Unit Division in 2020 are described in the following table.

Internal Audit Professional Certification of IPC Internal Audit Unit Division in 2020

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan kegiatan Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) hingga triwulan IV tahun 2020 adalah:

- Realisasi pelaksanaan audit sampai dengan triwulan IV tahun 2020, yaitu:
 - Audit Rutin Kantor Pusat dan 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan, yaitu Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Cirebon, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, Banten, dan Tanjung Priok.
 - Audit Performansi dan Kepatuhan di 12 (dua belas) Anak Perusahaan, yaitu PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, PT EPI, PT RSP, KSO TPK Koja, PT MTI, PT Rukindo, PT PPI, PT PTP, PT IPC TPK, dan PT JPPI.
 - Audit Khusus di PT PII dan Cabang Pelabuhan Jambi.
- Realisasi pelaksanaan jasa konsultatif pada triwulan IV tahun 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penugasan, dengan uraian sebagai berikut:

DUTY REPORT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION

Activity implementation by the Internal Audit Unit Division until Q4/2020 is as follows:

- Audit implementation until Q4/2020 is as follows:
 - Regular Audit at Head Office and 12 (twelve) Port Branches, namely Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Cirebon, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, Banten, and Tanjung Priok.
 - Performance and Compliance Audit at 12 (twelve) Subsidiaries, namely PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, PT EPI, PT RSP, KSO TPK Koja, PT MTI, PT Rukindo, PT PPI, PT PTP, PT IPC TPK, and PT JPPI.
 - Special Audit at PT PII and Jambi Port Branch.
- Realization of consultative services in Q4/2020 constituted 3 (three) assignments as described below:

Pelaksanaan Kegiatan Konsultatif Tahun 2020

Consultative Activity Implementation in 2020

No.	Penugasan Evaluasi / Evaluation Assignment	Nomor Surat Perintah / Instruction Letter Number	Waktu Pelaksanaan / Implementation Time	Nomor Laporan / Report Number
1.	Evaluasi Dokumen <i>Joint Procurement</i> di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Evaluation of Joint Procurement document of Pelabuhan Indonesia II (Persero).	KP.20.01/13/11/1/AIR/SPI/PII-II-20	13 – 26 November 2020 / November 13-26, 2020	HK.01/4/12/1/SPI/UT-20 tanggal 4 Desember 2020 / HK.01/4/12/1/SPI/UT-20 dated December 4, 2020
2.	Evaluasi Terkait Tindak Lanjut Pencairan dan Pembayaran Asuransi Purna Jabatan Mantan Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Evaluation on Follow-Up on Liquidation and Payment of Post-Employment Insurance of Former Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	KP.20.01/10/11/1/AIR/SPI/PII-II-20	10 – 26 November 2020 / November 10-26, 2020	PW.0.02/1/12/1/AIP/SPI-20 tanggal 1 Desember 2020 / PW.0.02/1/12/1/AIP/SPI-20 dated December 1, 2020



No.	Penugasan Evaluasi / Evaluation Assignment	Nomor Surat Perintah / Instruction Letter Number	Waktu Pelaksanaan / Implementation Time	Nomor Laporan / Report Number
3.	Pendapat/Masukan terkait Masa Berlaku Uang Pesangon / Opinion/ Input on Severance Pay Validity Period	Disposisi EVP SPI terhadap Nota Dinas VP Layanan SDM No. KP.21.06/23/11/1/LAD/LAS/SDU-20/23-NOV-20 tanggal 23 November 2020 / Disposition of EVP Internal Audit Unit on Official Memo of VP HC Services No. KP.21.06/23/11/1/LAD/LAS/SDU-20/23-NOV-20 dated November 23, 2020	4 Desember 2020 / December 4, 2020	HK.02/10/12/1/SPI/SPI/UT-20 tanggal 10 Desember 2020 / HK.02/10/12/1/SPI/SPI/UT-20 dated December 10, 2020

3. *Monitoring progress* tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:
- Dari LHA SPI pada Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat:
 - Tahun 2011 – 2018 yang telah selesai 99 persen dari 4.950 rekomendasi;
 - Tahun 2019 yang telah selesai 83 persen dari 626 rekomendasi.
 - Dari LHA SPI pada Anak Perusahaan:
 - Tahun 2011 – 2018 yang telah selesai 95 persen dari 392 rekomendasi;
 - Tahun 2019 yang telah selesai 73 persen dari 305 rekomendasi.
 - LHA dari Audit Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Secara keseluruhan, tindak lanjut atas temuan BPK yang masih harus diselesaikan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah 72 rekomendasi.
3. Audit Result Report (LHA) follow-up progress has been monitored with results as follows:
- From LHA of IAU at Port Branches and Head Office:
 - From 2011 – 2018, 99 percent of 4,950 recommendations were completed;
 - In 2019, 83 percent of 626 recommendations were completed.
 - From LHA of IAU at Subsidiaries:
 - From 2011 – 2018, 95 percent of 392 recommendations were completed;
 - In 2019, 73 percent of 305 recommendations were completed.
 - LHA of External Audit, namely the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK):
In general, the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) still have to follow up on 72 recommendations from BPK findings.
4. Terkait pandemi Covid-19 di mana saat ini sebagian besar *auditee* menerapkan kebijakan *Work From Home* di lingkungannya, sehingga Tim Audit SPI telah melakukan penyesuaian dalam proses audit antara lain:
- Mengoptimalkan media *online* serta implementasi Aplikasi e-Audit (*Audit Management System & Data Analytic*) sebagai *tools* para *auditor* untuk mendukung pelaksanaan audit secara *online*.
 - Namun pelaksanaan audit secara *online* tersebut, Tim Auditor SPI masih mengalami kendala khususnya terkait:
 - Kesiapan infrastruktur TI pada masing-masing Anak Perusahaan;
 - Supply* dokumen/data, baik secara *online* maupun *offline*;
 - Beberapa Anak Perusahaan (PT EDII dan PT ILCS) belum menerapkan *Enterprise Resources Planning* (ERP), AKA *Oracle*;
 - Hambatan dalam melakukan diskusi dan wawancara;
 - Pembuktian fisik dalam melakukan observasi; dan
 - Berkurangnya *awareness auditee* dalam proses audit.
4. In light of Covid-19 pandemic, where currently most of the auditees are working from home, the IAU Audit Team adjusted the audit process as follows:
- Optimizing online media and implementation of e-Audit application (Audit Management System & Data Analytic) as tools for the auditors to support online audit implementation.
 - Despite online audit implementation, the IAU Auditor Team faced obstacles related to:
 - TI infrastructure readiness in each Subsidiary;
 - Online and offline document/data supply;
 - Several subsidiaries (PT EDII and PT ILCS) have not implemented Enterprise Resources Planning (ERP), AKA Oracle;
 - Obstacles in conducting discussion and interview;
 - Physical evidence in conducting observation; and
 - Lack of auditee awareness in audit process.

c. Penarikan data terkait kegiatan audit, masih bersifat tidak langsung, sehingga penggunaan *data analytics* masih belum optimal.

c. Data retrieval related to audit activity remained indirect, so that data analytics usage was not optimal.

REALISASI RENCANA KERJA MANAJEMEN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2020

Progres realisasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) sampai dengan triwulan IV tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut:

REALIZATION OF MANAGEMENT WORK PLAN OF INTERNAL AUDIT UNIT DIVISION IN 2020

The Management Work Plan (RKM) realization progress of Internal Audit Unit Division until Q4/2020 is as follows:

Realisasi RKM Divisi SPI IPC Tahun 2020

RKM Realization of IPC IAU Division in 2020

No.	Rencana Program / Program Plan	% Akumulasi / % Accumulation	Deskripsi Progres / Progress Description	Next Step
1.	Audit.	100	Menyelesaikan Audit Rutin Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan. / Completing regular audit at Head Office and 12 Port Branches.	
2.	Audit Khusus dan Audit Anak Perusahaan. / Special audit and subsidiary audit.	100	Menyelesaikan Audit Performansi dan Kepatuhan di 12 (dua belas) Anak Perusahaan serta Audit Khusus di PT PII dan Cabang Jambi. / Completing performance and compliance audit at 12 (twelve) subsidiaries and special audit at PT PII and Jambi Branch.	
3.	Reporting Laporan Hasil Audit (LHA). / Audit Result Report (LHA) submission.	100	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian 6 LHA <i>carry over</i> 2019 : Cabang Pontianak, Cabang Panjang, Cabang Tanjung Priok, Cabang Palembang, Cabang Pontianak, Kantor Pusat, dan Pembangunan & Pengembangan Terminal Kijing. / Completing 6 carry over LHA from 2019: Pontianak Branch, Panjang Branch, Tanjung Priok Branch, Palembang Branch, Pontianak Branch, Head Office, and Kijing Terminal Construction & Development. Penyelesaian LHA 11 Cabang Pelabuhan, yaitu Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Cirebon, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, dan Banten, serta Kantor Pusat. / Completing 11 Port Branches LHA, namely Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Cirebon, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, Banten, and Head Office. Penyelesaian LHA 9 Audit Performansi Anak Perusahaan, yaitu : PT RSP, PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, KSO TPK Koja, PT MTI, dan PT Rukindo. / Completing 9 subsidiary performance audit LHA, namely PT RSP, PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, TPK Koja JO, PT MTI, and PT Rukindo. Penyelesaian LHA 2 Audit Khusus, yaitu PT PII dan Cabang Jambi. / Completing 2 special audit LHA, namely PT PII and Jambi Branch. 	Finalisasi 4 LHA (PT PTP, PT IPC TPK, PT JPPI, dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok). / Finalization of 4 LHA (PT PTP, PT IPC TPK, PT JPPI, and Tanjung Priok Port Branch)
4.	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Audit. / Monitoring of audit recommendation follow-up.	100	Realisasi progres tindak lanjut LHA tahun 2019 yang telah selesai dari target yang ditetapkan dalam KPI tahun 2020. / Realization of 2019 LHA follow-up progress which has been completed from the target set in 2020 KPI.	
5.	Sinergi Bidang Pengawasan pada IPC Group. / Supervision synergy in IPC Group.	85,5	Draft MoU Sinergi Pengawasan dalam proses sosialisasi ke Anak-Anak Perusahaan. / MoU draft on supervision synergy in dissemination process to subsidiaries.	Draft MoU Sinergi Pengawasan yang tersosialisasi dikirim ke Divisi PAC untuk proses lebih lanjut penandatanganan para pihak. / Disseminated MoU draft on supervision synergy was sent to PAC Division to be signed by the parties.
6.	Koordinasi Triwulan dengan Direksi dan Komisaris. / Quarterly coordination with Board of Directors and Board of Commissioners.	100	Koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan detail waktu dan tempat. / Coordination with relevant parties for the implementation time and venue.	
7.	Penyusunan Audit Universe berdasarkan Review Risk Profile dari Manajemen Risiko. / Audit universe preparation based on risk profile review from Risk Management.	100	Telah dilakukan penyusunan berdasarkan <i>risk profile</i> yang dikirim oleh Manajemen Risiko, dan diolah untuk PKPT 2021. / Preparation based on risk profile sent by Risk Management and processing for 2021 PKPT.	Audit Universe masuk ke dalam Lampiran PKPT. / Audit universe included in PKPT attachment.
8.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. / Annual Audit Work Program preparation.	100	PKPT 2021 telah disahkan oleh Direktur Utama. / 2021 PKPT validated by President Director.	
9.	Peningkatan Kompetensi Auditor. / Auditor competency development.	100	Pelatihan Dasar Audit untuk Auditor Baru dan pengikutsertaan para auditor untuk mengikuti Webinar masalah audit. / Basic audit training for new auditors and participation of auditors in audit issues webinar.	Pelatihan Audit Tingkat Lanjutan dan Manajerial untuk Sertifikasi QIA. / Advanced level and managerial audit training for QIA certification.



No.	Rencana Program / Program Plan	% Akumulasi / % Accumulation	Deskripsi Progres / Progress Description	Next Step
10.	Program <i>Study Banding</i> dengan instansi terkait/perusahaan lain. / Comparative study program with relevant institutions/other companies.	100	Telah dilaksanakan <i>Study Banding</i> dengan SPI Pelindo IV. / Conducted comparative study with IAU of Pelindo IV.	Evaluasi Materi <i>Study Banding</i> . / Comparative study material evaluation.
11.	Pengembangan e-Audit (<i>Audit Management System & Data Analytic</i>). / e-Audit development (Audit Management System & Data Analytic).	100	Sudah sesuai dengan target akhir tahun 2020 sebesar 50 persen. / In accordance with end of 2020 target at 50 percent.	<i>Commissioning & Tasting</i> pekerjaan. / Work commissioning & tasting.
12.	<i>Review SPO SPI</i> . / IAU SPO Review	100	SPO telah ditandatangani Direktur Utama dan telah diajukan registrasi ke Divisi Kendali Mutu. / SPO signed by President Director and registered to Quality Control Division.	Pengesahan SPO. / SPO validation.
13.	Peningkatan Kapabilitas Fungsi Internal Audit pada Level 3 / Internal Audit Function Capability Improvement Level 3	100	Sudah sesuai dengan target akhir tahun 2020. / In accordance with end of 2020 target.	
14.	Pengendalian Internal IPC berbasis COSO / COSO-based internal control at IPC	100	SK telah disahkan oleh Direktur Utama, sehingga target sampai Desember 2020 telah tercapai. / Decree validated by President Director, thus achieving December 2020 target.	

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga tahun 2020, Direksi IPC memiliki 2 (dua) komite yang bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu Komite Investasi dan Manajemen Risiko, yang kemudian berganti nama menjadi Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) serta Komite IPC Bersih.

KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung peningkatan performansi dan transformasi bisnis, serta meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko Perseroan, maka Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 tanggal 21 Juli 2017 tentang Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Adapun tujuan dibentuknya Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko Perseroan dengan mengevaluasi dan mengusulkan kebijakan/kegiatan pengelolaan investasi dan risiko Perseroan yang memerlukan persetujuan 2 (dua) Direktur atau lebih, atau yang merupakan eskalasi dari satu atau beberapa Direktur;

COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

As of 2020, IPC Board of Directors has 2 (two) committees assisting the duties of the Board of Directors, namely Investment and Risk Management Committee, which later changed its name to Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Committee as well as IPC Bersih Committee.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

To support business performance and transformation, as well as to improve Good Corporate Governance aspect and Board of Directors decision-making process related to managing the Company's investments and risks, the Board of Directors formed Investment and Risk Management Committee based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 dated July 21, 2017 concerning Investment and Risk Management Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The objectives of the establishment of the Investment and Risk Management Committee are as follows:

1. To improve the aspect of Good Corporate Governance, the decision-making process of the Board of Directors related to the Company's investment and risk management by evaluating and proposing policies/activities of the Company's investment and risk management that require approval of 2 (two) Directors or more, or who is an escalation of one or more Directors;

2. Memberikan keyakinan bahwa investasi yang akan dilakukan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, sesuai dengan kebutuhan Perseroan, selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, serta patuh pada peraturan hukum dan perundangan yang berlaku;
 3. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan pelimpahan kewenangan oleh Direksi.
2. To provide confidence that the investment to be made will provide added value for the Company, in accordance with the Company's needs, in line with the Company's Long-Term Plan, and comply with applicable laws and regulations;
 3. To assist the implementation of the Board of Directors' duties in managing the Company in accordance with the delegation of authority by the Board of Directors.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite GRC sejak pertama kali dibentuk terdiri dari seorang Ketua, dan 9 (sembilan) orang anggota, dengan uraian

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Since its formation, the GRC Committee has consisted of a Head, and 9 (nine) members, with the following descriptions:

Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2020

GRC Committee Structure and Membership in 2020

Posisi di Komite Investasi dan Manajemen Risiko / Position in GRC Committee	Jabatan di IPC / Position in IPC
Sekretaris Komite Investasi dan Manajemen Risiko / Investment and Risk Management Committee Secretary	VP Risk Manajemen Risiko / VP Risk Management
Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko / Investment and Risk Management Committee Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. EVP Perencanaan Strategi Korporasi / EVP Corporate Strategic Planning 2. SVP Pemasaran / SVP Marketing 3. SVP Konstruksi Sipil / SVP Civil Construction 4. VP Peralatan / VP Equipment 5. SVP Pelayanan Terminal / SVP Terminal Services 6. SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan / SVP Financial Planning and Control 7. SVP Pengelolaan Keuangan Perusahaan & Cabang / SVP Financial Management of the Company & Subsidiaries 8. SVP Hukum / SVP Legal 9. SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis / SVP Business Transformation & Development 10. SVP Manajemen Aset / SVP Asset Management 11. SVP Sistem Informasi / SVP Information System 12. SVP Manajemen Proyek Strategis / SVP Strategic Project Management

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen dan review terhadap pra kajian kelayakan dan/atau kajian kelayakan pengembangan bisnis baru;
2. Menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi atas usulan program investasi perusahaan dan strategi manajemen risikonya, berdasarkan hasil studi kelayakan terkait program kerja/proyek dan investasi Perseroan;

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITIES

Investment and Risk Management Committee has the following duties and authorities:

1. Assess and review the results of pre-feasibility study and/or feasibility study related to new business development;
2. Re-analyze the Company's feasibility studies and/or proposed investments that have been budgeted in the RKAP in the current year, either at the request of Related Technical Directorate or Investment Committee;



3. Mengevaluasi atas kelayakan dan/atau usulan investasi Perseroan yang telah dianggarkan dalam RKAP di tahun berjalan, baik atas permintaan Direktorat Teknis Terkait atau inisiatif Komite Investasi;
4. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan terkait rencana investasi atas pengembangan pelabuhan dan strategi pengimplementasiannya; dan
5. Dapat meminta bantuan dan melakukan penunjukan konsultan atau ahli independen dalam analisis dan evaluasi atas investasi tertentu.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah meliputi:

1. Investasi dalam ruang lingkup fungsi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yaitu untuk Investasi Perseroan atas suatu program kerja/proyek dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar;
2. Pra-Kajian Kelayakan dan Kajian Kelayakan yang merupakan pengembangan bisnis baru;
3. Pengkualifikasian Proyek Strategis untuk proyek-proyek tertentu yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Dikategorikan merupakan Investasi Strategis karena merupakan proyek investasi lebih dari atau sama dengan Rp500 miliar;
 - b. Proyek investasi yang melibatkan koordinasi dan kerja sama dengan banyak instansi pemerintahan;
 - c. Proyek investasi yang oleh dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Manajemen Perseroan (Direksi) sebagai Investasi Strategis;
 - d. Proyek Strategis Nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN (GRC)

Pada tanggal 18 November 2020, Direksi IPC membentuk Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) sebagai pengganti dari Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Pembentukan tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/18/11/1/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 18 November 2020 dalam rangka mendukung peningkatan performansi dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Manajemen Risiko, dan Kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perseroan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC.

3. Evaluate the Company's feasibility studies and/or proposed Investments that have been budgeted in the RKAP in the current year, either at the request of Related Technical Directorate or Investment Committee
4. Evaluate and recommend policies related to investment plans for port development and implementation strategies;
5. Request assistance and appoint consultants or independent experts for the analysis and evaluation of certain investments.

The scope of the Investment and Risk Management Committee's duties and authorities include:

1. Investments within the Investment and Risk Management Committee scope, namely for the Company's Investment in work programs/projects with an investment value of more than Rp50 billion;
2. Pre-feasibility study and feasibility study of new business development
3. Strategic Project Qualification for certain projects that meet at least one of the following criteria:
 - a. Categorized as a Strategic Investment as it is an investment project worth more than Rp500 billion;
 - b. Investment projects that involve coordination and cooperation with multiple government agencies;
 - c. Investment projects that are considered and determined by the Board of Directors as a strategic investment;
 - d. National strategic projects and/or accelerated national development assigned by Government to the Company.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE (GRC) COMMITTEE

On November 18, 2020, the IPC Board of Directors established Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Committee as a replacement for the Investment and Risk Management Committee. The formation was stipulated in Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/18/11/1/KPP/UT/PI.II-2020 dated November 18, 2020 in order to support performance improvement and business transformation that take into account the aspects of Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's strategic operational policies, and the strategic business activities control of the IPC Group.

Adapun tujuan dibentuknya Komite GRC adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Manajemen Risiko, dan Kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC;
2. Memberikan keyakinan bahwa investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, sesuai dengan kebutuhan Perseroan, selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta patuh pada peraturan hukum dan perundangan yang berlaku;
3. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam mengelola Perseroan secara hati-hati (*prudent*) sesuai dengan kewenangan Direksi.

The objectives of the GRC Committee establishment are as follows:

1. To improve aspects of Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's strategic operational policies, and the strategic business activities control of the IPC Group;
2. To provide confidence that the investment to be made by the Company will provide added value for the Company, in accordance with the Company's needs, in line with the Company's Long Term Plan and complying with applicable laws and regulations;
3. To assist the implementation of the Board of Directors' duties in managing the Company prudently in accordance with the authority of the Board of Directors.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE GRC

Anggota Komite GRC sejak pertama kali dibentuk terdiri dari seorang Ketua, dan 9 (sembilan) orang anggota, dengan uraian sebagai berikut:

GRC COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Since its formation, the GRC Committee has consisted of a Chair, and 9 (nine) members, with the following descriptions:

Posisi di Komite GRC / Position in GRC Committee	Jabatan di IPC / Position in IPC
Ketua Komite GRC / Head of GRC Committee	Wakil Direktur Utama / Vice President Director
Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko / Investment and Risk Management Committee Member	1. Direktur Komersial / Commercial Director 2. Direktur Keuangan / Finance Director 3. Direktur Teknik / Technical Director 4. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Director 5. EVP Sekretariat Perusahaan / EVP Corporate Secretary 6. EVP Satuan Pengawasan Internal / EVP Internal Audit Unit 7. EVP Perencanaan Strategi Korporasi / EVP Corporate Strategic Planning 8. SVP Hukum / SVP Legal 9. VP Manajemen Risiko / VP Risk Management

TUGAS KOMITE GRC

Komite GRC bertugas untuk:

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi;
2. Melakukan asesmen dan *review* terhadap prakajian dan/atau kajian kelayakan pengembangan bisnis baru, kebijakan strategis Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC;
3. Menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi atas usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC terkait dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

GRC COMMITTEE DUTIES

GRC Committee has the following duties:

1. Perform their duties collectively in assisting the Board of Directors;
2. Assess and review the results of pre-feasibility study and/or feasibility study related to new business development, the Company's strategic operational policies and the management of IPC Group strategic business activities;
3. Analyze, evaluate, and provide recommendations for the Company's investment program proposals, the Company's strategic policies, and the management of IPC Group strategic business activities related to Governance, Risk Management, and Compliance with laws and regulations;



4. Mengevaluasi atas kelayakan dan/atau usulan investasi Perseroan yang telah/akan dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, baik atas permintaan Direktorat Teknis Terkait atau inisiatif Komite;
 5. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan strategis Perseroan, dan pengendalian kegiatan strategi usaha Grup IPC terkait terkait rencana investasi atas pengembangan Pelabuhan dan strategi pengimplementasiannya;
 6. Dapat meminta bantuan dan melakukan penunjukan konsultan atau ahli independen dalam analisis dan evaluasi atas investasi tertentu;
 7. Bersikap independen dan obyektif serta profesional dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi;
 8. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan teknologi informasi untuk memudahkan *monitoring* pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
 9. Memastikan telah terdapat prosedur *check and balances* terhadap segala keputusan/kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan;
 10. Membuat rencana litigasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi, sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perseroan;
 11. Tugas Khusus dari Direksi
 - a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GRC oleh Direksi dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat nama yang diberi tugas, sifat penugasan, lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, serta jangka waktu penugasan;
 - b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GRC sepenuhnya ditentukan oleh Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Dalam melaksanakan tugas khusus, Komite GRC dapat:
 - 1) Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan, termasuk Notulen Rapat Direksi, serta dapat meminta Notulen Rapat Dewan Komisaris (jika dianggap perlu dan diperbolehkan Dewan Komisaris);
 - 2) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan struktural unit kerja terkait atau dengan Komite di bawah Dewan Komisaris, serta dapat meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GRC dengan beban Perseroan.
4. Evaluate the Company's feasibility studies and/or proposed investments that have been/will be budgeted in the Company's Budget Work Plan, either at the request of Related Technical Directorate or Investment Committee;
 5. Evaluate and recommend the Company's policies, and the management of IPC Group strategic business activities related to investment plans for Port development and implementation strategies;
 6. Request assistance and appoint consultants or independent experts for the analysis and evaluation of certain investments.
 7. Act independent and objective as well as professional in performing their duties as well as in reports and reporting directly to the Board of Directors;
 8. Provide recommendations on the improvement of information technology to facilitate monitoring of the implementation of governance, risk management, and compliance;
 9. Ensure the procedures of checks and balances are in place for all decisions/policies determined by the Company;
 10. Prepare a litigation plan on matters that require the attention of the Board of Directors, before strategic decisions/policies are determined by the Company;
 11. Special Duties from the Board of Directors
 - a. The assignment of special duties to the GRC Committee by the Board of Directors is carried out with a written order containing the name assigned, the nature of the assignment, the scope of work, the goals and objectives of the work, and the period of assignment;
 - b. The scope of work for the GRC Committee is fully determined by the Board of Directors as long as it does not contradict with the applicable laws and regulations;
 - c. In carrying out specific tasks, the GRC Committee may:
 - 1) Review all necessary notes, documents, and other information, including the Minutes of the Board of Directors' Meetings, and may request the Minutes of the Board of Commissioners' Meetings (if deemed necessary and permitted by the Board of Commissioners);
 - 2) Analyze and evaluate, cooperate with related structural work units or with Committees under the Board of Commissioners, and may request assistance from experts or consultants to assist the GRC Committee at the expense of the Company.

- d. Komite GRC menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Direksi, dan apabila berhubungan dengan Dewan Komisaris, maka laporannya wajib dihembuskan ke Dewan Komisaris.

RUANG LINGKUP TUGAS KOMITE GRC

Ruang lingkup tugas dan wewenang Komite GRC meliputi:

1. Investasi dalam ruang lingkup fungsi Komite GRC yaitu untuk Investasi Perseroan atas suatu program kerja/proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp50 Miliar.
2. Pra Kajian Kelayakan dan Kajian Kelayakan yang merupakan pengembangan bisnis baru.
3. Pengkualifkasian Proyek Strategis untuk proyek-proyek tertentu yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Dikategorikan merupakan Investasi Strategis karena merupakan proyek investasi lebih dari Rp500 Miliar;
 - b. Proyek investasi yang melibatkan koordinasi dan kerja sama dengan banyak instansi pemerintahan;
 - c. Proyek investasi yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Manajemen Perseroan (Direksi) sebagai Investasi Strategis;
 - d. Proyek strategis nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perseroan.
4. Kebijakan Strategis Perseroan yang memerlukan persetujuan Direksi.
5. Pengendalian kegiatan strategis usaha Grup IPC adalah hal-hal yang harus mendapat persetujuan Perseroan selaku pemegang saham pengendali Anak Perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang akan dilakukan oleh Anak Perusahaan yang menentukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE GRC

Sepanjang tahun 2020, Komite GRC Perseroan belum melaksanakan tugasnya sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Komite GRC, karena pembentukan Komite GRC baru ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan pada tanggal 18 November 2020.

- d. The GRC Committee submits a report on the implementation of special duties to the Board of Directors, and if it relates to the Board of Commissioners, the report must be forwarded to the Board of Commissioners.

THE SCOPE OF DUTIES OF GRC COMMITTEE

The scope of GRC Committee duties and authority cover:

1. Investments within the working scope of GRC Committee, namely for the Company's Investment in work programs/projects worth more than Rp50 billion;
2. Pre-feasibility study and feasibility study of new business development;
3. Strategic Project Qualification for certain projects that meet at least one of the following criteria:
 - a. Categorized as a Strategic Investment as it is an investment project worth more than Rp500 billion;
 - b. Investment projects that involve coordination and cooperation with multiple government agencies;
 - c. Investment projects that are considered and determined by Company's Management (Board of Directors) as a Strategic Investment;
 - d. National strategic projects and/or accelerated national development assigned by Government to the Company.
4. The Company's Strategic Policy which requires the approval of the Board of Directors.
5. The management of strategic business activities of the IPC Group are matters that must be approved by the Company as the controlling shareholder of the Subsidiary relating to the investment to be made by the Subsidiary which determines the approval of the Subsidiary General Meeting of Shareholders (GMS).

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF GRC COMMITTEE

Throughout 2020, the Company's GRC Committee has not performed its duties as stated in the GRC Committee Charter, as the establishment of the GRC Committee was determined by the Company's President Director on November 18, 2020.



KOMITE IPC BERSIH

Dalam rangka pelaksanaan GCG di IPC dan sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, IPC menerapkan *Whistleblowing System* (WBS). Untuk efektivitas penerapan WBS di IPC Direksi membentuk Komite IPC Bersih berdasarkan Surat Keputusan No. HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 tanggal 10 Desember 2019.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE IPC BERSIH

Pada tahun 2020, Komite IPC Bersih terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota, dengan uraian sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite IPC Bersih Tahun 2020

Posisi di Komite IPC Bersih / Position in IPC Bersih Committee	Jabatan di IPC / Position in IPC
Ketua Komite IPC Bersih / Head of IPC Bersih Committee	EVP Sekretariat Perusahaan / EVP Corporate Secretary
Wakil Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Deputy	SVP Hukum / SVP Legal
Sekretaris Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Secretary	SDVP Penerepan Tata Kelola Korporasi / SDVP Implementation of Corporate Governance
Anggota Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Member	1. EVP Satuan Pengawasan Internal / EVP Internal Audit Unit 2. VP Manajemen Risiko / VP Risk Management 3. VP Layanan SDM / VP of HC Services

TUGAS KOMITE IPC BERSIH

Komite IPC Bersih bertugas untuk:

- Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System* (WBS);
- Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk (termasuk *out of scope*) untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tipe pelanggarannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima dari pihak independen, seperti:
 - Apabila Karyawan, *Assistant Deputy General Manager*, *Deputy General Manager*, *Deputy Vice President*, *Senior Deputy Vice President*, *General Manager*, *Vice President*, dan Direksi yang dilaporkan, maka laporan akan diteruskan kepada Direktur Utama dengan dibantu oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Layanan Sumber Daya Manusia dan Umum dalam tindak lanjutnya;
 - Apabila Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris yang dilaporkan, maka laporan akan diteruskan kepada Komisaris Utama;

IPC BERSIH COMMITTEE

In the implementation of GCG at IPC and in line with BUMN Bersih program launched by the Ministry of SOEs, IPC has established a Whistleblowing System (WBS). For the effectiveness of WBS in IPC, Board of Directors established IPC Bersih Committee based on Decree No. HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 dated December 10, 2019.

IPC BERSIH COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

In 2020, IPC Bersih Committee consisted of one Chair, one Deputy, one Secretary, and 3 (three) members with description as follows:

IPC Bersih Committee Structure and Membership in 2020

Posisi di Komite IPC Bersih / Position in IPC Bersih Committee	Jabatan di IPC / Position in IPC
Ketua Komite IPC Bersih / Head of IPC Bersih Committee	EVP Sekretariat Perusahaan / EVP Corporate Secretary
Wakil Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Deputy	SVP Hukum / SVP Legal
Sekretaris Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Secretary	SDVP Penerepan Tata Kelola Korporasi / SDVP Implementation of Corporate Governance
Anggota Komite IPC Bersih / IPC Bersih Committee Member	1. EVP Satuan Pengawasan Internal / EVP Internal Audit Unit 2. VP Manajemen Risiko / VP Risk Management 3. VP Layanan SDM / VP of HC Services

IPC BERSIH COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITY

IPC Bersih Committee duties are as follows:

- Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations through in the Whistleblowing System channel;
- Classify and follow up all incoming reports (including out of scope) which can then be followed up according to the type of violation within 14 (fourteen) working days after the report is received from an independent party, such as:
 - If Employees, Assistant Deputy General Managers, Deputy General Managers, Deputy Vice Presidents, Senior Deputy Vice Presidents, General Managers, Vice President, and Directors are reported, the report will be forwarded to the President Director with the assistance of the Internal Audit Unit Division and the Human Resources and General Affair Services Division for follow-up;
 - If the President Director, the Board of Commissioners, the Committee of the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners are reported, the report will be forwarded to the President Commissioner;

- c. Apabila Komisaris Utama yang dilaporkan, maka laporan akan diteruskan kepada Pemegang Saham dengan sepengetahuan Direktur Utama;
 - d. Terhadap pengaduan kepada Anak Perusahaan, apabila yang dilaporkan adalah karyawan sampai dengan satu level di bawah Direksi Anak Perusahaan, maka akan diteruskan kepada Direktur Utama Anak Perusahaan, maka akan diteruskan kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan;
 - e. Untuk laporan segi operasional/*Customer Complaint* dan *Out of Scope*, maka laporan akan diteruskan langsung kepada *Vice President* atau unit kerja lainnya, termasuk Anak Perusahaan yang bersangkutan dengan sepengetahuan Direktur Utama.
3. Melakukan rapat Internal Komite IPC Bersih minimal satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
 4. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.
 5. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema WBS.
 6. Melakukan sosialisasi kepada Insan IPC dan *stakeholder* terkait penggunaan saluran WBS.
 7. Membuat laporan secara berkala kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan WBS.
- c. If the President Commissioner is reported, the report will be forwarded to the Shareholders with the knowledge of the President Director;
 - d. Regarding complaints to the Subsidiary, if the reported employee is up to one level below the Board of Directors of the Subsidiary, it will be forwarded to the President Director of the Subsidiary, then it will be forwarded to the President Commissioner of the Subsidiary;
 - e. For operational reports/*Customer Complaints* and *Out of Scope*, the report will be forwarded directly to the Vice President or other work units, including the Subsidiary concerned with the knowledge of the President Director.
3. Conducting Internal Meetings of IPC Bersih Committee at least once every 3 (three) months and/or at every report of alleged violations through the WBS;
 4. Supervise the independence and effectiveness of the Company's WBS implementation.
 5. Benchmarking with other companies to examine the development of the WBS scheme.
 6. Conducting dissemination to IPC Personnel and stakeholders regarding the use of the WBS channel.
 7. Prepare regular reports to the President Director and President Commissioner on the implementation of the WBS.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE IPC BERSIH

Selama tahun 2020, Komite IPC Bersih telah melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan Program IPC Bersih dengan baik. Adapun uraian mengenai Program IPC Bersih, termasuk laporan yang telah masuk melalui IPC Bersih selama tahun 2020 (termasuk lanjutan dari laporan sebelumnya) dan hasil pengujian saluran IPC Bersih dapat dilihat pada Sub Bab Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

AKUNTAN PUBLIK

Guna memperkuat kualitas implementasi GCG di Perseroan, fungsi pengawasan terhadap aspek keuangan juga dilakukan secara eksternal (audit eksternal) yang dijalankan oleh Akuntan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

IMPLEMENTATION OF IPC BERSIH COMMITTEE DUTIES

During 2020, the IPC Bersih Committee has performed its duties in the management of its program properly. The description of the IPC Bersih Program, including reports that have been submitted through the IPC Bersih during 2020 (including a continuation of the previous report) and the test results of the IPC Bersih channel can be seen in the Sub-Chapter of Whistleblowing System in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

PUBLIC ACCOUNTANT

To strengthen GCG implementation quality at the Company, the Company's financial aspect is also supervised through external audit performed by a Public Accountant. In carrying out its duties, Public Accountant implements auditing standards established and endorsed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Professional Standards of Certified Public Accountants (SPAP). In such standards, public accountants are required to plan and conduct an audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement.



Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan independen.

MEKANISME PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK

Pada umumnya, penunjukan Akuntan Publik dilakukan bersamaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan RUPST Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, Pemegang Saham menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Komite Audit menyusun *draft* Kerangka Acuan Kerja beserta rencana anggaran biaya untuk dapat disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Manajemen melakukan proses pengadaan melalui mekanisme Penunjukkan Langsung berdasarkan Keputusan RUPS. Selama proses pengadaan berlangsung, Manajemen memberikan laporan progres rutin kepada Komite Audit sampai dengan terbitnya perjanjian audit.

PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2020

Mengacu pada mekanisme penunjukkan KAP dan Akuntan Publik di atas, Perusahaan menugaskan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

The audits include examination on basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes an assessment of accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of comprehensive and independent financial statements.

Public Accountant Appointment Mechanism

In general, a Public Accountant is appointed along with a Public Accounting Firm (KAP) through Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) by taking account of recommendations from Board of Commissioners and Audit Committee. Based on AGMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report, the Shareholder reappointed Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statements as well as Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2020 Fiscal Year and delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit fees and other appointment requirements deemed reasonable for the KAP.

Based on this GMS decision, the Audit Committee drafted a reference framework along with the budget plan to be approved by the Board of Commissioners. After the approval, the management initiated procurement process through direct appointment mechanism based on GMS resolution. During the procurement process, the management regularly reported the progress to the Audit Committee until the issuance of audit agreement.

ASSIGNMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT IN 2020 FISCAL YEAR

Based on the aforementioned KAP and Public Accountant appointment mechanism, the Company appointed KAP Purwantono, Sungkoro & Surja and Public Accountant Moch. Dadang Syachruna as the external auditor tasked to audit the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the Partnership and Community Development Program Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the fiscal year ending on December 31, 2020.

Dasar penunjukan dan penugasan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna antara lain:

1. Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. 12 yang dibuat oleh Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H.
2. Berita Acara No. KP.02.03/15/9/1/ASK/LAK/PI.II-2020. tanggal 15 September 2020 tentang Mulai Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3. Perjanjian Audit dengan Nomor Perjanjian PD.02/2/10/1/PBN/ADP/PI.II-2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pekerjaan Audit Eksternal Laporan Keuangan Tahun 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2020

Jasa Utama

Berdasarkan Keputusan RUPST Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Jasa Lainnya

Selain melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, jasa lain yang diberikan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna untuk tahun buku 2020 antara lain:

1. Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Melaksanakan audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2020;
3. Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia.

The basis for the appointment and assignment of KAP Purwanto, Sungkoro & Surja and Public Accountants Moch. Dadang Syachruna includes:

1. Archive Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 12 made by Notary Dewi Sugina Mulyani, S.H.
2. Minutes No. KP.02.03/15/9/1/ASK/LAK/PI.II-2020 dated September 15, 2020 concerning the Beginning of Audit Work on the 2020 Annual Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3. Audit Agreement Number PD.02/2/10/1/PBN/ADP/PI.II-2020 dated October 2, 2020 concerning External Audit Work on the 2020 Financial Statements between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

SERVICES RENDERED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT IN 2020 FISCAL YEAR

Main Services

Based on the decision of AGMS for Validation of 2019 Fiscal Year Annual Report, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja and Public Accountant Moch. Dadang Syachruna was appointed to audit the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the fiscal year ending on December 31, 2020 in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Other Services

In addition to auditing the Company's Financial Statements for 2020 fiscal year, other services rendered by KAP Purwanto, Sungkoro & Surja and Public Accountant Moch. Dadang Syachruna in 2020 fiscal year include:

1. Carry out the procedure on the Report of Performance Evaluation and KPI Achievement (*Key Performance Indicator*) for the fiscal year ending on December 31, 2020;
2. Carry out the audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for fiscal year 2020;
3. Carry out the audit of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the fiscal year ending on December 31, 2020;
4. Carry out the procedure agreed upon in the Report of the Application of Prudential Principles (KPPK) in accordance with Bank Indonesia Regulations and Circular Letters.



PERIODE PENUGASAN DAN BESARAN FEE KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2020

Periode Penugasan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan, yaitu tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

BESARAN FEE

Adapun besaran fee yang dibayarkan atas jasa yang diberikan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp3.802.636.200 (sudah termasuk PPN).

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK, DAN OPINI AUDIT DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

Berikut ini merupakan nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) beserta Opini Audit dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Daftar KAP dan Akuntan Publik serta Opini Audit dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun Buku / Fiscal Year	Nama KAP / KAP Name	Periode KAP / KAP Period	Nama Akuntan Publik (Partner Penanggung Jawab) / Public Accountant Name (Partner in Charge)	Periode Akuntan Publik / Public Accountant Period	Nomor Izin Akuntan Publik / Public Accountant License Number	Opini Audit / Audit Opinion
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)	Periode ke-7 / 7th Period	Moch. Dadang Syachruna	Periode ke-3 / 3rd Period	AP.0697	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)		Muhammad Kurniawan	Periode ke-3 / 3rd Period	AP.0240	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)		Muhammad Kurniawan			Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)		Muhammad Kurniawan			Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)		Moch. Dadang Syachruna	Periode ke-1 / 1st Period	AP.0697	Wajar, dalam semua hal material / Fairly, in all material respects

ASSIGNMENT PERIOD AND FEES AMOUNT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT IN 2020 FISCAL YEAR

Assignment Period

The work period starts from the signing of Minutes of Work Commencement on September 15, 2020 until April 30, 2021.

FEES AMOUNT

The fees paid for the services rendered by KAP Purwanto, Sungkoro & Surja and Public Accountant Moch. Dadang Syachruna for 2020 fiscal year amounted to Rp3,802,636,200 (including VAT).

LIST OF PUBLIC ACCOUNTING FIRMS, PUBLIC ACCOUNTANTS, AND AUDIT OPINIONS IN THE LAST FIVE YEARS

The names of Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP) who audited the Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) along with the Audit Opinions in the last 5 (five) years are described the following table:

List of KAP, Public Accountants, and Audit Opinions in the Last Five Years

ORGANISASI DAN TATA KELOLA CABANG PELABUHAN

MANAJEMEN CABANG PELABUHAN

1. General Manager merupakan pimpinan tertinggi organisasi pada Cabang Pelabuhan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kelancaran kegiatan operasional Cabang Pelabuhan di jajaran organisasi yang dipimpinnya.
2. General Manager dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, melalui Direktur bidang masing-masing.
3. Susunan manajemen pada Cabang Pelabuhan akan diatur dalam peraturan tersendiri secara terpisah, dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pada tingkat pendapatan dan pemetaan segmen usaha masing-masing Cabang Pelabuhan.
4. Susunan organisasi, nama, nilai, dan kelas jabatan, serta uraian tugas jabatan pada Cabang Pelabuhan diatur di dalam Peraturan Direksi secara tersendiri, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi Perseroan.

PEMBINAAN CABANG PELABUHAN

1. Pembinaan Cabang Pelabuhan dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan yang ditunjuk sebagai Direktur Pembina (Dirbina) dalam rangka melakukan percepatan dalam penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis pada Cabang Pelabuhan.
2. Pelaksanaan pembinaan Cabang Pelabuhan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Direksi tersendiri.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam melakukan aktivitas operasional, Perseroan sepenuhnya menyadari adanya potensi munculnya risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran proses pelaksanaan bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya dan metode yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan munculnya atau terjadinya risiko usaha. Hal tersebut dicerminkan melalui program manajemen risiko yang dilakukan secara komprehensif dan terukur untuk mengelola dan memitigasi risiko dengan baik.

Penerapan manajemen risiko yang tepat dapat membawa dampak positif bagi keberlangsungan bisnis Perseroan di masa yang akan datang, karena dapat memperbesar peluang IPC untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang hendak dicapai. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga dapat memberikan gambaran komprehensif kepada pengelola

PORT BRANCH GOVERNANCE AND ORGANIZATION

PORT BRANCH GENERAL MANAGER

1. General Manager is the highest leader of the organization at a Port Branch who is responsible for operational activities at their Port Branch.
2. In performing their duties, General Manager is directly responsible to the President Director through their respective division Director.
3. The management composition of a Port Branch will be arranged in a separate regulation, by taking into account the organizational needs based on income level and business segment mapping of each Port Branch.
4. Organization structure, name, value, and grade, as well as job description at a Port Branch is arranged in a separate Board of Directors Regulation, by taking into account the organizational needs of the Company.

PORT BRANCH DEVELOPMENT

1. Port Branch development is carried out by a member of the Company's Board of Directors appointed as Development Director to accelerate the resolution of strategic issue at a Port Branch.
2. Further implementation of Port Branch development is arranged in a separate Board of Directors Regulation.

RISK MANAGEMENT

The Company is fully aware of potential risks that may arise in its operational activities which may hinder the business process of the Company. Therefore, preventive efforts are required to anticipate such business risks from happening. Those efforts are reflected through a comprehensive and measured risk management program to manage and mitigate risk in a proper manner.

The correct implementation of risk management can bring a positive impact for the Company's business continuity in the future by increasing IPC's opportunities to achieve the desired performance target. In addition, risk management can also provide a comprehensive overview of potential opportunity or loss from the Company's operational activities to the



Perusahaan maupun pemangku kepentingan mengenai potensi peluang maupun kerugian dari pelaksanaan aktivitas operasional. Dengan demikian, proses pembuatan keputusan dan kebijakan operasional Perseroan pun dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Agar pelaksanaan manajemen risiko di IPC dapat berjalan secara efektif dan optimal, maka dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada level *top management*, tetapi juga diterapkan di seluruh organ Perseroan di setiap lini bisnis.

FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO

Filosofi Manajemen Risiko Perusahaan saat ini adalah “kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melindungi seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan, menjaga kelangsungan kegiatan operasional dan usaha saat ini dengan menerapkan manajemen risiko secara komprehensif untuk mendukung upaya Perusahaan dalam meningkatkan nilai Perusahaan bagi para pemegang saham dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia”.

VISI MANAJEMEN RISIKO

Visi Manajemen Risiko adalah “membuat seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan adanya risiko yang melekat pada kegiatan operasional yang dijalankan dan mampu mengelola dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders* melalui proses bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip *Good Corporate Governance*”.

MISI MANAJEMEN RISIKO

Misi Manajemen Risiko adalah menjaga dan meningkatkan kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan meminimalisir berbagai potensi ancaman dan risiko yang timbul, dengan cara:

1. Menumbuhkan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan perbandingan antara risiko dan hasil dalam setiap pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Mendorong terciptanya budaya risiko disetiap elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan guna meningkatkan kesadaran akan risiko;
3. Meningkatkan proses Manajemen Risiko yang dapat berjalan secara berkala dan konsisten sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan;
4. Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada *Stakeholders* bahwa seluruh risiko perusahaan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;

management or stakeholders. Hence, decision making and policy formulation processes for the Company's operations can become more effective and efficient.

IPC is strongly committed in implementing risk management not only at top level management, but also in all of the Company's organs at each line of business to achieve a more effective and optimum risk management.

RISK MANAGEMENT PHILOSOPHY

The Company's Risk Management Philosophy is “high awareness and commitment to protect all of the Company's resources, maintain continuity of current business and operational through following a comprehensive risk management to support in increasing the Company's value to shareholders and boosting Indonesia's economic growth.”

RISK MANAGEMENT VISION

Risk Management Vision of IPC is “to ensure all elements of the Company and its Subsidiaries to have a high level of awareness of the risks inherent to their operational activities and are able to manage and control those risks, as well as to increase stakeholders trust through business processes conducted with Good Corporate Governance principles.”

RISK MANAGEMENT MISSION

Risk Management Mission of the Company is to maintain and improve the performance of the Company and its Subsidiaries through identifying potential threats and risks that arise by:

1. Building the principle of prudence and making comparisons between risks and results when allocating resources owned by the Company and its Subsidiaries.
2. Encouraging the creation of a risk culture in all parts of the Company and its Subsidiaries to increase risk awareness.
3. Making Risk Management process to run periodically and consistently to facilitate decision making process.
4. Asserting belief and confidence to Stakeholders that all of the Company's risks have been identified and managed appropriately.

- Melakukan upaya perbaikan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan;
- Melakukan upaya perbaikan atas proses Manajemen Risiko yang telah ada berdasarkan hasil *monitoring* dan kaji ulang;
- Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi dibidang Manajemen Risiko.

TARGET MANAJEMEN RISIKO

Target Manajemen Risiko adalah:

- Melindungi seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan;
- Mencegah terjadinya hal-hal tidak terduga yang dapat merugikan Perusahaan;
- Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam organisasi dan dalam proses pengambilan keputusan.

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko di IPC meliputi Lingkup Organisasi, Lingkup Perencanaan Strategis, Kegiatan/Usulan Proyek, Kegiatan Proses Bisnis, Kepatuhan (*Compliance*), dan aksi-aksi korporasi lainnya.

Lingkup Organisasi

Manajemen risiko diterapkan pada seluruh entitas Perseroan, yaitu di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan beserta Anak Perusahaan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran yang ada dalam RJPP, RKAP, dan KPI Korporat yang ada di dalam RKAP.

Lingkup Perencanaan Strategis

Prinsip penerapan manajemen risiko Perseroan adalah menjadi bagian integral dari perencanaan strategis yang secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran/kinerja Perseroan maupun dalam penganggarannya dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- RJPP
Penyusunan RJPP harus dilengkapi dengan kajian risiko berupa profil risiko-risiko jangka panjang yang paling signifikan dihadapi oleh Perseroan dan gambaran rencana penanganannya.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Penyusunan RKAP harus dilengkapi dengan kajian risiko berupa profil risiko-risiko jangka pendek yang paling signifikan dihadapi oleh Perseroan dan gambaran rencana penanganannya.

- Making improvements in all operational activities conducted by all elements of the Company and its Subsidiaries.
- Making improvements in the existing Risk Management process based on the results of monitoring and review.
- Consulting with various parties that are highly competent and have high reputation in Risk Management.

RISK MANAGEMENT TARGET

The Risk Management Targets include:

- Protecting all assets and resources of the Company.
- Preventing unexpected events that may harm the Company from occurring.
- Integrating Risk Management into the organization and decision-making process.

RISK MANAGEMENT SCOPE

Risk Management Scope in IPC includes Organization, Strategic Planning, Project Activities/Recommendations, Business Process Activities, Compliance, and other corporate actions.

Organization Scope

Risk Management is applied in all entities of the Company, namely Head Office, Port Branches, and Subsidiaries to ensure in achieving the targets in RJPP, RKAP, and Corporate KPI included in RKAP.

Scope of Strategic Planning

The principle behind the Company's risk management implement is an integral part of the strategic planning that significantly affects the fulfillment of the Company's goal/performance and budgeting with the following activities:

- The Company's Long-Term Plan (RJPP)
RJPP preparation must be complemented with risk reviews for the profiles of the most significant long-term risks faced by the Company and overview of their mitigation plan.
- The Company's Work Plan and Budget (RKAP)
RKAP preparation must be complemented with risk reviews for the profiles of the most significant short-term risks faced by the Company and overview of their mitigation plan.



Rencana Kerja Manajemen adalah mitigasi risiko, sedangkan anggaran rencana kerja manajemen adalah biaya mitigasi risiko

The Management's Work Plan constitutes risk mitigation, while the management's work plan budget constitutes risk mitigation cost.

Kegiatan/Usulan Proyek

Kegiatan atau usulan kegiatan yang bersifat proyek, khususnya yang secara signifikan, mempengaruhi pencapaian sasaran-sasaran Perseroan dan gambaran rencana penanganannya.

Project Activities/Recommendation

Project activities or recommendations, particularly significant ones, affect the achievement of the Company's targets and overview of their management plan.

Kegiatan Proses Bisnis

Penerapan manajemen risiko pada kegiatan/proses bisnis dilakukan secara bertahap, setiap tahap diidentifikasi risikonya dan rencana mitigasinya.

Business Process Activities

Implementation of risk management in business activities/processes is carried out gradually by identifying the risks and mitigation plan in each stage.

Lingkup Kepatuhan (Compliance)

Sebagai salah satu prinsip dari manajemen risiko adalah adanya aspek kepatuhan (*compliance*). Aspek ini merupakan prinsip yang dianut dan harus diterapkan dalam pengelolaan risiko.

Compliance Scope

One of the aspects in risk management is the compliance aspect. This is an aspect that must be embraced and implement in risk management.

Aksi Korporasi Lainnya

Pada saat perusahaan akan mengambil keputusan terkait merger, akuisisi, pembelian saham, peminjaman dana kepada anak perusahaan, maka pemilik risiko harus melengkapi dengan kajian risikonya.

Other Corporate Actions

At the time the Company is making decisions on merger, acquisition, stock purchases, or fund lending to subsidiaries, the risk owner shall provide a risk study.

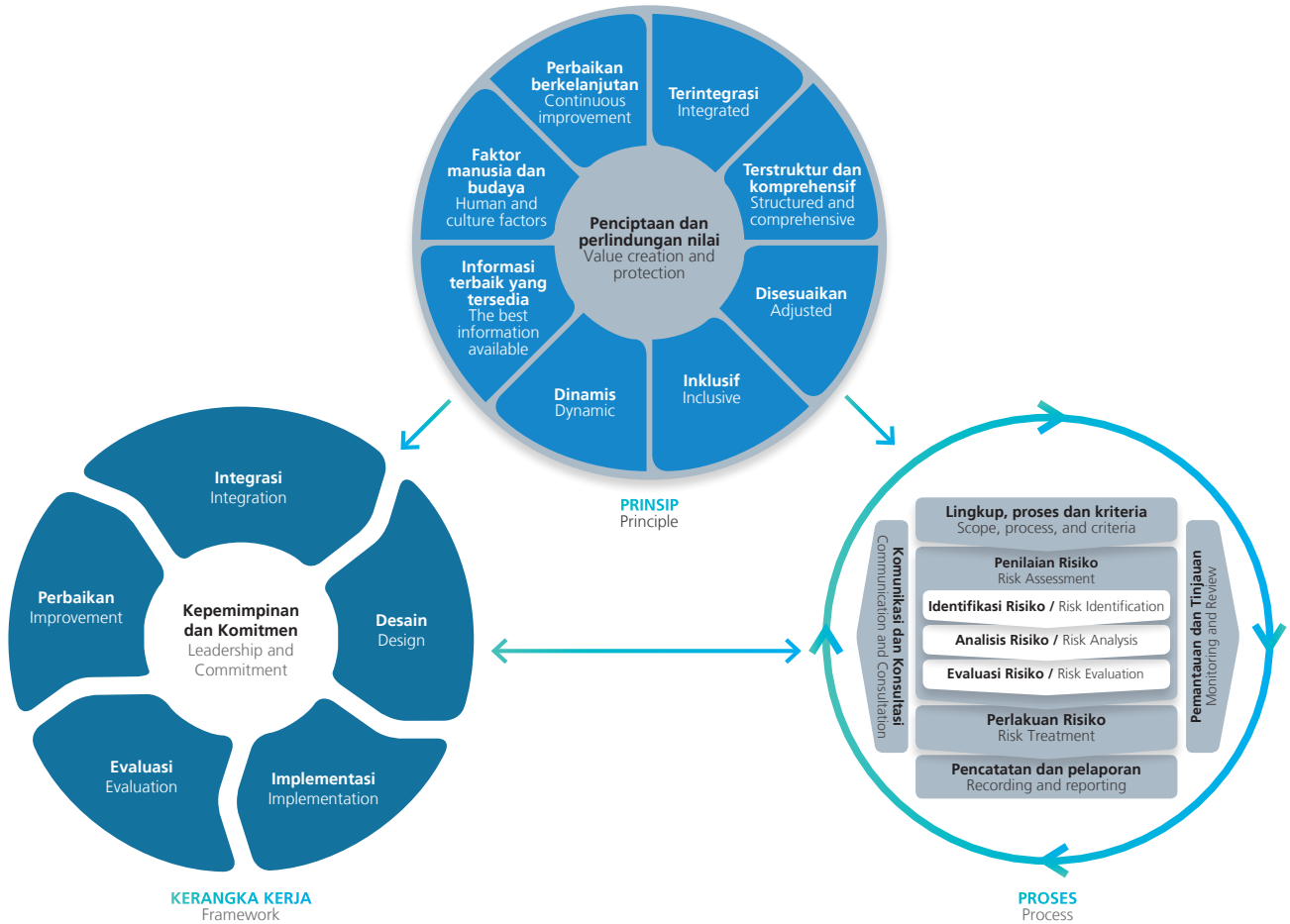
SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko IPC mengacu pada standar ISO 31000 tahun 2018. ISO 31000 adalah panduan penerapan manajemen risiko yang terdiri atas tiga elemen, yaitu prinsip (*principle*), kerangka kerja (*framework*), dan proses (*process*) manajemen risiko. Secara umum, ISO 31000:2018 menyederhanakan versi 2009. Diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko pun berubah. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan, sedangkan pada versi 2018 ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Risk Management System of IPC refers to the ISO 31000 of 2018 standard. ISO 31000 is a guideline in managing risk that consists of three elements, namely principles, framework, and processes of risk management. In general, ISO 31000:2018 simplifies the 2009 version. The diagrams that illustrate the connection of principle, framework, and risk management process also changed. In the 2009 version, principle, framework, and process are described as sequential sets of elements, while the three sections are described as an interrelated open system.

Sistem Manajemen Risiko IPC Berdasarkan ISO 31000:2018



Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan dasar praktik atau filosofi manajemen risiko, sehingga dapat memberikan panduan mengenai bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, juga menyampaikan nilai-nilai yang dikandungnya dan menjelaskan maksud serta tujuannya. Prinsip-prinsip yang digambarkan seyogyanya membuat organisasi mampu untuk mengelola dampak ketidakpastian dalam pencapaian sasaran.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk penciptaan dan perlindungan nilai melalui prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai berikut :

1. Terintegrasi;
2. Terstruktur dan menyeluruh;
3. Disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya;
4. Inklusif;
5. Dinamis;
6. Informasi terbaik yang tersedia;
7. Faktor budaya dan manusia;
8. Perbaikan berkelanjutan.

Risk Management Principles

Risk management principles are the basic practices or philosophy of risk management in order to be guidelines on the characteristics of effective and efficient risk management. These principles also convey and describe the purpose of values embedded in them. Such principles should make the organization to be capable in managing the uncertainty in the Company's pursuit of achieving its target.

The main purpose of risk management implementation is to create and protect value through risk management principles as follows:

1. Integrated;
2. Structured and Comprehensive;
3. Customized;
4. Inclusive;
5. Dynamic;
6. Best Available Information;
7. Human and Cultural Factors;
8. Continuous improvement.



Prinsip Manajemen Risiko IPC

IPC Risk Management Principle



Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Peran dan tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan organisasi. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko berhasil diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi (*governance*), kegiatan organisasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Oleh sebab itu, dukungan dari para pemangku kepentingan internal organisasi, khususnya pimpinan puncak sangat diperlukan.

Risk Management Framework

Risk Management framework is an arrangement of risk management system in a structured and systematic manner in all parts of the organization. The role and purpose of risk management framework are to assist the organization in integrating risk management in all of the organization's functions and activities. Effectiveness of risk management will depend on the extent to which risk management has been integrated in the organization's governance, activities and decision-making process in all levels. Therefore, it requires the support of internal stakeholders, particularly the organization's top leader.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko IPC

IPC Risk Management Framework



Kepemimpinan dan Komitmen

Direksi dan Dewan Komisaris, bila mungkin harus memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi dan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya, antara lain dengan :

1. Menyesuaikan dan menerapkan semua komponen dari kerangka kerja;
2. Membuat pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan manajemen risiko, rencana atau arah penerapan manajemen risiko;
3. Memastikan bahwa semua kebutuhan sumber daya untuk mengelola risiko akan dialokasikan;
4. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan risiko pada tingkatan organisasi yang sesuai.

Integrasi

Pengintegrasian manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Struktur setiap organisasi berbeda-beda sesuai dengan tujuan, sasaran dan kompleksitas yang dihadapinya. Risiko harus dikelola pada setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya.

Leadership and Commitment

When necessary, the Board of Directors and Board of Commissioners shall ensure that risk management has been integrated into all activities of the organization as well as demonstrate leadership and commitment through the following:

1. Adjusting and implementing all components of the framework
2. Making statements or formulating policies that determine risk management approach, plan, or direction of risk management implementation
3. Allocating all necessary resources to manage risk
4. Establishing authority, responsibility, and accountability of risk management to the appropriate level of the organization.

Integration

Risk management integration highly depends on understanding of organizational structure and context. Each organization has different structure according to its goal, target, and complexity. Risks should be managed in every level of the organization.



Desain Kerangka Kerja

Ketika merencanakan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks internal dan eksternal organisasi.

Implementasi

IPC menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan:

1. Menyusun suatu rencana penerapan, termasuk jadwal dan kebutuhan sumber daya;
2. Melakukan identifikasi di mana, kapan dan bagaimana berbagai macam keputusan penerapan diambil pada tiap-tiap bagian organisasi dan siapa yang dapat mengambil keputusan tersebut;
3. Melakukan penyesuaian proses pengambilan keputusan yang diterapkan bilamana diperlukan;
4. Memastikan bahwa pengaturan organisasi untuk mengelola risiko telah dipahami dengan baik dan diterapkan.

Evaluasi

Guna memastikan keefektifan kerangka kerja manajemen risiko, IPC melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mengukur secara berkala kinerja kerangka kerja manajemen risiko, apakah sesuai dengan tujuan pembuatan, rencana penerapan, capaian indikator-indikator yang ditetapkan dan juga perilaku pekerja terkait dengan penerapan manajemen risiko;
2. Menetapkan apakah kerangka kerja manajemen risiko masih tetap mampu untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan atau tidak.

Perbaikan

IPC senantiasa memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal, dengan melakukan hal tersebut maka organisasi dapat meningkatkan nilai. Ketika kesenjangan dan kesempatan perbaikan telah diidentifikasi maka perusahaan harus mengembangkan rencana perbaikan dan penugasan pelaksanaannya kepada yang mempunyai akuntabilitas terhadap penerapannya sehingga perbaikan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Framework Design

When designing the risk framework, the organization must examine and understand the internal and external contexts of the organization.

Implementation

IPC implements risk management framework through:

1. Preparing an implementation plan, including schedule and resource requirements;
2. Identifying the where, when, and how decisions are made for implementation in each level of the organization and who made the decision;
3. Customizing the implemented decision-making process when required;
4. Ensuring that the rules of the organization to manage risk have been understood and implemented properly.

Evaluation

To ensure the effectiveness of risk management framework, IPC conducts:

1. Measuring risk management framework periodically to be in line with its goals, implementation plan, achievement indicators, and employee behaviors related to risk management implementation;
2. Determining that the risk management framework is still able to support the achievement of the Company's targets.

Improvement

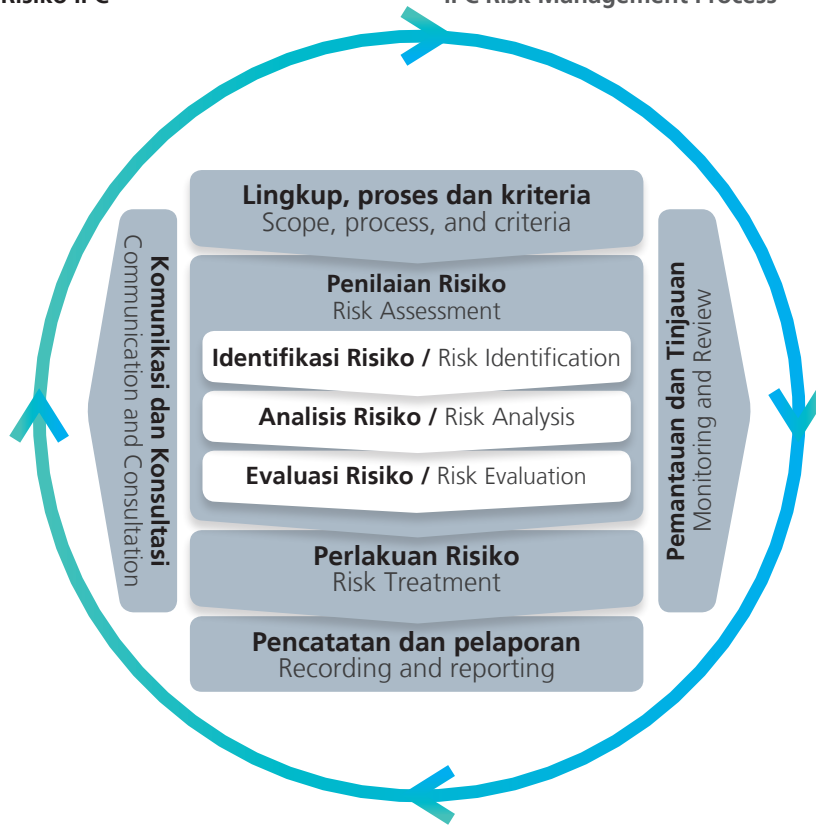
IPC constantly monitors and adjusts risk management framework to the changes in internal and external environment. By doing so, the organization can increase its value. After identifying discrepancy and improvement opportunity that exist, the Company shall develop improvement plan and assign its implementation to those who are accountable to the implementation so that these improvements can contribute to the betterment of management framework.

Risk Management Process

Risk management process is risk management activities that are sequential and interrelated. Risk management process includes systematic implementation of policies, procedures, and approaches to carrying out communication and consultation, development of contexts, risk assessment and risk treatment, monitoring, reviewing, recording, and reporting to interested parties.

Proses Manajemen Risiko IPC

IPC Risk Management Process



Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk membantu *stakeholders* dalam memahami risiko, sebagai hal yang mendasari pengambilan keputusan dan alasan mengapa tindakan-tindakan tertentu dilakukan. Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara konsultasi untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Koordinasi yang erat antara komunikasi dengan konsultasi dijalankan untuk menunjang pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, integritas dan keandalan informasi, dan juga hak-hak privasi dari setiap individu yang terlibat.

Communication and Consultation

Communication and consultation aim to assist stakeholders in understanding risk as the basis of decision making and reason for certain actions to be taken. Communication is carried out to build awareness and understanding of risk while consultation is carried out to obtain feedback and information needed for decision making. Close coordination between communication and consultation is performed to support factual, timely, relevant, accurate, and understandable exchange of information, information integrity and reliability, as well as privacy rights of each individual involved.

Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria

Menentukan lingkup, konteks dan kriteria bertujuan untuk merancang proses manajemen risiko yang khas sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk menunjang asesmen risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Lingkup, konteks dan kriteria meliputi penentuan lingkup proses dan pemahaman konteks internal dan eksternal perusahaan, serta kriteria untuk menilai tingkat risiko.

Scope, Context, and Criteria

Determination of scope, context, and criteria has the purpose to design a specific risk management process according to the needs of its users for supporting effective risk management and appropriate risk treatment. Scope, context, and criteria include determining the scope of process and understanding the Company's internal and external contexts, as well as criteria for assessing level risk.



Penilaian Risiko

Keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko hingga evaluasi risiko. Asesmen risiko harus menggunakan data dan informasi terbaik yang tersedia dan jika diperlukan dapat dilengkapi dengan kajian yang lebih mendalam.

Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk menemukan, menerima dan menjabarkan risiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Informasi yang relevan, memadai dan mutakhir merupakan hal penting dalam mengidentifikasi risiko.

Analisis Risiko

Memahami sifat dan perilaku risiko, bila perlu termasuk peringkat risiko. Analisis risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko, skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya.

Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko membantu proses pengambilan keputusan dan meliputi proses membandingkan hasil analisis dari masing-masing risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi ini akan mengerah pada keputusan untuk:

1. Tidak melakukan apa-apa;
2. Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko;
3. Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik;
4. Mempertahankan pengendalian risiko yang ada;
5. Mempertimbangkan ulang sasaran proses.

Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko bertujuan untuk menyeleksi dan mengimplementasikan opsi-opsi untuk menghadapi risiko. Perlakuan terhadap suatu risiko dapat berupa salah satu dari empat perlakuan, yaitu:

1. Menerima Risiko (*Accept*);
2. Memindahkan Risiko (*Transfer*);
3. Menghindari Risiko (*Avoid*);
4. Mengurangi Risiko (*Mitigate*).

Risk Assessment

It is the entire process from risk identification, risk analysis to risk evaluation. Risk assessment shall use the best available data and information, and if required, it can be supplemented with a more in-depth review.

Risk Identification

Risk identification aims to find, accept, and describe risks that can support or hinder the achievement of organizational goals. Relevant, adequate, and up-to-date information is important in identifying risk.

Risk Analysis

Risk analysis is understanding risk nature and behavior as well as risk rating, if necessary. Risk analysis includes detailed considerations related to uncertainty, risk sources, impacts, possibilities, risk events, scenarios, risk control and its effectiveness.

Risk Evaluation

Risk evaluation helps decision making process and includes the process of comparing analysis results of each risk with predetermined risk criteria in order to determine further action to that risk if required. This condition will lead to the decision to:

1. Performing nothing;
2. Considering risk treatment options;
3. Conducting further analysis to understand the risk better;
4. Maintaining existing risk control;
5. Reconsidering the process objectives.

Risk Treatment

Risk treatment aims to select and implement options for dealing with risks. The treatment of a risk can be one of the following four treatments:

1. Accepting Risk;
2. Transferring Risk;
3. Avoiding Risk;
4. Mitigating Risk.

Monitoring dan Reviu

Untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dan keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi dan hasil akhir yang diharapkan. Pemantauan secara rutin (*ongoing monitoring*) dan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko dan hasil akhir harus menjadi bagian dari proses manajemen risiko, dengan penetapan penanggung jawab yang jelas. Pelaksanaan monitoring dan reviu dilakukan oleh tiga pihak:

1. Pemantauan mandiri yang dilakukan oleh Pemangku Risiko dan Divisi Manajemen Risiko;
2. Pemantauan oleh atasan yang dilakukan oleh Manajemen Puncak di Perseroan;
3. Pemantauan oleh pihak ketiga yaitu Pengawasan dan Kaji Ulang terhadap proses Manajemen Risiko dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak terkait di dalam proses penerapannya.

Pelaporan & Pencatatan

Proses manajemen risiko dan berbagai keluarannya (*outcomes*) harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan dan pencatatan bertujuan untuk:

1. Mengkomunikasikan berbagai aktifitas proses manajemen risiko dan keluarannya melintasi seluruh area perusahaan;
2. Menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan;
3. Memperbaiki aktifitas proses manajemen risiko;
4. Membantu interaksi dengan *stakeholders*, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap aktifitas pengelolaan risiko.

PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan manajemen risiko dalam pengelolaan Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal pengambilan keputusan, pencapaian sasaran, proses bisnis, dan lain-lain.

Direksi

1. Direksi adalah penanggung jawab utama implementasi manajemen risiko Perseroan. Proses pengambilan keputusan, pencapaian sasaran, dan lain-lain, harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang dihadapi oleh Perseroan.
2. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perseroan.

Monitoring and Review

To guarantee and improve the quality and effectiveness of planned risk management process, its implementation and expected outcome, routine ongoing monitoring and periodic reviews must be part of risk management process with clear assignment of responsibilities. The monitoring and review are performed by three parties:

1. Independent monitoring by Risk Stakeholders and Risk Management Division;
2. Supervision by the Top Management of the Company;
3. Monitoring by a third party, namely Supervision and Risk Management by an independent party who is not involved in the implementation process.

Reporting & Recording

Risk management process and its various outcomes shall be documented and reported through appropriate mechanisms. Reporting and recording aims to:

1. Communicate various activities of risk management process and its outcomes across all areas of the Company;
2. Provide information for decision making;
3. Improving the activities of risk management process;
4. Assist the interaction with stakeholders, including those with responsibility and accountability for risk management activities.

PARTIES WITH ROLES IN RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

Board of Commissioners

Board of Commissioners are responsible to ensure that the Board of Directors have performed risk management in their management of the Company in accordance with prevailing laws and regulations. Risk management shall be included in decision making, target achievement, business process, and so on.

Board of Directors

1. Board of Directors is the main people in charge of risk management implementation in the Company. Decision making process, target achievement, and so on shall consider the risks and opportunities faced by the Company.
2. Board of Directors is required to submit the report of risk management profile and handling along with periodic report of the Company.



3. Pelaporan dibuat berkala dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dijalankan dengan baik dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan operasi Perseroan yang dilakukan Direksi kepada Dewan Komisaris, terutama dalam pengelolaan risiko.
4. Direksi telah menetapkan unit-unit kerja yang merupakan bagian dari pengelolaan risiko, yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Satuan Pengawasan Internal. Selain itu, pengelolaan risiko Perseroan juga melibatkan seluruh Pekerja IPC.

3. Reporting is prepared periodically and submitted to the Board of Commissioners. The purpose of such report is to ensure that risk management process is carried out properly as part of the Company's accountability in its operations run by the Board of Directors to the Board of Commissioners, particularly in risk management.
4. Board of Directors have determined work units that are part of risk management, namely the Risk Management Division and Internal Audit Unit. In addition, risk management of the Company involves all IPC employees.

Divisi Manajemen Risiko

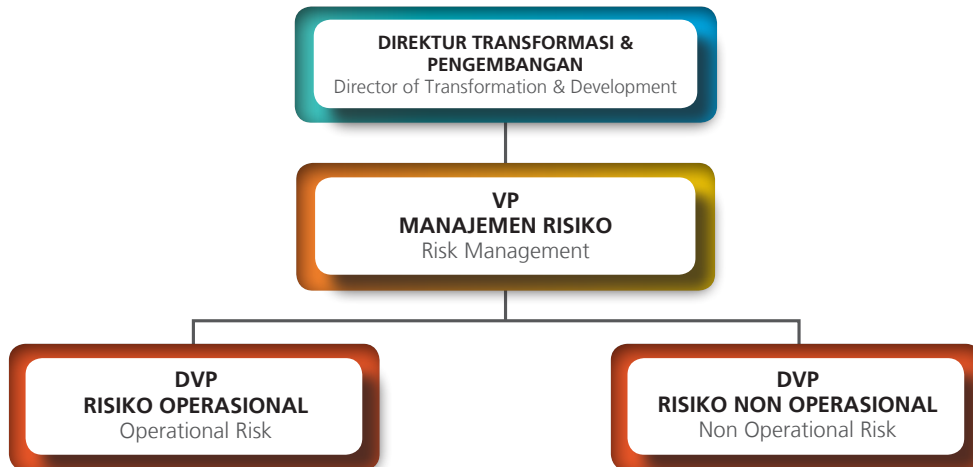
Secara struktural, Divisi Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis. Unit kerja ini dipimpin oleh VP Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari 2 (dua) departemen, yaitu Departemen Risiko Operasional yang dipimpin oleh DVP Risiko Operasional dan Departemen Risiko Non Operasional yang dipimpin oleh DVP Risiko Non Operasional.

Risk Management Division

Structurally, Risk Management Division is under the Business Transformation & Development Director. This work unit is led by Vice President (VP) of Risk Management. Risk management Division consists of 2 (two) departments, namely Operational Risk Department led by Deputy Vice President (DVP) and Non-Operational Risk led by another Deputy Vice President (DVP).

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Organizational Structure



Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko antara lain:

Duties and responsibilities of Risk Management Division are:

1. Melakukan reviu terhadap:
 - a. Hasil analisa *risk objective*, *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan;
 - b. Usulan strategi pengendalian/mitigasi risiko operasional dan non-operasional yang signifikan terhadap keberlangsungan Perseroan;
 - c. Usulan pengembangan metodologi *Enterprise Risk Management* (ERM).

1. Conducting review of:
 - a. Analysis results of the Company's risk objective, risk appetite and risk tolerance;
 - b. Operational and non-operational risks control/mitigation proposal strategies that are significant to the Company's continuity;
 - c. Development proposal of Enterprise Risk Management (ERM) methodology.

2. Merekomendasikan usulan terkait kebijakan manajemen dan penanganan risiko operasional dan risiko non-operasional di lingkungan IPC yang signifikan dan memerlukan perhatian segera.
 3. Melakukan *monitoring* terhadap:
 - a. Implementasi kebijakan dan/atau peraturan Perseroan terkait risiko operasional dan risiko non-operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - b. Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik.
 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) secara berkala di masing-masing bagian untuk memastikan pencapaian target perusahaan, penyelesaian proyek yang tepat waktu dengan kualitas yang sesuai dengan kepala Divisi dan Bidang Kantor Pusat, General Manager, dan Direktur Anak Perusahaan.
 5. Membangun lingkungan sadar risiko di Perseroan dengan menerapkan tata kelola yang baik.
2. Providing recommendations related to management policies as well as significant operational and non-operational risks control within IPC that require immediate attention.
 3. Monitoring:
 - a. Implementation of policies and/or regulations related to operational and non-operational risks within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - b. Periodic follow-up risk control for significant risks.
 4. Coordinating periodic Risk & Control Self-Assessment (RCSFA) in all divisions to ensure the achievement of the Company's targets, and timely project completion in accordance with quality requirements set by Division and Development Heads of the Head Office, General Manager, and Directors of Subsidiaries.
 5. Building risk-conscious environment in the Company by applying good governance.

Divisi Satuan Pengawasan Intern

Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan dan kualitas kinerja kebijakan manajemen risiko sebagai bagian dari tanggung jawab mereka atau atas permintaan khusus dari Direksi, Komite Audit, atau Dewan Komisaris. SPI dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit dengan memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan merekomendasikan perbaikan dalam efektivitas proses pengelolaan risiko Perseroan.

Pekerja IPC

Pekerja IPC turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko. Pekerja dapat membantu Perseroan dengan memberikan informasi mengenai permasalahan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap pedoman perilaku (*Code of Conduct*), pelanggaran terhadap kebijakan Perseroan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.

KERANGKA PERTAHANAN TIGA LAPIS (THREE LINES OF DEFENSE)

Pengelolaan Risiko di Perseroan dijalankan dengan penuh perhitungan melalui konsep Pertahanan 3 (tiga) Lapis. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan seluruh internal organisasi Perseroan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi.

Internal Audit Unit Division

Internal Audit Unit Division plays a key role in monitoring the implementation and performance quality or risk management policy as part of their responsibilities or special request of the Board of Directors, Audit Committee, or the Board of Commissioners. Internal Audit Unit may assist the Board of Directors and Board of Commissioners, or the Audit Committee through monitoring, evaluating, reporting, and recommending improvements for the effectiveness of the Company's risk management process.

IPC Employees

IPC employees are also responsible for the implementation of risk management. Employees can assist the Company through providing information on issues that arise due to the violation of the Code of Conduct, the Company's policies, or the laws.

THREE LINES OF DEFENSE FRAMEWORK

The Company's risk management is performed with full consideration through the Three Lines of Defense. This concept is aimed to improve the durability of the entire internal organization of the Company against various potential risks.



Fungsi dan Tanggung Jawab dari Setiap Lapis Pertahanan di IPC

Functions and Responsibilities of the Line of Defense in IPC

1. Pertahanan Lapis Pertama / First Line of Defense

Dilakukan oleh Pemangku Risiko yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari. / Performed by Risk Stakeholders who also carry out the Company's daily operational activities.

Dalam hal ini, mereka bertugas untuk: / In this case, they are tasked to:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian internal yang kondusif di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); / Ensure the availability of a conducive internal control environment at the Head Office and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan manajemen puncak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya; / Implement Risk Management policy that have been established by the top management in their roles and responsibilities;
- Melaksanakan penilaian risiko meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa dan evaluasi risiko, perlakuan risiko terhadap semua kegiatan yang ada pada unit kerjanya / Implement risk assessment which includes establishment of context, risk identification, risk analysis and evaluation, risk treatment in all activities of work unit;
- Dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan; / Consciously consider the risk factors in making decisions and taking actions;
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di Divisi atau Departemen masing-masing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal. / Be able to demonstrate effective internal control in their respective Divisions or Departments as well as monitoring and transparency of the internal control effectiveness.

2. Pertahanan Lapis Kedua / Second Line of Defense

Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dibantu oleh *Risk Officer*. Dalam hal ini, Divisi Manajemen Risiko harus terpisah dengan bagian operasional maupun bisnis agar terdapat independensi dalam membuat kebijakan. / Performed by Risk Management Division and assisted by Risk Officer. In this case, Risk Management Division shall be separate from operational and business sections in order to have independency in formulating policies.

Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan terhadap limit dan toleransi risiko tersebut. Seluruh limit dan toleransi risiko yang dapat diterima Perseroan harus disetujui oleh Direksi. Sebagai pertahanan lapis kedua, unit Manajemen Risiko memiliki tugas diantaranya: / Risk Management Unit is responsible in formulating a policy on the limit and tolerance of a risk. All risk limits and tolerances that the Company can accept shall be approved by the Board of Directors. As a second line of defense, Risk Management Unit has the following duties:

- Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan; / Being responsible for developing and monitoring the overall implementation of the Company's Risk Management.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perseroan; / Monitoring the manner in which business functions are carried out within the corridor of Risk Management policy and standard operating procedures established by the Company;
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan; / Monitoring and reporting the Company's risks thoroughly to the organ that has the highest accountability in the Company;
- Melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas kebijakan Manajemen Risiko ke seluruh pegawai, termasuk melakukan revisi atau pengkinian. Sedangkan Risk Officer memiliki tanggung jawab antara lain; / Developing, disseminating, and distributing Risk Management policy to all employees, including performing revision or update the policy. Whereas Risk Officer has the following responsibilities:
- Membantu unit Manajemen Risiko dalam melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh pegawai; / Assisting Risk Management unit in conducting development, dissemination, and distribution of Risk Management Guidelines to all employees;
- Memastikan Kebijakan tersebut dijalankan dengan benar di area kerjanya. / Ensuring such policy is implemented correctly in the work area.

3. Pertahanan Lapis Ketiga / Third Line of Defense

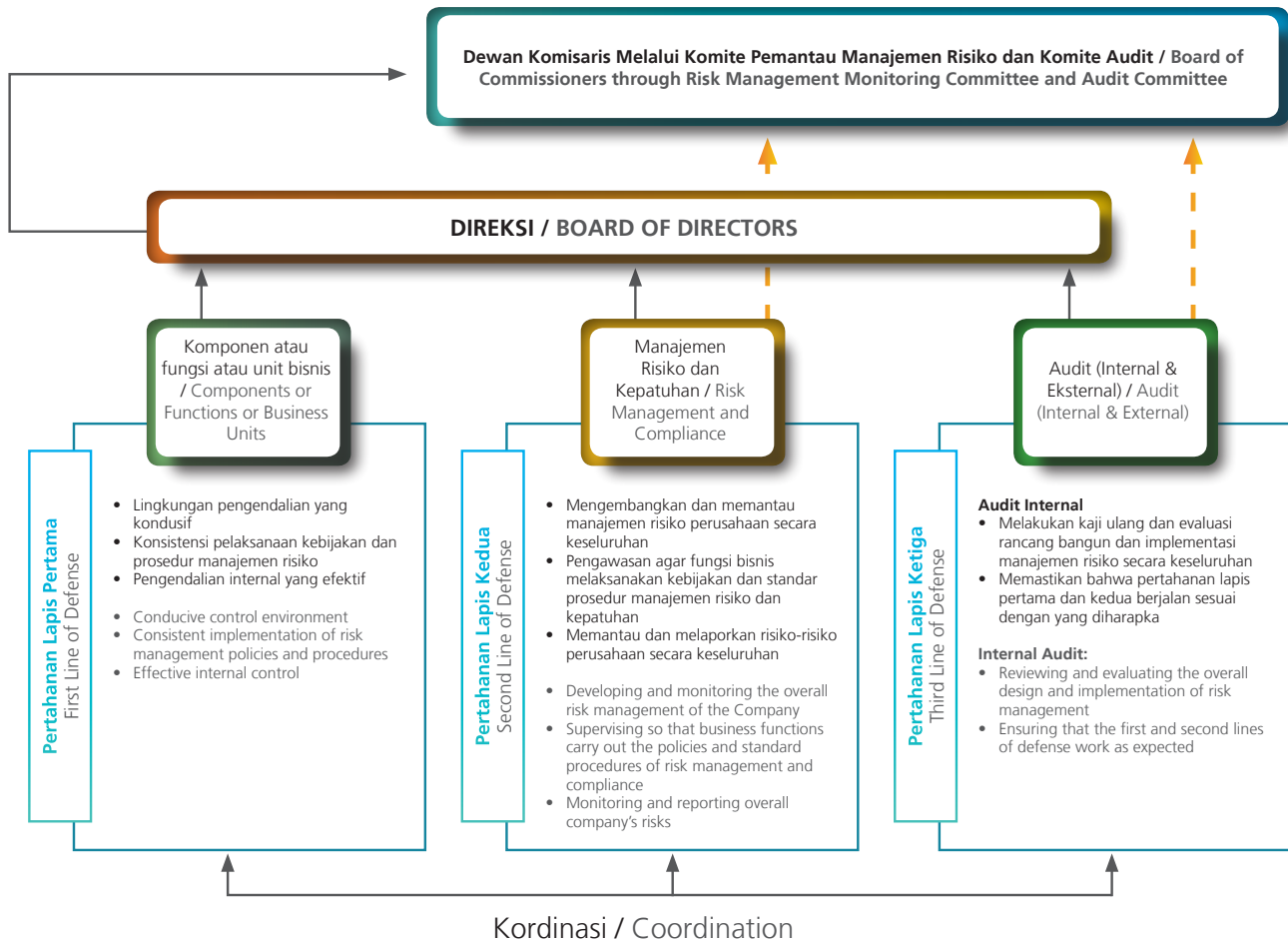
Dilakukan oleh Auditor, baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. / Performed by Auditor, whether it is Internal Auditor or External Auditor.

Peran Auditor Internal jauh lebih intens dalam model Pertahanan 3 (tiga) Lapis ini karena merupakan bagian Internal Perseroan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, Auditor Internal bertugas untuk: / The role of Internal Auditor is much more intense in the Three Lines of Defense model as it is an internal part of the Company which is independent of other functions. In this case, Internal Audit is tasked with:

- Melakukan kajian ulang dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan; / Reviewing and evaluating the overall framework and implementation of Risk Management;
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. / Ensuring that the first and second lines of defense work as expected.

Penerapan Kerangka Pertahanan Tiga Lapis di IPC

Implementation of Three Lines of Defense Framework in IPC



PROGRAM STRATEGIS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020
Penyusunan Business Continuity Management (BCM) di 5 (Lima) Cabang Pelabuhan

Menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Business Continuity Management (BCM)* adalah proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan/bencana guna melindungi kepentingan para *stakeholder*.

IPC telah menyusun kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management (BCM)* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/23/12/1/RNO/UT/PI.II-19 tanggal 23 Desember 2019. Dokumen *Business Continuity Management (BCM)* berisi tentang:

- Business Impact Analysis (BIA)*,
- Risk Assessment (RA)*,
- Threat Assessment*,
- Business Continuity Strategy (BCS)*,
- Procedure drill/Exercise*.

RISK MANAGEMENT STRATEGIC PROGRAM IN 2020
Preparation of Business Continuity Management (BCM) in 5 (Five) Port Branches

According to Bank Indonesia and Financial Services Authority, *Business Continuity Management (BCM)* is an integrated and comprehensive management process to ensure that the Company's operational activities can continue to function despite disruptions/disasters in order to protect interests of stakeholders.

IPC has prepared *Business Continuity Management* policies and guidelines in the Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: HK.01/23/12/1/RNO/UT/PI.II-19 dated December 23, 2019. The *Business Continuity Management* contains:

- Business Impact Analysis (BIA)*,
- Risk Assessment (RA)*,
- Threat Assessment*,
- Business Continuity Strategy (BCS)*,
- Procedure drill/Exercise*.



Untuk memastikan keberlangsungan bisnis jasa kepelabuhanan apabila terjadi bencana, maka disusunlah *Business Continuity Management* (BCM) di 5 (lima) Cabang Pelabuhan IPC yaitu Cabang Pelabuhan Jambi, Cabang Pelabuhan Palembang, Cabang Pelabuhan Cirebon, Cabang Pelabuhan Pontianak dan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam.

Pembuatan *Automatic Risk Early Warning System*

1. Untuk menambah wawasan tentang penerapan *Key Risk Indicator* dan *early warning system*, telah dilaksanakan Studi Banding ke PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Pertamina (Persero);
2. Telah dilaksanakan pelatihan *Key Risk Indicator & Early Warning System* dengan narasumber Manajemen Risiko dari PT Pertamina (Persero) pada *Batch 1* pada tanggal 29 – 30 September 2020 dan *Batch 2* pada tanggal 9 – 10 November 2020;
3. Sebagai langkah awal dalam rangka penerapan *Risk Early Warning System*, telah ditetapkan *Standard Operating Procedure* Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU) atau *Key Risk Indicator* (KRI) yang direncanakan pada tahun 2021 secara bertahap diterapkan SOP dimaksud.

Peningkatan *Risk Culture & Awareness*

IPC senantiasa berupaya untuk meningkatkan *risk culture* dan *awareness* seluruh karyawan IPC terhadap pentingnya implementasi Manajemen Risiko di lingkungan kerja Perseroan dalam rangka mengantisipasi adanya risiko yang berpotensi muncul dalam proses pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan. Upaya tersebut direalisasikan melalui beberapa langkah, diantaranya penyelenggaraan *Risk Champion/Agent Awards*, Program Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur, dan Seminar Manajemen Risiko.

Risk Champion/Agent Awards

IPC Risk Award tahun 2020 memiliki 3 (tiga) kategori yang diperlombakan, yaitu Kategori Rindu, Kategori Kangen, dan kategori Kencan.

1. Kategori Rindu – “Risk Individu”

- Merupakan penghargaan bagi insan IPC dalam mengidentifikasi risiko-risiko masing-masing individu terkait pekerjaan sehari-hari. Dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut, dilihat kesesuaian mitigasinya dan realisasi dari mitigasi tersebut.
- Diikuti oleh 3.626 peserta dari Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan.

2. Kategori Kangen – “Kejuaraan antar Risk Agent”

- Merupakan kejuaraan antar pengelola Manajemen Risiko Cabang Pelabuhan dan pengelola Manajemen Risiko Anak Perusahaan.

To guarantee the continuity of port services business when there is a disaster, Business Continuity Management is prepared in 5 (five) IPC Port Branches, namely Jambi Port Branch, Palembang Port Branch, Cirebon Port Branch, Pontianak Port Branch, and Pangkal Balam Port Branch.

Creation of *Automatic Risk Early Warning System*

1. Comparative studies to PT Jasa Raharja (Persero) and PT Pertamina (Persero) have been conducted to add insight for the implementation of Key Risk Indicator and Early Warning System;
2. Trainings for Key Risk Indicator & Early Warning System have been held with Risk Management of PT Pertamina (Persero) as speaker on Batch 1 on September 29-30, 2020 and Batch 2 on November 9-10, 2020;
3. As the initial step in implementing Risk Early Warning System, the Company has established Standard Operating Procedure on Key Risk Indicator that is planned to be implemented in a gradual manner in 2021.

Risk Culture & Awareness Improvement

IPC continues the efforts to improve risk culture and awareness of all IPC employees towards the importance of Risk Management implementation within the working environment of the Company. It is conducted to anticipate of potential risk that may arises in the Company's operational activities. Such efforts are realized through several steps, among others holding Risk Champion/Agent Awards, Structured Risk Management Training Program, and Risk Management Seminar.

Risk Champion/Agent Awards

IPC Risk Award awarded 3 (three) categories in 2020, namely Rindu Category, Kangen Category, and Kencan Category.

1. Rindu Category – “Risk Individual”

- It is an award for IPC personnel in identifying the risks of each individual related to their daily work. Of all the identified risks, the risk mitigation and its implementation are judged.
- It was followed by 3,626 participants from the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.

2. Kangen Category – “Risk Agents Championship”

- It is a championship between Risk Management agents of Port Branches and Risk Management agents of Subsidiaries.

- Kriteria penilaian antara lain dilihat dari kecepatan pengiriman laporan risiko, partisipasi dalam setiap kegiatan Manajemen Risiko dan Jumlah kepesertaan pegawai pada acara IPC Risk Award.
- Diikuti oleh 28 pengelola risiko dari Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.

3. Kategori Kencan – “Kejuaraan executive antar Risk Champion”

- Merupakan kejuaraan antar GM Cabang, Direktur Utama Anak Perusahaan dan VP/SVP/EVP di Kantor Pusat.
- Kriteria penilaian untuk kategori Kencan, antara lain keikutsertaan dalam pengisian Form *Survey IPC Risk Award*, komitmen dalam mendukung kegiatan Manajemen Risiko, jumlah kepesertaan pegawai dilingkungannya pada acara *IPC Risk Award* dan keaktifan dalam mengelola risiko.

Program Pelatihan dan Seminar Manajemen Risiko

Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM IPC mengenai manajemen risiko, Perseroan mengikutsertakan beberapa karyawan yang bertugas dalam menyelenggarakan program manajemen risiko di lingkungan IPC ke dalam beberapa program pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur, dengan uraian sebagai berikut:

Daftar Pelatihan Manajemen Risiko Terstruktur Tahun 2020

No.	Nama Pelatihan / Training Name	Waktu Pelatihan / Training Duration	Peserta (Karyawan IPC) / Participant (IPC Employee)
1.	Workshop Manajemen Risiko / Risk Management Workshop	27 Februari 2020 / February 27, 2020	34 orang / people
2.	Pelatihan <i>Risk Fundamental</i> / Risk Fundamentals Training	22 – 25 September 2020 / September 22-25, 2020	30 orang / people
3.	Pelatihan <i>Key Risk Indicator & Early Warning System Batch I</i> / Key Indicator & Early Warning System Training Batch I	29 – 30 September 2020 / September 29-30, 2020	17 orang / people
4.	Pelatihan <i>Key Risk Indicator & Early Warning System Batch II</i> / Key Indicator & Early Warning System Training Batch II	9 – 10 November 2020 / November 9-10, 2020	19 orang / people

Selain program pelatihan, Perseroan juga mengikutkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Para EVP/SVP/VP/GM Cabang Pelabuhan, Para SDVP/DVP/DGM Cabang Pelabuhan, Direksi Anak Perusahaan, Organ Komite Dewan Komisaris dan karyawan IPC dan Anak Perusahaan ke Seminar Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara Webinar pada tanggal 21 Desember 2020 dengan tema “Implementation of GCG & Risk Management to Prevent Fraud at IPC”. Seminar tersebut disampaikan oleh narasumber Bapak Erry Riyana Hardjapamekas selaku Wakil Ketua KPK periode 2003 – 2007, *Keynote Speaker* 1 yaitu Bapak Moermahadi Soerja Djanegara selaku Komisaris Utama IPC, dan *Keynote Speaker* 2 yaitu Bapak Arif Suhartono selaku Direktur Utama IPC.

- The evaluation criteria are the promptness of risk report delivery, participation in every Risk Management activity, and total employee participation in IPC Risk Award.
- It was participated by 28 risk agents from Port Branches and Subsidiaries.

3. Kencan Category – “Risk Champions or Executives Championship”

- It is a competition between GM of Port Branches, President Director of Subsidiaries and VP/SVP/EVP of the Head Office.
- The evaluation for this category are participation in filling in IPC Risk Award Survey Form, commitment in supporting Risk Management activities, employee participation in IPC Risk Award and activeness rate in managing risks.

Risk Management Training and Seminar

In order for IPC HC to add insight and gain knowledge about risk management, the Company includes several employees tasked with implementing risk management within IPC into several Structured Risk Management trainings as follows:

Structured Risk Management Training in 2020

In addition to training programs, the Company also includes the Board of Commissioners, Board of Directors, EVP/SVP/VP/GM of Port Branches, SDVP/DVP/DGM of Port Branches, Board of Directors of Subsidiaries, the Committee Organ of the Board of Commissioners and Employees of IPC and Subsidiaries in the Risk Management Seminar held in a Webinar on December 21, 2020 with the theme of “Implementation of GCGO & Risk Management to Prevent Fraud at IPC”. Speakers of the seminar were KPK Deputy Chief for 2003-2007 period Erry Riyana Hardjapamekas, *Keynote Speaker* 1 IPC President Commissioner Moermahadi Soerja Djanegara, and *Keynote Speaker* 2 IPC President Director Arif Suhartono.



Melakukan Kajian Risiko Proyek Strategis Nasional

1. Pembuatan Risiko Utama pembangunan CT2 dan PT 1;
2. Pembuatan Kajian Kerjasama khusus Pembangunan Terminal Kalibaru;
3. Pembuatan kajian risiko PRM Pelabuhan Kalibaru tahap 2.

Implementasi Manajemen Risiko sebagai Unsur Decision Making Process

Pada tahun 2020, telah diimplementasikan *Risk Based Decision Making* (RBDM) sebagai bahan masukan Direksi pada saat pengambilan keputusan/aksi korporasi antara lain:

1. Pembuatan RBDM terkait Perubahan Anggaran Dasar PT PII;
2. Pembuatan RBDM terkait Akuisisi Saham PT ILCS;
3. Pembuatan RBDM terkait Persetujuan kembali PMPI PT RSP;
4. Pembuatan RBDM KEK Bengkulu;
5. Pembuatan RBDM Investasi KSO TPK Koja.

Meningkatkan Peran Divisi Manajemen Risiko sebagai Risk Advisor dalam Penciptaan Nilai (Value Creation) Bidang Komersial dan Operasional

Pendampingan Manajemen Risiko

1. Sosialisasi pendampingan manajemen risiko secara *online* terkait Kebijakan Manajemen Risiko dan kertas kerja risiko tahun 2021 ke 12 Cabang Pelabuhan;
2. Pembuatan kuesioner sebagai alat (*tools*) untuk menggambarkan implementasi manajemen risiko di Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.

Risk Universe, Risk Appetite dan Risk Tolerance

Bahwa untuk pedoman dalam penyusunan pengukuran risiko pada proses asesmen risiko perlu ditetapkan pernyataan selera risiko dan toleransi risiko dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Melakukan *workshop/benchmark* pada Perseroan yang telah menerapkan selera dan toleransi risiko seperti PT Askrido;
2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan kepada responden, yaitu Direksi, melalui secara *online* (*google docs*) maupun secara *offline*;
3. Penyusunan dan pengesahan Surat Keputusan Direksi tentang penetapan pernyataan selera risiko (*risk appetite statement*) dan pernyataan toleransi risiko (*risk tolerance statement*) Direksi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Melakukan *cascading* pernyataan selera risiko (*risk appetite statement*) dan pernyataan toleransi risiko (*risk tolerance statement*) ke dalam kriteria dampak risiko dan kriteria kemungkinan risiko;

Reviewing Risks of National Strategic Projects

1. Reviewing Major Risks of CT2 and PT1 constructions;
2. Reviewing the Exclusive Cooperation of Kalibaru Terminal;
3. Reviewing the risks of PRM Kalibaru Port phase 2.

Implementation of Risk Management as Decision Making Process Element

Risk Based Decision Making (RBDM) has been implemented since 2020 as input for the Board of Directors in making corporate decisions/actions, among others:

1. RBDM related to Amendment to the Articles of Association of PT PII;
2. RBDM related to Share Acquisition of PT ILCS;
3. RBDM related to re-approval of PT RSP PMPI;
4. RBDM related to Bengkulu SEZ;
5. RBDM related to KSO for TPK Koja.

Improving Role of Risk Management Division as Risk Advisor in Value Creation in Commercial and Operational Fields

Risk Management Assistance

1. Online dissemination of Risk Management accompaniment related to Risk Management Policies and risk working paper of 2021 to 12 Port Branches;
2. Preparation of questionnaires as tools to describe risk management implementation in Port Branches and Subsidiaries.

Risk Universe, Risk Appetite and Risk Tolerance

In the guidelines for preparing risk measurement in the risk assessment process, the risk appetite and risk tolerance need to be determined by using the following methods:

1. Performing workshop/benchmark on the Company that has implemented risk appetite and risk tolerance such as PT Askrido.
2. Preparing and distributing questionnaires risk appetite and risk tolerance of the Company to responders through the Board of Directors by online (*google docs*) or offline.
3. Preparing and ratifying the Board of Directors Letter about determination of risk appetite state and risk tolerance statement of the Board of Directors within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Cascading the risk appetite statement and risk tolerance statement into risk impact criteria and risk possibility criteria

- Melakukan sosialisasi pernyataan selera risiko (*risk appetite statement*) dan pernyataan toleransi risiko (*risk tolerance statement*) kepada PIC (*risk agent*) manajemen risiko Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat.

Partisipasi dalam Risk Awards Event

Dalam rangka untuk meningkatkan citra dan *value* Perseroan, IPC telah mengikuti ajang penghargaan risiko, pada tahun 2020 IPC mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

1. TOP GRC 2020

- # 4 Stars: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Pemenang Kategori "*The Most Committed GRC Leader 2020*": Arif Suhartono (Direktur Utama IPC);
- Pemenang Kategori "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*": Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama IPC).

2. GRC Excellence Award 2020

- The Best CEO & GRC Leader 2020: Arif Suhartono (Direktur Utama IPC).

3. GRC Excellence Award 2020

- The Best GRC Overall for Corporate and Performance 2020 (In Logistic Services): PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, terdapat 4 (empat) jenis bentuk pengelolaan risiko di Perseroan, yaitu:

1. Menerima Risiko (*Accept*)

Upaya untuk mempertahankan risiko pada tingkat risiko saat ini dengan tidak mengambil tindakan lanjutan. Pilihan ini dapat dilakukan untuk risiko yang dianggap tidak signifikan atau memiliki tingkat kepentingan yang rendah bagi Perusahaan;

2. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Upaya untuk memindahkan/menggeser risiko yang ada kepada pihak ketiga yang independen dan memiliki kemampuan finansial yang kuat (seperti: perusahaan asuransi) dengan biaya yang sewajarnya dan pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang bermuatan hukum;

3. Menghindari Risiko (*Avoid*)

Upaya untuk menghindari eksposur terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko yang berpotensi terjadi (Contoh: menghentikan kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan risiko tersebut). Tindakan ini dapat dipilih sebagai perlakuan terhadap risiko yang memiliki tingkat risiko yang tidak dapat ditoleransi ataupun diterima oleh Perusahaan karena memiliki dampak yang signifikan;

- Disseminating risk appetite statement and risk tolerance statement to PIC (risk agent) of risk management at Port Branches and Head Office.

Risk Awards Participation

In order to improve the Company's image and value, IPC has participated in risk award events and received the following awards in 2020:

1. TOP GRC 2020

- # 4 Stars: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Winner of "*The Most Committed GRC Leader 2020*" category: Arif Suhartono (IPC President Director);
- Winner of "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*" category: Moermahadi Soerja Djanegara (IPC President Commissioner).

2. GRC Excellence Award 2020

- The Best CEO & GRC Leader 2020: Arif Suhartono (IPC President Director).

3. GRC Excellence Award 2020

- The Best GRC Overall for Corporate and Performance 2020 (In Logistic Services): PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

RISK MANAGEMENT EFFORTS

In accordance with Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy, there are 4 (four) types of risk management at the Company, namely:

1. Accepting Risk

An effort to accept a risk at its current level by not taking further actions. This option can be made for risks that are considered insignificant or have low level of importance for the Company;

2. Transferring Risk

An effort to transfer/shift a risk to an independent third party with strong financial capabilities (such as insurance companies) with reasonable costs and are generally based on legal agreements;

3. Avoiding Risk

An effort to avoid exposure to potential risks that may arise (such as stopping activities that may cause the risk). This action can be selected as a treatment for a risk that is at intolerable or unacceptable level for the Company due to its significant impact;



4. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Strategi untuk mengambil tindakan mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan memfokuskan pada penurunan kemungkinan dan dampak risiko. (Contoh: mengurangi tingkat risiko dengan menempatkan pengendalian tambahan atau menguatkan pengendalian dan proses yang sudah ada).

Dalam mengelola risiko-risiko perusahaan, IPC menurunkan rencana penanganan risiko tersebut dalam beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja

Pedoman, prosedur dan instruksi kerja termasuk dalam penanganan risiko yang sudah dilakukan atau biasa disebut sebagai aktivitas kontrol. Adanya efektivitas kontrol dapat menurunkan tingkat risiko residual. Apabila dengan adanya aktivitas kontrol ini tingkat risiko menjadi rendah atau sangat rendah, maka tidak perlu lagi adanya rencana penanganan lanjutan, cukup dengan melakukan *monitoring* terkait dengan aktivitas kontrol tersebut.

2. Rencana Kerja Manajemen (RKM)

Setiap unit kerja mempunyai risikonya masing-masing, selain risiko rutin ada juga risiko yang sifatnya strategis sesuai dengan visi IPC menuju *World Class Port*. Risiko ini di mitigasi melalui program kerja atau rencana kerja manajemen. Adanya program kerja atau rencana kerja manajemen ini outputnya diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko.

3. Investasi

Sesuai visi misi IPC menuju *World Class Port*, IPC dituntut untuk mengembangkan infrastruktur modern. Merencanakan investasi pembangunan pelabuhan adalah salah satu cara untuk menjawab tantangan atau risiko untuk menuju *World Class Port*.

PROFIL, PENILAIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO

Profil Risiko

Sesuai dengan *Corporate Roadmap* IPC, tema tahun 2020 adalah "*Business Stabilization: Commercial and Operational Excellence*". Tema serta target-target Perseroan yang tercantum dalam RJPP dan RKAP tersebut menjadi sasaran dalam menetapkan konteks risiko tahun 2020. Selain sasaran Perseroan, kondisi internal dan eksternal Perusahaan serta aspirasi dari *stakeholder* menjadi bagian dari konteks risiko tahun 2020.

4. Mitigating Risk

It is a strategy to take the action in reducing risk to an acceptable level by focusing on reducing risk possibility and impact (such as reducing risk level by placing additional control or strengthening existing controls and processes).

In managing the Company's risks, IPC has divided risk management plan into several matters, among others:

1. Work Guideline, Procedure, and Instruction

Work guideline, procedure, and instruction are included in risk management that have been carried or commonly referred to as control activities. Control effectiveness can reduce the level of residual risk. When the risk level becomes low or very low with this control activity, then there is no need for further management plan and only monitoring is required in relation to the activity control.

2. Management Work Plan (RKM)

Each unit has its own risk. Aside from routine risks, there are also strategic risks to IPC vision to become World Class Port Operator. These risks are mitigated through management work plan or work program with outputs that are expected to reduce the risk level.

3. Investment

According to IPC vision to be a World Class Port operator, the Company needs to develop modern infrastructures. One of the means to answer the challenge or risk in becoming a World Class Port operator is through planning port development investment.

RISK PROFILE ASSESSMENT AND MANAGEMENT

Risk Profile

In accordance with IPC Corporate Map, the theme of 2020 is "*Business Stabilization: Commercial and Operational Excellence*". The Company's theme and targets are included in RJPP and RKAP which also serve as targets in determining risk context of 2020. In addition to targets, the Company's internal and external conditions as well as aspirations from stakeholders are parts of the 2020 risk context.

Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi) dilakukan berdasarkan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *Top-Down*
Risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Top-Down* adalah risiko yang diidentifikasi melalui penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi secara korporat.
2. Pendekatan *Bottom-Up*
Risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Bottom-Up* adalah yaitu risiko-risiko yang teridentifikasi oleh *Risk Owner* berdasarkan aktivitas.
3. Pendekatan *Loss Event Manajemen* (LEM)
Risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Loss Event Management* (LEM) yaitu risiko-risiko berdasarkan data kejadian di tahun lalu dan kemungkinan risiko tersebut masih bisa terjadi di tahun ini.

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, dengan menggunakan *Risk Control & Self-Assesment* (RCSA) diperoleh risiko-risiko korporat yang meliputi Risiko Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan. Dari risiko-risiko tersebut dipilih risiko signifikan Perseroan atau Korporat yaitu:

Risk management process (identification, analysis, and evaluation) is carried out by 3 (three) approaches, namely:

1. Top-Down Approach
Risks obtained/identified through this approach are risks identified by assessing the achievement of corporate objectives.
2. Bottom-Up Approach
Risks obtained/identified through this approach are risks identified by Risk Owner based on activities.
3. Loss Event Management (LEM) Approach
Risks obtained/identified through this approach are risks on data from events in previous years and such risks have the possibility to occur this year.

Based on these approaches and through using Risk Control & Self-Assessment (RCSA), there are corporate risks that include Head Office risks, Port Branches risks, and Subsidiaries risks. From these risks, the significant risks are risks from the Company or Corporate, namely:

Profil dan Penilaian Risiko IPC Tahun 2020

IPC Risk Profile and Assessment in 2020

No.	Nama Risiko / Risk Name	Tingkat Risiko / Risk Level
1.	Risiko Penularan dan Penyebaran Covid-19 / Risk of the Spread and Transmission of Covid-19	Sangat Tinggi / Very High
2.	Risiko Tidak Tercapainya Target Pendapatan Operasional / Risk of Not Achieving Operational Revenue Target	Menengah / Moderate
3.	Rugi Selisih Kurs / Risk of Exchange Rate Difference	Rendah / Low
4.	Risiko Rendahnya Penyerapan Investasi / Risk of Low Absorption of Investment	Menengah / Moderate
5.	Risiko Meningkatnya Beban Biaya Perusahaan / Risk of Increased Cost	Menengah / Moderate
6.	Risiko Kehilangan Pangsa Pasar / Risk of Losing Market Share	Rendah / Low
7.	Risiko Piutang Macet / Risk of Bad Debt	Menengah / Moderate
8.	Risiko Kegagalan Pengelolaan Aset / Risk of Asset Management Failure	Menengah / Moderate
9.	Risiko Kegagalan Penanganan Permasalahan Hukum / Risk of Failure in Handling Legal Issue	Menengah / Moderate
10.	Risiko Perubahan Cuaca Ekstrem dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja & Lingkungan (K3L) / Risk of Extreme Weather and Occupational Health, Safety and Environment (OHSE)	Rendah / Low
11.	Risiko Rendahnya Keandalan Information Technology (IT) / Risk of Low Reliability of Information Technology (IT)	Rendah / Low
12.	Risiko Rendahnya Keandalan Laporan Keuangan / Risk of Low Reliability of Financial Statements	Rendah / Low
13.	Risiko Penyuaian dan <i>Fraud</i> / Risk of Bribery and Fraud	Rendah / Low
14.	Risiko Tidak Optimalnya Pengelolaan Perpajakan / Risk of Suboptimal Tax Management	Rendah / Low
15.	Risiko Turunnya Reputasi Perusahaan / Risk of Lowered Reputation	Rendah / Low
16.	Risiko Tertundanya Proyek Strategis Nasional / Risk of Postponement of National Strategic Projects	Menengah / Moderate



Mitigasi Risiko

Setiap risiko yang telah teridentifikasi akan ditentukan upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penilaian risiko Perseroan di atas, IPC telah menyusun upaya mitigasi risiko guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perseroan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Risk Mitigation

Risk mitigation for every identified risk will be determined as anticipation to potential risk that may arise in the Company's business in the future. Based on risk assessment of the Company, IPC has prepared risk mitigation effort described below to reduce the impact or loss that may hinder the Company's performance in the following table:

Upaya Mitigasi Risiko IPC Tahun 2020

IPC Risk Mitigation Effort in 2020

No.	Nama Risiko / Risk Name	Penanganan Risiko / Risk Management
Tingkat Risiko : SANGAT TINGGI / Risk Level: VERY HIGH		
1.	Risiko Penularan dan Penyebaran Covid-19 / Risk of the Spread and Transmission of Covid-19	<p>Melanjutkan pemberlakuan Surat Edaran tentang Waktu Kerja Menuju Kondisi New Normal Masa Transisi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), contohnya: / Continuing the enforcement of Circular Letter concerning Working Time Towards New Normal Conditions during Transition Period within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian jam kerja bagi yang melakukan <i>Work from Office</i> (WfO); / Working hours distribution for those who Work from Office (WfO); b. Jumlah pekerja yang melakukan WfO tidak lebih dari 50 persen; / Total employees working from office does not exceed 50 percent; c. Rapat yang diadakan dalam kegiatan tatap muka tidak boleh melebihi 5 orang peserta; / Face to face meeting must not exceed 5 participants; d. Meningkatkan penegakan implementasi protokol kesehatan di seluruh aktivitas kantor dan operasional lapangan; / Improving the implementation of health protocols in all activities in the office and field operations; e. Melakukan tindakan preventif untuk menghentikan penyebaran Covid-19 melalui <i>tracing contact</i> penderita, yang diikuti dengan <i>swab</i> dan <i>rapid test</i>, serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan kerja; / Performing preventive actions to stop Covid-19 transmission through tracing the patient's contact followed by swab and rapid tests as well as disinfecting all working rooms; f. Melakukan rapat secara <i>online</i>; / Holding meetings online; g. Melakukan <i>swab test</i> secara periodik. / Performing swab test periodically.
Tingkat Risiko : MENENGAH / Risk Level: MODERATE		
2.	Risiko Tidak Tercapainya Target Pendapatan Operasional / Risk of Not Achieving Operational Revenue Target	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan penandatanganan kerja sama penanganan bongkar muat produk curah cair di Terminal Kijing; / Have conducted signing of handling cooperation for loading and unloading of liquid bulk product at Kijing Terminal; b. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pelanggan agar tetap melaksanakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan di Lingkungan IPC; / Maintaining and improving customer service to remain performing loading and unloading activities at Ports of IPC; c. Menyampaikan Evaluasi Kinerja terhadap Capaian RKAP 2020 antara lain agar Manajemen Anak Perusahaan dan Cabang Menjaga komitmen terhadap pencapaian target-target RKAP tahun 2020 serta target-target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) sebagaimana termuat dalam Kontrak Kinerja Tahun 2020. / Submitting Performance Evaluation of RKAP 2020 Achievement, among others so that Management of Subsidiaries and Port Branches maintain the commitment to achieve 2020 RKAP targets and Key Performance Indicators (KPI) targets as stipulated in 2020 Performance Contract.
3.	Risiko Rendahnya Penyerapan Investasi / Risk of Low Absorption of Investment	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat <i>feasibility study</i> dan pemetaan risiko agar dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan pelaksanaan investasi; / Improving feasibility study and risk mapping to facilitate decision making in investment; b. Dengan Sistem <i>Monitoring</i> Realisasi Investasi; / Monitoring System for Investment Realization; c. Selalu memantau dan mengevaluasi kegiatan, baik perencanaan maupun pelaksanaan fisik; / Always monitoring and evaluating activities in terms of planning and physical implementation; d. Pembentukan Tim <i>Task Force</i> Percepatan pelaksanaan investasi; / Establishing a Task Force team to accelerate investment implementation; e. Menyelesaikan proses perizinan terkait secara paralel atau terlebih dahulu sebelum proses pengadaan fisik dilaksanakan. / Completing related permit process in parallel or before physical procurement is conducted.
4.	Risiko Meningkatnya Beban Biaya Perusahaan / Risk of Increased Cost	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengeluaran biaya dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat <i>must have</i> dan tercantum dalam RKAP; / Expenses are focused on must-have activities and included in RKAP; b. Pengeluaran biaya fokus pada yang menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan; / Expenses are focused on generating income for the Company; c. Penerapan skala prioritas dan <i>cost effectiveness</i> di semua bagian. / Implementing priority scale and cost effectiveness in all divisions.
5.	Risiko Piutang Macet / Risk of Bad Debt	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan posisi piutang masing-masing Cabang secara bulanan dan evaluasi piutang secara triwulanan; / Submitting account receivables position of each Branch monthly and evaluating accounts receivable quarterly; b. Melakukan inventarisasi data piutang usaha perusahaan khususnya piutang lama; / Making inventory of the Company's trade receivables, particularly old ones; c. Melakukan penyelesaian piutang secara intensif kepada para pengguna jasa yang memiliki piutang; / Settling accounts receivable intensively to service users with accounts receivable; d. Bekerja sama dengan JPN untuk penagihan piutang; / Cooperating with JPN for collecting accounts receivable; e. Menerapkan penundaan pelayanan terhadap pelanggan yang mempunyai tunggakan (selektif untuk cabang-cabang yang tidak mempunyai kompetitor); / Implementing service delay for customers with arrears (selective for branches with no competitors); f. Menerapkan/meningkatkan proses <i>monitoring</i> CMS, Uper, dan <i>Autocollection</i>; / Applying/improving monitoring process for CMS, Uper, and Autocollection; g. Mempercepat penerbitan nota segera setelah pelayanan selesai. / Accelerating issuance of receipts after service is provided.

No.	Nama Risiko / Risk Name	Penanganan Risiko / Risk Management
6.	Risiko Kegagalan Pengelolaan Aset / Risk of Asset Management Failure	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi & reviu optimalisasi atas aset lahan <i>idle</i>; / Identifying & reviewing optimization of idle land assets; b. Pemakaian media digital/<i>online</i> dalam WA <i>Group</i> "IPC Manajemen Aset" untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan serta mencari solusinya; / Utilizing digital/<i>online</i> media in "IPC Manajemen Aset (IPC Asset Management)" Whatsapp Group to be aware of the development and issue as well as coming up with the solution; c. Identifikasi dan reviu atas lahan yang saat ini telah dikerjasamakan dengan pihak lainnya; / Identifying and reviewing shared lands with other parties; d. Mengidentifikasi dan melakukan reviu atas permasalahan penggunaan lahan pada Cabang di lingkungan Perusahaan; / Identifying and reviewing land use issues in Port Branches of the Company; e. Mengidentifikasi dan reviu atas sertifikat atas aset lahan/sertifikasi beserta masa berlakunya masing-masing; / Identifying and reviewing land asset certificates/certification and validity period of each asset certificate; f. Mengoptimalkan kegiatan <i>meeting</i> secara <i>online</i> agar dapat memahami perkembangan dan permasalahan masing-masing terkait aset serta mencari solusinya; / Optimizing online meetings to understand development and issue of each asset and coming up with the solution; g. Membuat kajian/melakukan reviu atas optimalisasi lahan melalui program <i>Highest and Best Use Study</i> (HBU) sehingga dapat diidentifikasi penggunaan maksimal (terbaik) bidang lahan tersebut; / Reviewing land optimization through Highest and Best Use Study (HBU) program to identify the best use of the land; h. Melakukan reviu bulanan atas <i>progress</i> penyelesaian setiap permasalahan yang ada serta <i>monitoring</i> rencana tindak lanjutnya. / Conducting monthly review of the progress of issue resolution and monitoring the follow-up plan.
7.	Risiko Kegagalan Penanganan Permasalahan Hukum / Risk of Failure in Handling Legal Issue	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian pendapat hukum (<i>Legal Opinion</i>) secara tertulis berkaitan dengan kegiatan Perusahaan; / Providing written legal opinion related to the Company's activities; b. Asistensi hukum program strategis Perusahaan; / Legal assistance for the Company's strategic program; c. Bantuan dan Pendampingan Hukum; / Legal Assistance; d. Dilakukan proses penyelesaian melalui <i>Business to Business</i> dahulu sebelum dilakukan Tindakan Hukum kepada PT Adiguna Shipyard & Engineering; / Conducting resolution process through Business to Business prior to taking legal action against PT Adiguna Shipyard & Engineering; e. Telah dibuat Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait eksekusi Putusan Perkara Iman Sukanto; / Special Power of Attorney has been drawn up to Deputy Attorney General for Civil and State Administrative Court Affairs in relation to court execution for the Verdict of Iman Sukanto case; f. Telah dilakukan penyusunan dokumen administrasi pengadaan Konsultan Hukum untuk pelaksanaan Eksekusi Putusan dan Pengosongan; / Procurement document has been drawn up for Legal Consultant for the implementation of Verdict Execution and Eviction; g. Melakukan pendampingan Hukum untuk beberapa perkara pidana yang dihadapi oleh Pekerja; / Providing Legal assistance for criminal case faced by Employee; h. Telah dilakukan <i>review</i> atas dokumen-dokumen Perusahaan yang diterima oleh Divisi Hukum sebanyak 168 dokumen; / 168 documents received by Legal Division have been reviewed; i. <i>Upload</i> beberapa peraturan perusahaan dan Akta baru ke dalam sistem Regulasi <i>E-Office</i>; / Uploading several regulations and new deeds of the Company into E-Office Regulation system; j. Mengirimkan surat pemberitahuan terkait permintaan tanggapan atas reminder perikatan pada cabang-cabang Pelabuhan. / Sending notification letter related to response for engagement reminder to Port Branches.
8.	Risiko Tertundanya Proyek Strategis Nasional / Risk of Postponement of National Strategic Projects	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelesaikan pengadaan tanah; / Settling land procurement; b. Melanjutkan pembangunan konstruksi; / Continuing construction; c. Menggunakan jasa konsultansi; / Using consulting services; d. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten untuk penentuan lokasi tanah makam pengganti; / Coordinating with State Land Agency (BPN) and Regency Governments to determine the location of substitute burial grounds; e. Koordinasi dengan BPN untuk proses sertifikasi area konsesi, Hak Pengelolaan (HPL) IPC, dan HG jalan nasional; / Coordinating with BPN for certification process of concession area, Right-to-Manage (HPL) of IPC, and Right-to-Use (HG) of national roads; f. Percepatan pembayaran kepada pihak yang berhak yaitu Gang Baidullah dan Gang Ampara; / Accelerating payment to rightful parties, namely Baidullah Alley and Ampara Alley; g. Penggantian/relokasi aset yang tidak tercatat dilakukan melalui BPN; / Replacing/relocating unrecorded assets through BPN; h. Akan dilakukan penilaian nilai objek oleh tim appraisal; / Object value assessment will be conducted by appraisal team; i. Percepatan penentuan dan penetapan lokasi dengan pemilik aset; / Accelerating location determination and confirmation with asset owner; j. Percepatan penandatanganan perjanjian relokasi dengan pemilik aset. / Accelerating relocation agreement signing with asset owner.
Tingkat Risiko : RENDAH / Risk Level: LOW		
9.	Rugi Selisih Kurs / Risk of Exchange Rate Difference	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Update</i> mata uang korporat; / Updating corporate's currency; b. Konversi valuta asing (valas) pada kurs terbaik melalui <i>bidding</i>. / Converting foreign currency to the best exchange rate through bidding.
10.	Risiko Kehilangan Pangsa Pasar / Risk of Losing Market Share	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan melalui kecepatan bongkar muat dan kesiapan sistem Informasi; / Improving services through the speed of loading and unloading as well as information system readiness; b. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui kunjungan pelanggan dan mensosialisasikan program pelabuhan yang terbaru; / Maintaining good relations with customers through customer visit and disseminating the latest port programs; c. Mengintegrasikan kegiatan <i>marketing</i> melalui <i>stakeholders gathering</i>, <i>customer of the year</i>, dan Hari Ulang Tahun (HUT) IPC; / Integrating marketing activities through stakeholders gathering, customer of the year, and IPC anniversary; d. Melakukan pendekatan ke calon-calon mitra/potensial <i>customer</i> dengan menawarkan lahan-lahan yang dapat dikerjasamakan; / Approaching potential customers by offering shared lands; e. Membantu dalam <i>bridging</i> bisnis antar anak perusahaan ataupun anak perusahaan dan cabang pelabuhan untuk rencana bisnis yang dapat dikerjasamakan; / Assisting in business bridging among subsidiaries or between subsidiaries and port branches for shared business plan f. Melaksanakan peninjauan bisnis kerja sama dengan perusahaan lain yang sesuai dengan <i>core competencies</i> IPC, seperti komersialisasi Terminal baru Kijing; / Exploring business cooperation with other companies in line with IPC core competencies such as commercialization of new Kijing Terminal; g. Melaksanakan kegiatan pemasaran rutin. / Conducting routine marketing activities.



No.	Nama Risiko / Risk Name	Penanganan Risiko / Risk Management
11.	Risiko Perubahan Cuaca Ekstrem dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja & Lingkungan (K3L) / Risk of Extreme Weather and Occupational Health, Safety and Environment (OHSE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Surat Dinas ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan terkait perubahan cuaca ekstrem; / Drawing up Official Letter to Port Branches and Subsidiaries in relation to weather changes and extreme weather; b. Implementasi Sistem Manajemen K3L; / Implementing OHSE Management System; c. Menyiapkan <i>Business Continuity Planning</i> (BCP) terkait mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi; / Preparing Business Continuity Planning (BCP) in anticipation for potential disruptions; d. Meningkatkan kewaspadaan; / Increasing awareness; e. Memastikan kesiapan prosedur kondisi gawat darurat (banjir) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan covid-19. / Ensuring preparedness for emergency conditions (flood) in accordance with Covid-19 health protocols.
12.	Risiko Rendahnya Keandalan <i>Information Technology</i> (IT) / Risk of Low Reliability of Information Technology (IT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah dilakukan penyusunan IT <i>Master Plan</i> untuk mengetahui kebutuhan user; / IT Master Plan preparation has been carried out to understand user needs; b. IT <i>Risk Management</i>: Mengaplikasikan prinsip pengelolaan risiko pada organisasi IT untuk menjaga keberlangsungan layanan dan keamanan sistem informasi; / IT Risk Management: Applying risk management principle in IT organization to maintain continuity of information system services and security; c. <i>Enhancement Firewall</i> DC, DRC Kantor Pusat; / Enhancing Firewall of Head Office Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC); d. SIEM (<i>Security Identity and Event Management</i>); / SIEM (Security Identity and Event Management); e. Menggunakan perangkat IT (<i>software/hardware</i>) yang berlisensi; / Using licensed IT devices (software/hardware); f. Peningkatan kapasitas dan <i>monitoring</i> infrastruktur; / Improving capacity and infrastructure monitoring; g. Penyusunan <i>DRP</i>: Mengembangkan BCP dan <i>Disaster Recovery Planning</i> (DRP) yang berisi prosedur yang harus dilakukan saat proses <i>recovery</i>. / Disaster Recovery Planning (DRP) preparation: Developing BCP and DRP containing procedures during recovery process.
13.	Risiko Rendahnya Keandalan Laporan Keuangan / Risk of Low Reliability of Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bidang akuntansi; / Holding trainings to improve knowledge and skills in accounting; b. Melanjutkan proses audit KAP yang telah berjalan; / Continuing the running audit process by Public Accounting Firm (KAP); c. <i>Enhancement</i> Sistem Pembuatan RKAP EPBCS di lingkungan Grup IPC; / Enhancing Work Plan and Budget (RKAP) as well as Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service (EPBCS) System within IPC Group; d. Pelaksanaan <i>Refreshment</i> Penggunaan <i>Oracle Project Costing</i> Grup IPC; / Refreshing Oracle Project Costing Use of IPC Group; e. Implementasi Laporan konsolidasi Grup IPC Sistem Akuntansi Biaya untuk Laporan Laba Rugi dan Arus Kas; / Implementing consolidated statement of IPC Group Cost Accounting System for Profit or Loss and Cash Flows Statements; f. Implementasi Sistem Aplikasi <i>Mobile Asset Management System</i> yang terintegrasi dengan <i>Fixed Asset Management System</i> milik IPC; / Implementing Mobile Asset Management System integrated with Fixed Asset Management System of IPC; g. Integrasi Data Perpajakan (<i>Host to Host</i>); / Tax Data Integration (Host to Host); h. Pengembangan Laporan Arus Kas Konsolidasi IPC Group; / Developing Consolidated Cash Flows Statement of IPC Group; i. Penyusunan Standarisasi Perencanaan & Pengendalian Operasi; / Preparing Operation Planning & Control Standardization; j. Akan dilakukan implementasi <i>single billing</i>; / Single billing implementation will be carried out; k. Melakukan <i>support</i> untuk implementasi perubahan <i>Chart of Account</i> (COA); / Supporting implementation of Chart of Account (COA) changes; l. Melanjutkan standarisasi integrasi menggunakan <i>ESB</i>. / Continuing integration standardization using <i>ESB</i>.
14.	Risiko Penyuaan dan <i>Fraud</i> / Risk of Bribery and Fraud	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan; / Implementing Anti-Bribery Management System; b. Implementasi <i>WBS</i>; / Implementing Whistleblowing System (WBS); c. Pedoman gratifikasi; / Gratification guideline; d. Pembentukan Tim IPC Bersih; / Establishing Clean IPC Team; e. Pemberian sanksi yang tegas; / Imposing strict sanctions; f. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai dan penyedia jasa; / Signing integrity pact of all employees and service providers; g. Penyusunan dokumen sistem manajemen anti penyuaan; / Preparing documents of anti-bribery management system h. Melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) ISO 37001:2016; / Certifying Anti-Bribery Management System (SMAP) with ISO 37001:2016; i. Surat Edaran tentang larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi pada perayaan hari besar dan tahun baru. / Disseminating Circular Letters on prohibition of illegal levies, giving and accepting bribes as well as gratification during holidays and new year celebrations.
15.	Risiko Tidak Optimalnya Pengelolaan Perpajakan / Risk of Suboptimal Tax Management	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan <i>SIMTAX</i> yang diintegrasikan dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak; / Developing <i>SIMTAX</i> integrated with Tax Directorate General system; b. Evaluasi berkala atas pengelolaan laporan perpajakan pada Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan; / Evaluating tax reporting management on Port Branches and Subsidiaries periodically; c. Evaluasi berkala atas pengelolaan perpajakan di Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan; / Evaluating tax management in Port Branches and Subsidiaries periodically; d. <i>Update</i> dan sosialisasi peraturan perpajakan. / Updating and disseminating tax regulations.
16.	Risiko Turunnya Reputasi Perusahaan / Risk of Lowered Reputation	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat pemberitaan berita positif; / Publishing positive news; b. Sertifikasi <i>SMAP</i> ISO 37001:2016; / <i>SMAP</i> ISO 37001:2016 certification; c. Implementasi <i>GCG</i>; / Implementing <i>GCG</i>; d. Implementasi <i>Whistleblowing System</i> IPC Bersih; / Implementing Clean IPC Whistleblowing System; e. Memberikan pemberitaan-pemberitaan positif; / Providing positive news; f. Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> (Kejaksaan dan Media Massa); / Coordinating with stakeholders (Public Prosecutors and Mass Media); g. Melakukan inisiasi komunikasi dengan pihak DPR RI dan Sekretariat; / Initiating communications with House of Representatives (DPR) as well as State Secretariat and Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia; h. Melakukan <i>press release</i> (setiap minggu) terkait berita-berita positif IPC. / Publishing weekly <i>press release</i> related to positive news of IPC.

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

IPC khususnya Divisi Manajemen Risiko senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan agar implementasi manajemen risiko di perusahaan dapat dilakukan dengan efektif. Dalam rangka menuju *World Class Port*, tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity*) harus ditingkatkan. Pada tahun 2020 dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan nilai **3,10**.

Berdasarkan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko, terdapat beberapa evaluasi yang harus diperhatikan dalam pengembangan implementasi manajemen risiko IPC kedepannya. Berikut ini adalah evaluasi atau analisis kesenjangan implementasi manajemen risiko tahun 2020 yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *category* atau 9 (sembilan) *building block*.

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko IPC Tahun 2020

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

Risk Management Division of IPC constantly evaluates and improves risk management implementation in the Company in order to carry it out in an effective manner. In order to become a World Class Port operator, maturity level of risk management must be increased. Risk maturity level of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was measured at **3,10** in 2020.

Based on the measurement of risk maturity level, there are several evaluations that must be taken into account in implementation of IPC risk management going forward. Evaluation or analysis of the gap in risk management implementation in 2020 was grouped into the following 3 (three) categories or 9 (nine) building blocks.

Evaluation of IPC Risk Management Implementation in 2020

Category	Building Block	Parameters
Business Strategy	Risk Strategy	<ul style="list-style-type: none"> • Mind-set • Definition of Risk • Decision Making Process
	Risk Appetite	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning Signal • Risk Appetite Methodology
	Risk Profile	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting of Risk Event • Risk Profile • Risk Mitigation
Business Management	Governance Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Roles and Responsibilities • Governance Model • Risk Management Responsibility
	Risk Policies	<ul style="list-style-type: none"> • Transparency and Visibility into Risk Policies • Risk Policies
	Monitoring & Reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring & Reporting • Awareness of Lesson Learnt • Communication and Awareness • Follow Up Actions
	Modelling & Analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge Management • Risk Scoring • Risk Modelling • Risk Analysis Techniques
Business Platform	Risk Culture	<ul style="list-style-type: none"> • Assessment of Risk Culture • Tone for Managing Risk and the Culture of Risk Awareness • Respond to Risks • Values and Beliefs • Reporting of Risk Event
	Risk Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Systems and Technology

Dari hasil evaluasi implementasi manajemen risiko ini, disusunlah rencana-rencana perbaikan yang akan dituangkan dalam program kerja atau Rencana Kerja Manajemen (RKM) Divisi Manajemen Risiko tahun 2021, di antaranya:

1. Pengembangan Budaya Risiko IPC;
2. Penyusunan *Business Continuity Management* (BCM) Cabang dan Anak Perusahaan;

From the evaluation results of risk management implementation, there are plans for improvement that will be included in the work program or Management Work Plan for Risk Management Division in 2021, among others:

1. IPC Risk Culture Awareness Development;
2. Preparation of Business Continuity Management (BCM) of Branches and Subsidiaries;



3. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko;
4. Peningkatan Fungsi Divisi Manajemen Risiko Sebagai Risk Advisor;
5. Integrasi *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Key Risk Indicator* (KRI);
6. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Risiko.

3. Development of Risk Management Information System Application;
4. Function Improvement of Risk Management Division as Risk Advisor;
5. Key Performance Indicator (KPI) and Key Risk Indicator (KRI) Integration;
6. Quality Improvement of Risk Management System.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di IPC menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan, Direksi IPC telah menetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 tanggal 29 Desember 2020.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS COSO

Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

Keandalan Pelaporan

Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System is key in GCG implementation because it encourages the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and trusted. Effective and reliable Internal Control System is able to provide confidence for stakeholders that all of the Company's resources can be managed properly in order to reach the Company's objectives.

Implementation of effective and reliable Internal Control System in IPC becomes the responsibility of the Company's management. To support the development of Internal Control System in the Company, the Board of Directors has established a General Guideline of Internal Control System based on COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the Board of Directors Decree No. HK.01/29/12/1/AIR/UT/PI.II-20 dated December 29, 2020.

OBJECTIVES OF COSO-BASED INTERNAL CONTROL SYSTEM

Operational Effectiveness and Efficiency

It is aimed to improve effectiveness and efficiency in managing the Company's resources for the achievement of IPC's objectives.

Reporting Reliability

It has the purpose to guarantee reports that are accurate, fair, timely, and relevant, as a basis for making appropriate and accountable decisions. Presentation and information disclosure in financial statements and operational reports are more assured with effective internal control. This is intended to provide assurances that all data refers to authorized and legitimate transactions as well as recorded on the date they occurred with the accurate amount.

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

KARAKTERISTIK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Terintegrasi

1. Sistem Pengendalian Internal berintegrasi dan berinteraksi dengan Manajemen Risiko, Kendali Mutu, dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Sistem Pengendalian Internal juga terintegrasi antar Divisi dan antar Departemen, baik secara horizontal dan vertikal.
3. Sistem Pengendalian Internal dijabarkan dalam 5 (lima) komponen utama yang saling berintegrasi, yaitu:
 - a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
 - b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
 - c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
 - d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
 - e. Evaluasi Pemantauan (*Monitoring*).

Suatu Proses

Sistem Pengendalian Internal Perseroan merupakan suatu proses, tugas, dan aktivitas yang terintegrasi, berkelanjutan, dan bersifat dinamis. Kebijakan dan prosedur tertanam dalam proses tersebut.

Proses bisnis yang dilakukan dalam atau antar Unit Operasi dan Area Fungsi dikelola melalui aktivitas perencanaan, eksekusi, dan reviu, dimana pengendalian internal terintegrasi dan tertanam dalam proses tersebut.

Membangun pengendalian ke dalam sistem berjalan, atau memodifikasi pengendalian suatu proses dalam Perseroan, secara langsung mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencapai target, mendukung inisiatif kualitas bisnis, dan berimplikasi ke biaya. Dengan berfokus pada pengendalian yang signifikan, memitigasi risiko utama, mengelola sistem pengendalian keseluruhan, serta membangun pengendalian ke dalam aktivitas operasional, maka Perseroan dapat menghindari biaya pengembangan prosedur baru.

Compliance with Laws and Regulations

It is intended to ensure that all Company's activities are performed pursuant to prevailing laws and regulations issued by the government or other authorities. Such activities are also in accordance with policies, provisions, and procedures set by the Company.

CHARACTERISTICS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Integrated

1. Internal Control System is integrated and interacted with Risk Management, Quality Control, and Corporate Governance.
2. Internal Control System is also vertically and horizontally integrated with all Divisions and Departments.
3. Internal Control System is translated into 5 (five) main integrated components, namely:
 - a. Control Environment;
 - b. Risk Assessment;
 - c. Control Activities;
 - d. Information and Communication; and
 - e. Monitoring.

A Process

Internal Control System is a process, duty, and activity that is integrated, continuous, and dynamic with policies and procedures included in such process.

A business process performed in or between Operational Unit and Function Area is managed through planning, execution, and review activities where internal control is integrated and embedded in the process.

Developing control into a running system, or modifying control of a process in the Company, directly affects IPC ability in achieving target, supporting business quality initiative, and having implications to cost. Through focusing on significant controls, mitigating major risk, managing overall control system, and developing control into operational activities, the Company is then able to avoid the cost for new procedure development.



Bergantung pada Faktor Manusia

Efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. Manusialah yang menetapkan tujuan dan membangun mekanisme pengendalian. Namun, manusia tidak selalu memahami, mengkomunikasikan, dan melaksanakan secara konsisten.

Setiap individu membawa latar belakang dan kemampuan teknis yang unik, dan setiap individu memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berpengaruh positif dan negatif bagi efektivitas pengendalian intern dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Oleh karena itu, efektivitas peran dari tiap-tiap Pelaksana menjadi penting dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya.

Memberikan Keyakinan yang Memadai

Sistem Pengendalian Internal Perseroan memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak terhadap tercapainya tujuan pengendalian, yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, keandalan pelaporan keuangan dan manajemen, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Keyakinan yang memadai tidak berarti bahwa entitas akan selalu mencapai tujuannya. Efek kumulatif efektivitas pengendalian internal meningkatkan kemungkinan entitas mencapai tujuannya. Namun, kemungkinan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal.

Memiliki Keterbatasan

Efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan tidak akan tercapai, apabila pertimbangan yang keliru digunakan dalam pembuatan keputusan, terjadi kesalahan manusia, kegiatan manajemen yang dengan sengaja menghindari pengendalian internal, terdapat kolusi, dan keputusan yang keliru dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pengendalian internal.

FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam mengembangkan Sistem Pengendalian Internal di IPC, Manajemen Perseroan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Nilai aset.
2. Kompleksitas operasional.
3. Profil risiko dari setiap proses bisnis.

Depending on Human Factor

Effectiveness of the Company's Internal Control System implementation is greatly influenced by its executors, namely the Board of Directors, Structural Officials, Functional Officials, and Executors. It is people who determine objective and develop control mechanism. However, they do not always understand, communicate and perform it in a consistent manner.

Each individual has unique background and technical skills with different needs and priorities. These differences may have negative or positive impact to the effectiveness of internal control to reach the Company's objectives. Therefore, the effective role of Executors is an important element in implementing the Company's Internal Control System in accordance with their level of responsibility.

Asserting Sufficient Confidence

Internal Control System of the Company asserts a sufficient confidence, not an absolute one, to the achievement of control's objectives, namely compliance with applicable laws, financial reporting and management reliability, as well as effectiveness and efficiency of activities.

Sufficient confidence does not mean that the Company will always achieve its goals. The cumulative effect of internal control effectiveness is the one that allows an entity to achieve its objectives. However, such possibility is affected by inherent limitations of internal control.

Limitations

The Company's Internal Control System will not be effectiveness when wrong judgment is used as a basis in decision making. Other factors include human error, management activities that purposely avoid internal control, collusion and wrong decisions in considering costs and benefits of internal control.

CONTRIBUTING FACTORS IN INTERNAL CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT OF THE COMPANY

In developing Internal Control System in IPC, the Company's management shall take into account the following factors:

1. Asset value.
2. Operational complexity.
3. Risk profile of each business process.

4. Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi.
5. Ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Biaya dan manfaat dari penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

KOMPONEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS COSO

Secara garis besar, Pedoman Sistem Pengendalian Internal IPC mengacu ke *COSO Internal Control Integrated Framework* Desember 2011 dan *Update* 2013. Pedoman tersebut masih bersifat kerangka dan konseptual umum. Oleh sebab itu, agar dapat diterapkan di level operasional sehari-hari, Direksi dan pejabat struktural di bawahnya perlu mengakomodir kebijakan Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO ke dalam kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) di level tanggung jawabnya masing-masing.

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan Perseroan dan menjadi atmosfer bagi setiap individu di Perseroan melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan pengendalian menjadi fondasi yang efektif bagi komponen pengendalian internal lainnya.

Lingkungan pengendalian Perseroan dibangun dengan:

Prinsip 1: menunjukkan Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika

Perseroan menunjukkan komitmen terhadap penegakan integritas dan nilai etika.

1. Menegakkan *Tone of the Top*:
Dewan Komisaris dan Direksi di setiap tingkatan menunjukkan keteladanan (*role model*), melalui arahan, tindakan, dan perilaku, komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

4. Methods used in data processing and information technology.
5. Applicable provisions of the Company as well as laws and regulations.
6. Cost and benefit of the Company's Internal Control System implementation.

COMPONENTS OF COSO-BASED INTERNAL CONTROL SYSTEM

Guideline of IPC Internal Control System refers to *COSO Internal Control Integrated Framework* of December 2011 and 2013 Update. The guideline is only a framework and general concept. Therefore, the Board of Directors and structural officials under them need to adopt *COSO-Based Internal Control System* into a policy and/or *Standard Operating Procedure* (SOP) at their respective level of responsibility in order to apply it in the Company's daily operations.

The conceptual framework of *COSO* internal control as a comprehensive framework to measure effectiveness of internal control consists of 5 (five) components, namely:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information & Communication;
5. Monitoring.

Control Environment

Control environment is an influential factor to all parts of the Company and serves as an atmosphere for every individual in the Company to carry out activities and internal control responsibility. Control environment is an effective foundation for other internal control components.

The Company's control environment is built by:

1st Principle: Demonstrating Commitment to Integrity and Ethics

The Company demonstrates its commitment to the enforcement of integrity and ethics.

1. Enforcing *Tone of the Top*:
The Board of Commissioners and Board of Directors serve as role models for every level of the Company through instructions, actions, and behaviors, as well as demonstrate commitment to integrity and ethics to support effectiveness of *Internal Control System*.



2. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku:
Ekspektasi dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait integritas dan nilai etika didefinisikan dalam aturan perilaku Perseroan dan dipahami oleh setiap tingkatan organisasi dan oleh pihak partner eksternal.
3. Mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perilaku:
Penerapan proses evaluasi atas implementasi individu dan tim terhadap aturan perilaku Perseroan.
4. Mengidentifikasi deviasi secara tepat waktu:
Deviasi/pelanggaran terhadap aturan perilaku diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu dan konsisten.
5. Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis, melalui:
 - a. Penetapan target dan sasaran yang realistis/dapat dicapai dan tidak menuntut pegawai untuk mencapai sasaran yang tidak realistis.
 - b. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pegawai atas prestasi kerjanya. Penghargaan diberikan dalam rangka penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.
 - c. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atas pelanggaran terhadap integritas dan nilai etika.

Prinsip 2: Implementasi Tanggung Jawab Pengawasan

Dewan Komisaris bersikap independen terhadap Direksi dan mengimplementasikan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal.

1. Tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris:
Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menerima tanggung jawab pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
2. Memegang atau mendelegasikan tanggung jawab pengawasan:
Dewan Komisaris memegang tanggung jawab pengawasan atau mendelegasikan tanggung jawab tersebut Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
3. Mengimplementasikan keahlian yang relevan:
Dewan Komisaris mendefinisikan dan secara periodik menilai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap Direksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
4. Beraktivitas secara independen:
Dewan Komisaris memiliki jumlah anggota yang cukup, bersikap independen, dan objektif.

2. Establishing and Implementing Code of Conduct:
Expectations of the Board of Commissioners and Board of Commissioners related to integrity and ethics in the Company's Code of Conduct and understood by all levels of the organization and external parties.
3. Evaluating compliance with Code of Conduct:
Implementation of evaluation process on individuals and teams in relation to the implementation of the Company's Code of Conduct.
4. Identifying deviation in a timely manner:
Deviation/violation against the Code of Conduct is identified and corrected in a timely and consistent manner.
5. Eliminating opportunities for unethical behaviors through:
 - a. Setting realistic targets and objects that can be achieved as well as not demanding employees to achieve unrealistic objectives.
 - b. Providing commensurate reward to the employees for their work performance. Reward is given for the enforcement of integrity and compliance with ethics.
 - c. Imposing sanctions upon violation against integrity and ethics pursuant to applicable regulations.

2nd Principle: Implementing Supervisory Responsibility

The Board of Commissioners is independent of the Board of Directors and implements supervision on development and application of internal control.

1. Supervisory Responsibility of the Board of Commissioners:
The Board of Commissioners identifies and accept supervisory responsibility for adequacy and effectiveness of internal control.
2. Having or delegating supervisory responsibility:
The Board of Commissioners has supervisory responsibility or delegates the responsibility to the Board of Directors in order to support the achievement of the Company's objectives.
3. Implementing relevant expertise:
The Board of Commissioners defines and periodically assesses knowledge and skills needed by members of the Board of Commissioners to improve their critical skills towards the Board of Directors and the necessary actions.
4. Independent activities:
The Board of Commissioners has sufficient members as well as acts independently and objectively.

Prinsip 3: Pembentukan Struktur Organisasi, Kewenangan, dan Tanggung Jawab yang Sesuai dengan Kebutuhan

Dalam pengawasan Dewan Komisaris, Direksi membentuk struktur organisasi, jalur pelaporan dan kewenangan, serta pertanggungjawaban yang memadai untuk mencapai tujuan Perseroan.

1. Mempertimbangkan seluruh struktur entitas:
Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan (termasuk unit operasional, entitas legal, penyedia jasa *outsourcing*) untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
2. Membangun garis pelaporan:
Manajemen mendesain dan mengevaluasi garis pelaporan untuk setiap struktur/entitas agar mampu mengeksekusi kewenangan, tanggung jawab, serta arus informasi dalam mengelola aktivitasnya.
3. Mendefinisikan, mengalokasikan, dan membatasi kewenangan dan tanggung jawab:
Direksi dan Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan, mendefinisikan dan mengalokasikan tanggung jawab, serta memisahkan fungsi secara memadai pada berbagai tingkatan dalam organisasi.
4. Tanggung jawab dan garis pelaporan dapat dibagi ke dalam Model 3 Lini (*Three Lines Model*), dengan pengawasan Direksi dimana:
 - a. Manajemen dan pekerja operasional sehari-hari berada di Lini Pertama yang bertanggung jawab untuk menjaga efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. Lini Pertama bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja kepada Direksi.
 - b. Manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dan kendali mutu berada di Lini Kedua, bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memonitor efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal di Lini Pertama. Lini Kedua memberikan bantuan, dukungan, keahlian, pelengkap, pemantauan, dan kritik kepada Lini Pertama. Peran Lini Pertama dan Lini Kedua dapat dibentuk menjadi satu atau terpisah. Lini Kedua bertanggung jawab dan melapor kepada Direksi.
 - c. Auditor internal berperan sebagai Lini Ketiga yang bertanggung jawab untuk menilai dan melaporkan kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola Perusahaan. Posisi auditor internal relatif lebih independen terhadap Manajemen karena bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Direktur Utama.

3rd Principle: Establishing Required Organizational Structure, Authority, and Responsibility

In the Board of Commissioners supervisory duties, the Board of Directors establishes an organizational structure, reporting and authority, as well as sufficient accountability to reach the Company's objectives.

1. Taking into account the Company's structure:
The Board of Directors and Board of Commissioners consider various structures used in the Company (including operational units, legal entity, outsourcing services provider) to support the Company's efforts in achieving its objectives.
2. Building lines of reporting:
The management designs and evaluates lines of reporting for every structure/entity in order to be able to execute its authorities, responsibilities, and information flow in managing its activities.
3. Defining, allocating, and limiting authority and responsibility: the Board of Directors and Board of Commissioners delegate authority, define and allocate responsibility, as well as separate function in an adequate manner for every level within the organization.
4. Responsibility and lines of reporting can be categorized into 3 (Three) Lines Model with the supervision of the Board of Directors:
 - a. Management and daily operations personnel belong to the First Line that has the responsibility to maintain effectiveness of risk management and internal control. The First Line is responsible in reporting performance to the Board of Directors.
 - b. Risk management, compliance, legal, and quality control belong to the Second Line that has the responsibility to facilitate and monitor effectiveness of risk management and internal control of the First Line. The Second Line provides assistance, support, expertise, complementary, monitoring, and critic to the First Line. The roles of First Line and Second Line can be combined into one or separated. Second Line has the responsibility to report to the Board of Directors.
 - c. Internal auditor serves as the Third Line that has the responsibility to assess and report adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. Internal auditor is relatively more independent to the Management because it has the responsibility to report directly to the President Director.



5. Melaksanakan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang strategis.
6. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai untuk formasi manajerial dan non-manajerial.

Prinsip 4: Komitmen terhadap Kompetensi

Perseroan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten, dengan cara:

1. Menyusun kebijakan dan praktik (standar kompetensi):

Kebijakan dan praktik menggambarkan harapan organisasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
2. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu:

Perseroan menyediakan *mentoring* dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan kecukupan dan kompetensi pekerja dan penyedia jasa *outsourcing* untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
3. Mengevaluasi kompetensi dan mengatasi kekurangan:

Direksi mengevaluasi kompetensi seluruh tingkat dan individu organisasi, termasuk penyedia jasa *outsourcing*, terkait dengan kebijakan dan praktik yang ditetapkan, dan bertindak memadai untuk mengatasi kekurangan.
4. Merencanakan dan menyiapkan suksesi:

Direksi merencanakan dan menyiapkan suksesi pelimpahan tanggung jawab secara signifikan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Prinsip 5: Penegakan Akuntabilitas

Perusahaan meminta pertanggungjawaban individual atas area pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

1. Menegakkan akuntabilitas melalui struktur, kewenangan, dan tanggung jawab:

Perseroan membangun mekanisme untuk mengkomunikasikan dan menuntut para pekerja supaya akuntabel atas pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal organisasi dan mengimplementasikan tindakan koreksi jika diperlukan.
2. Membangun pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan:

Perseroan membangun ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan yang layak bagi pertanggungjawaban pada setiap level entitas, yang menggambarkan dimensi dari

5. Performing evaluation, adjustment, and improvement to organizational structure in the event of strategic change occurring in the environment.
6. Determining the adequate number of employees for managerial and non-managerial formations.

4th Principle: Commitment to Competence

The Company demonstrates commitment to attract, develop, and keep competent individuals through:

1. Formulating policies and practices (competency standards):

Policies and practices illustrate the organization's expectation on required competencies to achieve the Company's goals.
2. Attracting, developing, and keeping individuals:

The Company provides mentoring and training required to attract, develop, and maintain adequacy and competence of employees and outsourcing service providers to support the achievement of the Company's objectives.
3. Evaluating competency and overcoming shortcoming:

The Board of Directors evaluates the competency of all levels and individuals in the organization, including outsourcing services providers in relation to established policies and practices as well as take necessary actions to overcome shortcomings.
4. Planning and preparing succession:

The Board of Directors significantly draws up the plan and prepare for succession transfer of responsibilities to support the achievement of the Company's goals.

5th: Enforcing Accountability

The Company demands individual accountability for internal control area that becomes individual's responsibility in order to reach the Company's objectives.

1. Enforcing accountability through structure, authority, and responsibility:

The Company develops a mechanism to communicate and demand employees to be accountable on the implementation of organization's internal control and necessary corrective actions.
2. Developing measurement of performance, incentive, and reward:

The Company develops the measurement of performance, appropriate incentive, and reward for accountability in every level of the entity. This measurement describes the

kinerja dan standar perilaku, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

3. Mengevaluasi ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan:

Perseroan menyalurkan insentif dan penghargaan dengan pemenuhan tanggung jawab pengendalian internal dalam pencapaian tujuan Perseroan.

4. Mempertimbangkan tekanan berlebihan:

Perseroan mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ketika memberikan tanggung jawab, mengembangkan ukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.

5. Mengevaluasi kinerja dan penghargaan atau sanksi disiplin individu:

Perseroan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan tingkat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan atau sanksi disiplin.

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko Perseroan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkat risiko dapat berkurang sampai pada tingkatan yang dapat diterima oleh Perseroan. Oleh sebab itu, penilaian risiko merupakan basis untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola.

Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perseroan sampai pada tingkat kegiatan, yang dibagi menjadi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Penetapan tujuan Perseroan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu, serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

Penilaian risiko Perseroan dilakukan dengan:

Prinsip 6: Menetapkan Tujuan yang Relevan

Perseroan menetapkan tujuan secara jelas untuk implementasi proses identifikasi dan penilaian risiko-risiko terkait dengan tujuan.

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Perseroan yang dituangkan dalam rencana strategis (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), rencana kinerja tahunan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Tujuan Perseroan yang

dimensions of performance and behavioral standards by taking into account the achievement of short-term and long-term objectives.

3. Evaluating measurement of performance, incentive, and reward:

The Company aligns incentives and rewards with fulfillment of internal control responsibility in achieving the Company's goals.

4. Considering excessive pressure:

The Company evaluates and adjusts pressures related to objective achievement when delegating responsibilities, developing performance measurement, and evaluating performance.

5. Evaluating performance and individual reward or disciplinary sanction:

The Company evaluates the implementation of internal control responsibility, including compliance with regulations and expected competency level by giving out rewards or disciplinary sanctions.

Risk Assessment

Risk assessment is the process of identification and analysis on risks that have the potential to hinder fulfillment of the Company's objectives. Risk assessment is carried out to identify the Company's prioritized risks to be handled appropriately. It is also aimed to reduce the risk to a level acceptable by the Company. Hence, risk assessment is a basis to determine the manner of which a risk is managed.

Prior to performing risk assessment, it is necessary to set the Company's objectives at activity level that can be distributed into operational, reporting, and compliance objectives. The Company's objectives contain statements and directives that are specific, measured, achievable, realistic, and time bound as well as communicated to all employees.

The Company's risk assessment is carried out through:

6th Principle: Determining Relevant Objectives

The Company determines its objectives in a clear manner for implementation of risk identification and assessment processes related to the objectives.

The Board of Directors and Board of Commissioners determine the vision, mission, objective, and target of the Company stipulated in the strategic plan (the Company's Long-Term Plan), annual performance plan (the Company's Work Plan and Budget) and the Company's Articles of Association.



telah ditetapkan secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai. Manajemen menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis Perseroan.

Penetapan Tujuan pada Level Kegiatan

Penetapan tujuan pada level kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi Perseroan. Tujuan pada level kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Tujuan pada level kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama Perseroan dan mempunyai unsur kriteria pengukuran yang didukung oleh sumber daya Perseroan yang cukup. Kepala unit kerja mengidentifikasi tujuan pada level kegiatan yang menunjang pada keberhasilan Perseroan secara keseluruhan. Seluruh kepala unit kerja terlibat dalam proses penetapan tujuan pada level kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

Berikut ini merupakan atribut-atribut terkait dengan tujuan pengendalian internal:

1. Atribut Terkait Tujuan Operasional

- a. Mempertimbangkan toleransi risiko:
Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan operasional.
- b. Menggambarkan pilihan manajemen:
Tujuan operasional menggambarkan pilihan manajemen terkait struktur, pertimbangan industri, dan kinerja Perseroan.
- c. Memasukkan target kinerja operasional dan keuangan:
Perseroan menggambarkan tingkat kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan dalam tujuan operasional.
- d. Membangun dasar dalam mengalokasikan sumber daya:
Manajemen menggunakan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan.

2. Atribut Terkait Tujuan Pelaporan

Untuk tujuan pelaporan, atribut dibedakan menjadi pelaporan internal, pelaporan non-keuangan eksternal, dan pelaporan keuangan eksternal.

- a. Tujuan Pelaporan Internal (Keuangan dan/atau Non-Keuangan)
 - (1) Mempertimbangkan tingkat akurasi:
Manajemen mempertimbangkan tingkat akurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam tujuan pelaporan non-keuangan dan materialitas, serta dalam tujuan pelaporan keuangan.

The Company's objectives that have been set clearly are disseminated to all employees. The management determines an operational strategy that is consistent with the Company's strategic plan.

Objective Determination at Activity Level

Determination of objective at activity level is based on the Company's objectives and strategic plans. Objectives at activity level complement each other, support each other, and do not contradict each other. Objectives at activity level are relevant with the Company's main activities and have measurement criteria element supported by adequate resources of the Company. Heads of work unit identify the objectives at activity level that supports the Company's success as a whole. Heads of work units are involved in the process of determining objectives at activity level and committed to achieve those objectives.

The followings are attributes related to internal control objectives:

1. Attributes Related to Operational Objectives

- a. Considering risk tolerance:
Management considers the acceptable risk level in achieving the Company's objectives.
- b. Representing management's choice:
Operational objectives represent the management's choice related to structure, industrial consideration, and performance of the Company.
- c. Including operational and financial performance targets:
The Company describes the expected level of operational and financial performance in the operational objectives.
- d. Building the basis in allocating resources:
The management utilizes operational objectives as the basis to allocate resources needed to achieve expected operational and financial performances.

2. Attributes Related to Reporting Objectives

For reporting objectives, attributes are categorized into internal reporting, non-financial external reporting and external financial reporting.

- a. Internal Reporting Objectives (Financial and/or Non-Financial Reporting)
 - (1) Taking into account accuracy level:
The management takes into account the accuracy level in accordance with user needs in the objective of non-financial and materiality reporting as well as in the objective of financial reporting.

(2) Menggambarkan pilihan manajemen:
Pelaporan internal menyediakan informasi yang akurat dan lengkap terkait pilihan manajemen dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola Perseroan.

(3) Menggambarkan aktivitas Perseroan:
Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal

(1) Mempertimbangkan materialitas:
Manajemen mempertimbangkan materialitas dalam penyajian laporan keuangan.

(2) Mematuhi Standar Akuntansi Keuangan:
Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tersedia di Perseroan. Prinsip akuntansi dipilih sesuai dengan keadaan.

(3) Menggambarkan aktivitas Perseroan:

c. Tujuan Pelaporan Non-Keuangan Eksternal

(1) Mempertimbangkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan:
Manajemen menggambarkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan yang cocok dengan kebutuhan pengguna laporan dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak ketiga atas pelaporan non-keuangan.

(2) Mematuhi standar dan kerangka yang dibangun pihak eksternal:
Manajemen menetapkan tujuan secara konsisten dengan standar dan kerangka yang dibangun oleh organisasi eksternal yang diakui.

(3) Menggambarkan aktivitas Perseroan:
Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

3. Atribut terkait Tujuan Kepatuhan

1. Mempertimbangkan toleransi risiko:
Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan.
2. Mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal:
Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

(2) Representing management's option:
Internal reporting provides accurate and complete information related to management's option and required information in managing the Company.

(3) Representing the Company's activities:
External reporting represents transactions and the underlying events within reasonable boundaries.

b. Objectives of External Financial Reporting

(1) Considering materiality:
The management takes into account materiality in presenting financial statements.

(2) Complying with Financial Accounting Standards:
Objectives of financial reporting is consistent with applicable and available accounting principles in the Company. Accounting principle is selected according to necessity.

(3) Representing the Company's activities:

c. Objectives of Non-Financial External Reporting

(1) Taking into account required accuracy level:
The management describes the required accuracy level suitable to report user needs that is based on criteria set by a third party for non-financial reporting.

(2) Complying with standard and framework built by external party:
The management determines objectives that are consistent with standard and framework built by acknowledge external organization.

(3) Representing the Company's activities:
External reporting represents transactions and events that become its basis within acceptable range.

3. Attribute Related to Compliance Objectives

1. Taking into account risk tolerance:
The management takes into account acceptable risk level in relation to achievement of compliance objectives.
2. Taking into account external regulations and laws:
Laws and regulations are the minimum standard integrated into compliance objectives.



Prinsip 7: Identifikasi dan Analisis Risiko

Perseroan mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuannya dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko dapat dikelola. Proses identifikasi dan analisis risiko diatur lebih lanjut dalam Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan.

1. Melibatkan berbagai tingkatan manajemen:
Perseroan melaksanakan mekanisme penilaian risiko yang efektif dan melibatkan berbagai tingkatan manajemen.
2. Meliputi tingkatan entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional:
Perseroan mengidentifikasi dan menilai risiko pada tingkat entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan Perseroan.
3. Menganalisis faktor internal dan eksternal:
Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan Perseroan.
4. Mengestimasikan tingkat kemungkinan dan signifikansi risiko yang teridentifikasi:
Risiko yang teridentifikasi dianalisis melalui suatu proses, termasuk estimasi tingkat kemungkinan dan potensi signifikansi.
5. Menentukan bagaimana merespons risiko:
Penilaian risiko termasuk mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko signifikan seharusnya dikelola, dan apakah diterima, dihindari, dikurangi, atau di-*share*.

Prinsip 8: Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud*) dan Penyuapan

Organisasi mempertimbangkan potensi terjadi kecurangan (*fraud*) dan penyuapan dalam menilai risiko untuk pencapaian tujuan Perseroan.

1. Mempertimbangkan berbagai modus kecurangan (*fraud*):
Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kemungkinan kehilangan aset, laporan manipulatif, dan korupsi yang diakibatkan oleh berbagai cara untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan tidak patut.
2. Mempertimbangkan faktor risiko:
Penilaian risiko mempertimbangkan faktor signifikan yang mempengaruhi kehilangan atas aset dan dampak signifikan terkait aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.
3. Menilai insentif dan tekanan:
Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan insentif dan tekanan.

7th Principle: Risk Identification and Analysis

The Company identifies risks to achieve its goals and analyzes risks as a basis to determine risk management. The process of risk identification and analysis is arranged further in the Risk Management Framework of the Company.

1. Involving various management levels:
The Company conducts effective risk assessment mechanism and involves various management levels.
2. Covering entity, subsidiary, division, operational unit, and functional levels:
The Company identifies and assesses risks on the levels of entity, subsidiary, division, operational and functional unit that are relevant to the achievement of the Company's objectives.
3. Analyzing internal and external factors:
Risk identification takes into account internal and external factors as well as their impact to the achievement of the Company's objectives.
4. Estimating probability level and significance of identified risks:
Identified risks are analyzed through a process, including estimation of probability level and significance potential.
5. Determining response to risk:
Risk assessment also includes considering management of significant risks, whether the risks are accepted, avoided, reduced, or shared.

8th Principle: Risk Assessment of Fraud and Bribery

The organization considers the possibility of fraud and bribery occurring in assessing risks for the fulfillment of the Company's objectives.

1. Taking into account various fraud methods:
Risk assessment of fraud takes into account the possibility of losing assets, manipulative reports, and corruption caused by various methods of fraud and inappropriate actions.
2. Taking into account risk factor:
Risk assessment takes into account significant factors that affect the loss of assets and significant impact related to operational reporting, and compliance activities.
3. Assessing incentives and pressures:
Risk assessment of fraud takes into account incentives and pressures.

4. Menilai kesempatan:
Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kesempatan untuk mengakuisisi, menggunakan, atau melepas aset secara tidak sah, mengubah catatan pelaporan entitas, atau melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) lainnya.
5. Menilai perilaku dan rasionalisasi:
Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan bagaimana manajemen dan pekerja lainnya dapat menjustifikasi tindakan tidak patut.
6. Menilai risiko penyuapan:
Penilaian risiko mempertimbangkan tindakan memberi/menerima suap kepada pihak eksternal/internal yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pilihan keputusan pejabat pihak eksternal/internal sehingga mengeluarkan keputusan yang diinginkan dan memberi dampak kerugian bagi Perseroan.

Prinsip 9: Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan Signifikan

1. Menilai perubahan lingkungan eksternal:
Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuannya.
2. Menilai perubahan model bisnis:
Perseroan mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, perubahan besar pada komposisi bisnis yang ada, mengakuisisi atau melepas operasi bisnis terhadap Sistem Pengendalian Internal, perubahan geografi luar negeri, teknologi baru, dan perubahan lingkungan fisik dimana bisnis beroperasi.
3. Menilai perubahan kepemimpinan:
Perseroan mempertimbangkan perubahan dalam manajemen, yaitu perilaku dan filosofi manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dibangun melalui kebijakan dan prosedur yang membantu untuk menjamin arahan manajemen dapat dilaksanakan dengan benar. Kegiatan pengendalian dilaksanakan di semua tingkatan Perseroan di berbagai tahapan proses bisnis, dan di lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian dapat bersifat preventif atau detektif dan meliputi aktivitas manual dan otomatis. Pemisahan fungsi dibangun dalam penetapan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Ketika pemisahan fungsi tidak praktis, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian kompensatif.

4. Assessing opportunities:
Risk assessment of fraud takes into account the opportunity to acquire, use, or dispose assets illegitimately, change entity's records, or commit other frauds.
5. Assessing behavior and rationalization:
Risk assessment of fraud takes into account how management and other employees justify inappropriate actions.
6. Assessing bribe risk:
Risk assessment takes into account the action of giving/accepting bribe to/from external/internal party that may affect work process and decision making of external/internal party to make desired decisions and cause losses to the Company.

9th Principle: Identifying and Analyzing Significant Changes

1. Evaluating changes to external environment:
Risk identification process takes into account external changes factor that significantly affect the Company's ability in reaching its objectives.
2. Evaluating changes to business model:
The Company takes into account potential impact of a new business, significant changes to existing business composition, acquiring or disposing business operations related to Internal Control System, geographic changes aboard, new technology, and changes to physical environment of business operations.
3. Evaluating leadership changes:
The Company considers changes in the management, namely management behaviors and philosophy towards Internal Control System.

Control Activities

Control activities are actions built through policies and procedures that are helpful in ensuring that the management's directives can be carried out appropriately. Control activities are performed in all levels of the Company in various levels of business proves as well as in technological environment. Control activities can be preventive or detective and involve manual and automatic activities. Separation of functions is built in the establishment and development of control activities. When the separation of function is not practical, management determines and develops compensative control.



Prinsip 10: Menetapkan dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian

Perseroan menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan ke level yang dapat diterima.

1. Terintegrasi dengan proses penilaian risiko:
Aktivitas pengendalian membantu dan menjamin respons risiko telah dilaksanakan dalam mengatasi dan memitigasi risiko signifikan. Setelah proses penilaian risiko, manajemen mengidentifikasi dan mengimplementasikan aktivitas yang diperlukan untuk merespons risiko tertentu.
2. Menentukan proses bisnis yang relevan:
Manajemen menentukan proses bisnis yang relevan yang membutuhkan aktivitas pengendalian.
3. Mempertimbangkan faktor spesifik entitas:
Manajemen mempertimbangkan kompleksitas, sifat, dan operasional lingkungan, serta karakteristik spesifik dari Perseroan yang mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.
4. Mengevaluasi bauran tipe aktivitas pengendalian:
Aktivitas pengendalian termasuk rentang, variasi, dan bauran pengendalian untuk memitigasi risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian manual dan otomatis, serta pengendalian preventif dan detektif.
5. Menerapkan pemisahan fungsi/tugas:
Manajemen memisahkan fungsi/tugas yang tidak kompatibel (tidak dapat bersamaan), dan ketika pemisahan tersebut menjadi tidak praktis dan efisien, manajemen menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif (pengendalian kompensatif).

Pemisahan fungsi umumnya membagi tanggung jawab pencatatan, otorisasi, dan persetujuan transaksi, serta penanganan aset terkait. Ketidakadaan pemisahan fungsi dan pengendalian kompensatif akan:

- a. Membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan tindakan kecurangan (*fraud*).
- b. Memitigasi risiko terjadinya *management override* (pengabaian manajemen), yang sering terjadi saat melakukan kecurangan (*fraud*).
- c. Pemisahan fungsi juga mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) oleh satu orang dan risiko kesalahan karena para pihak terpisah tidak saling mereview pekerjaan pihak lainnya.
- d. Namun, kadang kala pemisahan fungsi tidak praktis atau tidak efisien. Dalam situasi ini, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian internal alternatif sebagai kompensasi dari tidak diterapkannya prinsip pengendalian internal.

10th Principle: Determining and Developing Control Activities

The Company determines and develops control activities to mitigate significant risks to achievement of the Company's objectives into acceptable level.

1. Integrated with risk assessment process:
Control activities assist and ensure that risk response has been carried out in resolving and mitigating significant risks. After risk assessment process, the management identifies and implements necessary activities to response certain risks.
2. Determining relevant business process:
The management determines relevant business process that requires control activities.
3. Taking into account specific factor of entity:
The management considers complexity, nature, and operational environment as well as specific characteristic of the Company that affect the selection and development of control activities.
4. Evaluating mixture of business activity types:
Control activities include the range, variation, and mixture of control to mitigate risks by considering manual and automatic controls as well as preventive and detective controls.
5. Implementing separation of function/duty:
Management separates functions/duties that are not compatible with each other (cannot function at the same time). When the separation is not practical and inefficient, management determines and develops alternative control activities (compensative control).

Separation of function generally divides responsibility for transaction recording, authorization, and approval as well as related asset management. Absences of function separation and compensative control will:

- a. Make internal control ineffective and cause fraud.
- b. Mitigate management override risk that often occurs when there is fraud.
- c. Separation of function reduces fraud risk by one person and error risk because the separated parties do not review each other's work.
- d. However, at times function separation is not practical or inefficient. In this case, management determines and develops alternative internal control as compensation for not implementing internal control principle.

Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan, dilakukan dengan memastikan bahwa:

- a. Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.
- b. Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, rewiu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
- c. Pembagian tugas kepada lebih dari satu orang pegawai dilakukan secara sistematis untuk memberikan keyakinan adanya *check and balances*.
- d. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.

Separation of function is aimed to reduce errors, fraud, and improvidence. Separation of functions within the Company is carried by ensuring that:

- a. No one is allowed to control all main aspects of events and transactions from the beginning to the end of the process.
- b. Allocation of responsibilities and duties of events and transactions to different employees in relation to authorization, approval, processing and recording, payment or receiving fund, review and audit, as well as functions of storage and asset management.
- c. Duties are divided to more than one employee in a systematic manner to provide assurance in the existence of check and balances.
- d. The Board of Directors formulates policies to reduce collusion.

Prinsip 11: Menetapkan dan Mengembangkan Pengendalian Umum (*General Controls*) terhadap Teknologi

1. Menentukan ketergantungan antara penggunaan teknologi dalam proses bisnis dan pengendalian umum teknologi:
Manajemen memahami dan menentukan ketergantungan dan hubungan antara proses bisnis, aktivitas pengendalian otomatis, dan pengendalian umum teknologi.
2. Membangun aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi:
Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi, yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlangsungan proses teknologi.
3. Membangun aktivitas pengendalian atas proses manajemen keamanan:
Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses teknologi hanya bagi pengguna terotorisasi sesuai dengan tanggung jawab tugasnya dan untuk melindungi aset Perseroan dari ancaman eksternal dan internal.
4. Membangun aktivitas pengendalian atas proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi:
Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastrukturnya, untuk mencapai tujuan Perseroan.

11th Principle: Establishing and Developing General Controls on Technology

1. Determining dependency on the use of technology in business process and general controls on technology:
Management understands and determines the dependency and relations between business process, automation activities, and general controls on technology.
2. Developing control activities on technology infrastructure:
Management establishes and develops control activities on technology that are designed and implemented to assure completeness, accuracy, and continuity of technology process.
3. Developing control activities on safety management process:
Management establishes and develops control activities that are designed and implemented to limit access right to technology only for authorized users in accordance with their responsibilities and safeguard the Company's assets from external and internal threats.
4. Developing control activities on the process of technology acquisition, development, and maintenance:
Management establishes and develops control activities related to technology acquisition, development, and maintenance as well as infrastructure to achieve the Company's objectives.



Secara detail, pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*) atas sistem informasi diatur dalam Kerangka Sistem Informasi Perseroan.

General control and application control on information system is arranged in detail in the Company's Information System Framework.

Prinsip 12: Implementasi melalui Kebijakan dan Prosedur

12th Principle: Implementation through Policies and Procedures

Perseroan menjalankan aktivitas pengendalian dalam bentuk kebijakan yang merupakan pernyataan apa yang diharapkan dan prosedur untuk menjalankan kebijakan tersebut.

The Company runs control activities in the form of policies that are statements for the goals of control activities and in the form of procedures to execute such policies.

1. Pembentukan kebijakan prosedur untuk mendukung pelaksanaan arahan manajemen:

Manajemen membentuk aktivitas pengendalian yang dibangun ke dalam proses bisnis dan aktivitas sehari-hari para pekerja, melalui kebijakan dan prosedur.

1. Formulating procedure policies to support the execution of management's directives:

Management forms control activities that are built into daily business processes and activities of employees through policies and procedures.

2. Membangun tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur:

Manajemen membangun tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian melalui personel yang ditunjuk dari unit bisnis atau fungsi, dimana risiko relevan berada.

2. Developing a sense of responsibility and accountability for implementation of policies and procedures:

Management develops a sense of responsibility and accountability on control activities through appointing personnel from the business unit or function where relevant risk is located.

3. Implementasi oleh pekerja kompeten:

Pekerja kompeten dapat melaksanakan aktivitas pengendalian dengan tekun dan berkelanjutan.

3. Implementation by competent employees:

Competent employees can perform control activities in a diligent and continuous manner.

4. Implementasi secara tepat waktu:

Pekerja melaksanakan aktivitas pengendalian secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur.

4. Timely Implementation:

Employees performs control activities in a timely manner as stipulated in the policies and procedures.

5. Mengambil tindakan korektif:

Pekerja yang bertanggung jawab dapat melakukan investigasi dan merespons permasalahan yang teridentifikasi dari pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. Taking corrective action:

Person-in-charge may conduct investigation and respond to identified issue from implementation of control activities.

6. Mereviu kebijakan dan prosedur:

Manajemen secara periodik mereviu aktivitas pengendalian untuk menilai apakah masih relevan dan dapat diperbaharui jika diperlukan.

6. Reviewing policies and procedures:

Management periodically reviews control activities to assess the relevancy of control activities as well as update control activities if necessary.

Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)

Information & Communication

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi (keuangan dan non-keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk (format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, baik komunikasi di lingkungan Perseroan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

The Board of Directors is required to identify, record, and communicate (financial and non-financial) information related to implementation of their main duties and functions in the right time and format to facilitate application, control and responsibility of their duties. Communication on information must be carried out effectively within the Company and with related external parties.

Penyelenggaraan komunikasi yang efektif di Perseroan dilakukan dengan:

Prinsip 13: Menggunakan Informasi Relevan

Perseroan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, relevan untuk mendukung efektivitas komponen-komponen pengendalian internal.

1. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan:
Suatu proses dilaksanakan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan pencapaian tujuan Perseroan.
2. Mendapatkan data eksternal dan internal:
Sistem informasi dapat memperoleh data eksternal dan internal.
3. Memproses data relevan menjadi informasi:
Sistem informasi memproses dan mengubah data relevan menjadi informasi.
4. Memelihara kualitas selama proses berlangsung:
Sistem informasi menghasilkan informasi secara tepat waktu, terkini, akurat, lengkap, dapat diakses, terlindungi, dan dapat diverifikasi, serta dapat disimpan. Informasi direviu untuk menilai relevansinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
5. Mempertimbangkan biaya dan manfaat:
Sifat, kuantitas, dan akurasi informasi disinkronkan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Prinsip 14: Komunikasi secara Internal

Perseroan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal.

1. Mengkomunikasikan pengendalian internal atas informasi ke para pekerja:
Suatu proses dilaksanakan untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan agar para pekerja dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal mereka.
2. Mengkomunikasikan dengan Dewan Komisaris:
Terdapat komunikasi antara manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga mereka memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dalam mencapai tujuan Perseroan.
3. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah:
Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.

Effective communication in the Company is carried out through:

13th Principle: Using Relevant Information

The Company obtains or generates and uses quality and relevant information to support the effectiveness of internal control components.

1. Identifying required information:
A process is carried out to identify the required and expected information to support the effectiveness of internal control and achievement of the Company's objectives.
2. Obtaining internal and external data:
Information system is able to obtain internal and external data.
3. Processing relevant data into information:
Information system processes and converts relevant data into information.
4. Maintaining quality during the process:
Information system generates timely, latest, accurate, complete, accessible, protected, verifiable, and recoverable information. The information is reviewed to assess its relevancy in supporting effective internal control.
5. Considering cost and benefit:
The nature, quantity, and accuracy of information are synchronized to support the achievement of the Company's objectives.

14th Principle: Internal Communication

The Company distributes information internally, including the required purpose and responsibility of internal control to support effectiveness of internal control.

1. Communicating internal control on information to employees:
A process is carried out to communicate the required information so that employees are able to understand and perform their internal control responsibilities.
2. Communicating with the Board of Commissioners:
There is communication between management/Board of Directors and Board of Commissioners in order to allow them to have the necessary information for fulfilling their roles in reaching the Company's objectives.
3. Providing separate lines of communication:
Separate lines of communication line serve as fail safe mechanisms which are run as anonymous or secret communication lines when the normal line is not operational or effective One example is the special line for whistleblower.



4. Menetapkan metode komunikasi relevan:
Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, dan sifat informasi.

Prinsip 15: Komunikasi secara Eksternal

Perseroan mengkomunikasikan dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal.

1. Komunikasi dengan pihak eksternal:
Suatu proses diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi relevan dan secara tepat waktu ke pihak eksternal termasuk pemegang saham, *partner*, pemilik, pemerintah, konsumen, analis keuangan, serta pihak eksternal lainnya.
2. Memudahkan komunikasi masuk:
Jalur komunikasi terbuka memudahkan input dari konsumen, pemasok, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan lainnya, untuk menyediakan informasi relevan bagi manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah:
Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
4. Komunikasi dengan Dewan Komisaris:
Informasi relevan dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan kepada manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menetapkan metode komunikasi:
Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, sifat komunikasi, serta ketentuan perjanjian dan aturan pemerintah.
6. Menerapkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan pegawai dan pihak lain yang terkait, antara lain melalui:
 - a. Penyusunan buku pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
 - b. Surat edaran;
 - c. Memorandum;
 - d. Pengumuman;
 - e. Pemanfaatan intranet dan internet;
 - f. Arahan lisan.
7. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi secara terus menerus, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

4. Establishing relevant communication method:
The communication method takes into account time, audience/listener, and nature of information.

15th Principle: External Communication

The Company communicates matters that affect effectiveness of internal control with related external parties.

1. Communication with external parties:
A process is implemented to communicate relevant information in a timely manner to external parties, including shareholders, partners, owners, government, customers, financial analysts, and other external parties.
2. Facilitating incoming communication:
An open communication line allows for input from customers, suppliers, external auditors, government, financial analysts, and so on, to provide relevant information for management/Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Providing separate lines of communication:
Separate lines of communication line serve as fail safe mechanisms which are run as anonymous or secret communication lines when the normal line is not operational or effective. One example is the special line for whistleblower.
4. Communication with the Board of Commissioners:
Relevant information generated from assessment conducted by external parties is delivered to management/Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Establishing communication method:
The communication method takes into account time, audience/listener, and nature of communication as well as agreement provision and government regulation.
6. Applying various forms and means of communication with employees and other relevant parties, among others through:
 - a. Creation of policy and procedure implementation guidelines book;
 - b. Circular letter;
 - c. Memorandum;
 - d. Announcement;
 - e. Intranet and internet utilization;
 - f. Verbal directive.
7. Managing, developing, and renewing information system to improve usability and reliability of continuous communications by taking into account the followings:

- a. Pengembangan sistem informasi didasarkan pada rencana strategis pengembangan sistem informasi yang merupakan bagian dari rencana strategis Perseroan secara menyeluruh.
- b. Mekanisme identifikasi perkembangan kebutuhan informasi.
- c. Perkembangan dan kemajuan teknologi.
- d. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap mutu informasi yang mencakup ketepatan isi, akurasi, dan kemudahan mengakses informasi.
- e. Kecukupan sumber daya manusia dan dana untuk pengembangan teknologi informasi.

- a. Information system development is based on strategic plans that are part of overall strategic plan of the Company.
- b. Identification mechanism of information needs development.
- c. Technology developments and advances.
- d. Continuous monitoring on information quality that includes content accuracy and easiness in accessing the information.
- e. Adequacy of human capital and fund for information technology development.

Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui:

Prinsip 16: Melakukan Evaluasi *Ongoing*/Berjalan dan/atau Terpisah

Perseroan menetapkan, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berjalan dan/atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah didesain secara memadai dan efektif.

1. Mempertimbangkan bauran evaluasi berjalan dan terpisah:
Manajemen menyeimbangkan bauran evaluasi berjalan dan terpisah.
2. Mengembangkan pemahaman titik awal:
Desain dan kondisi berjalan dari Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk membangun titik awal untuk evaluasi berjalan dan terpisah.
3. Mempertimbangkan tingkat perubahan:
Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis ketika menetapkan dan mengembangkan evaluasi berjalan dan terpisah.
4. Menggunakan pekerja yang kompeten:
Evaluator yang melaksanakan evaluasi berjalan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi.
5. Terintegrasi dengan proses bisnis:
Evaluasi berjalan dibangun dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi.
6. Evaluasi secara obyektif:
Evaluasi terpisah dilaksanakan secara periodik untuk memberikan masukan yang obyektif.
7. Menyesuaikan lingkup dan frekuensi:
Manajemen menyesuaikan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah, tergantung pada risiko.

Monitoring and Evaluation

Monitoring is a process of evaluating the quality of the Company's Internal Control System for certain periods. Monitoring and evaluation are carried out by:

16th Principle: Conducting *Ongoing* and/or Separate Evaluation

The Company determines, develops, and conducts ongoing and/or separate evaluation to ensure that internal control has been designed adequately and effectively.

1. Taking into account the mixture of ongoing and separate evaluations:
Management balances the mixture of ongoing and separate evaluations.
2. Developing understanding of the starting point:
The design and ongoing condition of Internal Control System are used to develop the starting point for ongoing and separate evaluations.
3. Taking into account the rate of change:
Management takes into account the rate of changes in business process when determining and developing ongoing and separate evaluations.
4. Utilizing competent employees:
Evaluators that perform ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated.
5. Integrated with business process:
Ongoing evaluation is built into business process and adjusted with changes in the condition.
6. Objective evaluation:
Separate evaluation is performed periodically to provide objective input.
7. Adjusting scope and frequency:
Management adjusts the scope and frequency of separate evaluation which depends on risks.



Prinsip 17: Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Internal

Perseroan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Menilai hasil:
Direksi dan Dewan Komisaris menilai hasil evaluasi berjalan dan terpisah.
2. Mengkomunikasikan kelemahan kepada manajemen:
Kelemahan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi dan kepada setidaknya manajemen satu tingkat ke atas.
3. Melaporkan kelemahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris:
Kelemahan signifikan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, jika diperlukan.
4. Memonitor tindakan koreksi:
Manajemen memonitor apakah kelemahan diperbaiki secara baik dan tepat waktu.

Mekanisme *monitoring* atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dapat menggunakan Model Tiga Lini (*Three Lines Model*), yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Berdasarkan Model tersebut, peran dari masing-masing lini dapat digambarkan sebagai berikut:

Peran Lini Pertama – Manajemen yang Memiliki dan Mengelola Risiko

1. Memimpin dan mengarahkan tindakan (termasuk manajemen risiko) dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Memelihara dialog berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan melaporkan terkait: rencana, aktual, dan hasil yang diharapkan dihubungkan dengan pencapaian tujuan organisasi dan risiko.
3. Membentuk dan memelihara struktur dan proses yang memadai untuk pengelolaan operasi dan risiko.
4. Manajemen operasional bertanggung jawab memelihara efektivitas pengendalian internal dan melaksanakan prosedur risiko sehari-hari.
5. Manajemen operasional mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko, mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur dan kebijakan internal, serta memastikan bahwa aktivitas telah konsisten dengan target dan tujuan.

17th Principle: Evaluation and Communication of Internal Control Weakness

The Company evaluates and communicates the weakness of internal control in a timely manner to responsible parties, including the Board of Directors and Board of Commissioners, in order to take corrective actions:

1. Assessing results:
The Board of Directors and Board of Commissioners assess the result of ongoing and separate evaluations.
2. Communicating weakness to management:
Weakness is communicated to responsible parties in order to take corrective actions and at least to management at one level above.
3. Reporting weakness to the Board of Directors and Board of Commissioners:
Significant weakness is reported to the Board of Directors and Board of Commissioners, if necessary.
4. Monitoring corrective actions:
Management monitors whether the weakness is fixed properly and timely.

Monitoring mechanism on the adequacy and effectiveness of internal control can use the Three Lines Model developed by Institute of Internal Auditors (IIA). Based on the model, the roles of each IPC line can be described as follows:

First Line Roles – Management Owning and Managing Risks

1. Leading and directing actions (including risk management) as well as applying resources to achieve the organization's objectives.
2. Maintaining a continuous dialog with the Board of Commissioners and reporting on planned, actual, and expected outcomes linked to the objectives of the organizations as well as risk.
3. Establishing and maintaining appropriate structures and processes for the management of operations and risks.
4. Operational management has the responsibility to maintain effectiveness of internal control and implement daily risk procedure.
5. Operational management identifies, assesses, controls, and mitigates risks, develops and implements internal policy procedure and policies, as well as ensures that activities are consistent with targets and objectives.

Peran Lini Kedua – Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang Memfasilitasi dan Mengawasi Risiko

1. Memberikan keahlian yang dibutuhkan, dukungan, *monitor*, dan tantangan terkait dengan manajemen risiko, termasuk:
 - a. Pengembangan, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan terkait praktik manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) pada level proses, sistem, dan entitas.
 - b. Pencapaian tujuan manajemen risiko seperti: kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perilaku etis; pengendalian internal; keamanan informasi dan teknologi; sustainabilitas; dan jaminan kualitas.
2. Memberikan analisis dan laporan terkait kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, termasuk pengendalian internal.
3. Menyediakan kerangka manajemen risiko, pengendalian keuangan, kepatuhan hukum, pengendalian intern, dan kendali mutu.
4. Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan pengendalian untuk mengelola risiko dan isu-isu.
5. Memonitor kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, akurasi, dan kelengkapan pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta perbaikan secara tepat waktu atas kelemahan pengendalian internal.

Peran Lini Ketiga – Internal Audit Berperan sebagai Pemberi Keyakinan yang Memadai (*Independent Assurance*)

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan relatif lebih independen terhadap Manajemen.
2. Mengkomunikasikan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terkait kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta mempromosikan dan memfasilitasi perbaikan berkelanjutan.
3. Melaporkan adanya gangguan independensi dan objektivitas kepada Dewan Komisaris dan mengimplementasikan tindakan pengamanannya (*safeguards*).

Second Line Roles – Functions of Risk and Compliance Management in Facilitating and Monitoring Risks

1. Providing complementary expertise, support, monitor, and challenge related to risk management, including:
 - a. Development, implementation, and continuous improvement related to risk management practices (including internal control) at a process, system, and entity level.
 - b. Achievement of risk management objectives, such as compliance with laws, regulations, and acceptable ethical behavior; internal control; information and technology security; sustainability; and quality assurance.
2. Providing analysis and reports on adequacy and effectiveness of risk management, including internal control.
3. Providing frameworks of risk management, financial control, legal compliance, internal control, and quality control.
4. Assisting management in developing process and control to manage risks and issues.
5. Monitoring adequacy and effectiveness of internal control, accuracy and completeness of reports, compliance with laws and regulations, as well as timely improvement on internal control weakness.

Third Line Roles – Internal Audit as Independent Assurance

1. Maintaining accountability to the President Director and relatively more independent from the Management
2. Communicating independent and objective assurance and advice to the President Director and Board of Commissioners on adequacy and effectiveness of governance and risk management (including internal control) to support the achievement of organizational objectives as well as to promote and facilitate continuous improvement.
3. Reporting impairments to independence and objectivity to the Board of Commissioners and implementing safeguards.



KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal, walaupun telah didesain dan diimplementasikan secara baik, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, tidak absolut, kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan pencapaian tujuan Perseroan. Kemungkinan pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam semua Sistem Pengendalian Internal.

Efektivitas pengendalian internal dibatasi oleh realitas kelemahan manusia dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengendalian internal telah didesain dengan baik, namun dapat rusak oleh karena salah paham terhadap instruksi, kecerobohan, kebingungan, atau ketidakfokusan (akibat banyaknya tugas). Bahkan pengendalian internal dapat diperdaya oleh kolusi antara 2 (dua) atau lebih banyak orang atau sikap pengabaian dan pembangkangan dari manajemen.

PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Setiap Insan IPC memiliki tanggung jawab atas pengendalian internal. Dewan Komisaris berperan untuk mengarahkan dan mengawasi Direksi dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Perseroan, dimana Direktur Utama sebagai penanggung jawab utama dibantu oleh Direktur lain dan senior manajemen lainnya.

Berbagai fungsi bisnis mengkomunikasikan, memenuhi, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan, standar, kebijakan internal, dan standar perilaku. Auditor internal mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan untuk efektivitas pengendalian internal, namun mereka tidak memiliki tanggung jawab eksternal dan *reviewer* eksternal lainnya juga tidak bertanggung jawab atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal, ketika mereka memberikan penilaian independen atas keandalan laporan eksternal Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan tata kelola, jalannya tata kelola pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi, terkait dengan manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

INTERNAL CONTROL LIMITATIONS

Although it has been designed and implemented properly, internal control only provides adequate, not absolute, assurance to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the achievement of the Company's objectives. The likelihood of reaching those objectives is influenced by limitations inherent in all Internal Control Systems.

Effectiveness of internal control is limited by human weaknesses in decision making. Despite well-designed internal control, it can still be damaged by misunderstanding of instructions, carelessness, confusion, or lack of focus (due to excessive number of duties). In fact, internal control could be overcome by the collusion of 2 (two) or more people or due to ignorance and insubordination of the management

PARTIES INVOLVED IN INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Every IPC personnel is responsible for internal control. The Board of Commissioners has the role to direct and supervise the Board of Directors in the development and implementation of internal control. Management is responsible for developing and implementing the Company's Internal Control System with President Director as the main person in charge assisted by other Directors and senior management.

Various business functions communicate, fulfill, and evaluate compliance with laws, regulations, standards, internal policies, and Code of Conduct. Internal auditor evaluates and recommends improvement to the effectiveness of internal control without having external responsibility. External reviewer also does not have the responsibility on effectiveness of Internal Control System when giving their independent evaluation on reliability of the Company's external report.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the responsibility to:

1. Supervise policies on governance, general application of governance, and provide counsels to the Board of Directors in relation to risk management and internal control;
2. Monitor and ensures that governance, risk management, and internal control have been implemented in an effective and continuous manner.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, atau Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direktur Utama

Direktur Utama memegang tanggung jawab utama atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan. Direktur Utama menetapkan *tone of the top* yang mempengaruhi faktor lingkungan pengendalian dan seluruh komponen lainnya dalam pengendalian internal.

Direktur Utama mempunyai peran:

1. Memberikan kepemimpinan dan arahan kepada Direktur lain dan para manajemen senior. Dengan dukungan manajemen, Direktur Utama menetapkan nilai, prinsip, dan kebijakan utama yang membentuk fondasi bagi Sistem Pengendalian Internal Perseroan.
2. Pertemuan secara periodik dengan manajemen senior dari setiap unit operasional (seperti Divisi Operasi dan Divisi Komersial) dan fungsi pendukung bisnis utama (seperti Keuangan, Teknik, SDM, hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko).
3. Menetapkan ukuran target dan ekspektasi terukur lainnya secara *on-going* maupun *long-term* untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Metode untuk mendesain, mengimplementasikan, dan menilai pengendalian internal didelegasikan kepada manajemen di berbagai tingkatan.
4. Mengarahkan seluruh manajemen dan para pekerja lainnya untuk secara proaktif mengidentifikasi ancaman atas Sistem Pengendalian Internal. Dengan memperhatikan kecepatan perubahan dan interaksi jaringan dari para mitra bisnis, konsumen, dan pekerja, maka sumber ancaman terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal akan secara konstan berubah pula.

Anggota Senior Manajemen Lainnya

Anggota Senior Manajemen lainnya merupakan para Direktur selain Direktur Utama yang memimpin operasional kunci dan fungsi pendukung bisnis.

Direksi mempunyai tanggung jawab:

1. Mengarahkan pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian internal secara konsisten untuk mencapai tujuan utama Perseroan.
2. Berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana dengan cara menetapkan kebijakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

In performing such responsibility, the Board of Commissioners can be assisted by committees, such as Audit Committee, Risk Management Committee, or Nomination and Remuneration Committee.

President Director

President Director has the main responsibility on effectiveness of the Company's Internal Control System. President Director determines *tone of the top* that affects control environment and other components in internal control.

President Director serves to:

1. Demonstrate leadership and provide directive to other Directors and senior management. With the management's support, the President Director sets values, principles, and main policies that serve as the foundation of the Company's Internal Control System.
2. Hold periodic meeting with senior management of each operational unit (such as Operation Division and Commercial Division) and main business supporting functions (such as finance, engineering, HC, laws, compliance, and risk management).
3. Determine on-going or long-term target measurement and other measured expectations to evaluate the effectiveness of Internal Control System. Methods to design, implement, and evaluate internal control are delegated to management at various levels.
4. Direct all management members and employees to proactively identify threats to Internal Control System. By considering the rate of changes and network interaction of business partners, customers, and employees, the source of threat to Internal Control System effectiveness will also constantly change.

Other Senior Management Member

The other Senior Management members are Directors, aside from the President Directors, who lead key operations and supporting functions of the Company's business.

The Board of Directors has the responsibility to:

1. Direct the development and implementation of internal control policies and procedures in a consistent manner to achieve the Company's main objectives.
2. Actively take part in preventing any deviations committed by structural officials, functional officials, and executors by formulating policies according to principles of prudence.



3. Memantau kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Direktorat untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.
4. Menugaskan pengembangan prosedur pengendalian internal yang lebih spesifik kepada pekerja yang bertanggung jawab atas suatu fungsi atau divisi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi dibantu oleh Kepala Divisi dan Subdivisi, yang mempunyai tanggung jawab:

1. Memainkan peranan praktik sehari-hari dalam merancang dan mengeksekusi prosedur pengendalian internal tertentu untuk mencapai tujuan unitnya masing-masing.
2. Memantau kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal unitnya untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Melakukan tindakan perbaikan atas kelemahan atau pelanggaran pengendalian internal.
4. Melaporkan hasil *monitoring* pengendalian internal kepada atasannya.

Fungsi Pendukung Bisnis

Berbagai fungsi pendukung bisnis melalui keahlian khusus mereka, seperti manajemen risiko, pengendali keuangan, manajemen kualitas produk/jasa, teknologi, kepatuhan, hukum, sumber daya, dan lainnya. Mereka memberikan panduan dan penilaian atas pengendalian internal terkait dengan area keahlian masing-masing. Fungsi pendukung bisnis ini merupakan salah satu bagian dari fungsi lini kedua.

Fungsi Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan

Fungsi Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan merupakan bagian dari fungsi lini kedua. Peran dan tanggung jawab mereka adalah:

1. Memberikan keahlian yang dibutuhkan, dukungan, monitor, dan tantangan terkait dengan manajemen risiko, termasuk:
 - a. Pengembangan, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan terkait praktik manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) pada level proses, sistem, dan entitas.
 - b. Pencapaian tujuan manajemen risiko, seperti kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perilaku etis, pengendalian internal, keamanan informasi dan teknologi, sustainabilitas, dan jaminan kualitas.
2. Memberikan analisis dan laporan terkait kecukupan dan efektivitas manajemen risiko (termasuk pengendalian internal).

3. Monitor adequacy and effectiveness of Internal Control System of the Directorate to ensure the objectives achievement.
4. Assign the development of a more specific internal control procedure to employees that have the responsibility over a function or division.

In carrying out such responsibilities, the Board of Directors is assisted by Division and Subdivision Heads with the responsibility to:

1. Play the role of daily practices in designing and execution certain internal control procedure to achieve their own unit objectives.
2. Monitor adequacy and effectiveness of Internal Control System in their unit to ensure the achievement of the Company's objectives.
3. Make improvements on weakness or violation of internal control.
4. Report the result of internal control monitoring to their supervisor.

Business Supporting Functions

Business functions with their own expertise, such as risk management, finance control, product/service quality, technology, compliance, laws, resources, and so on. They provide guidelines and evaluation on internal control related to the level of expertise. This business supporting function is part of the second line function.

Risk Management Function, Internal Control and Compliance

The functions of Risk Management, Internal Control, and Compliance are part of the second line function. Their roles and responsibilities are:

1. To provide necessary skills, support, monitor and challenges related to risk management, including:
 - a. Development, implementation, and continuous improvement related to risk management (including internal control) every process level, system, and entity.
 - b. Achievement of risk management objectives such as compliance with laws and regulations, ethical behaviors, internal control, information technology security, sustainability, and quality assurance.
2. Provide related analysis and report regarding adequacy and effectiveness of risk management (including internal control).

3. Menyediakan kerangka manajemen risiko, pengontrol keuangan, kepatuhan hukum, pengendalian internal, dan kendali mutu.
4. Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan pengendalian untuk mengelola risiko dan isu-isu.
5. Memonitor kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, akurasi dan kelengkapan pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan perbaikan secara tepat waktu atas kelemahan pengendalian internal.
6. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai Lini Ketiga mempunyai tanggung jawab:

1. Auditor internal memberikan *assurance* dan jasa konsultasi atas perbaikan pengendalian internal. Ukuran fungsi audit internal tergantung pada ukuran, kompleksitas, sebaran geografis dari keseluruhan entitas dan sub unitnya. Pada setiap penugasan, aktivitas audit internal diharapkan dilaksanakan secara kompeten, profesional, independen, dan objektif, serta berbasis risiko.
2. Aktivitas audit internal termasuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespons risiko-risiko signifikan, terkait:
 - a. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
 - b. Efektivitas dan efisiensi operasional.
 - c. Keamanan aset.
 - d. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
3. Audit internal mengkomunikasikan hasil penugasan dan berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama.
4. Audit internal memelihara sikap tidak memihak terhadap aktivitas yang diaudit, melalui posisi independen, kecakapan, dan kewenangan mereka.
5. Auditor internal tidak boleh mengambil tanggung jawab operasional dan juga tidak boleh ditugaskan pada aktivitas yang dalam setahun sebelumnya mereka terlibat.

Pihak-pihak Eksternal

Pihak-pihak eksternal Perseroan antara lain pelanggan, pemasok, dan auditor eksternal independen berperan memberikan kesaksian atau bukti yang menguatkan tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan. Pelanggan menyampaikan informasi kepuasan pelanggan, pemasok memberikan kesaksian atas penerapan Sistem Pengendalian

3. Provide frameworks for risk management, financial control, legal compliance, internal control, and quality control.
4. Assist the management in developing process and control to manage risks and issues.
5. Monitor adequacy and effectiveness of internal control, accuracy and completeness of reports, compliance with laws and regulations, as well as a timely improvement on internal control weakness.
6. Perform monitoring on how business function is run within the corridor of risk management policies and standard operating procedures set by the Company.

Internal Audit Unit Division

Internal Audit Unit Division serves as the Third Line that has the responsibility to:

1. Provide assurance and consultation services on internal improvements of internal control. Functional measure of internal audit depends on the measurement, complexity, and geographical spread of all entities and their sub-units. At each assignment, internal audit activities are expected to perform in a competent, professional, independent, and objectives based on risk.
2. Internal audit activities include evaluating adequacy and effective ness of control in responding to significant risks related to:
 - a. Financial and operational information reliability and integrity.
 - b. Operational effectiveness and efficiency.
 - c. Asset security.
 - d. Compliance with laws, regulations, policies, procedures and contracts.
3. Internal audit reports on the assignment result and communicate directly with the President Director.
4. Internal audit maintains independency on audited activities through independent, reliability, and authority.
5. Internal auditor shall not take operational responsibility and not be assigned on an achievement for a activities that they were in the previous year.

External Parties

External parties of the Company are customers, suppliers, and independent external auditors that have the role in providing witness or evidence that reinforce of the Company's Internal Control System effectiveness. Customers submit information on customer satisfaction, suppliers provide witness on Internal Control System through independent parties



Internal melalui konfirmasi pihak independen dan auditor eksternal independen menyampaikan hasil audit kepada manajemen Perseroan.

and independent auditors who submit audit result to the Company's management.

PENILAIAN MANDIRI ATAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

SELF-ASSESSMENT ON THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

Penilaian mandiri atas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan (*Control Self Assessment*) adalah suatu proses yang dijalankan untuk menguji dan menilai efektivitas penerapan Sistem Pengendalian di IPC. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh tujuan kegiatan dapat dicapai/dilaksanakan dengan baik.

Self-assessment on the Company's Internal Control System is a process to test and evaluate effectiveness of Internal Control System implementation in IPC. The purpose of this evaluation is to provide adequate belief that all activities purposes can be reached/achieved properly.

Pelaksanaan penilaian mandiri atas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan dilakukan secara berkala oleh setiap Unit Kerja Perseroan. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri tersebut.

Implementation of self-assessment on the Company's Internal Control System is carried out periodically by every Work Unit of the Company. Heads of Work Unit are responsible for implemented the self-assessment.

Satuan Pengawasan Internal melakukan pengumpulan, evaluasi, dan penilaian akumulatif dari hasil penilaian masing-masing Unit Kerja.

Internal Control Unit performs collection, evaluation, and accumulative assessment from each assessment result of the Work Unit.

Hasil Penilaian Mandiri atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020

Self-Assessment Result on Internal Control Implementation in 2020

Pada tahun 2020, Perseroan belum melakukan penilaian atas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) karena di tahun 2020, Manajemen IPC baru melakukan revisi Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal dengan mengacu pada Kerangka COSO.

In 2020, the Company did not conduct assessment on the Internal Control system implementation because the IPC Management recently revised the General Guidelines for Internal Control System by referring to COSO Framework in 2020.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

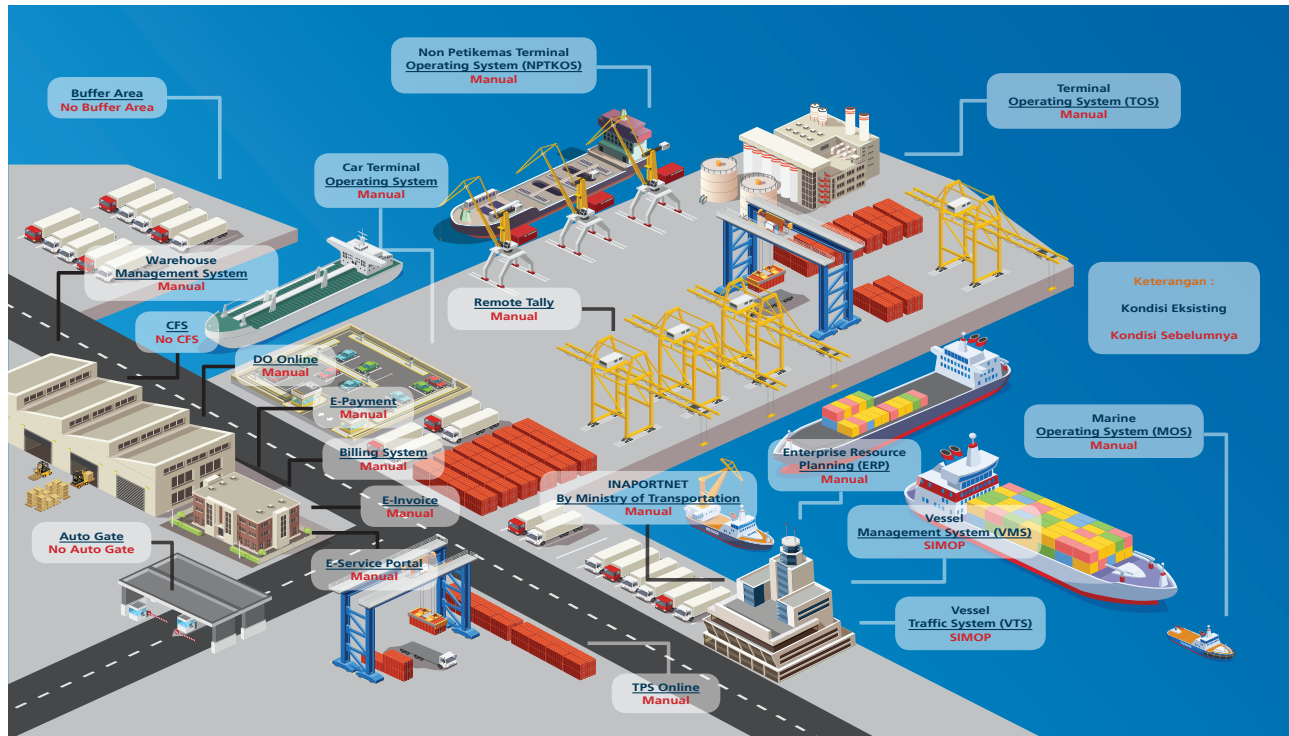
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Di tengah perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin masif, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berinisiatif untuk mengimplementasikan penggunaan TI dalam pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan dalam rangka mengotomasi proses bisnis, meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan serta sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat yang optimal dari pemanfaatan TI dapat dirasakan oleh Perseroan apabila TI di IPC dikelola secara memadai, sejak tahap perencanaan, pengembangan dan/atau pengadaan, pengoperasian, sampai pada pengawasan kinerjanya. Berikut ini merupakan lanskap teknologi informasi yang telah diimplementasi di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero):

In the midst of the increasingly massive development of Information Technology (IT), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) took the initiative to use of IT in the implementation of the Company's operational activities for automate business processes, increasing speed and service quality and as a tool in the decision making process. The Company is able to experience optimal benefits from the use of IT if IT in IPC is managed adequately, from the planning, development and/or procurement, operation, to performance monitoring stages. The following is the information technology landscape that has been implemented at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero):

Lanskap Implementasi TI di IPC

IT Implementation Landscape at IPC



Selaras dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan bisnis IPC berpedoman pada 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut wajib dilaksanakan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan internal, antara lain Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen, dan seluruh pegawai serta diterapkan pada semua fungsi bisnis Perseroan, termasuk fungsi pengelolaan Teknologi Informasi (TI) atau *Information Technology* (IT) Governance.

IT Governance telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari praktik GCG, yang merupakan perwujudan tanggung jawab Direksi dan manajemen Perseroan yang diterapkan melalui gaya kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Perseroan dikelola secara optimal dalam mendukung pencapaian strategi dan tujuan perusahaan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan IT Governance di lingkungan IPC, Perseroan telah menetapkan Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SI.01/28/2/1/PMI/UT/PI.II-2020 tanggal 28 Februari 2020. Pedoman tersebut menjadi kerangka utama dalam pengelolaan tata kelola

In harmony with the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) that has been implemented by the Company, IPC business management is guided by 5 (five) principles, namely transparency, independency, accountability, responsibility and fairness. These principles must be implemented consistently by internal stakeholders, including Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and all employees and are applied to all business functions of the Company, including the *Information Technology* (IT) Governance.

IT Governance is an inseparable part of GCG practices, which is a manifestation of the responsibilities of Board of Directors and Management of the Company that is applied through leadership style, organizational structure, and processes designed to ensure that the Company's Information System is optimally managed in supporting the achievement of the Company's strategies and objectives.

To support the effectiveness of the implementation of IT Governance at IPC, the Company has established Guidelines for Information System Governance for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SI.01/28/2/1/PMI/UT/PI.II-2020 dated February 28, 2020. This guideline is the main framework in the good Information System governance



Sistem Informasi yang baik di lingkungan Perseroan dalam rangka mendukung GCG secara lebih komprehensif.

Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi IPC ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai arahan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Informasi dan membuat kebijakan-kebijakan strategis dan operasional Sistem Informasi yang wajib dipenuhi dan dipatuhi dalam pengelolaan Sistem Informasi Perseroan untuk menghasilkan layanan Sistem Informasi sebagai berikut:

- a. Efektif, yaitu informasi yang tepat waktu, benar, konsisten, bermanfaat, relevan, dan berkaitan dengan proses bisnis Perseroan.
- b. Efisien, yaitu informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya secara optimal.
- c. Kerahasiaan, yaitu perlindungan atas informasi yang sensitif dari penyajian yang tidak terotorisasi.
- d. Integritas, yaitu perlindungan atas akurasi, validasi, dan kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kriteria proses bisnis Perseroan.
- e. Ketersediaan, yaitu perlindungan atas ketersediaan informasi sehingga dapat tersedia pada saat dibutuhkan.
- f. Kepatuhan, yaitu pengelolaan Sistem Informasi yang patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan dan pengelolaan Sistem Informasi.
- g. Keandalan, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan digunakan oleh manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Penetapan Peran TI Perusahaan

Teknologi Informasi di Perseroan digunakan sebagai *enabler* bisnis Perseroan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan mencapai tujuan Perseroan. Adapun peran TI sebagai *enabler* bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi mampu mentranslasikan kebutuhan bisnis dan strategi bisnis Perseroan ke dalam strategi teknologi informasi.
2. Strategi TI dapat meningkatkan performansi dari bisnis proses Perseroan dan memberikan *added value* terhadap bisnis.
3. Setiap yang berkaitan dengan implementasi TI harus melalui *risk assesment*, dan *risk acceptance* disesuaikan dengan *risk appetite top level management* Perseroan.
4. TI wajib diimplementasikan secara terintegrasi agar memudahkan pemantauan berkala.
5. Pengembangan TI harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki Perseroan dan disertai dengan *IT performance measurement*.

within the Company in order to support GCG in a more comprehensive manner.

This Information Technology Governance Policy Guideline is intended to provide an overview of the direction of the Company's management relating to the management of Information System and to make strategic and operational policies in the Information System that must be fulfilled and adhered to in managing corporate information technology to produce information technology services as follows:

- a. Effective, i.e. information that is timely, correct, consistent, useful, relevant and related to the Company's business processes.
- b. Efficient, i.e. information that is generated through optimal use of resources.
- c. Confidentiality, i.e. the protection of sensitive information from unauthorized presentation.
- d. Integrity, i.e. the protection for the accuracy, validation and completeness of information in accordance with the needs and criteria of the Company's business processes.
- e. Availability, i.e. the protection for the availability of information hence it can be available when needed.
- f. Compliance, i.e. the management of Information System that comply with laws and regulations related to the management of the Company and information technology;
- g. Reliability, i.e. information that can be trusted and used by management in the context of decision making.

STRATEGIC POLICIES

Company IT Roles

The Company's Information Technology is used as the Company's business enabler to increase value and achieve the Company's objectives. The IT roles as the Company's business enabler are as follows:

1. Information Technology is able to translate the Company's business needs and business strategy into an information technology strategy.
2. The IT strategy can improve the performance of the Company's business processes and provide added value to the business.
3. Anything related to IT implementation must go through risk assessment, and risk acceptance in accordance with the Company's risk appetite for top level management.
4. IT must be implemented in an integrated manner to facilitate periodic monitoring.
5. IT development must be adjusted to the capacity of the Company's resources and accompanied by IT performance measurement.

Peran dan Fungsi IT *Holding*, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan

1. Berdasarkan peran dan fungsi, pengelola TI di lingkungan IPC dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. IT *Holding* (Kantor Pusat)
 - b. Pengelola TI Kantor Cabang Pelabuhan dan pengelola TI Anak Perusahaan.
2. Pengelola TI di Kantor Pusat (IT *Holding*) merupakan pembina TI untuk TI Cabang Pelabuhan dan TI Anak Perusahaan.
3. Posisi pengelola TI di Kantor Cabang dan Anak Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Penetapan Kelas dan Struktur Organisasi Cabang Pelabuhan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
4. Secara umum tugas pengelola TI antara lain adalah:
 - a. Memonitor pemanfaatan fasilitas layanan dan infrastruktur TI dari setiap pengguna TI, untuk memastikan penggunaan yang tepat, efisien dan tidak melanggar hukum.
 - b. Menyusun aturan, kebijakan yang diperlukan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan dan infrastruktur TI di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk keberlangsungan bisnis dan operasional Perseroan.
 - c. Mengajukan rancangan aturan-aturan sebagaimana dimaksud pada poin b kepada Direksi untuk menjadi aturan yang berlaku.

Perencanaan TI

Perencanaan TI dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan tahapan dalam perencanaan TI, baik yang berupa perencanaan strategis (jangka panjang), dan perencanaan operasional (jangka pendek). Perencanaan TI ditujukan agar pengelolaan sumber daya TI beserta pengembangannya dapat selaras dengan tujuan dan strategi bisnis Perseroan.

Rencana Strategis Sistem Informasi

1. Rencana Strategis Sistem Informasi (IT *Master Plan*) merupakan dokumen yang menggambarkan visi dan misi Sistem Informasi, strategi yang mendukung visi misi tersebut dan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penggunaan Sistem Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Penyusunan Rencana Strategis Sistem Informasi (IT *Master Plan*) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian arah dengan rencana strategis Perseroan secara keseluruhan;

IT Roles and Functions at *Holding*, Port Branches, and Subsidiaries

1. Based on the roles and functions, IT managers at IPC are divided into 2 (two), namely:
 - a. IT *Holding* (Head Office)
 - b. Port Branch Office IT Manager and Subsidiary IT Manager.
2. IT Manager at Head Office (IT *Holding*) is an IT adviser for Port Branch IT and Subsidiary IT.
3. The position of IT managers at Branch Offices and Subsidiaries is stipulated in the Decree of the Board of Directors concerning Guidelines for Classification and Organizational Structure of Port Branches in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
4. In general, the duties of the IT managers include:
 - a. Monitor the utilization of IT service and infrastructure facilities of all IT users, to ensure proper, efficient and legal use.
 - b. Formulate the necessary rules and policies related to the use and utilization of IT services and infrastructure within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the continuity of the Company's business and operations.
 - c. Propose draft rules as referred to in point b to the Board of Directors to become the applicable rules.

IT Planning

IT planning is intended to regulate the procedures and stages in IT planning, both in the form of strategic planning (long term) and operational planning (short term). IT planning is intended so that the management of IT resources and their development can be in line with the Company's business objectives and strategy.

Information System Master Plan

1. Information System (IT) Master Plan is a document that describes vision and mission of the Information System, strategies that support this vision and mission and the main principles that serve as references in the use of Information System to meet business needs and support long-term strategic plans of PT Pelabuhan Indonesia. II (Persero).
2. The Information System Master Plan takes into account the following matters:
 - a. The conformity between the direction and the Company's overall strategic plan;



- b. Kesesuaian arah dengan strategi dan kegiatan masing-masing Unit Kerja;
 - c. Pemahaman manajemen mengenai peran dari Sistem Informasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini dan yang direncanakan;
 - d. Mempertimbangkan manfaat langsung dan tak langsung yang akan diperoleh dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan untuk penggunaan Sistem Informasi;
 - e. Kebutuhan akan investasi baru di bidang teknologi.
- b. The conformity between the direction and the strategies and activities of each Work Unit;
 - c. Management's understanding of the role of Information System in supporting the implementation of the Company's current and planned business activities;
 - d. Considering direct and indirect benefits that will be obtained compared to the costs that will be incurred for using the Information System;
 - e. The need for new investment in technology.

Pemantauan Rencana Strategis TI

Pemantauan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) atau IT *Master Plan* dilakukan pada tengah periode implementasi RSTI bertujuan untuk melakukan *review* apakah pelaksanaan RSTI telah sesuai dengan rencana dan tujuan bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pemantauan dapat dilakukan oleh Departemen Perencanaan dan Manajemen Informasi. Tahapan dalam pelaksanaan pemantauan rencana strategis TI sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Review Progress* Implementasi RSTI
2. *Review* Strategi Bisnis
3. Menyusun Rencana Implementasi Pengkinian RSTI
4. Melakukan Finalisasi Pengkinian RSTI

Arsitektur TI

Arsitektur TI merupakan dokumen yang menggambarkan desain, standar, target dan panduan yang menjadi acuan dalam pengembangan TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI

Kebijakan kerangka kerja proses dan organisasi TI adalah kebijakan yang mengatur tata kelola proses TI perusahaan serta kebutuhan organisasi pendukungnya. Kebijakan ini bertujuan agar proses utama TI perusahaan dapat dijalankan dan selaras dengan peran TI Perseroan, serta tersedianya organisasi pendukung proses tersebut.

Organisasi Divisi Sistem Informasi

Secara struktural, Divisi Sistem Informasi IPC berada di bawah Direktur Operasi. Unit kerja ini dipimpin oleh SVP Sistem Informasi. Divisi Sistem Informasi terdiri dari 3 (tiga) departemen, yaitu Departemen Perencanaan & Manajemen Informasi yang dipimpin oleh DVP Perencanaan & Manajemen Informasi, Departemen Pengembangan Sistem Informasi yang

IT Master Plan Monitoring

Monitoring the Information Technology Master Plan (RSTI) or IT Master Plan is carried out in the middle of the RSTI implementation period aimed at reviewing whether the RSTI implementation is in accordance with the plans and business objectives of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Monitoring can be carried out by the Department of Planning and Information Management. The stages in the implementation of IT master plan monitoring are as follows:

1. RSTI Implementation Progress Review
2. Business Strategy Review
3. Compiling IT Master Plan Update Implementation Plan
4. Finalizing IT Master Plan Updates

IT Architecture

IT architecture is a document that describes designs, standards, targets and guidelines as a reference in IT development to meet business needs and support the long-term strategic plan of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

IT Organization and Process Framework

IT process and organization framework policy governs the corporate IT process governance and the needs of their supporting organizations. This policy aims to ensure that the Company's main IT processes can be carried out and aligned with the Company's IT roles, as well as the availability of supporting organizations for these processes.

Information Systems Division Organization

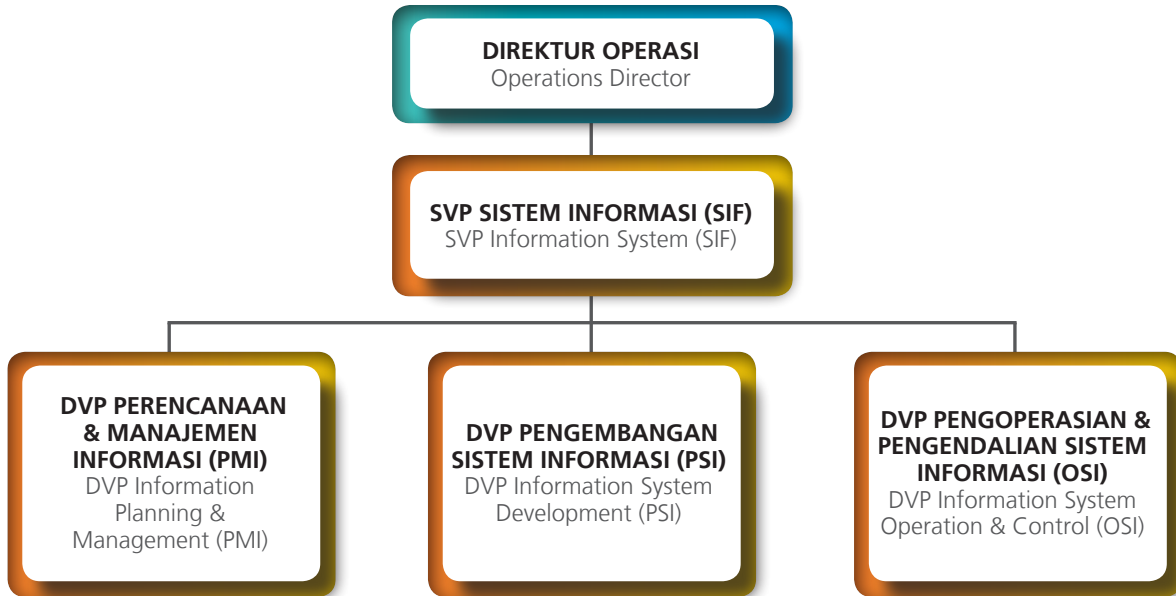
Structurally, IPC's Information Systems Division is under the Director of Operations. This work unit is led by SVP of Information Systems. The Information Systems Division consists of 3 (three) departments, namely Information System Planning & Management Department led by DVP of Planning & Information Management, Information System

dipimpin oleh DVP Pengembangan Sistem Informasi, dan Departemen Pengoperasian & Pengendalian Sistem Informasi yang dipimpin oleh DVP Pengoperasian & Pengendalian Sistem Informasi.

Development Department led by DVP of Information System Development, and Information System Operation & Control Department led by DVP of Information System Operation & Control.

Struktur Organisasi Divisi Sistem Informasi IPC

IPC Organizational Structure of Information Systems Division



Dewan Komisaris

Dalam Tata Kelola Sistem Informasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengarahkan, memantau dan mengevaluasi IT *Strategic Planning* (ITSP)/IT *Master Plan* dan kebijakan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terkait penyelenggaraan Sistem Informasi.

Board of Commissioners

In Information Systems Governance, the Board of Commissioners is responsible for directing, monitoring and evaluating the IT Strategic Planning (ITSP)/IT Master Plan and the policies of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding the implementation of Information System.

Direksi

Dalam Tata Kelola Sistem Informasi, Direksi bertanggung jawab menetapkan ITSP/IT *Master Plan* dan rencana pelaksanaan/pengembangan Sistem Informasi jangka pendek yang sejalan dengan Corporate Plan, menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Sistem Informasi, memastikan Sistem Informasi yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan kelangsungan pelayanan kepada pengguna.

Board of Directors

In Information System Governance, the Board of Directors is responsible for establishing ITSP/IT Master Plan and a short-term Information System implementation/development plan that is in line with the Corporate Plan, determine policies and procedures related to the implementation of Information System, ensure that the Information System used by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can support business development, achieve business goals of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the continuity of service to users.



Pengelola dan Penanggung Jawab Sistem Informasi

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memberikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi kepada Divisi Sistem Informasi. Dalam mengelola Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Divisi Sistem Informasi dapat dibantu oleh fungsi/organisasi tersendiri yang berada di Anak Perusahaan dan Cabang Pelabuhan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

IT Steering Committee

IT *Steering Committee* bertanggung jawab terhadap memberikan arahan strategis tentang kebijakan, pengembangan, dan implementasi Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Pengelolaan Investasi TI

Kebijakan pengelolaan investasi TI merupakan kebijakan yang mengatur tata kelola investasi TI Perseroan, kebijakan ini harus dipastikan bahwa setiap investasi TI harus terkait dengan inisiatif bisnis Perseroan agar setiap investasi TI selaras dengan strategi bisnis Perseroan.

Pengelolaan Sumber Daya TI

Pengelolaan sumber daya TI adalah kebijakan yang mengatur tatanan pengelolaan seluruh sumber daya TI yang berupa SDM, data/informasi, aplikasi dan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh proses pengelolaan sumber daya TI dapat dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk TI yang dapat dipercaya, efektif, dan efisien.

Pengelolaan Risiko TI

Pengelolaan Risiko TI dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan tahapan dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI. Pengelolaan risiko TI ditujukan agar penanganan risiko yang berkaitan dengan TI dapat dilaksanakan secara tepat, efektif dan selaras dengan kerangka pengelolaan risiko Perseroan.

Information System Manager and Person in Charge

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Directors delegates authority and responsibility for the management of Information Systems to the Information Systems Division. In managing Information System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Information Systems Division can be assisted by a separate function/organization from Subsidiaries and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

IT Steering Committee

IT Steering Committee is responsible for providing strategic direction on policies, development and implementation of the Information System for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

IT Investment Management

IT investment management policy is a policy that regulates the governance of the Company's IT investment. This policy shall ensure that all IT investments must be related to the Company's business initiatives so that every IT investment is in line with the Company's business strategy.

IT Resource Management

The management of IT resource is a policy that regulates the management of all IT resources in the form of HR, data/information, applications and infrastructure. This policy aims to ensure that the entire IT resource management process can be managed in accordance with the required rules so as to produce reliable, effective, and efficient IT products.

IT Risk Management

IT Risk Management is intended to govern the procedures and stages in risk management relating to the operation of IT. IT risk management is intended so that risk management related to IT can be carried out appropriately, effectively and in line with the Company's risk management framework.

PRINSIP TI

Pengelolaan TI di Perseroan memiliki visi, misi, dan sasaran TI yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan.

Prinsip TI IPC

01. Arsitektur Bisnis / Business Architecture

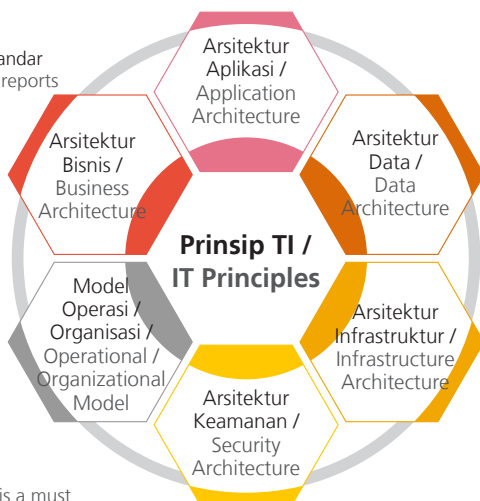
- Menggunakan kembali sebelum menciptakan baru / Re-use before creating new
- Kelangsungan usaha / Business continuity
- Proses bisnis, SLA, dan laporan yang terstandar / Business process, SLA, and standardized reports
- Kepatuhan / Compliance

06. Model Operasi / Organisasi / Operational / Organizational Model

- TI sebagai mitra usaha / IT as a business partner
- Efisiensi operasi / Operational efficiency
- Merencanakan dan meninjau proses IT / Plan and review IT process
- Personel yang kompeten / Competent personnel
- Tata Kelola Arsitektur / Architecture Governance

05. Arsitektur Keamanan / Security Architecture

- Kewajiban keamanan data / Data security is a must
- Ketidakpercayaan (jangan percaya, selalu verifikasi) / Zero Trust (never trust, always verify)
- Standarisasi proses keamanan dan sosialisasi / Standardize security process and socialize
- Sumber daya berdedikasi dan kompeten untuk mengawasi dan merespons insiden / Dedicated and competent resources to monitor and to respond to incident
- Memperhatikan pengguna / Considers the users
- Sistemisasi untuk menghindari kesalahan manusia dan perusakan data / Systemize to avoid human error and data tampering
- Dinilai secara berkala / Periodically reassessed



IT PRINCIPLES

IT management in the Company has a vision, mission, and goals that are in line with the Company's Vision and Mission.

IPC IT Principles

02. Arsitektur Aplikasi / Application Architecture

- Konsistensi analitik / Analytics consistency
- Mudah digunakan / Easy to use
- Mendahulukan sistem berbasis web / Web-based system first
- Menggunakan kembali > Membeli > Mengembangkan / Re-use > Buy > Build
- Menyelaraskan dengan kebutuhan usaha / Align with business need

03. Arsitektur Data / Data Architecture

- Definisi dan manajemen data / Data definitions and management
- Mudah diakses / Accessible
- Data adalah aset / Data is an asset
- Memperoleh data sekali dan memvalidasi dari sumber / Capture data once and validate at source
- Kepemilikan data / Data ownership

04. Arsitektur Infrastruktur / Infrastructure Architecture

- Agnostik Teknologi / Technology Agnostic
- Ketersediaan tinggi / High Availability
- Skala dapat disesuaikan / Scalable
- Sederhana / Keep it simple

REALISASI PENGEMBANGAN TI DI TAHUN 2020

Rekapitulasi Pekerjaan IT Kantor Pusat IPC Tahun 2020

Berikut ini adalah rekapitulasi pekerjaan kerja baik yang bersifat Rencana Kerja Manajemen (RKM), *Adhoc*, maupun *Carryover* pada Divisi Sistem Informasi:

REALIZATION OF IT DEVELOPMENT IN 2020

Recapitulation of IT Works at IPC Head Office in 2020

The following is a recapitulation of work both in the form of a Management Work Plan (RKM), *Adhoc*, and *Carryover* in the Information System Division:

Rekapitulasi Pekerjaan IT Kantor Pusat IPC Tahun 2020

Recapitulation of IT Works at IPC Head Office in 2020

RKM 2020

- 53**
Proyek / Project
- 11 Selesai / Done
 - 15 Masih berlangsung / On-going
 - 5 Dibatalkan / Dropped
 - 22 Belum dimulai / Not Started*

Pekerjaan *Adhoc* 2020 / *Adhoc* Works in 2020

- 39**
Proyek / Project
- 2 Selesai / Done (1 PSI, 1 OSI)
 - 11 Masih berlangsung / On-going (5 PSI, 6 OSI)
 - 26 Belum dimulai / Not Started* (9 PSI, 17 OSI)

Pekerjaan *Carryover* 2019 dikerjakan di 2020 / 2019 *Carryover* Works carried out in 2020

- 31**
Proyek / Project
- 27 Selesai / Done
 - 4 Masih berlangsung / On-going (TBC dengan RKM *Owner* / TBC with RKM *Owner*)

Keterangan / Description:

- *) Pekerjaan *Not Started*/belum dimulai karena: / *Not Started* works are due to:
1. RKM *Owner* belum membutuhkan *support* dari IT / RKM *Owner* is yet to need support from IT
 2. *User* belum memberikan nota dinas dan/atau BRD / *User* has not given official note and/or BRD yet
 3. RKM *cancel* dan/atau bergeser / *Canceled* and/or shifted RKM



Evaluasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020

Berikut ini adalah rangkuman status pekerjaan Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2020 dengan IT sebagai RKM Owner dari Divisi Sistem Informasi IPC:

2020 Management Work Plan Evaluation

The following is a summary of the work status of the 2020 Management Work Plan (RKM) with IT as the RKM Owner of the IPC Information Systems Division:

Evaluasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Divisi Sistem Informasi IPC Tahun 2020

Management Work Plan Evaluation of Information System Division in 2020

Nama RKM / Name of RKM	Status (Fase) / Status (Phase)	Target 2020 / 2020 Target	Realisasi 2020 / 2020 Realization
Penyusunan ITMP 2020 – 2024 / ITMP 2020-2024 Preparation	<i>Review & Socialization</i>	70%	100%
IT Risk Management (Lanjutan) / IT Risk Management (Continued)	<i>Finished</i>	100%	100%
Implementasi Enterprise Service Bus Fase III / Implementation of Phase III Enterprise Service Bus	<i>Finished</i>	100%	100%
Implementasi Release & Patch (versioning) Management System / Implementation of Release & Patch (versioning) Management System	<i>Procurement Preparation</i>	10%	100%
Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) DC & DR / Preparation of Disaster Recovery Plan (DRP) DC & DR	<i>Planning</i>	45%	100%
Peningkatan Pengawasan Keamanan TI / Improvement of IT Security Supervision	<i>Procurement Preparation</i>	15%	100%

Evaluasi Pekerjaan Sistem Informasi Tahun 2020

Selain pekerjaan dengan IT sebagai RKM Owner berikut disampaikan laporan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi tahun 2020 sebagai berikut:

2020 Information System Work Evaluation

In addition to work with IT as RKM Owner, the following is a report on the implementation of Information System development for 2020:

Evaluasi Pekerjaan Sistem Informasi Tahun 2020

2020 Information System Work Evaluation

Nama Pekerjaan / Works	Direktorat / Directorate	Status Project / Project Status
Pengembangan IPC Board Organizing System (i-BOS). / Development of IPC Board Organizing System (i-BOS).	SDM / HR	<i>Done</i>
Penyempurnaan Sistem Aplikasi SISKAKU. / Implementation of SISKAKU Application System.	Komersial / Commercial	<i>Done</i>
Implementasi Sistem MOS di Cabang Pelabuhan Panjang dan Teluk Bayur. / Implementation of MOS System at Panjang Port and Teluk Bayur Branches.	Operasi / Operation	<i>Done</i>
Pengembangan Terminal Operating System (ITOS) dan Sistem Billing (NBS) untuk pelayanan peti kemas di Cabang Bengkulu dan Sunda Kelapa. / Development of Terminal Operating System (ITOS) and Billing System (NBS) for container services in Bengkulu and Sunda Kelapa branches.	Operasi / Operation	<i>Done</i>
Implementasi Integrasi VMS dengan Inaportnet di 5 (lima) Cabang. / Implementation of VMS integration with Inaportnet in 5 (five) branches.	Operasi / Operation	<i>Done</i>
Pekerjaan Pengembangan Sistem Oracle Project Costing Tahap III Anak Perusahaan. / Oracle Project Costing Phase III Subsidiary System Development Work.	Kuangan / Finance	<i>Done</i>
Pengembangan Sistem Oracle Project Costing Tahap IV: Anak Perusahaan (PT RSP, PT PII, PT JPPI, PT PMLI dan PT EPI). / Oracle Project Costing Phase IV System Development: Subsidiaries (PT RSP, PT PII, PT JPPI, PT PMLI and PT EPI).	Kuangan / Finance	<i>Done</i>
Pekerjaan Optimalisasi dan Enhancement Fixed Asset Management System Keuangan. / Optimization and Enhancement Work on Financial Fixed Asset Management System.	Kuangan / Finance	<i>Done</i>
Pekerjaan Pengembangan Sistem Manajemen Absensi. / Attendance Management System Development Works.	SDM / HR	<i>Done</i>
Pekerjaan Pengembangan Sistem Human Resources Data dan Payroll. / Human Resources Data and Payroll System Development Works.	SDM / HR	<i>Done</i>
Pekerjaan Implementasi Sistem Laporan Arus Kas. / Implementation of Cash Flow Statement System Works.	Kuangan / Finance	<i>Done</i>
Pekerjaan Pengembangan Intergrated Billing System (IBS) Nasional Layanan Peti Kemas PT Pelindo I, II, III & IV (Persero). / Development of National Integrated Billing System (IBS) for Container Services of PT Pelindo I, II, III & IV (Persero).	Operasi / Operation	<i>Done</i>
Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Enterprise Planning & Budgeting Cloud Service (EPBCS) Tahap II. / Enterprise Planning & Budgeting Cloud Service (EPBCS) System Development Consultant Services Work Phase II.	Kuangan / Finance	<i>Done</i>
Pekerjaan Advancing Sistem Monitoring Realisasi Investasi. / Advancing Work on Investment Realization Monitoring System.	Teknik / Engineering	<i>Done</i>
Pekerjaan Integrasi Learning Management System dengan Sistem SDM. / Job Integration Learning Management System with HR Systems.	SDM / HR	<i>Done</i>

Nama Pekerjaan / Works	Direktorat / Directorate	Status Project / Project Status
Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan & Implementasi Sistem IPC <i>Databox</i> . / Consulting Services for <i>Databox</i> IPC System Development & Implementation.	Utama / Main	Done
Pekerjaan Jasa Pengembangan Sistem <i>Customer Mobile Application</i> . / Customer Mobile Application System Development Services Works.	Komersial / Commercial	Done
Pekerjaan Implementasi Non-Peti Kemas <i>Terminal Operating System</i> (NPK TOS) di Cabang Pelabuhan Bengkulu & Pontianak. / Implementation of Non-Container Terminal Operating System (NPK TOS) at Bengkulu & Pontianak Port Branches.	Operasi / Operation	Done
Pekerjaan Pembangunan Aplikasi VMS untuk <i>Platform</i> iOS dan <i>Android</i> . / VMS Application Development Works for iOS and Android Platforms.	Operasi / Operation	Done
Pekerjaan Pengembangan IPC <i>Intercompany System</i> Fase III. / IPC Intercompany System Development Works Phase III.	Keuangan / Finance	Done
Pekerjaan Implementasi Visualisasi <i>Dashboard Intelligence & Analytics</i> . / Intelligence & Analytics Dashboard Visualization Implementation.	Keuangan / Finance	Done
Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta dan Pengelolaan Karier. / Talent Management and Career Management Application Development Works.	SDM / HR	Done
Pekerjaan Implementasi Standarisasi Nota Jasa Kepelabuhan (<i>e-Invoice</i>) di Cabang. / Implementation of Standardized Port Service Notes (<i>e-Invoice</i>) at Branches.	Keuangan / Finance	Done
Pekerjaan Jasa Konsultansi Strategi dan Implementasi <i>Digital Port</i> (Pengembangan <i>Minimum Viable Product/ MVP</i>) untuk Sistem I-Hub dan IODB). / Strategic Consulting Services and Digital Port Implementation Services (<i>Minimum Viable Product/MVP</i> Development) for I-Hub and IODB Systems).	Operasi / Operation	Done
Pekerjaan Implementasi Sistem <i>CFS Stuffing/Stripping Terminal Multipurpose</i> (Non-Peti Kemas/NPK-S) di Cabang Pelabuhan Palembang dan Jambi. / Implementation of <i>CFS Stuffing/Stripping Terminal Multipurpose</i> System (Non-Container/NPK-S) at the Palembang and Jambi Port Branches.	Operasi / Operation	Done
<i>Enhancement Enterprise Planning and Controlling</i> .	Utama / Main	Done
Pengembangan <i>Contract Management System & E-Catalog</i> . / Development of Contract Management System & E-Catalog.	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Done
<i>Roll Out Cash Management</i> pada Cabang Pelabuhan Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan. / Roll Out Cash Management at Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan Port Branches.	Keuangan / Finance	Done
Konsultansi <i>IT Risk Management</i> . / IT Risk Management Consultation.	Operasi / Operation	Done
Implementasi dan <i>Roll Out Enterprise Service Bus</i> (ESB) Tahap II dan III. / Implementation and Roll Out of Enterprise Service Bus (ESB) Phase II and III.	Operasi / Operation	Done
<i>Enhancement Data Center</i> (DC) dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) Fase II. / Enhancement Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) Phase II.	Operasi / Operation	Done
Migrasi <i>Data Center</i> . / Data Center Migration.	Operasi / Operation	Done
Implementasi <i>Security Information and Event Management</i> (SIEM). / Implementation of Security Information and Event Management (SIEM).	Operasi / Operation	Done
Peningkatan Keamanan Layanan Infrastruktur TI Cabang Sunda Kelapa. / Improvement of Security of IT Infrastructure Services for the Sunda Kelapa Branch.	Operasi / Operation	Done
Implementasi <i>Document Management System</i> (DMS) di Divisi Sistem Informasi. / Implementation of Document Management System (DMS) in the Information System Division.	Operasi / Operation	Done
Pengadaan Perangkat <i>Server Oracle DB Disaster Recovery Center</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Procurement of Oracle DB Disaster Recovery Center Server Equipment for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Operasi / Operation	Done
Implementasi <i>Fiber Optic</i> di Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. / Implementation of Fiber Optic at the Sunda Kelapa Port Branch.	Operasi / Operation	Done
Penyusunan <i>IT Master Plan 2020 – 2024</i> / Implementation of IT Master Plan 2020-2024	Operasi / Operation	In progress
Implementasi <i>Release & Patch (Versioning) Management System</i> / Implementation of Release & Patch (Versioning) Management System	Operasi / Operation	In progress
Penyusunan <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) untuk DC dan DR / Preparation of Disaster Recovery Plan (DRP) for DC and DR	Operasi / Operation	In progress
Peningkatan Pengawasan Keamanan TI/ <i>Security Operation Center</i> / Improvement of Supervision on IT Security/Security Operation Center	Operasi / Operation	In progress

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PRINSIP DASAR

1. Perseroan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
2. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

BASIC PRINCIPLES

1. The Company will disclose complete, accurate, and timely information to the Shareholders and the Board of Commissioners.
2. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders is carried out fairly, taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations.



3. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan informasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis, antara lain:
 - a. Mengungkapkan informasi yang salah;
 - b. Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
 - c. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap;
 - d. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam, termasuk data/informasi yang berasal dari Anak Perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek dan belum diungkap ke publik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Perseroan melarang memperbincangkan tentang informasi rahasia dengan keluarga atau pihak di luar Perseroan, atau membicarakannya di tempat-tempat umum di luar lingkungan IPC;
 - f. Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh setiap jajaran Perseroan;
 - g. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan oleh Pejabat di bawah Direktur terkait atau Pejabat lainnya yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;
 - h. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain dapat dilakukan, dimana Direktur atau Pejabat Perseroan dapat ditugasi oleh Direksi untuk meminta persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Direktur terkait;
 - i. Informasi yang belum terklasifikasi tidak dapat diungkapkan pihak lain sebelum informasi tersebut ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.
 4. Pengungkapan informasi Perseroan harus memperhatikan tingkat *urgency* dan manfaat bagi Perseroan.
 5. Informasi Biasa Perseroan yang dipublikasikan dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Every level of the Company is not allowed to disclose information that is contrary to regulations and business ethics, including:
 - a. Disclosing false information;
 - b. Disclosing information that is not entirely true;
 - c. Disclosing incomplete information;
 - d. The Company prohibits the use of information by Insiders, including data/information originating from Subsidiaries that have been listed on the Stock Exchange and have not been disclosed to the public, with the intention of benefiting themselves, groups or other people illegally and in contravention of the prevailing laws and regulations;
 - e. The Company prohibits discussing confidential information with family or parties outside the Company, or discussing it in public places outside the IPC environment;
 - f. Ordinary Information Disclosure can be done by every level of the Company;
 - g. Disclosure of Limited Information to other parties can be carried out by Officials under the related Director or other Officials specifically appointed by the Board of Directors;
 - h. Disclosure of Confidential Information to other parties can be done, where the Director or Official of the Company can be assigned by the Board of Directors to request written approval from the President Director or related Directors;
 - i. Unclassified information cannot be disclosed by other parties until the information has been classified by the Board of Directors.
 4. Disclosure of Company information must pay attention to the level of urgency and benefit to the Company.
 5. The Company's Ordinary Information published can be obtained or accessed quickly and on time, at low cost, and in a simple way.

PENGLOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Keterbukaan Informasi

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Keterbukaan Informasi terbagi atas tingkatan dalam struktur organisasi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan informasi. Tugas Direksi terkait dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi, diantaranya:

INFORMATION DISCLOSURE MANAGEMENT

Duties and Responsibilities of Information Disclosure Manager

Duties and responsibilities of Information Disclosure Manager are divided into levels in the Company's organization structure which is described as follows:

1. The Board of Directors has the main responsibility in managing information. The duties of the Board of Directors are related to disclosure and confidentiality of information, including:

- a. Mengungkapkan penerapan GCG di Perseroan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta informasi lainnya kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif;
 - b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan individu dan kelompok.
2. Pemberi Informasi Perseroan yang memiliki tugas antara lain:
 - a. Memberikan informasi yang sudah tervalidasi terkait Perseroan kepada Pihak Internal dan/atau Eksternal Perseroan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis;
 - b. Menjalin hubungan baik dengan *Stakeholders*, media, dan komunitas, dengan tetap mempertahankan kaidah GCG yang bertujuan untuk membentuk persepsi positif Perseroan di mata internal dan eksternal;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung *branding* positif Perseroan, baik internal
 3. Fungsi yang membidangi Teknologi Informasi Perseroan, yaitu Divisi Sistem Informasi IPC, memiliki tanggung jawab atas keandalan keamanan sistem informasi;
 4. Bidang-bidang di Perseroan yang terkait dengan hubungan masyarakat, hubungan dengan kelembagaan, hubungan dengan Pemegang Obligasi (Obligor), serta publikasi, hanya dapat mengeluarkan informasi di bawah koordinasi EVP Sekretariat Perusahaan;
 5. Divisi Satuan Pengawasan Internal memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan informasi.
- a. Disclosing the implementation of GCG in the Company and important information in the Annual Report and Financial Statements as well as other information to other parties in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner;
 - b. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Directors must be kept confidential in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - c. In terms of maintaining the confidentiality of Company information, the Board of Directors is required to prioritize the interests of the Company over the interests of individuals and groups.
2. Company Information Providers whose duties include:
 - a. Providing validated information related to the Company to Internal and/or External Parties of the Company, either in oral or written form;
 - b. Maintaining good relations with stakeholders, the media, and the community, while maintaining GCG principles which aim to form a positive perception of the Company in the eyes of both internal and external parties;
 - c. Carrying out activities that support the Company's positive branding, both internally and externally
 3. The function in charge of the Company's Information Technology, namely the IPC Information System Division, has responsibility for the reliability of information system security;
 4. Areas in the Company related to public relations, institutional relations, relations with Bondholders, and publications, can only issue information under the coordination of the Corporate Secretariat EVP;
 5. The Internal Audit Unit Division has the responsibility to supervise the effectiveness of information management.

Laporan Keterbukaan Informasi

Perseroan menyusun dan menyampaikan pelaporan secara berkala kepada Pemegang Saham, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat (1). Laporan Keterbukaan Informasi ini sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Laporan Manajemen

Isi Laporan Manajemen merujuk pada ketentuan penyusunan Laporan

 - a. Manajemen dari Kementerian Negara BUMN dengan mengutamakan prinsip langsung ke substansi (*concise but right on the content*).

Information Disclosure Report

The Company prepares and submits periodic reports to Shareholders, as regulated in Article 19 Paragraph (1) of the Articles of Association. This Information Disclosure Report at least consists of:

1. Management Report

The contents of the Management Report refer to the provisions for preparing the Report

 - a. Management from the Ministry of State-Owned Enterprises by prioritizing direct principles to the substance (*concise but right on the content*).



- b. Laporan Manajemen yang dimaksud di atas terdiri dari:
- Laporan Manajemen Triwulan;
 - Laporan Manajemen Tahunan.
2. Laporan Tahunan
- a. Isi dan format dari Laporan Tahunan atau *Annual Report* mengacu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Perseroan wajib menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada RUPS dan Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan.
- c. Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan atau *Annual Report* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku lalu berakhir.
- d. Perseroan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan atau *Annual Report*. Laporan Keberlanjutan merupakan laporan ketaatan Perseroan yang menunjukkan dilaksanakannya kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan dan kegiatan lain yang relevan untuk menjamin keberlanjutan Perseroan. Isi dan format dari Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) mengacu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Laporan Keuangan Perseroan
- Perseroan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir kepada RUPS. Isi dan format dari Laporan Keuangan harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Laporan Lain yang Harus Diungkapkan oleh Perseroan
- Perseroan tetap mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental maupun sektoral yang dimintakan oleh Regulator, Pemegang Saham, maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Media/Saluran Publikasi Informasi

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, Perseroan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

- b. The Management Reports referred to above consist of:
- Quarterly Management Reports;
 - Annual Management Report.

2. Annual Report

- a. The content and format of the Annual Report refer to the prevailing regulations.
- b. The Company is obliged to submit the results of the assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance to the GMS and Shareholders through the Annual Report.
- c. The Company submits an Annual Report signed by the Board of Commissioners and Board of Directors to the Shareholders no later than 5 (five) months after the end of the last fiscal year.
- d. The Company submits a Sustainability Report which is part of the Annual Report. The Sustainability Report is a report on the compliance of the Company which shows the implementation of the Company's social responsibility activities and other relevant activities to ensure the sustainability of the Company. The content and format of the Sustainability Report refers to the applicable regulations.

3. The Company's Financial Statements

The Company submits Financial Statements that has been audited by an External Auditor no later than 5 (five) months after the fiscal year ends to the GMS. The content and format of the Financial Statements must refer to the prevailing laws and regulations.

4. Other Reports That Must Be Disclosed by the Company

The Company always complies with the obligation to submit incidental and sectoral reports requested by the Regulators, Shareholders, and other parties who have rights in accordance with the prevailing laws and regulations.

Information Publication Channels/Media

As a form of implementation of the Company's disclosure of information to stakeholders and the general public, the Company has provided information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate and accessible manner via various media, both print and electronic media.

Komunikasi Digital Situs Web Perseroan

Situs web (*Website*) resmi Perseroan, yaitu www.indonesiaport.co.id, menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas. Informasi yang tercantum dalam situs web Perseroan dapat diakses dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Adapun informasi yang tersedia dalam *Website* IPC antara lain:

Digital Communication Company Website

The official website of the Company, namely www.indonesiaport.co.id, is the official corporate digital portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a wide audience. The information contained in the Company's website can be accessed in 2 (two) languages, namely Indonesian Language and English. The information available on the IPC Website includes:

Informasi yang Tersedia pada Situs Web IPC

Information Available on the IPC Website

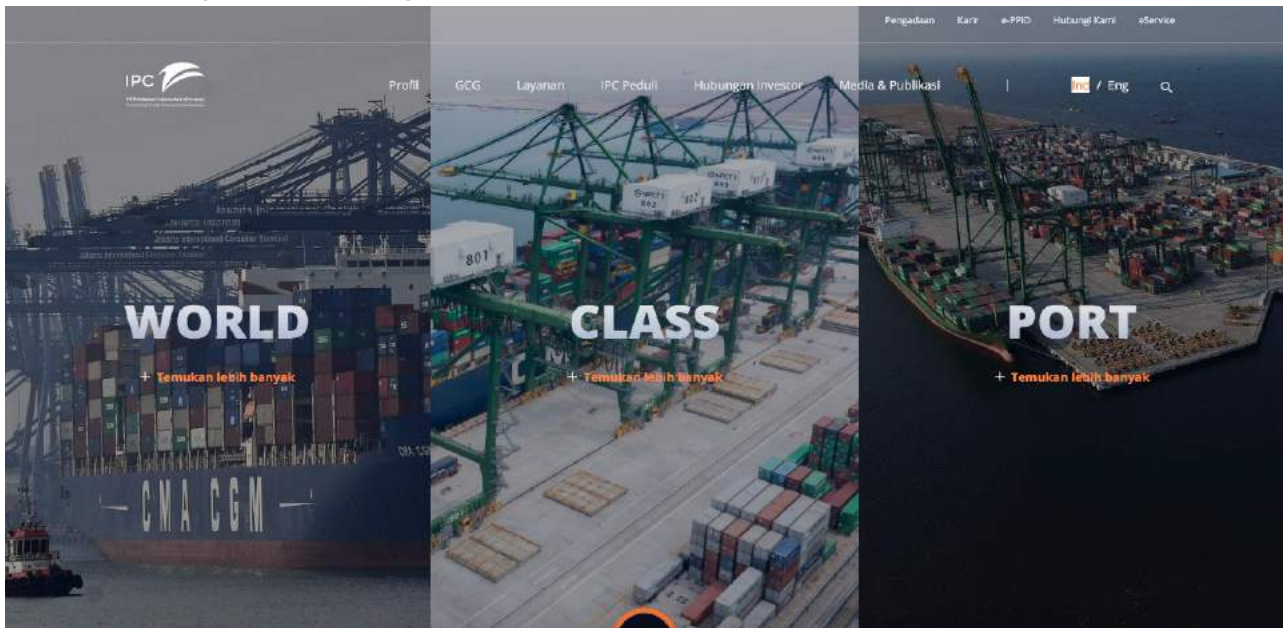
Kategori / Category	Uraian / Description
Profil / Profile	Memberi gambaran umum mengenai Perseroan, meliputi: / Provide an overview of the Company, including: <ul style="list-style-type: none"> Tentang IPC, yang memuat informasi mengenai Visi, Misi, Nilai, dan <i>Roadmap</i> Perseroan Tahun 2020-2024; / About IPC, which contains information regarding the Company's Vision, Mission, Values and Roadmap for 2020-2024; Profil Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi); / Management Profile (Board of Commissioners and Board of Directors); Profil Anggota Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko); / Profile of the Committees under the Board of Commissioners (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee); Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan; / Port Branch and Subsidiaries; Struktur Organisasi Perseroan terbaru; / The latest Company Organizational Structure; Penghargaan yang diraih oleh Perseroan / Awards won by the Company
GCG / GCG	Memberi informasi mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan IPC, meliputi: / Provide information about the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the IPC environment, including: <ul style="list-style-type: none"> Pedoman GCG terbaru, termasuk 6 (enam) prinsip GCG yang berlaku di Perseroan, serta Skor <i>Assessment</i> Praktik GCG di IPC; / The latest GCG Code, including 6 (six) GCG principles that are implemented in the Company, as well as the GCG Practice Assessment Score at the IPC; Organ IPC yang berperan dalam penerapan GCG, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern. Informasi mengenai Organ GCG Perseroan juga memaparkan tugas, tanggung jawab, wewenang, hingga hak dari masing-masing organ. / IPC organs play a role in implementing GCG, namely the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit. Information regarding the Company's GCG Organs also describes the duties, responsibilities, authorities, and rights of each organ.
Layanan / Service	Memberi informasi mengenai Layanan yang disediakan oleh Perseroan, antara lain: / Provide information regarding the services provided by the Company, including: <ul style="list-style-type: none"> Layanan Barang; / Cargo Services; Layanan Kapal; / Ship Services; Layanan Rupa-rupa. / Other Services.
IPC Peduli / IPC Care	Memberi informasi mengenai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> yang dicerminkan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau IPC Peduli, meliputi: / Provide information about Corporate Social Responsibility activities that are reflected through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) or IPC Care, including: <ul style="list-style-type: none"> IPC Peduli Pendidikan; / IPC for Educations; IPC Peduli Lingkungan; / IPC for Environment; IPC Peduli Kesehatan. / IPC for Health. <p>Informasi tersebut juga disertai deskripsi singkat mengenai pelaksanaan dari masing-masing program IPC Peduli beserta dokumentasinya. / The information is also accompanied by a brief description of the implementation of each IPC Care program and its documentation.</p>
Hubungan Investor / Investor Relations	Memberi beberapa informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya para investor, meliputi: / Provide information needed by stakeholders, especially investors, including: <ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan (lebih dari 5 (lima) tahun); / Annual Report (more than 5 (five) years); Laporan Keberlanjutan (lebih dari 5 (lima) tahun); / Sustainability Report (more than 5 (five) years); Laporan Keuangan; / Financial Report; Laporan RUPS; / GMS Report; Obligasi; / Bond; Peringkat Utang. / Bond Rating.
Media & Publikasi / Media & Publication	<ul style="list-style-type: none"> IPC News Siaran Pers / Press Release Media Eksternal / External Media Media Sosial / Social Media

Sepanjang tahun 2020, *Website* Perseroan dikunjungi oleh 179.600 pengunjung dan telah dilakukan 133 kali pembaharuan konten *Website*, mulai dari postingan berita hingga *update static page*. Berdasarkan data yang dihimpun

Throughout 2020, the Company's Website was visited by 179,600 visitors and the content was updated 133 times, from news posts to static page updates. Based on data compiled from SimiliarWeb, the official IPC website is ranked 305,247

dari SimiliarWeb, *Website* resmi IPC berada di peringkat 305.247 di tingkat global, peringkat 6.172 di tingkat nasional, dan peringkat 223 pada Kategori Pemerintahan.

at the global level, ranked 6,172 at the national level, and ranked 223 in the Government Category.



Portal Internet

Portal Intranet adalah *gateway* yang bertindak sebagai tempat berbagai macam informasi dan data yang berasal berbagai departemen dalam Perseroan. Sepanjang tahun 2020, telah diposting 105 *Pop Up* Intranet dan 90 materi intranet.

Internet Portal

The Intranet Portal is a gateway that serves as a place for various kinds of information and data originating from various departments within the Company. Throughout 2020, 105 Intranet Pop Ups and 90 intranet materials were posted.

Pop Up Intranet

Intranet Pop Up



Materi Intranet

Intranet Material



Media Sosial Perusahaan

Selain situs web, Perseroan juga memiliki 4 (empat) akun media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube.

Kinerja Media Sosial IPC Tahun 2020



@indonesiaportcorp

- Memposting sebanyak 672 kali. / Posted 672 times.
- Memperoleh 13.700 Pengikut Baru, sehingga Total Pengikut menjadi 45.700. / Acquired 13,700 New Followers, bringing the Total Followers to 45,700.



Pelabuhan Indonesia II

- Memposting sebanyak 607 kali. / Posted 607 times.
- Memperoleh total 6.797 Followers dan 6.413 Likes. / Gained a total of 6,797 Followers and 6,413 Likes.



@indonesiaport

- Memposting sebanyak 643 tweet. / Posted 634 tweets.
- Memperoleh total 11.287 Followers. / Gained a total of 11,287 Followers.



Pelabuhan Indonesia II/IPC

- Memposting sebanyak 23 post/video. / Posted 23 videos.
- Postingan video di YouTube telah memperoleh 34.068 views. / The video post on YouTube has gained 34,068 views.
- Memperoleh 1.514 Subscribers. / Gained 1,514 Subscribers.

Corporate Social Media

Apart from the website, the Company also has 4 (four) social media accounts, namely Instagram, Facebook, Twitter and Youtube.

IPC Social Media Performance in 2020



Majalah Internal

IPC menerbitkan Majalah Internal, yaitu IPC News yang terbit setiap bulan dan dapat diunduh di Situs Web Perseroan. Pada tahun 2020, IPC News telah terbit sebanyak 12 (dua belas) edisi.

Internal Magazine

IPC publishes an Internal Magazine, namely IPC News which is published every month and can be downloaded on the Company's Website. In 2020, IPC News has published 12 (twelve) editions.

IPC News yang Terbit Tahun 2020



Januari / January



Februari / February



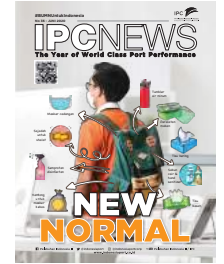
Maret / March



April / April



Mei / May



Juni / June



Juli / July



Agustus / August



September / September



Oktober / October



November / November



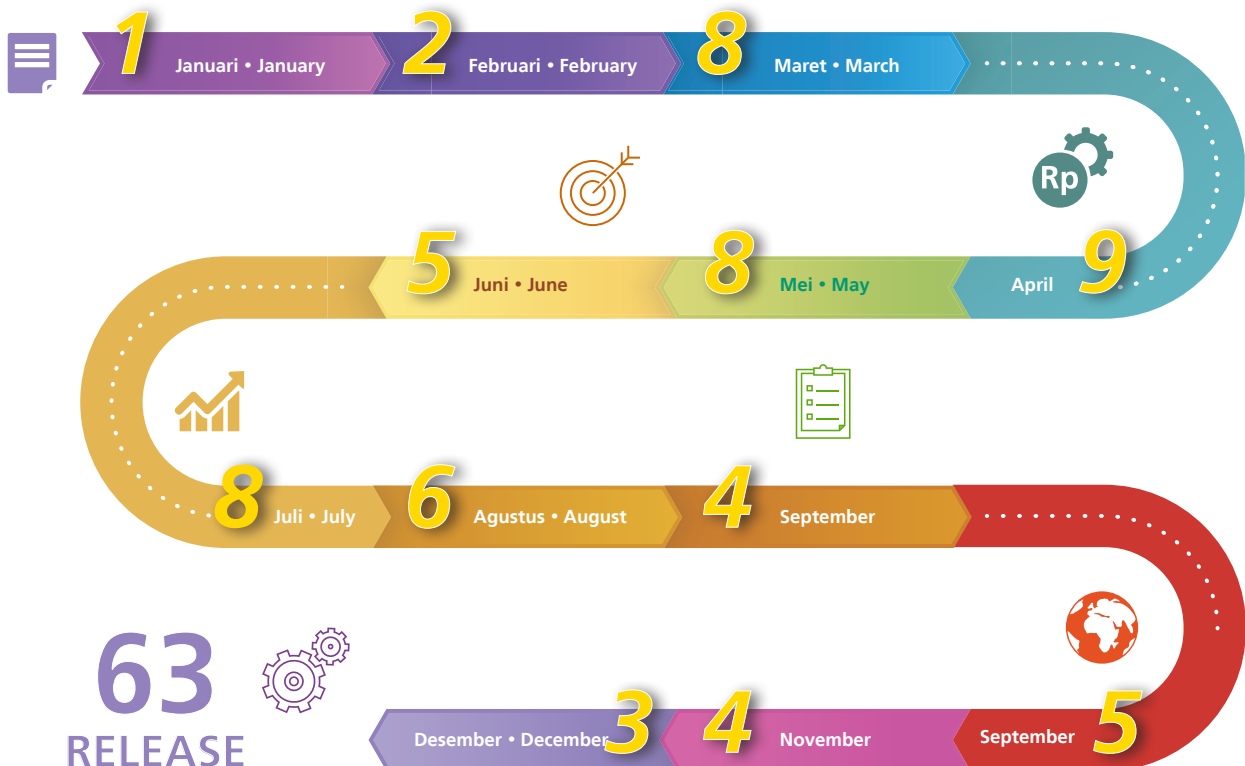
Desember / December

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan siaran pers sebanyak 63 kali, dengan uraian sebagai berikut:

Press Release

Throughout 2020, the Company has conducted 63 press releases, with the following descriptions:



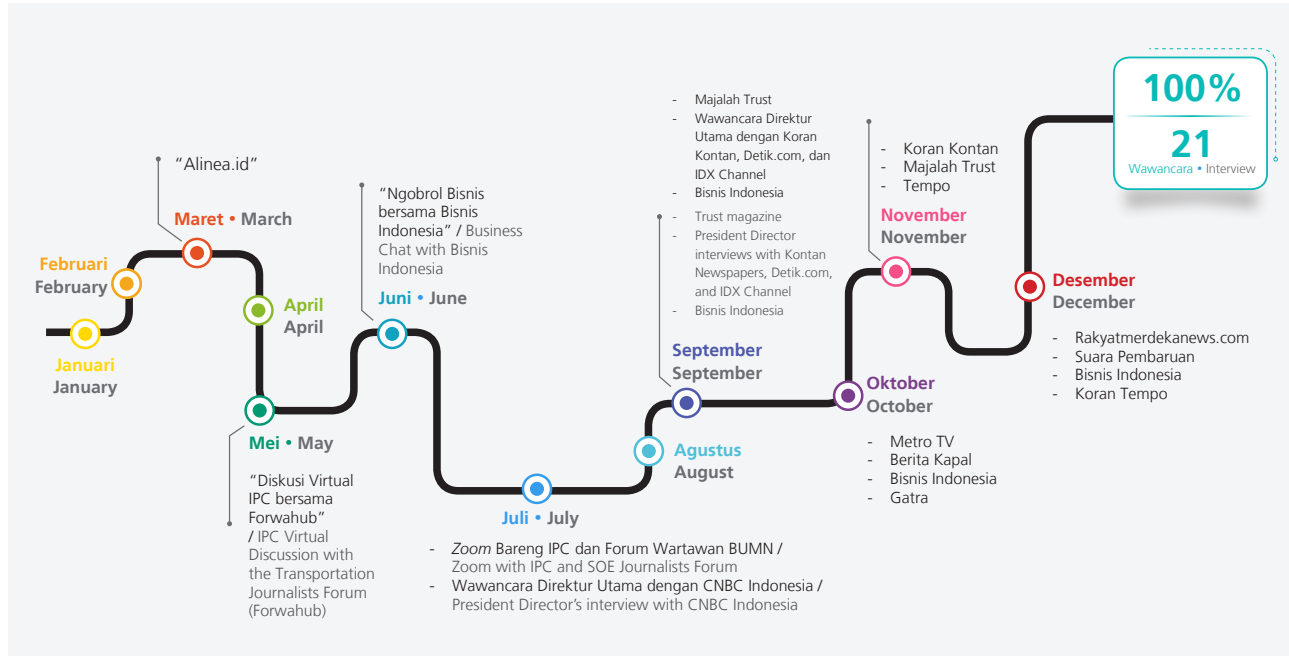
63
RELEASE

Wawancara Direksi dengan Media

Sepanjang tahun 2020, Direksi IPC melakukan wawancara dengan Media Nasional sebanyak 21 kali, dengan uraian sebagai berikut:

Board of Directors Interview with Media

Throughout 2020, the IPC Board of Directors conducted 21 interviews with National Media, with the following descriptions:



CEO Letter

Sepanjang tahun 2020, CEO Letter telah diterbitkan sebanyak 12 Edisi, yang disebarakan melalui Email Korporat, Majalah IPC News, E-Office, dan Whatsapp Group.

CEO Letter

Throughout 2020, 12 editions of CEO Letter have been published, which are distributed through Corporate Email, IPC News Magazine, E-Office, and Whatsapp Group.

Saluran Persebaran CEO Letter Tahun 2020

CEO Letter Distribution Channels in 2020





KEBIJAKAN KERAHASIAAN INFORMASI

Walaupun Perseroan menganut prinsip transparansi dalam pengelolaan Perseroan, bukan berarti Perseroan tidak melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan. Manajemen Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Informasi Perseroan yang bersifat rahasia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu Informasi Biasa, Informasi Terbatas, Informasi Rahasia, dan Informasi yang Belum Terklasifikasi.

Informasi Biasa

Informasi Biasa adalah informasi yang apabila fisiknya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan Perseroan. Penetapan sebagai Informasi Biasa tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk melakukan pengaturan terhadap mekanisme akses pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Informasi Biasa tersebut. Termasuk dalam kategori Informasi Biasa adalah informasi-informasi yang mengandung esensi sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain:

1. Menurut peraturan perundang-undangan wajib disediakan untuk kepentingan dan dapat diakses oleh Publik;
2. Khusus ditujukan untuk Publik, seperti *press release*;
3. Telah menjadi milik Publik, seperti Laporan Tahunan yang ditempatkan dalam *Website* Perseroan;
4. Prosedur dan ketentuan resmi yang harus diketahui oleh pihak-pihak di luar Perseroan dalam berhubungan dengan Perseroan.

Informasi Terbatas

Informasi Terbatas adalah informasi Perseroan yang dapat diakses oleh internal Perseroan dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Perseroan. Pengungkapan Informasi Terbatas yang tidak sesuai dapat mengakibatkan tertanggungnya pelaksanaan fungsi dan tugas Perseroan, seperti kerugian finansial yang signifikan. Termasuk dalam kategori Informasi Terbatas adalah informasi-informasi yang mengandung esensi sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain:

1. Khusus ditujukan untuk kepentingan internal Perseroan;
2. Berasal dari pihak di luar Perseroan yang khusus ditujukan untuk kepentingan internal Perseroan.

Informasi Rahasia

Informasi Rahasia adalah informasi Perseroan yang berlaku di internal Perseroan yang bersifat rahasia. Informasi ini hanya diungkap pada kondisi tertentu dengan ditunjang alasan yang

INFORMATION CONFIDENTIALITY POLICY

Even though the Company adheres to the principle of transparency in managing the Company, it does not mean that the Company does not protect confidential information about the Company, the Company's management and other related parties are in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Confidential Company information is classified into several categories, namely Ordinary Information, Limited Information, Confidential Information, and Unclassified Information.

Ordinary Information

Ordinary Information is information when it is physically disclosed to the public, does not have any impact on security of the Company. Determination of Ordinary Information does not reduce the Board of Directors' authority to make arrangements for the access mechanism of interested parties to such Ordinary Information. Information is included in the Ordinary Information category if it contains the essence as follows:

1. In accordance with the laws and regulations, it must be made available for the benefit of and accessible to the Public;
2. Specifically intended for the Public, for example *press release*;
3. Has become Public property, for example Annual Report which is posted on the Company's Website;
4. Official procedures and provisions that parties outside the Company shall know when dealing with the Company.

Limited Information

Limited Information is the Company's information that is accessible internally by the Company and is only used for the Company's internal interests. Inappropriate disclosure of Limited Information may result in disruption of the implementation of the Company's functions and duties, for instance, significant financial losses. Information is included in the Limited Information category if it contains the essence as follows:

1. Specifically for the Company's internal interests;
2. Derived from the Company's outside parties specifically intended for the Company's internal interests.

Confidential Information

Confidential Information is the Company's information that applies in the Company's internal which is confidential. This information is only disclosed under certain conditions

sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam kategori Informasi Rahasia adalah informasi-informasi yang mengandung esensi sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain:

1. Apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, baik secara finansial maupun non-finansial;
2. Apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan Perseroan;
3. Apabila diungkapkan mengakibatkan gangguan operasional Perseroan;
4. Apabila diungkapkan mengakibatkan gangguan tentang ketertiban, kelancaran, kesesuaian, dan keserasian lingkungan kerja;
5. Menyangkut catatan dan keterangan mengenai individu Pekerja Perseroan yang bersifat sensitif;
6. Belum memiliki ketentuan karena sifatnya strategis dan sensitif.

Informasi yang Belum Terklasifikasi

Informasi yang belum terklasifikasi adalah informasi-informasi lain yang berdasarkan isi, sifat, dan kondisinya belum dapat dikategorikan dalam klasifikasi mana pun sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Informasi.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menangani 42 perkara hukum, baik perkara litigasi maupun non-litigasi, dimana 17 diantaranya telah selesai ditangani.

Berikut ini merupakan uraian mengenai beberapa perkara hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (perkara litigasi) selama tahun 2020, baik perkara pidana maupun perdata, beserta status dari masing-masing perkara.

supported by legitimate reasons as required in the prevailing laws and regulations. Information is included in the Confidential Information category if it contains the essence as follows:

1. When disclosed it results in losses to the Company, both financially and non-financially;
2. When disclosed it results in losses for other parties who have a contractual commitment with the Company;
3. When disclosed it results in disruption to the Company's operations;
4. When disclosed it results in disruption to order, smoothness, suitability and harmony of the work environment;
5. Concerning sensitive notes and information regarding individual employees of the Company;
6. Does not have any provision because it is strategic and sensitive.

Unclassified Information

Unclassified information is other information based on its content, nature and condition, cannot be categorized under any classification in accordance with the Information Management Guidelines.

LEGAL ISSUES AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS

LEGAL ISSUES

Throughout 2020, the Company handled 42 legal issues, both litigation and non-litigation, where 17 of which have been closed.

The following is a description of the legal issues that were settled through court (litigation) throughout 2020, including criminal and civil cases, as well as the status of each case.

Perkara Litigasi yang Dihadapi IPC Tahun 2020 / Litigation Cases Faced by IPC in 2020

No.	Uraian Permasalahan / Description of Dispute	Status Perkara per 31 Desember 2020 / Case Status as of December 31, 2020
Perkara Pidana / Criminal Case		
1.	Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane untuk Cabang Palembang, Pontianak, dan Panjang tahun 2010. / Alleged corruption crime in the procurement of 3 (three) units of Quay Container Crane for Palembang, Pontianak, and Panjang Port Branches in 2010.	Monitoring perkembangan perkara, melakukan pendampingan kepada pekerja dan apabila Penyidik KPK memerlukan tambahan dokumen maka akan disampaikan oleh Penyidik KPK. / Monitoring of case developments, assisting employees, and submitting any additional documents necessary to KPK Investigators.
2.	Perkara Tindak pidana korupsi dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit <i>Mobile Crane</i> tahun 2011. / Corruption crime in the procurement of 10 (ten) units of Mobile Crane in 2011.	Menunggu salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali. / Awaiting official copy of Judicial Review Ruling.



Perkara Litigasi yang Dihadapi IPC Tahun 2020 /
Litigation Cases Faced by IPC in 2020

No.	Uraian Permasalahan / Description of Dispute	Status Perkara per 31 Desember 2020 / Case Status as of December 31, 2020
3.	Perkara tindak pidana lingkungan kenaikan ambang baku mutu air laut di perairan Teluk Lampung yang diduga diakibatkan oleh pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Panjang. / Environmental crime in the increase of seawater quality standard threshold in the waters of Lampung Bay, which is suspected to have been caused by the dredging of shipping lanes in Panjang Port.	Permasalahan Selesai / Case Closed a. Telah diterima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid.Sus/2020 yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Yang Bersangkutan (Ybs). / Received Release of Notice of Judicial Review Ruling Number 41 PK/Pid.Sus/2020, which in essence rejected the Request for Judicial Review from the Party Concerned. b. Ybs. telah bebas berdasarkan surat keterangan bebas dari Lapas Kelas I Bandar Lampung No. W9.PAS.1.PK.01.02/1150 tanggal 2 September 2020. / The Party Concerned is free based on letter of release from Class I Correctional Facility Bandar Lampung No. W9.PAS.1.PK.01.02/1150 dated September 2, 2020.
Perkara Perdata / Civil Case		
4.	Permasalahan sewa menyewa lahan, dimana terdapat perusahaan yang menjual bangunan milik Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok kepada perusahaan lain tanpa seising dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). / Dispute on land lease, wherein a company sold building owned by Tanjung Priok Port Operator to another company without permission from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Permasalahan Selesai / Case Closed Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi No. 3604/K/Pdt/2019 tanggal 18 Mei 2020. / Based on Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Cassation Level No. 3604/K/Pdt/2019 dated May 18, 2020. Setelah putusan <i>inkracht</i> , Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dapat menguasai seluruh objek tanah dan dapat dilakukan komersialisasi. / After <i>inkracht</i> ruling, Tanjung Priok Port Branch can control and commercialize all land object.
5.	Gugatan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) cq. Kepala Staf Angkatan Darat, cq. Batalyon Pembekalan Angkatan 4/Air, dimana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok selaku Turut Tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait penggunaan bangunan gudang di Pelabuhan Tanjung Priok. / Lawsuit against the Commander of the Indonesian National Armed Forces (Panglima TNI) cq. Chief of Staff of the Army, cq. 4th/Water Transportation Supply Battalion, in which PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch acts as Co-Defendant, at the District Court of Jakarta Utara on the use of warehouse building at Tanjung Priok Port.	Permasalahan Selesai / Case Closed Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi No. 2747/K/Pdt/2019 tanggal 20 Oktober 2020. / Based on Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Cassation Level No. 2747/K/Pdt/2019 dated October 20, 2020. Sehubungan dengan Posisi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Turut Tergugat II, sehingga tidak berdampak langsung terhadap kepemilikan HPL Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. / Related to the position of Tanjung Priok Port Branch as Co-Defendant II, thus there were no direct impacts to the ownership of HPL Tanjung Priok Port Branch.
6.	Gugatan mengenai klaim Hak Guna Bangunan (HGB) No. 100/Sungai Selincah milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan (HPL) No. 88/Sungai Selincah atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga menuntut pembatalan HPL No. 88, serta perpanjangan HGB No. 100. / Lawsuit on the claim on Building Use Rights (HGB) No. 100/Sungai Selincah owned by the Plaintiff which overlaps with Management Rights (HPL) No. 88/Sungai Selincah on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which demands for the revocation of HPL No. 88 and the extension of HGB No. 100.	Permasalahan Selesai / Case Closed Berdasarkan Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 392 PK/PDT/2020 tanggal 17 Juni 2020. / Based on Copy of Ruling of the Supreme Court at Judicial Review Level No. 392 PK/PDT/2020 dated June 17, 2020. Saat ini, objek tanah dikuasai oleh Cabang Pelabuhan Palembang. / Currently, the land object is controlled by Palembang Port Branch.
7.	Gugatan terkait tumpang tindih dengan HPL atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Bojonegara. / Lawsuit on the overlap of HPL on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) at Bojonegara Port.	Permasalahan Selesai, menunggu eksekusi Pengadilan / Case Closed, awaiting Court Execution
8.	Penanganan perkara perdata di tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 25/PDT/2020/PT BTN, IPC selaku Tergugat I yang dikuasakan Direksi kepada Sugih Ardhian Pramono & Partners, atas sengketa tanah HPL No 2/91 Cabang Pelabuhan Banten oleh Para Penggugat di Tingkat Banding. / Handling of civil case at Cassation level on the Ruling of the High Court of Banten No. 25/PDT/2020/PT BTN, IPC as Defendant I, delegated by the Board of Directors to Sugih Ardhian Pramono & Partners, on land dispute HPL No. 2/91 of Banten Port Branch by Plaintiffs at Judicial Appeal Level.	Permasalahan Selesai / Case Closed Berdasarkan Website resmi Mahkamah Agung pada tanggal 15 Desember 2020, Putusan telah <i>In Kracht Van gewijsde</i> namun Salinan Putusan resmi belum diterima. / Based on the official website of the Supreme Court on December 15, 2020, the ruling was <i>In Kracht Van gewijsde</i> , although the copy of official ruling has not been received. Saat ini, objek tanah dikuasai oleh Cabang Pelabuhan Banten dapat dikomersialisasikan. / Currently, the land object controlled by Banten Port Branch can be commercialized.
9.	Penanganan Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten, IPC selaku Tergugat, atas gugatan lahan di Bojonegara Persil No 42 Desa Pulo Ampel. / Handling of Civil Case No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg at the District Court of Serang, Banten, IPC as Defendant, on land dispute in Bojonegara Persil No 42 Desa Pulo Ampel.	Pihak Penggugat mengajukan Banding / Plaintiff made Judicial Appeal
10.	Gugatan terkait tuntutan bahwa tanah yang terletak di Jln. Lodan No.43 adalah milik Penggugat dan telah dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim yang pada intinya menolak Gugatan dari Penggugat. Kemudian, Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Perkara: 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. / Lawsuit on the claim that the land on Jln. Lodan No.43 is owned by Plaintiff, the Panel of Judges read the ruling which essentially rejects the Lawsuit of the Plaintiff. Subsequently, Plaintiff made judicial appeal on the ruling of the District Court of Jakarta Utara Case Number: 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.	Dalam tahap Pemeriksaan berkas perkara <i>Inzage</i> untuk proses Banding. / Investigation of <i>Inzage</i> case files for Judicial Appeal process.

Perkara Litigasi yang Dihadapi IPC Tahun 2020 /
Litigation Cases Faced by IPC in 2020

No.	Uraian Permasalahan / Description of Dispute	Status Perkara per 31 Desember 2020 / Case Status as of December 31, 2020
11.	PTPE memiliki kewajiban pelunasan piutang atas minimum throughput sebesar Rp884.444.000 di Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019, sebagaimana yang tertuang dalam dengan Surat Perjanjian No. KS.02/5/11/1/D2/GM/C.TGDN-18 dan No. 002/PELINDO-PTPE/Bongkar Muat BBM/XI/2018 tentang Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat BBM antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Pandan dengan PTPE. / PTPE is obligated to pay receivables on minimum throughout amounting to Rp884,444,000 at Tanjung Pandan Port Branch from February 2019 to September 2019 as stated in Letter of Agreement No. KS.02/5/11/1/D2/GM/C.TGDN-18 and No. 002/PELINDO-PTPE/Bongkar Muat BBM/XI/2018 on Fuel Loading and Unloading Service Cooperation between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Pandan Branch and PTPE.	Telah dilaksanakan rapat verifikasi pajak/pencocokan piutang pada tanggal 15 September 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran. / Tax/receivables verification meeting was held on September 15, 2020 at the Commercial Court of the District Court of Jakarta Pusat and recorded in Minutes of Payment Agreement.
12.	Gugatan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terkait dengan Perbuatan melawan Hukum pada pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pengerukan di Alur dan Kolam Pelabuhan Cirebon tahun 2014 dengan Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2020/PN Cbn. / Lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on Unlawful Action in the implementation of Work Agreement for Dredging of Port Lanes and Ponds at Cirebon Port in 2014 with Case Number: 32/Pdt.G/2020/PN Cbn.	Telah dilaksanakan sidang lanjutan pada tanggal 14 Desember 2020, dengan agenda menghadirkan saksi dari Pihak Tergugat. / Follow-up trial was held on December 14, 2020, with the agenda of presenting witnesses from Defendant.
13.	Gugatan mengenai klaim HGB No. 101/Sungai Selincah milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan (HPL) No. 91/Sungai Selincah atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga menuntut pembatalan HPL No. 91, serta perpanjangan HGB No. 101. / Lawsuit on the claim of HGB No. 101/Sungai Selincah owned by the Plaintiff which overlaps with Management Rights (HPL) No. 91/Sungai Selincah on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which demands for the revocation of HPL No. 91 and the extension of HGB No. 100.	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI. / Awaiting Ruling of Judicial Review from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
14.	Perkara Pajak di Tingkat Upaya Hukum Luar Biaya Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak di Tingkat Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. / Tax Dispute at Extraordinary Legal Remedy of Judicial Review on the Ruling of Tax Court at Judicial Appeal Level on the Decree of the Directorate General of Taxes No.KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017	Permasalahan Selesai / Case Closed Berdasarkan Website resmi Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 2020. Saat ini sedang menunggu Salinan Putusan resmi dari Mahkamah Agung RI. / Based on the official website of the Supreme Court on December 16, 2020. Currently awaiting copy of official ruling from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

SANKSI ADMINISTRASI

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat sanksi administrasi dari otoritas terkait, seperti pasar modal, perbankan, maupun otoritas lainnya, yang dikenakan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

ADMINISTRATIVE SANCTION

In 2020, there were no administrative sanctions from relevant authorities, such as the capital market, banks, or other authorities, which were imposed to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.

PERATURAN DISIPLIN KERJA

Untuk menjamin ketertiban kerja dan tanggung jawab Insan IPC dalam melaksanakan tugas, maka Perseroan menerapkan penegakan disiplin melalui penerapan Peraturan Disiplin Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/21/8/1/KRF/UT/PI.II-17.

EMPLOYEE DISCIPLINE REGULATION

To ensure work order and responsibility of IPC employees in carrying out their duties, the Company implements discipline enforcement through the application of Employee Discipline Regulation in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/21/8/1/KRF/UT/PI.II-17.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi terkait Peraturan Disiplin Kerja adalah untuk memberikan landasan keseragaman tindakan dalam menegakan disiplin Pekerja di lingkungan IPC dan membudayakan sikap Disiplin dalam rangka menciptakan Pekerja yang tertib dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas kerja.

The purpose and objective of establishing the Decree regarding Employee Discipline Regulation is to provide a basis for uniform actions in upholding Employee discipline within IPC and cultivating an attitude of discipline in order to create orderly and responsible Employees to improve work productivity.



HUKUMAN DAN PELANGGARAN DISIPLIN

Hukuman Disiplin

Jenis sanksi/hukuman yang dapat diberikan kepada Insan IPC yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, antara lain Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin Berat.

SANCTION AND DISCIPLINARY VIOLATION

Disciplinary Sanction

The types of sanctions/penalties that can be given to IPC employee who commit work discipline violations include Low Sanction, Medium Sanction, and Severe Sanction.

Jenis Pelanggaran Disiplin dan Sanksi yang Diberikan

Disciplinary Violations and Sanctions

Jenis Pelanggaran / Type of Violation	Jenis Sanksi yang Diberikan / Sanction Given
Disiplin Ringan / Low Sanction	1. Hukuman dengan teguran secara tertulis dari atasan langsung; atau / Written reprimand from direct superior; or 2. Hukuman pernyataan tidak puas dari Pengusaha (Direktur Perseroan). / Unsatisfied statement from Entrepreneur (Director of the Company).
Disiplin Sedang / Medium Sanction	1. Hukuman denda pemotongan penghasilan sebesar 10 persen per bulan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan; atau / Fine of 10 percent of monthly income for 3 (three) months; or 2. Hukuman denda pemotongan penghasilan sebesar 20 persen per bulan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan. / Fine of 20 percent of monthly income for 2 (two) months.
Disiplin Berat / Severe Sanction	1. Hukuman Penurunan Kelas Jabatan/jabatan setingkat lebih rendah dari Kelas Jabatan/jabatan sebelumnya; / Demotion of Position and/or Grade of one level lower from current Position and/or Grade; 2. Hukuman Penurunan Kelas Jabatan/jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari Kelas Jabatan/jabatan sebelumnya; / Demotion of Position and/or Grade of 2 (two) levels lower from current Position and/or Grade; 3. Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; / Honorable Termination of Employment/Layoff, not on Own Request; 4. Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat. / Dishonorable Termination of Employment/Layoff.

Terhadap Pekerja yang melanggar disiplin, selain hukuman di atas dilakukan pemotongan bonus untuk tahun saat jatuhnya hukuman sebagai berikut:

1. Untuk hukuman Disiplin Ringan Bonus Tahunan diberikan sebesar 70 persen;
2. Untuk hukuman Disiplin Sedang Bonus Tahunan diberikan sebesar 40 persen;
3. Untuk hukuman Disiplin Berat tidak diberikan Bonus Tahunan.

For Employees who violate discipline, in addition to the above sanctions, bonus cut for the year when the sanction is imposed are as follows:

1. For Low Sanction the Annual Bonus is given at 70 percent;
2. For Medium Sanction the Annual Bonus is given at 40 percent;
3. For Severe Sanction, no Annual Bonus is given.

Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin dapat berupa ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Pekerja, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya dalam melanggar peraturan/tata tertib Perseroan, dan/atau tindakan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan hukuman disiplin.

Disciplinary Violation

Disciplinary violation may include utterance, writing, and/or actions committed by Employees, either intentionally or due to their negligence in violating the Company's rules/regulations, and/or other actions that directly or indirectly harm the Company. Without prejudice to the provisions in the prevailing laws and regulations, Employees who commit a disciplinary violation will be subject to sanctions.

Pelanggaran Disiplin di IPC diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Pelanggaran Disiplin Ringan, Pelanggaran Disiplin Sedang, dan Pelanggaran Disiplin Berat.

Disciplinary Violations at IPC are classified into 3 (three) types, namely Low Sanction, Medium Sanction, and Severe Sanction.

Pelanggaran Disiplin Ringan

Pelanggaran Disiplin dan/atau tindakan lainnya yang ditafsirkan sebagai Kesalahan Ringan meliputi:

1. Jenis pelanggaran Disiplin Ringan yang dapat dijatuhkan hukuman dengan Teguran Secara Tertulis dari atasan langsung, adalah pelanggaran terhadap:
 - a. Tidak menaati ketentuan jam kerja (terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja) 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali dalam sebulan tanpa izin atasan langsung;
 - c. Tidak mengisi daftar hadir (absensi) baik secara manual atau mesin sesuai ketentuan Perseroan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.
 - d. Menolak perintah/tugas yang sah dari atas langsung dan/atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Menciptakan keadaan yang mengganggu suasana kerja.
2. Jenis pelanggaran Disiplin Ringan yang dapat dijatuhkan dengan hukuman Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dari Perseroan, adalah pelanggaran terhadap:
 - a. Terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja lebih dari 20 (dua puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas lebih dari 6 (enam) kali dalam sebulan tanpa izin atasan langsung;
 - c. Apabila setelah 2 (dua) kali mendapat teguran secara tertulis dari atasan langsung, Pekerja tersebut tidak mengindahkannya atau tidak melakukan upaya-upaya yang menunjukkan perbaikan;
 - d. Atasan tidak melaporkan tindakan pelanggaran disiplin.

Pelanggaran Disiplin Sedang

Pelanggaran Disiplin dan/atau tindakan lainnya yang ditafsirkan sebagai Kesalahan Sedang meliputi:

1. Jenis pelanggaran Disiplin Sedang yang dapat dijatuhkan hukuman dengan Pemotongan Penghasilan sebesar 10 persen per bulan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, adalah pelanggaran berupa:
 - a. Terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas lebih dari 10 (sepuluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;

Minor Disciplinary Violations

Disciplinary Violations and/or other actions that are interpreted as minor errors include:

1. Minor Disciplinary violations with a sanction of written reprimand from the direct superior include as follows:
 - a. Do not comply with the provisions of working hours (late arrival and/or early return from work) 10 (ten) to 20 (twenty) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Leave office during working hours not for official purposes 3 (three) to 6 (six) times a month without permission from the direct supervisor;
 - c. Do not fill in the attendance list either manually or machine according to the Company's provisions 3 (three) times a month.
 - d. Refuse a legitimate order/task from direct supervisor and/or do not carry out the task thoroughly that are their responsibility;
 - e. Create a situation that disrupts the work atmosphere.
2. Minor Disciplinary violations with a sanction of Written Unsatisfied Statement from the Company include as follows:
 - a. Late arrival and/or early return from work for more than 20 (twenty) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Leave office during working hours not for official purposes more than 6 (six) times a month without permission from the direct supervisor;
 - c. If after 2 (two) times received a written reprimand from the direct supervisor, the Employee does not heed it or does not make efforts to show improvement;
 - d. The supervisor does not report disciplinary violations.

Moderate Disciplinary Violations

Disciplinary Violations and/or other actions that are interpreted as Moderate Errors include:

1. Moderate Disciplinary violations with a sanction of income cut of 10 percent per month for a period of 3 (three) months include as follows:
 - a. Late arrival and/or early return from work for more than 30 (thirty) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Leave office during working hours not for service purposes of more than 10 (ten) hours in a month without any legitimate reason;



- c. Mangkir sampai dengan 2 (dua) hari dalam sebulan tidak berturut-turut;
 - d. Karena kelalaian mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian Perseroan sebesar Rp1 juta hingga Rp10 juta;
 - e. Apabila setelah 3 (tiga) kali mendapat pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perseroan, maka Pekerja tersebut tidak mengindahkannya atau tidak melakukan upaya-upaya yang menunjukkan perbaikan.
2. Jenis pelanggaran Disiplin Sedang yang dapat dijatuhkan dengan hukuman Pemotongan Penghasilan sebesar 20 persen per bulan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, adalah pelanggaran terhadap:
- a. Terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja lebih dari 50 (lima puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas lebih dari 12 (dua belas) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - c. Mangkir sampai dengan 3 (tiga) hari dalam sebulan tidak berturut-turut;
 - d. Karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Perseroan, dan/atau kerugian Perseroan senilai lebih dari Rp10 juta hingga Rp50 juta.
- c. Be absent for up to 2 (two) non consecutive days in a month;
 - d. The negligence resulted in damage or loss of the Company's property, resulting in a loss of the Company amounting to Rp1 million to Rp10 million;
 - e. If after 3 (three) times unsatisfied statement is received from the Company, the Employee does not heed it or does not make efforts to show improvement.
2. Moderate Disciplinary violations with a sanction of Income Cut of 20 percent a month for a period of 3 (three) include as follows:
- a. Late arrival and/or coming home from work more than 50 (fifty) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Leave office during working hours not for official purposes more than 12 (twelve) times a month without any legitimate reason
 - c. Be absent for up to 3 (three) non consecutive days in a month;
 - d. Due deliberately or negligently resulted in damage or loss of the Company's property, and/or loss to the Company in the amount of more than Rp10 million to Rp50 million.

Pelanggaran Disiplin Berat

Pelanggaran Disiplin dan/atau tindakan lainnya yang ditafsirkan sebagai Kesalahan Berat meliputi:

1. Jenis pelanggaran Disiplin Berat yang dapat dijatuhkan hukuman dengan Penurunan Kelas Jabatan/jabatan setingkat lebih rendah dari Kelas Jabatan/jabatan sebelumnya, adalah pelanggaran terhadap:
 - a. Terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja lebih dari 70 (tujuh puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Mangkir lebih dari 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam sebulan;
 - c. Karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Perseroan senilai lebih dari Rp50 juta hingga Rp100 juta;
 - d. Menyalahgunakan mesin *handkey*, atau menyuruh Pekerja atau orang lain untuk mengubah daftar hadir sesuai data mesin *handkey* atau sarana lain yang digunakan untuk itu;
- ### Severe Disciplinary Violations
- Disciplinary Violations and/or other actions that are interpreted as Severe Errors include:
1. Severe Disciplinary violations with a sanction of Demotion of Position and/or Grade of one level lower from previous Position and/or Grade include as follows:
 - a. Late arrival and/or early return from work for more than 70 (seventy) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Be absent for more than 4 (four) non-consecutive days in a month;
 - c. Due deliberately or negligently resulted in damage or loss of the Company's property, resulting in financial losses of the Company amounting to more than Rp50 million to Rp100 million;
 - d. Abuse handkey machine, or ask an Employee or other person to change the attendance list according to the handkey machine data or other means used for it;

- e. Mabuk di tempat kerja atau di dalam lingkungan Perseroan pada jam kerja maupun di luar jam kerja di dalam lingkungan Perseroan;
 - f. Berjudi di tempat kerja atau di dalam lingkungan Perseroan pada jam kerja maupun di luar jam kerja di dalam Perseroan;
 - g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang berkaitan dengan jabatan atau tugas dan pekerjaan yang memberikan keuntungan pribadi atau pihak lain, sehingga merugikan Perseroan;
 - h. Membuat kegaduhan atau kekacauan di tempat kerja atau menghalang-halangi para Pekerja lain yang akan masuk kerja atau bekerja;
 - i. Karena kelalaian mengakibatkan bahaya atau kecelakaan fatal terhadap teman sekerja.
2. Jenis pelanggaran Disiplin Berat yang dapat dijatuhkan dengan hukuman Penurunan Kelas Jabatan/jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari Kelas Jabatan/jabatan sebelumnya, adalah pelanggaran terhadap:
- a. Terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Mangkir lebih dari 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam sebulan;
 - c. Karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Perseroan senilai lebih dari Rp100 juta hingga Rp200 juta;
 - d. Melakukan usaha-usaha sejenis dengan usaha Perseroan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. Pelanggaran disiplin sedang dan telah mendapatkan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dari Perseroan;
 - f. Melanggar, menyalahgunakan perintah atau tugas yang menjadi kewajibannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain;
 - g. Menyalahgunakan Pekerja lainnya atau peralatan usaha milik Perseroan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain;
 - h. Dengan sengaja ikut membantu terjadinya suatu perbuatan/tindakan yang termasuk kategori ancaman hukumannya yang lebih berat;
 - i. Dengan sengaja mengakibatkan bahaya atau kecelakaan terhadap Perseroan dan Pekerja;
 - j. Melakukan penyerangan, mengancam, atau mengintimidasi baik secara lisan, tulisan, maupun dengan menggunakan alat, sehingga dapat mengganggu kejiwaan dan fisik Pengusaha, Pekerja, maupun keluarganya.
- e. Intoxicated at work or within the Company during normal working hours and outside working hours within the Company;
 - f. Gamble at work or within the Company during working hours or outside working hours within the Company;
 - g. Receive gifts in the form of anything from anyone related to position or duties and jobs that provide personal or other party benefits, so as to harm the Company;
 - h. Create noise or chaos at work or impede other Employees from coming to work;
 - i. Due negligence result in danger or fatal accident to other employees.
2. Severe Disciplinary violations with a sanction of Demotion of Position and/or Grade of 2 (two) levels lower from previous Position and/or Grade include as follows:
- a. Late arrival and/or early return from work for more than 90 (ninety) hours a month without any legitimate reason;
 - b. Be absent for more than 4 (four) non-consecutive days in a month;
 - c. Due deliberately or negligently resulting in damage or loss of the Company's property, resulting in financial losses of the Company amounting to more than Rp100 million to Rp200 million;
 - d. Run similar businesses with the Company's business that may directly or indirectly create a conflict of interest;
 - e. Moderate disciplinary violation and has received written reprimands 3 (three) times from the Company;
 - f. Violate, abuse orders or duties that are their responsibilities for personal or other party benefits;
 - g. Abuse other Employees or the Company's business equipment for personal or other party benefits;
 - h. Intentionally participate in the occurrence of an act that is included in the category of the threat of a heavier sanction;
 - i. Intentionally cause danger or accident to the Company and its Employees;
 - j. Carry out attacks, threaten, or intimidate either verbally, in writing, or by using tools, so that it can be psychologically and physically disturbing the Employer, Employee, and family.



3. Jenis pelanggaran Disiplin Berat yang dapat dijatuhkan dengan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, adalah pelanggaran berupa:
 - a. Mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam sebulan atau 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan;
 - b. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas lebih dari 100 (seratus) jam dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - c. Karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Perseroan senilai lebih dari Rp200 juta;
 - d. Melakukan suatu perbuatan, baik lisan, tertulis, atau dengan gambar yang dapat mencemarkan nama baik Perseroan;
 - e. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan barang milik Perseroan dan Pekerja;
 - f. Melakukan tindak pidana yang tidak merugikan Perseroan dalam bentuk finansial berdasarkan pengakuan atau tertangkap tangan dan/atau setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. Menyalahgunakan bahan-bahan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (yang tidak menyebabkan kerugian Perseroan).
4. Jenis pelanggaran Disiplin Berat yang dapat dijatuhkan dengan hukuman Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat, adalah pelanggaran terhadap:
 - a. Mangkir lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam sebulan;
 - b. Membocorkan atau memberikan informasi Perseroan yang bersifat rahasia kepada pihak lain, terkecuali untuk kepentingan pemeriksaan aparat hukum yang resmi;
 - c. Memaksa, mempengaruhi, atau membujuk orang lain melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan;
 - d. Melakukan penganiayaan, baik fisik maupun mental/ jiwa terhadap Pekerja atau keluarganya;
 - e. Memalsukan dokumen/surat-surat Perseroan;
 - f. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai suatu penistaan atau penodaan terhadap suatu ras, agama, suku/golongan tertentu;
 - g. Mengedarkan/menjadi bandar/membujuk Pekerja lain untuk menggunakan bahan-bahan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di dalam lingkungan Perseroan;
3. Severe Disciplinary violations with a sanction of Honorable Termination of Employment/Layoff, not on Own Request, include as follows:
 - a. Be absent for 5 (five) consecutive days in a month or 6 (six) to 10 (ten) non-consecutive working days in a month;
 - b. Leave office during working hours not for service purposes of more than 100 (one hundred) hours a month without any legitimate reason;
 - c. Due deliberately or negligently result in damage or loss of the Company's property, resulting in the Company's financial loss of more than Rp200 million;
 - d. Perform an act, in the forms of verbal, written, or with an image that can defame the Company's good name;
 - e. Intentionally damage or destroy property belonging to the Company and Employees;
 - f. Commit a criminal act that is not detrimental to the Company in financial form based on confession or being caught in the act and/or after obtaining a final legally binding decision;
 - g. Misuse narcotic substances, psychotropic substances and other additives (which does not cause loss to the Company).
4. Severe Disciplinary violations with a sanction of Dishonorable Termination of Employment/Layoff include as follows:
 - a. Be absent for more than 10 (ten) working days a month;
 - b. Disclose or provide confidential Company information to other parties, except for the purpose of audit by official legal officers;
 - c. Force, influence, or persuade other people to do an act which results in and/or may cause harm to the Company;
 - d. Conduct maltreatment, both physically and mentally against employees or their families;
 - e. Falsify the Company's documents;
 - f. Perform an act as a form of blasphemy or desecration of a certain race, religion, ethnicity/group;
 - g. Circulate/become a dealer/persuade other Employees to use narcotic substances, psychotropic substances and other additives within the Company;

- h. Melakukan usaha-usaha di luar Perseroan secara langsung atau tidak langsung menjadikan Perseroan sebagai unsur dalam usahanya;
- i. Memberikan keterangan palsu dan/atau mengubah dokumen/surat-surat yang dapat merugikan Perseroan, Pengusaha, atau Pekerja.

- h. Conduct business outside the Company, directly or indirectly, makes the Company an element in its business;
- i. Provide false information and/or change documents that may harm the Company, Employers, or Employees.

PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEKERJA *TRAINEE* DAN PEKERJA PKWT

Bagi Pekerja *Trainee* (peserta lulus rekrutmen dan seleksi Perseroan yang diangkat dan ditempatkan pada jabatan dan kelas jabatan tertentu dengan Surat Keputusan Direksi dengan masa *trainee* selama 12 (dua belas) bulan) dan Pekerja PKWT (Pekerja yang bekerja pada Perseroan dengan berdasar pada perjanjian kerja antara Perseroan dengan yang bersangkutan untuk waktu tertentu) yang melakukan pelanggaran disiplin, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pekerja dan segera diberhentikan sebagai Pekerja *Trainee* dan Pekerja PKWT.

Laporan Adanya Pelanggaran Disiplin Kerja

Laporan adanya pelanggaran Disiplin Pekerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diketahui terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan Pekerja, dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka atasan langsung dari Pekerja tersebut berkewajiban melaporkannya kepada Perseroan secara berjenjang. Untuk laporan Atasan langsung dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

Apabila Atasan langsung tidak melaporkan kepada Perseroan, dan/atau sengaja menutup-nutupi pelanggaran disiplin bawahannya, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Ringan.

Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kerja

1. Perseroan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Tim Disiplin.
2. Pembentukan Tim Disiplin untuk tingkat Kantor Pusat, ditetapkan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang SDM, sedangkan untuk tingkat Cabang/Unit Kerja ditetapkan oleh General Manager/Kepala Unit dan oleh Direktur Utama untuk Anak Perusahaan.

DISCIPLINARY VIOLATIONS FOR TRAINEE AND PKWT EMPLOYEES

For a Trainee (participants who pass the recruitment and selection in the Company who are appointed and placed in certain positions and classes with the Board of Directors Decree with a trainee period of 12 (twelve) months) and Fixed-term Employment Contract (PKWT/Employees who work for the Company based on a work agreement between The company and the employee concerned for a certain time) employee that has committed a disciplinary violation, is declared not eligible to be appointed as an Employee and immediately dismissed as a Trainee and a PWKT employee.

Reports of Employee Disciplinary Violations

Report on an Employee Disciplinary Violation is a maximum of 7 (seven) working days, starting from the date when the disciplinary violation committed by the Employee is known, and supported by strong evidence, the direct supervisor of the Employee concerned is obliged to report it to the Company in stages. Direct Supervisor reports are made in writing and confidentially.

If a direct Supervisor does not report to the Company, and/or deliberately covers up disciplinary violations of his/her subordinates, he/she is subject to minor disciplinary sanctions.

Employee Discipline Violation Investigation

1. The Company has full authority to conduct investigation of employees who commit disciplinary violations which in its implementation is delegated to a Disciplinary Team.
2. Formation of the Disciplinary Team for the Head Office level, is determined by the Director in charge of HC, while for the Branch/Work Unit level, it is determined by General Manager/Head of Unit and by President Director for Subsidiaries.



3. Pemanggilan terhadap Pekerja yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin:
 - a. Terhadap Pekerja yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin wajib dipanggil secara patut melalui surat pemanggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Disiplin, apabila Ketua Tim berhalangan dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua atau Sekretaris Tim.
 - b. Apabila pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka Tim Disiplin dapat melakukan pemanggilan kedua sampai dengan panggilan ketiga (panggilan terakhir) dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat pemanggilan.
 - c. Masing-masing surat pemanggilan, wajib ditembuskan kepada:
 - 1) Untuk Kantor Pusat:
 - Direktur SDM dan Hukum;
 - Ketua Umum DPP Serikat Pekerja.
 - 2) Untuk Cabang Pelabuhan
 - General Manager/Kepala Unit;
 - Ketua Umum DPP Serikat Pekerja;
 - Ketua DPC Serikat Pekerja dimana Pekerja tersebut bertugas.
 - 3) Untuk Anak Perusahaan
 - Direktur Utama;
 - Ketua Umum DPP Serikat Pekerja;
 - Ketua DPC Serikat Pekerja dimana Pekerja tersebut bertugas.
 - d. Apabila setelah panggilan ketiga Pekerja yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak juga mengindahkannya, maka Tim Disiplin Pekerja tetap dapat melakukan pemeriksaan secara *in absentia* (tanpa kehadiran Pekerja yang diperiksa).
 4. Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Disiplin Kerja:
 - a. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota Tim Disiplin dan dilaksanakan secara tertutup;
 - b. Selama proses pemeriksaan, Pekerja yang diperiksa dapat didampingi oleh maksimum 2 (dua) orang Pengurus Serikat Pekerja;
 - c. Hasil pemeriksaan pelanggaran Disiplin Kerja dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Disiplin dan Pekerja yang diperiksa dianggap mengakui atau membenarkan;
3. Summons for Employees suspected of committing disciplinary violations:
 - a. Employees who are suspected of committing disciplinary violations must be properly summoned by means of a summons signed by the Discipline Team Leader, if the Team Leader is unable to attend can be represented by the Deputy Team Head or Team Secretary.
 - b. If the first call is ignored, the Discipline Team can make a second call to a third (last call) with an interval of 7 (seven) calendar days from the date of the summons.
 - c. Summons must be copied to:
 - 1) Head Office:
 - Director of Human Capital and Legal;
 - Head of the DPP Trade Union.
 - 2) Port Branch
 - General Manager/Head of Unit;
 - Head of the DPP Trade Union;
 - Head the DPC Trade Union where the Employee is assigned.
 - 3) Subsidiaries
 - President Director;
 - Head of the DPP Trade Union;
 - Head the DPC Trade Union where the employee is assigned.
 - d. If after the third call, Employees who are suspected of committing disciplinary violations ignore it, the Employee Disciplinary Team can still carry out an in-absent check (without the presence of the inspected Employee).
 4. The investigation process of employee Disciplinary Violations:
 - a. Shall be performed by at least 3 (three) members of the Disciplinary Team and carried out in private;
 - b. During the inspection process, inspected Employees can be accompanied by a maximum of 2 (two) Trade Union Management;
 - c. The results of the Employee Disciplinary Violation investigation are stated in the Minutes of Investigation signed by the Disciplinary Team and the investigated employees are deemed to admit or justify;

d. Untuk kepentingan pemeriksaan, Pemeriksa dapat menghadirkan Pihak Lain/Saksi, memeriksa, mengamankan (menyita) barang-barang, dokumen, surat-surat, atau alat bukti yang diduga kuat ada hubungan dengan Pelanggaran Disiplin, memasuki ruangan atau tempat penyimpanan barang/alat bukti dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

d. For the purpose of investigation, the Investigator can bring another Party/Witness, investigate, confiscate items, documents, letters, or evidence that are strongly suspected of having a connection with Disciplinary Violation, enter the room or place where the goods/evidence are placed and perform actions deemed necessary in accordance with applicable regulations.

Jumlah Pelanggaran Disiplin Pekerja Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, terdapat 6 (enam) pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pekerja IPC, dengan uraian sebagai berikut:

Number of Employee Disciplinary Violations in 2020

Throughout 2020, 6 (six) disciplinary violations were committed by IPC Employees, with the following details:

Jumlah Pelanggaran Disiplin Pekerja Tahun 2020

Number of Disciplinary Violations in 2020

No.	Kriteria Hukuman / Sanction	Jumlah / Total	Keterangan / Description	Status Banding / Appeal Status
1.	Sanksi Berat / Severe Sanction	6	Done	Terdapat 1 (satu) perkara mengajukan banding. / 1 (one) case filed an appeal.
2.	Sanksi Sedang / Medium Sanction			Nihil / Nil
3.	Sanksi Ringan / Low Sanction			
Jumlah / Total		6		

TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN

NILAI BUDAYA AKHLAK

Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara disampaikan bahwa setiap BUMN wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) SDM BUMN menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter SDM di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.

Nilai-nilai utama (*core values*) tersebut diharapkan dapat menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perubahan nilai tersebut juga menjadi salah satu aspek transformasi *Human Capital* guna meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta.

TRANSFORMATION OF CORPORATE CULTURE

AKHLAK CULTURE VALUES

Along with the issuance of the Circular of Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning State-Owned Enterprise Human Resource Core Values, it states that all SOEs must apply the SOE HR Core Values to become Corporate Culture and serve as the basis for the human capital formulation within the State-Owned Enterprises, Subsidiaries, and Consolidated Affiliates.

These core values are hoped to become the identity and adhesive work culture that supports continuous performance improvement. In addition, this change in values is also one of the Human Capital transformation aspects in order to increase the competitiveness of SOEs to become global players and to turn SOEs into talent factories.



Nilai-nilai Budaya BUMN

SOE Culture Values



Nilai Perusahaan disusun berdasarkan kebutuhan Perseroan yang berisi tentang perilaku dan pola pikir tertentu yang menyatukan para Pekerja dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi.

The Corporate values are designed based on the Company's needs which contain certain behaviors and mindsets that unite Employees in thinking, acting and interacting.

Pengelolaan Budaya Perusahaan di IPC memiliki tujuan:

Management of Corporate Culture at IPC has the following objectives:

1. Memberikan pedoman dalam pengelolaan Budaya Perusahaan;
2. Memberikan pengetahuan akan peran Budaya Perusahaan dalam struktur organisasi dan fungsinya dalam kinerja Perseroan;
3. Membuat pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa harus melakukan hal tersebut sehingga pekerja lebih yakin dalam bertindak.

1. To provide guidance in the management of Corporate Culture;
2. To provide knowledge of the role of Corporate Culture in the organizational structure and its function in the Company's performance;
3. To encourage employees to know what to do, how to do, and why to do so that the employees have more confidence in taking actions.

AKHLAK merupakan akronim dari **A**manah, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif. Pada dasarnya, penciptaan setiap *value* selalu ingin memberikan energi positif dalam sebuah institusi. Kehadiran *Core Values CINTA* di IPC selama kurang lebih 5 (lima) tahun juga telah memberikan energi bagi Insan IPC untuk terus berkarya mewujudkan Visi, Misi, dan *Roadmap* Perusahaan dari *Fit in Infrastructure* hingga menjadi *World Class Port*. Seluruh Insan IPC tidak perlu serta-merta merasa "baru" dengan kehadiran **AKHLAK**

AKHLAK is an acronym for **A**manah (Trustworthy), **K**ompeten (Competent), **H**armonis (Harmonious), **L**oyal, **A**daptif (Adaptive), and **K**olaboratif (Collaborative). Basically, the formulation of these values is always aimed at providing positive energy in an institution. The presence of **CINTA** Core Values at IPC for approximately 5 (five) years has also provided energy for IPC Personnel to continue working to realize the Company's Vision, Mission and Roadmap from Fit in Infrastructure to becoming a World Class Port. All IPC

sebagai *one single core value* Grup IPC yang terbaru, karena **AKHLAK** adalah pembaharuan dari *value CINTA* yang telah menjadi *Core Values* IPC selama 5 (lima) tahun terakhir.

Personnel do not necessarily need to feel “new” immediately with the presence of **AKHLAK** as the new one single core value for the IPC Group because **AKHLAK** is a renewal of **CINTA** values which have been the IPC Core Values for the last 5 (five) years.

Core Values IPC

Pemetaan CINTA Menuju AKHLAK



IPC Core Values

CINTA Towards AKHLAK Mapping

Amanah / Trustworthy	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. / We uphold the trust given.	Integrity
Kompeten / Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. / We continue to learn and develop capabilities.	Nationalism Action
Harmonis / Harmonious	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. / We care for each other and respect differences.	Nationalism Teamwork
Loyal / Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. / We are dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State.	Integrity Nationalism
Adaptif / Adaptive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. / We continue to innovate and are enthusiastic in driving or facing change.	Customer Centric Action
Kolaboratif / Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis. / We build synergistic cooperation.	Teamwork



Penjabaran Nilai-Nilai Utama (Core Values) BUMN

Elaboration of SOE Core Values



INTERNALISASI NILAI AKHLAK

Internalisasi *value* **AKHLAK** dilaksanakan serentak oleh seluruh BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi melalui 4 (empat) *milestone*, yaitu:

1. Awareness

Mengetahui dan memahami *core value* BUMN **AKHLAK** dalam seluruh kegiatan operasional harian dan melakukan integrasi dalam program kerja serta proses bisnis Perseroan.

2. Understanding

Memahami dan mengerti lebih dalam arti dan tujuan *core value* BUMN **AKHLAK** dalam organisasi dan penjabarannya dalam perilaku kerja serta mulai melakukan penyesuaian dengan kegiatan operasional di unit kerja.

INTERNALIZATION OF AKHLAK VALUES

The internalization **AKHLAK** values is carried out simultaneously by all SOEs, Subsidiaries, and Consolidated Affiliates through 4 (four) milestones, namely:

1. Awareness

Get to know and see SOE core values of **AKHLAK** in all daily operational activities and carry out integration in the work programs and business processes of the Company.

2. Understanding

Understand and grasp deeper meaning and purpose of SOE core values of **AKHLAK** in the organization and the elaboration into work behavior and begin to align with operational activities in work units.

3. Buy-in

Memahami dan mengerti lebih dalam arti dan tujuan *core value* BUMN **AKHLAK** dalam seluruh kegiatan operasional harian dan melakukan integrasi dalam program kerja serta proses bisnis Perseroan.

4. Ownership

Setiap individu memiliki perilaku yang sesuai dengan *core value* BUMN **AKHLAK** dan para pemimpinnya menjadi *role model* dan referensi utama terwujudnya bisnis yang berkelanjutan.

Keempat *milestone* internalisasi tersebut kiranya perlu memperhatikan prinsip *People (improving role fit)*, *Practice (connecting roles to purpose)*, *Place and Narrative (establishing connections in the workplace)*, sehingga *value AKHLAK* dapat dipahami dan dilaksanakan dengan *embedded mechanism* terhadap proses bisnis Perseroan. Dengan demikian, budaya kerja yang unik dapat tercipta dan memungkinkan Pekerja untuk terlibat, merasa dihargai, dan didengar. Inilah peran kepemimpinan yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan pengalaman para Pekerja, serta bagaimana Direksi Perseroan dapat membantu mengembangkan budaya yang kuat dalam lingkungan IPC.

3. Buy-in

Understand and grasp deeper meaning and purpose of SOE core values of **AKHLAK** in all daily operational activities and integrate into work programs and business processes of the Company.

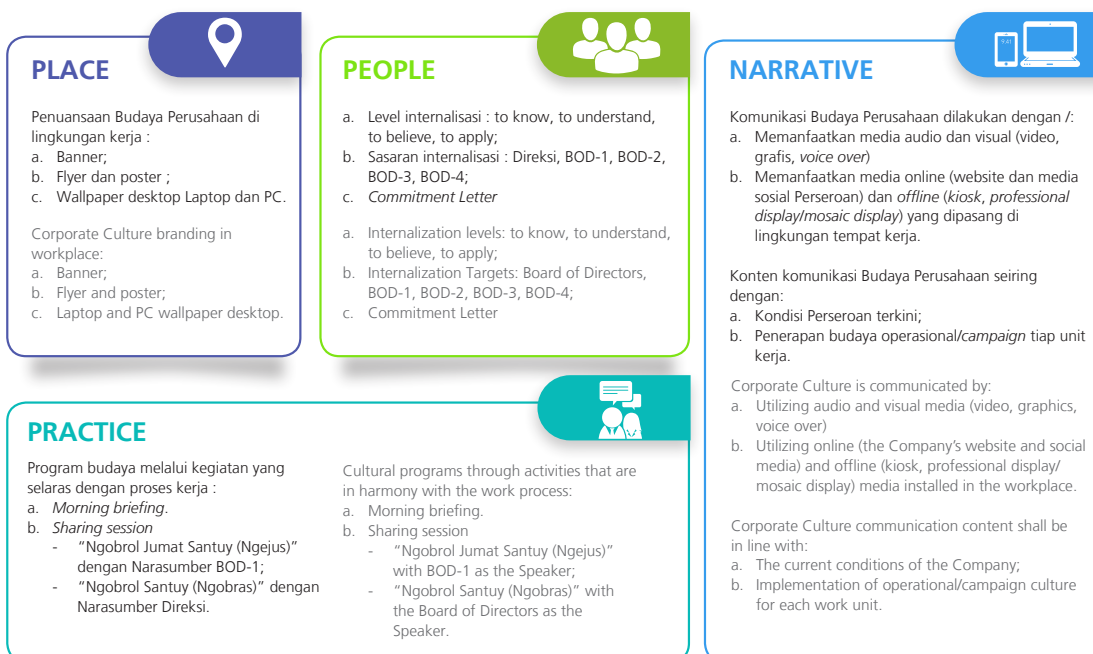
4. Ownership

Each individual has a behavior in accordance with SOE core values of **AKHLAK** and leaders become role models and the main reference for the realization of a sustainable business.

The internalization through these four milestones shall pay attention to the principles of *People (improving role fit)*, *Practice (connecting roles to purpose)*, *Place and Narrative (establishing connections in the workplace)*, so that the **AKHLAK** values can be understood and implemented with an embedded mechanism for the Company's business processes. Thus, a unique work culture can be created that allows Employees to be involved, feel valued and heard. This is a leadership role that is required to improve the experience of employees, as well as the way of the Company's Board of Directors in supporting the development of strong culture within IPC.

Prinsip Pendukung *Milestone* Internalisasi *Value* AKHLAK

Milestone Supporting Principles in the Internalization of AKHLAK Values



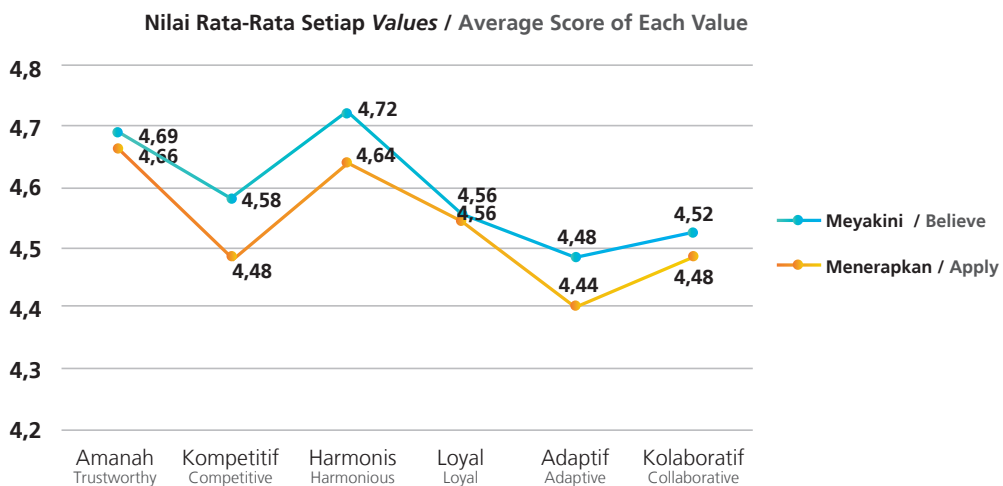


INDEKS BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan implementasi Core Values BUMN, yaitu **AKHLAK**, IPC melakukan Survei Implementasi Budaya Perusahaan secara berkala. Pada tanggal 11 – 22 Desember 2020, Perseroan melakukan Survei Implementasi Budaya Perusahaan terhadap 288 sampling, yang terdiri dari 118 Pekerja Kantor Pusat dan 172 Pekerja Cabang Pelabuhan. Berikut ini merupakan Indeks Implementasi Budaya Perusahaan secara Korporat pada tahun 2020:

CORPORATE CULTURE INDEX

To learn the level of understanding and implementation of SOE Core Values, namely **AKHLAK**, IPC conducts regular Corporate Culture Implementation Survey. On December 11-22, 2020, the Company conducted Corporate Culture Implementation Survey on 288 samplings, consisting of 118 Head Office Employees and 172 Port Branch Employees. The Corporate Culture Implementation Index in 2020 is as follows:



Realisasi Indeks implementasi Budaya Perusahaan secara Korporat tahun 2020 sebesar 4,56 dari skala Likert 1 – 5, telah melampaui target dalam KPI Corporate tahun 2020 sebesar 4,55 dari skala Likert 1 – 5.

The Corporate Culture Implementation Index in 2020 scored 4.56 in a Likert scale of 1-5, which exceeded the target of 2020 Corporate KPI at 4.55 in a Likert scale of 1-5.

Dari kegiatan survei tersebut, diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait implementasi Budaya Perusahaan di tahun depan, dengan uraian sebagai berikut:

The survey provided conclusions and recommendations that can support evaluation of the Corporate Culture implementation in the next year, which are described as follows:

Kesimpulan dan Rekomendasi terkait Implementasi Budaya Perusahaan Tahun 2020

Conclusions and Recommendations of Corporate Culture Implementation in 2020

KESIMPULAN / CONCLUSION		
No.	Kesimpulan / Conclusion	Rujukan / Reference
1.	Implementasi Budaya Perusahaan dapat dikatakan sudah baik untuk seluruh Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan. / The Corporate Culture is deemed well-implemented in the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.	Nilai rata-rata Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan adalah 4,55 dari skala 1-5 dimana nilai 4 menunjukkan persepsi "sering" dari responden terhadap values, baik dari segi believe maupun implementasi. / The average score of Head Office and Port Branches is 4.55 from a scale of 1-5, where the score 4 indicates "frequent" perception from the respondents regarding the values, both in terms of believing and implementation.
2.	Indeksi Implementasi Budaya Perusahaan memenuhi target untuk indeks implementasi budaya perusahaan pada KPI Corporate Tahun 2020 / Corporate Culture implementation index meets the target of corporate culture implementation index in the 2020 Corporate KPI.	Indeks implementasi budaya perusahaan untuk Kantor Pusat dan Cabang adalah 4,56 dimana untuk target KPI adalah 4,55. / The Corporate Culture Implementation Index of the Head Office and Branches is 4.56, whereas the KPI target is 4.55.
3.	Value Amanah dan Harmonis merupakan value yang sudah sangat baik dalam hal nilai yang diyakini maupun nilai yang diimplementasikan / The values of Trustworthy and Harmonious are very well believed and implemented.	Amanah, menjadi nilai tertinggi hampir di seluruh divisi Kantor Pusat dan Harmonis menjadi nilai tertinggi hampir di seluruh Cabang Pelabuhan. Begitu pula di Anak Perusahaan, Amanah, dan Harmonis menjadi nilai yang sudah baik dalam nilai yang diyakini dan diterapkan di dalam keseharian. / Trustworthy value gained the highest score in almost all divisions of the Head Office, while Harmonious value gained the highest score in almost all Port Branches. Likewise, in the Subsidiaries, the values of Trustworthy and Harmonious are well believed and implemented in daily activities.

KESIMPULAN / CONCLUSION

No.	Kesimpulan / Conclusion	Rujukan / Reference
4.	<i>Value</i> Adaptif harus mendapatkan perhatian lebih didalam implementasi budaya perusahaan. / The Adaptive value shall be improved in the corporate culture implementation.	Adaptif, menjadi <i>value</i> dengan nilai rata-rata terendah baik secara rata-rata keseluruhan (Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, Anak Perusahaan) maupun jika dilihat masing – masing Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, dan Anak Perusahaan. Begitu pun jika dilihat per Divisi, per Cabang Pelabuhan, dan per Anak Perusahaan hampir seluruhnya nilai Adaptif termasuk dalam kategori rendah. / Adaptive is the value with the lowest average score, both in overall average (Head Office, Port Branches, Subsidiaries) and in individual average at the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries. Likewise, in each Division at every Port Branch and Subsidiary, almost all gained low score in Adaptive value.
5.	<i>Value</i> berikutnya yang juga membutuhkan perhatian adalah Kompeten / The next value that shall be improved is Competent.	Kompeten merupakan <i>value</i> berikutnya yang membutuhkan perhatian setelah Adaptif. Hal ini terutama muncul pada hasil survei Kantor Pusat dan Anak Perusahaan. / Competent is the next value that shall be improved after Adaptive value. This particularly was found in the survey results of the Head Office and Subsidiaries.

REKOMENDASI / RECOMMENDATION

1.	Merancang program budaya yang menitikberatkan pada nilai yang masih perlu diperhatikan, yaitu kompeten dan adaptif. / Planning corporate culture program that emphasizes on values that must be improved, namely competent and adaptive.
2.	Melanjutkan dan menyempurnakan program yang sudah ada sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai yang sudah terimplementasikan dengan baik. / Continuing and improving existing programs in order to maintain the values that are already well-implemented.
3.	Menghimbau Manajemen Anak Perusahaan untuk meningkatkan kegiatan implementasi budaya perusahaan di masing – masing Anak Perusahaan, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan implementasi budaya perusahaan yang diadakan oleh Kantor Pusat. / Encouraging Subsidiaries Management to improve corporate culture implementation in each Subsidiary and increasing participation in corporate culture implementation activities held by the Head Office.

KODE ETIK BISNIS PERUSAHAAN

Sebagai Perusahaan Pelabuhan terkemuka di Indonesia, IPC bertekad penuh untuk senantiasa menanamkan budaya integritas dan berorientasi terhadap kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan. Guna mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan menyeluruh, yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*). Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terbaru telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Pedoman Kode Etik Bisnis IPC disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan IPC sebagai bukti komitmen Insan IPC untuk mewujudkan perilaku etika profesional dan etika kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Pedoman Kode Etik Bisnis juga disusun untuk dijadikan sebagai acuan prinsip nilai-nilai budaya dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan IPC.

Pedoman Kode Etik Bisnis Perseroan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan/atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Pedoman ini.

COMPANY CODE OF CONDUCT

As a leading Port Company in Indonesia, IPC is fully committed to always instilling integrity culture and is oriented towards performance and the targets that have been set in order to achieve the Company's vision and mission. In order to achieve this, the Company is committed to implementing GCG consistently and comprehensively, one of which is done through the implementation of Code of Conduct. The latest Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020.

The IPC Code of Conduct is ratified and enforced for all IPC Employees as proof of the commitment of IPC Employees to realize professional ethical behavior and work ethics in carrying out their daily work. The Code of Conduct is also formulated to serve as a reference for the principles of cultural values and Good Corporate Governance within IPC.

The Company's Code of Conduct is updated every 3 (three) years and/or if there are amendments to the Articles of Association and/or provisions of laws and regulations that affect the content or effectiveness of this Guideline.



MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT PENERAPAN PEDOMAN KODE ETIK BISNIS

Maksud Penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi Perusahaan

1. Setiap Insan IPC memahami bahwa segala aktivitas Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Ketidakberpihakan, Kewajaran, dan Terpercaya;
2. Mendorong seluruh Insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan;
4. Membangun reputasi Perseroan lebih baik;
5. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan.

Tujuan Penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi Perusahaan

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi IPC secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan IPC yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
3. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perseroan;
4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara Insan IPC dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

Manfaat Penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis

Penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini oleh Insan IPC secara konsisten dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perseroan

- a. Mendorong kegiatan operasional IPC agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* lainnya harus didasari dengan standar etika;
- b. Meningkatkan nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perseroan, sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

PURPOSE, OBJECTIVES, AND BENEFITS OF APPLYING CODE OF CONDUCT

Purpose of Applying Code of Conduct in the Company

1. Each IPC employee understands that all IPC activities are based on good corporate governance principles including Openness, Accountability, Responsibilities, Impartiality, Fairness, and Trusted;
2. Encourage all IPC employees to behave well in carrying out all Company activities;
3. Create a healthy and comfortable working environment within the Company;
4. Build a better Company reputation;
5. Minimize opportunities for deviations.

Objectives of Applying Code of Conduct in the Company

1. As a joint commitment to realize the vision and carry out IPC mission in a professional and ethical way to conduct business;
2. As a behavioral guide for all IPC employees to be obeyed in carrying out all business activities;
3. As a guide to avoid conflict of interest in carrying out all business activities;
4. Developing a harmonious, synergic and mutually beneficial relationship between IPC Employees and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive company.

Benefits of Applying Code of Conduct

The implementation of this Code of Business Conduct by IPC Employees consistently and comprehensively is expected to provide benefits for:

1. Company

- a. Encouraging IPC operations to be more efficient and effective as relationships with customers, communities, governments and other stakeholders must be based on ethical standards;
- b. Increasing the value of the Company by providing assurance and protection to Stakeholders in dealing with the Company resulting in a good reputation, which ultimately realizes the long-term success of the business.

2. Pemegang Saham (*Stakeholders*)

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara bertanggung jawab, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel, dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan.

3. Insan IPC

- Memberikan pedoman kepada Insan IPC tentang tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di IPC;
- Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dari keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Insan IPC secara menyeluruh.

4. Masyarakat dan Pihak Lain yang Terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders*, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

PELAPORAN DAN KEPATUHAN

Insan IPC akan mengimplementasikan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur dalam setiap tindakan terkait kode etik bisnis. Komitmen Perseroan terhadap integritas dan etika tidak dapat dijalankan apabila Insan IPC tidak berkomunikasi, berbagi informasi serta berkolaborasi terkait isu-isu seputar etika. Insan IPC dihimbau untuk berbicara kapan pun mereka melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi.

Kapan pun Insan IPC menghadapi dilema, kebingungan, ketidakjelasan, atau pertanyaan, Insan IPC dapat segera menghubungi salah satu dari pihak-pihak berikut:

- Atasan langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
- Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
- Pimpinan Unit Pengelola SDM.

Sedangkan untuk permasalahan/pertanyaan yang belum dapat diselesaikan agar dilaporkan kepada Direksi. Beberapa aturan yang harus diingat oleh Insan IPC sehubungan dengan Pelaporan dan Kepatuhan antara lain:

- Pelanggaran terhadap segala peraturan yang tercantum dalam Pedoman Kode Etik Bisnis dapat menciptakan konsekuensi terganggunya profesionalisme Insan IPC dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang

2. Shareholder

Increasing awareness that IPC is managed responsibly, prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the level of profitability expected by the Shareholder while taking into account the interests of the Company.

3. IPC Employees

- Providing guidance to every IPC employee about the behavior desired or prohibited by the Company;
- Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and openness so as to improve the performance and productivity of every IPC employee.

4. Society and Other Related Parties

Creating harmonious and mutually beneficial relationship with stakeholders, ultimately creating socio-economic welfare for communities and other concerned parties.

REPORTING AND COMPLIANCE

IPC Employees are required to apply a transparent, open and honest communication culture in all actions related to the business Code of Conduct. IPC's commitment to integrity and ethics cannot be carried out if IPC Employees do not communicate, share information and collaborate on issues surrounding ethics. IPC Employees are encouraged to speak whenever they see an ethical or compliance violation.

Whenever IPC Employees face any dilemmas, confusion, obscurity, or questions, they can immediately contact one of the following parties:

- Their direct supervisor (one level above);
- Their indirect supervisor (supervisor above direct supervisor/supervisor two levels above);
- Head of HC Management Unit.

For unresolved problems/questions to be reported to Board of Directors. Some of the rules that must be remembered by IPC employees in relation to Reporting and Compliance include:

- Violation of all regulations stated in the Code of Conduct may result in disrupting the professionalism of IPC employees and imposing sanctions in accordance with applicable regulations. Therefore, IPC Employees are



berlaku. Oleh karena itu, Insan IPC dihimbau untuk selalu mematuhi Pedoman Kode Etik Bisnis IPC;

2. Apabila terjadi pelanggaran, akan segera dilakukan proses investigasi dan penelusuran terhadap hal tersebut oleh unit yang berwenang;
3. IPC akan menjaga kerahasiaan individu yang melaporkan tindakan pelanggaran;
4. Apabila Insan IPC menghadapi kesulitan dalam memahami Pedoman Kode Etik Bisnis;
5. Insan IPC dapat menghubungi salah satu pihak yang telah disebutkan di atas.

Pelanggaran atas Pedoman Kode Etik Bisnis akan mengakibatkan tindakan indisipliner tegas terhadap individu yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Perseroan.

POKOK-POKOK PEDOMAN KODE ETIK BISNIS

Pedoman Kode Etik Bisnis merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Profesional dan Etika Kerja Insan IPC yang menjadi Panduan Perilaku Insan IPC, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi IPC.

Etika Profesional

Profesionalisme merupakan suatu kemampuan spesifik yang diperlukan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, profesionalisme dapat diartikan juga dengan suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut. Dengan demikian, etika profesional merupakan etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dijalankan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bidang (profesi) tersebut. Etika profesional juga disusun sebagai acuan Perseroan serta Manajemen untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*stakeholders*).

Dalam etika profesional mengatur tentang:

1. Hubungan dengan Pekerja;
2. Hubungan dengan Pelanggan;
3. Hubungan dengan *Vendor*;
4. Hubungan dengan Pesaing;
5. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas, dan Lingkungan;
6. Hubungan dengan Regulator;
7. Hubungan dengan Anak Perusahaan;
8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain.

urged to always comply with the IPC Code of Conduct;

2. If a violation occurs, an investigation and tracing process will be carried out immediately by the authorized unit;
3. IPC will maintain the confidentiality of individuals who report violations;
4. If IPC Employees face difficulties in understanding the Code of Conduct;
5. IPC Employees can contact one of the parties mentioned above.

Violation of the Code of Conduct will result in strict disciplinary action against the individuals concerned in accordance with the Company's regulations.

CODE OF CONDUCT

Code of Conduct is a set of commitments consisting of Professional Ethics and Work Ethics of IPC Employees which becomes Guideline for IPC Employees to behave, which is designed to influence, form, and direct the conformity of behavior with the Company's values and culture in achieving the vision and mission of IPC.

Professional Ethics

Professionalism is a specific ability required to carry out a job. In other words, professionalism can also be interpreted as expertise in handling a problem or work with maximum results due to have mastered the field being carried out. Thus, professional ethics is ethics related to the field of work to ensure quality and process undertaken in accordance with the rules in the profession. Professional ethics is also formulated as a reference for the Company and Management to relate to the environment, both internal and external (*stakeholders*).

The professional ethics govern:

1. Relationship with Employees;
2. Relationship with Customers;
3. Relationship with Vendors;
4. Relationship with Competitors;
5. Relationship with Society, Community, and Environment;
6. Relationship with Regulators;
7. Relationship with Subsidiaries;
8. Relationship with Other Stakeholders.

Etika Kerja

Etika kerja (*work ethic*) adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Insan IPC, dalam bekerja sehari-hari. Etika kerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Dengan etika kerja diharapkan dapat meningkatkan karakter moral. Perseroan dengan etika kerja yang baik akan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai positif yang universal seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan, loyalitas kepada Perseroan, konsisten pada keputusan, dedikasi kepada *stakeholders*, kerja sama yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab.

Beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan etika kerja IPC, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Ketentuan Lainnya;
2. Benturan Kepentingan;
3. Korupsi dan Suap;
4. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya;
5. Pencucian Uang;
6. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan, dan Donasi);
7. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
8. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan;
9. Integritas Laporan Keuangan;
10. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi;
11. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi;
12. Pengelolaan Arsip;
13. Perlindungan Harta Perusahaan;
14. Pengendalian Internal;
15. Perjalanan Dinas;
16. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
17. Aktivitas Politik dan Sosial;
18. Perilaku Etis terhadap Sesama Pekerja, yang mencakup:
 - a. Etika Kerja Atasan terhadap Bawahan;
 - b. Etika Kerja Bawahan terhadap Atasan, dan;
 - c. Etika Sesama Rekan Kerja

PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK BISNIS

Komitmen Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan IPC memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan.

Work Ethics

Work ethics is a system of values or norms used by all IPC employees in daily work. Work ethics is based on hard work and persistence. Work ethics is expected to improve moral character. Companies with good work ethics will have and practice universal positive values such as honesty, openness, sincerity, loyalty to the Company, consistency in decisions, dedication to stakeholders, good cooperation, discipline, and responsible.

Some matters must be resolved regarding IPC work ethics, among others, are as follows:

1. Compliance with Laws, Legislation and Other Terms;
2. Conflict of Interest;
3. Corruption and Bribe;
4. Theft and Similar Dissolution;
5. Money Laundering;
6. Gratuities (Giving and Reception Present/Souvenirs, Dinner, Entertainment and Donation);
7. Equal Opportunities for Getting Jobs and Promotions;
8. Documenting and Listing of Companies;
9. Integrity of Financial Statements;
10. Data and/or Information Confidentiality;
11. Media, Communications and Information Dissemination;
12. Archive Management;
13. Protection of Company Property;
14. Internal Control;
15. Business Trip;
16. Intellectual Property Rights (HAKI);
17. Political And Social Activities;
18. Ethical Behavior towards Fellow Employees, which includes:
 - a. Work Ethics of Supervisors towards Subordinates;
 - b. Work Ethics of Subordinates towards Supervisors, and;
 - c. Ethics of Peers.

ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT

Commitment to Enforcement of Code of Conduct

In order to realize the Company's commitment to the stakeholders, all IPC Employees are committed to:

1. Always thinking and behaving in a corporate manner by prioritizing the Company interests above personal and/or group interests to provide the best for the Company.



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perseroan. 3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan. 4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (<i>sharing knowledge</i>) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi. 6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perseroan. 7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan/atau menyalahgunakan wewenang. 8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan IPC dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku. 9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Always caring for and maintaining the good image and reputation of the Company. 3. Carrying out duties in a professional manner with full responsibility and upholding integrity, honesty and a spirit of togetherness. 4. Caring for and being responsive to complaints from customers/business partners and immediately following up in accordance with applicable regulations. 5. Having a strong motivation to develop themselves and expand knowledge and willing to share knowledge and skills and help other colleagues without feeling afraid of being rivaled. 6. Always behaving in a commendable manner as an individual and as a member of society and not committing disgraceful acts that may degrade the Company's image. 7. Refraining from all actions that may violate provisions and/or abuse authority. 8. Implementing religious worship embraced by respective IPC Employees properly and understanding and complying with ethics and behavior. 9. Working in accordance with the principles of Good Corporate Governance. |
|--|--|

Oleh sebab itu, sebagai perwujudan Komitmen di atas, maka:

1. Seluruh Insan IPC wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan IPC untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun.
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan IPC.
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis, dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan.
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perseroan dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan untuk Kantor Pusat dan di Bagian SDM masing-masing Cabang Pelabuhan.
5. Unit Kerja/Bagian yang menangani Bidang Kepatuhan membuat rekapitulasi Pekerja IPC yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap awal tahun.

Therefore, as a manifestation of the above Commitment:

1. All IPC Employees are required to sign an Integrity Pact and Appointments Code of Business Conduct which is the commitment of IPC Employees to implement the Code of Business Conduct which is updated every year.
2. The Code of Business Conduct must be socialized and understood by IPC Employees.
3. The Integrity Pact, Appointments Code of Conduct, and Conflict of Interest Statements for the Board of Commissioners and Board of Directors are made and signed in one copy and kept at the Corporate Secretary.
4. The Company's Integrity Pact and Appointments Code of Conduct are made and signed in one copy and kept at the Corporate Secretary of the Head Office and HC Division of each Port Branches.
5. The Work Unit/Division in charge of Compliance shall make a recapitulation of IPC Employees who sign the Integrity Pact every year, to be submitted to the Corporate Secretary at the beginning of each year.

Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) *grade* di bawahnya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis IPC.

Sosialisasi dan Internalisasi

Pedoman Kode Etik Bisnis ini merupakan revisi dari Kode Etik Bisnis sebelumnya seiring dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik GCG. Dalam rangka membangun kultur Perseroan berbasis nilai-nilai GCG dan *Corporate Culture*, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada seluruh Insan IPC secara berkala.

Penyebarluasan Kode Etik Bisnis Perusahaan

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, IPC telah menyebarkan Kode Etik Perusahaan:

1. Telah dilakukan sosialisasi kode etik bisnis kepada Direksi dan pegawai IPC di Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan.
2. Melakukan sosialisasi dalam bentuk media cetak dan sosial media penerapan pedoman kode etik bisnis Perseroan.
3. Pedoman Kode Etik Bisnis bisa diakses oleh Insan IPC dengan media digital komunikasi internal dan eksternal Perseroan, seperti E-Office, sistem I-Good, dan *Website* resmi Perseroan.

Pelanggaran

Setiap Insan IPC maupun pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan laporan/pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pedoman Kode Etik Bisnis dan/atau pelanggaran atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan pengaduan (*whistleblowing*).

Yang bersangkutan dapat melaporkan/mengadukan dugaan pelanggaran tersebut melalui surat tertulis, faksimile, SMS, atau *Web Aplikasi Pengaduan (Whistleblowing System)* yang disediakan khusus oleh IPC untuk keperluan tersebut. Sarana/media pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kebutuhan atau keluhan bersifat pribadi.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Pelapor dapat atau tidak mengungkapkan identitasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di Perseroan;
2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor apabila pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran Pedoman Kode Etik Bisnis IPC;

All Work Unit Heads up to 2 (two) grade levels lower below them shall be responsible and provide an example for their subordinates in the implementation of the IPC Code of Conduct.

Dissemination and Internalization

This Code of Conduct is a revision of the previous Code of Conduct to keep up with developments in GCG regulations and best practice. In order to build culture of the Company based on the GCG values and Corporate Culture, the Company is obliged to conduct dissemination and internalization of the values contained in the Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to all IPC Employees on a regular basis.

Dissemination of the Company's Code of Conduct

As of the end of the 2020 fiscal year, IPC has disseminated the Company's Code of Conduct:

1. Dissemination of the code of conduct was carried out to the Board of Directors and IPC employees at the Head Office and all Port Branches.
2. Conducting dissemination via print media and social media for the implementation of the Company's code of conduct guidelines.
3. The Code of Conduct Guidelines can be accessed by IPC personnel using the Company's internal and external digital communication media, such as E-Office, I-Good system, and the Company's official website.

Violation

IPC Employees or stakeholders can submit reports/complaints regarding alleged violations of the Code of Conduct and/or violations of actions that fall within the scope of whistleblowing.

The people concerned can report/complain about the alleged violation via written letter, facsimile, SMS, or the Complaints Web Application (*Whistleblowing System*) provided specifically by IPC for this purpose. The means/media for complaints are not intended as a mechanism to convey personal needs or complaints.

Some important points to note:

1. The whistleblowers may or may not reveal their identity in accordance with the provisions stipulated in the Company;
2. There is no penalty imposed on the whistleblowers if the violation did occur, unless they are also involved in violating the IPC Code of Conduct;



3. Perseroan menjamin kerahasiaan data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor dan menjamin perlindungan bagi pelapor atas:
 - a. Dihilangkannya/ditunda hak-hak/sanksi kepegawaian;
 - b. Diskriminasi, tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan/atau;
 - c. Tindakan-tindakan lainnya sebagai *response* (tindakan yang bersifat pembalasan) dari manajemen dari pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan olehnya.
4. Kerahasiaan pelapor akan dijaga secara ketat, kecuali apabila:
 - a. Yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. Diperlukan dalam kaitannya dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
 - c. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sesuai dengan Pedoman Kode Etik Bisnis ini;
 - d. Diperlukan oleh unit yang membidangi hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di hadapan hukum.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaksanaan Pedoman Kode Etik Bisnis merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan IPC. Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan, maka Insan IPC wajib melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui:
 - a. *Whistleblowing System*;
 - b. Pimpinan Cabang/Unit/Anak Perusahaan;
 - c. Atasan Langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
 - d. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
 - e. Pimpinan Unit Pengelola SDM.
2. Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu kepentingan/keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap Insan IPC dan pihak eksternal Perseroan (Pelanggan, Mitra Kerja, dan Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman Kode Etik Bisnis yang dilakukan oleh oknum Insan IPC dan Perseroan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya.

Whistleblowing Mechanism

1. Implementation of the Code of Conduct and Business Conduct is the commitment and responsibility of all IPC employees. In case of alleged violation or alleged irregularities, IPC employees shall report the alleged violation through:
 - a. Whistleblowing System;
 - b. Branch Manager/Head of Unit/Subsidiary;
 - c. Direct supervisor (one level above the concerned);
 - d. Indirect supervisor (superior from the direct supervisor/ two levels above the concerned);
 - e. Head of Human Capital Management Unit.
2. Reporting of alleged violations must be done in good faith and not a personal interest/complaint over a particular policy in the Company (grievance) or based on bad will/defamation.
3. All IPC Employees and Company external persons (Customers, Business Partners and Communities) may report alleged violations of the Code of Conduct and Business Conduct conducted by IPC Employees. The Company is obliged to follow up reporting which is potentially harmfully material and may damage the Company's image, among others, caused by irregularities, manipulations, corruption and many others.

4. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan. Namun untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri dan penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
5. IPC wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran disampaikan melalui "Komite IPC Bersih", maka mekanismenya mengikuti ketentuan yang diatur dalam SOP Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Sanksi atas Pelanggaran

1. Setiap Insan IPC yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan, dengan melalui mekanisme indisipliner.
2. Sanksi bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Indisipliner.
3. Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner, dan/atau tindakan lainnya, serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/mekanisme indisipliner.
4. Sanksi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Bila mitra usaha atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di seluruh lini bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, IPC menghimbau kepada seluruh Insan IPC maupun *stakeholder* lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan terhadap nilai-nilai etika yang berlaku melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang independen.

4. Submission of reports of alleged violations anonymously (without providing personal data) is allowed. To accelerate and facilitate the follow-up process of reporting alleged violations, the reporter is expected to provide information on personal data and the recipient of the report shall keep the identity of the reporter.
5. IPC is obliged to follow up every report received in accordance with the applicable procedures and mechanisms. In the case of reports of alleged violations submitted through the "IPC Bersih Committee", the mechanism shall follow the provisions stipulated in the SOP for Whistleblowing System.

Sanctions for Violation

1. Any IPC Employees proven to be in violation of this Code of Conduct and Business Conduct will be sanctioned in accordance with the rules and regulations applicable in the Company through disciplinary mechanism.
2. Sanctions for the offending Employee are stipulated by Board of Directors upon receipt of recommendation from the Disciplinary Team.
3. Board of Commissioners and/or Board of Directors will decide on the provision of guidance, disciplinary and/or other measures and prevention to be carried out by direct supervisor in the environment of the respective work unit/disciplinary mechanism;
4. Sanctions for Board of Directors and Board of Commissioners committing the violation are decided by the Shareholder;
5. If the partners or other stakeholders committed the violation, will be subject to the provisions as contained in the contract and other governing provisions. If related to a crime can be forwarded to the authorities.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its Subsidiaries believe in creating a culture of transparency, open and honest communication is one of the efforts that can improve the quality of GCG implementation in all of the Company's business lines. Therefore, IPC appealed to all IPC employees and other stakeholders to submit reports regarding indications of violations committed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its Subsidiaries' personnel against applicable ethical values through the independent Whistleblowing System (WBS).



Di IPC, program WBS disebut sebagai Program IPC Bersih, yang merupakan sebuah program nyata dari manajemen Perseroan maupun Anak Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Dengan melaporkan adanya pelanggaran melalui IPC Bersih, Insan IPC maupun *stakeholder* lainnya telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan meminimalisir terjadinya tindakan curang, pencurian, dan korupsi di dalam lingkungan kerja IPC.

Untuk mendukung pelaksanaan Program IPC Bersih, Perseroan telah menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Surat Keputusan Direksi No. SK01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tanggal 2 Januari 2019. Pedoman WBS tersebut bertujuan untuk:

1. Memandu pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG;
2. Mewujudkan pengelolaan Perseroan yang berintegrasi dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Sebagai pedoman bagi Insan IPC dalam memanfaatkan WBS melalui berbagai saluran yang tersedia;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh Insan IPC dalam bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melengkapi Program IPC Bersih ini dengan:

1. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Program IPC Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independen;
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada *stakeholder* agar memahami kebijakan prosedur *internal control* untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
3. Operator *call center* khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting;
4. Ahli investigasi forensik yang berpengalaman untuk menganalisa laporan;
5. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

JENIS-JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem *Whistleblowing System*, di antaranya:

1. Tindakan Curang (Tidak Adil)
Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok Insan IPC dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan

In IPC, the WBS program is called IPC Bersih Program, which is a concrete program from the Company's management and its subsidiaries to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion. By reporting violations through IPC Bersih, IPC Employees and other stakeholders have helped create a conducive environment and minimize the occurrence of fraud, theft, and corruption in IPC's work environment.

To support the implementation of the IPC Bersih Program, the Company has established PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Whistleblowing System Guidelines in the Decree of the Board of Directors No. SK01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 dated January 2, 2019. The WBS guidelines aim to:

1. Guide business implementation based on GCG principles;
2. Realize an integrated management of the Company and free from all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN);
3. Become a guideline for IPC Employees in utilizing WBS through the various available channels;
4. Become a guideline for all IPC Employees in behaving both as individuals and entities in carrying out their duties and responsibilities professionally.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s management complements the IPC Bersih Program by:

1. Dissemination to increase employee awareness of the IPC Bersih Program and the independent whistleblowing system;
2. Education and training for stakeholders in order to understand procedures of internal control policy to prevent violations;
3. Specialized call center operators with the knowledge to dig up important information;
4. Experienced forensic investigator to analyze reports;
5. A mechanism for reporting violations that can be immediately followed up.

TYPES OF VIOLATION

9 (nine) types of violations that can be reported in the Whistleblowing System include:

1. Fraud (Unfair)
Is an action taken by a person/group of IPC Employee with the intent to benefit themselves or others, using a false name or fake dignity, by deception or a series of lies or

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

2. Korupsi

Tindakan Insan IPC yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

3. Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan IPC, baik disengaja maupun terencana, yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perseroan dan Anak Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

5. Benturan Kepentingan

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan IPC atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan dan Anak Perusahaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perseroan dan Anak Perusahaan.

6. Penyuapan/Gratifikasi

Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128

persuading other people to benefit them in incorrect ways and against the law.

2. Corruption

An improper and illegal action of IPC Employee to enrich themselves or enrich those who have a "special relationship" with them, by abusing their position and power entrusted to them.

3. Theft

An activity/action of taking an item, wholly or partly belonging to another person, with the intention of being illegally owned (KUHP Article 362).

4. Violation of Company Policies and Regulations

An Activity/action carried out by IPC Employee, whether intentional or planned, which is contrary to the internal policies and regulations of the Company and its Subsidiaries. The perpetrator of this violation can be subject to sanctions according to applicable regulations, both internal and external.

5. Conflict of Interest

A situation and condition in which IPC Employee or Shareholders due to their position in the Company and its Subsidiaries have the potential to misuse it, whether intentionally or unintentionally, for their personal interests, resulting in a conflict between personal and/or group and/or family interests with the economic interests of the Company and its Subsidiaries. These conditions may affect the quality of decisions on the tasks assigned to him, so that the performance of the results of these decisions can be detrimental to the Company and its Subsidiaries.

6. Bribery/Gratuities

An action/activity that is carried out deliberately and consciously accepts something or a promise, while a person knows or should be able to suspect that the giving of something or a promise is intended to make him/her to carry out something or not carry out something in his/her duties, which is contrary to his/her authority or obligations concerning the public interest (Article 3 of Law No.11 of 1980 concerning Criminal Acts of Bribery).

Giving in a broad sense, includes giving money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment, and other facilities. (Article 128 of Law No. 20 of



UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

7. Penipuan

Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP 378).

8. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

9. Penggelapan

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan (KUHP Pasal 372).

PERSYARATAN PELAPORAN PELANGGARAN

Laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Termasuk pada kriteria yang telah ditentukan;
2. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan IPC dan Anak Perusahaan;
3. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan;
4. Manajemen IPC akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

Laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:

1. Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen IPC dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan;
2. Uraian pelanggaran yang dilakukan;
3. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);

2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption).

7. Fraud

Activities carried out deliberately and consciously with the intention to benefit oneself or others unlawfully by using a false name or fake dignity, by deception, or a series of lies, persuading others to hand over something to him/her, or to give a debt or to write off a debt (KUHP 378).

8. Extortion

Activities/actions carried out with the intention of unlawfully benefiting oneself or others, forcing a person with violence or threats of violence to give something, which is wholly or partly owned by that person or someone else, or to create a debt or write off a debt (KUHP Article 368).

9. Embezzlement

Actions/activities that are carried out deliberately and consciously against the law in order to own something that is wholly or partly owned by someone else, which is currently under their control, not because of a crime (KUHP Article 372).

VIOLATION REPORTING REQUIREMENTS

Reports of violations can be followed up if they meet the following requirements:

1. Included in the criteria that have been determined;
2. The reports constitute an act of violation involving IPC Employees and its Subsidiaries;
3. The reports have an impact on the performance and reputation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;
4. IPC Management will prioritize the follow-up of reports submitted by the whistleblowers who mentions the identity and equipped with 2 (two) supporting pieces of evidence.

The reports submitted shall contain at least the following:

1. The whistleblower must state his/her identity to obtain protection from IPC management and to facilitate the follow-up of the report in the event that additional data is needed;
2. Description of the violations committed;
3. Data on the reported and other parties involved and their units (if any);

4. Data terkait tempat kejadian dan waktu kejadian;
5. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya (bila ada).

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib.
2. Karyawan yang menjadi Pelapor dan menunjukkan itikad baik akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya.
3. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh petugas yang diberi kewenangan untuk menerima laporan tersebut, tetapi harus disadari bahwa terdapat kesulitan untuk melakukan klarifikasi, namun laporan tersebut tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan WBS dan ditegaskan bahwa para pihak (baik internal maupun eksternal) yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi, termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor.

TATA CARA PELAPORAN

Laporan dapat disampaikan melalui salah satu cara di bawah ini:

1. Telepon : +62 21 2782 2345
2. Faksimile : +62 21 2782 3456
3. SMS & *WhatsApp* : +62 811 933 2345
4. *Email* : ipcbersih@whistleblowing.link
5. *Website* IPC Bersih : www.ipcbersih.whistleblowing.link
6. Surat melalui PO BOX yang ditetapkan:
IPC Bersih
PO Box 1074
JKS 12010

LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TAHUN 2020

Laporan WBS Berdasarkan Saluran WBS

Pada 1 Januari sampai 31 Desember 2020, laporan yang telah masuk melalui IPC Bersih (termasuk lanjutan dari laporan sebelumnya) sebanyak 48 laporan, dengan uraian sebagai berikut:

4. Data related to the scene and time of the incident;
5. Supporting documents and/or other evidence (if any).

PRIVACY AND PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

1. The Company guarantees privacy of the whistleblower's identity, unless such disclosure is required in connection with a report or investigation conducted by the authorities.
2. Employees who become Whistleblowers and show good faith will be protected from acts of dismissal, demotion/promotion, harassment or discrimination in all forms and adverse records in their personal data files.
3. Anonymous submission of reports will still be accepted by the officer who is authorized to receive the report, but it must be recognized that there are difficulties in clarifying, however the report will still be followed up in accordance with existing procedures.
4. The Company determines sanctions for the misuse of WBS and affirms that parties (both internal and external) who submit reports in the form of slander or false reports will be given sanctions, including legal proceedings and do not receive both privacy guarantees and protection for Whistleblower.

REPORTING PROCEDURE

Reports can be submitted in one of the following channels:

1. Telephone: +62 21 2782 2345
2. Facsimile: +62 21 2782 3456
3. SMS & *WhatsApp*: +62 811 933 2345
4. Email: ipcbersih@whistleblowing.link
5. IPC Bersih website: www.ipcbersih.whistleblowing.link
6. Mail via the designated PO BOX:
IPC Clean
PO Box 1074
JKS 12010

WHISTLEBLOWING SYSTEM REPORTS IN 2020

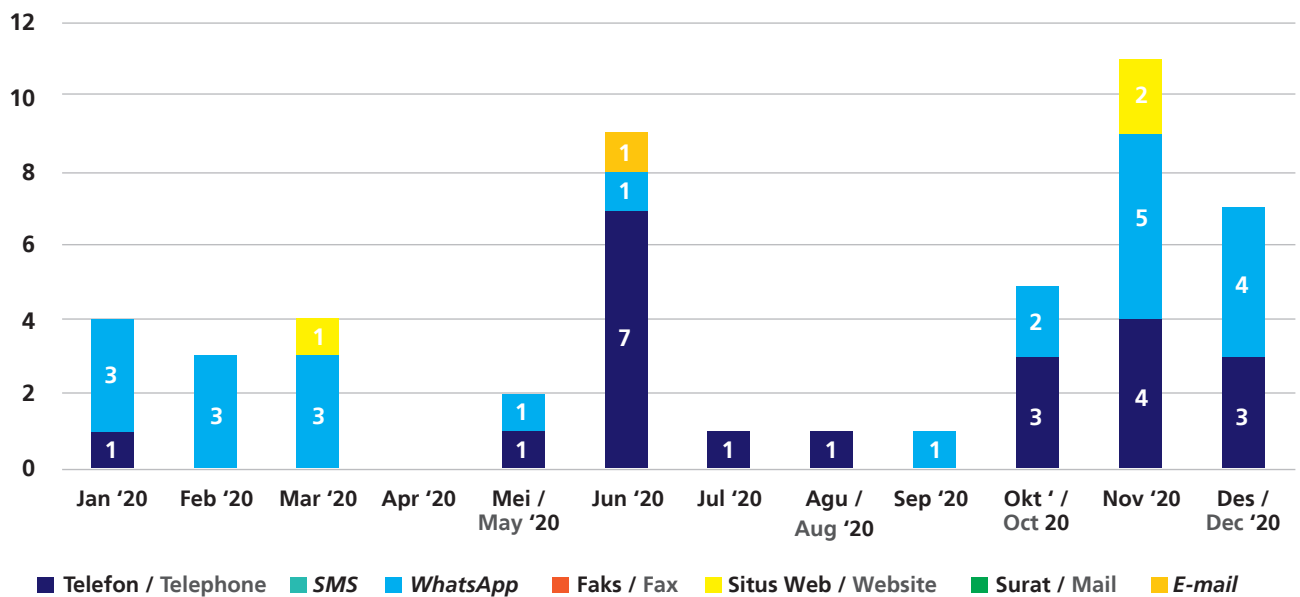
WBS Reports by WBS Channels

From January 1 until December 31, 2020, number of reports submitted to IPC Bersih (including continuation of the previous reports) was 48 reports with the following description:



Laporan WBS Tahun 2020 Berdasarkan Saluran WBS

WBS Reports in 2020 by WBS Channel



Laporan yang diterima berdasarkan jenis kontak disusun lebih terperinci untuk menginformasikan seluruh laporan yang meliputi indikasi laporan pelanggaran baru, kelanjutan dari laporan sebelumnya (berupa tambahan informasi, bukti atau data pendukung serta status laporan), saluran yang terputus, gangguan pada saluran, laporan di luar cakupan dan laporan yang menanyakan perihal layanan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Reports received by type of contact are compiled in more detail to inform all reports including indications of new violation reports, continuation of previous reports (in the form of additional information, supporting evidence or data and report status), disconnected channels, channel errors, out-of-scope reports and reports asking about PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) services.

Laporan WBS Berdasarkan Kontak dari Pelapor dan Kategori Indikasi Pelanggaran

Berdasarkan kontak dari pelapor, laporan WBS yang diterima pada tahun 2020 terdiri dari:

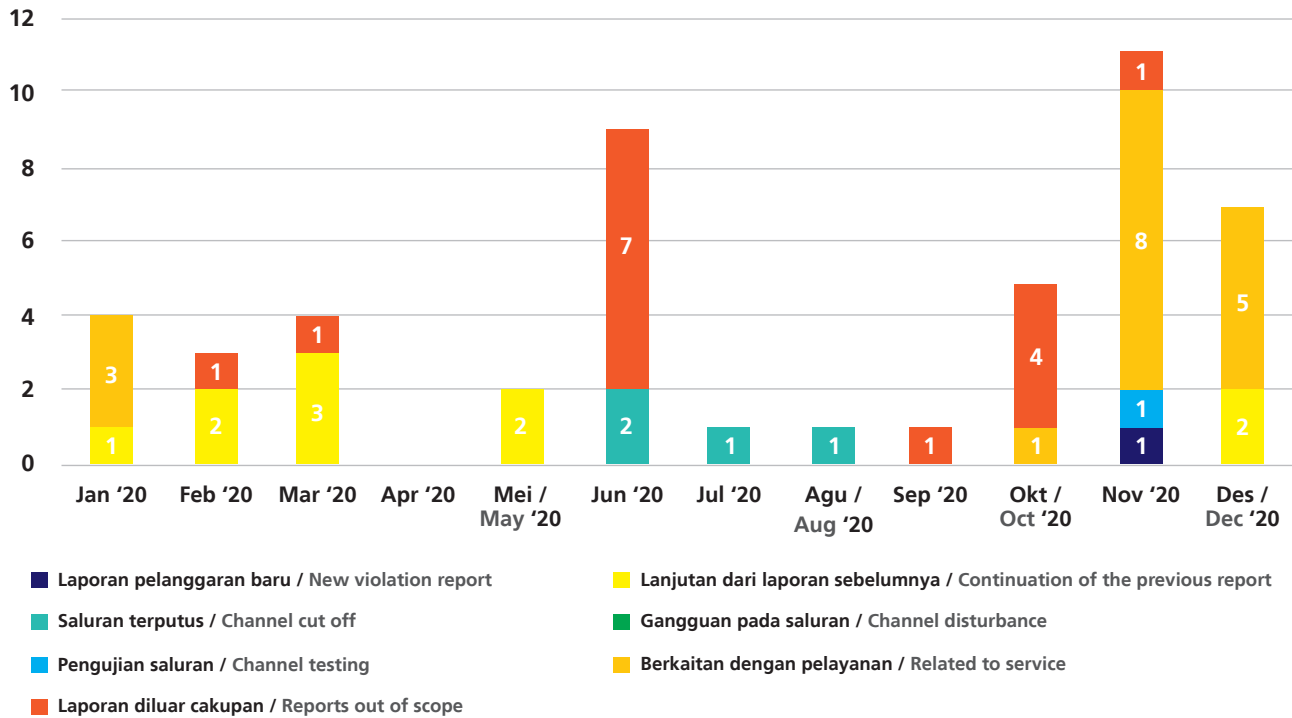
1. Laporan yang menanyakan mengenai pelayanan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebanyak 19 laporan;
2. Laporan di luar cakupan kategori sebanyak 15 laporan;
3. Saluran terputus dari pihak pelapor sebanyak 4 laporan;
4. Laporan yang terkait dengan indikasi kategori Pelanggaran Baru sebanyak 1 laporan;
5. Pengujian saluran dari Bagian Pengadaan sebanyak 1 laporan;
6. Lanjutan dari laporan indikasi pelanggaran sebelumnya sebanyak 8 laporan.

WBS Reports by Contact of Whistleblowers and Indication of Violation Category

Based on the contact of the whistleblowers, WBS reports received in 2020 consist of:

1. 19 reports asking about PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) services;
2. 15 out-of-scope reports;
3. 4 reports with disconnected channels from the whistleblowers;
4. 1 report related to the indication of New Violation category;
5. 1 report of channel testing by the Procurement Division;
6. 8 reports as the continuation of previous violation indication reports.

Laporan WBS Tahun 2020 Berdasarkan Kontak dari Pelapor WBS Reports in 2020 by Contact of Whistleblowers

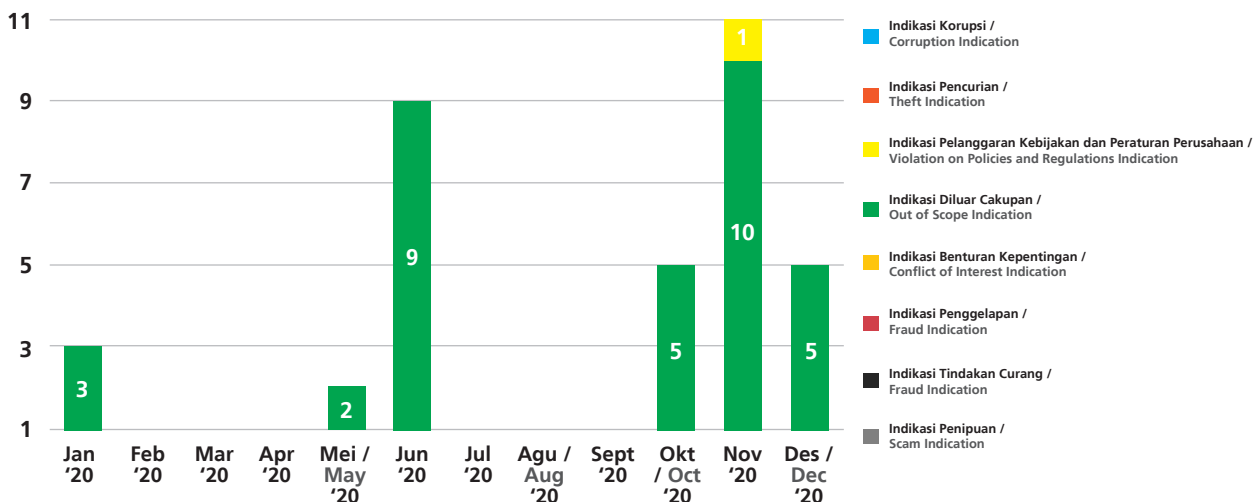


Dengan adanya lanjutan dari laporan sebelumnya sebanyak 8 (delapan) laporan, maka total laporan baru yang diterima oleh IPC Bersih pada tahun 2020 sebesar 40 (empat puluh) laporan. Dari 40 (empat puluh) laporan tersebut, 1 (satu) laporan diantaranya termasuk dalam Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan, sedangkan 39 (tiga puluh sembilan) laporan lainnya merupakan Laporan di Luar Cakupan. Untuk laporan yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) laporan.

With the 8 (eight) reports as continuation of the previous reports, the number of new reports received by IPC Bersih in 2020 was 40 (forty) reports. Of the 40 (forty) reports, 1 (one) of which was included in the Indication of Violation of Company Policies and Regulations, while the other 39 (thirty-nine) were Out-of-Scope Reports. Reports that have been followed-up throughout 2020 amounted to 3 (three) reports.

Laporan Baru WBS Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Indikasi Pelanggaran WBS New Reports in 2020 by Indication of Violation Categories

Grafik Laporan Berdasarkan Kategori Indikasi Pelanggaran / Chart of Reports Based on Indication of Violation Category





Laporan WBS Berdasarkan Identitas Pelapor

Jika ditinjau dari identitas pelapor, laporan WBS yang masuk di tahun 2020 dilaporkan oleh:

1. Pelapor Anonim sebanyak 6 laporan;
2. Pelapor yang diketahui identitasnya (tidak anonim) sebanyak 3 laporan;
3. Pelapor dari karyawan sebanyak 1 laporan;
4. Pelapor bukan dari karyawan sebanyak 17 laporan;
5. Pelapor yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 21 laporan.

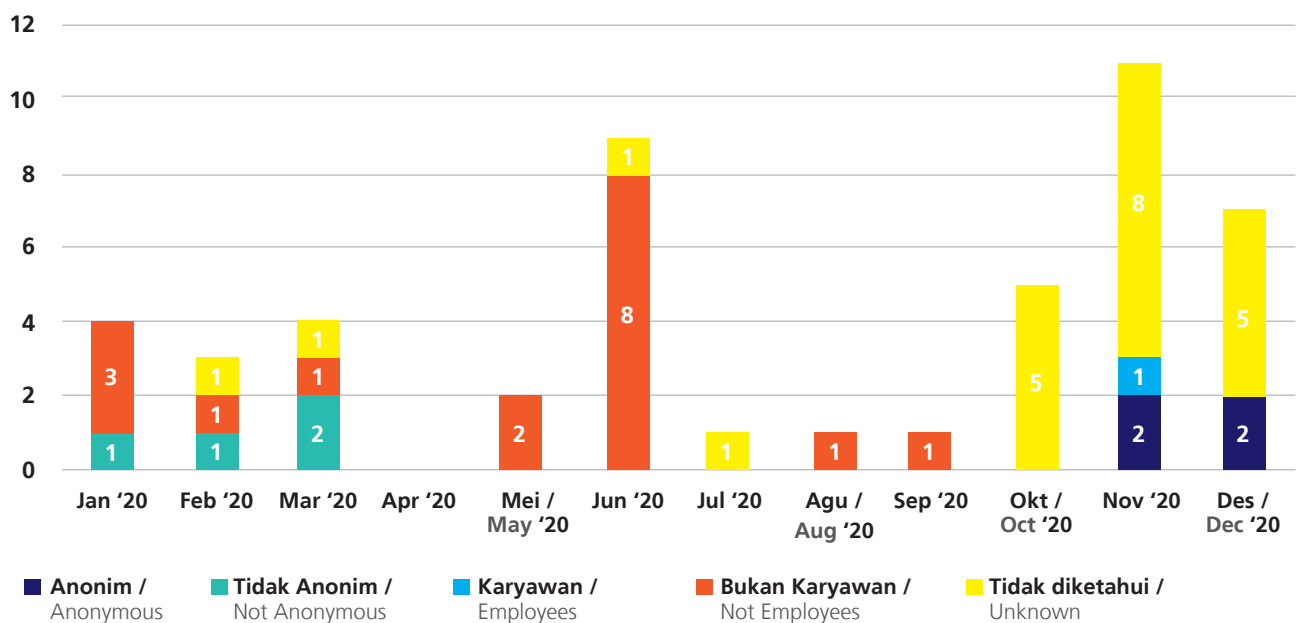
WBS Reports by the Identity of Whistleblowers

If viewed from the identity of whistleblowers, WBS reports submitted in 2020 were reported by:

1. Anonymous whistleblowers, totaling 6 reports;
2. Not anonymous whistleblowers, totaling 3 reports;
3. Employee whistleblowers, totaling 1 report;
4. Non-employee whistleblowers, totaling 17 reports;
5. Unknown identity whistleblowers, totaling 21 reports.

Laporan Baru WBS Tahun 2020 Berdasarkan Identitas Pelapor

New WBS Reports in 2020 by Whistleblower Identity



Pengujian Saluran IPC Bersih

Pengujian saluran IPC Bersih biasanya dilakukan oleh dua penguji dari tim IPC Bersih dan satu penerima dari pihak Konsultan Eksternal Independen. Kemudian, hasil uji dicatat dalam tabel yang menginformasikan waktu, keterangan, tindakan yang diambil, serta nama penguji dan penerima. Pengujian pada semester kedua dilakukan tidak secara langsung karena pandemi Covid-19, sehingga pengujian dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Saluran yang dilakukan pengujian secara rutin yaitu *WhatsApp*, *SMS*, *email*, telepon, faksimile dan *Website*. Penerima akan membuat catatan yang menginformasikan waktu, keterangan, hasil pengujian, dan hal yang harus diperbaiki (jika terjadi gangguan).

IPC Bersih Channel Testing

Testing of IPC Bersih channels is usually carried out by two testers from the IPC Bersih team and one receiver from Independent External Consultant. Then, the test results are recorded in a table that informs the time, description, actions taken, and the names of testers and recipients. Testing in the second semester was carried out indirectly due to the Covid-19 pandemic. It was carried out online through Zoom application. Channels that are tested regularly are *WhatsApp*, *SMS*, *email*, telephone, facsimile and *Website*. The recipient will make a note informing the time, description, test results, and matters that must be repaired (in case of error).

Pengujian saluran penerimaan *whistleblowing system* dilakukan dengan simulasi pelaporan melalui saluran-saluran yang tersedia. Pihak penerima juga menyimulasikan

Testing of the whistleblowing system channels is carried out by simulating reporting through the available channels. The receiving party also simulates receiving the report. If

penerimaan laporan tersebut. Apabila pelaporan dapat dilakukan dan penerima dapat menerima laporan, maka saluran laporan tersebut dapat dianggap aktif (normal tidak mengalami gangguan).

Sepanjang tahun 2020, pengujian saluran IPC Bersih telah dilakukan setiap satu bulan sekali, dengan hasil bahwa seluruh saluran IPC Bersih, yaitu *WhatsApp*, *SMS*, *email*, telepon, faksimile dan *Website* IPC Bersih, berstatus aktif dan berfungsi dengan baik.

the reporting can be done and the recipient can receive the report, then the report channel can be considered active (normal without error).

Throughout 2020, the IPC Bersih channel testing has been carried out once a month, with the results that all IPC Bersih channels, namely *WhatsApp*, *SMS*, *email*, telephone, facsimile and IPC Bersih Website, are active and functioning properly.

Hasil Pengujian Saluran IPC Bersih Tahun 2020

Testing Results of IPC Bersih Channels in 2020

Saluran / Channel	Email	SMS	WhatsApp	Telepon / Telephone	Situs Online / Online Site	Faksimili / Facsimile
Januari / January	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Februari / February	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Maret / March	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
April / April	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Mei / May	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Juni / June	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Juli / July	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Agustus / August	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
September / September	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Oktober / October	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
November / November	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active
Desember / December	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active	Aktif / Active

ASESMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mengetahui efektivitas dan mengukur tingkat implementasi praktik GCG di lingkup usaha, IPC setiap tahunnya melakukan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan Perseroan dalam melakukan perbaikan praktik GCG di Perseroan secara berkelanjutan. Prosedur pelaksanaan penilaian GCG IPC mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

To determine the effectiveness and measure the level of GCG practices implementation in the scope of business, IPC annually conducts GCG assessments. The implementation of this GCG assessment results in recommendations that can be used as a reference for the Company in continuously improving GCG practices in the Company. The procedure for the implementation of GCG assessment of IPC refers to several provisions, namely:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
3. Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/MMBU/2002 dated August 1, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;



4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG;
6. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/15/6/1/KPP/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
7. Praktik *best practice* yang berkembang. Perseroan juga telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait perencanaan dan pelaksanaan penilaian GCG, yaitu SOP Perencanaan Penilaian GCG, SOP Pelaksanaan Penilaian GCG, dan SOP Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan GCG.

PELAKSANAAN ASESMEN GCG TAHUN BUKU 2020

Kriteria Asesmen GCG

Asesmen GCG untuk tahun buku 2020 dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

Pihak yang Melakukan Asesmen GCG

Asesmen GCG tahun buku 2020 dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), dengan didampingi oleh pihak eksternal.

Skor Asesmen GCG Tahun Buku 2020

Dari pelaksanaan asesmen GCG untuk tahun buku 2020, diperoleh hasil capaian sebesar 98,73 dari skor maksimal 100,00 dengan kategori "Sangat Baik". Adapun capaian skor untuk setiap aspek pengujian asesmen GCG diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF GCG ASSESSMENT FOR FISCAL YEAR 2020

GCG Assessment Criteria

GCG assessment for the 2020 fiscal year is carried out using the assessment criteria based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The indicators used in the GCG assessment include:

1. Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner;
2. Shareholders and GMS/Investors;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency; and
6. Other aspects.

Parties Conducting GCG Assessment

GCG Assessment of fiscal year 2020 is conducted through self-assessment with assistance from external party.

GCG Assessment Score for 2020 Fiscal Year

The GCG assessment for 2020 fiscal year produced a score of 98.73 out of 100.00 under category "Excellent". The score achievement for each GCG assessment aspect is described in the following table:

Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2020

GCG Assessment Result for 2020 Fiscal Year

Aspek Pengujian/Indikator Parameter / Assessment Aspect/Parameter Indicator	Bobot / Value	Capaian Tahun 2020 / 2020 Achievement		Penjelasan / Description
		Skor / Score	% Capaian / % Achievement	
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	7,00	100,00	Sangat Baik / Excellent
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owner	9,00	8,57	95,27	Sangat Baik / Excellent
III Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35,00	34,50	98,57	Sangat Baik / Excellent
IV Direksi / Board of Directors	35,00	34,66	99,02	Sangat Baik / Excellent
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,00	9,00	100,00	Sangat Baik / Excellent
VI Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik / Excellent
Skor Keseluruhan / Overall Score	100,00	98,73	98,73	Sangat Baik / Excellent
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG / GCG Implementation Quality Classification				Sangat Baik / Excellent

Hasil Rekomendasi Asesmen GCG Tahun Buku 2020

Dari pelaksanaan asesmen GCG untuk tahun buku 2020, diperoleh hasil rekomendasi atau *Area of Improvement* (AoI) sebanyak 13 (tiga belas) AoI yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan praktik GCG di Perseroan ke depannya. Adapun hasil rekomendasi yang diperoleh dari asesmen GCG tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

GCG Assessment Recommendation Results for 2020 Fiscal Year

The GCG assessment for 2020 fiscal year produced recommendation results amounting to 13 (thirteen) Areas of Improvement (AoI) for the improvement of GCG practices at the Company going forward. The recommendation results produced from GCG assessment for 2020 fiscal year are as follows:

Hasil Rekomendasi dari Asesmen GCG Tahun Buku 2020

Recommendation Results from GCG Assessment for 2020 Fiscal Year

No	Hasil Rekomendasi (AoI) / Recommendation Results (AoI)
I. Pemegang Saham / Shareholders	
1.	Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas didukung dengan Berita Acara penilaian. / The assessment covers all criteria of assessment of the Board of Commissioners/Supervisory Board as stipulated in laws concerning SOEs (assessment of integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to management function, and adequate knowledge in the line of business of the company). The assessment process of candidates for the Board of Commissioners/Supervisory Board is supported by Minutes of the assessment.
2.	Penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / Appointment of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board by the GMS/Capital Owner shall take place no later than 30 (thirty) days since the end of term of service.
3.	RUPS mengesahkan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. / The GMS validates RJPP on time no, no later than 60 (sixty) days after the receipt of the complete RJPP draft or before the start of the next RJPP period.
4.	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu. / Validation of Annual Report and approval of Financial Statements shall be given on time.



No	Hasil Rekomendasi (Aol) / Recommendation Results (Aol)
II. Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
5.	Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual. / Response to RKAP draft by Board of Commissioners/Supervisory Board shall be given within a period as regulated in the Board Manual.
6.	Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memuat realisasi KPI masing-masing Direksi / Submit a Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners containing the realization of the KPI of each Board of Directors
7.	Menyusun dan melengkapi Risalah rapat Dewan Komisaris dengan memuat evaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris. / Prepare and complete the Minutes of the Board of Commissioners' meeting by containing an evaluation of the performance achievements of each Member of the Board of Commissioners.
8.	Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / The performance assessment of the Board of Commissioners/Supervisory Board is reported in the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board Report.
9.	Program kerja tahunan Komite Lainnya paling sedikit sesuai dengan piagam Komite lainnya dan mencakup self-assessment kinerja Komite Lainnya. / The annual work program of the Other Committees is at least in accordance with the charter of the other Committees and includes a self-assessment of the performance of the Other Committees.
III. Direksi / Board of Directors	
10.	Mengesahkan Draft IT Master Plan 2016-2020. / Approve the 2016-2020 IT Master Plan Draft.
11.	Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP. / Implement partnership programs with small businesses as planned in the RKAP.
12.	Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor). / The Head of the Internal Audit Function possesses certified expertise in the internal auditor profession by obtaining the right professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).
13.	Melaksanakan RUPS pengesahan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. / Implement the GMS to approve the RJPP in a timely manner, which is no later than 60 (sixty) days after the receipt of the complete RJPP draft or before the next RJPP period.

Untuk aspek pengujian Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya, tidak terdapat hasil rekomendasi atau *Area of Improvement*.

Perbandingan Capaian Skor Asesmen GCG dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, skor asesmen GCG yang menggunakan kriteria dari Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut menunjukkan upaya Perseroan untuk senantiasa melakukan perbaikan praktik GCG secara berkelanjutan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

There are no recommendations or Areas of Improvement for evaluation aspects of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects.

Comparison of GCG Assessment Score Achievements in the Last 5 (Five) Years

In the last 5 (five) years, the GCG assessment score refers to the criteria from the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs shows an improvement. This shows the Company's efforts to continuously improve GCG practices in order to provide added value for shareholders and stakeholders.

Adapun capaian skor asesmen GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini:

The achievements of GCG assessment scores in the last 5 (five) years are presented in the following graph:

Grafik Hasil Asesmen GCG dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Graph of GCG Assessment Results in the Last 5 (Five) Years

Tahun Buku Asesmen GCG / GCG Assessment Fiscal Year	Capaian Skor Asesmen GCG / GCG Assessment Score Achievements	Kategori / Category	Asesor GCG / GCG Assessor
2016	93,32	Sangat Baik / Excellent	Lembaga eksternal (PT Multi Utama Indojasa) / External agency (PT Multi Utama Indojasa)
2017	96,37		
2018	98,30		
2019	98,55		
2020	98,73		

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Asesmen GCG Tahun Buku 2019

Selain melakukan asesmen GCG, pada tahun 2020 Perseroan juga menindaklanjuti hasil rekomendasi atau *Area of Improvement (AoI)* dari hasil asesmen GCG tahun buku 2019 sebanyak 23 AoI, dengan uraian sebagai berikut:

Follow-up on Recommendations of GCG Assessment for 2019 Fiscal Year

In addition to conducting a GCG assessment, in 2020 the Company also followed up on the results of recommendations or Areas of Improvement (AoI) from the results of the GCG assessment for the 2019 fiscal year as many as 23 AoI, with the following description:

Hasil Rekomendasi dari Asesmen GCG Tahun Buku 2019 dan Status Tindak Lanjutnya di Tahun 2020

Results of Recommendation of GCG Assessment for 2019 Fiscal Year and the Status of Follow-up in 2020

No.	Hasil Rekomendasi (AoI) / Area of Improvement (AoI)	Status Tindak Lanjut / Follow-up Status
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation		
1.	Menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. / Submit LHKPN in accordance with applicable regulations in a timely manner.	Telah Diterapkan / Implemented
2.	Menyampaikan pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. / Submit periodic reports on progress in fulfilling the obligation to submit LHKPN to the KPK.	Telah Diterapkan / Implemented
II. Pemegang Saham / Shareholders		
3.	Pemegang Saham menetapkan anggota Direksi yang definitive oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / Shareholders determine the definitive members of the Board of Directors by the GMS no later than 30 (thirty) days after the term of office ends.	Telah Diterapkan / Implemented
4.	Pemegang Saham menetapkan pemberhentian anggota Dewan Komisaris melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS. / Shareholders determine the dismissal of members of the Board of Commissioners through the Decree of the Minister of SOEs as the GMS.	Telah Diterapkan / Implemented
5.	RUPS mengesahkan rancangan RJPP Perusahaan 2015-2019 sesuai ketentuan yang berlaku. / The GMS approved the 2015-2019 Company RJPP draft in accordance with applicable regulations.	Telah Diterapkan / Implemented
6.	RUPS mengesahkan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. / The GMS validates the RJPP in a timely manner, which is no later than 60 (sixty) days after the receipt of the complete RJPP draft or before the next RJPP period runs.	On Progress
7.	Pemegang Saham memberikan penilaian kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi dalam Risalah RUPS. / Shareholders provide individual performance assessments of members of the Board of Directors based on the performance report of the Board of Directors by considering the response of the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors in the Minutes of the GMS.	Telah Diterapkan / Implemented
8.	Pemegang Saham menyampaikan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara spesifik dalam Risalah RUPS. / Shareholders submit a specific performance assessment of the Board of Commissioners in the Minutes of the GMS.	Telah Diterapkan / Implemented



No.	Hasil Rekomendasi (Aol) / Area of Improvement (Aol)	Status Tindak Lanjut / Follow-up Status
9.	Pemegang Saham menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yaitu mengesahkan rancangan maupun revisi RJPP, dan melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu, serta melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara spesifik dalam RUPS. / Shareholders follow-up on areas of improvement resulting from the assessment of the implementation of good corporate governance in the company, namely validating the draft and revision of the RJPP, and assessing the performance of the Board of Directors individually, as well as evaluating the performance of the Board of Commissioners specifically at the GMS.	Telah Diterapkan / Implemented
III. Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
10.	Program Kerja Dewan Komisaris memuat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. / The Board of Commissioners' Work Program contains a discussion plan regarding policies and implementation of the management of subsidiaries/joint ventures.	Telah Diterapkan / Implemented
11.	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing dengan melibatkan perangkat Dewan Komisaris. / Assessing the performance of the Board of Directors based on a review of the criteria, targets, and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement by involving the Board of Commissioners.	Telah Diterapkan / Implemented
12.	Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memuat realisasi KPI masing-masing Direksi. / Submit a Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners containing the realization of KPI for each Board of Directors.	On Progress
13.	Menyusun dan melengkapi Risalah rapat Dewan Komisaris dengan memuat evaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris. / Prepare and complete the Minutes of the Board of Commissioners' meeting by containing an evaluation of the performance achievements of each Member of the Board of Commissioners.	Telah Diterapkan / Implemented
14.	<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dala rapat Dewan Komisaris. / Documenting the power of attorney made by members of the Board of Commissioners who are unable to attend the meeting of the Board of Commissioners. Mendorong kehadiran Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. / Encouraging the presence of the Board of Commissioners to attend Board of Commissioners meetings. 	Telah Diterapkan / Implemented
15.	Menyusun dan menetapkan Program Kerja Komite yang memuat <i>self-assessment</i> kinerja Komite. / Develop and determine the Committee's Work Program which contains a self-assessment of the Committee's performance.	Telah Diterapkan / Implemented
IV. Direksi / Board of Directors		
16.	Memenuhi seluruh target kinerja Direksi secara kolegal dalam KPI Perusahaan Tahunan. / Meet all performance targets of the Board of Directors collegially in the Annual Corporate KPI.	Telah Diterapkan / Implemented
17.	Mengesahkan <i>Draft IT Master Plan</i> 2016-2020. / Validate Draft IT Master Plan 2016-2020.	On Progress
18.	Mengesahkan <i>Draft Standar Mutu Layanan Pelabuhan</i> . / Validate the Draft of Port Service Quality Standards.	Telah Diterapkan / Implemented
19.	Memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati dalam KPI Perusahaan setiap tahun. / Fulfill the expectations of Shareholders through the achievement of targets that have been agreed in the Company's KPI every year.	Telah Diterapkan / Implemented
20.	Meningkatkan Kinerja Perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya. / Improve the Company's Performance (according to the established KPI) from previous years.	Telah Diterapkan / Implemented
21.	Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP. / Implement partnership programs with small businesses as planned in the RKAP.	On Progress
22.	Meningkatkan kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi maupun pada rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. / Increase the attendance of members of the Board of Directors at Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners.	Telah Diterapkan / Implemented
23.	Melaksanakan RUPS pengesahan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. / Carry out the GMS to approve the RJPP in a timely manner, which is no later than 60 (sixty) days after the receipt of the complete RJPP draft or before the next RJPP period runs.	On Progress

06



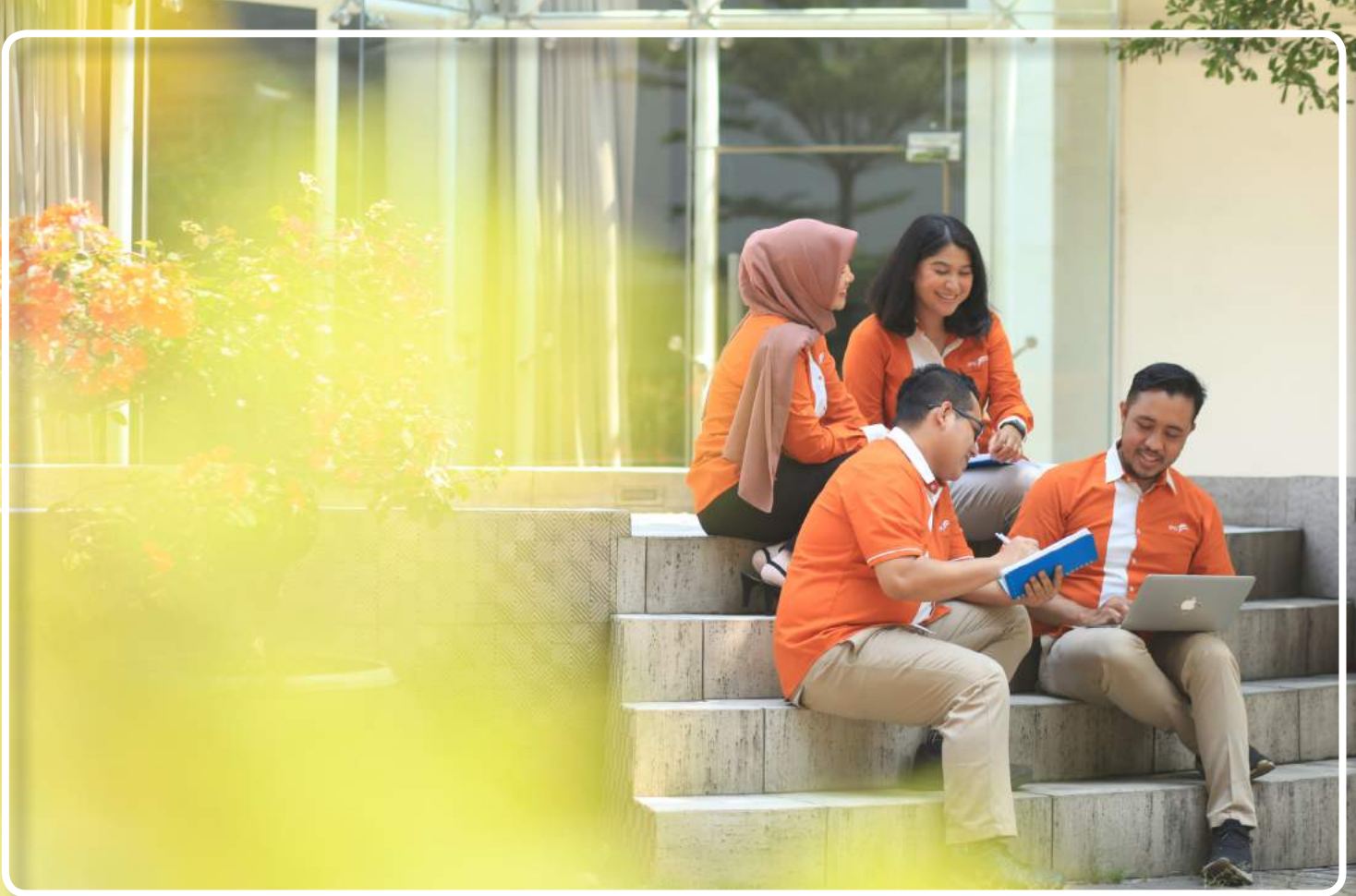
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



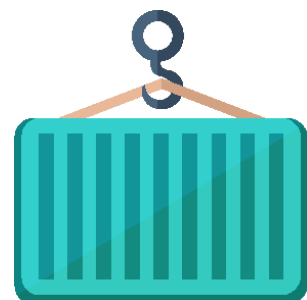
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



IPC menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan usaha saat ini tidak hanya ditentukan dari perolehan profitabilitas semata, tetapi juga sejauh mana kontribusi Perseroan dalam mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

IPC is fully aware that business success currently is not only determined by profitability, but also the extent to which the Company contributes in encouraging the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).





TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

IPC menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan usaha saat ini tidak hanya ditentukan dari perolehan profitabilitas semata, tetapi juga sejauh mana kontribusi Perseroan dalam mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berlandaskan pada konsep *three bottom line* dengan menekankan keseimbangan antara 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu *People, Profit, dan Planet*.

IPC juga memahami adanya peran penting dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Perseroan melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui harapan, aspirasi, dan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang berguna dalam proses perumusan strategi dan program kerja yang dapat menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para *stakeholder*.

METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Guna mendorong tercapainya keberlanjutan bisnis Perseroan yang berorientasi pada nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan, IPC terus berupaya untuk melaksanakan kinerja keberlanjutan sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif terhadap para pemangku kepentingan dalam proses bisnis Perseroan.

Sebelum merumuskan program-program Tanggung Jawab Sosial dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, Perseroan terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap dampak ekonomi,

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

COMMITMENT TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

IPC is fully aware that business success currently is not only determined by profitability, but also the extent to which the Company contributes in encouraging the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). To that end, the Company is fully committed to carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) program based on the triple bottom line concept which emphasizes the balance between 3 (three) important aspects of sustainable development, namely *People, Profit, and Planet*.

IPC also understands the important role of stakeholders in the implementation of the Corporate Social Responsibility program. Therefore, the Company strives to maintain a harmonious and mutually beneficial relationship with all internal and external stakeholders of the Company through stakeholder engagement activities. This is carried out to learn the hopes, aspirations, and input of each stakeholder which will be useful in the formulation of strategies and work programs that can create added value for stakeholders.

METHODS AND SCOPE OF DUE DILIGENCE ON THE ECONOMIC, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

To support the Company's business continuity which is oriented towards the values and goals of sustainable development, IPC strives to deliver sustainability performance as part of the Corporate Social Responsibility Program which focuses on 3 (three) important aspects, namely economy, social affairs, and environment, in order to create positive impacts and reduce negative impacts to the stakeholders in the Company's business processes.

Before formulating Social Responsibility programs with the aim of giving added value to stakeholders, the Company first conducts a comprehensive study of the economic, environmental and social impacts arising from its business

lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis secara komprehensif. Adapun metode dan lingkup *due diligence* dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:

activities. The methods and scope of due diligence of Corporate Social Responsibility activities include:

Metode dan Lingkup *Due Dillgence* Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Method and Scope of Corporate Social Responsibility Program Due Diligence

Lingkup <i>Due Diligence</i> / Due Diligence Scope	Metode <i>Due Dillgence</i> / Due Diligence Method
Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi / Mitigation of Economic Impacts	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); - Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan; / Company Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Report; - Laporan <i>Whistleblowing System</i>, Laporan Pelaporan Gratifikasi; / Whistleblowing System Report, Gratification Report; - Hasil audit ISO 37001:2016; / ISO 37001:2016 Audit Result; - Survei Kepuasan Penyedia. / Supplier Satisfaction Survey.
Mitigasi terhadap Dampak Lingkungan / Mitigation of Environmental Impacts	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); - Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan; / Company Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Report; - Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); / Environmental Impact Analysis Document; - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); / Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts; - Hasil <i>Green Port Assessment</i>. / Green Port Assessment Result.
Mitigasi terhadap Dampak Sosial / Mitigation of Social Impacts	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); - Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan; / Company Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Report; - Survei Kepuasan dan <i>Engagement</i> Pekerja; / Employee Satisfaction and Engagement Survey; - Survei Kepuasan Pelanggan; / Customer Satisfaction Survey; - Laporan Pengaduan Pelanggan; / Customer Complaint Report;

PEMANGKU KEPENTINGAN PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Perseroan telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan operasi Perseroan atau yang tindakannya diperkirakan dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis, dengan uraian sebagai berikut:

IMPORTANT STAKEHOLDERS AFFECTED BY OR AFFECTING THE IMPACT OF THE COMPANY'S OPERATIONS

The Company has identified stakeholders who are affected by the Company's operations or whose actions are estimated to affect the Company in carrying out business activities, with the following descriptions:

Pemetaan Pemangku Kepentingan IPC

IPC Stakeholder Mapping

Pemangku Kepentingan / Stakeholder	Dasar Identifikasi / Identification Basis	Potensi Dampak / Impact Potential
Pemegang Saham (Kementerian BUMN) / Shareholder (Ministry of SOEs)	Pemangku kepentingan yang berperan dalam mengendalikan Perseroan / Stakeholder that controls the Company.	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan pendapatan dan laba / Revenues and profit • Strategi bisnis / Business strategy • Transparansi tata kelola dan manajemen Perseroan / Transparency of corporate governance and management • Pembagian dividen / Dividend payment • Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional / Contribution to national development



Pemangku Kepentingan / Stakeholder	Dasar Identifikasi / Identification Basis	Potensi Dampak / Impact Potential
Regulator/Pemerintah / Regulator/Government	Pengawas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku / Supervisor of the Company's compliance with prevailing regulations	Kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang berlaku, antara lain terkait: / Compliance with applicable requirements concerning: <ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian pelabuhan / Port operations • <i>Dwelling time</i>, sistem integrasi nasional logistik / Dwelling time, national logistics integration system • Isu lingkungan (<i>green port</i>) / Environmental issues (green port) • Keamanan fasilitas kantor dan pelabuhan / Office and port facilities safety • Ketaatan terhadap hukum dan HAM / Compliance with laws and human rights • Ketenagakerjaan / Employment • Ekspor impor / Export and import • Pelaksanaan pengadaan, pajak, standar akuntansi keuangan, dan bea cukai / Implementation of procurement, taxes, financial accounting standards, and customs and excise • Operasi dan karantina / Operations and quarantine
Insan IPC / IPC Personnel	Aset utama yang mampu menggerakkan roda operasional Perseroan / Main asset that runs the Company's operations	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja / Fulfillment of basic labor rights • Program peningkatan kompetensi dan pengembangan karier yang setara / Equal competency and career development programs • Jaminan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja / Safety and health assurance at workplace
Rekanan/Mitra Kerja / Business Partners	Penggerak rantai pasokan Perseroan / Enabler of the Company's supply chain	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan yang obyektif / Objective procurement process • Kerja sama saling menguntungkan, transparan dan adil / Mutually beneficial, transparent, and fair cooperation
Masyarakat/Komunitas / Community	Pemangku kepentingan yang dapat terkena maupun memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan / Stakeholder that may be affected by or give significant impacts to the Company's business continuity	Optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) lainnya / Optimization of Partnership and Community Development Program (PKBL) and other Corporate Social Responsibility (CSR) programs
Pelanggan / Customers	Pengguna layanan Perseroan yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis / Users of the Company's services that support business growth	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas layanan / Service quality • Hubungan komersial / Commercial relations • <i>Customer retention</i>
Kreditur / Creditors	Pemangku kepentingan yang mendukung finansial Perseroan / Stakeholders that support the Company's finance	Pembayaran kredit/pinjaman dengan tepat waktu / Timely credit/loan payments
Media	Lembaga independen yang menyalurkan informasi Perseroan kepada public / Independent institutions that deliver the Company's information to the public	Keterbukaan informasi Perseroan secara akurat dan terkini / Transparency of accurate and up-to-date Company information

ISU-ISU PENTING DI BIDANG EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Dalam menentukan isu penting di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dampak dari pelaksanaan kegiatan operasional, Perseroan melakukan pemetaan terhadap isu-isu penting baik dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan uraian sebagai berikut:

MATERIAL ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ISSUES RELATING TO COMPANY OPERATIONS

In determining material economic, environmental and social issues related to the impact of operational activities, the Company maps material issues in social, economic and environmental aspects, with the following descriptions:

Isu-isu Penting yang Berkaitan dengan Kegiatan Operasional IPC

Material Issues Relating to IPC Operations

Isu Penting / Material Issue	Alasan Isu Ini Penting / Reason of Materiality of the Issue
Anti-Korupsi / Anti-Corruption	Menggambarkan komitmen IPC dalam membangun budaya korporasi yang bebas dari tindakan korupsi, gratifikasi, dan <i>fraud</i> . / Describes IPC's commitment to building a corporate culture that is free from acts of corruption, gratification, and fraud.
Proses Pengadaan yang Transparan / Transparent Procurement Process	Menggambarkan komitmen IPC dalam mengelola rantai pasokan yang selaras dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel. / Describes IPC's commitment in managing supply chains in line with procurement principles, namely efficient, effective, competitive, transparent, just and fair, open, and accountable.
Efisiensi Energi / Energy Efficiency	Menggambarkan komitmen IPC dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui program pengelolaan dan efisiensi penggunaan energi. / Describes IPC's commitment to addressing operational impacts on the environment through energy management and efficiency programs.
Pengendalian Emisi / Emission Control	Menggambarkan komitmen IPC dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui program pemantauan dan pengendalian gas emisi yang dihasilkan. / Describes IPC's commitment to addressing operational impacts on the environment through monitoring and control program of the emission gas produced.
Pengelolaan Limbah / Waste Management	Menggambarkan komitmen IPC dalam menangani dampak operasional terhadap lingkungan hidup melalui manajemen limbah yang tepat. / Describes IPC's commitment to addressing operational impacts on the environment through proper waste management.



Isu Penting / Material Issue	Alasan Isu Ini Penting / Reason of Materiality of the Issue
Kepegawaian / Employment	Menggambarkan komitmen IPC dalam melakukan pengelolaan karyawan sebagai aset penting Perseroan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. / Describes IPC's commitment to managing employees as an important asset of the Company in order to maintain business continuity.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety	Menggambarkan komitmen IPC dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman demi mengurangi tingkat kecelakaan kerja karyawan serta memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan dalam melakukan aktivitas operasional Perseroan. / Describes IPC's commitment to providing a safe and comfortable workplace in order to reduce the level of employee work accidents and ensure the safety and health of employees in carrying out the Company's operational activities.
Peningkatan Kompetensi SDM / HC Competency Development	Menggambarkan komitmen IPC dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM melalui penilaian kinerja karyawan secara rutin dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan. / Describes IPC's commitment to developing HC skills and competencies through regular employee performance assessment in order to improve Company performance.
Keberagaman dan Kesempatan Setara / Diversity and Equal Opportunity	Menggambarkan komitmen IPC dalam menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan karyawan pada proses pelaksanaan bisnis Perseroan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. / Describes IPC's commitment to upholding diversity and equality of employees in the Company's business processes regardless of ethnicity, religion, gender, race, and others.
Pengembangan Masyarakat/Komunitas Lokal / Local Community Development	Menggambarkan komitmen IPC terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan prospek pembangunan jangka panjang. / Describes IPC's commitment to improving the welfare of surrounding communities and its long-term development prospects.
Kepatuhan Lingkungan dan Sosial Ekonomi / Compliance on Environment and Socio-Economic Affairs	Menggambarkan komitmen IPC dalam menaati peraturan-peraturan tentang lingkungan maupun sosial ekonomi yang berlaku. / Describes IPC's commitment to complying with applicable environmental and socio-economic regulations.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN

Dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, IPC merujuk pada konsep *triple bottom line* (*people, profit, planet*) yang diintegrasikan dengan 7 (tujuh) subjek inti dalam standar mutu ISO 26000. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan agar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lebih terarah dan tepat sasaran.

Tujuh Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SCOPE OF MANDATORY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In implementing Corporate Social Responsibility, IPC refers to the triple bottom line concept (*people, profit, planet*) which is integrated with 7 (seven) core subjects in the ISO 26000 quality standard. This is carried out to ensure clear direction and target of Corporate Social Responsibility program implementation.

Seven Core Subjects of the Corporate Social Responsibility Program



Lingkup tanggung jawab sosial di atas telah dilakukan *review* terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu-isu penting tanggung jawab sosial. Peraturan-peraturan yang telah dipatuhi oleh Perseroan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:

The scope of social responsibility above has been reviewed on all regulations relating to important social responsibility issues. The regulations that have been complied with by the Company in implementing the Corporate Social Responsibility program include:

Pemenuhan Lingkup CSR Perusahaan terhadap Regulasi yang Berlaku

Compliance of the Company's CSR Scope with Applicable Regulations

Tujuh Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Seven Core Subjects of Corporate Social Responsibility Program	Dasar Regulasi / Regulation Basis
Tata Kelola Organisasi / Organizational Governance	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Pada BUMN. / Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 regarding Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance in SOEs.
Hak Asasi Manusia (HAM) / Human Rights	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. / Law No. 39 of 1999 regarding Human Rights. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. / Law No. 21 of 2000 regarding Labor Union. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. / Law No. 13 of 2003 regarding Manpower. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. / Law No. 35 of 2014 regarding Amendment to Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Konvensi <i>International Labour Organization (ILO)</i> tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. / International Labour Organization (ILO) Convention on Freedom of Association and Protection of Human Rights.
Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. / Law No. 28 of 1999 regarding State Administration Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. / Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / Law No. 20 of 2001 regarding Amendment to Law No. 31 of 1999 regarding Eradication of Corruption Crime. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. / Minister of SOEs Regulation No. PER-08/MBU/12/2019 regarding General Guidelines for Goods and Services Procurement in State-Owned Enterprises.
Lingkungan Hidup / Environment	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. / Law No. 5 of 1990 regarding Conservation of Biodiversity and Ecosystem. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. / Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. / Government Regulation No. 27 of 2012 regarding Environmental Permit.
Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja / Labor Practices, Occupational Health and Safety	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Law No. 13 of 2003 regarding Manpower Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja / Law No. 1 of 1970 regarding Occupational Safety Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) / Government Regulation No. 50 of 2012 regarding Implementation of Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)
Pengembangan Masyarakat/Komunitas Lokal / Local Community Development	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas / Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan / Responsibility to Customers	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen / Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Selain merujuk pada standar mutu ISO 26000, IPC juga melaksanakan kegiatan PKBL dan CSR dalam rangka menyehatkan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perseroan.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THAT EXCEEDS OBLIGATIONS

In addition to referring to the ISO 26000 quality standard, IPC also carries out PKBL and CSR activities in order to improve and help communities affected by the Company's strategic projects.

1. Pelabuhan Kalibaru

Pembangunan Terminal Kalibaru yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional.

2. Pelabuhan Kijing/Mempawah

Terminal Kijing sebagai pengembangan Cabang Pelabuhan Pontianak, dimana adanya keterbatasan area pengembangan di Kota Pontianak, keterbatasan kedalaman sungai dan tingkat sedimentasi yang tinggi serta untuk mendukung program Pemerintah "Tol Laut" untuk meningkatkan konektivitas laut guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Sumber Daya Alam.

3. Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut

Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways*/CBL sebagai alternatif moda transportasi yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus logistik jalur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan atau sebaliknya.

IPC juga melaksanakan Program CSR yang bertujuan untuk meminimalisir penggunaan air bersih dan pembersihan sampah di wilayah perairan, antara lain:

1. Pengoperasian Kapal dan Mobil Pembersih Sampah

Sebagai komitmen kepedulian Perusahaan terhadap pencemaran lingkungan, IPC mengoperasikan kapal sampah dan penyapu jalan untuk pelayanan menjalankan bisnis kepelabuhanan.

2. Penyulingan Air Laut

Sebagai kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan, dalam penggunaan air bersih IPC menerapkan Penyulingan Air Laut untuk meminimalisir penggunaan air tanah yang dapat merusak permukaan tanah.

3. Pengelolaan Limbah

Untuk mendukung bisnis perusahaan untuk mencapai kelas dunia, IPC menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kapal untuk menciptakan perusahaan yang ramah terhadap lingkungan.

PENGGORGANISASIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan telah menugaskan beberapa unit kerja yang bertanggung jawab sesuai dengan kategori program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, seperti yang tergambar di bawah ini:

1. Kalibaru Port

The construction of Kalibaru Terminal in Tanjung Priok, North Jakarta. This port is planned to increase the capacity of Tanjung Priok Port Branch in order to support national logistics distribution.

2. Kijing/Mempawah Port

Kijing Terminal as a development of Pontianak Port Branch, where there are limited development areas in Pontianak City, limited river depth, and high sedimentation rate, in support of the Government's "Sea Toll" program to improve sea connectivity in order to reduce logistics costs and increase competitiveness of Natural Resources products.

3. Construction of Terminal and *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut

Construction of Terminal and *Inland Waterways*/CBL as an alternative mode of transportation which is expected to reduce the density of land logistics flows from Cikarang and Karawang industrial areas to Tanjung Priok Port Branch and vice versa

IPC also implements CSR program that aims to minimize the use of clean water and to clean up waste in water areas, including:

1. Operation of Garbage Cleaning Ships and Cars

As a commitment to the Company's concern for environmental pollution, IPC operates garbage boats and road sweepers as a service in running the port business.

2. Seawater Desalination

As the Company's concern for the environment, in using clean water, IPC implements Seawater Desalination to minimize the use of groundwater which can damage the soil surface.

3. Waste Management

To support the company's business in achieving world class standard, IPC provides ship waste management facilities to realize an environmentally friendly company.

ORGANIZING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

To increase the effectiveness of Corporate Social Responsibility implementation, the Company has assigned several work units in charge of various categories of the Corporate Social Responsibility program as illustrated below:



Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Work Unit in Charge of Corporate Social Responsibility Implementation

Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Core Subjects of Corporate Social Responsibility Program	Unit Kerja Perusahaan / Company Work Unit
Tata Kelola Perusahaan / Organizational Governance	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Internal, Divisi Manajemen Risiko / Corporate Secretary Division, Internal Audit Unit Division, Risk Management Division
Hak Asasi Manusia (HAM) / Human Rights	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Hukum, Divisi Layanan SDM / Corporate Secretary Division, Legal Division, HC Service Division
Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Hukum, Divisi Pengadaan / Corporate Secretary Division, Legal Division, Procurement Division
Lingkungan Hidup / Environment	Divisi Pelayanan Terminal, Divisi Konstruksi Sipil, Divisi Manajemen Proyek Strategis, Divisi Sekretariat Perusahaan / Terminal Service Division, Civil Construction Division, Strategic Project Management Division, Corporate Secretary Division
Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja / Labor Practices, Occupational Health and Safety	Divisi Strategi SDM, Divisi Pembelajaran SDM, Divisi Layanan SDM, Divisi Pelayanan Terminal / HC Strategy Division, HC Learning Division, HC Service Division, Terminal Service Division
Pengembangan Masyarakat/Komunitas / Local Community Development	Divisi Sekretariat Perusahaan / Corporate Secretary Division
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan / Responsibility to Customers	Divisi Pemasaran, Divisi Aliansi Bisnis & Hubungan Pelanggan / Marketing Division, Business Alliance & Customer Relations Division

STRATEGI DAN BENTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Agar pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat berjalan secara efektif, Perseroan telah menyusun strategi dan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk setiap subjek inti program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

Strategi dan Bentuk Pelaksanaan Setiap Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No.	Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Core Subjects of Corporate Social Responsibility Program	Strategi / Strategy	Bentuk Pelaksanaan / Implementation Form
1.	Tata Kelola Organisasi / Organizational Governance	Berfokus pada pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada 6 (enam) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, <i>Responsibilitas</i> , <i>Independensi</i> , <i>Fairness</i> , dan <i>Trusted</i> . / Focusing on corporate governance implementation by referring to the 6 (six) principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trusted.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>assessment</i> GCG; / Implementation of GCG assessment; • Evaluasi kinerja Organ Tata Kelola Perusahaan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Teknologi Informasi; / Performance evaluation of Corporate Governance Organs, Internal Control System, Risk Management System, and Information Technology Governance; • Pemenuhan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan Perseroan dan publik / Fulfillment of information disclosure for the Company's stakeholders and the public
2.	Hak Asasi Manusia / Human Rights	Berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia dalam menjalankan aktivitas operasional, khususnya berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. / Focusing on the fulfillment of human rights in carrying out operational activities, particularly those related to labor issues and industrial relations.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengakuan keberadaan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); / Establishment and recognition of the existence of the Labor Union of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); • Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); / Signing of the Collective Labor Agreement (PKB); • Pemenuhan hak-hak dasar Pekerja; / Fulfillment of basic rights of Workers; • Penanganan perselisihan hubungan industrial; / Handling of industrial relations disputes; • Pengelolaan SDM yang adil dan bebas diskriminasi; / Fair and discrimination-free Human Capital management; • Penegakan penghapusan tenaga kerja di bawah umur (pekerja anak). / Enforcing the elimination of underaged workers (child labor).

STRATEGY AND FORM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

To run Corporate Social Responsibility Program effectively, the Company has formulated the strategy and activity implementation for each core subject of the Corporate Social Responsibility program with the following description:

Strategy and Implementation Form of Each Core Subject of the Corporate Social Responsibility Program

No.	Subjek Inti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Core Subjects of Corporate Social Responsibility Program	Strategi / Strategy	Bentuk Pelaksanaan / Implementation Form
3.	Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	Berfokus pada pencegahan terjadinya konflik dan benturan kepentingan, tindakan korupsi dan <i>fraud</i> , pelaksanaan praktik pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan, serta menghormati Hak Kekayaan Intelektual. / Focuses on preventing conflicts and conflicts of interest, acts of corruption and fraud, implementing fair and transparent procurement practices of goods and services, and respecting Intellectual Property Rights.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan benturan kepentingan; / Prevention of conflicts of interests; • Keterlibatan politik yang bertanggung jawab; / Responsible political engagement; • Penegakan anti korupsi dan anti suap (termasuk pengendalian gratifikasi dan tindakan fraud lainnya); / Anti-corruption and anti-bribery enforcement (including control of gratuities and other acts of fraud); • Proses pengadaan yang adil dan transparan; / Fair and transparent procurement processes; • Persaingan usaha yang sehat; / Fair business competition; • Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). / Respect for Intellectual Property Rights (IPR).
4.	Lingkungan Hidup / Environment	Berfokus pada pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. / Focusing on managing the negative impacts arising from the Company's operational activities on environmental sustainability.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>green port</i> melalui implementasi Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015 di lingkungan Grup IPC; / Green port establishment through the implementation of Environmental Management System based on ISO 14001: 2015 within the IPC Group; • Pengelolaan dan efisiensi energi dan penggunaan sumber energi alternatif dalam rangka menurunkan polusi udara di lingkungan pelabuhan; / Energy management and efficiency and use of alternative energy sources in order to reduce air pollution in the port environment; • Inisiatif pengelolaan air bersih dengan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO) dalam rangka menghemat penggunaan air tanah; / Clean water management initiative using Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) technology in order to conserve groundwater use; • Pengendalian emisi melalui pemantauan dan pengelolaan emisi; / Emission control through emission monitoring and management; • Pengelolaan limbah padat/sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan limbah cair domestik; / Management of solid waste/garbage, Hazardous and Toxic Waste (B3), and domestic liquid waste; • <i>Green Port Assessment</i>.
5.	Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) / Labor Practices, Occupational Health and Safety	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing Insan IPC. / Focusing on the management of Human Capital in order to increase the excellence and competitiveness of IPC Personnel. 2. Berfokus pada pemberian jaminan keselamatan dan fasilitas kesehatan yang memadai di lingkungan kerja. / Focusing on providing adequate safety assurance and health facilities in the work environment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengelolaan SDM, mencakup program rekrutmen, program pengembangan kompetensi, program penilaian kinerja, program remunerasi dan kesejahteraan karyawan); / HC management programs, including recruitment program, competency development program, performance assessment program, employee remuneration and welfare program); • Pengelolaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). / Management of occupational health and safety (OHS) aspects.
6.	Pengembangan Masyarakat/ Komunitas / Local Community Development	Berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat/komunitas di sekitar wilayah operasional Perseroan. / Focusing on improving the welfare of the communities around the Company's operational areas.	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) / Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR)
7.	Tanggung Jawab terhadap Pelanggan / Responsibility to Customers	Berfokus pada penguatan hubungan dengan para pelanggan. / Focusing on strengthening customer relations.	Penguatan hubungan dengan pelanggan / Strengthening customer relations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik operasi yang adil. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan praktik bisnis yang bersih, sehat, dan terhindar dari segala bentuk kecurangan serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang termasuk dalam rantai bisnis Perseroan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATING PRACTICES

As an implementation of good corporate governance, the Company is committed to always carrying out fair operating practices. This is aimed at developing clean, healthy business practices and avoiding all forms of fraud and encouraging the creation of a harmonious relationship between the Company and its stakeholders, especially those who involved in the Company's business chain.



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASI YANG ADIL

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di industri jasa pelabuhan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan praktik bisnis yang adil, berintegritas, dan profesional, Perseroan telah memiliki beberapa pedoman yang menjadi acuan dan landasan bagi Insan IPC dalam menjalankan aktivitas operasional, antara lain:

1. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis pada ISO 37001:2016;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis;
3. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
4. Pedoman Pengendalian Kecurangan (*Fraud*);
5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
6. Pedoman *Whistleblowing System*;
7. Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
8. Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan IPC;
9. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan IPC;
10. Prosedur Pelaporan dan Penganganan atas Laporan Indikasi Tindakan Curang di Lingkungan IPC dan Anak Perusahaan.

LINGKUP PELAKSANAAN OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi pencegahan benturan kepentingan, keterlibatan politik yang bertanggung jawab, penegakan anti korupsi dan anti suap (termasuk pengendalian gratifikasi dan tindakan *fraud* lainnya), proses pengadaan yang adil dan transparan, persaingan usaha yang sehat, dan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

IPC senantiasa berusaha dalam menjalankan operasi yang adil. Perseroan menargetkan seluruh Insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perseroan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perseroan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perseroan.

COMMITMENT AND POLICIES RELATING TO FAIR OPERATIONS

The Company is committed to complying with all government regulations and applying the applicable standards of the port service industry, both in terms of governance and general business practices. Therefore, in order to realize fair and professional business practices with integrity, the Company has several guidelines that serve as reference and basis for IPC personnel in carrying out operational activities, including:

1. Implementation of Anti-Bribery Management System based on ISO 37001: 2016;
2. Code of Business Conduct;
3. Work Implementation Procedure related to BOD-BOC Relation (Board Manual);
4. Fraud Control Guidelines;
5. Gratification Control Guidelines;
6. Whistleblowing System Guidelines;
7. Good Corporate Governance Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
8. Guidelines for Cooperation with Partners in IPC Environment;
9. Guidelines for Goods and Services Procurement in IPC Environment;
10. Procedure for Reporting and Handling of Indication of Frauds within IPC and its Subsidiaries.

SCOPE OF FAIR OPERATING PRACTICES

The scope of fair operating practices includes prevention of conflicts of interests, responsible political engagement, anti-corruption and anti-bribery enforcement (including control of gratuities and other acts of fraud), fair and transparent procurement processes, fair business competition, and respect for Intellectual Property Rights (IPR).

PLAN OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR FAIR OPERATING PRACTICES

At all times, IPC strives to carry out fair operating practices. The Company targets all IPC Employees to uphold their attitude in carrying out all Company activities and to create a healthy and comfortable work atmosphere in the Company's environment. This is expected to minimize chances for any violation and to build a good reputation for the Company. Therefore, the Company always strives to enforce policies related to fair operating practices so as to increase the value of the Company's stakeholders, which in turn will also increase the value of the Company.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Pencegahan Benturan Kepentingan

Seluruh Insan IPC berkomitmen untuk berperilaku etis sesuai dengan kepentingan Perseroan. IPC berkomitmen untuk menghindari hubungan, aktivitas, atau perkumpulan yang akan mempengaruhi kemampuan Insan IPC untuk membuat keputusan yang adil dan obyektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Seluruh keputusan bisnis harus netral, bebas dari benturan kepentingan, serta berdasarkan peraturan Perseroan dan proses bisnis yang berlaku secara umum/*best practices*.

Aktivitas yang dilakukan di luar IPC dianggap sebagai konflik kepentingan jika:

1. Aktivitas tersebut merusak reputasi IPC;
2. Aktivitas tersebut memberi dampak buruk pada bisnis IPC;
3. Aktivitas tersebut mempengaruhi individu dalam membuat keputusan kerja.

Seluruh Insan IPC tidak diperkenankan untuk:

1. Menggunakan status kepegawaian, posisi, atau reputasi di IPC untuk mencapai tujuan pribadi, keluarga, atau kerabat;
2. Menggunakan aset/sumber daya Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Menghindari benturan kepentingan adalah sesuai dengan nilai-nilai integritas yang diharapkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan Pribadi

Hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan pesaing, vendor, atau bawahan yang akan mempengaruhi kemampuan membuat keputusan harus dihindari setiap saat karena hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Seluruh Insan IPC harus menghindari segala keterlibatan seperti ini, dan jika hal ini terjadi mereka harus melaporkan situasi tersebut kepada atasan langsung untuk mengklarifikasi konflik kepentingan. Pelanggaran pada kode etik ini akan mengakibatkan tindakan indisipliner tegas terhadap individu yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR FAIR OPERATING PRACTICES

Conflicts of Interest Prevention

All IPC Employees are committed to upholding ethical attitude in accordance with the Company's interests. IPC is committed to avoiding relationships, activities, or associations that will affect the ability of IPC Employees to make fair and objective decisions in carrying out their duties and responsibilities in the workplace. All business decisions shall be neutral, free from conflicts of interests, and refer to Company regulations and generally applicable best practices.

Activities conducted outside IPC are considered conflict of interests if:

1. The activity harms IPC's reputation;
2. The activity adversely affects IPC's business;
3. The activity affects individuals in making work decisions.

All IPC Employees are not allowed to:

1. Use their employment status, position, or reputation in IPC to achieve personal, family, or relative gains;
2. Using the Company's assets/resources for personal gain.

Avoiding conflicts of interest is in accordance with the values of integrity which are expected to be applied in everyday life.

Personal Relationships

Personal relationships or emotional engagements with competitors, vendors or subordinates that will affect decision-making abilities shall be avoided at all times as this could result in a conflict of interest. All IPC Employees shall avoid any such engagement, and if this occurs, they shall report the situation to their direct supervisor to clarify the conflict of interest. Violation of this code of conduct will result in strict disciplinary action against the individual concerned in accordance with applicable regulations.



Memperlakukan Keluarga dan Teman

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus Insan IPC memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau bawahan. Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama-sama menjadi Pekerja IPC.

Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa hubungan Anda tidak mengganggu atau berpotensi mengganggu, kemampuan Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik IPC. Oleh sebab itu, hal yang harus dilakukan oleh setiap Insan IPC adalah:

1. Memberitahukan atasan langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan), atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan) dan Pimpinan Unit Pengelola SDM jika ada anggota keluarga atau teman yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan di Perseroan yang sedang atau mencoba menjadi mitra usaha IPC;
2. Jika perusahaan dimana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan di Perseroan itu mengikuti proses tender, Insan IPC yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam menjaga profesionalisme, maka setiap Insan IPC **dilarang** untuk:

1. Memberikan informasi yang dimiliki IPC untuk kepentingan Perseroan yang dimiliki keluarga atau teman atau untuk Perseroan dimana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan;
2. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan IPC dalam proses pengadaan untuk kepentingan Perseroan dimana perusahaan itu dimiliki anggota keluarga atau teman, atau keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan tersebut;
3. Terlibat atau mempengaruhi kebijakan IPC yang terkait dengan rekrutmen, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja Pekerja yang mempunyai hubungan keluarga.

Treating Family and Friends

Conflicts of interest occur or may occur in cases where IPC personnel have family relations or friendship with competitors, vendors, or subordinates. Conflicts of interest may also occur when there are family members who are also IPC employees.

When dealing with family members or friends, ensure that your relationship does not interfere or potentially interfere with your ability to act in the best interest of IPC. Therefore, what every IPC employee must do is:

1. Notify direct supervisor (one level above the person concerned), indirect superior (supervisor of direct supervisor/two levels above the person concerned) and the HC Management Unit Leader if there is a family member or friend who is the owner or decision-making official in companies that are currently or are attempting to become IPC business partners;
2. If the company in which your family or friend is the owner or the decision-making official participates in tender process, the IPC Personnel who has family relations or friendship must submit a request not to be involved in making decisions for the tender process, if the person is involved in the decision-making process.

To maintain professionalism, every IPC Employee is **prohibited** from

1. Providing information owned by IPC for the benefit of a company owned by their family or friends or for companies in which their family or friends are decision-making officials;
2. Being involved in decision-making or attempting to influence IPC decisions in the procurement process for the benefit of the company owned by their family member or friend, or in which their family member or friend is a decision-making official;
3. Being involved in or influencing IPC policies related to recruitment, rotation and promotion processes, as well as imposition of sanctions and performance assessment for Employees with family ties.

Pekerjaan di Luar IPC

Seorang Insan IPC tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pekerjaan profesional lain selain di dalam IPC, baik penuh waktu (*full-time*) maupun paruh waktu (*part-time*) karena hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Insan IPC tidak diperkenankan:

1. Pada waktu yang sama bekerja di lembaga pemerintahan, swasta, maupun institusi profesional lainnya yang akan berdampak pada peran dan tanggung jawab di IPC;
2. Bekerja untuk perusahaan lain sebagai Pekerja, *advisor*/jasa-jasa pelayanan atau menjadi anggota Direksi, kecuali untuk dan atas nama Perseroan dengan penugasan tertulis dari Perseroan serta tetap patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan Bisnis

Insan IPC harus selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan ini harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan langsung, atasan tidak langsung, atau Pimpinan Unit Pengelola SDM.

Pengeluaran Tidak Tercatat

Insan IPC tidak diperkenankan untuk mengumpulkan/mendistribusikan dana atau melakukan pembiayaan yang penggunaannya tidak tercatat di dalam *balance sheet* (neraca keuangan) atau transaksi melalui rekening personal.

Donasi

Insan IPC tidak diperkenankan untuk mendukung atau memberikan donasi untuk kepentingan politik. Donasi hanya akan diberikan dengan dasar etika kerja dan etika profesional sebagai berikut:

1. Jika dianggap layak, donasi untuk tujuan amal dapat diperbolehkan;
2. Donasi untuk tujuan lainnya hanya dapat diberikan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. IPC tidak diperkenankan untuk memberikan dana, aset, atau pendapatan Perseroan untuk donasi politik atau kepada calon kandidat legislatif;
4. Pekerja tidak diizinkan menggunakan jabatannya di Perseroan atau memanfaatkan fasilitas Perseroan untuk kegiatan aktivitas politik.

Keterlibatan Politik yang Bertanggung Jawab

Perseroan dapat mengemukakan pandangan kepada pemerintah dan pihak lain yang terkait mengenai aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi

Employment Outside IPC

An IPC Personnel is not allowed to be involved in other professional work apart from IPC, either full-time or part-time as this can lead to a conflict of interest. IPC Personnel are not allowed to:

1. At the same time working in government, private, and other professional institutions that will affect their roles and responsibilities in IPC;
2. Working for other companies as employees, advisors/service providers or as members of the Board of Directors, except for and on behalf of the Company with a written assignment from the Company and remain in compliance with the prevailing laws and regulations.

Business Involvement

IPC Employees shall avoid any form of family involvement in business relationships in order to avoid conflicts of interest. All transactions carried out with this involvement must be avoided and discussed in advance with the direct supervisor, indirect superior, or the HC Management Unit Leader.

Unrecorded Expenses

IPC Employees are not allowed to collect/distribute funds or make financing of which use is not recorded in the balance sheet or transactions through personal accounts.

Donation

IPC Employees are not allowed to support or make donations for political purposes. Donations shall only be made on the basis of work ethics and professional ethics as follows:

1. If deemed appropriate, donations for charitable purposes may be allowed;
2. Donations for other purposes can only be made if in accordance with applicable regulations;
3. IPC is not allowed to provide funds, assets, or revenues of the Company for political donations or to legislative candidates;
4. Employees are not allowed to use their position at the Company or take advantage of the Company's facilities for political activities.

Responsible Political Engagement

The Company may express views to the government and other related parties regarding operational aspects that affect business activities for the interests of Shareholders,



kepentingan Pemegang Saham, Pekerja, dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis.

Perseroan senantiasa mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. Oleh sebab itu, Perseroan mengharuskan Direksi dan Pekerja untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan politik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut terpenuhi, maka Perseroan telah berkomitmen sebagai berikut:

1. Insan IPC **dilarang** untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Insan IPC **dilarang** untuk keterlibatan dalam organisasi terlarang;
2. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana pilihannya ditujukan;
3. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari Perseroan, barang-barang, dan fasilitas milik Perseroan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik, termasuk politisi di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perseroan.

Pemberian Dana terhadap Aktivitas Politik

Perseroan senantiasa berupaya untuk menghindari keterlibatan atau kecenderungan terhadap kelompok politik tertentu dengan tidak menyalurkan pemberian dana untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu, selama tahun 2020, Perseroan tidak pernah memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

Penegakan Anti Korupsi dan Anti Suap

Selaras dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang sehat, jujur, adil, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Perseroan, IPC secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk korupsi dan suap. Korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara. Sedangkan penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian

Employees, and other parties involved in the business.

The Company always maintains a neutral attitude towards political parties. Therefore, the Company requires the Board of Directors and Employees to comply with all laws and regulations governing the Company's engagement in political affairs. To ensure that these requirements are met, the Company has the following commitments:

1. IPC Employees are **prohibited** from becoming administrators of political parties and/or legislative candidates/members or candidates for Regional/Government leaders in accordance with applicable laws and regulations and IPC Employees are **prohibited** from engaging in illegal organizations;
2. No one may force others in a way that limits the rights of the individual concerned to determine a political party of their choice;
3. There will be no contribution from the Company, goods and facilities belonging to the Company, which are intended to support any political party or candidate, except to the extent justified by applicable laws and regulations;
4. It is prohibited to carry, install, display, and wear symbols, pictures and/or ornaments of political parties, including politicians in the workplace/other public facilities owned by the Company.

Provision of Funds for Political Activities

The Company always strives to avoid engagement or inclination towards certain political groups by not disbursing funds for political activities. Therefore, during 2020, the Company has never provided assistance funds for political activities.

Anti-Corruption and Anti-Bribery Enforcement

In line with the Company's commitment to implementing GCG principles to create a corporate culture that is healthy, honest, fair and compliant with the laws and regulations within the Company, IPC strongly condemns and prohibits all forms of corruption and bribery. Corruption is an act that is against the law, enriches oneself, other people, or other bodies in a way that is detrimental to the national economy. Whereas bribery can be interpreted as giving or receiving any forms of offers, commitments, money, gifts, entertainment,

atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika Insan IPC berada dalam kapasitas pekerjaan.

Untuk mendukung terwujudnya budaya anti korupsi dan anti suap di seluruh lingkungan kerja IPC, Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berbasis pada ISO 37001:2016. Pada tanggal 26 November 2020, IPC telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (KAN) yang dikeluarkan oleh BSI Indonesia, sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Tunggal Perseroan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung penerapan SMAP di lingkungan kerja IPC, Perseroan telah menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis pada ISO 37001:2016 dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/31/81.1/PKN/UT/PI.II-2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 31 Agustus 2020.

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memandu para Insan IPC untuk memastikan pemenuhan persyaratan standar ISO 37001:2016 serta kepatuhan terhadap persyaratan, peraturan, perundangan, kepuasan para pemangku kepentingan, serta peningkatan berkelanjutan. Pedoman tersebut juga digunakan secara eksternal untuk memperkenalkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemegang saham, instansi pemerintah, rekan bisnis/mitra, penyedia barang/jasa, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya) mengingat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memerlukan dukungan proaktif dari seluruh pihak, khususnya pihak eksternal.

or valuables that are unethical and given or received with the aim of favoritism, influence, change of decisions, violation against work agreements, provision of benefits that are inappropriate and unethical when IPC Employees are in their working capacity.

To support the creation of anti-corruption and anti-bribery culture throughout IPC work environment, the Company has implemented an Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016. On November 26, 2020, IPC obtained ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System (SMAP) (KAN) issued by BSI Indonesia, in accordance with the direction of the Ministry of SOEs as the Sole Shareholder of the Company through Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 concerning the Implementation of Anti-Bribery Management System in State-Owned Enterprises as the Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning National Strategy of Corruption Prevention.

The implementation of Anti-Bribery Management System is a strategic decision by an organization that can help the organization to improve its overall performance continuously and provide a solid foundation for sustainable development initiatives. To support its implementation in IPC work environment, the Company has established Anti-Bribery Management System Guidelines based on ISO 37001:2016 in the Board of Directors Decree No. HK.01/31/81.1/PKN/UT/PI.II-2020 concerning the Implementation of Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dated August 31, 2020.

The Anti-Bribery Management System Guidelines directs IPC Employees to ensure compliance with ISO 37001:2016 standard as well as fulfillment of requirements, regulations, laws, stakeholder satisfaction, and continuous improvement. These guidelines are also used externally to introduce the Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to relevant parties (shareholders, government agencies, business partners, goods/services providers, and other parties) considering the implementation of the Anti-Bribery Management System requires proactive support from all parties, especially external parties.



Komitmen Manajemen

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan:

1. Menyetujui Kebijakan Anti Penyuapan Perseroan;
2. Memastikan bahwa strategi dan Kebijakan Anti Penyuapan Perseroan sejalan;
3. Menerima dan meninjau informasi tentang implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada waktu yang direncanakan;
4. Mendukung pemenuhan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dialokasikan dan ditentukan;
5. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perseroan sesuai kepemimpinan Direksi.

Direksi

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertanggung jawab untuk membangun, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari perumusan Kebijakan Anti Penyuapan, penilaian risiko penyuapan, Sasaran Anti Penyuapan, pemberian wewenang dan tanggung jawab, tinjauan manajemen secara berkala, mengupayakan dan meningkatkan Sumber Daya untuk memelihara dan meningkatkan sistem serta mengkomunikasikan tentang pentingnya kepatuhan tentang persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Direksi membentuk Tim untuk menjalankan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.02/27/P/1/PKN/UT/PI.II-2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang beranggotakan:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : SVP Hukum |
| 2. Wakil Ketua | : EVP Sekretariat Perusahaan |
| 3. Sekretaris | : DVP Pemeriksaan Kepatuhan |
| 4. Anggota | : EVP Satuan Pengawasan Internal |
| 5. Anggota | : VP Manajemen Risiko |
| 6. Anggota | : VP Layanan Sumber Daya Manusia |
| 7. Anggota | : SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi |

Management Commitment

Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) demonstrates leadership and commitment to the Anti-Bribery Management System by:

1. Approving the Company's Anti-Bribery Policy;
2. Ensuring that the Company's Anti-Bribery Policy is in line with the Company's strategy;
3. Receiving and reviewing information about the implementation of the Anti-Bribery Management System at the planned time;
4. Supporting the fulfillment of sufficient and appropriate resources required for the allocated and determined implementation of the Anti-Bribery Management System;
5. Carrying out reasonable oversight of the implementation and effectiveness of the Company's Anti-Bribery Management System in accordance with the leadership of the Board of Directors.

Board of Directors

The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is responsible for building, implementing, and maintaining the Anti-Bribery Management System. This responsibility includes the formulation of the Anti-Bribery Policy, bribery risk assessment, Anti-Bribery Targets, granting of power and responsibilities, periodic management reviews, seeking and improving resources to maintain and improve the system as well as communicating the importance of compliance with the prevailing laws and regulations.

Anti-Bribery Compliance Function

The Board of Directors established a Team to carry out the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.02/27/P/1/PKN/UT/PI.II-2020 dated August 27, 2020, which consists of:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Head | : SVP Legal |
| 2. Deputy Head | : EVP Corporate Secretary |
| 3. Secretary | : DVP Compliance Inspection |
| 4. Member | : EVP Internal Audit Unit |
| 5. Member | : VP Risk Management |
| 6. Member | : VP Human Capital Services |
| 7. Member | : SDVP Corporate Governance Implementation |

Adapun tugas dan wewenang dari FKAP antara lain untuk:

1. Mengawasi penyusunan rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu terkait penyuapan;
3. Memastikan Sistem Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia ISO 3700 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
4. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
5. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran Penyuapan yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System*;
6. Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait dengan adanya dugaan Penyuapan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyuapan dimaksud dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba;
 - b. Penyuapan oleh Perseroan;
 - c. Penyuapan oleh karyawan yang bertindak atas nama Perseroan atau untuk kepentingan pegawai tersebut;
 - d. Penyuapan oleh mitra yang bertindak atas nama perusahaannya untuk keuntungan mitra tersebut;
 - e. Penyuapan kepada Perseroan;
 - f. Penyuapan kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas Perseroan;
 - g. Penyuapan kepada Mitra Perseroan sehubungan dengan aktivitas Perseroan;
 - h. Penyuapan langsung maupun tidak langsung (misalnya menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga);

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan memiliki akses langsung kepada Direksi maupun Dewan Komisaris agar terhadap adanya isu-isu maupun informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan Penyuapan atau terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat diketahui segera.

7. Melakukan rapat internal Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran Penyuapan melalui saluran *Whistleblowing System*;

The FKAP has the duty and authority to:

1. Oversee the preparation of design and implementation of anti-bribery management system of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Provide direction and guidance to personnel of the Anti-Bribery Compliance Function Team in the Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Anti-Bribery Management System and issues related to bribery;
3. Ensure the Anti-Bribery System complies with the requirements of the Indonesian National Standard ISO 3700:2016 regarding Anti-Bribery Management System;
4. Report the performance of the Anti-Bribery Management System to the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
5. Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of suspected bribery received through the *Whistleblowing System* channel;
6. Classify and follow up all incoming reports related to suspected bribery to be further processed according to the type of violation based on the prevailing regulations. Bribery may include the following activities:
 - a. Bribery in the public, private and non-profit sectors;
 - b. Bribery by the Company;
 - c. Bribery by employees acting on behalf of the Company or for the benefit of the employee;
 - d. Bribery by a partner acting on behalf of their company for the benefit of that partner;
 - e. Bribery to the Company;
 - f. Bribery to Employees in connection with the implementation of the Company's activities;
 - g. Bribery to the Company's Partners in connection with the Company's activities;
 - h. Direct or indirect bribery (for example, offering or accepting bribery through or by third parties);

In carrying out these duties, the Anti-Bribery Compliance Function Team has direct access to the Board of Directors and the Board of Commissioners so that issues and information related to suspected bribery or the implementation of Anti-Bribery Management System can be immediately known.

7. Conduct internal meeting of the Anti-Bribery Compliance Function Team at least 1 (one) time every 3 (three) months and/or every time there is a report on suspected bribery through the *Whistleblowing System* channel;



8. Melakukan pengawasan dan tinjauan secara berkala terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
9. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
10. Melakukan sosialisasi kepada Insan IPC dan *stakeholder* terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
11. Membuat laporan secara berkala kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

8. Supervise and periodically review the independence and effectiveness of the Anti-Bribery Management System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment;
9. Conduct benchmarking with other companies to see the development of the Anti-Bribery Management System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment;
10. Conduct dissemination to IPC Employees and stakeholders regarding Anti-Bribery Management System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment;
11. Prepare regular reports to the President Director and President Commissioner on the implementation of Anti-Bribery Management System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK.01.01/7/9/1/KPP/UT/PI-II-17 tanggal 7 September 2017 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berfungsi sebagai pengendali Gratifikasi di lingkungan IPC. UPG bersifat *ad-hoc*, dan terdiri dari:

1. Ketua : EVP Sekretariat Perusahaan
2. Wakil Ketua : EVP Satuan Pengawasan Internal
3. Sekretaris : SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi
4. Anggota : SVP Hukum dan VP Hubungan Pekerja & Layanan SDM

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim UPG IPC antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan IPC;
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian Gratifikasi;
3. Me-review dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi, dan pencegahan korupsi di lingkungan IPC;
4. Menerima laporan, merekap, dan melaporkan Gratifikasi dari pihak internal IPC kepada KPK.

Kebijakan Anti Penyuapan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan menetapkan kebijakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dari praktik suap dan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Gratification Control Unit

The Gratification Control Unit (UPG) which was established based on the Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK.01.01/7/9/1/KPP/UT/PI-II-17 dated September 7, 2017 concerning the Establishment of a Gratification Control Unit (UPG) Team for the Implementation of Gratification Prevention and Control System within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which functions as a Gratification controller in IPC environment. UPG is *ad-hoc* and consists of:

1. Chairperson : EVP Corporate Secretary
2. Deputy Chairperson : EVP Internal Audit Unit
3. Secretary : SDVP Corporate Governance Implementation
4. Members : SVP Legal Affairs and VP Employee Relations & HC Services

The duties and responsibilities of IPC UPG Team include:

1. Disseminating gratification control in the IPC environment;
2. Coordinating with units or departments related to the implementation and effectiveness of gratification control;
3. Reviewing and updating management policies, establishing anti-gratification environment, and preventing corruption in IPC;
4. Receiving reports, recapitulating, and reporting gratification from IPC internal parties to the KPK.

Anti-Bribery Policy

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a State-Owned Enterprise engaged in Port Services has established a policy to carry out its business activities free from bribery and corruption by implementing an Anti-Bribery Management System.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk:

1. Melarang tindakan suap dan korupsi sesuai dengan tujuan organisasi;
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan;
3. Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan tentang suap dan korupsi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
4. Mendorong peningkatan kepedulian anti penyuapan di lingkungan perusahaan dengan itikad baik, dan/atau atas dasar keyakinan yang wajar;
5. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
6. Memenuhi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan;
7. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor tindakan penyuapan dari tindakan balasan karena kepeduliannya pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan anti penyuapan.

Konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan serius berupa sanksi indisipliner, pemutusan hubungan kerja, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana.

Guna menjamin konsistensi pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan mengkomunikasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Pedoman terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Untuk menyempurnakan dan mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Perseroan telah menetapkan beberapa pedoman yang sejalan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, antara lain:

1. Pedoman Kode Etik Bisnis;
2. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
3. Pedoman Pengendalian Kecurangan (*Fraud*);
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
5. Pedoman *Whistleblowing System*;
6. Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
7. Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan IPC;

To support this policy, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is committed to:

1. Prohibit bribery and corruption in accordance with organizational goals;
2. Provide framework for establishing, reviewing, and achieving anti-bribery objectives;
3. Comply with all laws and regulations concerning bribery and corruption applicable in the Republic of Indonesia;
4. Encourage increased anti-bribery awareness within the company in good faith, and/or based on reasonable belief;
5. Establish the authority and independence of the Anti-Bribery Compliance Function;
6. Meet the requirements of the Anti-Bribery Management System and make continuous improvements;
7. Maintain confidentiality and protect whistleblowers from retaliation due to their concern for the Anti-Bribery Management System;
8. Supervise and evaluate the implementation of the anti-bribery policy.

Non-compliance with this policy may result in serious actions in the form of disciplinary sanctions, termination of employment, civil sanctions and/or criminal sanctions.

To ensure consistency in the implementation of this Anti-Bribery Policy, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) disseminates this policy to all relevant stakeholders.

Guidelines on Anti-Bribery Management System

To improve and develop the Anti-Bribery Management System in the entire work environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Company has established several guidelines that are in line with the Anti-Bribery Management System, including:

1. Code of Business Conduct Guidelines;
2. Work Implementation Procedure related to BOD-BOC Relation (*Board Manual*);
3. Fraud Control Guidelines;
4. Gratification Control Guidelines;
5. Whistleblowing System Guidelines;
6. Good Corporate Governance Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
7. Guidelines for Cooperation with Partners in IPC Environment;



8. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan IPC;
9. Pedoman Rekrutmen Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
10. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
11. Pedoman Pengelolaan Media Komunikasi dan Pemberian Informasi Perusahaan;
12. Pedoman Pengendalian Dokumen SOP di Lingkungan IPC;
13. Prosedur Pelaporan dan Penganganan atas Laporan Indikasi Tindakan Curang di Lingkungan IPC dan Anak Perusahaan.

8. Guidelines for Goods and Services Procurement in IPC Environment;
9. Employee Recruitment Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
10. Risk Management Implementation Guidelines;
11. Guidelines for Communication Media Management and Provision of Company Information;
12. Guidelines for Control of SOP Documents in IPC Environment;
13. Procedure for Reporting and Handling of Indication of Frauds within IPC and its Subsidiaries.

Pengendalian Keuangan dan Non-Keuangan

Perseroan menerapkan pengendalian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, baik secara manual maupun berbasis aplikasi transaksi elektronik. Fungsi pengelola keuangan bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan informasi terdokumentasi keuangan.

Financial and Non-Financial Control

The Company implements financial control based on applicable and binding laws and regulations for both manual and electronic transactions. The financial management function is responsible for controlling and maintaining documented financial information.

Sedangkan untuk pengendalian non-keuangan diterapkan di seluruh lingkup kegiatan utama dan pendukung pada divisi-divisi berdasarkan peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur, instruksi kerja, *checklist*, surat keputusan Direksi baik secara manual maupun yang didukung aplikasi transaksi aplikasi. Pihak Manajemen beserta jajaran di bawahnya bertanggung jawab terhadap pengendalian non-keuangan dan pemeliharaan informasi terdokumentasi yang terkait. Pengembangan pengendalian non-keuangan selalu diperbarui sesuai hasil penilaian risiko penyuapan yang selalu ditinjau secara rutin serta mempertimbangkan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Meanwhile, non-financial control is applied in all main and supporting activities of the divisions based on laws and regulations, procedures, work instructions, checklists, Board of Directors decrees, for both manual transactions and application-based transactions. The Management and its subordinates are responsible for non-financial control and maintenance of relevant documented information. The development of non-financial control is always updated in accordance with the results of bribery risk assessment which is regularly reviewed and takes into account applicable Company policies.

Bentuk Implementasi Pengendalian Keuangan dan Non-Keuangan di IPC

Forms of Financial and Non-Financial Control Implementation at IPC

Pengendalian Keuangan / Control	Pengendalian Non-Keuangan / Non-Financial Control
<p>Telah menyusun kebijakan/dokumen yang melandasi pelaksanaan pengendalian keuangan, antara lain: / Prepared policies/documents as reference for financial control implementation, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi (SKD) Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran sebagai bagian dari siklus <i>procure to Pay</i>; / Board of Directors Decree on Budget Preparation and Management as part of <i>procure-to-pay</i> cycle; 2. SKD Pedoman Anggaran Investasi; / Decree on Investment Budget Guidelines; 3. SKD <i>Budget Control</i>; / Decree on Budget Control; 4. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Penyusunan Anggaran; / Standard Operating Procedure (SOP) for Budget Preparation; 5. SOP Konsolidasi Anggaran; / Budget Consolidation SOP; 6. SOP Pengajuan <i>Purchase Requisition</i>; / Purchase Requisition Proposal SOP; 7. SOP Transfer Anggaran Satu Divisi; / Intra-Division Budget Transfer SOP; 8. SOP Transfer Anggaran Antar Divisi; / Inter-Division Budget Transfer SOP; 9. SOP Monitoring Anggaran Bulanan dan Triwulan; / Monthly and Quarterly Budget Monitoring SOP; 10. Sistem EPBCS / EPBCS System; 11. Sistem <i>Budget Control</i> / Budget Control System; 12. Sistem <i>Project Costing</i> / Project Costing System; 	<p>Telah menyusun kebijakan/dokumen yang melandasi pelaksanaan pengendalian non-keuangan, antara lain: / Prepared policies/documents as reference for non-financial control implementation, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kode Etik Bisnis; / Code of Business Conduct Guidelines; 2. Pedoman <i>Board Manual</i>; / Board Manual Guidelines; 3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi; / Gratification Control Guidelines; 4. Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); / Good Corporate Governance Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 5. Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Lingkungan IPC; / Guidelines for Cooperation with Partners in IPC Environment; 6. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan IPC. / Guidelines for Goods and Services Procurement in IPC Environment;

Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang Dikendalikan oleh Organisasi dan Rekan Bisnisnya

Perseroan menetapkan tata cara yang mensyaratkan pihak eksternal yang dikendalikan untuk:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; atau
2. Menerapkan pengendalian anti penyuapannya secara mandiri.

dalam setiap kasus hanya sebatas yang wajar dan proporsional dengan memperhatikan risiko suap yang dihadapi oleh Perseroan, dikendalikan, dengan mempertimbangkan penilaian risiko penyuapan yang dilakukan.

Hubungan dengan rekan bisnis yang tidak melaksanakan pengendalian risiko penyuapan dengan nilai di atas batas rendah dan tidak melaksanakan Uji Kelayakan, maka Perseroan menerapkan proses sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa rekan bisnis telah berperan dalam pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan;
2. Apabila rekan bisnis tidak memiliki peran pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memverifikasi:
 - a. Perseroan meminta rekan bisnis untuk menerapkan pengendalian anti penyuapan berkaitan dengan transaksi yang relevan, proyek atau kegiatan, atau
 - b. Jika tidak dapat diterapkan, terkait meminta rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, maka hal ini menjadikan faktor yang diperhitungkan saat mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis serta cara mengelola risiko tersebut.

Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah yang mengacu kepada hasil penilaian risiko penyuapan, Perseroan melaksanakan tata cara yang mensyaratkan:

1. Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk kepentingan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan;
2. Perseroan bisa mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk kepentingan rekan bisnis terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan;
3. Persyaratan tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama atau bentuk perikatan lainnya.

Implementation of Anti-Bribery Control by the Organization and Its Business Partners

The Company established procedures that require controlled external parties to:

1. Implement the Anti-Bribery Management System; or
2. Implement anti-bribery control independently.

In each case only to the extent that is reasonable and proportional with regard to the risk of bribery faced by the Company, controlled, by taking into account bribery risk assessment carried out.

Relationships with business partners which do not control the risk of bribery with a value above the bottom threshold and do not perform Due Diligence, the Company implements the following process:

1. Ensure that business partners have an anti-bribery control role that manages the relevant bribery risks;
2. If the business partner does not have an anti-bribery control role, or it is impossible to verify:
 - a. The Company requests business partners to implement anti-bribery control in relation to relevant transactions, projects or activities, or
 - b. If the request to business partners to implement anti-bribery control cannot be applied, this becomes a factor that shall be taken into account when evaluating the bribery risks associated with business partners and the risk management procedure.

For business partners which pose bribery risk above the bottom threshold according to the bribery risk assessment results, the Company implements procedures with the following requirements:

1. Business partner shall be committed to preventing bribery by or on behalf of or for the benefit of the business partner in connection with the relevant transaction, project, activity, or relationship;
2. The Company may terminate a relationship with business partner in the event of bribery by or on behalf of or for the benefit of the business partner related to the relevant transaction, project, activity, or relationship;
3. These requirements are set forth in the form of a cooperation agreement or contract or other forms of engagement.



Komunikasi terkait Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Perseroan telah menetapkan proses komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang dibutuhkan terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dengan uraian sebagai berikut:

Communication of the Anti-Bribery Management System Implementation

The Company has established a communication process with internal and external parties in relation to the implementation of the Anti-Bribery Management System as described below:

Proses Komunikasi Internal dan Eksternal terkait Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Internal and External Communication Process Related to Anti-Bribery Management System Implementation

No.	Uraian / Description	Frekuensi Komunikasi / Communication Frequency	Sasaran Komunikasi / Communication Target	Metode Komunikasi / Communication Method	Pihak yang Mengkomunikasikan / Communicating Party
1.	Kebijakan Anti Penyuapan / Anti-Bribery Policy	Setiap saat / At all times	Direksi, Manajemen, Pegawai / Board of Directors, Management, Employees	Dipajang di dinding setiap lantai / Displayed on walls on every floor	Sekretariat Perusahaan, FKAP / Corporate Secretary, FKAP
		Saat negosiasi pekerjaan / During work negotiation	Masyarakat / Public	Website IPC / IPC Website	Sekretariat Perusahaan, FKAP / Corporate Secretary, FKAP
2.	Penilaian Risiko Penyuapan, Tindakan Mengatasi Risiko & Peluang, Target Sasaran Anti Penyuapan / Bribery Risk Assessment, Actions to Handle Risks & Potentials, Anti-Bribery Targets	Saat awal periode Sistem Manajemen Anti Penyuapan / At beginning of Anti-Bribery Management System period	Direksi, Manajemen, Pegawai / Board of Directors, Management, Employees	Nota Dinas / Official Memo	Seluruh Divisi, FKAP / All Divisions, FKAP
		Saat negosiasi pekerjaan / During work negotiation	Pihak Penyedia Eksternal, termasuk mitra / External Suppliers, including partners	Lisan pada saat rapat / Verbal during meeting	Penyelenggara Pengadaan / Procurement Organizer
3.	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) / Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines	Saat awal periode Sistem Manajemen Anti Penyuapan / At beginning of Anti-Bribery Management System period	Direksi, Manajemen / Board of Directors, Management	Surat Keputusan Direksi (SKD) / Board of Directors Decree	FKAP
4.	Prosedur SMAP / SMAP Procedure	Saat dibutuhkan / When necessary	Direksi, Manajemen, Pegawai / Board of Directors, Management, Employees	Aplikasi i-SOP / i-SOP Application	FKAP, Divisi Kendali Mutu / FKAP, Quality Control Division
5.	Program dan Rencana Audit Internal SMAP / SMAP Internal Audit Program and Plan	Saat awal periode SMAP / At beginning of SMAP period	Direksi, Manajemen, Pegawai / Board of Directors, Management, Employees	Nota Dinas / Official Memo	FKAP
		Sebelum dilakukan audit internal SMAP / Prior to SMAP internal audit			FKAP
6.	Edaran kepada Rekan Bisnis / Circular Letter to Business Partners	Saat pertama penerapan SMAP, pada saat rekan bisnis mengakses aplikasi E-Procurement / At initial SMAP implementation, when business partners access e-procurement application	Rekan Bisnis / Business Partners	Surat dan Aplikasi / Letter and Application	Penyelenggara Pengadaan, Pemasaran, dan FKAP / Procurement Organizer, Marketing, and FKAP
7.	Sosialisasi / Dissemination	Saat pertama penerapan SMAP, saat rekrutmen pegawai, saat morning briefing (sesuai kebutuhan) / At initial SMAP implementation, during employee recruitment, during morning briefing (as necessary)	Pegawai / Employees	Lisan pada saat rapat / Verbal during meeting	Penyelenggara Rekrutmen, Seluruh Divisi, FKAP / Recruitment Organizer, All Divisions, FKAP
8.	Hasil Audit Internal SMAP / SMAP Internal Audit Results	Setelah selesai dilaksanakan audit internal SMAP / After SMAP internal audit	Manajemen / Management	Closing Meeting, Nota Dinas, Perintah Tindakan Koreksi (PTK) / Closing Meeting, Official Memo, Corrective Action Instruction (PTK)	Auditor Internal SMAP, FKAP / SMAP Internal Auditor, FKAP
			Direksi / Board of Directors	Rapat, Nota Dinas / Meeting, Official Memo	FKAP

No.	Uraian / Description	Frekuensi Komunikasi / Communication Frequency	Sasaran Komunikasi / Communication Target	Metode Komunikasi / Communication Method	Pihak yang Mengkomunikasikan / Communicating Party
9.	Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan / Anti-Bribery Target Achievement	Setiap 3 bulan sekali / Every 3 months	FKAP	Nota Dinas, Laporan Pencapaian SMAP, PTK / Official Memo, SMAP Achievement Report, PTK	Seluruh Divisi / All Divisions
			Direksi / Board of Directors	Nota Dinas, Laporan Rangkuman Pencapaian SMAP / Official Memo, SMAP Achievement Summary Report	Seluruh Divisi, FKAP / All Divisions, FKAP
10.	Masukan Tinjauan FKAP / FKAP Review Input	Saat akhir periode SMAP / At end of SMAP period	FKAP	Nota Dinas, Rapat / Official Memo, Meeting	Seluruh Divisi / All Divisions
11.	Masukan Tinjauan Manajemen Direksi dan Dewan Pengarah / Input from Board of Directors and Steering Board	Saat akhir periode SMAP / At end of SMAP period	Direksi dan Dewan Komisaris / Board of Directors and Board of Commissioners	Nota Dinas, Rapat / Official Memo, Meeting	Seluruh Divisi, FKAP / All Divisions, FKAP
12.	Laporan Tinjauan Manajemen / Management Review Report	Saat akhir periode SMAP / At end of SMAP period	Direksi dan Dewan Komisaris / Board of Directors and Board of Commissioners	Hasil Rapat / Meeting Result	FKAP
13.	Budaya Anti Suap <i>Continuous Improvement</i> / Continuous Improvement Anti-Bribery Culture	Setiap saat / At all times	Manajemen, Pegawai / Management, Employees	Internalisasi, IPC <i>Continuous Improvement</i> , IPC CI Award / Internalization, IPC Continuous Improvement, IPC CI Award	Fasilitator, FKAP / Facilitator, FKAP

Pengembangan Kompetensi terkait Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi Insan IPC terkait implementasi SMAP berbasis pada ISO 37001:2016. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah memberikan program pengembangan kompetensi berupa *Training ISO 37001 Awareness* dan Internal Audit kepada 25 (dua puluh lima) Pekerja IPC yang bertugas untuk menjalankan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Auditor Internal.

Program Pengendalian Gratifikasi

Perseroan menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan Pihak Ketiga, sering kali bersinggungan dengan praktik Gratifikasi. Oleh sebab itu, Perseroan menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/15/6/2/KPP/UT/PI.II-20 tanggal 15 Juni 2020 sebagai upaya untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya praktik gratifikasi di seluruh lingkup operasional Perseroan serta memberi pemahaman kepada Insan IPC tentang perlakuan terhadap Gratifikasi.

Gratifikasi yang Termasuk Tindakan Suap

Beberapa contoh Gratifikasi yang termasuk dalam tindakan Suap sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

Competency Development Related to Anti-Bribery Management System Implementation

To improve the quality of Anti-Bribery Management System (SMAP) implementation, the Company provides knowledge and insights for IPC personnel regarding the implementation of SMAP based on ISO 37001:2016. Throughout 2020, the Company provided competency development programs in the form of ISO 37001 Awareness and Internal Audit Training to 25 (twenty-five) IPC employees assigned to carry out the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and Internal Auditor.

Gratuity Control Program

The Company realizes that business relationship with third parties often intersects with the practice of gratification. Therefore, the Company established Gratification Control Guidelines in Board of Directors Decree No. HK.01/15/6/2/KPP/UT/PI.II-20 dated June 15, 2020 as an effort to control and prevent the practice of gratification throughout the Company's operational scope as well as to provide understanding to IPC personnel regarding the treatment of Gratification.

Gratification That Constitutes Bribery

Some examples of gratification that constitutes an act of bribery as regulated in the Gratification Control Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), include but are not limited to:



1. Uang dan/atau setara uang, termasuk *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Insan IPC sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, misalnya vendor, mitra kerja, dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan IPC yang bersangkutan;
 2. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi sebagai tanda terima kasih yang diterima Insan IPC dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
 3. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima Insan IPC dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
 4. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Insan IPC yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
 5. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan, dan kewenangan dari Insan IPC yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 6. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan IPC karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 7. Makanan, minuman, dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan IPC yang bersangkutan yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
 8. Keuntungan dari undian, program, atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak *fair*;
 9. Pemberian fasilitas transportasi akomodasi, uang, dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan IPC yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
 10. Jamuan makan, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan IPC oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh IPC;
1. Cash and/or cash equivalents, including vouchers and checks, given to IPC personnel as a token of gratitude from third parties, for example vendors, business partners, and other parties related to goods and services procurement process, related to the selection or the completion of a work (project) and/or other activity during the implementation of the duties and positions of the relevant IPC Personnel;
 2. Unofficial gifts in the form of cash and/or cash equivalents, goods, facilities, and/or accommodation as a token of gratitude received by IPC Employee from Third Parties related to work feasibility inspection process and/or the approval/monitoring process for the work of the Third Party;
 3. Unofficial gifts in the form of cash and/or cash equivalents, goods, facilities, and/or accommodation as a token of gratitude received by IPC Employee from third parties who are business partners, including but not limited to notaries, insurance companies, banks, travel agencies, airlines and/or other companies/consulting offices for ongoing cooperation/cooperation agreements;
 4. Any form of gift from a Third Party in connection with promotion and/or new position of IPC Employee which is usually done as a sign of introduction;
 5. Loans from banks or other financial institutions that are received due to personal relationship, position, and authority of the relevant IPC personnel and do not apply to the general public;
 6. Opportunities or benefits including an amount/percentage of special interest or commercial discounts received by IPC personnel due to personal relationship or position and do not apply to the general public;
 7. Food, beverages, and entertainment which are given specifically due to the position or authority of the relevant IPC Personnel which are given outside work and are not related to official duties;
 8. Gains from lottery, programs, or contests that are conducted in a closed and unfair manner;
 9. Provision of transportation facilities, accommodation, cash and/or cash equivalents related to duties and obligations implementation of the IPC Employee concerned in the Third Party company, which is based on direct appointment and/or invitation of the Third Party;
 10. Meals, accommodation and other facilities provided to IPC Personnel by Third Party when performing on-the-spot checking for the inspection/analysis of work results feasibility and/or inspection of Third-Party workplace by a team assigned by IPC;

- | | |
|--|---|
| <p>11. Pemberian akomodasi, hiburan (<i>entertainment</i>), fasilitas, paket wisata perlengkapan, dan/atau <i>voucher</i>, termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, <i>voucher</i> hotel, olahraga golf, tenis lapangan, <i>voucher</i> hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan IPC di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan IPC tersebut;</p> <p>12. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan IPC yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;</p> <p>13. Pemberian kepada Insan IPC sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan dari Pihak Ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,00 dari masing-masing Pihak Ketiga, kecuali yang diatur dalam pemberian bukan termasuk Gratifikasi;</p> <p>14. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/<i>catering</i> dari Pihak Ketiga pada saat Insan IPC yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan kelulusan;</p> <p>15. Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari Pihak Ketiga kepada Keluarga Inti Insan IPC;</p> <p>16. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan IPC membeli barang dari Pihak Ketiga;</p> <p>17. Pemberian bingkisan dalam bentuk apapun kepada Insan IPC dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.</p> | <p>11. Provision of accommodation, entertainment, facilities, tour packages, equipment, and/or vouchers, including but not limited to airplane tickets, hotel vouchers, golf sports, tennis courts, entertainment vouchers in connection with duties and obligations implementation of IPC personnel in a third-party company that are irrelevant/unrelated to the assignment purpose of the IPC Personnel;</p> <p>12. Provision of free medical expenses when the IPC Personnel concerned goes to a hospital, given by a Third Party during the implementation of their duties;</p> <p>13. Gifts for IPC Employee related to celebrations, including but not limited to birthdays, weddings, and graduations from a Third Party, of which material value in Rupiah exceeds Rp1,000,000.00 from each Third Party, except those regulated as non-gratification gifts;</p> <p>14. Provision of facilities in the form of catering services from third parties when the relevant IPC Employee hold celebrations, including but not limited to weddings, birthdays and graduations;</p> <p>15. Provision of tour travel facilities from Third Parties to the Core Family of IPC Employee;</p> <p>16. Special discount when IPC Employee purchase goods from third parties;</p> <p>17. Any form of gift to IPC Employee from Third Parties related to the celebration of religious holidays.</p> |
|--|---|

Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program anti gratifikasi, serta mewujudkan budaya Perseroan yang bebas dari praktik KKN, IPC senantiasa melakukan sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi secara khusus serta kebijakan penerapan GCG secara umum, kepada Insan IPC pada setiap tingkatan/jenjang organisasi maupun pihak eksternal Perseroan. Sosialisasi dilakukan melalui pembagian buku pedoman, *website internal*, promosi melalui media cetak terkait "IPC Bersih" dan larangan gratifikasi, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki IPC. Sosialisasi dilakukan di Kantor Pusat, seluruh Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perseroan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas Perseroan dan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Perseroan.

Dissemination of Gratification Control Guidelines

To support the success of the anti-gratification program and to create a Company culture that is free from the practice of KKN, IPC continues to disseminate gratification control guidelines in particular and GCG implementation policies in general to IPC personnel at all levels of the organization and to external parties of the Company. Dissemination is carried out through distribution of manuals, internal websites, promotion through printed media related to "IPC Bersih" and the prohibition of gratification, as well as through other activities and media owned by IPC. Dissemination is carried out at the Head Office, all Port Branches, and Subsidiaries. For external parties, the dissemination is directed at providing an understanding of the Company's Gratification Control Guidelines, so as to create a healthy business process and protect the Company's operations from activities that can harm the Company.



Sosialisasi telah dilakukan baik melalui tatap muka dan juga secara daring di seluruh Departemen Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan, sementara sosialisasi lainnya dalam bentuk media promosi seperti *banner* dan poster. Setiap tahunnya, Direksi IPC mengeluarkan surat pengumuman kepada seluruh Insan IPC di Kantor Pusat dan Cabang Perusahaan terkait larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan. Serta memberikan surat larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan ke EVP/SVP/VP Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.

Pada tahun 2020, IPC juga menyosialisasikan larangan penerimaan gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari *stakeholder* dan pihak-pihak lainnya untuk Insan IPC, melalui media sosial resmi Perseroan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan, yaitu Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

Komitmen IPC terkait Larangan Penerimaan Gratifikasi pada Hari Besar Keagamaan

KOMITMEN IPC GROUP TENTANG LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai perusahaan yang menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), IPC Group telah menetapkan bahwa seluruh individu IPC **dilarang meminta/menerima gratifikasi** (hadiah, bingkisan, parsel, dll.) dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari *stakeholder* dan pihak-pihak lainnya, termasuk pada **Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H.**

Kami memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan dan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada individu IPC. Apabila ditemukan indikasi individu IPC yang mengatasnamakan pribadi maupun perusahaan meminta/menerima hadiah, bingkisan dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon melaporkannya kepada Saluran IPC Bersih melalui salah satu *channel* berikut :

- Telp : +62 21 2782 2345
- WA : +62 811 933 2345
- E-mail : ipcbersih@whistleblowing.link

dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, Mei 2020
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Direksi
www.indonesiaport.co.id

Pemberian Sanksi terkait Pelanggaran Gratifikasi

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, dan berpotensi dikenakan Tindak Pidana Suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Socialization has been carried out both face-to-face and online in all Head Office Departments, Port Branches, and Subsidiaries, and through promotional media such as banners and posters. Each year, IPC Board of Directors issues an announcement letter to all IPC Employees at the Head Office and Company Branches regarding the prohibition of receiving gifts/parcels for religious holidays as well as letter prohibiting the receipt of gifts/parcels for religious holidays to the EVP/SVP/VP at Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.

In 2020, IPC also disseminated the prohibition of receiving gratuities, both directly and indirectly from stakeholders and other parties for IPC Employees through the Company's official social media before religious holidays, namely Eid al-Fitr and Christmas and New Year.

IPC Commitment on the Prohibition of Receiving Gratuities on Religious Holidays

KOMITMEN IPC GROUP TENTANG LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Dalam rangka menegakkan komitmen sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip "Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)", Manajemen IPC Group telah menetapkan bahwa seluruh insan IPC **dilarang menerima dan atau memberikan gratifikasi** dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pada **Hari Natal dan Tahun Baru.**

Kami membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada insan IPC. Apabila ditemukan indikasi insan IPC meminta dan atau menerima hadiah, bingkisan, uang atau dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon melaporkannya melalui salah satu Saluran IPC Bersih dibawah ini

- Telp : +62 21 2782 2345
- WA : +62 811 933 2345
- E-mail : ipcbersih@whistleblowing.link
- Website : <https://ipcbersih.whistleblowing.link/>

Manajemen IPC Group mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, Desember 2020
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Direksi

www.indonesiaport.co.id | [@indonesiaportcorp](https://www.instagram.com/indonesiaportcorp) | [@indonesiaport](https://www.instagram.com/indonesiaport) | Pelabuhan Indonesia II | Pelabuhan Indonesia II / IPC

Imposition of Sanctions Related to Gratification

Violation of the provisions stipulated in the Gratification Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will be subject to sanctions in accordance with the provisions and regulations applicable in the Company and may be charged for bribery crime in accordance with prevailing laws in Indonesia.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Sebagai perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka menegakkan upaya pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal di lingkungan aparatur negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara, termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik KKN, serta perbuatan *fraud* lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Wajib Laporan LHKPN

Pelaksanaan LHKPN Perusahaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 tanggal 16 Maret 2017 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pedoman tersebut mengatur tentang ketentuan pejabat Perseroan yang menjadi Wajib Laporan LHKPN, antara lain:

Submission of State Officials Assets Report (LHKPN)

As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company is obligated to comply with applicable laws and regulations, one of which is related to the obligation to submit a State Officials Assets Report (LHKPN) in order to enforce the eradication of corruption and internal frauds within state organizations as regulated in Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism requires every state administrator, including other officials who hold strategic functions related to state administrators, such as the Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials at SOEs and Regional-Owned Enterprises (BUMD), to report and declare their assets before and after taking office and to let their assets be audited before and after taking office.

LHKPN is a list of all State Administrators' assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the KPK as regulated in KPK Decree No. KEP-07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Audit, and Declaration of State Administrators Assets Report.

The LHKPN audit submitted to the KPK is aimed at realizing State Administrators who comply with the general principles of state administrators who are free from KKN practices and other fraudulent acts. Every State Administrator is required to report their assets through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the entire amount, type and value of assets reported correctly, quickly, accurately, and responsibly.

LHKPN Subjects

The implementation of the Company's LHKPN refers to Decree of the Board of Directors No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 dated March 16, 2017 regarding Obligation to Report Assets for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The guideline regulates the requirements of Company officials who are obligated to submit LHKPN, among others:



1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pekerja Perseroan yang ditugaskan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Anak Perusahaan;
3. Pejabat Struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perseroan.

Penyampaian LHKPN Tahun 2020

Pada periode 1 Januari - 30 April 2020, IPC memiliki total Wajib Lapo LHKPN sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, dimana seluruh Wajib Lapo LHKPN IPC 100 persen telah menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Proses Pengadaan yang Transparan

IPC melakukan praktik pengadaan barang dan/atau jasa sebagai mekanisme yang mendukung terlaksananya rantai pasokan yang memadai di lingkungan Perusahaan Induk maupun Entitas Anak. Mekanisme pelaksanaan praktik pengadaan barang dan jasa di Perseroan telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Dalam menjalankan kebijakan pengadaan barang dan jasa, Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel. Perseroan juga mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekrutan nasional demi memperluas kesempatan bagi usaha kecil dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Selain itu, Perseroan dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN dalam melakukan praktik pengadaan barang dan/atau jasa.

Untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dan memudahkan penyedia maupun Perseroan, IPC telah mengembangkan sistem *e-procurement* yang terdiri dari beberapa modul, yaitu *Vendor Management System* (VMS), *e-Tender*, *e-Documents*, Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP), *e-Catalogue*, dan *Contract Management System* (CMS). Adapun ruang lingkup praktik pengadaan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya.

1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
2. Company employees who are assigned as members of the Board of Commissioners or Board of Directors of Subsidiaries;
3. Structural Officers 1 (one) level below the Board of Directors of the Company.

Submission of 2020 LHKPN

During January 1 – April 30, 2020 period, IPC had a total of 92 (ninety-two) LHKPN subjects. All LHKPN subjects of IPC 100 percent have submitted the LHKPN to the KPK.

Transparent Procurement Process

IPC practices the procurement of goods and/or services as a mechanism that supports an adequate supply chain within the Parent Company and Subsidiaries. The mechanism for goods and services procurement in the Company is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 concerning Guidelines for Goods and Services Procurement in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In implementing the goods and services procurement policy, the Company always prioritizes the principles and ethics of goods and services procurement, namely efficient, effective, competitive, transparent, just and fair, open, and accountable. The Company also prioritizes the use of domestic production, design and engineering in order to expand opportunities for small businesses and encourage domestic industrial growth. In addition, the Company can synergize with SOEs/SOE Subsidiaries/SOE Affiliated Companies in carrying out goods and services procurement.

To support integrated goods and services procurement process and facilitate both providers and the Company, IPC has developed an *e-procurement* system which consists of several modules, namely the Vendor Management System (VMS), *e-Tender*, *e-Documents*, Supplier Selection Document Standards (SDP), *e-Catalog*, and Contract Management System (CMS). The scope of procurement practices carried out by the Company includes procurement of Construction Work, Consultant Services, and Other Services.

Guna menggenapi semangat keberlanjutan, Perseroan telah berupaya menerapkan *sustainability procurement* dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaan, termasuk *supply chain*. Penerapan *sustainability procurement* tersebut dapat membantu Perseroan dalam mengelola risiko (termasuk peluang) untuk pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Inisiatif Perseroan untuk menerapkan *sustainability procurement* dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pengadaan berkelanjutan merupakan peluang untuk memberikan nilai lebih bagi IPC melalui peningkatan produktivitas, nilai, dan kinerja, sehingga memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih baik antara pembeli, pemasok, dan semua pemangku kepentingan. Inisiatif ini juga mendorong terciptanya inovasi yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum, Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui proses Pemilihan Penyedia dengan 4 (empat) metode, yaitu tender/seleksi umum, tender terbatas/seleksi terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

Tender/Seleksi Umum

Metode Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;

Metode Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar).

Penunjukan Langsung

Metode Pemilihan Penyedia untuk:

1. Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (limaratusjutarupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai tidak terbatas;
3. Orang perseorangan dan/atau individual *expert* sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

In line with spirit of sustainability, the Company strived to implement sustainability procurement by integrating sustainability principles into procurement policies and practices, including the supply chain. The implementation of sustainability procurement can help the Company in managing risks (including opportunities) for sustainable environmental, social and economic development.

The Company's initiative to implement sustainability procurement is motivated by the belief that it will provide added value to IPC by increasing productivity, value, and performance, thus enabling better communication between buyers, suppliers, and all stakeholders. This initiative also encourages innovation which is in line with the Company's vision and mission.

Procurement Methods for Goods and Services

In general, the procurement of goods and services through suppliers is carried out through a Supplier Selection process with 4 (four) methods, namely tender/general selection, limited tender/limited selection, direct appointment, and direct procurement.

General Tender/Selection

A supplier selection method for the procurement of goods, Construction Work, Consultant Services, and Other Services with a value of more than Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).

Limited Tender/Selection

A supplier selection method for the procurement of goods, construction work, consultant services, and other services with a value from Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) to Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).

Direct Selection

A supplier selection method for:

1. The procurement of goods with a value from Rp500,000,000.00 (fife hundred million rupiah) to Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah);
2. The procurement of goods, construction work, and other services with a value above Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) up to an undetermined value;
3. Individual expert with a value up to Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).



Pengadaan Langsung

Metode Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Direct Procurement

A supplier selection method for the procurement of goods with a value of up to Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

Persyaratan Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubungan dengan kebutuhan pengadaan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, mempunyai risiko atau menggunakan teknologi tinggi, menggunakan peralatan khusus, dan memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi, maka IPC harus menetapkan syarat yang lebih tinggi untuk menunjang kebutuhan tersebut. Persyaratan khusus tersebut antara lain:

1. Menyediakan dokumen paling sedikit berupa dokumen rancangan awal (*basic design*) meliputi data peta geologi teknis lokasi pekerjaan, referensi data penyelidikan, penetapan lingkup pekerjaan, identifikasi dan alokasi risiko proyek, identifikasi dan kebutuhan lahan, dan gambar dasar/skematis/potongan/tipikal yang mendukung pekerjaan.
2. Mengantongi izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi.
3. Mencantumkan keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.

Special Requirements for Goods and Services Procurement

In connection with the procurement requirements for work that is complex, poses risks or uses high technology, uses special equipment, and has high unforeseen conditions, IPC must set higher requirements to support these needs. The special requirements include:

1. Provide documents which at least constitute a basic design document, covering technical geological map of the work location, reference to investigation data, determination of work scope, identification and allocation of project risks, identification and requirements of land, and basic/schematic/cut/typical drawings that supports the work.
2. Have permits, environmental requirements, or certificates that must be obtained in the preparation of the design and construction implementation.
3. Include a description of the part of the work that has high unforeseen conditions.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan telah menjalin mitra dengan 460 Penyedia (Vendor) untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, yang mana 353 Penyedia atau 76,74 persen di antaranya merupakan Pemasok Lokal atau pemasok yang beroperasi dalam satu provinsi yang sama dengan wilayah operasional Perseroan. Besarnya proporsi penggunaan Pemasok Lokal tersebut sejalan dengan komitmen Perseroan untuk mendukung produksi dalam negeri.

Implementation of Goods and Services Procurement Activities in 2020

In 2020, the Company established partnership with 460 Suppliers (Vendors) to meet the needs of the Company's operations. 353 vendors or 76.74 percent are local vendors or vendors operating within the same province as the Company's operational area. The large proportion of local supplier use was in line with the Company's commitment to supporting domestic production.

Adapun nilai pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1,70 triliun, dengan uraian sebagai berikut:

The expenditure for goods and services procurement amounted to Rp1.70 trillion with description as follows:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa IPC Tahun 2020 (dalam Juta Rupiah) / IPC Goods/Services Procurement in 2020 (in millions of Rupiah)				
Tender/Seleksi Umum / General Tender/ Selection	Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas / Limited Tender/ Selection	Penunjukan Langsung / Direct Appointment	Pengadaan Langsung /Direct Procurement	Jumlah / Total
335.175	306.444	1.027.739	31.912	1.701.271
19,70%	18,01%	60,41%	1,88%	100,00%

Sosialisasi terkait Praktik Operasi yang Adil kepada Penyedia Tahun 2020

Untuk menjamin terwujudnya praktik pengadaan barang dan jasa yang transparan dan adil, Perseroan telah melaksanakan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bagi Pelaku Usaha/ Mitra Kerja Sama di lingkungan IPC pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui *Zoom Meeting*.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan para Penyedia maupun Mitra Kerja Sama memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menyampaikan apabila terjadi tindakan *fraud*, seperti korupsi, gratifikasi, suap, benturan kepentingan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip operasi yang adil.

Persaingan Usaha yang Sehat

Perkembangan jasa pelabuhan dan logistik yang semakin dinamis menyebabkan ketatnya persaingan usaha di industri pelabuhan. Hal tersebut diperkuat oleh gelar Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun demikian, IPC memaknai persaingan bukan sebagai suatu rintangan usaha, melainkan sebagai pendongkrak semangat Perseroan untuk terus maju dan bertumbuh melalui penyempurnaan kualitas layanan dan penguatan keunggulan dan daya saing dalam rangka mewujudkan visi Perseroan untuk Menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia.

Keyakinan dan optimisme IPC dalam menghadapi persaingan didasari oleh *spirit* dan keteguhannya untuk menjadi pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Perseroan juga berupaya untuk menjauhi persekongkolan atau konspirasi usaha dengan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu pasar atau kinerja kompetitor. Untuk memenangkan persaingan, IPC lebih fokus pada upaya perbaikan kualitas layanan dan penerapan strategi bisnis yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mewujudkan proses bisnis yang mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders*.

Dalam menghadapi persaingan yang terjadi, Perseroan senantiasa berpedoman pada kaidah dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, antimonopoli, dan *anti-trust*. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip IPC untuk mendukung terciptanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku pasar, serta mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, dalam bersaing, Perseroan juga berpegang teguh pada Pedoman Kode Etik Bisnis agar dapat terhindar dari cara-cara yang tidak etis, seperti mengungkapkan kekurangan-kekurangan kompetitor.

Dissemination of Fair Operating Practices to Suppliers in 2020

To ensure a transparent and fair procurement of goods and services, the Company carried out Dissemination of Anti-Bribery Management System Implementation at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for Business Entities/Cooperation Partners in the IPC environment on October 23, 2020 through *Zoom Meeting*.

Through this dissemination activity, Suppliers and Cooperation Partners are expected to have an understanding and awareness to report any acts of fraud, such as corruption, gratification, bribery, conflict of interest, and other actions that are contrary to the principles of fair operation.

Fair Business Competition

The increasingly dynamic development of port services and logistics has resulted in intense business competition in the port industry. This is reinforced by Indonesia's title as the largest maritime country in the world. However, IPC interprets competition not as a business obstacle, but as a booster for the Company's spirit to progress and grow further by improving service quality and strengthening excellence and competitiveness in realizing the Company's vision to become a World Class Maritime Ecosystem.

IPC's confidence and optimism in facing competition is rooted in its spirit and determination to become a world-class port that excels in operations and services. The Company also strives to avoid any business conspiracy with certain parties to disrupt the market or the performance of competitors. To win the competition, IPC is more focused on efforts to improve service quality and implement targeted business strategies in order to increase customer satisfaction while at the same time creating a business process that is able to provide added value to stakeholders.

In facing the occurring competition, the Company refers to the principles of fair competition, anti-monopoly and anti-trust. These efforts are in line with IPC principles to support the creation of equal business opportunities for all market players, and promote economic efficiency and sustainable growth. In addition, the Company also upholds the Code of Business Conduct in competing to avoid engaging in unethical ways, such as disclosing the shortcomings of competitors.



Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), IPC berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Insan IPC tidak akan terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Insan IPC akan memasarkan layanan dan berinteraksi dengan para pelanggan berdasarkan kinerja dan tidak akan menyampaikan informasi yang tidak benar tentang layanan pesaing;
3. Insan IPC akan mengutamakan keadilan, kebenaran, dan transparansi terhadap kompetisi bisnis dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Insan IPC tidak diperkenankan untuk menyampaikan komentar atau pendapat tentang layanan atau produk yang dihasilkan para pesaing;
5. Insan IPC tidak diperkenankan memberikan informasi atau data Perusahaan secara ilegal untuk kepentingan pesaing.

Kesungguhan IPC dalam memegang prinsip-prinsip persaingan yang sehat, anti monopoli, dan *anti-trust* dibuktikan dengan tidak adanya perkara hukum, keputusan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun lembaga anti monopoli di tingkat global kepada Perseroan pada tahun 2020.

Menghormati Hak Kekayaan Intelektual

Dalam menjalankan bisnis, IPC senantiasa menghargai karya seseorang atau institusi dan memberikan penghormatan terhadap hak intelektual seseorang atau institusi. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Oleh sebab itu, IPC senantiasa mengedepankan sikap:

1. Menghormati HAKI pihak lain;
2. Seluruh insan IPC harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan;
3. Insan IPC harus menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual;
4. Insan IPC yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perseroan, atau Pekerja yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait

As stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/1/KPP/UT/PI.II-2020 dated August 14, 2020 regarding Guidelines for the Code of Business Conduct of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), IPC is committed to complying with business competition laws, both written and unwritten, with due observance of the following matters:

1. IPC personnel will not be involved in illegal trading practices, abuse of market domination or other unfair trading activities based on the prevailing laws and regulations;
2. IPC personnel will market services and interact with customers based on performance and will not convey false information about competitor services;
3. IPC personnel will prioritize fairness, truth and transparency in business competition by following the prevailing laws and regulations;
4. IPC personnel are not allowed to express commentaries or opinions about services or products provided by competitors;
5. IPC personnel are not permitted to illegally provide Company information or data for the benefit of competitors.

The seriousness of IPC in upholding the principles of fair competition, anti-monopoly and anti-trust is proven by the absence of legal cases, decisions and sanctions imposed to the Company by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) or anti-monopoly institutions at the global level in 2020.

Respecting Intellectual Property Rights

In conducting business, IPC always respects the work of a person or institution and respects the intellectual rights of a person or institution. Intellectual Property Rights (HAKI) are intangible assets that are the result of creativity such as patents, copyrights and trademarks. As such, IPC promotes the following attitudes:

1. Respect the intellectual property rights of others;
2. All IPC personnel must actively participate in protecting the intellectual property rights of the Company;
3. IPC personnel must comply with the laws and regulations governing intellectual property rights;
4. IPC personnel who participate/work in developing a process or product that will be used by the Company, or employees who own the work, must treat information related to the process or product as the property of the

- dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perseroan, baik selama masa kerja maupun setelah Insan IPC tidak bekerja lagi untuk IPC;
- Seluruh Insan IPC harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perseroan. IPC berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.

Perlindungan HAKI

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak memiliki sertifikasi atas hak kekayaan intelektual.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Pada tahun 2020, Perseroan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil sebesar Rp1.702,09 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil Tahun 2020

No.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil / Corporate Social Responsibility Activities for Fair Operating Practices	Alokasi Dana (Rp) / Fund Allocation (Rp)
1.	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa / Goods and services procurement implementation	1.701.271.382.920
2.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Vendor / Vendor Satisfaction Survey Implementation	205.700.000
3.	Assessment dan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan / ISO 37001:2016 Assessment and Certification on Anti-Bribery Management System	326.222.000
4.	Implementasi <i>Whistleblowing System</i> IPC / IPC <i>Whistleblowing System</i> Implementation	290.400.000
Jumlah / Total		1.702.093.704.920

MEKANISME PENGADUAN MASALAH OPERASI YANG ADIL

Perseroan memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran di bidang Operasi yang Adil yang terjadi di lingkungan IPC maupun dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Insan IPC melalui mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Mekanisme Pengaduan Gratifikasi

Dalam kondisi dimana Insan IPC tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dimana pemberian tersebut di luar ketentuan yang telah disebutkan di atas, atau pemberian tersebut sudah ada di suatu

Company, both during the working period and after the IPC Personnel no longer works for IPC;

- All IPC Personnel must inform the results of the work they produce both during and outside of working hours, if the work is related to the business or operations of the Company. IPC is entitled to all the benefits (*exclusive benefits*) of patents, and others related to the work referred to above.

Intellectual Rights Protection

Until the end of 2020, the Company did not have certification of intellectual property rights.

ALLOCATION OF FUNDS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION FOR FAIR OPERATING PRACTICES

In 2020, the Company allocated funds to support the implementation of Corporate Social Responsibility activities for Fair Operating Practices amounting to Rp1,702.09 billion with the following details:

Allocation of Funds for Corporate Social Responsibility Implementation for Fair Operating Practices in 2020

COMPLAINT MECHANISM FOR FAIR OPERATING PRACTICE

The Company provides the opportunity for both internal and external stakeholders to report all forms of violations of Fair Operating Practices that occur within IPC or committed by the Board of Commissioners, Board of Directors, and IPC Personnel through the gratification reporting mechanism and the *Whistleblowing System*.

Gratification Complaint Mechanism

In a condition where IPC personnel cannot avoid receiving gifts from Third Parties, whereas the gifts do not fall into the aforementioned provisions, or the gifts are already entrusted to other people without the knowledge of the IPC Personnel,



tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan IPC tersebut, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Pelaporan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Laporan Gratifikasi disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.gol.kpk.go.id.

Pelaporan melalui Tim UPG IPC

Pelapor terlebih dahulu mengisi form Laporan Gratifikasi UPG IPC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima. Kemudian, UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG IPC selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK.

Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misalnya makanan dan minuman) dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi. Sedangkan untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cenderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kadaluwarsa dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut ke depannya.

Perlindungan terhadap Pelapor Gratifikasi

Pelapor Gratifikasi memiliki hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, Pelapor Gratifikasi dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tidak pidana korupsi.

then the person concerned must report it either directly to the KPK or through the Gratification Control Unit (UPG).

Reporting through the Corruption Eradication Commission (KPK)

The Gratification Report is submitted online through the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by the KPK within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by the KPK. For more complete information, please visit www.gol.kpk.go.id.

Reporting through the UPG IPC Team

The reporter must first fill in the IPC UPG Gratification Report form no later than 7 (seven) working days from the date the gratification was received by delivering the object of gratification received. Then, UPG makes a recapitulation of the Gratification Report and reports it to the KPK no later than 14 (fourteen) working days from the time the Gratification report is received by the IPC UPG Team. The status of the gratification object will be determined by the KPK.

Perishable gratifications (for example food and beverages) received can be donated to the social institutions by submitting proof of acceptance to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of the gratification. Meanwhile, the receipt of gratification in the form goods, such as souvenirs/cash/food that does not expire quickly and so forth shall wait for determination of gratification object by the Corruption Eradication Commission for future follow-up.

Protection of Gratification Reporters

Gratification Reporters have the right to be legally protected. According to Article 15 of Law No. 30 of 2002, the KPK is obliged to provide protection for Witnesses or Reporters who have submitted reports or provided information regarding the occurrence of corruption crime. In addition, based on Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, the Witness Protection Agency for Victims (LPSK) has the responsibility to provide protection and assistance to witnesses and victims. In this context, the Gratification Reporter is being asked for their statement as a witness in the allegation of corruption crime.

Pelapor yang patuh terhadap Pedoman Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:

1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
2. Pemindahtugasan atau mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap Pelapor;
3. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan; dan
4. Kerahasiaan identitas Pelapor.

Upaya perlindungan diberikan dalam hal:

1. Pelapor Gratifikasi menghadapi potensi adanya intimidasi, ancaman yang bersifat fisik, psikis, termasuk ancaman terhadap karier Pelapor dan perlakuan yang tidak lazim lainnya dari Pihak Internal atas dampak pelaporan tersebut;
2. Pelapor Gratifikasi mengajukan permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG melalui Tim UPG IPC.

Laporan Gratifikasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat 13 (tiga belas) laporan gratifikasi yang masuk melalui mekanisme pengaduan gratifikasi. Seluruh laporan gratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke KPK, serta telah mendapat penetapan status laporan gratifikasi dari KPK.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pelaporan pengaduan terkait masalah operasi yang adil juga dapat disampaikan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Adapun informasi terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran, termasuk jumlah laporan pelanggaran yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Reporters who comply with the Gratification Guidelines are entitled to receive protection measures in the form of:

1. Protection from retaliation or administrative treatment that is not objective and detrimental to the reporting party as an employee;
2. Transfer of assignment for the reporting person in the event of intimidation or physical threats against the reporting party;
3. Legal assistance in accordance with the provisions applicable in the Company; and
4. Confidentiality of the reporting party's identity.

Protection measures are provided if:

1. Gratification Reporter faces potential intimidation, physical and psychological threats, including threats to the reporter's career and other unusual treatment from Internal Parties regarding the impact of the report;
2. Gratification Reporter requests for protection from the KPK or LPSK by submitting a written request to the Member of the Board of Directors who is responsible for the implementation and monitoring of GCG through the IPC UPG Team.

2020 Gratification Report

In 2020, there were 13 (thirteen) gratification reports received through gratification reporting mechanism. All these reports have been followed up and reported to the KPK and received status of gratification report from the KPK.

Whistleblowing System Mechanism

Complaints related to issues of fair operating practices can also be submitted through the Whistleblowing System (WBS) mechanism. Information related to the Whistleblowing System, including the number of reports of violations received and followed up by the Company throughout 2020 is described in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.



CAPAIAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Skor GCG Perusahaan

Komitmen IPC untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh aspek bisnis tercermin dari perbaikan hasil *assessment* GCG di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, *assessment* GCG dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), dengan didampingi oleh pihak eksternal, dengan perolehan skor sebesar 98,73, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Sedangkan pada tahun 2019, *assessment* GCG dilakukan bersama dengan pihak eksternal menghasilkan skor 98,55, termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Penghargaan dan Sertifikasi

Daftar penghargaan dan sertifikasi yang berhasil diperoleh oleh Perseroan sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan Operasi yang Adil sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penghargaan dan Sertifikasi terkait Operasi yang Adil IPC Tahun 2020

ACHIEVEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR FAIR OPERATING PRACTICES

Corporate GCG Score

IPC's commitment to implementing GCG principles in an inclusive and sustainable manner in all business aspects is reflected on the improving GCG assessment results in 2020 compared to the previous year. In 2020, the GCG assessment was carried out through self-assessment with assistance from external party, with a score of 98.73 under category "Excellent". Meanwhile, in 2019, the GCG assessment was carried out together with external party with a score of 98.55 under category "Excellent".

Awards and Certifications

The list of awards and certifications earned by the Company for the implementation of Fair Operating Practices throughout 2020 are as follows:

IPC Awards and Certifications Related to Fair Operating Practices in 2020

Penghargaan / Awards

1. TOP GRC 2020
 - # 4 Stars : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - Pemenang Kategori "*The Most Committed GRC Leader 2020*" : Arif Suhartono (Direktur Utama IPC); / Winner of Category "*The Most Committed GRC Leader 2020*" : Arif Suhartono (IPC President Director)
 - Pemenang Kategori "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*" : Moermahadi Soerja Djanegara (Komisaris Utama IPC). / Winner of Category "*The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020*" : Moermahadi Soerja Djanegara (IPC President Commissioner).
2. GRC Excellence Award 2020
 - *The Best CEO & GRC Leader 2020* : Arif Suhartono (Direktur Utama IPC). / *The Best CEO & GRC Leader 2020* : Arif Suhartono (IPC President Director).
 - *The Best GRC Overall For Corporate And Performance 2020 (In Logistic Services)* : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3. Indonesia Most Trusted Companies Award 2020
 - *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2019* Kategori "TERPERCAYA" / *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2019* Category "TRUSTED"

Sertifikasi / Certifications

1. Sertifikat ISO 37001 : 2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (KAN) kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diterbitkan oleh BSI Indonesia (Masa Berlaku : 26 November 2020 – 25 November 2023). / ISO 37001 : 2016 Certification on Anti-Bribery Management System (KAN) to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) issued by BSI Indonesia (Validity Period : November 26, 2020 - November 25, 2023).

Survei Kepuasan dan Keterikatan Penyedia (Vendor)

Capaian pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Operasi yang Adil juga tercermin dari hasil Indeks Kepuasan dan *Engagement* Penyedia (Vendor) pada tahun 2020. Pencapaian tersebut diperoleh dari kegiatan Survei Kepuasan Penyedia (Vendor) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Desember 2020 terhadap 179 perusahaan/korporasi yang tersebar di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan.

Pada tahun 2020, Indeks Kepuasan Vendor Korporat (Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan) tercatat sebesar 5,24, sedangkan untuk Indeks *Engagement* Vendor secara Korporat tahun 2020 adalah 5,41.

Supplier (Vendor) Satisfaction and Engagement Survey

The achievement of Corporate Social Responsibility activities for Fair Operating Practices is also reflected in the results of the Supplier (Vendor) Satisfaction and Engagement Index of 2020. This achievement was obtained from the Supplier Satisfaction Survey which was carried out on December 16-18, 2020 to 179 companies/cooperatives across Head Office and Port Branches.

In 2020, the Corporate Vendor Satisfaction Index (Head Office and 12 Port Branches) was recorded at 5.24, while the 2020 Corporate Vendor Engagement Index was 5.41.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berangkat dari definisi tersebut, Perseroan menyadari pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan aktivitas operasionalnya melalui pemenuhan hak-hak setiap Insan IPC.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT PENEGAKAN HAM

Perseroan berkomitmen penuh untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak setiap Insan IPC. Hal tersebut dicerminkan melalui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Perseroan dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) yang mengatur tentang beberapa komponen dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap HAM, seperti pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, cuti, dan hak dasar lainnya.

Selain itu, Perseroan juga telah menetapkan Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Perseroan) dan menginternalisasikan kepada seluruh IPC secara berkala agar dapat menjadi landasan dan pedoman mereka dalam beretika dan berperilaku di seluruh lingkungan kerja Perseroan maupun dengan *stakeholder* lainnya.

Komitmen Perseroan dalam menegakkan HAM pada pelaksanaan aktivitas operasional tidak semata ditujukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam menghormati dan melindungi harkat dan martabat dari sesama manusia.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap HAM di lingkungan Perseroan mencakup pengelolaan hubungan industrial yang dimulai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memayungi kepentingan Pekerja dan Manajemen Perseroan dalam aspek ketenagakerjaan hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui penyampaian keluhan, Bipartit, dan Tripartit. Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya untuk

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

The definition of Human Rights (HAM) according to the Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 concerning Human Rights is a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and is a gift that must be respected, upheld and protected by the state, law and government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. Based on this definition, the Company realizes the importance of upholding human rights in the implementation of its operational activities by fulfilling the rights of every IPC Personnel.

COMPANY'S COMMITMENT AND POLICY ON HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT

The Company is fully committed to ensuring the fulfillment of all rights of every IPC Person. This is reflected in the existence of a Cooperation Agreement between the Company's Management and the Indonesian Port Workers Union II (SPPI II) which regulates several components of Corporate Social Responsibility towards Human Rights, such as prevention of acts of discrimination, freedom of association, arrangements for working time, leave, and other basic rights.

In addition, the Company has also established Codes of Business Ethics Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (the Company) and internalized it to all IPCs on a regular basis so that it can become their foundation and guidelines for ethics and behavior throughout the Company's work environment and with other stakeholders.

The Company's commitment to upholding human rights in the implementation of operational activities is not only intended as a form of compliance with laws and regulations, but also as a form of the Company's responsibility in respecting and protecting the dignity of fellow human beings.

THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

The implementation of Corporate Social Responsibility for Human Rights within the Company includes the management of industrial relations starting from the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB) which covers the interests of Employees and Company Management in the labor aspect to the settlement of industrial relations disputes through the submission of grievances, bipartite and tripartite. In addition, the Company also strives to fulfill the basic rights of every IPC



memenuhi hak-hak dasar setiap Insan IPC serta menolak tegas penggunaan tenaga kerja di bawah umur/pekerja anak dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Perseroan menargetkan untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional. Hal tersebut ditujukan melalui pengelolaan hubungan industrial yang proporsional dan mampu menciptakan hubungan yang sinergis, *mutual understanding*, *mutual respect*, *mutual trust*, dan *mutual benefit* antara Manajemen dan seluruh Insan IPC.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Pengelolaan Hubungan Industrial

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pegawai dan Manajemen, maka Perseroan memberikan kebebasan bagi seluruh Pekerja IPC untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui pembentukan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.398/M/BW/1999 dan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara No. 210/III/N/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 *juncto* Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara No. 210/III/N/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Pencatatan Hasil Musyawarah Pusat SPPI II tanggal 27 Desember 2018.

SPPI II diketuai oleh Dodi Nurdiana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II No. 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penguatan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Periode 2018 – 2021 dan Surat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II No. 02/XII/SK/SPPI-II/18 tanggal 10 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Perubahan Pengurus

Personnel and firmly rejects the use of underage/child labor in carrying out its operational activities.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANS ON HUMAN RIGHTS

The Company strives to prioritize human rights principles in carrying out all operational activities. This is aimed at managing industrial relations that are proportional and able to create synergistic relationships, mutual understanding, mutual respect, mutual trust, and mutual benefits between the Management and IPC Personnel.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS Industrial Relationship Management

Pursuant to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, industrial relation is a system of relations formed between actors in the process of producing goods and/or services consisting of elements from entrepreneurs, employees/laborers, and the government based on the values of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

In order to create harmonious industrial relations between the employees and the management, the Company provides freedom for all IPC Employees to associate, gather, and express opinions through the formation of the Indonesian Port Workers Union II (SPPI II) which has been registered in the Ministry of Manpower and Transmigration based on Decree of the Minister of Manpower No. KEP.398/M/BW/1999 and at the Office of the Manpower and Transmigration Office of North Jakarta Municipality No. 210/III/N/VII/2001 dated July 31, 2001, in conjunction with Sub-Department of Manpower and Transmigration of North Jakarta Municipality No. 210/III/N/VII/2007 dated July 31, 2007 regarding the Letter of Recording of the Results of the SPPI II Central Conference dated December 27, 2018.

The Head of Trade union of Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) is Dodi Nurdiana, who was appointed based on the Decree of the Central Executive Board of the Indonesian Port Workers Union II No. 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 dated December 27, 2018 on the Inauguration of the Organizational Structure and Composition of the Central Executive Board of the Indonesian Port Workers Union II for the 2018 - 2021 Period and Letter of the Indonesian Port Workers Union II No. 02/XII/SK/SPPI-II/18

DPP SPPI II. Hingga akhir tahun 2020, seluruh Pekerja IPC, baik Kantor Pusat maupun Cabang Pelabuhan, telah bergabung dalam keanggotaan SPPI II.

Pengakuan Para Pihak terkait Keberadaan Serikat Pekerja

Direksi Perseroan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi Pekerja yang didirikan secara sah yang mewakili anggotanya untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan perundingan dengan Perseroan mengenai hubungan kerja. Sedangkan Serikat Pekerja mengakui bahwa Direksi memiliki hak dan kewajiban untuk memimpin dan menjalankan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Bersama

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang serasi, dinamis, aman, tenteram, sejahtera, dan berintegritas yang tinggi, sehingga dapat menumbuhkembangkan Perseroan secara produktif dan berdaya saing, maka Manajemen IPC dan SPPI II sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019 – 2020 No. KP.08.03/9/4/1/HUP/LAS/PI.II-19 dan No. 05/12/SKEP/SPPI-II/19 pada tanggal 9 April 2019. PKB tersebut telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Surat Keputusan No. B.105/PHIJSK-PK/PP&PKB/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Secara garis besar, isi dari PKB antara IPC dan SPPI II mengatur tentang:

1. Maksud dan tujuan;
2. Hubungan kerja;
3. Rekrutmen, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan Pekerja;
4. Waktu kerja, lembur, cuti, izin meninggalkan pekerjaan, dan perjalanan dinas;
5. Penghasilan;
6. Kesejahteraan, kesehatan Pekerja, dan pembinaan mental;
7. Keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
8. Peraturan disiplin, jenis pelanggaran, dan sanksi Pekerja;
9. Keluh kesah, bipartit, dan tripartit;
10. Lain-lain
11. Penutup.

Isi dari PKB tersebut wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja yang ada di lingkungan kerja IPC.

dated December 10, 2018 on the Notification of Change of Management of DPP SPPI II. Until the end of 2020, all IPC Employees, both in Headquarters and Port Branches, have joined the SPPI II membership.

Recognition from Related Parties on the Existence of Worker Union

The Company's Board of Directors acknowledges that Worker Union is a legally established Employee organization that represents its members to carry out coordination, consultation and negotiation with the Company regarding work relations. Meanwhile, the Workers Union acknowledges that the Board of Directors has the right and obligation to lead and run the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.

Collective Labor Agreement

To realize an industrial relation that is harmonious, dynamic, safe, peaceful, prosperous, and with high integrity for the Company to be more productive and competitive, IPC Management and SPPI II agreed to enter into a Collective Labor Agreement (PKB) for the Period of 2019-2020 No. KP.08.03/9/4/1/HUP/LAS/PI.II-19 and No. 05/12/SKEP/SPPI-II/19 on April 9, 2019. The PKB has been registered with the Directorate General of Industrial Relations Development and Social Security for Workers of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in Decree No. B.105/PHIJSK-PK/PP&PKB/V/2019 dated May 3, 2019.

In general, the content of PKB between IPC and SPPI II regulates the following:

1. Purpose and objectives;
2. Work relationship;
3. Recruitment, development, education and training of Employees;
4. Working time, overtime, leave, permission to leave work, and official travel;
5. Income;
6. Worker welfare, health, and mental development;
7. Work safety and social security for workers;
8. Disciplinary regulations, types of violations, and Employee's sanctions;
9. Complaints, bipartite, and tripartite;
10. Others;
11. Closing.

The content of PKB must be announced to all Employees in IPC's work areas.



Pemenuhan Hak-Hak Dasar Insan IPC

Selaras dengan komitmen untuk menegakkan aspek HAM dalam pelaksanaan aktivitas operasional, Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar dari setiap Insan IPC sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun wujud realisasi dari pemenuhan hak dasar Pekerja IPC diuraikan sebagai berikut.

Hak Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Perseroan telah menjamin hak Insan IPC untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui pembentukan, pengakuan, dan jaminan SPPI II. Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan SPPI II, Perseroan memberikan bantuan dan fasilitas, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas ruang kantor kesekretariatan beserta kelengkapannya yang memadai dan Serikat Pekerja wajib memelihara dan menjaganya agar tetap terawat. Terhadap fasilitas dan kelengkapan kesekretariatan yang telah disediakan oleh Perseroan kepada Serikat Pekerja ditetapkan sebagai barang inventaris Perseroan.
2. Membantu menyediakan fasilitas untuk mengadakan rapat bagi Serikat Pekerja.
3. Membantu pelaksanaan pemungutan iuran wajib melalui pemotongan penghasilan Pekerja yang menjadi Anggota Serikat Pekerja, berdasarkan permintaan tertulis dari Serikat Pekerja.
4. Memberikan bantuan operasional setiap tahun yang besarnya ditetapkan Manajemen dengan mempertimbangkan rencana kegiatan yang diajukan Serikat Pekerja sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) ditetapkan Manajemen setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5. Memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja dalam menjalankan Serikat Pekerja, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung. Kegiatan Serikat Pekerja yang dimaksud adalah mencakup kegiatan:
 - a. Musyawarah Pusat/Cabang;
 - b. Rapat Kerja Pusat/Cabang;
 - c. Rapat Pimpinan;
 - d. Rapat Pleno;
 - e. Rapat Pengurus Harian;
 - f. Bipartit;
 - g. Tripartit;

Basic Rights Fulfillment for IPC Personnel

In line with its commitment to upholding human rights aspects in the implementation of operational activities, the Company always strives to fulfill the basic rights of every IPC Personnel as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The realization of the fulfillment of the basic rights of IPC Employees is described as follows.

Rights of Association, Gathering, and Expressing Opinions

As explained above, the Company has guaranteed the rights of IPC Personnel to associate, gather, and express opinions through the formation, recognition and guarantee of SPPI II. To facilitate the implementation of all SPPI II activities, the Company provides assistance and facilities, including:

1. Provide secretary office facility and adequate equipment and the Worker Union is obliged to maintain the facility. The secretary facilities and equipment that have been provided by the Company to the Workers' Union are regarded as the Company's inventory.
2. Provide facilities to organize meetings for Worker Union.
3. Assist the collection of mandatory contributions through deduction of income of employees who are member of the Workers Union, based on written request by the Workers Union.
4. Provide operational assistance every year, the amount of which is determined by the Management by considering the activity plan proposed by the Workers Union in accordance with the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) determined by the Management after obtaining the approval of the GMS.
5. Providing dispensation to Workers Union Administrators in running Workers Union, by giving prior written notification to the direct supervisor. The activities of the Worker Union in question include the following activities:
 - a. Headquarters/Branch Conference;
 - b. Headquarters/Branch Meeting;
 - c. Leadership Meeting;
 - d. Plenary Meeting;
 - e. Daily Management Meeting;
 - f. Bipartite;
 - g. Tripartite;

- h. Mewakili dan/atau mendampingi Pekerja dalam proses penanganan masalah hukum; dan/atau
- i. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Serikat Pekerja yang disetujui oleh pihak Manajemen IPC.

Pemberian dispensasi bagi Pekerja yang melakukan kegiatan Serikat Pekerja sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pekerja dalam hal keadaan yang mendesak di Perseroan dan tidak ada Pekerja lain yang dapat menggantikan Pekerja yang bersangkutan.

Hak Memperoleh Upah dan Kesejahteraan

Perseroan menjamin hak dari setiap Insan IPC untuk memperoleh upah/penghasilan. Penghasilan yang diberikan terdiri dari Penghasilan Tetap, Penghasilan Tidak Tetap, dan Penghasilan Lainnya, sesuai dengan kemampuan finansial Perseroan. Kebijakan mengenai komponen penghasilan dan kesejahteraan Pekerja telah diatur dalam Pasal 22 Bab V dan Pasal 24 Bab VI Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II.

Besaran penghasilan yang diberikan dapat mengalami perubahan, tergantung pada kinerja, kehadiran, mutasi, hukuman disiplin, atau kebijakan Perseroan yang berlaku. IPC senantiasa memastikan bahwa besaran gaji yang diberikan untuk Pekerja dengan Golongan Terendah telah sesuai dengan standar upah minimum yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Hak Mendapatkan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

Perseroan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara dan secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi dalam ras, agama, warna kulit, suku, jenis kelamin, usia, keterbatasan fisik, serta kepercayaan setiap individu. Maka dari itu, Insan IPC diharapkan untuk menghormati keberagaman ras, agama, warna kulit, suku, jenis kelamin, usia, keterbatasan fisik, serta kepercayaan setiap rekan kerja serta senantiasa berperilaku dengan penuh rasa hormat dan tidak mendiskriminasi rekan kerja.

Komitmen IPC terhadap pemberian kesempatan setara dan menolak segala bentuk diskriminasi dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional telah diatur dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjadi landasan perilaku dan etika setiap Insan

- h. Represent and/or accompany an Employee during the handling process of legal issues; and/or
- i. Other matters related to Workers Union activities that are approved by IPC's Management.

The provision of dispensation for the Employees who carry out Labor Union activities as described above does not eliminate their duties and responsibilities as Workers in urgent situations in the Company and no other Employees can replace the Employee concerned.

Rights to Receive Salary and Welfare

The Company guarantees the rights of every IPC Personnel to earn salary/income. The income given consists of Fixed Income, Non-Fixed Income, and Other Income, in accordance with the Company's financial capability. The policy regarding the components of employee's income and welfare has been regulated in Article 22 Chapter V and Article 24 Chapter VI of the 2019 - 2020 Collective Labor Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Pelabuhan Indonesia II Workers Union.

The amount of income given may change, depending on the performance, attendance, transfer, disciplinary action, or applicable Company policies. IPC always ensures that the amount of salary given to Workers with the Lowest Class is in accordance with the minimum wage standards set by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 7 of 2013 concerning Minimum Wages.

Rights to Receive Equal Opportunity and Treatment

The Company upholds the provision of equal opportunities and strictly rejects all forms of discrimination in terms of race, religion, color, ethnicity, gender, age, physical limitations, and beliefs of each individual. Therefore, IPC Personnel are expected to respect the diversity of race, religion, color, ethnicity, gender, age, physical limitations, and beliefs of each colleague and always behave respectfully and not discriminate against co-workers.

IPC's commitment to providing equal opportunities and rejecting all forms of discrimination in the process of implementing operational activities has been regulated in the Codes of Conduct Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which is the basis of behavior and ethics for every



IPC dalam menjalankan aktivitas operasional. Selain itu, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi juga berlaku dalam seluruh kegiatan pengelolaan SDM, mulai dari program rekrutmen Pekerja baru, program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan Pekerja, program penilaian kinerja, penempatan dan mutasi, hingga program kesejahteraan Pekerja.

Jika Insan IPC menghadapi atau melihat adanya diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerja, maka Perseroan menghimbau untuk segera melaporkan kepada atasan langsung, atasan tidak langsung, dan Pimpinan Unit Pengelola SDM apabila menghadapi atau melihat adanya diskriminasi yang terjadi, karena hal tersebut sudah melanggar hukum dan aturan yang berlaku di IPC.

Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja

Perseroan membuka kesempatan bagi seluruh Insan IPC, baik dari *level top management* hingga level staf/non-staf, untuk mengikuti Program Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh Perseroan. Adapun informasi mengenai pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi di IPC akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dalam Laporan Tahunan ini.

Hak Memiliki Waktu Kerja yang Sesuai

Perseroan menolak keras segala bentuk praktik kerja paksa dan perbudakan, termasuk di dalamnya pemaksaan simpanan wajib, pemberian ancaman pemecatan untuk bekerja lembur tanpa kesepakatan, dan penahanan dokumen identitas. Untuk mencegah terjadinya insiden kerja paksa, Perseroan telah menetapkan aturan terkait Hari dan Jam Kerja, Lembur, dan Hari Libur dalam Pasal 16, 17, dan 18 Bab IV Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II.

Hari dan Jam Kerja

Jumlah hari kerja Perseroan adalah 5 (lima) hari dalam seminggu. Sedangkan jumlah jam kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam dalam seminggu dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam seminggu. Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus dan operasional, Perseroan dapat mengatur hari dan jam kerja di luar hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Untuk pelaksanaan waktu hari jam kerja diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi atau peraturan Perseroan lainnya.

IPC Personnel in carrying out operational activities. In addition, the implementation of the principles of equality and non-discrimination also applies to all HR management activities, starting from the recruitment program for new Workers, Employee development, education and training programs, performance appraisal programs, placement and transfer, to Employee welfare programs.

If IPC Personnel face or see discrimination occurring in the work environment, the Company urges them to immediately report to their direct supervisors, indirect superiors, and HR Management Unit Heads if they encounter or see any discrimination that has occurred, as it violates the applicable rules and regulations in IPC.

Rights to Receive Work Trainings

The Company opens opportunities for all IPC Personnel, from top management to staff/non-staff levels, to participate in the Competency Development Program organized by the Company. The information regarding the implementation of the Competency Development Program at IPC will be further elaborated on in the discussion of Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Safety & Health (K3) in this Annual Report.

Rights to Choose Adequate Working Time

The Company strongly rejects all forms of forced labor and slavery, including forcing compulsory savings, threatening dismissal for working overtime without an agreement, and detention of identity documents. In order to prevent incidents of forced labor, the Company has stipulated rules regarding Working Days and Hours, Overtime and Holidays in Articles 16, 17 and 18 of Chapter IV of the Collective Labor Agreement for the 2019 - 2020 Period between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Pelabuhan Indonesia II Workers Union.

Working Days and Hours

The number of working days in the Company is 5 (five) days in a week. Meanwhile, the total working hours of the Company are 8 (eight) hours in a week and a maximum of 40 (forty) hours in a week. In terms of specific and operational works, the Company can regulate working days and hours outside of the predetermined working days and hours. The implementation of working days shall be further stipulated in the Decree of the Board of Directors or other Company regulations.

Bagi Pekerja yang melanggar ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan Perseroan.

Kerja Lembur

Penugasan Pekerja di luar jam kerja ditetapkan dengan surat perintah sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pusat ditetapkan oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
2. Untuk Cabang dan Unit Kerja ditetapkan oleh General Manager dan Kepala Unit.

Pemberian uang lembur dibayarkan dengan melampirkan hasil pelaksanaan tugas lembur. Bagi Pekerja yang bekerja melebihi jumlah jam kerja selama 1 (satu) bulan karena pengaturan sistem kerja diberikan uang lembur. Bagi Pekerja yang bekerja pada hari libur nasional berhak mendapat kompensasi kehadiran yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Direksi. Kepada Pekerja tertentu yang berproduksi di atas standar produksi normal diberikan insentif dan tidak diberikan uang lembur. Besaran uang lembur per jam ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalahgunaan pemberian perintah lembur dan pelaksanaan lembur dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Lembur, Uang Lembur dan Pengganti Transportasi Lembur dan Uang Pengganti Lembur, serta Insentif Produksi diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi.

Hari Libur

Hari libur Perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi/hari libur massal yang ditetapkan oleh Pemerintah RI. Dalam hal Pekerjaan yang bersifat khusus, Direksi dapat mengatur hari libur selain hari libur yang ditetapkan.

Hak Cuti dan Hak Khusus Pekerja Perempuan

Pemberian cuti kepada Pekerjaan dilaksanakan oleh Perseroan dengan memperhatikan produktivitas Pekerja dan pencapaian target Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis cuti yang berlaku di Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Bab IV Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II adalah sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan.
2. Cuti Besar.
3. Cuti Sakit.

Employees who violate the provisions regarding Working Days and Hours will be subject to sanctions in accordance with the Company's rules and regulations.

Overtime Works

The assignment of Employees outside of working hours is stipulated by a warrant as follows:

1. For Headquarters, it is determined by an official one level below the Board of Directors.
2. For Branch and Work Units, it is determined by the General Manager and Unit Head.

The overtime pay is paid by attaching the results of the implementation of overtime duties. Employees who work more than the number of hours worked for 1 (one) month due to the work system arrangement are given overtime pay. Employees who work on national holidays are entitled to attendance compensation, the amount of which is further regulated by the Board of Directors. Certain Employees who produce above normal production standards are given incentives and are not given overtime pay. The amount of hourly overtime pay is determined in accordance with the provisions of the applicable laws.

Misuse of giving orders for overtime and implementing overtime will be subject to strict sanctions in accordance with the applicable regulations. Further provisions regarding Overtime Work, Overtime Pay and Replacement for Overtime Transportation and Compensation for Overtime, as well as Production Incentives are further stipulated in the Decree of the Board of Directors.

Holidays

The Company's holidays are Saturdays, Sundays, and official holidays/mass holidays determined by the Government of the Republic of Indonesia. In case of special works, the Board of Directors can arrange a holiday other than the set holiday.

Leave Rights and Special Rights for Female Employees

The provision of leave is carried out by the Company by taking into account the productivity of the Workers and the achievement of the Company's targets in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The types of leave applicable to the Company as stipulated in Article 19 Chapter IV of the 2019 - 2020 Collective Labor Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the Pelabuhan Indonesia II Workers Union are as follows:

1. Annual Leave.
2. Holiday Leave.
3. Sick Leave.



4. Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan.
5. Cuti Massal/Bersama.
6. Cuti Melaksanakan Ibadah Keagamaan
7. Cuti Karena Alasan Penting, meliputi:
 - a. Pekerja menikah (selama 3 hari kerja);
 - b. Menikahkan anaknya (selama 2 hari kerja);
 - c. Mengkhitanakan anaknya atau membaptiskan anaknya (selama 2 hari kerja);
 - d. Istri melahirkan atau keguguran kandungan (selama 2 hari kerja);
 - e. Suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia (selama 2 hari kerja).
8. Bagi Pekerja perempuan, terdapat cuti khusus berupa Cuti Bersalin dan Gugur Kandungan serta Cuti Masa Haid.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Perseroan diatur oleh Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hak Menjalankan Ibadah

Perseroan menjamin hak setiap Insan IPC untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Hal tersebut direalisasikan melalui pemberian cuti untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Selain itu, terkait pelaksanaan ibadah di tempat kerja, Perseroan juga telah menyediakan tempat ibadah bagi pegawai yang beragama Islam, yaitu 2 (dua) masjid di area Kantor Pusat dan mushola di masing-masing lantai gedung Kantor Pusat, sedangkan pada setiap Cabang Pelabuhan disediakan 1 (satu) masjid. Sedangkan bagi pegawai yang beragama Nasrani dan Katolik, Perseroan menyediakan agenda rutin kegiatan kerohanian yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu.

Hak Mendapatkan Lingkungan Kerja yang Aman dan Bebas dari Pelecehan

Perseroan secara tegas tidak menoleransi segala jenis intimidasi atau pelecehan di tempat kerja. Hal tersebut telah diatur dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjadi landasan perilaku dan etika setiap Insan IPC dalam menjalankan aktivitas operasional.

Dalam hal ini, Insan IPC:

1. Tidak diperkenankan berperilaku kasar, otoriter, intimidatif, atau pelecehan di tempat kerja;
2. Menghindari pernyataan dan lelucon yang mengarah pada kekerasan dan seksual yang dapat melukai perasaan seseorang;
3. Menjunjung tinggi prinsip keamanan dan bebas dari pelecehan atau asusila selama berada di lingkungan kerja dan selama menggunakan atribut Perseroan;

4. Leave Outside of the Company's Responsibility.
5. Mass Leave.
6. Religious Holiday Leave.
7. Leave Due to Important Reasons, such as:
 - a. Employee's marriage (for 3 workdays);
 - b. Employee's son/daughter's marriage (for 2 workdays);
 - c. Children's circumcision or baptism (for 2 workdays);
 - d. An employee's wife is delivering or experiencing miscarriage (for 2 working days);
 - e. An employee's husband/wife, parent/parent-in-law or a child or a son/daughter-in-law passes away (for 2 working days).
8. Female employees will receive special leaves, namely Maternity and Miscarriage Leave and Menstrual Leave.

Further provisions on the Company leaves are regulated by the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Rights to Practice Religious Worship

The Company guarantees the rights of every IPC Personnel to have a religion and to carry out worship in accordance with the teachings of their religion. This is realized through the provision of leave to carry out religious worship. In addition, regarding the implementation of worship in the workplace, the Company has also provided a place of worship for Muslim employees, namely 2 (two) mosques in the Head Office area and a prayer room on each floor of the Head Office building, while each Port Branch is provided with 1 (one) mosque. Meanwhile, for Christian and Catholics employees, the Company provides a routine agenda of spiritual activities which are carried out 1 (once) a week.

Rights to a Safe and Harassment-Free Environment

The Company strictly forbids any kind of intimidation or harassment in the workplace. This has been regulated in the Codes of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which is the basis for the behavior and ethics of every IPC Personnel in carrying out operational activities.

In this case, IPC Personnel:

1. Are not allowed to perform abusive, authoritarian, intimidating, or harassing behavior in the workplace;
2. Must avoid making sexual and violent statements and jokes that could hurt someone's feelings;
3. Must uphold the principle of safety and free from harassment or immorality while in the work environment and while using the Company's attributes;

4. Tidak diperkenankan membiarkan atau menoleransi segala bentuk pelecehan, seperti tindakan, komentar, kontrak fisik, gangguan, dan pembicaraan yang mengarah pada kekerasan dan seksual.

Segala bentuk pelecehan harus segera dilaporkan kepada pihak manajemen yang berwenang dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Perseroan mendorong seluruh Insan IPC untuk menyampaikan keluhan kapan pun mereka melihat atau mengalami segala jenis intimidasi dan pelecehan di tempat kerja.

Hak Mendapatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan senantiasa menjamin kesehatan dan keselamatan kerja seluruh Pekerja dalam menjalankan aktivitas operasional. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 26 dan 27 Bab VI serta Pasal 29 Bab VII Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II.

Kesehatan dan Pembinaan Mental Pekerja

Untuk mendorong tercapainya tingkat kesehatan Pekerja dan keluarganya yang memadai secara berdaya guna dan berhasil guna, Perseroan menjamin pelayanan kesehatan kepada Pekerja dan keluarganya secara tuntas dengan menyediakan fasilitas rumah sakit atau menunjuk lembaga kesehatan lainnya yang memberikan fasilitas alat bantu kesehatan.

Selain itu, Perseroan juga memberikan pembinaan mental kepada seluruh Insan IPC untuk pembinaan sumber daya manusia seutuhnya. Perseroan dapat menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kekeluargaan, seperti kegiatan *employee gathering* atau *family gathering* yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Manajemen/Direksi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membina dan memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar sesama Pekerja dan keluarga dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Keselamatan Kerja

Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyebaran penyakit akibat kerja, Perseroan telah melaksanakan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik melalui pelatihan keselamatan kerja kepada seluruh Pekerja maupun menyediakan fasilitas penunjang keselamatan kerja bagi Pekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, Perseroan juga wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja IPC pada jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Must not tolerate any form of harassment, such as acts, comments, physical contracts, harassment, and talk that leads to violence and sexuality.

All forms of harassment must be immediately reported to the authorized management and subject to sanctions according to the applicable regulations. Therefore, the Company encourages all IPC Personnel to submit complaints whenever they see or experience any kind of intimidation and harassment in the workplace.

Rights for Occupational Health and Safety

The Company guarantees the health and safety of all Employees in carrying out its operational activities. This has been regulated in Articles 26 and 27 Chapter VI and Article 29 Chapter VI of the 2019 - 2020 Collective Labor Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the Pelabuhan Indonesia II Workers Union.

Mental Health and Coaching for Employees

To encourage the attainment of an adequate level of health for Employees and their families in an efficient and effective manner, the Company guarantees complete health services for Employees and their families by providing hospital facilities or by appointing other health institutions that provide medical aid facilities.

In addition, the Company also provides mental coaching to all IPC Personnel for the development of complete human resources. The Company may organize family activities, such as employee gathering or family gathering, the implementation of which is further regulated by the Management/Board of Directors. This activity aims to foster and maintain a sense of kinship and togetherness among fellow Employees and families with due regard to the Company's capabilities.

Occupational Safety

To prevent and reduce the possibility of occupational accidents and transmission of the Company has implemented Occupational Health and Safety (OHS) guidelines, both through occupational safety training for all Workers as well as providing work safety support facilities for Workers in accordance with their respective duties. In addition, the Company is also obliged to include all IPC Employees in labor social security in accordance with the prevailing laws and regulations.



Adapun informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan K3 di lingkungan kerja IPC dapat dilihat pada pembahasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dalam Laporan Tahunan ini.

Penegakan Penghapusan Tenaga Kerja di Bawah Umur (Pekerja Anak)

Berdasarkan Konvensi 138 International Labour Organization (ILO) tentang Konvensi Usia Minimum dan 182 tentang Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak, seluruh pelaku usaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur atau pekerja anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja Anak adalah Pekerja yang berusia di bawah 18 tahun.

Perseroan berkomitmen untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur maupun pekerja anak. Hal tersebut tercermin dari persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja IPC, yang salah satunya harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun saat diterima sebagai Pekerja. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Bab III Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II tentang Rekrutmen Pekerja.

Dengan adanya persyaratan rekrutmen tersebut, insiden penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan pekerja anak tidak pernah terjadi di lingkungan kerja IPC dapat dicegah sejak awal.

Mekanisme Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan.

Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Jenis-jenis perselisihan mengenai hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

Further information regarding the implementation of OHS in the IPC work environment can be seen in the discussion of Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety (OHS) in this Annual Report.

Enforcement of the Elimination of Underage Workers (Child Labor)

Based on International Labor Organization (ILO) Convention 138 concerning the Minimum Age Convention and 182 concerning the Convention of the Worst Forms of Child Labor, all business players are prohibited from employing child labor or child labor. Based on Law No. 13 of 2002 concerning Employment, Child Labor is a worker who is under 18 years of age.

The Company is committed to not using underage or child labor. This is reflected in the general requirements that must be met by Prospective IPC Workers, one of which must be at least 18 (eighteen) years old when accepted as an Employee. This stipulation is contained in Article 10 Chapter III of the Collective Labor Agreement for the 2019-2020 Period between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Pelabuhan Indonesia II Workers Union concerning Worker Recruitment.

With these recruitment requirements, incidents of the use of underage labor and child labor that never occurred in the IPC work environment can be prevented from the start.

Handling Mechanism of Industrial Relations Disputes

Based on Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, industrial relations disputes are differences of opinion that cause conflicts between employers or a combination of employers and workers/laborers or trade unions/labor unions due to disputes regarding rights, disputes over interests, disputes over termination working relations and disputes between trade unions/labor unions within the company.

Types of Industrial Relations Disputes

The types of disputes regarding industrial relations as regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement include:

1. Perselisihan Hak

Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan perundang-undangan, kegagalan perjanjian kerja, peraturan Perseroan, dan perjanjian kerja sama.

2. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan, perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan Perseroan.

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Adanya perselisihan karena Perseroan atau pihak Manajemen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Biasanya perselisihan ini terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Misalnya, perbedaan hitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peraturan Perseroan.

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Buruh dalam Satu Perusahaan

Perselisihan antar Serikat Pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak.

Metode Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan PKB antara IPC dan SPPI II, perselisihan hubungan industrial antara Manajemen IPC dengan SPPI II dapat ditangani atau diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain penyampaian keluhan kesah, lembaga bipartit, dan lembaga tripartit.

Penyampaian Keluh Kesah

Penyampaian keluhan kesah Pekerja kepada Manajemen IPC dilakukan melalui saluran hierarki untuk mendapatkan respons dan penyelesaian yang adil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Adapun tata cara penyampaian keluhan kesah Pekerja adalah sebagai berikut:

1. Pekerja menyampaikan kepada atasan langsung di unit kerjanya untuk didiskusikan dalam rangka mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.
2. Apabila tidak dicapai kesepakatan atau penyelesaian yang belum memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan kepada Pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan diketahui oleh atasan langsung.

1. Disputes on Rights

Rights disputes arise due to the failure to fulfill rights, as well as differences in the implementation and interpretation of statutory regulations, irregularities in work agreements, Company regulations, and cooperation agreements.

2. Disputes on Interest

Disputes on interest occurs in a work relationship that does not have a conformity of opinion, especially regarding the making, changes to certain conditions stated in the work agreement or Collective Bargaining Agreement (PKB) or Company regulations.

3. Disputes on Work Termination (PHK)

A dispute due to the Work Termination (PHK) made by the Company or the Management. Usually, this dispute occurs as a result of an inappropriate opinion in terminating the employment relationship of one party only. For example, the difference in the calculation of severance pay received by workers or laborers based on Labor Laws and Company regulations.

4. Disputes Between Workers or Labor Union in a Company

Disputes between Workers Union and laborers which generally occur in the same company. In many cases it was caused by disagreements about membership, the obligations of trade union members, and the exercise of rights.

Methods for Handling Disputes in Industrial Relations

Based on the PKB between IPC and SPPI II, industrial relations disputes between IPC Management and SPPI II can be handled or resolved in several ways, including through complaint submission as well as bipartite and tripartite institutions.

Complaints Submission

The submission of Employee's complaints to IPC Management is carried out through hierarchical channels to get a fair response and resolution in the near future. The procedures for submitting worker complaints are as follows:

1. Employees communicate to direct supervisors in their work units to be discussed in order to achieve an understanding or settlement that satisfy both parties.
2. In the event an agreement or settlement cannot be reached, the employee may forward it to a higher authority Officer with the notice of the immediate superior.



3. Apabila cara sebagaimana dimaksud pada Poin 1 dan 2 tidak tercapai kesepahaman atau mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan kepada Pengurus Cabang Serikat Pekerja setempat untuk diselesaikan dalam forum komunikasi tingkat Cabang setempat.
 4. Jika cara sebagaimana dimaksud pada Poin 3 juga tidak tercapai kesepahaman dan/atau permasalahannya merupakan wewenang Manajemen Perseroan, maka dapat diteruskan kepada Lembaga Bipartit tingkat pusat.
 5. Dalam hal tidak tercapainya kesepahaman atau penyelesaian yang memuaskan setelah ditempuh tahapan yang telah diuraikan di atas, maka penyelesaiannya dapat diteruskan kepada Lembaga Tripartit sebelum ditempuh prosedur penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. In the event the methods in Point 1 and 2 are not reached by agreement or obtain a satisfactory settlement, the Employee may forward the issue to the Branch manager of the local Workers union to be resolved in the local Branch level communication forum.
 4. In the event the measure referred in Point 3 is also not able to reach an understanding and or the issue is the authority of the Company, it can be forwarded to the Central Bipartite Institution.
 5. In the event that an understanding is not reached or a satisfactory settlement has been taken after the stages described above are taken, the settlement can be forwarded to the Tripartite Institution before the dispute settlement procedure is taken in accordance with the provisions and laws in force.

Perselisihan dianggap telah terjadi apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kondisi tertentu dalam hubungan kerja antara Pekerja dengan Manajemen IPC atau pejabat yang mewakili setelah Pekerja yang bersangkutan menyampaikan keluhan kesah dan/atau aspirasi mengenai kondisi dimaksud melalui saluran hierarki sesuai tingkatan organisasi Perseroan. Apabila perbedaan pendapat dapat dicapai kesepahaman di antara kedua belah pihak pada setiap tahapan prosedur penyelesaian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perselisihan dianggap sudah selesai.

Disputes are deemed to have occurred if there is a difference of opinion regarding certain conditions in the work relationship between the Employees and IPC Management or an official representing the Employee after the Employee concerned has submitted complaints and/or aspirations regarding the condition referred to through the hierarchical channel according to the organizational level of the Company. If differences of opinion can be reached between the two parties at each stage of the settlement procedure as described above, the dispute is deemed to have been resolved.

Lembaga Bipartit

1. Lembaga Bipartit bertujuan untuk mengembangkan hubungan industrial yang harmonis melalui pembinaan terhadap Pekerja serta menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Pekerja dengan Manajemen IPC.
2. Lembaga Bipartit terdiri dari wakil-wakil Pengurus Serikat Pekerja dan wakil-wakil Manajemen IPC pada Kantor Pusat, yang beranggotakan masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
3. Lembaga Bipartit berfungsi:
 - a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara Manajemen IPC dan Wakil Serikat Pekerja atau Pekerja pada tingkat Perseroan;
 - b. Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di Perseroan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan Pekerja yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.

Bipartite Institution

1. Bipartite Institution aims to develop harmonious industrial relations through guidance for Workers and resolve problems that arise between Employees and IPC Management.
2. Bipartite Institution consists of representatives of the Management of the Workers' Union and representatives of IPC Management at the Head Office, each of which consists of at least 3 (three) members with a management period of 3 (three) years.
3. Bipartite Institution functions:
 - a. As a forum for communication, consultation and deliberation between IPC Management and Trade Union or Employee Representatives at Company level;
 - b. As a forum to discuss industrial relations issues in the Company in order to increase work productivity and employee welfare which ensures business continuity and creates work peace.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Lembaga Bipartit mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pertemuan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen dan aspirasi Pekerja berkaitan dengan kesejahteraan Pekerja dan kelangsungan usaha. c. Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di Perseroan. d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Manajemen dalam penetapan kebijakan Perseroan. e. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja. | <p>4. To carry out these functions, the Bipartite Institution has the following duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Conduct periodic meetings at least 1 (one) time in three months and/or any time if needed. b. Communicating management policies and employee aspirations relating to employee welfare and business continuity. c. Perform early detection and accommodate industrial relations problems in the Company. d. Delivering suggestions and considerations to the Management in determining Company policies. e. Delivering suggestions and opinions to the Employees and/or Worker Unions. |
|--|--|

Lembaga Tripartit

1. Lembaga Tripartit terdiri dari Lembaga Bipartit dan unsur pemerintahan yang menangani atau yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang tujuan utamanya untuk mengembangkan komunikasi yang harmonis dan kooperatif diantara pihak-pihak terkait, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Bipartit.
2. Lembaga Tripartit berfungsi untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian perselisihan antara Pekerja dan Manajemen yang tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat dicapai kesepakatan melalui Lembaga Bipartit, sebelum ditempuh prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mogok Kerja

Mogok Kerja sedapat mungkin dihindari apabila terjadi perselisihan antara Serikat Pekerja dengan Manajemen dalam hubungan industrial, namun dalam hal perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan baik secara internal maupun melalui lembaga yang berwenang, maka Mogok Kerja dapat ditempuh sebagai alternatif yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Pelaksanaan Mogok Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Tripartite Institution

1. Tripartite institution consists of Bipartite Institution and government elements that handle or are responsible for the manpower sector whose main objective is to develop harmonious and cooperative communication among the parties concerned, especially in resolving labor problems that cannot be resolved by the Bipartite Institution.
2. Tripartite Institution functions to obtain a resolution or settlement of disputes between Workers and Management that cannot be resolved or an understanding cannot be reached through the Bipartite Institution, before a settlement procedure is taken in accordance with the prevailing laws and regulations.

Work Strike

Work Strike must be avoided as much as possible if there is a dispute between the Workers' Union and Management in industrial relations, but in the event that an industrial relations dispute cannot be resolved either internally or through an authorized institution, a strike can be adopted as the most recent alternative (*ultimum remedium*). The strike is carried out in accordance with the applicable provisions in the manpower sector.



Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, IPC telah melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui penyelenggaraan rapat Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali, dengan uraian sebagai berikut:

Implementation of 2020 Industrial Relations Dispute Settlement

Throughout 2020, IPC has resolved industrial relations disputes through the holding of 3 (three) Bipartite meetings, with the following descriptions:

Pelaksanaan Rapat Bipartit Tahun 2020

The Holding of Bipartite Meeting 2020

Rapat Bipartit I (Periode Bulan Januari 2020) / Bipartite Meeting I (January 2020 Period)	
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat / Meeting Time and Place	Selasa, 14 Januari 2020 pukul 14.30 WIB – selesai, di Hotel <i>Holiday Inn</i> Kemayoran, Jakarta / Tuesday, January 14, 2020, at 14:30 WIB – finish, at Holiday Inn Hotel Kemayoran, Jakarta
Peserta Rapat / Meeting Participant	- Pihak Manajemen (7 orang) / Management party (7 people) - Pihak SPPI II (8 orang) / SPPI II party (8 people) - Tim Konsultan KPI (5 orang) / KPI Consultant Team (5 people)
Agenda Rapat dan Hasil Pembahasan / Meeting Agenda and Discussion Results	Agenda Pertama: / First Agenda: Pemaparan/sosialisasi implementasi KPI Individu. / Presentation/dissemination of Individual KPI implementation. Agenda Kedua / Second Agenda : Pertemuan Bipartit akan dilakukan setelah acara pemaparan/sosialisasi oleh Konsultan. / The Bipartite Meeting will be held after the presentation/dissemination by the Consultant.
Rapat Bipartit II (Periode Bulan April 2020) / Bipartite Meeting II (April 2020 Period)	
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat / Meeting Time and Place	Senin, 13 April 2020 pukul 13.30 WIB – selesai, di Ruang Rapat Bandar Jaya B Kantor Pusat IPC / Monday, April 13, 2020, at 13:30 WIB – finish, at Bandar Jawa B Meeting Hall, IPC Headquarters
Peserta Rapat / Meeting Participant	- Pihak Manajemen (4 orang) / Management party (4 people) - Pihak SPPI II (4 orang) / SPPI II party (4 people)
Agenda Rapat dan Hasil Pembahasan / Meeting Agenda and Discussion Results	Agenda Pertama: / First Agenda: Pembahasan Teknis <i>Switching</i> Asuransi Perusahaan. / Technical Discussion on Company Insurance Switching. Agenda Kedua / Second Agenda : Beberapa hal penting lainnya. / Other important matters.
Rapat Bipartit III (Periode Bulan Juni 2020) / Bipartite Meeting III (June 2020 Period)	
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat / Meeting Time and Place	Selasa, 16 Juni 2020 pukul 13.30 WIB – selesai, di Ruang Rapat Bandar Jaya C Kantor Pusat IPC / Tuesday, June 16, 2020, at 13:30 WIB – finish, at Bandar Jaya C Meeting Hall, IPC Headquarters
Peserta Rapat / Meeting Participant	- Pihak Manajemen (6 orang) / Management party (6 people) - Pihak SPPI II (7 orang) / SPPI II party (7 people)
Agenda Rapat dan Hasil Pembahasan / Meeting Agenda and Discussion Results	Agenda Pertama / First Agenda : Pembahasan Asuransi Perusahaan. / Discussion on Company Insurance. Agenda Kedua / Second Agenda: Upaya Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Turunan dari PKB Periode 2019 – 2020. / Improvement of Derivative Board of Directors Decree from the 2019 – 2020 Period PKB. Agenda Ketiga / Third Agenda : Pembahasan hal-hal lainnya. / Discussion of other matters.

Laporan *Monitoring* terkait Rencana Kerja Manajemen (RKM) Integrasi Kebijakan, Strategi, dan Pola Hubungan Industrial Grup IPC Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial dalam Program Bipartit, Departemen Hubungan Pekerja IPC telah menyusun Laporan *Monitoring* terkait Rencana Kerja Manajemen (RKM) Integrasi Kebijakan, Strategi, dan Pola Hubungan Industrial Grup IPC per triwulan sepanjang tahun 2020.

Monitoring Report related to the Management Work Plan (RKM) for the Integration of Policies, Strategies, and Industrial Relations Patterns of the IPC Group in 2020

In order to improve industrial relations in the Bipartite Program, the IPC Labor Relations Department has prepared a Monitoring Report related to the Management Work Plan (RKM) Integration of Policies, Strategies, and Industrial Relations Patterns of the IPC Group per quarter throughout 2020.

Pelaksanaan RKM Integrasi Kebijakan, Strategi, dan Pola Hubungan Industrial Grup IPC Tahun 2020

Implementation of RKM for Integrating Policies, Strategies and Patterns of Industrial Relations at the IPC Group in 2020

(dalam satuan % / in %)

Triwulan I / First Quarter	Triwulan II / Second Quarter	Triwulan III / Third Quarter	Triwulan IV / Fourth Quarter
30%	95%	98%	100%

PERKARA TERKAIT PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pada tahun 2020, Perseroan hanya menghadapi perkara non-litigasi (tidak melalui jalur persidangan) terkait Penyelesaian Hubungan Industrial, dengan uraian sebagai berikut:

INDUSTRIAL RELATIONS ISSUES SETTLEMENT

2020, the Company only faced non-litigation cases (outside of court) related to settlement of Industrial Relations issues with as described below:

No.	Uraian Permasalahan / Description of Dispute	Posisi Saat Ini / Current Position
1.	Terdapat Nota Pemeriksaan I dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatra Selatan No. 057/986/Nakertrans/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan meminta sejumlah dokumen berupa akta pendirian, struktur organisasi, akte pengawasan, wajib lapor ketenagakerjaan, daftar semua tenaga kerja upah dan daftar hadir pekerja 2 tahun terakhir, peralatan K3, pekerja dengan kompetensi ahli K3 umum, petugas penanggulangan kebakaran, P3K, Operator, teknisi beserta sertifikat dan lisensi, daftar BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan serta SK P2K3. / Issuance of Memorandum of Inspection I from the Employment Supervisor of the Office of Manpower and Transmigration of Sumatra Selatan No. 057/986/Nakertrans/2019 dated February 20, 2019 and request of several documents in the form of deed of establishment, organization structure, supervision deed, employment report subjects, list of all waged employees and employee attendance list of the last 2 years, OHS equipment, employees with general OHS expertise competency, fire mitigation officers, first aid, operators, technicians with their certificates and licenses, list of BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan, and P2K3 Decree.	Permasalahan Selesai / Case Closed Telah dilakukan pembahasan dengan Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan diminta beberapa dokumen susulan, saat ini telah disusun dokumen tambahan dan akan didiskusikan kembali dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan. / Discussion was held with the Employment Supervisor Team and several follow-up documents were requested. The additional documents have been prepared and will be discussed with the Employment Supervisor at the Office of Manpower and Transmigration of Sumatera Selatan Province.
2.	Permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial antara mantan tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai TNO pada IPC TPK Area Panjang sebanyak 68 orang dengan Koperasi Kekar Pelabuhan Panjang. / Industrial Relations Dispute between 68 former contract employees assigned as TNO at IPC TPK Panjang Area and Koperasi Kekar of Panjang Port.	Telah dilakukan Mediasi Kedua pada tanggal 12 November 2020 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan Panjang, IPC TPK, Koperasi Kekar Pelabuhan Panjang, dan Kuasa Hukum Pekerja K68 di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. / Second Mediation was held on November 12, 2020, which was attended by representatives from the Head Office, Panjang Port Branch, IPC TPK, Koperasi Kekar of Panjang Port, and the Legal Representative of K68 Employees at the Office of Manpower of Bandar Lampung City.

ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Pada tahun 2020, Perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp108,17 juta untuk pelaksanaan Rapat Kerja Terpusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) tahun 2020.

FUND ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION FOR HUMAN RIGHTS

In 2020, the Company allocated Rp108.17 million for the implementation of Centralized Work Meeting of the Workers Union of Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) in 2020.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH HAM PERUSAHAAN

Segala permasalahan yang berhubungan dengan HAM di internal Perseroan dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian keluhan Pekerja. Selain itu, Perseroan juga menyediakan saluran bagi Insan IPC maupun para pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan segala pelanggaran yang dilakukan oleh Insan IPC maupun Anak Perusahaan terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, termasuk HAM, melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang independen.

COMPLAINTS MECHANISM FOR COMPANY HUMAN RIGHTS ISSUES

All issues related to human rights within the Company can be reported through the employee complaint mechanism. In addition, the Company also provides channels for IPC Personnel and other stakeholders to report all violations committed by IPC Personnel and Subsidiaries against applicable ethical values, including human rights, through independent *Whistleblowing System* (WBS) mechanism.



Mekanisme Pengaduan Keluhan Pekerja

Perseroan memberi kesempatan bagi para Pekerja untuk menyampaikan keluhan melalui aplikasi *I-MOVE*. Pekerja yang ingin menyampaikan keluhan mengisi *form* identitas secara lengkap, yang terdiri dari:

1. Nama;
2. Unit Kerja (Cabang/Anak Perusahaan);
3. Lokasi Kerja;
4. Divisi/Departemen Pekerja.

Pekerja memilih kriteria atau jenis dari keluhan yang ingin disampaikan. Jenis keluhan yang menjadi lingkup tugas Divisi Layanan SDM adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumah tangga atau keluarga;
2. Pekerjaan yang sesuai *jobdesk*;
3. Perasaan dihargai oleh atasan;
4. Teman kerja yang suportif;
5. Fasilitas kerja yang memadai;
6. Ruang kantor yang rapi;
7. Kesempatan untuk berkembang.

Kemudian Pekerja menuliskan tentang keluhan yang ingin disampaikan dengan jelas. Jika memungkinkan di dalam penjabaran keluhan terdapat identitas dari pihak-pihak terkait, waktu dan tempat kejadian yang terkait dengan keluhan, cerita kronologis, serta dapat melampirkan *file* (dokumen/*scan*/foto) terkait.

Proses Klasifikasi Keluhan Pekerja

Proses klasifikasi keluhan Pekerja dilakukan oleh *Officer Hubungan Pekerja* dengan menggunakan aplikasi *I-MOVE*. *Form* keluhan Pekerja yang telah diisi dan disetujui oleh Pekerja yang memberikan keluhan melalui aplikasi *I-MOVE* dilihat dan diklasifikasikan oleh *Officer Hubungan Pekerja*. Tindak lanjut pengklarifikasian adalah keluhan Pekerja dapat diproses atau tidak. Jika keluhan dapat diproses, maka *Officer Hubungan Pekerja* akan memberikan rekomendasi solusi terhadap keluhan Pekerja. Jika keluhan tidak dapat untuk diproses, maka *Officer Hubungan Pekerja* memberitahukan kepada Pekerja bahwa keluhan tidak dapat diproses dengan menggunakan aplikasi *I-MOVE*.

Proses Pemberian Rekomendasi Solusi

Pemberian solusi keluhan Pekerja yang diberikan oleh *Officer Hubungan Pekerja* dengan mengisi *form* pemberian rekomendasi solusi yang tersedia di aplikasi *I-MOVE*. Setelah *Officer Hubungan Pekerja* mengisi *form* pemberian rekomendasi. *Officer Hubungan Pekerja* melakukan validasi dengan mengirimkan rekomendasi kepada DVP Hubungan

Employees Complaints Mechanism

The Company provides an opportunity for Employees to submit complaints through the *I-MOVE* application. Employees who wish to submit a complaint fill out a complete identity form, which consists of:

1. Name;
2. Work Unit (Branch/Subsidiary);
3. Work Location;
4. Division/Employee Department;

The employee chooses the criteria or type of complaint to be submitted. Types of complaints that fall within the scope of the HR Services Division's duties are as follows:

1. Household or family condition;
2. Jobs that match the job description;
3. Feeling of being valued by supervisors;
4. Supportive colleagues;
5. Adequate work facilities;
6. Neat office space;
7. Chance for development.

Next, the Employees write about the complaint that they want to convey clearly. If possible, the description of the complaint includes the identities of the parties involved, the time and place of the incident related to the complaint, a chronological story, and can attach related files (documents/*scans*/photos).

Employee Complaints Classification Process

The classification process of Employee's complaints is carried out by Employee Relations Officer by using the *I-MOVE* application. Employee complaints form that has been filled in and approved by the Employee who provides a complaint through *I-MOVE* application is seen and classified by the Employee Relations Officer. The follow-up clarification determines whether the Employee's complaints can be processed or not. If the complaint can be processed, the Employee Relations Officer will provide a recommendation for a solution to the complaints. If the complaints cannot be processed, the Employee Relations Officer will notify the Employee that the complaint cannot be processed using the *I-MOVE* application.

Solution Recommendation Provision Process

The provision of employee complaint solutions by the Employee Relations Officer by filling in the solution recommendation form available on the *I-MOVE* application. Next, the Employee Relations Officer fills in the recommendation form. The Employee Relations Officer performs validation by sending recommendations to the Worker Relations DVP, then reviews

Pekerja, lalu di-review. Jika rekomendasi solusi yang diberikan oleh *Officer* Hubungan Pekerja sesuai, maka DVP Hubungan Pekerja memberikan persetujuan dan mengirimkan ke VP Layanan SDM. Namun, jika rekomendasi tidak sesuai, maka DVP Hubungan Pekerja memberikan arahan kepada *Officer* Hubungan Pekerja untuk menyusun rekomendasi solusi yang baru. Setelah *form* pemberian rekomendasi disetujui oleh DVP Hubungan Pekerja dan dikirimkan kepada VP Layanan SDM, maka selanjutnya VP Layanan SDM me-review dan menyetujui dengan memberikan disposisi kepada DVP Hubungan Pekerja untuk menyampaikan rekomendasi solusi melalui aplikasi *I-MOVE*. Kemudian, DVP Hubungan Pekerja memberikan disposisi kepada *Officer* Hubungan Pekerja untuk membuat dokumen solusi keluhan dan penyampaian solusi melalui aplikasi *I-MOVE*. *Officer* Hubungan Pekerja melakukan solusi kepada Pekerja melalui aplikasi *I-MOVE*.

Laporan Monitoring RKM terkait Pengembangan Sistem Aplikasi dan Pembuatan SOP Penyampaian Penanganan Keluhan Pekerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan keluhan Pekerja, Departemen Hubungan Pekerja IPC telah menyusun Laporan *Monitoring* terkait Rencana Kerja Manajemen (RKM) Pengembangan Sistem Aplikasi dan Pembuatan SOP Penyampaian Penanganan Keluhan Pekerja per triwulan sepanjang tahun 2020.

Pelaksanaan RKM Pengembangan Sistem Aplikasi dan Pembuatan SOP Penyampaian Penanganan Keluhan Pekerja Tahun 2020

Triwulan I / First Quarter	Triwulan II / Second Quarter	Triwulan III / Third Quarter	Triwulan IV / Fourth Quarter
30%	35%	45%	100%

(dalam satuan % / in %)

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pelaporan pengaduan terkait masalah Hak Asasi Manusia juga dapat disampaikan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Adapun informasi terkait mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran, termasuk jumlah laporan pelanggaran yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

the recommendations. If the solution recommendations given by the Employee Relations Officer are appropriate, the Employee Relations DVP approves and sends it to the HR Services VP. However, if the recommendations are unsuitable, the Employee Relations DVP provides direction to the Labor Relations Officer to formulate a new solution recommendation. After the Employee Relations DVP approves the recommendation form and sends it to the VP of HR Services, then the VP of HR Services reviews and agrees by giving a disposition to the Employee Relations DVP to submit a solution recommendation through the *I-MOVE* application. Then, Employee Relations DVP provides a disposition to the Employee Relations Officer to create a complaint solution document and submit a solution through the *I-MOVE* application. Employee Relations Officer provides solutions to the Employee through *I-MOVE* application.

RKM Monitoring Report Related to Application System Development and SOP Development for Handling Employee Complaints

In order to improve the quality of handling worker complaints, the IPC Worker Relations Department has prepared a Monitoring Report related to the Management Work Plan (RKM) Development of Application Systems and SOPs for Submitting Worker Complaints Handling per quarter throughout 2020.

Implementation of RKMP Development of Application Systems and SOP for Submission of Worker Complaints Handling in 2020

Whistleblowing Mechanism

Complaints on Human Rights issues can be reported through the Whistleblowing System (WBS). Information on Whistleblowing System (WBS) mechanism, including the number of violation reports that have been received and followed up by the Company in 2020, has been described in Good Corporate Governance Chapter in this Annual Report.



CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja

Dampak dari pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia tercermin dari hasil Indeks *Engagement* dan Kepuasan Pekerja yang diperoleh dari Survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 Januari 2021 dengan melibatkan 1.417 Pekerja Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan IPC secara *online*.

Pada tahun 2020, Indeks *Engagement* Pekerja (IEP) secara Korporat (Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan) adalah 4,38 dari skala Likert 5,00 dengan kategori Sangat Terikat. Indeks tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,57 dari skala Likert 5,00 dengan kategori Sangat Terikat.

Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Pekerja (IKP) Korporat tercatat sebesar 4,58 dari skala Likert 5,00 dengan kategori Sangat Puas, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,51 dari skala Likert 5,00 dengan kategori Sangat Puas.

Adapun Indeks *Engagement* dan Kepuasan Pekerja Korporat dalam 5 (lima) tahun terakhir diuraikan dalam grafik berikut ini:

Indeks *Engagement* dan Kepuasan Pekerja Korporat dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun / Year	Indeks <i>Engagement</i> Pekerja (IEP) / Employee Engagement Index	Indeks Kepuasan Pekerja (IKP) / Employee Satisfaction Index
2016	4,13	4,13
2017	4,24	4,16
2018	4,37	4,27
2019	4,57	4,51
2020	4,38	4,58

Laporan *Monitoring* RKM terkait Survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja, Departemen Hubungan Pekerja IPC telah menyusun Laporan *Monitoring* terkait Rencana Kerja Manajemen (RKM) Survei *Engagement* dan Kepuasan Pekerja per triwulan sepanjang tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

ACHIEVEMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR HUMAN RIGHTS

Employee Engagement and Satisfaction Survey

The impact of the implementation of Corporate Social Responsibility activities on Human Rights was reflected in the results of the Employee Engagement and Satisfaction Index obtained from the Employee Engagement and Satisfaction Survey, which was carried out on January 18-21, 2021 and involved 1,417 Employees of the IPC Head Office and Branch Offices online.

In 2020, the Company Employee Engagement Index (IEP) (Head Office and 12 Port Branches) was 4.38 on a Likert scale of 5.00 in the Very Engaged category. This index was lower than 2019, which was recorded at 4.57 on the Likert scale of 5.00 in the Very Engaged category.

Whereas for Corporate Employee Satisfaction Index (IKP) in 2020 was recorded at 4.58 on the Likert scale of 5.00 in the Very Satisfied category, an increase from 2019 which was recorded at 4.51 on the Likert scale of 5.00 in the Very Satisfied category.

The Company Engagement and Satisfaction Index in the last 5 (five) years are described in the following diagram:

Corporate Engagement and Satisfaction Index in the Last 5 (Five) Years

(dalam satuan Likert / in Likert)

RKM Monitoring Report on the Employee Engagement and Satisfaction Surveys

In order to improve the implementation of the Employee Engagement and Satisfaction Surveys, the IPC Employee Relations Department prepared a Monitoring Report related to the Management Work Plan (RKM) for the quarterly Employee Engagement and Satisfaction Survey throughout 2020, with the following description:

Laporan *Monitoring* terkait RKM *Survei Engagement* dan Kepuasan Pekerja Tahun 2020

Monitoring Report related to RKM for the 2020 Employee Engagement and Satisfaction Survey

(dalam satuan % / in %)

Kriteria Penilaian / Assessment Criteria	Bobot / Value	Progress Aktual / Actual Progress	Progress Overall / Overall Progress
Triwulan I / First Quarter			
<i>Intiation</i>	10%	100%	10%
<i>Planning</i>	20%	100%	5%
<i>Execution</i>	50%	0%	0%
<i>Monitoring & Controlling</i>	15%	0%	0%
<i>Closing</i>	5%	0%	0%
Total	100%		15%

Pencapaian / Achievements:

Masih melakukan evaluasi dan rencana *action plan* masing-masing Cabang terhadap Hasil Indeks Survei Tahun 2019, dikarenakan pelaksanaan survei dilakukan di Triwulan IV tiap tahunnya. / Evaluation and action plans of each branch for the 2019 Survey Index Results were still being carried out as the survey was implemented in the fourth quarter of each year.

Next Step / Next Step :

Melakukan Evaluasi Survei tahun sebelumnya seperti klarifikasi, validasi, dan penyusunan langkah tindak lanjut perbaikan terhadap atribut survei selanjutnya. / Conducting the previous year's survey evaluation such as clarification, validation, and preparation of follow-up corrective steps for the next survey attributes.

Triwulan II / Second Quarter			
<i>Intiation</i>	10%	100%	10%
<i>Planning</i>	20%	100%	10%
<i>Execution</i>	50%	10%	0%
<i>Monitoring & Controlling</i>	15%	0%	0%
<i>Closing</i>	5%	0%	0%
Total	100%		20%

Pencapaian / Achievements:

Melakukan Evaluasi dan rencana *action plan* masing-masing Cabang terhadap Hasil Indeks Survei Tahun 2019, dikarenakan pelaksanaan survei dilakukan di Triwulan IV tiap tahunnya. / Evaluate and draft the action plan of each branch regarding the 2019 Survey Index Results, as the survey is carried out in the fourth quarter of each year.

Next Step / Next Step :

Melakukan Evaluasi Survei tahun sebelumnya seperti klarifikasi, validasi, dan penyusunan langkah tindak lanjut perbaikan terhadap atribut survei selanjutnya. / Conducting the previous year's Survey Evaluation such as clarification, validation, and preparation of follow-up corrective steps for the next survey attributes.

Triwulan III / Third Quarter			
<i>Intiation</i>	10%	100%	10%
<i>Planning</i>	20%	100%	20%
<i>Execution</i>	50%	60%	15%
<i>Monitoring & Controlling</i>	15%	50%	2%
<i>Closing</i>	5%	60%	0%
Total	100%		47%

Pencapaian / Achievements:

1. Membuat Dokumen Pengadaan Pemilihan Konsultan. / Drafting a Consultant Selection Procurement Document.
2. Melakukan evaluasi dan rencana *action plan* masing-masing Cabang terhadap Hasil Indeks Survei Tahun 2019, dikarenakan pelaksanaan survei dilakukan di Triwulan IV tiap tahunnya. / Evaluate and draft the action plan of each branch regarding the 2019 Survey Index Results, as the survey is carried out in the fourth quarter of each year.

Next Step / Next Step :

Melakukan Evaluasi Survei tahun sebelumnya seperti klarifikasi, validasi, dan penyusunan langkah tindak lanjut perbaikan terhadap atribut survei selanjutnya. / Conducting the previous year's Survey Evaluation such as clarification, validation, and preparation of follow-up corrective steps for the next survey attributes.

Triwulan IV / Fourth Quarter			
<i>Intiation</i>	10%	100%	10%
<i>Planning</i>	20%	100%	20%
<i>Execution</i>	50%	100%	35%
<i>Monitoring & Controlling</i>	15%	95%	8%
<i>Closing</i>	5%	95%	1%
Total	100%		73%

Pencapaian / Achievements:

Kontrak Pemilihan Konsultan *Survei Engagement* dan Kepuasan Pekerja tahun 2020. / The 2020 Employee Engagement and Employee Satisfaction Survey Consultant Selection Contract.

Next Step / Next Step :

Pelaksanaan *Survei Engagement* dan Kepuasan Pekerja tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 18-21 Januari 2021 kepada Pekerja Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan IPC secara *online*. / The 2020 Employee Engagement and Satisfaction Survey will be carried out on January 18-21, 2021 for IPC Head Office and Port Branch Office Workers online.



Progress Overall Pelaksanaan RKM Survei Engagement dan Kepuasan Pekerja Tahun 2020

Overall Progress of the Implementation of the 2020 RKM Workforce Engagement and Satisfaction Survey

(dalam satuan % / in %)

Triwulan I / First Quarter	Triwulan II / Second Quarter	Triwulan III / Third Quarter	Triwulan IV / Fourth Quarter
15%	20%	41%	85%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

BIDANG KETENAGAKERJAAN

IPC memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai mitra utama dan strategis bagi Perseroan yang berperan dalam menggerakkan roda operasional demi mendorong terwujudnya visi Perseroan untuk menjadi perusahaan jasa pelabuhan yang memiliki pelayanan yang berkualitas internasional.

Komitmen dan Kebijakan Pengelolaan SDM

Menyadari pentingnya peranan SDM bagi keberlangsungan usaha di masa depan, Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan SDM yang memiliki integritas tinggi serta berorientasi pada pelayanan Pelanggan.

Kebijakan Umum

1. Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki oleh seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perseroan menetapkan dan melaksanakan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja;
3. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perseroan selalu memiliki SDM yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Perseroan telah menetapkan pengelolaan SDM yang meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja

Direksi melakukan perencanaan organisasi Perseroan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan budaya Perseroan, fokus kepada efisiensi dan peraturan perundang-undangan serta

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

FIELD OF MANPOWER

IPC views Human Resources (HR) as the main and strategic partner for the Company, which plays a role in moving the operational wheels in order to encourage the realization of the Company's vision to become a port service company that has international quality services.

Commitment and Policies on HR Management

Realizing the importance of the role of HR for the sustainability of its business in the future, the Company is committed to developing human resources who have high integrity and are customer service oriented.

General Policies

1. The Board of Directors must employ, determine the amount of salary, provide training, determine career paths, and determine other job requirements, without considering ethnic background, religion, gender, age, disability owned by a person, or other special circumstances protected by laws and regulations.
2. The Company establishes and implements a competency and performance-based HR management system;
3. HR management is intended to ensure that the Company always has superior Human Resources who can be directed and driven to achieve the Company's goals.

HR Management Policies

The Company determines an HR management which comprises of the following processes:

1. Organization Development and Manpower Planning

The Board of Directors carries out the Company's organizational planning by taking into account the Company's needs in accordance with the Company's vision and mission, which has the ability to adapt to the Company's culture, focuses on efficiency and laws and

menyadari pentingnya kepuasan Pelanggan. Adapun proses ini meliputi:

- a. Penetapan struktur organisasi;
- b. Penetapan nomenklatur jabatan;
- c. Penetapan ruang lingkup pekerjaan dan jabatan;
- d. Penetapan struktur gaji yang berdasarkan kinerja.

2. Perencanaan Tenaga Kerja

Direksi menetapkan proses-proses perencanaan tenaga kerja yang bertujuan memberikan gambaran kebutuhan pekerja termasuk di antaranya kebutuhan rekrutmen pekerja. Proses rekrutmen yang bertujuan untuk memberikan hasil yang nyata, beretika tinggi, serta mampu membangun hubungan dan kerja sama tim dalam jangka waktu panjang. Proses rekrutmen Pekerja dilakukan berdasarkan basis kompetensi yang jelas sebagai kriteria utama. Proses perencanaan tenaga kerja minimal terdiri dari:

- a. Analisis beban kerja;
- b. Perencanaan tenaga kerja;
- c. Penetapan kebijakan dan program proses rekrutmen yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja serta orientasi, tenaga alih daya dan pemutusan hubungan kerja.

3. Penetapan Organisasi Perseroan

Direksi menetapkan struktur organisasi yang efisien dan efektif, yang dapat selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh Perseroan. Perubahan struktur organisasi dapat dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi Perseroan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi proses, tegas dan tepat sasaran tapi fleksibel, serta mampu menghilangkan batasan dalam hubungan kerja.

Penetapan struktur organisasi Perseroan hingga akhir tahun 2020 telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19

regulations and realizes the importance of customer satisfaction. The process includes:

- a. Determination of organizational structure;
- b. Determination of the nomenclature of positions;
- c. Determination of the scope of work and position;
- d. Determination of salary structure based on performance.

2. Workforce Planning

The Board of Directors established workforce planning processes that aim to illustrate the need for employees, including recruitment needs. The recruitment process aim to provide tangible results, strong ethics, and are able to build long-term relationships and teamwork. The employee recruitment process is carried out based on a clear competency basis as the main criterion. The workforce planning consists of at least:

- a. Workload analysis;
- b. Manpower planning;
- c. Determining the recruitment process policies and programs covering the process of recruitment, selection, placement of Workers and orientation, outsourcing and termination of employment.

3. Determination of Company's Organization

The Board of Directors establishes an efficient and effective organizational structure, which can always be adjusted to the conditions faced by the Company. Changes in the organizational structure can be made by the Board of Directors in accordance with the principles of good corporate governance. The Company's organizational structure is expected to be able to create a work environment that is process-oriented, assertive and on target but flexible, and able to remove boundaries in work relationships.

The determination of the Company's organizational structure until the end of 2020 has been regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 on the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in conjunction with Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/13/8/1/PSO/UT/PI.II-20 dated August 13, 2020 concerning Amendments to the Decree of the Board of



Tanggal 20 November 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 Dated November 20, 2019 on the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Human Capital Roadmap

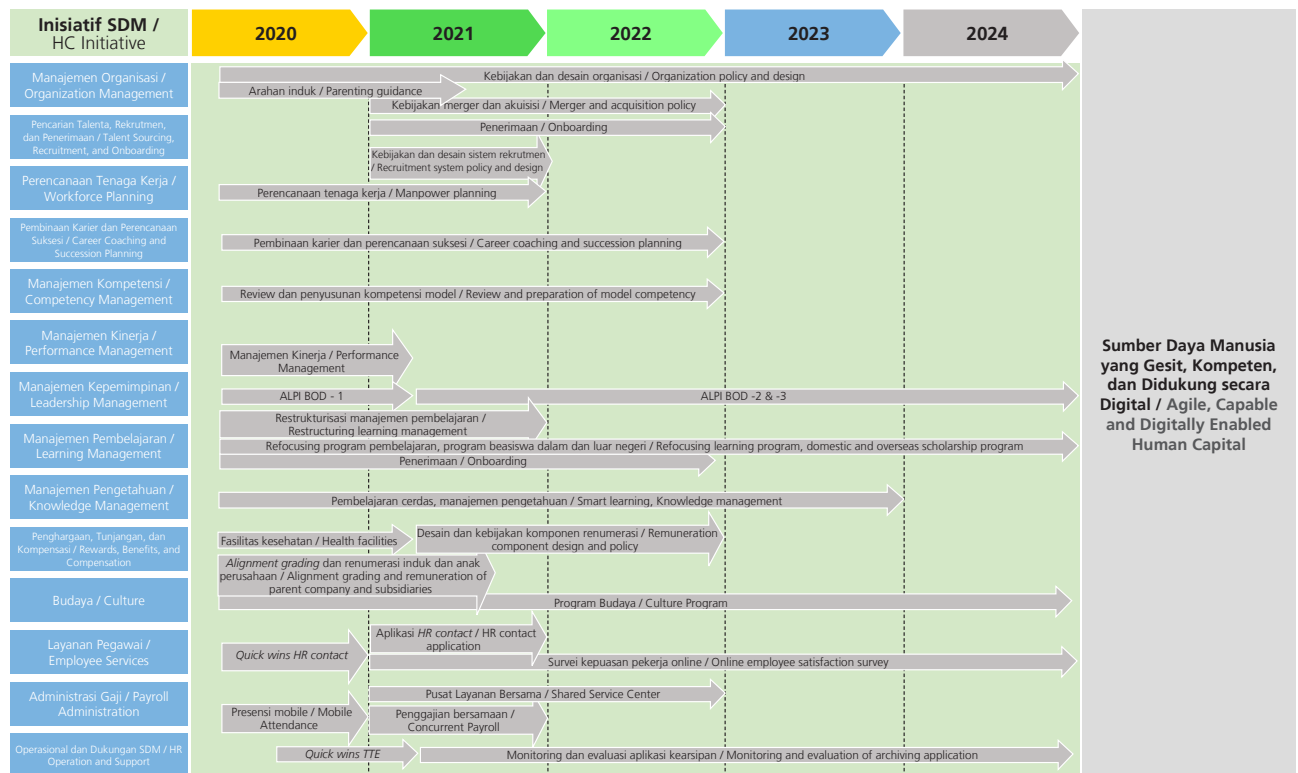
Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Perseroan, IPC telah menetapkan strategi pengelolaan SDM dalam *Human Capital Roadmap 2020 - 2024* dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.01.01/24/11/1/PSK/SDU/PI.II-2020 tanggal 24 November 2020. *Roadmap* tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kerja terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan IPC.

Human Capital Roadmap

In order to support the achievement of the Company's vision and mission, IPC has established a HR management strategy in the Human Capital Roadmap 2020-2024 in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.01.01/24/11/1/PSK/SDU/PI.II-2020 dated November 24, 2020. The roadmap can be used as a reference and guidance in implementing work programs related to Human Resources management in the IPC environment.

Human Capital Roadmap 2020 - 2024

Human Capital Roadmap 2020 - 2024



Target dan Sasaran Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM di Perseroan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Insan IPC. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menetapkan target dan sasaran pengelolaan SDM dalam RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020 yang telah mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

HR Management Targets and Aims

Human Resource management in the Company aims to increase capacity and capability of IPC personnel. In order to achieve this goal, the Company has set targets and targets for HR management in the RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020 which has been revised 1 (one) time in connection with the Covid-19 pandemic, with the following description:

Target dan Sasaran Kekuatan SDM dalam Revisi RKAP Tahun 2020

Targets and Aims of HR Strength in 2020 Revised RKAP

(dalam satuan orang / in person)

Indikator / Indicator	Target di 2020 Revised RKAP / Target in RKAP Revision 2020
Kekuatan SDM / HR Strength	
Pegawai di Induk Perusahaan / Employees in Parent Company	
• Pegawai Organik (Pekerja) / Organic Employees (Workers)	2.714 orang / person
• Pegawai Non-Organik / Non-Organic Employees	975 orang / person
• Jumlah Pegawai di Induk Perusahaan / Total Employees in Parent Company	3.689 orang / person
Jumlah Pegawai di Anak Perusahaan (Pegawai Organik + Non-Organik) / Total Employees in Subsidiaries (Organic + Non-Organic Employees)	6.590 orang / person
Total Pegawai / Total Employees	10.279 orang / person
Kualitas SDM melalui Program Pembelajaran / HR Quality through Study Program	
Program Pelatihan / Training Program	
• Jumlah Program / Total Programs	164 program / programs
• Jumlah Peserta / Total Participants	3.159 orang / person

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan

Program Rekrutmen dan Turnover Pekerja Program Rekrutmen Pekerja

Untuk mendapatkan Pekerja yang berkualitas dan unggul di bidangnya, kebijakan awal yang dilakukan Perseroan adalah melakukan rekrutmen untuk menjaring kandidat-kandidat terbaik. Rekrutmen dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan Pekerja berdasarkan kebutuhan formasi jabatan yang telah disusun sebelumnya oleh Divisi SDM Perseroan. Pengumuman rekrutmen Pekerja biasanya dipublikasikan secara daring melalui *website*, yaitu www.ipc.e-seleksi.com, media sosial Perseroan, maupun media surat kabar nasional. Dalam melaksanakan proses rekrutmen, Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip obyektif, transparan, dan terbuka, serta tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Persyaratan Umum Penerimaan Pekerja

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berumur minimal 18 (delapan belas) tahun saat diterima sebagai Pekerja;
3. Tidak sedang dalam ikatan dinas pada instansi pemerintahan maupun perusahaan lainnya;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Bersedia ditempatkan dan mematuhi peraturan yang berlaku di Perseroan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pekerja dari suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta;
7. Berkelakuan baik;
8. Lulus seleksi rekrutmen.

Implementation of Corporate Social Responsibility for Employment Activities

Employee Recruitment and Turnover Program Employee Recruitment Program

To get qualified and superior Employees in their fields, the initial policy carried out by the Company was to recruit the best candidates. Recruitment is carried out according to an analysis of the needs of employees based on the need for job formations that have been previously prepared by the Company's HR Division. Employee recruitment announcements are usually published online through the website www.ipc.e-seleksi.com, the Company's social media, as well as national newspapers. In carrying out the recruitment process, the Company always prioritizes the principles of being objective, transparent and open, and without differentiating between ethnicity, religion, race, and between groups.

General Requirements for Employee Recruitment

The general requirements that must be met by Prospective Employees are as follows:

1. Indonesian citizens;
2. At least 18 (eighteen) years of age when accepted as an Employee;
3. Not currently in an official bond with government agencies or other companies;
4. Physically and mentally healthy;
5. Willing to be placed and comply with the applicable regulations in the Company;
6. Never been dishonorably dismissed as a Worker from an agency, both government and private;
7. Good behavior;
8. Pass the recruitment selection.



Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen Pekerja

Tahapan pelaksanaan rekrutmen Pekerja antara lain:

1. Pengumuman Pembukaan secara Terbuka;
2. Registrasi melalui *Website*;
3. Seleksi Administrasi;
4. Tes berenang (untuk Jabatan Pandu);
5. Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik);
6. Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris);
7. *Interview User*;
8. Tes Kesehatan;
9. *Interview* Direksi.

Tingkat Perputaran Pekerja

IPC menyadari sepenuhnya bahwa Pekerja merupakan salah satu aset terpenting yang berperan penting dalam menentukan kualitas performa Perseroan serta penentu keberlangsungan bisnis di masa depan. Oleh sebab itu, IPC senantiasa berupaya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari setiap Pekerja selama menjalankan aktivitas operasional dalam rangka meningkatkan keterikatan Pekerja terhadap IPC. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan *monitoring* Tingkat Perputaran Pekerja secara berkala setiap tahunnya. Dengan melakukan *monitoring* tersebut, IPC dapat mengetahui dan menganalisis profil dari Pekerja yang mengundurkan diri, khususnya alasan pengunduran diri dari Pekerja yang bersangkutan.

Beberapa alasan berakhirnya hubungan kerja dengan Pekerja IPC antara lain:

1. Atas permintaan sendiri (minimal usia 46 tahun).
2. Pengunduran diri secara sukarela.
3. Mencapai batas usia pensiun Pekerja, yaitu 56 tahun.
4. Melakukan pelanggaran Disiplin Kerja.
5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
6. Meninggal dunia.
7. Hilang/tidak diketahui tempatnya berada sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
8. Diangkat menjadi Direksi atau Komisaris pada BUMN atau perusahaan lain di luar Anak Perusahaan.
9. Diangkat menjadi pekerja tetap pada BUMN lain, instansi pemerintah, atau perusahaan lain di luar Anak Perusahaan.
10. Menjadi anggota/pengurus Partai Politik.
11. Menjadi anggota Legislatif/Eksekutif.

Implementation Stages of Employee Recruitment

The implementation stages of Employee recruitment are as follows:

1. Public Opening Announcement;
2. Registration via Website;
3. Administrative Selection;
4. Swimming test (for Pilotage Position);
5. First Stage Selection Test (Academic Potential Test);
6. Second Stage Selection Test (Psychological and English Test);
7. User Interview;
8. Medical checkup;
9. Interview by the Board of Directors.

Employee Turnover Rate

IPC is fully aware that employees are one of the most important assets that play an important role in determining the quality of the Company's performance as well as determining the sustainability of its business in the future. Therefore, IPC always strives to maintain the comfort and safety of each employee while carrying out operational activities in order to increase employee attachment to IPC. One of the efforts made is to monitor the Employee Turnover Rate periodically every year. By carrying out this monitoring, IPC can find out and analyze the profile of the Employee who resigns, especially the reason for the resignation of the Employee concerned.

Several reasons for terminating work relations with IPC Employees are:

1. Upon own request (minimum age 46 years).
2. Voluntary resignation.
3. Reach the Employee's retirement age limit, which is 56 years old.
4. Violating Work Discipline.
5. Physically and/or spiritually handicapped.
6. Pass away.
7. Lost/unknown whereabouts in at least 3 (three) months.
8. Appointed as member of the Board of Director or Board of Commissioner in a state-owned enterprise (BUMN) or other company outside of the Subsidiaries.
9. Appointed to be a permanent worker at another state-owned enterprise (BUMN), government agency, or other company outside of the Subsidiaries.
10. Become a member/administrator of a Political Party.
11. Become a Legislative/Executive member.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran hubungan kerja dengan Pekerja karena alasan-alasan yang telah diuraikan di atas telah diatur dalam Pasal 36 Bab IX Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2020 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II tentang Berakhirnya Hubungan Kerja dan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengakhiran Hubungan Kerja No. KP.07.02/6/8/1/KRF/SDM/PI.II-20 tanggal 6 Agustus 2020.

Hingga akhir tahun 2020, Tingkat Perputaran Pekerja IPC tercatat sebesar 2,25 persen, lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 2,35 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah Pekerja yang masuk melalui proses rekrutmen maupun jumlah Pekerja yang keluar dari Perseroan. Adapun tren dari Tingkat Perputaran Pekerja selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Further provisions regarding the termination of employment relations with Employees for reasons described above have been regulated in Article 36 Chapter IX of the 2019 – 2020 Collective Labor Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the Indonesian Pelabuhan Workers Union II regarding the Termination of the Work Relationship and Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on Termination of Employment Relations No. KP.07.02/6/8/1/KRF/SDM/PI.II-20 dated August 6, 2020.

Until the end of 2020, the IPC Employee Turnover Rate was recorded at 2.25 percent, lower than 2019 at 2.35 percent. This decrease was influenced by the decrease in the number of employees who entered through the recruitment process and the number of employees leaving the Company. The trend in Employee Turnover Rate for the last 3 (three) years are as follows:

Tingkat Perputaran Pekerja dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Employee Turnover Rate in the Last 3 (Three) Years

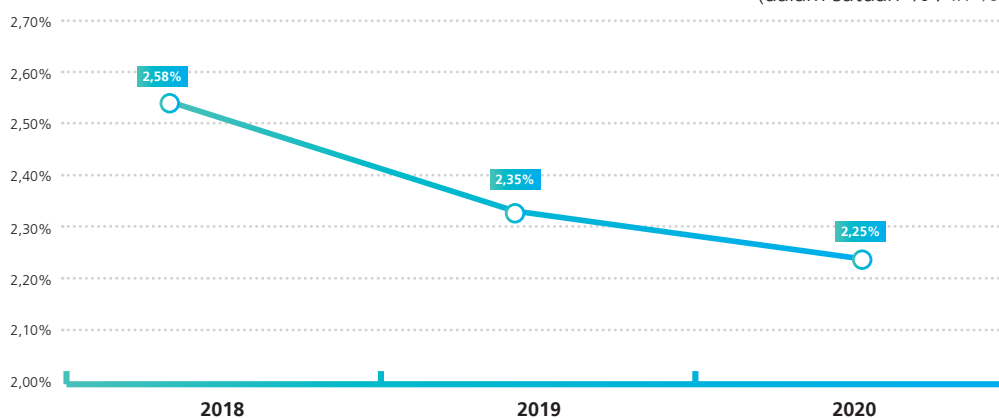
(dalam satuan orang / in person)

Uraian / Description	2020	2019	2018
Jumlah Pekerja Masuk / Total New Hires	6	128	1
Jumlah Pekerja Keluar / Total Resigning Employees			
• Pensiun Normal / Normal Retirement	31	48	48
• Meninggal Dunia / Deceased	12	6	13
• Mengundurkan Diri / Resigned	8	6	5
• Diangkat menjadi Direksi BUMN / Appointed as Board of Directors of BUMN	5	1	1
• Pensiun Permintaan Sendiri / Retirement at Own Request	2	1	0
• Diberhentikan dengan Tidak Hormat / Dishonorably Terminated	2	0	1
Total Jumlah Pekerja Keluar / Total Resigning Employees	60	62	68
Tingkat Perputaran Pekerja / Employee Turnover Rate	2,25%	2,35%	2,58%

Tingkat Perputaran Pekerja Periode Tahun 2018 - 2020

Employee Turnover Rate in 2018 - 2020

(dalam satuan % / in %)





Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Tingkat *Turnover* Pekerja IPC selama 2018 hingga 2020 menunjukkan tren penurunan. Tingkat *turnover* Pekerja yang semakin turun menunjukkan upaya Perseroan untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan Pekerja secara berkesinambungan melalui penguatan strategi retensi.

Program Pengembangan Kompetensi Pekerja

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia, IPC terus berupaya untuk memperkuat kompetensi dari Pekerja IPC melalui penyelenggaraan program pengembangan kompetensi secara rutin dan berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi, Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh Pekerja untuk mengikuti dan menjadi peserta pelatihan. Penugasan kepada setiap Pekerja untuk mengikuti pelatihan/pendidikan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan rencana pengembangan usaha.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Pekerja IPC antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap mental, dan profesionalisme Pekerja sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing Perseroan serta mengikuti perkembangan bisnis dan teknologi;
2. Mengembangkan kompetensi Pekerja agar sesuai dengan tuntutan kompetensi pada jabatan/pekerjaan saat ini;
3. Meningkatkan kompetensi Pekerja agar sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan (*job requirement*) di masa mendatang yang sesuai dengan pola pengembangan karier.

Program Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh Perseroan meliputi Program Pendidikan, Program Pelatihan, dan Program Magang.

Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan program peningkatan kompetensi Pekerja melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) orang yang belum menyelesaikan Program Pendidikan dengan rincian Program Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri dengan jumlah peserta sebanyak 6 (enam) orang dan Program Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri yang berjumlah 1 (satu) orang.

Based on the chart above, the Employee Turnover Rate of IPC from 2018 to 2020 showed a declining trend, which indicates the Company's efforts to meet the expectations and needs of the employees in a continuous manner by strengthening retention strategy.

Employee Competency Development Program

In line with the Company's vision to become a World Class Maritime Ecosystem, IPC continues to strive to strengthen the competence of IPC Employees through the implementation of regular and continuous competency development programs. In conducting competency development programs, the Company provides equal opportunities for all Employees to participate in and become training participants. The assignment of each Employee to attend training/education is based on the consideration of the Company's needs by taking into account the business development plan.

The objectives of the implementation of the IPC Employee Competency Development Program are, among others:

1. Increase the knowledge, skills, mental attitude and professionalism of Employees so that they can support the increase in the productivity and competitiveness of the Company and keep abreast of business and technology developments;
2. Developing Employees competencies to match the competency demands of the current position/job;
3. Improve Employees competence so that they are in line with future job requirements in accordance with the career development patterns.

Competency Development Programs organized by the Company include Education Programs, Training Programs, and Internship Programs.

Education Program

The education program is a program to increase Employees' competency through formal education organized by education providers, both at home and abroad.

In 2020, 7 (seven) participants have not completed Education Program, namely 6 (six) participants in the Overseas Postgraduate Education Program and 1 (one) participant in the Domestic Postgraduate Education Program.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan beberapa negara di dunia sejak awal tahun 2020, maka penyelenggaraan program Pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2020 ini ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan, sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat pembahasan *Refocusing Program Pembelajaran, Culture Roadmap, dan Knowledge Management* yang dilaksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan 28 Mei 2020.

Program Pelatihan

Program pelatihan merupakan program pengembangan kompetensi yang bersifat non-formal, sehingga Pekerja dapat melaksanakan tugas dengan kinerja yang optimal. Dalam penyelenggaraan program pelatihan *in-house*, Perseroan dapat bekerja sama dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, sebagai wujud sinergi pengembangan Anak Perusahaan antar IPC Group.

Secara umum, program pelatihan yang diselenggarakan oleh Perseroan terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Program Pelatihan Dasar Korporat
Program Pembelajaran Dasar yang Wajib diikuti seluruh calon Pekerja IPC;
2. Program Pelatihan Wajib Korporat
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh Pekerja IPC sesuai levelnya;
3. Program Pelatihan Kepemimpinan Korporat
Program Kepemimpinan Korporat merupakan pembelajaran yang diselenggarakan dengan merujuk kepada Kompetensi Kementerian BUMN, sehingga diharapkan Pekerja IPC dapat mendukung tujuan BUMN dalam transformasi *Human Capital* dalam meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta.

Terdapat 2 (dua) jenis pelatihan yang termasuk program ini, yaitu:

- a. Program Pelatihan Kepemimpinan Korporat untuk Pengembangan Karier
Program Pelatihan Kepemimpinan Korporat untuk Pengembangan Karier adalah program pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan zona jabatannya.

In connection with the Covid-19 pandemic that hit Indonesia and several countries in the world since the beginning of 2020, the implementation of the Education program, both at home and abroad in 2020, would be cancelled until an undetermined time limit, as stated in the meeting minutes on the *Refocusing on Learning Programs, Culture Roadmap, and Knowledge Management*, which was held from April 16 to May 28, 2020.

Training Program

Training program is a non-formal competency development program, so that employees can carry out tasks with optimal performance. In organizing an in-house training program, the Company may cooperate with PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, as a form of synergy in the development of Subsidiaries between the IPC Group.

In general, the training program held by the Company consists of 5 (five) types, namely:

1. Basic Corporate Training Program
Basic Learning Program that is mandatory for all employee candidates of IPC;
2. Obligatory Corporate Training Program
Learning Program that is mandatory for all IPC employees based on their level;
3. Corporate Leadership Training Program
The Corporate Leadership Program is a training held by referring to the Competence of the Ministry of BUMN. As such, it is hoped that IPC Employees can support the goals of BUMN in the transformation of Human Capital in increasing the competitiveness of SOEs to become global players and making BUMN as talent factories.

There are 2 (two) training types in this program, namely:

- a. Corporate Leadership Training Program for Career Development
The Corporate Leadership Training Program for Career Development is a leadership training program provided to employees according to their position zone.



- | | |
|---|---|
| <p>b. Program Pelatihan Kepemimpinan Korporat untuk Persyaratan Karier
Program Pelatihan Kepemimpinan Korporat untuk Persyaratan Karier adalah program pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada pekerja yang akan naik zona karier.</p> | <p>b. Corporate Leadership Training Program for Career Requirements
The Corporate Leadership Training Program for Career Requirements is a leadership training program given to employees who are undergoing career promotion.</p> |
| <p>4. Program Pelatihan Lintas Akademi
Program Pembelajaran bagi pekerja IPC untuk peningkatan kompetensi teknis akademi lainnya.</p> | <p>4. Cross-Academy Training Program
Learning Program for IPC employees to improve other academic technical competencies.</p> |
| <p>5. Program Pelatihan Wajib & Keahlian Sekolah
Program Wajib & Keahlian Sekolah merupakan Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang tertentu. Terdapat 7 (tujuh) jenis pelatihan dari program ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung;2. Akademi Wakil Direktur Utama
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Wakil Direktur Utama;3. Akademi Komersial
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Komersial;4. Akademi Teknik
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Teknik;5. Akademi Operasi
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Operasi;6. Akademi Keuangan
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Keuangan;7. Akademi Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh pekerja IPC dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pada bidang Transformasi dan Pengembangan Bisnis. | <p>5. Expertise & School Mandatory Program
The Expertise & School Mandatory Program is a Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in specific fields. There are 7 (seven) types of training from this program, namely:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leadership and Business Support Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in Leadership and Business Support;2. Vice President Director Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in the Vice President Director field;3. Commercial Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in the Commercial field;4. Technical Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in the Technical field;5. Operations Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in Operations;6. Finance Academy
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in Finance;7. Academy of Business Transformation and Development
Learning Program that is mandatory for all IPC employees to improve technical competencies in the Business Transformation and Development. |

Sepanjang tahun 2020, program pelatihan IPC diselenggarakan sebanyak 159 kali dan diikuti oleh 6.480 Pekerja, dengan uraian sebagai berikut:

Throughout 2020, the IPC training program was held 159 times and attended by 6,480 employees, with the following descriptions:

Penyelenggaraan Program Pelatihan Tahun 2020 Berdasarkan Metode Penyelenggaraan dan Pihak Penyelenggara

Implementation of the 2020 Training Program Based on the Holding Method and the Organizer

Metode Penyelenggaraan / Holding Method	Pihak Penyelenggara / Organizer		Total
	Publik / Public	In-house	
Webinar / Webinar	6	45	51
Pelatihan / Training	18	68	86
Sertifikasi / Certification	12	10	22
Total	36	123	159

Penyelenggaraan Program Pelatihan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Program, Jumlah Program, dan Jumlah Peserta

Implementation of the 2020 Training Program Based on Program Types, Program Number, and Participants Number

Jenis Program Pelatihan / Types of Training Program	Jumlah Program / Total Program			Jumlah Peserta / Total Participant		
	Publik / Public	In-house	Jumlah / Total	Terdaftar / Registered	Terealisasi / Realized	Persentase / Percentage
Dasar Korporat / Corporate Basics	-	-	-	-	-	-
Wajib Korporat / Corporate Mandatory	6	10	16	850	794	93%
Kepemimpinan Korporat / Corporate Leadership						
- Pengembangan Karier / Career Development	-	3	3	81	71	88%
- Persyaratan Karier / Career Requirements	-	4	4	83	82	99%
Lintas Akademi / Cross Academy	3	51	54	5.666	4.372	77%
Wajib & Keahlian Sekolah / Expertise & School Mandatory	-	1	1	1	1	100%
- Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung / Leadership and Supporting Business Academy	16	13	29	417	389	93%
- Akademi Wakil Direktur Utama / Vice President Director Academy	2	4	6	33	32	97%
- Akademi Komersial / Commercial Academy	-	1	1	28	23	82%
- Akademi Teknik / Technical Academy	1	3	4	85	80	94%
- Akademi Operasi / Operations Academy	3	12	15	143	139	97%
- Akademi Keuangan / Finance Academy	3	9	12	235	213	91%
- Akademi Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Transformation and Business Development Academy	2	12	14	195	184	94%
Lainnya / Others	-	-	-	100	100	100%
Total	36	123	159	7.917	6.480	82%

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan beberapa negara di dunia sejak awal tahun 2020, Divisi Pembelajaran SDM menyelenggarakan kegiatan *Webinar* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan Program Pembelajaran Pekerja. Untuk pelaksanaan program Pelatihan difokuskan untuk mendukung *core business* Perseroan dalam mengimplementasikan *services* industri pelabuhan, yaitu *flow of goods* (kecepatan bongkar muat) dan *flow of*

In connection with the Covid-19 pandemic that hit Indonesia and several countries in the world since the beginning of 2020, the HR Learning Division held Webinars as an alternative to the implementation of Employee Learning Program. The implementation of the training program is focused on supporting the Company's core business in implementing port industry services, namely flow of goods (loading and unloading speed) and flow of documents (speed



documents (kecepatan dan ketepatan administrasi mengikuti kegiatan bongkar muat tersebut). Sedangkan untuk program Sertifikasi wajib diikuti oleh Pekerja yang memiliki jabatan tertentu, mengikuti regulasi atau kualifikasi yang ditentukan.

Program Magang

Program Magang yang diselenggarakan oleh Perseroan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Program *Sisterport*, *Talent Exchange* BUMN, dan *Fellowship*.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan beberapa negara di dunia sejak awal tahun 2020, maka penyelenggaraan program Magang *Sisterport* dan *Global Apprenticeship* pada tahun 2020 ini ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan, sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat pembahasan *Refocusing Program Pembelajaran*, *Culture Roadmap*, dan *Knowledge Management* yang dilaksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan 28 Mei 2020. Hal yang sama juga berlaku pada pelaksanaan Program Magang *Talent Exchange* BUMN dan *Fellowship* yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19.

IPC Corporate University

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan untuk bertransformasi menjadi pelabuhan kelas dunia, Perseroan membentuk *IPC Corporate University* dan menggandeng Anak Perusahaan IPC, yakni PT PMLI untuk bekerja sama sebagai penyelenggara pelatihan.

Selain berfokus pada kegiatan pelatihan, *IPC Corporate University* turut menyelenggarakan program pembelajaran berupa pendidikan dan magang serta menghadirkan pendidikan dengan fokus pada pengelolaan pengetahuan dalam bidang pelabuhan, maritim, logistik, serta manajemen dan kepemimpinan. Pelaksanaan pembelajaran selain melibatkan peran serta sumber daya internal secara optimal, Perseroan juga bekerja sama dengan tenaga ahli dari institusi dalam negeri maupun luar negeri.

Mayoritas kegiatan pembelajaran di *IPC Corporate University* diselenggarakan di Kampus I Ciawi yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti *Simulator Center* yang memiliki 4 (empat) unit *crane simulator* dan 1 (satu) unit *ship simulator*. Selain itu juga terdapat fasilitas *Port & Logistic Simulation Building* serta *Learning & Innovation Building* yang memiliki 20 (dua puluh) ruangan kelas, perpustakaan dengan ribuan koleksi, *ballroom*, auditorium, serta *residence* berkapasitas 140 (seratus empat puluh) kamar. Sedangkan Kampus II berlokasi di Walang, Jakarta Utara dengan fasilitas ruang kelas, wisma, ruang rapat dan sarana olahraga.

and accuracy of administration following the loading and unloading activities). Meanwhile, the Certification program must be followed by Employees with certain positions, in line with the specified regulations or qualifications.

Internship Program

The Internship Program held by the Company consists of 3 (three) types, namely the *Sisterport* Program, BUMN *Talent Exchange*, and *Fellowship*.

In connection with the Covid-19 pandemic that hit Indonesia and several countries in the world since early 2020, the implementation of the *Sisterport* Apprenticeship and *Global Apprenticeship* program in 2020 would be abolished until an undetermined time limit, as stated in the Meeting Minutes that discussed *Learning Program Refocusing*, *Culture Roadmap*, and *Knowledge Management*, which were held from April 16 to May 28, 2020. The same applied to the implementation of the BUMN *Talent Exchange* and *Fellowship* Internship Programs which were hampered due to the Covid-19 pandemic.

IPC Corporate University

In order to realize the Company's commitment to transforming into a world-class port, the Company formed *IPC Corporate University* and collaborated with an IPC subsidiary, namely PT PMLI, to work together as a training provider.

Apart from focusing on training activities, *IPC Corporate University* also organizes learning programs in the form of education and apprenticeships as well as presenting education with a focus on knowledge management in the fields of ports, maritime, logistics, as well as management and leadership. In addition to optimally engaging internal resources, the Company also collaborates with experts from domestic and foreign institutions.

The majority of learning activities at *IPC Corporate University* are held at Campus I Ciawi, which is equipped with various facilities such as the *Simulator Center* with 4 (four) crane simulator units and 1 (one) ship simulator unit. In addition, there are also *Port & Logistic Simulation Building* and *Learning & Innovation Building* facilities, which have 20 (twenty) classrooms, a library with thousands of collections, a ballroom, an auditorium, and a residence with the capacity of 140 (one hundred and forty) rooms. Meanwhile, Campus II is located in Walang, North Jakarta with facilities such as classrooms, guest houses, meeting rooms and sports facilities.

Pernyataan tentang Kesetaraan

IPC memiliki konsep kesetaraan untuk pekerjanya yang ditunjukkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana pekerja adalah seluruh Pekerja IPC, tanpa dibedakan berdasarkan SARA dan gender.

Pengembangan karier maupun pelatihan di IPC juga tidak dibedakan berdasarkan SARA dan gender. Pengembangan karier telah diatur dalam Surat Keputusan Pengembangan SDM dan Pola Karier. Untuk Pengembangan SDM, syarat pengembangan pekerja didasarkan pada hasil *performance* dan *assessment*. Sedangkan untuk karier pekerja didasarkan pada hasil performansi, talenta, dan juga minat dari pekerja.

Program Penilaian Kinerja Pekerja

Dalam rangka mengevaluasi kinerja seluruh Pekerja IPC, Perseroan setiap tahunnya melakukan pengukuran keberhasilan kinerja individu dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Key Performance Indicators (KPI) Individu

KPI Individu adalah alat ukur kinerja individu yang diterapkan sejak tahun 2020 di Kantor Pusat dan Cabang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang merupakan turunan (*cascading*) dari KPI Korporat menjadi KPI Individu. KPI Individu dimonitor dan dilaporkan setiap semester.

Pada tahun 2020, hasil rata-rata KPI Individu Pekerja IPC Kantor Pusat dan Cabang adalah dengan nilai sebesar 104,5 yang masuk dalam kategori "Memuaskan".

2. Penilaian Performansi Bulanan (P2B)

P2B merupakan metode penilaian individu yang digunakan oleh anak perusahaan sebagai salah satu dasar untuk persyaratan karier, pengembangan diri, dan kompensasi bagi Pekerja yang diperbantukan di Anak Perusahaan. P2B dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Pada tahun 2020, hasil rata-rata nilai performansi seluruh Pekerja IPC 7,20 dari skala 8,00 dan termasuk dalam kategori "Baik".

Hasil dari penilaian performansi Pekerja menjadi salah satu dasar bagi Perseroan dalam menentukan pembagian bonus, pengembangan karier, dan pemberian insentif bagi Pekerja sesuai dengan ketentuan Perseroan.

Statement of Equality

IPC adopts the concept of equality for its employees as demonstrated in Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), in which all Employees are regarded as IPC employees without discrimination based on ethnicity, religion, race, class (SARA) and gender.

Career development or trainings at IPC also do not discriminate based on SARA and gender. Career development is regulated in Decree of HR Development and Career Pattern. In HR Development, the requirements for employee development are based on the results of performance and assessment of an employee, while an employee's career is based on performance results, talent, as well as the interests of the employee.

Employee Performance Assessment Program

In order to evaluate the performance of all IPC Employees, the Company annually measures the success of individual performance using several methods, including:

1. Individual Key Performance Indicator (KPI)

Individual KPI refers to individual performance measurement tool applied since 2020 at the Head Office and Branches within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which is cascaded from Corporate KPIs to Individual KPIs. Individual KPIs are monitored and reported every semester

In 2020, the average KPI for IPC Headquarters and Branch Officers was with a score of 104.5 which was in the "Satisfactory" category.

2. Annual Performance Assessment (P2B)

P2B is an individual appraisal method used by subsidiaries as a basis for career requirements, self-development, and compensation for workers assigned at Subsidiaries. P2B is carried out regularly every month. In 2020, the average performance score of all IPC Employees was 7.20 out of 8.00 and fell under the "Good" category.

The results of the Employee performance are one of the basis for the Company in determining the distribution of bonuses, career development, and incentives for Employees pursuant to the Company's regulations.



Program Penempatan dan Mutasi Jabatan Pekerja

Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penempatan dan mutasi jabatan Pekerja sebagai bentuk pengembangan diri serta karier Pekerja. Penempatan dan mutasi jabatan Pekerja tidak boleh dilaksanakan berdasarkan diskriminasi pada suku, agama, ras dan antar golongan, keadaan fisik, perselisihan industrial, penyampaian keluhan atau pendapat terhadap kebijakan Manajemen IPC.

Penempatan Pekerja ke Cabang Pelabuhan/Unit Kerja Perusahaan

Setiap Pekerja harus bersedia ditempatkan pada Cabang Pelabuhan ataupun Unit Kerja di seluruh wilayah kerja Perseroan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO. Uraian mengenai jumlah Pekerja yang ditempatkan pada Cabang Pelabuhan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO pada tahun 2020 dapat dilihat di Sub Bab Profil Pekerja IPC pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Mutasi Jabatan Pekerja

Pelaksanaan mutasi atau perpindahan jabatan Pekerja memperhatikan formasi jabatan yang dibutuhkan serta performansi dan kompetensi dari setiap Pekerja IPC. Secara umum, terdapat 3 (tiga) metode mutasi jabatan Pekerja, yaitu:

1. Promosi Jabatan

Promosi jabatan merupakan alih tugas Pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas jabatannya, baik dalam satu lingkungan Cabang Pelabuhan atau Unit Kerja di seluruh wilayah kerja Perseroan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO, maupun antar Cabang Pelabuhan atau Unit Kerja di seluruh wilayah kerja Perseroan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO.

Promosi jabatan dilakukan kepada Pekerja dengan mempertimbangkan kompetensi dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- Adanya kebutuhan Perseroan dan tersedianya formasi jabatan.
- Hasil penilaian kinerja baik.
- Tidak sedang terkena sanksi Disiplin Pekerja.
- Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.
- Hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Manajemen Perseroan.

2. Rotasi Jabatan

Rotasi jabatan merupakan alih tugas Pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas relatif sama/setara dan tidak berdampak pada perubahan kelas jabatan, baik dalam satu

Placement Program and Employee's Position Transfer

The Company has full authority to carry out the placement and transfer of the Employee's position as a form of personal development and the Employee's career. Placement and transfer of Employee positions may not be carried out based on discrimination based on ethnicity, religion, race, and between groups, physical condition, industrial disputes, submission of complaints or opinions against IPC Management policies.

Employee Placement in the Company's Port Branch/Work Unit

Every Employee must be willing to be placed in a Port Branch or Work Unit in the entire work area of the Company and the Subsidiaries/Affiliates/KSO. A description of the number of Workers assigned to Port Branches and Subsidiaries/Affiliates/KSO in 2020 can be seen in the Sub-Chapter of IPC Employee Profile in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Employee Position Transfer

The implementation of transfer of Employee positions takes into account the required position formation and the performance and competence of each IPC employee. In general, there are 3 (three) methods of transferring an Employee's position, namely:

1. Position Promotion

Promotion of a position is the transfer of duties of an employee from one position to another of a higher class position, either within a Port Branch or Work Unit in the entire work area of the Company or Subsidiaries/Affiliates/KSO, as well as between Port Branches or Work Units in all work areas of the Company and its Subsidiaries/Affiliates/KSO.

Promotion is carried out to employees by taking into account the competencies and several requirements that must be met, including:

- The needs from the Company and the availability of position formations.
- Good performance appraisal results.
- Not undergoing sanction by Employee Discipline.
- Meet the required competencies.
- Other matters that will be determined by the Company's Management.

2. Position Turnover

Rotation of positions is the transfer of duties of workers from one position to another which has relatively similar/equal responsibilities and workloads and does not have an impact on changes in class of position, either within

lingkungan Cabang Pelabuhan atau Unit Kerja di seluruh wilayah kerja Perseroan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO, maupun antar Cabang Pelabuhan atau Unit Kerja di seluruh wilayah kerja Perseroan maupun Anak Perusahaan/Afiliasi/KSO.

3. Demosi Jabatan

Demosi jabatan merupakan penurunan Kelas Jabatan bagi Pekerja menjadi lebih rendah dari Kelas Jabatan sebelumnya, maksimal penurunan ke 2 (dua) tingkat dari Kelas Jabatan sebelumnya.

Adapun uraian mengenai pelaksanaan pengelolaan karier melalui program mutasi Pekerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pelaksanaan Program Mutasi Jabatan Pekerja IPC Tahun 2020

Jenis Mutasi Jabatan / Type of Job Transfer	Jumlah Pekerja (orang) / Total Employee (person)
Promosi / Promotion	151
Rotasi / Rotation	684
Demosi / Demotion	9
TOTAL	844

**Program Remunerasi dan Kesejahteraan Pekerja
Program Remunerasi Pekerja**

Selaras dengan visi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia, Perseroan berkomitmen untuk secara konsisten memberikan remunerasi dan program kesejahteraan bagi para Pekerja. Pemberian remunerasi dan program kesejahteraan tersebut merupakan wujud kepedulian Perseroan terhadap kesejahteraan pegawai dengan tetap memperhatikan pada asas keberlanjutan (*sustainability*).

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen menerapkan kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada tiga aspek dasar yaitu *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance* dengan memperhatikan kompetensi serta kinerja. Selain itu, kebijakan manajemen mengenai kesejahteraan pegawai disusun dengan mempertimbangkan aspek kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perseroan.

Remunerasi yang diberikan oleh Perusahaan tidak hanya dalam bentuk bulanan, namun juga berupa tunjangan lain dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai produktivitas optimal. Adapun komponen remunerasi Pekerja yang diberikan oleh Manajemen IPC meliputi:

a Port Branch or Work Unit in the entire work area of the Company or Subsidiaries/Affiliates/KSO, as well as between Port Branches or Work Units in the entire work area of the Company and Subsidiaries/Affiliates/KSO.

3. Job Demotion

Job demotion is a reduction in the Position Class for Employees to be lower than the previous Position Class, a maximum of a decrease to 2 (two) levels from the previous Position Class.

The description of the implementation of career management through the Employee transfer program in 2020 can be seen in the following table:

Employee Transfer Program Implementation of IPC in 2020

(dalam satuan orang / in person)

Jenis Mutasi Jabatan / Type of Job Transfer	Jumlah Pekerja (orang) / Total Employee (person)
Promosi / Promotion	151
Rotasi / Rotation	684
Demosi / Demotion	9
TOTAL	844

**Remuneration and Employee Welfare Program
Employee Remuneration Program**

In line with the vision of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to become a World Class Maritime Ecosystem, the Company is committed to consistently providing remuneration and welfare programs for employees. The provision of remuneration and welfare programs is a form of the Company's concern for the welfare of employees while still paying attention to the principle of sustainability.

In line with this, management implements a remuneration policy based on three basic aspects, namely *Pay for Person*, *Pay for Position* and *Pay for Performance* with due regard to competence and performance. In addition, management policies regarding employee welfare are formulated by taking into account the aspects of the increase in the cost of living and the Company's financial capacity.

Remuneration provided by the Company is not only in the form of months, but also in the form of other benefits in order to increase employee motivation to achieve optimal productivity. The components of employee remuneration provided by IPC Management include:



1. Gaji Pokok;
2. Tunjangan Cuti Tahunan;
3. Tunjangan Cuti Besar;
4. Uang Bantuan Pendidikan;
5. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
6. Gaji Ke XIII;
7. Bonus.

Pada tahun 2020, rasio perbandingan remunerasi Pekerja level jabatan tertinggi dengan Pekerja level jabatan terendah adalah 1:8.

Program Kesejahteraan Pekerja

Selain pemberian remunerasi, Perseroan juga memberikan berbagai macam fasilitas sebagai salah satu strategi memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para Pekerja dalam menjalankan aktivitas operasional. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan antara lain:

1. Fasilitas kesehatan;
2. Rumah dinas jabatan dan rumah dinas operasional bagi pejabat yang mengalami mutasi;
3. Bantuan biaya sewa rumah bagi pegawai yang mengalami mutasi;
4. Fasilitas kendaraan dinas bagi pejabat tertentu;
5. Fasilitas makan siang;
6. Bantuan biaya pindah sekolah;
7. Rekreasi Pekerja.

Selain kesejahteraan dalam hal fasilitas, Perseroan juga memberikan kemudahan bagi pegawai untuk melaksanakan ibadah serta adanya pengaturan tentang pemberian cuti kepada seluruh Insan IPC, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

Program Kesejahteraan Pekerja Pascakerja

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan dimana Pekerja akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. Oleh sebab itu, Perseroan telah menyiapkan Kebijakan terkait hal tersebut yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengakhiran Hubungan Kerja No. KP.07.02/6/8/1/KRF/SDM/PI.II-20 tanggal 6 Agustus 2020. Melalui kebijakan tersebut dijelaskan bahwa pegawai diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, mengikuti program *exit plan* dan lain sebagainya.

1. Basic salary;
2. Annual Leave Allowance;
3. Holiday Leave Allowance;
4. Education Assistance Money;
5. Religious Holiday Allowance;
6. Thirteenth Salary;
7. Bonus.

In 2020, the ratio of remuneration for Employees at the highest level of position to those at the lowest level was 1:8.

Employee Welfare Program

In addition to providing remuneration, the Company also provides various facilities as a strategy to provide comfort and serenity for employees in carrying out operational activities. The facilities provided are:

1. Medical facility;
2. The official residence, position and operational house for officials who have undergone a transfer;
3. Assistance with the cost of renting a house for transferred employees;
4. Official vehicle facilities for certain officials;
5. Lunch facility;
6. School transfer fee assistance;
7. Employee Recreation.

In addition to welfare in terms of facilities, the Company also provides facilities for employees to carry out worship and the provision of leave for all IPC Personnel, as described in the discussion regarding Corporate Social Responsibility for Human Rights in this Annual Report.

Post-Employment Welfare Program

In the flow of the Human Resources management system, there are stages where the employee will enter the retirement period or work termination. Therefore, the Company has prepared a related policy as outlined in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) concerning Termination of Employment Relationship No. KP.07.02/6/8/1/KRF/SDM/PI.II-20 dated August 6, 2020. This policy explains that employees are dismissed or retired if they reach the retirement age limit, pass away, due to disciplinary violations, by their own request, following an exit plan program, and other reasons.

Komponen Program Kesejahteraan Pekerja Pascakerja IPC

Program Pensiun / Pension Program
1. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja; / Defined Benefit Pension Plan under the Employer Pension Fund;
2. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan; / Defined Contribution Pension Program in the Pension Fund of a Financial Institution;
3. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua; / Life Insurance Allowance Program;
4. Program Tambahan Manfaat Purna Bakti; / Supplementary Allowance for Retirement;
5. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; / Labor Social Security Program by Social Security Administering Body of BPJS Employment;
6. Program Asuransi Jiwa. / Life Insurance Program.

Components of IPC Post-Employment Welfare Program

Penghargaan atas Jasa Pengabdian / Award for Service	Fasilitas Pascakerja / Post-employment Facilities
1. Pemberian Penghargaan Masa Bakti; / Rewards for Years of Service;	1. Fasilitas Kesehatan Pensiunan beserta Keluarga; / Pension and Family Health Facilities;
2. Penghargaan Kenaikan Kelas Jabatan Pengabdian; / Promotion of Years of Service;	2. Bantuan Pindah Pensiun; / Pension Moving Allowance;
3. Pemberian Jasa Pengabdian; / Rewards for Service;	3. Bantuan Musibah Kematian; / Fatality Allowance;
4. Pemberian Cendera Mata. / Souvenirs.	4. Bantuan Uang Duka dan Sumbangan Kematian. / Mourning Money and Fatality Donation.

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp14,3 miliar. untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi Pekerja, yang merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan.

Fund Allocation for Corporate Social Responsibility Implementation on Employment

In 2020, the Company allocated funds amounting to Rp14.3 billion to support the implementation of competency development program for employees, which is part of Corporate Social Responsibility for Employment.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Keluhan Pekerja

Perseroan memberi kesempatan bagi para Pekerja untuk menyampaikan keluhan terkait masalah ketenagakerjaan melalui aplikasi I-MOVE. Adapun mekanisme penanganan pengaduan keluhan Pekerja IPC telah diuraikan pada Sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

Employee Complaint Handling Mechanism

The Company provides the opportunity for the Employees to submit complaints related to employment issues through I-MOVE application. The mechanism of IPC Employees complaint handling is described in Corporate Social Responsibility for Human Rights sub-chapter in this Annual Report.

Capaian Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan

Achievements of Corporate Social Responsibility Activities on Employment

Perbandingan antara Target dan Realisasi di bidang SDM

Comparison between Targets and Realization in HR Field

Indikator / Indicator	Target di Revisi RKAP 2020 / Target in the 2020 Revised RKAP (a)	Realisasi 2020 / 2020 Realization (b)	Pencapaian (%) / Achievements (%) (a : b)
Kekuatan SDM / HR Strength			
Pegawai di Induk Perusahaan / Employees in Parent Company			
• Pegawai Organik (Pekerja) / Organic Employees (Workers)	2.714 orang / people	2.609 orang / people	96,13%
• Pegawai Non-Organik / Non-Organic Employees	975 orang / people	914 orang / people	93,74%
• Jumlah Pegawai di Induk Perusahaan / Total Employees in Parent Company	3.689 orang / people	3.523 orang / people	95,50%
Jumlah Pegawai di Anak Perusahaan (Pegawai Organik + Non-Organik) / Total Employees in Subsidiaries (Organic + Non-Organic Employees)	6.590 orang / people	6.741 orang / people	102,29%
Total Pegawai / Total Employees	10.279 orang / people	10.264 orang / people	99,85%
Kualitas SDM melalui Program Pembelajaran / HR Quality through Study Program			
Program Pelatihan / Training Program			
• Jumlah Program / Total Programs	164 program / programs	159 program / programs	96,95%
• Jumlah Peserta / Total Participants	3.159 orang / people	6.480 orang / people	205,13%



Posisi realisasi kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan pada tahun 2020 adalah 10.257 orang, lebih rendah 22 orang dari Revisi RKAP 2020.

Untuk Pegawai Organik di Induk Perusahaan, realisasi tahun 2020 tercatat sebanyak 2.609 orang, lebih rendah 105 orang dari Revisi RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pekerja yang pensiun sebanyak 33 orang, meninggal dunia sebanyak 12 orang, mengundurkan diri 8 (delapan) orang, diberhentikan 2 (dua) orang, diangkat sebagai Direksi BUMN 5 (lima) orang, serta tidak terealisasinya rekrutmen pandu sebanyak 20 orang dan rekrutmen umum. Sedangkan realisasi Pegawai Organik di Anak Perusahaan pada tahun 2020 yang berasal dari rekrutmen internal Anak Perusahaan sejumlah 1.059 orang, lebih tinggi sebanyak 2 (dua) orang dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020.

Sementara itu, realisasi jumlah pegawai non-organik tahun 2020 pada Induk Perusahaan sebanyak 914 orang atau lebih rendah 61 orang dibandingkan dengan Revisi RKAP 2020. Sementara realisasi jumlah pegawai non-organik tahun 2020 pada Anak Perusahaan sebanyak 5.675 orang atau lebih tinggi 146 orang dari Revisi RKAP 2020.

Pencapaian kinerja pengelolaan SDM Perseroan juga tercermin dari tercapainya realisasi jumlah Program Pembelajaran yang diselenggarakan selama tahun 2020 dan jumlah peserta yang mengikuti program tersebut. Berdasarkan tabel di atas, Perseroan telah melaksanakan 159 program dari 164 program yang direncanakan, atau tercapai sebesar 96,95 persen. Menurunnya tren jumlah program pada tahun 2020 disebabkan kebijakan Perseroan untuk melakukan *refocusing* program sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan realisasi jumlah Pekerja yang mengikuti Program Pembelajaran sebanyak 6.480 peserta, lebih tinggi dari jumlah peserta yang direncanakan sebesar 3.159 peserta.

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pekerja

Capaian pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan tercermin dari hasil Survei Kepuasan dan Keterikatan Pekerja pada tahun 2020 yang telah diuraikan pada pembahasan terkait Capaian Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

The realization of Human Resources (HR) workforce at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its Subsidiaries in 2020 amounted to 10,257 people, 22 people lower than the 2020 Revised RKAP.

Organic Employees at the Parent Company in 2020 was recorded at 2,609 people, 105 people lower than the 2020 Revised RKAP. This was due to 33 employees who retired, 12 people who were deceased, 8 (eight) people who resigned, 2 (two) people who were dismissed, 5 (five) people who were appointed as the Board of Directors of SOE, as well as the unrealized pilot recruitment amounting to 20 people and general recruitment. Meanwhile, the realization of Organic Employees in Subsidiaries in 2020 from internal recruitment of Subsidiaries was 1,059 people, 2 (two) people higher than the 2020 Revised RKAP.

The realization of non-organic employees in 2020 at the Parent Company amounted to 914 people or 61 people lower than the 2020 Revised RKAP, while the number of non-organic employees in 2020 at Subsidiaries amounted to 5,675 people or 146 people higher than the 2020 Revised RKAP.

The achievement of the Company's HR management performance is also reflected on the number of Learning Programs held during 2020 and the number of participants in the programs. Based on the table above, the Company organized 159 programs out of 164 planned programs or equivalent to 96.95 percent achievement. The decline in the number of programs in 2020 was due to the Company's policy to refocus programs as a result of the Covid-19 Pandemic. Meanwhile, the number of employees participating in the Learning Program amounted to 6,480 participants, higher than the target of 3,159 participants.

Employee Satisfaction and Engagement Survey

The achievement of the implementation of the Corporate Social Responsibility for Employment activities is reflected in the results of the Employee Satisfaction and Engagement Survey in 2020 which have been described in the discussion related to the Achievement of Corporate Social Responsibility Activities for Human Rights in this Annual Report.

Rencana Program Pembelajaran untuk Tahun 2021

Perseroan telah berencana untuk menyelenggarakan Program Pembelajaran untuk tahun 2021 sebanyak 225 Program dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Perseroan di tahun depan. Jumlah program pembelajaran tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 6.380 peserta.

Learning Program Plan for 2021

The Company plans to organize 225 Learning Programs in 2021 in order to improve the Company's HR quality in the next year. These learning programs are estimated to involve 6,380 participants.

Rencana Program Pembelajaran IPC untuk Tahun 2021

Jenis Program / Type of Program	Jumlah Program / Number of Programs	Jumlah Peserta / Number of Participants
Pendidikan Formal / Formal Education	1	2
Sertifikasi / Certification	56	734
<i>Agile Learning</i>	7	Disesuaikan / Adjustable
Pelatihan / Training	143	4.014
Seminar/Webinar	17	1.630
Total	225	6.380

IPC Learning Program Plan for 2021

Untuk tahun 2021, Program Magang tidak dilaksanakan, baik mengirimkan Pekerja IPC ke instansi lain maupun penerimaan pegawai magang dari instansi lain atau magang mahasiswa/siswa. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menyelenggarakan Program *Agile Learning* di tahun depan guna mengakomodasi kebutuhan pelatihan yang belum diidentifikasi di Program Pendidikan yang ditetapkan di awal tahun.

In 2020, the Company will not organize Internship Program, which includes assigning IPC employees to other institutions or receiving intern employees from other institutions or student internship. This is due to the Covid-19 pandemic. In addition, the Company also plans to organize Agile Learning Program in the next year to accommodate training needs which have not been identified in the Education Program set at the beginning of the year.

BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Perseroan menyadari pentingnya menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pelaksanaan aktivitas operasionalnya dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan para pegawai yang sedang melakukan aktivitas operasional di seluruh lingkungan kerja. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan kompleksitas dan frekuensi pelaksanaan kegiatan operasional seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin dinamis, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap munculnya penyakit akibat kerja hingga kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

The Company realizes the importance of implementing Occupational Health and Safety (K3) aspects in the implementation of its operational activities in order to ensure the safety and security of employees who are carrying out operational activities in all work environments. This view is motivated by an increase in the complexity and frequency of operational activities in line with the increasingly dynamic business development, which has the potential to create high-risk occupational diseases and accidents that occur in the work environment.

Komitmen dan Kebijakan K3

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan aspek K3 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di bidang pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan. Pengelolaan K3 di IPC mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

K3 Commitment and Policy

The Company commits to carrying out K3 aspects in carrying out its operational activities in the field of port management and operation. The management of K3 at IPC refers to Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 concerning Occupational Safety and Health Management Systems.



Komitmen IPC untuk senantiasa menerapkan standar tertinggi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan pelanggan/mitra kerja ditunjukkan melalui pembaruan kebijakan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang telah disetujui Direksi pada 29 Juli 2020. Adapun isi dari pembaruan Kebijakan SMK3 tersebut meliputi komitmen-komitmen sebagai berikut:

1. Kepatuhan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan berusaha mematuhi semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan SMK3 baik internasional maupun domestik yang berlaku untuk kegiatan operasionalnya.

2. Integrasi

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan memastikan bahwa SMK3 sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua unit kegiatan operasional perusahaan.

3. Mencegah dan Penyimpanan Data Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertujuan untuk memiliki target mencapai angka nol pada kasus kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan secara terus menerus untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, semua data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan kejadian akan disimpan, di selidiki dan diambil tindakan perbaikan yang tepat.

4. Pelatihan dan Kesadaran

Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan diberikan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan dalam melaksanakan praktik kerja yang aman. Semua pegawai baru, kontraktor dan pihak ketiga akan diberikan induksi keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan kebijakan.

5. Tidak Ada Obat Terlarang/Narkoba atau Alkohol

Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilarang keras membeli, menjual, memiliki atau di bawah pengaruh obat terlarang/narkoba atau alkohol di tempat kerja selama jam kerja. Penggunaan narkoba akan sangat berbahaya dan berisiko terhadap HIV/AIDS.

6. Alat Pelindung Diri (APD)

Seluruh pegawai, mitra kerja dan tamu wajib menggunakan APD sesuai ketentuan dan kebutuhan berdasarkan prosedur kerja dalam lingkup area kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

7. Kesiapan Tanggap Darurat

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan mengembangkan dan memelihara efektivitas penerapan prosedur kesiapan tanggap darurat.

IPC's commitment to applying the highest standards in creating a safe and healthy work environment for employees and customers/work partners is shown through the update of the K3 Management System (SMK3) policy that was approved by the Board of Directors on July 29, 2020. The contents of the SMK3 Policy update include commitments as follows:

1. Obedience

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will strive to comply with all laws and regulations relating to SMK3 both international and domestic that apply to its operational activities.

2. Integration

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will ensure that SMK3 is fully integrated into all operational units of the Company.

3. Prevent and Save Work Accident Data and Occupational Illness

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) aims to have a target of reaching zero in cases of work-related accidents and continuously reducing the rate of occupational accidents and occupational diseases. Therefore, all data on occupational accidents and occupational diseases and incidents will be stored, investigated and appropriate corrective action taken.

4. Training and Awareness

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) employees will be provided with the necessary training to ensure that they have the necessary skills and understanding to carry out safe work practices. All new employees, contractors and third parties will be given an occupational safety and health induction to ensure that they understand their obligations and responsibilities in relation to the policy.

5. Zero Drugs or Alcohol

Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) are strictly prohibited from buying, selling, possessing or being under the influence of illegal drugs or alcohol in the workplace during work hours. Drug use will be very dangerous and pose a risk to HIV/AIDS.

6. Personal Protective Equipment (APD)

All employees, work partners and guests are required to wear PPE according to the provisions and needs based on work procedures within the scope of the work area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

7. Emergency Response Readiness

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will develop and maintain the effectiveness of implementing emergency response preparedness procedures.

Ruang Lingkup Pelaksanaan K3

Kebijakan SMK3 berlaku di Kantor Pusat Perseroan, termasuk sub-sub operasional lainnya dan pihak lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan Perseroan serta pihak-pihak lainnya yang melakukan aktivitas ataupun beroperasi di wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Penerapan SMK3 juga berlaku di 12 Cabang Pelabuhan IPC. Implementasi SMK3 di masing-masing Cabang Pelabuhan mengacu pada arahan, ketetapan dan kebijakan, maupun prosedur dari IPC Pusat. Namun demikian, masing-masing Cabang Pelabuhan akan memiliki dokumen tersendiri sebagai kewajiban pemenuhan persyaratan maupun bukti komitmen manajemen Cabang Pelabuhan IPC. Untuk ruang lingkup dan proses bisnis masing-masing Cabang Pelabuhan dijelaskan lebih lanjut dalam Manual SMK3 Pelindo II Cabang (level 2).

Target Program K3

Perseroan telah menetapkan beberapa target pengelolaan K3, antara lain nihilnya kecelakaan (*zero accident*), tidak adanya penyakit akibat kerja, serta pembinaan pengetahuan dan kesadaran seluruh tenaga kerja IPC terkait bahaya dan risiko kerja.

Identifikasi Bahaya dan Risiko Kerja

Identifikasi bahaya dilaksanakan guna menentukan rencana penerapan K3 di lingkungan Perseroan. Identifikasi bahaya ditujukan pada segala sumber, situasi, maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Adapun identifikasi bahaya berdasarkan jenis-jenis bahaya dan sumber bahaya diuraikan pada tabel berikut ini:

Scope of K3 Implementation

The SMK3 policy applies at the Company's Head Office, including other sub-operations and other parties that have cooperative ties with the Company as well as other parties who carry out activities or operate in the area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The implementation of SMK3 also applies in 12 IPC Port Branches. The implementation of SMK3 in each Port Branch refers to the directions, regulations and policies, as well as procedures from the Central IPC. However, each Port Branch will have separate documents as an obligation to fulfill the requirements as well as proof of commitment to the management of the IPC Port Branch. The scope and business process of each Port Branch are further explained in the SMK3 Manual of Pelindo II Branch (level 2).

K3 Program Target

The Company sets several K3 management targets, including zero accidents, absence of occupational diseases, as well as fostering knowledge and awareness of all IPC employees regarding occupational hazards and risks.

Occupational Hazard and Risk Identification

Hazard identification is carried out in order to determine the K3 implementation plan within the Company. Hazard identification is aimed at all sources, situations, and activities that have the potential to cause work accidents or occupational diseases. The hazard identification based on the types of hazards and hazard sources is described in the following table:

Identifikasi Bahaya dan Risiko Kerja

Berdasarkan Jenis Bahaya
<p>Tindakan Tidak Aman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan tentang teknik keamanan yang baik. • Penggunaan mesin yang tidak benar. • Penggunaan peralatan yang tidak benar. • Penggunaan peralatan yang rusak. • Perbaikan dan modifikasi mesin yang sah/resmi (bukan wewenangnyanya). • Penanganan manual yang tidak aman. • Kegagalan dalam penerapan sistem yang menyediakan sarana pengujian, inspeksi dan pemeliharaan. • Pemuatan, pergerakan, penyusunan atau penyimpanan yang tidak aman. • Bekerja di kecepatan yang tidak aman. • Memindahkan pelindung mesin. • Kesalahan dalam penggunaan APD. • Pengoperasian yang salah dari alat bantu, mesin atau peralatan. • Melemparkan atau menjatuhkan benda dari ketinggian. • Menumpahkan minyak dan kotoran lumpur (membuat licin lantai). • Merokok, menciptakan nyala api atau percikan di wilayah terlarang. • Cara akses/jalan keluar yang ilegal/salah ke tempat kerja. • Mengendarai/menaiki alat mekanis atau kendaraan di tempat-tempat yang bukan wewenangnyanya dan tidak aman. • Mengganggu orang di tempat kerja. • Terlibat dalam senda gurau yang kasar dan ribut. • Tidak melaporkan peralatan yang rusak atau tidak aman atau kejadian berbahaya. • Mengabaikan aturan yang ditetapkan, prosedur aman atau metode kerja. • Mengabaikan atau tidak menggunakan sinyal keselamatan, peringatan perangkat atau tanda- tanda bahaya.

Occupational Hazard and Risk Identification

Based on Hazard Types
<p>Unsafe Action</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lack of knowledge on proper safety techniques. • Incorrect use of machines. • Incorrect use of equipment. • Use of damaged equipment. • Repair and modification of authorized engine (not his/her authority). • Unsafe manual handling. • Failure to implement a system that provides the means for testing, inspection and maintenance. • Unsafe loading, movement, stacking or storage. • Work in an unsafe speed. • Remove engine guard. • Incorrect use of PPE. • Incorrect operation of tools, machines or equipment. • Throwing or dropping objects from a height. • Shedding oil and dirt mud (makes the floor slippery). • Smoking and creating flames or sparks in restricted areas. • Illegal/incorrect way to access the workplace. • Driving/riding mechanical devices or vehicles in places that are not under their authority and are not safe. • Disturb other employees at workplace. • Involved in an inappropriate and loud joking. • Fail to report damaged or unsafe equipment or hazardous event. • Disregard for established rules, safe procedures or work methods. • Ignore or not using safety signals, device warnings or danger signs.



Kondisi Tidak Aman	Unsafe Condition
<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan Alat pengaman. Kerusakan Peralatan <i>Safety</i>. Kerusakan APD. Ada bagian mesin yang longgar, hilang/lepas. Sambungan yang tidak aman, kabel, dan peralatan listrik. Tanah yang tidak stabil, kondisi penumpukkan yang tidak benar Jalan keluar/masuk yang tidak layak. Menyimpan barang berbahaya di daerah berisiko tinggi dan tanpa rambu peringatan yang tepat. Bocornya wadah/tempat penyimpanan Barang Berbahaya. Mesin-mesin yang tidak pernah di servis atau dirawat. Personil yang kurang mengetahui prosedur tanggap darurat. Bekerja dengan mesin tanpa alat pelindung atau alat bantu yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Safety device malfunction Safety equipment malfunction. PPE damage. Loose, lost/detached machine part. Unsafe connections, cables, electrical equipment. Unstable soil, improper stacking conditions. Unsafe exit/entry paths. Storing dangerous goods in high-risk areas and without proper warning signs. Leakage on Hazardous Goods containers/storage areas. Machines that have never been serviced or maintained. Personnels who are not familiar with emergency response procedures. Work with machines without the required protective equipment or tools.
Berdasarkan Sumber Bahaya	Based on Hazard Source
Workshop	Workshop
<ul style="list-style-type: none"> Kebakaran Benda yang jatuh Lantai licin Buruknya pemeliharaan kebersihan Rusaknya alat/mesin listrik Kebisingan Pemindahan mesin (terutama yang berat) 	<ul style="list-style-type: none"> Fire Fallen object Slippery floor Poor hygiene maintenance Damaged electric tools/machines Noise Machine displacement (especially heavy machines)
Kantor	Office
<ul style="list-style-type: none"> Tersandung kabel, laci yang terbuka dan lemari Peralatan listrik rusak <i>Cutter</i>/peralatan potong yang tajam Tepi meja <i>Blind Spot</i> di lorong Kursi yang Patah Jalan keluar/akses yang tertutup Buruknya pemeliharaan kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> Tripped over cables, opened drawer, and cupboard Electrical equipment is damaged Cutters / sharp cutting tools Table edge Blind Spot at hallways Broken chairs Closed exits/access Poor hygiene maintenance
Kapal	Ship
<ul style="list-style-type: none"> Jatuh dari atas Kapal Kondisi lantai yang licin/mudah terpeleset Lantai yang terbuka Kebakaran Kesandung 	<ul style="list-style-type: none"> Fall from the ship Slippery floor Open floor Fire Tripped
Dermaga	Dock
<ul style="list-style-type: none"> Pergerakan <i>Quay Cranes</i> Pergerakan Alat-alat utama Jatuh ke laut Kejatuhan barang Tersandung <i>Rel Quay Crane</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Quay Cranes movement Main equipment movement Fall into the sea Getting hit by fallen object Tripped on Quay Crane railway
Container Yard	Container Yard
<ul style="list-style-type: none"> Pergerakan <i>Rubber Tyred</i> Derek (R.T.G) Kejatuhan Kontainer <i>box</i> Menurunkan Peti Kemas <i>box</i> Jatuh dari dan tersandung/terpeleset di tumpukan <i>container</i> Bocornya Barang Berbahaya 	<ul style="list-style-type: none"> Rubber Tyred Gantry (R.T.G) movement Getting hit by container box Lowering container box Fall from and tripped/slipped on container stacks Leakage on Dangerous Goods

Program Peningkatan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk terus meminimalkan terjadinya tindakan dan kondisi yang tidak aman dalam rangka menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, IPC melaksanakan program peningkatan keselamatan kerja, dengan uraian sebagai berikut.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja

Beberapa sarana dan prasarana keselamatan kerja yang dimiliki oleh Perseroan antara lain Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Rambu K3, Tangga Darurat, Jalur Evakuasi, *Hydrant*, *Sprinkle*, Alarm Kebakaran, dan Mobil Pemadam Kebakaran (PMK). Secara rutin, Perseroan

Occupational Safety Improvement Program

The Company is committed to continuing to minimize the occurrence of unsafe actions and conditions in order to ensure the effectiveness of the implementation of work safety and prevent work accidents. Therefore, IPC implements a work safety improvement program, with the following description.

Availability of Occupational Safety Facilities and Infrastructure

Some of the work safety facilities and infrastructure owned by the Company include Personal Protective Equipment (PPE), Light Fire Extinguishers (APAR), OHS Signs, Emergency Stairs, Evacuation Routes, Hydrants, Sprinklers, Fire Alarms, and Fire Trucks. On a regular basis, the Company inspects and repairs

melakukan inspeksi dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana keselamatan kerja dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja. Berikut ini merupakan ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja di Kantor Pusat maupun seluruh Cabang Pelabuhan IPC per tahun 2020.

work safety facilities and infrastructure in order to improve work safety. The availability of occupational safety facilities and infrastructure at the Head Office and all Port Branches of IPC in 2020 is as follows.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja di Area Operasional IPC Tahun 2020

Availability of Occupational Safety Facilities and Infrastructure in IPC Operational Area in 2020

Area Operasional IPC	APD / PPE	APAR / Light Fire Extinguisher	Rambu K3 / OHS Signs	Tangga Darurat / Emergency Stairs	Jalur Evakuasi / Evacuation Route	Hydrant	Sprinkle	Alarm Kebakaran / Fire Alarm	Mobil Pemadam Kebakaran / Fire Truck
Kantor Pusat / Head Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Cabang Pelabuhan: / Port Branch:									
1. Tanjung Priok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Panjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x
3. Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Pontianak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Teluk Bayur	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓
6. Cirebon	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
7. Bengkulu	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	x	✓
8. Banten	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓
9. Jambi	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
10. Pangkal Balam	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
11. Tanjung Pandan	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	x
12. Sunda Kelapa	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓

Alat Pelindung Diri

Perseroan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pegawai operasional, termasuk pihak lain yang berada di lingkungan IPC (*visitor*) dalam upaya menjamin keselamatan kerja dalam melaksanakan aktivitas pelayanan jasa kepelabuhanan. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha mengeliminasi, substitusi, rekayasa (*engineering*), dan administrasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari keempat usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir. Adapun macam-macam APD yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Alat Pelindung Mata dan Wajah (*safety glass, safety goggles, face shield, dan welding mask*);
2. Alat Pelindung Kepala (helm dengan *bump caps/skull guard*);
3. Alat Pelindung kaki (kaos kaki dan sepatu atau *safety shoes*);
4. Alat Pelindung tangan (sarung tangan yang berbahan kulit, kain tebal, kain tebal dengan karet, karet/*latex*, apron berbahan kulit);
5. Alat Pelindung Kulit Tubuh dan Pakaian Kerja *High Visibility* (rompi);

Personal Protective Equipment

The Company provides Personal Protective Equipment (PPE) for all operational employees, including other parties in the IPC environment (*visitors*) to ensure work safety in carrying out port service activities. PPE is used as a last resort to protect workers if efforts to eliminate, substitution, engineering, and administration cannot be carried out properly. However, the use of PPE is not a substitute for these four businesses, but as a last resort. The types of PPE used are as follows:

1. Eye and Face Protection (*safety glass, safety goggles, face shield, and welding mask*);
2. Head Protection Equipment (*helmet with bump caps/skull guard*);
3. Feet protective equipment (*socks and shoes or safety shoes*);
4. Hand protective equipment (*gloves made of leather, thick cloth, thick cloth with rubber, rubber/latex, leather apron*);
5. Protective Body Skin Equipment and High Visibility Work Wear (*vest*);



6. Alat Pelindung Telinga;
7. Alat Pelindung Pernapasan (Respirator dan *Self-Contained Breathing Aparatus* (SCBA));
8. Alat Pelindung Jatuh (jenis *Full Body Harness*).

6. Ear Protection Equipment;
7. Respiratory Protective Equipment (Respirator and Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA));
8. Fall protection equipment (full body harness).

Untuk spesifikasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai APD Perseroan telah diatur dalam Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

For further specifications and provisions regarding the Company's PPE, it has been regulated in the Occupational Health and Safety (K3) Manual at the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Matriks Alat Pelindung Diri (APD) IPC

Personal Protective Equipment (PPE) Matrix of IPC

Jenis Pekerjaan / Work Type	Alat Pelindung Diri (APD) / Personal Protective Equipment							
	Helm / Helmet	Pelindung Mata/ Muka / Eye/Face Protector	Respirator / Respirator	Breathing Apparatus	Pelindung Telinga / Ear Protector	Sarung Tangan / Gloves	Safety Shoes	Safety Harness
Pekerjaan Panas (Las) / Heat-Related Work (Welding)		✓	✓			✓	✓	
Pekerjaan di Ruang Terbatas (<i>ground tank</i> , plafon) / Work in Limited Space (<i>ground tank</i> , ceiling)	✓	✓	✓	✓ (<i>optional : blower fan</i>)		✓	✓	✓
Pekerjaan di Tempat Ketinggian / Work at High Places	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Pekerjaan Listrik / Electricity-Related Work	✓					✓	✓	
Kamar Mesin/ <i>Genset</i> / Engine/ <i>Genset</i> Room	✓				✓	✓	✓	
Penggunaan Bahan Kimia / Chemical Usage		✓	✓			✓	✓	

Usia Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) IPC

Age of Personal Protective Equipment (PPE) Usage at IPC

No.	Helm / Helmet	Safety Shoes	Ear Plug	Respirator / Respirator	Sarung Tangan / Gloves	Kacamata / Glasses	Rompi / Vest
1.	2 Tahun / Years	1 Tahun / Years	1 Tahun / Years	1 Tahun / Years	Sesuai Kebutuhan / As Needed	1 Tahun / Years	1 Tahun / Years

Hingga akhir tahun 2020, jumlah APD yang tersedia di Perseroan sebanyak 58 dan seluruhnya dalam kondisi Baik.

Until the end of 2020, the number of PPE available in the Company was 58 and all of them were in Good condition.

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) adalah alat pemadaman *portable* yang mudah dibawa, cepat, dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran. APAR dapat digunakan secara manual dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam dimana api berada. Dikarenakan fungsinya untuk penanganan kebakaran dini/kecil, maka APAR

Light Fire Extinguisher (APAR)

APAR (Light Fire Extinguisher) is a portable extinguisher that is easy to carry, fast, and precise in use for the start of a fire. APAR can be used manually by sweeping from the outer point to the deepest point where the fire is located. Due to its function for handling early/small fires, the APAR is placed in certain places and is easily visible, making it easier to use. The

diletakkan di tempat-tempat tertentu dan mudah terlihat, sehingga memudahkan di dalam penggunaannya. Adapun jumlah APAR yang tersedia di Kantor Pusat IPC hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

number of APARs available at IPC Head Office until the end of 2020 are as follows:

Jumlah APAR di Kantor Pusat IPC per Tahun 2020

Total APAR in IPC Head Office as of 2020

No.	Posisi APAR / APAR Position	Dry Powder				Cleant Agent AF11			Fire Blanket
		6 kg	3,5 kg	3 kg	2,5 kg	6 kg	3 kg	4,5 kg	1,5 x 1,5 m
1.	Mazizka	2							
2.	Masjid Al-Ikhlas / Al-Ikhlas Mosque	2							
3.	Genset					2			
4.	Kantin Masjid / Mosque Canteen			2	2				
5.	Pos Pintu Masuk / Entrance Post	2							
6.	Pool Kendaraan / Vehicle Pool	1							
7.	Lantai Dasar Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Ground Floor	1	4	1	1		1		
8.	Lantai 1, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East First Floor	1		5	1	1			
9.	Lantai 2, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Second Floor	6		1	1	1			
10.	Lantai 3, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Third Floor	1		2	2	1	2	2	
11.	Lantai 4, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Fourth Floor	1	1	4	3				
12.	Lantai 5, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Fifth Floor	8			3				
13.	Lantai 6, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Sixth Floor	5		1	1				1
14.	Lantai 7, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Seventh Floor	3		3	1				1
15.	Lantai 8, Barat/Tengah/Timur / West/Central/East Eighth Floor	5			2				
16.	Lantai 9, Roof Top / Ninth Floor, Rooftop	3							
Total Refill APAR		41	5	19	17	5	3	2	2
17.	Tambah APAR baru cadangan / Additional new spare APAR	7				2			
18.	Alas/kaki dudukan APAR / APAR's pedestal feet	7							
TOTAL		55	5	19	17	7	3	2	2

Seluruh APAR yang tersedia di Kantor Pusat dalam kondisi Baik.

All available APAR at the Head Office are in Good condition.

Rambu K3

Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan wajib memastikan setiap Pekerja maupun pihak eksternal untuk peduli, paham, dan patuh terhadap aturan mengenai K3 yang berlaku dengan membaca rambu yang ada, baik berupa himbauan, larangan, maupun perintah. Tujuan dari sistem tanda keselamatan adalah untuk menarik perhatian dengan cepat dan jelas untuk objek dan situasi yang dapat menyebabkan bahaya spesifik. Penggunaan rambu-rambu K3 dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah, beberapa standar seperti SNI, ISO, OSHA, ANSI, IMO, GHS, dan sebagainya, atau dapat berupa kombinasi (*multipurpose*).

K3 Signs

The Head Office and all Port Branches are obliged to ensure that every worker and external party cares, understands, and complies with the applicable K3 rules by reading the existing signs, whether in the form of appeals, prohibitions or orders. The purpose of a safety alert system is to quickly and clearly draw attention to objects and situations that may cause specific hazards. The use of K3 signs can refer to Government Regulations, several standards such as SNI, ISO, OSHA, ANSI, IMO, GHS, and so on, or it can be a combination (*multipurpose*).



Hingga akhir tahun 2020, jumlah rambu dan *traffic sign* yang tersedia di Perseroan sebanyak 10 dan seluruhnya dalam kondisi Baik.

Until the end of 2020, the number of signs and traffic signs available at the Company was 10 and in Good condition.

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk memastikan pelaksanaan K3 di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, Perseroan membentuk tim unit kerja bernama Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 yang telah dibentuk di Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi setempat. Setiap 3 (tiga) bulan sekali, P2K3 Perseroan menyampaikan Laporan Bulanan P2K3 yang berisi tentang laporan waktu kerja, data kecelakaan, kegiatan QHSE, dan kondisi Perlengkapan QHSE IPC, serta notulensi rapat P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Establishment of the Occupational Health and Safety Committee

To ensure that the implementation of K3 within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is in accordance with the applicable rules and regulations, the Company has formed a work unit team called the Occupational Health and Safety Committee (P2K3). P2K3 has been established at the Head Office and 12 Port Branches, as approved by the local Provincial Department of Manpower and Transmigration. Every 3 (three) months, the Company's P2K3 unit submits P2K3 Monthly Report, which contains reports on working time, accident data, QHSE activities, and conditions of QHSE IPC equipment, as well as P2K3 meeting minutes to the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office.

Pelaksanaan Kegiatan terkait K3

Dalam rangka memastikan keselamatan kerja di lingkungan Perseroan, Departemen Manajemen K3L melaksanakan beberapa kegiatan rutin, dengan uraian sebagai berikut:

Implementation of K3-Related Activities

In order to ensure work safety in the Company's environment, the K3L Management Department carries out several routine activities, with the following descriptions:

Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan terkait K3 Tahun 2020

K3 Activity Implementation Frequency in 2020

No.	Kegiatan / Activity	Frekuensi / Frequency
1.	Toolbox Meeting	4
2.	Induksi / Induction	16
3.	Safety Patrol	4
4.	Safety Meeting	4
5.	Safety Training	-
6.	Inspeksi / Inspection	8

Program Peningkatan Kesehatan Kerja

Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kesehatan seluruh pegawai di lingkungan kerja sekaligus meminimalisir terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK), Perseroan telah memiliki standar pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan oleh seluruh Insan IPC. Pemeriksaan kesehatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

Occupational Health Improvement Program Health Examination

To improve the employees' health in the work area and minimize the occurrence of Work-Related Diseases (PAK), the Company has health examination standards that must be followed by all IPC Employees. The health examination consists of the 3 (three) types, namely:

1. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja
 - Ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang dipersyaratkan oleh Perseroan, termasuk Cabang Pelabuhan, tidak memiliki penyakit menular, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan.

1. Health Examination Before Work
 - Its aim is that the accepted employee is in the health condition required by the Company, including Port Branches, does not have any contagious disease, and is suitable for the work to be carried out.

- Meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, *rontgen* paru-paru (bila mungkin), pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
 - Ditujukan untuk mempertahankan derajat kesehatan pegawai sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan sedini mungkin yang perlu dikendalikan, sehingga tidak memunculkan PAK.
 - Wajib dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - Meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, *rontgen* paru-paru (bila mungkin), pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dokter okupasi, dan pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
 3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus
 - Ditujukan untuk menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pegawai atau golongan tertentu. Selain itu, juga dilakukan terhadap tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua) minggu.

Medical Check Up (MCU)

Penentuan parameter periksa MCU, termasuk evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dokter *Hygiene* Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Dokter Hiperkes. Terdapat 7 (tujuh) paket MCU, yaitu:

1. MCU Paket A: untuk pegawai (baru)

Parameter:

 - Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
 - Pemeriksaan fisik, meliputi *Snellen*, Buta Warna, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah).
 - ECG.
2. MCU Paket B: untuk pegawai jasa boga/*food handler*

Parameter:

 - Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
 - Pemeriksaan fisik, meliputi *Snellen*, Buta Warna, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.

- Including a complete physical examination, physical fitness, X-rays of the lungs (if possible), laboratory tests, and other examinations deemed necessary.
2. Periodic Health Examination
 - Aimed at maintaining the health status of employees after being in work, as well as assessing the possible effects of work as early as possible which need to be controlled, so as not to create PAK.
 - Must be conducted at least once a year.
 - Including a complete physical examination, physical fitness, X-ray of the lungs (if possible), laboratory examination, examination of an occupational doctor, and other examinations deemed necessary.
 3. Special Health Examination
 - Aimed at assessing the influence of certain jobs on certain employees or groups. In addition, it is also carried out for workers who have experienced accidents or illnesses that require treatment for more than 2 (two) weeks.

Medical Check Up (MCU)

The determination of MCU examination parameters, including evaluation and analysis of health examination results, must be carried out by a doctor who has the competence of a doctor of Occupational Health and Safety Company Hygiene (Hiperkes), proven with a Hiperkes Doctor Certificate. There are 7 (seven) MCU packages, namely:

1. MCU Package A: for (new) employees

Parameter:

 - Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.
 - Physical examination, including *Snellen*, Color Blind, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratory (examination of blood, urine, blood group).
 - ECG.
2. MCU Package B: for food handler employees

Parameter:

 - Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.
 - Physical examination, including *Snellen*, Color Blind, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.



- Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah, *stool* (feses), *stool culture* (rectal swab), *random blood glucose*, SGOT & SGPT, *ureum & creatinine*).
 - ECG.
 - Vaksinasi (Hepatitis A, *Thypoid*)
3. MCU Paket C: untuk pegawai yang terpapar kebisingan
Parameter:
- Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
 - Pemeriksaan fisik, meliputi *Snellen*, Buta Warna, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah).
 - ECG.
 - Audiometri
4. MCU Paket D: untuk pegawai yang terpapar suhu tinggi
Parameter:
- Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
 - Pemeriksaan fisik, meliputi *Snellen*, Buta Warna, *Vital Sign*, Lapang Pandang.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah, *random blood glucose*, SGOT & SGPT, *ureum & creatinine*).
 - ECG.
5. MCU Paket E: untuk pegawai yang terpapar bahan kimia
Parameter:
- Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
 - Pemeriksaan fisik, meliputi *Snellen*, Buta Warna, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah, *random blood glucose*, SGOT & SGPT, *ureum & creatinine*).
 - ECG.
 - Spirometri.
6. MCU Paket F: untuk pegawai yang mengemudikan kendaraan operasional dan kendaraan alat berat
Parameter:
- Anamnesa, meliputi *Lifestyle* (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi.
- Laboratory (examination of blood, urine, blood group, stool, stool culture (rectal swab), random blood glucose, SGOT & SGPT, urea & creatinine).
 - ECG.
 - Vaccinations (Hepatitis A, *Thypoid*)
3. MCU Package C: for employees who are exposed to noise
Parameter:
- Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.
 - Physical examination, including *Snellen*, Color Blind, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratory (examination of blood, urine, blood group).
 - ECG.
 - Audiometry
4. MCU Package D: for employees who are exposed to high temperature
Parameter:
- Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.
 - Physical examination, including *Snellen*, Color Blind, *Vital Sign*, *Visual View*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratory (examination of blood, urine, blood group, random blood glucose, SGOT & SGPT, urea & creatinine).
 - ECG.
5. MCU Package E: for employees who are exposed to chemicals
Parameter:
- Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.
 - Physical examination, including *Snellen*, Color Blind, *Vital Sign*.
 - *Chest X-Ray*.
 - Laboratory (examination of blood, urine, blood group, random blood glucose, SGOT & SGPT, urea & creatinine).
 - ECG.
 - Spirometry.
6. MCU Package F: for employees who drive operational and heavy equipment vehicles
Parameter:
- Anamnesis, including *Lifestyle* (smoking, alcohol, exercise), Medical History, Family History, Work History, Allergies, Vaccination History.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik, meliputi <i>Snellen</i>, Buta Warna, <i>Vital Sign</i>, Lapang Pandang. - <i>Chest X-Ray</i>. - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah, <i>random blood glucose</i>, SGOT & SGPT, <i>ureum & creatinine</i>). - ECG. - Audiometri. <p>7. MCU Paket G: untuk petugas medis/<i>first aider</i>
Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anamnesa, meliputi <i>Lifestyle</i> (perokok, alkohol, olahraga), Riwayat Medis, Riwayat Keluarga, Riwayat Kerja, Alergi, Riwayat Vaksinasi. - Pemeriksaan fisik, meliputi <i>Snellen</i>, Buta Warna, <i>Vital Sign</i>. - <i>Chest X-Ray</i>. - Laboratorium (pemeriksaan darah, urin, golongan darah, <i>random blood glucose</i>, SGOT & SGPT, <i>ureum & creatinine</i>, HbsAg & Anti HBs). - ECG. - Vaksinasi (Hepatitis B). | <ul style="list-style-type: none"> - Physical examination, including <i>Snellen</i>, Color Blind, <i>Vital Sign</i>, <i>Visual View</i>. - <i>Chest X-Ray</i>. - Laboratory (examination of blood, urine, blood group, <i>random blood glucose</i>, SGOT & SGPT, <i>urea & creatinine</i>). - ECG. - Audiometry. <p>7. MCU Package G: for medical officers/<i>first aiders</i>
Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anamnesis, including <i>Lifestyle</i> (smoking, alcohol, exercise), <i>Medical History</i>, <i>Family History</i>, <i>Work History</i>, <i>Allergies</i>, <i>Vaccination History</i>. - Physical examination, including <i>Snellen</i>, Color Blind, <i>Vital Sign</i>. - <i>Chest X-Ray</i>. - Laboratory (examination of blood, urine, blood group, <i>random blood glucose</i>, SGOT & SGPT, <i>urea & creatinine</i>, HbsAg & Anti HBs). - ECG. - Vaccinations (Hepatitis B). |
|---|---|

Setiap pegawai mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan MCU terhadap dirinya. Pegawai yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan wajib menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan kesehatan yang digunakan sebagai barang bukti bahwa Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut.

Every employee has the right to refuse to implement the MCU on him. Employees who refuse to have a medical examination are required to sign a statement letter of refusal to have a medical examination which is used as evidence that the Company is not responsible for the consequences of such refusal.

Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka pemberian jaminan kesejahteraan bagi Pekerja beserta keluarganya, maka Perseroan perlu memberikan jaminan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan kepada Pekerja dan pensiunan beserta keluarganya. Adapun dasar pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan kepada Pekerja dan pensiunan beserta keluarganya telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/6/1/PI.II-13.

Health Maintenance and Services

In the framework of providing welfare guarantees for Employees and their families, the Company needs to provide guaranteed maintenance and health services to Employees and retirees and their families. The basis for implementing health care and services for workers and retirees and their families has been regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/6/1/PI.II-13.

Pengendalian Kontraktor terkait Penerapan K3

Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan telah memiliki sistem untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi risiko yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh Insan IPC, terutama dari sisi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua maupun ketiga, seperti Mitra Bisnis dan Kontraktor (termasuk Tenaga Non-Organik (TNO), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)).

Contractor's Control regarding the K3 Implementation

The Head Office and all Port Branches have a system to detect, prevent, and manage risks that have the potential to threaten the health and safety of all IPC Personnel, especially in terms of work performed by second and third parties, such as Business Partners and Contractors (including Non-Organic Employees (TNO), Unloading Workers (TKBM), and Daily Freelance Workers (TKHL)).



Terdapat 6 (enam) langkah pengendalian kontraktor sebagaimana yang diatur dalam Manual K3 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat, yaitu:

1. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko) atau *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA) yang berfungsi untuk menilai seluruh pekerjaan yang akan dikontrakan.
2. Prakuifikasi yang berfungsi untuk menjamin hanya kontraktor yang mampu bekerja secara aman yang akan diikutsertakan dalam lelang. Adapun kriteria nilai minimum yang bisa diterima agar kontraktor lulus prakuifikasi SMK3 Kontraktor adalah 55 untuk risiko tinggi, 40 untuk risiko medium, dan 25 untuk risiko rendah.
3. *Selection* (Seleksi) yang berfungsi untuk memilih dan menentukan Kontraktor yang paling memenuhi persyaratan dari aspek K3L selain persyaratan teknis, ekonomis, dan persyaratan lainnya.
4. *Pre-Job Activity* (Pra Pelaksanaan Pekerjaan) yang berfungsi untuk memastikan K3 *plan* yang dibuat oleh Kontraktor sudah lengkap dan memastikan bahwa semua K3 *Plan* yang dibuat akan dilaksanakan.
5. *Work in Progress* (Pelaksanaan Pekerjaan) yang berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana K3 yang telah disepakati oleh Perseroan dengan rekan kerja dan bahwa kebutuhan K3 tambahan yang ditemukan selama pekerjaan diperhatikan dengan benar. Dalam pelaksanaan *work in progress* dibutuhkan adanya *Chechlist* Inspeksi K3 yang digunakan oleh Pengawas Pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Aspek K3 Mitra Kerja.
6. *Final Evaluation* untuk mengadakan evaluasi bersama terhadap kinerja K3 Kontraktor dan untuk memberikan *feed back* baik kepada kontraktor maupun Perseroan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk pekerjaan di masa depan.

Pelaksanaan Pengendalian Kontraktor Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, seluruh Kontraktor Perseroan yang memiliki risiko kerja tinggi telah memenuhi persyaratan dari aspek K3L, selain persyaratan teknis, ekonomis, dan persyaratan lainnya.

Sementara itu, sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok membagikan sebanyak 3.700 masker non-medis kepada perwakilan dari TKBM agar terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

There are 6 (six) contractor control measures as regulated in the K3 Manual of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office, namely:

1. Risk Assessment or Hazard Identification Risk Assessment (HIRA) which functions to assess all work to be contracted.
2. Prequalification that serves to ensure that only contractors who are able to work safely will be included in the auction. The criteria for the minimum value that can be accepted for contractors to pass the Contractor's SMK3 prequalification are 55 for high risk, 40 for medium risk, and 25 for low risk.
3. Selection, which functions to select and determine the Contractor that meets the requirements from the HSE aspect apart from technical, economic, and other requirements.
4. Pre-Job Activity which functions to ensure the K3 plan made by the Contractor is complete and ensures that all the K3 Plans made will be implemented.
5. Work in Progress (Work Implementation), which functions to ensure that the implementation of work is in accordance with the K3 plan agreed by the Company with colleagues and that additional K3 needs found during work are properly considered. In the implementation of work in progress, it is necessary to have an OHS Inspection Checklist that is used by the Implementing Supervisor to carry out an inspection of the OHS Aspects of Work Partners.
6. The Final Evaluation to conduct a joint evaluation of the Contractor's K3 performance and to provide feedback to both the contractor and the Company which can be used as a reference for future work.

Implementation of Contractor Control in 2020

Throughout 2020, all Contractors with high occupational risk had met the requirements from the HSE aspect apart from technical, economic, and other requirements.

Meanwhile, in connection with the Covid-19 pandemic that hit Indonesia in early 2020, the Tanjung Priok Port Branch distributed 3,700 non-medical masks to representatives of TKBM to continue implementing the Covid-19 health protocol in carrying out their duties and functions.

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap K3

Pada tahun 2020, Perseroan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap K3 sebesar Rp749.230.564 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan *Safety Training*.

Mekanisme Pelaporan Bahaya dan Masalah K3

1. Apabila terdapat Insan IPC/kontraktor menemukan suatu sumber bahaya/masalah K3 di lokasi kerja, maka wajib untuk melaporkan kepada atasannya dengan mengisi *Form Standard: Safety Observation Tour*.
2. Insan IPC/kontraktor juga mengkomunikasikan temuan sumber bahaya tersebut kepada penanggung jawab di area tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
3. DVP Manajemen K3L melakukan verifikasi terhadap laporan sumber bahaya dan masalah K3 tersebut secara menyeluruh.
4. Penanggung jawab area mengelola data laporan sumber bahaya dan masalah K3 kemudian melakukan tindak lanjut atas temuan kondisi bahaya, membuat program tindak lanjut, menyelesaikan semua permasalahan hasil temuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
5. Penanggung jawab area memberikan informasi terkait status dari kondisi sumber bahaya dan masalah K3 kepada Divisi Manajemen K3/ P2K3.
6. Divisi Manajemen K3/P2K3 melakukan *monitoring* terkait pelaksanaan tindakan perbaikan dari Divisi Terkait, apakah sumber bahaya dan masalah K3 sudah ditindaklanjuti.
7. DVP Manajemen K3L dan Officer K3L melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut laporan sumber daya dan masalah K3 secara menyeluruh serta dipastikan tidak ada yang terlewat.
8. Tindak lanjut hasil perbaikan tersebut di evaluasi kembali oleh SVP Pelayanan Terminal sebagai bentuk pengawasan akan laporan perbaikan tersebut.

Seluruh hasil Prosedur Pelaporan Bahaya dan Masalah K3 disimpan sebagai catatan K3 yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Catatan K3.

CAPAIAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP K3

Tingkat Kecelakaan Kerja

Sepanjang tahun 2020, tingkat kecelakaan kerja di Induk Perusahaan (IPC), baik Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan sebesar 16 kejadian. Sedangkan tingkat kecelakaan kerja

Fund Allocation for Corporate Social Responsibility Implementation on K3

In 2020, the Company allocated funds to support the implementation of Corporate Social Responsibility activities for OSH amounting to Rp749.230.564 (seven hundred forty-nine million two hundred thirty thousand five hundred sixty-four rupiah) which was used for *Safety Training* implementation.

K3 Hazard and Problems Reporting Mechanism

1. If an IPC Personnel/contractor finds a source of K3 danger/problem at the work site, he or she is obliged to report it to his or her superior by filling in the Standard Form: *Safety Observation Tour*.
2. IPC personnel/contractors must also communicate the findings of the source of the hazard to the person in charge in the area for immediate follow-up.
3. The K3L Management DVP carries out a comprehensive verification of the reports of sources of hazards and OHS problems.
4. The person in charge of the area manages data on reports of sources of hazards and OHS problems then follows up on the findings of hazard conditions, creates a follow-up program, resolves all problems resulting from the findings by following the applicable procedures.
5. The person in charge of the area provides information related to the status of the hazard source conditions and K3 problems to the K3/P2K3 Management Division.
6. The K3/P2K3 Management Division monitors the implementation of corrective actions from the Related Division, whether the sources of hazards and K3 problems have been followed up.
7. The K3L Management DVP and K3L Officer monitor the follow-up of reports on OHS resources and problems as a whole and ensure that nothing is missed.
8. The follow-up results of these improvements are re-evaluated by the SVP of Terminal Services as a form of monitoring of the repair report.

All results of the K3 Hazards and Problems Reporting Procedure are stored as K3 records which are regulated in the K3 Records Control Procedure.

ACHIEVEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES TOWARDS K3

Work Accident Rate

Throughout 2020, the rate of work accidents at the Parent Company (IPC), both Head Office and Port Branches was 16 incidents. Meanwhile, the occupational accident rate in the



di Anak Perusahaan sebesar 14 kejadian. Adapun uraian mengenai tingkat kecelakaan kerja di Grup IPC pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Subsidiary was 14 incidents. The description of the level of work accidents in the IPC Group in 2020 is as follows:

Tingkat Kecelakaan Kerja Di Grup IPC Tahun 2020

Work Accident Rate at IPC Group in 2020

No.	Lokasi Kerja / Work Location	Jenis Kecelakaan Kerja / Work Accident Type			Total
		Insiden / Incident	Accident	Fatality	
1.	Induk Perusahaan (IPC) / Parent Company (IPC)				
	• Kantor Pusat / Head Office			Nihil / None	
	• Cabang Pelabuhan / Port Branch	8	7	1	16
2.	Anak Perusahaan / Subsidiary	13	1	-	14
Total		21	8	1	30

Penghargaan dan Sertifikasi K3

Daftar penghargaan dan sertifikasi K3 yang berhasil diperoleh oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

K3 Awards and Certification

The list of K3 awards and certifications that were successfully obtained by the Company throughout 2020 are as follows:

Penghargaan dan Sertifikasi K3 IPC Tahun 2020

IPC K3 Awards and Certifications in 2020

Penghargaan / Awards

Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada: / Zero Accident Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to:

- Cabang Pelabuhan Banten (6.273.219 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja per tanggal 30 November 2017 – 30 September 2019) tanggal 17 September 2020; / Banten Port Branch (6,273,219 people working hours without work accidents as of November 30, 2017 – September 30, 2019) September 17, 2020;
- Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (447.732 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja per tanggal 1 Januari 2017 – 31 Desember 2019) tanggal 17 September 2020 / Teluk Bayur Port Branch (447,732 people working hours without work accidents as of January 1, 2017 - December 31, 2019) September 17, 2020

Sertifikasi / Certification

- Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada: / Certificate of the Occupational Health and Safety Management System from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to:
 - Cabang Pelabuhan Bengkulu, dengan hasil pencapaian 90,62 persen untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria) (Masa Berlaku : 29 Maret 2019 – 28 Maret 2022); / Bengkulu Port Branch, with an achievement result of 90.62 percent for the Initial (64 Criteria) level category (Validity Period: March 29, 2019 – March 28, 2022);
 - Cabang Pelabuhan Cirebon, dengan hasil pencapaian 67,19 persen untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Cirebon Port Branch, with an achievement result of 67.19 percent for the Initial (64 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 - September 16, 2023);
 - Cabang Pelabuhan Cirebon, dengan hasil pencapaian 67,19 persen untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Cirebon Port Branch, with an achievement result of 67.19 percent for the Initial (64 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 – September 16, 2023);
 - Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan hasil pencapaian 85,54 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 30 Juli 2018 – 29 Juli 2021); / Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with achievement results of 85.54 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: July 30, 2018 – July 29, 2021);
 - Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, dengan hasil pencapaian 86,75 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 29 Maret 2019 – 28 Maret 2022); / Sunda Kelapa Port Branch, with an achievement result of 86.75 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: March 29, 2019 – March 28, 2022);
 - Cabang Pelabuhan Pontianak, dengan hasil pencapaian 86,14 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Pontianak Port Branch, with an achievement result of 86.14 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: 17, September 2020 – September 16, 2023);
 - Cabang Pelabuhan Panjang, dengan hasil pencapaian 86,74 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Panjang Port Branch, with achievement results of 86.74 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 – September 16, 2023);
 - Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, dengan hasil pencapaian 87,95 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Tanjung Priok Port Branch, with an achievement result of 87.95 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 – September 16, 2023);
 - Cabang Pelabuhan Palembang, dengan hasil pencapaian 90,96 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023); / Palembang Port Branch, with the achievement of 90.96 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 – September 16, 2023);
 - Cabang Pelabuhan Pontianak, dengan hasil pencapaian 86,14 persen untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) (Masa Berlaku : 17 September 2020 – 16 September 2023). / Pontianak Port Branch, with an achievement result of 86.14 percent for the Advanced (166 Criteria) level category (Validity Period: September 17, 2020 – September 16, 2023).
- Sertifikat OHSAS 18001 : 2007 tentang *Occupational Health and Safety Management System* dari TUV Nord Indonesia kepada: / OHSAS 18001 : 2007 Certificate on Occupational Health and Safety Management System from TUV Nord Indonesia to:
 - Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (Masa Berlaku : hingga 30 Agustus 2021). / Tanjung Priok Port Branch (Validity Period: up to August 30, 2021).
- Sertifikat OHSAS 18001 : 2007 tentang *Occupational Health and Safety Management System* dari TUV Nord Indonesia kepada: / OHSAS 18001 : 2007 Certificate on Occupational Health and Safety Management System from TUV Nord Indonesia to:
 - Cabang Pelabuhan Palembang (Masa Berlaku : 23 Mei 2019 – 22 Mei 2022). / Palembang Port Branch (Validity Period: May 23, 2019 – May 22, 2022).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Aktivitas operasional di sektor pelabuhan memiliki dampak signifikan bagi lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya permintaan jasa pelabuhan. Beberapa dampak signifikan yang berpotensi muncul antara lain pencemaran air laut yang berpotensi merusak ekosistem laut, pencemaran udara yang mengganggu kesehatan manusia, polusi bau akibat timbunan sampah, hingga pencemaran tanah dan air akibat air limbah masuk ke bumi. Apabila dampak tersebut tidak ditangani dan dikelola dengan baik, maka akan membawa dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup di sekitar pelabuhan.

Menyadari risiko lingkungan tersebut, IPC berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup. Selain itu, Perseroan juga berinisiatif untuk menjalankan aktivitas operasional di sektor pelabuhan yang berbasis pada konsep Pelabuhan Ramah Lingkungan (*Green Port*) sejak tahun 2016.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan operasi pelabuhan yang berwawasan lingkungan (*Green Port*) sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait dengan lingkungan melalui perbaikan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan (*continual improvement*).

Untuk memperkuat komitmen tersebut, Direksi IPC telah mengeluarkan Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah disosialisasikan kepada seluruh Insan IPC dengan cara mencetak dan membingkai kebijakan tersebut, kemudian dipasang di setiap lantai gedung Kantor Pusat IPC. Selain itu, sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan juga dilakukan di seluruh Cabang Pelabuhan dan Kantor Anak Perusahaan.

Adapun Isi Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan IPC adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan, persyaratan lain dan prosedur yang berlaku baik nasional dan internasional terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran;
2. Menerapkan konsep *Green Port* dalam kegiatan operasional perusahaan;
3. Memberikan keteladanan perilaku dan mengembangkan inovasi kreatif untuk peduli lingkungan;

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

The operational activities in the port sector have a significant impact on the environment as demand for port services increases. Some of the significant impacts that have the potential to arise include sea water pollution which has the potential to damage marine ecosystems, air pollution that disturbs human health, odor pollution due to garbage piles, to soil and water pollution due to wastewater entering the earth. If these impacts are not handled and managed properly, it will have negative impacts on the community and environment around the port.

Recognizing these environmental risks, IPC commits to carrying out environmental management in accordance with laws and regulations related to the Environment. In addition, the Company has also taken the initiative to carry out operational activities in the port sector based on the concept of Green Port since 2016.

COMMITMENT AND POLICIES

IPC commits to carrying out all port operations that are environmentally sound (*Green Port*) as mandated in laws and regulations and other requirements related to the environment through continual improvement of the environmental management system.

To strengthen this commitment, the IPC's Board of Directors has issued an Environmental Management System Policy on July 29, 2020 and it has been socialized to all IPC Personnel by printing and framing the policy, then installing it on every floor of the IPC Headquarters building. In addition, the dissemination of Environmental Management System Policy is also carried out in all Port Branches and Subsidiary Offices.

The content of Environmental Management System Policy of IPC is as follows:

1. Complying with and implementing laws and regulations, other requirements and procedures that apply both nationally and internationally related to environmental protection and prevention of pollution;
2. Applying the *Green Port* concept in the company's operational activities;
3. Providing behavioral modeling and developing creative innovations to care for the environment;



4. Melakukan pembinaan terhadap komunitas dan partisipasi perlindungan ekosistem di sekitar pelabuhan;
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Lingkungan demi terciptanya lingkungan kerja yang baik di wilayah perusahaan.

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pekerja dan mitra kerja serta dilaksanakan dalam bidang tugas masing-masing.

Salah satu program kerja yang dijalankan dari Implementasi *Green Port* adalah Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan yang berbasis pada ISO 14001:2015 di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau *IPC Group*.

Target *Green Port* IPC Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menargetkan 2 (dua) program kerja dalam rangka mengimplementasikan komitmen *Green Port*. Program kerja ini dituangkan menjadi Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2020, yaitu Implementasi ISO 14001:2015 di *IPC Group* dan Pendampingan Perbaikan Rapor Merah PROPER KLHK. Selain itu, RKM Implementasi ISO 14001:2015 di *IPC Group* ditetapkan menjadi salah satu RKM Strategis.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengelolaan Energi

Salah satu bentuk implementasi dari *Framework Green Port* adalah pengelolaan energi di lingkungan pelabuhan yang meliputi pengelolaan energi pada bangunan/gedung, peralatan, dan sistem utilitas. Pengelolaan energi penting dilakukan agar IPC mampu menggunakan energi dengan tepat dan bijak dalam rangka mendorong terciptanya lingkungan pelabuhan yang lebih ramah lingkungan.

Program pengelolaan energi IPC yang telah dilakukan meliputi program efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan program inisiatif penggunaan energi bersih yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

Program Efisiensi Penggunaan Energi

Seperti yang telah diuraikan di atas, salah satu bentuk implementasi dari *Framework Green Port* adalah menerapkan program efisiensi energi yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional Perseroan. Beberapa program efisiensi energi yang telah dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

4. Fostering community and participation in protecting ecosystems around the port;
5. Carrying out continuous improvements to the environmental management system to create a good work environment in the company's area.

The responsibility for environmental protection is a shared responsibility of all workers and partners and is carried out in their respective fields of duty.

One of the work programs carried out from the Green Port Implementation is the Implementation of an Environmental Management System based on ISO 14001: 2015 in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or *IPC Group Environment*.

IPC Green Port Target

In 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) targeted 2 (two) work programs to implement the Green Port commitment. This work program was stipulated in Management Work Plan (RKM) of 2020, namely ISO 14001:2015 implementation at *IPC Group* and Supervision of PROPER KLHK Red Reports Improvement. In addition, the RKM for ISO 14001:2015 implementation at *IPC Group* was established as a Strategic RKM.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Energy Management Program

One form of the Green Port Framework implementation is energy management in the port environment which includes energy management of buildings, equipment, and utility systems. Energy management enables IPC to use energy appropriately and wisely in order to create a more environmentally friendly port environment.

IPC energy management program that has been implemented includes an efficiency program that aims to improve the efficiency of energy use in operational activities as well as a clean energy initiative program aimed at reducing the use of fossil energy.

Efficient Use of Energy Program

As previously described, a form of Green Port Framework implementation is the energy efficiency program that supports the Company's operational activities. Several energy efficiency programs that have been carried out by the Company include:

1. Pengembangan dan Pembangunan *Building Automation System (BAS)* dan *Smart Panel* di Kantor Pusat IPC

Dengan menggunakan *Building Automation System* dan *smart panel*, maka sistem kelistrikan di dalam gedung dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan tingkat pemakaian ruangan sehingga lebih efisien. Melalui sistem ini pula dapat dilakukan *monitoring* dan pencatatan penggunaan listrik di seluruh ruangan di Gedung Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sehingga diperoleh profil penggunaan listrik sebagai bahan analisis dan evaluasi peningkatan efisien energi ke depannya.

2. Pengembangan Perangkat *Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS)* Tahap II di 10 Cabang Pelabuhan

Sebagai tindak lanjut program *pilot project* RCMMS tahap I di Cabang Pelabuhan Palembang, seluruh peralatan bongkar muat utama telah dilengkapi dengan perangkat RCMMS. Fitur energi *monitoring* akan ditampilkan lebih komprehensif dengan ditambahkannya *analytical dashboard* pada perangkat RCMMS tahap II ini sehingga profil penggunaan energi dapat diperoleh dan dianalisis dengan lebih cepat dan akurat.

3. Penerapan Program Elektrifikasi

IPC akan terus melakukan program elektrifikasi untuk 56 (lima puluh enam) unit alat bongkar muat milik IPC yang tersebar di seluruh cabang pelabuhan dan telah dilaksanakan untuk 25 (dua puluh lima) unit. Pada saat ini, di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dan Cabang Pelabuhan Pontianak sedang dalam tahap konstruksi untuk 14 (empat belas) unit, sedangkan 17 (tujuh belas) unit lainnya akan dilakukan dalam kesempatan pertama.

4. *Pilot Program* Penerapan Teknologi Hemat Energi pada Alat Bongkar Muat

Program ini merupakan tindak lanjut dari kajian efisiensi energi yang dilakukan sejak tahun 2018, dengan penerapan teknologi hemat energi, khususnya pada alat bongkar muat yang masih menggunakan *diesel generator set*, berupa penggunaan berupa penggunaan *hybrid system*, *variable speed generator*, *solar panel*, dan lainnya. Dengan penerapan teknologi hemat energi ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penggunaan bahan bakar fosil pada peralatan bongkar muat dimaksud.

Selain program efisiensi di atas, Perseroan telah melakukan beberapa *improvement* dalam rangka efisiensi energi pada pelaksanaan aktivitas operasional di kantor, antara lain menggunakan peralatan hemat energi di gedung perkantoran,

1. Development and Construction of *Building Automation System (BAS)* and *Smart Panel* at IPC Headquarters

By using *Building Automation System* and *smart panels*, the electrical system in the building can be controlled automatically based on the level of space usage so that it is more efficient. Through this system, it is possible to monitor and record electricity usage in all rooms in the Head Office Building and Tanjung Priok Port Branch so that a profile of electricity use can be obtained as material for analysis and evaluation of future energy efficiency improvements.

2. Development of *Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS)* Equipment Phase II in 10 Port Branches

As a follow-up to phase I of RCMMS pilot project program at Palembang Port Branch, all main loading and unloading equipment has been equipped with the RCMMS kit. The energy monitoring feature will be displayed more comprehensively by adding an analytical dashboard to the RCMMS phase II devices so that energy use profiles can be obtained and analyzed more quickly and accurately.

3. Implementation of Electrification Program

IPC will continue electrification program of 56 (fifty-six) units of loading and unloading equipment in all port branches, 25 (twenty-five) of which have been carried out. Currently, 14 (fourteen) units are being constructed in Teluk Bayur and Pontianak Port Branches, while the remaining 17 (seventeen) units will follow at the first opportunity.

4. *Pilot Program* on the Implementation of Energy-Saving Technology for Loading and Unloading Equipment

This program is a follow-up of the energy efficiency study in 2018, by applying energy saving technologies, especially for loading and unloading equipment which still used diesel generator sets, into using hybrid systems, variable speed generators, solar panels, and others. The application of energy saving technology is expected to reduce the amount of fossil fuel used in loading and unloading equipment.

In addition to the efficiency program above, the Company has made several improvements in the context of energy efficiency in the implementation of operational activities in the office, including using energy efficient equipment in office buildings,



seperti *Variable Refrigerant Volume (VRV System)* untuk mesin pendingin udara; secara bertahap mengganti lampu penerangan menjadi LED sejak tahun 2015; memanfaatkan tenaga surya untuk penerangan luar ruangan; dan mengatur jam kerja dengan mematikan pendingin udara pada jam 6 sore.

Inisiatif Penggunaan Energi Bersih

Untuk meningkatkan kualitas udara di lingkungan operasional pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Perseroan berinisiatif untuk mengurangi penggunaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu, IPC dan anak perusahaannya, yaitu PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI), mengembangkan fasilitas *Shore to Ship (STS)* di dermaga peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2020. Fasilitas STS ini memungkinkan kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok dapat menggunakan energi listrik yang disediakan di dermaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di kapal tersebut, menggantikan penggunaan BBM.

Fasilitas STS yang dikembangkan Perseroan dapat memastikan keamanan jaringan listrik dan peralatan di kapal dengan menggunakan trafo isolasi. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan *mobile converter* yang dapat mengikuti lokasi sandar kapal dan multi frekuensi (50Hz dan 60Hz) dan multi tegangan (380V, 400V, 440V, 450V, 460V) yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan kapal yang memiliki frekuensi kelistrikan yang bervariasi. Untuk menunjang penggunaannya, IPC juga telah menyiapkan 2 unit konverter frekuensi, sehingga dapat melayani 2 kapal yang bersandar secara bersamaan.

Melalui penerapan STS ini, Perseroan berkontribusi untuk mengurangi penggunaan energi dari bahan bakar fosil dan menurunkan polusi di lingkungan pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Ke depannya, secara bertahap fasilitas STS ini akan dipasang di seluruh pelabuhan yang dikelola oleh IPC.

Selain mengembangkan fasilitas STS, secara bertahap IPC juga mengganti berbagai peralatan yang semula menggunakan BBM menjadi mesin bertenaga listrik, seperti *Container Crane (CC)* dan *Gantry Luffing Crane (GLC)*. Upaya ini dapat mengurangi penggunaan BBM untuk mengoperasikan peralatan operasional serta menghemat biaya operasional dan perawatan mesin.

such as the Variable Refrigerant Volume (VRV System) for air conditioning machines; gradually changing lighting lamps to LEDs since 2015; utilize solar power for outdoor lighting; and regulating working hours by turning off air conditioning at 6 pm.

Initiatives to Use Clean Energy

To improve air quality in the port operational area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Company took the initiative to reduce the use of fossil fuel or oil fuel. Therefore, IPC and its subsidiary, PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI), developed Shore to Ship (STS) facility at the domestic container dock at Tanjung Priok Port in 2020. The STS facility allows ships that dock at Tanjung Priok Port to use electricity provided at the dock to meet the ship's electricity needs, replacing the use of oil fuel.

The STS facility developed by the Company ensures the safety of electricity network and equipment of the ship by using isolation transformer. This facility is also equipped by mobile converter that follows the ship's docking location with multi-frequency (50Hz and 60Hz) and multi-voltage (380V, 400V, 440V, 450V, 460V) options to cater to various electricity needs of ships. To support its usage, IPC also provided 2 units of frequency converter in order to serve 2 docking ships simultaneously.

Through the application of this STS, the Company contributes in the reduction of fossil-fueled energy and reduce pollution in the port environment, especially at Tanjung Priok Port. Going forward, the STS facility will be gradually installed in all ports managed by IPC.

In addition to developing STS facility, IPC also gradually replaced various equipment that originally used fuel into electrically powered machines, such as Container Cranes (CC) and Gantry Luffing Cranes (GLC). This effort aimed at reducing the use of oil fuel for operational equipment and saving cost of operations and maintenance of machineries.

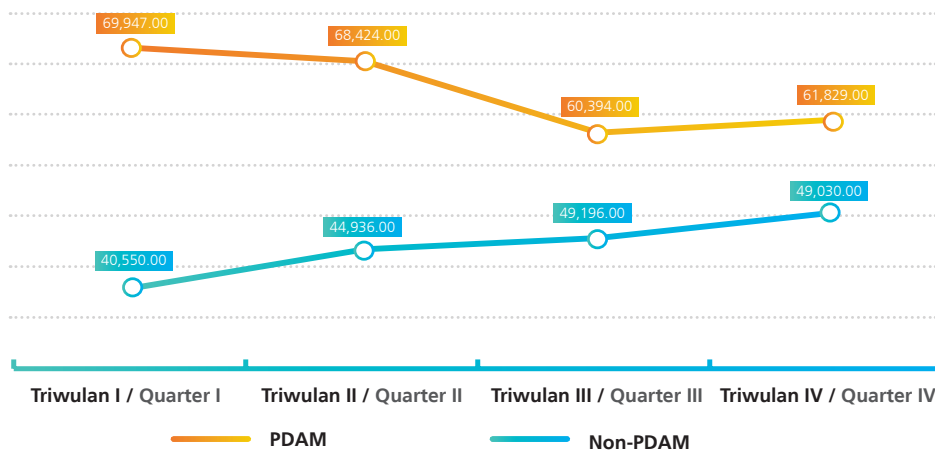
Pengelolaan Penggunaan Air

Penggunaan air di Perseroan berasal dari 2 (dua) sumber yang berbeda, yaitu pasokan dari PDAM dan hasil pengelolaan air bersih dengan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) yang memiliki kemampuan untuk memurnikan dan menyuling air laut, sehingga dapat memenuhi pasokan air bersih untuk kebutuhan non-konsumsi, seperti kebutuhan sanitasi dan kebutuhan penunjang operasional lainnya, termasuk kebutuhan air untuk kapal. Dengan demikian, Perseroan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi pasokan air bersih.

Hingga kini, teknologi SWRO telah dikembangkan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, dengan kapasitas masing-masing sebesar 1.000 ton/hari dan 500 ton/hari. Di samping itu, saat ini sedang dilakukan konstruksi SWRO di Pelabuhan Kijing.

Adapun volume penggunaan air bersih di 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan IPC selama tahun 2020 berdasarkan sumber air diuraikan dalam grafik berikut ini:

Volume Penggunaan Air Bersih di Seluruh Cabang Pelabuhan IPC Selama Tahun 2020 (dalam m³)



Berdasarkan grafik di atas, volume penggunaan air PDAM di seluruh Cabang Pelabuhan IPC selama tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan volume penggunaan air dari sumber selain PDAM, dengan proporsi yang tidak terlalu jauh, yaitu 58,65 persen atau 260.594 m³ untuk volume air PDAM dan 41,35 persen atau 183.712 m³ untuk volume air dari sumber selain PDAM. Penggunaan air PDAM pada periode triwulan I hingga triwulan III mengalami penurunan, namun sedikit meningkat pada triwulan IV. Di sisi lain, penggunaan air dari sumber selain PDAM mengalami peningkatan pada periode triwulan I hingga triwulan III, namun sedikit mengalami

Water Usage Management

The water used at the Company originates from 2 (two) sources, namely supply from PDAM and water processed through the clean water management facilities using *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO), which purifies and distills sea water to provide clean water for non-consumption needs, such as sanitation needs and other operational support needs, including water needs for ships. Thus, the Company can reduce dependence on the use of groundwater to meet clean water supplies.

To date, SWRO technology has been developed at the Head Office and Tanjung Priok Port Branch Office with capacities of 1,000 tons/day and 500 tons/day, respectively. Furthermore, SWRO is currently being constructed at Kijing Port.

The volume of clean water usage at 12 (twelve) Port Branches of IPC throughout 2020 based on water source is described in the following chart:

Volume of Clean Water Usage in All Port Branches of IPC in 2020 (in m³)

Based on the chart above, the volume of PDAM water use in all IPC Port Branches during 2020 is more than the volume of water use from sources other than PDAM with a slight difference in proportion, namely 58.65 percent or 260,594 m³ of PDAM water and 41.35 percent or 183,712 m³ of water from sources other than PDAM. The use of PDAM water decreased in the first quarter to the third quarter, but increased slightly in the fourth quarter. On the other hand, the use of water from sources other than PDAM increased in the first quarter to the third quarter, but decreased slightly in the fourth quarter. This condition is expected to encourage



penurunan pada triwulan IV. Kondisi ini ke depannya dapat menjadi motivasi bagi Perseroan untuk beralih menggunakan air dari sumber selain PDAM di masa depan dalam rangka mengurangi penggunaan air tanah dan mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah.

Sejalan dengan prinsip efisiensi dan *mindful consumption* (konsumsi wajar), IPC mengeluarkan himbauan tentang perlunya menggunakan air secara bijaksana. Apalagi, air baku yang diolah oleh Perusahaan Air Minum saat ini semakin terbatas karena dampak pencemaran. Selain itu, pengolahan air dengan teknologi SWRO juga membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga prinsip penghematan air tetap relevan untuk dilakukan. Selain himbauan, penghematan air juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berkala instalasi air sehingga bisa dilakukan perbaikan segera apabila terjadi kebocoran.

Selain instalasi 2 (dua) unit SWRO, Pelabuhan Tanjung Priok juga memasok air bersih komersial dengan bersinergi dengan Perusahaan Air Minum. Jaringan pipa air bersih tersedia dalam pelabuhan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan atau keterbatasan suplai dari SWRO.

Program Pengendalian Emisi

Dalam menjalankan aktivitas operasional di sektor pelabuhan, Perseroan menghasilkan emisi yang berasal dari kegiatan perkantoran dan terminal. Menyadari bahwa emisi dapat berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasi Perseroan, maka IPC berkomitmen untuk mengendalikan dampak negatif dari emisi melalui upaya pengendalian emisi. Pengendalian emisi di IPC dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pemantauan dan pengelolaan emisi. Untuk kegiatan pemantauan dan pengelolaan emisi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari izin lingkungan kegiatan yang telah dimiliki, baik kegiatan di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan.

Pemantauan Emisi

Uji Emisi

Pemantauan emisi dilakukan salah satunya melalui Uji Emisi untuk mengukur emisi secara langsung yang dihasilkan dari kendaraan yang berlalu lintas di area terminal pelabuhan, seperti truk kontainer, mobil, motor, dan lainnya serta dari peralatan bongkar muat, seperti *crane* ataupun *genset*. Pemantauan dan pengukuran emisi mobil operasional kantor dilakukan secara berkala dengan menunjuk vendor/pihak ketiga yang di bawah koordinasi Departemen Umum dan Rumah Tangga.

the Company to switch to water from sources other than PDAM in the future in order to reduce groundwater use and prevent land subsidence.

In line with the principles of efficiency and mindful consumption, IPC has issued an appeal about the need to use water wisely. Moreover, the raw water processed by Drinking Water Companies is currently increasingly limited due to the impact of pollution. In addition, water treatment using SWRO technology also requires a large amount of money, so the principle of water saving remains relevant. Apart from the appeal, saving water is also carried out by periodically checking the water installation so that it can be repaired immediately if a leak occurs.

In addition to the installation of 2 (two) SWRO units, Tanjung Priok Port also supplies commercial clean water in synergy with the Drinking Water Company. Clean water pipelines are available in the port to anticipate damage or limited supply from SWRO.

Emission Control Program

In carrying out operational activities in the port sector, the Company produces emissions originating from office and terminal activities. Realizing that emissions can have a negative impact on humans and the environment around the Company's operational areas, IPC is committed to controlling the negative impacts of emissions through emission control efforts. Emission control at IPC is carried out through 2 (two) methods, namely monitoring and managing emissions. Monitoring and emission management activities are carried out as a form of fulfilling the obligations of the environmental permits for activities that are already held, both at the Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.

Emission Monitoring

Emission Test

Emission monitoring is carried out through, one of which is, Emission Test to measure emissions directly resulting from traffic vehicles in the port terminal area, such as container trucks, cars, motorbikes, and others as well as from loading and unloading equipment, such as cranes or generators. Monitoring and measurement of office operational car emissions is carried out periodically by appointing a vendor/third party under the coordination of the General and Household Department.

Uji emisi mobil operasional kantor dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 terhadap 14 (empat belas) unit mobil, dengan uraian sebagai berikut:

Office operational car emission tests were carried out on February 12, 2020 for 14 (fourteen) units of cars, with the following description:

Pelaksanaan Uji Emisi Mobil Operasional Tahun 2020

Emission Test Implementation for Operational Cars in 2020

No.	Gas Emission Analyzer	Hasil Pemantauan / Monitoring Results													
		B 1512 PIQ	B 1796 PIQ	B 1662 PIP	B 1752 PIQ	B 1511 PIQ	B 1406 PIR	B 1159 PIR	B 1524 PIQ	B 1676 PIP	B 1526 PIQ	B 1523 PIQ	B 1753 PIQ	B 1171 PIR	B 1390 PIQ
1	Nomor Mobil / Car Number														
2	Tahun Uji Emisi / Emission Test Year	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
3	CO	0,13%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,32%	0,01%	0,01%	0,25%	0,00%	0,04%	0,01%
4	HC	160,00	64,00	59,00	36,00	89,00	70,00	64,00	147,00	37,00	37,00	162,00	75,00	66,00	35,00
5	CO2	14,50	15,40	15,20	15,00	15,20	15,10	15,20	14,50	15,20	15,40	14,60	15,40	15,10	15,40
6	O2	0,63	0,88	0,09	0,05	0,19	0,09	0,05	0,77	0,07	0,14	0,93	0,08	0,07	0,14
7	LAMBDA	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	1,03	1,00	1,00	1,00
8	AFR	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
9	Bahan Bakar / Fuel	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE	GASO-LINE
10	H/C	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500	1,8500
11	O/C	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Pemantauan Kualitas Udara Ambient

Pemantauan emisi kendaraan yang berlalu lintas di area kantor dapat mempengaruhi kualitas udara di area kantor. Hal ini dipantau melalui pengukuran kualitas udara di luar gedung (*ambient*) di Kantor Pusat dan 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan. Pengukuran kualitas udara *ambient* dilakukan dengan menggunakan parameter Debu (TSP) dan Karbon Monoksida dan standar baku mutu sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota atau Dokumen Izin Lingkungan yang dimiliki oleh seluruh Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Ambient Air Quality Monitoring

Monitoring of traffic emissions in the office area can affect the air quality in the office area. This is monitored through measurement of air quality outside the building (*ambient*) at the Head Office and 12 (twelve) Port Branches. Ambient air quality measurements were carried out using the Dust (TSP) and Carbon Monoxide parameters and quality standards as stipulated in the Decree of the Minister of Environment No. 41/1999 concerning Guidelines for the Establishment of a District/City Environmental Impact Assessment Commission or the Environmental Permit Documents owned by all PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branches.

Berikut data hasil pemantauan kualitas udara *ambient* pada 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan berikut kawasannya dan 1 Kantor Pusat pada tahun 2020:

The following is the data on the results of monitoring of ambient air quality in the areas of 12 (twelve) Port Branches and 1 Head Office in 2020:

Tabel Monitor IPC pada Kualitas Udara Ambient Selama Tahun 2020

IPC's Monitor Table on Ambient Air Quality in 2020

No.	Area Operasional IPC / IPC Operational Area	Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	14	14	0	0
2	Tanjung Pandan	6	6	0	0
3	Banten	8	8	0	0



No.	Area Operasional IPC / IPC Operational Area	Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
4	Cirebon	4	4	0	0
5	Panjang	8	8	0	0
6	Sunda Kelapa	6	6	0	0
7	Jambi (Talang Duku)	3	3	0	0
8	Pontianak	11	10	0	0
9	Pangkal Batam	3	3	0	0
10	Teluk Bayur	6	6	0	0
11	Palembang	5	5	0	0
12	Bengkulu	6	6	0	0
13	Bojonegara	4	2	0	0
14	Kantor Pusat	2	2	0	0
Jumlah / Total		86	85	0	0
Persentase / Percentage		100%	100%	0%	0%

Pada semester I dan II tahun 2020, hasil kualitas udara di Cabang Pelabuhan IPC adalah masing-masing sebesar 100 persen dan telah memenuhi baku mutu parameter Debu dan Karbon Monoksida.

In the first and second semesters of 2020, the air quality results at the IPC Port Branch were 100 percent each and had met the quality standards for the dust and carbon monoxide parameters.

Pemantauan Kualitas Udara Real Time

Perseroan juga melakukan pemantauan emisi udara melalui Sistem Pemantauan Kualitas Udara *Real Time* di Area Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak tahun 2019, Perseroan telah membangun Sistem Pemantauan Kualitas Udara *Real Time* dengan memasang 4 (empat) alat Pemantauan Kualitas Udara di Kantor Pusat dan Area Terminal Operasi Pelabuhan Tanjung Priok. Pemantauan Kualitas Udara *Real Time* disesuaikan dengan Parameter Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Real Time Air Quality Monitoring

The Company also monitors air emissions through the Real Time Air Quality Monitoring System in the Tanjung Priok Port Head Office and Branch Areas. Since 2019, the Company has built a Real Time Air Quality Monitoring System by installing 4 (four) Air Quality Monitoring devices at the Head Office and the Tanjung Priok Port Operation Terminal Area. Real Time Air Quality Monitoring is adjusted to the Air Pollution Standard Index (ISPU) Parameter of the Ministry of Environment and Forestry.

Adapun hasil pemantauan emisi yang dilakukan di tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya diuraikan dalam pembahasan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup dalam Laporan Tahunan ini.

The results of monitoring of emissions carried out in 2020 and their comparison with the previous year are described in the discussion of the Achievements in the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities for the Environment in this Annual Report.

Pengelolaan Emisi

Pengelolaan emisi adalah langkah untuk menjaga nilai emisi atau kualitas udara agar tetap di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sesuai izin lingkungan kegiatan terkait serta mendukung terciptanya udara bersih di sekitar wilayah operasional Perseroan. Beberapa upaya pengelolaan emisi yang telah dilakukan antara lain:

Emission Management

Emission management is a measure to maintain the emission value or air quality so that it remains below the quality standard that has been determined in accordance with the environmental permit for related activities and supports the creation of clean air around the Company's operational areas. Some of the emission management efforts that have been made include:

1. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau;
2. Melakukan penanaman pohon di area kegiatan usaha;

1. Maintaining Green Open Space;
2. Planting trees in the area of business activity;

3. Menyimpan genset sebagai energi cadangan di tempat yang khusus;
4. Penyediaan tempat parkir untuk para pegawai dan tamu;
5. Menyediakan ruangan khusus untuk merokok, seperti ruang tambahan khusus untuk merokok di luar gedung dan taman sekitar gedung;
6. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal berstatus lolos emisi gas buang;
7. Mewajibkan kendaraan yang masuk ke Terminal memiliki sertifikat layak jalan/KIR;
8. Melakukan uji petik terhadap emisi yang dihasilkan kendaraan yang masuk ke terminal;
9. Pada pelabuhan dengan penumpukan muatan curah kering, Perseroan memasang pagar keliling, *sprinkler*, penyapuan area terminal dan prosedur pencucian truk barang curah yang meninggalkan kawasan pelabuhan.

Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk tidak menggunakan sistem pendingin udara dan kulkas yang menggunakan zat/material perusak ozon. Saat ini, mesin pendingin udara di gedung baru IPC telah menggunakan *refrigeran* non-CFC R410 yang bebas bahan perusak lapisan ozon (BPO). Perseroan juga secara bertahap beralih menggunakan *refrigeran* non-CFC R410 sebagai alat pendingin udara di *Container Office* di lapangan yang memiliki keunggulan *Coefficient of Performance* (CoP) tiga kali lebih tinggi dibandingkan R22. CoP yang tinggi mengindikasikan efek pendinginan yang dihasilkan lebih tinggi sehingga lebih hemat energi. Sementara itu, untuk alat pemadam api, Perseroan menggunakan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang ramah lingkungan pengganti Halon.

Dengan mengurangi penggunaan bahan perusak ozon, maka IPC turut ambil bagian dalam gerakan Perlindungan Lapisan Ozon (PLO) sebagai salah satu bagian dari upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program Pengelolaan Limbah

Dalam menjalankan aktivitas operasional di bidang jasa kepelabuhanan, IPC menghasilkan limbah yang berasal dari kegiatan perkantoran maupun terminal/operasional. Agar limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan ekosistem di sekitar wilayah operasional, maka Perseroan berkomitmen untuk mengelola limbah dengan baik. Pengelolaan limbah Perseroan dilakukan berdasarkan jenis limbah yang dihasilkan, yaitu limbah padat/sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan limbah cair.

3. Storing the generator as backup energy in a special place;
4. Provision of parking spaces for employees and guests;
5. Provide a special smoking room, such as an additional smoking room outside the building and a park around the building;
6. Require all vehicles that enter the Terminal to pass exhaust gas emission status;
7. Require all vehicles that enter the Terminal have a roadworthiness/KIR certificate;
8. Carry out a sampling test of the emissions produced by vehicles entering the terminal;
9. At ports with an accumulation of dry bulk cargo, the Company installs fences, sprinklers, sweeping the terminal area and washing procedures for bulk goods trucks leaving the port area.

In addition, the Company is committed to not using air conditioning systems and refrigerators that use ozone depleting substances/materials. Currently, the air conditioning machines in the new IPC building have used non-CFC R410 refrigerant which is free of ozone depleting substances (BPO). The company has also gradually switched to using non-CFC R410 refrigerant as an air conditioner in the *Container Office* in the field which has the advantage of a *Coefficient of Performance* (CoP) three times higher than R22. A high CoP indicates a higher cooling effect, so it is more energy efficient. Meanwhile, for fire extinguishers, the Company uses fire extinguishers with environmentally friendly extinguishers to replace Halon.

By reducing the use of ozone-depleting substances, IPC is taking part in the Ozone Layer Protection (PLO) movement as a part of overall environmental protection efforts, as stated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Waste Management Program

In carrying out operational activities in the port services sector, IPC produces waste originating from office and terminal/operational activities. So that the resulting waste does not have a negative impact on the environment and the ecosystem around the operational area, the Company is committed to managing waste properly. The management of the Company's waste is carried out based on the type of waste produced, namely solid waste/garbage, Hazardous and Toxic (B3) waste, and liquid waste.



Pengelolaan Limbah Padat/Sampah

Perseroan mengategorikan limbah padat yang dari dihasilkan kegiatan operasional IPC, baik dari area gedung perkantoran maupun area operasi terminal, berdasarkan sifat dan jenis masing-masing sampah, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah kertas. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan limbah padat atau sampah dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk pengelolaan sampah organik akan diproses menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik dan sampah kertas akan didaur ulang dan dikirim ke *landfill* melalui pengangkutan sampah secara rutin dari wadah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan diproses ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, IPC mulai melakukan kajian sistem pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk area Kantor Pusat dan direalisasikan melalui penyediaan wadah sampah terpilah/segregasi untuk tiap lantai di Gedung Kantor Pusat IPC oleh Departemen Rumah Tangga & Umum. Pada tahun 2019, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok menerapkan wadah sampah terpilah/segregasi di gedung kantor. Kemudian, pada tahun 2020, implementasi pengelolaan sampah 3R diterapkan pada 11 Cabang Pelabuhan lainnya dan Anak Perusahaan IPC.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 Perseroan dihasilkan dari kegiatan perkantoran dan terminal/operasional. Dari kegiatan perkantoran, limbah B3 yang dihasilkan antara lain seperti *toner, cartridge*, kain majun, oli bekas genset, bangkai lampu, dan sebagainya. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan terminal/operasional antara lain bahan bakar bekas dari *crane*, oli bekas genset, bangkai lampu, dan sebagainya. Salah satu Anak Perusahaan IPC yang telah mengelola limbah B3 adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan limbah B3, IPC telah mengembangkan Fasilitas Pengolahan Limbah Kapal atau *Reception Facilities* (RF) sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga akhir tahun 2020, IPC memiliki 3 (tiga) Izin Fasilitas Pengelolaan Limbah Kapal atau *Reception Facilities* (RF) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 3 (tiga) Cabang Pelabuhan, yaitu Cabang Pelabuhan Palembang, Cabang Pelabuhan Panjang, dan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur. Adapun untuk Pelabuhan Tanjung Priok saat ini masih dalam proses perpanjangan izin. Seluruh fasilitas tersebut memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat digunakan

Solid Waste/Garbage Management

The Company categorizes solid waste generated from IPC operational activities, both from office building areas and terminal operation areas, based on the nature and type of each waste, namely organic waste, non-organic waste, and paper waste. It is intended that solid waste or garbage management can be carried out appropriately in accordance with applicable regulations.

Organic waste management will be processed into compost, while non-organic waste and paper waste will be recycled and sent to the landfill through routine waste transportation from the container to the Temporary Disposal Site (TPS) and processed to the Final Processing Site (TPA) by appointing a third party as a manager.

Since 2017 to 2018, IPC began to study the 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) waste management system for the Headquarters area and realized through the provision of segregated waste containers for each floor in the IPC Head Office Building by the Department of Household & General Affairs. In 2019, the Tanjung Priok Port Branch implemented segregated waste containers in office buildings. Then, in 2020, the 3R waste management was implemented in 11 other Port Branches and IPC Subsidiaries.

Hazardous and Toxic Materials (B3) Waste Management

The Company's B3 waste is generated from the offices and terminal/operational activities. From office activities, the B3 waste produced includes toner, cartridges, rags, used generator set oil, lamp carcasses, and so on. Meanwhile, B3 waste generated from terminal/operational activities includes used fuel from cranes, used generator set oil, lamp carcasses, and others. One of the IPC Subsidiaries that has managed B3 waste is PT Pelabuhan Tanjung Priok.

To optimize B3 waste management, IPC has developed a Ship Waste Treatment Facility (RF) as mandated by the Ministry of Environment and Forestry. Until the end of 2020, IPC had 3 (three) Ship Waste Management Facility Permits or Reception Facilities (RF) from the Ministry of Environment and Forestry at 3 (three) Port Branches, namely Palembang Port Branch, Panjang Port Branch, and Teluk Bayur Port Branch. The permit for Tanjung Priok Port is currently being extended. All these facilities are valid for 5 (five) years and can be used to process waste oil lubricants from hydraulics, gear machines, lubrication, insulation, heat transmission, grit chamber, separators and/or mixtures thereof. The RF facility at Teluk

untuk pengelolaan pelumas bekas, antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin *gear*, pelumasan, insulasi, *heat transmission*, *grit chamber*, *separator* dan/atau campurannya. Khusus untuk fasilitas RF di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, terdapat fungsi tambahan, yaitu untuk mengelola residu yang dihasilkan dari proses produksi, meliputi *manufacturing*, *assembly*, dan *maintenance*.

Pada tahun 2020, IPC mengembangkan inisiatif ini melalui Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran dari limbah yang berasal dari kapal sampai ke level yang aman bagi manusia dan lingkungan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup dari manajemen limbah kapal terpadu ini adalah pengelolaan limbah kapal untuk semua jenis limbah yang berasal dari kapal (*Ship Generated Waste*) seperti dari pengoperasian permesinan kapal, pemeliharaan kapal, kegiatan domestik kapal (dapur, cucian, dan kamar mandi), serta pembersihan muatan dan ruang muat, termasuk limbah sisa muatan (*Cargo Residues*) yang diangkut kapal yang tidak dapat dibongkar bersama muatan pada saat proses bongkar muat.

Pengembangan Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu didukung oleh sistem teknologi informasi dengan menggabungkan sistem eksisting milik Kementerian Perhubungan yakni Sistem Pelaporan Kapal Inaportnet, dengan *Port Waste Management System* IPC. Sistem ini akan mengharuskan bahwa paling lama satu kali 24 jam atau pada saat melaporkan warta kedatangan kapal (SPM), operator kapal/*agent* harus sudah mengajukan permohonan rencana penurunan/bongkar limbah dari kapal yang sudah diklasifikasikan menurut jenis dan jumlah limbahnya melalui sistem Inaportnet.

Pemantauan dan Pengelolaan Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan toilet, *pantry*, dan kegiatan operasional di terminal dapat mempengaruhi kualitas badan air. Adapun badan air yang dimaksud adalah air laut, kecuali pada Cabang Pelabuhan Jambi, Palembang, dan Pontianak berupa air sungai. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pemantauan dan pengelolaan limbah cair dalam rangka mencegah pelepasan air limbah yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan badan air dan ekosistem di sekitarnya.

Bayur Port Branch has an additional function to process the residue generated from the production process, including manufacturing, assembly, and maintenance.

In 2020, IPC is developing this initiative through the Integrated Ship Waste Management Program at the Port of Tanjung Priok which aims to reduce the impact of pollution from waste originating from ships to a level that is safe for humans and the environment in accordance with applicable rules and regulations.

The scope of the integrated ship waste management is the management of ship waste for all types of waste originating from ships (*Ship Generated Waste*) such as from the ship machinery operations, ship maintenance, ship domestic activities (kitchens, laundry, and bathrooms), and cargo and loading space cleaning, including cargo residues transported by ships that cannot be unloaded with cargo during the loading and unloading process.

The development of the Integrated Ship Waste Management Program is supported by an information technology system by combining the existing system of the Ministry of Transportation, namely the Inaportnet Ship Reporting System, with the IPC Port Waste Management System. This system will require that no later than one in 24 hours or at the time of reporting the ship arrival message (SPM), the ship operator/*agent* must have submitted an application for a plan to reduce/unload waste from vessels that have been classified according to the type and amount of waste through the Inaportnet system.

Liquid Waste Monitoring and Management

The liquid waste generated from toilet, *pantry*, and terminal operations can affect the quality of water bodies. The water bodies referred to are seawater, except for Jambi, Palembang, and Pontianak Port Branches in the form of river water. Therefore, the Company monitors and manages liquid waste in order to prevent irresponsible release of wastewater and endanger water bodies and the surrounding ecosystem.



Pemantauan Limbah Cair

Untuk memastikan air yang dibuang ke badan air sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, IPC telah memiliki alat pemantauan limbah cair berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok serta Anak Perusahaan IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok, Cabang Pelabuhan Panjang, Cabang Pelabuhan Pontianak, PT IKT, PT PPI, dan PT PMLI.

IPC telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Pusat IPC dan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan kapasitas masing-masing sebesar 50 m³ serta Kantor Cabang Pelabuhan Panjang dan Cabang Pontianak masing-masing sebesar 15 m³ yang berfungsi untuk memantau dan memastikan air yang dilepas ke badan air telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Fasilitas ini telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04.37.12 tahun 2014 tentang izin pembuangan air limbah ke Laut Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Nomor 04.38.12 tahun 2014 tentang Pembuangan Air Limbah ke Laut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dan untuk Cabang Pelabuhan Panjang dengan Izin Nomor:660.1/389/TL.PLH/III.10/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Instalasi pengelolaan limbah cair tersebut dipantau dan dievaluasi secara berkala, baik dari segi kualitas maupun volume. Pemantauan dan penilaian kualitas pelepasan air sebelum dilepas ke badan air dilakukan dengan menunjuk laboratorium dengan menggunakan metode SNI terkait pengambilan sampel air limbah dan uji analisa air limbah sesuai baku mutu. Air limbah yang dilepas ke badan air tidak digunakan kembali oleh organisasi lain.

Selama tahun 2020, pemantauan dan *monitoring* volume dan kualitas pelepasan air limbah dilakukan di 91 titik pada Semester I dan 92 titik pada Semester II. Berikut data hasil pemantauan kualitas badan air (air laut/air sungai) pada 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat pada tahun 2020:

Tabel Monitor IPC pada Kualitas Badan Air (Air Laut/Air Sungai) Selama Tahun 2020

No.	Area Operasional IPC / IPC Operational Area	Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	10	10	0	0
2	Tanjung Pandan	7	7	0	0
3	Banten	10	11	0	0
4	Cirebon	4	4	0	0
5	Panjang	9	9	0	0

Liquid Waste Monitoring

To ensure that water discharged into water bodies meets the required quality standards, IPC has a liquid waste monitoring tool in the form of a Wastewater Treatment Plant (IPAL) at the Headquarters, Tanjung Priok Port Branch and IPC Subsidiaries, namely PT Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang Port Branch, Pontianak Port Branch, PT IKT, PT PPI, and PT PMLI.

IPC already had a Wastewater Treatment Plant (IPAL) at IPC Head Office and PT Pelabuhan Tanjung Priok Office with a capacity of 50 m³ each and at Panjang Port Branch Office and Pontianak Port Branch Office with a capacity of 15 m³ each. These plants has the function to monitor and ensure that the water discharged to bodies of water meets the required quality standards. This facility has obtained a permit from the Ministry of Environment and Forestry Number 04.37.12 of 2014 concerning permits for Disposal of Wastewater into the Sea of the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Number 04.38.12 of 2014 concerning Disposal of Wastewater into the Sea of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch, and for Panjang Port Branch with Permit Number: 660.1/389/TL.PLH/III.10/VIII/2020 dated August 25, 2020 issued by the Environmental Office of Bandar Lampung City.

The wastewater treatment plant is monitored and evaluated regularly, both in terms of quality and volume. Monitoring and assessing the quality of water released before being released into water bodies is carried out by appointing a laboratory using the SNI method related to wastewater sampling and wastewater analysis testing according to quality standards. Wastewater that is released into water bodies is not reused by other organizations.

During 2020, monitoring and monitoring of the volume and quality of wastewater discharge was carried out at 91 points in Semester I and 92 points in Semester II. The following is data on the results of monitoring the quality of water bodies (sea water/river water) at 12 (twelve) Port Branches and 1 Head Office in 2020:

IPC Monitoring Table of Water Body Quality (Sea Water/River Water) in 2020

No.	Area Operasional IPC / IPC Operational Area	Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meets Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
6	Sunda Kelapa	6	6	0	0
7	Jambi (Talang Duku)	2	2	0	0
8	Pontianak	7	7	0	0
9	Pangkal Batam	3	3	0	0
10	Teluk Bayur	10	10	0	0
11	Palembang	5	5	0	0
12	Bengkulu	8	8	0	0
13	Bojonegara	8	8	0	0
14	Kantor Pusat	2	2	0	0
Jumlah / Total		91	92	0	0
Persentase / Percentage		100%	100%	100%	0%

Secara konsisten, IPC dapat menghasilkan penilaian baku mutu air yang terjaga pada level 100 persen dan 100 persen masing-masing pada Semester I dan Semester II tahun 2020, menandakan bahwa kualitas badan air di tahun 2020 telah memenuhi baku mutu.

IPC can consistently produce water quality standard assessments that are maintained at the level of 100 percent and 100 percent respectively in Semester I and Semester II of 2020, indicating that the quality of water bodies in 2020 has met quality standards.

Pengelolaan Limbah Cair

Untuk mendukung pengelolaan limbah cair dan mewujudkan pemeliharaan wilayah air yang lebih baik, Perseroan menjalankan Program CSR yang melebihi kewajiban, antara lain pengoperasian kapal dan mobil pembersih sampah, penerapan penyulingan air laut untuk meminimalisir penggunaan air tanah yang dapat merusak permukaan tanah, dan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah kapal untuk menciptakan perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Program tersebut bertujuan untuk meminimalisir penggunaan air bersih dan pembersihan sampah di wilayah perairan sekitar area operasional Perseroan.

Liquid Waste Management

To support liquid waste management and achieve better water area maintenance, the Company runs CSR programs that exceed its obligations, among others by operating boats and garbage cleaning cars, implementing sea water distillation to minimize land water use that can damage the land surface, and the provision of ship waste management facilities to create a company that is friendly to the environment. These programs aimed at minimizing the use of clean water and cleaning up waste in waters around the Company's operational areas.

ALOKASI DANA PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2020, Perseroan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup sebesar Rp1,61 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

FUNDS ALLOCATION FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR THE ENVIRONMENT

In 2020, the Company allocated funds to support the implementation of Corporate Social Responsibility activities for the Environment amounting to Rp1.61 billion, with details as follows:



Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup Tahun 2020

Funds Allocation for the Implementation of Corporate Social Responsibility in 2020

No.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup / Corporate Social Responsibility Activity in the Environment	Alokasi Dana (Rp Juta) / Funds Allocation (Rp million)
1.	Pelestarian Alam (dari Program Bina Lingkungan) / Nature Conservation (from the Community Development Program)	745
2.	Pembangunan/Pengembangan Lingkungan, Fasilitas serta Pelestarian Alam(dari Program CSR) / Environmental Development, Facilities and Nature Conservation (from the CSR Program)	867
Jumlah / Total		1.612

MEKANISME PENGADUAN LINGKUNGAN

Komitmen IPC dalam mengupayakan praktik terbaik pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku dijalankan dengan turut melibatkan peran pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah menyediakan akses pengaduan masalah lingkungan akibat operasional IPC.

Laporan pengaduan permasalahan lingkungan yang disediakan Perseroan dapat disampaikan melalui Sekretariat Perusahaan melalui:

Telepon : +62-21 4367505/+62-21 4301080
Email : corp_sec@indonesiaport.co.id

Setiap pengaduan yang diterima akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku bersama dengan Tim Lingkungan guna menentukan langkah penyelesaian masalah lingkungan yang disampaikan.

Laporan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat Laporan Pengaduan terkait Lingkungan Hidup yang masuk melalui saluran pengaduan permasalahan lingkungan.

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup Penurunan Jumlah Penggunaan Energi di Beberapa Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan

Dampak dari penerapan program efisiensi energi tercermin dari penurunan jumlah penggunaan energi listrik di beberapa Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan IPC dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan uraian sebagai berikut:

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS MECHANISM

IPC's commitment to striving for best environmental management practices and compliance with applicable environmental regulations is carried out by involving the role of stakeholders in the sustainability of the Company. For this reason, the Company has provided access to complaints about environmental problems due to IPC operations.

The complaints on environmental issues provided by the Company can be submitted to the Corporate Secretary through:

Phone Numbers : +62-21 4367505/+62-21 4301080
E-mail : corp_sec@indonesiaport.co.id

Each complaint received will be processed and followed up in accordance with the applicable procedures together with the Environment Team to determine the steps to resolve the environmental problems submitted.

Environmental Complaints Report

Throughout 2020, there were no Complaints related to the Environment that were submitted through the complaint channel for environmental problems.

Achievements of the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities in the Environment Decrease in Total Energy Use in Several Port Branches and Subsidiaries

The impact of energy efficiency program implementation is reflected on the decrease in total electricity energy use in several Port Branches and Subsidiaries of IPC during the last 2 (two) years, with description as follows:

Jumlah Penggunaan Energi Listrik di Lingkungan IPC Tahun 2019 dan 2020

Total Electricity Energy Use in IPC Environment in 2019 and 2020

Nama Cabang Pelabuhan/Anak Perusahaan / Name of Port Branch/Subsidiary	2020 (a)	2019 (b)	Persentase (%) (a - b) / b / Percentage (%) (a - b) / b
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
• Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	4.933.301	5.422.940	(9,03%)
• Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch	567.546	757.373	(25,06%)
• Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	2.351.205	3.897.865	(39,68%)
Anak Perusahaan / Subsidiary			
• PT New Priok Container Terminal One (PT NPCT1)	12.264.882	13.824.615	(11,28%)
• PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)	172.919	1.093.759	(84,19%)

Dampak positif dari pelaksanaan program efisiensi energi juga tercermin dari adanya peningkatan *availability*/tingkat kesiapan dari peralatan operasional, seperti *diesel generator set*. Sebelum dilakukan elektrifikasi, diperlukan adanya pemeliharaan *diesel generator set*, mulai dari penggantian oli, *troubleshooting*, hingga dilakukan *general overhaul* yang membutuhkan biaya dan waktu relatif banyak. Namun, setelah pemakaian sumber daya listrik darat sebagai sumber energi peralatan tersebut, maka kegiatan dan biaya pemeliharaan dari instalasi listrik ini relatif lebih sedikit.

The positive impact of energy efficiency program implementation is also reflected on the increased availability of operational equipment, such as diesel generator sets. Prior to electrification, maintenance of the diesel generator set is required, starting from oil change, troubleshooting, to general overhaul which requires a relatively large amount of money and time. However, after the use of land electricity sources as the energy source of the equipment, the activities and maintenance costs of this electrical installation are relatively less.

Perbaikan Kualitas Udara di Lingkungan Pelabuhan

Upaya Perseroan dalam memperbaiki kualitas udara melalui penggunaan energi bersih dan pengendalian emisi berdampak pada hasil *monitoring* kualitas udara *ambient* tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Air Quality Improvement at the Port's Environment

The Company's efforts to improve air quality through the use of clean energy and emission control have an impact on the results of monitoring ambient air quality in 2020 which has increased from 2019, with the following description:

Hasil Pemantauan Kualitas Udara *Ambient* IPC Tahun 2019 – 2020

IPC Monitoring Results for Ambient Air Quality in 2019 - 2020

Uraian / Description	2020				2019			
	Memenuhi Baku Mutu / Meet Quality Standards		Tidak Memenuhi Baku Mutu / Does Not Meet Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meet Quality Standards		Tidak Memenuhi Baku Mutu / Does Not Meet Quality Standards	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Jumlah / Total	86	85	0	0	76	79	5	2
Persentase / Percentage	100%	100%	0%	0%	94%	98%	6%	2%

Berdasarkan tabel di atas, kualitas udara *ambient* Perseroan, baik pada Semester I dan II telah memenuhi baku mutu parameter Debu dan Karbon Monoksida. Hasil tersebut mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2019, di mana kualitas udara *ambient* yang tidak memenuhi baku mutu sebesar 6 persen pada Semester I 2019 dan 2 persen pada Semester II 2019. Membaiknya kualitas

Based on the table above, the ambient air quality of the Company, both in Semester I and II, has met the quality standard for Dust and Carbon Monoxide parameters. These results have improved compared to 2019, where ambient air quality did not meet quality standards by 6 percent in Semester I 2019 and 2 percent in Semester II 2019. The improvement in ambient air quality in 2020 was due to the



udara *ambient* di tahun 2020 ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berakibat pada berkurangnya aktivitas kepelabuhanan di Cabang Pelabuhan IPC.

Covid-19 pandemic. in 2020 which results in reduced port activity at IPC Port Branches.

Selain itu, Perseroan juga melakukan Pemantauan Kualitas Udara *Real Time* disesuaikan dengan Parameter Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-107/KABPEDAL/11/1997. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menggambarkan kondisi mutu udara *ambient* di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

In addition, the Company also conducts Real Time Air Quality Monitoring according to the Air Pollution Standard Index (ISPU) Parameters established by the Ministry of Environment and Forestry through Decision of the Head of Environmental Impact Management Agency No. KEP-107/KABPEDAL/11/1997. The Air Pollutant Standard Index (ISPU) describes the condition of ambient air quality at a particular location, which is based on the impact on human health, aesthetic values and other living things.

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-107/KABPEDAL/11/1997

Air Pollutant Standard Index (ISPU) Based on Decision of the Head of Environmental Impact Management Agency No. KEP-107/KABPEDAL/11/1997

Kategori / Category	Status Warna / Color Status	Angka Rentang / Range Number
Baik / Good	Hijau / Green	1 – 50
Sedang / Medium	Biru / Blue	51 – 100
Tidak Sehat / Unhealthy	Kuning / Yellow	101 – 199
Sangat Tidak Sehat / Very Unhealthy	Merah / Red	200 – 299
Berbahaya / Hazardous	Hitam / Black	≥ 300

Hasil Pemantauan Kualitas Udara terkini di Area Kantor Pusat IPC dan Area Terminal Operasi Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The results of the latest Air Quality Monitoring in the IPC Headquarters Area and Tanjung Priok Port Operation Terminal Area in 2020 are as follows:

Hasil Pemantauan Kualitas Udara *Real Time* Tahun 2020

Real Time Air Quality in IPC's Head Office Area

Kategori / Category	Status Warna / Color Status	Skor Angka / Number Score
CO	Hijau / Green	2.935
PM 2.5	Hijau / Green	44
PM 10	Hijau / Green	6
TSP	Hijau / Green	136
NO ₂	Hijau / Green	45
SO ₂	Hijau / Green	228
O ₃	Hijau / Green	28
Suhu (°C) / Temperature (°C)		32° C
Kecepatan Angin / Wind Speed		5 m/d

Kualitas Udara *Real Time* di Area Terminal Operasi Pelabuhan Tanjung Priok

Kategori / Category	Status Warna / Color Status	Skor Angka / Number Score			
		Lini 2	TO1	TO2	TO3
CO	Hijau / Green	4.297	1.044	8.565	7.575
PM 2,5	Hijau / Green	26	53	47	16
PM 10	Hijau / Green	121	139	127	114
TSP	Hijau / Green	66	103	219	177
NO ₂	Hijau / Green	86	35	65	35
SO ₂	Hijau / Green	138	22	61	121
O ₃	Hijau / Green	106	109	69	48
Suhu (°C) / Temperature (°C)		32° C			
Kecepatan Angin / Wind Speed		5 m/d			

Berdasarkan tabel di atas, kualitas udara di area Kantor Pusat IPC dan Area Terminal Operasi Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2020 termasuk dalam kategori "Baik".

Real Time Air Quality at Tanjung Priok Port Operation Terminal Area

Based on the table above, air quality in the area of the IPC Head Office and the Tanjung Priok Port Operation Terminal Area in 2020 is included in the "Good" category.

Perbaikan Kualitas Badan Air (Air Laut/Air Sungai)

Upaya Perseroan dalam memperbaiki kualitas badan air melalui pemantauan dan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan toilet, *pantry*, dan kegiatan operasional di terminal pelabuhan berdampak pada hasil *monitoring* kualitas badan air (air laut/air sungai) tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Water Body (Sea Water/River Water) Quality Improvement

The Company's efforts to improve the quality of water bodies through monitoring and management of liquid waste generated from activities toilets, pantries, and operational activities at port terminals have an impact on the results of monitoring the quality of water bodies (sea water/river water) in 2020 which has increased from 2019, with the following description:

Hasil Pemantauan Kualitas Badan Air (Air Laut/Air Sungai) IPC Tahun 2019 – 2020

Uraian / Description	2020				2019			
	Memenuhi Baku Mutu / Meet Quality Standards		Tidak Memenuhi Baku Mutu / Does Not Meet Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu / Meet Quality Standards		Tidak Memenuhi Baku Mutu / Does Not Meet Quality Standards	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Jumlah / Total	91	92	0	0	85	87	4	2
Persentase / Percentage	100%	100%	0%	0%	96%	98%	4%	2%

IPC Monitoring Results on Water Body (Sea Water/River Water) Quality in 2019 - 2020

Berdasarkan tabel di atas, kualitas badan air Perseroan, baik air sungai di Cabang Pelabuhan Jambi, Palembang, dan Pontianak maupun air laut di 9 (sembilan) cabang pelabuhan Perseroan lainnya, selama tahun 2020 telah 100 persen memenuhi baku mutu parameter Debu dan Karbon Monoksida. Hasil tersebut mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2019, di mana terdapat badan air di sekitar operasional IPC yang kualitasnya masih tidak memenuhi baku mutu, tepatnya sebesar 4 persen pada Semester I 2019 dan 2 persen pada Semester II 2019.

Based on the table above, the quality of the Company's water bodies, both river water in Jambi, Palembang and Pontianak Port Branches as well as seawater in 9 (nine) other port branches of the Company, during 2020 has 100 percent met the quality standards for Dust and Carbon Monoxide parameters. These results have improved compared to 2019, where there were water bodies around IPC operations whose quality still did not meet quality standards, to be precise by 4 percent in Semester I 2019 and 2 percent in Semester II 2019.



Realisasi *Green Port* Tahun 2020

Sehubungan penyesuaian terhadap situasi Pandemi Covid-19, RKM Implementasi ISO 14001:2015 di IPC Group mengalami perubahan waktu dan ruang lingkup. Semula merupakan RKM Strategis *single year* (2020) menjadi *multi years* (2020-2022). Realisasi RKM tersebut meliputi pembuatan *project charter*, permohonan penawaran (proposal teknis & biaya) kepada beberapa vendor konsultan, dan presentasi penawaran dari para vendor terkait. Angka capaian/realisasi RKM strategis tersebut adalah 30,55 persen.

RKM Pendampingan Perbaikan Rapor Merah PROPER KLHK dilakukan untuk Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Teluk Bayur. Realisasi RKM ini meliputi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan *virtual clinic* pendampingan perbaikan rapor. Angka capaian/realisasi RKM ini adalah 100 persen.

Sertifikasi ISO 14001:2015 di Grup IPC

Terdapat tujuh (7) unit kerja yang telah melaksanakan Sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan di Grup IPC, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk ruang lingkup *Management of Head Office and Facilities*.
- 2) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk ruang lingkup Penyediaan Layanan Pelabuhan untuk Gedung Cabang Tanjung Priok, Terminal Penumpang, dan *Reception Facilities*.
- 3) PT Pelabuhan Tanjung Priok area Tanjung Priok untuk ruang lingkup Terminal Operasi III, *Container Yard, Technical Support, Customer Service and Office Management*.
- 4) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk ruang lingkup *Provision of Project Management for Port Development Work*.
- 5) PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk ruang lingkup *Office Based Activity of Supporting Pilotage and Towage*.
- 6) PT Pengerukan Indonesia untuk ruang lingkup *Provision of Dredging and Reclamation Services*.
- 7) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk untuk ruang lingkup Pelayanan Jasa Bongkar Muat dan Penumpukan di Lapangan Terminal Domestik, Lapangan Terminal Internasional, dan Perkantoran.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) KLHK

Perseroan melakukan *self-assessment* PROPER, dengan kandidat PROPER yaitu Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Teluk Bayur. Adapun hasil penilaian dari *self-assessment* PROPER adalah **Rapor Merah**.

Realization of *Green Port* in 2020

In adjustment to the Covid-19 Pandemic situation, the RKM for the implementation of ISO 14001:2015 at IPC Group has changed in terms of time and scope. It changed from a single year Strategic RKM (2020) to multi years (2020-2022). The realization of the RKM includes making project charters, requesting proposals (technical & cost proposals) from several consultant vendors, and offering presentations from related vendors. The strategic RKM achievement/realization reached 30.55 percent.

The RKM for Supervision of PROPER KLHK Red Report Improvements was carried out for Tanjung Priok and Teluk Bayur Port Branches. The realization of this RKM includes the opening, implementation, and closing of a virtual clinic to assist in improving report cards. The RKM achievement/realization rate was 100 percent.

ISO 14001:2015 Certification at IPC Group

There are seven (7) work units that have carried out ISO 14001:2015 Certification on the Environmental Management System in the IPC Group, with the following descriptions:

- 1) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office for the scope of Management of Head Office and Facilities;
- 2) Tanjung Priok Port Branch for the scope of Provision of Port Services for Tanjung Priok Branch Building, Passenger Terminal and Reception Facilities;
- 3) PT Pelabuhan Tanjung Priok for the scope of Operation Terminal III, Container Yard, Technical Support, Customer Service and Office Management;
- 4) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for the scope of Provision of Project Development for Port Development Work;
- 5) PT Jasa Armada Indonesia for the scope of Office Based Activity of Supporting Pilotage and Towage;
- 6) PT Pengerukan Indonesia for the scope of Provision of Dredging and Reclamation Services;
- 7) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for the scope of Loading and Stacking Services at Domestic Terminal Fields, International Terminal Fields and Offices.

Company Performance Rating Assessment Program (PROPER) KLHK

From July 2019 to June 2020, the Company conducted PROPER self-assessment for Tanjung Priok and Teluk Bayur Port Branches as the PROPER candidates. The result of this PROPER self-assessment was **Red Report Card**.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT

IPC menyadari bahwa keberadaan Perseroan di tengah lingkungan masyarakat berpotensi menimbulkan risiko konflik sosial terhadap masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional. Upaya tersebut dicerminkan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasi IPC.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait pengembangan masyarakat/komunitas, Perseroan merujuk pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan untuk pelaksanaan CSR;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara untuk pelaksanaan PKBL;
3. Surat Keputusan Direksi IPC No. MB.01/2/12/1/LMS/UT/PI.II-2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan PT Pelabuhan IndonesiaII (Persero).

ROADMAP CSR

Sebagai salah satu komitmen untuk menjalankan bisnis berkelanjutan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menyusun *Roadmap Corporate Social Responsibility* (CSR). *Roadmap* CSR ini menjadi panduan bagi Insan IPC dalam melaksanakan kegiatan CSR yang meliputi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Salah satu tujuan disusunnya *Roadmap* CSR adalah untuk menentukan strategi dari setiap kegiatan atau program CSR IPC yang akan dilaksanakan. Tentunya, dibutuhkan program yang efektif dan terintegrasi dengan visi, misi, *value*, serta strategi bisnis Perusahaan. Dengan demikian, strategi dan program CSR ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE COMMUNITY

IPC realizes that the Company's presence in the community has the potential to create the risk of social conflict for the local community. Therefore, the Company always strives to maintain harmony with the communities around the operational location. This effort is reflected in the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) which is focused on empowering communities around the IPC operation area.

COMMITMENT AND POLICY ON COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITY

In carrying out social responsibility related to community/community development, the Company refers to the following provisions:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies issued in Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Environmental Social Responsibility for CSR implementation;
2. Regulation of the Minister for State Owned Enterprises Number PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister for State Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Environmental Development Program for State-Owned Enterprises for the implementation of PKBL;
3. Decree of IPC Board of Directors No. MB.01/2/12/1/LMS/UT/PI.II-2019 dated December 02, 2019 concerning Guidelines for Implementing Partnership Programs, Community Development Programs, and Corporate Social Responsibility (CSR) Programs within PT Pelabuhan IndonesiaII (Persero).

CSR ROADMAP

As one of the commitments to run a sustainable business, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has compiled a Corporate Social Responsibility (CSR) Roadmap. This CSR Roadmap serves as a guide for IPC Individuals in carrying out CSR activities which include the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities.

One of the goals of preparing the CSR Roadmap is to determine the strategy of each IPC CSR activity or program that will be implemented. Of course, an effective program that is integrated with the Company's vision, mission, values and business strategy is needed. Thus, this CSR strategy and program is an integral part of IPC's business strategy. The



dari strategi bisnis IPC. Tahapan dalam *roadmap* CSR ini dikembangkan dengan memperhatikan tema tahunan *Corporate Roadmap* IPC 2016-2020.

stages in this CSR roadmap are developed with due regard to the annual theme of the 2016-2020 IPC Corporate Roadmap.

Tema Roadmap IPC / IPC Roadmap Theme

Tema / Theme	: "ALIGNING SUSTAINABLE PORT"
Sub Tema / Sub-Theme	Menyelaraskan Strategi Menuju Pelabuhan Berkelanjutan / Aligning Strategy Toward Sustainable Ports

Roadmap CSR ini juga disusun berdasarkan ISO 26000 : *Guidance on Social Responsibility* yang secara komprehensif memiliki tujuh *core subject* sebagai acuan dalam melakukan CSR. Pada tahap awal penyusunan dokumen *Roadmap* CSR ini dilakukan asesmen atas kegiatan CSR saat ini berbasis tujuh *core subject* ISO 26000. Hasil asesmen tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan *Roadmap* CSR yang berisi berbagai inisiatif untuk menyinergikan kekuatan Perusahaan dengan *stakeholder* terkait.

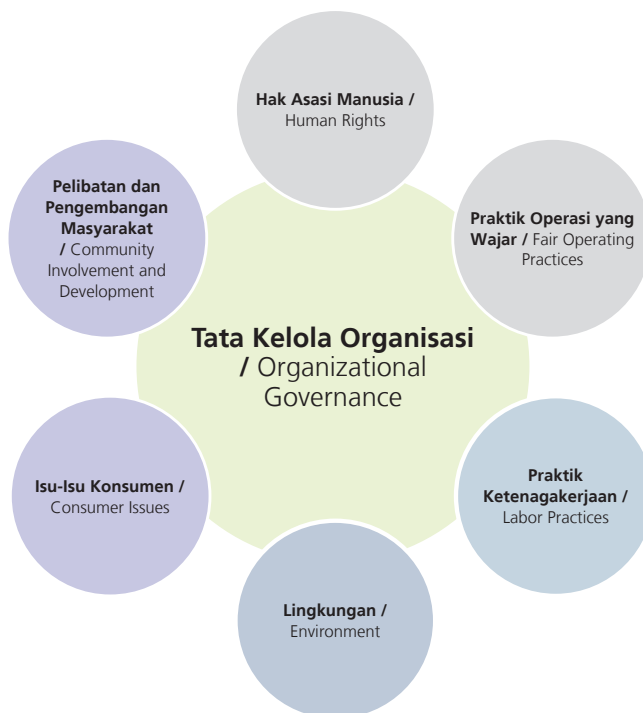
This CSR roadmap is also prepared based on ISO 26000: Guidance on Social Responsibility which comprehensively has seven core subjects as a reference in carrying out CSR. In the early stages of compiling the CSR Roadmap document, an assessment was carried out on current CSR activities based on the seven core subjects of ISO 26000. The results of the assessment serve as a reference in the preparation of the CSR Roadmap which contains various initiatives to synergize the strength of the Company with related stakeholders.

Dengan diberlakukannya *Roadmap* CSR Nomor MB.02/24/12/1/LMS/UT/PI.II-18 tanggal 24 Desember 2018, diharapkan kinerja keberlanjutan dapat tercapai dengan baik dan terjalin sinergi dari berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja Perusahaan. Dengan demikian kinerja IPC secara keseluruhan baik di kantor pusat, kantor cabang pelabuhan dan anak perusahaan juga dapat meningkat dan lebih *sustainable*. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan kontribusi IPC bagi seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal juga terus meningkat.

With the enactment of the CSR Roadmap Number MB.02/24/12/1/LMS/UT/PI.II-18 dated December 24, 2018, it is hoped that sustainability performance can be achieved well and there will be synergy from various parties in improving the Company's performance. Thus, the overall performance of IPC at the head office, port branch offices and subsidiaries can also improve and be more sustainable. In line with this, it is expected that IPC's contribution to all internal and external stakeholders will also continue to increase.

Holistic Integrated Approach (ISO 26000: Guidance on Social Responsibility)

Holistic Integrated Approach (ISO 26000: Guidance on Social Responsibility)



Dalam menjalankan perannya, organisasi seharusnya bekerja berdasarkan standar pedoman perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. ISO 26000 menetapkan tujuh subyek inti (*core subject*) yang penting untuk diperhatikan dan menjadi bagian integral dalam perencanaan aktivitas tanggung jawab sosial organisasi. Berdasarkan hal tersebut IPC menyusun *Roadmap* kebijakan implementasi CSR yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 yang sejalan dengan *Roadmap Corporate*.

In carrying out its role, the organization should work based on standards of behavior in accordance with the principles of social responsibility. ISO 26000 defines seven core subjects that are important to be considered and become an integral part in planning social responsibility activity of the organization. Based on this, IPC prepared a CSR implementation policy Roadmap starting in 2018 to 2020 which is in line with the Corporate Roadmap.

Roadmap CSR IPC Tahun 2018 - 2020

IPC CSR Roadmap in 2018 - 2020



Tahun 2018 : Synergize	Year 2018 : Synergize
<ul style="list-style-type: none"> Mendesain program CSR dan PKBL Yang Mendukung Strategi Bisnis berbasis ISO 26000 Kelengkapan kebijakan dan infrastruktur CSR Memotret dan mengevaluasi pelaksanaan CSR dan PKBL Mendesain Komunikasi Perusahaan tentang CSR dan PKBL Integrasi CSR lintas unit kerja di Pusat dan Cabang Penyiapan SDM pelaksana program 	<ul style="list-style-type: none"> Designing CSR and PKBL programs that Support a Business Strategy based on ISO 26000 Complete CSR policies and infrastructure Photographing and evaluating the implementation of CSR and PKBL Designing Corporate Communications about CSR and PKBL Integration of CSR across work units at the Headquarters and Branches Preparation of HR to implement the program
Tahun 2019 : Energize	Year 2019 : Energize
<ul style="list-style-type: none"> Penumbuhan kesadaran dan inisiatif sinergi CSR di sepanjang rantai/ rentang kendali bisnis IPC Pengorganisasian masyarakat untuk melaksanakan sinergi CSR Pelaksanaan program-program CSR kolaboratif yang memberikan manfaat bersama (<i>shared value</i>) Pelaksanaan program-program CSR dan PKBL di lokasi proyek-proyek strategis IPC Meningkatkan <i>branding</i> IPC sebagai perusahaan yang ramah lingkungan Membuat <i>internal award</i> di IPC Group (Cabang dan Anak Perusahaan) 	<ul style="list-style-type: none"> Awareness raising and CSR synergy initiatives along the IPC business chain /span of control Community organizing to implement CSR synergies Implementation of collaborative CSR programs that provide shared values Implementation of CSR and PKBL programs at IPC strategic project locations Increase IPC branding as an environmentally friendly company Making internal awards at the IPC Group (Branches and Subsidiaries)
Tahun 2020 : Sustainable	Year 2020 : Sustainable
<ul style="list-style-type: none"> Tumbuh inisiatif pelaksanaan CSR secara mandiri oleh <i>stakeholder</i> Integrasi pelaksanaan CSR di seluruh rantai bisnis IPC Aktif di forum-forum internasional dalam pengembangan bisnis berkelanjutan Pelaksanaan CSR IPC menjadi rujukan bagi perusahaan di tingkat nasional dan internasional Memiliki program CSR dan PKBL yang menjadi simbol IPC Audit CSR berdasarkan ISO 26000 	<ul style="list-style-type: none"> Growing CSR implementation initiatives independently by stakeholders Integration of CSR implementation across IPC business chains Active in international forums in sustainable business development IPC CSR implementation becomes a reference for companies at the national and international levels Has a CSR and PKBL program which is a symbol of IPC CSR audits based on ISO 26000



IPC memiliki inisiatif *Green Port* sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap bisnis berkelanjutan. Inisiatif ini terus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja terkait di IPC. Inisiatif ini juga akan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, negara dan lingkungan jika dilakukan secara partisipatif bersama *stakeholder*.

IPC has the Green Port initiative as a form of commitment to support sustainable business. This initiative is continuously carried out comprehensively by all related work units in IPC. This initiative will also provide additional value for the Company, the country, and the environment if it is carried out in a participatory manner with the stakeholders.

IPC mendapatkan manfaat profit dan reputasi yang optimal, *stakeholder (people)* akan mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih baik (*profit*), ekologi (*planet*) lebih terjaga dan negara merasakan kontribusi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (3P).

IPC gets optimal profit and reputation benefits, the stakeholders (people) will get better economic benefits (profit), the ecology (planet) will be preserved, and the state benefits from the economic contribution and the creation of community work fields (3P).

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM PKBL DAN CSR

PKBL AND CSR PROGRAM MANAGEMENT STRUCTURE

Struktur pengelolaan PKBL dan CSR di lingkungan IPC berada di bawah Divisi Sekretariat Perusahaan. Dengan demikian, secara teknis pengelolaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berada dalam pengawasan Sekretariat Perusahaan. Dalam pelaksanaan PKBL dan CSR terdapat pendelegasian kewenangan kepada Direktur Sumber Daya Manusia hingga batasan tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Adapun struktur organisasi pengelola program PKBL dan CSR IPC adalah sebagai berikut.

The management structure for PKBL and CSR in the IPC environment is under the Corporate Secretary Division. Thus, technically the management of corporate social responsibility activities is under the supervision of the Corporate Secretary. In the implementation of PKBL and CSR, there is a delegation of authority to the Director of Human Resources to a certain extent as outlined in the Minutes of the Agreement of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The organizational structure for managing the IPC PKBL and CSR programs is as follows.



Adapun jumlah pihak pengelola pelaksanaan Program PKBL dan CSR di Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The number of parties managing the implementation of the PKBL and CSR programs in the Company as of December 31, 2020 are as follows:

Jumlah Pengelola Pelaksanaan Program PKBL Dan CSR di IPC Tahun 2020

Number of PKBL and CSR Implementation Program Manager at IPC in 2020

Wilayah Operasional / Operational Area	Tahun 2020 / Year 2020
Kantor Pusat / Head Office	11
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	6
Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch	4
Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch	3
Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch	3
Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch	3
Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch	3
Jumlah / Total	57

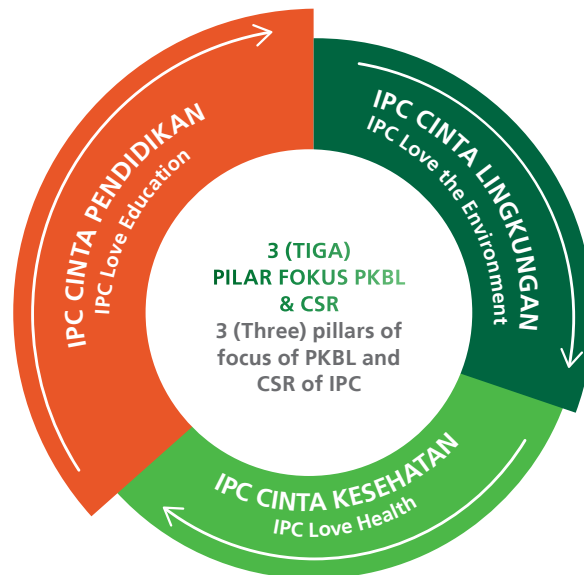
TARGET KEGIATAN PKBL DAN CSR

Pada tahun 2020, fokus kegiatan PKBL dan CSR IPC mengacu pada “3P”, yaitu *Planet*, *People* dan *Profit* yang diwujudkan dalam tiga program utama, yaitu IPC Cinta Pendidikan, IPC Cinta Lingkungan dan IPC Cinta Kesehatan.

PKBL AND CSR ACTIVITY TARGET

In 2020, the focus of IPC PKBL and CSR activities refers to “3P”, namely Planet, People and Profit, which are manifested in three main programs, namely IPC Love Education, IPC Love the Environment and IPC Love Health.

3 (Tiga) pilar fokus PKBL dan CSR IPC
3 (Three) pillars of focus of PKBL and CSR of IPC



PELAKSANAAN KEGIATAN PKBL DAN CSR TAHUN 2020

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Untuk menunjang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan IPC terus melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan PKBL & CSR terutama dalam bidang operasional PKBL sendiri, sejak tahun 2018 telah dikembangkan aplikasi

PKBL AND CSR ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2020

Partnership and Community Development Program

To support the Partnership Program and Community Development Program IPC continues to optimize the management of PKBL & CSR, especially in the field of PKBL operations itself, since 2018 a Website-based “Go Live”



PKBL & CSR “Go Live” berbasis *Web* untuk mempercepat penyaluran bantuan. Aplikasi PKBL milik Perseroan ini telah menjadi *role model* bagi BUMN lain untuk menjalankan PKBL di perusahaannya.

IPC selaku perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan memiliki 12 (dua belas) cabang pelabuhan, yang mana masing-masing cabang pelabuhan memiliki perwakilan yang bertanggung jawab pada pengelolaan PKBL. Untuk menjamin pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan perusahaan, IPC telah melakukan *training* CSR berbasis ISO 26000 kepada seluruh pengelola PKBL di lingkungan Perseroan.

Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan

Program Kemitraan IPC mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Aturan tersebut menyebutkan, Program Kemitraan BUMN dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN

Untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam aturan tersebut, IPC melakukan seleksi ketat dan memberikan kesempatan pada pengusaha - pengusaha kecil yang memiliki produk dengan daya saing tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pemasaran, SDM, manajemen, permodalan dan teknologi. Terhadap para pengusaha yang telah terpilih untuk menjadi Mitra Binaan, IPC memberikan bantuan dengan beberapa metode berikut:

1. Pemberian pinjaman modal kerja.
2. Pemberian wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajerial.
3. Keikutsertaan Mitra Binaan pada beragam pameran dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan pemasaran produk, investasi maupun kerja sama bisnis.
4. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk mereka menjadi lebih kompetitif.

Hingga akhir 2020, jumlah mitra binaan mencapai 3.751 usaha kecil yang tersebar di seluruh sektor usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PKBL & CSR application has been developed to speed up the distribution of aid. The PKBL application owned by the Company has become a role model for other SOEs to run PKBL in their companies.

IPC, as a state-owned company engaged in port services, has 12 (twelve) port branches, of which each port branch has a representative who is responsible for PKBL management. To ensure the management of the company's Partnership Program and Community Development Program, IPC has conducted ISO 26000-based CSR training for all PKBL managers within the Company.

Partnership Program Activity Implementation

The IPC Partnership Program refers to the Regulation of the Minister of BUMN PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises. The regulation states, the BUMN Partnership Program is carried out to increase the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of BUMN funds.

To fulfill the mandate contained in these regulations, IPC conducts strict selection and provides opportunities for small entrepreneurs who have products with high competitiveness but have limitations in marketing, human resources, management, capital and technology. For entrepreneurs who have been selected to become Fostered Partners, IPC provides assistance in the following methods:

1. Providing working capital loans.
2. Providing insight and skills to develop business in the form of managerial education and training.
3. Fostered Partners' participation in various exhibitions in order to open and develop product marketing networks, investment and business cooperation.
4. Through the assistance provided, it is hoped that all Fostered Partners can develop more, become independent and discover potentials that make their products more competitive.

By the end of 2020, the number of fostered partners reached 3,751 small enterprises in all business sectors as shown in the following table:

Jumlah Mitra Binaan Tahun 2019 – 2020

Total Fostered Partners in 2019 - 2020

No.	Sektor Penyaluran / Distribution Sector	2020	2019
1.	Sektor Industri / Industrial Sector	799	813
2.	Sektor Perdagangan / Trade Sector	1.538	1.562
3.	Sektor Pertanian / Agriculture Sector	84	84
4.	Sektor Peternakan / Livestock Sector	80	81
5.	Sektor Perkebunan / Plantation Sector	50	50
6.	Sektor Perikanan / Fisheries Sector	116	120
7.	Sektor Jasa / Service Sector	552	561
8.	Sektor Lainnya / Other Sectors	532	543
Jumlah Mitra Binaan / Total Fostered Partners		3.751	3.814

Dibandingkan dengan jumlah mitra binaan di tahun 2019, terdapat penurunan mitra binaan yang telah selesai dibina sebanyak 63 (enam puluh tiga), dikarenakan usaha yang dijalankan oleh mitra binaan telah mengalami peningkatan skala usaha.

Compared with the number of fostered partners in 2019, there was a decrease of 63 (sixty-three) partners who have completed the service as the efforts carried out by fostered partners have experienced an increase in business scale.

Pelaksanaan Kegiatan Program Bina Lingkungan

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar IPC, dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Implementation of Community Development Program Activities

The Community Development Program target is surrounding communities through assistance to empower the communities. Thus, we expect that harmonious and mutual relations can be established, through the creation of a favorable climate for continuous business activities and the safeguarding of the Company's assets.

Lingkup kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan dalam program Bina Lingkungan, sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The scope of Corporate Social Responsibility activities carried out in the Community Development program, in line with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2017 on the Third Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program of State Owned Enterprises.

Ada tujuh bidang yang menjadi sasaran Program Bina Lingkungan, yaitu:

There are seven areas targeted by the program:

1. Bantuan kepada korban bencana alam dan non alam merupakan bentuk kepedulian Perusahaan terhadap terdampak bencana yang terjadi. Bantuan tersebut terdiri dari:
 - Bantuan Bencana Non Alam berupa Covid-19;
 - Bantuan Bencana Banjir Kabupaten Lebak;
 - Bantuan Bencana Banjir Kecamatan Ciwandan;
 - Bantuan Tanggap Bencana Banjir Jabodetabek;

1. Donation to victims of both natural and non-natural disasters is a form of the Company's concern for the affected people, which consists of:
 - Non-Natural Disaster Relief for Covid-19;
 - Flood Relief for Lebak Regency;
 - Flood Relief for Ciwandan Subdistrict;
 - Flood Emergency Response Relief for Jabodetabek area;



2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
 - *IPC Champion Scholarship*
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat prasejahtera untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak, bantuan ini meliputi pembiayaan terhadap biaya sekolah.
 - Bantuan Biaya Pendidikan
Program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga siswa/i yang kurang mampu dalam membiayai biaya pendidikan, dengan adanya bantuan ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.
 - Pendidikan Gratis dan berkualitas kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara melalui program SD Juara Cinta IPC. Bentuk kepedulian Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra/i yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta Utara mendapatkan pengetahuan.
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
Bentuk kepedulian Perusahaan ini bertujuan untuk menjadikan fasilitas pendidikan yang layak dan nyaman, sehingga anak-anak senang untuk datang ke sekolah.
 - Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat di Jakarta Utara yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kewirausahaan sehingga dapat menekan pertumbuhan pengguna narkotika di Jakarta Utara.
 - Pelatihan Tata Rias
Pelatihan diberikan kepada perempuan yang di sekitar Jakarta Utara, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
 - *IPC Peduli Mata Anak*
Program IPC Peduli Mata Anak diikutsertakan oleh 5.000 anak, dengan memberikan layanan pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan mata yang banyak dialami anak-anak di sekitar perusahaan.
 - *New Normal Kit*
Bantuan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para sopir truk dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19 di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Bantuan yang diberikan berupa *tumbler, hand sanitizer, masker* dan tisu basah.
2. Education and/or training assistance.
 - *IPC Champion Scholarship*
This program aims to provide opportunities for underprivileged people to continue to get a decent education, this assistance includes funding for school fees.
 - *Education Fee Assistance*
This program aims to ease the burden on the families of students and underprivileged students to pay for education costs. With this assistance, it is hoped that there will be no more children who drop out of school.
 - *Free and quality education to people in North Jakarta area through SD Juara Cinta IPC program.* This form of Company's awareness aims to provide opportunities for children coming from underprivileged families in North Jakarta to gain knowledge.
 - *New Classrooms Construction*
This form of concern from the Company aims to make education facilities appropriate and comfortable, so that children are happy to come to school.
 - *Entrepreneurship Training*
In collaboration with the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia, this training is provided to people in North Jakarta, which aims to provide knowledge to the public about entrepreneurship so that it can suppress the growth of narcotics users in North Jakarta.
 - *Makeup Training*
This training is given to women around North Jakarta, with the hope of improving the community's economy.
 3. Health Improvement Supports
 - *IPC Cares for Children's Eyes (IPC Peduli Mata Anak).* IPC Peduli Mata Anak Program was attended by 5,000 children, in which eye examination and eyewear distribution service were provided. This program is expected to help overcome the eye problems that are experienced by many children around the Company.
 - *New Normal Kit*
This assistance aims to provide comfort and safety for truck drivers and Loading and Unloading Workers (TKBM) to minimize the risk of Covid-19 transmission in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) environment. The assistance provided was in the form of tumblers, hand sanitizers, masks, and wet wipes.

- IPC Sunatan Massal
Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meminimalisir penyakit infeksi saluran kemih.
- 4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
 - Pembangunan MCK
Pembangunan sarana umum berupa MCK dilakukan di Kota Palembang yang digunakan sebagai fasilitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan tidak membuang kotoran sembarangan.
 - Pembangunan Jembatan Gantung
Jembatan Gantung sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menyeberangi sungai, dengan adanya bantuan berupa jembatan gantung masyarakat dapat mempersingkat jarak tempuh untuk mengangkut dagangan dan sebagai prasarana transportasi darat.
 - Taman Baca IPC
Bantuan bertujuan membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat.
 - Perbaikan Drainase Lingkungan
Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Dengan terhindarnya genangan air pada lingkungan perusahaan diharapkan meminimalisir terjadinya kemacetan.
- 5. Bantuan sarana ibadah.
Merupakan bentuk dukungan Perusahaan terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, guna untuk memberikan tempat ibadah yang layak bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan warga negara, sehingga masyarakat lebih agamis yang berdampak pada lingkungan kerja Perseroan terbebas dari kriminalisasi.
- 6. Bantuan pelestarian alam.
 - Padat Karya Tunai
Beragam kegiatan dilaksanakan, mulai dari pembersihan sungai, penanaman pohon mangrove, pembersihan sampah di pesisir pantai dan pemberian peralatan kebersihan beserta tempat sampah kepada masyarakat di lingkungan perusahaan.
 - Penanaman Pohon Mangrove
Program Penanaman Pohon Mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan dan tumbuhan Mangrove ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki akar kokoh yang dapat meredam gelombang besar termasuk tsunami.
- Mass Circumcision with IPC
This assistance aims to assist the community in minimizing urinary tract infections.
- 4. Public Facilities and Infrastructures Development Supports
 - Public Bathrooms (MCK) Construction
The construction of public facilities in the form of public bathrooms (MCK) is carried out in Palembang City which is used as community facilities. This activity aims to provide education to the public to live healthily by not littering.
 - Suspension Bridge Construction
Suspension bridges are very much needed by the community to cross the river, with the assistance of a suspension bridge, the community can shorten the distance traveled to transport merchandise and as land transportation infrastructure.
 - IPC Public Library
This form of assistance aims to arouse and increase people's interest in reading to create a smart community who always follows the development of science and technology and becomes a forum for community learning activities.
 - Environmental Drainage Repairment
Environmentally Friendly Drainage System is defined as the discharge of surface water with the aim of preventing inundation, maintaining and lowering the water level so that stagnation of water can be avoided. By avoiding standing water in the company's environment, we hope to minimize congestion.
- 5. Praying facilities support.
Is a form of Company's support for the construction and improvement of religious facilities, in order to provide a suitable place of worship for followers of religion to carry out worship in accordance with their beliefs. Hence, the community can be more religious and can have an impact on the Company's work environment, to be free from criminalization.
- 6. Nature conservation assistance.
 - Intensive Works
Various activities were carried out, starting from cleaning up the river, planting mangrove trees, cleaning up trash on the coast and providing cleaning equipment and trash bins to the community in the company.
 - Mangrove Tree Planting
Mangrove Tree Planting Program to protect the coastline from abrasion or erosion and this Mangrove plant is a type of plant that has strong roots that can dampen large waves including tsunamis.



7. Bantuan sosial masyarakat pengentasan kemiskinan.
 - Pembagian Sembako Gratis Ramadhan
Sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat, IPC melakukan pembagian Sembako Gratis di wilayah Perusahaan dengan tujuan agar masyarakat dapat merayakan bulan Ramadhan dengan menyediakan sembako gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - Pembagian Hewan Kurban
Untuk merayakan hari Idul Adha, IPC memiliki program pembagian hewan kurban untuk memeriahkan perayaan hari besar Islam.
 - *Make Over* Rumah Pahlawan
Bantuan diberikan kepada Pahlawan masyarakat berupa perbaikan tempat tinggal sehingga menjadi rumah yang memenuhi setandar kesehatan, keselamatan dan sosial.

7. Social assistance for poverty alleviation.
 - Free Distribution of Groceries for Ramadan
As a form of Company's concern for the community, IPC is distributing Free Groceries within the Company's area with the aim that the surrounding community can celebrate the month of Ramadan by providing free food for the poor;
 - Distribution of Sacrificial Animals
To celebrate Eid al-Adha, IPC has a qurban animal distribution program to enliven the Islamic holiday celebration.
 - Heroes' Houses Make Over
This assistance is given to community Heroes in the form of housing improvements so that they become houses that meet health, safety and social standards.

Program CSR

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* IPC merupakan kegiatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan kegiatan ini berada dalam lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, terutama merupakan bentuk kepedulian IPC terhadap lingkungan sosial, sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Program ini berbeda dengan pelaksanaan PKBL seperti telah diuraikan di atas, karena PKBL direalisasikan dalam kapasitas IPC sebagai BUMN yang kegiatannya telah terikat dengan *framework* yang dibuat oleh pemerintah.

CSR Program

IPC's Corporate Social Responsibility (CSR) programs focus on community empowerment. The management of these activities is held by the Corporate Secretary Division. The purpose of these activities is primarily as a form of IPC's concern for the social environment, as well as contributing to sustainable development. These programs are different from the implementation of PKBL as described above, as PKBL is realized in the capacity of IPC as an SOE, where the activities are tied to the government framework.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan Program CSR selama tahun 2020 di sekitar wilayah operasional IPC, antara lain:

In 2020, the Company conducted various CSR Programs in IPC's operational areas, such as:

1. Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Kurang Mampu
 - Program Kerja Sama IPC dengan BNN Jakarta Utara terkait Pelatihan Anti Narkoba;
 - Kegiatan Pelatihan Berdagang, Memasak, dan Menjahit.
2. Pembangunan/Pengembangan Lingkungan, Fasilitas serta Pelestarian Alam
 - IPC Cinta Lingkungan;
 - IPC Peduli Sampah.
3. Pendidikan/Pelatihan, Kegiatan Olahraga, Kesenian, dan Budaya
 - Program Kerja Sama terkait Pendidikan, Olahraga, Seni, dan Budaya IPC dengan SD Juara Cinta IPC di Jakarta Utara;
 - *IPC Champion Scholarship*.

1. Empowerment of Underprivileged Community Development
 - IPC Collaboration Program with BNN of North Jakarta on Anti-Drugs Training;
 - Trading, Cooking, and Sewing Training.
2. Environmental, Facilities and Nature Conservation Development
 - IPC Loves Environment;
 - IPC Cares for Waste.
3. Education/Training, Sports Activities, Arts, and Culture
 - Collaboration Program in Education, Sports, Arts, and Culture between IPC and SD Juara Cinta IPC in North Jakarta;
 - *IPC Champion Scholarship*.

4. Kegiatan Sosial Masyarakat & Keagamaan

- IPC Cinta Ramadhan;
- IPC Berbagi Qurban;
- IPC Berbagi Sembako Gratis.

5. Peningkatan Kesehatan

- IPC Peduli Covid-19;
- IPC *Health Care*;
- IPC Sunatan Masal;
- Pembagian *New Normal Kit*;
- IPC Cinta Mata Anak.

6. Promosi, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemasaran Usaha Kecil Menengah

- Pelatihan Kewirausahaan untuk Warga Jakarta Utara.

7. Program CSR Lainnya.

IPC juga melaksanakan PKBL dan CSR dalam rangka menyejahterakan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perseroan.

- Pelabuhan Kalibaru
Pembangunan Terminal Kalibaru yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional;
- Pelabuhan Kijing/Mempawah
Terminal Kijing sebagai pengembangan Cabang Pelabuhan Pontianak, dimana adanya keterbatasan area pengembangan di Kota Pontianak, keterbatasan kedalaman sungai dan tingkat sedimentasi yang tinggi serta untuk mendukung program Pemerintah "Tol Laut" untuk meningkatkan konektivitas laut guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Sumber Daya Alam;
- Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut
Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways*/CBL sebagai alternatif moda transportasi yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus logistik jalur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan atau sebaliknya.

Perseroan juga melaksanakan Program CSR yang dilaksanakan dalam praktik bisnis Perusahaan untuk meminimalisir penggunaan air bersih dan pembersihan sampah di wilayah perairan.

4. Community & Religious Social Activities

- IPC Loves Ramadhan;
- IPC Sharing Qurban;
- IPC Sharing Food Parcels.

5. Health Improvement

- IPC Cares for Covid-19;
- IPC Health Care;
- IPC Mass Circumcision;
- Distribution of New Normal Kit;
- IPC Cares for Children's Eyes.

6. Promotion, Development, Assistance and Marketing of Small and Medium Enterprises

- Entrepreneurship Training for Residents of North Jakarta.

7. Other CSR Programs.

IPC also implements PKBL and CSR to improve the welfare and help communities affected by the Company's strategic projects.

- Kalibaru Port
Construction of Kalibaru Terminal located in Tanjung Priok, North Jakarta. This port is planned to increase the capacity of Tanjung Priok Port Branch to support national logistics distribution;
- Kijing/Mempawah Port
Kijing Terminal as the development of Pontianak Port Branch, where there are limited development areas in Pontianak, limited river depth and high sedimentation levels and to support the government's "Sea Toll" program to improve sea connectivity to reduce logistics costs and improve the competitiveness of natural resource products;
- Construction of Cikarang Bekasi Laut Terminal and Inland Waterways;
Construction of Terminals and Inland Waterways/CBL as an alternative mode of transportation which is expected to reduce the density of land route logistics flows from Cikarang and Karawang industrial areas to Tanjung Priok Port and or vice versa.

The Company also implements a CSR Program in the Company's business practices to minimize the use of clean water and clean up waste in water areas.



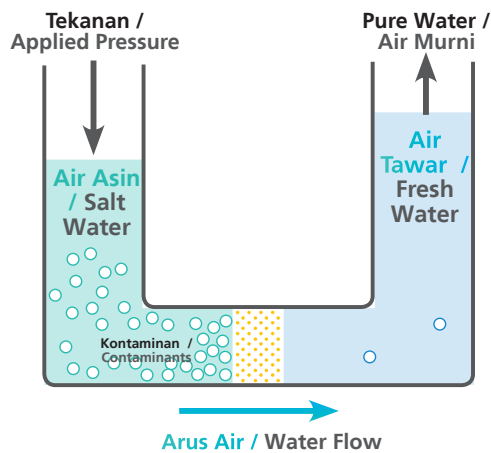
- Kapal dan Mobil Pembersih Sampah**
 Sebagai komitmen kepedulian Perusahaan terhadap pencemaran lingkungan, IPC mengoperasikan kapal sampah dan penyapu jalan untuk pelayanan menjalankan Bisnis Kepelabuhanan.



- Garbage Cleaning Ship and Vehicles**
 As a commitment of the Company's concern for environmental pollution, IPC operates garbage ship and road sweeper for the Port Business services.



- Penyulingan Air Laut**
 Sebagai kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan, dalam penggunaan air bersih IPC menerapkan Penyulingan Air Laut untuk meminimalisir penggunaan air tanah yang dapat merusak permukaan tanah.



- Seawater Distillation**
 As part of the Company's concern for the environment, for clean water IPC uses a Sea Water Distillation to minimize the use of ground water that can damage the soil surface.

- Pengelolaan Limbah**
 Untuk mendukung bisnis perusahaan untuk mencapai kelas dunia, IPC menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kapal untuk menciptakan perusahaan yang ramah terhadap lingkungan.

- Waste Management**
 To support the company's efforts in achieving world-class business, IPC provides ship waste management facilities to create a company that is friendly to the environment.



ALOKASI DANA PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT

Sumber Dana

Berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 09 tanggal 24 Januari 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 menetapkan bahwa besaran Program Kemitraan sebesar Rp47,85 miliar dan yang bersumber dari saldo dana Program Kemitraan, penerimaan dari angsuran pinjaman, serta penerimaan dari angsuran pinjaman serta penerimaan jasa administrasi dan bunga. Kemudian, besaran dana untuk program Bina Lingkungan ditetapkan sebesar Rp24,74 miliar yang bersumber dari tambahan alokasi dana Bina Lingkungan yang berasal dari proyeksi laba tahun 2019.

Realisasi Biaya Pelaksanaan Program Kemitraan

Pada tahun 2020, Perseroan tidak melakukan penyaluran dana untuk Program Kemitraan karena adanya penundaan penyaluran Hibah kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp45,5 miliar, sehubungan dengan ketetapan Kementerian BUMN bahwa penyaluran dana Program Kemitraan dengan mekanisme Hibah kepada PT Perusahaan Nasional Madani (Persero) ditunda sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut. Perseroan juga tidak mengalokasikan dana untuk pembinaan Program Kemitraan pada tahun 2020, baik untuk Pendidikan/Pelatihan maupun Pemasaran/Pameran.

Realisasi Biaya Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

Sepanjang tahun 2020, total dana kegiatan Bina Lingkungan yang disalurkan IPC mencapai Rp26,78 miliar, meningkat 10,36 persen dari tahun 2019 sebesar Rp24,27 miliar. Rincian pemanfaatannya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Realisasi Biaya Pelaksanaan Program Bina Lingkungan Tahun 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Berdasarkan Wilayah Operasi / Based on Operational Area				
DKI Jakarta	15.024	10.626	4.398	41,39%
• Kantor Pusat / Head Office	12.482	9.047	3.435	37,97%

ALLOCATION OF FUNDS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES TO THE COMMUNITY

Source of funds

Based on the Notary Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 09 dated January 24, 2020 regarding the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) concerning Work Plan and Budget and the 2020 Partnership and Community Development Program Budget Work Plan stipulated that the amount of the Partnership Program was Rp47.85 billion, sourced from the balance of Partnership Program funds, receipts from loan installments, as well as administration services and interest. Next, the amount of funds for the Community Development program was set at Rp24.74 billion, which came from additional Community Development fund allocations from 2019 profit projections.

Realization of Partnership Program Implementation Funds

In 2020, the Company did not disburse funds for the Partnership Program due to a delay in the distribution of Grants to PT Permodalan Nasional Madani (Persero) amounting to Rp45.5 billion, in connection with the Ministry of SOEs' decision that the distribution of funds for the Partnership Program through the Grant mechanism to PT Perusahaan Nasional Madani (Persero) was postponed until further decision. The Company also did not allocate funds for fostering the Partnership Program in 2020, either for Education/Training or Marketing/Exhibition.

Fund Realization of Community Development Program Implementation

Throughout 2020, the total funds for Community Development activities channeled by IPC reached Rp26.78 billion, an increase of 10.36 percent from 2019 amounting to Rp24.27 billion. The usage details are described in the table below.

Fund Realization of Community Development Program Implementation in 2019 - 2020

(in million Rupiah)



Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
• Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	1.566	1.248	318	25,48%
• Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch	976	332	644	193,98%
Lampung	1.142	945	197	20,85%
Sumatra Selatan / South Sumatra	1.432	1.974	(542)	(27,46%)
Sumatra Barat / West Sumatra	1.428	2.363	(935)	(39,57%)
Kalimantan Barat / West Kalimantan	1.919	1.678	241	14,36%
Banten	978	1.334	(356)	(26,69%)
Jawa Barat (Cabang Pelabuhan Cirebon) / West Java (Cirebon Port Branch)	2.185	2.109	76	3,60%
Jambi	726	303	423	139,60%
Bengkulu	708	1.255	(547)	(43,59%)
Bangka Belitung	1.240	1.679	(439)	(26,15%)
• Bangka (Cabang Pelabuhan Pangkal Balam) / Bangka (Pangkal Balam Port Branch)	576	1.037	(461)	(44,46%)
• Belitung (Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan) / Belitung (Tanjung Pandan Port Branch)	664	642	22	3,43%
Total Penyaluran / Total Distribution	26.783	24.266	2.515	10,36%
Berdasarkan Objek Bantuan / Based on Areas of Assistance				
BUMN Peduli / SOE Care	-	-	-	-
Bencana Alam / Natural Disaster	3.102	69	3.033	4395,65%
Pendidikan dan/atau Pelatihan / Education and/or Training	4.919	5.172	(253)	(4,89%)
Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	3.657	1.630	2.027	124,36%
Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum / Infrastructure and Public Facilities Development	4.334	5.171	(837)	(16,19%)
Sarana Ibadah / Places of Worship	4.088	4.588	(500)	(10,90%)
Pelestarian Alam / Nature Conservation	745	2.992	(2.247)	(75,10%)
Pengentasan Kemiskinan / Poverty Alleviation	5.937	4.598	1.339	29,12%
Lainnya / Others	-	44	(44)	(100,00%)
BUMN Peduli Pulau-pulau Perbatasan / SOE Cares for Border Islands	-	-	-	-
Total Penyaluran / Total Distribution	26.783	24.266	2.515	10,36%

Realisasi Biaya Pelaksanaan CSR

Sepanjang tahun 2020, total dana kegiatan CSR yang disalurkan IPC mencapai Rp12,81 miliar, turun 7,97 persen dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp13,92 miliar. Rincian pemanfaatannya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Realization of CSR Implementation Costs

Throughout 2020, the total CSR activity funds channeled by IPC reached Rp12.81 billion, down 7.97 percent compared to 2019 amounting to Rp13.92 billion. The usage details are described in the table below.

Realisasi Pelaksanaan CSR Tahun 2019 – 2020

(dalam jutaan Rupiah)

CSR Implementation Realization in 2019 - 2020

(in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Berdasarkan Wilayah Operasi / Based on Operational Area				
DKI Jakarta	8.294	9.704	(1.410)	(14,53%)
• Kantor Pusat / Head Office	6.731	6.240	491	7,87%
• Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch	1.147	3.375	(2.228)	(66,01%)
• Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch	417	89	328	368,54%
Lampung	415	431	(16)	(3,71%)
Sumatra Selatan / South Sumatra	476	465	11	2,37%
Sumatra Barat / West Sumatra	575	646	(71)	(10,99%)
Kalimantan Barat / West Kalimantan	1.173	1.315	(142)	(10,80%)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Banten	351	238	113	47,48%
Jawa Barat (Cabang Pelabuhan Cirebon) / West Java (Cirebon Port Branch)	335	265	70	26,42%
Jambi	402	443	(41)	(9,26%)
Bengkulu	337	114	223	195,61%
Bangka Belitung	452	298	154	51,68%
• Bangka (Cabang Pelabuhan Pangkal Balam) / Bangka (Pangkal Balam Port Branch)	234	164	70	42,68%
• Belitung (Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan) / Belitung (Tanjung Pandan Port Branch)	218	134	84	62,69%
Total Penyaluran / Total Distribution	12.810	13.919	(1.109)	(7,97%)
Berdasarkan Objek Bantuan / Based on Area of Assistance				
Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Kurang Mampu / Empowerment of Poor Community Development	1.028	3.737	(2.709)	(72,49%)
Pembangunan/Pengembangan Lingkungan, Fasilitas serta Pelestarian Alam / Environmental, Facilities and Nature Conservation Development	867	2.774	(1.907)	(68,75%)
Pendidikan/Pelatihan, Kegiatan Olahraga & Kesenian / Education/Training, Sports & Arts Activities	1.195	2.155	(960)	(44,55%)
Kegiatan Sosial Masyarakat & Keagamaan / Community & Religious Social Activities	6.480	5.083	1.397	27,48%
Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	3.120	171	2.949	1.724,56%
Promosi, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemasaran Usaha Kecil Menengah / Promotion, Coaching, Mentoring, and Marketing of Small and Medium Enterprises	81	-	81	100,00%
Lainnya / Others	40	-	40	100,00%
Total Penyaluran / Total Distribution	12.810	13.919	(1.109)	(7,97%)

SALURAN PENGADUAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Perseroan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menerima manfaat dari Program PKBL maupun CSR untuk melaporkan segala keluhan dan pengaduan terkait pelaksanaan Program PKBL dan CSR melalui saluran pengaduan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan, yang dapat disampaikan langsung pada Divisi Sekretariat Perusahaan IPC atau dapat melalui *email*: ipcpkbl@gmail.com maupun corp_sec@indonesiaport.co.id.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT

Realisasi Kinerja Program Kemitraan Efektivitas Penyaluran

Pada tahun 2020, persentase beban dana pembinaan kemitraan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan sebesar 0,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya dana pembinaan kemitraan maupun penyaluran program kemitraan yang disalurkan selama tahun 2020.

Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program

COMMUNITY DEVELOPMENT COMPLAINT CHANNEL

The Company provides opportunities for people who receive benefits from both PKBL and CSR Programs to report all complaints and complaints regarding the implementation of the PKBL and CSR Programs through complaint channels in the field of social community development, which can be submitted directly to the IPC Corporate Secretariat Division or the following emails: ipcpkbl@gmail.com or corp_sec@indonesiaport.co.id.

ACHIEVEMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES TO THE COMMUNITY

Performance Realization of Partnership Program Distribution Effectiveness

In 2020, the percentage of the partnership coaching fund expenses to the distributed partnership program funds was 0.00 percent. This was due to the absence of partnership fostering funds or distribution of partnership programs in 2020.

Loan Collectability Rate

Based on the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs' No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 02, 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER 09/MBU/07/2015 dated July 3,



Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, kualitas pinjaman digolongkan menjadi 4 (empat), sebagai berikut:

1. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
2. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Kualitas Pinjaman dan perhitungan rata-rata tertimbang menurut kualitas pinjaman sampai dengan tahun 2020 tercatat sebesar 3,19 persen.

Penghargaan di Bidang CSR

Pada tahun 2020, Perseroan mendapat beberapa penghargaan atas kinerja CSR yang diselenggarakan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indonesia CSR Brand Equity Award 2020
 - Excellence Corporate Social Responsibility Program in 2020 Port Operator Category
2. Bersatu Lawan Covid
 - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Atas Peran Serta, Dukungan dan Kerja Samanya Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jakarta Utara
3. Indonesia TOP CSR Award 2020
 - Arif Suhartono (Direktur Utama IPC) sebagai *Top Leader on CSR Commitment 2020*
 - Top CSR Award 2020 #Stars 4
4. Nusantara CSR Award 2020
 - Kategori Peningkatan Mutu Pendidikan Program 50 Juara Cinta IPC Jakarta Utara
5. Harbour Master of Tanjung Priok Awards 2020
 - Perusahaan Terfavorit atas Peran Aktif pada Kegiatan Sosial dan Keamanan

2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises, the quality of loans is classified into 4 (four), as follows:

1. Current, if the payment of principal installments and loan administration services is on time or there is a delay in principal installment payments and/or loan administration services no later than 30 days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement.
2. Noncurrent, if there is a delay in payment of principal installments and/or loan administration services that have exceeded 30 days and have not exceeded 180 days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement.
3. Doubtful, if there is a delay in payment of principal installments and/or loan administration services that have exceeded 180 days and have not exceeded 270 days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement.
4. Bad, if there is a delay in payment of principal installments and/or administrative services that have exceeded 270 days from the due date of the installment payment, according to the agreement that has been mutually agreed.

Loan quality and the weighted average calculation according to loan quality up to 2020 was recorded at 3.19 percent.

Awards in CSR Field

In 2020, the Company received several awards for its CSR performance, with the following descriptions:

1. Indonesia CSR Brand Equity Award 2020
 - Excellence Corporate Social Responsibility Program in 2020 Port Operator Category
2. Bersatu Lawan Covid
 - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) For Their Participation, Support and Cooperation to Prevent and Manage Corona Virus Disease (Covid-19) in 2019 in North Jakarta Area
3. Indonesia TOP CSR Award 2020
 - Arif Suhartono (IPC President Director) as Top Leader on CSR Commitment 2020
 - Top CSR Award 2020 #Stars 4
4. Nusantara CSR Award 2020
 - Education Quality Improvement Category for 50 Juara Cinta IPC Program North Jakarta
5. Harbour Master of Tanjung Priok Awards 2020
 - Favorite Company for Their Active Role in Social and Security Activities

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Pelanggan merupakan pengguna jasa yang menggunakan jasa dan/atau fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis IPC di masa depan. Oleh sebab itu, Perseroan selalu berupaya untuk menjaga komitmennya dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan terbaik bagi para pelanggan serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistemik.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Perseroan mengacu pada Standar Internasional ISO 9001:2015 di lingkungan IPC, yang meliputi Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/1/MKR/UT/PI.II-2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu diwujudkan dengan menetapkan Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, dan Sasaran Mutu.

KEBIJAKAN MUTU PERUSAHAAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara tepat dan konsisten dengan mempertimbangkan persyaratan dan harapan pihak berkepentingan terkait pelayanan jasa kepelabuhanan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oleh karena itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 dan ISPS Code, serta mempertimbangkan IMO *instruments* dan IALA *standards*.
2. Menyediakan jasa pelayanan kepelabuhan dengan berfokus pada produktivitas, penyederhanaan prosedur pelayanan dan *integrated services*.
3. Meningkatkan jasa pelayanan kepelabuhanan secara berkesinambungan dengan memperhatikan umpan balik pelanggan.

KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Direktur Utama

Direktur Utama Perseroan bertanggung jawab untuk membangun, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Mutu. Tanggung jawab tersebut terdiri dari perumusan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, pemberian

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMERS

Customers are service users who use port services and/or facilities provided by the Company. As a company that engages in port services, customer trust and satisfaction are key factors in maintaining the sustainability of IPC's business in the future. Therefore, the Company always strives to maintain its commitment in providing the best port services for customers as well as increasing customer trust and satisfaction through an organized and systemic quality assurance.

Implementation of the Quality Management System in the Company refers to the ISO 9001: 2015 International Standard in the IPC environment, which includes the Head Office and Port Branches, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.01/14/8/1/MKR/UT/PI.II-2020 on the Implementation of Quality Management Systems at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Company's commitment to implement Quality Management System is manifested in the establishment of Quality Policy, Quality Guidelines and Quality Objectives.

COMPANY QUALITY POLICY

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is committed to implementing Quality Management System appropriately and consistently by considering the requirements and expectations of parties having interests in port services in order to provide satisfaction to customers. Therefore, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is committed to:

1. Implementing Quality Management System in accordance with SNI ISO 9001:2015 and ISPS Code, and considering IMO instruments and IALA standards.
2. Providing port services with a focus on productivity, streamlining service procedures and integrated services.
3. Improving port services continuously by paying attention to customer feedback.

MANAGEMENT COMMITMENT TO QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

President Director

The President Director of the Company is responsible for building, implementing and maintaining Quality Management System. This responsibility includes formulating Quality Policy, Quality Targets, granting of authority and responsibility,



wewenang dan tanggung jawab, Tinjauan Manajemen secara berkala, mengupayakan dan meningkatkan Sumber Daya untuk memelihara dan meningkatkan sistem serta mengkomunikasikan tentang pentingnya pelanggan, seperti juga terhadap persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama IPC juga bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan sesuai dengan persyaratan Standar ISO 9001:2015.
2. Memastikan proses-proses memberikan hasil yang diinginkan.
3. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang perbaikan.
4. Memastikan promosi Fokus Pelanggan.
5. Memastikan integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara ketika terjadi perubahan.

Ketua Tim Sistem Manajemen Mutu/Wakil Manajemen Tingkat Korporasi

Perseroan menugaskan VP Kendali Mutu berperan dalam menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Mutu dengan persyaratan Standar ISO 9001:2015, mengkoordinasikan pelaporan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan memastikan integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara ketika terjadi perubahan. Adapun tanggung jawab VP Kendali Mutu adalah:

1. Mendukung Direktur Utama Perseroan dalam menetapkan, menerapkan, serta memelihara Kebijakan Mutu dan Pedoman Mutu.
2. Mendukung Direktur Utama Perseroan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen, untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, keefektifan, dan keselarasan Penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan Arahan Strategi Perusahaan.
3. Bertanggung jawab terhadap proses Audit Internal, yaitu menyusun dan mengimplementasikan program Audit Internal serta menyusun Rencana Audit. Audit Internal dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan, dapat juga dilakukan secara terpusat.
4. Bertanggung jawab terhadap proses penetapan Sasaran Mutu, yaitu menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan Sasaran Mutu.
5. Memastikan penyediaan Sumber Daya yang diperlukan, khususnya untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu.
6. Memastikan pihak-pihak relevan, yang bekerja di Perseroan menyadari Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu yang relevan, bagaimana mereka berkontribusi terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu serta memahami implikasi ketidaksesuaian.

periodic Management Reviews, seeking and improving Resources to maintain and improve system as well as communicating the importance of customers and applicable requirements of laws and regulations. IPC President Director is also responsible for:

1. Ensuring the Company's Quality Management System is in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 Standard.
2. Ensuring processes are producing the desired results.
3. Reporting the performance of the Quality Management System and areas of improvement.
4. Ensuring Customer Focused promotion.
5. Maintaining the integrity of the Quality Management System when changes occur.

Head of the Quality Management System Team/ Corporate Management Representative

The Company assigned the VP Quality Control to ensure the conformity of the Quality Management System with the requirements of ISO 9001:2015 Standard, coordinate the reporting of the Quality Management System, and maintaining the integrity of the Quality Management System when changes occur. The responsibilities of VP Quality Control are:

1. Supporting the Company's President Director in establishing, implementing and maintaining the Quality Policy and Quality Guidelines.
2. Supporting the Company's President Director in conducting Management Review to review the appropriateness, adequacy, effectiveness and alignment of Quality Management System Implementation with the Company's Strategic Direction.
3. Being responsible for the Internal Audit process, namely preparing and implementing the Internal Audit program and preparing Audit Plan. Internal Audit can be carried out by Head Office and Port Branches independently or in a centralized manner.
4. Being responsible for the process of determining the Quality Targets, namely preparing, establishing and documenting the Quality Targets.
5. Ensuring the provision of the necessary resources, particularly for implementing the Quality Management System.
6. Ensuring that relevant parties working in the Company are aware of the Quality Policy, the relevant Quality Targets, how they contribute to the effectiveness of the Quality Management System, and understand the implications of any non-conformity.

Wakil Manajemen Tingkat Cabang Pelabuhan

Perseroan menugaskan General Manager (GM) Cabang Pelabuhan berperan dalam menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Mutu dengan persyaratan Standar ISO 9001:2015, mengkoordinasikan pelaporan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan memastikan integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara ketika terjadi perubahan. Adapun tanggung jawab GM Cabang adalah:

1. Bertanggung jawab terhadap proses Audit Internal Cabang Pelabuhan, yaitu menyusun dan mengimplementasikan program Audit Internal serta menyusun Rencana Audit. Hal ini dilakukan secara mandiri oleh Cabang Pelabuhan.
2. Bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian Sasaran Mutu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
3. Memastikan penyediaan Sumber Daya yang diperlukan, khususnya untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu.
4. Memastikan pihak-pihak relevan, yang bekerja di Perseroan menyadari Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu yang relevan, bagaimana mereka berkontribusi terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu serta memahami implikasi ketidaksesuaian.
5. Melaporkan Hasil Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi ke Divisi Kendali Mutu Kantor Pusat, termasuk daftar Permintaan Tindakan Korektif yang diterbitkan.

Manajemen Eksekutif

Perseroan menugaskan para Manajemen Eksekutif untuk berperan dalam memastikan pelaksanaan proses-proses yang berada di bawah kendalinya dan relevan dengan Sistem Manajemen Mutu memberikan hasil yang diinginkan. Manajemen Eksekutif yang dimaksud terdiri dari:

Kantor Pusat

1. Para Executive Vice President (EVP)
2. Para Senior Vice President (SVP)
3. Para Vice President (VP)

Cabang Pelabuhan

4. Para Deputy General Manager

Tanggung Jawab Manajemen Eksekutif adalah:

1. Memastikan penyediaan Sumber Daya yang diperlukan, khususnya untuk pelaksanaan proses-proses yang relevan.
2. Melakukan perubahan proses secara terencana.
3. Mengukur dan melaporkan pencapaian Sasaran Mutu.

Port Branch Management Representative

The Company assigned Port Branch General Managers (GM) to ensure the conformity of the Quality Management System with the requirements of ISO 9001:2015 Standard, coordinate the reporting of the Quality Management System, and maintaining the integrity of the Quality Management System when changes occur. The responsibilities of Branch GM are:

1. Being responsible for Port Branch Internal Audit process, namely preparing and implementing the Internal Audit program as well as preparing Audit Plan. This is carried out independently by the Port Branch.
2. Being responsible for the process of distributing the Quality Targets set by the Head Office.
3. Ensuring the provision of the necessary Resources, especially for the implementation of the Quality Management System.
4. Ensuring relevant parties working in the Company are aware of the Quality Policy, the relevant Quality Targets, how they contribute to the effectiveness of the Quality Management System and understand the implications of any non-conformity.
5. Reporting the Results of Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation to the Head Office Quality Control Division, including the list of Requests for Corrective Action issued.

Executive Management

The Company assigned Executive Management to ensure that the processes under its control and relevant to the Quality Management System produce the desired results. The Executive Management consists of:

Head Office

1. Executive Vice Presidents (EVP)
2. Senior Vice Presidents (SVP)
3. Vice Presidents (VP)

Port Branch

4. Deputy General Managers

Responsibilities of Executive Management are:

1. Ensuring the provision of the necessary Resources, particularly for the implementation of relevant processes.
2. Making planned changes to the process.
3. Measuring and reporting the achievement of the Quality Targets.



Manajemen Eksekutif yang Berkaitan dengan Pelanggan

Perseroan menugaskan para Manajemen Pelanggan untuk berperan dalam mendesain program dan mempromosikan fokus pelanggan. Manajemen Pelanggan yang dimaksud terdiri dari:

1. SVP Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan
2. SVP Pemasaran
3. EVP Perencanaan Strategi Korporasi

Tanggung Jawab Manajemen Pelanggan adalah:

1. Melakukan pengumpulan data umpan balik pelanggan dan melaksanakan analisisnya.
2. Mengomunikasikan hasil analisis umpan balik pelanggan.
3. Mendorong dan memfasilitasi inovasi produk dan jasa.

SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN MUTU TERINTEGRASI

Pada tahun 2020, Perseroan melalui Divisi Kendali Mutu telah menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Manajemen Eksekutif IPC.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PROSES

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menentukan ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dengan mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal, persyaratan dari pihak berkepentingan serta jasa yang disediakan oleh Perseroan. Berikut ini adalah kelompok pelayanan yang disediakan oleh IPC.

Executive Management Related to Customers

The Company assigned Customer Management to design programs and promote customer focus. The Customer Management consists of:

1. SVP Business Alliance and Customer Relations
2. SVP Marketing
3. EVP Corporate Strategy Planning

Responsibilities of Customer Management are:

1. Collecting customer feedback data and carry out the analysis.
2. Communicating the results of customer feedback analysis.
3. Supporting and facilitating product and service innovation.

DISSEMINATION OF THE INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

In 2020, the Company through the Quality Control Division has held Dissemination of the Integrated Quality Management System of the Head Office and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to the Executive Management of IPC.

SCOPE AND BOUNDARIES OF PROCESS

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) established the scope of the Quality Management System by taking account of external and internal issues, requirements from relevant parties, as well as services rendered by the Company. The service groups provided by IPC are as follows.

Kelompok Pelayanan IPC / IPC Service Groups		
No.	Kelompok Pelayanan / Service Group	Lokasi / Location
1.	Pelayanan Kapal / Vesel Services	1. Kantor Pusat: Jakarta / Head Office: Jakarta
2.	Pelayanan Barang / Cargo Services	2. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch
3.	Persewaan Lahan & Bangunan / Land & Building Rent	3. Cabang Pelabuhan Banten / Banten Port Branch
		4. Cabang Pelabuhan Panjang / Panjang Port Branch
		5. Cabang Pelabuhan Bengkulu / Bengkulu Port Branch
		6. Cabang Pelabuhan Jambi / Jambi Port Branch
		7. Cabang Pelabuhan Cirebon / Cirebon Port Branch
		8. Cabang Pelabuhan Palembang / Palembang Port Branch
		9. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch
		10. Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch
		11. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch
		12. Cabang Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port Branch
		13. Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch

Penerapan Sistem Manajemen Mutu IPC berlaku pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan. Sistem Manajemen Mutu juga diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan dalam kontrak. Seluruh persyaratan dalam standar ISO 9001:2015 berlaku bagi Sistem Manajemen Mutu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanpa pengecualian.

IPC Quality Management System applies to activities carried out at the Head Office and Port Branches. The Quality Management System also applies to activities conducted by third parties according to each contract agreement. All requirements of ISO 9001:2015 apply in the Quality Management System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) without any exception.

Secara berkala, dilakukan peninjauan ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu pada saat pelaksanaan Analisis dan Evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan pada saat mempersiapkan rekomendasi keputusan Tinjauan Manajemen.

Adapun batasan proses pada Sistem Manajemen Mutu Perseroan terdiri dari Proses Marketing dan Hubungan Pelanggan; Desain dan Pengembangan; Pembangunan; Operasional; Pelayanan, termasuk Pengendalian dan Pemeliharaan; serta Manajemen Mutu. Selain itu, Perseroan juga menjamin bahwa proses-proses tersebut telah memenuhi persyaratan yang relevan dengan Standar ISO 9001:2015.

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Dalam rangka mencapai Visi Perseroan menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan, IPC memiliki rencana maupun target dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan seperti *customer of the years*, *customer gathering*, serta strategi atau apresiasi lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan hubungan pelanggan utama (*Key Account Relationship*). Adapun rencana-rencana untuk mencapai Visi Perseroan tersebut antara lain:

1. Melakukan pemahaman untuk informasi layanan IPC kepada seluruh masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai layanan kepelabuhan yang dimiliki Perseroan, yang dilakukan dalam kegiatan *coffee morning* yang ditargetkan diadakan setiap triwulan;
2. IPC memberikan kemudahan pengaduan bagi para pelanggan, sebagai upaya Perseroan dalam meningkatkan loyalitas pelayanan bagi para pelanggan, yang dituangkan dalam kegiatan *customer visit*, *direct mailing*, dan *web portal*;
3. Melakukan kegiatan survei kepuasan pelanggan setiap tahun sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas pelayanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan, dengan memonitor dan mengevaluasi hasil tindak lanjut survei kepuasan tersebut.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait dengan pelanggan, Perseroan telah melakukan *due diligence* dengan memperhatikan hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan yang memberi gambaran mengenai informasi kebutuhan pelanggan. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan

The scope of the Quality Management System is periodically reviewed through Analysis and Evaluation. The results of analysis and evaluation further serve as consideration when preparing recommendations for Management Review decision.

The boundaries of the process of the Company's Quality Management System include Marketing and Customer Relations Process; Design and Development; Development; Operations; Services, including Control and Maintenance; and Quality Management. In addition, the Company also guarantees that these processes meet the relevant requirements of the ISO 9001:2015 Standard.

PLAN OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR CUSTOMERS

In order to achieve the Company's Vision to become a world-class port manager that excels in operations and services, IPC has plans and targets to improve service quality for customers. The service is carried out through several activities, such as customer of the years, customer gathering, and other strategies or appreciation that are used to support Key Account Relationship. The plans to achieve the Company's Vision include:

1. Promoting information of IPC services to the public as an effort to improve understanding of the port services delivered by the Company, carried out through coffee morning which is targeted to be held every quarter;
2. IPC provides ease for customers in submitting complaint as part of the Company's efforts to increase service loyalty for customers, carried out through customer visits, direct mailing, and web portals;
3. Conducting annual customer satisfaction surveys to improve the quality of services provided by the Company to customers by monitoring and evaluating the results of follow-up to the satisfaction survey.

In planning CSR activities related to customers, the Company carried out due diligence by taking into account the results of customer satisfaction and loyalty surveys which provide an overview of the customers' needs. The approach used is to evaluate the results of customer satisfaction and loyalty



evaluasi hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai bahan untuk menyusun program kerja tahun berikutnya.

Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan Perseroan pada konsumen yaitu meningkatnya kepuasan dan loyalitas konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan. Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting bidang konsumen dalam perencanaan CSR terkait dengan konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Pelanggan dan peraturan lainnya.

IPC senantiasa mempertimbangkan risiko terkait konsumen dalam melakukan perencanaan kegiatan. Risiko tersebut antara lain adanya komplain dari pelanggan yang berdampak pada tingkat loyalitas pelanggan terhadap Perseroan. Dengan kata lain, Perseroan senantiasa mempertimbangkan harapan pelanggan, antara lain kecepatan pelayanan, kebersihan pelabuhan, dan tarif yang kompetitif dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait pelanggan.

Perseroan juga menitikberatkan pada pelibatan *stakeholders* internal yang terkait dengan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan untuk kegiatan bongkar muat dimulai dari proses *gate in* sampai dengan *gate out*. Sementara dari sisi *back office* pelayanan dimulai dari bagian keamanan, *receptionist*, dan Pegawai IPC. Semua pihak yang terlibat dari proses tersebut terlibat dalam pelaksanaan CSR terkait pelanggan. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan manajemen dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai upaya Perseroan dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggan.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Optimalisasi Layanan Online bagi Pelanggan

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk menjadi *World Class Port*, IPC terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan layanan berbasis elektronik, seperti *Vessel Traffic System* (VTS) dan *Vessel Management System* (VMS), *e-Service*, *I-HUB*, *CFS Center*, serta *Customer Data Management* (CDM) dan *Customer Relationship Management* (CRM). Layanan tersebut disediakan untuk memudahkan para pelanggan dalam mengakses informasi jasa atau layanan kepelabuhanan Perseroan.

surveys as materials for preparing work program for the next year.

The Company has considered significant direct or indirect impacts of the Company's activities and decisions on consumers, namely increased customer satisfaction and loyalty which in turn will increase the Company's revenue. The Company also reviews all regulations related to important consumer issues in CSR planning related to consumers, such as the Customer Protection Law and other regulations.

IPC always considers risks related to consumers in planning activities. These risks include, among others, complaints from customers that affect customer loyalty to the Company. In other words, the Company always considers customer expectations, which include service speed, port cleanliness, and competitive rates, in planning customer-related CSR activities.

The Company also focuses on the involvement of internal stakeholders related to customer service. Services provided for stevedoring activities start from gate in to gate out process. Meanwhile, from the back office, the service starts from the security department, receptionist, and IPC employees. All parties involved in the process are part of CSR implementation for the customers. This is stated in various management policies and Standard Operating Procedures (SOPs) as the Company's efforts to provide protection for customers.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR CUSTOMERS

Online Services for Customers

In line with the Company's goal to become a World Class Port, IPC continuously strives to improve the quality of port services. Among the Company's efforts is providing electronic-based services, such as *Vessel Traffic System* (VTS) and *Vessel Management System* (VMS), *e-Service*, *I-HUB*, *CFS Center*, as well as *Customer Data Management* (CDM) and *Customer Relationship Management* (CRM). These services are provided to facilitate the customers in accessing information on the Company's port services.

Vessel Traffic System (VTS) dan Vessel Management System (VMS)

Sebagai langkah digitalisasi pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi para pelanggan dan pengguna jasa kepelabuhanan, IPC menerapkan *Vessel Traffic System (VTS)* dan *Vessel Management System (VMS)*.

VTS adalah sistem *monitoring* lalu lintas pelayaran yang diterapkan oleh pelabuhan atau suatu manajemen armada perkapalan, sedangkan VMS adalah sistem pengelolaan dokumen keluar masuk kapal di pelabuhan secara digital. Sistem digital *port* tersebut telah diperkenalkan sejak tahun 2016 dan telah diterapkan di 10 Cabang Pelabuhan. Dengan adanya kedua sistem ini, Perseroan berhasil meningkatkan kecepatan dalam pengurusan dokumen serta efisiensi beban operasional dan sumber daya.

Sistem VMS Perseroan, khususnya di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah terhubung dengan *INAPORTNET* milik Kementerian Perhubungan RI. *INAPORTNET* adalah sistem informasi layanan tunggal elektronik yang berbasis internet. Sistem ini berperan untuk mengintegrasikan sistem informasi yang berkaitan dengan pelabuhan yang distandarkan dalam melayani kapal dan barang yang mencakup berbagai kepentingan instansi terkait. Fungsi dari *INAPORTNET* meliputi pelayanan kapal dan barang yang mendukung program "*Indonesia National Single Window*" serta penurunan *dwelling time*, standarisasi pelayanan kapal dan barang berbasis *IT/Online*, serta perluasan sistem *Vessel Management System*.

E-Service

Portal *E-Service* adalah layanan *online* tersentralisasi yang disediakan untuk pelanggan di lingkungan pelabuhan. Dengan adanya *e-Service* pada pengelolaan terminal, maka pengguna jasa tidak perlu lagi datang kepelabuhan saat mengajukan kegiatan *receiving* maupun *delivery (R/D)* peti kemas hingga penerbitan *billing* layanan secara keseluruhan. Selain itu, portal *e-Service* ini dapat melakukan *tracing* layanan kepelabuhanan dan pengurusan dokumen secara *real time*, sehingga dapat meningkatkan kemudahan dan kepraktisan pembayaran.

Platform ini meliputi layanan berbasis elektronik dan digital yang terdiri dari *e-Registration*, *e-Booking*, *e-Tracking*, *e-Payment*, *e-Billing*, dan *e-Care*. Layanan *e-Service* dapat diakses secara aman oleh pelanggan IPC, sehingga memudahkan dalam bertransaksi.

Vessel Traffic System (VTS) and Vessel Management System (VMS)

As a step towards port digitalization to improve convenience and services for customers and users of port services, IPC has implemented the *Vessel Traffic System (VTS)* and *Vessel Management System (VMS)*.

VTS is a shipping traffic monitoring system implemented by a port or a shipping fleet management, while VMS is a digital document management system for incoming and outgoing ships at the port. This digital port system has been introduced since 2016 and has been implemented in 10 Port Branches. With these two systems, the Company was able to increase the speed in processing documents and the efficiency of operating expenses and resources.

The Company's VMS system, especially at the Tanjung Priok Port Branch, is connected to *INAPORTNET* belonging to the Indonesian Ministry of Transportation. *INAPORTNET* is an internet-based electronic single service information system. This system's role is to integrate standardized port-related information system in serving ships and cargo, which covers various interests of related agencies. The functions of *INAPORTNET* include providing ship and cargo services that support the "*Indonesia National Single Window*" program and lowering dwelling time, standardizing *IT/Online*-based ship and cargo services, as well as expanding the *Vessel Management System*.

E-Service

The *E-Service* Portal is a centralized online service provided to customers in the port environment. With the existence of *e-Service* in terminal management, service users no longer need to come to the port in person when proposing container receiving or delivery (*R/D*) activities until the issuance of the entire service billing. In addition, this *e-Service* portal can perform real-time tracing of port services and document management, thereby increasing the ease and practicality of payments.

This platform includes electronic and digital-based services consisting of *e-Registration*, *e-Booking*, *e-Tracking*, *e-Payment*, *e-Billing*, and *e-Care*. The *e-Service* can be accessed safely by IPC customers, making transactions easier.



IPC E-SERVICE					
e-Registration	e-Booking	e-Tracking	e-Invoice	e-Payment	e-Care
Menyediakan fungsi registrasi elektronik untuk data pelanggan baru dan juga memperkaya data pelanggan yang sudah ada. / Providing electronic registration function for new customer data and enriching existing customer data.	Menyediakan <i>booking</i> elektronik untuk pelanggan <i>Vessel Customer</i> (<i>Shipping Agent</i>) dan <i>Cargo Customer</i> . / Providing electronic booking for Vessel Customers (<i>Shipping Agent</i>) and Cargo Customers.	Menyediakan fungsi <i>tracking</i> dan <i>tracing</i> elektronik untuk pelanggan <i>Vessel Customer</i> dan <i>Cargo Customer</i> . / Providing electronic tracking and tracing function for Vessel Customers and Cargo Customers.	Menyediakan informasi billing dan nota elektronik untuk pelanggan <i>Vessel Customer</i> dan <i>Cargo Customer</i> . / Providing billing information and electronic receipts for Vessel Customers and Cargo Customers.	Menyediakan <i>channel</i> pembayaran dan konfirmasi <i>online</i> . / Providing payment and online confirmation channels.	Menyediakan fungsi penanganan keluhan untuk pengguna. / Providing complaint handling function for users.

Portal *E-Service* yang dikembangkan oleh Perseroan ini menyediakan layanan petikemas. Terdapat juga layanan non-petikemas, namun untuk saat ini hanya tersedia di Cabang Pelabuhan Banten.

The *E-Service* Portal developed by the Company provides container services. Non-container services are currently only available at Banten Port Branch.

I-HUB (IPC HUB)

Perseroan mengembangkan aplikasi *I-HUB* atau IPC HUB, yang merupakan suatu aplikasi yang merangkum semua layanan aktivitas logistik yang diberikan oleh IPC kepada *customer* yang mencakup layanan terminal, kapal, serta pengembangan aplikasi *mobile*. *I-HUB* merupakan salah satu dari inisiatif *Digital Port* yang dijalankan oleh IPC. Sistem ini telah dibangun hingga tahap *Minimum Viable Product* (MVP) di tahun 2019.

I-HUB (IPC HUB)

The Company developed the *I-HUB* or IPC HUB application, which is an application that summarizes all logistics services provided by IPC to customers, including terminal services, vessel services, and mobile application development. *I-HUB* is one of the *Digital Port* initiatives run by IPC. This system has been built up to the *Minimum Viable Product* (MVP) stage in 2019.

Sejak tahun 2020, aplikasi ini mulai dikembangkan untuk *pilot project* di Cabang Pelabuhan Panjang, dan direncanakan akan dilakukan *live* di Pelabuhan Panjang pada tahun 2021 mendatang. Aplikasi ini ke depannya juga akan diimplementasikan secara bertahap di Cabang Pelabuhan IPC lainnya.

Since 2020, this application has been developed for a pilot project at Panjang Port Branch, and is planned to be carried out live at Panjang Port in 2021. In the future, this application will also be gradually implemented in other IPC Port Branches.

CFS Center

CFS Center merupakan opsi yang dapat dipilih pengguna jasa untuk memudahkan transaksi. Keunggulannya adalah proses pelayanan menjadi ringkas/ sederhana dan transparan sehingga menjadi efisien bagi pengguna jasa. Integrasi *CFS* mencakup manajemen data pelanggan, *CFS booking service*, layanan nota, pembayaran elektronik, *tracking* kargo, dan *customer care*. Sistem *CFS* yang sudah berjalan *online* dan beroperasi 24/7. Ke depannya, sistem layanan *CFS* akan terus disempurnakan dan ditambah fitur baru, seperti *multichannel payment* serta *invoice* langsung ke pemilik barang/*consignee*.

CFS Center

CFS Center is an option for service users to facilitate transactions. It provides the advantage of more concise/simple and transparent service process which increases efficiency for service users. *CFS* integration includes customer data management, *CFS booking service*, receipt service, electronic payment, cargo tracking, and customer care. The existing *CFS* system is online and operates 24/7. Going forward, the *CFS* service system be continuously improved and equipped with new features, such as *multichannel payments* and direct *invoice* to goods owners/*consignees*.

Customer Data Management (CDM) dan Customer Relationship Management (CRM)

Perseroan telah mengembangkan aplikasi *Customer Data Management* (CDM) yang berfungsi untuk mengelola basis data pelanggan pelabuhan. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan *Customer Relationship Management* (CRM) yang merupakan sistem informasi terintegrasi untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan (*pre-sales*), penjualan (*sales*), dan pascapenjualan (*after sales*) dalam sebuah organisasi.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Kesehatan dan keselamatan konsumen telah tertuang dalam kebijakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang berisi kewajiban bagi seluruh pegawai, mitra kerja, dan tamu untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dan kebutuhan berdasarkan prosedur kerja dalam lingkup area kerja IPC.

Merujuk kebijakan pada kebijakan tersebut, Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3) diberikan kepada setiap orang untuk setiap orang yang melakukan aktivitas di lingkungan kerja pelabuhan, termasuk tamu dan pelanggan/pengguna jasa.

Pengelolaan Data Pelanggan

Pengguna jasa Perseroan yang ingin menjadi Pelanggan wajib mendaftarkan dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada General Manager Cabang Pelabuhan/Manager area anak perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan administratif. Persyaratan administratif yang telah diajukan akan divalidasi oleh petugas *customer service* Cabang Pelabuhan/anak perusahaan setempat dengan melakukan pengecekan, memastikan keabsahan semua dokumen, serta memastikan kelengkapan dokumen telah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, data-data pelanggan diinput oleh petugas *customer service* sesuai dokumen yang dilampirkan untuk kemudian diverifikasi oleh Asistant Manager Pelayanan pelanggan dan dilakukan approval pada sistem *Customer Relationship Management* (CRM). Seluruh data Pelanggan yang valid dan tertata secara sistematis disimpan dalam aplikasi CRM. Setelah data diapprove oleh Manager Komersial, sistem akan otomatis membentuk *Billing ID* yang kemudian dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan transaksi di IPC Group.

Customer Data Management (CDM) and Customer Relationship Management (CRM)

The Company developed Customer Data Management (CDM) application which manages port customer databases. In addition, the Company also developed Customer Relationship Management (CRM), which is an integrated information system for planning, scheduling and controlling pre-sales, sales and after sales activities in an organization.

Customer Health and Safety

Consumer health and safety has been stated in the Occupational Health and Safety System (OHS) policy in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment, which consists of the obligation for all employees, work partners and guests to use Personal Protective Equipment (PPE) according to the provisions and needs based on work procedures within the scope of work in IPC area.

Based on this policy, Occupational Health and Safety (OHS) is provided to every person who conducts activities in the port working environment, including guests and customers/service users.

Customer Data Management

Users of the Company's services who wish to become a Customer are required to submit an application letter to the General Manager of Port Branch/Area Manager of subsidiaries by attaching supporting documents for administrative requirements. The submitted administrative requirements will be validated by customer service officer of the Port Branch by verification, ensuring validity of all documents, and ensuring the documents are complete according to the requirements. Furthermore, the customer's data is inputted by the customer service officer in accordance with the information presented in the attached documents, which is then verified by the Customer Service Assistant Manager before being approved through the Customer Relationship Management (CRM) system. All valid and organized customer data are systematically stored in the CRM application. Upon data approval by the Commercial Manager, the system will automatically form a Billing ID which can then be used by customers to make transactions in the IPC Group.



CRM yang disiapkan oleh Perseroan adalah aplikasi data pelanggan di Cabang Pelabuhan/anak perusahaan yang meliputi data sebagai berikut:

1. Informasi Umum Pelanggan;
2. Informasi Penagihan (*Billing Account*);
3. Penanggung Jawab Perusahaan/Pelanggan (*Contact*);
4. Informasi Keluhan (*Cases*); dan
5. Dokumen Pendukung (*Attachment Files*).

Data Pelanggan yang telah tercatat dalam CRM akan diintegrasikan dengan sistem operasional dan sistem keuangan untuk mendapatkan profil Pelanggan.

Monitoring Data Pelanggan

Cabang Pelabuhan/anak perusahaan wajib melaksanakan kegiatan evaluasi dan *monitoring* data pelanggan yang tersimpan dan terekam di sistem CRM. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perubahan pada data pelanggan, Cabang Pelabuhan/anak perusahaan yang bersangkutan wajib menghubungi pelanggan untuk memperbaiki dan melengkapi data pelanggan terbaru di CRM secara benar. Staf Hubungan Pelanggan Kantor Pusat juga akan melakukan *monitoring* berkala atas kelengkapan dan validitas data-data pelanggan yang terdapat di sistem CRM di seluruh Cabang Pelabuhan/anak perusahaan. Jika terdapat data yang tidak sesuai, Staf Hubungan Pelanggan Kantor Pusat akan melakukan konfirmasi ke Cabang Pelabuhan/anak perusahaan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki data pelanggan tersebut.

Perubahan Data Pelanggan

Perubahan data Pelanggan dilakukan oleh Bagian Pelayanan Pelanggan Cabang Pelabuhan/anak perusahaan. Perubahan data Pelanggan dapat dilaksanakan dengan:

1. Mendatangi Pelanggan yang bersangkutan meminta data Pelanggan untuk mengirimkan data perusahaannya dalam bentuk *hard copy* serta *soft copy* (formulir pendaftaran dan dokumen pendukung);
2. Pelanggan mengajukan permohonan perubahan data dengan mengirimkan data perusahaannya dalam bentuk *hard copy* serta *soft copy* (formulir pendaftaran dan dokumen pendukung).

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Data Pelanggan

Seluruh data dan informasi Pelanggan yang terekam dan terdokumentasi di dalam aplikasi CRM merupakan informasi Perseroan yang harus dijaga kerahasiaannya dan dapat dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan Perseroan.

CRM prepared by the Company is a customer data application at the Port/subsidiary Branch, which includes the following data:

1. General Customer Information;
2. Billing Information (Billing Account);
3. Person in Charge of the Company/Customer (Contact);
4. Complaint Information (Cases); and
5. Supporting Documents (Attachment Files)

Customer data recorded in the CRM will be integrated into operational and financial systems to obtain Customer profile.

Customer Data Monitoring

Port Branches/subsidiaries are obliged to carry out evaluation and monitoring of customer data stored and recorded on the CRM system. If there is discrepancy or change in customer data, the relevant Port Branch/subsidiaries is required to contact the customer to update and complete the latest customer data on CRM correctly. Customer Relations Officer at the Head Office will also conduct periodic monitoring of the completeness and validity of customer data contained in the CRM system in all Port Branches/subsidiaries. If there is incorrect data, the Customer Relations Officer at the Head Office will confirm to the Port Branches/subsidiaries to be able to complete and update the customer data.

Changes in Customer Data

Changes in customer data are carried out by Customer Service Department of Port Branches/subsidiaries. Changes in Customer data can be carried out by:

1. Visiting the Customer concerned to request their company data in hard copy and soft copy (registration form and supporting documents);
2. Customers apply for data changes by sending their company data in hard copy and soft copy (registration form and supporting documents).

Regulation of the Utilization of Data and Information on Customer Data

All Customer data and information recorded and documented in the CRM application constitute Company information that must be kept confidential and can be utilized and used for the benefit of the Company.

Pemanfaatan, penggunaan, pendistribusian, dan penggandaan data dan informasi mengenai data pelanggan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, yakni General Manager untuk Cabang Pelabuhan atau Manager Area untuk anak perusahaan dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Pelanggan untuk Kantor Pusat. Setiap pelanggaran atas penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai data pelanggan di luar kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Pengelolaan Hubungan Pelanggan

Komitmen Perseroan dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan juga tercermin dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hubungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.568/19/1/2/Pl.II-17 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Pelanggan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara Manajemen Perseroan dengan pelanggan. Beberapa kegiatan Pengelolaan Hubungan Pelanggan yang diselenggarakan oleh Perseroan terdiri dari:

1. *Coffee Morning*

Merupakan pertemuan yang sifatnya tukar menukar informasi dengan pelanggan yang dilakukan oleh Cabang Pelabuhan/anak perusahaan. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar Cabang Pelabuhan/anak perusahaan dapat mensosialisasikan program-program yang sejalan dengan kebijakan serta informasi perkembangan Perseroan sampai dengan saat ini dan target-target apa saja di tahun mendatang.

2. *Site Visit Customer*

Merupakan kunjungan manajemen Perseroan baik dari Kantor Pusat maupun Cabang Pelabuhan ke tempat pelanggan, khususnya kepada pelanggan utama di masing-masing Cabang Pelabuhan yang dilakukan secara reguler, berkesinambungan, dan terjadwal. Diharapkan pelanggan dapat menyampaikan keluhan, saran atau masukan dalam pertemuan ini.

3. *Port Visit Customer*

Merupakan program pengelolaan hubungan pelanggan dengan mengumpulkan para pelanggan utama (*key customer*) untuk berkunjung ke pelabuhan dengan tujuan membangun kepercayaan pelanggan melalui tukar menukar informasi.

Utilization, distribution, and duplication of customer data and information must obtain approval from the authorized official, namely the General Manager for Port Branches or Area Manager for subsidiaries and Officials one level below the Board of Directors who are responsible for Customer Relations for the Head Office. Any violation related to utilization of customer data and information beyond necessity will be subject to sanctions in accordance with the provisions and regulations applicable within the Company.

Customer Relations Management

The Company's commitment to increasing customer satisfaction and trust is also reflected in the implementation of Relations Management activities as regulated in Decree of the Board of Directors No. HK.568/19/1/2/Pl.II-17 dated January 19, 2017 regarding Customer Relations Management Guidelines at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). These activities aim to improve a good relationship between the Company's management and customers. Some of the Customer Relations Management activities held by the Company are:

1. *Coffee Morning*

A meeting for exchanging information with customers which is held by Port Branches/subsidiaries. The purpose of this meeting is to disseminate programs of the Port Branches/subsidiaries according to policies as well as information on the Company's latest developments and the targets of the upcoming year.

2. *Site Visit to Customers*

A visit by the Company's management, either from the Head Office or Port Branches, to the customers' premises, especially to the main customers of each Port Branch, which is conducted on a regular, continuous, and scheduled basis. Customers are expected to submit their complaints, suggestions or input in this meeting.

3. *Port Visit for Customers*

A customer relations management program which invites key customers to visit the port with the aim to build customer trust through information sharing.



4. Customer Gathering

Merupakan pertemuan pelanggan dalam suatu acara tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas para pelanggan dalam kurun waktu sekali dalam setahun. Tujuan dari pertemuan ini, sebagai bentuk apresiasi Perseroan terhadap pelanggan setianya.

5. Customer of the Year

Merupakan kegiatan yang dilakukan Perseroan kepada pelanggannya dalam bentuk apresiasi penghargaan yang dapat diberikan secara periodik setiap tahun sekali.

6. Courtesy Call/Direct Mailing Customer

Merupakan komunikasi Perseroan kepada pelanggan dalam bentuk surat, email, dan telepon, yang disampaikan pada momen tertentu.

7. Strategi atau apresiasi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan hubungan pelanggan utama (Key Account Relationship).

4. Customer Gatherings

A customer gathering in certain events that aims to increase customer loyalty which is held once a year. The purpose of this meeting is to show the Company's appreciation to its loyal customers.

5. Customer of the Years

An activity carried out by the Company for its customers in the form of appreciation and awards which can be given periodically every year.

6. Courtesy Call/Direct Mailing to Customers

The Company's communication to customers in the form of letters, e-mails, and telephone calls in certain moments.

7. Other strategies and appreciation that can support relationship with main customers (Key Account Relationship).

Adapun realisasi kegiatan Pengelolaan Hubungan Pelanggan selama tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut ini:

The realization of Customer Relations Management activities during 2020 is described in the following table:

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Hubungan Pelanggan IPC Tahun 2020

Realization of IPC Customer Relations Management Activities in 2020

No.	Cabang Pelabuhan IPC / IPC Port Branch	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Customer Engagement / Customer Engagement Activity Frequency				Jumlah / Total
		Coffee Morning	Customer Site Visit	Customer Gatherings/ Event	Sosialisasi / Dissemination	
1.	Cirebon	1	10	2	-	13
2.	Pangkal Balam	-	5	1	1	7
3.	Jambi	1	3	1	3	8
4.	Tanjung Pandan	2	8	-	1	11
5.	Tanjung Priok	-	21	1	-	22
6.	Teluk Bayur	1	2	3	2	8
7.	Banten	-	11	-	1	12
8.	Bengkulu	1	16	5	1	23
9.	Sunda Kelapa	1	2	1	-	4
10.	Panjang	1	6	1	1	9
22.	Pontianak	3	21	2	1	27
23.	Palembang	-	32	8	-	40
Jumlah / Total		11	137	25	11	184

Pengelolaan Pelanggan Utama

Key Account Management (KAM) atau Pengelolaan Pelanggan Utama adalah kegiatan membangun hubungan strategis dengan pelanggan utama/terpilih untuk menjalin kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan antara pihak Perseroan dan pelanggan. Tujuan dibentuknya KAM

Key Account Management

Key Account Management (KAM) is an activity to build strategic relationships with key/selected customers to establish mutually beneficial long-term cooperation between the Company and customers. The purpose of establishing KAM is to maintain regular customers who are actively

adalah untuk mempertahankan pelanggan tetap yang aktif bertransaksi di lingkungan Perseroan dan efisiensi aktivitas pelayanan hubungan pelanggan dengan penyediaan fasilitas layanan yang dirancang secara khusus untuk pelanggan *key account*.

Fokus KAM

Fokus KAM terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Pelanggan *Key Account* untuk Perusahaan Pelayaran (*Shipping Line*) meliputi:
 - a. Perusahaan Pelayaran Petikemas;
 - b. Perusahaan Pelayaran Non-Petikemas.
2. Pelanggan *Key Account* untuk Pemilik Barang (*Cargo Owner*) meliputi:
 - a. Pemilik Barang Petikemas;
 - b. Pemilik Barang Non-Petikemas.

Pengelompokan Key Account

Perseroan melakukan pengelompokan *Key Account* yang penetapannya dilakukan setiap tahun. pengelompokan *Key Account* terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Klaster 1 (*Executive Customer*), Klaster 2 (*Prime Customer*), dan Klaster 3 (*Regular Customer*). Pengelompokan kriteria *Key Account* di tingkat Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan umumnya dilakukan berdasarkan pada kontribusi pendapatan kepada Perseroan, namun juga tidak terbatas pada *Gross Tonnage* (GT) kapal dan jumlah kunjungan kapal (*Shipcall*) untuk perusahaan pelayaran petikemas dan non-petikemas, dan volume barang (*throughput*) untuk pemilik barang petikemas dan non-petikemas.

Kriteria Pengelompokan Key Account pada Level Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan IPC

Pengelompokan Key Account / Key Account Grouping	Kriteria di Level Kantor Pusat / Criteria at Head Office Level	Kriteria di Level Cabang Pelabuhan / Criteria at Port Branch Level
Klaster 1 (<i>Executive Customer</i>) / Cluster 1 (Executive Customer)	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat 1 – 10. / Customers giving contribution to the Company ranked 1-10.	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat 1 – 3. / Customers giving contribution to the Company ranked 1-3.
Klaster 2 (<i>Prime Customer</i>) / Cluster 2 (Prime Customer)	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat 11 – 20. / Customers giving contribution to the Company ranked 11-20.	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat 4 – 10. / Customers giving contribution to the Company ranked 4-10.
Klaster 3 (<i>Regular Customer</i>) / Cluster 3 (Regular Customer)	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat di atas 20. / Customers giving contribution to the Company ranked beyond the top 20.	Pelanggan yang memberikan kontribusi kepada Perseroan pada peringkat di atas 10. / Customers giving contribution to the Company ranked beyond the top 10.

conducting transactions with the Company and the efficiency of customer relations service activities by providing service facilities specifically designed for key account customers.

KAM Focus

The focus of KAM is divided into 2 (two) groups, namely:

1. Key Account Customers from Shipping Lines, including:
 - a. Container Shipping Lines;
 - b. Non-Container Shipping Lines.
2. Key Account Customers from Cargo Owners, including:
 - a. Container Cargo Owner;
 - b. Non-Container Cargo Owner.

Key Account Grouping

The Company classifies Key Accounts every year by grouping Key Accounts into 3 (three) groups, namely Cluster 1 (Executive Customer), Cluster 2 (Prime Customer), and Cluster 3 (Regular Customer). The classification of Key Account criteria at the Head Office and Port Branches is generally carried out based on revenue contribution to the Company, including but not limited to Gross Tonnage (GT) of vessels and the number of ship calls for container and non-container shipping lines, as well as the volume of cargo (throughput) for container and non-container cargo owners.

Key Account Grouping Criteria at Head Office and Port Branches of IPC



Pemberian Penghargaan bagi Key Account

IPC melakukan pemberian penghargaan bagi *Key Account* sebagai bentuk apresiasi Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada pelanggan utama yang telah berkontribusi besar terhadap Perseroan. Pada tahun 2020, pemberian penghargaan bagi *Key Account* dilakukan melalui ajang Penghargaan *Customer of the Year*.

ALOKASI DANA PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Pada tahun 2020, Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp416,90 juta. untuk mendukung pelaksanaan Survei Pelanggan tahun 2020, yang merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelanggan.

MEKANISME PENGAJUAN KELUHAN DAN KLAIM PELANGGAN

Mekanisme Pengajuan Keluhan Pelanggan

Perseroan memberi kesempatan bagi para pengguna jasa pelayanan kepelabuhanan untuk menyampaikan segala keluhan/pengaduan melalui sarana:

1. Datang langsung ke *Customer Service* atau Divisi Pelayanan Pelanggan di masing-masing Cabang Pelabuhan/anak perusahaan (*walk in*);
2. Portal *e-Service* dengan menu "*e-Care*" (*web*);
3. Layanan *Customer Service*:
Call Center : 1500-767
E-mail : customercare@indonesiaport.co.id
4. Melalui *Customer Visit*;
5. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada General Manager Cabang Pelabuhan/Manager Area Anak Perusahaan.

Selanjutnya, Petugas *Customer Service* Cabang Pelabuhan input semua keluhan pelanggan pada sistem CRM agar dapat tercatat di sistem dan dapat dilakukan *monitoring* perkembangannya.

Divisi Pelayanan Pelanggan Cabang Pelabuhan/anak perusahaan wajib melakukan pengecekan, analisa, evaluasi, dan *monitoring* dengan dibantu kelengkapan dokumen pendukung persyaratan dalam pengajuan keluhan pelanggan. Cabang Pelabuhan/anak perusahaan wajib memberikan tindak lanjut atas analisis dan evaluasi dokumen keluhan Pelanggan berupa:

1. Informasi tindak lanjut (*feed back*) yang berupa pemberitahuan kepada Pelanggan terkait respon penyelesaian tindak lanjut keluhan;

Rewards for Key Accounts

IPC gives rewards for Key Accounts as a form of appreciation by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to its key customers which have largely contributed to the Company. In 2020, rewards for Key Accounts were given at the Customer of the Year Award Event.

FUND ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

In 2020, the Company allocated funds amounting to Rp416.90 million for the implementation of Customer Survey in 2020, which is part of Corporate Social Responsibility to Customers.

CUSTOMER COMPLAINT AND CLAIM MECHANISM

Customer Complaint Mechanism

The Company provides the opportunity for users of port services to submit any complaints/reports through the following facilities:

1. Coming directly to the Customer Service Division of each Port Branch/subsidiary (*walk in*);
2. *e-Service* Portal through "*e-Care*" menu (*web*);
3. Customer Service:
Call Center: 1500-767
E-mail: customercare@indonesiaport.co.id
4. Through Customer Visit;
5. Through official letter to General Manager of Port Branches/Area Managers of Subsidiaries.

Furthermore, Customer Service Officers of Port Branches will input all customer complaints at the CRM system so as to be recorded in the system and monitor the development.

The Customer Service Division of Port Branches/subsidiaries is required to conduct checking, analysis, evaluation, and monitoring with the support of complete supporting requirement documents in submitting customer complaint. Port Branches/subsidiaries are required to follow up on the analysis and evaluation of customer complaint documents through:

1. Information on follow-up (*feed back*) in the form of notification to the Customers on the settlement of the complaint;

- Informasi penyelesaian/solusi yang telah dilakukan sebagai hasil akhir untuk menutup (*closing*) sebuah keluhan dan selanjutnya dicatat pada aplikasi CRM.

Staf Hubungan Pelanggan secara rutin melakukan *monitoring* di sistem CRM untuk mengetahui keluhan pelanggan yang belum direspon dan melebihi batas waktu SLA. Kemudian akan dilakukan konfirmasi melalui surat resmi yang ditujukan kepada General Manager Cabang Pelabuhan/Manager Area Anak Perusahaan agar segera ditindaklanjuti.

Pengajuan Klaim Pelanggan

Jika pada pelaksanaan kegiatan jasa kepelabuhanan di lingkungan Perseroan terdapat aset milik pelanggan yang mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian, pelanggan dapat mengajukan klaim kepada Perseroan atau pihak ketiga.

Pengajuan klaim dialamatkan kepada Cabang Pelabuhan tempat kejadian dengan menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:

- Surat tuntutan klaim dari Pelanggan;
- Berita Acara/kronologis kejadian;
- Estimasi kerugian;
- Foto kerusakan;
- Surat Keterangan dari pejabat atau instansi yang berwenang terkait dengan kejadian yang dialami;
- Kuitansi dan perincian biaya rumah sakit untuk klaim *bodily injury*;
- Dokumen-dokumen lain yang relevan.

Pengajuan klaim Pelanggan kepada Perseroan dilakukan paling lambat 45 hari kalender, terhitung sejak tanggal kejadian. Selanjutnya, Cabang Pelabuhan mencatat (input) semua klaim pelanggan pada sistem CRM agar dapat dilakukan *monitoring* perkembangannya.

Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan Kantor Pusat akan melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi, verifikasi dokumen, analisis teknis, dan penyelesaian klaim yang diajukan pelanggan dengan berkoordinasi dengan Divisi terkait.

Cabang Pelabuhan wajib memberikan informasi tentang tindak lanjut atas penanganan klaim pelanggan berupa:

- Pemberitahuan tentang telah dikirimnya surat tuntutan klaim ganti rugi Pelanggan kepada Cabang Pelabuhan dan/atau kepada Perseroan, misalnya Penanggungjawab Asuransi Perusahaan atau kepada Pihak Ketiga;

- Information of settlement/solution carried out to close a complaint shall be recorded in the CRM application.

Customer Relation officers routinely monitor the CRM system to find out customer complaints that have not been responded and have exceeded the SLA deadline. Furthermore, confirmation will be made via an official letter addressed to the General Manager of Port Branches/Area Manager of Subsidiaries for immediate follow-up.

Customer Claim Submission

If during the implementation of port service activities within the Company there are assets belonging to the customer that are damaged and inflicting losses, the customer can submit claim to the Company or a third party.

Submission of claim is addressed to the Port Branch where the incident occurred by submitting the following documents:

- Claim letter from the Customer;
- Minutes/chronology of events;
- Estimated losses;
- Photograph of the damage;
- Statement from official or authorized party related to the incident experienced;
- Receipts and details of hospital costs for bodily injury claims;
- Other relevant documents.

Customer claim shall be submitted to the Company no later than 45 calendar days from the date of the incident. Furthermore, the Port Branch inputs all customer claims in the CRM system so that the development can be monitored.

The Business Alliance and Customer Relations Division of the Head Office will conduct follow-up through clarification, document verification, technical analysis, and settlement of claim submitted by the customer by coordinating with relevant divisions.

The Port Branch is required to provide follow-up information on the handling of customer claims in the form of:

- Notification of the submission of claim for compensation from the Customer to the Port Branch and/or to the Company, for example the Party in Charge of the Company's Insurance or to a Third Party;



2. Pembayaran ganti rugi klaim yang telah dibayarkan oleh Pihak Asuransi Perusahaan/Cabang Pelabuhan/Pihak Ketiga.

2. Claim compensation that has been paid by the Insurance Company/Port Branch/Third Party.

Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan Kantor Pusat melakukan kegiatan *monitoring* status dan penyelesaian klaim pelanggan di setiap Cabang Pelabuhan untuk melihat apakah proses penyelesaian klaim sudah sesuai dengan prosedur yang distandarkan dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan Kantor Pusat juga bertugas untuk membuat laporan periodik terkait hasil *monitoring* dan evaluasi penyelesaian klaim pelanggan setiap triwulan.

The Business Alliance and Customer Relations Division of the Head Office monitors the status and settlement of customer claims at each Port Branch to see whether the claim settlement process is in accordance with the standard procedures and does not exceed the specified time limit. The Business Alliance and Customer Relations Division of the Head Office is also responsible for making periodic reports on the results of monitoring and evaluation of the customer claim settlement every quarter.

Laporan Penanganan Keluhan Pelanggan Tahun 2020 Melalui Aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM)

Selama tahun 2020, terdapat 559 laporan keluhan yang diterima oleh IPC melalui aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM), dengan uraian sebagai berikut:

Customer Complaint Handling Report in 2020 Through Customer Relationship Management (CRM) Application

In 2020, IPC received 559 reports through the Customer Relationship Management (CRM) application with the following description:

Laporan Penanganan Keluhan Pelanggan Tahun 2020 via CRM

Customer Complaint Handling Report via CRM in 2020

No.	Klasifikasi Masalah / Issue Classification	Ditutup / Closed	Dalam Penanganan / Processed	Baru / New	Jumlah / Total
1.	<i>Autocollection</i>	13	3	-	16
2.	<i>Billing</i>	5	-	-	5
3.	Bisnis & Prosedur / Business & Procedure	7	-	-	7
4.	Cetak Kartu / Card Printing	6	-	-	6
5.	Fasilitas / Facilities	10	1	-	11
6.	Keamanan / Security	1	1	-	2
7.	Klaim / Claim	6	1	1	8
8.	Nota / Receipt	84	42	2	128
9.	Operasi / Operation	4	1	-	5
10.	<i>Order/Request</i>	90	1	-	91
11.	Pembayaran / Payment	34	2	-	36
12.	Pengalihan Agen / Agent Transfer	1	-	-	1
13.	Peralatan / Equipment	1	-	-	1
14.	Pertanyaan / Inquiries	4	-	-	4
15.	Perubahan Data / Data Change	42	1	-	43
16.	Sistem Informasi / Information System	12	-	-	12
17.	Tambah Limit Kartu / Card Limit Increase	1	-	-	1
18.	Tarif / Tariff	8	1	-	9
19.	Keluhan Lainnya / Other Complaints	193	18	2	213
Jumlah / Total		522	72	5	599

Melalui Kegiatan *Customer Visit* Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat 156 keluhan yang disampaikan oleh Pelanggan melalui kegiatan *Customer Visit* ke-12 Cabang Pelabuhan yang diselenggarakan baik secara langsung maupun *via online*. Dari total keluhan yang disampaikan tersebut, keluhan paling banyak berkaitan dengan Fasilitas di Cabang Pelabuhan sebesar 62 keluhan atau 39,74 persen, diikuti oleh Kebijakan sebesar 21 keluhan atau 13,46 persen, dan Keuangan sebesar 18 keluhan atau 11,54 persen.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Survei Pelanggan

Kegiatan Survei Pelanggan merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan dan menjadi salah satu dasar dalam upaya peningkatan *level of service* kepada pelanggan. Adapun tujuan pelaksanaan Survei Pelanggan adalah:

1. Mengukur serta mengetahui harapan (ekspektasi) dan persepsi pelanggan terhadap kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan;
2. Mengukur loyalitas pelanggan terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. Mengukur ketidakpuasan pelanggan terhadap jasa kepelabuhanan;
4. Mengukur kepuasan pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terhadap pesaingnya;
5. Membandingkan hasil survei tingkat kepuasan pelanggan saat ini dengan hasil survei tahun sebelumnya;
6. Sebagai pedoman penyusunan strategi dan rencana aksi (*strategy and action plan*) perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya;
7. Menunjukkan komunikasi dan komitmen terhadap kualitas kepada pelanggan;
8. Menjadi masukan bagi Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Survei Pelanggan Tahun 2020

Survei Pelanggan dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 4 Desember 2020, dengan melibatkan 1.071 responden dari 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan. Adapun lingkup pelayanan yang disurvei meliputi Pelayanan Nakhoda, Pelayanan *Shipping Agent*, Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas, Pelayanan Bongkar Muat Barang Non-Peti Kemas, dan Pelayanan Terminal Penumpang. Rincian sebaran responden adalah sebagai berikut:

Through *Customer Visit* Activity in 2020

During 2020, there were 156 complaints submitted by Customers through *Customer Visit* activities of the 12 Port Branches which were held both in person and online. Of the total complaints submitted, the most complaints were related to Facilities at the Port Branches amounting to 62 complaints or 39.74 percent, followed by Policies with 21 complaints or 13.46 percent, and Finance with 18 complaints or 11.54 percent.

ACHIEVEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR CUSTOMERS

Customer Survey

Customer Survey activity is part of the Company's Key Performance Indicators (KPI) and the basis for efforts to increase the level of service to customers. The objectives of Customer Survey implementation are:

1. Measuring and knowing the expectations and perceptions of customers on the performance of port services;
2. Measuring customer loyalty to port services;
3. Measuring customer dissatisfaction with port services;
4. Measuring satisfaction of the customers of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with its competitors;
5. Comparing the current results of the customer satisfaction survey with the survey results from the previous year;
6. Providing guideline for the formulation of strategy and action plan for overall improvement in performance in the following period;
7. Demonstrate communication and commitment to quality to the customers;
8. Providing input for the management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to improve and enhance the company's performance in a sustainable manner.

2020 Customer Survey Implementation

The Customer Survey was conducted through data collection from October 20 to December 4, 2020, involving 1,071 respondents from 12 (twelve) Port Branches. The scope of services surveyed includes captain services, shipping agent services, container stevedoring services, non-container cargo stevedoring services, and passenger terminal services. The distribution of respondents is described as follows:



Persebaran Responden Survei Pelanggan Tahun 2020

Distribution of Customer Survey Respondents in 2020

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Nahkoda / Captain	Shipping Agent	Non-Peti Kemas / Non-Container	Peti Kemas / Container	Penumpang / Passenger	Total
1.	Tanjung Priok	50	104	49	82	35	320
2.	Panjang	10	31	29	35	N/A	105
3.	Palembang	7	23	27	31	N/A	88
4.	Pontianak	10	15	10	40	37	112
5.	Teluk Bayur	10	24	10	25	N/A	69
6.	Cirebon	10	19	16	N/A	N/A	45
7.	Bengkulu	8	11	23	8	N/A	50
8.	Banten	8	30	20	N/A	N/A	58
9.	Jambi	4	25	13	24	N/A	66
10.	Pangkal Balam	5	14	14	N/A	23	56
11.	Tanjung Pandan	8	18	10	N/A	25	61
12.	Sunda Kelapa	N/A	27	14	N/A	N/A	41
Total Responden / Total Respondents		130	341	235	245	120	1.071

Hasil Survei Pelanggan Tahun 2020

Hasil Survei Pelanggan yang dilaksanakan selama tahun 2020 tercermin dari Indeks Kepuasan Pelanggan dan Indeks Loyalitas Pelanggan (skala Likert 1 – 5) serta Indeks Ketidakpuasan Pelanggan dan Indeks Keterikatan Pelanggan (skala Likert 10 – 100 persen).

Indeks Kepuasan Pelanggan

Secara korporat, Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2020 sebesar 4,68, lebih tinggi dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 4,58 dan 4,67. Indeks tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 sebesar 4,67.

Tercapainya target kepuasan pelanggan telah memberikan manfaat positif pada peningkatan pendapatan Perseroan, seperti yang telah diuraikan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. Hal ini menunjukkan bahwa CSR terkait konsumen telah mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

2020 Customer Survey Results

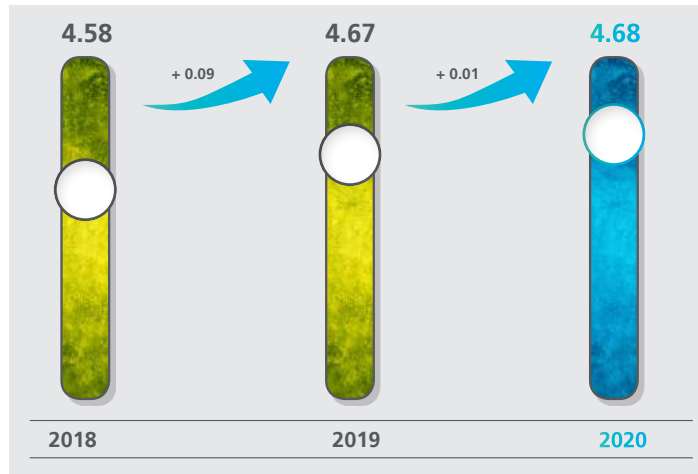
The results of the Customer Survey in 2020 are reflected in the Customer Satisfaction Index and Customer Loyalty Index (1 - 5 Likert scale) as well as the Customer Dissatisfaction Index and Customer Engagement Index (10 - 100 percent Likert scale).

Customer Satisfaction Index

The 2020 corporate Customer Satisfaction Index was 4.68, higher than that of 2018 and 2019 at 4.58 and 4.67, respectively. The index has exceeded the target set in the 2020 RKAP at 4.67.

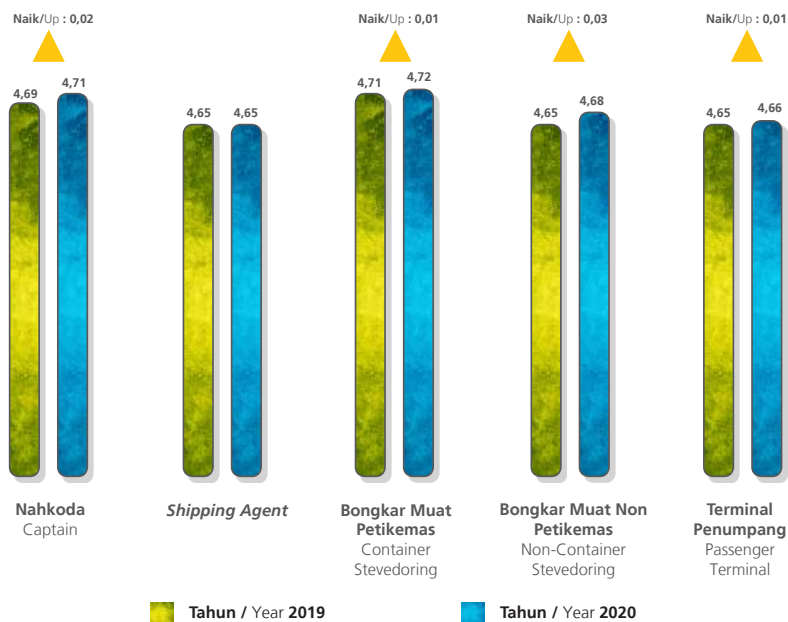
The achievement of customer satisfaction target provided positive benefits to increasing the Company's revenue as described in the Management Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report. This shows that CSR related to consumers has driven the achievement of sustainable development, especially in the economic and social aspects.

Indeks Kepuasan Pelanggan Secara Korporat Tahun 2018 – 2020 Corporate Customer Satisfaction Index 2018 – 2020



Indeks Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2019 – 2020 Customer Satisfaction Index by Service Type 2019 – 2020

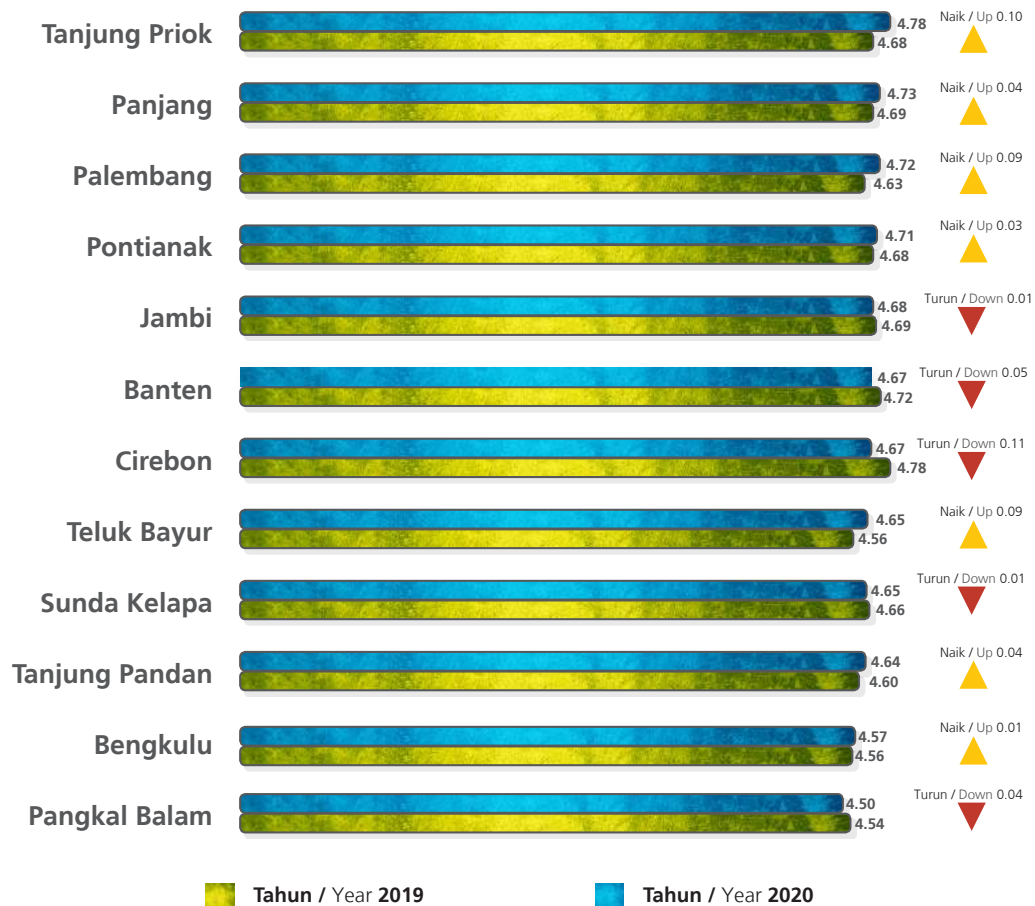
Jenis Pelayanan / Service Type	2020	2019	Keterangan / Description
Nahkoda / Captain	4,71	4,67	Naik : 0,02 / Increased: 0.02
Shipping Agent	4,65	4,65	-
Bongkar Muat Peti Kemas / Container Stevedoring	4,72	4,71	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Bongkar Muat Non-Peti Kemas / Non-Container Stevedoring	4,68	4,65	Naik : 0,03 / Increased: 0.03
Terminal Penumpang / Passenger Terminal	4,66	4,65	Naik : 0,01 / Increased: 0.01





Indeks Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Cabang 2019 – 2020 Customer Satisfaction Index by Port Branch Pelabuhan Tahun 2019 – 2020

Cabang Pelabuhan / Port Branch	2020	2019	Keterangan / Description
Tanjung Priok	4,71	4,68	Naik : 0,03 / Increased: 0.03
Palembang	4,70	4,66	Naik : 0,04 / Increased: 0.04
Panjang	4,70	4,70	-
Jambi	4,68	4,68	-
Bengkulu	4,67	4,66	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Pontianak	4,67	4,66	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Tanjung Pandan	4,67	4,66	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Cirebon	4,66	4,66	-
Teluk Bayur	4,66	4,63	Naik : 0,03 / Increased: 0.03
Banten	4,64	4,65	Turun : 0,01 / Decreased: 0.01
Sunda Kelapa	4,62	4,65	Turun : 0,03 / Decreased: 0.01
Pangkal Balam	4,62	4,59	Naik : 0,03 / Increased: 0.03



Indeks Loyalitas Pelanggan

Secara korporat, Indeks Loyalitas Pelanggan tahun 2020 sebesar 4,70, lebih tinggi dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 4,59 dan 4,65.

Customer Loyalty Index

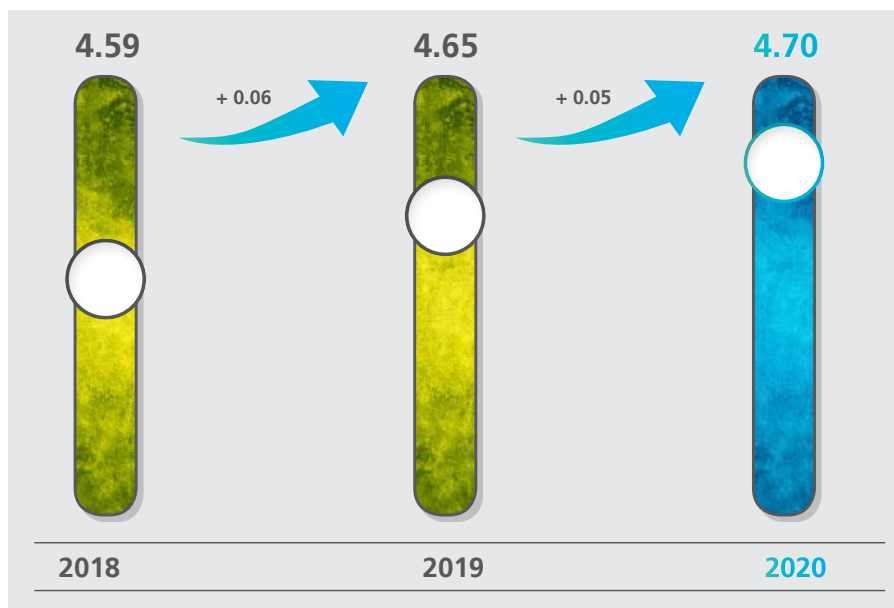
The 2020 corporate Customer Loyalty Index was 4.70, higher than that of 2018 and 2019 at 4.59 and 4.65, respectively.

Tercapainya loyalitas pelanggan telah memberikan manfaat positif pada peningkatan pendapatan Perseroan, seperti yang telah diuraikan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. Hal ini menunjukkan bahwa CSR terkait konsumen telah mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

The achievement of customer loyalty provided positive benefits to increasing the Company's revenue as described in the Management Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report. This shows that CSR related to consumers has driven the achievement of sustainable development, especially in the economic and social aspects.

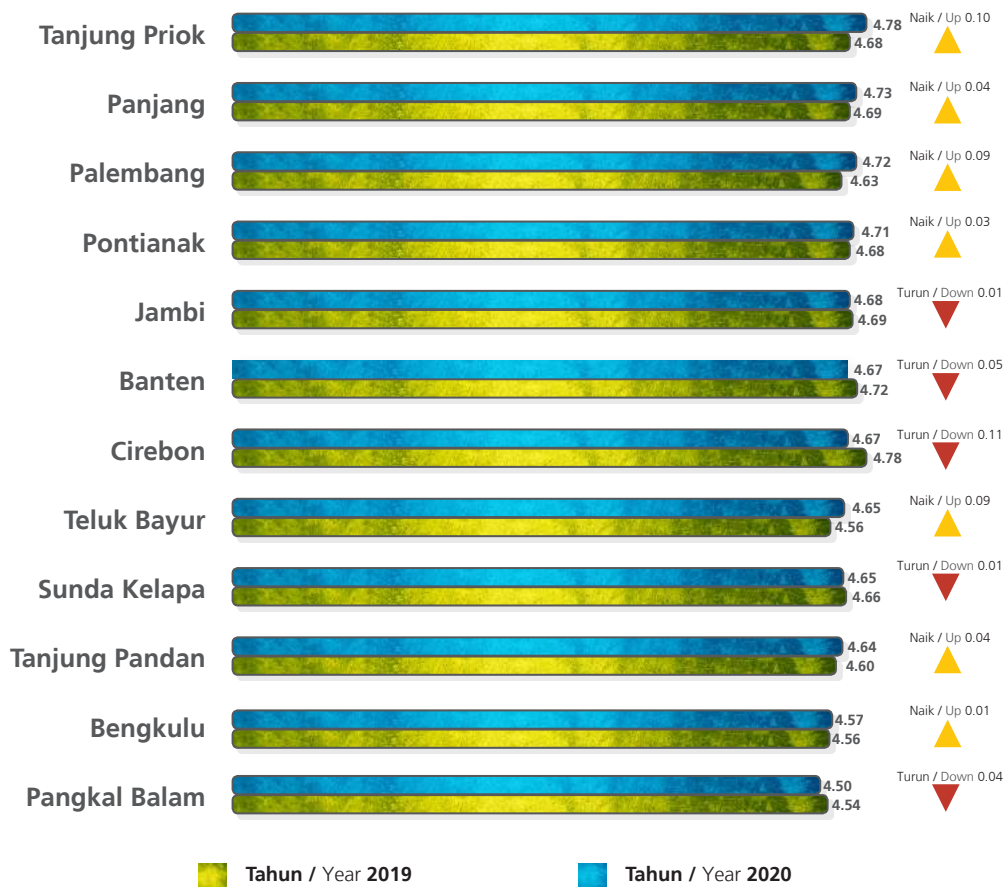
Indeks Loyalitas Pelanggan Secara Korporat Tahun 2018 – 2020

2018 – 2020 Corporate Customer Loyalty Index



Indeks Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Cabang Pelabuhan Tahun 2019 – 2020 **2019 – 2020 Customer Loyalty Index by Port Branch**

Cabang Pelabuhan / Port Branch	2020	2019	Keterangan / Description
Tanjung Priok	4,78	4,68	Naik : 0,10 / Increased: 0.10
Panjang	4,73	4,69	Naik : 0,04 / Increased: 0.04
Palembang	4,72	4,63	Naik : 0,08 / Increased: 0.08
Pontianak	4,71	4,68	Naik : 0,02 / Increased: 0.02
Jambi	4,68	4,69	Turun : 0,01 / Decreased: 0.01
Banten	4,67	4,72	Turun : 0,05 / Decreased: 0.05
Cirebon	4,67	4,78	Turun : 0,11 / Decreased: 0.11
Teluk Bayur	4,65	4,56	Naik : 0,08 / Increased: 0.08
Sunda Kelapa	4,65	4,66	Turun : 0,01 / Decreased: 0.01
Tanjung Pandan	4,64	4,60	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Bengkulu	4,57	4,56	Naik : 0,01 / Increased: 0.01
Pangkal Balam	4,50	4,54	Turun : 0,04 / Decreased: 0.04



Indeks Ketidakpuasan Pelanggan

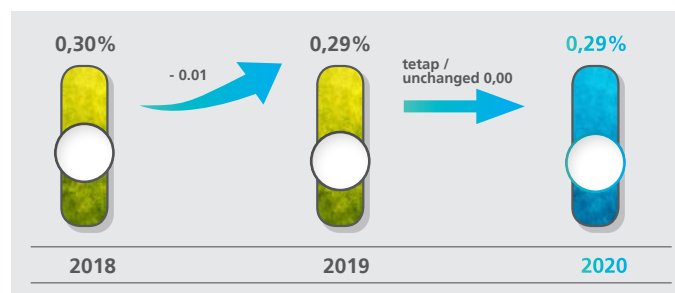
Secara korporat, Indeks Ketidakpuasan Pelanggan tahun 2020 sebesar 0,29%, tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 sebesar 0,29%, namun lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 0,30%.

Customer Dissatisfaction Index

The 2020 corporate Customer Dissatisfaction Index was 0.29%, unchanged from 0.29% in 2019, but lower than that of 2018 at 0.30%.

Indeks Ketidakpuasan Pelanggan Secara Korporat Tahun 2018 – 2020

2018 – 2020 Corporate Customer Dissatisfaction Index



Indeks Keterikatan Pelanggan

Pada tahun 2020, Tingkat *Customer Engagement* tercatat sebesar 94,97 persen, naik 2,76 persen dari Tingkat *Customer Engagement* di 2019 sebesar 92,21 persen. Indeks Keterikatan Pelanggan menunjukkan bahwa tingkat keterikatan Perseroan dengan Pelanggan termasuk kategori "Tinggi".

Customer Engagement Index

In 2020, the Customer Engagement Rate was recorded at 94.97 percent, up 2.76 percent from the previous Customer Engagement Rate in 2019 of 92.21 percent. The Customer Engagement Index shows that the Customer's engagement rate with the Customer was in "High" category.

Tingkat *Engagement* Tahun 2019 – 2020

2019 – 2020 *Engagement* Rate



Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Pelayanan Pelanggan

Daftar penghargaan dan sertifikasi terkait pelayanan pelanggan, termasuk Sistem Manajemen Mutu yang berhasil diperoleh oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penghargaan atas Pencapaian Survei Pelanggan di Cabang Pelabuhan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu IPC Tahun 2020

Awards and Certifications in Customer Service

The awards and certifications related to customer service, including the Quality Management System that were successfully obtained by the Company throughout 2020, are described as follows:

Award for Achievement of Customer Survey at Port Branches and Certification of IPC Quality Management System Certification in 2020

Penghargaan / Awards

1. Penghargaan "The Best Branch" kepada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok atas pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 4,71 dari skala Likert 5 dan Indeks Loyalitas Pelanggan sebesar 4,78 dari skala Likert 5, tertinggi dari seluruh Cabang Pelabuhan Perseroan. / "The Best Branch" Award to Tanjung Priok Port Branch for the achievement of Customer Satisfaction Index of 4.71 out of 5 Likert scale and Customer Loyalty Index of 4.78 out of 5 Likert scale, the highest of all Port Branches of the Company.
2. Penghargaan "The Most Improved Branch" kepada Cabang Pelabuhan Palembang atas kenaikan paling besar sebesar 0,04 dari Indeks Kepuasan Pelanggan 2019 sebesar 4,66 dari skala Likert 5 menjadi 4,70 dari skala Likert 5 di tahun 2020. / "The Most Improved Branch" Award to Palembang Port Branch for the highest increase in Customer Satisfaction Index by 0.04, from 4.66 out of 5 Likert scale in 2019 to 4.70 out of 5 Likert scale in 2020

Sertifikasi / Certifications

Sertifikat ISO 9001 : 2015 tentang *Quality Management Systems – Requirements* yang diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Service kepada: / ISO 9001:2015 Certificate on Quality Management Systems – Requirements issued by Sucofindo International Certification Service to:

1. Kantor Pusat / Head Office
2. Cabang Tanjung Priok / Tanjung Priok Port Branch
3. Cabang Panjang / Panjang Port Branch
4. Cabang Banten / Banten Port Branch
5. Cabang Cirebon / Cirebon Port Branch
6. Cabang Jambi / Jambi Port Branch
7. Cabang Bengkulu / Bengkulu Port Branch
8. Cabang Teluk Bayur / Teluk Bayur Port Branch
9. Cabang Palembang / Palembang Port Branch
10. Cabang Pontianak / Pontianak Port Branch
11. Cabang Pangkal Balam / Pangkal Balam Port Branch
12. Cabang Tanjung Pandan / Tanjung Pandan Port Branch
13. Cabang Sunda Kelapa / Sunda Kelapa Port Branch

Masa berlaku : 28 Desember 2020 – 27 Desember 2023 / Validity period: December 28, 2020 – December 27, 2023



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018

Reference Content of Annual Report with Criteria
for Annual Report Award (ARA) 2018

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
I. Umum / General		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. / Annual Report is presented in good and correct Indonesian and it is recommended to present the report also in English.		√
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. / Annual report is printed in good quality and use type and font so that the text is easy to read.		√
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. / Annual report should state clearly the identity of the company.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: / Name of company and year of the annual report is placed on: 1. Sampul muka; / Front cover; 2. Samping; / Side; 3. Sampul belakang; / Back cover; 4. Setiap halaman. / Every page.	√
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. / Annual Report is presented in the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. / Covers the latest annual report and, at the least, the annual report of the past 4 years.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Key Financial Data Highlights		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk Perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Business results information in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: / The information shall include, among others: 1. Penjualan/pendapatan usaha; / Operating sales/revenues; 2. Laba (rugi); / Profit (loss): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; / Attributable to owner of parent entity; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali; / Attributable to non-controlling interest; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: / Comprehensive income for the current period: • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; / Attributable to owner of parent entity; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali; / Attributable to non-controlling interest; 4. Laba (rugi) per saham. / Earnings (loss) per share.	10 - 11
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Financial position information in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: / The information shall include, among others: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; / Total investment in associate entities; 2. Jumlah aset; / Total assets; 3. Jumlah liabilitas; / Total liabilities; 4. Jumlah ekuitas. / Total equity.	8 - 10
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. / Information includes 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the industry the company.	14
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. / Share price information in the form of table and chart.	Informasi memuat: / The information shall include: 1. Jumlah saham yang beredar; / Total outstanding shares; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: / Information in the form of table shall include: • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Market capitalization based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Highest, lowest, and closing prices based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Share trading volume at Stock Exchange on which the shares are listed; 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: / Information in the form of chart shall include, among others: • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Closing price based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. / Share trading volume at Stock Exchange on which the shares are listed for a quarterly basis during the last 2 (two) fiscal years.	18
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan / Note: If the company does not have market capitalization, share price information, and share trading volume, to be disclosed as such.		



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. / Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds within the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: / The information shall include: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); / Total outstanding bonds/ sukuk/ convertible bonds; 2. Tingkat bunga/imbalan; / Interest/return rate; 3. Tanggal jatuh tempo; / Maturity date; 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. / Bonds/sukuk rating in 2017 and 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. / Note: If the company does not have bonds/ sukuk/ convertible bonds, to be disclosed as such.	19 - 20
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Reports of Board of Commissioners and Board of Directors		
Laporan Dewan Komisaris. / Report of Board of Commissioners.	Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; / Assessment on the performance of Board of Directors on company's management and the basis for the assessment; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; / Perspective on company's business prospects set by the Board of Directors and the basis of consideration; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; / Perspective on the implementation/management of whistleblowing system (WBS) at the company and the role of Board of Commissioners in WBS; and 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. / Changes in the composition of Board of Commissioners and the reason behind the change (if any).	36 - 61
Laporan Direksi. / Report of Board of Directors.	Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: / Analysis on company's performance, which shall include, among others: • Kebijakan strategis; / Strategic policies; • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; / Comparisons between realizations and targets; • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; / Obstacles faced by the company and the steps to address them 2. Analisis tentang prospek usaha; / Analysis on business prospects; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan / Development of corporate governance implementation in the fiscal year; and 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. / Changes in the composition of Board of Directors (if any) and the reason behind the change.	62 - 97
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. / Signature of members of Board of Commissioners and Board of Directors.	Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; / Signatures are set on a separate page; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; / Statements that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the annual report; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; / Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions; 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. / A written explanation in a separate letter from the member of Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the concerned member.	98 - 99
IV. Profil Perusahaan / Company Profile		
Nama dan alamat lengkap perusahaan. / Name and address of the company	Memuat informasi antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. / Containing information on, among others, name and address, postal code, telephone number, facsimile number, email, and website of the company.	102 - 103
Riwayat singkat perusahaan. / Brief history of the company.	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. / Includes, among others, date/year of establishment, name, change to the company's name (if any), and effective date for the change to the company's name. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan / Note: if the company has not changed its name, to be disclosed as such.	104 - 107

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Bidang usaha. / Business lines	Memuat antara lain: / Contains, among others: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; / Company's business activities based on the latest articles of association; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; / Business activities carried out; 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. / Products and/or services generated.	116 - 120
Struktur Organisasi dalam bagan. / Organization structure in a chart.	Meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi / Contains the names and positions/titles, at the very least, one level below the Board of Directors.	154 - 155
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan. / Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Visi perusahaan; / Company's vision; 2. Misi perusahaan; / Company's mission; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-review dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; / Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the current fiscal year; 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. / Statement on corporate culture established within the company.	110 - 114, 796 - 802
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. / Identity and brief curriculum vitae of the members of Board of Commissioners.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama; / Name; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); / Position and tenure (including position at the company or other institutions); 3. Umur; / Age; 4. Domisili; / Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); / Education (Field of Study and Educational institution); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); / Work experience (Position, Institution, and Service Period); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. / History of the appointment (period and position) as members of Board of Commissioners since the first appointment.	124 - 132
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. / Identity and brief curriculum vitae of the members of Board of Directors.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama; / Name; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); / Position and tenure (including position at the company or other institutions); 3. Umur; / Age; 4. Domisili; / Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); / Education (Field of Study and Educational institution); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); / Work experience (Position, Institution, and Service Period); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. / History of the appointment (period and position) as members of Board of Directors since the first appointment.	133 - 146
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. / Number of employees (comparative in 2 years) and data of employee competency development which reflects the presence of opportunity for each level of organization.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; / Number of employees for each level of the organization; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; / Number of employees for each level of education; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; / Number of employees based on employment status; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; / Data of employee competency development conducted in the fiscal year, consisting party (position level) attending the training, type of training, and objective of training; 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. / Costs incurred for employee competency development in the fiscal year.	162 - 167
Komposisi Pemegang saham. / Composition of Shareholders	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; / Detailed name of shareholders covering 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: / Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5 persen atau lebih saham; / Names of shareholders having 5 percent or more shares; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5 persen; / Public shareholder group with share ownership each less than 5 percent; c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. / Names of Directors and Commissioners as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. Note: if the Directors and Commissioners do not have direct or indirect shares, to be disclosed as such.	169 - 170



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Daftar perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel. / List of subsidiaries and/or associate entities in table.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama perusahaan anak dan/atau asosiasi; / Name of subsidiaries and/or associate entities; 2. Persentase kepemilikan saham; / Shareholding percentage; 3. Keterangan tentang bidang usaha perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi; / Information on the line of business of subsidiaries and/or associate entities; 4. Keterangan status operasi perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). / Information regarding the operational status of subsidiaries and/or associate entities (already operating or not yet operating).	172 - 213
Struktur grup perusahaan. / Company's group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, perusahaan anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV). / Company's group structure in a chart describing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	168
Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. / Chronology of share issuance (including private placement) and/or share listing, from the initiation of issuance to the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); / Year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and offering price for each corporate action; 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); / Number of shares listed after each corporate action; 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. / Name of stock exchange on which the company's shares are listed Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have chronology of share listing, to be disclosed as such.	170 - 171
Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. / Chronology of other securities issuance and/or listing, from the initiation of issuance to the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; / Name of other securities, year of other securities issuance, interest/return rate of other securities and maturity date; 2. Nilai penawaran efek lainnya; / Issuance value of other securities; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; / Name of stock exchange on which the other securities are listed 4. Peringkat efek. / Rating of securities. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have chronology of other securities issuance and listing, to be disclosed as such.	19 - 20, 171
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. / Name and address of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: / The information shall contain, among others: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; / Name and address of Share Registrar/party administrating the company's shares; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; / Name and address of Public Accounting Firm; 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. / Name and address of securities rating agency.	214 - 217
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. / Awards received in the last fiscal year and/or valid certificates in the last fiscal year, both of national scale and international scale.	Informasi memuat antara lain: / The information shall contain, among others: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; / Name of award and/or certificate; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; / Year in which the award and/or certificate is obtained; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; / Institution presenting the award and/or certificate; 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). / Validity period (for certification).	28 - 31
Nama dan alamat perusahaan anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). / Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any).	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama dan alamat perusahaan anak; dan / Name and address of subsidiaries; and 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. / Name and address of branch/representative offices. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki perusahaan anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have any subsidiaries, branch offices, and representative offices, to be disclosed as such.	121 - 123, 172 - 213

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Informasi pada Website Perusahaan. / Information on Company's Website.	Meliputi paling kurang: / Contains, at the very least: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; / Information on shareholders and end beneficiary; 2. Isi Kode Etik; / Contents of Code of Conduct; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; / Information on General Meeting of Shareholders (GMS) which shall include, among others, agenda to be discussed in the GMS, summary of GMS minutes, and information on important dates, namely GMS announcement date, GMS summons date, GMS date, and announcement date of summary of GMS minutes; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); / Separate annual financial statements (the past 5 years); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; / Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors; 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. / Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	780
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. / Education and/or training activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): / Contains information on, at the very least (type and relevant party): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; / Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; / Education and/or training for Board of Directors; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; / Education and/or training for Audit Committee; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; / Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; / Education and/or training for Other Committees; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; / Education and/or training for Corporate Secretary; 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. / Education and/or training for Internal Audit Unit attended in the fiscal year. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan. / Note: if there is no education and/or training conducted in the fiscal year, to be disclosed as such.	485 - 486, 577, 631, 654, 672 - 673, 689, 703
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis on Company's Performance		
Tinjauan operasi per segmen usaha. / Operational overview per business segment.	Memuat uraian mengenai: / Contains description of: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha; / Each business segment of the company; 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: / Performance per business segment, among others: • Produksi; / Productions; • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; / Increase/decrease of production capacities; • Penjualan/pendapatan usaha; / Sales/ revenues; • Profitabilitas. / Profitability.	272 - 348
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel). / Description of company's financial performance, which includes financial performance comparison between the current year and the previous year, and the reason behind the increase/decrease of an account (in the form of narrative and table)	Antara lain mengenai: / Includes, among others: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; / Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; / Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities; 3. Ekuitas; / Equity; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; / Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period; 5. Arus kas. / Cash flows;	348 - 363
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. / Discussion and analysis on solvency and receivables collectability rate of the company, by presenting the calculation of ratios relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: / Describes: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; / Solvency, both short-term and long-term; 2. Tingkat kolektibilitas piutang. / Receivables collectability rate.	364 - 369
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). / Discussion on capital structure and management's policy on capital structure.	Penjelasan atas: / Describes: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; / Details of capital structure, consisting of interest/sukuk-and-equity-based debts; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); / Management's policy on capital structure; 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. / Basis for selecting the policy on capital structure by the management.	369 - 370



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
 Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. / Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last fiscal year.	<p>Penjelasan tentang: / Describes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; / Party conducting the commitment; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; / Objective of the commitment; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; / Source of fund expected to meet the commitments; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; / Denomination currency; 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. / Steps taken by the Company to protect against the related foreign exchange risk. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. / Note: if the company does not have any commitment related to capital goods investment in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	370 - 372
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. / Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year.	<p>Penjelasan tentang: / Describes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; Types of capital goods investment; 2. Tujuan investasi barang modal; dan / Objectives of capital goods investment; and 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. / Value of capital goods investment spent in the last fiscal year. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. / Note: if there is no realization of capital goods investment, to be disclosed as such.</p>	372 - 381
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. / Information on comparison between target set at the beginning of the fiscal year and the realization, and target or projection for the next year concerning revenue, profit, and others considered important for the company.	<p>Informasi memuat antara lain: / Contains information on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); / Comparison between target of the beginning of the fiscal year and the realization; 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. / Target or projection for the following year. 	384 - 393, 428 - 433
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. / Material information and fact subsequent to the date of accountant's report.	<p>Uraian mengenai kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. / Description on significant events that take place after the date of accountant's report, including the impact on the performance and business risk in the future.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. / Note: if there is no significant events subsequent to the date of accountant's report, to be disclosed as such.</p>	394
Uraian tentang prospek usaha Perusahaan. / Description of company's business outlook/prospects.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. / Description on company's business outlook/prospects related to the condition of industry and economy in general, complete with quantitative data from reliable sources.	418 - 428
Uraian tentang aspek pemasaran. / Description of marketing aspect.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. / Description of marketing aspect of company's products and/or services, such as marketing strategy and market share.	260 - 262
Uraian mengenai kebijakan dividen. / Description of dividend policy.	<p>Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, Memuat uraian mengenai: / Description of dividend policy and total cash dividend per share, and total dividend per year announced or paid in the last 2 (two) fiscal years. Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembagian dividen; / Dividend distribution policy; 2. Total dividen yang dibagikan; / Total dividend distributed; 3. Jumlah dividen kas per saham; / Total cash dividend per share; 4. Payout ratio; 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. / Date of announcement and payment of cash dividend for each year. <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. / Note: if there is no dividend distribution, to be disclosed as such.</p>	395 - 396
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. / Existing employee and/or management stock option plan (ESOP/ MSOP) carried out by the company up to the fiscal year.	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; / Total ESOP/MSOP shares and the realization; 2. Jangka waktu; / Term; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; / Requirements for entitled employees and/or management; 4. Harga exercise. / Exercise price. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no such program, to be disclosed as such.</p>	397

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). / Realization of the use of proceeds from public offering (in the event the company is required to submit the report of the use of proceeds).	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; / Total funds obtained; 2. Rencana penggunaan dana; / Plans for the use of funds; 3. Rincian penggunaan dana; / Details of the use of funds; 4. Saldo dana; / Balance; 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). / Date of approval of GMS on the change in the use of funds (if any). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. / Note: if there is no information on the realization of proceeds from public offering, to be disclosed as such.</p>	397
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. / Information on material transaction containing conflict of interest and/or transaction with affiliated parties.	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; / Name of the parties involved in the transactions and related affiliation; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; / Explanation on fairness of transaction 3. Alasan dilakukannya transaksi; / Reason for transaction; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; / Realization of transaction in the last fiscal year; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; / Company's policy related to review mechanism of the transaction; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. / Compliance with the related provisions. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. / If there is no transaction related to this issue, to be disclosed as such.</p>	398 - 408
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. / Description of changes in laws and regulations affecting the company in the last fiscal year.	<p>Uraian memuat antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan / Title of laws and regulations undergone changes; and b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. / The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statements that the impact is not significant. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / If there is no change in the laws and regulations in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	409
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. / Description of changes in accounting policies implemented by the company in the last fiscal year.	<p>Uraian memuat antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; / Changes in accounting policies; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; / Reason behind the changes in accounting policies; 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. / The quantitative impact on the financial statements. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no change in the accounting policies in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	410 - 414
Informasi kelangsungan usaha. / Information on business continuity.	<p>Pengungkapan informasi mengenai: / Discloses information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; / Matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year. 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; / Management's assessment on matters described in number 1; 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. / Assumptions used by the management in conducting assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. / Note: In the event that there are no matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year, to disclose the underlying assumption of the management which makes them believe that there are no matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year.</p>	415 - 418
VI. Tata Kelola Perusahaan / Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris. / Description of Board of Commissioners.	<p>Memuat antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; / Description of responsibilities of Board of Commissioners; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; / Assessment of performance of each committee under the Board of Commissioners and basis for assessment; 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). / Disclosure of Board Charter (guidelines and work procedures of Board of Commissioners). 	470 - 546



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Komisaris Independen (jumlah minimal 30 persen dari total Dewan Komisaris). / Independent Commissioner (minimum amount: 30 percent of the total members of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: / Contains information on: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan / Criteria to determine Independent Commissioner; and 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. / Statement of independency of each Independent Commissioner.	489 - 491
Uraian Direksi. / Description of Board of Directors.	Memuat antara lain: / Contains information on: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi / Scope of works and responsibilities of each member of Board of Directors. 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) / Assessment of performance of each committee under the Board of Directors (if any); 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). / Disclosure of Board Charter (guidelines and work procedures of Board of Commissioners).	546 - 607
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. / Assessment on GCG Implementation for 2018 fiscal year, which shall include, at the very least, the aspects of Board of Commissioners and Board of Directors	Memuat uraian mengenai: / Contains information on: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; / Criteria used in the assessment 2. Pihak yang melakukan penilaian; / Assessor 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; / Assessment score of each criteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; / Recommendation of assessment results; 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. / Reason of the lack implementation of recommendation. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. / Note: if there is no assessment on GCG implementation for 2015 fiscal year, to be disclosed as such.	818 - 823
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. / Description of policy of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.	Mencakup antara lain: / Contains information on: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; / Disclosure of proposal procedure to the determination of remuneration for the Board of Commissioners; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; / Disclosure of proposal procedure to the determination of remuneration for the Board of Directors; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; / Remuneration structure which shows remuneration component and nominal value per component for each member of Board of Commissioners; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; / Remuneration structure which shows remuneration component and nominal value per component for each member of Board of Directors; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; / Disclosure of indicator to determine the remuneration for Board of Directors. 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). / Disclosure of performance and non-performance bonuses, and/or share option received by each member of Board of Commissioner and Board of Directors (if any). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. / Note: if there are no performance and non-performance bonuses, and/or share option received by each member of Board of Commissioner and Board of Directors, to be disclosed as such.	608 - 613
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). / Frequency and Attendance Rate of Meetings attended by the majority members of Board of Commissioners (at minimum once in 2 (two) months), Board of Directors (at minimum once a month), and Joint Meetings of Board of Commissioners with the Board of Directors (at minimum once in 4 (four) months).	Informasi memuat antara lain: / Contains information on: 1. Tanggal Rapat / Meeting Date 2. Peserta Rapat / Meeting Participants 3. Agenda Rapat / Meeting Agenda untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. / for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meeting.	491 - 520, 582 - 602
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. / Information on main and controlling shareholders, both direct and indirect, up to the final individual owner.	Informasi dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. / Information in the form of scheme or diagram that separates the main shareholders with the controlling shareholders. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. / Note: main shareholder is a party who, either directly or indirectly, has 20 (twenty) percent, at the very least, votes of the entire shares with valid voting rights issued by the Company. but they are not controlling shareholders.	447 - 448

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. / Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners, and Main and/or Controlling Shareholders	<p>Mencakup antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; / Affiliations among the members of Board of Directors; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; / Affiliations between the members of Board of Directors and members of Board of Commissioners; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; / Affiliations between the members of Board of Directors and the Main and/or Controlling Shareholders; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan / Affiliations among the members of Board of Commissioners; 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. / Affiliations between the members of Board of Commissioners and the Main and/or Controlling Shareholders. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no affiliation, to be disclosed as such.</p>	488 - 489, 580 - 581
Komite Audit. / Audit Committee	<p>Mencakup penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; / Name, position, and tenure of members of audit committee; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; / Educational background (Field of Study and Educational institution) and work experience (Position, Institution, and Service Period); 3. Independensi anggota komite audit; / Independency of members of audit committee; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan / Description of activities of audit committee conducted in the fiscal year; and 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. / Meeting frequency and attendance rate of audit committee. 	624 - 645
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. / Nomination and/or Remuneration Committee.	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; / Name, position, and brief curriculum vitae of members of nomination and/or remuneration committee 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; / Independency of members of nomination and/or remuneration committee; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; / Description of activities of nomination and/or remuneration committee conducted in the fiscal year; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; / Meeting frequency and attendance rate of nomination and/or remuneration committee; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan / Statement of the establishment of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. / Policy on the succession of Board of Directors. 	664 - 685
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. / Other committees under the Board of Commissioners established by the company.	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; / Name, position, and brief curriculum vitae of members of other committees; 2. Independensi komite lain; / Independency of other committees; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan / Description of activities of other committees conducted in the fiscal year; and 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. / Meeting frequency and attendance rate of other committees. 	646 - 664
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. / Description of duties and functions of Corporate Secretary.	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; / Name, position, and brief work experience of corporate secretary; 2. Domisili; / Domicile; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan / Description of duties and responsibilities; and 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. / Description of duties of corporate secretary conducted in the fiscal year. 	685 - 693
Uraian mengenai unit audit internal. / Description of internal audit unit.	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; / Name of the head of internal audit unit; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; / Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; / Certification for the profession of internal auditor; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; / Position of internal audit unit in company's structure; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan / Description of activities of internal audit unit conducted in the fiscal year; and 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. / Party appointing and dismissing the head of internal audit unit. 	693 - 707



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Akuntan Publik. / Public Accountant.	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; / Name of public accountant and the year the public accountant conducts audit activity on the annual financial statements in the last 5 years; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; / Name of Public Accounting Firm and the year the Public Accounting Firm conducts audit activity on the annual financial statements in the last 5 years; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan / Amount of fee for each service provided by the Public Accounting Firm in the last fiscal year; and 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. / Other services provided by the Public Accounting Firm and public accountant other than the audit service on annual financial statements in the last fiscal year. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no other service, to be disclosed as such.</p>	714 - 717
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. / Description of company's risk management.	<p>Mencakup antara lain: / Contains, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; / Description of risk management system implemented by the company; 2. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; / Description of the results of review on risk management system conducted in the fiscal year; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan / Description of the risks faced by the company; and 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. / Efforts to manage the risks. 	718 - 743
Uraian mengenai sistem pengendalian intern. / Description of internal control system.	<p>Penyampaian informasi antara lain / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; / Brief description of internal control system, covering, among others, financial and operational control; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan / Description of the conformity of internal control system with the internationally recognized framework (COSO – internal control framework); and 3. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. / Description of the results of review on internal control system conducted in the fiscal year. 	743 - 767
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial. / Description of corporate social responsibility related to governance of social responsibility	<p>Informasi meliputi: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial; / Commitment to social responsibility; 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan; / Method and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts from company's activities; 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan; / Key stakeholders that are impacted by or influenced by the impact from company's activities; 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan; / Significant issues of social, economic, and environment related to the impact of company's activities; 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban; / Scope of positive corporate social responsibility activities that is the obligation or exceeds the obligation of the company; 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan value untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i>; / Strategies and work programs of the company in handling social, economic, and environmental issues in the framework of stakeholders engagements and improvement of values for stakeholders and shareholders; 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan / Various programs that exceed the minimum responsibilities of the company relevant to the business being carried out; and 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. / Funds and budgets for social responsibility activities. 	827 - 834

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia. / Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights.	Informasi meliputi: / Contains information on: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of Human Rights; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia; / Company's definition of the responsibility scope of the core subject of Human Rights; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia; / Corporate social responsibility planning in the field of Human Rights; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia; dan / Implementation of CSR initiatives in the field of Human Rights; and 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia. / Achievement and awards for the CSR initiatives in the field of Human Rights.	862 - 881
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil. / Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair Operations.	Informasi meliputi: / Contains information on: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of fair Operations; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil; / Company's definition of the responsibility scope of the core subject of fair Operations; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil; / Corporate social responsibility planning in the field of fair Operations; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; dan / Implementation of CSR initiatives in the field of fair Operations; and 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. / Achievement and awards for the CSR initiatives in the field of fair operations.	834 - 861
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. / Description of corporate social responsibility related to the environment.	Penyampaian informasi tentang: / Contains information on: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; / Commitment and policy of social responsibility regarding the environment; 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; / Significant impact and risk of environment related, either directly or indirectly, to the company; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; / Activities conducted in relation to the environmental programs that are relevant to the company's operations; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; / Implementation of CSR initiatives in the field of environment; 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan / Quantitative impact of the activities, such as the use of green material and energy that can be recycled, company's waste treatment system, mechanism to submit environmental complaints, consideration of environmental aspect in providing loans to the customers, and so on; and 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. / Certification in the field of environment owned by the company.	912 - 929
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. / Description of corporate social responsibility related to manpower and occupational health and safety.	Mencakup antara lain informasi tentang: / Contains information on, among others: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of manpower; 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan; / Scope and definition of social responsibility in manpower; 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan / Activities conducted and quantitative impact of such activities; and 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. / Manpower and occupational health and safety practices, such as gender equality and work opportunity, work facilities and safety, employee turnover rate, work accident rate, remuneration, mechanism to submit employment complaints, and so on.	881 - 911



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. / Description of corporate social responsibility related to responsibility to customers	Mencakup antara lain: / Contains information on, among others: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan / Activities conducted and quantitative impact of such activities; and 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. / Issues related to product responsibility, such as customer's health and safety, product information, facilities, amount and management of customer complaints, and so on.	930 - 945
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat. / Description of corporate social responsibility related to social and community development.	Mencakup antara lain informasi tentang: / Contains information on, among others: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan masyarakat; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of social and community development; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; / Social issues that are relevant to the company; 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan; / Social risks managed by the Company 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat; / Scope and definition of social responsibility in the field of social and community development; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; / Activities conducted and quantitative impact of such activities; 7. Biaya yang dikeluarkan; dan / Expenses; and 8. Terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. / Issues related to socio-community, such as the use of local manpower, empowerment of community around the company; improvement of social facilities and infrastructure, other form of donation, communication on anti-corruption policy and procedure, training on anti-corruption, and so on.	946 - 968
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. / Litigation faced by the company, subsidiaries, and members of Board of Commissioners and Board of Directors serving in the period of annual report.	Mencakup antara lain: / Contains information on, among others: 1. Pokok perkara/gugatan; / Principal case/claim; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; / Status of settlement of case/claim; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan / Risk faced by the company and nominal value of case/claim; and 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). / Administrative sanction imposed on the company, members of Board of Commissioners and Board of Directors, from the related authorities (capital market, bank institutions, and others) in the last fiscal year (or statement if there is no administrative sanction imposed on the company). Catatan: dalam hal perusahaan, perusahaan anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. / Note: if the company, subsidiaries, and members of Board of Commissioners and Board of Directors do not any litigation, to be disclosed as such.	786 - 788
Akses informasi dan data perusahaan. / Access to company's information and data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), <i>media massa</i> , <i>mailing list</i> , buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. / Description on the provision of access to company's information and data for the public, such as through website (in Indonesian Language and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, and so on.	776 - 786
Bahasan mengenai kode etik. / Discussion on code of conduct.	Memuat uraian antara lain: / Contains information on, among others: 1. Pokok-pokok kode etik; / Principles of code of conduct; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; / Disclosure that code of conduct is applicable for all levels of organization; 3. Penyebarluasan kode etik; / Dissemination of code of conduct; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan / Sanction for each type of violation regulated in the code of conduct (normative); and 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. / Total violations of code of conduct as well as the sanctions imposed in the last fiscal year. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no violation of code of conduct, to be disclosed as such.	788 - 796, 802 - 810

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Pengungkapan mengenai whistleblowing system. / Disclosure of whistleblowing system.	<p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: / Contains description of whistleblowing system mechanism, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; / Submission of violation report; 2. Perlindungan bagi whistleblower; / Protection for whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; / Management of complaint; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; / Party managing the complaint; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan / Total incoming and processed complaints in the last fiscal year; and 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. / Sanctions/follow-up activities on the settled complaints in the fiscal year. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no incoming and processed complaints in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	810 - 818
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. / Policy on the diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors	<p>Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. / Description of written policy of the Company on the diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors in terms of education (field of study), work experience, age, and gender.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. / Note: if there is no such policy, to be disclosed as such.</p>	613 - 616
VII. Informasi Keuangan / Financial Information		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. / Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Responsibility for Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. / Conformity to the regulations related to Responsibility for Financial Statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Opini auditor independen atas laporan keuangan. / Opinion of independent auditor on the financial statements.		Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Deskripsi Auditor Independen di Opini. / Description of the Independent Auditor in the Opinion.	<p>Deskripsi memuat tentang: / Describes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tanda tangan; / Names and signatures; 2. Tanggal Laporan Audit; dan / Date of Audit Report; and 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. / KAP and Public Accountant license numbers. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Laporan keuangan yang lengkap. / Complete financial statements.	<p>Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: / Contains complete elements of financial statements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan; / Statements of financial position; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; / Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Laporan perubahan ekuitas; / Statements of changes in equity; 4. Laporan arus kas; / Statements of cash flows; 5. Catatan atas laporan keuangan; / Notes to the financial statements; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan / Comparative information about the previous period; and 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). / Statements of financial position at the beginning of the previous period when the entity implemented an accounting policy retrospectively or prepared restatements of items in the financial statements, or when the entity reclassified the items in its financial statements (if relevant). 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Perbandingan tingkat profitabilitas. / Comparison of profitability rate.	Menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. / Displays the comparison of performance/ profit (loss) of the current year and of the previous year.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Laporan Arus Kas. / Cash Flows Statements.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: / Complies with the following provisions: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; / Classification for three activities: operating, investing, and financing; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; / Use of direct method to report cash flows from operating activities; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan / Separated presentation of cash inflows and/or cash outflows during the current year in the operating, investing, and financing activities; and 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. / Disclosure of non-cash transaction which must be stated in the notes to financial statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. / Accounting Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: / Contains, among others: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; / Statement of compliance with the FAS; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; / Basis for calculating and preparing the financial statements; 3. Pajak penghasilan; / Income tax; 4. Imbalan kerja; dan / Employee benefits; and 5. Instrumen Keuangan. / Financial Instruments.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. / Disclosure of transaction with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; / Name of related parties as well as the nature of relations with related parties; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan / Value of transactions and the percentage to the related total revenues and expenses; and 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. / Balance and the percentage to the related total asset or liabilities.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. / Disclosure of details related to taxes.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; / Fiscal reconciliation and calculation of current tax expenses; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; / Description of relationship between tax expenses (gains) and profit from accounting; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; / Statement that Taxable Profit (LKP) as the result of reconciliation becomes the basis in filling out the Annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax of 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan / Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position for each presentation period, and total deferred tax expenses (gains) recognized in the statements of profit or loss if the amount is not evident in total deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position; and 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. / Disclosure of the presence of tax dispute.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. / Disclosure of details related to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Metode penyusutan yang digunakan; / Method of depreciation used; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; / Description of the selected accounting policy, between the revaluation model and cost model; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan / Significant method and assumption used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation model) or disclosing the fair value of fixed assets (for cost model); 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. / Reconciliation of gross carrying amount and accumulation of depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period, by displaying: addition, deduction, and reclassification.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Kriteria Annual Report Award (ARA) 2018
Reference Content of Annual Report with Criteria for Annual Report Award (ARA) 2018

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. / Disclosure of details related to operating segments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; / General information covering the factors used in identifying the reported segments; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; / Information on profit or loss, assets, and liabilities of reported segments; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan / Reconciliation of total income of the segments, profit or loss of the reported segments, assets and liabilities of the segments, and other material elements of the segments to the related amount in the entity; and 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. / Disclosure at the entity's level, covering information on products and/or services, geographical area, and primary customers.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. / Disclosure of details related to Financial Instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; / Details of financial instruments owned based on their classification; 2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; / Fair value and the hierarchy for each group of financial instrument; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; / Description of risks related to the financial instruments, including market risk, credit risk, and liquidity risk. 4. Kebijakan manajemen risiko; dan / Risk management policy; and 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. / Quantitative analysis of risks related to the financial instruments.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Penerbitan laporan keuangan. / Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan / Date of financial statements authorized for publication; and 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. / Party responsible for authorizing the financial statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



07

Laporan Keuangan

Financial Report



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2020 and for the year then ended
with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-191	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title
2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

- : Arif Suhartono
- : Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
Jakarta 14310, Indonesia
- : Jl. Tunas Kelapa Raya / 167
RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa
Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat Indonesia
- : 61-21-4301080
- : Direktur Utama/President Director
- : Mega Satria
- : Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
Jakarta 14310, Indonesia
- : Jl. Senayan Blok HH.11/4 RT/RW 003/015
Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan Banten, Indonesia
- : 61-21-4301080
- : Direktur Keuangan/Finance Director

declare that:

1. I responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended.
2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. I am responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 25 Maret 2021 / March 25, 2021



Arif Suhartono
Direktur Utama / President Director

Mega Satria
Direktur Keuangan / Finance Director

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00282/2.1032/AU.1/06/0697-1/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00282/2.1032/AU.1/06/0697-1/1/III/2021

**The Shareholder and the Board of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00282/2.1032/AU.1/06/0697-
1/1/III/2021 (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00282/2.1032/AU.1/06/0697-
1/1/III/2021 (continued)

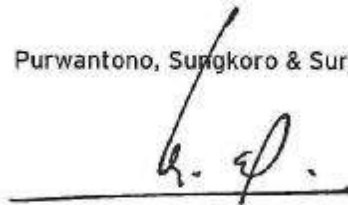
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

25 Maret 2021/March 25, 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5.298.274.315	2d,2e,2g,2v,5 43,44,45,46	15.603.533.329	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	11.090.879.218	2d,2e,2g,2v 6,43,44,45,46	2.596.701.126	Short-term investments
Piutang usaha - neto		2d,2h,2v		Trade receivables - net
Pihak ketiga	564.590.543	7,44,45,46	712.826.744	Third parties
Pihak berelasi	56.644.013	2e,43	135.198.738	Related parties
Piutang lain-lain - neto		2d,2v		Other receivables - net
Pihak ketiga	40.278.140	8,44,45	45.117.978	Third parties
Pihak berelasi	1.151.526.870	2e,43	784.951.419	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	93.350.043	2j,9	104.181.981	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima		2d,2v,10		Accrued revenues
Pihak ketiga	265.857.471	45,46	258.865.863	Third parties
Pihak berelasi	12.881.610	2e,43	46.586.491	Related parties
Persediaan	55.314.157	2i,11	82.940.596	Inventories
Pajak dibayar di muka	524.068.875	2t,24a	680.605.067	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	9.822.586	2v,45,46	10.253.126	Other current assets
Total Aset Lancar	19.163.487.841		21.061.762.458	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	2.776.393.603	2k,12,45,46	3.211.023.600	Long-term investment
Properti investasi - neto	337.941.738	2l,13	357.295.487	Investment properties - net
Aset tetap - neto	14.190.173.679	2m,14	13.387.155.835	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	434.117.133	2o,15	461.100.101	Joint operation assets - net
Aset hak-guna - neto	162.800.761	2c,4,17	-	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	158.035.340	2t,24f	73.873.814	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	11.863.510.745	2p,16	10.818.271.480	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.052.309.931	2t,24a	958.917.154	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.545.880.270	2v,18,45,46	1.711.199.806	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	32.521.163.200		30.978.837.277	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	51.684.651.041		52.040.599.735	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	19,43,46	34.193.914	Short-term bank loans
Utang usaha		2d,2v		Trade payables
Pihak ketiga	293.806.030	20,44,45,46	359.929.551	Third parties
Pihak berelasi	1.288.115.200	2e,43	1.076.552.787	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	957.175.849	2e,2r,21	845.489.224	Short-term unearned revenues
Utang pajak	357.031.402	2t,24b	445.015.994	Taxes payable
Beban akrual	1.765.278.079	2v,22,45,46	2.274.726.626	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang		2v,45,46		Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	-	2d,25,44	12.000	Bank loans
Liabilitas sewa	60.214.419	2c,4,17	-	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	10.835.740	2e,28	19.887.737	Other long-term liabilities - related parties
Liabilitas jangka pendek lainnya		2v,23,44		Other current liabilities
Pihak ketiga	205.507.480	45,46	206.170.895	Third parties
Pihak berelasi	98.512.786	2e,43	91.743.873	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.040.476.985		5.353.722.601	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang obligasi	22.333.703.064	2d,2v, 26	21.984.178.194	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	2v, 25,45,46	114.978.000	Bank loans
Liabilitas sewa	112.676.519	2c, 4,17	-	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya		2d, 28		Other long-term liabilities
Pihak ketiga	228.316.051		225.013.928	Third parties
Pihak berelasi	13.842.060	2e,43,45	10.250.000	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.060.901.225	2r,27,43	4.005.631.257	Long-term unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	2.764.262.295	2u,29	1.966.325.908	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	43.507.959	2t, 24f	254.289.069	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	29.557.209.173		28.560.666.356	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	34.597.686.158		33.914.388.957	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	30	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	31	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(205.004.707)	2f,35	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	15.021.058.681		13.273.514.540	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	907.447.522		2.455.762.802	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(1.119.689.737)	1e,34	(105.008.860)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	16.074.666.741		16.777.525.989	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.012.298.142	2b,32	1.348.684.789	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	17.086.964.883		18.126.210.778	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51.684.651.041		52.040.599.735	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pendapatan operasi	10.453.610.044	2s,36	11.141.752.225	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	957.228.613	2s,37	1.542.697.617	Construction revenues
Beban operasi	(8.271.983.135)	2s,38	(8.520.357.673)	Operating expenses
Beban konstruksi	(957.228.613)	2s,37	(1.542.697.617)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	(85.551.623)	2s,39	717.114.514	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	2.096.075.286		3.338.509.066	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	508.515.645	2s,40	836.260.112	Finance income
Beban keuangan	(1.122.841.759)	2s,41	(1.200.237.089)	Finance costs
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	(97.537.586)	2k,2o,42	240.568.343	Equity in income (loss) of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.384.211.586		3.215.100.432	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(397.544.705)	24d	(509.692.491)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	986.666.881		2.705.407.941	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN		2t		CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(116.190.631)	24d,24e	(259.917.054)	Current
Tangguhan	286.311.037	24d,24f	58.319.461	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	1.156.787.287		2.503.810.348	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(794.030.284)	2u,34	(68.567.665)	Remeasurements of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(329.194.038)	1e,34	254.857.849	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	108.347.081	2g,34	(170.053.962)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	141.910.046		2.520.046.570	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.184.857.249		2.455.762.801	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(28.069.962)	2b,32	48.047.547	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	1.156.787.287		2.503.810.348	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	170.176.372		2.473.310.918	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(28.266.326)	2b,32	46.735.652	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	141.910.046		2.520.046.570	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	820.522	2w	1.700.633	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambahkan modal diseor/ Additional paid- in capital	Saldo laba/Retained earnings		Saldo laba/Retained earnings	Saldo laba/Retained earnings	Pengaruh komprehensif lain/ Other comprehensive income			Ekuitas - neto/ Equity - net	Keperluan nonpengendali/ Non-controlling Interests	Ekuitas - neto/ Equity - net	Balance as of December 31, 2018
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengukuran imbalan pensiun/ Remeasurements of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available-for-sale financial assets				
	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	11.726.994.846	2.379.261.695	373.526.146	(442.795.382)	(45.328.052)	15.144.916.760	1.293.988.447	16.438.906.207		16.438.906.207	Balance as of December 31, 2018
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	(832.742.000)	-	-	-	(832.742.000)	-	(832.742.000)	-	(832.742.000)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	-	-	-	1.546.519.694	(1.546.519.694)	-	-	-	-	-	-	-	-	General reserve
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	246.899.366	-	-	246.899.366	7.958.483	254.857.849	-	254.857.849	Exchange difference due to financial statement translation
Pengukuran kembali program imbalan pensiun	1e,34	-	-	-	-	-	(67.273.984)	-	(67.273.984)	(1.293.681)	(68.567.665)	-	(68.567.665)	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,34	-	-	-	-	-	-	(170.036.954)	(170.036.954)	(17.007)	(170.053.961)	-	(170.053.961)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan		-	-	-	2.455.762.801	-	-	-	2.455.762.801	48.047.547	2.503.810.348	-	2.503.810.348	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2019		1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	13.273.514.540	2.455.762.802	(510.069.366)	(215.365.006)	16.777.525.989	1.348.684.789	18.126.210.778		18.126.210.778	Balance as of December 31, 2019
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71	4	-	-	-	-	(277.409.727)	-	-	(277.409.727)	-	(277.409.727)	-	(277.409.727)	Beginning balance adjustment for implementation of PSAK 71
Pembagian dividen kas	33	-	-	-	-	(708.218.661)	-	-	(708.218.661)	(308.120.321)	(1.016.338.982)	-	(1.016.338.982)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	33	-	-	-	1.747.544.141	-	-	-	-	-	-	-	-	General reserve
Selisih transaksi entitas sependetail	35	-	-	112.592.768	-	-	-	-	112.592.768	-	112.592.768	-	112.592.768	Difference arising from transaction Under common control
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	(329.194.456)	-	-	(329.194.456)	418	(329.194.038)	-	(329.194.038)	Exchange difference due to financial statement translation
Pengukuran kembali program imbalan pensiun	1e,34	-	-	-	-	(793.822.666)	-	-	(793.822.666)	(207.618)	(794.030.284)	-	(794.030.284)	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,34	-	-	-	-	-	-	108.336.245	108.336.245	10.836	108.347.081	-	108.347.081	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	1.184.857.249	-	-	1.184.857.249	(28.069.962)	1.156.787.287	-	1.156.787.287	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2020		1.444.029.000	26.825.982	(205.004.707)	15.021.058.681	307.447.522	(1.303.892.032)	(107.028.761)	16.074.666.741	1.012.298.142	17.086.964.883		17.086.964.883	Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	9.943.466.403		11.677.175.952	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(5.105.621.170)		(5.642.396.334)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(2.631.603.392)		(2.609.390.364)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(249.151.245)		(1.995.196.071)	Payment for income taxes
Penghasilan bunga	505.408.821		719.435.193	Interest received
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(1.108.967.928)		(1.025.736.701)	Payment of interest and other financial charges
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.353.531.489		1.123.891.675	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	223.174.017		281.858.622	Receipt of dividend
Laba penjualan aset tetap	8.503.424		80.629.851	Gain on disposal assets
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(2.627.005.403)		(3.312.163.703)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek	(8.494.178.092)		1.239.306.163	Receipt of (placement) short-term investments
Penerimaan sewa di muka	127.469.047		124.255.688	Receipt of advance rental fee
Penempatan investasi saham	(165.555.296)		(787.067.050)	Placement of investment in shares of stock
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.927.592.303)		(2.373.180.429)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(2.000.000)		145.183.914	Receipt (payment) of bank loans and other financial institution
Pembayaran liabilitas sewa	(51.779.311)		-	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen	(708.218.661)	33	(832.742.000)	Payment of dividend
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(761.997.972)		(687.558.086)	Net Cash Used in Financing Activities
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	30.799.772		(478.291.310)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(10.305.259.014)		(2.415.138.150)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.603.533.329	5	18.018.671.479	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5.298.274.315	5	15.603.533.329	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 09 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 21 Agustus 2019 mengenai perubahan jenis saham dan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0323035 tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta No. 09 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE"), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 09 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 21, 2019 regarding change in the types of shares and the Company's Articles of Association. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance of No. AHU-AH.01.03-0323035 dated August 30, 2019.

Based on the Notarial Deed No. 09 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decision of Minister of Transportation KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada Perusahaan yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
- Perjanjian konsesi (Catatan 47a dan 48m).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

- Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to companies which are set on 25 September 2018.
- Concession Agreement (Note 47a and 48m).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2020	2019
Kepemilikan Langsung/Direct Ownership						
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	1995	51,00%	95.075.606	179.282.586
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	2002	99,00%	906.370.055	884.682.897
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") *****	Jakarta	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2012	71,28%	1.827.715.741	1.262.080.951
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") *****)	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	2012	100,00%	137.134.393	160.100.918
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan Pelabuhan/ Port Development	2012	99,89%	5.136.951.404	1.841.105.049
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services	2012	99,00%	199.238.113	157.445.101
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider	2012	55,00%	175.927.346	145.105.432
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan Alur/ Dredging	1991	99,93%	373.782.108	376.359.505

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2020	2019
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ****)	Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider	2013	76,89%	1.397.383.219	1.277.801.802
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistic training and education services	2013	99,00%	64.532.883	71.354.014
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	4.711.001.619	1.762.867.454
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	4.555.083.524	1.099.123.570
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	2017	99,00%	1.073.885.201	1.036.864.363
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>						
<u>Dimiliki melalui/Owned through PPI</u>						
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	2014	99,52%	1.000.147.569	779.593.101
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti / Building management service	2018	78,87%	655.089.060	357.601.919
<u>Entitas Asosiasi/Associate Entities</u>						
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") *****)	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	1999	32,88%	548.048.589	575.930.021
<u>Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK</u>						
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 47d/Note 47d) *)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2014	51,00%	3.629.484.871	3.878.213.647
<u>Dimiliki melalui/Owned through API</u>						
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 12/Note 12) **)	Jakarta	Operasi Jalan Tol/Toll Road Operation	2006	45,00%	8.966.942.359	7.375.640.508
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 48b/ Note 48b)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1999	48,90%	18.098.499.339	4.342.577.010

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, dan Operasi Bersama
(lanjutan)**

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2020	2019
PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI")	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2013	25,00%	134.140.778	131.111.708
Operasi Bersama/Joint Operation						
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 48a/ Note 48a)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1994	54,91%	3.718.062.921	520.428.809
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") (Catatan 48n/ Note 48n) ***)	Gresik	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2015	45,00%	3.083.275	4.339.729

*) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1 (Catatan 47d).

***) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP (Catatan 12).

****) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45% (Catatan 48n).

*****) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.

*****) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

*****) Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan melakukan penjualan saham RSP kepada PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 67% sehingga kepemilikan saham perusahaan menjadi sebesar 32,88%.

*****) Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan melakukan pembelian saham ILCS milik PT Multimedia Nusantara sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS.

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

*) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1 (Note 47d).

***) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP (Note 12).

****) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45% (Note 48n).

*****) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

*****) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

*****) On August 2020, the Company sold shares of RSP to PT. Pertamina Bina Medika IHC by 67%, bringing the company's share ownership to 32.88%.

*****) On October 9, 2020, the Company purchased shares of ILCS owned by PT Multimedia Nusantara amounted to 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS.

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EDII (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan kepabeanan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EDII (continued)

As of December 31, 2016, the authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 51.00% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.
- PT Sisindokom Teknologi owns 49.00% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.00% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1.00% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in transportation, warehousing, cargo consolidation, cargo space provision and customs services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp153.979.000 terdiri dari 153.979 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 (Catatan 35).

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,88% atau sebanyak 153.799 saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.379.900.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pengambilalihan saham tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina Bina Medika IHC memiliki 67% atau sebanyak 103.166 saham dengan nilai nominal sebesar Rp103.166.000.
- Perusahaan memiliki 32,88% atau sebanyak 50.633 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.633.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital of RSP amounted to Rp153,979,000 composed of 153,979 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) takeover RSP 103,166 shares owned by the Company (67%) worth Rp167.500.000 (Note 35).

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- The Company owns 99.88% or 153,799 shares with total amount of Rp15,379,900,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover and as of December 31, 2020 is as follows:

- PT Pertamina Bina Medika IHC owns 67% or 103,166 shares with total amount of Rp103,166,000.
- The Company owns 32.88% or 50,633 shares with total amount of Rp50,633,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (Employee Stock Option Allocation).

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.486.510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (Employee Stock Option Allocation) program.

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follow:

- The Company owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,615,475.
- MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237.
- PII owns 5.54% or 100,682,600 shares with total amount of Rp10,068,260.
- Public own 22.46% or 408,465,100 shares with total amount of Rp40,486,510.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/ cargodoring, yard operation and other logistic services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49,00% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 100,00% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share.

On October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- *The Company owns 51.00% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000.*
- *PT Multimedia Nusantara owns 49.00% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.*

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover is as follows:

- *The Company owns 100.00% or 10,000,000 shares with total amount of Rp100,000,000.*

Currently, ILCS' activities consist of providing e-trade logistic services and other services including data management, e-commerce, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-0019856.AH.01.02 tanggal 25 September 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 37 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No.AHU-0019856.AH.01.02 dated September 25, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 37 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99.89% or 22,475,000 shares with total amount of Rp224,750,000.*
- *PII owns 0.11% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, PPI engages in port development.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EPI (lanjutan)

Modal dasar EPI sebesar Rp174.543.000 terdiri dari 17.454.300 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 55,00% atau sebanyak 2.400.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.000.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 1.963.575 saham dengan nilai sebesar Rp19.635.750.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EPI (continued)

The authorized capital of EPI amounted to Rp174,543,000 composed of 17,454,300 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 55.00% or 2,400,000 shares with total amount of Rp24,000,000.
- PT Haleyora Power owns 45.00% or 1,963,575 shares with total amount of Rp19,635,750.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company. The Company's shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.93% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.07% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agrees among others:

- change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kecil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- PII memiliki 11,05% atau sebanyak 583.715.200 saham dengan nilai sebesar Rp58.371.520.
- Masyarakat memiliki 11,80% atau sebanyak 623.751.500 saham dengan nilai sebesar Rp62.375.150.
- Saham treasury 0,15% atau sebanyak 8.039.800 saham dengan nilai sebesar 803.980

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.
- PII owns 11.05% or 583,715,200 shares with total amount of Rp58,371,520.
- Public owns 11.80% or 623,751,500 shares with total amount of Rp62,375,150.
- Treasury stock 0.15% or 8,039,800 shares with total amount Rp803,980

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 1 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 1 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.
- PII owns 1.00% or 300 shares with total amount of Rp300,000.

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training.

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan sepakat, diantaranya untuk tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company agreed among others, to no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 29 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada IPC TPK, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Juli 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Panjang terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Januari 2019, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Palembang, Pangkal Balam, Cirebon dan Tanjung Pandan terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Based on Company's Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to IPC TPK, a related party.

On July 31, 2018, PTP cooperates with Company's Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's Panjang branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On January 1, 2019, PTP cooperates with the Company's Palembang branch, Pangkal Balam branch, Cirebon branch and Tanjung Pandan branch in relation to operational and management of non-container terminal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Pada tanggal 1 Juli 2019, PTP melakukan kerjasama dengan the Company's cabang Teluk Bayur terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

On July 1, 2019, PTP cooperates with the Company's Teluk Bayur branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99.00% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.*
- *MTI owns 1.00% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.*

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU0027756.AH.01.02. TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 99.52% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.
- PTP owns 0.48% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

NPCT1 (lanjutan)

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

TPI

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

NPCT1 (continued)

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

TPI

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 48b, 48c, 48d dan 48e):

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Note 48b, 48c, 48d and 48e):

- The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amandemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amandemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amandemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 48a).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 48a).

The investment proportions of the participants for the year 2020 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in MTDX.

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 78,87% atau sebanyak 2.450.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp245.000.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 21,13% atau sebanyak 656.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp65.625.000.
- Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45.00% and 55.00%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 dated July 16, 2018.

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 78.87% or 2,450,000,000 shares with total amount of Rp245,000,000
- PT PP Properti Tbk owns 21.13% or 656,250,000 shares with total amount of Rp65,625,000.
- At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.02 tanggal 11 Januari 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris Independen	Nurrachman
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Girianna
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Rima Novianti
Direktur Teknik	Zuhri Iryansyah
Direktur Operasi	Muarip
Direktur Keuangan	Yon Irawan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

1. GENERAL (continued)

**c. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees**

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-391/MBU/12/2020 dated March 14, 2020 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.02 dated January 11, 2021, The Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of The Company stipulated as follows:

December 31, 2020

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources and General Affair
Director of Transformation and Business Development

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan
(lanjutan)**

31 Desember 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

-
Suaidi Marasabessy
Kushari Suprianto
Montty Giriana
D. Andhi Nirwanto
Djadmiko
R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Komersial
Direktur Teknik
Direktur Operasi
Direktur Keuangan
Direktur SDM
Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis

Elvyn G. Masassya
Hambra
Arif Suhartono
Dani Rusli Utama
Prasetyadi
Widyaka Nusapati
Rizal Ariansyah
Ogi Rulino

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah mengangkat Tumpak H. Panggabean sebagai ketua Dewan Pengawas KPK, maka pada tanggal 23 Desember 2019, Tumpak H. Panggabean telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 2 Januari 2020, Djadmiko ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Komisaris Utama Perusahaan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perusahaan oleh RUPS.

1. GENERAL (continued)

**c. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees (continued)**

December 31, 2019

Board of Commissioners

President/Independent
Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources
Director of Transformation and
Business Development

In relation to the Decision of the President of the Republic of Indonesia dated December 19, 2019 regarding Appointment of Membership of the Supervisory Board on the Eradication of Corruption (KPK) which appoint Tumpak H. Panggabean as the president of the KPK Supervisory Board, on December 23, 2019, Tumpak H. Panggabean has filed a resignation as the Company's President Commissioner as well as Independent Commissioner.

Based on Board of Commissioner's Decision dated January 2, 2020, Djadmiko was appointed to perform the functionality of the Company's President Commissioner until the establishment of Independent Commissioner by RUPS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Pionir H
Anggota	Muhdi Al Fajar

Sekretaris Perusahaan	Ari Santoso
-----------------------	-------------

31 Desember 2019

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakmat Adi Santosa
Anggota	Muhdi Al Fajar

Sekretaris Perusahaan	Shanti Puruhita
-----------------------	-----------------

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 3.668 dan 4.640 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2019, mata uang fungsional PPI adalah Dolar AS (USD), yang juga digunakan sebagai mata uang penyajian dalam laporan keuangan. Efektif tanggal 1 Januari 2019, PPI mengubah mata uang fungsionalnya menjadi Rupiah (Rp) yang disebabkan oleh terjadinya perubahan secara substansial dalam mata uang yang digunakan dalam sebagian besar transaksi penjualannya. Sebagai akibatnya, efektif tanggal 1 Januari 2019, mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan juga berubah menjadi Rupiah. Manajemen berkeyakinan bahwa perubahan ini akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat dalam laporan keuangan.

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

December 31, 2020

Audit Committee

Head
Member
Member

Corporate Secretary

December 31, 2019

Audit Committee

Head
Member
Member

Corporate Secretary

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2020 and 2019 are 3,668 and 4,640 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

Prior to January 1, 2019, the functional currency of PPI is US Dollar (USD), which was also used as presentation currency in the financial statements. Effective January 1, 2019, PPI has changed its functional currency to Rupiah (Rp) due to substantial change in the currency used in majority of its sales transaction. As a result, effective January 1, 2019, the presentation currency used in the financial statements has also been changed to Rupiah. The management believes that such change will result in a more appropriate presentation in the financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Saldo awal	567.153.934	312.296.085	<i>Beginning balance</i>
Efek penjabaran - neto	(329.194.038)	254.857.849	<i>Effect due to translation - net</i>
Saldo akhir	237.959.896	567.153.934	<i>Ending balance</i>

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 25 Maret 2021. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

e. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- *Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;*
- *Income and expenses were translated using the average exchange rate; and*
- *All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.*

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 25, 2021. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas (bila ada).
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries.*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI.*
- *derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity (if any).*
- *recognizes the fair value of the consideration received.*
- *recognizes the fair value of any investment retained.*
- *recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Penerapan standar akuntansi baru

Kelompok Usaha telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyalurkan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board ("IASB") dan Financial Accounting Standards Board ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Adoption of new accounting standards

The Group has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow:

- Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

- PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020.

This PSAK provides classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting in information that are more timely, relevant and understandable to users of the financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirement based on management's judgment.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020.

This PSAK is a single standard that is a joint project between the International Accounting Standards Board ("IASB") and the Financial Accounting Standards Board ("FASB"), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to perform analysis before recognizing the revenue.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Kelompok Usaha telah menerapkan standar akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Kelompok Usaha tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah dibebankan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan untuk PSAK 73 "Sewa", Kelompok Usaha telah mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 4, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 (two) optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

The Group has implemented new accounting standards and such adjustments or amendments since January 1, 2020. The Group did not restate comparative information in 2019 on the implementation of PSAK 71 "Financial Instruments" and PSAK 73 "Leases", therefore comparative information for 2019 cannot be compared to financial information presented for the year ended December 31, 2020. Differences arising from the implementation of PSAK 71 "Financial Instruments" have been charged to the retained earnings on January 1, 2020. As for PSAK 73 "Leases", the Group has recorded right-of-use assets and lease liabilities as of January 1, 2020. The impact of the application of PSAK 71 "Financial Instruments" and PSAK 73 "Leases" on January 1, 2020 were disclosed in Note 4, the impact on the application of new standards and adjustments or other amendments is not material to the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (nilai penuh):

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	14.105	13.901	United States Dollar (USD) 1
Euro Eropa (EUR) 1	17.330	15.589	European Euro (EUR) 1
Dolar Singapura (SGD) 1	10.644	10.321	Singapore Dollar (SGD) 1

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

f. Kombinasi bisnis entitas sependali

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sependali".

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "tambahan modal disetor".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2020 and 2019 (full amount):

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

f. Business combinations entities under common control

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the "additional paid-in capital" account.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

h. Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan metode roll rate. Berdasarkan keyakinan manajemen, metode pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan basis individual. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

i. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

h. Trade Receivables and Allowance for Losses

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management's evaluation on the collectability of the balances using roll rate method. Based on the management beliefs, the impairment method will not have a significant difference compared to management evaluation on the collectability of the balances using individual basis. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

i. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the useful life.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Investment in Associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Company's investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

The Group's share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangement". On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

- (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- (b) jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

l. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Investment in Associates (continued)

- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).

l. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 50
Kapal	5 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25
Jalan dan bangunan	10 - 40
Peralatan	4 - 25
Kendaraan	5
Emplasemen	3 - 25

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

<u>Type of Assets</u>
Building and port facilities
Vessels
Port equipment
Port facility installation
Road and building
Equipment
Vehicles
Emplacement

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Aset tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Fixed assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Lease

Before January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

The Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

Sesudah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal insepasi suatu kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Kelompok Usaha menilai apakah:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Lease (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

The Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

After January 1, 2020

From 1 January 2020, the Group has adopted PSAK 73 "Leases", which sets the requirements for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as "operating leases". This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Sewa (lanjutan)

n. Lease (continued)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After January 1, 2020 (continued)

- a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b) Kelompok Usaha memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c) Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Kelompok Usaha mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

- a) *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b) *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- c) *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
 - *The Group has the right to operate the asset; or*
 - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Lease (continued)

After January 1, 2020 (continued)

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use assets is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai-rendah

Kelompok Usaha memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

o. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Lease (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- the structure of the joint arrangement
- the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle
- the contractual terms of the joint arrangement agreement
- any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognize: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Concession Asset

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal Kalibaru yang akan diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan sejak tanggal pengoperasian terminal. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal Kalibaru diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are Kalibaru terminal concession rights which are amortized over the period of assets are expected to use from the date of operation of the Kalibaru terminal. During the construction period, the accumulated Kalibaru terminal construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

r. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

s. Pendapatan dan Beban

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

r. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

s. Revenue and Expenses

Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.
- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.
- Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and Expenses (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

- Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.
- Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the customer.
- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue from training services is recognized when the activities are completed.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.
- Construction revenues
The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Company recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

s. Revenue and Expenses (continued)

Sesudah 1 Januari 2020

After January 1, 2020

Pada 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Untuk pendapatan, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

For revenues, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the services has been transferred to the customer (a point in time).

Pengakuan beban

Expenses recognition

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

t. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and Expenses (continued)

After January 1, 2020 (continued)

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

t. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

u. Imbalan Kerja

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

u. Employee Benefits

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

v. Instrumen Keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan juga memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kelompok Usaha menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Kelompok Usaha dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Kelompok Usaha menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Employee Benefits (continued)

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

v. Financial Instruments

i) Financial assets

Initial recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following category: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues and long-term investments classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

The Group used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Group's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Group assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian Model Bisnis

Kelompok Usaha menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Kelompok Usaha tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

SPPI Test (continued)

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Group applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Business Model Assessment

The Group determines its business model at the level that best reflects how it manages the Group's financial assets to achieve its business objective.

The Group's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Kelompok Usaha.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Kelompok Usaha tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Business Model Assessment (continued)

- How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;
- How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Group's assessment.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Group's original expectations, the Group does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Kelompok Usaha untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Business Model Assessment (continued)

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the financial statements as "Impairment loss".

Before January 1, 2020, the Group classified its financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. This classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the beginning of its recognition.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or specified payments and have no quotes on the active market, except:

- intended by the Group for sale in the near future, which is classified as held for trading, as well as which at the time of initial recognition is determined to be measured at fair value through profit or loss;
- which at the time of initial recognition is set as available for sale; or

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

- dalam hal Kelompok Usaha mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Business Model Assessment (continued)

- in the case of the Group may not obtain substantial initial investment unless caused by a decrease in the quality of loans provided and receivables.

At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at their fair value plus transaction fees and are further measured on amortized acquisition costs using the Effective Interest Rate ("EIR") method. Income from financial assets in the category of loans and receivables is recorded in the consolidated statements of income and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, impairment losses are reported as a deduction from the carrying value of the financial assets in loan and receivables and are recognized in the statements of profit and loss and other comprehensive income as "Impairment loss".

Effective Interest Method ("EIR")

EIR is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")
(lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Effective Interest Method ("EIR")
(continued)

Income is recognized on an effective interest rate basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The adoption of PSAK 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL"). The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Before January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty;*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Kelompok Usaha atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

v. Financial Instruments (continued)

ii) Liabilitas keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan dan pengukuran awal

Initial recognition and measurement

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank, liabilitas jangka panjang lainnya, utang obligasi, dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Group's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, bank loans, other long term liabilities, bonds payable, and lease liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

iii) Reklasifikasi instrumen keuangan

Kelompok Usaha diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Kelompok Usaha mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Kelompok Usaha tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

iii) Reclassification of financial instruments

The Group is allowed to reclassify the financial assets owned if the Group changes the business model for the management of financial assets and the Group is not allowed to reclassify the financial liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

v. Financial Instruments (continued)

**iii) Reklasifikasi instrumen keuangan
(lanjutan)**

**iii) Reclassification of financial
instruments (continued)**

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Kelompok Usaha seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Kelompok Usaha perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Changes in the business model should significantly impact the Group's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Group needs to prove the change to external parties.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Kelompok Usaha dengan model bisnis berbeda.

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Group and different business models.

iv) Saling hapus instrumen keuangan

iv) Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika Kelompok Usaha memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy.

v) Pengukuran nilai wajar

v) Fair value measurement

Kelompok Usaha mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Kelompok Usaha juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

The Group initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It also measures certain recoverable amounts of the CGU using fair value less cost of disposal ("FVLCD").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

v) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Kelompok Usaha.

w. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham.

x. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

v) Fair value measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

w. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares.

x. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

z. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

z. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari
2021**

Amandemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after 1 January
2021**

Amendments to PSAK No. 22: Definition of Business, effective from 1 January 2021 and early adoption is permitted.

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2v.

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2v.

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 7.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

OP memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 47a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp1.708.665.986 dan Rp1.542.697.617.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

OP granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 47a). Upon expiry of the service concession period, the Company shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Group recognized construction revenue amounting to Rp1,708,665,986 and Rp1,542,697,617, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Sewa

Sewa Operasi

Sebelum 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Kelompok Usaha bertindak sebagai lessee. Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30, "Sewa", yang mensyaratkan Kelompok Usaha untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'Sewa Operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Leases

Operating Leases

Before January 1, 2020, the Group has several leases whereas the Group acts as lessee. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30, "Leases", which requires the Company to make judgement and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

From January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Kelompok Usaha mengevaluasi akun-akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha.

Setelah 1 Januari 2020

Kelompok Usaha menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Kelompok Usaha secara historis. Kelompok Usaha akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor usaha Kelompok Usaha, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual default pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of financial assets

Before January 1, 2020

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group is expected to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

After January 1, 2020

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2m. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2i, 2l, 2m, 2p, 11, 13, 14, 15, 16 dan 18.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2m. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Note 2i, 2l, 2m, 2p, 11, 13, 14, 15, 16 and 18.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2t dan 24.

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp2.764.262.295 dan Rp1.966.325.908 (Catatan 29).

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 24.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 2t and 24.

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2020 and 2019, employee benefits liability amounted to Rp2,764,262,295 and Rp1,966,325,908 (Note 29).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73

Dampak terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

PSAK 71

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73

The impact to the Group's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows:

PSAK 71

Classification of financial assets and liabilities

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020:

Catatan/Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
<u>Aset keuangan/Financial assets</u>				
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	15.603.533.329	15.603.533.329
Investasi jangka pendek/ Short-term investment	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	2.259.297.400	2.259.297.400
	Nilai wajar diukur melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Nilai wajar diukur melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	337.403.726	337.403.726
Piutang usaha - neto/ Trade receivables - net	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	848.025.482	572.348.662
Piutang lain-lain - neto/ Other receivables - net	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	830.069.397	830.069.397
Pendapatan yang masih harus diterima/ Accrued revenues	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	305.452.354	303.719.447
Investasi jangka panjang/ Long-term investments	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	2.777.919.330	2.777.919.330
	Tersedia untuk dijual / Available for sale	Nilai wajar diukur melalui pendapatan komprehensif lainnya / Fair value through other comprehensive income	433.104.270	433.104.270

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73
(lanjutan)**

Dampak terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020: (lanjutan)

**4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73
(continued)**

The impact to the Group's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Classification of financial assets and liabilities (continued)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued)

Catatan/Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
<u>Liabilitas keuangan/Financial liabilities</u>				
Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loans	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	34.193.914	34.193.914
Utang usaha/ Trade payables	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	1.436.482.338	1.436.482.338
Beban akrual/ Accrued expenses	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	2.274.726.626	2.274.726.626
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang/ Current maturities of long-term liabilities	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost		
Utang bank/ Bank loans			12.000	12.000
Liabilitas sewa/ Lease liabilities			-	28.449.194
Liabilitas jangka Panjang lainnya pihak berelasi / Other long-term liabilities related parties			19.887.737	19.887.737
Liabilitas jangka pendek lainnya/ Other current liabilities	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	297.914.768	297.914.768

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73
(lanjutan)**

Dampak terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020: (lanjutan)

**4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73
(continued)**

The impact to the Group's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Classification of financial assets and liabilities (continued)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued)

Catatan/Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
Liabilitas keuangan/Financial liabilities				
Utang obligasi/ Bonds payable	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	21.984.178.194	21.984.178.194
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar/ Long-term liabilities-net of current maturities	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost		
Utang bank/ Bank loans			114.978.000	114.978.000
Liabilitas sewa/ Lease liabilities			-	144.441.744
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities			235.263.928	235.263.928

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73
(lanjutan)**

Dampak terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019:

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ <i>Balance before implementation PSAK 71</i>	Klasifikasi dan pengukuran/ <i>Classification and measurement</i>	Kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ <i>Balance after implementation PSAK 71</i>
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	15.603.533.329	-	-	15.603.533.329
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	-	-	2.596.701.126
Piutang usaha	848.025.482	-	(275.676.820)	572.348.662
Piutang lain-lain - neto	830.069.397	-	-	830.069.397
Uang muka dan beban dibayar di muka	104.181.981	-	-	104.181.981
Pendapatan yang masih harus diterima	305.452.354	-	(1.732.907)	303.719.447
Persediaan	82.940.596	-	-	82.940.596
Pajak dibayar di muka	680.605.067	-	-	680.605.067
Aset lancar lainnya	10.253.126	-	-	10.253.126
Total Aset Lancar	21.061.762.458	-	(277.409.727)	20.784.352.731
Aset Tidak Lancar				
Investasi	3.211.023.600	-	-	3.211.023.600
Properti investasi - neto	357.295.487	-	-	357.295.487
Aset tetap - neto	13.387.155.835	-	-	13.387.155.835
Aset kerjasama operasi - neto	461.100.101	-	-	461.100.101
Aset hak guna - neto	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	73.873.814	-	-	73.873.814
Aset takberwujud - neto	10.818.271.480	-	-	10.818.271.480
Taksiran tagihan restitusi pajak	958.917.154	-	-	958.917.154
Aset tidak lancar lainnya	1.711.199.806	-	-	1.711.199.806
Total Aset Tidak Lancar	30.978.837.277	-	-	30.978.837.277
Total Aset	52.040.599.735	-	(277.409.727)	51.763.190.008
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	-	-	34.193.914
Utang usaha	1.436.482.338	-	-	1.436.482.338
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	845.489.224	-	-	845.489.224
Utang pajak	445.015.994	-	-	445.015.994
Beban akrual	2.274.726.626	-	-	2.274.726.626
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	-	-	-	-
Utang bank	12.000	-	-	12.000
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	-
- pihak berelasi	19.887.737	-	-	19.887.737
Liabilitas sewa	-	-	-	-
Liabilitas jangka pendek lainnya	297.914.768	-	-	297.914.768
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.353.722.601	-	-	5.353.722.601

**4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73
(continued)**

The impact to the Group's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Impact on the adoption of PSAK 71 to the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019:

Assets	
Current Assets	
Cash and cash equivalents	15.603.533.329
Short-term investment	2.596.701.126
Trade receivables	572.348.662
Other receivables - net	830.069.397
Advances and prepaid expense	104.181.981
Accrued revenues	303.719.447
Inventories	82.940.596
Prepaid taxes	680.605.067
Other current assets	10.253.126
Total Current Assets	20.784.352.731
Non-Current Assets	
Long-term investment	3.211.023.600
Investment properties - net	357.295.487
Fixed assets - net	13.387.155.835
Joint operation assets - net	461.100.101
Right of use asset - net	-
Deferred tax assets	73.873.814
Intangible assets, net	10.818.271.480
Estimated claims for tax refund	958.917.154
Other non-current assets	1.711.199.806
Total Non-Current Assets	30.978.837.277
Total Assets	51.763.190.008
Liabilities	
Current Liabilities	
Short-term bank loans	34.193.914
Trade payables	1.436.482.338
Short-term unearned revenues	845.489.224
Taxes payable	445.015.994
Accrued expenses	2.274.726.626
Current maturities of long-term liabilities	-
Bank loans	12.000
Other long-term liabilities	-
- related parties	19.887.737
Lease liabilities	-
Other current liabilities	297.914.768
Total Current Liabilities	5.353.722.601

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73
(lanjutan)**

Dampak terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019: (lanjutan)

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ <i>Balance before implementation PSAK 71</i>	Klasifikasi dan pengukuran/ <i>Classification and measurement</i>	Kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ <i>Balance after implementation PSAK 71</i>	
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Utang Obligasi	21.984.178.194	-	-	21.984.178.194	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang setelah Dikurangi bagian lancar					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	114.978.000	-	-	114.978.000	Bank loans:
Liabilitas jangka panjang lainnya	235.263.928	-	-	235.263.928	Other long-term liabilities
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.005.631.257	-	-	4.005.631.257	Long-term unearned revenue
Liabilitas	1.966.325.908	-	-	1.966.325.908	Employee benefit liabilities
Liabilitas sewa	-	-	-	-	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	254.289.069	-	-	254.289.069	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.560.666.356	-	-	28.560.666.356	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	33.914.388.957	-	-	33.914.388.957	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham	1.444.029.000	-	-	1.444.029.000	Share capital
Modal donasi	26.825.982	-	-	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor (317.597.475)	-	-	-	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba	15.729.277.342	-	(277.409.727)	15.451.867.615	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain	(105.008.860)	-	-	(105.008.860)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk - neto	16.777.525.989	-	(277.409.727)	16.500.116.262	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.348.684.789	-	-	1.348.684.789	Non-controlling interests
Ekuitas Neto	18.126.210.778	-	(277.409.727)	17.848.801.051	Equity - net
Total Liabilitas dan Ekuitas	52.040.599.735	-	(277.409.727)	51.763.190.008	Total Liabilities and Equity

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020:

PSAK 73

The following table presents the impact of the implementation of PSAK 73 on January 1, 2020:

	1 Januari 2020/January 1, 2020			
	Sebelum penyesuaian/ <i>Before adjustment</i>	Penyesuaian PSAK 73/ <i>PSAK 73 adjustments</i>	Setelah penyesuaian/ <i>After adjustment</i>	
Aset				Assets
Uang muka dan beban dibayar di muka	2.354.828	(2.354.828)	-	Advances and prepaid expenses
Aset hak-guna - neto	-	(227.049.843)	227.049.843	Right-of-use assets - net
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas sewa - jangka pendek	-	(88.888.250)	88.888.250	Lease liabilities - current
Liabilitas sewa - jangka panjang	-	(135.806.765)	135.806.765	Lease liabilities - non-current

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Kas	3.645.983	4.797.709	Cash on hand
Bank	1.939.286.548	1.169.594.929	Cash in banks
Deposito berjangka	3.355.341.784	14.429.140.691	Time deposits
Total kas dan setara kas	5.298.274.315	15.603.533.329	Total cash and cash equivalents

a. Kas

a. Cash on hand

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Rupiah	3.645.983	4.797.709	Rupiah

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Rupiah:</u>			<u>Rupiah:</u>
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	396.474.090	100.090.077	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	15.306.391	3.771.120	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	347.791	172.878	PT Bank Victoria International Tbk
PT DBS Indonesia	300.260	1.321.841	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	32.805	21.429.637	PT Bank Permata Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	15.682.193	5.523.679	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 43a)	693.346.200	698.369.522	Related parties (Note 43a)
Subtotal	1.121.489.730	830.678.754	Sub-total
<u>Dolar AS:</u>			<u>US Dollar:</u>
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank DBS Indonesia	508.921.912	15.750.732	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.245.481	37.105.758	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	24.681.736	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	4.226.276	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	2.817.266	PT Bank Permata Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	63.668	91.019	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 43a)	302.565.757	254.243.344	Related parties (Note 43a)
Subtotal	817.796.818	338.916.131	Sub-total
<u>Euro Eropa:</u>			<u>European Euro:</u>
Pihak berelasi (Catatan 43a)	-	44	Related parties (Note 43a)
Total bank	1.939.286.548	1.169.594.929	Total cash in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Rupiah:</u>			<u>Rupiah:</u>
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Bukopin Tbk	215.000.000	370.200.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	120.000.000	200.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	1.000.000	-	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk	-	35.596.970	PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	31.682.478	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	26.011.830	PT Bank Mega Tbk
PT Bank J Trust Indonesia	-	5.000.000	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	3.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BCA Syariah	-	2.000.000	PT Bank BCA Syariah
Pihak berelasi (Catatan 43a)	1.707.575.943	2.631.242.274	Related parties (Note 43a)
Subtotal	2.043.575.943	3.304.733.552	Sub-total
<u>Dolar AS:</u>			<u>US Dollar:</u>
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	-	5.605.624	PT Bank Central Asia Tbk
Pihak berelasi (Catatan 43a)	1.311.765.841	11.118.801.515	Related parties (Note 43a)
Subtotal	1.311.765.841	11.124.407.139	Sub-total
Total deposito berjangka	3.355.341.784	14.429.140.691	Total time deposits

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Rupiah	3,50% - 7,30%	5,00% - 9,00%	Rupiah
Dolar AS	0,75% - 3,30%	1,35% - 3,55%	US Dollar

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

6. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
<u>Rupiah:</u>			<u>Rupiah:</u>
Pihak berelasi (Catatan 43b)	-	104.642.400	Related parties (Note 43b)
<u>Dolar AS:</u>			<u>US Dollar:</u>
Pihak berelasi (Catatan 43b)	10.946.890.500	2.154.655.000	Related parties (Note 43b)
Total deposito berjangka	10.946.890.500	2.259.297.400	Total time deposits
Efek yang diperdagangkan	143.988.718	337.403.726	Marketable securities
Total investasi jangka pendek	11.090.879.218	2.596.701.126	Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2020	2019
Rupiah	0.0%	7.5%
Dolar AS	0.75% - 1.25%	3.7%

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham jangka pendek dan reksadana pasar uang.

6. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock and money market mutual funds.

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pihak ketiga		
Swasta	1.088.986.819	909.768.844
Perorangan	2.933.055	5.430.314
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(527.329.331)	(202.372.414)
Pihak ketiga - neto	564.590.543	712.826.744
Pihak berelasi (Catatan 43c)	159.222.695	345.392.417
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(102.578.682)	(210.193.679)
Pihak berelasi - neto	56.644.013	135.198.738
Piutang usaha - neto	621.234.556	848.025.482

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Rupiah	1.237.561.892	1.205.344.597
Dolar AS	13.580.677	55.168.076
Dolar Singapura	-	78.902
Total	1.251.142.569	1.260.591.575
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(629.908.013)	(412.566.093)
Neto	621.234.556	848.025.482

7. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Third parties		
Private	1.088.986.819	909.768.844
Individuals	2.933.055	5.430.314
Less: Allowance for impairment	(527.329.331)	(202.372.414)
Third parties - net	564.590.543	712.826.744
Related parties (Note 43c)	159.222.695	345.392.417
Less: Allowance for impairment	(102.578.682)	(210.193.679)
Related parties - net	56.644.013	135.198.738
Trade receivables - net	621.234.556	848.025.482

b. By currency

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Rupiah	1.237.561.892	1.205.344.597
US Dollar	13.580.677	55.168.076
Singapore Dollar	-	78.902
Total	1.251.142.569	1.260.591.575
Less: Allowance for impairment	(629.908.013)	(412.566.093)
Net	621.234.556	848.025.482

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Saldo awal	412.566.093	370.910.980
Penyisihan tahun berjalan	217.341.920	41.655.113
Saldo akhir	629.908.013	412.566.093

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Belum jatuh tempo	120.747.628	255.115.082
Lewat jatuh tempo		
1-30 hari	264.641.660	255.538.660
31-60 hari	62.518.875	111.820.153
61-150 hari	76.875.962	102.438.411
Lebih dari 150 hari	726.358.444	535.679.269
Saldo awal	1.251.142.569	1.260.591.575
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(629.908.013)	(412.566.093)
Neto	621.234.556	848.025.482

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

c. The movements in the allowance for impairment of receivables is as follows:

	Beginning balance
	Provision for the year
	Ending balance

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pihak ketiga		
Swasta	68.050.477	70.235.566
Perorangan	105.814	5.414.839
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(27.878.151)	(30.532.427)
Pihak ketiga - neto	40.278.140	45.117.978
Pihak berelasi (Catatan 43d)	1.191.310.519	821.218.704
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(39.783.649)	(36.267.285)
Pihak berelasi - neto	1.151.526.870	784.951.419
Piutang lain-lain - neto	1.191.805.010	830.069.397

8. OTHER RECEIVABLES

Third parties
Private
Individuals
Less:
Allowance for impairment
Third parties - net
Related parties (Note 43d)
Less:
Allowance for impairment
Related parties - net
Other receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Saldo awal	66.799.712	64.286.813
Penyisihan tahun berjalan	862.088	2.512.899
Saldo akhir	67.661.800	66.799.712

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Uang muka		
Operasional	15.397.681	7.033.421
Lain-lain	738.292	892.674
Subtotal	16.135.973	7.926.095
Beban dibayar di muka		
Pegawai	45.335.852	47.700.658
Asuransi	10.998.055	9.782.442
Sewa	10.249.974	5.102.500
Umum	7.357.953	5.510.554
Lain-lain	3.272.236	28.159.732
Subtotal	77.214.070	96.255.886
Total	93.350.043	104.181.981

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat uang muka operasional yang telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan namun belum dilakukan pertanggungjawaban masing-masing sebesar Rp1.409.885 dan Rp712.249.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Saldo awal	66.799.712	64.286.813
Penyisihan tahun berjalan	862.088	2.512.899
Saldo akhir	67.661.800	66.799.712

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Advances		
Operasional	15.397.681	7.033.421
Others	738.292	892.674
Sub-total	16.135.973	7.926.095
Prepaid expenses		
Personnel	45.335.852	47.700.658
Insurance	10.998.055	9.782.442
Rental	10.249.974	5.102.500
General	7.357.953	5.510.554
Others	3.272.236	28.159.732
Sub-total	77.214.070	96.255.886
Total	93.350.043	104.181.981

As of December 31, 2020 and 2019, there are advances for operational which has been charged to the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income but has not been accounted amounted to Rp1,409,885 and Rp712,249.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

10. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
Pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik	100.075.102	80.411.283	Land, building, water and electrical services
Jasa logistik	36.065.874	21.524.157	Logistic services
Pelayanan jasa kapal	35.285.314	12.269.114	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	18.310.715	60.541.624	Terminal services
Pelayanan jasa barang	3.927.687	3.979.721	Cargo services
Pelayanan terminal petikemas	584.456	6.653.533	Container terminal services
Pelayanan kesehatan	-	9.906.869	Medical services
Pengusahaan peralatan	-	2.720.876	Equipment services
Lain-lain	71.608.323	60.858.686	Others
Subtotal	265.857.471	258.865.863	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 43e)	12.881.610	46.586.491	Related parties (Note 43e)
Total	278.739.081	305.452.354	Total

11. PERSEDIAAN

11. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Suku cadang	46.973.867	50.398.366	Spareparts
Bahan bakar	9.276.827	16.203.938	Fuels
Obat, bahan, dan alat medis	-	10.924.650	Medicines, materials and equipment
Alat tulis dan barang cetakan	628.103	1.009.483	Stationaries and printings
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.302.854	8.580.437	Others (each below Rp1 billion)
Total	58.181.651	87.116.874	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan persediaan usang	(2.867.494)	(4.176.278)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	55.314.157	82.940.596	Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Saldo awal	4.176.278	4.920.226	Beginning balance
Pemulihan tahun berjalan	(1.275.273)	(710.590)	Recovery during the year
Efek penjabaran mata uang asing	(33.511)	(33.358)	Effect of foreign exchange translation
Saldo akhir	2.867.494	4.176.278	Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

12. LONG-TERM INVESTMENT

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Investasi pada entitas asosiasi	2.121.040.201	2.757.291.330	<i>Investment in associates</i>
Investasi pada penyertaan saham	138.912.000	50.906.100	<i>Investment in share of stocks</i>
Investasi pada surat utang	516.441.402	402.826.170	<i>Investment in bonds</i>
Total	2.776.393.603	3.211.023.600	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. *Investment in associates*

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
JICT (Catatan 48b, 48c, 48d dan 48e)	1.195.871.471	1.802.286.963	<i>JICT (Note 48b, 48c, 48d and 48e)</i>
CTP	584.874.744	584.174.631	<i>CTP</i>
NPCT1 (Catatan 47d)	299.868.935	337.706.705	<i>NPCT1 (Note 47d)</i>
TPI	33.245.452	33.123.031	<i>TPI</i>
RSP (Catatan 35)	7.179.599	-	<i>RSP (Note 35)</i>
Total	2.121.040.201	2.757.291.330	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember/December 31, 2020					
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas					
<i>Owned through the Company</i>					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.057.544.585	30.037.638	1.195.871.471
RSP	32,88%	13.706.360	(6.478.544)	(48.217)	7.179.599
TPI	25,00%	37.500.000	(4.254.548)	-	33.245.452
<i>Owned through API</i>					
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	148.618.924	-	584.874.744
<i>Owned through IPC TPK</i>					
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	99.537.499	26.561.380	299.868.935
Total		769.521.484	1.294.967.916	56.550.801	2.121.040.201
31 Desember/December 31, 2019					
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas					
<i>Owned through the Company</i>					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.113.555.444	580.442.271	1.802.286.963
TPI	25,00%	37.500.000	(4.376.969)	-	33.123.031
<i>Owned through API</i>					
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	147.918.811	-	584.174.631
<i>Owned through IPC TPK</i>					
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	141.558.496	22.378.153	337.706.705
Total		755.815.124	1.398.655.782	602.820.424	2.757.291.330

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

b. Investasi pada penyertaan saham

b. Investment in share of stock

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
PT Pertamina Bina Medika IHC	96.250.000	-	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Djakarta Lloyd	20.628.000	20.628.000	PT Djakarta Lloyd
PT Astra International Tbk	15.062.500	17.312.500	PT Astra International Tbk
PT Bukit Asam Tbk	5.620.000	5.320.000	PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	5.102.500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	1.351.500	2.543.100	Others (each below Rp2 billion)
Total	138.912.000	50.906.100	Total

c. Investasi pada surat utang

d. Investment in bonds

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	99.616.912	97.074.515	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Medco Power Indonesia	51.812.250	50.432.290	PT Medco Power Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	50.000.000	50.000.000	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	20.415.680	51.367.050	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
PT PLN (Persero)	10.941.195	-	PT PLN (Persero)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	283.655.365	153.952.315	Others (each below Rp2 billion)
Total	516.441.402	402.826.170	Total

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.002.857	-	-	-	45.002.857	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	644.034.633 21.545.378	- -	- -	- -	644.034.633 21.545.378	Port facilities Roads and buildings
Total	710.582.868	-	-	-	710.582.868	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(346.002.520) (7.284.861)	(18.871.309) (482.440)	- -	- -	(364.873.829) (7.767.301)	Port facilities Roads and buildings
Total	(353.287.381)	(19.353.750)	-	-	(372.641.130)	Total
Nilai buku neto	357.295.487				337.941.738	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	(8.741)	45.002.857	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	652.779.657	-	-	(8.745.024)	644.034.633	Port facilities
Jalan dan bangunan	12.799.354	-	-	8.745.024	21.545.378	Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	(8.741)	710.582.868	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(326.645.743)	(19.356.777)	-	-	(346.002.520)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(6.802.419)	(482.442)	-	-	(7.284.861)	Roads and buildings
Total	(333.448.162)	(19.839.219)	-	-	(353.287.381)	Total
Nilai buku neto	377.142.447				357.295.487	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

Nilai wajar properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp11.641.103.381 dan Rp10.899.062.719.

The fair value of investment properties for the years ended December 31, 2020 and 2019 are calculated amounting to Rp11,641,103,381 and Rp10,899,062,719, respectively.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	2.340.910.460	6.142.286	-	-	2.347.052.746	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.775.710.200	-	-	637.096.053	6.412.806.253	Port facilities
Kapal	1.740.326.484	35.888.863	(41.231.857)	142.506.911	1.877.490.401	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.755.485.620	4.964.847	(5.179.080)	44.667.787	2.799.939.174	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	1.032.093.284	8.000.932	-	83.038.084	1.123.132.300	Port installation
Jalan dan bangunan	2.085.483.546	6.681.240	(22.888)	171.116.625	2.263.258.523	Roads and buildings
Peralatan	683.795.880	10.331.982	(4.625.887)	23.323.210	712.825.185	Equipment
Kendaraan	64.460.475	12.825	(1.332.858)	-	63.140.442	Vehicles
Emplasemen	43.745.952	-	-	32.329.150	76.075.102	Emplacement
Subtotal	16.522.011.901	72.022.975	(52.392.570)	1.134.077.820	17.675.720.126	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	1.824.102.142	1.524.995.753	-	(1.279.202.228)	2.069.895.667	Construction in progress
Total	18.346.114.043	1.597.018.728	(52.392.570)	(145.124.408)	19.745.615.793	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.357.741.308)	(96.088.991)	-	-	(1.453.830.299)	Port facilities
Kapal	(841.801.071)	(101.135.541)	39.382.706	(101.816.449)	(1.005.370.355)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.389.134.394)	(167.246.277)	5.179.080	-	(1.551.201.591)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(314.729.855)	(48.479.820)	-	-	(363.209.675)	Port installation
Jalan dan bangunan	(514.769.188)	(79.074.281)	22.430	892.549	(592.928.490)	Roads and buildings
Peralatan	(451.880.329)	(35.165.655)	3.467.522	(892.549)	(484.471.011)	Equipment
Kendaraan	(40.853.052)	(2.259.380)	832.558	-	(42.279.874)	Vehicles
Emplasemen	(21.218.019)	(3.654.014)	-	-	(24.872.033)	Emplacement
Total	(4.932.127.216)	(533.103.959)	48.884.296	(101.816.449)	(5.518.163.328)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(26.830.992)	(10.447.794)	-	-	(37.278.786)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	13.387.155.835				14.190.173.679	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	2.253.903.307	86.852.116	-	155.037	2.340.910.460	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.666.729.950	79.842.388	(6.375.332)	35.513.194	5.775.710.200	Port facilities
Kapal	1.694.204.431	87.903.071	(41.781.018)	-	1.740.326.484	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.611.900.537	96.315.481	(13.632.860)	60.902.462	2.755.485.620	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	966.492.385	44.202.013	(8.879.365)	30.278.251	1.032.093.284	Port installation
Jalan dan bangunan	1.990.567.548	176.810.615	(87.096.359)	5.201.742	2.085.483.546	Roads and buildings
Peralatan	597.516.344	82.825.244	(3.103.305)	6.557.597	683.795.880	Equipment
Kendaraan	65.026.632	1.018.860	(1.602.507)	17.490	64.460.475	Vehicles
Emplasemen	40.000.139	2.392.134	(992.930)	2.346.609	43.745.952	Emplacement
Subtotal	15.886.341.273	658.161.922	(163.463.676)	140.972.382	16.522.011.901	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	1.272.325.406	700.684.387	-	(148.907.651)	1.824.102.142	Construction in progress
Total	17.158.666.679	1.358.846.309	(163.463.676)	(7.935.269)	18.346.114.043	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.292.154.461)	(68.788.295)	3.201.448	-	(1.357.741.308)	Port facilities
Kapal	(788.510.726)	(94.748.495)	41.458.150	-	(841.801.071)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.238.381.952)	(163.821.487)	13.069.045	-	(1.389.134.394)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(272.636.901)	(46.353.394)	4.260.440	-	(314.729.855)	Installation
Jalan dan bangunan	(458.559.758)	(80.605.817)	24.396.387	-	(514.769.188)	Roads and buildings
Peralatan	(393.657.642)	(61.263.926)	3.041.239	-	(451.880.329)	Equipment
Kendaraan	(38.710.021)	(3.158.102)	1.015.071	-	(40.853.052)	Vehicles
Emplasemen	(19.154.801)	(3.056.148)	992.930	-	(21.218.019)	Emplacement
Total	(4.501.766.262)	(521.795.664)	91.434.710	-	(4.932.127.216)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(27.902.984)	1.071.992	-	-	(26.830.992)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	12.628.997.433				13.387.155.835	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, dan Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp6.087.464.242 dan USD553.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp6.125.510.242 dan USD571.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, and Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association with total insurance coverage amounting to Rp6,087,464,242 and USD553,000,000 as of December 31, 2020 and Rp6,125,510,242 and USD571,000,000 as of December 31, 2019. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reklasifikasi pada tahun 2020 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset tak berwujud dengan nilai perolehan sebesar Rp282.193.221, serta reklasifikasi akun aset tidak lancar lainnya menjadi akun aset tetap sebesar Rp137.068.813.

Reclassification in 2020 included reclassification from fixed assets to intangible assets amounted to Rp282,193,221, and reclassification of other non-current assets to fixed assets amounting to Rp137,068,813.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp7.944.010, serta reklasifikasi akun aset properti investasi menjadi akun aset tetap sebesar Rp8.741.

Penghapusan Aset Tetap

Perusahaan

Pada tahun 2020, Perusahaan menghapusbukukan beberapa aset tetap dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN berdasarkan surat No. X-793/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan surat No.15/DK/PI.II/III-2020 tanggal 31 Maret 2020, 155/DK/PI.II/III-2018 tanggal 19 Desember 2018, dan 154/DK/PI.II/XII-2018 tanggal 19 Desember 2018.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.410.761 dan Rp113.747.216 dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp262.807 dan Rp72.028.966.

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di 2020, Perusahaan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp80.961 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Rukindo

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No KS.01/24/9/1/PCB/UT/PI.II-20 dan No: PPI-623-24092020-007 tanggal 24 September 2020, Rukindo menghapusbukukan aset tetap yaitu aset kapal TSHD Irian Jaya. Rukindo menjual aset tetap tersebut pada tahun 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp41.231.856 dan nilai buku sebesar Rp1.849.151 dan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp4.830.849 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 Januari 2020 No. 004/DKPII/2020, dimana menyatakan Dewan Komisaris selaku mewakili pemegang saham menyetujui penghapusan aset Rukindo dengan nilai buku sebesar Rp1 (dengan nilai perolehan sebesar Rp7.978.626). Berdasarkan Keputusan Direksi Rukindo No. 5/2/3/Dirut-2020 tanggal 5 Februari 2020, Direksi Rukindo menyetujui menghapusbukukan peralatan dan inventaris kantor milik Rukindo yang bernilai Rp1.

14. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification in 2019 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp7,944,010, and reclassification of investment properties to fixed assets amounting to Rp8,741.

Write-off of Fixed Assets

The Company

In 2020, the Company has written-off certain fixed assets and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. X-793/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 and the Company's Board of Commissioners based on letter No.15/DK/PI.II/III-2020 dated March 31, 2020, 155/DK.PI.II/III-2018 dated December 19, 2018, and 154/DK/PI.II/XII-2018 dated December 19, 2018.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2020 and 2019 amounting to Rp2,410,761 and Rp113,747,216 respectively, with book value amounting to Rp262,807 and Rp72,028,966 respectively.

Due to write-off and sales of fixed asset which were already performed in 2020, the Company recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp80,961 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Rukindo

Based on Decree of Board of Directors No KS.01/24/9/1/PCB/UT/PI.II-20 and No PPI-623-24092020-007 dated September 24, 2020, Rukindo has disposed certain fixed assets, namely TSHD Irian Jaya. Rukindo sold such fixed assets in 2020 with acquisition cost totaling Rp41,231,856 and book value amounting to Rp1,849,151 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp4,830,849 in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.004/DKPII/2020 dated January 21, 2020, which stated that the Board of Commissioners as representing the shareholders approved the write-off of Rukindo's assets with book value of Rp1 (with acquisition cost totaling Rp7,978,626). Based on the Decree of the Board of Directors of Rukindo No.5/2/3/Dirut-2020 dated February 5, 2020, the Board of Directors of Rukindo agreed to write off equipment and office inventory belonging to Rukindo which was valued at Rp1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap

PII

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 006/DK-PII/Eksternal/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, PII menghapusbukukan aset tetap berupa interior dan renovasi 2nd office pada Gedung Wisma BNI.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2020 sebesar Rp1.826.339 dengan nilai buku sebesar Rp739.828.

PII melelang aset tersebut di tahun 2020 dan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp739.828 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.075.053.681	787.031.669
Jalan dan bangunan	480.723.326	448.717.217
Kapal	214.834.239	150.815.147
Peralatan	163.930.870	335.905.514
Instalasi fasilitas pelabuhan	72.019.388	6.658.141
Alat fasilitas pelabuhan	60.289.824	92.417.481
Emplasemen	3.044.339	2.556.973
Total	2.069.895.667	1.824.102.142

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,00% - 94,00%
Pekerjaan pembangunan kapal	3,00%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	5,00% - 95,00%
Alat fasilitas pelabuhan	73,00% - 88,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	24,00% - 84,00%

14. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets

PII

Based on the Board of Commissioners Approval Letter No. 006/DK-PII/Eksternal/V/2020, dated May 29, 2020, PII written-off fixed assets in the form of interior and renovation of the 2nd office at Wisma BNI Building.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2020 amounting to Rp1,826,339 with book value amounting to Rp739,828.

PII auctioned the goods in 2020 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp739,828 on consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

31 Desember/December 31,		
2020	2019	
		Port facilities
		Roads and buildings
		Vessels
		Equipment
		Port installation
		Port equipment
		Emplacement
Total	Total	

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2020 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2021	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2021	Construction of ship
2021	Construction of yard
2021	Port equipment facilities
2021	Port facility installation

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	15% - 94,99%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	23,53% - 95%
Alat fasilitas pelabuhan	0,05% - 94,91%
Instalasi fasilitas pelabuhan	16,04% - 76,04%

15. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 48a) dan PT Maspion Industrial Estate (Catatan 48n), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	479.250	-	-	1.082.111	Roads and buildings
Peralatan	609.224	926.597	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	875.341.301	1.405.847	-	-	876.747.148	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(361.223.727)	(20.516.614)	-	-	(381.740.341)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(47.699.898)	(5.985.691)	-	-	(53.685.589)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.782.575)	(647.368)	-	-	(4.429.943)	Port installation
Jalan dan bangunan	(227.576)	(188.068)	-	-	(415.644)	Roads and buildings
Peralatan	(597.040)	(873.478)	-	-	(1.470.518)	Equipment
Emplasemen	(710.384)	(177.596)	-	-	(887.980)	Emplacement
Total	(414.241.200)	(28.388.815)	-	-	(442.630.015)	Total
Nilai buku neto	461.100.101				434.117.133	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.725.479	-	-	7.944.010	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	867.397.291	-	-	7.944.010	875.341.301	Total

14. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2019 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2020	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2020	Construction of yard
2020	Port equipment facilities
2020	Port facility installation

15. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 48a) and PT Maspion Industrial Estate (Note 48n), respectively, with details as follow:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET KERJASAMA OPERASI

15. JOINT OPERATION ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(339.121.390)	(22.102.337)	-	-	(361.223.727)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(41.690.939)	(6.008.959)	-	-	(47.699.898)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.043.523)	(739.052)	-	-	(3.782.575)	Port installation
Jalan dan bangunan	(170.682)	(56.894)	-	-	(227.576)	Roads and buildings
Peralatan	(447.780)	(149.260)	-	-	(597.040)	Equipment
Emplasemen	(532.788)	(177.596)	-	-	(710.384)	Emplacement
Total	(385.007.102)	(29.234.098)	-	-	(414.241.200)	Total
Nilai buku neto	482.390.189				461.100.101	Net book value

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Aset hak konsesi	12.030.523.331	11.073.294.718	Concession rights assets
Piranti lunak	654.000.363	369.777.904	Software application
Aset takberwujud lainnya	23.200.889	25.103.155	Other intangible assets
Subtotal	12.707.724.583	11.468.175.777	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(844.213.838)	(649.904.297)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	11.863.510.745	10.818.271.480	Net

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak kepada Perusahaan masing-masing untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 47a dan 48o), dengan rincian sebagai berikut:

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok and Port Authority office of Class II Pontianak Port to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port and Kijing Terminal at Pontianak Port, respectively, based on Concession Agreement (Note 47a and 48o), with details as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya perolehan	11.073.294.718	957.228.613	-	-	12.030.523.331	Cost
Akumulasi amortisasi	(287.807.459)	(96.443.009)	-	-	(384.250.468)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	10.785.487.259				11.646.272.863	Carrying amount
	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya perolehan	9.150.801.841	1.930.151.065	(7.658.188)	-	11.073.294.718	Cost
Akumulasi amortisasi	(186.344.486)	(101.462.973)	-	-	(287.807.459)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.964.457.355				10.785.487.259	Carrying amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset hak konsesi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 94,00% dan 70,52%, sedangkan persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 80,00% dan 43,66%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019 adalah sebesar Rp180.998.295 dan Rp123.863.584, sedangkan untuk terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp84.721.410 dan Rp62.200.973.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan *VGM* untuk sistem operasi terminal.

17. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Rekonsiliasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Aset hak-guna	
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73 (Catatan 4)	227.049.843
Penambahan bersih selama tahun berjalan	-
Beban amortisasi selama tahun berjalan	(64.249.082)
Saldo akhir	162.800.761

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Concession rights assets (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 94.00% and 70.52%, respectively, while the average percentage construction for Kijing terminal for the year ended December 31, 2020 and 2019 is 80.00% and 43.66%, respectively.

Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp180,998,295 and Rp123,863,584 while for Kijing terminal for the year ended December 31 2020 and 2019 is Rp84,721,410 and Rp62,200,973, respectively.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2020 and 2019.

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for car terminal services, container terminal services and warehouse and *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of *Port Community System/Inaportnet*, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, *autogate* integration and *VGM* for terminal operating system.

17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The reconciliation of right-of-use assets is as follows:

	Right-of-use assets
Balance adjustment upon adoption of PSAK 73 (Note 4)	-
Net addition during the year	-
Amortization expense during the year	-
Ending balance	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**17. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Liabilitas sewa	
Bagian jangka pendek	60.214.419
Bagian jangka panjang	112.676.519
Total	172.890.938

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020
Bunga atas liabilitas sewa	11.836.300
Beban penyusutan aset hak-guna	64.249.082

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020
Jumlah kas keluar untuk	
Pembayaran liabilitas sewa	51.779.311
Pembayaran bunga	11.836.300
Total	63.615.611

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Kelompok Usaha sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Kelompok Usaha mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Kelompok Usaha.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020
Liabilitas sewa	
Saldo, 31 Desember 2019	-
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73	224.670.249
Arus kas	(51.779.311)
Perubahan non-kas - penambahan	-
Saldo akhir	172.890.938

**17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

The detail of lease liabilities is as follows:

Lease liabilities
Current portion
Non-current portion

Total

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

Interest on lease liabilities
Depreciation of right-of-use assets

Amount recognized in statement of cash flow is as follows:

Total cash outflow for
Payments of lease liabilities
Payments of interest

Total

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

Lease liabilities
Balance, December 31, 2019
Balance adjustment upon adoption of PSAK 73
Cash flow
Non-cash changes - additions

Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Pajak final dibayar di muka (Catatan 24g)	1.244.598.181	1.230.024.963	Prepaid final tax (Note 24g)
Jaminan pelaksanaan	64.999.265	64.999.265	Performance bond
Piutang pemulihan investasi	55.016.590	269.245.974	Investment recovery receivables
Uang jaminan	21.053.483	17.096.154	Security deposits
Aset lain-lain - neto	160.212.751	129.833.450	Other assets – net
Total	1.545.880.270	1.711.199.806	Total

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 47a).

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Note 47a).

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan vessel traffic service, dan perbaikan kapal keruk.

Other assets - others - net mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, and dredges repairment.

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

19. SHORT-TERM BANK LOANS

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

Short-term bank loans consist of:

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Pihak Ketiga			Third parties
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.000.000	6.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
Pihak berelasi (Catatan 43f)			Related parties (Note 43f)
PT Bank Syariah Mandiri	-	28.193.914	PT Bank Syariah Mandiri
Total	4.000.000	34.193.914	Total

EDII

EDII

Pada tanggal 13 Oktober 2020, EDII memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") senilai Rp15.000.000 dengan suku bunga setara 11% per tahun yang berakhir pada tanggal 10 Desember 2021. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021.

On October 13, 2020, EDII obtained a loan from PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") which has amount Rp15,000,000 with an interest rate equal to 11% per annum which ended on December 10, 2021. As of December 31, 2020, the outstanding balance from the loan is Rp4,000,000 and will mature on January 31, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

EDII (lanjutan)

Pada tanggal 25 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga setara 11,75% per tahun dengan jatuh tempo pada 10 November 2020. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.000.000.

RSP

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah - pembiayaan dana berputar kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp30.000.000. Fasilitas ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja RSP. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 2,22% dan 97,78%. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan oleh Perusahaan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai Rp30.000.000 dengan nilai pengikatan fidusia sebesar nilai piutang tersebut.

Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 27 Februari 2020, jangka waktu fasilitas tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp13.811.239 dan Rp28.193.914. Sejak tanggal 7 Agustus 2020, laporan keuangan RSP tidak lagi dikonsolidasikan ke laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha (catatan 1b).

20. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pihak ketiga Swasta	293.806.030	359.929.551
Pihak berelasi (Catatan 43g)	1.288.115.200	1.076.552.787
Total	1.581.921.230	1.436.482.338

19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

EDII (continued)

On November 25, 2019, the Company obtained loan facility from PT OCBC NISP, Tbk amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 11.75% per annum with the maturity date on November 10, 2020. Balance of the loan as of December 31, 2019 amounted to Rp6,000,000.

RSP

Based on agreement dated February 15, 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") agreed to provide financing facility based on musyarakah - revolving fund financing to RSP with maximum financing limit amounting to Rp30,000,000. This facility is provided for working capital of RSP. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP amounted to 2.22% and 97.78%, respectively. The facility period is 12 (twelve) months since the drawdown date by RSP. The facility is guaranteed by collateral in the form of trade receivables amounted Rp30,000,000 with fiduciary value amounting as the mentioned receivables.

The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

On February 27, 2020, the term of the facility was extended until February 15, 2021.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp13,811,239 and Rp28,193,914, respectively. Since 7 August 2020, RSP's financial statements are no longer consolidated into the Group's consolidated financial statements (note 1b).

20. TRADE PAYABLES

a. By supplier

Third parties
Private

Related parties (Note 43g)

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. UTANG USAHA

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Rupiah	1.261.702.500	947.869.630
Dolar AS	320.080.089	488.488.004
Euro Eropa	138.641	124.704
Total	1.581.921.230	1.436.482.338

20. TRADE PAYABLES

b. By currency

Rupiah
US Dollar
European Euro

Total

**21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Sewa kuartalan (Catatan 47h dan 48a)	654.685.673	520.544.218
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	106.697.987	156.088.555
Uang muka dari pelanggan untuk diperhitungkan Swasta	29.116.769	10.697.990
Pihak berelasi (Catatan 43h)	124.326	950.251
Lain-lain	9.380.996	7.132.428
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	1.965.396	3.078.074
Subtotal	801.971.147	698.491.516
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 27)	155.204.702	146.997.708
Total	957.175.849	845.489.224

21. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES

Quarterly rent (Note 47h and 48a)
Land, building, water and electricity
services

Advances from customers
Private
Related parties (Note 43h)
Others

Other short-term unearned revenues

Sub-total

Current portion of long-term unearned
revenue (Note 27)

Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Umum	632.577.850	897.590.232
Pegawai	553.996.934	537.340.813
Bunga	165.296.504	159.205.064
Kerjasama mitra usaha	164.620.152	264.259.150
Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI	39.089.633	39.089.633
Pemeliharaan	30.407.592	72.828.363
Biaya konsesi	28.354.981	32.077.764
Bahan bakar dan bahan habis pakai	22.462.359	103.074.299
Lain-lain	128.472.074	169.261.308
Total	1.765.278.079	2.274.726.626

22. ACCRUED EXPENSES

General
Employees
Interest
Partnership
Provision for construction of Pemda
DKI assets
Maintenance
Concession fee
Fuels and supplies
Others

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi tanggal 11 November 2015 (Catatan 48m).

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 Mei 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangunan kepada Perusahaan.

22. ACCRUED EXPENSES (continued)

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement dated November 11, 2015 (Note 48m).

Provision of construction of Pemda DKI assets represents the Company's obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

23. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Pihak ketiga	205.507.480	206.170.895	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43i dan 43j)	98.512.786	91.743.873	Related parties (Note 43i and 43j)
Total	304.020.266	297.914.768	Total

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Uang titipan dari pelanggan			Deposit from customers
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Swasta	102.688.518	85.926.856	Private
Lain-lain	69.468.915	87.820.980	Others
Pihak berelasi (Catatan 43i)	26.781.769	18.382.047	Related parties (Note 43i)
Subtotal	198.939.202	192.129.883	Sub-total
Liabilitas jangka pendek lainnya			Other current liabilities
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Pihak berelasi (Catatan 43j)	33.350.047	32.423.059	Related parties (Note 43j)
Subtotal	71.731.017	73.361.826	Sub-total
Subtotal	105.081.064	105.784.885	Sub-total
Total	304.020.266	297.914.768	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/Pl.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

24. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	158.389.132	197.084.038
Pajak penghasilan	20.691.139	27.232.934
Subtotal	179.080.271	224.316.972
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	269.129.543	107.873.791
Pajak penghasilan	75.859.061	348.414.304
Subtotal	344.988.604	456.288.095
Total	524.068.875	680.605.067

23. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

Other current liabilities to DKB represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/Pl.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Other current liabilities to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

24. TAXATION

a. Prepaid taxes

*The Company
Value Added Tax
Income taxes*

Sub-total

*Subsidiaries
Value Added Tax
Income taxes*

Sub-total

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

Taksiran tagihan restitusi pajak

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
2015	381.563.183	381.563.183	<i>2015</i>
2018	171.961.012	171.961.012	<i>2018</i>
2019	152.258.584	152.258.584	<i>2019</i>
2020	88.550.785	-	<i>2020</i>
Subtotal	<u>794.333.564</u>	<u>705.782.779</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai			<i>Value Added Tax</i>
2018	-	16.158.615	<i>2018</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
2015	573.404	14.502.241	<i>2015</i>
2016	7.658.230	7.658.230	<i>2016</i>
2017	1.476.564	3.215.362	<i>2017</i>
2018	6.100.289	39.084.807	<i>2018</i>
2019	185.049.405	172.515.120	<i>2019</i>
2020	57.118.475	-	<i>2020</i>
Subtotal	<u>257.976.367</u>	<u>253.134.375</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>1.052.309.931</u>	<u>958.917.154</u>	<i>Total</i>

b. Utang pajak

b. *Taxes payable*

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai			<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	16.334.668	21.706.567	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	30.637.442	27.131.331	<i>Article 21</i>
Pasal 22	66.529	210.893	<i>Article 22</i>
Pasal 23	19.425.770	21.611.655	<i>Article 23</i>
Pasal 25	-	9.750.759	<i>Article 25</i>
Lainnya	945	133.561	<i>Others</i>
Subtotal	<u>193.755.317</u>	<u>283.276.808</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai			<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	29.167.670	56.121.269	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	29.378.101	33.397.029	<i>Article 21</i>
Pasal 23	5.330.801	6.699.520	<i>Article 23</i>
Pasal 25	4.129.476	20.445.076	<i>Article 25</i>
Pasal 29	14.754.525	8.651.061	<i>Article 29</i>
Lainnya	3.000.473	3.968.052	<i>Others</i>
Subtotal	<u>163.276.085</u>	<u>161.739.186</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>357.031.402</u>	<u>445.015.994</u>	<i>Total</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2020 and 2019 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	986.666.881	2.705.407.941	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	580.953.153	1.039.668.216	Income before corporate income tax of subsidiaries
Pendapatan kena pajak final	2.455.811.980	2.672.426.763	Income subject to final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(2.050.098.252)	(1.006.687.037)	Loss before corporate income tax expenses - the Company
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Penyisihan imbalan kerja karyawan	99.172.246	56.169.583	Provision for employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	13.879.033	(30.917.268)	Provision for impairment of receivables
Amortisasi	26.866.966	35.952.965	Amortization
Penyusutan aset tetap	(105.753.772)	(131.897.568)	Depreciation of fixed assets
<u>Beda permanen:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban bunga	524.580.338	684.009.132	Interest expenses
Beban umum	114.668.778	143.300.705	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	115.888.405	98.491.347	Employees social welfare expenses
Beban promosi	23.774.551	29.245.190	Promotion expenses
Bagian laba entitas asosiasi	62.366.982	(139.545.210)	Income portion from associates
Lainnya	112.347.167	(179.430.708)	Others
Subtotal	987.790.694	565.378.168	Sub-total
Taksiran rugi pajak	(1.062.307.558)	(441.308.869)	Estimated tax loss

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	986.666.881	2.705.407.941	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Pendapatan kena pajak final	2.455.811.980	2.672.426.763	Income subject to final tax
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan	(1.469.145.099)	32.981.178	Income (loss) before corporate income tax expenses
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(323.211.922)	8.245.295	Income tax calculated at applicable rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. *Corporate income tax (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
<u>Dampak perbedaan permanen:</u>			<u>Effect of permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	177.952.908	259.718.928	Non deductible expenses
Penyesuaian	(7.403.414)	(2.586.976)	Adjustment
Bagian laba entitas asosiasi	(17.457.978)	(63.779.654)	Income portion from associates
Beban pajak penghasilan badan	(170.120.406)	201.597.593	Corporate income tax expense

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020.

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2020 will be used as a basis in filling the 2020 annual corporate income tax return.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. *The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	304.745.465	417.964.858	The Company
Entitas anak	92.799.239	91.727.633	Subsidiaries
Subtotal	397.544.705	509.692.491	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan			Corporate income tax expense
Kini			Current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	116.190.631	259.917.054	Subsidiaries
Subtotal	116.190.631	259.917.054	Sub-total
Tangguhan			Deferred
Perusahaan	(190.767.247)	(35.356.767)	The Company
Entitas anak	(95.543.790)	(22.962.694)	Subsidiaries
Subtotal	(286.311.037)	(58.319.461)	Sub-total
Total	(170.120.406)	201.597.593	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan Entitas anak	- 580.953.153	- 1.039.668.216	Estimated taxable income The Company Subsidiaries
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	580.953.153	1.039.668.216	Total estimated taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan Perusahaan Entitas anak	- 116.190.631	- 259.917.054	Corporate income tax expense - current The Company Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	116.190.631	259.917.054	Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan Entitas anak	88.550.785 158.554.581	152.258.584 423.781.112	Less prepaid income tax The Company Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	247.105.366	576.039.696	Total prepaid income tax
Taksiran hutang pajak penghasilan - Pasal 29 Perusahaan Entitas anak	- 14.754.525	- 8.651.061	Estimated income tax payable - Article 29 The Company Subsidiaries
Total	14.754.525	8.651.061	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan Perusahaan Entitas anak	88.550.785 57.118.475	152.258.584 172.515.119	Estimated claims for tax refund The Company Subsidiaries
Total	145.669.260	324.773.703	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020

	Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	73.873.814	91.363.159	(7.626.128)	424.495	158.035.340	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(717.067.728)	84.850.579	-	-	(632.217.149)	Depreciation
Amortisasi	37.017.200	(45.447.469)	-	-	(8.430.269)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	62.187.817	27.685.124	-	-	89.872.941	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	400.160.676	123.679.013	13.277.381	-	537.117.070	Provision for employee benefits
Subtotal	(217.702.035)	190.767.247	13.277.381	-	(13.657.407)	Sub-total
Entitas anak	(36.587.034)	4.180.631	5.951.725	(3.395.874)	(29.850.552)	Subsidiaries
Total	(254.289.069)	194.947.878	19.229.106	(3.395.874)	(43.507.959)	Total

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019

	Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	47.498.765	22.880.166	3.494.883	-	73.873.814	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(687.207.680)	(29.860.048)	-	-	(717.067.728)	Depreciation
Amortisasi	(18.595.544)	55.612.743	-	-	37.017.199	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	60.653.106	1.534.711	-	-	62.187.817	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	369.242.847	8.069.361	22.848.469	-	400.160.676	Provision for employee benefits
Subtotal	(275.907.271)	35.356.767	22.848.469	-	(217.702.035)	Sub-total
Entitas anak	(31.939.536)	82.528	702.878	(5.432.904)	(36.587.034)	Subsidiaries
Total	(307.846.807)	35.439.295	23.551.347	(5.432.904)	(254.289.069)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut.

Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan informasi website Mahkamah Agung dengan tanggal putusan 14 Desember 2020, peninjauan kembali Perusahaan dikabulkan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung tersebut.

JAI

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2018

Pada tanggal 5 Mei 2020, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar Rp9.472.131. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp3.211.767 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan. Pada tanggal 25 Mei 2020, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp8.731.268 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23 dan PPN sebesar Rp740.862.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filed an objection to the DJP for the SKPKB.

As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected Company's appeal. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company filed a judicial review to the Supreme Court.

Based on the Supreme Court's website information with decision date of December 14, 2020, the Company's judicial review was granted. Until the date of the completion of this consolidated financial statement, the Company has not received the legalized copy of the Supreme Court's decision.

JAI

Tax assessment for fiscal year 2018

On May 5, 2020, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2018 amounting to Rp9,472,131. The difference of the tax assessment with JAIs record amounting to Rp3,211,767 has been recorded as part of income tax expense. On May 25, 2020, JAI has received this overpayment refund amounting to Rp8,731,268 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23 and VAT amounting Rp740,862.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

JAI (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Desember 2019, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 sebesar Rp55.688.477. Pada tanggal 17 Januari 2020, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp51.806.641 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal PPN sebesar Rp3.881.835.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2017

Pada tanggal 8 Juli 2019, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp17.214.504. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp7.248.430 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan. Pada tanggal 19 Agustus 2019, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp10.550.266 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp6.664.237.

Pada tanggal 9 Mei 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp18.326.999. JAI telah membayar atas kurang bayar tersebut beserta utang pajak penghasilan pasal 15, 21, 23 dan PPN sebesar Rp23.845.304. JAI masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut dan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka.

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 43k) PT Bank Syariah Mandiri	-	114.990.000
Bagian lancar utang bank jangka panjang	-	(12.000)
Total bagian jangka panjang	-	114.978.000

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

JAI (continued)

Tax assessment for fiscal year 2018 (continued)

On December 11, 2019, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax (VAT) for fiscal year 2018 amounting to Rp55,688,477. On January 17, 2020, JAI has received this overpayment refund amounting to Rp51,806,641 after being compensated with income tax payable of VAT amounting Rp3,881,835.

Tax assessment for fiscal year 2017

On July 8, 2019, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2017 amounting to Rp17,214,504. The difference of the tax assessment with JAI's record amounting to Rp7,248,430 has been recorded as part of income tax expense. On August 19, 2019, JAI has received this overpayment refund amounting to Rp10,550,266 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23, 26 and VAT amounting Rp6,664,237.

On May 9, 2018, JAI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2014 amounting to Rp18,326,999. JAI has paid this underpayment assessment and income tax payable of articles 15, 21, 23 and VAT amounting to Rp23,845,304. JAI is still in the process of filing an objection of the SKPB and recorded it as prepaid tax.

25. LONG-TERM BANK LOANS

Related party (Note 43k)
PT Bank Syariah Mandiri

Current maturities of long-term bank loans

Total long-term portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, BSM menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan investasi berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp115.000.000. Fasilitas ini diberikan terutama untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan rumah sakit baru di cabang RSP Palembang. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 38,29% dan 61,71%, dengan besaran ujuh sebesar Rp186.366.230. Jangka waktu pembiayaan adalah 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal penarikan oleh RSP.

Fasilitas ini dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 21.330 m² di RSP Cabang Jakarta yang terletak di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara dengan nilai pengikatan hak tanggungan sebesar Rp181.250.000. Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp114.978.000 dan Rp114.990.000.

Sejak tanggal 7 Agustus 2020, laporan keuangan RSP tidak lagi dikonsolidasikan ke laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha (catatan 1b).

26. UTANG OBLIGASI

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Senior Notes penerbitan tahun 2015		
USD1.100.000.000	15.515.500.000	15.291.100.000
USD500.000.000	7.052.500.000	6.950.500.000
Dikurangi:		
Diskonto yang belum diamortisasi	(178.579.559)	(194.965.370)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(55.717.377)	(62.456.436)
Utang obligasi - neto	22.333.703.064	21.984.178.194

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Based on agreement dated February 15, 2019, BSM agreed to provide investment financing facility based on musyarakah mutanaqishah principle to RSP with maximum financing limit amounting to Rp115,000,000. This facility is provided to fund the investment to build a new hospital in RSP Palembang branch. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP each amounted at 38.29% and 61.71%, with amount of ujuh amounting to Rp186,366,230. The facility period is 120 (one hundred twenty) months since the drawdown date by RSP.

The facility is guaranteed by collateral in the form of land and building with area of 21,330 m² in RSP Jakarta branch, which located in Jl. Kramat Jaya, North Jakarta with mortgage value amounting to Rp181,250,000. The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp114,978,000 and Rp114,990,000, respectively.

Since 7 August 2020, RSP's financial statements are no longer consolidated into the Group's consolidated financial statements (note 1b).

26. BONDS PAYABLE

Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Interest Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
							Senior Notes issued in 2015 USD1,100,000,000 USD500,000,000
Senior Notes due 2025	USD1.100.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,250%
Senior Notes due 2045	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/Semi- Annually	5,375%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah The Development Bank of Singapore Limited (dahulunya Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompany Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's Investors Service, Inc. dan Standard and Poor's Ratings Group masing-masing adalah Baa3 dan BBB-.

Berdasarkan *Offering Circular*, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.

27. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Premium JICT (Catatan 48e)	2.087.090.104	2.325.614.688
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 47h)	1.019.435.010	771.175.595
Premium TPK Koja (Catatan 48a)	418.084.656	540.840.625
Sewa tanah dan/atau bangunan: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 48j)	450.433.639	276.168.033
PT Jakarta Tank Terminal (Catatan 48k)	29.802.670	34.634.861
PT Tunas Baru Lampung	14.265.129	23.378.016
PT Bogasari Sentra Flour Mills	2.989.449	5.978.898
PT Dok Duasatu Nusantara	2.684.523	3.723.693
PT Indokarya Internusa	2.192.927	3.467.415
PT Intiboga Sejahtera	387.630	3.772.473
PT Wilmar Nabati Indonesia	-	4.488.750
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	188.740.190	159.385.918
Total	4.216.105.927	4.152.628.965
Bagian lancar (Catatan 21)	(155.204.702)	(146.997.708)
Total bagian jangka panjang	4.060.901.225	4.005.631.257

26. BONDS PAYABLE (continued)

The obligation is not guaranteed by any special collateral.

Acting as the joint bookrunners are The Development Bank of Singapore Limited (previously Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompany Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.

Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company's expansion plan and general Corporate purposes.

On December 31, 2020, the Company's bond rating by Moody's Investors Service, Inc. and Standard Poor's Ratings Group are Baa3 and BBB-, respectively.

Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and should ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.

27. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

JICT Premium (Note 48e)	
Advance rental fee - NPCT1 (Note 47h)	
TPK Koja Premium (Note 48a)	
Land rental and/or building: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 48j)	
PT Jakarta Tank Terminal (Note 48k)	
PT Tunas Baru Lampung	
PT Bogasari Sentra Flour Mills	
PT Dok Duasatu Nusantara	
PT Indokarya Internusa	
PT Intiboga Sejahtera	
PT Wilmar Nabati Indonesia	
Others (each below Rp2 billion)	
Total	
Current portion (Note 21)	
Total long-term portion	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

28. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third party</u>
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	228.316.051	225.013.928	Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
<u>Pihak berelasi (Catatan 43i)</u>			<u>Related parties (Note 43i)</u>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	24.677.800	27.137.737	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	3.000.000	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Subtotal	24.677.800	30.137.737	Sub-total
Bagian lancar	(10.835.740)	(19.887.737)	Current portion
Bagian jangka panjang	13.842.060	10.250.000	Long-term portion

STMS

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 47e).

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2007 dari Notaris Kartono, S.H., Rukindo memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp16.000.000.000, Rp24.000.000.000 dan Rp8.000.000.000 masing-masing dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito bank pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, yang ditetapkan pada setiap awal tahun.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Berdasarkan Surat Perjanjian No 14/12/3/DIRUT-2018 dan No PKS.55/HK.05018/P.III-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang restrukturisasi pinjaman modal kerja kepada Pelindo III, disepakati bahwa utang pokok Rukindo tetap sebesar Rp24.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semula sebesar Rp16.595.467 menjadi sebesar Rp6.267.150. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp10.328.467 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

STMS

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 47e).

Based on Deed No. 22 dated August 13, 2007, of Notary Kartono, S.H., the Company obtained working capital loans amounting to Rp16,000,000,000, Rp24,000,000,000 and Rp8,000,000,000 from PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), respectively, with repayment term of 5 (five) years and bears interest at the rate equal to the average interest rate on 1-year time deposits of government-owned banks, which shall be determined at the beginning of each year.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Based on the Agreement No. 14/12/3/DIRUT-2018 and No. PKS.55/HK.05018/P.III-2018 dated December 14, 2018 concerning the capital loan restructuring to Pelindo III, it was agreed that the Rukindo's principal debt still same which is amounted Rp24,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp16,595,467 became Rp6,267,150. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp10,328,467 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**28. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (lanjutan)

Berdasarkan kesepakatan di atas, Rukindo akan membayar utang pokok sebesar Rp10.000.000 setelah memperoleh tambahan penyertaan modal dari Perusahaan dan/atau sumber dana lainnya yang diperoleh Rukindo. Sedangkan sisa utang pokok sebesar Rp14.000.000.000 akan diangsur selama 7 tahun dengan dikenakan bunga sebesar rata-rata suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mata uang Rupiah tenor 6 bulan. Sedangkan utang bunga sebesar Rp6.267.150.000 akan diusulkan untuk dihapus maksimal 50% dari total utang bunga dan sisanya dibayarkan secara proposional selama 7 (tujuh) tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp24.677.800 dan Rp27.137.737.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No 10/12/1/DIRUT-2018 dan No 8.HK.301/12/DKU-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penyelesaian pinjaman modal kepada Pelindo IV, disepakati bahwa utang pokok Rukindo yang semula sebesar Rp10.923.000 menjadi sebesar Rp8.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semua sebesar Rp5.531.822 menjadi sebesar Rp2.932.000. Jangka waktu pelunasan utang pokok, bunga dan denda tersebut adalah selama 3 tahun. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp2.608.822 pada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Berdasarkan kesepakatan pada bulan Desember 2019, Rukindo memperoleh persetujuan dari Pelindo IV untuk menghapus bunga dan denda sebesar Rp2.923.000. Jumlah tersebut di atas telah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman sebesar Rp3.000.000. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 9 Januari 2020.

28. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (continued)

Based on the agreement above, Rukindo will pay the principal loan amounting Rp10,000,000 after obtaining additional capital injection from the Company and/or other sources of funds obtained from the Company. The remaining principal loan of Rp14,000,000,000 will be paid in installments for 7 years which bears interest at the average rate of Jakarta Interbank Interest Rate (JIBOR) in Rupiah currency with a tenor of 6 months. While the interest payable of Rp6,267,150,000 will be submitted to be written off with maximum of 50% of the total interest and the remaining will be paid proportionally for 7 (seven) years.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of this loan amounted to Rp24,677,800 and Rp27,137,737.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Based on the Minutes of Agreement No. 10/12/1/DIRUT-2018 and No.8.HK.301/12/DKU-2018 dated December 10, 2018 concerning the settlement of capital loans to Pelindo IV, it was agreed that the Rukindo's principal debt which originally amounted Rp10,923,000 became Rp8,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp5,531,822 became Rp2,932,000. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp2,608,822 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on agreement on December 2019, Rukindo obtained approval from Pelindo IV to written off of interests and penalties amounting to Rp2,923,000. All amounts have been charged to the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2019 the outstanding balances of this loan amounted to Rp3,000,000. This loan was fully repaid on January 9, 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Towers Watson Purbajaga dan PT Padma Radya Aktuaria, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	2020	2019
Tingkat diskonto	3,64% - 7,83%	7,04% - 8,11%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4,00% - 10,00%	6,00% - 10,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2019	TMI 2011
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	5% - 10%	1% - 10%
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00%	1,00% - 5,00%
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Perusahaan		
Program pensiun	177.574.750	174.365.283
Program penghargaan masa bhakti	849.857.115	750.788.445
Program kesehatan pensiunan	1.410.890.095	646.466.873
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	29.154.985	29.042.101
Subtotal	2.467.476.945	1.600.642.702
Entitas anak		
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	296.785.350	365.683.206
Total	2.764.262.295	1.966.325.908

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2020 and 2019, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Towers Watson Purbajaga and PT Padma Radya Aktuaria, using the "Projected Unit Credit" method.

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

	2020	2019
Tingkat diskonto	3,64% - 7,83%	7,04% - 8,11%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4,00% - 10,00%	6,00% - 10,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2019	TMI 2011
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	5% - 10%	1% - 10%
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00%	1,00% - 5,00%
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years

The employee benefit liabilities are as follows:

	2020	2019
The Company		
Program pensiun	177.574.750	174.365.283
Gratuity and compensation benefits	849.857.115	750.788.445
Pension healthcare program	1.410.890.095	646.466.873
Other long-term employee benefits	29.154.985	29.042.101
Sub-total	2.467.476.945	1.600.642.702
Subsidiaries		
Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program	296.785.350	365.683.206
Total	2.764.262.295	1.966.325.908

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas	478.628.195	474.260.058	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(301.053.445)	(299.894.775)	Fair value of plan assets
Defisit program	177.574.750	174.365.283	Deficit in plan
Dampak batas atas aset	-	-	Effect of asset ceiling
Liabilitas yang diakui	177.574.750	174.365.283	Recognized liabilities

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Biaya jasa kini	4.844.544	4.287.073	Current service cost
Biaya bunga	13.652.802	13.725.288	Interest cost
Beban yang diakui	18.497.346	18.012.361	Recognized expense

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Liabilitas awal tahun	174.365.283	164.769.363	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	18.497.346	18.012.361	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	27.450.615	24.308.157	Other comprehensive income
Iuran pemberi kerja	(42.738.494)	(32.724.598)	Employer's contributions
Liabilitas akhir tahun	177.574.750	174.365.283	Liabilities at end of year

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	474.260.058	481.507.390	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	4.844.544	4.287.073	Current service cost
Biaya bunga	37.134.562	40.109.567	Interest cost
Iuran peserta program	788.975	834.748	Plan participants' contributions
Ekspektasi pembayaran imbalan	(65.722.613)	(67.200.908)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	27.322.669	14.722.188	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	478.628.195	474.260.058	Present value of liabilities - end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Nilai wajar aset program awal tahun	299.894.775	316.738.027	Fair value of program assets - beginning of year
Imbal hasil ekspektasian aset program	23.481.761	26.384.278	Expected return from program assets
luran pemberi kerja	42.738.494	32.724.598	Employer's contributions
luran peserta program	788.975	834.748	Plan participants' contributions
Imbalan yang dibayarkan	(65.722.613)	(67.200.908)	Benefits paid
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(127.947)	(9.585.968)	Actuarial gain (loss)
Nilai wajar aset program akhir tahun	301.053.445	299.894.775	Fair value of program assets - end of year

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Aset tetap 45,45%	- Fixed assets 45.45%
- Reksa dana 30,85%	- Mutual funds 30.85%
- Investasi saham 2,66%	- Investment in shares 2.66%
- Surat utang negara 7,74%	- State bonds 7.74%
- Deposito berjangka 8,37%	- Time deposits 8.37%
- Penyertaan langsung 4,93%	- Direct investment 4.93%

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	377.424.720	386.268.990	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	60.281.722	51.273.204	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	167.682.316	178.812.694	Maturity > 5 years
Total	605.388.758	616.354.888	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	17.453.714	(21.934.530)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	722.820	(909.976)	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(7.181.044)	6.709.123	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(305.821)	285.153	Current service cost

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

b. Penghargaan masa bhakti

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

b. Gratuity and compensation benefits

		31 Desember/December 31,		
		2020	2019	
Nilai kini liabilitas		849.857.115	750.788.445	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program		-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui		849.857.115	750.788.445	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2020	2019	
Biaya jasa kini		56.769.981	52.314.545	Current service cost
Biaya bunga		58.786.735	54.448.359	Interest cost
Keuntungan aktuarial		(338.639)	(32.512)	Actuarial gain
Beban imbalan kerja lain		53.311.245	292.156	Other employee benefit cost
Beban yang diakui		168.529.322	107.022.548	Recognized expense
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2020	2019	
Liabilitas awal tahun		750.788.445	653.641.759	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi		168.529.322	107.022.548	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain		(24.231.841)	34.382.820	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan		(45.228.811)	(44.258.682)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun		849.857.115	750.788.445	Liabilities at end of year
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,				
		2020	2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun		750.788.445	653.641.759	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini		56.769.981	52.314.544	Current service cost
Biaya bunga		58.786.735	54.448.359	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan		(45.228.811)	(44.258.682)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial		(24.570.479)	34.350.308	Actuarial loss (gain)
Biaya jasa lalu		53.311.244	292.157	Past service cost
Nilai kini liabilitas akhir tahun		849.857.115	750.788.445	Present value of liabilities - end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Jatuh tempo <= 1 tahun	35.328.941	27.438.107
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	225.617.887	192.447.732
Jatuh tempo > 5 tahun	5.028.940.902	5.227.027.064
Total	5.289.887.730	5.446.912.903

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	68.667.958	(79.458.016)
Biaya jasa kini	6.026.351	(7.166.341)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	(76.637.453)	67.338.852
Biaya jasa kini	(6.923.811)	5.916.689

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Nilai kini liabilitas	1.410.890.095	646.446.873
Nilai wajar aset program	-	-
Liabilitas yang diakui	1.410.890.095	646.446.873

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	35.328.941	27.438.107	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	225.617.887	192.447.732	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	5.028.940.902	5.227.027.064	Maturity > 5 years
Total	5.289.887.730	5.446.912.903	Total

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	68.667.958	(79.458.016)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	6.026.351	(7.166.341)	Current service cost

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(76.637.453)	67.338.852	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(6.923.811)	5.916.689	Current service cost

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas	1.410.890.095	646.446.873	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	1.410.890.095	646.446.873	Recognized liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2020	2019	
Biaya jasa kini	23.390.232	Current service cost
Biaya bunga	50.616.790	Interest cost
Beban yang diakui	74.007.022	Recognized expense

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2020	2019	
Liabilitas awal tahun	646.446.873	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	74.007.022	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	764.508.744	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(74.072.544)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	1.410.890.095	Liabilities at end of year

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2020	2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	646.446.873	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	23.390.232	Current service cost
Biaya bunga	50.616.790	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(74.072.544)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	764.508.744	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.410.890.095	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2020 dan 2019 is as follows:

31 Desember/December 31,		
2020	2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	73.605.754	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	333.112.501	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	2.115.298.216	Maturity > 5 years
Total	2.522.016.471	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	175.249.189
Biaya jasa kini	5.305.723

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Pension healthcare program (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(260.459.509)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(10.263.942)	Current service cost

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

31 Desember/December 31,

	2020	2019	
Nilai kini liabilitas	29.154.985	29.042.101	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	29.154.985	29.042.101	Recognized liabilities

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2020	2019	
Biaya jasa kini	3.751.100	4.022.673	Current service cost
Biaya bunga	2.273.997	2.023.505	Interest cost
Kerugian atau (keuntungan) aktuarial	(4.148.639)	448.046	Actuarial loss or (gain)
Beban imbalan kerja lain	-	(1.437.912)	Other employee benefit cost
Beban yang diakui	1.876.458	5.056.312	Recognized expense

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2020	2019	
Liabilitas awal tahun	29.042.100	24.291.771	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	1.876.458	5.056.312	Expense recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(1.763.573)	(305.982)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	29.154.985	29.042.101	Liabilities at end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	29.042.100	24.291.771	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	3.751.100	4.022.673	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	(1.437.912)	Past service cost
Biaya bunga	2.273.997	2.023.505	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(1.763.573)	(305.982)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(4.148.639)	448.046	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	29.154.985	29.042.101	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	6.024.180	3.604.833	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	33.295.694	28.200.991	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	172.223.950	213.737.684	Maturity > 5 years
Total	211.543.824	245.543.508	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.763.190	(1.978.540)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	229.931	(258.519)	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2020 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2020:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(1.965.772)	1.782.801	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(256.910)	232.534	Current service cost

e. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2020 dan 2019, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp5.471.093 dan Rp5.357.565.

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. In 2020 and 2019, contribution plan paid by the Group amounted to Rp5,471,093 and Rp5,357,565, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100%

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

30. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Nominal/ Amount	Shareholders
1.444.029.000	Republic of Indonesia

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No.58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.
- 2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

- a) sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
- b) sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugianto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

30. SHARE CAPITAL (continued)

- a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
- b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugianto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

31. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

32. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2020	2019	2020	2019	
IKT	616.143.547	734.895.768	(5.506.266)	30.107.262	IKT
JAI	267.817.040	411.528.755	14.687.597	16.483.423	JAI
API	66.022.184	68.594.301	(2.572.117)	316.272	API
EPI	49.807.774	48.589.605	5.956.138	6.417.198	EPI
EDII	6.808.186	47.710.363	(40.519.376)	7.565.246	EDII
MTI	5.519.876	5.898.716	(120.380)	202.359	MTI
Rukindo	133.208	130.526	2.875	2.179	Rukindo
PPI	41.769	18.370	23.462	24.174	PPI
PTP	27.251	44.218	(13.843)	15.232	PTP
IPC TPK	14.207	26.039	(1.673)	30.555	IPC TPK
JPPI	84	(206)	354	150	JPPI
PMLI	(1.506)	(1.834)	266	1.016	PMLI
PII	(35.478)	(39.247)	(6.999)	(17.998)	PII
ILCS	-	31.094.899	-	(13.004.818)	ILCS
RSP	-	194.516	-	(94.703)	MTI
Total	1.012.298.142	1.348.684.789	(28.069.962)	48.047.547	Total

33. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

a. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 dari Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

- Penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 28,84% dari laba neto atau sebesar Rp708.218.661.061.
 - Penetapan cadangan sebesar 71,16% dari laba neto atau sebesar Rp1.747.544.138.938.

33. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

a. *Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 12 on August 24, 2020 of Dewi Sugina Mulyani, S.H., the shareholders approved, among others:*

- *Utilization of 2019 consolidated net income of the Company as follows:*
 - *Distribution of cash dividends 28,84% of net income or amounted to Rp708.218.661.061.*
 - *Reserve 71,16% of net income or amounted to Rp1.747.544.138.938.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-164/MK.2/2020 tanggal 29 Juli 2020, penjadwalan pembayaran dividen Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

Tahap / Phase	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Kewajiban Dividen / Dividend Payable
I	4 Agustus 2020	177.054.665
II	4 September 2020	177.054.665
III	5 Oktober 2020	177.054.665
IV	5 November 2020	177.054.666
Jumlah		708.218.661

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 1 Oktober 2020 dan 3 November 2020 masing-masing untuk pembayaran Tahap I, II, III, dan IV.

b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 13 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

- Penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 35% dari laba neto atau sebesar Rp832.742.000.
 - Penetapan cadangan sebesar 65% dari laba neto atau sebesar Rp1.546.519.695.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 2019.

33. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

Based on Letter from Ministry of Finance Number S-164/MK.2/2020 on July 29, 2020 the schedule of dividend payment of the Company was determined as follows:

The Company has paid the dividends mentioned above on July 30, 2020, August 31, 2020, October 1, 2020, and November 3, 2020 for the payment of Phase I, II, III, and IV, respectively.

b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 13 on April 29, 2019 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others:

- Utilization of 2018 consolidated net income of the Company as follows:
 - Distribution of cash dividends 35% of net income or amounted to Rp832,742,000.
 - Reserve 65% of net income or amounted to Rp1,546,519,695.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 27, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

34. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(1.303.892.032)	(510.069.366)	Remeasurement of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	291.231.056	620.425.512	Exchange difference due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(107.028.761)	(215.365.006)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Total	(1.119.689.737)	(105.008.860)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali			Difference in value of business combination transaction of entities under common control
RSP	134.385.547	-	RSP
ILCS	(21.792.779)	-	ILCS
RUKINDO	(317.597.475)	(317.597.475)	RUKINDO
Total	(205.004.707)	(317.597.475)	Total

a. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000 (Catatan 30). Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

a. On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000 (Note 30). After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525	Net assets of Rukindo as of transfer date
Nilai pengalihan	426.418.000	Transfer amount
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)	Difference in value of business combination transaction of entity under common control

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

- b. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:

- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sependengali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453
Nilai pengalihan	167.500.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali	134.385.547
--	--------------------

- c. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

- b. Based Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).
- PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.

PBM IHC have transferred cash amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of RSP as of transfer date	33.114.453
Transfer amount	167.500.000

Difference in value of business combination transaction of entity under common control

- c. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(21.792.779)
--	---------------------

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date	
Transfer amount	

Difference in value of business combination transaction of entity under common control

36. PENDAPATAN OPERASI

36. OPERATING REVENUES

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2020	2019
Pelayanan terminal petikemas	3.178.042.872	2.603.524.300
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.023.332.854	2.852.740.624
Pelayanan jasa terminal	1.775.217.079	3.267.617.624
Pelayanan jasa kapal	1.332.080.149	1.322.240.654
Jasa logistik	500.350.190	385.563.738
Pelayanan kesehatan	263.284.289	271.456.635
Pendapatan pas pelabuhan	143.868.832	109.219.182
Pengusahaan peralatan	58.819.885	66.735.164
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	56.400.000	126.790.040
Pelayanan jasa barang	42.766.976	107.220.693
Jasa keuangan	8.735.843	6.387.167
Pendapatan kebersihan	4.512.083	8.817.006
Lain-lain	66.198.992	13.439.398
Total	10.453.610.044	11.141.752.225

*Container services
Land, building, water and electricity services
Terminal services
Vessel services
Logistic services
Medical services
Port entry fee
Equipment services
Network services and consultant of information system
Cargo services
Financial service
Cleaning services
Others*

Total

37. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

37. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru and Kijing terminal. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2020	2019
Pendapatan konstruksi	957.228.613	1.542.697.617
Beban konstruksi	(957.228.613)	(1.542.697.617)

Construction revenues

Construction expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

38. BEBAN OPERASI

38. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Kerjasama mitra usaha	2.361.541.362	2.568.723.277	Partnership
Pegawai	2.402.703.777	2.639.837.009	Employee
Umum	1.380.948.074	1.211.702.460	General
Penyusutan dan amortisasi	942.134.851	863.705.620	Depreciation and amortization
Bahan bakar dan bahan habis pakai	843.740.521	897.934.623	Fuels and supplies
Pemeliharaan	160.725.324	168.627.849	Maintenance
Asuransi	93.568.332	64.907.607	Insurance
Administrasi kantor	86.454.900	104.292.888	Office administration
Lain-lain	165.994	626.340	Others
Total	8.271.983.135	8.520.357.673	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

39. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA – NETO

39. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Amortisasi premium (Catatan 48a, 48b dan 48e)	146.997.708	146.997.708	Amortization of premium (Note 48a, 48b and 48e)
Pendapatan denda	11.115.491	20.716.447	Income from penalties
Laba (rugi) penjualan aset tetap	4.398.051	45.882.184	Gain (loss) on sale of fixed assets
Beban denda	(211.783.638)	(105.916.793)	Expenses from penalties
Beban pajak penghasilan final	(23.970.761)	(144.760.388)	Final income tax expense
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(50.684.324)	322.213.993	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	38.375.850	431.981.363	Others - net
Total	(85.551.623)	717.114.514	Total

Beban denda merupakan denda pajak.

Expense from penalties represents tax penalty.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. PENDAPATAN KEUANGAN

40. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Pendapatan bunga deposito	453.411.322	771.045.247	Interest income from deposits
Pendapatan jasa giro	43.848.820	65.214.865	Interest income on current account
Pendapatan bunga pinjaman	11.255.503	-	Interest income from loan
Total	508.515.645	836.260.112	Total

41. BEBAN KEUANGAN

41. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.108.985.933	1.197.098.875	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban bunga sewa	11.836.300	-	Lease interest expenses
Beban administrasi	2.019.526	3.138.214	Administration expenses
Total	1.122.841.759	1.200.237.089	Total

42. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

42. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
JICT	(56.010.859)	138.210.596	JICT
NPCT1	(35.870.716)	101.023.133	NPCT1
CTP	700.112	1.894.058	CTP
RSP	(6.478.544)	-	RSP
TPI	122.421	(559.444)	TPI
Total	(97.537.586)	240.568.343	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i> Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank BNI Syariah	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT BRI Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa/Sales

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension/ Pension services
	PT Jasa Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi/ Insurance services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman/Loan
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan Royalti/ Rental and Royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
	RSP	Kesehatan/Health services
	CTP	Jasa pembangunan/ Construction services

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas (Catatan 5)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					
<u>Rupiah</u>					Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	506.968.135	0,96	516.127.675	0,99	<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145.236.026	0,28	140.963.425	0,27	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.263.890	0,04	19.976.271	0,04	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.123.703	0,02	1.244.179	0,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	8.754.446	0,02	10.386.922	0,02	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	-	0,00	9.671.050	0,02	PT Bank Syariah Mandiri
					PT Bank BNI Syariah
Total	693.346.200	1,32	698.369.522	1,34	Total
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.543.323	0,30	193.637.340	0,37	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	133.443.793	0,25	36.287.523	0,07	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.758.888	0,01	24.318.481	0,05	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	2.819.753	0,01	-	-	PT Bank BNI Syariah
Total	302.565.757	0,57	254.243.344	0,49	Total
<u>Euro</u>					<u>Euro</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00	44	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	-	0,00	44	0,00	Total
Deposito Berjangka					Time Deposits
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	555.193.809	1,06	1.073.096.983	2,05	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	409.072.411	0,78	583.240.758	1,11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	333.002.921	0,63	548.297.580	1,05	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	304.400.000	0,58	131.816.463	0,25	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	64.200.000	0,12	19.500.000	0,04	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	41.706.802	0,08	275.290.490	0,53	PT Bank Syariah Mandiri
Total	1.707.575.943	3,25	2.631.242.274	5,03	Total
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	705.383.778	1,34	4.906.696.846	9,37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	604.710.404	1,15	6.144.937.050	11,73	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.671.659	0,00	67.167.619	0,13	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	1.311.765.841	2,49	11.118.801.515	21,23	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 6)

b. Short-term investment (Note 6)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito berjangka				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	0,00	104.642.400	0,20
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.555.387.750	16,52	2.154.655.000	4,11
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.391.502.750	4,62	-	0,00
Total	10.946.890.500	21,14	2.259.297.400	4,31

Time deposits	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
<u>US Dollar</u>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

*) dari total aset

*) from total assets

c. Piutang usaha (Catatan 7)

c. Trade receivables (Note 7)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	63.483.317	0,12	63.483.316	0,12
Tentara Nasional Indonesia	28.496.523	0,06	13.197.544	0,03
PT Semen Padang	19.692.496	0,04	17.401.269	0,03
PT Pertamina Trans Kontinental	14.953.231	0,03	12.776.013	0,02
PT Pertamina (Persero)	9.861.629	0,02	9.830.300	0,02
PT Dharma Lautan Nusantara	4.797.674	0,01	4.797.674	0,01
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.397.552	0,01	1.024.346	0,00
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	3.276.439	0,01	5.896.327	0,01
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.142.514	0,00	5.569.386	0,01
Instansi Pemerintah	1.917.562	0,00	190.719	0,00
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.697.354	0,01	1.448.414	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.386.117	0,00	4.723.761	0,01
PT Bukit Asam	606.642	0,00	606.642	0,00
BPJS Kesehatan	-	0,00	67.589.555	0,13
Lain-lain	1.513.645	0,00	136.857.151	0,26
Subtotal	159.222.695	0,31	345.392.417	0,65
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(102.578.682)	(0,20)	(210.193.679)	(0,41)
Total	56.644.013	0,11	135.198.738	0,24

PT Djakarta Lloyd (Persero)	
Indonesian Armed Forces	
PT Semen Padang	
PT Pertamina Trans Kontinental	
PT Pertamina (Persero)	
PT Dharma Lautan Nusantara	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
Government Institutions	
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
PT Bukit Asam	
BPJS Kesehatan	
Others	
Sub-total	
Less: Allowance for impairment	
Total	

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 8)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	740.736.508	1,40	659.701.914	1,26
CTP (Catatan 48q)	387.255.704	0,75	111.545.526	0,22
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,02	11.989.210	0,02
PT Nindya Karya (Persero)	8.745.745	0,02	-	0,00
PT Jakarta Lloyd (Persero)	4.926.238	0,01	4.926.238	0,01
RSP	4.274.743	0,01	-	0,00
Instansi Pemerintah	2.511.770	0,00	2.688.218	0,01
NPCT1	1.171.410	0,00	1.391.404	0,00
Tentara Nasional Indonesia	934.500	0,00	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00	230.455	0,00
PT Utama Karya (Persero)	27.964.031	0,05	1.550.567	0,00
Lain-lain	27.964.031	0,05	30.616.705	0,05
Subtotal	1.191.310.519	2,26	821.218.704	1,57
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(39.783.649)	(0,07)	(36.267.285)	(0,07)
Total	1.135.206.870	2,19	784.951.419	1,50

*) dari total aset

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 10)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.715.423	0,01	560.228	0,00
JICT	8.058.465	0,02	2.600.380	0,00
NPCT1	1.753.258	0,00	1.730.516	0,00
BPJS Kesehatan	-	0,00	40.512.903	0,08
Lainnya	354.464	0,00	1.182.464	0,00
Total	12.881.610	0,03	46.586.491	0,08

*) dari total aset

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 19)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00	28.193.914	0,08
Total	-	0,00	28.193.914	0,08

**) dari total liabilitas

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 8)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	740.736.508	1,40	659.701.914	1,26
CTP (Note 48q)	387.255.704	0,75	111.545.526	0,22
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,02	11.989.210	0,02
PT Nindya Karya (Persero)	8.745.745	0,02	-	0,00
PT Jakarta Lloyd (Persero)	4.926.238	0,01	4.926.238	0,01
RSP	4.274.743	0,01	-	0,00
Government Institutions	2.511.770	0,00	2.688.218	0,01
NPCT1	1.171.410	0,00	1.391.404	0,00
Indonesia Armed Forces	934.500	0,00	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00	230.455	0,00
PT Utama Karya (Persero)	27.964.031	0,05	1.550.567	0,00
Others	27.964.031	0,05	30.616.705	0,05
Sub-total	1.191.310.519	2,26	821.218.704	1,57
Less: Allowance for impairment	(39.783.649)	(0,07)	(36.267.285)	(0,07)
Total	1.135.206.870	2,19	784.951.419	1,50

*) from total assets

e. Accrued revenues (Note 10)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.715.423	0,01	560.228	0,00
JICT	8.058.465	0,02	2.600.380	0,00
NPCT1	1.753.258	0,00	1.730.516	0,00
BPJS Kesehatan	-	0,00	40.512.903	0,08
Others	354.464	0,00	1.182.464	0,00
Total	12.881.610	0,03	46.586.491	0,08

*) from total assets

f. Short-term bank loans (Note 19)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00	28.193.914	0,08
Total	-	0,00	28.193.914	0,08

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

g. Utang usaha (Catatan 20)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	539.149.680	1,54	573.631.158	1,69	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero)	248.222.960	0,71	9.570.900	0,03	PT Wijaya Karya (Persero)
RSP	11.770.706	0,03	-	0,00	RSP
PT Utama Karya (Persero)	10.030.178	0,03	10.030.178	0,03	PT Utama Karya (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.720.621	0,02	6.607.716	0,02	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Koperasi Pegawai Maritim	6.535.465	0,02	4.772.648	0,01	Koperasi Pegawai Maritim
PT Pertamina Patra Niaga	3.138.943	0,01	3.869.484	0,01	PT Pertamina Patra Niaga
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.972.257	0,01	478.459	0,00	Koperasi Karyawan TPK KOJA
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1.831.122	0,01	-	0,00	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Nusantara Regas	1.391.509	0,00	1.366.406	0,00	PT Nusantara Regas
PT Pertamina (Persero)	1.015.134	0,00	240.739	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Waskita Karya (Persero)	630.558	0,00	630.558	0,00	PT Waskita Karya (Persero)
PT PLN (Persero)	327.651	0,00	-	0,00	PT PLN (Persero)
PT Jakarta Internasional Container Terminal	26.814	0,00	30.369	0,00	PT Jakarta International Container Terminal
PT Multimedia Nusantara	-	0,00	12.207.051	0,04	PT Multimedia Nusantara
Lain-lain	455.351.602	1,30	453.117.121	1,30	Others
Total	1.288.115.200	3,68	1.076.552.787	3,12	Total

**) dari total liabilitas

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 21)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
Instansi Pemerintah	18.512	0,00	18.512	0,00	Government Institutions
PT. Semen Padang	15.923	0,00	1.448	0,00	PT. Semen Padang
PT. Pertamina Trans Kontinental	1.042	0,00	55.036	0,00	PT. Pertamina Trans Kontinental
Tentara Nasional Indonesia	371	0,00	708.865	0,00	Indonesian Armed Forces
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	-	0,00	49.603	0,00	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)
Lain-lain	88.478	0,00	116.787	0,00	Others
Total	124.326	0,00	950.251	0,00	Total

**) dari total liabilitas

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 23)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT BNI Life Insurance	8.828.221	0,03	5.833.813	0,02	PT BNI Life Insurance
Instansi Pemerintah	1.992.773	0,01	1.682.618	0,00	Government Institutions
PT Bhandha Ghara Rekasa	1.211.447	0,00	1.211.447	0,00	PT Bhandha Ghara Rekasa
BPJS Kesehatan	838.524	0,00	344.708	0,01	BPJS Kesehatan
Lain-lain	13.910.804	0,06	9.309.461	0,01	Others
Total	26.781.769	0,10	18.382.047	0,04	Total

**) dari total liabilitas

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

g. Trade payables (Note 20)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	539.149.680	1,54	573.631.158	1,69	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero)	248.222.960	0,71	9.570.900	0,03	PT Wijaya Karya (Persero)
RSP	11.770.706	0,03	-	0,00	RSP
PT Utama Karya (Persero)	10.030.178	0,03	10.030.178	0,03	PT Utama Karya (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.720.621	0,02	6.607.716	0,02	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Koperasi Pegawai Maritim	6.535.465	0,02	4.772.648	0,01	Koperasi Pegawai Maritim
PT Pertamina Patra Niaga	3.138.943	0,01	3.869.484	0,01	PT Pertamina Patra Niaga
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.972.257	0,01	478.459	0,00	Koperasi Karyawan TPK KOJA
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1.831.122	0,01	-	0,00	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Nusantara Regas	1.391.509	0,00	1.366.406	0,00	PT Nusantara Regas
PT Pertamina (Persero)	1.015.134	0,00	240.739	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Waskita Karya (Persero)	630.558	0,00	630.558	0,00	PT Waskita Karya (Persero)
PT PLN (Persero)	327.651	0,00	-	0,00	PT PLN (Persero)
PT Jakarta Internasional Container Terminal	26.814	0,00	30.369	0,00	PT Jakarta International Container Terminal
PT Multimedia Nusantara	-	0,00	12.207.051	0,04	PT Multimedia Nusantara
Lain-lain	455.351.602	1,30	453.117.121	1,30	Others
Total	1.288.115.200	3,68	1.076.552.787	3,12	Total

**) from total liabilities

h. Advances from customer (Note 21)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
Instansi Pemerintah	18.512	0,00	18.512	0,00	Government Institutions
PT. Semen Padang	15.923	0,00	1.448	0,00	PT. Semen Padang
PT. Pertamina Trans Kontinental	1.042	0,00	55.036	0,00	PT. Pertamina Trans Kontinental
Tentara Nasional Indonesia	371	0,00	708.865	0,00	Indonesian Armed Forces
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	-	0,00	49.603	0,00	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)
Lain-lain	88.478	0,00	116.787	0,00	Others
Total	124.326	0,00	950.251	0,00	Total

**) from total liabilities

i. Deposits from customer (Note 23)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT BNI Life Insurance	8.828.221	0,03	5.833.813	0,02	PT BNI Life Insurance
Instansi Pemerintah	1.992.773	0,01	1.682.618	0,00	Government Institutions
PT Bhandha Ghara Rekasa	1.211.447	0,00	1.211.447	0,00	PT Bhandha Ghara Rekasa
BPJS Kesehatan	838.524	0,00	344.708	0,01	BPJS Kesehatan
Lain-lain	13.910.804	0,06	9.309.461	0,01	Others
Total	26.781.769	0,10	18.382.047	0,04	Total

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**j. Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas
jangka panjang lainnya (Catatan 23 and 28)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
Jangka pendek (Catatan 23)					Short-term (Note 23)
JICT (Catatan 48f)	38.980.725	0,11	38.980.725	0,11	JICT (Note 48f)
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,09	31.666.118	0,09	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	1.084.174	0,00	2.714.983	0,01	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
Total	71.731.017	0,20	73.361.826	0,21	Total
Jangka panjang (Catatan 28)					Long-term (Note 28)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	24.677.800	0,07	27.137.737	0,08	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	0,00	3.000.000	0,01	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Total	24.677.800	0,07	30.137.737	0,09	Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

k. Utang bank jangka panjang (Catatan 25)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00	114.990.000	0,00	PT Bank Syariah Mandiri

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

l. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp242.319.765 dan Rp220.171.759, masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

**43. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

**j. Other short-term liabilities and other long-term
liabilities (Note 23 and 28)**

k. Long-term bank loan (Note 25)

l. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp242,319,765 and Rp220.171.759 for 2020 and 2019, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		31 Desember 2020/ December 31, 2020			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	150.979.274	2.129.562.659	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek	USD	776.100.000	10.946.890.500	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	962.827	13.580.677	Trade receivables	
Total aset			13.090.033.836	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.568.000.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	22.692.668	320.080.089	Trade payables	
	EUR	8.000	138.641		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.763.610	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	228.316.052	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			23.155.515.507	Total liabilities	
Liabilitas neto			10.065.481.670	Net liabilities	

		31 Desember 2019/ December 31, 2019			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	824.640.189	11.463.323.271	Cash and cash equivalents	
	EUR	3	44		
Investasi jangka pendek	USD	155.000.000	2.154.655.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	3.968.641	55.168.077	Trade receivables	
	SGD	7.645	78.902		
Piutang lain-lain	USD	863.760	12.007.121	Other receivables	
Total aset			13.685.232.415	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.241.600.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	35.140.494	488.488.004	Trade payables	
	EUR	8.000	124.704		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.804.167	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	225.013.928	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			22.994.207.361	Total liabilities	
Liabilitas neto			9.308.974.946	Net liabilities	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Kelompok Usaha:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	5.298.274.315	15.603.553.329
Investasi jangka pendek	11.090.879.218	2.596.701.126
Piutang usaha - neto	621.234.556	848.025.482
Piutang lain-lain - neto	1.191.805.010	830.069.397
Pendapatan masih akan diterima	278.739.081	305.452.354
Aset lancar lainnya	9.822.586	10.253.126
Investasi jangka panjang	2.776.393.603	3.211.023.600
Aset tidak lancar lainnya	120.015.855	334.245.239
Total	21.387.164.224	23.739.323.653
Liabilitas Keuangan		
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	34.193.914
Utang usaha	1.581.921.230	1.436.482.338
Beban akrual	1.765.278.079	2.274.726.626
Liabilitas jangka pendek lainnya	304.020.266	297.914.768
Utang obligasi	22.333.703.064	21.984.178.194
Utang bank jangka panjang	-	114.990.000
Liabilitas jangka panjang lainnya	252.993.851	255.151.665
Liabilitas sewa	172.890.938	-
Total	26.403.971.688	26.397.637.505

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Other current assets
Long term investment
Other non-current assets
Total
Financial Liabilities
Short-term bank loans
Trade payables
Accrued expenses
Other current liabilities
Bonds payable
Other non-current liabilities
Other non-current liabilities
Lease liabilities
Total

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

**45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions: (continued)

- The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
- Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As of December 31, 2020 and 2019, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

**45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 13)	11.641.103.381	-	11.641.103.381	-
				Investment properties (Note13)
31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 13)	10.899.062.719	-	10.899.062.719	-
				Investment properties (Note13)

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

As of December 31, 2020, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

46. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 44. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates
Perubahan kurs mata uang asing 2020	(+)-100bps (-)-100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+)-100bps (-)-100bps

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Aset					
Kas dan setara kas	5.298.274.315	-	-	-	5.298.274.315
Investasi jangka pendek	-	-	11.090.879.218	-	11.090.879.218
Total aset	5.298.274.315	-	11.090.879.218	-	16.389.153.533

Assets
Cash and cash equivalent
Short-term investments
Total assets

**46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 44. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2020	(100.265.009) 100.265.009	Fluctuation in the foreign exchange rates 2020
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(93.089.749) 93.089.749	Fluctuation in the foreign exchange rates 2019

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
	Liabilitas					
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	4.000.000	-	4.000.000	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	10.835.740	242.158.111	252.993.851	Other long-term liabilities
Liabilitas sewa	-	-	60.214.419	112.676.519	172.890.938	Lease liabilities
Obligasi	-	-	-	22.333.703.064	22.333.703.064	Bonds
Total liabilitas	-	-	75.050.159	22.688.537.694	22.763.587.853	Total liabilities

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	5.298.274.315	15.603.553.329	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	11.090.879.218	2.596.701.126	Short-term investments
Piutang usaha - neto	621.234.556	848.025.482	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	1.191.805.010	860.069.397	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	278.739.081	305.452.354	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	9.822.586	10.253.126	Other current assets
Investasi jangka panjang	2.776.393.603	3.211.023.600	Long-term investment
Aset tidak lancar lainnya	120.015.855	334.245.239	Other non-current assets
Total	21.387.164.224	23.769.323.653	Total

**46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

2020

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	-	-	-	4.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha	1.581.921.230	-	-	-	1.581.921.230	Trade payables
Beban akrual	1.765.278.079	-	-	-	1.765.278.079	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	304.020.266	-	-	-	304.020.266	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	22.333.703.064	22.333.703.064	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	10.835.740	242.158.111	-	-	252.993.851	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	60.214.419	112.676.519	-	-	172.890.938	Lease liabilities
Total	3.726.269.733	354.834.630	-	22.333.703.064	26.414.807.427	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Pengelolaan modal (lanjutan)

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2027. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Aset tidak lancar lainnya" (Catatan 18).

**46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Capital management (continued)

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office**

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.
- Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. Which was extended until December 31, 2027. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other non-current assets" (Note 18).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.
- Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- *The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Vessels and other supporting facilities.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company will consult with the Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide advice.*
- *The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
 - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- *The Company may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.*
- *At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.*
- *At the end of the concession period, the Company is obliged to:*
 - *Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.*
 - *Transfer the authorization of the intangible assets of the Company to the Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.*
 - *For movable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.*
 - *Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
 - Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
 - Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp4.086.893.974 dan Rp8.905.704.192 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 16).

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)
 - Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Port Authority.
 - Move or take out from the concession area all current assets which the Company decides to move or take out.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp4,086,893,974 and Rp8,905,704,192 and recorded them as part of "Intangible assets - concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the Company (Note 16).

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

On November 23, 2015, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.*

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

On November 28, 2016, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

**c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan
Pengembangan Terminal Kalibaru**

**c) Insurance Agreement on Construction and
Development of Kalibaru Terminal**

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019:

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019:

- Polis *Construction All Risks* dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), pihak berelasi, sebagai *insurer* utama dan batas pertanggungan sebesar USD2.425.000.000.
- Polis *Third Party Liability* dengan Jasindo sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan PT Asuransi Astra Buana ("AAB") sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan AAB sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD50.000.000 per peristiwa.

- *Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of USD2,425,000,000.*
- *Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana ("AAB") as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with AAB as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD50,000,000 per one event.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS**

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok pinjaman ke STMS masing-masing sebesar USD15.096.000 dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan principal to STMS amounted to USD15,096,000 and recorded as part of other long-term liabilities account.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 47h).

f) Project Implementation Agreement - PPI

The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 47h).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

**f) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI.

In accordance with the PIA, the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/site lease yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease / site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

g) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

g) Project Management Agreement - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

On February 24, 2014, the Company and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan dan PPI menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

On October 9, 2020, the Company and PPI signed the Minutes No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**g) Perjanjian Pengelolaan Proyek – PPI
(lanjutan)**

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan dan PPI bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan PPI dalam pelaksanaan kerjasama manajemen proyek pembangunan Terminal Kalibaru I Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No.PJK-KJG-06-29042019-010.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan PPI dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**g) Project Management Agreement - PPI
(continued)**

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company and PPI agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

On December 18, 2020, the Company and PPI agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and PPI in performing of cooperation in the management of the Kalibaru I Terminal construction project at the Port of Tanjung Priok.

On April 29, 2019, the Company and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No.KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No.PJK-KJG-06-29042019-010.

On October 23, 2020, the Company and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No.PJK-621-23102020-009.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and PPI in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1**

Berdasarkan PIA (Catatan 47f), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1**

Based on PIA (Note 47f), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PPI tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, PPI has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PPI telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan sebesar USD10.347.826 (setara dengan Rp137.742.143).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation. Therefore, for the year ended December 31, 2016, PPI has recorded the revenue from quarterly site rent amounting to USD10,347,826 (equivalent to Rp137,742,143).

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan *pressure tank* dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;
- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI Undertaking* telah diselesaikan.

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
 - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
 - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
 - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
 - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*
- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
 - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer dan cooling room* tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
 - Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
 - Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.
- PPI will complete the following works within the time specified for each item:
 - East area exit access road of CGA by December 15, 2017;
 - Go-live IT system operation by December 31, 2017;
 - Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;
 - Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
 - Entry access road west side CGA by February 28, 2018;
 - Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;
 - Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;
 - Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;
 - Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;
 - Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.
 - If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work.
 - Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**47. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

PPI telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) item yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

PPI has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara the Company dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) item pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 item pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the Company and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, PPI membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada PPI beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh PPI. Sesuai dengan ketentuan SMA, PPI diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

On November 2, 2020, PPI entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay PPI some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by PPI. In accordance with SMA regulations, PPI is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan
HPI

52,12%
47,88%

Company
HPI

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.

- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.

- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.

- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.

- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.

- Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.

- The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.

- Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.

- Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.

- If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.

- The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 2 April 2019, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2018.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2018 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2018 sebesar USD10,11 juta atau setara dengan Rp140,48 miliar untuk Perusahaan dan USD9,64 juta atau setara dengan Rp134 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 26 Mei 2020, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2019.

Pada tanggal 30 November 2020, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2019 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2019 sebesar USD9,45 juta atau setara dengan Rp133,31 miliar untuk Perusahaan dan USD8,59 juta atau setara dengan Rp121,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2019 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On April 2, 2019, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2018 net income.

On August 16, 2019, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2018 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2018 of USD10.11 million or equivalent to Rp140.48 billion for the Company and USD9.64 million or equivalent to Rp134 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2018 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On May 26, 2020, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2019 net income.

On November 30, 2020, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2019 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2019 of USD9.45 million or equivalent to Rp133.31 billion for the Company and USD8.59 million or equivalent to Rp121.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2019 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, KSO TPK Koja telah membayar sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.171.561 (setara dengan Rp526,24 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp503,26 miliar) (Catatan 27).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp503,92 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp503,26 miliar).

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company. For the years ended December 31, 2020 and 2019, KSO TPK Koja has paid for quarterly rent amounting to USD35,171,561 (equivalent to Rp526.24 billion) and USD35,171,561 (equivalent to Rp503.26 billion), respectively (Note 27).

For the year ended December 31, 2020 and 2019, the Company has recorded the revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,000,000 (equivalent to Rp503,92 billion) and USD35,171,561 (equivalent to Rp503.26 billion), respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp418.084.656 dan 540.840.625 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2020 and 2019, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2020 and 2019, the balance of unamortized premium amounted to Rp418,084,656 and Rp540,840,625 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 48c), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 48f). Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 48e).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee amounting to USD21,250,000 (Note 48c), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 48f). Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 48e).

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of State Owned Enterprise and letter of the Minister of Transportation below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri Badan Usaha Milik Negara secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan diharuskan melakukan revisi terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of State Owned Enterprise regarding Cooperation of Management/Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of State Owned Enterprise principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.
- To execute letter of Vice Minister of State Owned Enterprise to President Director of State Owned Enterprises No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of State Owned Enterprises dated January 7, 2016, the Company was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya – JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amandemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut sebesar Rp1.234.370.000 dan Rp1.224.063.750.

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilization period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company. For the year ended December 31, 2020 and 2019, the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to Rp1,234,370,000 and Rp1,224,063,750, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham – JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan, HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amandemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan.
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

Atas penyesuaian kepemilikan ini, kepemilikan saham Perusahaan di JICT meningkat menjadi sebesar 50,9%. Amandemen Perjanjian Pemegang Saham ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Peningkatan kepemilikan saham Perusahaan di JICT belum efektif pada tanggal 31 Desember 2015 karena Perusahaan belum melakukan penyeteroran tambahan modal dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh JICT belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company, HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorised Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.*
- *Additional 18,059,505 B series shares for the Company.*
- *Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.*

In consideration to the ownership adjustment, the Company's share ownership in JICT increased to 50.9%. The Amended Shareholder Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. The increase of the Company's ownership in JICT has not become effective as of December 31, 2015 since the Company has not paid the additional paid-in capital and the increase of JICT's authorised capital, issued and fully paid capital has not been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham – JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).
- Untuk tujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh JICT, agar diterbitkan 18.077.583 lembar saham Seri B sebesar Rp9.038.792 dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan proporsi sebagai berikut:
 - 18.059.505 lembar saham Seri B sebesar Rp9.029.752 akan diambil oleh Perusahaan.
 - 18.079 lembar saham Seri B sebesar Rp9.039 akan diambil oleh Kopegmar.

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement – JICT (continued)

- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- For the purpose of the increase of JICT's authorized, issued and fully paid capital, to issue 18,077,583 B Series shares amounting to Rp9,038,792 with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) with proportion as follows:
 - 18,059,505 B Series shares amounting to Rp9,029,752 will be subscribed by the Company.
 - 18,079 B Series shares amounting to Rp9,039 will be subscribed by Kopegmar.

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 47b). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp119.262.292. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp2.206.352.395 dan Rp2.325.614.688 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720. Pada tanggal 31 Desember 2019 Perusahaan belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 23).

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 47b). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp119,262,292, each year. As of December 31, 2020 and 2019, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,206,352,395 and Rp2,325,614,688 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

f) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to The Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720. As of December 31, 2019, the Company has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 23).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- g) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.
- h) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo yang belum di amortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp450.433.639 dan Rp276.168.033 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2)).

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- g) *The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.*
- h) *On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.*

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2020 and 2019, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp450,433,639 and Rp276,168,033 respectively (before deducted by final income tax article 4(2)).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- i) Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT AKR Corporindo Tbk mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 130.000 m² untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (*flammable*) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *breakwater*. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai penggunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *break water* seluas 1.400 m² serta perubahan luas lahan menjadi 130.004 m².

j) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Pada berbagai tanggal dari tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, PTP dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di terminal yang telah ditentukan pada wilayah kerja Cabang Priok.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, PTP dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%.

Pada tanggal 15 Oktober 2020, perjanjian-perjanjian antara PTP dan PBM tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal telah diperpanjang kembali sampai dengan 31 Desember 2020.

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- i) Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk-04 dated May 27, 2004, the Company and PT AKR Corporindo Tbk entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 130,000 m² to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which passes the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

Based on a letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company's Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south breakwater with area of 1,400 m² and change of land area to 130,004 m².

j) Loading and Unloading Activities Cooperation

On various dates from November 1, 2019 until December 31, 2019, PTP and selected loading and unloading companies (PBM) entered into a Service Level Agreement (SLA) where the parties agreed to carry out loading and unloading activities at the terminals specified in the Branch Priok area.

For the activities that have been performed, PTP and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively.

On October 15, 2020, the agreements between PTP and PBM concerning SLA in cooperation with the implementation of terminal business activities have been extended again until December 31, 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, PTP berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thruptut minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thruptut minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

k) Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi. Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j) Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

Based on the above mentioned agreements, PTP has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM have obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and others equipment needed to perform the loading and unloading activities.

In performing the loading and unloading activities, PBM have obligation to provide minimum throughput which was agreed by the parties.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

k) Concession Agreement

On November 11, 2015, the Company and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping. Based on the Concession Agreement, the Company is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (MIE) dengan membentuk manajemen kerjasama operasi (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

m) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Kijing.
- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak berupa pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kijing.

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l) Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate (MIE) by establishing joint operation management (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

m) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak

On July 12, 2018, the Company and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area. Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

- Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.
- The Company is required to pay to Pontianak Port Authority, in form of concession revenues, 2.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kijing terminal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (lanjutan)

- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, *trestle*, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
 - Superstruktur, termasuk peralatan di terminal multipurpose, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.
- Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhan di dalam area konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kijing tersebut masing-masing sebesar Rp2.252.781.801 dan Rp1.879.783.067 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 16).

48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak (continued)

- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including access roads, piers, trestle, dock yard and other facilities.*
 - *Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.*
- *Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.*
- *Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company has the right to impose and levy port services rate within the concession area.*
- *At the end of the concession period, the Company is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.*

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kijing terminal amounting to Rp2,252,781,801 and Rp1,879,783,067, respectively and recorded them as part of "Intangible assets – concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the company (Note 16).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham API-CTP

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham antara API dan CTP No. 009/SHL/CTP-API/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dimana API memberikan pinjaman kepada CTP sebesar Rp210.663.180 dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman 12% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham antara API dan CTP No. 011/SHL/CTP-API/IX/2020 tanggal 27 September 2020 dimana API memberikan pinjaman kepada CTP sebesar Rp86.814.000 dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman 12% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham antara API dan CTP No. 013/SHL/CTP-API/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dimana API memberikan pinjaman kepada CTP sebesar Rp7.084.350 dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman 12% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham antara API dan CTP No. HKK.566/12/34/01/API-2020 tanggal 11 Desember 2020 dimana API memberikan pinjaman kepada CTP sebesar Rp71.253.000 dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman 12% per tahun.

o) Kerjasama Pemindahan Petikemas Jalur Merah untuk Kegiatan Behandle dari Terminal Petikemas Internasional Area Tanjung Priok 2 Ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

Pada tanggal 9 Oktober 2020 MTI dan IPC TPK menandatangani kerjasama Pemindahan Petikemas Jalur Merah untuk Kegiatan Behandle dari Terminal Petikemas Internasional Area Tanjung Priok 2 Ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

Persentase pembagian hasil pendapatan untuk Behandle 1 sebesar 30% untuk IPC TPK dan 70% untuk MTI, sedangkan Behandle 2 sebesar 20% untuk IPC TPK dan 80% untuk MTI.

Perjanjian ini dilakukan terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2021.

**48. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

n) Shareholder Loan Agreement API-CTP

Based on the Shareholder Facility Loan Agreement between API and CTP No.009/SHL/CTP-API/VIII/2020 dated August 27, 2020, API provided a loan to CTP of Rp210,663,180 with a term of 1 year with a loan interest of 12% per year.

Based on the Shareholder Facility Loan Agreement between API and CTP No.011/SHL/CTP-API/IX/2020 dated September 27, 2020, API provided a loan to CTP in the amount of Rp86,814,000 with a term of 1 year with a loan interest of 12% per year.

Based on the Shareholder Facility Loan Agreement between API and CTP No.013/SHL/CTP-API/IX/2020 dated September 30, 2020, API provided a loan to CTP of Rp7,084,350 with a term of 1 year with a loan interest of 12% per year.

Based on the Shareholder Facility Loan Agreement between API and CTP No.HKK.566/12/34/01/API-2020 dated December 11, 2020, API provided a loan to CTP of Rp71,253,000 with a term of 1 year with an interest rate of 12% per annum.

o) Agreement of Red Line Containers Allocation for Behandle Activities from Terminal Petikemas Internation Area Tanjung Priok 2 to Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

On October 9, 2020 MTI and IPC TPK entered into an agreement of red line containers allocation for behandle activities from Terminal Petikemas Internation Area Tanjung Priok 2 to Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

The percentage for the sharing profit on this agreement is behandle 1 30% for IPC TPK and 70% for MTI, while Behandle 2, 20% for IPC TPK 20% and 80% for MTI.

This agreement is valid from October 9, 2020 until October 9, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan tambahan pokok gugatan yang meminta untuk dilakukan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Arta Sempana apabila Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Telah diterbitkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama Perusahaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara hukum ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja JICT menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Serikat Pekerja JICT mengajukan gugatan kepada JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan Nomor Perkara 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan dengan JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan kepada JICT sebesar USD147.595.109 atau setara dengan Rp1.976.869.823, dan sita jaminan atas rekening bank milik Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

49. LAWSUIT

- a) *Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.*

In 2019, PT Artha Sempana submitted a new lawsuit to the North Jakarta Public Court with No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the addition of the principal lawsuit to request compensation to be made against the land held by PT Arta Sempana if the Company wishes to control the land.

A special Power of Attorney has been issued from the President Director of the Company to the Head of the North Jakarta Public Attorney as State Attorney No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

As of the completion date of this consolidated financial statements, the lawsuit is still in process in the North Jakarta Public Court.

- b) *Lawsuit filed by Labor Union of JICT claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.*

The Labor Union of JICT has filed a lawsuit to JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal issue to order cancelation of extension cooperation on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok between the Company and JICT, repayment of rental fee of the Company to JICT amounting to USD147,595,109 or equal to Rp1,976,869,823, and sequestration of the Company's bank account. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in process in North Jakarta Public Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Serikat Pekerja JICT telah mengajukan banding dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- c) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution.

Penggugat menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No.1 dan No.2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (surat No.300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan Salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang).

Para Penggugat mendalilkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat. Sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012 telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012.

49. LAWSUIT (continued)

The verdict of the North Jakarta Public Court No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta Public Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

On March 13, 2018, the the Labor Union of JICT has filed an appeal and until the completion date of this consolidated financial statements, the case is still in process in DKI Jakarta High Court.

- c) *Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution.*

The Plaintiffs claimed that the Land Administration Office has admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

The Plaintiffs argued that Land Administration Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, because it was deemed to have known about the certificate owned by the Plaintiffs. Therefore, it has been categorized to have breached the law.

The North Jakarta Public Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012 has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

On August 14, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta Public Court as stated above to the DKI Jakarta High Court.

The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, strengthened the North Jakarta Public Court decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 634/PDT/2014/PT.DKI.

Mahkamah Agung telah memeriksa permohonan kasasi dengan No Register Perkara 3281 K/ PDT/2015 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Perusahaan tanggal 8 Maret 2016 dengan amar Menolak Permohonan Kasasi Perusahaan. Salinan putusan resmi diterima oleh Perusahaan pada tanggal 6 Maret 2017.

Telah diterima Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 433 PK/PDT/2019 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali dari Perusahaan.

- d) Perkara dengan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.100/Sei Selincah dan HGB No.101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah seluas 23.500 m² di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

49. LAWSUIT (continued)

The Company has proposed the cassation appeal to Supreme Court The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI.

Supreme Court has reviewed the cassation appeal with register No. 3281 K/ PDT/2015 that has been proposed by the Company on March 8, 2016 and rejected their cassation. The Company has obtained a copy of the appeal on March 6, 2017.

A copy of the review decision of the Supreme Court No. 433 PK/PDT/2019 has been received and Supreme Court essentially rejected the application for review of judicial review request from the Company.

- d) Case with No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanding the cancellation of the Right to Operate (HPL) certificates No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapping with Right to Build (HGB) certificate No.100/Sei Selincah and HGB certificate No.101/Sei Selincah under the name of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which terms have terminated.

The Palembang Public Court in Decision No.182 / Pdt.G /2016/ PN.Plg. In its ruling stated that among them were certificates of HPL No.91/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.91/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force, declares valid and valuable confiscation of collateral that has been placed by the Palembang Public Court on land of HPL certificate No.91/Selincah River covering an area of 23,500 m² in the Village Sungai Selincah, Kalidoni Subdistrict, Palembang City, according to the Official Record of Confiscation on February 28, 2017 with No.182/BA.Pdt.G/2016 / PN.Plg.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2018.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2725K/PDT/2018 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Perusahaan, sehingga perkara dimenangkan oleh Perusahaan.

PT Resource Alam Indonesia telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini Perusahaan sebagai Termohon Peninjauan Kembali I.

Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 392 PK/PDT/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Resources Alam Indonesia.

- e) Perkara dengan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No.100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No.88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan telah menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

49. LAWSUIT (continued)

Appeal Decision of South Sumatera High Court No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg has reinforced the Palembang Public Court in Decision No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. The Company has filed a cassation to the Supreme Court registered on February 27, 2018.

Supreme Court on the Cassasion Decision No. 2725K/PDT/2018 has granted the cassation request from the Company, therefore the decision has favored the Company.

PT Resource Alam Indonesia registered the Judicial Review on August 12, 2019 at the Registrar of the Palembang Public Court in this case the Company as the Respondent for Judicial Review I.

The Company has obtained copy of the appeal No. 392 PK/PDT/2020 Supreme Court on June 17, 2020 that stated the judicial review from PT Resources Alam Indonesia has been declined.

- e) *Case with No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No.88/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapped with HGB certificate No.100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.*

The Palembang Public Court in Decision No.151/Pdt.G /2017/PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No.88/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.88/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force.

The Company has filed an appeal to the South Sumatera High Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No.80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi Nomor 2225 K/Pdt/2019 dalam amar putusan telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Perusahaan).

Perusahaan mengajukan Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019.

Perusahaan saat ini sedang dalam proses menunggu putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- f) Perkara perdata No.27/Pdt.G/2019/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan selaku Tergugat I yang dikuasakan Direksi kepada Sugih Ardhian Pramono & Partners, atas sengketa tanah HPL No 2/91 Cabang Pelabuhan Banten oleh para Penggugat ahli waris Alm. H.Somad di Tindak Banding.

Salinan Putusan Banding No. 25/PDT/2020/PT BTN menyatakan bahwa permohonan banding dari para penggugat ahli waris Alm. H. Somad ditolak sehingga Perusahaan dimenangkan.

Pihak lawan mengajukan upaya Kasasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Juni 2020.

Berdasarkan informasi dari Website resmi Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 3672K/PDT/2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (ahli waris Alm. H. Somad).

Perusahaan saat ini sedang menunggu salinan resmi putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- g) Perkara perdata No.6/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan selaku Tergugat II atas gugatan lahan di Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel Para Penggugat yaitu Sdr. Ali Rahman Bin (Alm) Madraf.

49. LAWSUIT (continued)

Palembang High Court on the appeal decision No.90/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang Public Court No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Supreme Court in the decision at cassation level no 255K/Pdt/2019 has rejected the application for cassation from the cassation applicant (the Company).

The Company filed an extraordinary legal action review of the decision of the Supreme Court of Cassation No. 255K/Pdt/2019.

The Company is currently in the process of awaiting a judicial review decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

- f) *The civil lawsuit no. No.27/Pdt.G/2019/PN.Srg in Serang State Court, Banten. The Company as the Defendant I, which represented by Sugih Ardhian Pramono & Partners, on the Land Dispute of Land Usage Permit No. 2/91 Banten Port Branch, is appealed by the Plaintiff which is the heir of the late H. Somad.*

The Copy of the Appeal No.25/PDT/2020/PT BTN stated that the appeal of the heir of late H.Somad has been rejected, therefore the decision has favored the Company.

The Plaintiff have proposed for the Cassation as written under the Cassation Statement Circular from Serang Public Court on June 9, 2020.

Based on information from Supreme Court website, Cassation Decision No. 3672K/PDT/2020 dated December 4, 2020, with verdict rejecting the cassation request that has been proposed by the cassation petitioners (the heir of late H. Somad).

The Company is currently awaiting an official copy of the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

- g) *The civil lawsuit No.6/Pdt.G/2020/PN.Srg in Serang Public Court, Banten. The Company as the Defendant II on the land dispute in Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel, with Ali Rahman Bin (Alm.) Madraf as the Plaintiff.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Telah diterima Salinan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 15 Oktober 2020 yang pada intinya Gugatan dari Penggugat (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Banding sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas (Inzage) tanggal 11 November 2020.

Kantor Advokat Akmalisyah & Co. selaku Kuasa dari Perusahaan telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2020. Perusahaan sedang menunggu putusan banding dari pengadilan tinggi Banten.

- h) Perkara di Pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

Perusahaan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA tahun 2019.

Berdasarkan informasi dari Website Resmi Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 4223 B/PK/PJK/2020 dengan amar putusan Kabul PK, Batal Putusan Pengadilan Pajak, adili kembali, Kabul Banding. (Perusahaan dimenangkan). Perusahaan sedang menunggu salinan putusan peninjauan kembali dari mahkamah agung Republik Indonesia

- i) Gugatan dari Budi Nugroho selaku Direktur Utama PT Intijasa Niaga kepada Perusahaan terkait dengan Perbuatan melawan Hukum pada pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pengerukan di alur dan kolam pelabuhan Cirebon tahun 2014 dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2020/PN-Cbn.

Dalam tahap Persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cirebon.

49. LAWSUIT (continued)

The Company has received a Copy of the Decision of the Serang Public Court No 6/Pdt.G/2020/PN Srd on October 15, 2020 which in essence the lawsuit from the plaintiff (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) is rejected (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Plaintiff has filed an Appeal as the Minutes of Notification of File Examination (*Inzage*) on November 11, 2020.

Akmalisyah & Co. Advocate as the Power of Attorney of the Company has submitted a counter-memory appeal on November 24, 2020. The Company is awaiting an appeal decision from the Banten high court.

- h) Case at the Jakarta Tax Court in the case of Appeal of the Decree of the Director-General of Taxation No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 concerning Taxpayer Objections to The Provision of Underpaid Income Tax.

The Company filed an extraordinary legal action review to the Supreme Court on the Decision of the Tax Court No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA in 2019.

Based on information from the Official Website of the Supreme Court of The Republic of Indonesia, The Decision of Review No. 4223 B/PK/PJK/2020 with the warning of receive PK verdict, Cancel the Decision of the Tax Court, re-fair, Kabul Appeal (the Company won). The company is awaiting a copy of the judicial review decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia

- i) Lawsuit from Budi Nugroho as President Director of PT Intijasa Niaga to the Company related to Acts against the Law on the implementation of dredging work agreement in the flow and pool of Cirebon port in 2014 with Case Number 32/Pdt.G/2020/PN-Cbn.

In the first phase of the Trial at the Cirebon Public Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- j) Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negera pada Kejaksaan Tinggi Jambi selaku kuasa dari Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT Budigraha Perkasa Utama pada bulan November 2020 terkait dengan kelebihan nilai pembayaran atas pekerjaan perbaikan berat Dermaga TPK Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Dalam tahap Persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan. Mega Satria menggantikan Yon Irawan sebagai Direktur Keuangan Perusahaan.

51. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga dan permintaan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya secara signifikan operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi lainnya di luar kendali Kelompok Usaha. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Kelompok Usaha. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

49. LAWSUIT (continued)

- j) Civil Lawsuit by the State Attorney General at the Jambi High Prosecutor's Office as the power of the Jambi Pelabuhan Branch to PT Budigraha Perkasa Utama in November 2020 with an overpayment value for the work of heavy repairs TPK Port Talang Duku Jambi.

In the first phase of the Trial at the Muara Bungo Public Court, Jambi.

50. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company. Mega Satria replaces Yon Irawan as the Company's Finance Director.

51. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of this consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices and demand. This condition has affected the significant decreased in the Group's operation and financial condition. Future developments may change due to market changes or other situations outside the control of the Group. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regard with this matter in the future.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

52. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2020

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	9.719.063.306	734.546.738	10.453.610.044	-	10.453.610.044	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.720.465.791	23.169.899	2.743.635.690	(2.743.635.690)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	12.439.529.097	757.716.637	13.197.245.734	(2.743.635.690)	10.453.610.044	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.003.695.740)	(904.880.932)	(10.908.576.672)	2.636.593.537	(8.271.983.135)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	(79.945.918)	109.411.712	29.465.794	(115.017.417)	(85.551.623)	Other operating income - net
Laba usaha					2.096.075.286	Operating income
Pendapatan keuangan	506.494.663	2.020.982	508.515.645	-	508.515.645	Finance income
Beban keuangan	(1.817.018.054)	(15.158.877)	(1.832.176.931)	709.335.172	(1.122.841.759)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	(206.375.490)	-	(206.375.490)	108.837.904	(97.537.586)	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					1.384.211.586	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(396.052.830)	(1.491.875)	(397.544.705)	-	(397.544.705)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					986.666.881	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(114.011.141)	(2.179.489)	(116.190.630)	-	(116.190.630)	Current
Tangguhan	274.682.646	11.628.391	286.311.037	-	286.311.037	Deferred
Laba tahun berjalan					1.156.787.287	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	71.832.532.046	670.524.990	72.503.057.035	(20.818.405.993)	51.684.651.042	Segment assets
Liabilitas segmen	52.598.533.881	466.467.708	53.065.001.589	(18.467.315.430)	34.597.686.160	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(868.847.692)	(73.287.160)	(942.134.852)	-	(942.134.851)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha
Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business
segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.054.866.623	1.086.885.602	11.141.752.225	-	11.141.752.225	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.627.525.315	27.156.463	3.654.681.778	(3.654.681.778)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.682.391.938	1.114.042.065	14.796.434.004	(3.654.681.779)	11.141.752.225	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.862.669.461)	(1.164.951.377)	(12.027.620.837)	3.507.263.164	(8.520.357.673)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	720.320.596	51.672.366	771.992.962	(54.878.448)	717.114.514	Other operating income - net
Laba usaha					3.338.509.066	Operating income
Pendapatan keuangan	832.477.623	3.782.489	836.260.112	-	836.260.112	Finance income
Beban keuangan	(1.196.139.389)	(17.046.345)	(1.213.185.734)	12.948.645	(1.200.237.089)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	979.956.870	-	979.956.870	(739.388.528)	240.568.342	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.215.100.432	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(505.944.961)	(3.747.530)	(509.692.491)	-	(509.692.491)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.705.407.941	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(240.416.714)	(19.500.340)	(259.917.054)	-	(259.917.054)	Current
Tangguhan	39.603.470	18.715.991	58.319.461	-	58.319.461	Deferred
Laba tahun berjalan					2.503.810.348	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	58.538.271.418	1.351.814.560	59.890.085.978	(7.849.486.244)	52.040.599.734	Segment assets
Liabilitas segmen	37.864.505.082	933.846.256	38.798.351.338	(4.883.962.382)	33.914.388.956	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(803.880.502)	(59.825.118)	(863.705.620)	-	(863.705.620)	Segment depreciation and amortization

Informasi yang menyangkut segmen geografis
Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's geographical
segment is as follows:

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2020	2019	
Pendapatan Operasi			Operating Revenues
Tanjung Priok	7.475.226.473	8.426.347.509	Tanjung Priok
Palembang	578.163.840	442.335.533	Palembang
Panjang	541.783.612	431.012.354	Panjang
Banten	518.365.107	505.505.646	Banten
Teluk Bayur	373.569.609	353.339.199	Teluk Bayur
Pontianak	372.851.404	366.080.664	Pontianak
Bengkulu	203.005.162	179.902.032	Bengkulu
Cirebon	146.052.388	207.846.157	Cirebon
Jambi	92.001.326	107.477.694	Jambi
Pangkal Balam	88.434.649	46.383.534	Pangkal Balam
Sunda Kelapa	51.365.447	56.554.487	Sunda Kelapa
Tanjung Pandan	12.791.027	18.967.416	Tanjung Pandan
Total	10.453.610.044	11.141.752.225	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's geographical segment is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Aset tidak lancar			Non-current asset
Tanjung Priok	27.434.100.460	26.267.990.456	Tanjung Priok
Banten	1.244.080.739	1.175.481.901	Banten
Panjang	986.051.426	798.291.930	Panjang
Teluk Bayur	746.947.403	660.756.402	Teluk Bayur
Pontianak	464.279.288	454.415.947	Pontianak
Bengkulu	457.030.711	456.746.282	Bengkulu
Palembang	385.611.702	387.199.459	Palembang
Jambi	282.318.650	278.532.863	Jambi
Cirebon	241.574.439	233.309.650	Cirebon
Pangkal Balam	124.881.139	122.095.269	Pangkal Balam
Sunda Kelapa	107.321.556	103.639.466	Sunda Kelapa
Tanjung Pandan	46.965.687	40.377.652	Tanjung Pandan
Total	32.521.163.200	30.978.837.277	Total

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi non-kas terdiri dari:

53. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Non-cash transaction consists of:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	227.049.843	-	Addition of right-of-use assets through lease liabilities
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	265.719.705	186.064.557	Capitalization of borrowing costs

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	(2.000.000)	-	(28.193.914)	4.000.000	Short-term bank loans
Utang bank	114.990.000	-	-	(114.990.000)	-	Bank loans
Utang obligasi	21.984.178.193	-	349.524.870	-	22.333.703.063	Bonds payable
Dividen	(832.742.000)	(708.218.661)	-	832.742.000	(708.218.661)	Dividend
Total	21.300.620.107	(710.218.661)	349.524.870	689.558.086	21.629.484.402	Total

OPERATIONAL AND COMMERCIAL EXCELLENCE FOR BUSINESS STABILIZATION

Keunggulan Operasi dan Komersial Demi Stabilisasi Bisnis

LAPORAN TAHUNAN **2020** ANNUAL REPORT

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, 14310

P : +62-21 4367505, +62-21 4301080
E : corp_sec@indonesiaport.co.id

www.indonesiaport.co.id